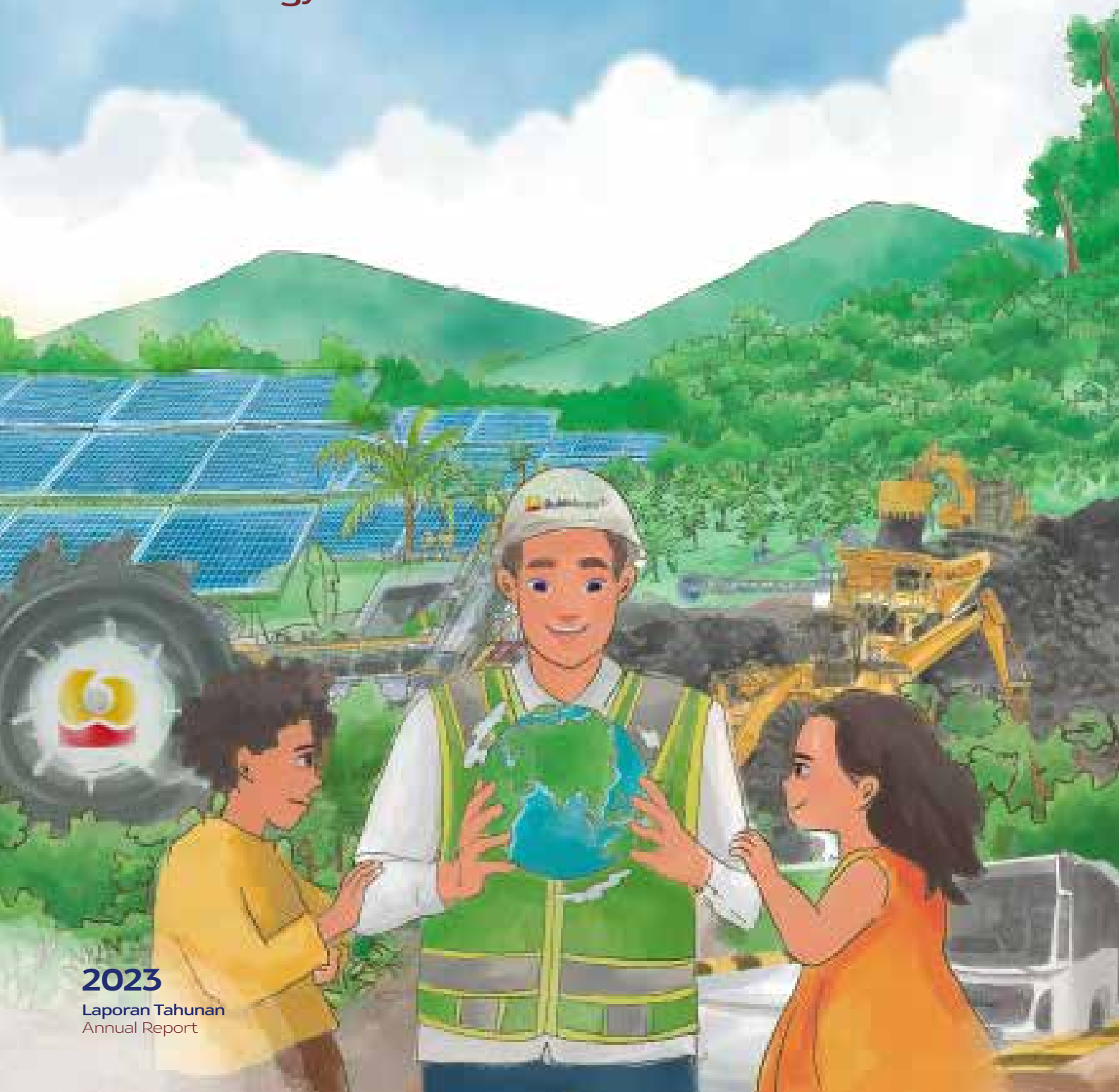
BUMN UNTUK INDONESIA

BukitAsam

Energi Bersih untuk Masa Depan yang Tangguh

Clean Energy for a Resilient Future



2023

Laporan Tahunan
Annual Report

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan

Preparation Method and About the Annual Report

Laporan Tahunan 2023 PT Bukit Asam Tbk disusun berdasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam rangka menerapkan praktik terbaik prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), penyampaian laporan ini juga mengacu pada pedoman praktik tata kelola yang berlaku di lingkup nasional, yaitu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2021.

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi: Ikhtisar Kinerja, Laporan Manajemen, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp", atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penyebutan kata "PTBA" dan "Perusahaan" didefinisikan sebagai PT Bukit Asam Tbk yang menjalankan bisnis tambang batu bara dan lainnya.

Laporan Tahunan disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di portal resmi PT Bukit Asam Tbk https://www.ptba.co.id/.

PT Bukit Asam Tbk 2023 Annual Report was issued based on the Company's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Public Companies; and Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the form and content of the Annual Report of Public Companies.

In order to apply the best practices of Good Corporate Governance (GCG) principles, the submission of this report also refers to governance practice guidelines that apply at the national scope, namely the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) issued by the Committee National Governance Policy (KNKG) in 2021.

This Annual Report consists of several chapters, including: Performance Highlights, Management Report, Company Profile, Management Discussion and Analysis, Corporate Governance, as well as Social and Environmental Responsibility.

The mention of currency unit "Rupiah", "Rp", or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Mention of the word "PTBA" and "Company" is defined as PT Bukit Asam Tbk, which engaged in coal mining business and other businesses.

This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using an easy-to-read font type and size with good-quality printing. This Annual Report can be accessed and downloaded on the official website of PT Bukit Asam Tbk https://www.ptba.co.id/.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

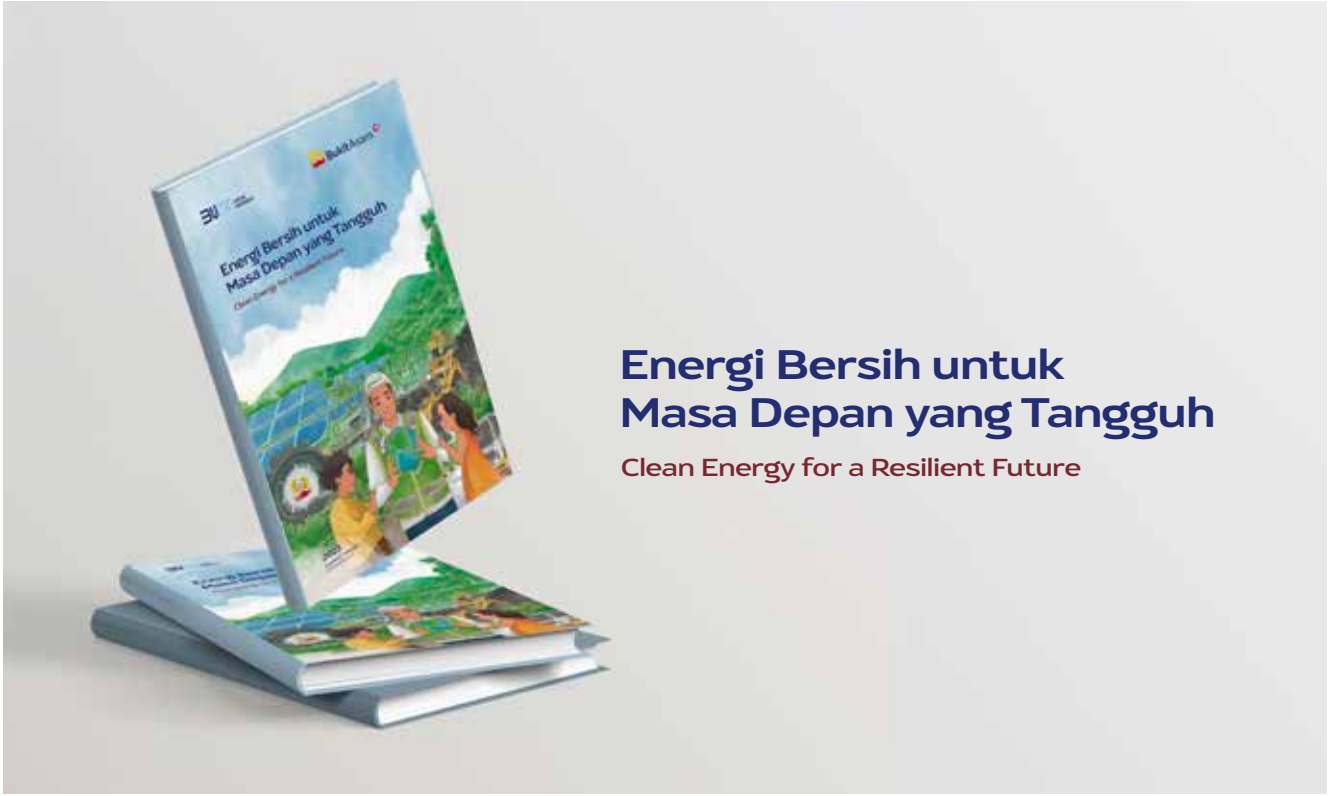
Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan berdasarkan asumsi yang dibuat oleh manajemen PTBA, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PTBA serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan bahwa kinerja di masa yang akan datang akan persis sama, karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perusahaan.

This Annual Report contains of financial statements, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company. These are considered forward-looking statements based on assumptions made by PTBA management, excluding historical matters. These statements involve prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments in materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are based on assumptions about the current and future conditions of PTBA and the business environment in which the Company operates. These statements do not guarantee that future performance will mirror the projections, as they may be impacted by factors beyond the Company's control.

Penjelasan Tema
Theme Explanation



PTBA terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja agar dapat meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan dengan fokus pada program efisiensi biaya dan ekspansi ke sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, Perusahaan menghadapi sejumlah tantangan yang akan berimbas kepada kinerja perusahaan, salah satunya adalah sentimen potensi resesi global akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Bagi Perusahaan, pengembangan bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan. PTBA juga menargetkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan menjadi perusahaan berbasis bisnis energi pada tahun 2030, dengan target pendapatan dari sektor energi sebesar 30%. Untuk itu, Perusahaan telah menjalin kerja sama dengan mitra strategis untuk meningkatkan daya saing dan menurunkan risiko investasi.

Selain itu, Perusahaan juga fokus untuk menurunkan emisi dan menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan. Bukan hanya reklamasi lahan, Perusahaan telah menjalankan sejumlah program dekarbonisasi. Dari sisi operasional, Perusahaan menerapkan *Eco Mechanized Mining,* yakni mengganti peralatan pertambangan yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi elektrik, serta menerapkan *E-Mining Reporting System*, yaitu sistem pelaporan produksi secara *real-time* dan daring, sehingga mampu meminimalkan pemantauan konvensional yang menggunakan bahan bakar.

PTBA continues to optimize its performance in achieving sustainable business growth. The Company always improves its operational and financial performance by focusing on cost efficiency programs and expansion into the New Renewable Energy sector. However, the Company also faces some challenges that will impact the company's performance, one of which is the sentiment of a potential global recession due to slowing economic growth.

For the Company, developing New Renewable Energy (EBT) businesses like Solar Panel Power Plants (SPPP) and Wind Power Plants is a key part of its long-term strategy to achieve its vision and mission. PTBA aims to achieve sustainable business growth and transition into an energy-based company by 2030, with a revenue target of 30% from the energy sector. To achieve this goal, the company has formed strategic partnerships to enhance competitiveness and mitigate investment risks.

In addition, the Company also prioritizes reducing emissions and implementing sustainable mining practices. The Company has implemented various decarbonization programs, including Eco Mechanized Mining, which involves replacing fossil fuel-powered mining equipment with electric alternatives. alternative, and implementing the E-Mining Reporting System, namely a real-time and online production reporting system, to reduce the reliance on conventional monitoring methods that uses fuel.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2022



Memaksimalkan Inovasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Maximizing Innovation for National Energy Security

Sebagai anak perusahaan BUMN, PTBA berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pasokan batu bara PTBA mayoritas ditujukan kepada pasar domestik, khususnya kepada pembangkit listrik, guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Tidak hanya di sektor batu bara saja, sejalan dengan transformasi bisnis PTBA, Perusahaan juga membidik kesempatan bisnis baru, yakni memasuki bisnis energi baru dan terbarukan. Sampai dengan saat ini, PTBA telah berhasil mengembangkan 2 (dua) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Masuknya PTBA ke bisnis energi baru dan terbarukan juga menandakan peran penting PTBA dalam mendukung ketahanan energi nasional.

As a subsidiary of SOE, PTBA plays an important role in supporting national energy security. The majority of PTBA's coal supply is intended for domestic market, particularly for power plants to meet national energy needs. Not only in the coal sector, in line with PTBA's business transformation, the Company is also targeting new business opportunities by entering the new and renewable energy business. To date, PTBA has succeeded in developing 2 (two) Solar Panel Power Plant (SPPP). Bukit Asam's entry into the new and renewable energy business also signifies Bukit Asam's important role in supporting national energy security.

2021



Ketahanan dan Keberlanjutan
Resilience and Sustainability

Di tengah kondisi yang sangat menantang sebagai imbas dari pandemi COVID-19, Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik. Konsistensi dalam mengembangkan *operations excellence* menjadi faktor yang sangat penting dalam mengantarkan Perusahaan mewujudkan pencapaian tersebut. Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, serta inovasi dan efisiensi terus dilakukan. Sejalan dengan itu, Perusahaan juga terus melanjutkan proyek-proyek hilirisasi batu bara yang akan menjadi masa depan Perusahaan.

Amidst a truly challenging condition as an impact of COVID-19 pandemic the Company managed to post good performance growth. Consistency in developing operations excellence became a crucial factor in helping the Company accomplish such a feat. Efforts to optimize existing resources to meet market requirements and innovation as well as effciency are continuosly implemented. In line with it, the Company also continues on with coal downstreaming projects that should be the future of the Company.

2020



Mengoptimalkan Produktivitas untuk Memperkuat Daya Saing
Improve Productivity to Reinforcing Competitiveness

Di tengah kondisi yang sulit akibat pandemi, Perusahaan terus berupaya untuk mempertahankan kinerja yang positif. Perusahaan terus melakukan terobosan untuk mengoptimalkan semua potensi dan meningkatkan produktivitas, salah satunya melalui gasifikasi batu bara. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan *operations excellence*, meningkatkan budaya inovasi, dan meningkatkan efisiensi untuk terus meningkatkan daya saing agar dapat mempertahankan kinerja yang positif.

Amid difficult conditions due to the pandemic, the Company strives to maintain a positive performance. the Company continues to make breakthroughs to optimize all potentials and increase productivity, one of which is coal gasification. In addition, the Company also implements operations excellence, enhances a culture of innovation, and improves effciency to improve competitiveness to maintain a positive performance continuously.

Daftar Isi
Table of Content

2 Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan
Preparation Method and About the Annual Report

3 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

4 Penjelasan Tema
Theme Explanation

5 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

6 Daftar Isi
Table of Content

8 Ekosistem Bisnis PTBA
PTBA Business Ecosystem

10 Pencapaian Terbaik
Best Achievements

16 Jejak Langkah
Milestones

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

20 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

26 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

28 Ikhtisar Saham
Share Highlights

30 Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham
Information on Suspension and/or Delisting

30 Aksi Korporasi
Corporate Action

31 Dividen Saham
Share Dividends

32 Informasi tentang Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi
Information on Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds

32 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Information on Other Funding

34 Peristiwa Penting
Significant Events

Laporan Manajemen
Management Report

40 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

52 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors

64 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bukit Asam Tbk
Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for 2023 Annual Report of PT Bukit Asam Tbk

Profil Perusahaan
Company Profile

68 Identitas dan Informasi Umum Perusahaan
Company Identity and General Information

70 Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History

73 Logo dan Moto Perusahaan
Company's Logo and Motto

74 Visi dan Misi Perusahaan
Company Vision and Mission

75 Hierarki Tata Nilai Bukit Asam
Bukit Asam Hierarchy of Values

79 Bidang Usaha
Line of Business

86 Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operational Area

89 Keanggotaan dalam Asosiasi
Membership in Associations

90 Struktur Organisasi di Bawah Direksi
Organizational Structure Under the Board of Directors

92 Struktur Organisasi di Bawah Dewan Komisaris
Organizational Structure Under the Board of Commissioners

94 Direksi PT Bukit Asam Tbk
Board of Directors

96 Profil Direksi
Board of Directors Profile

102 Komisaris PT Bukit Asam Tbk
Board of Commissioners

104 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

112 Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku Berakhir
Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners after the Fiscal Year Ended

113 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Management Profile

115 Sumber Daya Manusia
Human Capital

134 Demografi Karyawan
Employees Demographic

140 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition

146 Informasi Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Pemilik Akhir
Information on Major/Controlling Shareholders to Ultimate-End Owner

149 Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama
List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

152 Struktur Grup
Group Structure

154 Alamat Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan, Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama, dan Entitas Asosiasi
Addresses of Head Office, Branches, Representatives, Subsidiaries, Joint Ventures, and Associated

158 Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/or Listing

160 Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing

160 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accounting and Public Accounting Firm

161 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

166 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website

170 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Pejabat Eksekutif
Education and/or Training of Board of Commisioners, Board of Directions, Commitees, Corporate Secretary, and Executive

179 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

188 Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic and Industrial Overview

194 Kebijakan Strategis Perusahaan
Corporate Strategic Policy

198 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

201 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment

208 Tinjauan Keuangan
Financial Review

225 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Rate

229 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

231 Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

232 Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

233 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Subsequent to The Date of The Accountant's Report

234 Perbandingan Antara Target dan Realisasi serta Proyeksi untuk Satu Tahun ke Depan
Comparison Between Targets and Realizationand Projection for The Next One Year

237 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Payout

239 Kontribusi Kepada Pemerintah (Pajak dan Royalti)
Contributions to Government (Tax and Royalty)

240 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

240 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of The Use of Proceeds From Public Offering

241 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

242 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

247 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan
Changes in Laws and Regulations with Significant Impact on the Company

250 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policy and Impact on the Company

250 Tingkat Kesehatan Perusahaan (*Corporate Rating*)
Company wellness Level (Corporate Rating)

251 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

253 Prospek Usaha dan Strategi ke Depan
Business Prospects and Future Strategies

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

260 Ikhtisar Pencapaian Penerapan Tata Kelola Tahun 2023
Achievement on Corporate Governance Highlights in 2023

262 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment Implementation of Good Corporate Governance

268 Struktur Tata Kelola
Governance Structure

271 Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Secara Berkelanjutan
Sustainable Improvement of The Quality of GCG Implementation

276 Monitoring Penerapan GCG
GCG Implementation Monitoring

293 Peningkatan Kualitas Implementasi GCG
Improving the Quality of GCG Implementation

294 Roadmap GCG PTBA
PTBA Roadmap GCG

297 Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders and General Meeting of Shareholders

316 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

351 Direksi
The Board of Directors

382 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Performance Appraisal of the Board of Commissioners and The Board of Directors

390 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Commissioners

397 Hubungan Afiliasi antara Direksi dan Dewan Komisaris
Affiliations among Board of Directors and Board of Commissioners

398 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity

401 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of Board of Commissioners

407 Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committee Under the Board of Commissioners

445 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

458 Satuan Pengawasan Internal
Internal Supervision Unit

471 Satuan Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Unit

478 Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan & GCG
Corporate Management System & GCG Work Unit

485 Akuntan Publik
Public Accountant

488 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

492 Manajemen Risiko
Risk Management

506 Teknologi Informasi
Information Technology

516 Perkara Hukum
Lawsuit

522 Kebijakan Pengungkapan Informasi
Information Disclosure Policy

523 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access Company Information and Data

525 Kode Etik
Code of Conducts

529 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

536 Kebijakan Insider Trading
Insider Trading Policy

537 Kebijakan Antikorupsi
Anti-Corruption Policy

539 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

540 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

544 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Officials Wealth Report

546 Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

547 Penyediaan Dana untuk Kegiatan Politik
Provision of Funds for Political Activities

547 Pemenuhan Hak Terhadap Kreditor
Fulfillment of Rights Against Creditors

548 Transparansi Praktik Bad Governance
Transparency of Bad Governance Practices

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

552 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainable Performance Highlights

558 Informasi Lebih Lanjut
Further Information

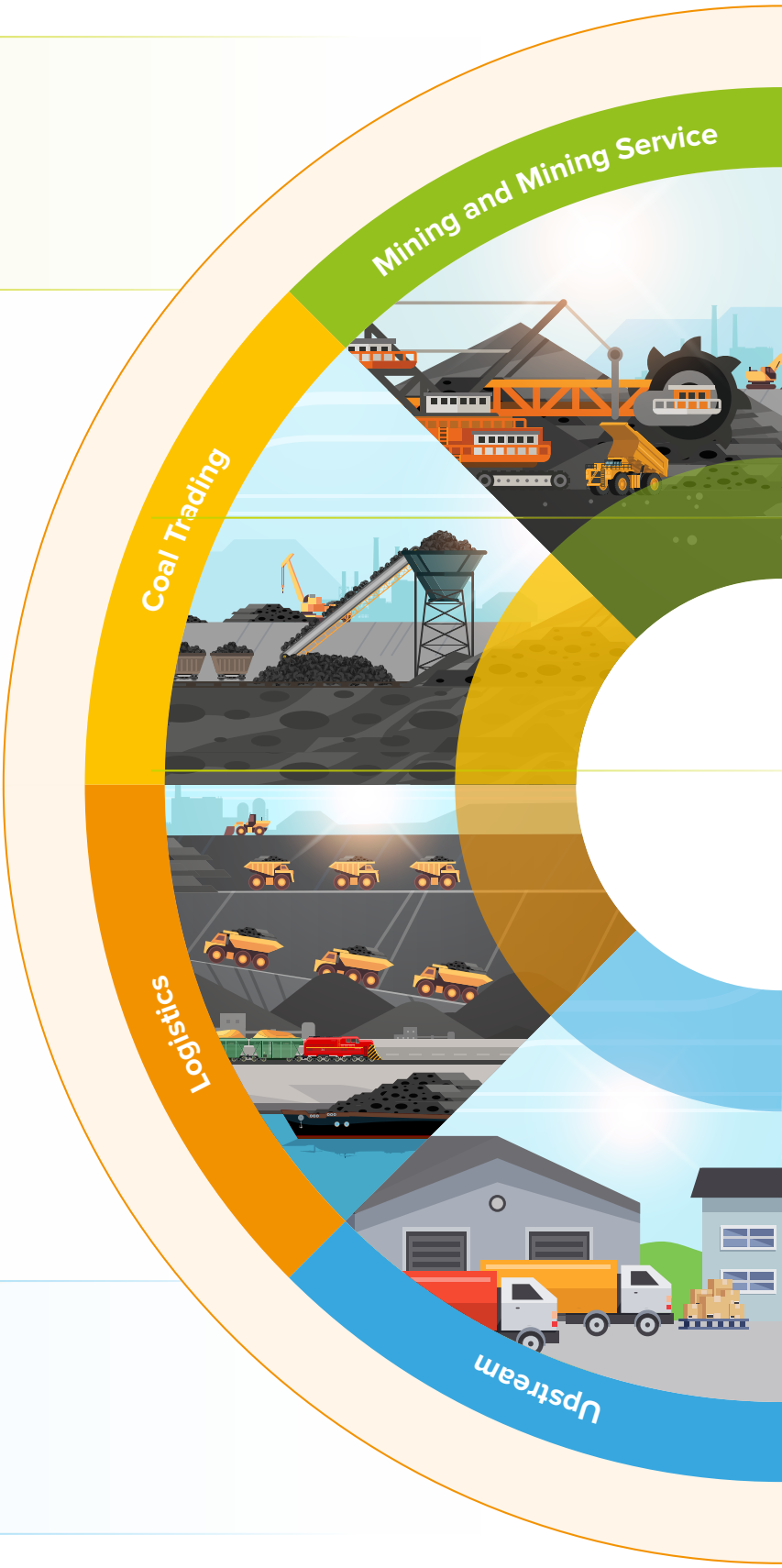
Lampiran
Attachment

703 Indeks Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)
General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) Index

728 Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021
POJK NO. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference

Ekosistem Bisnis PTBA

PTBA Business Ecosystem





BSP
BA Medika
Sinergi
Sinergi Mitra Lestari Indonesia
PT. Bukit Multi Properti

Bukit Energi Investama

BukitAsamMetanaOmbilin
enim
PT. BUKIT ASAM METHANA ENIM

bpi
BukitAsam
BEST

Pencapaian Terbaik
Best Achievements

Kinerja Operasional | Operational Performance

Produksi dan Pembelian Batu Bara
Coal Production and Purchases

41,94 Juta ton / Million Tons

Penjualan Batu Bara
Coal Sales

36,97 Juta ton / Million Tons

Angkutan Batu Bara
Coal Transport

32,42 Juta ton / Million Tons

Nisbah Kupas
Stripping Ratio

6,24 Kali / Times



Kinerja Keuangan | Financial Performance

Pendapatan
Revenue

Rp38,49 Triliun / Trillion

Laba Bersih*
Net Profit*

Rp6,11 Triliun / Trillion

Total Aset
Total Assets

Rp38,77 Triliun / Trillion

Total Ekuitas
Total Equity

Rp21,56 Triliun / Trillion

Catatan | Note:
*Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the period attributable to Owners of the parent entity

Business Development



PLTU Sumsel-8

PLTU Sumsel-8 sebagai PLTU Mulut Tambang terbesar di Asia Tenggara yang dimiliki oleh *joint venture company* (PT Huadian Bukit Asam Power) berhasil *commercial operation date* pada 7 Oktober 2023.
Sumsel-8 CFPP, the largest Mine Mouth CFPP in Southeast Asia, is owned by a joint venture company (PT Huadian Bukit Asam Power) and had a successful commercial operation date on October 7, 2023.

Tata Kelola Perusahaan | Good Corporate Governance



Annual Report Award

Juara II Annual Report Award atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 pada Kategori Go Publik Non-Keuangan.
Second place in the Annual Report Award for the Annual Report Fiscal Year 2022 in the Non-Financial Go Public Category.



Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Meraih predikat The Most Trusted Company dengan nilai 90,03 yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) - Majalah SWA.
Received the title of The Most Trusted Company with a score of 90.03, as organized by The Institute for Corporate Governance (IICG) by SWA Magazine.



Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)

ISO 37001:2016 Certification (Anti-Bribery Management System)

Berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) sebagai komitmen utama atas antikorupsi dan anti penyuapan.
Successfully maintained ISO 37001:2016 certification (Anti-Bribery Management System) as the main commitment to anti-corruption and anti-bribery.

Teknologi Informasi | Information Technology



Menerima tiga penghargaan bergengsi pada ajang Top Digital Award Tahun 2023

Received three prestigious awards at The 2023 Top Digital Award event

Penghargaan tersebut adalah Top Digital Implementation-Level 5 Star, Top Leader on Digital Implementation, dan Gold Star-Trophy. Top Digital Implementation-Level 5 Star telah dimenangkan 3 kali berturut-turut.

These awards were Top Digital Implementation-Level 5 Star, Top Leader on Digital Implementation, and Gold Star-Trophy. Top Digital Implementation-Level 5 Star has been won three times in a row.

Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA)

- Executive Support
- Human Capital
- Supply Chain
- Finance & Accounting
- Corporate Services

PTBA terus berkomitmen untuk melakukan digitalisasi di segala aspek lini bisnis untuk mendukung proses bisnis perusahaan secara komprehensif atas 5 (lima) modul utama.

PTBA remains committed to digitizing all of its business lines to comprehensively support the company's business processes on 5 (five) main modules.

Sumber Daya Manusia | Human Capital

Tema Strategis Transformasi Budaya 2024-2028
Cultural Transformation Strategic Theme 2024-2028

- Akuntabel
  Accountable
- Keberlanjutan
  Sustainability
- Sinergi
  Synergy
- Inovasi
  Innovation

Penguatan budaya perusahaan melalui "AKSI" sebagai pengejawantahan dari *core value* BUMN "AKHLAK" dan *Key Behaviour* MIND ID.
Strengthening corporate culture through "AKSI" which is the embodiment of SOEs' core value "AKHLAK" and MIND ID's Key Behavior.

Peningkatan Jumlah Pegawai Perempuan
Increase in the Number of Female Employees



298 orang people

2% dari tahun 2022
2% from 2022

Peningkatan jumlah pegawai perempuan menunjukan komitmen PTBA dalam keberagaman *gender* di perusahaan.
The increase in the number of female employees demonstrates PTBA's commitment to gender diversity within the company.

Keberlanjutan | Sustainability



Anugerah Lingkugan PROPER
PROPER Environmental Award

Memperoleh 2 (dua) PROPER Emas untuk unit Pertambangan Tanjung Enim dan Pelabuhan Tarahan. Selain itu, PTBA juga mendapatkan 1 (satu) PROPER Hijau untuk Dermaga Kertapati. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja lingkungan perusahaan.
Achieved 2 (two) Gold PROPER awards for the Tanjung Enim Mining unit and Tarahan Port. In addition, PTBA also received 1 (one) Green PROPER award for Kertapati Barging Port. These awards were given by the Ministry of Environment and Forestry in recognition of the company's environmental performance.



Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT)

Meraih predikat Platinum sebagai predikat tertinggi atas *rating* Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022. Penghargaan ini diberikan oleh National Center for Corporate Rating (NCSR).
Received the Platinum predicate as the highest rating for the 2022 Financial Year Sustainability Report, from the National Center for Corporate Rating (NCSR).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) | Social and Environmental Responsibility

Penyaluran Bantuan TJSL
Distribution of CSR Assistance

Rp66,94
Miliar | **Billion**

Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK)
Micro & Small Business Unit Funding

Rp31,56
Miliar | **Billion**

Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Occupational Health and Safety

ZERO FATALITIES

PTBA mencatat *zero fatalities* di tahun 2023 atau 100% dari target di tahun 2023 atau turun dari tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan prioritas utama dari PTBA dengan penerapan *Golden Rules*.
PTBA recorded zero fatalities in 2023, meeting 100% of the target for the year and showing a decrease from 2022. This highlights that Occupational Health and Safety is PTBA's main priority, demonstrated through the implementation of the Golden Rules.



Jejak Langkah
Milestones

1876
Tambang batu bara di Ombilin, Sumatra Barat, mulai beroperasi.

The coal mining in Ombilin, West Sumatra, started operations.

1919
Pada zaman penjajahan Belanda, tambang terbuka di Air Laya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, mulai beroperasi.

In the Dutch colonial era, the open pit mine at Air Laya, Tanjung Enim, South Sumatra, started to operate.

1950
Menjadi Perusahaan Negara (PN) dengan nama PN Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

Becoming a State Enterprise (PN) under the name PN Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

1981
PN Tambang Batu Bara Bukit Asam berubah menjadi Perseroan dan namanya berganti menjadi PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) dan 2 Maret 1981 menjadi tanggal resmi berdirinya PTBA.

PN Tambang Batu Bara Bukit Asam changed to a Limited Liability Company and changed its name to PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero). March 2, 1981, marked the official date of PTBA's establishment.

1990
Perusahaan Batu Bara lainnya yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum Tambang Batu Bara bergabung dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero). Sejak saat itulah menjadi perusahaan batu bara satu-satunya yang dimiliki negara.

Other state-owned coal enterprises, namely Perusahaan Umum Tambang Batu Bara merged with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero). Since then, the merged companies became the only state-owned coal company.

2002
PTBA tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Jakarta dengan 25% sahamnya dimiliki publik. Harga saham pertama tercatat pada Rp575/lembar saham dengan kode saham PTBA.

PTBA is listed as a public company on the Jakarta Stock Exchange with 25% of its shares owned by the public. The first share price was recorded at Rp575/share with the stock code PTBA.

2011
Harga saham PTBA mencapai harga tertinggi Rp27.000 per lembar saham.

PTBA's share price reached the highest price of Rp27,000 per share.

2013
Perubahan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Changes in BPTBA's vision to become a world-class energy company that cares about the environment.

2015
Menteri ESDM Republik Indonesia, Sudirman Said meresmikan pengoperasian PLTU Banjarsari 2x110 MW nett serta melakukan *groundbreaking* PLTU Banko Tengah 2x620 MW di Tanjung Agung. PTBA meresmikan dermaga Batu Bara dan pelabuhan curah terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pelabuhan sebesar 25 juta ton dan kapasitas sandar 210.000 DWT yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Tarahan, Bandar Lampung. PTBA melakukan akuisisi atas empat perusahaan:
1. PT Satria Bahana Sarana
2. PT Tabalong Prima Resources
3. PT Mitra Hasrat Bersama
4. PT Bumi Sawindo Permai

The Indonesian Minister of Energy and Mineral Resources, Sudirman Said, inaugurated the operation of 2x110 MW Banjarsari power plant and conducted the groundbreaking of 2x620 MW Banko Tengah power plant in Tanjung Agung. PTBA also inaugurated the largest coal Barging Port and bulk port in Southeast Asia with a port capacity of 25 million tons and a berthing capacity of 210,000 DWT, carried out by the Minister of Transportation, Ignatius Jonan, in Tarahan, Bandar Lampung.
PTBA acquired four companies:
1. PT Satria Bahana Sarana
2. PT Tabalong Prima Resources
3. PT Mitra Hasrat Bersama
4. PT Bumi Sawindo Permai

2022

- Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jalan Tol Bali-Mandara sebagai wujud kolaborasi dan sinergi BUMN dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia.
- PTBA mencetak laba bersih sebesar Rp12,57 triliun, laba tertinggi yang pernah diraih Perusahaan.

- The inauguration of Solar Power Plant (SPPP) on Bali-Mandara Toll Road as a form of SOE collaboration and synergy in supporting Indonesia's G20 Presidency.
- PTBA recorded a net profit of Rp12.57 trillion, the highest profit ever achieved by the Company.

2023

- Proyek PLTU Sumsel-8 yang dijalankan oleh PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP") yang merupakan entitas *joint venture company* PTBA bersama China Huadian Hongkong Company Ltd berhasil beroperasi komersial pada 7 Oktober 2023.
- PT IPC entitas anak perusahaan PTBA melakukan pembatalan atas rencana akuisisi pada PT Tabalong Prima Recourses dan PT Mitra Hasrat Bersama.

- CFPP Mine Mouth Sumsel-8, operated by PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP"), a joint venture between PTBA and China Huadian Hongkong Company Ltd, successfully commenced commercial operations on October 7, 2023.
- PT IPC, a subsidiary of PTBA, canceled its planned acquisition of PT Tabalong Prima Recourses and PT Mitra Hasrat Bersama.

2021

PTBA berhasil mengalihkan sejumlah 303.148.100 lembar saham treasuri dan memperoleh dana sebesar Rp691,18 miliar (di luar biaya pengalihan).

PTBA managed to transfer a total of 303,148,100 treasury shares and obtained Rp691.18 billion in funds (excluding transfer fees).

2020

PTBA Terapkan Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016 dan menjadi BUMN pertama di sektornya yang menerapkan ISO 37001:2016.

PTBA applied ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management and became the first SOEs in its sector to apply ISO 37001:2016.

2019

2 April, 8 Mei, dan 4 Desember Perusahaan berhasil mengalihkan sejumlah 649.987.500 lembar saham treasuri dan mendapatkan dana sejumlah Rp2,15 triliun. Pada tanggal 29 Oktober, PTBA menerima Sertifikat Warisan Budaya Dunia *Ombilin Coal Mining Heritage of* Sawahlunto dari UNESCO.

On April 2, May 8, and December 4, the Company managed to transfer a total of 649,987,500 treasury shares and obtain Rp2.15 trillion in funds. On October 29, PTBA received the World Cultural Heritage Certificate for Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto from UNESCO.

2017

Melakukan aksi pemecahan *(stock split)* nilai saham dengan perbandingan 1:5. Perubahan status dari Persero menjadi Non-Persero, yaitu PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. Perubahan ini dilakukan seiring dengan bergabungnya Perusahaan ke dalam *Holding* BUMN Pertambangan yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Conducted a stock split with a stock value ratio of 1:5. Changes in the status of the Company from Persero to Non-Persero, thus changing its name from PT Tambang Batabara Bukit Asam (Persero) Tbk to PT Bukit Asam Tbk. This change was in line with the joining of PT Bukit Asam Tbk into the SOE Mining Holding, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

2018

PTBA melakukan *Financial Closed* dengan China Export Import Bank terkait dengan pinjaman untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

PTBA conducted a Financial Closed with the China Export Import Bank related to a loan for the construction of the Sumsel 8 Mine Mouth power plant.

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, PTBA berhasil mempertahankan kinerja yang positif. Sejalan dengan itu, PTBA juga terus memperkuat komitmen untuk menyediakan energi bersih.

Despite facing various challenges, PTBA has managed to maintain a positive performance. In line with this, PTBA also continues to strengthen its commitment to providing clean energy.



01



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

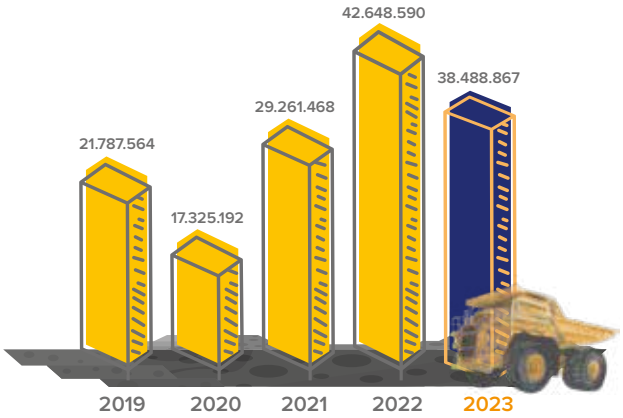
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian | In million Rupiah, except for basic and diluted earnings per share

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Revenue	**38.488.867**	**42.648.590**	**29.261.468**	**17.325.192**	**21.787.564**
Pendapatan Batu Bara Revenue from Coal Sales	37.972.033	42.099.316	28.873.738	17.072.791	21.391.760
Pendapatan dari Aktivitas Lainnya Revenue from other Activities	516.834	549.274	387.730	252.401	395.804
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(29.331.562)	(24.682.304)	(15.777.245)	(12.758.932)	(14.176.060)
Laba Bruto Gross Profit	**9.157.305**	**17.966.286**	**13.484.223**	**4.566.260**	**7.611.504**
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.936.635)	(2.390.336)	(2.579.462)	(1.439.913)	(1.934.503)
Beban Penjualan dan Pemasaran Selling and Marketing Expenses	(656.362)	(953.120)	(1.014.269)	(692.320)	(828.674)
Penghasilan Lainnya, Neto Other income, Nett	638.401	522.591	68.533	86.398	166.028
Laba Usaha Operating Profit	**7.202.709**	**15.145.421**	**9.959.025**	**2.520.425**	**5.014.355**
Penghasilan Keuangan Finance Income	584.339	428.033	256.856	362.503	389.022
Biaya Keuangan Finance Costs	(204.038)	(200.203)	(158.426)	(132.515)	(127.670)
Bagian atas Keuntungan Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures	571.303	829.063	301.220	481.272	179.455
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	8.154.313	16.202.314	10.358.675	3.231.685	5.455.162
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.861.792)	(3.422.887)	(2.321.787)	(823.758)	(1.414.768)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**6.292.521**	**12.779.427**	**8.036.888**	**2.407.927**	**4.040.394**
(Kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year	(808.804)	(13.061)	(460.949)	(158.397)	(197.056)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	5.483.717	12.766.366	7.575.939	2.249.530	3.843.338
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	6.105.856	12.567.582	7.909.113	2.386.819	4.056.888
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interests	186.665	211.845	127.775	21.108	(16.494)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	5.297.052	12.554.521	7.448.164	2.228.422	3.859.832
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling Interests	186.665	211.845	127.775	21.108	(16.494)
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) Earnings per Share - Basic and Diluted (Full Amount)	**532**	**1.094**	**702**	**213**	**371**

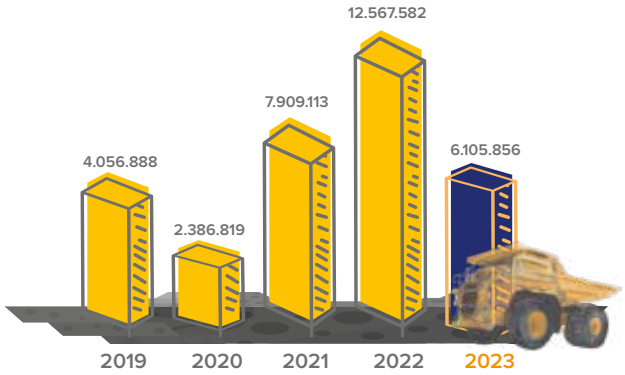
Pendapatan
Revenue

Dalam Rp Juta
In Million Rupiah



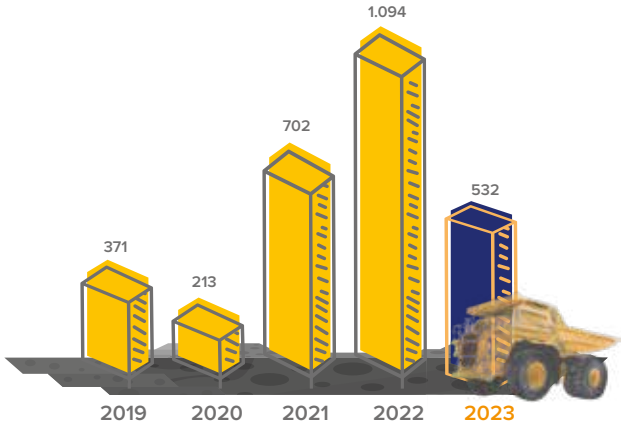
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

Dalam Rp Juta
In Million Rupiah



Laba per Saham Dasar dan Dilusian
Basic and Diluted Earnings per Share

Rp/Lembar
(Rupiah/Share)



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham | In million Rupiah, except par value and share data

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
ASET ASSETS					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	4.138.867	7.030.343	4.394.195	4.340.947	4.756.801
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	3.797.292	3.509.912	3.099.840	1.578.867	2.482.837
Aset keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	875.330	783.070	341.821	301.257	-

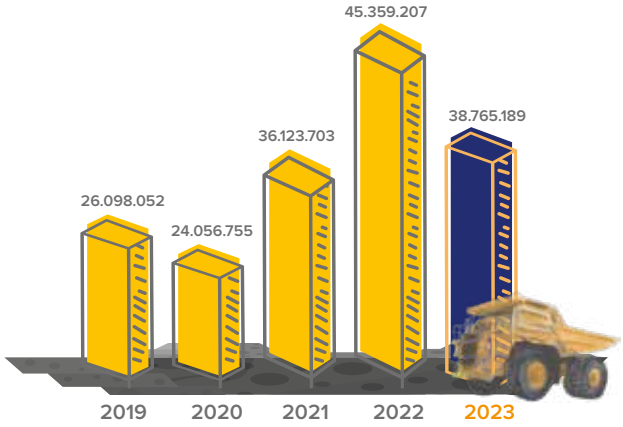
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position

Dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham | In million Rupiah, except par value and share data

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Persediaan Inventories	5.499.614	3.837.187	1.207.585	805.436	1.383.064
Deposito Berjangka Jatuh Tempo di atas 3 Bulan dan Kurang dari 1 Tahun Time Deposits with more than 3 months and less than 1 year	541.818	8.929.196	9.010.987	1.130.354	2.581.030
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	295.435	342.440	157.072	207.495	296.596
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**15.148.356**	**24.432.148**	**18.211.500**	**8.364.356**	**11.679.884**
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	188.271	232.678	413.836	406.750	240.865
Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi Other Receivables from Related Parties	18.683	29.407	15.500	109.264	53.989
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates	-	25.314	23.297	23.015	66.830
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	7.263.276	6.519.097	5.174.429	3.926.147	2.914.403
Properti Penambangan Mining Properties	3.271.657	2.873.707	2.099.454	1.830.667	1.900.998
Aset Tetap Fixed Assets	8.566.210	8.410.051	8.321.231	7.863.615	7.272.751
Tanaman Produktif Bearer Plants	72.820	52.679	48.070	59.501	142.039
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	2.554.351	1.496.343	675.200	600.670	842.928
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	1.208.683	917.323	768.833	542.644	641.944
Goodwill	102.077	102.077	102.077	102.077	102.077
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	370.805	268.383	270.276	228.049	239.344
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	**23.616.833**	**20.927.059**	**17.912.203**	**15.692.399**	**14.418.168**
Jumlah Aset Total Assets	**38.765.189**	**45.359.207**	**36.123.703**	**24.056.755**	**26.098.052**
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**9.968.101**	**10.701.780**	**7.500.647**	**3.872.457**	**4.691.251**
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	**7.233.892**	**5.741.381**	**4.369.332**	**3.245.102**	**2.983.975**
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**17.201.993**	**16.443.161**	**11.869.979**	**7.117.559**	**7.675.226**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**21.563.196**	**28.916.046**	**24.253.724**	**16.939.196**	**18.422.826**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**38.765.189**	**45.359.207**	**36.123.703**	**24.056.755**	**26.098.052**

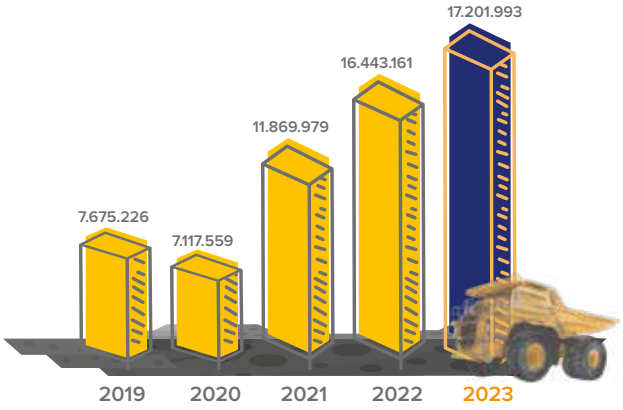
Jumlah Aset
Total Assets

Dalam Rp Juta
In Million Rupiah



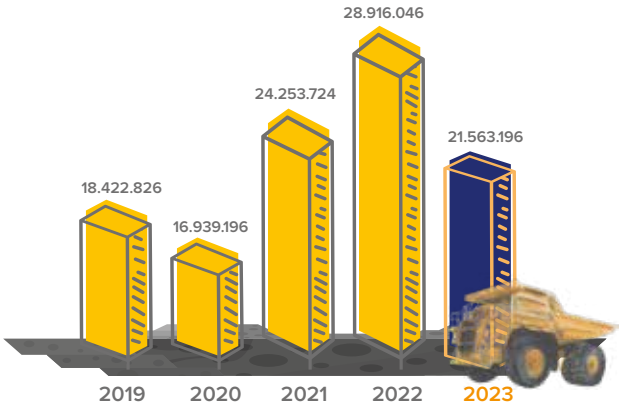
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Dalam Rp Juta
In Million Rupiah



Jumlah Ekuitas
Total Equity

Dalam Rp Juta
In Million Rupiah



Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flow

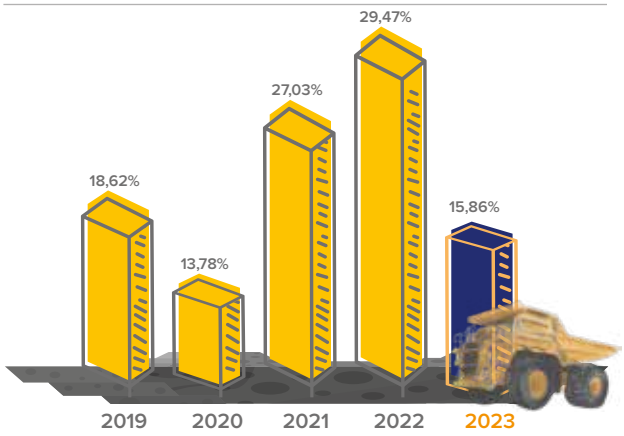
Dalam jutaan Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	3.104.707	12.527.439	10.795.075	3.513.628	4.296.479
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	7.248.649	(1.294.274)	(9.838.749)	113.585	(3.784.778)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(13.234.918)	(8.668.614)	(911.583)	(4.083.158)	(2.033.191)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	**(2.881.562)**	**2.564.551**	**44.743**	**(455.945)**	**(1.521.490)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**7.030.343**	**4.394.195**	**4.340.947**	**4.756.801**	**6.301.163**
Efek Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas Effects of Changes in Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents	(9.914)	71.597	8.505	40.091	(22.872)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**4.138.867**	**7.030.343**	**4.394.195**	**4.340.947**	**4.756.801**

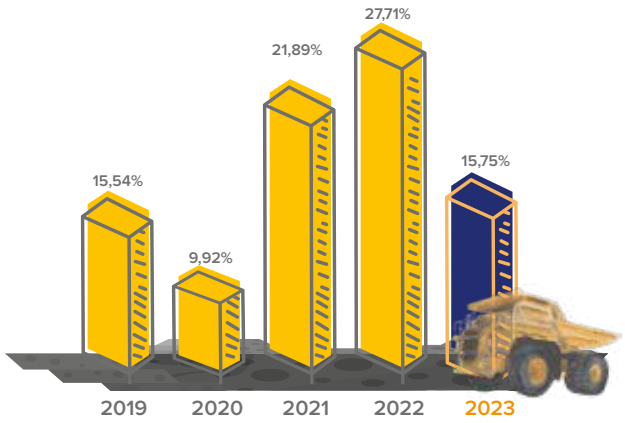
Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya
Financial Ratios and Other Important Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha Operating Profit Margin	%	18,71	35,51	34,03	14,55	23,01
Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha Net Profit Margin	%	15,86	29,47	27,03	13,78	18,62
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Return on Asset	%	15,75	27,71	21,89	9,92	15,54
Laba Bersih terhadap Ekuitas Return on Equity	%	28,32	43,46	32,61	14,09	22,02
Kas dan Setara Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek Quick Ratio	%	41,52	65,69	58,58	112,10	101,40
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek Current Ratio	%	151,97	228,30	242,80	216,00	248,97
Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset Debt to Asset Ratio	%	44,37	36,25	32,86	29,59	29,41
Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	79,77	56,87	48,94	42,02	41,66
Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectability Rate	Hari Day	38	32	44	42	46
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Produksi Batu Bara Permanent Employees Productivity on Coal Production	Ton/Pegawai Ton/Employee	26.746,94	23.224,94	16.441,21	12.076,99	13.219,00
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Laba Bersih Permanent Employees Productivity to Net Profit	Rp Juta/Pegawai Rp Million/ Employee	3.911,50	7.859,65	4.329,02	1.160,34	1.845,00
Produktivitas Pegawai Tetap terhadap Pendapatan Permanent Employees Productivity to Revenue	Rp Juta/Pegawai Rp Million/ Employee	24.656,55	26.672,04	16.016,13	8.422,55	9.908,00

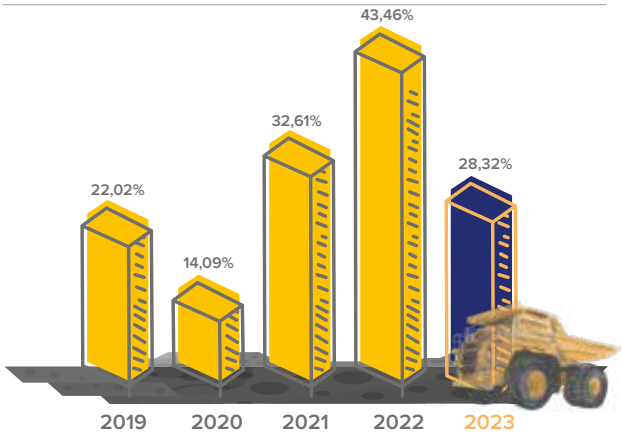
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha
Net Profit Margin



Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset
Return on Asset



Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas
Return on Equity



Belanja Modal
Capital Expenditures

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah Belanja Modal Total Capital Expenditures	2.015.289	831.747	1.840.414	1.327.496	1.633.386

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

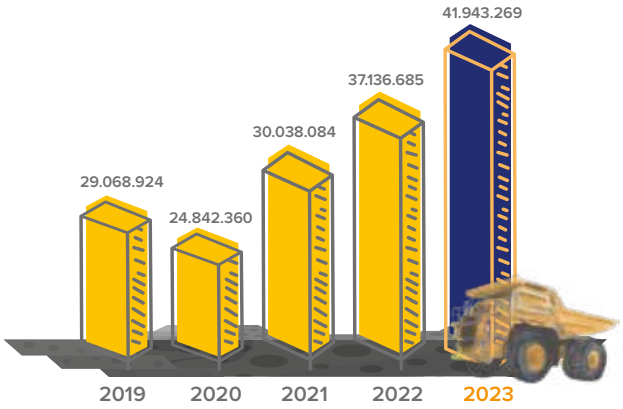
Kinerja Operasional
Operational Performance

dalam ton | in tons

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Produksi dan Pembelian Batu Bara Coal Production and Purchases					
Produksi Batu Bara Coal Production					
Unit Pertambangan Tanjung Enim Tanjung Enim Mining Unit					
Tambang Air Laya Air Laya Mine	5.398.027	7.318.743	5.461.197	5.270.842	7.777.286
Muara Tiga Besar Muara Tiga Besar	9.806.196	9.448.761	11.241.213	7.253.285	7.020.898
Banko Barat & Tengah West and Central Banko	25.685.494	19.497.246	12.562.456	11.710.244	13.277.253
Jumlah Produksi Unit Pertambangan Tanjung Enim **Total Production of Tanjung Enim Mining Unit**	**40.889.717**	**36.264.750**	**29.264.866**	**24.234.371**	**28.075.437**
Unit Pertambangan Peranap Peranap Mining Unit	4.175	-	-	7.451	4.445
PT Internasional Prima Coal	858.088	871.935	773.218	600.538	989.042
Jumlah Produksi Batu Bara **Total Coal Production**	41.751.980	37.136.685	30.038.084	24.842.360	29.068.924
Pembelian Batu Bara Coal Purchases					
PT Bukit Asam Prima	191.289	-	-	-	-
Jumlah Pembelian Batu Bara **Total Coal Purchases**	**191.289**	-	-	-	-
Jumlah Produksi dan Pembelian **Production and Purchases**	**41.943.269**	**37.136.685**	**30.038.084**	**24.842.360**	**29.068.924**
Angkutan Batu Bara Coal Transport					
Tanjung Enim ke Tarahan Tanjung Enim to Tarahan	25.426.945	23.409.125	20.053.105	18.226.112	20.783.148
Tanjung Enim ke Kertapati Tanjung Enim to Kertapati	6.992.232	5.402.048	5.365.858	5.571.504	3.458.856
Jumlah Volume Angkutan Batu Bara **Total Volume of Coal Transport**	**32.419.177**	**28.811.173**	**25.418.964**	**23.797.616**	**24.242.004**
Penjualan Batu Bara Coal Sales					
Domestik Domestic	21.403.957	19.172.313	16.111.899	14.135.858	16.677.939
Ekspor Export	15.569.604	12.481.321	12.258.020	11.989.018	11.115.462
Jumlah Penjualan Batu Bara **Total Coal Sales**	**36.973.561**	**31.653.634**	**28.369.919**	**26.124.876**	**27.793.401**

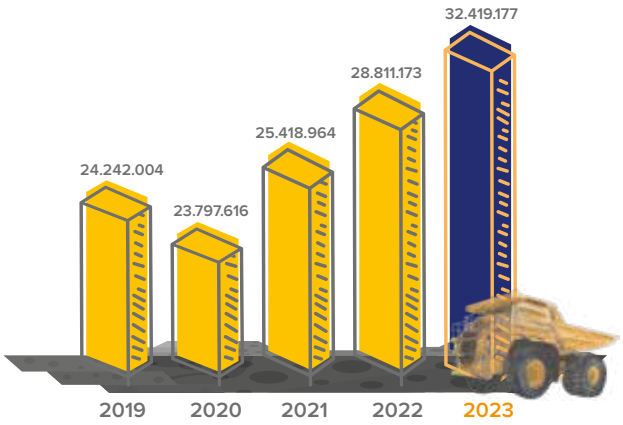
Jumlah Produksi dan Pembelian Batu Bara
Total Coal Production and Purchases

dalam ton
in tons



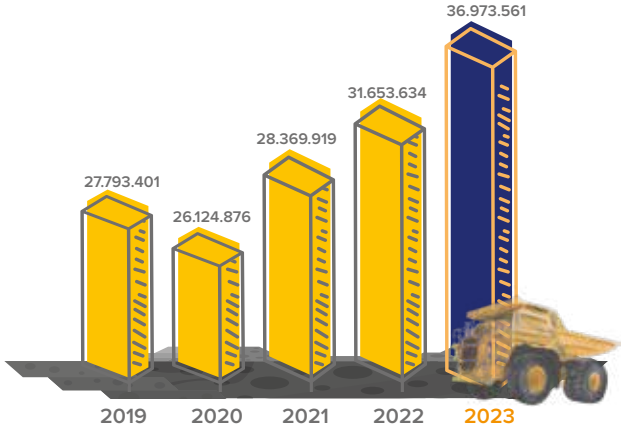
Jumlah Volume Angkutan Batu Bara
Total Volume of Coal Transport

dalam ton
in tons



Jumlah Penjualan Batu Bara
Total Coal Sales

dalam ton
in tons



Kinerja Organisasi
Organizational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2023*	2022	2021	2020	2019
Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	Skor Score	-	97,30	97,62	96,10	97,50
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundess Level	Peringkat Ranking	idAA	AA	AA	AA	AA

Catatan | Notes :
- Parameter assesmen GCG di Lingkungan BUMN tahun 2023 dicabut, sehinga tidak dilakukan penilaian GCG.
- Pada tahun 2023, penilaian dilakukan oleh PT Pefindo berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023
- In 2023, PT Pefindo was assessed based on the provisions of SOEs Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2023
- The parameter of GCG assessment in BUMN Group 2023 was revoked, thus the GCG assessment was not conducted.

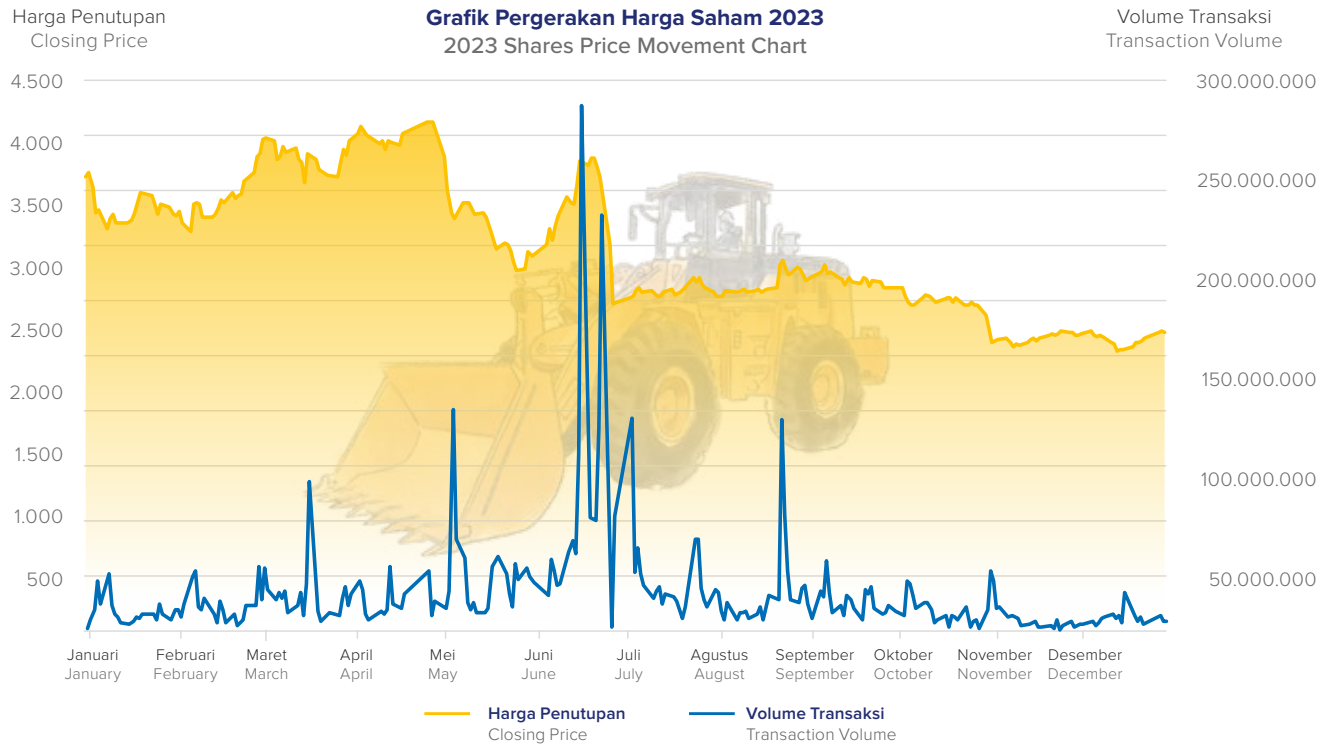
Ikhtisar Saham
Share Highlights

Informasi Perdagangan Saham Triwulanan
Quarterly Shares Trading Information

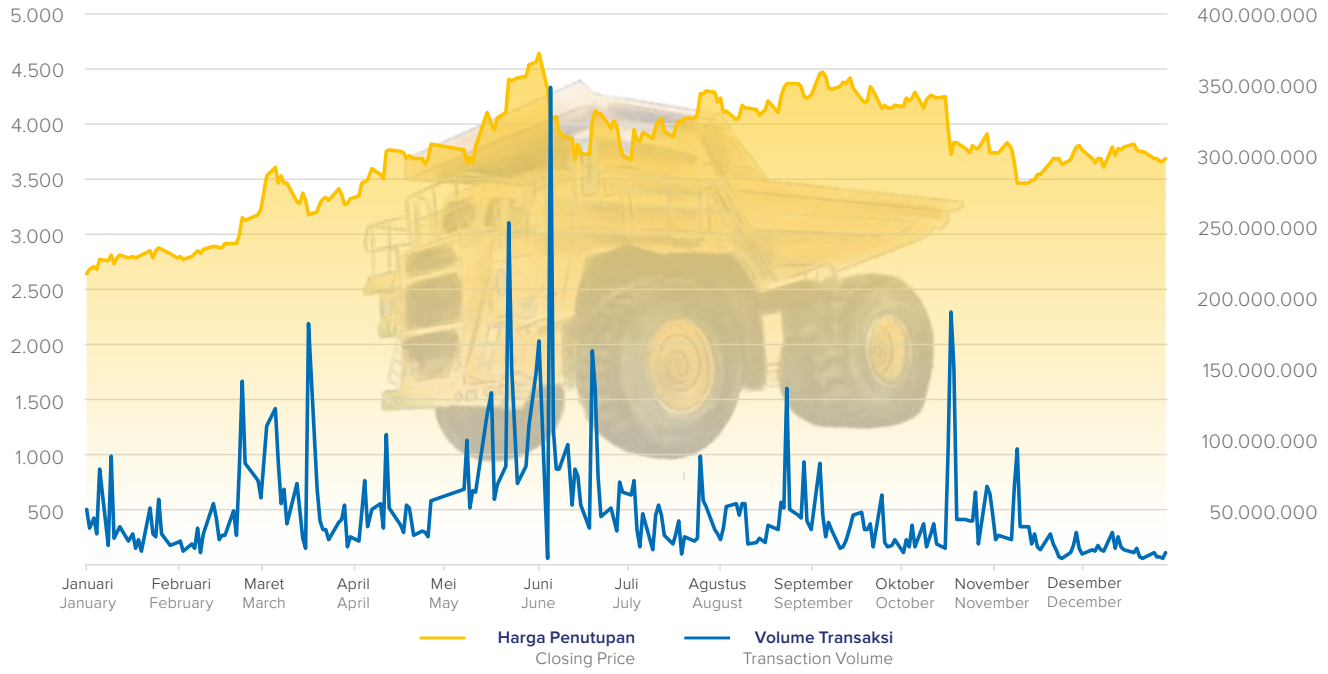
Periode Period	Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham) Number of Shares Outstanding (Shares)	Harga Saham Pembukaan (Lembar Saham) Opening Share Price (Share)		Harga Saham Tertinggi (Lembar Saham) Highest Share Price (Share)		Harga Saham Terendah (Lembar Saham) Lowest Share Price (Share)		Harga Saham Penutupan (Lembar Saham) Closing Share Price (Share)		Volume Perdagangan (Lembar Saham) Trade volume (Share)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun) Market Capitalization (Rp Trillion)
		Rp	Tanggal Date	Rp	Tanggal Date	Rp	Tanggal Date	Rp	Tanggal Date		
2023											
Triwulan I 1st Quarter	11.487.209.350	3.690	02/01/2023	4.020	03/03/2023	3.240	10/01/2023	3.990	31/03/2023	1.060.250.700	45,83
Triwulan II 2nd Quarter	11.487.209.350	4.000	03/04/2023	4.200	28/04/2023	2.680	27/06/2023	2.680	27/06/2023	2.202.105.224	30,79
Triwulan III 3rd Quarter	11.487.209.350	2.670	03/07/2023	3.070	23/08/2023	2.660	03/07/2023	2.800	29/09/2023	887.404.300	32,16
Triwulan IV 4th Quarter	11.487.209.350	2.810	02/10/2023	2.830	2/10/2023	2.300	14/12/2023	2.440	29/12/2023	676.585.800	28,03
2022											
Triwulan I 1st Quarter	11.487.209.350	2.660	03/01/2022	3.760	07/03/2022	2.600	03/01/2022	3.290	31/03/2022	2.332.606.500	45,83
Triwulan II 2nd Quarter	11.487.209.350	3.290	01/04/2022	4.630	03/06/2022	3.270	01/04/2022	3.820	30/06/2022	3.762.378.128	43,88
Triwulan III 3rd Quarter	11.487.209.350	3.820	01/07/2022	4.530	06/09/2022	3.620	04/07/2022	4.170	30/09/2022	2.126.281.896	47,90
Triwulan IV 4th Quarter	11.487.209.350	4.160	03/10/2022	4.330	07/10/2022	3.430	10/11/2022	3.690	30/12/2022	1.653.059.816	42,39

Catatan I Notes :
Kapitalisasi Pasar: (harga saham penutupan x jumlah saham beredar)
Market Capitalization: (closing share price x number of outstanding shares)

Grafik Pergerakan Harga Saham 2023
2023 Shares Price Movement Chart



Grafik Pergerakan Harga Saham 2022
2022 Shares Price Movement Chart



Informasi Saham Perusahaan Tahun 2019-2023
The Company's Share Information in 2019-2023

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Harga Saham Pembukaan (Rp/Lembar Saham) Opening Share Price (Rp/Share)	3.690	2.660	2.810	2.640	4.320
Harga Saham Tertinggi (Rp/Lembar Saham) Highest Share Price (Rp/Share)	4.200	4.630	3.040	3.170	4.470
Harga Saham Terendah (Rp/Lembar Saham) Lowest Share Price (Rp/Share)	2.300	2.600	2.000	1.485	2.150
Harga Saham Penutupan (Rp/Lembar Saham) Closing Share Price (Rp/Share)	2.440	3.690	2.710	2.810	2.660
Price to Book Value (x)	1,79	1,47	1,40	1,86	1,63
Price to Earnings Ratio (x)	4,60	3,37	5,10	13,19	7,17
Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham) Number of Outstanding Shares (Shares)	11.487.209.350	11.487.209.350	11.487.209.350	11.184.061.250	11.190.363.250

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham

Information on Suspension and/or Delisting

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak pernah menerima sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek, dimana perusahaan mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya, baik penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak dari penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Until the end of 2023, the Company has never received sanctions that could affect stock trading activities on the Stock Exchange, where the Company registers and trades its shares, both suspension and/or delisting shares. Thus, there is no information related to the impact of suspension and/or delisting of shares that can be presented in this Annual Report.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham berupa pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun perubahan nilai nominal saham. Namun, di tahun 2023, terdapat 1 (satu) aksi korporasi yang dilakukan oleh PTBA sebagai berikut.

Throughout 2023, the Company did not take any corporate actions that cause changes to shares in the form of stock split, reverse stock, bonus shares, or changes in the nominal value of shares. However, in 2023, the Company took one corporate action as listed below.

Aksi Korporasi Pengakhiran Rencana Akuisisi PT Tabalong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama

PT Tabalong Prima Resources (“PT TPR”) dan PT Mitra Hasrat Bersama (“PT MHB”) merupakan entitas asosiasi yang dimiliki oleh PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”) yang merupakan anak perusahaan dari PTBA. Pada tahun yang sama, PT IPC menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada PT TPR dan PT MHB.

Selanjutnya pada tahun 2015, sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), saham masing-masing pada PT TPR dan PT MHB sebesar 34,17% telah dipindahnamakan menjadi atas nama PT IPC yang telah dituangkan pada Akta Perjanjian Penjualan Saham (“AJB”). PPJB tersebut sampai dengan akhir periode berlakunya tidak bisa diselesaikan karena masih terdapat beberapa prasyarat yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak penjual. Oleh karena itu, PT IPC telah melakukan kajian mendalam terkait dengan keberlanjutan rencana akuisisi tersebut, dengan dibantu oleh Konsultan independen, yang merekomendasikan untuk tidak dilanjutkannya proses akuisisi saham PT TPR dan PT MHB.

PT IPC sendiri telah mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran Rencana Transaksi Akuisisi PT TPR dan PT MHB pada tanggal 9 Desember 2022. Sebagai tindaklanjut atas pengakhiran PPJB tersebut:

Corporate Action to Terminate the Acquisition of PT Tabalong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama

PT Tabalong Prima Resources (“PT TPR”) and PT Mitra Hasrat Bersama (“PT MHB”) are entities owned by PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”) which is a subsidiary of PTBA. In the same year, PT IPC signed a Share Sale and Purchase Agreement (“PPJB”) with PT TPR and PT MHB.

In 2015, as part of The Sale and Purchase Agreement (SPA), the respective shares in PT TPR and PT MHB amounting to 34.17% were transferred to the name of PT IPC as stated in the Deed of Agreement for Sale of Shares. The SPA cannot be completed until the end of its validity period because there are still several pre-requisites that cannot be fulfilled by the seller. Therefore, PT IPC has carried out an in-depth study regarding the sustainability of the acquisition plan, with the assistance of an independent consultant, who recommended to stop the process of acquiring PT TPR and PT MHB shares.

PT IPC has obtained the corporate approval required to sign the Termination Agreement for the PT TPR and PT MHB Acquisition Transaction Plan on December 9, 2022. As a follow-up of the termination of SPA:

1. Telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT TPR dan PT MHB yang pada intinya menyetujui pengalihan saham PT IPC pada PT TPR dan PT MHB kepada pemegang saham semula (sebelum pembelian oleh PT IPC);
2. Telah didapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya atas pengakhiran tersebut, maka PT IPC mendapatkan pengembalian uang sebesar USD12.300.000 dan kompensasi atas biaya-biaya sebesar USD946.095. Sehingga setelah dilakukan pengembalian saham dan pembayaran tersebut, maka PT IPC tidak lagi menjadi pemegang saham pada PT TPR dan PT MHB.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, PTBA telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik berdasarkan Surat PTBA No. B/251/1110000/KS.03/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

1. A General Meeting of Shareholders ("GMS") of PT TPR and PT MHB has been held which approved the transfer of PT IPC shares to PT TPR and PT MHB to the original shareholders (before the purchase by PT IPC);

2. Approval has been obtained in accordance with statutory provisions.

Furthermore, for this termination, PT IPC received a refund of USD12,300,000 and compensation for costs of USD946,095. After the shares are returned and the payment is made, PT IPC will no longer become a shareholder of PT TPR and PT MHB.

In line with Financial Services Authority Regulation No. 31/ POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies, PTBA has submitted information disclosure to the public based on PTBA Letter No. B/251/1110000/KS.03/ VI/2023 dated June 27, 2023.

Dividen Saham
Share Dividends

Uraian Description	Tahun Buku Fiscal Year	
	2022	2021
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp) Distributed Dividend (Rp)	12.567.581.927.964	7.909.111.452.604
Rasio Pembayaran Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	100,00	100,00
Nilai Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend Value per Share (Rp)	1.094,05	688,52
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (lembar) Number of Shares Entitled to Dividends (shares)	11.487.209.350	11.487.209.350
Tanggal Pengumuman Announcement Date	15 Juni 2023 June 15, 2023	24 Mei 2022 May 24, 2022
Tanggal Pembayaran Payment Date	14 Juli 2023 July 14, 2023	24 Juni 2022 June 24, 2022

Informasi tentang Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Information on Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2023, the Company did not issue bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Thus, there is no information related to the outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Funding

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak ada sumber pendanaan lainnya kepada Perusahaan.

As of December 31, 2023, the Company has no other sources of funding.


VOLVO
VOLVO
VOLVO

Peristiwa Penting
Significant Events



Lima unit bus listrik dioperasikan PTBA untuk Pelabuhan Tarahan

The operation of five electric buses by PTBA at Tarahan Port



Sinergi Grup MIND ID, PT Timah, dan PTBA jajaki pengembangan PLTS

Synergy of MIND ID Group, PT Timah and PTBA explored the development of Solar Panel Power Plant (SPPP)



Jasa Marga dan PTBA Lanjutkan Kolaborasi Pengembangan PLTS di Jalan Tol

Continued collaboration between PTBA and Jasa Marga in the development of SPPP at toll road



Siapkan Tanjung Enim Jadi Kota Wisata, PTBA Hadirkan Waterpark

PTBA opened Water Park at Tanjung Enim



Tertinggi sepanjang Sejarah, PTBA Raih Laba Bersih Rp12,6 Triliun

PTBA achieved the highest net profit in history of Rp12.6 trillion



PTBA Konservasi Terumbu Karang di Pulau Pahawang

PTBA carried out coral conservation at Pahawang Island



Kinerja Operasional Meningkat, PTBA Raih Laba Bersih Rp1,2 Triliun di Triwulan I 2023

PTBA achieved net profit of Rp1.2 trillion in the first quarter of 2023



PLTU Sumsel-8 Masuki Tahap Uji Coba Operasi

Sumsel-8 power plant entering the operational trial



PTBA Menggelar RUPST 2022, Tebar Dividen Rp12,6 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih

PTBA conducted General Meeting of Shareholders 2022 and Distributes Dividends of Rp12.6 Trillion, 100 Percent of Net Profit



PTBA Ubah Lahan Bekas Tambang Jadi Kebun Buah

PTBA converted former mining land into a fruit garden



PTBA Bagikan Dividen Rp12,6 Triliun

PTBA shared Rp12.6 trillion dividends



PTBA Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Kawasan Ekowisata Cuku Nyi Nyi

PTBA planted 50,000 mangrove seeds at Cuku Nyi Nyi Ecotourism



PTBA Gandeng China Huadian Kembangkan Energi Terbarukan

PTBA worked with Huadian China to develop renewable energy



HUT ke-78 RI, PTBA Resmikan PLTS Irigasi Desa Karang Raja

PTBA inaugurated the Karang Raja Village power plant irrigation on the 78th anniversary of the Republic of Indonesia



PTBA Gandeng Inhutani V untuk Reklamasi hingga Pengelolaan Hutan

PTBA worked with Inhutani V for reclamation to forest management



Kolaborasi PTBA dan Universitas Gajah Mada (UGM) Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara

PTBA worked with Gajah Mada University to bring added value in coal



Dorong Inovasi Pemanfaatan Batu Bara dan EBT, PTBA Gandeng BRIN

PTBA worked with BRIN to encourage coal and NRE (new renewable energy) utilization



PLTU Sumsel-8 Resmi Beroperasi Secara Komersial

Sumsel-8 CFPP began its official operation



PTBA Kembangkan Energi Biomassa dari Kaliandra Merah

PTBA Develops Biomass Energy from Kaliandra Merah



Tingkatkan Sinergitas, KAI dan PTBA Tandatangani Perjanjian Angkutan Batu Bara

Increase Synergy, KAI and PTBA Sign the Coal Transportation Agreement



PTBA Cetak Laba Bersih Rp3,8 Triliun di Triwulan III 2023

PTBA recorded a net profit of Rp3.8 trillion in the third quarter of 2023



PTBA dan Kimia Farma Jajaki Kerja Sama di Bidang Kesehatan

PTBA explored cooperation with Kimia Farma in the health sector



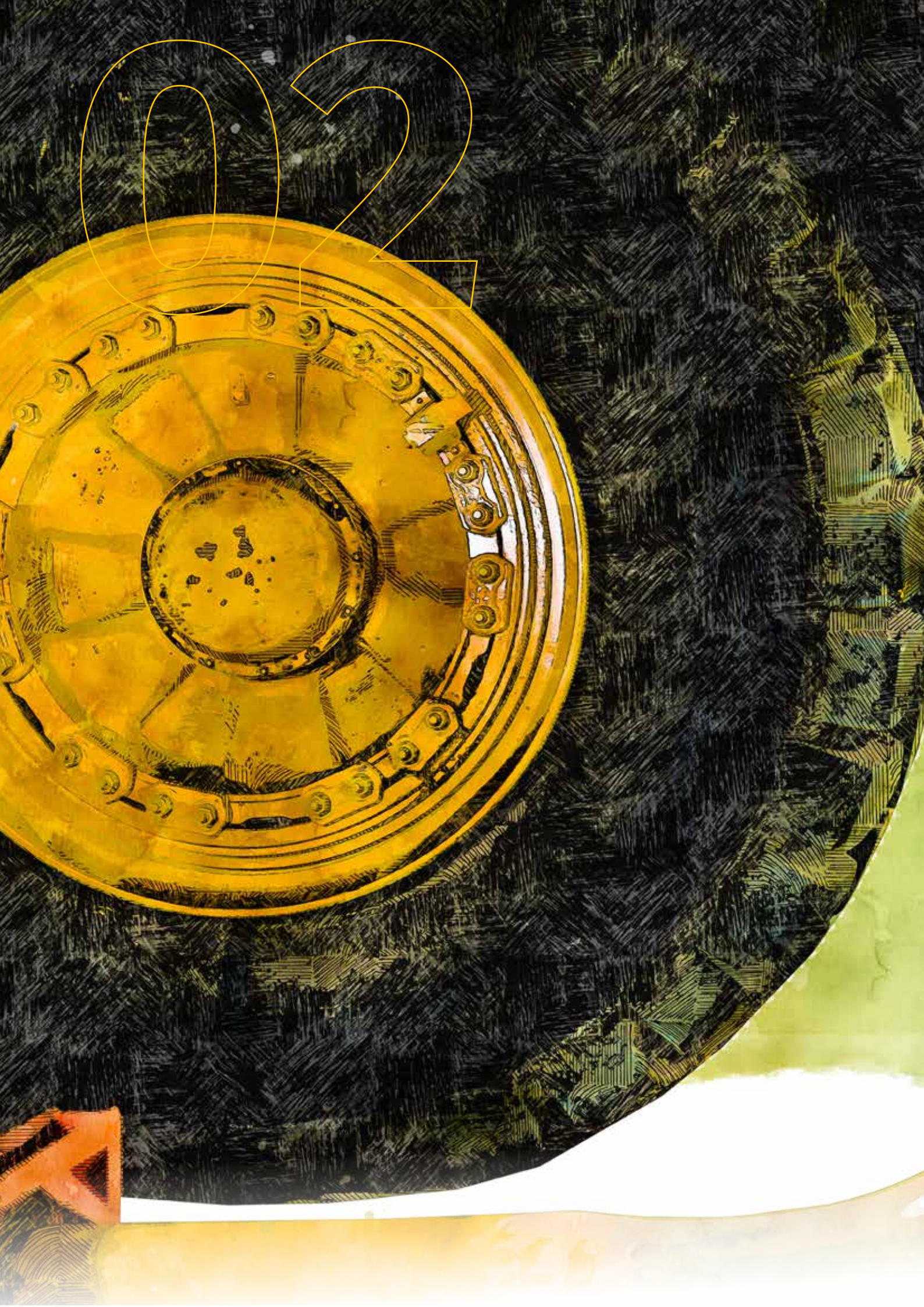
Taat Pengelolaan Lingkungan, PTBA Dianugerahi 2 PROPER Emas 2023

Comply to Environment Management, PTBA received 2 Gold PROPER in 2023



Groundbreaking pembangunan coal handling facility (CHF) 6 & 7 untuk mendukung proyek angkutan TE - Keramasan 20 juta ton

Groundbreaking for the construction of coal handling facilities (CHF) 6 & 7 to support the 20 million ton TE - Keramasan transportation project


02



Manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat komitmen untuk menyediakan energi bersih untuk memastikan masa depan Perusahaan yang gemilang.

Management plays a crucial role in strengthening the commitment to provide clean energy to ensure the Company's brilliant future.

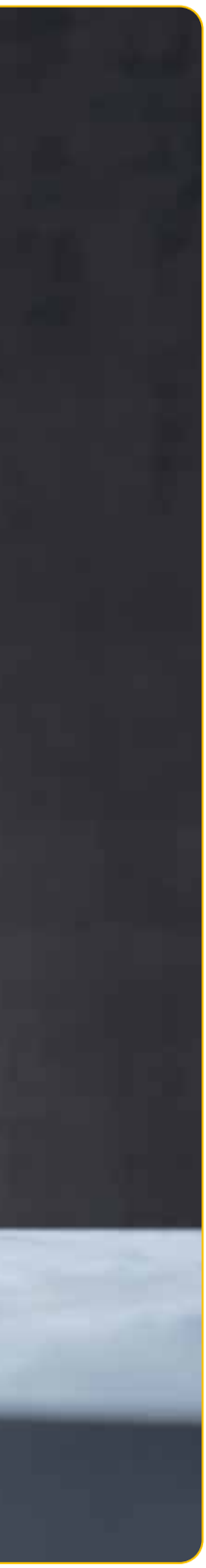
Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners



Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc
Komisaris Utama | President Commissioner



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PTBA dapat melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dan dinamika dengan capaian kinerja yang baik. Keberhasilan ini sekaligus menunjukan resiliensi Perusahaan terhadap berbagai kondisi ekonomi dan bisnis.

Melalui laporan ini, izinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan pokok-pokok dari laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini juga menjadi salah satu wujud dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pandangan terhadap Kondisi Ekonomi dan Industri

Ekonomi global kembali menghadapi tantangan yang tidak ringan di tahun 2023. Berbagai persoalan yang sudah terjadi sejak tahun sebelumnya, seperti konflik geopolitik, gangguan pasokan komoditas pangan dan energi, serta tekanan inflasi hingga kebijakan suku bunga tinggi, masih terus berlanjut. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan, yang juga berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Kendati pertumbuhan ekonomi nasional masih cukup stabil, namun dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit mengalami perlambatan. Hal ini salah satunya disebabkan menurunnya kinerja ekspor karena pelemahan harga komoditas utama, seperti *crude palm oil* (CPO) dan batu bara. Meskipun begitu, posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia tetap menjadi salah satu pendorong terbaik pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023.

Melemahnya harga batu bara di tahun 2023 merupakan dampak dari pelemahan ekonomi di banyak negara di dunia, khususnya Tiongkok. Selama ini, Tiongkok merupakan salah satu pasar utama bagi produk batu bara. Oleh karena itu, meskipun Perusahaan berusaha mengimbanginya melalui peningkatan volume penjualan ekspor, akan tetapi tetap tidak mampu menahan efek dari laju penurunan harga batu bara dari posisi tertingginya di tahun lalu.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Let us send the utmost praise and gratitude to the presence of God Almighty, since due to His grace and blessings, so that PTBA managed to sail through the challenging 2023 with positive performance growth. This achievement is a proof of our resilience amid challenges in our economic and business climate.

In this report, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to deliver the main points of the Board of Commissioners' supervisory report on the management of the Company carried out by the Board of Directors, as a form of accountability to shareholders and other stakeholders. This report is also a manifestation of the implementation of Good Corporate Governance in the Company and to fulfill statutory regulations.

Economic and Industrial Conditions Overview

The global economy faced many challenges in 2023. Various problems that have occurred since the previous year, such as geopolitical conflicts, disruptions in the supply of food and energy commodities, as well as inflationary pressures to high interest rate policies, are still ongoing. This has led to a slowdown in global economic growth, which has also had an impact on the Indonesian economy.

Even though national economic growth remained stable, when compared to the previous year, Indonesia's economic growth has declined slightly. This was caused by a decline in export performance due to weakening prices of main commodities, such as crude palm oil (CPO) and coal. However, Indonesia's position as the largest coal exporter in the world remained as one of the best driving forces of the national economy in 2023.

The weakening of coal prices in 2023 was the impact of the economic weakness in many countries in the world, especially China. So far, China has been one of the major markets for coal products. Therefore, even though PTBA is trying to compensate this condition through increasing export sales volumes, it is still unable to withstand the effects of the decline in coal prices from their highest position last year.

Dalam menghadapi kondisi ini, Dewan Komisaris menekankan perlunya diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efisiensi. Fokus pada inovasi dan investasi dalam teknologi bersih menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang Perusahaan. Selain itu, penting juga untuk mengikuti perubahan kebijakan energi global dan menyesuaikan strategi Perusahaan untuk tetap relevan dalam pasar yang dinamis ini.

In dealing with this condition, the Board of Commissioners emphasized the need to diversify income sources and increase efficiency. A focus on innovation and investment in clean technologies will be important to ensure the long-term sustainability of the Company. It is also important to keep up with the ever-changing global energy policies and adjust the Company's strategies in order to stay relevant in this dynamic market.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2023. Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, antara lain terkait penerapan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) ,dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan Perusahaan.

Performance of the Board of Commissioners' Duties

As the organ responsible for supervising the management of the Company carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners has conducted various supervisory activities in 2023. The supervision carried out covers various aspects, including those related to the implementation of the Company's strategies and strategic policies, the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), and other aspects related to the Company.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan masukan, rekomendasi, dan persetujuan terhadap hal-hal yang disampaikan Direksi.

In addition, the Board of Commissioners provided advice, recommendations, and approval on matters submitted by the Board of Directors.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Sesuai dengan amanat Undang Undang, tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi, termasuk di dalamnya implementasi strategi Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagai acuan pengawasan.

Supervision of the Implementation of Company Strategies

In accordance with the applicable Law, the main task of the Board of Commissioners is to supervise the management of the Company carried out by the Board of Directors, including the implementation of the Company strategy. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the Company's Work Plan and Budget (WP&B), which has been submitted by the Board of Directors and received approval from Shareholders as a reference for supervision.

Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan *review* atas setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan rencana Perusahaan. Dewan Komisaris menekankan bahwa meskipun ada tantangan, upaya Direksi dalam mempertahankan aktivitas operasional dan menjaga keseimbangan keuangan Perusahaan patut diapresiasi.

The Board of Commissioners monitors and reviews every strategic initiative taken by the Board of Directors and assesses its suitability according to the Company's plans. The Board of Commissioners emphasized that despite challenges, the Board of Directors' efforts in maintaining operations and financial balance must be appreciated.

Dewan Komisaris menilai langkah-langkah ekspansif yang diambil Perusahaan dalam mengembangkan pasar sebagai respons yang sangat strategis dan adaptif terhadap kondisi pasar yang berubah. Sepanjang tahun 2023 ini, Perusahaan terus melakukan ekspansi pasar baru, utamanya pasar-pasar Asia yang mempunyai potensi permintaan akan batu bara yang terus bertumbuh, seperti Vietnam dan Bangladesh.

The Board of Commissioners assessed the expansive steps taken by the Company in developing the market as a very strategic and adaptive response to the changing market condition. Last year, the Company discovered new market potentials, especially Asian markets which have potential demand for coal that continues to grow, such as Vietnam and Bangladesh.

Selain itu, untuk mendukung pencapaian target penjualan, Perusahaan terus berupaya untuk mengembangkan alternatif angkutan batu bara selain kereta api. Hal tersebut menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam penjualan batu bara.

Moreover, in order to support the achievement of sales targets, the Company developed transportation alternatives other than coal trains. This shows a commitment to increasing accessibility and flexibility in coal sales.

Dewan Komisaris menekankan pentingnya analisis pasar yang menyeluruh, pengelolaan risiko yang cermat, dan efisiensi biaya, serta aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan.

Dewan Komisaris menaruh perhatian besar pada keberlanjutan dan adaptasi Perusahaan terhadap perubahan iklim dan tren energi terbarukan. Fokus ini mencakup investasi dalam teknologi bersih, diversifikasi portofolio energi, dan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi. Kami juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus pada pengelolaan risiko dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Hal tersebut mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar tata kelola yang baik, dan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap Direksi melalui beberapa mekanisme, antara lain dengan memeriksa laporan dan melakukan pengawasan tambahan melalui Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (dimana sejak tanggal 15 Desember 2023 Komite tersebut dipecah menjadi 2 yaitu (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dan (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi).

Dewan Komisaris menggunakan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke lokasi kegiatan usaha Perusahaan. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Dewan Komisaris terlibat secara aktif dalam memberikan arahan kepada Direksi melalui beberapa kegiatan utama. Kegiatan tersebut antara lain, rapat internal dan rapat gabungan, sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi serta prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan. Sebagai *output* dari kegitan tersebut, Dewan Komisaris memberikan tanggapan, catatan, dan masukan yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan 19 kali rapat internal dan 13 kali rapat gabungan bersama dengan Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan hak dan wewenang Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

The Board of Commissioners emphasized the importance of thorough market analysis, careful risk management, cost efficiency, sustainability aspect, and environmental impact.

The Board of Commissioners also pays great attention to the Company's sustainability and adaptation to climate change and renewable energy trends. This focus includes investments in clean technologies, energy portfolio diversification, and initiatives to improve energy efficiency. The Board of Commissioners also drew attention to the importance of compliance with environmental and social regulations, as well as maintaining good relationships with stakeholders.

Lastly, the Board of Commissioners pays special attention to risk management and good corporate governance. This includes transparency in financial reporting, compliance with good governance standards, and ensuring that business decisions are made by taking into consideration the interests of all stakeholders.

Supervision Mechanism and Frequency

The Board of Commissioners carried out strict supervision of the Board of Directors through several mechanisms, including examining reports and carrying out additional supervision through the Audit Committee and the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Committees (as of December 15, 2023, the Committee was split into 2: (i) Integrated Risk Monitoring and Governance Committee and (ii) Nomination and Remuneration Committee).

The Board of Commissioners used direct and indirect mechanisms to supervise the implementation of the Company's strategy. The direct mechanism was carried out through visits to the Company's activities, while the indirect mechanism was carried out through meetings by inviting the Board of Directors.

The Board of Commissioners is actively involved in providing direction to the Board of Directors through several main activities, namely internal meetings and joint meetings as a form of coordination to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance. As outputs of those activities, the Board of Commissioners provide responses, notes, and advice as outlined in the Minutes of Meeting. In 2023, the Board of Commissioners held 19 internal meetings and 13 joint meetings with the Board of Directors.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adhered to applicable laws and regulations while still taking into consideration the rights and authority of the Board of Directors in managing the Company.

Masukan dan Rekomendasi

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan masukan kepada Direksi berdasarkan pertimbangan masukan dari Komite yang merupakan organ pendukung Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. **Bidang Keuangan**
   Dewan Komisaris mendorong agar dilakukan berbagai upaya efisiensi berkelanjutan dan memastikan upaya-upaya yang dijalankan sesuai dengan target. Selain itu, Dewan Komisaris mendukung langkah proaktif manajemen dalam mempercepat penyelesain proyek-proyek strategis secara tepat waktu agar terhindar dari potensi *cost overrun*,serta mendorong manajemen untuk meningkatkan penyerapan investasi secara berkala.
2. **Pengelolaan Risiko**
   Dewan Komisaris meminta kepada manajemen untuk melakukan kajian secara menyeluruh atas risiko-risiko yang dapat berdampak pada setiap proses bisnis Perusahaan, termasuk menyiapkan mitigasi risiko yang memadai. Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta agar manajemen mengevaluasi risiko atas aset-aset PTBA apabila ditetapkan sebagai obyek vital nasional.
3. **Bidang Produksi & Angkutan**
   Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan manajemen untuk dapat menjaga persediaan dalam jumlah optimal, melakukan pengelolaan nisbah kupas dengan memperhatikan dinamika perubahan harga dan target Perusahaan, serta melakukan upaya-upaya alternatif dari sisi operasional agar dapat tercipta *cost awarensess* dari setiap lini bisnis dan rantai pasok Perusahaan.
4. **Bidang Pemasaran**
   Dewan Komisaris memberikan nasihat agar manajemen senantiasa memperhatikan dinamika pasar dalam dan luar negeri, serta memanfaatkan momentum agar dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris mendukung opsi-opsi penjualan melalui moda transportasi selain kereta api.
5. **Bidang Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia**
   Manajemen perlu memastikan penerapan peraturan dan ketentuan terkait bidang Nominasi dan Remunerasi serta SDM diterapkan dengan baik. Dewan Komisaris juga mengingatkan manajemen untuk memperhatikan dan mempertimbangkan talenta milenial dan perempuan dalam menetapkan talenta Perusahaan.
6. **Bidang Pengembangan Usaha**
   Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyusun *roadmap* Strategi *Unlocking Logistic* PTBA dalam rangka mengatasi masalah angkutan dan upaya monetisasi cadangan batu bara. Selain itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk mempercepat pengembangan usaha yang belum ada di Indonesia namun memiliki potensi yang baik dan menguntungkan, serta peluang-peluang kerjasama yang dapat meningkatkan *value* PTBA.

Advice and Recommendations

As part of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners supervises the management of the Company by the Board of Directors. They can provide advice and recommendations to the Board of Directors. Throughout 2023, the Board of Commissioners has provided suggestions and advice to the Board of Directors based on input from the Committee, which is the supporting body of the Board of Commissioners, as follows:

1. **Financial Sector**
   The Board of Commissioners encourages various sustainable efficiency efforts and ensures that those efforts are carried out in accordance with targets. In addition, the Board of Commissioners supports management's proactive steps in accelerating the completion of strategic projects in a timely manner to avoid potential cost overruns and encouraging management to increase investment absorption on a regular basis.
2. **Risk Management**
   The Board of Commissioners requested the management to conduct a comprehensive study of risks that could impact every business process of the Company, including preparing adequate risk mitigation. In addition, the Board of Commissioners also requested the management to evaluate the risks to PTBA's assets if they were designated vital national objects.
3. **Production & Transportation Sector**
   The Board of Commissioners always reminds management to maintain optimal inventory quantities, manage the stripping ratio (SR) by paying attention to the dynamics of changes in prices and Company targets, and make alternative operational efforts to realize cost awareness in each business line and the Company's supply chain.
4. **Marketing Sector**
   The Board of Commissioners provides advice for the management to always pay attention to the dynamics of domestic and foreign markets and take advantage of the momentum to increase the Company's sales and income. In addition, the Board of Commissioners supports sales scheme options through other modes.
5. **Nomination, Remuneration, and Human Capital Sector**
   The management must ensure the implementation of regulations for Nomination, Remuneration, and Human Capital. The Board of Commissioners also reminds management to pay attention and consider the talents of millennials and women when determining the Company's talent.
6. **Business Development Sector**
   The Board of Commissioners asked the Board of Directors to prepare a roadmap for the PTBA Unlocking Logistics Strategy in order to overcome transportation problems and monetize coal reserves. In addition, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to accelerate the development of inexistent businesses in Indonesia with good and profitable potential as well as collaboration opportunities that can increase PTBA's value.

7. **Kinerja Anak Perusahaan**
   Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada manajemen untuk dapat mengkaji dan mengupayakan restrukturisasi terhadap anak-anak Perusahaan, dan mendorong untuk dilakukan analisis *stress test*.
8. **Bidang Teknologi dan Informasi**
   Dewan Komisaris mengingatkan manajemen untuk menjaga faktor keamanan data Perusahaan, mengupayakan percepatan-percepatan yang berkaitan dengan migrasi sistem dan penerapan teknologi guna memperlancar kegiatan usaha Perusahaan.
9. **Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Keberlanjutan**
   Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan manajemen untuk melakukan monitoring dan berupaya merealisasikan target program TJSL sesuai dengan program kerja, melakukan upaya penagihan kepada mitra secara konsisten dan masif, pendekatan dengan para debitur melalui *follow up* komunikasi secara intensif, serta mendorong manajemen terus berupaya melakukan peningkatkan transaksi melalui platform PaDi UMKM.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam mengelola Perusahaan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Kinerja Direksi dinilai tidak hanya dari segi nilai ekonomi dan sosial, tetapi juga dari inovasi model bisnis, pengembangan talenta, peningkatan investasi, dan kepemimpinan teknologi. Meskipun ada koreksi dalam beberapa aspek kinerja keuangan, Direksi berhasil meningkatkan stabilitas operasional, meminimalisir dampak penurunan indeks harga batu bara, dan mengejar peluang pasar baru yang merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional dan keuangan telah tercapai dengan hasil yang memuaskan. Untuk kinerja operasional, Dewan Komisaris menilai kebijakan yang dijalankan oleh Direksi sudah sangat baik, kendati realisasi volume penjualan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang dicanangkan di awal tahun.

Penurunan harga batu bara dunia di tahun 2023 juga telah memberikan dampak yang besar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan sebesar Rp38,49 triliun dan laba bersih Rp6,11 triliun.

7. **Subsidiary Performance**
   The Board of Commissioners has advised management to review and carry out the restructuring of the subsidiaries and encouraged stress test analysis.
8. **Technology and Information Sector**
   The Board of Commissioners reminded the management to maintain Company data security and strive for acceleration related to system migration and technology implementation to expedite the Company's business activities.
9. **Social and Environmental Responsibility and Sustainability Program**
   The Board of Commissioners always reminds management to monitor and carry out efforts to realize the CSR program targets in accordance with the work program, make consistent and massive collection efforts to partners, approach debtors through intensive communication follow-up, and encourage management to continue carrying out efforts to increase transactions through the PaDiUMKM platform.

Assessment of the Board of Directors' Performance in Managing the Company

The Board of Commissioners lauded the Directors' efforts in managing the Company amidst challenging market conditions.

The performance of the Board of Directors is assessed not only in terms of economic and social values but also in terms of business model innovation, talent development, increased investment, and technological leadership. Despite corrections in several aspects of financial performance, the Board of Directors managed to improve operational stability, minimize the impact of the decline in the coal price index, and pursue new market opportunities, which are important aspects in maintaining the Company's business continuity.

In general, the Board of Commissioners considers that operational and financial performance has been achieved with satisfactory results. Regarding operational performance, the Board of Commissioners assesses that the policies implemented by the Board of Directors are excellent, even though the realization of sales volume has decreased compared to the previous year's achievements.

The decline in global coal prices in 2023 greatly affected the Company's financial performance. In 2023, the Company managed to record a positive performance with a revenue of Rp38.49 trillion and net profit of Rp6.11 trillion.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Prospek Usaha 2024

Dewan Komisaris memiliki pandangan optimis terhadap prospek bisnis Perusahaan. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan volatilitas harga batu bara dan perubahan kebijakan energi global, kami percaya bahwa strategi ke depan telah mengakomodir tantangan yang ada dan berdampak positif kepada keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Dewan Komisaris menekankan pentingnya adaptasi terhadap tren transisi energi, termasuk investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih, serta pengembangan pasar baru sebagai kunci untuk mempertahankan relevansi dan keberhasilan Perusahaan di masa depan. Selain itu, Perusahaan harus terus mengedepankan upaya efisiensi biaya dan *unlocking* angkutan batu bara agar Perusahaan terus tumbuh sebagai pemain besar dalam industri batu bara Indonesia.

Di samping kesinambungan pada bisnis eksisting, Perusahaan harus terus mengeksplorasi peluang diversifikasi usaha melalui bisnis energi terbarukan serta peningkatan upaya dalam keberlanjutan dan inovasi. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu Perusahaan dalam mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar batu bara, tetapi juga memposisikan Perusahaan sebagai pemimpin dalam industri energi.

Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk memperkuat sinergi dengan anggota MIND ID lainnya untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi untuk terus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengembangan usaha Perusahaan dan meningkatkan aspek manajemen risiko dalam setiap langkah yang dijalani.

Dewan Komisaris telah meninjau dan memberikan tanggapan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 yang telah disusun oleh Direksi. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, persetujuan atas RKAP Tahun 2024 telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan MIND ID selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Dewan Komisaris menilai RKAP tersebut sebagai rencana yang komprehensif dan realistis, mencerminkan pemahaman mendalam Direksi terhadap tantangan dan peluang yang berpotensi dihadapi Perusahaan di tahun 2024.

Secara garis besar dalam RKAP Tahun 2024, Perusahaan menargetkan produksi sebanyak 41,34 juta ton dan penjualan sebanyak 43,11 juta ton. Penetapan target dalam RKAP ini mencakup strategi yang jelas untuk mengatasi ketidakpastian pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, termasuk pengembangan pasar baru dan inisiatif keberlanjutan. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Direksi dalam memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi bilamana diperlukan.

Board of Commissioners' Views on 2024 Business Outlook

The Board of Commissioners is optimistic in the Company's business prospects. Although experiencing significant challenges, especially related to coal price volatility and changes in global energy policy, we believe that the future strategy has accommodated existing challenges to bring a positive impact on the Company's business sustainability.

The Board of Commissioners highlighted the importance of adapting to energy transition trends, including investment in renewable energy and clean technologies, as well as the development of new markets as key to maintain the Company's relevance and success in the future. In addition, the Company must continue to prioritize cost efficiency efforts and unlock coal transportation to help the Company becoming a big player in the Indonesian coal industry.

Besides maintaining its sustainability in existing businesses, PTBA must explore opportunities for business diversification through renewable energy businesses and increasing efforts in sustainability and innovation. This approach will not only help the Company reduce risks associated with the coal market fluctuations but also make the Company a leader in the energy industry.

The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to strengthen synergy with other MIND ID members to further increase the Company's efficiency and effectiveness. Moreover, the Board of Directors must continue to improve the principle of prudence in developing the Company's business and improve risk management aspects in every step taken.

The Board of Commissioners has reviewed and provided responses to the 2024 Company Work Plan and Budget (WP&B) which has been prepared by the Board of Directors. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, approval for the 2024 WP&B has been given by the Board of Commissioners and MIND ID as the Proxy for Series A Dwiwarna Shareholders. The Board of Commissioners assesses the WP&B as a comprehensive and realistic plan, reflecting the Board of Directors' in-depth understanding of the challenges and opportunities to face the 2024.

In the 2024 WP&B, the Company targets production of 41.34 million tons and sales of 43.11 million tons. Setting target in the WP&B includes a clear strategy to overcome market uncertainty and utilize growth opportunities, including new market development and sustainability initiatives. We are committed to working closely with the Board of Directors in monitoring progress and adjusting strategies when needed.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan arahan Pemegang Saham, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, melakukan pengawasan dan peninjauan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan hukum dan penerapan GCG dalam proses bisnis Perusahaan.

Penerapan GCG hingga saat ini telah berjalan dengan baik, didukung dengan kerjasama yang efektif antara organ GCG di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ pendukung dapat berjalan sesuai dengan kebijakan GCG PTBA.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara semakin mendorong Perusahaan untuk meningkatkan implementasi tata kelola korporat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nilai-nilai dari Peraturan Menteri tersebut telah diadopsi secara baik oleh Perusahaan. Hal ini terbukti dengan telah ditetapkannya *Corporate Governance Policy*, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Kerja Direksi PT Bukit Asam Tbk di akhir tahun 2023. Selain mengacu pada Peraturan Menteri tersebut, kebijakan internal juga mengacu pada *best practice/soft-law* yang berlaku secara nasional dengan mengadopsi nilai-nilai dari Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021, yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi serta *best practice* regional dengan mengacu pada ketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Perusahaan telah mengadopsi Sistem Pengendalian Internal berdasarkan *Best Practice* berstandar internasional yang sesuai dengan prinsip *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* yang melibatkan lima komponen utama termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara umum menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan skor rata-rata 91,57% dari 10 unit kerja.

Pandangan terhadap Penerapan ESG

Dewan Komisaris memberikan penilaian positif terhadap penerapan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) oleh Perusahaan di tahun 2023. Dewan Komisaris memberikan apresiasi khusus atas pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan ESG di tahun 2023. Pembentukan komite tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan fokus dan akuntabilitas dalam implementasi TJSL dan prinsip ESG, yang sejalan dengan arahan pemegang saham, khususnya dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Board of Commissioners' Views on the Implementation of Corporate Governance

In accordance with Shareholder instructions, the Board of Commissioners through the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee supervised and reviewed the Company's compliance with legal regulations and the implementation of GCG in the Company's business processes.

The implementation of GCG to date went relatively well, supported by effective collaboration between GCG organs under the Board of Commissioners and Directors. Thus, the functions and responsibilities of each supporting organ ran in accordance with PTBA's GCG policy.

The issuance of SOEs Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, encourages the Company to improve the implementation of corporate governance in the future. The values of the Ministerial Regulation have been properly adopted by the Company. This is proven by the stipulation of the Corporate Governance Policy, the Board of Commissioners' Work Guidelines, and the Directors' Work Guidelines of PT Bukit Asam Tbk at the end of 2023. Besides referring to the Ministerial Regulation, these internal policies also refer to best practice/soft-law that applies nationally by adopting the values of the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), established by the National Committee for Governance Policy as well as regional best practices by referring to the provisions of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

The Company has adopted an international standard internal control system that includes the principles of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, which involves five main components including control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Based on the carried out assessment, the Company's Internal Control System showed high effectiveness with an average score of 91.57% from 10 work units.

Views on ESG Implementation

The Board of Commissioners gives a positive appraisal of the Company's implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in 2023. The Board of Commissioners also lauded the formation of the Social and Environmental Responsibility (CSR) and ESG Committee in 2023. The formation of this committee is important to increase the focus and accountability in ESG and CSR implementations in line with direction from shareholders, especially in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 regarding the Special Assignment and Social Environmental Responsibility Program for State-Owned Enterprises.

Untuk terus meningkatkan kualitas penerapan ESG, Dewan Komisaris menyarankan Perusahaan untuk lebih meningkatkan transparansi dan pelaporan dalam aspek ESG dalam setiap kanal yang dimiliki oleh Perusahaan. Ini termasuk pengembangan indikator kinerja yang lebih jelas dan terukur, serta komunikasi yang lebih efektif mengenai pencapaian dan tantangan ESG kepada pemangku kepentingan. Untuk, di tahun 2024 dan dan seterusnya, *ultimate shareholder* Perusahaan, yaitu Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, telah menerapkan *Key Performance Indicators* bagi Perusahaan dengan berlandaskan pada pilar ESG. Dengan demikian, diharapkan ESG menjadi salah satu perhatian utama bagi Perusahaan.

To improve the quality of ESG implementation, the Board of Commissioners advises the Company to further increase transparency and reporting in ESG aspects in every channel owned by the Company. This includes the development of clearer and measurable performance indicators, as well as more effective communication of ESG achievements and challenges to stakeholders. In 2024 and in the future, the ultimate shareholder of the Company, the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs, has implemented Key Performance Indicators for the Company based on the ESG pillar. Therefore, it is hoped that ESG will become a main concern for the Company.

Dewan Komisaris juga menekankan agar *roadmap* dekarbonisasi dapat segera diimplementasikan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian komitmen *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia di tahun 2060. Terakhir dan yang tak kalah pentingnya, Dewan Komisaris juga menyarankan Perusahaan untuk senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, untuk mendapatkan wawasan dan mendukung inisiatif yang lebih inovatif.

The Board of Commissioners emphasizes that the decarbonization roadmap can be implemented immediately as an effort to support Indonesia's achievement toward Net Zero Emission (NZE) commitments by 2060. Last but not least, the Board of Commissioners also advises the Company to always collaborate with various parties, to gain insight and supporting more innovative.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam Penerapan *Whistleblowing System*

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) merupakan sebuah mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan Perusahaan. WBS dapat memungkinkan setiap Insan Perusahaan dan juga pihak eksternal untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, serta pelanggaran *code of conduct* yang melibatkan Insan Perusahaan.

Board of Commissioners' Views and Roles in Implementing the Whistleblowing System

The whistleblowing system (WBS) is a mechanism designed to prevent fraud within the Company. WBS can help employees and also external parties to report suspected fraud, legal violations, and violations of the code of conduct involving Company Personnel.

Dewan Komisaris menilai keberadaan WBS yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal sebagai mekanisme penting dalam mempertahankan integritas dan transparansi Perusahaan. Penerapan WBS ini mempunyai peran penting dalam mencegah dan mengidentifikasi masalah pada tahap awal, sehingga meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

The Board of Commissioners views the existence of the WBS as a part of the internal control system which is an important mechanism in maintaining the Company's integrity and transparency. The implementation of WBS has an important role in preventing and identifying problems at an early stage, thereby minimizing negative impacts on the Company.

Dengan dibentuknya Tim Pengelola WBS yang ditugaskan khusus untuk mengelola, memverifikasi, dan memproses semua laporan pengaduan yang masuk, Perusahaan menunjukkan keseriusannya dalam penerapan WBS. Penerapan ini juga didukung oleh penetapan pedoman melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06/DEKOM/VI11/2020 serta No. 395/0100/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran.

By establishing a WBS Management Team specifically assigned to manage, verify, and process all incoming complaint reports, the Company shows its earnestness in implementing WBS. This implementation is also supported by the establishment of guidelines through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 06/DEKOM/VI11/2020 and No. 395/0100/2020 on August 31, 2020, concerning Ratification of Violation Reporting System Guidelines.

Sebagai komitmen atas diterapkannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perusahaan juga didorong untuk terus melakukan *room of improvement* bagi pelaksanaan WBS. Di tahun 2024, Perusahaan yang tergabung dalam Grup MIND ID akan melakukan integrasi sistem WBS dengan sistem WBS yang dimiliki oleh holding dengan nama "OpenMIND",

As a commitment to the implementation of SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Company is also encouraged to make room for improvement for the implementation of WBS. In 2024, companies under the MIND ID Group will integrate the WBS system with the WBS system owned by the holding with the name "OpenMIND" which uses an independent

yang menggunakan pihak independen untuk melakukan pengelolaan WBS di Perusahaan. Dengan demikian, diharapkan ke depannya WBS Perusahaan dapat berjalan secara efektif dan independen.

Sampai saat ini, Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di lingkungan Perusahaan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar Perusahaan dapat terus meningkatkan efektivitas implementasi penerapan WBS.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) organ penunjang, yaitu Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR dan Nominasi, Remunerasi & PSDM (Dimana sejak tanggal 15 Desember 2023 Komite tersebut dipecah menjadi 2 yaitu (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dan (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi). Komite Audit memiliki fungsi utama untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit, guna mendapatkan kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Sedangkan, Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR dan Nominasi, Remunerasi & PSDM membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut termasuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta memastikan proses nominasi dan pengembangan SDM, serta persiapan pascatambang yang dilaksanakan secara efektif, objektif dan transparan.

Dewan Komisaris mengapresiasi kontribusi penting dari seluruh komite dalam mendukung tugas pengawasan dan memberikan saran strategis. Komite-komite ini telah menunjukkan kinerja yang solid dalam membantu Dewan Komisaris memahami dan menangani tantangan yang dihadapi Perusahaan.

Dewan Komisaris menilai kinerja komite berdasarkan keefektifan mereka dalam memberikan pandangan dan rekomendasi, serta seberapa baik mereka mengidentifikasi dan merespon isu-isu kritis yang mempengaruhi perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 18 kali, sedangkan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR dan Nominasi, Remunerasi & PSDM melakukan rapat sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran anggota Komite yang sangat baik. Hasil rapat tersebut menjadi dokumentasi bagi Dewan Komisaris untuk melihat kinerja masing-masing anggota komite.

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris, sekali lagi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

party to manage the WBS in the Company. It is hoped that in the future the Company's WBS can run effectively and independently.

To date, the Board of Commissioners assessed that the implementation of WBS within the Company has gone well. However, the Board of Commissioners asked the Company to improve the effectiveness of WBS implementation.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 2 (two) supporting organs, namely the Audit Committee and the Business Risk, Post-Mining, CSR and Nomination, Remuneration & HCD Committee (as of December 15, 2023, the Committee was split into two: (i) Integrated Risk Monitoring and Governance Committee and (ii) Nomination and Remuneration Committee). The Audit Committee is responsible to monitor and evaluate audit planning and implementation as well as to monitor follow-up to audit results, in order to obtain adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process. Meanwhile, the Business Risk, Post-Mining, CSR and Nomination, Remuneration & HCD Committees assist the Board of Commissioners to ensure the proper implementation of GCG. This includes ensuring the effectiveness of the implementation of risk management, while ensuring that the nomination and human resource development process, as well as post-mining preparations are carried out effectively, objectively, and transparent.

The Board of Commissioners appreciates the important contribution of all committees in supporting supervisory duties and providing strategic advice. These committees have demonstrated solid performance in assisting the Board of Commissioners in understanding and addressing the challenges facing the Company.

The Board of Commissioners assesses the performance of committees based on their effectiveness in providing views and recommendations, and their ability to identify and respond to critical issues affecting the company.

In 2023, the Audit Committee held 18 meetings, while the Business Risk, Post-mining, CSR and Nomination, Remuneration & HCD Committees held 12 meetings, with a very good level of attendance of Committee members. The results of the meeting were used by the Board of Commissioners to review the performance of each member committee.

With all the duties carried out by all committee members, allow the Board of Commissioners, once again, to express their appreciation and gratitude.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris PTBA mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023, yang memutuskan sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pengakhiran masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/ Independen terhitung sejak tanggal 11 April 2023; dan
   b. Sdri. Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Irwandy Arif, dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
   a. Sdr. Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen; dan
   b. Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Irwandy Arif
Komisaris Independen	: Kurnia Toha
Komisaris Independen	: Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen	: Andi Pahril Pawi
Komisaris	: E. Piterdono Hz.
Komisaris	: Carlo Brix Tewu

Atas nama Perusahaan, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Agus Suhartono dan Ibu Devi Pradnya Paramita atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2023, the composition of the PTBA Board of Commissioners had changed according to the decision of the Annual General Meeting of Shareholders on June 15, 2023, which decided as follows:

1. Confirm the termination of the terms of office of the members of the Board of Commissioners as follows:
   a. Agus Suhartono as President/Independent Commissioner as of April 11, 2023; and
   b. Devi Pradnya Paramita as Commissioner as of March 21, 2023.
2. Transfer the duty of Irwandy Arif, from being Commissioner to become President Commissioner of PT Bukit Asam Tbk, with the remaining term of office continuing in accordance with the GMS decision regarding the appointment of the person concerned.
3. Appoint members of the Company's Board of Commissioners as follows:
   a. Kurnia Toha as Independent Commissioner; and
   b. Rahmat Hidayat Pulungan as Independent Commissioner.

Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner	: Irwandy Arif
Independent Commissioner	: Kurnia Toha
Independent Commissioner	: Rahmat Hidayat Pulungan
Independent Commissioner	: Andi Pahril Pawi
Commissioner	: E. Piterdono Hz.
Commissioner	: Carlo Brix Tewu

On behalf of the Company, we express our appreciation and gratitude to Agus Suhartono and Devi Pradnya Paramita for their dedication and contributions while serving as members of the Company's Board of Commissioners.

Penutup dan Apresiasi

Tantangan demi tantangan telah berhasil dilalui PTBA dengan baik. Tantangan tersebut menjadi pelajaran yang akan membuat PTBA menjadi semakin kuat di masa mendatang. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi kepada Perusahaan, khususnya kepada Direksi beserta seluruh Insan Perusahaan yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Perusahaan. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang.

Closing Remarks and Appreciation

PTBA has successfully overcome challenges in the past year. These challenges are lessons that will make us stronger in the future. The Board of Commissioners expressed appreciation to all parties who have contributed to the Company, especially to the Board of Directors and all Company Personnel who have worked hard with their dedications.

We also expressed our gratitude to the Shareholders for their trust and support, so we can carry out our duties and responsibilities. We also express our appreciation to all stakeholders who have placed their trust in the Company. Hopefully this good cooperation can continue and be improved in the future.

Jakarta, 16 April 2024
Jakarta, April 16, 2024
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

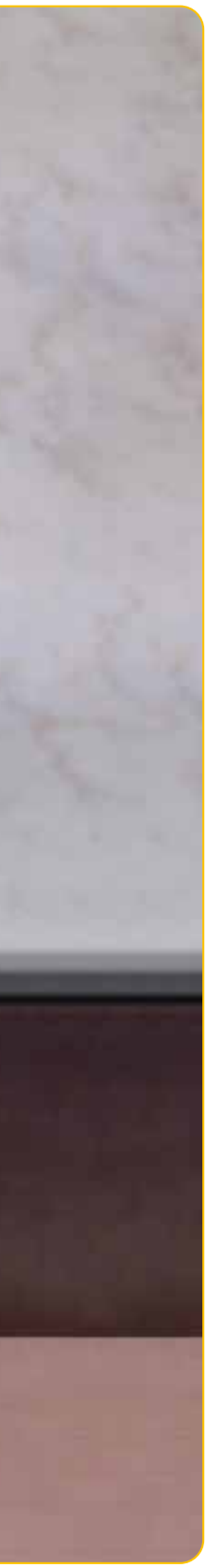


Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors



Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI
Direktur Utama | President Director



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PT Bukit Asam Tbk mampu melewati tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang baik.

Atas nama segenap Direksi dan jajaran manajemen, perkenankan kami menyampaikan pencapaian kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan selama tahun 2023 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan memberikan opini pada laporan konsolidasian disajikan secara "wajar" dalam semua hal yang material.

Analisis Ekonomi

Sepanjang tahun 2023, ekonomi global dan nasional menghadapi serangkaian tantangan dan peluang yang beragam. Pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 terus menjadi fokus utama, dengan dampak signifikan pada kebijakan moneter dan fiskal, serta pada tren ketenagakerjaan dan industri. Di sisi lain, gejolak politik dan geopolitik, termasuk konflik dan dinamika antar negara besar, turut berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi.

Selain itu, inflasi yang tinggi di banyak negara telah memaksa perubahan dalam kebijakan moneter, diantaranya kenaikan suku bunga yang berdampak pada penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Isu perubahan iklim dan kebutuhan transisi energi juga menjadi perhatian utama, khususnya untuk industri berbahan bakar fosil, sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor industri tersebut dan serapan investasi yang terlibat di dalamnya.

Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan ekonomi dan ketidakpastian politik, menambah kompleksitas permasalahan ekonomi yang ada.

Lembaga Dana Moneter Internasional dalam laporan *World Economics Outlook* yang dipublikasikan pada Januari 2024 mengestimasikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 mencapai 3,1%, atau melambat dari tahun sebelumnya 3,5%.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Let us send the highest praise and gratitude to the presence of Allah SWT for His blessings so that PT Bukit Asam Tbk was able to go through 2023 with brilliant achievements.

On behalf of the entire Board of Directors and management, please allow us to present the Company's performance achievements and management activities during 2023 along with financial reports that have been audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm by providing an opinion on the consolidated report which is presented "fairly" in all materials.

Economic Analysis

Throughout 2023, global and national economic conditions experienced a series of diverse challenges and opportunities. Recovery from the impact of the COVID-19 pandemic continues to be a key focus, with significant impacts on monetary and fiscal policy, as well as on employment and industrial trends. On the other hand, political and geopolitical turmoil, including conflicts and dynamics between large countries, also contribute to economic instability.

In addition, high inflation in many countries has forced changes in monetary policy, such as raising interest rates, which has resulted in decreased consumption and investment. The issue of climate change and the need for an energy transition is also a major concern, especially for the fossil fuel industry, which influences the growth of this industrial sector and the investment absorption involved in it.

On the other hand, global financial market uncertainty, which is influenced by various factors including changes in economic policies and political uncertainty, adds complexity to the existing economic scenario.

The International Monetary Fund in its World Economics Outlook report published in January 2024 projected global economic growth in 2023 to reach 3.1%, or decreased from the previous year's 3.5%.

Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan , diantaranya ditandai dengan menurunnya tren harga komoditas utama ekspor, namun ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,1%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,3%.

Berdasarkan realiasi angka pertumbuhan tersebut, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2023. Sementara itu, untuk Asia Tenggara secara keseluruhan, ADB dan the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office memperkirakan perekonomian di Asia Tenggara tumbuh secara kolektif sebesar 4,9% pada tahun 2023.

Industri Batu Bara

Pada tahun 2023, kondisi pasar batu bara dunia dan nasional mengalami beberapa dinamika penting. Pertama, terjadi penurunan tajam dalam indeks harga batu bara dunia, khususnya ICE Newcastle, dibandingkan dengan tahun 2022. Fenomena ini juga terlihat pada indeks harga batu bara yang digunakan di Indonesia, seperti HBA (Harga Batu bara Acuan) dan ICI (*Indonesia Coal Index*), yang mengikuti tren pelemahan yang sama. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan energi global, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dan kemungkinan perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi permintaan batu bara.

Di sisi lain, secara *supply-demand*, Indonesia tetap menjadi negara eksportir batu bara nomor satu di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan harga, posisi Indonesia dalam pasar batu bara global tetap kuat. Selanjutnya, pertumbuhan produksi batu bara di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menandakan bahwa sektor batubara Indonesia masih memiliki kapasitas produksi yang besar dan mampu memenuhi permintaan, baik domestik maupun internasional. Secara keseluruhan, walaupun terjadi penurunan harga di pasar global, kekuatan Indonesia sebagai eksportir utama dan peningkatan produksi menjadi faktor penting yang membentuk kondisi pasar batu bara di tahun 2023.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, PTBA menyadari semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh industri batu bara ke depannya. Transisi energi telah mereduksi prospek penggunaan batu bara dalam jangka panjang namun di saat yang sama membuka kesempatan pengembangan bisnis baru bagi Perusahaan seperti bisnis energi baru dan terbarukan serta bisnis hijau lainnya.

Isu-isu keberlanjutan menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam strategi bisnis Perusahaan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan

Amid global economic conditions which are experiencing a slowdown marked by declining trends in prices of main export commodities, the Indonesian economy is still able to grow quite strongly. Based on data from the Indonesian Statistics Indonesia, Indonesia's economic growth in 2023 increased by 5.1%, lower than the achievement in 2022 which experienced growth of 5.3%.

Based on the realization of these growth figures, the Asian Development Bank (ADB) estimated that the Indonesian economy would grow by 5.0% in 2023. Meanwhile, for Southeast Asia, the ADB and the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office estimated that the economy in Southeast Asia would grow collectively by 4.9% in 2023.

Coal Industry

In 2023, world and national coal market conditions experienced several important dynamics. First, a sharp decline in the global coal price index, especially ICE Newcastle, compared to 2022. This phenomenon can also be seen in the coal price indices used in Indonesia, such as HBA (Reference Coal Price) and ICI (Indonesia Coal Index), which followed the same weakening trend. This decline can be linked to various factors, including changes in global energy policy, increased utilization of renewable energy, and a possible global economic slowdown affecting coal demand.

In terms of supply-demand, Indonesia remains as the number one coal exporter in the world. This shows that despite the decline in prices, Indonesia's position in the global coal market remains strong. Furthermore, coal production growth in Indonesia showed an upward trend compared to 2022. This increase indicated that the Indonesian coal sector still has a large production capacity and is able to meet both domestic and international demands Overall, even though there has been a decline in prices on the global market, Indonesia's strength as a major exporter and increased production are important factors shaping coal market conditions in 2023.

Company Strategy and Strategic Policy

As one of the largest coal producers in Indonesia, PTBA is aware of the increasing challenges the coal industry faces in the future. The energy transition has reduced the prospects for using coal in the long term but, at the same time, has opened up new business development opportunities for the Company, such as new and renewable energy businesses and other green businesses.

Sustainability issues are an essential part that must be integrated into the Company's business strategy to ensure the long-term sustainability of the Company's business and

dalam jangka panjang serta peningkatan nilai tambah bagi pemangku kepentingan di masa depan.

Perusahaan saat ini berfokus pada upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta berusaha meningkatkan kapabilitas untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.

Kebijakan strategis perusahaan yang selaras dengan visi perusahaan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya. Perusahaan saat ini telah memperbarui kerangka strategi bisnis yang terdiri dari 4 (empat) pilar bisnis, yaitu: (1) Tambang, (2) Logistik, Infrastruktur dan *Trading*, (3) *Downstream,* Energi, dan Utilitas dan (4) *Green Business*.

Adapun di tahun 2023, beberapa aktivitas dalam kerangka 4 (empat) pilar tersebut antara lain:

1. **Pilar Tambang**
   Di bidang tambang, Perusahaan terus berupaya melakukan penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan melalui pemetaan atas potensi-potensi tambang yang ekonomis. Perusahaan juga berhasil meningkatkan produksinya ke angka tertinggi dalam sejarah Perusahaan. Perusahaan juga mendorong peningkatan produksi entitas anak perusahaan yaitu PT Internasional Prima Coal yang beroperasi di Kalimantan Timur. Secara operasional, Perusahaan juga terus melakukan optimasi penambangan yang ditunjukkan dengan keberhasilan menurunkan tingkat nisbah kupas menjadi 6,24 x (kali) dari target 6,31 x (kali). Selain itu, Perusahaan juga secara berkelanjutan aktif melakukan efisiensi biaya operasional dan upaya digitalisasi di *end-to-end* proses bisnis melalui melalui aplikasi CISEA.

2. **Pilar Logistik, Infrastruktur, dan *Trading***
   Peningkatan kapasitas angkutan batu bara merupakan salah satu prioritas utama bagi Perusahaan. Di tahun 2023, Perusahaan telah berhasil melakukan *groundbreaking Train Loading Station* (TLS) dan *Coal Handling Facility* (CHF) 6 dan 7 di Tanjung Enim pada tanggal 30 Desember 2023. *Groundbreaking* TLS ini merupakan satu kesatuan rangkaian pengembangan kapasitas angkutan batu bara melalui jalur kereta api relasi Tanjung Enim - Keramasan dengan potensi peningkatan kapasitas angkutan sebesar 20 juta ton per tahun. Proyek ini bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan akan beroperasi komersial pada tahun 2025.

3. **Pilar *Downstream,* Energi, dan Utilitas**
   Perusahaan terus berusaha melakukan diversifikasi portofolio bisnis di antaranya dengan menjajaki pengembangan bisnis energi, utilitas, dan hilirisasi batubara. Di bisnis energi, perusahaan masih mengembangkan bisnis pembangkit berbasis batu bara dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan di saat yang sama agresif menjajaki pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan.

increase added value for stakeholders in the future.

The Company is currently focusing on optimizing its existing resources and improving capabilities to support its business transformation and achieve the above goals.

The Company's strategic policies that are in line with the Company's vision are contained in the Company's long-term plan, which is then revealed in the Company's work plan and budget (WP&B) each year. The Company has currently updated its business strategy framework, which consists of 4 (four) business pillars, namely: (1) Mining, (2) Logistics, Infrastructure, and Trading, (3) Downstream, Energy, and Utility and (4) Green Business.

As for 2023, several activities within the framework of the 4 (four) pillars include:

1. **Mining Pillar**
   In the mining sector, the company strives to safeguard existing reserves and control reserves by mapping economic mining potentials. The company also increased its production to the highest figure in its history. The company also encourages increased production of its subsidiary, namely PT Internasional Prima Coal, which operates in East Kalimantan. Operationally, the company also continues to optimize mining, as demonstrated by the success of reducing the stripping ratio to 6.24 x (times) from the target of 6.31 x (times). Apart from that, the company is also continuously active in carrying out operational cost efficiency and digitalization efforts in end-to-end business processes through the CISEA application.

2. **Logistics, Infrastructure, and Trading Pillar**
   Increasing coal transportation capacity is one of the main priorities for the Company. In 2023, the Company successfully carried out the groundbreaking of the Train Loading Station (TLS) and Coal Handling Facility (CHF) 6 and 7 in Tanjung Enim on December 30, 2023. This TLS groundbreaking was a part of a series of developing coal transportation capacity via the Tanjung Enim-Keramasan railway with the potential to increase transportation capacity by 20 million tons per year. This project is in collaboration with PT Kereta Api Indonesia (Persero) which is expected to have commercial operations in 2025.

3. **Downstream, Energy, and Utility Pillars**
   The company continues to try to diversify its business portfolio, including by exploring the development of energy, utilities, and coal downstream businesses. In the energy business, the company is still developing its coal-based generating business with more environmentally friendly technology and is aggressively exploring the development of new and renewable energy businesses.

Di tahun 2023, PLTU Sumsel-8 berkapasitas 2x620 MW di bawah entitas PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan *joint venture company* antara PTBA dengan China Huadian Hong Kong Co., Ltd. (CHDHK) telah berhasil mencapai tahapan *Commercial Operation Date* (COD) pada tanggal 7 Oktober 2023. PLTU Sumsel-8 ini merupakan PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilengkapi dengan teknologi *supercritical* yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, PLTU Sumsel-8 juga menerapkan teknologi *Flue Gas Desulfurization* (FGD) untuk menekan emisi gas buang. Teknologi FGD ini selain dapat mengurangi sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, juga memproduksi gipsum sebagai produk yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. PLTU Sumsel-8 diestimasikan akan memanfaatkan batu bara low CV dari PTBA sebesar 4 hingga 5 juta ton per tahun.

In 2023, Sumsel-8 CFPP, with a capacity of 2x620 MW, will be under the entity PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), which is a joint venture company between PTBA and China Huadian Hong Kong Co., Ltd. (CHDHK) successfully reached the Commercial Operation Date (COD) stage on October 7, 2023. Sumsel-8 CFPP is the enormous mine mouth CFPP in Southeast Asia, and it is one of the National Strategic Projects, equipped with efficient and supercritical technology and environmentally friendly. Apart from that, Sumsel-8 CFPP also applies Flue Gas Desulfurization (FGD) technology to reduce exhaust gas emissions. Apart from reducing sulfur dioxide from exhaust emissions from coal-fired power plants, this FGD technology can also produce gypsum as a product that can be used as a construction material. It is estimated that Sumsel-8 CFPP will utilize low CV coal from PTBA, amounting to 4 to 5 million tons annually.

Perusahaan bersama entitas anak dan afiliasi perusahaan juga terus berupaya melakukan ekspansi bisnis di rantai nilai bisnis energi lainnya.

The company and its subsidiaries and affiliated companies continue to strive for business expansion in other energy business value chains.

Perusahaan tetap melanjutkan program hilirisasi batubara sebagai bagian dari mandat strategis negara dengan tetap mengutamakan keekonomian dari setiap proyek. Perusahaan terus menjajaki kerja sama dengan pemilik teknologi maupun peneliti untuk mengembangkan produk-produk turunan batu bara yang potensial untuk dikomersialisasi dalam jangka panjang. Beberapa inisiatif yang dilakukan salah satunya adalah kerja sama Perusahaan dengan Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN). Pada tanggal 2 Oktober 2023, Perusahaan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan BRIN untuk melakukan riset dan pengembangan, kajian teknologi energi dan industri berbasis batu bara, serta energi baru dan terbarukan. Beberapa proyek yang saat ini ada dalam *pipeline* Perusahaan, antara lain *Coal to DME, Coalite to Artificial Graphite* hingga *Coal to MEG*.

The company continues its coal downstream program as part of the state's strategic mandate while prioritizing each project's economics. The company continues to explore collaboration with technology owners and researchers to develop coal derivative products that have the potential to be commercialized in the long term. One of the initiatives is the company's collaboration with the National Research & Innovation Agency (BRIN). On October 2, 2023, the company signed a Memorandum of Understanding with BRIN to conduct research and development, study energy technology and coal-based industry, and new and renewable energy. Several projects currently in the company's pipeline include Coal to DME, Coalite to Artificial Graphite, and Coal to MEG.

4. Pilar *Green Business*

Perusahaan juga berupaya memperluas portofolio ke bisnis hijau. Pilar bisnis ini merupakan pilar baru bagi Perusahaan yang diyakini akan semakin berkembang ke depannya. Di tahun 2023, Perusahaan telah melakukan *soft launching* reklamasi bentuk lain untuk pengembangan budidaya kaliandra merah di Tanjung Enim. Kaliandra merah tersebut akan diolah menjadi *wood pellet* yang akan digunakan sebagai bahan bakar campuran batu bara (*co-firing*) di PLTU. Perusahaan juga aktif untuk menjajaki proyek karbon yang tidak hanya dapat mendukung upaya dekarbonisasi Perusahaan ke depan namun juga dapat dikomersialisasi untuk memberikan nilai tambah di masa depan.

4. Green Business Pillar

The company is also working to expand its portfolio into green businesses. This business pillar is a new pillar for the company, and it is believed to continue to develop in the future. In 2023, the company carried out a soft launch of another form of reclamation to develop red calliandra cultivation in Tanjung Enim. The red calliandra will be processed into wood pellets and used as coal-mixed fuel (co-firing) at the CFPP. The company is also actively exploring carbon projects that can not only support the company's future decarbonization efforts but can also be commercialized to provide added value.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

PTBA menghadapi sejumlah tantangan sepanjang tahun 2023, diantaranya penurunan indeks harga batu bara yang cukup dalam. Untuk mengurangi risiko akibat penurunan harga batu bara global, PTBA melakukan diversifikasi pasar /

Obstacles and Challenges

In 2023, PTBA faced several challenges, including a major decline in the coal price index. In order to reduce risks due to the decline in global coal prices, PTBA carried out market diversification/exploring new markets and expanding its

mengeksplorasi pasar baru dan memperluas basis pelanggan, sehingga meningkatkan stabilitas pendapatan. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan dengan melakukan optimalisasi penjualan batu bara tujuan ekspor dan terbukti volume penjualan ekspor di tahun 2023 mencapai 42% dari total penjualan atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 39%. Peningkatan volume penjualan ekspor tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan domestik dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional. Direksi berkomitmen secara penuh untuk mengatasi segala tantangan dengan menerapkan beberapa strategi yang efektif.

Analisis Kinerja Perusahaan

Di tengah tantangan penurunan harga batu bara global di sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja positif melalui berbagai strategi yang telah dijalankan yang didukung dengan perencanaan penambangan yang tepat, penerapan *Good Mining Practice* serta optimasi pangsa pasar ekspor.

Dari sisi kinerja operasional, sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil merealisasikan produksi dan pembelian batu bara sebesar 41,94 juta ton, meningkat 13% dari tahun sebelumnya sebesar 37,14 juta ton. Pencapaian tersebut, setara dengan 102% dari target yang ditetapkan sebesar 41,04 juta ton. Sedangkan untuk angkutan kereta api selama tahun 2023 telah terealisasi sebesar 32,42 juta ton dan meningkat 13% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 28,81 juta ton. Pencapaian tersebut, setara dengan 101% dari target yang ditetapkan sebesar 32,00 juta ton.

Volume penjualan batu bara Perusahaan di tahun 2023 mencapai 36,97 juta ton atau setara dengan 90% dari target yang ditetapkan sebesar 41,24 juta ton namun meningkat cukup signifikan dari realisasi tahun 2022 sebesar 31,65 juta ton. Komposisi penjualan ekspor dan domestik di tahun 2023, masing-masing sebesar 42% dan 58%. Porsi penjualan ekspor tahun 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 39%. Komposisi penjualan tersebut menunjukkan komitmen Perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara domestik yang sebagian besar ditujukan untuk pembangkit tenaga listrik, dengan tentunya tetap mengoptimalkan potensi *market* guna mendukung peningkatan pendapatan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp38,49 triliun atau menurun 10% dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,65 triliun. Realisasi pendapatan tersebut sedikit dibawah dari target yang ditetapkan sebesar Rp40,35 triliun. Sedangkan dari sisi biaya, terdapat kenaikan total biaya yaitu dari Rp28,03 triliun di tahun 2022 menjadi Rp31,92 triliun di tahun 2023. Kenaikan total biaya didorong oleh beberapa faktor, diantaranya peningkatan volume produksi, angkutan, penjualan, hingga perubahan aturan terkait tarif royalti. Kondisi tersebut berdampak pada koreksi terhadap laba bersih tahun 2023, yaitu menjadi Rp6,11 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp12,57 triliun. Serta koreksi terhadap total aset dari Rp45,36

customer base, thereby increasing revenue stability. The implementation of this policy is realized by optimizing coal sales for export purposes. In 2023, export sales volume reached 42% of total sales or an increase from the previous year of 39%. The increase in export sales volume was carried out while still paying attention to domestic needs to maintain national energy security. The Board of Directors is fully committed to overcome all challenges with the implementation of effective strategies.

Analysis of the Company Performance

In the midst of the challenges of decreasing global coal prices throughout 2023, the Company succeeded in recording positive performance through various implemented strategies supported by appropriate mining planning, the implementation of Good Mining Practices, and the optimization of export market share.

In terms of operational performance, throughout 2023, the Company succeeded in realizing coal production and purchase of 41.94 million tons, an increase of 13% from the previous year of 37.14 million tons. This achievement is equivalent to 102% of the target set at 41.04 million tons. Meanwhile, rail transportation in 2023 has been realized at 32.42 million tons, an increase of 13% compared to the realization in 2022 of 28.81 million tons. This achievement is equivalent to 101% of the target set at 32.00 million tons.

The Company's coal sales volume in 2023 reached 36.97 million tons or equivalent to 90% of the target set at 41.24 million tons. However, this achievement is a significant increase from the realization in 2022 of 31.65 million tons. The composition of export and domestic sales in 2023 were 42% and 58% respectively. The portion of export sales in 2023 also increased compared to 2022 which was only 39%. This sales composition shows the Company's commitment in meeting domestic coal needs, which mostly used for electricity generation, while still continuing to optimize market potential to support increased Company revenue.

Throughout 2023, the Company managed to record revenue of Rp38.49 trillion or a decrease of 10% from the previous year of Rp42.65 trillion. The realization of this income was slightly below the target set at Rp40.35 trillion. Meanwhile, there was an increase in total costs, namely from Rp28.03 trillion in 2022 to Rp31.92 trillion in 2023. The increase in total costs is driven by several factors, including increases in production volume, transportation, sales, and changes in rules regarding royalty fees. This condition has an impact on the correction of net profit in 2023, namely to Rp6.11 trillion from the previous year of Rp12.57 trillion. As well as corrections to total assets

triliun per 31 Desember 2022 menjadi Rp38,77 triliun per 31 Desember 2023.

Terlepas dari kinerja keuangan yang terkoreksi akibat harga batu bara global, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang efektif, termasuk efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, dan inovasi dalam pengembangan produk. Perusahaan aktif memantau dinamika pasar dan secara proaktif menyesuaikan strategi bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

Prospek Usaha Perusahaan

Industri batu bara diyakini masih memiliki prospek cerah untuk beberapa tahun ke depan, meski di tengah tren transisi energi dan komitmen iklim untuk menurunkan emisi karbon yang menjadi tantangan terberat. Mengacu pada Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) Indonesia, batu bara diperkirakan masih akan menjadi salah satu sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia hingga tahun 2060. Harga batu bara global di tahun 2023 yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, diproyeksikan tidak banyak berubah di tahun 2024. Perusahaan meningkatkan target operasional di tahun 2024 yaitu produksi batu bara 41,34 juta ton angkutan 33,69 juta ton dan penjualan batu bara 43,11 juta ton. Selain itu, PTBA berpotensi mendapatkan keuntungan dari implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP), melalui kompensasi atas kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan batu bara domestik untuk mendukung ketahanan energi nasional.

PTBA juga menargetkan 30% dari *revenue stream* Perusahaan akan berasal dari bisnis energi di tahun 2030. Hal tersebut termasuk diversifikasi ke dalam pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta inisiatif Manajemen Karbon. Strategi ini sejalan dengan tren global untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dasar penyusunan prospek ini didasarkan pada RJPP PTBA, yang telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti proyeksi ekonomi makro dunia, peta bauran energi global, dan target *Net Zero Emission* (NZE) di negara-negara dunia, terutama negara-negara pengimpor batu bara. Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang efektif, termasuk efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, dan inovasi dalam pengembangan produk. Perusahaan aktif memantau dinamika pasar dan secara proaktif menyesuaikan strategi bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

Peranan Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi serta Kebijakan Strategis

Direksi bersama jajaran manajemen merumuskan target usaha, anggaran, strategi, dan kebijakan strategis sebelum tahun berjalan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang didasarkan pada asumsi perkembangan kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, indikator

from Rp45.36 trillion as of December 31, 2022, to Rp38.77 trillion as of December 31, 2023.

Despite the corrected financial performance due to global coal prices, the Company is committed to implement effective strategies, including operational efficiency, revenue diversification, and innovation in product development. The Company actively monitors market dynamics and proactively adjusts business strategies to suppress negative impacts and improve future growth potential.

Company Business Prospects

The coal industry is believed to have bright prospects for the next few years, amidst the energy transition trend and climate commitments to reduce carbon emissions which are the toughest challenges. Referring to Indonesia's Grand National Energy Strategy, coal is predicted to remain one of the main energy sources for electricity generation in Indonesia until 2060. Global coal prices in 2023, which experienced a contraction compared to the previous year, are projected to not change much in 2024. The company has increased its operational targets in 2024, namely coal production to 41.34 million tons, transportation to 33.69 million tons, and coal sales to 43.11 million tons. In addition, PTBA has the potential to benefit from the implementation of Management Agency Partners, through compensation for contributions in meeting domestic coal needs to support national energy security.

PTBA also targets 30% of the Company's revenue stream to come from the energy business by 2030. This includes diversification into New and Renewable Energy generation as well as Carbon Management initiatives. This strategy is in line with the global trend to switch to more sustainable and environmentally friendly energy sources.

The basis for preparing this prospect is based on PTBA's long term plan, which has considered various factors such as world macroeconomic projections, global energy mix map, and Net Zero Emission (NZE) targets in world countries, especially coal importing countries. The company is committed to implementing effective strategies, including operational efficiency, revenue diversification, and innovation in product development. The company actively monitors market dynamics and proactively adjusts business strategies to minimize negative impacts and maximize future growth potential.

Roles of the Board of Directors in the Formulation and Implementation of Strategy and Strategic Policy

The Board of Directors together with the management team formulate business targets, budgets, strategies, and strategic policies before the current year in the form of a Company Work Plan and Budget (WP&B) based on assumptions about developments in external and internal conditions. External conditions may include economic growth projections,

makro ekonomi, kondisi sosial, serta kondisi pasar dan persaingan usaha. Sedangkan kondisi internal antara lain mencakup kesiapan sumber daya manusia, kapasitas produksi, dan data historis penjualan.

Penyusunan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dalam upaya mencapai target dilakukan secara seksama dan komprehensif. Direksi berperan penting dalam perumusan sekaligus memastikan terwujudnya kebijakan strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

- Merumuskan visi, misi, dan strategi Perusahaan, serta menerjemahkannya ke dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek, serta memimpin pelaksanaannya;
- Memastikan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan;
- Mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang handal dalam mitigasi risiko;
- Memastikan adanya pengelolaan dan pengendalian risiko yang tepat dalam Perusahaan.

Direksi memastikan seluruh strategi tersebut dapat terimplementasi dengan baik dengan senantiasa melakukan *monitoring*, diantaranya dengan menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin yang mengundang pimpinan satuan kerja terkait, sehingga kebijakan Perusahaan dapat tersampaikan ke semua pegawai. Sepanjang tahun 2023, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 36 kali dan 13 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Direksi menilai penerapan implementasi strategi yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang terintegrasi dengan visi, misi, serta strategi Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan SDM agar dapat mendukung perkembangan bisnis dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan *best practices* pengelolaan SDM yang berlaku, baik itu domestik maupun internasional. Di samping itu, dalam rangka menjawab setiap tantangan dan tahapan pengembangan bisnis Perusahaan, SDM PTBA senantiasa melakukan peningkatan dalam penguasaan teknologi, *skill set* dan *mindset* yang dibutuhkan, untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja Perusahaan. PTBA telah menyusun kebijakan strategi pengelolaan SDM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pengelolaan SDM 2023-2027 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Peremajaan *workforce* dengan memperhatikan persentase gender perempuan dan milenial dalam *nominated talent.*
2. Pengembangan talenta dengan optimalisasi program *Talent Mobility* yang diinisiasi oleh MIND ID untuk kepemimpinan PTBA yang berkelanjutan.
3. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai melalui mekanisme strategis *Learning Organization Culture.*

macroeconomic indicators, social conditions, market conditions, and business competition. Meanwhile, internal conditions include, among other things, human resource readiness, production capacity, and historical sales data.

The preparation of the Company's strategy and strategic policies in an effort to achieve targets must be carried out carefully and comprehensively. The Board of Directors plays an important role in formulating and ensuring the realization of established strategic policies, including:

- Formulate the Company's vision, mission, and strategy, and translate them into long-term and short-term plans, and lead their implementation;
- Ensure that the implementation of the formulated strategy meets all applicable laws and regulations and the Company's internal regulations;
- Design and implement a reliable internal control system for risk mitigation;
- Ensure the readiness of appropriate risk management and control within the Company.

The Board of Directors ensures that all these strategies must be properly implemented by consistent monitoring, including by holding regular Board of Directors meetings by inviting the heads of relevant work units, to deliver all Company policies to all employees. Throughout 2023, the Board of Directors held 36 meetings and 13 joint meetings with the Board of Commissioners. The Board of Directors assesses that the implementation of the Company's strategy is in accordance with the direction and policies set out in the WP&B.

Human Capital Development

The Company always carries out management and development of Human Capital (HC). which is integrated with the Company's vision, mission, and strategy. In addition, the Company strives to always improve the quality of HC management to support business development while still referring to statutory regulations and HR management best practices applied both domestically and internationally. In order to respond to every obstacle and stage of the Company's business development, PTBA's HC always makes improvements in mastering the technology, skill-set, and mindset needed, to strengthen and improve the Company's performance. PTBA has developed a strategic HC management policy as stated in the 2023-2027 HC Management Strategic Plan with targets namely:

1. Workforce rejuvenation by paying attention to the percentage of women and millennials in nominated talent.
2. Talent development by optimizing the Talent Mobility program initiated by MIND ID for sustainable PTBA leadership.
3. Developing employee capabilities and competencies through the strategic mechanism of Learning Organization Culture.

4. Meningkatkan Kapabilitas Talenta SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Membangun budaya berbasis kinerja.
6. Sistem manajemen (digital) HR dan *Workforce Planning* berbasis *Data Driven*.
7. Transformasi Struktur Organisasi Berkinerja Tinggi.

Perusahaan telah meluncurkan program pendidikan dan pengembangan pegawai untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas operasional dan kedewasaan organisasi. Hal ini bertujuan agar Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Program ini tidak hanya berfokus pada kemampuan dan kompetensi pegawai, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti sistem manajemen, kebijakan, strategi, dan peraturan.

Dalam konteks ini, Perusahaan memahami pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang berlaku di Perusahaan. Salah satunya adalah Program Profesi dan Sertifikasi, yang merupakan investasi jangka panjang Perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa depan. Program ini telah disesuaikan dengan Rencana Pelatihan tahunan yang dibuat berdasarkan *Individual Development Plan* (IDP) masing-masing pegawai.

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi seluruh pegawai. Hal ini sejalan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) 24 *Learning Hours* yang telah diterapkan PTBA sejak tahun 2020. Dimana seluruh pegawai wajib mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis maupun non teknis minimal sebanyak 24 jam selama satu tahun.

Teknologi Informasi

Dari segi pengembangan teknologi informasi, PTBA telah mengambil langkah menuju digitalisasi dalam operasional penambangan. Sejak tahun 2020, Perusahaan telah memperkenalkan aplikasi bernama Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA) yang memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap kegiatan pertambangan melalui perangkat seluler. CISEA adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai sistem, termasuk Integrasi Sistem *Automation* & SCADA, Sistem Optimasi *Dispatcher* Pertambangan PTBA, Stasiun Pemuatan Kereta Otomatis, Radar Stabilitas Lereng, Telemetri Digital, Sistem Pemantauan Air Terintegrasi, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Transformasi digital ini adalah bagian dari upaya PTBA untuk menerapkan kaidah penambangan yang baik (*Good Mining Practice*), yang juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis. PTBA juga telah memperoleh hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk aplikasi CISEA dengan perlindungan selama 50 tahun sejak diumumkan.

PTBA memahami bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal dapat membantu Perusahaan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu,

4. Increasing the capabilities of quality and competitive HC talent.
5. Building a performance-based culture.
6. Data Driven (digital) HC and Workforce Planning management system.
7. High Performance Organizational Structure Transformation.

The Company has launched an employee education and development program to prepare human capital to increase operational productivity and organizational maturity. This aims to help the Company becomes more effective and efficient in achieving its vision and mission. This program does not only focus on employee abilities and competencies, but also to other aspects such as management systems, policies, strategies, and regulations.

In this context, the Company fully recognizes the importance of education and training programs for employees to meet the technical and regulatory requirements applicable to the Company. One of them is the Professional and Certification Program, which has been the Company's long-term investment in improving future performance. This program has been adapted to the annual Training Plan which is created based on each employee's Individual Development Plan (IDP).

The Company is always committed to increase the knowledge, capacity, and competence of all employees. This is in line with the 24 Learning Hours Key Performance Indicator (KPI) which has been applied by PTBA since 2020, where all employees are required to receive training and development of technical and non-technical competencies for a minimum of 24 hours for one year.

Information Technology

In terms of information technology development, PTBA has taken steps towards digitalization in mining operations. Since 2020, the Company has introduced an application called Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA) which allows real-time monitoring of mining activities via mobile devices. CISEA is an application that integrates various systems, including Automation & SCADA System Integration, PTBA Mining Dispatcher Optimization System, Automatic Train Loading Station, Slope Stability Radar, Digital Telemetry, Integrated Water Monitoring System, and Corporate Social Responsibility (CSR).

This digital transformation is part of PTBA's efforts to implement Good Mining Practice, which also increases business efficiency and sustainability. PTBA has also obtained copyright from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for the CISEA application with protection for 50 years from the time it was announced.

PTBA understands that optimal use of Information Technology can help the Company to achieve sustainable business growth. Therefore, the Company always allocates investment

Perusahaan selalu mengalokasikan investasi ke dalam teknologi informasi sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan dan pengembangan teknologi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam proses bisnis.

Pada tahun 2023, realisasi anggaran investasi di bidang TI naik hampir dua kali lipat. Adapun investasi yang dilakukan Perusahaan untuk pengembangan TI meliputi: pembangunan *tower* jaringan data, *refreshment core switch hub*, pembangunan *display monitoring* informasi, *refreshment storage dan server* CCTV, *middleware data integration*, dan pembangunan *interactive monitoring meeting room.*

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Komitmen terhadap Aspek ESG

Direksi berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas Perusahaan. Hal ini ditujukan dengan arahan Direksi untuk terus memonitor penerapan GCG, mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) di tahun 2021 dan ketentuan ASEAN Corporate Governance (ACGS). Tujuan dilakukannya kegiatan *monitoring* agar Perusahaan dapat melengkapi seluruh *soft structure* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG, serta melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada demi meningkatkan penerapan GCG.

GCG menjadi arahan sekaligus panduan dalam setiap tahapan kegiatan operasional Perusahaan. Menyadari akan arti penting penerapan GCG, Perusahaan berusaha secara terus-menerus membangun kesadaran di semua organ dan level organisasi, termasuk bagi jajaran manajemen puncak hingga karyawan. Penerapan GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Selain itu, komitmen Perusahaan dalam membudayakan praktik-praktik terbaik GCG diaktualisasikan dengan terus berupaya mengakomodasi adanya perubahan yang dinamis dan bersikap terbuka terhadap konsep-konsep baru. Oleh karena itu, keberadaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai kebijakan yang dianggap perlu untuk terus diperbaharui secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan serta isu-isu internal dan eksternal Perusahaan. Hal ini tercermin dari ratifikasi atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang mana semakin mendorong Perusahaan untuk meningkatkan implementasi tata kelola korporat menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Pada tahun 2023 ini, Direksi melanjutkan komitmennya terhadap penerapan prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG) dalam Perusahaan, dengan cara mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi dan kegiatan operasional. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna mengurangi dampak lingkungan, memperkuat

for information technology as a form of commitment to technology management and development in order to increase effectiveness, efficiency, and productivity in its business processes.

In 2023, the realization of the investment budget in the IT sector was almost doubled. The investments made by the Company for IT development include: construction of data network towers, refreshment core switch hubs, construction of information monitoring displays, refreshment storage and CCTV servers, middleware data integration, and construction of interactive monitoring meeting rooms.

Implementation of Corporate Governance and Commitment to ESG Aspects

The Board of Directors is fully committed to implement the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG) in every Company activity. This was based on the Board of Directors' direction to continue monitoring the implementation of GCG, referring to the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance determined by the National Committee for Governance Policy in 2021 and the provisions of the ASEAN Corporate Governance (ACGS). The purpose of monitoring activities is to accommodate the Company completing all soft structures that are adapted to applicable regulations and best practices for GCG implementation, as well as conducting studies for existing improvements in order to improve GCG implementation.

GCG is a direction and guide in every implementation of the Company's operational activities. Realizing the importance of GCG implementation, the Company strives to continuously build awareness in all organs and levels of the organization, including from top management to employees. The implementation of GCG is based on 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Company's commitment to cultivate best GCG practices is realized by accommodating dynamic changes and being open to new concepts. Therefore, the existence of the Corporate Governance Policy is a policy that is deemed necessary to continue to be updated periodically and adapted to developments and internal and external issues of the Company. This is reflected in the ratification of SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which further encourages the Company to improve the implementation of corporate governance in the future.

In 2023, the Board of Directors continued its commitment to implement Environment, Social, and Governance (ESG) principles within the Company, by integrating ESG principles into strategy and operational activities. These efforts were made to reduce environmental impacts, strengthen involvement with local communities, and improve corporate

keterlibatan dengan masyarakat lokal, dan meningkatkan tata kelola perusahaan, serta sebagai langkah penting dalam mendukung pencapaian visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Sehubungan dengan performa ESG yang sedemikian pentingnya dalam bisnis Perusahaan, Direksi membentuk Komite ESG sebagai pembaharuan dari tim ESG yang sebelumnya sudah ada. Pembentukan komite tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan fokus dan akuntabilitas dalam prinsip ESG. Komite terbukti telah memainkan peran kunci khususnya dalam mengidentifikasi area prioritas, mengawasi inisiatif ESG, dan memastikan integrasi prinsip-prinsip ini dalam keputusan bisnis. Direksi menghargai kerja keras dan dedikasi Komite tersebut dalam mengarahkan Perusahaan menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satu *output* dari Komite ini adalah *roadmap* dekarbonisasi, yang mana menunjukkan keseriusan Perusahaan dalam upayanya untuk mendukung pencapaian komitmen *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia di tahun 2060.

Atas upaya dan inisiatif Perusahaan di sepanjang tahun 2023 yang lalu dalam penerapan prinsip ESG, PTBA mendapatkan apresiasi berupa penilaian/rating yang positif dari Lembaga terkait, baik dari dalam maupun luar negeri. PTBA berhasil mempertahankan rating "BB" dari penilaian yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dan rating "B" dari Carbon Disclosure Project (CDP). Kemudian, penilaian ESG *Risk Rating* dari Morningstar Sustainalytics, PTBA mendapatkan nilai 31,5 (yang terbaik di Indonesia jika dibandingkan dengan *peers*) dan mempertahankan kelas risikonya tetap di kategori tinggi. Terakhir, penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait indikator ESG Perusahaan adalah 78,5 dari skor maksimal 100 dengan kategori baik.

governance, as well as being an important step in supporting the achievement of PTBA's vision of becoming a world-class energy company that cares about the environment.

Related to the importance of ESG performance in the Company's business, the Board of Directors formed an ESG Committee as a renewal of the previously existing ESG team. The formation of the Committeeis an important step to increase focus and accountability in ESG principles. The Committee is proven to have played a key role in in identifying priority areas, overseeing ESG initiatives, and ensuring the integration of these principles in business decisions. We appreciate the Committee's hard work and dedication in supporting the Company towards more sustainable and responsible practices. One of the outputs of this Committee is a decarbonization roadmap, which shows the Company's seriousness in its efforts to support Indonesia's achievement of Net Zero Emission (NZE) commitments by 2060.

Based on the Company's efforts and initiatives throughout 2023 in implementing ESG principles, PTBA received appreciation in the form of positive assessments/ratings from related institutions, both domestic and foreign. PTBA succeeded in maintaining its "BB" rating from the assessment issued by Morgan Stanley Capital International (MSCI). And a "B" rating from the Carbon Disclosure Project (CDP). Then, in the ESG Risk Rating assessment from Morningstar Sustainalytics, PTBA received a score of 31.5 (the best in Indonesia when compared with peers) and maintained its risk class in the high category. Lastly, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)'s assessment regarding the Company's ESG indicators was 78.5 out of a maximum score of 100 in the good category.

Perubahan Komposisi Direksi

Tahun 2023, komposisi Direksi PTBA tidak mengalami perubahan. Dengan demikian susunan Direksi PTBA per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arsal Ismail
Direktur Operasi dan Produksi	: Suhedi
Direktur Pengembangan Usaha	: Rafli Yandra
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Farida Thamrin
Direktur Sumber Daya Manusia	: Suherman

Changes in Board of Directors Composition

In 2023, there was no change in the composition of the PTBA Board of Directors. Therefore, the composition of PTBA's Baord of Directors as of December 31, 2023 as follows:

President Director	: Arsal Ismail
Operations and Production Director	: Suhedi
Business Development Director	: Rafli Yandra
Finance and Risk Management Director	: Farida Thamrin
Human Resources Director	: Suherman

Penutup

Tahun 2023 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui Perusahaan dengan baik. Atas nama Direksi, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sehingga memungkinkan Perusahaan meraih kinerja yang positif.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berharga dan senantiasa membimbing langkah kami dalam menjalankan amanat untuk mengelola dan menghasilkan nilai-nilai terbaik. Kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja, Perusahaan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan, sehingga PTBA senantiasa dapat terus berkembang sebagai Perusahaan yang berprestasi dan berintegritas. Seluruh pencapaian ini akan menjadi pondasi bagi PTBA untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

Final Words

The Company has successfully navigated the year 2023, which was full of challenges. On behalf of the Board of Directors, we give the highest appreciation to all employees who have worked with great dedication, thus enabling the Company to achieve such good performance.

We also express our gratitude to the Board of Commissioners and Shareholders who have provided valuable direction and advice while guiding our steps in carrying out our mandate to manage and produce the best values. To all stakeholders and work partners, the Company expresses its appreciation and gratitude for the good cooperation that has been established so far.

With full optimism, let us continue to work and innovate to improve the Company's capabilities, so we can develop as a Company with achievements and integrity. All of these achievements will become the foundation for PTBA to optimize its potential and achieve its best performance in the future.

Jakarta, 16 April 2024
Jakarta, April 16, 2024
Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors



Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI
Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bukit Asam Tbk

Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for 2023 Annual Report of PT Bukit Asam Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk tahun buku 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all the information contained in the 2023 Annual Report of PT Bukit Asam Tbk has been disclosed completely and we are fully responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 16 April 2024
Jakarta, April 16, 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc
Komisaris Utama
President Commissioner

Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ir. E. Piterdono Hz, S.E., M.M.
Komisaris
Commissioner

Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Directors

Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI
Direktur Utama
President Director

Farida Thamrin, S.T.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Ir. Suhedi
Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Suherman, S.E., Ak., M.M.
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director



Profil Perusahaan
Company Profile

Perusahaan terus melakukan pengembangan dan perkuatan organisasi untuk mendukung tujuannya dalam penyediaan energi bersih agar dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

The Company continues to develop and strengthen its organization to support its goals of providing clean energy in order to achieve sustainable business growth.




03

Identitas dan Informasi Umum Perusahaan

Company Identity and General Information

Nama Perusahaan | Company Name
PT Bukit Asam Tbk

Kode Saham | Ticker Code
PTBA

Status Perusahaan | Company status
Perusahaan Terbatas/Perusahaan Publik
Limited Liability Company/Public Company

Bidang Usaha | Line of Business
Tambang Batu Bara dan Lainnya
Coal Mining and Others

Tanggal Pendirian | Founding Date
2 Maret 1981
March 2, 1981

Modal Dasar | Authorized Capital
Rp4.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid
Rp1.152.065.925.000

Kontak Perusahaan | Company Contact
Sekretaris Perusahaan: corsec@bukitasam.co.id
Corporate Secretary
Hubungan Investor : fcitraning@bukitasam.co.id
Investor Relations

Media Sosial | Social Media
Facebook : PT Bukit Asam Tbk
Twitter : @BukitAsamPTBA
Instagram : @bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Website | Website
www.ptba.co.id

Telepon : + 62 734 451 096, 452 352
Phone
Faksimile : +62 734 451 095, 452 993
Faximile

Sistem Pengaduan | Whistleblowing System
Email : spp@bukitasam.co.id
Phone : +62 21 527 4635

Kepemilikan Saham | Shareholders Composition
- **Pemerintah Indonesia (0,00% - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna)**
- **PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (65,93% - 7.595.650.695 lembar saham seri B)**
- **PT Bukit Asam Tbk (Saham Treasuri) (0,29% - 33.449.900 lembar saham seri B)**
- **Masyarakat (33,78% - 3.891.558.650 lembar saham seri B)**

- Indonesian Government (0,00% - 5 Series A Dwiwarna shares)
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (65.93% - 7,595,650,695 Series B shares)
- PT Bukit Asam Tbk (Treasury Stocks) (0.29% - 33,449,900 Series B shares)
- Public (33.78% - 3,891,558,650 Series B shares)

Pencatatan Saham | Shares Listing
Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2002
Listed in Indonesia Stock Exchange on December 23, 2002

Jumlah Karyawan | Number of Employees
1.561 orang
1,561 people

Produk dan Jasa | Products and Services
- **Batu bara**
- **Lainnya, di antaranya briket, listrik, sawit, jasa kesehatan, kontraktor jasa penambangan, jasa kepelabuhan, dan jasa angkutan perairan untuk batu bara.**

- Coal
- Others, include briquettes, electricity, palm oil, health services, mining service contractors, port services and water transportation services for coal.

Perubahan Nama | Name Changes
- **1919 – Tambang Air Laya**
- **1950 – Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA)**
- **1981 – PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero)**
- **2002 – PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk**
- **2017 – PT Bukit Asam Tbk**

Jaringan Kelompok Usaha | Business Group Network
- **8 Entitas Anak melalui Kepemilikan Langsung**
- **8 Entitas Anak melalui Kepemilikan Tak Langsung**
- **1 Entitas Asosiasi**
- **3 Entitas Ventura Bersama**

- 8 Subsidiaries through Direct Ownership
- 8 Subsidiaries through Indirect Ownership
- 1 Associate
- 3 Joint Ventures

Pasar yang Dilayani I Market Served

Pasar yang dilayani perusahaan yaitu untuk kebutuhan domestik (Indonesia) dan kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia dan non Asia seperti India, Korea Selatan, Tiongkok, Kamboja, Vietnam, Jepang, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Filipina, Malaysia, serta pasar baru di Brunei Darussalam dan Australia.

Markets served by the Company are for domestic needs (Indonesia) and export needs to Asia and non Asian countries such as India, South Korea, China, Cambodia, Vietnam, Japan, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Philippines, Malaysia, as well as new markets in Brunei Darussalam and Australia.

Dasar Hukum Pendirian I Legal Entity Establishment

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang batubara Bukit Asam, dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama.

Government Regulation No. 42 of 1980 concerning the Republic of Indonesia State Equity Participation for the Incorporation of Tambang Batubara Bukit Asam State-Owned Enterprise, with the Notarial Deed of Mohammad Ali No. 1 dated March 2, 1981 which has been amended by the Notarial Deed No. 5, dated March 6, 1984 and No. 51, dated May 29, 1985, with the same notary.

Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Operasi
Head Office Address and Operation Location

Kantor Pusat, Tanjung Enim
Head Office, Tanjung Enim
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim Muara Enim, Sumatera Selatan
Indonesia 31716
T (0734) 451 096, 452 352
F (0734) 451 095, 452 993

Kantor Perwakilan Jakarta
Jakarta Representative Office
Menara Kadin Indonesia, Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950
T (021) 525 4014
F (021) 525 4002

Unit Pertambangan Tanjung Enim
Tanjung Enim Mining Unit
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan 31716
T (0734) 451 096, 452 352
F (0734) 451 095, 452 993

Unit Pertambangan Ombilin
Ombilin Mining Unit
Jl. Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat
T (0754) 61 021
F (0754) 61 402

Unit Pelabuhan Tarahan
Tarahan Port Unit
Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Tarahan, Bandar Lampung
T (0721) 31 545, 31 686
F (0721) 31 577

Unit Dermaga Kertapati
Kertapati Pier Unit
Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan
T (0711) 512 617
F (0711) 511-388

Pelabuhan Teluk Bayur
Teluk Bayur Port
Jl. Tanjung Periuk No. 1 Teluk Bayur, Sumatera Barat
T (0751) 62 522, 63 522, 31 996
F (0751) 63 533

Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History

PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "PTBA", secara resmi berdiri pada 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam, kemudian dikukuhkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/363/4 tanggal 7 Juni 1982. Perusahaan memiliki sejarah panjang seiring dengan sejarah penambangan batu bara di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, yang dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1919.

PT Bukit Asam Tbk, hereinafter referred to as "Company" or "PTBA" was officially established on March 2, 1981, based on Government Regulation No. 42 of 1980 concerning the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of the Bukit Asam Coal Mining Company (Persero) which then confirmed through Deed of Notary Mohamad Ali No. 1 dated March 2, 1981, and has obtained approval from the Minister of Justice in Decree No. YA 5/363/4 of June 7, 1982. The Company has a long history along with the history of coal mining in Tanjung Enim, Muara Enim, South Sumatra, which was started by the Dutch Colonial Government in 1919.

1918

Ahli penambangan Belanda, R. Everwijn, melakukan penelitian di wilayah Tanjung Enim dan menemukan cadangan antrasit yang cukup besar. Penambangan batu bara pertama dilakukan di Air Laya dengan sistem penambangan terbuka *(open pit mining)*. Hasil penambangan digunakan untuk kepentingan Belanda dalam memenuhi permintaan Eropa. Pengangkutan batu bara dilakukan menggunakan kereta api yang disebut Babaranjang. Kereta api Babaranjang merupakan kereta api batu bara dengan rangkaian gerbong yang panjang. Sampai saat ini, Babaranjang masih digunakan untuk mengangkut batu bara.

A Dutch mining expert, R. Everwijn, conducted research in Tanjung Enim and found large reserves of anthracite. The first coal mining was carried out at Air Laya using an open pit mining system. Mining results were used for the Dutch interests in meeting demand from Europe. Coal was transported using a train called Babaranjang. The Babaranjang train is a coal train with a long series of carriages and is still used to transport coal.

1923

Penambangan batu bara di Air Laya mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah (*underground mining*).

Coal mining in Air Laya began using an underground mining method.

1938

Hasil produksi batu bara mulai dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

The results of coal production began to be used for commercial purposes.

Seluruh tambang batu bara di Tanjung Enim diambil alih oleh Pemerintah Jepang yang pada saat itu sedang menguasai Indonesia. Hasil penambangan digunakan sepenuhnya untuk mendukung mobilitas para tentara Jepang di Indonesia.

All of the coal mines in Tanjung Enim were taken over by the Japanese Government, which at this time had succeeded in ruling Indonesia. Mining profit were used to support the mobility of Japanese soldiers in Indonesia.

1942

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam. Sejak saat itu, nama perusahaan dikenal sebagai PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) disingkat PTBA. Perubahan status tersebut dikukuhkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/363/4 tanggal 7 Juni 1982.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia berusaha mengambil alih kembali seluruh aset dan wilayah operasional perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Karyawan di penambangan batu bara Air Laya menuntut perubahan status menjadi pertambangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan penambangan batu bara Air Laya sebagai Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

After Indonesia's independence, the Indonesian Government tried to restore the entire assets and operational areas of companies that exploited Indonesia's natural wealth. Employees at the Air Laya coal mining demanded a change in the status of the mine to a national mine. The Government then legalized Air Laya coal mining as Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA).

1950

1981

Based on Government Regulation No. 42 of 1980 concerning the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Tambang Batu Bara Bukit Asam Company, since then, the Company's name has been known as PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) or PTBA. The change in status was confirmed by Mohamad Ali Notarial Deed No. 1 dated March 2, 1981, and has obtained approval from the Minister of Justice in Decree No. YA5/363/4 dated June 7, 1982.

PTBA

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan suatu Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai perusahaan holding di Bidang Pertambangan ("Holding Pertambangan") dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal efektif pendirian, Holding Pertambangan akan memiliki saham pada perusahaan (Anggota Holding) sebagai berikut:

- secara langsung saham Seri B terbanyak pada PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium; serta
- secara langsung dan tidak langsung saham pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd.

In December 2022, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 45 of 2022 concerning Reduction of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Limited Liability Company (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminum and Government Regulation No. 46 of 2022 concerning Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector. Furthermore, the Minister of Finance has also issued Decree No. 516/KMK.06/2022 concerning the Determination of the Value of the Republic of Indonesia's State Equity Participation for the Establishment of Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector. In regard to these regulations, the Indonesian Government established a Limited Liability Company (Persero) as a holding company in the Mining Sector by taking into account prevailing provisions. On the effective date of establishment, the Mining Holding will own shares in the company (Holding Member) as follows:

- directly, Series B shares in PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminum; as well as
- directly and indirectly, shares in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd.

Pada tanggal 21 Maret 2023, menindaklanjuti dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan dan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, Negara Republik Indonesia mendirikan BUMN Induk Industri Pertambangan dengan nama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang merupakan induk dari PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium dan memiliki saham secara langsung pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd

On March 21, 2023, following up on Government Regulation No. 46 of 2022 concerning State Capital Inclusion of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector and Decree No. 516/KMK.06/2022 concerning the Determination of the Capital Investment Value of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Mining Sector, the Indonesian Government established an SOE Mining Holding with the name PT Mineral Industri Indonesia (Persero) which is the parent of PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminum and owns shares directly in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd.

2022

Sehubungan dengan bergabungnya PTBA dalam holding industri pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Perusahaan melakukan integrasi logo dengan induk perusahaan yang menunjukan eksistensi dari identitas holding industri pertambangan.

In connection with the joining of PTBA in the Mining Industry Holding led by PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), the Company integrated the logo with the parent company which shows the existence of the Mining Industry Holding identity.

2023

Perusahaan memasuki babak baru dengan resmi bergabung bersama PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk dalam Holding BUMN Pertambangan dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk holding. Bergabungnya Perusahaan ke dalam holding tersebut memberikan efek domino dalam kebijakan Perusahaan, di antaranya dengan perubahan nama dan status PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi PT Bukit Asam Tbk. Bergabungnya Perusahaan ke dalam Holding BUMN Pertambangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara yang lebih efektif, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan.

The Company entered a new chapter by officially joining PT Aneka Tambang Tbk and PT Timah Tbk in the SOE Mining Holding with PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the parent holding. The Company's incorporation into the holding also brought a domino effect on Company policy, including changing the name and status of PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk to PT Bukit Asam Tbk. The joining of the Company to the SOE Mining Holding was expected to increase business capacity and funding, more effective management of mineral and coal natural resources, increase added value through downstreaming and increasing local content, as well as cost efficiency from the synergies carried out.

2019

2017

Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batu bara di Indonesia, melalui PP No. 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batu bara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero), maka Pemerintah Indonesia membubarkan Perum Tambang Batu Bara dan melakukan penambahan penyertaan Modal Negara ke dalam saham Perusahaan. Dengan demikian, Bukit Asam menjadi perusahaan batu bara satu-satunya yang dimiliki negara.

In order to increase the development of the coal industry in Indonesia, through Government Regulation No. 56 of 1990 dated October 30, 1990, concerning the Dissolution of the General Coal Mining Company and the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Into the Company's Shares, the Indonesian Government dismissed the Public Coal Mining Company and made additional State Capital participation into the Company's shares. Thus, Bukit Asam became the only state-owned coal company.

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pemerintah menugaskan Perusahaan untuk mengembangkan usaha briket batu bara.

In accordance with the national energy security development program, the government assigned the Company to develop a coal briquette business.

1990

1993

2002

Perusahaan melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*) kepada masyarakat sebanyak 346.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran sebesar Rp450 per saham. Dengan demikian, sejak 23 Desember 2002, saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker saham "PTBA". Kemudian nama Perusahaan berubah menjadi PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.

The Company made an initial public offering of 346,500,000 shares with a nominal value of Rp500 per share and an offering price of Rp450 per share. Thus, since December 23, 2002, the Company's shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange with ticker code "PTBA". The Company changed its name to PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

Informasi Perubahan Nama dan Status Badan Hukum Perusahaan

Information on Changes in Name and Legal Entity Status of the Company

No	Nama Name	Alasan Perubahan Reason of Change	Tanggal Efektif Perubahan Date of Change
1	Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA)	Nasionalisasi Aset oleh Pemerintah Republik Indonesia atas tambang terbuka Air Laya, Tanjung Enim, yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1919 dan mengesahkan pembentukan perusahaan. Asset Nationalization by the Indonesian Government for Air Laya open pit mining, Tanjung Enim, which was established by the Dutch Colonial Government in 1919.	1950
2	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Berubah status menjadi Perseroan Terbatas, Perubahan status tersebut dimuat pada Akta Notaris Muhammad Ali, S.H., No. 1 tanggal 2 Maret 1981. Change of status into a Limited Liability Company, as amended in Notarial Deed of Muhammad Ali, S.H., No. 1 dated March 2, 1981.	2 Maret 1981 March 2, 1981
3	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Perusahaan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga statusnya menjadi Perusahaan Terbuka dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk yang dimuat pada Akta Notaris Nila Noordjasman Seoyasa Besar, S.H., No. 18 tanggal 14 Oktober 2002. The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and became a public company under the name PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk as published in Notarial Deed of Nila Noordjasman Seoyasa Besar, S.H., No. 18 dated October 14, 2002.	14 Oktober 2002 October 14, 2002
4	PT Bukit Asam Tbk	Perusahaan bergabung dengan Holding Industri Pertambangan dengan pemindahan saham seri B mayoritas yang dimilikl oleh Pemerintah Indonesia ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sehingga status perusahaan menjadi Non-Persero dengan nama PT Bukit Asam Tbk. Perubahan ini dimuat pada Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 78 tanggal 29 November 2017. The Company joined the Mining Industry Holding by transferring the majority series B shares owned by the Indonesian Government to PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero). The Company's status changed into Non-Persero under the name PT Bukit Asam Tbk. This change was contained in Notarial Deed Fathiah Helmi, S.H., No. 78 dated November 29, 2017.	29 November 2017 November 29, 2017



Logo dan Moto Perusahaan
Company's Logo and Motto

Logo Perusahaan terdiri dari dua komponen yang menjadi satu kesatuan yang harus dirangkaikan dan tidak boleh ditampilkan secara terpisah. Komponen tersebut terdiri dari Logo Simbol dan Logo Nama. Penggunaan logo perusahaan ditentukan dengan Surat Keputusan Direksi No. 556/0100/2021 tentang Panduan Dasar Identitas PT Bukit Asam Tbk.

The Company's logo consists of two components that form as one unit that must be assembled and should not be displayed separately. These components consist of a symbol logo and a name logo. The use of the company logo is determined by the Decree of the Board of Directors No. 556/0100/2021 on the Basic Guide to the Identity of PT Bukit Asam Tbk.

Simbol logo Bukit Asam menggambarkan Bumi, Tanah, dan Matahari. Simbol ini berasal dari huruf "B" dan ditransformasikan secara abstrak menjadi simbol matahari yang terbit dari bumi (dalam hal ini Bukit Asam) yang mencerminkan awal dari masa depan yang cerah. Warna kuning mencerminkan matahari (energi), warna biru mencerminkan "*Corporate Image*" yang menunjukkan pengalaman dan jati diri yang tangguh, serta warna merah kecoklatan menunjukkan lingkungan yang subur.

The logo describes the Earth, Ground, and the Sun. It is derived from the letter 'B' abstractly transformed into a symbol of the sun rising from the Earth (in this case, Bukit Asam), representing the beginning of a bright future. Yellow means the Sun (energy), blue for "Corporate Image" represents strong experience and strong, and brownish red represents a fertile soil.

Kata Bukit Asam digunakan sebagai nama logo, dirangkaikan pada simbol logo sebelah kanan dengan bagian bawah huruf sejajar dengan simbol. Nama logo yang dirangkaikan dengan simbol logo merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

The logo name, which reads Bukit Asam, is combined with the logo symbol on the right side and the bottom letter parallel to the symbol. Both name and symbol are integral units.

Dalam rangka penyeragaman dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan anggota *holding* lainnya, Perusahaan melakukan penyesuaian dengan menambahkan konfigurasi MIND ID pada logo Bukit Asam.

Lambang MIND ID yang diletakkan pada sisi kanan atas konfigurasi logo Bukit Asam memiliki makna bahwa pada sisi solid melambangkan kekayaan alam yang kita eksplorasi dan kita manfaatkan bagi semua dan sisi sinergi melambangkan komitmen seluruh anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan demi Indonesia.

To match with Mining Industry Indonesia (MIND ID) and other Holding members, the Company added the MIND ID configuration to the logo.

The MIND ID symbol is placed on the right side of the Bukit Asam logo. The solid part symbolizes the natural wealth we explore and use for all Indonesians, and the synergy part represents the commitment of all members to work together to achieve our goals for Indonesia.

Visi dan Misi Perusahaan
Company Vision and Mission



VISI
Vision

Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Becoming a world-class energy company that cares about the environment.

Mengelola Sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi *stakeholder* dan lingkungan.

Managing energy sources by developing corporate competencies and human excellence to provide maximum added value for stakeholders and the environment.



MISI
Mission

Review Visi dan Misi oleh Manajemen

Visi dan Misi Perusahaan ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan. Pernyataan terkait Visi dan Misi Perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 15/SK/PTBAKOM/XII/2013 dan No. 336/KEP/Int-0100/PW.01/2013 telah mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan *review* dan menilai bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih relevan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan bisnis tahun 2023 serta arah dan tujuan bisnis Perusahaan.

Management Review on the Vision and Mission

The Company's Vision and Mission are determined and enforced through periodic reviews to ensure their relevance to the development of the Company's business environment. Statements related to the Vision and Mission as contained in the Decree of the Board of Directors No. 15/SK/PTBAKOM/XII/2013 and No. 336/KEP/Int-0100/PW.01/2013 which have obtained joint approval from The Board of Commissioners and The Board of Directors. Prior to the publication of this annual report, Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed and assessed that the Company's Vision and Mission are still relevant to the developments and conditions of the business environment in 2023 as well as the direction and objectives of the Company's business.

Hierarki Tata Nilai Bukit Asam

Bukit Asam Hierarchy of Values

AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given

HARMONIS
Saling peduli menghargai perbedaan
Care for each other, respect differences

ADAPTIF
Terus beinovasi dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
Continuously innovate in driving or facing changes



KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continuously learn and develop capabilities

LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Dedicated and prioritize the interests of the nation

KOLABORATIF
Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation

Pada tanggal 14 Februari 2022, MIND ID mengeluarkan Surat Edaran No. SE-001/DIRHK/2022 Tentang Penetapan Core Values AKHLAK & Key Behaviors MIND ID sebagai Budaya Perusahaan. Surat Edaran tersebut menyeleraskan dan menetapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) sumber daya manusia BUMN AKHLAK, yaitu Amanah; Kompeten; Harmonis; Loyal; Adaptif; dan Kolaboratif menjadi *Core Values* MIND ID.

Setiap Anggota MIND ID wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN, AKHLAK, beserta panduan perilakunya menjadi Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di masing-masing perusahaan yang dituangkan dalam berbagai program Pengembangan budaya dan nilai perusahaan guna memastikan proses transformasi pembentukan budaya di seluruh lapisan insan MIND ID dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

On February 14 2022, MIND ID issued Circular Letter No. SE-001/DIRHK/2022 Concerning The Determination of Core Values AKHLAK & Key Behaviors MIND ID as Company Culture. This Circular Letter harmonizes and determines the Core Values of SOEs' AKHLAK namely: Trust; Competent, Harmonious; Loyal; Adaptive; and Collaborative as MIND ID's Core Values.

Each MIND ID Member is obliged to apply the Core Values (Core Values) of SOEs' Human Capital, AKHLAK, along with their behavioral guidelines as Corporate Culture and become the basis for forming the character of human capital in each company as outlined in various Development programs company culture and values. This step aims to ensure that the transformation process of culture formation at all levels of MIND ID people can continue sustainably.

PTBA terus berupaya menginternalisasi Tata Nilai Perusahaan sesuai dengan arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah menetapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai utama, sekaligus pembentukan karakter di seluruh lingkungan BUMN. Dengan mentransformasi AKHLAK ke dalam Tata Nilai Perusahaan, diharapkan dapat menuntun segenap insan Perusahaan untuk lebih optimal dan berjalan lebih terarah di masa depan.

PTBA continues to internalize its Corporate Values in line with the directive from the Ministry of State-Owned Enterprises that has established AKHLAK as the core values and character building throughout the SOEs environment. By transforming AKHLAK into the Corporate Values, it is expected to guide all Company employees to be more optimal and focused in the future.

Panduan Perilaku "AKHLAK"
Code of Conduct of "AKHLAK"

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Statements	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Code of Conduct
Amanah Trust	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan We uphold the trust given	• Integritas • Tulus • Konsisten • Dapat Dipercaya • Integrity • Sincerity • Consistency • Trustworthy	• Memenuhi janji dan komitmen • Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan • Berpegang teguh pada nilai moral dan etika • Fulfill promises and commitments • Responsible for tasks, decisions, and actions taken • Firmly uphold moral and ethical values
Kompeten Competent	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas We continuously learn and develop capabilities	• Kinerja Terbaik • Sukses • Keberhasilan • *Learning Agility* Ahli di Bidangnya • Best performance • Success • Accomplishment • Learning Agility Expert in own field	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik • Increasing self-competency to respond to ever-changing challenges • Helping others to learn • Completing tasks with highest quality
Harmonis Harmonious	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan We care for each other and respect difference	• Peduli • Perbedaan • Caring • Diversity	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif • Respect everyone regardless of their background • Helpful • Build a conducive work environment
Loyal Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara We Dedicate and prioritize the interests of the nation	• Komitmen • Dedikasi (rela berkorban) • Kontribusi • Commitment • Dedication (willing to sacrifice) • Contribution	• Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar • Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika • Maintain the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State • Willing to make sacrifices to achieve a greater goal • Obey the leaders as long as this does not conflict with law and ethics
Adaptif Adaptive	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan We continuously innovate and are enthusiastic in driving or facing changes	• Inovasi • Antusias terhadap perubahan • Proaktif • Innovation • Enthusiastic for change • Proactive	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi • Bertindak proaktif • Quickly adjust so as to improve • Continuously make improvements following technological developments • Act proactively
Kolaboratif Collaborative	Kami membangun kerja sama yang sinergis We build synergistic cooperation	• Kesediaan bekerja sama • Sinergi untuk hasil yang lebih baik • Willingness to cooperate • Synergy for better results	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama • Provide opportunities for various parties to contribute • Open-minded in team work to produce added value • Mobilize the use of various resources for common goals

THE NOBLE PURPOSE OF MIND

Mining Industry Indonesia sebagai Induk dari PTBA telah menetapkan *Noble Purpose "We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity, and a Brigther Future"*.

THE NOBLE PURPOSE OF MIND

Mining Industry Indonesia (MIND ID) as a holding company of PTBA has regulated one Noble Purpose, namely "We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity, and a Brighter Future".

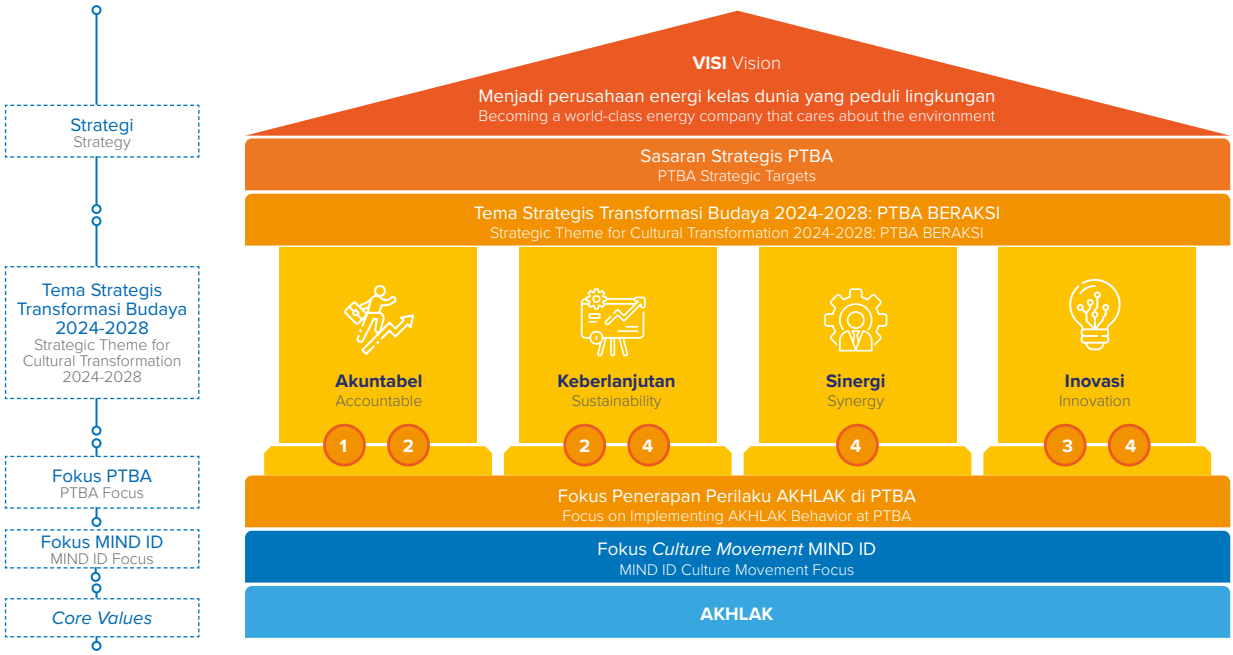
KEY BEHAVIORS OF MIND ID	
AGILE Tanggap terhadap Tantangan Baru Responsive Towards New Challenges	Selalu terbuka, *flexible* dan mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Tantangan menjadi alat untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan maju. Always being open to, flexible with, and adaptive to new challenges. Challenges become a means of innovation, creative thinking, and going forward.
GOING EXTRA MILES Bekerja Melalui *Target Performing* *Performing Beyond Targets*	Semangat untuk bekerja cerdas dan mengupayakan hasil kerja nyata sesuai target atau bahkan melebihi target demi kepentingan Perusahaan. Striving to work smart and to give the real result of efforts, following the targets, or even exceeding the targets, for the best interests of the Company.
ACCOUNTABLE Bertindak dengan Penuh Tanggung Jawab Act Responsibly	Memastikan setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensuring that all actions taken are fully accountable and are in line with prevailing legislations and regulations.

Kerangka Transformasi Budaya PTBA

Sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai AKHLAK BUMN dan *Key Behaviour* MIND ID, PTBA juga telah menyusun langkah strategis untuk transformasi budaya PTBA, sehingga insan PTBA memiliki visi budaya ke depan. Hal tersebut sebagaimana tergambarkan pada Kerangka Transformasi Budaya PTBA Tahun 2024-2028 yang dikemas dalam nilai "AKSI".

PTBA Cultural Transformation Framework

As a reflection of SOEs' AKHLAK values and MIND ID's Key Behavior, PTBA has developed strategic steps for cultural transformation. This aims to instill a cultural vision for the future among PTBA employees. The PTBA Cultural Transformation Framework for 2024-2028 is encapsulated in the "AKSI" value.



Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai Perusahaan

Perusahaan senantiasa melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi nilai inti Perusahaan dalam rangka memberikan pengetahuan (*knowing*) dan menanamkan serta meningkatkan pemahaman (*understanding*) seluruh Insan Perusahaan mengenai nilai inti Perusahaan. Agar Budaya Perusahaan dapat menyatu dengan perilaku Insan Perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi Budaya Perusahaan dengan menjalankan sesuai dengan tahapan pada Panduan AKHLAK *Culture Journey* (SK Menteri BUMN No. SK-115/MBU/05/2022) dan membagi pendekatannya pada 3 elemen utama, yakni:

Socialization and Internalization of Corporate Values

PTBA always conducts socialization and internalization programs for the corporate core values to provide knowledge and increase understanding of all company personnel regarding the core values. In order to integrate with the behavior of company personnel in daily business activities, the Corporate Culture socialization and internalization is done according to the stages in AKHLAK Culture Journey Guide (Minister of SOE Decree No. SK-115/MBU/05/2022). The approach is divided into 3 main elements, namely:

Leadership (Leaders Behaviour)

Perusahaan melibatkan para pemimpin baik *Formal Leaders*, manajemen dan pemimpin struktural dari satuan kerja dan tim maupun *Informal Leaders* atau agen-agen perubahan untuk menjadi role model dalam menjalankan *Key Behaviour* serta memastikan setiap Pegawai memahami Visi, Misi, *Noble Purpose* dan Nilai-Nilai Perusahaan.

The Company involves leaders, both Formal Leaders, management and structural leaders from work units and teams as well as Informal Leaders or agents of change to become role models in implementing Key Behavior and ensuring that every employee understands PTBA's Vision, Mission, Noble Purpose, and Corporate Values.

System

Perusahaan memastikan sistem organisasi dan manajemen SDM yang digunakan dapat mendorong terwujudnya budaya perusahaan yang diharapkan. Oleh karenanya, dilakukan penyelarasan BSC-KPI pada pelaksanaan program di elemen ini.

The Company ensures that the organizational and human capital management systems used can encourage the realization of the expected corporate culture. Therefore, KPI alignment is conducted in the implementation of programs in this element.

Symbol

Perusahaan menggunakan atribut fisik maupun digital untuk dapat menjadi pengingat Insan Perusahaan tentang budaya yang sedang dikembangkan.

The Company uses both physical and digital attributes to remind employees about the company culture that is being developed.

Bidang Usaha
Line of Business



Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir mengalami perubahan dan disahkan melalui Akta Nomor 61 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang pengembangan bahan galian, terutama pertambangan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Company Purposes and Objectives

Following Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended and ratified by Deed No. 61 dated June 15, 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU.AH.01.03-0090409 dated July 12, 2023, regarding the Receipt of Notification of the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk and the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0138986 dated 12 July, 2023, Regarding Receipt of Notification of Changes to PT Bukit Asam Tbk Company Data. The aim and objective of the Company is to carry out business in the field of mineral development, especially coal mining in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce high quality and competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan lingkup sebagai berikut:

Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

The Company conduct business activities with the following scope:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
Kegiatan Usaha Utama Main Business Activities			
1. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan galian terutama batu bara, antara lain: Engaged in mining, which includes general probing, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and mineral trading, especially coal; among others:			• Kegiatan huruf a.1, 2, 4 dilakukan oleh PTBA sendiri. • Kegiatan huruf a.1 dilakukan juga oleh entitas anak PT Internasional Prima Coal • Kegiatan huruf a.3 dilakukan oleh entitas anak PT Satria Bahana Sarana • Kegiatan a.5 dilakukan oleh entitas anak seperti PT BAMO dan PT BAME. • Activity in letter a.1, 2, 4 is conducted by PTBA • Activity in letter a.1 is also conducted by a subsidiary, PT Internasional Prima Coal. • Activity in letter a.3 is run by a subsidiary, PT Satria Bahana Sarana • Activity a.5 is conducted by subsidiary, PT BAMO and PT BAME
a. Pertambangan batu bara; Coal mining;	√		
b. Penggalian batu hias dan batu bahan bangunan; Excavation of decorative stone and building material stone;	√		
c. Pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya; Mining and other quarrying which are not included in others;	√		
d. Pertambangan Lignit; Lignite Mining;	√		
e. Pertambangan Gas Alam. Natural gas mining.	√		
2. Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara di atas, antara lain: Engaged in advanced processing of minerals, especially coal, among others:			Kegiatan dilakukan oleh PTBA sendiri melalui Pabrik Briket di Tanjung Enim dan Lampung This activity is run by PTBA through the Briquette Factories in Tanjung Enim and Lampung.
a. Industri briket batu bara; Coal briquette industry;	√		
b. Industri Produk dari batu bara; Coal product industry;		√	
c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Basic organic chemical industry originating from petroleum, natural gas and coal.		√	
3. Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri antara lain perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar. Trading production results in connection with sub a and sub b businesses, both self-produced and produced by other parties, and in national and international markets, among others wholesale trading of basic chemical materials and goods.	√		Dijalankan oleh PTBA sendiri dan juga dilakukan oleh entitas anak PT Bukit Asam Prima. Run by PTBA and is also conducted by a subsidiary, PT Bukit Asam Prima
4. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan terminal (pelabuhan dan/atau dermaga) untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, antara lain: Manage and/or operate terminals (ports and/or Barging Ports) both for own needs or other parties, among others:			Aktivitas No. 1 dan 2 telah dijalankan oleh Perusahaan sendiri dengan memiliki 3 (tiga) pelabuhan dan/atau dermaga batu bara yaitu (a) Dermaga Kertapati, Palembang, (b) Pelabuhan Tarahan Lampung, dan (c) Dermaga Teluk Bayur, Padang dan melalui entitas anak PT Bukit Prima Bahari, dan PT Penajam Internasional Terminal. Activity No. 1 and 2 are run by PTBA by owning three coal ports and/or Barging Ports, namely (a) Kertapati Barging Port, Palembang, (b) Tarahan Lampung Port, and (c) Teluk Bayur Barging Port, Padang and through subsidiaries, PT Bukit Prima Bahari and PT Penajam Internasional Terminal.
a. Aktivitas pelayanan pelabuhan laut; Sea port service activities	√		
b. Aktivitas pelayanan pelabuhan sungai dan danau. River and lake port service activities	√		

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
5. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, antara lain: Manage and/or operate coal power plants or others, both for own needs and for other parties, among others:			Aktivitas e.1-8 dilakukan dengan: Pengusahaan dan/atau pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya, telah dijalankan oleh Perusahaan sendiri dengan mengoperasikan PLTU Tanjung Enim dengan kapasitas listrik sebesar 3x10 MW dan PLTU Tarahan dengan kapasitas 2x8 MW. • Kegiatan usaha ini juga dijalankan oleh entitas ventura bersama, yaitu PT Bukit Pembangkit Innovative dengan kapasitas 2x110 MW nett dan saat ini tengah mengembangkan PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2x620 MW melalui PT Huadian Bukit Asam Power Kegiatan usaha ini juga dijalankan oleh entitas ventura bersama, yaitu PT Bukit Pembangkit Innovative dengan kapasitas 2x110 MW nett dan saat ini tengah mengembangkan PLTU Sumsel 8 dengan kapasitas 2x620 MW melalui PT Huadian Bukit Asam Power. Activity point e.1-8 is conducted by: concession and/or operation of steam power plants or others, is conducted by the Company by operating Tanjung Enim power plant with a capacity of 3x10 MW and Tarahan power plant with a capacity of 2x8 MW. • This business activity is also carried out by a joint venture entity, namely PT Bukit Pembangkit Innovative with a capacity of 2x110 MW nett and is currently developing the Sumsel 8 CFPP with a capacity of 2x620 MW through PT Huadian Bukit Asam Power. This business activity is also carried out by a joint venture entity, namely PT Bukit Pembangkit Innovative with a capacity of 2x110 MW nett and is currently developing the Sumsel 8 CFPP with a capacity of 2x620 MW through PT Huadian Bukit Asam Power.
a. Pembangkitan tenaga listrik; Power plant;	√		
b. Transmisi tenaga listrik; Electricity power transmission;	√		
c. Distribusi tenaga listrik; Electricity power distribution;	√		
d. Penjualan tenaga listrik; Electricity power trade;	√		
e. Pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; Generation, transmission, distribution and sales of electricity in one business unit;	√		
f. Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; Generation, transmission, and sales of electricity in one business unit;	√		
g. Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu; Distribution and Sales of Electricity in one business unit;	√		
h. Kesatuan Usaha. Business Unity.	√		
6. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta hasil-hasil olahannya, antara lain: Providing consulting and engineering services related to coal mining and its processed products, among others:			Aktivitas huruf f. 1 sd 3 yaitu Aktivitas mencangkup aktivitas *holding* yang dilakukan oleh entitas anak PT Bukit Multi Investama dan juga melalui entitas anak PT Bukit Energi Investama serta PT Bukit Asam Prima Activity point f. 1 to 3, namely activities including holding activities are carried out by the subsidiary PT Bukit Multi Investama and also through subsidiary PT Bukit Energi Investama and PT Bukit Asam Prima.
a. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; Other management consulting activities;	√		
b. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu; Engineering activities and technical consulting related;	√		
c. Aktivitas konsultasi manajemen industri. Industrial management consulting activities.	√		
Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business Activities			
1. Optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas pada Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan aset baik itu tanah, bangunan, atau bentuk aset lainnya. Optimization and utilization of resources, which are not limited to optimization and utilization of assets, be it land, buildings, or other forms of assets.	√		Optimasi dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana telah dijelaskan, dijalankan oleh Perusahaan dengan melakukan aktivitas sewa menyewa, BOT dan skema lainnya untuk aset-aset yang tersebar di Provinsi Sumatra Selatan, Sumatra Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Optimization and utilization of resources as described, are conducted by the Company by carrying out leasing activities, BOT and other schemes for assets spread across the Provinces of South Sumatra, West Sumatra, DKI Jakarta, and East Java.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
2. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi yang tidak terbatas pada: Water management, waste water management, waste management and recycling, and remediation activities, which is not limited to:			Seluruh aktivitas dilakukan oleh PTBA sendiri dalam menjalankan kegiatan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan melalui PT Nasional Hijau Lestari (entitas asosiasi PTBA). All activities are run by PTBA in carrying out activities according to the 2020 Indonesia Standard Industrial Classification and through PT Nasional Hijau Lestari (PTBA associated entity).
a. Pengumpulan air limbah berbahaya; Collection of hazardous waste water;	√		
b. *Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya; Treatment and disposal of hazardous waste water;	√		
c. Pengumpulan limbah berbahaya; Collection of hazardous waste;	√		
d. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya; Collection of waste and non-hazardous waste;	√		
e. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, pengolahan, pembuangan, dan pemanfaatan limbah B3; Management of hazardous and toxic waste (B3) including collection, transportation, stockpiling, processing, disposal, and utilization of B3 waste;	√		
f. *Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya; Treatment and disposal of hazardous waste;	√		
g. Pemulihan material barang bukan logam; Material recovery of non-metallic goods;	√		
h. Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; Storage, purification, and distribution of drinking water;	√		
i. Penampungan dan penyaluran air baku; Storage and distribution of raw water;	√		
j. Pemulihan barang bukan logam; Non-metallic goods recovery;	√		
k. Produksi kompos organik; Production of organic compost;	√		
l. Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. Activities of remediation and management of waste and other waste.	√		
3. Real Estate yang tidak terbatas pada: Real Estate, which is not limited to:			Aktivitas c.2 dilakukan oleh entitas anak PT Bukit Multi Properti Activity c. 2 is run by a subsidiary, PT Bukit Multi Properti.
a. Kawasan Industri; Industrial area		√	
b. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Owned or rented real estate.	√		
4. Informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada menjalankan penyiaran radio oleh swasta; Information and communication, which is not limited to radio broadcasting by private sector;	√		Aktivitas ini dilakukan oleh PTBA sendiri untuk memenuhi ketentuan KBLI 2020. This activity is run by Bukit Asam to comply with the 2020 KBLI regulation.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Business Activities Conducted Based on the Articles of Association

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Telah Dijalankan Implemented	Belum Dijalankan Not yet Implemented	Keterangan Description
5. Pengangkutan dan pergudangan yang tidak terbatas pada: Transportation and warehousing, which is not limited to:			• Aktivitas e.2 dan 3 dijalankan oleh PT Bukit Asam Prima Bahari dan PT Penajam Internasional Terminal. • Untuk kegiatan usaha e.5 dan e.7 dijalankan oleh PT Bukit Asam Transpacific Railways (namun belum beroperasi). • Activities e.2 and 3 are carried out by PT Bukit Asam Prima Bahari and PT Penajam Internasional Terminal. • Business activities e.5 and e.7 are run by PT Bukit Asam Transpacific Railways (but not yet operational).
a. Angkutan bermotor untuk barang khusus; Motorized transportation for special goods;		√	
b. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; Domestic sea transportation for special goods;	√		
c. Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus; River and lake transportation for special goods;	√		
d. Aktivitas kebandarudaraan; Airport activities;		√	
e. Angkutan jalan rel untuk barang; Railroad transportation for goods;	√		
f. Angkutan penyeberangan lainnya untuk barang termasuk penyeberangan antarnegara; Other ferry transportation for goods including interstate crossings;	√		
g. Angkutan jalan rel lainnya; Other rail transportation;	√		
6. Kesenian, hiburan, dan rekreasi yang tidak terbatas pada: Arts, entertainment and recreation, which is not limited to:			Aktivitas ini dilakukan oleh PTBA sendiri untuk memenuhi ketentuan KBLI 2020. This activity is run by PTBA to fulfill the 2020 KBLI requirements
a. Perpustakaan dan arsip swasta; Private library and archive;	√		
b. Museum yang dikelola swasta; Private-run museums;	√		
c. Peninggalan sejarah yang dikelola Swasta. Private-run historical heritage;	√		
7. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis yang tidak terbatas pada: Professional, scientific and technical activities, which are not limited to:			• Aktivitas g. 1 dilakukan oleh PTBA sendiri. • Aktivitas g. 2 sd 4 dilakukan oleh PTBA sendiri melalui laboratorium PTBA. • Activity g. 1 is run by PTBA. • Activity g. 2 to 4 is ran by PTBA through its laboratory
a. Aktivitas Kantor Pusat; Head office activities;	√		
b. Jasa Pengujian Laboratorium; Laboratory Testing Services;	√		
c. Jasa Kalibrasi/Metrologi; Calibration/Metrology Services;	√		
d. Analisis dan uji teknis lainnya; Analysis and other technical tests	√		
8. Aktivitas kesehatan manusia dan sosial yang tidak terbatas pada: Human health and social activities, which is not limited to:			Aktivitas ini telah dilakukan oleh entitas anak yaitu PT Bukit Asam Medika. This activity has been run by a subsidiary, PT Bukit Asam Medika.
a. Aktivitas klinik swasta; Private clinic activities;	√		
b. Aktivitas praktik dokter. Doctor practice activity.	√		
9. Konstruksi yang tidak terbatas pada konstruksi jalan rel; Construction, which is not limited to railroad construction;		√	Aktivitas terkait konstruksi jalan rel saat ini masih dalam tahap pengembangan, belum dijalankan PTBA. Activities related to railroad construction are currently still in the development stage, not yet conducted by PTBA.
10. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan yang tidak terbatas pada: Wholesale trading of building materials and equipment, which is not limited to:			Aktivitas perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan belum dijalankan oleh PTBA. PTBA has not yet conducted the wholesale trading activities for building materials and equipment
a. Perdagangan besar bahan berbahaya (B2); Wholesale trading of hazardous materials (B2)		√	
b. Perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3); Wholesale trading of hazardous and toxic materials (B3);		√	
c. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap) Wholesale trading of used goods and unused remains (Scrap).		√	

Proses Bisnis PTBA

Sebagai perusahaan energi yang berbasis batu bara, proses bisnis utama dari PTBA adalah proses penambangan batu bara. Proses bisnis utama tersebut dijakan berdasarkan alur proses dan *supply chain* sebagai berikut:

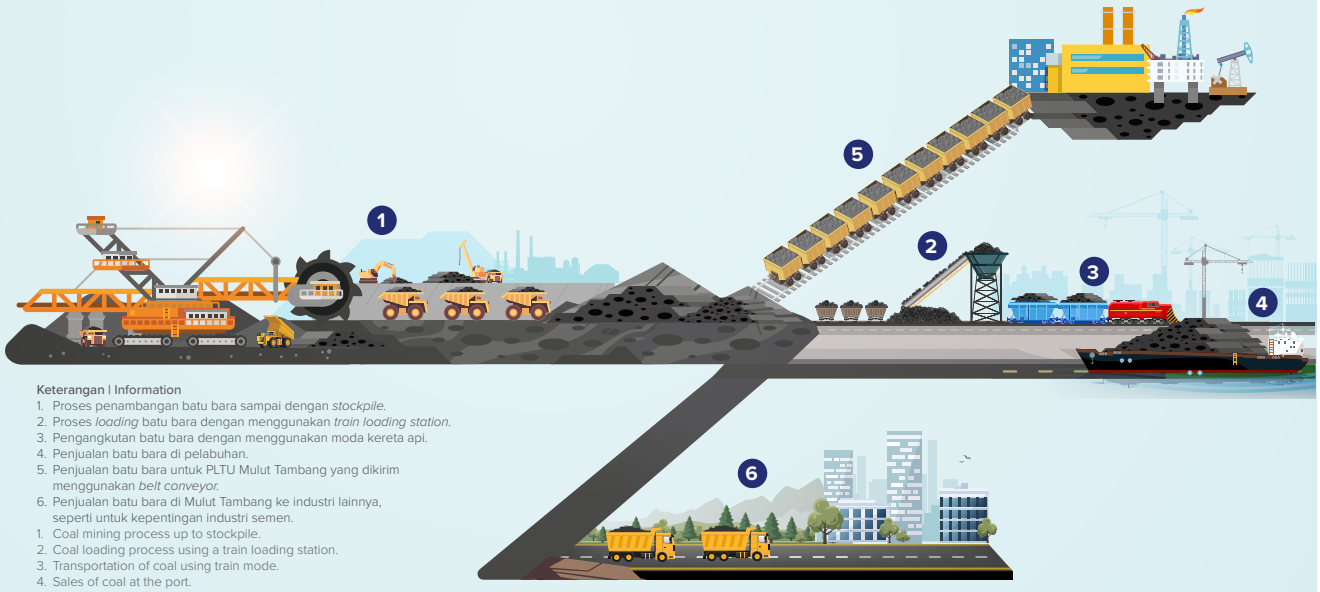
1. Penambangan dan Penjualan via Pelabuhan
   Proses ini dimulai dengan proses penambangan dengan mekasime *open pit mining* yang dilanjutkan dengan proses pengiriman batu bara ke *stockpile* dengan menggunakan *dumptruck*. Selanjutnya, dari *stockpile* dilakukan pemuatan batu bara ke kereta api dengan menggunakan *Train Loading Station*. Batu bara yang telah dimuat dalam gerbong kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) selanjutnya dikirim ke pelabuhan milik PTBA untuk kemudian dilakukan *loading* ke kapal/*vessel* milik pembeli atau *trader*.
2. Penambangan dan Penjualan di Mulut Tambang untuk Kepentingan PLTU
   Sama seperti proses sebelumnya, proses penambangan dilakukan secara *open pit mining* yang selanjutnya batu bara yang dihasilkan dilakukan pengangkutan ke *stockpile* terdekat. Dari *stockpile* tersebut, batu bara dikirimkan dengan menggunakan *belt coveyor* ke PLTU Mulut Tambang.
3. Penambangan dan Penjualan Mulut Tambang untuk Kepentingan Industri Lain (*End User*)
   Proses dilakukan dengan penambangan yang dilakukan secara *open pit mining*, yang selanjutnya batubara tersebut dikirimkan ke *stockpile*. Dari *stockpile*, batu bara akan jual kepada pihak *end user*. Pihak *end user* sendirilah dengan moda transportasi milik *end user* yang akan melakukan pengiriman batu bara dari tambang PTBA ke lokasi industri milik *end user.*

PTBA Business Process

As a coal-based energy company, PTBA's main business process is the coal mining process. The main business processes are carried out based on the process flow and supply chain are as follows:

1. Mining and Sales via Port
   The process starts with open-pit mining, followed by transporting the coal to the stockpile using dump trucks. Subsequently, the coal is loaded onto the train at the Train Loading Station. The loaded train carriages, owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero), then transport the coal to the port owned by PTBA for loading onto the buyer's or trader's ship/vessel.
2. Mining and Sales at the Mine Mouth for CFPP Purposes

   Similar to the previous process, the mining is conducted through open-pit mining, and the coal extracted is then transported to the nearest stockpile. Subsequently, the coal is conveyed via a belt conveyor to the Mine Mouth CFPP.
3. Mining and Mine Mouth Sales for Other Industrial Uses (End Users)
   The process involves open-pit mining, followed by the transportation of coal to a stockpile. The coal is then sold to end users who will transport it from the PTBA mine to their industrial location using their preferred mode of transportation.



Keterangan | Information
1. Proses penambangan batu bara sampai dengan *stockpile.*
2. Proses *loading* batu bara dengan menggunakan *train loading station.*
3. Pengangkutan batu bara dengan menggunakan moda kereta api.
4. Penjualan batu bara di pelabuhan.
5. Penjualan batu bara untuk PLTU Mulut Tambang yang dikirim menggunakan *belt conveyor.*
6. Penjualan batu bara di Mulut Tambang ke industri lainnya, seperti untuk kepentingan industri semen.

1. Coal mining process up to stockpile.
2. Coal loading process using a train loading station.
3. Transportation of coal using train mode.
4. Sales of coal at the port.
5. Sales of coal for the Mine Mouth CFPP which is sent using a belt conveyor.
6. Sales of coal at Mine Mouth to other industries, such as for the benefit of the cement industry.

Informasi Produk dan Jasa Layanan

Sesuai dengan Keputusan Direksi PTBA No. 050/0100/2022 tentang Merek Dagang (*Brand*) dan Spesifikasi batu bara PT Bukit Asam Tbk, Perusahaan memiliki beragam jenis produk batu bara sesuai dengan kadar kualitas sebagai berikut:

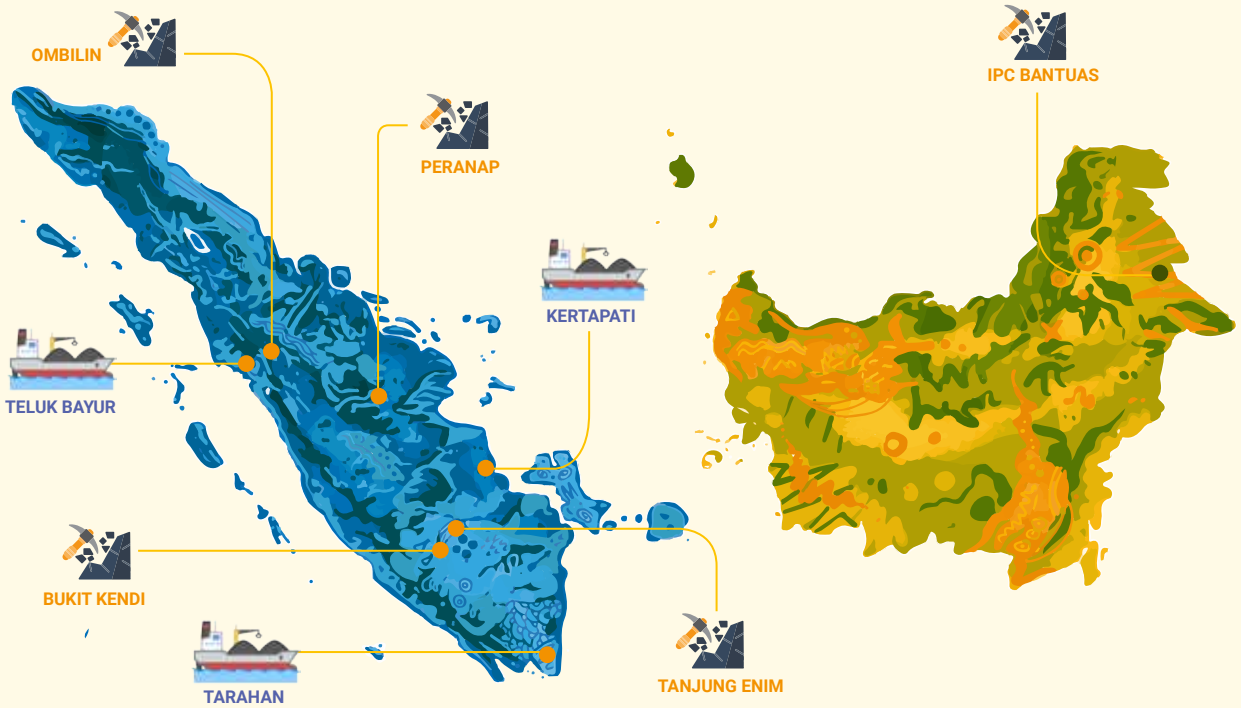
Information on Products and Services

In accordance with PTBA Board of Directors Decree No. 050/0100/2022 concerning Trademarks (Brands) and Coal Specifications of PT Bukit Asam Tbk, the Company has various types of coal products according to the following quality levels:

Parameter		PTBA							IPC		
		BA–42	BA–46	BA–48	BA–50	BA–61	BA–67	BA–71	GAR 4600	GAR 4700	GAR 4800
CV	Kcal/Kg.ar	4,200	4,500	4,800	5,000	6,100	6,700	7,100	4,600	4,700	4,800
TM	%, ar	33.00	31.00	30.00	28.00	16.00	11,00	7,00	31	28	27
IM	%, adb	16.00	15.00	14.00	13.00	6,00	4,00	3,00	15	15	15
Ash	%, adb	8.00	4.00	8.00	7.00	7,00	10,00	8,00	6	6	6
VM	%, adb	39.00	43.00	39.00	40.00	40,00	25,00	28,00	38	38	38
FC	%, adb	37.00	38.00	39.00	40.00	47,00	61,00	61,00	By Diff	By Diff	By Diff
TS	%, adb	0.60	0.54	0.68	0.42	0.39	0,64	0,65	0.5	0.5	0.5
Ash Fushion Temperatures (oC)	*Deformation*	1,218	1,216	1,321	1,302	1,331	1,479	1,461	-	-	-
-	*Spherical*	1,240	1,246	1,332	1,325	1,366	1,476	1,486	-	-	-
-	*Hemisphere*	1,268	1,384	1,340	1,350	1,405	1,480	1,489	-	-	-
-	*Flow*	1,288	1,413	1,373	1,392	1,445	1,485	1,495	-	-	-
HGI	-	60	58	55	57	55	63	77	42	42	42



Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Business Network and Operational Area



Luas Area Pertambangan
Mining Land Area
65.632
Hektar
Hectare

Sumber Daya Batu bara
Coal Resources
5,81
Juta Ton
Million Tons

Cadangan Batu Bara
Coal Reserves
2,98
Juta Ton
Million Tons

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Number of Mining Exploration Permit
8 **Izin Usaha**
Permits

Jumlah Pelabuhan & Dermaga
Number of Port & Barging Port
3 **Pelabuhan**
Ports

Hingga akhir tahun 2023, jaringan bisnis PTBA terdiri atas 5 (lima) wilayah kelolaan pertambangan dan 3 (tiga) pelabuhan. Izin usaha pertambangan (IUP) produksi batu bara Perusahaan memiliki total area kelola seluas 65.632 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Until 2023, PTBA's business network consists of 5 five mining managed areas and three ports. The Company's coal production mining exploration permit has a total managed area of 65,632 Ha with the following details:

No	Lokasi Location	Nama Izin Pertambangan Name of Mining License	Nomor Izin Pertambangan Mining Permit Number	Penerbit Izin Permit Issuer	Area (Ha)	Masa Berlaku Validity Period	
						Mulai Start	Berakhir End
1.	Tanjung Enim, Sumatra Selatan Tanjung Enim, South Sumatra	Tambang Air Laya Air Laya Mine	No. 94/1/IUP/ PMDN/2020 Jo.	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	7.621	01 Januari 2020 January 1, 2020	31 Desember 2030 December 31, 2030
			No. 159/1/IUP/ PMDN/2020	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM			
		Muara Tiga Besar	No. 251/1/IUP/ PMDN/2019 jo	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	2.866	30 Agustus 2019 August 30, 2019	29 Agustus 2029 August 29, 2029
			No. 4802/A.8/ B.1/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM			
		Banko Barat	No. 2402 K/30/ MEM/2011 jo.	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	4.500	10 Oktober 2011 October 10, 2011	09 April 2027 April 09, 2027
			No. 2866 K/30/ MEM/2014 jo.	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM			
			No. 1/1/IUP-PB/ PMDN/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM			
		Banko Tengah A	No. 307/1/IUP/ PMDN/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	2.423	22 Agustus 2019 August 22, 2019	07 September 2035 September 07, 2035
		Banko Tengah B	No. 487/1/IUP/ PMDN/2021	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	22.937	08 Juni 2021 June 08, 2021	07 September 2035 September 07, 2035
2.	Samarinda, Kalimantan Timur Samarinda, East Kalimantan	Bantuas Samarinda	No. 503/2253/ IUP-OP/BPPMDPTSP/ XI/2016	Gubernur Kalimantan Timur East Kalimantan Governor	3.238	30 November 2016 November 30, 2016	30 November 2026 November 30, 2026
3.	Indragiri Hulu, Riau	Peranap	No. 486/1/IUP/ PMDN/2021	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	18.230	08 Juni 2021 June 08, 2021	09 Juni 2035 June 09, 2035
4.	Sawahlunto, Sumatra Barat Sawahlunto, West Sumatra	Ombilin	No. 99/I/IUP/ PMDN/2019	Menteri Investasi/Kepala BKPM Minister of Investment/Head of BKPM	2.935	16 Februari 2019 February 16, 2019	16 Februari 2029 February 16, 2029
5.	Muara Enim, Sumatra Selatan Muara Enim, South Sumatra	Bukit Kendi	No. 305/KPTS/ DISTAMBEN/2010	Gubernur Sumatra Selatan South Sumatra Governor	882	30 April 2010 April 30, 2010	25 Oktober 2025 October 25, 2025
Total Area (Ha)					**65.632**		

Adapun izin operasi pelabuhan yang dijalankan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The port operation permits carried out by the Company are as follows:

No	Nama Izin Name of Permit	Penerbit Izin Issued by	Lokasi Location	Nama Pelabuhan/ Dermaga Port/Barging Port Name	Masa Berlaku Validity Period	
					Mulai Start	Berakhir End
1	BX-424/PP008	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Director General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation	Tarahan, Lampung	Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	11 September 2017 September 11, 2017	11 September 2027 September 11, 2027
2	BX-423/PP008	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Director General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation	Kertapati, Sumatra Selatan Kertapati, South Sumatra	Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	11 September 2017 September 11, 2017	11 September 2027 September 11, 2027
3	A.433/AL.308/DJPL	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Director General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation	Teluk Bayur, Sumatra Barat Teluk Bayur West Sumatra	Dermaga Teluk Bayur Teluk Bayur Barging Port	13 Mei 2019 May 13, 2019	13 Mei 2024 May 13, 2024

Sumber Daya dan Cadangan
Resources and Reserves

Unit Lokasi Location Unit	Izin Usaha Pertambangan Mining License	2023		2022	
		Sumber Daya (juta ton) Resources (in million ton)	Cadangan (juta ton) Reserves (in million ton)	Sumber Daya (juta ton) Resources (in million ton)	Cadangan (juta ton) Reserves (in million ton)
Tanjung Enim	Tambang Air Laya Air Laya Mine	690	382	695	387
	Muara Tiga Besar	314	168	324	178
	Banko Barat	507	245	517	255
	Banko Tengah A	375	364	376	365
	Banko Tengah B	3.127	1.535	3.142	1.550
Ombilin	Ombilin	102	0	102	0
Peranap	Peranap	671	279	671	279
Bantuas (IPC)	Bantuas Samarinda	20	2	21	3
Bukit Kendi	Bukit Kendi	3	1	3	1
Total		**5.809**	**2.976**	**5.851**	**3.018**

Kapasitas Pelabuhan dan Dermaga

Guna mendukung aktivitas operasional PTBA, khususnya untuk proses muat batu bara, PTBA memiliki 3 (tiga) Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan lokasi dan kapasitas sebagaimana informasi di bawah ini:

Port and Barging Port Capacity

To support PTBA operational activities, specifically for the coal loading process, PTBA has 3 (three) Designated Terminals for Own Interests with locations and capacities as follows:

Pelabuhan dan Dermaga Port and Barging Port	Stockpile (Ton)	2023		2022	
		Port Throughput (juta ton per tahun) (million tons per year)	Kapasitas (Barging Deadweight Tonnage)	Port Throughput (juta ton per tahun) (million tons per year)	Kapasitas Capacity (Barging Deadweight Tonnage)
Dermaga Teluk Bayur Teluk Bayur Barging Port	90.000	2,5	40.000	2,5	40.000
Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	1.000.000	25	210.000	25	210.000
Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	160.000	7	8.000	7	8.000

Keanggotaan dalam Asosiasi
Membership in Associations

PTBA telah bergabung dengan asosisasi dan organisasi di tingkat Nasional dan Internasional, seperti:

PTBA has joined national and international association and organization, such as:

Internasional
International

Carbon Disclosure Project

United Nations Global Compact

Nasional
National

Asosiasi Pertambangan Indonesia
Indonesia Coal Mining Association

Indonesian Mining Association

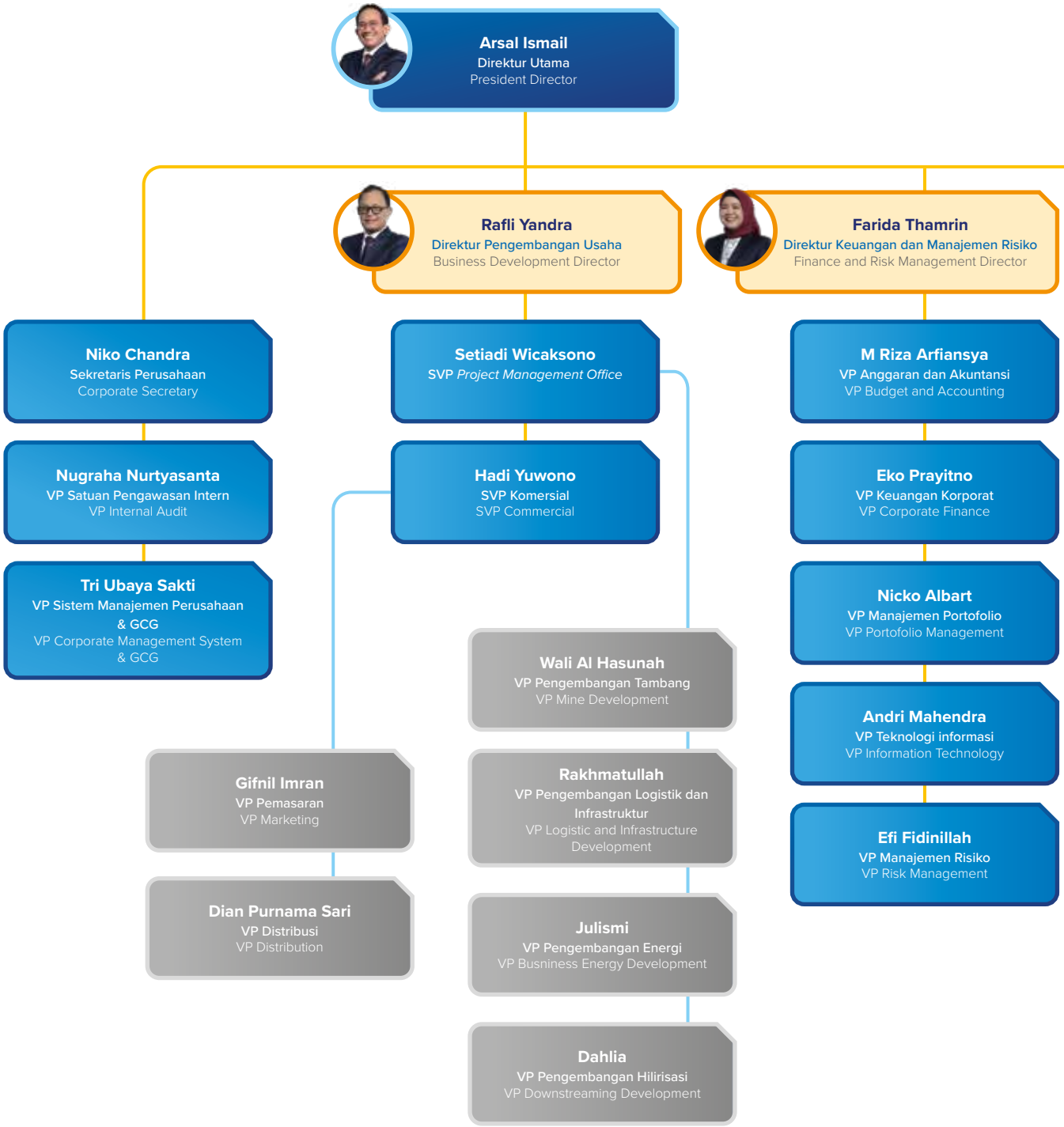
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia
Association of Indonesian Mining Professionals

Indonesia Corporate Secretary Association

Asosiasi Emiten Indonesia
Indonesia Public Listed Companies Association

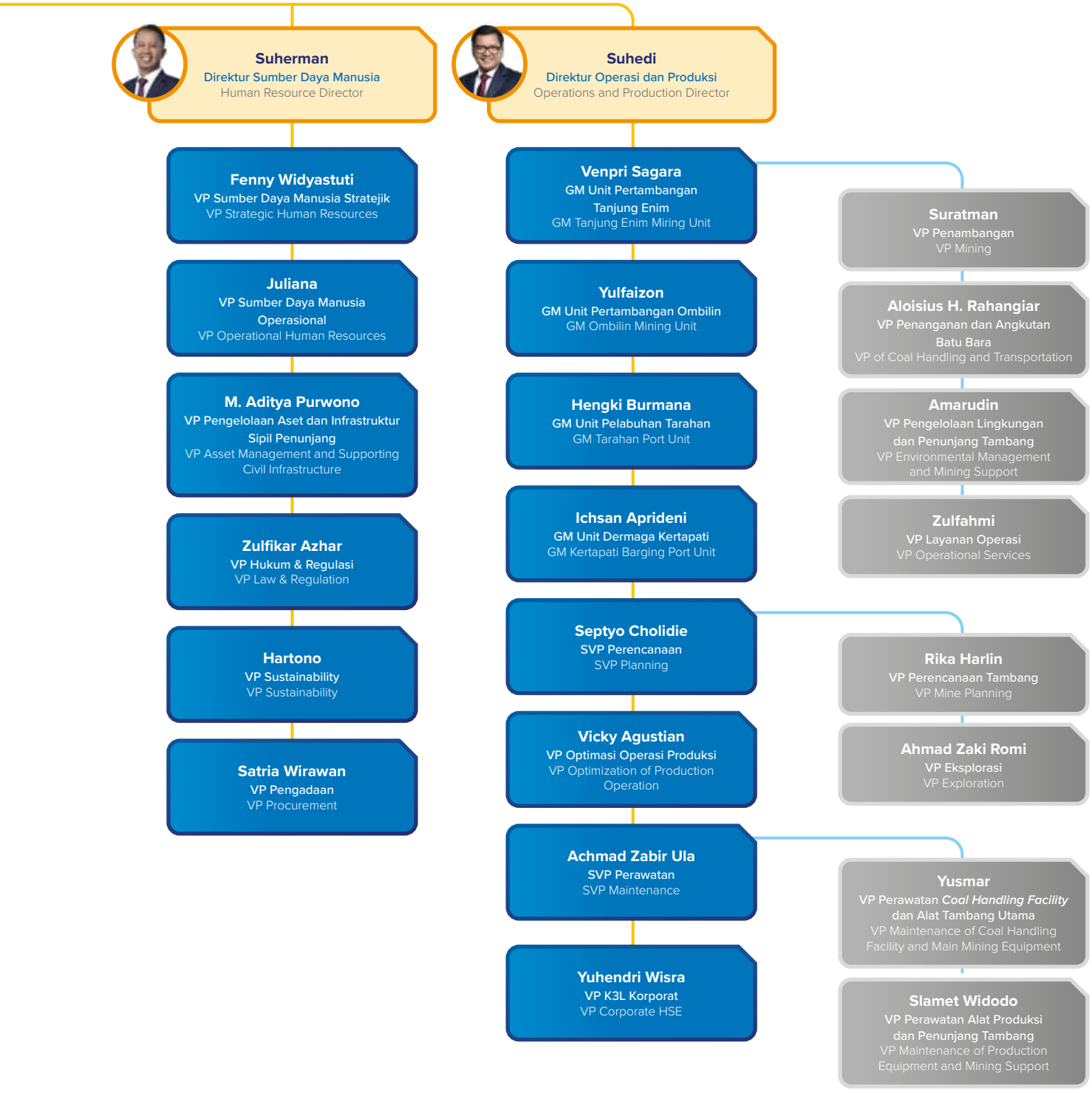
Struktur Organisasi di Bawah Direksi

Organizational Structure Under the Board of Directors



Sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang dan berubah, PTBA terus melakukan penguatan struktur organisasi demi mencapai tujuan bersama dan dengan tetap memperhatikan perkembangan bisnis ke depan. Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 033/0100/2023 tanggal 22 Februari 2023.

In line with business dynamics that continue to develop and change, PTBA continues to strengthen its organizational structure to achieve common goals while still paying attention to future business developments. The Company's Organizational Structure as of December 31, 2023 determined based on Decree No. 033/0100/2023 dated February 22, 2023.



Struktur Organisasi di Bawah Dewan Komisaris

Organizational Structure Under the Board of Commissioners

Struktur organisasi di tingkat Dewan Komisaris PTBA dapat dlihat pada bagan sebagai berikut:
The organizational structure of the Board of Commissioners of PTBA can be seen in the following chart:



Irwandy Arif
Komisaris Utama
President Commissioner



Andi Pahril Pawi
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Kurnia Toha
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Komite Audit
Audit Committee

- **Andi Pahril Pawi**
  Ketua
  Chairman
- **Kurnia Toha**
  Wakil Ketua
  Vice Chairman
- **Dody Masykur**
  Anggota
  Members
- **Fadhila Achmadi Rosyid**
  Anggota
  Members

Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi*
Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

- **Irwandy Arif**
  Ketua
  Chairman
- **E. Piterdono HZ**
  Wakil Ketua Bidang Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
  Vice Chairman of Business Risk and Integrated Governance
- **Rahmat Hidayat Pulungan**
  Wakil Ketua Bidang Pascatambang, CSR, GCG dan TI
  Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG and IT
- **Tri Winarno**
  Anggota
  Members
- **Helmiansyah Irawan**
  Anggota
  Members
- **Ganda Marihot Simangunsong**
  Anggota
  Members



Carlo B. Tewu
Komisaris
Commissioner



E. Piterdono Hz.
Komisaris
Commissioner

Komite Nominasi & Remunerasi*
Nomination and Remuneration Committee

- **Kurnia Toha**
  Ketua
  Chairman
- **Carlo B. Tewu**
  Wakil Ketua
  Vice Chairman
- **Nora Sri Hendriyeni**
  Anggota
  Members

Sekretariat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretariat

- **Nurul Almy**
  Sekretaris Dewan Komisaris
  Secretary of Board of Commissioners
- **Qanita Zara Shafira**
  Staf Sekretaris Dewan Komisaris
  Staff of Secretary of Board of Commissioners

*Catatan | *Notes:
Sejak tanggal 15 Desember 2023 Komite tersebut dipecah menjadi 2 yaitu (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dan (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi, hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Group MIND ID dan Kementerian BUMN.
Since December 15, 2023, the Committee has been divided into 2, namely (i) the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee and (ii) the Nomination and Remuneration Committee. This is in line with the provisions in force in the MIND ID Group and the Ministry of SOEs.

Direksi PT Bukit Asam Tbk
Board of Directors





01 **Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI**
Direktur Utama
President Director

02 **Farida Thamrin, S.T.**
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

03 **Ir. Suhedi**
Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

04 **Suherman, S.E., Ak., M.M.**
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director

05 **Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.**
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

04 05

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI

Direktur Utama
President Director

Masa Jabatan: 23 Desember 2021 - Sekarang
Term of Office: December 23, 2021 – Present

Usia Age	59 tahun 59 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Baturaja, 4 Juli 1964 Baturaja, July 4, 1964
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2, Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Universitas Indonesia (2004) Master of Business Administration and Policy, University of Indonesia (2004)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) • *President Director* PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) • *President Director* PT Muba Coal (2016-2020) • Direktur Marketing PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016) • Business Development Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) • President Director of PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) • President Director of PT Muba Coal (2016-2020) • Marketing Director of PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 2021 Extraordinary GMS Resolution on December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Memiliki saham PT Bukit Asam Tbk sebesar 304.900 lembar saham Owns 304,900 shares of PT Bukit Asam Tbk



Farida Thamrin, S.T.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Masa Jabatan: 5 April 2021 - Sekarang
Term of Office: April 5, 2021 – Present

Usia Age	51 tahun 51 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 27 Oktober 1972 Jakarta, October 27, 1972
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1, Teknik Sipil Universitas Indonesia (1996) Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia (1996)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Group *Head Corporate* Solution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-April 2021) • Group *Head Treasury* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • Group *Head Market Risk* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Group Head Corporate Solution of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-April 2021) • Treasury Group Head of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • Group Head Market Risk of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 5 April 2021 2020 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on April 5, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Ir. Suhedi

Direktur Operasi dan Produksi
Operations and Production Director

Masa Jabatan: 5 April 2021 - Sekarang
Term of Office: April 5, 2021 - Present

Usia Age	60 tahun 60 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Baturaja, 8 Februari 1964 Baturaja, February 8, 1964
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1, Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (1990) Bachelor of Geology Engineering from Gadjah Mada University (1990)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) • Senior Manajer Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan PT Bukit Asam Tbk (2012-2016) • General Manager Tanjung Enim Mining Unit of PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) • Senior Manager Land and Building Asset Management of PT Bukit Asam Tbk (2012-2016)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 5 April 2021 2020 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on April 5, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA.

Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Masa Jabatan: 23 Desember 2021 - Sekarang
Term of Office: December 23, 2021 – Present

Usia Age	54 tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sawahlunto, 6 Agustus 1969 Sawahlunto, August 6, 1969
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) • S2, Manajemen di Universitas Sriwijaya (2012) • S1, Teknik Sipil di Universitas Andalas (1995) • Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Germany (2015) • Master in Management from Sriwijaya University (2012) • Bachelor in Civil Engineering at Andalas University (1995)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• *Vice President* Penanganan dan Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) • Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) • *Vice President* Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (2017-2019) • Vice President of Coal Handling and Transportation of PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) • President Director of PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) • Vice President Marketing and Export Sales of PT Bukit Asam Tbk (2017-2019)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

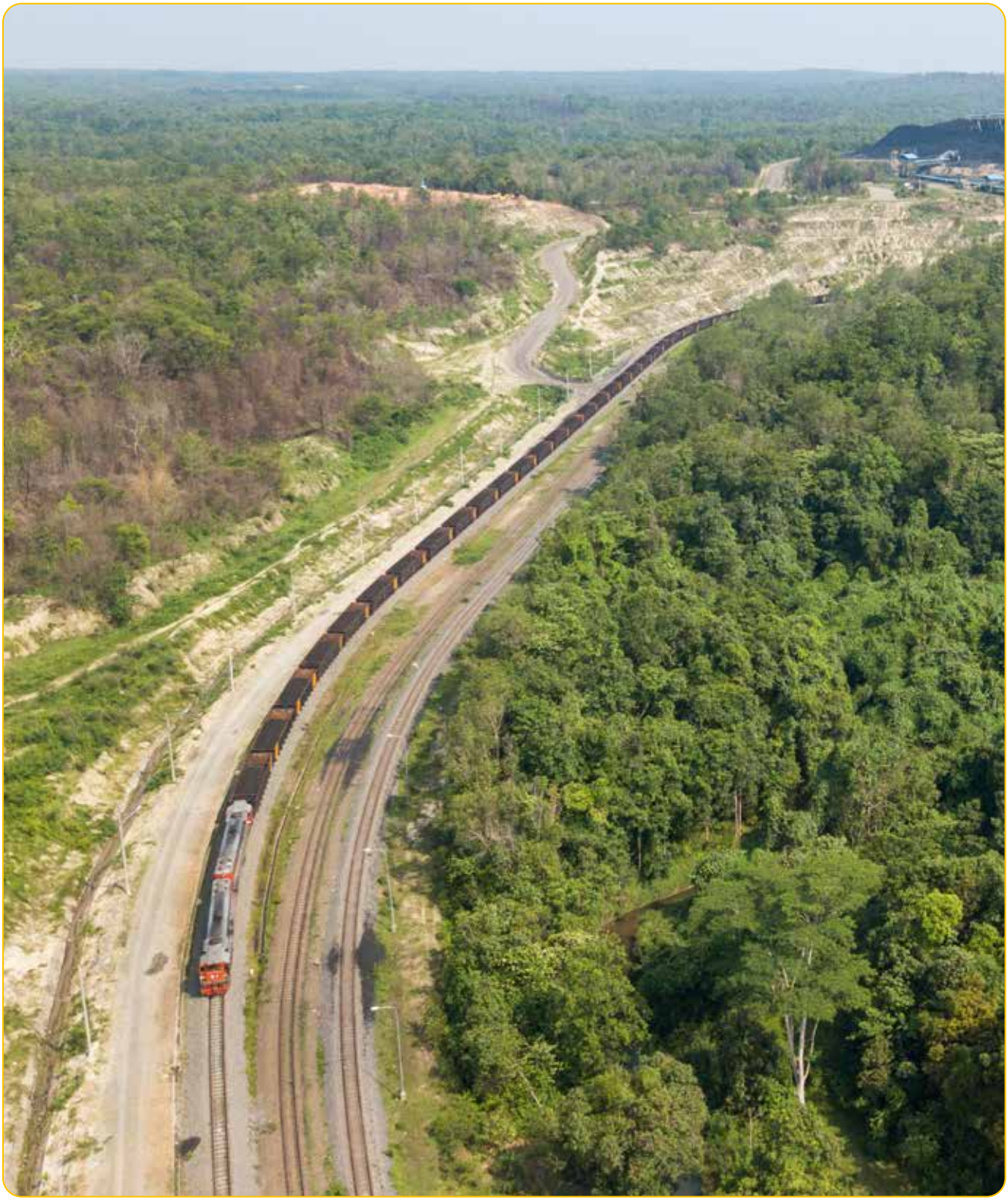


Suherman, S.E., Ak., M.M.

Direktur Sumber Daya Manusia
Human Resources Director

Masa Jabatan: 23 Desember 2021 - Sekarang
Term of Office: December 23, 2021 – Present

Usia Age	57 tahun 57 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Palembang, 28 Agustus 1966 Palembang, August 28, 1966
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Manajemen Universitas Sriwijaya (2007) • S1, Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990) • Master in Management, Sriwijaya University (2007) • Bachelor in Economics, Sriwijaya University (1990)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2020-2021) • Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) • Senior Manajer Perbendaharaan dan Anggaran PT Bukit AsamTbk (2016-2017) • Senior Manajer Perbendaharaan dan Pendanaan PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) • Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran PT Bukit Asam Tbk (2009-2014) • President Director of PT Bukit Multi Investama (2020-2021) • Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) • Senior Manager of Treasury and Budget of PT Bukit Asam Tbk (2016-2017) • Senior Manager of Treasury and Funding of PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) • Senior Manager of Accounting and Budgeting of PT Bukit Asam Tbk (2009-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Komisaris di PT Internasional Prima Coal (2022-Sekarang) Commissioner of PT Internasional Prima Coal (2022-Present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk sebesar 100.000 lembar saham Owns 100,000 share in PT Bukit Asam Tbk



Komisaris PT Bukit Asam Tbk

Board of Commissioners





01 **Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc**
Komisaris Utama
President Commissioner

02 **Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

03 **Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

04 **Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu**
Komisaris
Commissioner

05 **Ir. E. Piterdono Hz, S.E., M.M.**
Komisaris
Commissioner

06 **Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc

Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	72 tahun 72 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ujung Pandang, 28 Desember 1951 Ujung Pandang, December 28, 1951
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) • S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) • S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) • Doctoral Degree from Ecole des Mines de Nancy, France (1991) • Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) • Bachelor of Mining Engineering at Bandung Institute of Technology (1976)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) • Commissioner of PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Independent Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Underground Mining Advisor of PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Independent Commissioner of PT Antam Tbk (2009)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2020 - sekarang) Special Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources (2020 - present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020, pengangkatan sebagai Komisaris • Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, alih tugas sebagai Komisaris Utama • 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 10, 2020 as Commissioner • 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 15, 2023 as President Commissioner
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bone, 4 April 1962 Bone, April 4, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) • Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) • Akademi Angkatan Udara (1985) • Army Forces Staff and Command School (2008) • Air Forces Staff and Command School (1998) • Air Force Unit Command School (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) • Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) • Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) • Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) • Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) • Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Ir. E. Piterdono Hz, S.E., M.M.

Komisaris
Commisioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	63 tahun 63 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ogan Kemering Ulu, 22 November 1960 Ogan Komering Ulu, November 22, 1960
Domisili Domicile	Bandar Lampung, Sumatra
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) • S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) • S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) • Master of Management at the University of Bandar Lampung (2001) • Bachelor of Economy Management at the Saburai University Lampung (2001) • Bachelor of Geological Engineering at UPN Veteran Yogyakarta (1986)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) • Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2013) • Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) • Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) • Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) • Head of Lampung Province Environmental Management Agency (2013) • Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 – Present

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tondano, 13 September 1962 Tondano, September 13, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) • Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) • Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) • Akademi Kepolisian (1994) • Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) • National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) • Police Staff and Leadership School (1998) • Police Academy (1994)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-sekarang) • Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2022-2023) • Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) • Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) • Expert Staff of the Minister of SOEs in the Field of Mediation (2023-present) • Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) • Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) • West Sulawesi Acting Governor (2016) • Criminal Acts Director for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-sekarang) Expert Staff of the Minister of SOEs in the Field of Mediation (2023-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Present

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lampung, 16 Juni 1961 Lampung, June 16, 1961
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, University of Washington School of Law pada tahun 2007 • S2, University of Washington School of Law pada tahun 1998 • S1, Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Present

Usia Age	45 tahun 45 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 16 Agustus 1978 Jakarta, August 16, 1978
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, Universitas Negeri Jakarta (2020) • S2, Universitas Negeri Jakarta (2016) • S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute (2012) • S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta (2001) • Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) • Master Degree at Jakarta State University (2016) • Bachelor Degree in Faculty of Economics and Business at Perbanas Institute (2012) • Bachelor Degree at Sharia Faculty of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2001)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2021) • Komisaris Utama PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) • Komisaris PT Rekayasa Industri (2016-2017) • Komisaris PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) • Komisaris PT Berdikari (Persero) (2013-2015) • Komisaris PT Niaga Permasindo (2011-2014) • Independent Commissioner at PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Independent Commissioner at PT KAI (2017-2021) • President Commissioner at PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) • Commissioner at PT Rekayasa Industri (2016-2017) • Commissioner at PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) • Commissioner at PT Berdikari (Persero) (2013-2015) • Commissioner at PT Niaga Permasindo (2011-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, S.E.

Komisaris Utama/Independen
President Commissioner / Independent Commissioner

Masa Jabatan: 10 Oktober 2013 - 11 April 2023
Term of Office: October 10, 2013 – April 11, 2023

Usia Age	68 tahun 68 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Blitar, 25 Agustus 1955 Blitar, August 25, 1955
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Kursus Maritime Force Commander, Hawaii (2006) • Kursus Lemhannas (2003) • Sesko TNI (1999) • Sarjana (S1) Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Merdeka Surabaya (1998) • Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI AL (1994) • Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Bagian Laut (sekarang Akademi TNI Angkatan Laut) (1978) • Maritime Force Commander Course, Hawaii (2006) • Course at National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2003) • Indonesian Military Staff and Command College (1999) • Bachelor Degree of Economy at Merdeka Surabaya University (1998) • Indonesian Navy Staff and Command College (1994) • Indonesian Navy Academic (1978)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Panglima TNI (2010-2013) • Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2009-2010) • Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (2009) • Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAL (2008-2009) • Operations Assistant (2008) • TNI Commander (2010-2013) • Indonesian Navy Chief of Staff (2009-2010) • Inspector General of the Defense Ministry (2009) • Planning and Budget Assistance to the Indonesian Navy Chief of Staff (2008-2009) • Operations Assistant (2008)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	• Komisaris Utama PT Pondok Indah Padang Golf Tbk • Komisaris Utama PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk • President Commissioner of PT Pondok Indah Padang Golf Tbk • President Commissioner of PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2013 • Kemudian diangkat kembali sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 11 April 2018 untuk periode jabatan yang ke-2. • Appointed for the first time as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner through the 2013 Extraordinary GMS Resolution dated October 10, 2013 • Reappointed as President Commissioner and Independent Commissioner based on the Resolution of the 2017 Annual GMS dated April 11, 2018, for the second term of office.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Devi Pradnya Paramita, M.Sc

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 23 Desember 2021 - 21 Maret 2023
Term of Office: December 23 – March 21, 2023

Usia Age	46 tahun 46 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bandung, 16 Agustus 1977 Bandung, August 16, 1977
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Manajemen Risiko di ICMA Business School (2000) • S1, Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (1999) • Master Degree of Risk Management at ICMA Business School (2000) • Bachelor Degree of International Relations at Parahyangan Catholic University (1999)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (2021-sekarang) • Direktur Pelaksana dan CFO PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (2019-2021) • Kepala Hubungan Investor PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2019) • Chief Finance Officer of PT PGN Saka (2015-2019) • Finance Director of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (2021-present) • Managing Director and CFO of PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (2019-2021) • Head of Investor Relations of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2019) • Chief Finance Officer of PT PGN Saka (2015-2019)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Finance Director of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Desember 2021 2021 Extraordinary GMS Resolution dated December 23, 2021
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Does not own shares in PT Bukit Asam Tbk

Catatan | Notes :
* Dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris Bukit Asam, mengingat yang bersangkutan dialihtugaskan sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium.
*Prohibited to have an concurrent position, since she was assigned as Director of Finance PT Indonesia Asahan Aluminium.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners after the Fiscal Year Ended

Pada RUPS tahun buku 2023 tidak terdapat perubahan susunan Direksi PTBA. Dengan demikian, komposisi Direksi Perusahaan sebagai berikut:

Jabatan		Nama
Direktur Utama	:	Arsal Ismail
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Farida Thamrin
Direktur Operasi dan Produksi	:	Suhedi
Direktur Pengembangan Usaha	:	Rafli Yandra
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Suherman

There was no changes to the composition of the PTBA Board of Directors in the 2023 fiscal year.

Position		Name
President Director	:	Arsal Ismail
Finance and Risk Management Director	:	Farida Thamrin
Operations and Production Director	:	Suhedi
Business Development Director	:	Rafli Yandra
Human Resources Director	:	Suherman

Sedangkan untuk susunan Dewan Komisaris PTBA pada tahun 2023 terdapat perubahan. Perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023 yang memutuskan sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pengakhiran masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/ Independen terhitung sejak tanggal 11 April 2023; dan
   b. Sdri. Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Irwandy Arif, dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
   a. Sdr. Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen; dan;
   b. Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen.

Meanwhile, there were changes to the composition of the PTBA Board of Commissioners in 2022. Changes in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders held on June 15, 2023, which decided as follows:

1. Officiating the termination of the terms of office of members of the Board of Commissioners as follows:
   a. Agus Suhartono as President/Independent Commissioner as of April 11, 2023; and
   b. Devi Pradnya Paramita as Commissioner as of March 21, 2023.
2. Transfer of duty of Irwandy Arif, from Commissioner to President Commissioner of PT Bukit Asam Tbk, with the term of office continuing the remaining term of office in accordance with the GMS decision regarding the appointment of the person concerned.
3. Inaugurate members of the Company's Board of Commissioners as follows:
   a. Kurnia Toha as Independent Commissioner; and;
   b. Rahmat Hidayat Pulungan as Independent Commissioner.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Jabatan		Nama
Komisaris Utama	:	Irwandy Arif
Komisaris Independen	:	Kurnia Toha
Komisaris Independen	:	Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi
Komisaris	:	E. Piterdono HZ
Komisaris	:	Carlo Brix Tewu

Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Position		Name
President Commissioner	:	Irwandy Arif
Independent Commissioner	:	Kurnia Toha
Independent Commissioner	:	Rahmat Hidayat Pulungan
Independent Commissioner	:	Andi Pahril Pawi
Commissioner	:	E. Piterdono HZ
Commissioner	:	Carlo Brix Tewu

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Management Profile



Tempat, Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Gunung Megang, 7 April 1984 / 39 tahun Gunung Megang, April 7, 1984 / 39 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim, Muara Enim
Riwayat Pendidikan Educational Background	Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2008 Bachelor Degree from Diponegoro University (2008)
Riwayat Jabatan Position History	• General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim (2021-sekarang) • General Manajer Layanan Operasi Tanjung Enim (2020-2021) • Senior Manajer Pengelolaan Aset, Layanan Umum dan Balitas (2019-2020) • General Manager of Tanjung Enim Mining Unit (2021 – Present) • General Manager of Operational Services Tanjung Enim (2020-2021) • Senior Manager of Asset Management, General Services, and Utility (2019-2020)
Tahun Bergabung Year of Joining	2009



Tempat, Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Sawahlunto, 18 Juli 1971 / 52 tahun Sawahlunto, July 18, 1971 / 52 years old
Domisili Domicile	Bandar Lampung, Lampung
Riwayat Pendidikan Educational Background	D3 dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2008 Diploma from Padang State University (2008)
Riwayat Jabatan Position History	• General Manajer Unit Pelabuhan Tarahan (2023-sekarang) • General Manajer Unit Dermaga Kertapati (2021-2023) • Manajer Penambangan Banko Barat (2020-2021) • General Manager of Tarahan Port Unit (2023-present) • General Manager of Kertapati Barging Port (2021-2023) • Banko Barat Mining Manager (2020-2021)
Tahun Bergabung Year of Joining	1999



Tempat, Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Sungailiat, 6 April 1984 / 39 Tahun Sungailiat, April 6, 1984 / 39 years old
Domisili Domicile	Palembang, Sumatera Selatan
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Universitas Sriwijaya tahun 2019 • S1, Universitas Sriwijaya tahun 2007 • Master Degree from Sriwijaya University (2019) • Bachelor Degree from Sriwijaya University (2017)
Riwayat Jabatan Position History	• General Manajer Unit Dermaga Kertapati (2023-sekarang) • *Vice President* Pengembangan Aset dan Infrastruktur Sipil Penunjang (2021-2023) • General Manager of Kertapati Barging Port (2023-Present) • Vice President for Asset Development and Supporting Civil Infrastructure (2021 – 2023)
Tahun Bergabung Year of Joining	2009



Septyo Cholidie
***Senior Vice President* Perencanaan**
Senior Vice President for Planning

Tempat, Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Jakarta, 28 September 1980 / 43 tahun Jakarta, September 28, 1980 / 43 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim, Muara Enim Tanjung Enim, Muara Enim
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Universitas Airlangga pada tahun 2020 • S1, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 • Master Degree from Airlangga University (2020) • Bachelor Degree from Gadjah Mada University (2005)
Riwayat Jabatan Position History	• *Senior Vice President* Perencanaan (2022-sekarang) • Senior Manajer Perencanaan (2020-2022) • Senior Manajer Penanganan dan Angkutan Batu Bara (2020) • Senior Vice President for Planning (2022-Present) • Senior Manager for Planning (2020-2022) • Senior Manager of Coal Handling and Transportation (2020)
Tahun Bergabung Year of Joining	2009



Hadi Yuwono
***Senior Vice President* Komersial**
Commercial Senior Vice President

Tempat, Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Ngawi, 2 Januari 1969 / 54 tahun Ngawi, January 2, 1969 / 54 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	Universitas Brawijaya pada tahun 1992 Bachelor Degree from Brawijaya University (1992)
Riwayat Jabatan Position History	• *Senior Vice President* Komersial (2022-sekarang) • General Manajer Komersial (2021-2022) • Direktur Utama PT Bukit Energi Service Terpadu (2020-2021) • Commercial Senior Vice President (2022-present) • Commercial General Manager (2021-2022) • President Director of PT Bukit Energi Service Terpadu (2020-2021)
Tahun Bergabung Year of Joining	1992



Setiadi Wicaksono
***Senior Vice President Project Management Office* (PMO)**
Senior Vice President Project Management Office (PMO)

Tempat, Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Jakarta, 23 Juni 1985 / 38 tahun Jakarta, June 23, 1985 / 38 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2- MSc University of Glasgow 2018 • S2- MBA Institut Teknlogi Bandung 2016 • S1- Institut Teknologi Bandung 2003 • Master Degree from University of Glasgow (2018) • Business Master Degree from Bandung Institute of Technology (2016) • Bachelor Degree from Bandung Institute of Technology (2003)
Riwayat Jabatan Position History	• *Senior Vice President Project Management Office* (2023-sekarang) • *Vice President Project* Pengembangan Hilirisasi (2022-2023) • Senior Manajer Strategi dan Pengembangan Korporat (2021-2022) • Senior Vice President Project Management Office (PMO) (2023-present) • Vice President Project of Downstreaming Development (2022-2023) • Senior Manager of Corporate Strategy and Development (2021-2022)
Tahun Bergabung Year of Joining	2009

Sumber Daya Manusia
Human Capital



Keberadaan sumber daya manusia yang andal merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Karena itu, PTBA terus berupaya untuk melakukan pengelolaan SDM dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* di industri.

The existence of quality human Capital is crucial to realize the Company's vision, mission, and goals. Therefore, PTBA continues to strive to maintain its human capital in accordance with laws and industrial best practices.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan Perusahaan. Melalui pengelolaan SDM yang tepat dan berkesinambungan, Perusahaan terus melakukan pengembangan talenta untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas di tengah persaingan dan lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Human Capital Governance

Human Capital (HC) is one of the important factors in supporting the Company's development. With proper and sustainable HC management, the Company continues to develop its employees to become superior and qualified amid competition and dynamic business.

PTBA menyadari bahwa keberadaan SDM yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan SDM yang diwujudkan melalui perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi dengan rencana Perusahaan secara umum, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan arah pembangunan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa mengkaji ulang kebijakan SDM yang telah dijalankan serta melakukan penyempurnaan organisasi sehingga terbangun keselarasan dari kebutuhan dan rencana pengembangan SDM sesuai arah pengembangan Perusahaan ke depan. Pengelolaan dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Perusahaan dimulai dari rancangan struktur organisasi yang selalu disesuaikan dengan arah bisnis dan strategi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan selalu melakukan evaluasi unit kerja terhadap efektivitas proses bisnis serta mempertimbangkan aspek efisiensi.

Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM yang terintegrasi dengan visi, misi serta strategi Perusahaan dan berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan SDM agar dapat mendukung perkembangan bisnis dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan *best practices* pengelolaan SDM yang berlaku, baik itu domestik maupun internasional.

Program Strategis Pengelolaan SDM Tahun 2023

Dalam rangka menjawab setiap tantangan dan tahapan perkembangan bisnis Perusahaan, SDM PTBA senantiasa melakukan peningkatan dalam penguasaan teknologi, *skill-set* dan *mindset* yang dibutuhkan, untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Bukit Asam telah menyusun kebijakan strategi pengelolaan SDM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pengelolaan SDM 2023-2027 dengan sasaran yaitu:

1. Peremajaan *workforce* dengan memperhatikan persentase gender perempuan dan millenial dalam *nominated talent*
2. Pengembangan talenta dengan optimalisasi program *Talent Mobility* yang diinisiasi oleh MIND ID untuk kepemimpinan PTBA yang berkelanjutan
3. Pengembangan kapabilitas dan kompetensi pegawai melalui mekanisme strategis *Learning Organization* Culture
4. Meningkatkan Kapabilitas Talenta SDM yang berkualitas dan berdaya saing
5. Membangun Budaya berbasis Kinerja
6. Sistem manajemen (digital) HC dan *Workforce Planning* berbasis *Data Driven*
7. Transformasi Struktur Organisasi Berkinerja Tinggi

PTBA understands that powerful and superior HC plays an important role in realizing the Company's vision and mission. For this matter, the Company always carries out HC management which is realized through workforce planning integrated in the Company's general plans including the Company's Work Plan and Budget and the direction of the Company's long-term business development.

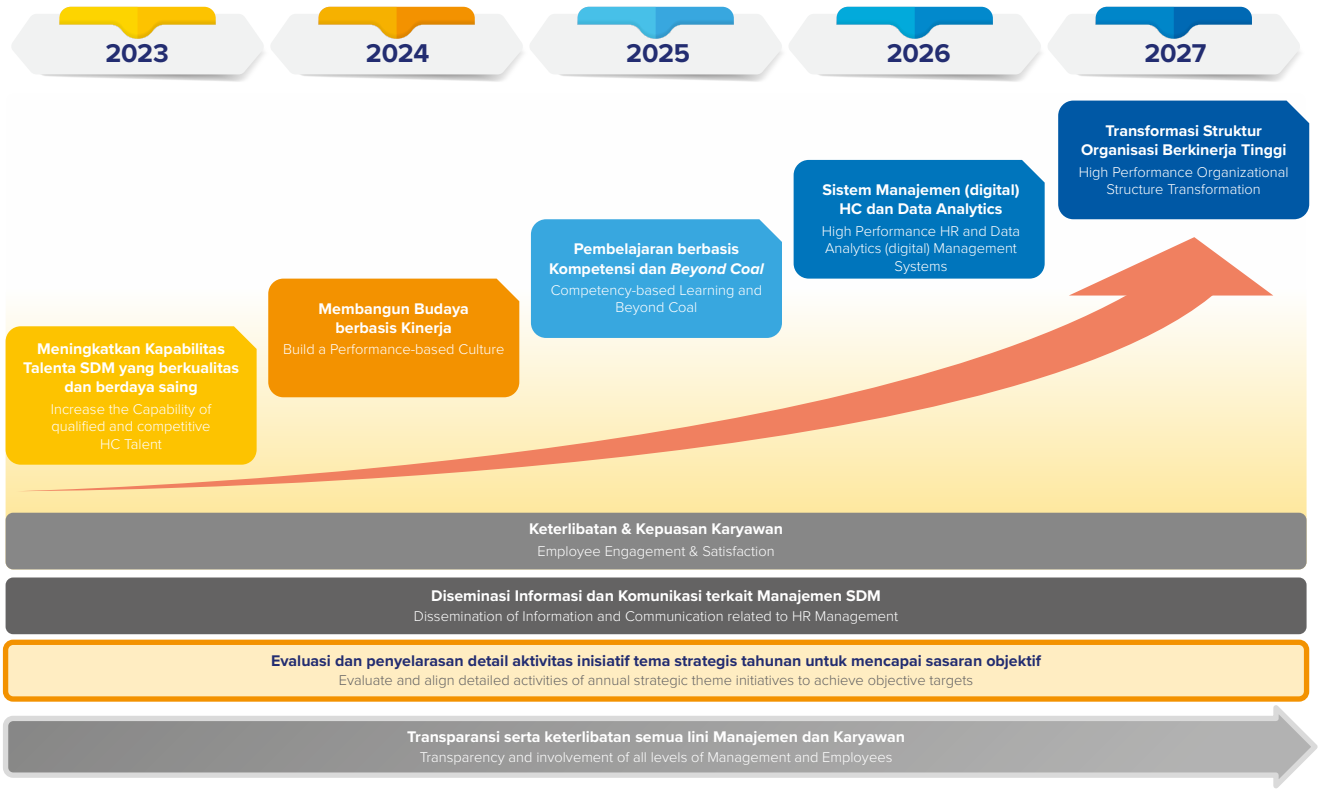
The Company also continues to review its ongoing HC policies and improves the HC organization to realize a balance between HC needs and development plans which is in line with the Company's future development goals. HC management and development carried out by the Company starts from the design of the organizational structure which is always adjusted to the Company's business direction and strategy. Therefore, the Company always evaluates work units based on business process effectiveness while considering efficiency aspects.

In addition, the Company always carries out HC management and development that is integrated with the Company's vision, mission, and strategy and strives to always improve the quality of HC management to support business development while still referring to laws and regulations and HC management best practices, both domestic and international.

Human Capital Management Strategic Programs for 2023

In answering every challenge and step in the Company's business development, PTBA's HC department ensures to always make improvements in mastering the technology, skill-set, and mindset needed to strengthen and improve the Company's performance. The Company has developed a strategic HC management policy as stated in the 2023-2027 HC Management Strategic Plan with targets listed below:

1. Workforce rejuvenation by considering the percentage of women and millennials in nominated talent
2. Talent development by optimizing the Talent Mobility program initiated by MIND ID for sustainable PTBA leadership
3. Developing employee capabilities and competencies through the strategic mechanism of Learning Organization Culture
4. Increasing qualified and competitive employee's capability
5. Building a performance-based culture
6. Realizing digital data-driven HC and workforce planning management system
7. Transformation of high-performance organizational structure



Tema Strategis Fungsi SDM PTBA 2023-2027 di atas disusun berdasarkan kebutuhan dan tantangan bisnis yang dianalisis melalui berbagai sumber seperti hasil wawancara *pemangku* kepentingan, survei SDM, HC, tren SDM dan *benchmarking*. Masing-masing tema strategis diturunkan menjadi inisiatif strategis serta aktivitas kunci pendukung implementasi Rencana Strategis Pengelolaan SDM.

Atas sasaran tersebut di atas, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan di tahun 2023, antara lain:

1. Penyusunan *Career Development Journey* dengan lingkup pekerjaan antara lain *updating* dan evaluasi kompetensi, penyusunan *career path* serta penyusunan *guidelines* dan *matrix learning & development*
2. Pelaksanaan Rekrutmen *Fresh Graduate* dan *Professional Hire*
3. Pelaksanaan *Talent Mobility* MIND ID dan PTBA Grup
4. Implementasi AKHLAK *Culture Journey* dan *Respectful Workplace Policy* (RWP)
5. Program pengembangan Pegawai:
   a. *Directorship Program*
   b. Bukit Asam *Leadership Acceleration & Development Program* (BLADE)
   c. Pelatihan *Supervisor Leading Team and Decision Making*
   d. *Coaching Program*
   e. *Character & Team Building*
   f. Program Bahasa Internasional
   g. *Lean Six Sigma*

The PTBA HC Function Strategic Theme for 2023-2027 was developed in response to business needs and challenges identified through stakeholder interviews, HC surveys, trends, and benchmarking. Each strategic theme has been translated into strategic initiatives and key activities to support the implementation of the HC Management Strategic Plan.

Based on the targets above, there are several programs that have been implemented in 2023, including:

1. Preparing a Career Development Journey with the scope of work including updating and evaluating competencies, preparing career paths and preparing learning & development guidelines and matrix
2. Implementation of Fresh Graduate Recruitment and Professional Hire
3. Implementation of MIND ID and PTBA Group Talent Mobility
4. Implementation of AKHLAK Culture Journey and Respectful Workplace Policy (RWP)
5. Employee development program:
   a. Directorship Program
   b. Bukit Asam Leadership Acceleration & Development Program (BLADE)
   c. Supervisor Leading Team and Decision Making Training
   d. Coaching Program
   e. Character & Team Building
   f. International Language Program
   g. Lean Six Sigma

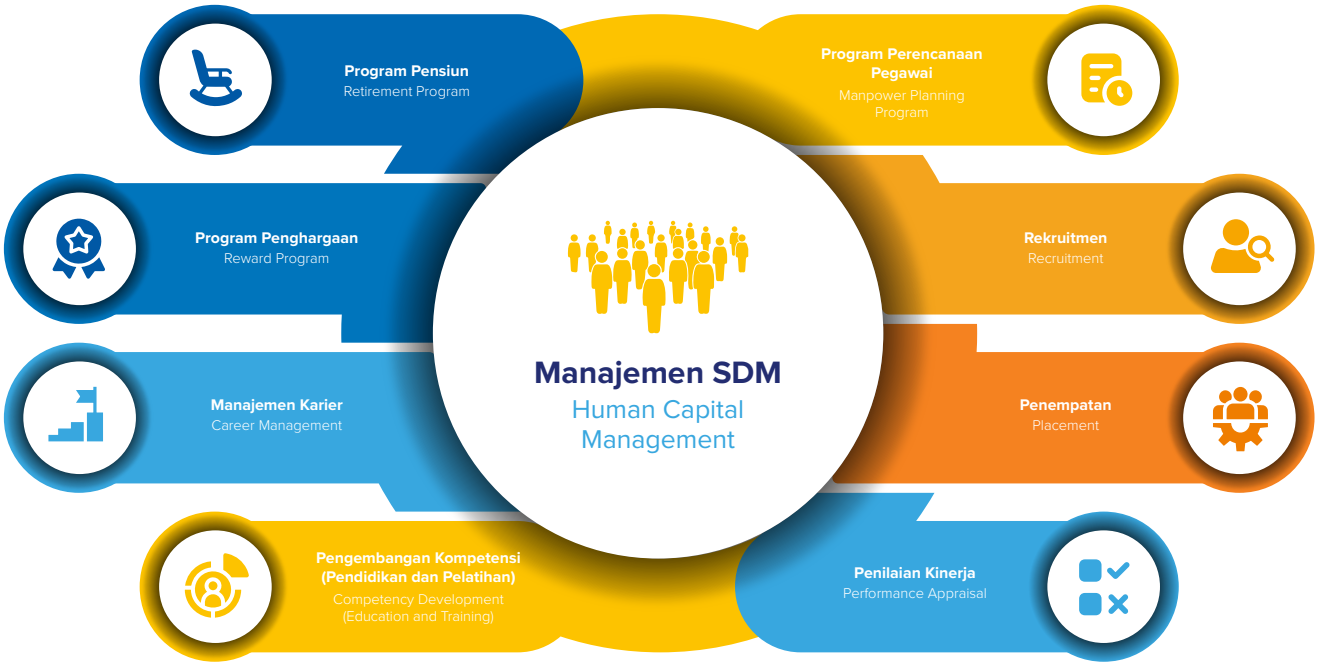
Manajemen Sumber Daya Manusia

PTBA telah memiliki kebijakan pengelolaan SDM yang diterapkan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan SDM tersebut juga didukung oleh berbagai perangkat manajemen SDM yang telah tersedia. Perangkat dimaksud, antara lain berupa kamus kompetensi, kebutuhan kompetensi jabatan, sistem *competency-based training*, sistem *knowledge management*, serta *Human Capital Management System* (HCMS). Melalui perangkat-perangkat tersebut diharapkan penilaian kompetensi karyawan akan lebih objektif. Pengembangan SDM di lingkungan PTBA juga lebih terarah sesuai dengan minat karier dan kompetensinya.

Human Capital Management

PTBA has an HC management policy that is implemented comprehensively and continuously. In its implementation, the HC management process is supported by various available HC management tools such as a competency dictionary, job competency requirements, a competency-based training system, a knowledge management system, and a Human Capital Management System (HCMS). With these tools, employee competency assessments are expected to be more objective. HC development in the PTBA environment is also more focused in each talent's career interests and competencies.

Manajemen SDM
Human Capital Management



Program Perencanaan Pegawai

Dalam rangka menghadapi perkembangan bisnis dan organisasi yang dinamis, maka diperlukan SDM yang andal, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan strategi pemenuhan SDM yang cepat dan akurat. Satuan Kerja SDM PTBA melakukan proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang dilakukan dengan mengacu kepada rencana kebutuhan karyawan (*manpower plan*), yang diselaraskan dengan rencana dan strategi Perusahaan. Hasil dari rencana *manpower* kemudian ditindaklanjuti dengan menjalankan program rekrutmen.

Employee Planning Program

In facing dynamic business and organizational developments, reliable human capital are needed. Thus, the Company always implements a fast and accurate HC fulfillment strategy. The PTBA HC Department carries out the employee recruitment and selection process by referring to the manpower needs plan which is aligned with the Company's plans and strategies. The results of the manpower plan are then followed up by the recruitment program.

PTBA juga tetap memperhatikan aspek-aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan prinsip pelaksanaan rekrutmen pegawai dalam setiap proses pemenuhan pegawai Perusahaan. Selanjutnya, Perusahaan juga secara berkala melakukan *monitoring/review* terhadap pemenuhan kebutuhan SDM.

In the recruitment program, PTBA always follows the Good Corporate Governance aspects and the principles of employee recruitment in every recruitment process. In addition, the Company regularly monitors the fulfillment of HR needs.

Program Rekrutmen

Agar Perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang, penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dirumuskan dari proses perencanaan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dipenuhi baik dari internal Perusahaan melalui proses penempatan Pegawai maupun dari eksternal melalui kegiatan pengadaan tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah, kualifikasi dan waktu yang telah ditentukan. Dengan metode pengadaan tenaga kerja (rekrutmen) yang konsisten, terukur dan berpedoman pada kaidah-kaidah tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* akan diperoleh Pegawai yang berintegritas, profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan serta akan terlaksana proses pengadaan yang transparan.

Recruitment Program

In order for the Company to continue to grow and develop, it is important to meet the workforce needs formulated from the workforce planning process. This can be met both from within the Company through the employee placement process and from the external through labor procurement activities that are in accordance with the number, qualifications and time that has been determined. With a consistent, measurable method of labor procurement (recruitment) and guided by the principles of Good Corporate Governance, Employees with integrity, professionalism and competence will be obtained as needed and a transparent procurement process will be carried out.

Pelaksanaan rekrutmen pegawai baru di lingkungan Perusahaan telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Proses *talent acquisition* tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan dan strategi yang dijalankan Perusahaan.

The Company has implemented a new employee recruitment process that adheres to the rules and regulations. The talent acquisition process is carried out to meet the Company's needs and align with its strategy.

PTBA telah memiliki mekanisme yang komprehensif dalam proses rekrutmen pegawai sehingga dapat memperoleh karyawan yang tidak hanya memiliki *skill* dan *knowledge* sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, tetapi juga memiliki *attitude* yang sesuai dengan budaya Perusahaan. Selain itu, PTBA juga memiliki mekanisme rekrutmen internal melalui program promosi dan rotasi.

PTBA has a thorough recruitment process to ensure that it hires employees that not only have necessary skills, and knowledge, but also have attitudes that align with the company's culture. In addition to external hiring, PTBA also implements internal recruitment through promotion and rotation programs.

Pada tahun 2023, PTBA telah melakukan rekrutmen sebanyak 60 Pegawai, yang terdiri dari 19 Pegawai *fresh graduate* dan 41 *pro hire*.

In 2023, PTBA recruited as many as 60 Employees, consisting of 19 fresh graduates and 41 Pro-hire employees.

Penempatan Pegawai

Setiap pegawai yang direkrut Perusahaan akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini dimaksudkan agar pegawai tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap perkembangan dan pertumbuhan Perusahaan. Para calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai PTBA melalui masa percobaan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi, sesuai ketentuan Perusahaan.

Employee Placement

Every employee recruited by PTBA will be placed in a suitable position with their qualifications. This step is important to ensure optimal contribution by the employee to the Company's development. Prospective employees can be officiated as PTBA employees through a trial period that has been determined in a Board of Directors Decree, which is in line with the Company regulations.

Selain itu, PTBA juga melaksanakan program rotasi, mutasi, dan promosi pegawai sebagai bagian dari strategi penempatan pegawai untuk memberikan kesempatan kepada pegawai agar dapat mengembangkan karier dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Perusahaan.

In addition, PTBA also implements employee rotation, transfer, and promotion programs as part of its employee placement strategy to provide opportunities for employees to develop their careers and bring more contributions to the Company.

Penilaian Kinerja

Sistem penilaian kinerja di PTBA disusun untuk mengatur kegiatan pengelolaan kinerja yang terdiri dari tahapan penyusunan target dan indikator kinerja, *monitoring*, evaluasi capaian kinerja secara periodik, penilaian kinerja individu dan penilaian kompetensi secara tahunan, serta pemberian *reward* atas capaian kinerja. Penilaian kinerja pegawai dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengembangan pegawai guna meningkatkan kinerja Perusahaan.

Perusahaan melaksanakan 2 (dua) kali penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai), yang dilakukan dalam setahun. Penilaian tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu *performance plan, performance review*, dan *performance appraisal*.

Pada tahap *performance plan* di PTBA, pegawai dan atasan akan menyepakati target serta komitmen dalam mencapai target di tahun berjalan. Proses penetapan kesepakatan kinerja pegawai telah disusun dan ditetapkan berdasarkan target perusahaan dan Rencana Kerja Tahunan, yang berisi tentang kegiatan kerja yang akan dilakukan, target, hasil kinerja yang akan dicapai, *timeline* waktu pelaksanaan target kinerja, dan estimasi waktu penyelesaiannya.

Kemudian, Perusahaan menjalankan tahap *performance review* dengan memantau pencapaian kinerja masing-masing individu maupun grup/kelompok melalui *coaching* dan *mentoring*, *knowledge sharing*, inovasi, dan *improvement*. Selanjutnya, Perusahaan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai (*performance appraisal*), baik secara individual, tim, maupun pada tingkat Perusahaan secara periodik. Hasil evaluasi yang telah dilakukan kemudian digunakan untuk beberapa tujuan, di antaranya:

1. Sebagai umpan balik bagi pengembangan kompetensi individu;
2. Sebagai dasar untuk pemberian penghargaan bagi pegawai yang kinerjanya memenuhi atau melebihi target sesuai kesepakatan KPI sebelumnya; dan
3. Untuk menentukan program pembinaan bagi pegawai yang kinerjanya masih belum memenuhi ukuran kinerja yang ditetapkan.

Program Pengembangan Kompetensi Pegawai

Perusahaan telah meluncurkan program pendidikan dan pengembangan pegawai untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki kedewasaan dalam berorganisasi. Hal ini bertujuan agar Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Program ini tidak hanya berfokus pada kemampuan dan kompetensi pegawai, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti sistem manajemen, kebijakan, strategi, dan peraturan.

Performance Assessment

The performance assessment system at PTBA is designed to regulate performance management activities consisting of the stages of setting performance targets and indicators, monitoring, evaluating performance achievements, assessing individual performance, and evaluating competencies annually, followed by rewards for performance achievements. Employee performance assessments can be used as a reference in preparing employee development plans to improve the Company's performance in general.

Every year, PTBA carries out two employee performance assessments through the PPKP (Employee Performance Assessment) application. The assessment consists of three stages, namely performance plan, performance review, and performance appraisal.

During the performance plan stage at PTBA, employees and their superiors will establish targets and commitments to be achieved in the current year. The process of setting employee performance agreements is based on company targets and the Annual Work Plan, which outlines work activities, targets, expected performance results, timelines for achieving targets, and estimated completion times.

Moreover, PTBA conducts a performance review stage by monitoring the performance achievements of each individual and group through coaching and mentoring, knowledge sharing, innovation, and improvement. Furthermore, the Company evaluates the performance of all employees (performance appraisal), both individually, as a team, and at the company level periodically. The results of the evaluation will be used for several purposes, namely:

1. As feedback for individual competency development;
2. As a basis for awarding employees whose performance meets or exceeds targets set on agreements; and
3. To determine a coaching program for underachievers.

Competency Development Program

The Company has launched an employee education and development program to increase operational productivity and organizational maturity. This aims to make the Company becoming more effective and efficient in achieving its vision and mission. This program not only focuses on employee abilities and competencies, but also fulfills other aspects such as management systems, policies, strategies, and regulations.

Dalam konteks ini, Perusahaan sangat mengakui pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang berlaku di Perusahaan. Salah satunya adalah Program Profesi dan Sertifikasi, yang merupakan investasi jangka panjang Perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa depan. Program ini telah disesuaikan dengan Rencana Pelatihan tahunan yang dibuat berdasarkan *Individual Development Plan* masing-masing pegawai.

PTBA juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau agama, untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Namun, pelaksanaan program ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh Perusahaan.

Perusahaan juga mengembangkan kompetensi manajerial, kepemimpinan, Bahasa internasional, serta program persiapan masa pensiun

1. *Directorship Program*
   Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan, membekali serta meningkatkan kapabilitas pegawai BOD-1 dan BOD-2 untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menduduki jabatan sebagai Direktur atau Komisaris.
2. Bukit Asam *Leadership Acceleration & Development Program* (BLADE)
   Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali pegawai agar dapat memiliki keahlian dan karakteristik yang sesuai dalam menghadapi tantangan perusahaan kedepan, serta pengembangan Pegawai.
3. Pelatihan *Supervisor Leading Team and Decision Making*
   Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali pegawai agar dapat mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan pada level BOD-4.
4. *Coaching Program*
   Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali pegawai agar dapat meningkatkan keterampilan, mengembangkan tim serta membangun budaya *coaching* di PTBA.
5. *Character & Team Building*
   Program Pelatihan yang dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, pembentukan karakter, serta meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar pegawai PT Bukit Asam Tbk yang *inline* dengan *core value* BUMN.
6. Program Bahasa Internasional
   Program Pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali pegawai PT Bukit Asam Tbk agar dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam Bahasa Internasioanal terutama Bahasa Inggris.
7. *Lean Six Sigma*
   Program Pelatihan & Sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis yang dilakukan di PT Bukit Asam Tbk.

The Company realizes that employee training is important to fulfill technical and regulatory requirements. One of them is the Professional and Certification Program, which is the Company's long-term investment in improving employee's performances in the future. This program has been tailored to the annual Training Plan which is created based on each employee's Individual Development Plan.

PTBA also provides equal opportunities to all employees, regardless of gender, race, and religion, to take part in training and competency development programs. However, the implementation of this program is still adjusted to the Company's specific needs.

In addition, the Company also develops managerial competencies, leadership, international languages, and retirement preparation programs.

1. Directorship Program
   Training Program to prepare, equip, and improve the capabilities of BOD-1 and BOD-2 employees to be able to hold positions as Director or Commissioner.
2. Bukit Asam Leadership Acceleration & Development Program (BLADE)
   Training Program to prepare and equip employees to have appropriate skills and characteristics in facing company's future challenges and as part of employee development.
3. Supervisor Leading Team and Decision-Making Training
   Training Program to prepare and equip employees to develop managerial and leadership competencies at BOD-4 level.
4. Coaching Program
   Training program to prepare and equip employees to improve skills, develop teams, and build a coaching culture in PTBA.
5. Character & Team Building
   A training program designed to increase productivity, build character, and increase cooperation and collaboration between PT Bukit Asam Tbk employees which is in line with SOEs' core values.
6. International Language Program
   A training program to improve PT Bukit Asam Tbk employees' communication skills in international languages, especially in English.
7. Lean Six Sigma
   A training and certification program to increase the efficiency of business processes carried out at PT Bukit Asam Tbk.

Selain itu, terdapat juga pelatihan untuk memenuhi kompetensi teknis dan program sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Operasional pekerjaan maupun pemenuhan regulasi.

In addition, the Company also provides training to fulfill technical competencies and certification programs in accordance with work operational needs and regulatory compliance.

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi seluruh pegawai. Hal ini sejalan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) 24 *Learning Hours* yang telah diterapkan PTBA sejak tahun 2020, dimana seluruh pegawai wajib mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis maupun non teknis minimal sebanyak 24 jam selama satu tahun.

The Company is always committed to increase employees' knowledge, capacity, and competence. This is in line with the Key Performance Indicator (KPI) of 24 Learning Hours, which has been implemented by PTBA since 2020, where all employees are required to join training and development in technical and non-technical competencies for a minimum of 24 hours for one year.

PTBA memiliki rencana pelatihan tahunan yang disusun berdasarkan IDP dan penyelarasan KPI 24 *Learning Hours,* yang disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan Perusahaan, gap kompetensi, dan hasil penilaian pegawai. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah menyelenggarakan sebanyak 396 Pelatihan dan Pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

PTBA also has an annual training plan prepared based on the IDP and the 24-Learning Hours KPI alignment, which is regulated based on the Company's development needs, competency gaps, and employee assessment results. Throughout 2023, the Company has organized 396 trainings and developments with the following details:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Number of Training and Development Programs	13	35	37	12	26	30	35	38	26	35	56	53	**396**

Selain itu, Perusahaan juga memiliki program beasiswa bagi pegawai dengan memberikan fasilitas dan kesempatan bagi para pegawai yang berminat dan dinyatakan lolos hasil seleksi untuk melanjutkan pendidikan dengan program studi sesuai kebutuhan Perusahaan.

In addition to the benefits mentioned, the company offers a scholarship program for employees. This program provides opportunities for interested employees who have successfully passed the selection process to pursue further education in a field that aligns with the company's requirements.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah mengirimkan pegawai untuk melaksanakan program tugas belajar, baik program diploma III maupun magister ke beberapa universitas terkemuka, baik di Indonesia maupun ke luar negeri, di antaranya:

In 2023, the Company has sent employees to carry out study assignment programs for both diploma III and master's programs to several leading universities, both in Indonesia and abroad, including:

No	Universitas University	Jurusan Pendidikan Department of Education	Waktu Pendidikan Study Assignment Period	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Colorado School of Mines Amerika Serikat Colorado School of Mines, the United States	Advance Energy System	18 Agustus 2022 s/d 17 Agustus 2024 August 18, 2022 - August 17, 2024	2 orang | people
		Mining Engineering	14 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2025 August 14, 2023 - August 13, 2025	1 orang | person
2	University of Michigan Amerika Serikat University of Michigan, the United States	Business Administration	14 Agustus 2023 s/d 13 Agustus 2025 August 14, 2023 - August 13, 2025	1 orang | person
3	Waseda University Jepang Waseda University, Japan	Law	01 April 2022 s/d 31 Maret 2023 April 01, 2022 - March 31, 2023	1 orang | person
4	Politeknik Energi Pertambangan, Bandung Polytechnic of Mining Energy, Bandung	Pertambangan Mining	11 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2025 August 11, 2022 - August 31, 2025	5 orang | people
5	Politeknik Negeri Sriwijaya Sriwijaya State Polytechnic	Teknik Mesin Mechanical Engineering	11 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2025 August 11, 2022 - August 31, 2025	2 orang | people
		Teknik Elektronika Electrical Engineering	11 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2025 August 11, 2022 - August 31, 2025	3 orang | people
Jumlah Total				**15 orang | people**

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah menyelenggarakan Uji Kompetensi (*Assessment*) Non-Teknis kepada pegawai sebanyak 327 orang dan Uji Kompetensi (*Assessment*) Teknis sebanyak 508 orang. Data tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengidentifikasi *gap* kompetensi pegawai. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

In 2023, the Company conducted Non-Technical Competency Tests (Assessments) for 327 employees and Technical Competency Tests (Assessments) for 508 individuals. This data serves as a guide for identifying employee competency gaps. The breakdown is as follows:

Program	Objective	Jumlah Jumlah
Uji Kompetensi (Asesmen) Non Teknis J1 Non-Technical Competency Test (Assessment) J1	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ1 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ1	21 orang I people
Uji Kompetensi (Asesmen) Non Teknis J2 Non-Technical Competency Test (Assessment) J2	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ2 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ2	84 orang I people
Uji Kompetensi (Asesmen) Non Teknis J3 Non-Technical Competency Test (Assessment) J3	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ3 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ3	155 orang I people
Uji Kompetensi (Asesmen) Non Teknis J4 Non-Technical Competency Test (Assessment) J4	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ4 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ4	67 orang I people
Uji Kompetensi (Asesmen) Teknis J4 Technical Competency Test (Assessment) J4	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ4 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ4	74 orang I people
Uji Kompetensi (Asesmen) Teknis J5 Technical Competency Test (Assessment) J5	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ5 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ5	152 orang I people
Uji Kompetensi (Asesmen) Teknis J6 Technical Competency Test (Assessment) J6	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Teknis dan Non-teknis untuk JJ6 Implementation of Technical and Non-technical Competency Assessments for JJ6	282 orang I people
Jumlah **Total**		**835 peserta I people**

Program pendidikan atau pelatihan yang telah dilaksanakan PTBA di sepanjang tahun 2023 telah mencakupi beberapa jenis pengembangan kompetensi, di antaranya:

The education or training programs that PTBA has implemented throughout 2023 include several types of competency development, including:

Nama Pelatihan Training Name	Tujuan Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Objectives	Biaya Pelatihan (Rp) Training Cost (Rp)
Tugas Belajar (termasuk Eksisting) Study Assignment (including existing)	Mempersiapkan pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menunjang peningkatan Kinerja Perusahaan Preparing employees with the knowledge and skills to enhance company performance.	4.487.324.856
Leadership	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai Increasing employee leadership competence	1.376.868.695
Manajerial Managerial	Meningkatkan kompetensi manajerial pegawai Increasing employee managerial competence	272.940.000
Teknis (Inti dan Penunjang) Technical (Core and Supporting)	Meningkatkan kompetensi teknis pegawai Increasing employee technical competence	8.802.497.992
Sertifikasi (Mandatory dan Profesi) Certification (Mandatory and Professional)	Memenuhi persyaratan regulasi Meet regulatory requirements	3.553.969.326
Kesisteman Systematicity	Meningkatkan pengetahuan kesisteman di PTBA Increasing system knowledge at PTBA	106.870.000
PROPER	Pemenuhan pelatihan untuk penilaian PROPER Fulfillment of training for PROPER assessment	449.161.000
Penyegaran Refreshment	Mengulang pengetahuan pegawai Review employee knowledge	12.016.000
Coaching / Mentoring	Meningkatkan keterampilan pegawai dalam proses *coaching / mentoring* Improve employee skills in the coaching/mentoring process	1.107.230.000
Pembekalan Pra Pensiun Pre-Retirement Provision	Mempersiapkan mental maupun finansial pegawai yang mendekati masa pensiun Preparing mentally and financially for employees who are approaching retirement	795.230.000
Assessment Center	Pengembangan dan Evaluasi Pegawai Employee Development and Evaluation	1.844.515.000
Pelatihan Bahasa Internasional International Language Training	Meningkatkan kompetensi terkait dengan penguasaan Bahasa internasional untuk Penunjang pekerjaan Increasing competence related to mastery of international languages for Job support	668.236.185
Jumlah **Total**		**23.476.859.054**

Biaya Pengembangan Kompetensi

Perusahaan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani yang dimiliki. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan penyediaan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2023, seluruh pegawai PTBA mendapatkan pelatihan dengan rata rata jumlah waktu sebanyak 244 Jam dengan investasi pengembangan tiap pegawai mencapai Rp15,65 Juta per orangnya. Hal tersebut mengalami peningkatan 0,7% dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp15,54 Juta per orangnya.

Competency Development Costs

The Company is committed to continuously improving the capacity and quality of its human capital. One of these commitments is realized by providing an investment budget for employee competency development programs on an ongoing basis.

Throughout 2023, all PTBA employees received training with an average of 244 hours with development investment per employee reaching Rp15.65 Million per person. It increased 0.7% compared to 2022, which amounted to Rp15.54 Million per person.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai
Cost of Employee Competency Development

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Perbandingan Realisasi 2023 dan 2022 Comparison of Realization 2023 and 2022	
			Selisih (Rp) Difference (Rp)	Presentase (%) Percentage (%)
Pengembangan Kompetensi Competency Development	23.476.859.054	24.773.157.414	-1.296.298.360	-5,2%

*Penurunan terjadi karena adanya perbedaan jumlah pegawai pada tahun 2022 dan 2023
The decrease occurred due to differences in the number of employees in 2022 and 2023

Manajemen Pengembangan Karier Pegawai

PTBA memberikan kesempatan yang sama dan luas kepada setiap pegawai untuk mengembangkan karier di Perusahaan. Pegawai yang memiliki kinerja dan kompetensi yang baik akan memiliki potensi untuk terus berkembang hingga ke level tertinggi di Perusahaan.

Program pengembangan karier yang dijalankan Perusahaan juga merupakan bagian dari strategi PTBA untuk dapat mempertahankan talenta terbaik yang dimilikinya, salah satu upayanya adalah menyediakan jenjang karier yang jelas. Karenanya, Perusahaan memperhatikan kebutuhan pengembangan pegawai melalui hasil pembinaan sebagai bagian dari evaluasi kerja dan penilaian kompetensi yang memunculkan kebutuhan pelatihan sesuai kondisi operasional di lapangan.

Pengembangan karier bagi Pegawai bermanfaat sebagai sarana pengembangan diri, peluang menyatakan eksistensi, penumbuhan motivasi, dan untuk pengukuran kelebihan dan kekurangan dirinya dalam rangka meningkatkan kemampuan. Di lain pihak, bagi Perusahaan pengembangan karier bermanfaat sebagai media dalam upaya menyediakan Pegawai yang sesuai dengan strategi Perusahaan, mengatur agar Perusahaan memiliki dan mengaplikasikan sistem pengembangan karier yang jelas dan terukur, mengidentifikasi Pegawai yang potensial, menciptakan iklim kompetesi yang sehat dan menyediakan standar kompetensi Pegawai yang dibutuhkan pada setiap jabatan di Perusahaan.

Kegiatan Pengembangan karier di Perusahaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jenjang Karier
   a. Jenjang karier memberikan gambaran proyeksi secara berjenjang yang akan dilalui oleh Pegawai selama masa kerja yang bersangkutan di Perusahaan.

Career Development Management

PTBA provides equal and wide opportunities for every employee to develop their career in the Company. Employees with good performance and competence can continue to reach the highest levels in the Company.

The career development program run by the Company is also part of PTBA's strategy to retain its best talents, by providing clear career paths for them. Therefore, PTBA always pays attention to employee development needs through coaching as part of job evaluation and competency assessment which then provides training needs according to conditions in the field.

Management of employee career development as structural officials or functional officials in the Company is carried out through a combination of Employee Career Plan, Management Career Plan, and Succession Career Plan. In the Employee Career Plan, employees can choose their desired position in the future, both rotation and higher promotion with three positions based on their qualifications. Meanwhile, in the Management Career Plan, the upper management selects positions that are suitable for the career development of the employees who are subordinate to them, both with equivalent positions (rotation) or higher (promotion) and their priorities with a total of 3 positions in each line.

There are several requirements for every position that employees must possess such as:

1. Career Path
   a. Career path provides the big picture of what an employee will go through during their working period at the Company.

b. Jalur karier (*career path*) disusun berdasarkan kelompok jabatan (cluster, rumpun dan bidang), yaitu kesatuan bidang pekerjaan utama yang menggambarkan akuntabilitas, cakupan dan persyaratan kompetensi yang menentukan pencapaian kinerja unggul.
c. Perusahaan menetapkan 2 (dua) sistem pembinaan melalui jalur karier, yaitu jalur karier manajerial dan fungsional sebagai berikut:
   - Jalur karier manajerial, merupakan jalur pembinaan bagi Pegawai untuk menduduki jabatan struktural. Arah pembinaan pada jalur karier ini mengikuti hierarki struktur organisasi Perusahaan, PTBA Group dan MIND ID Group.
   - Jalur karier fungsional, merupakan jalur pembinaan bagi pegawai yang menduduki jabatan non struktural (fungsional dan pelaksana). Arah pembinaan pada jalur karier ini ditentukan berdasarkan keahlian/ keterampilan seseorang yang ditunjukkan dalam peningkatan kompetensi dan kinerja dengan berpedoman pada formasi jabatan.

2. Perencanaan Karier
   a. Perencanaan karier pegawai adalah suatu proses masing-masing Pegawai merencanakan kariernya sesuai kebutuhan Perusahaan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan dan minatnya serta merencanakan program-program untuk mencapainya.
   b. Atasan masing-masing Pegawai bertanggung jawab untuk membantu dan mengarahkan pencapaian rencana karier melalui pengarahan dan bimbingan serta pengembangan kompetensi.

3. Rencana Pengembangan Individu (Individual Development Plan/IDP)
   Rencana pengembangan individu dimaksudkan untuk menentukan program pengembangan setiap Pegawai guna meningkatkan kapabilitas Pegawai dalam memenuhi tuntutan jabatan saat ini dan jabatan yang akan datang.

   Rencana pengembangan individu disusun berdasarkan hasil identifikasi kompetensi yang bersangkutan dengan penekanan pada kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, dalam penentuan target kerja dan area pengembangan yang dibutuhkan, agar mengakomodir aspirasi Pegawai dan atasan Pegawai.

4. Perencanaan Suksesi
   Kegiatan perencanaan suksesi mencakup identifikasi, seleksi, dan penyiapan Pegawai untuk pengisian jabatan. Penentuan calon pemegang jabatan dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan *talent pool* dengan jumlah calon minimal 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.

5. Mutasi
   Mutasi dalam pengembangan karier adalah pergerakan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain sesuai kebutuhan Perusahaan dan rencana pembinaan karier Pegawai.

b. Career paths are arranged based on job groups (clusters, families and fields), namely the unity of the main work fields that describe accountability, scope and competency requirements that determine the achievement of superior performance.
c. The company has established 2 (two) coaching systems through career paths that are managerial and functional career paths as follows:
   - Managerial career path, is a development path for employees to occupy structural positions. The direction of coaching on this career path follows the hierarchical organizational structure of the Company, PTBA Group and MIND ID Group.
   - Functional career path, is a development path for employees who occupy non-structural (functional and executive) positions. The direction of coaching on this career path is determined based on skills/ person's skills shown in increasing competence and performance based on position formation.

2. Career Planning
   a. Employee career planning is a process of each employee planning his career according to the Company's needs based on an assessment of his abilities and interests and planning programs to achieve them.

   b. Each employee's superior is responsible for assisting and directing the achievement of career plans through direction and guidance as well as competency development.

3. Individual Development Plan (IDP)

   The individual development plan is intended to determine the development program for each employee in order to increase the employee's capabilities to meet the demands of the current position and future positions.

   Individual development plans are prepared based on the results of the identification of competencies concerned with an emphasis on their strengths. In addition, in determining work targets and development areas needed, in order to accommodate the aspirations of employees and employees' supervisors.

4. Succession Planning
   Succession planning activities include identification, selection, and preparation of employees to fill positions. Determination of candidates for office holders is carried out through selection based on a talent pool with a minimum of 3 (three) candidates for each position.

5. Reassignment
   Reassignment in career development is the movement of employees from one position to another according to the needs of the Company and the employee's career development plans.

Dalam proses mutasi dimungkinkan seorang Pegawai berpindah dari suatu fungsi ke fungsi lainnya (*cross function*), sejauh memenuhi persyaratan jabatan.

Mutasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
a. Rotasi, yaitu pergerakan jabatan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam kategori jabatan yang sama. Rotasi Pegawai dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi jabatan atau memperkaya kompetensi (competency enrichment) Pegawai sesuai rencana pengembangan karier Pegawai.
b. Promosi, yaitu pergerakan jabatan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang lain pada kategori jabatan setingkat lebih tinggi. Promosi dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi jabatan serta merupakan pengakuan dan penghargaan Perusahaan kepada Pegawai atas kemampuan dan integritasnya.
c. Demosi, yaitu pergerakan jabatan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang lain pada kategori jabatan yang lebih rendah sebagai akibat prestasi kerja yang tidak baik dan/atau pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Karier merupakan bagian dari manajemen talenta. Manajemen talenta sendiri merupakan komitmen dari Perusahaan dalam rangka mengelola Pegawai terbaik.

Program Penghargaan bagi Pegawai

PTBA sangat menghargai para pegawai yang telah dengan sungguh-sungguh memberikan dedikasi dan kontribusinya untuk pengembangan dan kemajuan Perusahaan. Sebagai bentuk apresiasi, PTBA memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik sekaligus sebagai stimulus dalam meningkatkan kinerja para pegawai. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan capaian kinerja yang diperolehnya.

Bentuk penghargaan atau *reward* yang diberikan Perusahaan kepada pegawai berprestasi adalah sebagai berikut:
1. Penghargaan Prestasi
   Penghargaan yang diberikan dengan ketentuan Pegawai ataupun sekelompok Pegawai mendapatkan penghargaan pada kompetisi resmi tingkat Nasional maupun Internasional sesuai dengan bidang tugas.
2. Penghargaan Teladan
   Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai yang telah memperlihatkan keteladanan melalui perilaku yang sesuai dengan *Core Value* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta menunjukkan perilaku kunci *Agile, Going Extra Miles* dan *Accountable*, baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.
3. Penghargaan Inovasi
   Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau sekelompok pegawai yang menjuarai kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh perusahaan.

In the reassignment process, it is possible for an employee to move from one function to another (cross function), as long as it meets the requirements of the position.

Reassignment are grouped into 3 (three) types, namely:
a. Rotation, namely the movement of employees from one position to another position in the same position category. Employee rotation is carried out in order to fill position formations or enrich employee competencies according to employee career development plans.
b. Promotion, namely the movement of an employee from one position to another position in a higher level position category. Promotions are carried out in order to fill position formations and are the Company's recognition and appreciation to employees for their abilities and integrity.
c. Demotion, namely the movement of an employee from one position to another position in a lower position category as a result of poor work performance and/or violations of work rules and discipline or applicable laws and regulations.

Career Management is part of talent management. Talent management itself is a commitment from the Company to manage the best employees.

Employee Reward Program

PTBA appreciates its employees who have dedicated and contributed to the Company's development. As a form of appreciation, PTBA grants rewards to employees who have shown excellent performance, which is also a form of stimulus to improve their performance. Rewards are given to outstanding employees in accordance with their achievements.

The forms of rewards granted by the Company to outstanding employees are as follows:
1. Achievement Award
   Awards are given to employees or a group of employees receiving awards in official national and international competitions in their field of work.
2. Exemplary Employee Award
   An award for employees who have shown exemplary behavior in accordance with AKHLAK's Core Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) and demonstrated the key behaviors of Agile, Going Extra miles, and being Accountable, both at the workplace and in society.
3. Innovation Award
   Award given to employees or a group of employees who won the innovation competition organized by the company.

Program Pensiun

PTBA senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai, baik itu selama mengabdi maupun yang telah purnabakti. Dalam rangka memelihara kesinambungan penghasilan Pegawai pada hari tua, Perusahaan memberikan Program Pensiun yang berasal dari kontribusi Pegawai dan Perusahaan, yang meliputi:

1. Diterima bulanan:
   Manfaat Jaminan Hari Tua dari Dana Pensiun PTBA;
2. Diterima sekaligus:
   a. Manfaat Program Pensiun Iuran Pasti yang Merupakan Penggabungan dari:
      - Program Pensiun Iuran Pasti
      - Manfaat Jaminan Hari Tua dari Asuransi Jiwasraya
      - Tabungan Hari Tua dari AJB Bumiputera 1912
      - Tabungan Hari Tua dari Taspen
      - Tambahan Manfaat Pensiun
   b. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan
      - Jaminan Hari Tua
      - Jaminan Pensiun
   c. Uang Cuti Besar (5 kali Penghasilan)
   d. Jaminan Kesehatan bagi pensiunan dan pasangan

Di samping itu, Perusahaan juga memberikan cuti besar, yaitu untuk tidak masuk kerja selama 3 (tiga) bulan sebelum memasuki usia pensiun dengan tetap mendapat penghasilan, fasilitas, dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PTBA. Namun, pegawai juga dapat mengajukan untuk tidak mengambil cuti besar tersebut.

Hubungan Industrial

PTBA terus berkomitmen untuk membangun serta memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara pegawai dan Perusahaan. Hubungan tersebut dilandasi pada asas saling menghormati untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hal tersebut dilakukan dengan komunikasi intensif dan keterlibatan antara PTBA dan pegawai dalam mencapai target Perusahaan yang telah dirancang.

PTBA menempatkan karyawan sebagai mitra strategis dalam rangka membangun dan memelihara hubungan kerja yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi yang teratur dan berkesinambungan. Perusahaan memiliki serikat pekerja untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki wadah untuk menyalurkan keinginan mereka. Saat ini, terdapat 1 (satu) organisasi serikat pekerja yang berada di lingkungan PTBA, yaitu Serikat Pegawai PTBA (SPBA) yang telah tercatat di instansi ketenagakerjaan dengan nomor Bukti Pencatatan: 560/1128/Disnaker/6.4/2019.

Dalam rangka menjalin komunikasi yang baik antara Perusahaan dan pegawai, PTBA secara rutin mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang melibatkan serikat pekerja dan perwakilan dari Perusahaan. Untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis antara Perusahaan dan pegawai serta untuk menjamin keamanan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, PTBA telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi

Retirement Program

PTBA pays attention to the welfare of its employees, both while serving and those who have retired. In order to maintain the continuity of employee's income in their old age, a Retirement Program is put in place by the Company, generated through employees and the Company's contribution, which covers:

1. Received monthly:
   Pension Benefits from PTBA Pension Fund;
2. Received at once:
   a. Benefits of a Defined Contribution Pension Program which is a combination of:
      - Defined Contribution Pension Plan
      - Old Age Security Benefits from Jiwasraya Insurance
      - Old Age Savings from AJB Bumiputera 1912
      - Old Age Savings from Taspen;
      - Additional Retirement Benefits
   b. Benefits of BPJS Employment
      - Pension plan
      - Retirement Security
   c. Big Leave Pay (5 times Income)
   d. Health insurance for retirees and spouses

The Company also grants long-time leave, which permits employees to be absent from work for three months before entering retirement age while still accepting income, facilities, and other rights in accordance with the prevailing provisions at PTBA. However, employees can also appeal not to be granted this long-time leave.

Industrial Relations

PTBA is committed to maintain its industrial relations as a system of healthy, harmonious, and constructive working relations between employees and the Company. The industrial relations are based on the principle of mutual respect to create a balance between the fulfillment of rights and the implementation of duties. This is carried out through intensive communication and participation between the Company and the employees in achieving the Company's target.

PTBA places employees as strategic partners in building and maintaining harmonious working relationships through regular and continuous communication. The Company also grants rights to employees to establish labor union organization. Currently, there is one labor union in PTBA, namely the Labor Union of PTBA which has been registered with the employment agency with Registration Evidence number: 560/1128/Disnaker/6.4/2019.

In order to build and maintain a harmonious communication between the Company and employees, PTBA regularly holds meetings with the labor union and the Company's representatives. To realize a dynamic and harmonious relationship between the two parties and to ensure security between the rights and obligations of both parties, PTBA has prepared a Collective Labor Agreement which serves as a guideline for cooperation between employees and the

pedoman kerja sama antara pegawai dan Perusahaan. PKB ini juga membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah/perselisihan di tempat kerja.

PKB terakhir yang dimiliki Perusahaan disahkan terakhir kali pada 12 April 2023 dan telah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.230509001/B/VI/2023 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Asam Tbk dengan Serikat Kerja Pegawai Bukit Asam tanggal 05 Juni 2023.

Membangun Budaya Kerja

PTBA terus berupaya menginternalisasi Tata Nilai Perusahaan sesuai dengan arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), yang telah menetapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai utama, dan juga sebagai dasar pembentukan karakter di seluruh lingkungan BUMN. AKHLAK adalah singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, yang menjadi standar perilaku dan panduan dalam budaya kerja yang mewujudkan semangat "BUMN untuk Indonesia".

Dengan mengintegrasikan AKHLAK ke dalam Tata Nilai Perusahaan, diharapkan semua anggota Perusahaan akan lebih optimal dan memiliki arah yang jelas dalam pengembangan masa depan. PTBA telah mengimplementasikan Program Budaya melalui elemen budaya berdasarkan tahapan internalisasinya, selain itu telah Menyusun Rencana Strategis Transformasi Budaya dan mendapatkan nilai *Employee Engagement* di atas norma industri sejenis.

1. Implementasi Program Budaya melalui tiga elemen

   Perusahaan secara berkesinambungan mengadakan program budaya dan membaginya ke dalam tahapan internalisasi, yaitu *awareness, understanding, acceptance* dan *commitment* yang telah diselaraskan dengan tahapan pedoman AKHLAK *Culture Journey* (berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-5/MBU/05/2022) dan menguraikan pendekatannya dalam tiga elemen utama. Elemen pertama adalah *Leadership (Leaders Behavior)* yang berarti Perusahaan melibatkan baik *Formal Leaders*, Manajemen dan Pemimpin Struktural dari Satuan Kerja dan tim, maupun *Informal Leaders* atau agen-agen perubahan untuk menjadi *role model* dalam menjalankan *Key Behaviour* serta memastikan seluruh Pegawai memahami Visi, Misi, *Noble Purpose*, dan nilai-nilai perusahaan. Elemen kedua adalah sistem yang berarti Perusahaan memastikan sistem organisasi dan manajemen SDM yang digunakan dapat mendorong terwujudnya budaya perusahaan yang diharapkan. Kemudian elemen yang terakhir adalah simbol yang berarti Perusahaan menggunakan atribut fisik maupun digital yang dapat menjadi pengingat Insan Perusahaan tentang budaya yang sedang dikembangkan.

Company. This Collective Labor Agreement also helps both del. parties to resolve problems/disputes in the workplace.

The Company's final Collective Labor Agreement was completed on April 12, 2023, and approved by the Ministry of Manpower and Transmigration under Decree No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.230509001/B/VI/2023. This decree pertains to the Collective Work Agreement between PT Bukit Asam Tbk and the Bukit Asam Employees' Work Union, dated June 5, 2023.

Establishing a Work Culture

PTBA continues to internalize Corporate Values as stated in the direction of the SOEs Ministry which has established AKHLAK as the main values and also as the basis for character formation throughout the SOEs environment. AKHLAK is an abbreviation of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, which is a standard of behavior that guides a work culture that embodies the spirit of "BUMN for Indonesia" (SOEs for Indonesia).

By integrating AKHLAK into the Company's values, all company members are expected to have more optimal and clear direction in future development. PTBA always carries out programs to socialize and internalize the Company's core values to provide knowledge and increase employees' understanding regarding these core values. This effort is made to ensure that the Company Culture can truly be reflected in the daily activity of all employees in carrying out their duties.

1. Implementation of the Cultural Program through three elements
   The company continuously holds cultural programs and divides them into internalization stages, namely awareness, understanding, acceptance and commitment which have been aligned with the AKHLAK Culture Journey guideline stages (based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-5/MBU/05/2022) and outlines the approach in three elements main. The first element is Leadership (Leaders Behavior) which means that the Company involves both Formal Leaders, Management and Structural Leaders from Work Units and teams, as well as Informal Leaders or change agents to become role models in carrying out Key Behavior and ensuring that all Employees understand the Vision, Mission, Noble Purpose, and company values. The second element is the system, which means the company ensures that the organizational and HC management systems used can encourage the realization of the expected company culture. Then the final element is a symbol, which means the company uses physical and digital attributes that can serve as a reminder to company personnel about the culture that is being developed.

Adapun program yang ada di PTBA dalam upaya membangun budaya kerja yang telah dibagi sesuai dengan 3 (tiga) elemen utama, di antaranya:

a. *Leadership*
- Better Us (*Coaching, Mentoring* dan Konseling)
  Better Us terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu Coaching Culture & Konseling, dimana pada program Coaching Culture sasarannya adalah para *leaders* pada level BOD-1 s/d BOD-3. Sedangkan untuk program konseling sasarannya adalah seluruh pegawai.

  Coaching culture merupakan program Pembinaan pegawai melalui Pengembangan *Leaders* di lingkungan PTBA untuk mencapai visi perusahaan menjadi perusahaan energi kelas dunia serta sebagai bentuk peningkatan nilai kompeten, dimana salah satu perilakunya adalah membantu orang lain belajar. Program ini juga ditujukan untuk menumbuhkan budaya coaching pada *leaders*. Pada tahun 2023, sebanyak 81 peserta pada BOD-1 & BOD-2 telah mengikuti program tersebut.

  Konseling merupakan wadah untuk mengindentifikasikan masalah-masalah yang dapat menganggu pekerjaan dan juga dapat memfasilitasi pegawai untuk dapat mengembangkan dirinya. Program ini juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan retensi pegawai dan *engagement* pegawai. Pada tahun 2023, telah dilakukan 126 sesi konseling, dimana 62 sesi dilakukan secara *online* dan 46 sesi secara *offline*.

- *Culture Agent*
  Merupakan informal *leaders* atau agen-agen perubahan untuk menjadi *role model* dalam internalisasi budaya kerja serta penggerak inisiatif budaya perusahaan. *Culture agent* yang ada dalam PTBA, termasuk Anak, Cucu, dan Afiliasi perusahaan sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) yang tersebar pada setiap satuan kerja maupun Anak, Cucu, dan Afiliasi Perusahaan. Adapun pada *culture agent* memiliki *journey* tiap tahunnya, dimana akan dilaksanakan *onboarding, upskilling, networking, refreshment,* serta pemberian apresiasi berupa souvenir yang dikhususkan untuk *culture agent.*
- *Executive Sharing*
  Executive sharing merupakan wadah para kepala satuan kerja (BOD -1) kepada seluruh anggota tim-nya untuk menurunkan strategi perusahaan yang telah diselaraskan dengan Budaya perusahaan. Kegiatan ini dilakukan 1 (satu) kali setiap bulannya, oleh 36 kepala satuan kerja yang ada di PTBA.

- *Townhall*
  Townhall merupakan wadah pertemuan BOD dengan seluruh pegawai guna memberikan informasi, serta memberikan kesempatan karyawan untuk menyampaikan aspirasi, serta memberikan

The existing programs at PTBA in an effort to build a work culture have been divided according to 3 (three) main elements, as follows:

a. Leadership
- Better Us (Coaching, Mentoring and Counseling)
  Better Us is divided into 2 (two) programs, namely Coaching Culture & Counseling, where in the Coaching Culture program the targets are leaders at BOD-1 to BOD-3 levels. Meanwhile, the target counseling program is all employees.

  Coaching culture is an employee development program through Leaders Development within PTBA to achieve the company's vision of becoming a world-class energy company and as a form of increasing competent values, where one of the behaviors is helping other people learn. This program is also aimed at fostering a coaching culture in leaders. In 2023, 81 participants in BOD-1 & BOD-2 will have participated in the program.

  Counseling is a forum for identifying problems that can disrupt work and can also facilitate employees to develop themselves. This program is also an effort to increase employee retention and employee engagement. In 2023, 126 counseling sessions were held, of which 62 sessions were conducted online and 46 sessions were conducted offline.

- Culture Agent
  Are informal leaders or agents of change to become role models in internalizing work culture and driving initiatives company culture. The culture agents in PTBA, include 55 (Fifty Five) subsidiaries, sub subsidiaries, and other affiliated companies spread across each work unit as well as Subsidiaries, subsubsidiaries, and other affiliated companies. Meanwhile, culture agents have a journey every year, where onboarding, upskilling, networking, refreshment, and appreciation will be given in the form of souvenirs specifically for culture agents.

- Executive Sharing
  Executive sharing is a forum for work unit heads (BOD -1) to all team members to develop company strategies that have been aligned with company culture. This activity is carried out 1 (one) time every month, by 36 work unit heads at PTBA.

- Townhall
  Townhall is a meeting place for BOD with all employees to provide information and provide opportunities for employees to convey aspirations, as well as provide insight to employees about the

wawasan kepada pegawai tentang arah dan strategi perusahaan.

Pada tahun 2023 *townhall* PTBA diikuti oleh 1185 pegawai dengan 115 aspirasi pegawai yang tersampaikan kepada Pihak manajemen dengan umpan balik sebesar 74,4%.

b. Sistem

- *Respectful Workplace Policy* (RWP)
  Sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-3/MBU/04/2022, perusahaan berkomitmen membuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, menghormati dan bebas akan diskriminasi, pelecehan dan lainnya.

  Adapun sebagai komitmen manajemen untuk penerapan *Respectful Workplace Policy* (RWP), PTBA melakukan penyusunan *Handbook* melalui *Focus Group Discussion* dan interview bersama 24 perwakilan pegawai.

  Pada tahun 2023, PTBA fokus pada peningkatan *awareness* dengan memberikan kampanye secara berkala, adapun untuk sistem pelaporan pada *Respectful Workplace Policy* (RWP) ditunjukkan langsung kepada Direksi.

- Penyelarasan Kebijakan & Sistem Dengan Budaya Perusahaan
  PTBA telah melakukan penyelarasan kebijakan & sistem yang ada dengan budaya perusahaan, hal tersebut guna untuk menunjang implementasi budaya perusahaan pada pekerjaan setiap harinya, sehingga nilai-nilai budaya perusahaan yang sudah diinternasilasikan akan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pegawai.

- Kompetisi Inovasi Setiap Tahun
  Kompetisi inovasi ini merupakan wadah untuk pegawai PTBA dan juga mitra kerja menyampaikan inovasi yang mereka buat yang nantinya dapat diterapkan di perusahaan ataupun inovasi yang telah berhasil diimplementasikan.

  Pada tahun 2023, sebanyak 358 pegawai PTBA dengan 237 karya inovasi dan 121 karya inovasi dari mitra kerja PTBA yang telah mengikuti kompetisi inovasi tersebut.

- Culture Immersion
  Culture immersion merupakan kegiatan membangun *networking* dengan perusahaan lainnya dan mempelajari bagaimana budaya di perusahaan lain, sehingga setelah melaksanakan culture immersion dapat membuat inovasi yang nantinya bisa diimplementasikan di perusahaan.

company's direction and strategy.

In 2023, the PTBA town hall was attended by 1185 employees with 115 employee aspirations conveyed to management with feedback of 74.4%.

b. System

- Respectful Workplace Policy (RWP)
  In accordance with the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-3/MBU/04/2022, the company is committed to creating a policy to create a work environment that is mutually respectful, respectful and free from discrimination, harassment and others.

  As management's commitment to implementing the Respectful Workplace Policy (RWP), PTBA prepared a Handbook through Focus Group Discussions and interviews with 24 employee representatives.

  In 2023, PTBA will focus on increasing awareness by providing regular campaigns, while the reporting system on the Respectful Workplace Policy (RWP) will be shown directly to the Board of Directors.

- Alignment of Policies & Systems with Corporate Culture
  PTBA has aligned existing policies & systems with company culture, this is to support the implementation of company culture in everyday work, so that the corporate cultural values that have been internalized will become a habit carried out by the company employee.

- Annual Innovation Competition
  This innovation competition is a forum for PTBA employees and work partners to convey the innovations they have created which can later be implemented in the company or innovations that have been successfully implemented.

  In 2023, as many as 358 PTBA employees with 237 innovation works and 121 innovation works from PTBA partners participated in the innovation competition.

- Culture Immersion
  Culture immersion is an activity to build networking with other companies and learn about the culture in other companies, so that after carrying out culture immersion you can create innovations that can later be implemented in the company.

- Employee Volunteering
  Program Employee Volunteering (BA For Society) merupakan mandat Kementerian BUMN melalui Surat No. S-125/DSI.MBU/11/2022 bahwa Kementerian BUMN mengajak seluruh Pegawai untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

  Oleh karena itu sebagai komitmen PTBA ketercapaian pelaksanaan Employee Volunteering sebesar 100% pegawai pada tahun 2023, dengan 8 tema sebagai wadah pegawai melakukan *volunteering*, adapun detailnya sebagai berikut:
  a. Bakti BUMN Sumsel Youth Summit
  b. Kelas Inspirasi "Hari Buku"
  c. Green School
  d. Jaga Bugar Pensiunan
  e. Ceria Bersama Lansia
  f. Kontribusi Pemuda Untuk Bangsa
  g. Jaga Bugar Pensiunan 2.0
  h. Bakti untuk Guru

- Pegawai Teladan
  Pegawai teladan merupakan program pemilihan pegawai yang telah memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan budaya perusahaan, memiliki kinerja yang baik, memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat, taat pada peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menjadi panutan bagi pegawai/orang lain.

  Pada tahun 2023, Calon Pegawai Teladan di lingkungan PTBA adalah sebanyak 50 calon dan mengikuti beberapa seleksi yaitu:
  a. Verifikasi administrasi
  b. Tes tertulis
  c. Wawancara
  d. Kunjungan kerja
  e. Presentasi hasil kunjungan kerja
  f. Uji publik tempat kerja
  g. Uji publik tempat tinggal
  h. Setelah seluruh calon pegawai teladan mengikuti seleksi akan terpilih 15 orang pegawai teladan PTBA dengan detail sebagai berikut:

     - BOD – 1 : 1 (satu) Orang
     - BOD – 2 : 2 (dua) Orang
     - BOD – 3 : 3 (tiga) Orang
     - BOD – 4 s/d BOD – 6 : 10 (sepuluh) Orang

c. Simbol
   - Lomba Budaya
     Lomba Budaya merupakan acara tahunan yang dilakukan sebagai internaliasasi nilai-nilai Budaya, guna meningkatkan *awareness* serta pengetahuan tentang budaya perusahaan. Pada tahun 2023 lomba budaya diikuti oleh 220 karyawan yang terbagi menjadi 110 tim, dimana kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 babak dan dimenangkan oleh 3 tim.

- Employee Volunteering
  The Employee Volunteering Program (BA For Society) is a mandate of the Ministry of SOEs through Letter No. S-125/DSI.MBU/11/2022 states that the Ministry of SOEs invites all employees to actively participate in Social and Environmental Responsibility activities.

  Therefore, as PTBA's commitment to achieving Employee Volunteering of 100% of employees by 2023, with 8 themes as a forum for employees to volunteer, the details are as follows:

  a. Bakti BUMN South Sumatra Youth Summit
  b. Inspirational Class "Book Day"
  c. Green School
  d. Keep Retirees Fit
  e. Cheerful with the Elderly
  f. Youth Contribution to the Nation
  g. Keep Retirement Fit 2.0
  h. Devotion to Teachers

- Exemplary Employee
  Exemplary employees is a program for selecting employees who have attitudes and behavior in accordance with company culture, have good performance, have responsibility towards family and society, comply with company regulations and applicable laws and can be role models for other employees/people.

  In 2023, there were 50 candidates for Exemplary Employees within PTBA and took part in several selections, namely:
  a. Administrative verification
  b. Written test
  c. Interview
  d. Work visit
  e. Presentation of the results of the work visit
  f. Workplace public testing
  g. Residential public test
  h. After all prospective exemplary employees have taken part in the selection, 15 exemplary employees of PTBA will be selected with the following details:
     - BOD – 1 : 1 (one) person
     - BOD – 2 : 2 (two) people
     - BOD – 3 : 3 (three) people
     - BOD – 4 to BOD – 6 : 10 (ten) people

c. Symbol
   - Cultural Competition
     The Cultural Competition is an annual event held as an internalization of Cultural values, in order to increase awareness and knowledge about company culture. In 2023, 220 employees participated in the cultural competition, divided into 110 teams, where the activity was divided into 3 rounds and won by 3 teams.

- Video Budaya
  Video budaya merupakan salah satu cara untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya agar tersampaikan kepada selutuh pegawai di lingkungan PTBA.

- Artefak Budaya
  Artefak Budaya merupakan simbol-simbol, seperti banner, poster, sticker, maupun logo logo serta nilai afirmasi yang dipasang dilingkungan PTBA.

- BA Ring Ring
  Program webinar yang rutin dilaksanakan dengan topik yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan serta diselarasakan dengan nilai-nilai budaya perusahaan. BA Ring Ring sampai pada tahun 2023 telah dilakukan sebanyak 28 kali dengan diikuti rata-rata setiap webinarnya sebanyak 450 peserta.

2. Penyusunan Rencana Transformasi Budaya
   Selain itu PTBA tahun 2023, untuk mencapai visi menjadi perusahaan kelas dunia yang peduli lingkungan, melakukan Penyusunan Rencana Transformasi Budaya. Dimana hal tersebut sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis jangka panjang perusahaan serta memastikan keberlanjutan dan mengakselerasi pertumbuhan masa depan. Dengan hasil fokus transformasi pada Akuntabilitas, Keberlanjutan, Sinergi dan Inovasi sebagai bagian dari penerapan AKHLAK. Adapun dalam melakukan penyusunan Transformasi Budaya dengan komitmen pimpinan dan terus melibatkan pegawai, dilakukan melalui:
   a. *Review* Dokumen Strategis;
   b. *Interview* dengan seluruh jajaran Direksi;
   c. FGD dengan perwakilan pegawai dari setiap level (BOD-1 s.d BOD-6) di PTBA & perwakilan pegawai Anak & Afiliasi Perusahaan dengan jumlah 143 pegawai;
   d. Survey program budaya kepada 634 pegawai;
   e. Leadership Alignment Workshop sebagai bentuk komitmen dari jajaran BOD dan BOC;
   f. Culture Champion Alignment Workshop sebagai bentuk komitmen dari BOD-1.
3. Employee Engagement Survey
   Pada tahun 2023, PTBA melakukan *Employee Engagement Survey* dengan 95% keterlibatan pegawai, untuk melihat tingkatan dimana pegawai berkomitmen untuk energi dan upaya mereka dalam berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Pada *survey* tersebut PTBA mendapatkan hasil sebesar 89 berada di atas Norma (rata-rata) Global untuk Engagement Score sebesar 77; Normal (rata-rata) Industri Energi untuk Engagement Score 78 serta Norma (rata-rata) Indonesia untuk Engagement Score 80.

- Cultural Videos
  Cultural videos are one way to internalize cultural values so that they are conveyed to all employees within PTBA.

- Cultural Artifacts
  Cultural Artifacts are symbols, such as banners, posters, stickers, logos and affirmative values that are installed within the PTBA environment.

- BA Ring Ring
  Regular webinar programs are held on different topics and are tailored to needs and aligned with the company's cultural values. BA Ring Ring until 2023 has been held 28 times with an average of 450 participants attending each webinar.

2. Preparation of a Cultural Transformation Plan
   Apart from that, PTBA in 2023, to achieve its vision of becoming a world-class company that cares about the environment, the Company prepares a Cultural Transformation Plan. This is part of the company's long-term business transformation strategy and ensures sustainability and accelerates future growth. With the results of the transformation focusing on Accountability, Sustainability, Synergy and Innovation as part of implementing AKHLAK. Meanwhile, in preparing Cultural Transformation with leadership commitment and continuing to involve employees, this is done through:
   a. Strategic Document Review;
   b. Interviews with all levels of Directors;
   c. FGD with employee representatives from every level (BOD-1 to BOD-6) at PTBA & representatives employees of Subsidiaries & Company Affiliates with a total of 143 employee;
   d. Cultural program survey of 634 employees;
   e. Leadership Alignment Workshop as a form commitment from the BOD and BOC ranks;
   f. Culture Champion Alignment Workshop as form of commitment from BOD-1.
3. Employee Engagement Survey
   In 2023, PTBA conducted an Employee Engagement Survey with 95% employee engagement, to see the level to which employees are committed to their energy and efforts in contributing to the company's success. In this survey, PTBA obtained a result of 89, which is above the Global Norm (average) for Engagement Score of 77; Normal (average) for the Energy Industry for an Engagement Score of 78 and Norm (average) for Indonesia for an Engagement Score of 80.

Rencana Pengembangan SDM ke Depan

Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan SDM secara berkelanjutan terus dilakukan. Pada tahun 2024, strategi dan program unggulan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelarasan Kebijakan SDM sesuai dengan MIND ID
   Untuk meningkatkan keselarasan di tiap entitas dan mengembangkan sinergi antar entitas di MIND ID Group, Perusahaan akan melakukan penyelarasan kebijakan di antaranya terkait dengan Grading Jabatan, Performance Based Culture, dan Strategic Workforce Planning berdasarkan kajian dan/atau pedoman dari MIND ID.
2. Kajian Evaluasi Organisasi
   Perusahaan akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap Organisasi saat ini sehingga tersedianya desain dan struktur organisasi yang telah diselaraskan dengan model dan atau strategi bisnis untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
3. Career Development Journey
   Penyusunan sistem pengelolaan ke-SDM-an yang terintegrasi secara *end-to-end* untuk meningkatkan *employee engagement* dan *productivity* pegawai (Kamus Kompetensi, Assesment Guidelines, Career Journey, Development Matrix). Adapun program ini merupakan kelanjutan dari program unggulan tahun 2023.
4. Reinforcement Learning Architecture
   Untuk memastikan program Pengembangan pegawai dilakukan mendukung tujuan bisnis perusahaan, Perusahaan akan melakukan pembuatan *blueprint* program pengembangan pegawai yang berisi standarisasi program Pengembangan pegawai serta *learning journey* pegawai.

Future HC Development Plans

Continuous improvements in the quality of HC Management implementation continue to be carried out. In 2024, the superior strategies and programs that will be implemented are as follows:

1. Alignment of HC Policies according to MIND ID
   To increase harmony within each entity and develop synergy between entities in the MIND ID Group, the Company will align policies including those related to Job Grading, Performance Based Culture, and Strategic Workforce Planning based on studies and/or guidelines from MIND ID
2. Organizational Evaluation Study
   The company will conduct a study and evaluation of the current organization so that an organizational design and structure is available that is aligned with the business model and/or strategy to support the achievement of company goals.
3. Career Development Journey
   Preparation of an end-to-end integrated HC management system to increase employee engagement and employee productivity (Competency Dictionary, Assessment Guidelines, Career Journey, Development Matrix). This program is a continuation of the 2023 flagship program
4. Reinforcement Learning Architecture
   To ensure that employee development programs are carried out to support the company's business goals, the company will create an employee development program blueprint that contains standardization of employee development programs and employee learning journeys.

Demografi Karyawan
Employees Demographic

Per 31 Desember 2023, jumlah pegawai Perusahaan mencapai 1.561 orang, mengalami penurunan sebesar 2,38% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2022 yang sebanyak 1.599 orang. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal, meliputi pegawai yang sudah memasuki masa purnabakti, mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

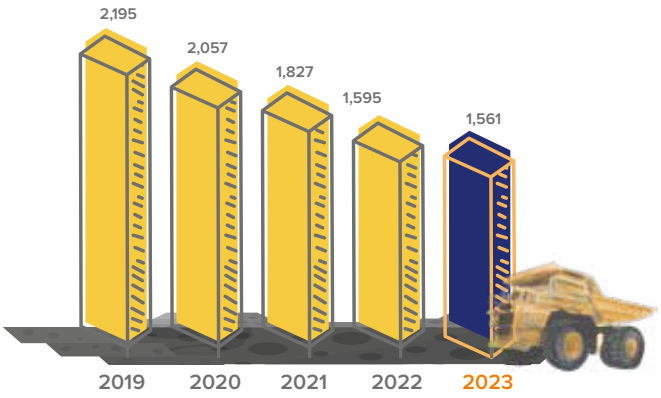
As of December 31, 2023, the number of Company employees reached 1,561 people, a decrease of 2.38% compared to the number of employees in December, 31, 2022, with 1,599 people. This decrease was caused by several causes, including retired employees, resigned, or passed away.

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Demographics Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2023		2022	
	Jumlah Amount	%	Jumlah Amount	%
Laki-laki Male	1.263	80,91	1.307	81,74
Perempuan Female	298	19,09	292	18,26
Jumlah **Total**	**1.561**	**100%**	**1.599**	**100,00**

Jumlah Karyawan 2019-2023
Number of Employees from 2019-2023

Orang
People

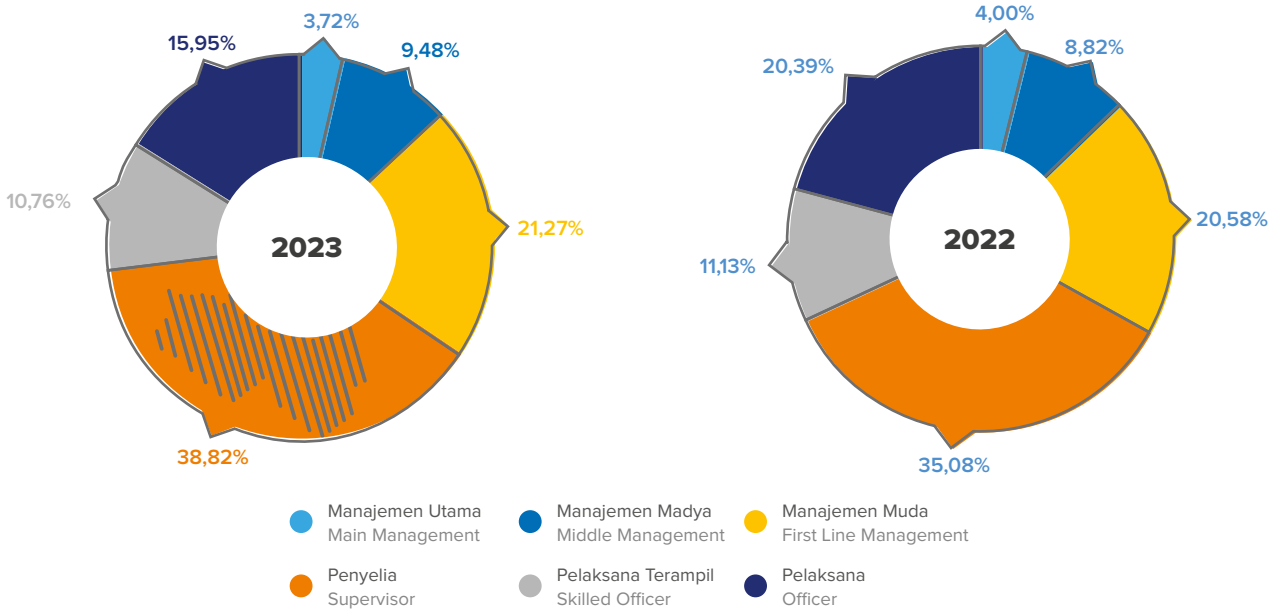


Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Demographics Based on Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
Manajemen Utama Main Management	49	9	58	3,72	57	7	64	4,00
Manajemen Madya Middle Management	128	20	148	9,48	121	20	141	8,82
Manajemen Muda First Line Management	276	56	332	21,27	271	55	326	20,39
Penyelia Supervisor	471	135	606	38,82	461	100	561	35,08

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Demographics Based on Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
Pelaksana Terampil Skilled Officer	124	44	168	10,76	108	70	178	11,13
Pelaksana Officer	215	34	249	15,95	289	40	329	20,58
Jumlah Total	**1.263**	**298**	**1.561**	**100**	**1.307**	**292**	**1.599**	**100,00**

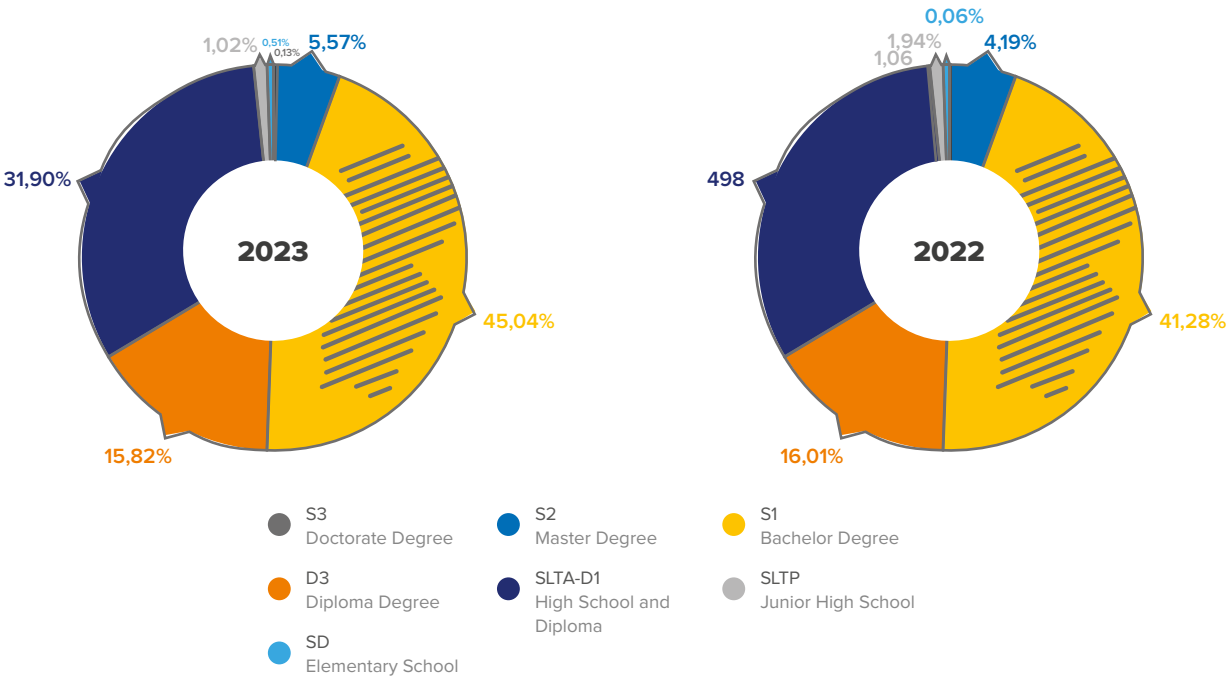


Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employee Demographics Based on Education Level

Tingkat Pendidikan Educational Level	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
Doktoral (S3) Doctorate Degree	2	-	2	0,13	1	-	1	0,06
Magister (S2) Master Degree	73	14	87	5,57	60	7	67	4,19
Sarjana (S1) Bachelor Degree	540	163	703	45,04	512	148	660	41,28
Ahli Madya (D3) Diploma Degree	189	58	247	15,82	190	66	256	16,01

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employee Demographics Based on Education Level

Tingkat Pendidikan Educational Level	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
Sekolah Lanjutan Atas dan Diploma (SLTA-D1) High School and Diploma	436	62	498	31,90	498	69	567	35,46
Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Junior High School	15	1	16	1,02	29	2	31	1,94
Sekola Dasar (SD) Elementary School	8		8	0,51	17	-	17	1,06
Jumlah Total	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**	**1.307**	**292**	**1.599**	**100,00**

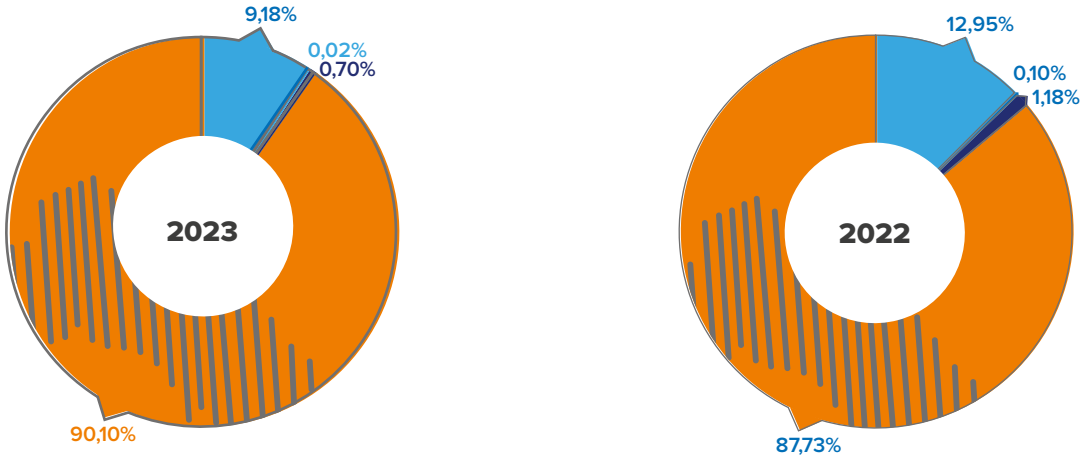


Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Demographics Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
Pegawai Tetap Permanent Employee								
Aktif Bekerja Actively Working	1.259	298	1.557	9,18	1.296	291	1.587	12,95
Cuti Besar Leave	4	-	4	0,02	11	1	12	0,10

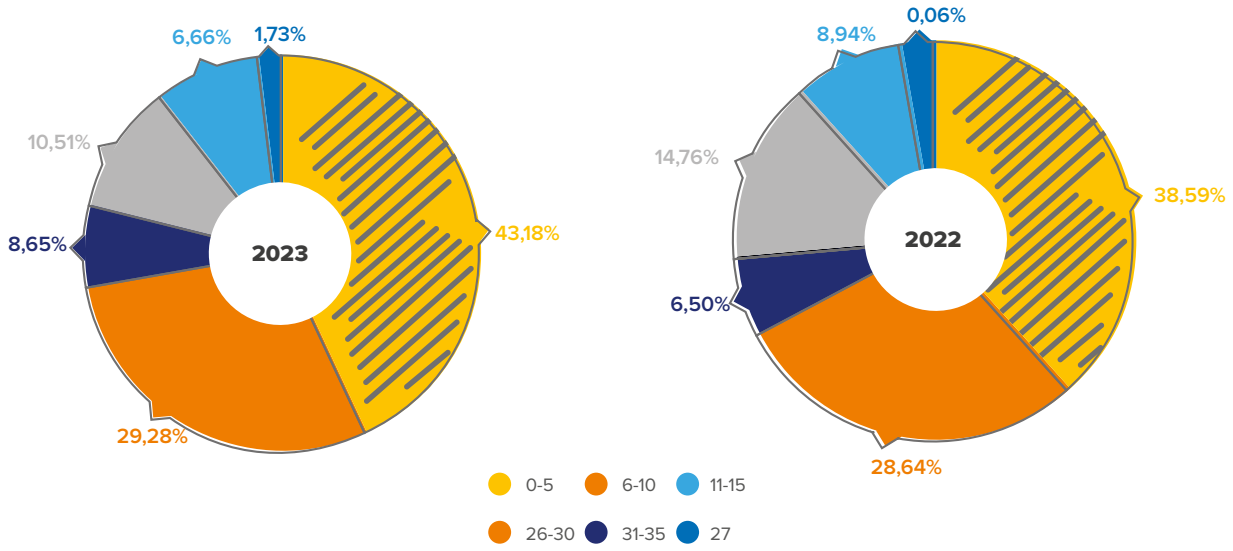
Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Demographics Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
Jumlah Total	**1.263**	**298**	**1.561**	**9,20**	**1.307**	**292**	**1.599**	**13,05**
Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee								
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Temporary Work Agreement	99	19	118	0,70	129	16	145	1,18
Alih Daya dan Kontrak Jasa Penambangan Outsourcing and Mining Service Contract	14.703	577	15.280	90,10	12.038	430	12.468	87,73
Tenaga Kerja Asing Foreign Employee	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	14.802	596	15.398	90,80	12.167	446	12.613	88,75
Jumlah Keseluruhan **Grand Total**	**16.065**	**894**	**16.959**	**100**	**13.474**	**738**	**14.212**	**100,00**



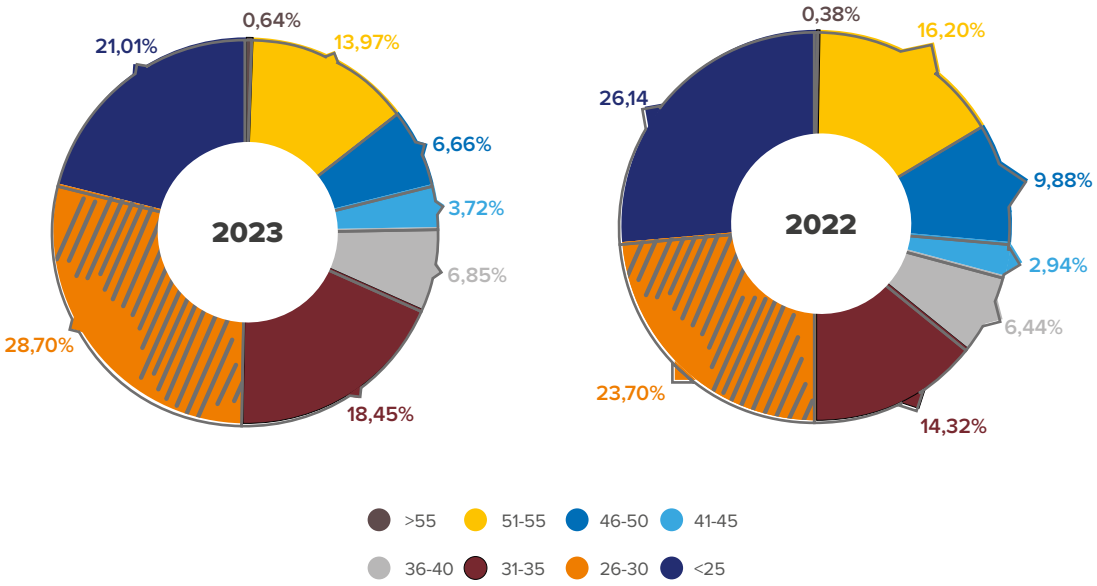
Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
Employee Demographics Based on Working Period

Masa kerja (tahun) Work Period (year)	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
0-5	514	160	674	43,18	470	147	617	38,59
6-10	373	84	457	29,28	373	85	458	28,64
11-15	76	28	104	6,66	76	28	104	6,50
16-20	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	-	-	-	-	1	-	1	0,06
26-30	155	9	164	10,51	224	12	236	14,76
31-35	119	16	135	8,65	123	20	143	8,94
>35	26	1	27	1,73	40	-	40	2,50
Jumlah Total	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**	**1.307**	**292**	**1.599**	**100,00**



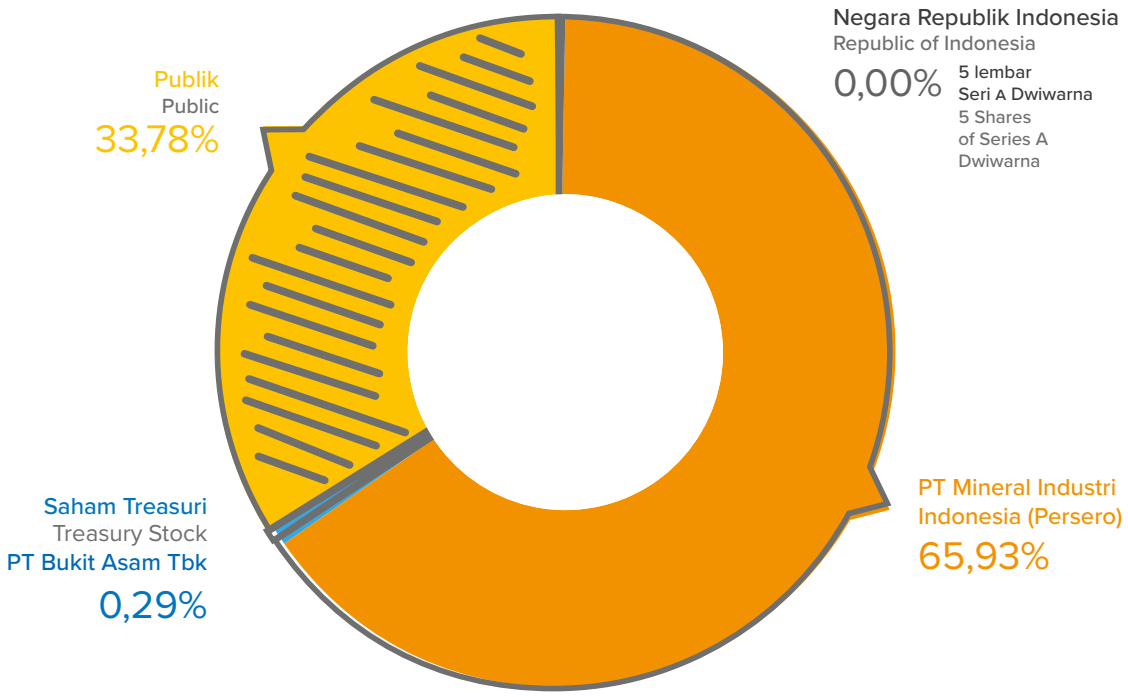
Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia
Employee Demographics Based on Age Groups

Rentang Usia Age Groups	2023				2022			
	L/M	P/F	Jumlah Total	%	L/M	P/F	Jumlah Total	%
>55	7	3	10	0,64	6	-	6	0,38
51-55	197	21	218	13,97	229	30	259	16,20
46-50	103	1	104	6,66	157	1	158	9,88
41-45	49	9	58	3,72	41	6	47	2,94
36-40	77	30	107	6,85	75	28	103	6,44
31-35	235	53	288	18,45	182	47	229	14,32
26-30	325	123	448	28,70	276	103	379	23,70
<25	270	58	328	21,01	341	77	418	26,14
Jumlah Total	**1.263**	**298**	**1.561**	**100,00**	**1.307**	**292**	**1.599**	**100,00**



Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Structure and Composition

Struktur Pemegang Saham per 31 Desember 2023
Shareholder Structure as of December 31, 2023



Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Nama Pemegang Saham Name of Shareholder	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Shares				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	5	0,00 5	0,00 5	0,00
Saham Seri B Series B Shares				
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7.595.650.695	65,93	-	-
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	-	-	7.595.650.695	65,93
Saham Treasuri PT Bukit Asam Tbk Treasury Stock of PT Bukit Asam Tbk	33.449.900	0,29	33.449.900	0,29
Publik Public	3.891.558.650	33,78	3.891.558.650	33,78
Jumlah **Total**	**11.520.659.250**	**100,00**	**11.520.659.250**	**100,00**

Jenis Saham Perusahaan
Type of Company Shares

Jenis Kepemilikan Saham Type of Shareholding	Hak dan Kewenangan Rights of Authorities
Saham Seri A Dwiwarna Series A Dwiwarna Shares	Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, yaitu: 1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS Perseroan termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan; b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar; c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham; d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan Perusahaan oleh perusahaan lain; 2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan; 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; 5. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis pada Perusahaan dalam bidang sebagai berikut: a. Bidang akuntansi dan keuangan; b. Bidang pengembangan dan investasi; c. Bidang operasional dan pengendalian mutu; d. Bidang pemasaran dan komersial; e. Bidang informasi teknologi; f. Bidang pengadaan dan logistik; g. Bidang sumber daya manusia; h. Bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan internal; i. Bidang hukum, kepatuhan, dan penanganan permasalahan hukum; j. Bidang kesehatan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial; k. Bidang penelitian dan inovasi terkait teknologi serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); l. Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; dan/atau m. Bidang lainnya. 6. Hak untuk melakukan pemeriksaan, memberi masukan, meminta informasi, memberikan persetujuan, melakukan penetapan, dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perusahaan; 7. Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan; 8. Hak untuk mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Perusahaan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c.5 Pasal ini; 9. Hak untuk melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan; 10. Hak melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perusahaan; 11. Hak untuk melakukan pemeriksaan, memberi masukan, meminta informasi, dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan; dan 12. Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Series A Dwiwarna are shares that are specially owned by the Republic of Indonesia which grant the holder special rights namely: 1. The right to approve at the GMS regarding the following matters: a. Agreement of appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners; b. Agreement to amendments to the Articles of Association; c. Agreement to changes in shareholding structure; d. Agreement on merger, consolidation, separation and dissolution as well as takeover of the Company by another company; 2. The right to nominate Candidates for Members of Board of Directors and Candidates for Members of Board of Commissioners; 3. The right to propose GMS agenda; 4. The right to request and access Company data and documents; 5. The right to determine the Company's strategic guidelines in the following fields; a. Accounting and Finance b. Development and Investment c. Operational and Quality Control d. Marketing and Commercial e. Technology Information f. Procurement and Logistic g. Human Capital h. Governance, risk management, and internal control i. Legal, compliance and handling of legal issues; j. Health, Occupational Safety, Environmental Management, and Social Responsibility; k. Research and innovation related to technology and Intellectual Property Rights (IPR); l. Review of legal regulations and policies; and/or m. Others 6. The right to review, approve, determine, and monitor the implementation of the Company's Board of Directors Management Contract, including determining the key performance indicators attached therein, as a condition for the appointment of the Company's Directors. 7. The right to propose changes to the Company's Articles of Association 8. The right to coordinate, organize and/or synergize functions for the Company based on an agreement with/authorized by the Company in the fields as above; 9. The right to synergize supervision of the Company's operational and strategic activities 10. The right to control or monitor the implementation of the Company's strategic and operational activities or policies 11. The right to carry out inspections/reviews, provide input, request information, and approve the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, other work plans, along with changes submitted by the Company's Board of Commissioners; And 12. Other rights regulated in these Articles of Association as the rights and/or authorities of Series A Dwiwarna Shareholders.

Jenis Saham Perusahaan
Type of Company Shares

Jenis Kepemilikan Saham Type of Shareholding	Hak dan Kewenangan Rights of Authorities
Saham Seri B Series B Shares	Memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki Saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa atau hak-hak tertentu yang dimiliki Saham Seri A sebagaimana dijelaskan di atas. Hak yang sama dengan yang dimiliki Saham Seri A termasuk hak untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan, sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki. Saham Seri B merupakan Saham biasa yang beredar. Having the same rights as the Series A Shares, except for special rights or certain rights owned by the Series A Shares as explained above. The same rights as those of Series A Shares are including the right to receive dividends and proceeds from the dissolution of the company, in accordance with the proportion of the amount and amount paid for the shares owned. Series B Shares are ordinary outstanding shares.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar (Per 31 Desember 2023)
Composition of the Top 20 Shareholders (Per December 31, 2023)

No	Pemegang Saham Shareholder	Status	Jumlah Saham Number of Shares	Presentase (%) Percentage (%)
1	PT Mineral Industri Indonesia (PERSERO)	Institusi Lokal Local Institution	7.595.650.695	65,93
2	PT Panin Sekuritas	Institusi Lokal Local Institution	256.220.900	2,22
3	DJS Ketenagakerjaan Program JHT	Institusi Lokal Local Institution	176.580.255	1,53
4	Pemerintah Propinsi Sumatra Selatan Government of South Sumatra Province	Institusi Lokal Local Institution	106.575.000	0,93
5	DJS Ketenagakerjaan Program JP	Institusi Lokal Local Institution	81.474.100	0,71
6	State Street Bank - Wisdomtree Emerging Markets	Institusi Asing Foreign Institution	77.927.200	0,68
7	JPMCB NA RE - Vanguard Emerging Markets	Institusi Asing Foreign Institution	55.790.944	0,48
8	JPMCB NA RE - Vanguard Total International	Institusi Asing Foreign Institution	54.901.516	0,48
9	BNYM RE Acadian EM MKTS SM ALL CAP EQ FD	Institusi Asing Foreign Institution	49.660.856	0,43
10	State Street Bank-Teachers' Retirement	Institusi Asing Foreign Institution	47.750.213	0,41
11	PT Pamapersada Nusantara	Institusi Lokal Local Institution	45.000.000	0,39
12	State Street Bank - Ishares Emerging Market	Institusi Asing Foreign Institution	44.433.800	0,39
13	State Street Bank - Ishares Core MSCI Emerging Market	Institusi Asing Foreign Institution	41.619.800	0,36
14	State Street Bank - Ishares V Public Limited	Institusi Asing Foreign Institution	37.128.300	0,32
15	Arya Hidayat Adisena	Institusi Lokal Local Institution	36.679.600	0,32
16	Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Government of Muara Enim Regency	Institusi Lokal Local Institution	34.730.000	0,30
17	GSCO LLC S/A Truffle Hound Global Value	Institusi Asing Foreign Institution	33.999.300	0,30
18	PT Bukit Asam TBK	Institusi Lokal Local Institution	33.449.900	0,29
19	Citibank New York S/A Dimensional Emerging Markets	Institusi Asing Foreign Institution	32.441.000	0,28
20	Citibank New York S/A Emerging Markets	Institusi Asing Foreign Institution	32.282.400	0,28

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki >5% (Per 31 Desember 2023)
Composition of Shareholders with >5% Ownership (Per December 31, 2023)

Nama Pemegang Saham Shareholder	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*	-	-	7.595.650.695	65,93
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*	7.595.650.695	65,93	-	-

*Catatan | Notes:
Pada tanggal 21 Maret 2023 terjadi aksi korporasi pada tingkat induk PTBA dan pada tanggal 6 April 2023 terjadinya pengalihan saham sebanyak 0,91% dari PT Indonesia Asahan Aluminium kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID, sebagai tindak lanjut dari pembentukan BUMN holding industri pertambangan. Per 31 Desember 2023, MIND ID merupakan pemegang saham mayoritas seri B pada PTBA.
On March 21, 2023, a corporate action was carried out at the parent level of PTBA and on April 6, 2023, a transfer of 0.91% of shares from PT Indonesia Asahan Aluminum was made to PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID, as a follow-up to the formation of a SOEs holding mining industry. As of December 31, 2023, MIND ID is the majority shareholder of series B in PTBA.

Komposisi Pemegang Saham yang Memiliki <5% (Per 31 Desember 2023)
Composition of Shareholders with Ownership <5% (Per December 31, 2023)

No	Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Number of Shares	Presentase (%) Percentage (%)
1	Institusi Asing dan Individu Asing Foreign Institution and Foreign Individual	1.217.650.820	10,57
2	Institusi Lokal dan Individu Lokal* Local Institution and Local Individual	2.673.907.835	23,21
3	Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	5	0,00

*Catatan | Notes:
Institusi Lokal yang selain saham treasuri PTBA
Local Institution other than treasury shares of PTBA

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi (Per 31 Desember 2023)
Composition of Shareholders Based on Classification (Per December 31, 2023)

Nama Pemegang Saham Shareholder	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Lokal Local				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	5	0,00	5	0,00
Perorangan Indonesia Individual	1.571.707.900	13,64	1.216.491.500	10,56
Pemerintah Daerah Local Government	141.305.000	1,23	141.305.000	1,23
Koperasi Cooperative	510.800	0,00	847.600	0,01
Yayasan Foundation	10.379.900	0,09	12.331.700	0,11
Dana Pensiun Pension Funds	428.232.639	3,72	349.195.850	3,03
Asuransi Insurance	37.886.649	0,33	174.084.676	1,84
Bank	6.176.500	0,05	4.400.000	0,04
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	7.997.295.318	69,42	8.032.419.369	69,72
Reksadana Mutual Funds	109.513.719	0,95	262.558.714	2,28
Jumlah Kepemilikan Lokal Total Local Ownership	10.303.008.430	89,43	10.193.634.414	88,48
Asing Foreign				
Perorangan Asing Foreign Individual	13.491.207	0,12	6.079.507	0,05
Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	1.204.159.613	10,45	1.320.945.329	11,47
Jumlah Kepemilikan Asing Total Foreign Ownership	1.217.650.820	10,57	1.327.024.836	11,52
Jumlah **Total**	**11.520.659.250**	**100,00**	**11.520.659.250**	**100,00**

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Company Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	1 Januari - 31 Desember 2023 January 1 – December 31, 2023	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Share (share)	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Irwandy Arif Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Andi Pahril Pawi Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
E. Piterdono HZ Komisaris Commissioner	-	-
Carlo Brix Tewu Komisaris Commissioner	-	-
Kurnia Toha Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Direksi Board of Directors		
Arsal Ismail Direktur Utama President Director	304.900	0,00
Farida Thamrin Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	-	-
Suhedi Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	-	-
Rafli Yandra Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	-	-
Suherman Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	100.000	0,00

Informasi Saham *Free Float* (Per 31 Desember 2023)

Free Float Stock Information (As of December 31, 2023)

	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Total Saham Warkat Total Warkat Shares	7.635.342.500	
Total Saham *Scripless* Total Scripless Shares	3.885.316.750	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Deposited Capital	11.520.659.250	
Jumlah Saham *Free Float** Number of Free Float Shares*	3.746.248.750	32,52%
Pemegang Saham < 5% Shareholders < 5%		
Masyarakat - Warkat - *Scrip* Public - Warkst - Scrip	144.905.000	1,26%
Masyarakat - Non Warkat - *Scripless* Public - Non Warkat - Scripless	3.746.248.750	32,52%
Saham Treasuri Treasury Shares	33.449.90	0,29%
Informasi Saham *Free Float* Free Float Stock Information		
Jumlah Saham *Scripless* Dimiliki oleh Pemegang Saham Kurang dari 5% Number of Scripless Shares Owned by Shareholders Less Than 5%	3.780.103.550	
Jumlah Saham *Scripless* Dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris Kurang dari 5% Number of Scripless Shares Owned by Directors and Board of Commissioners Less Than 5%	404.900	
Jumlah Saham *Scripless* Dimiliki oleh Pengendali Kurang dari 5% The Number of Scripless Shares Owned by the Controller is Less Than 5%	-	
Jumlah Saham *Scripless* Dimiliki oleh Afiliasi dari Pengendali Kurang dari 5% Number of Scripless Shares Owned by Affiliates of the Controller Less Than 5%	-	
Jumlah Saham Treasuri *Scripless* Kurang dari 5% Number of Scripless Treasury Stock Less Than 5%	33.449.900	
Jumlah Saham Portofolio Investasi dengan Penerima Manfaat Investor Publik yang Telah Disetujui Bursa untuk Diperhitungkan Sebagai *Free Float* Number of Investment Portfolio Shares with Public Investor Beneficiaries that have been Approved by the Exchange to be Considered as Free Float	-	
Jumlah Saham Tercatat di Bursa Per Akhir Bulan Number of Shares Listed on the Exchange at the End of the Month	11.520.659.250	
Jumlah Saham *Free Float** Number of Free Float Shares*	3.746.248.750	32,52%

*Catatan | Notes:

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 mengenai perubahan peraturan nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, diatur bahwa:

Saham *free float* diuraikan dalam lampiran I butir I.22 peraturan No.I-A adalah saham yang:
1. Dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (lima perseratus) dari seluruh saham tercatat,
2. Bukan dimiliki oleh pengendali dan afiliasi dari pengendali (berdasarkan Surat Edaran BEI No: SE-00010/BEI/07-2023),
3. Bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi, dan
4. Bukan saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan.

Selanjutnya diuraikan dalam lampiran I butir II.5 peraturan No.I-A saham yang dapat diperdagangkan di bursa termasuk saham *Free Float* adalah saham yang dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

Jumlah saham dan persentase *Free Float* tersebut belum memperhitungkan "jumlah saham yang terafiliasi dari pengendali" dan "jumlah saham portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik yang telah disetujui bursa untuk diperhitungkan Sebagai *Free Float"* (jika ada).

Based on the decision of the Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.KEP-00101/BEI/12-2021 dated December 21, 2021, concerning changes to regulation number I-A regarding the listing of shares and equity securities other than shares issued by listed companies, it is regulated that:

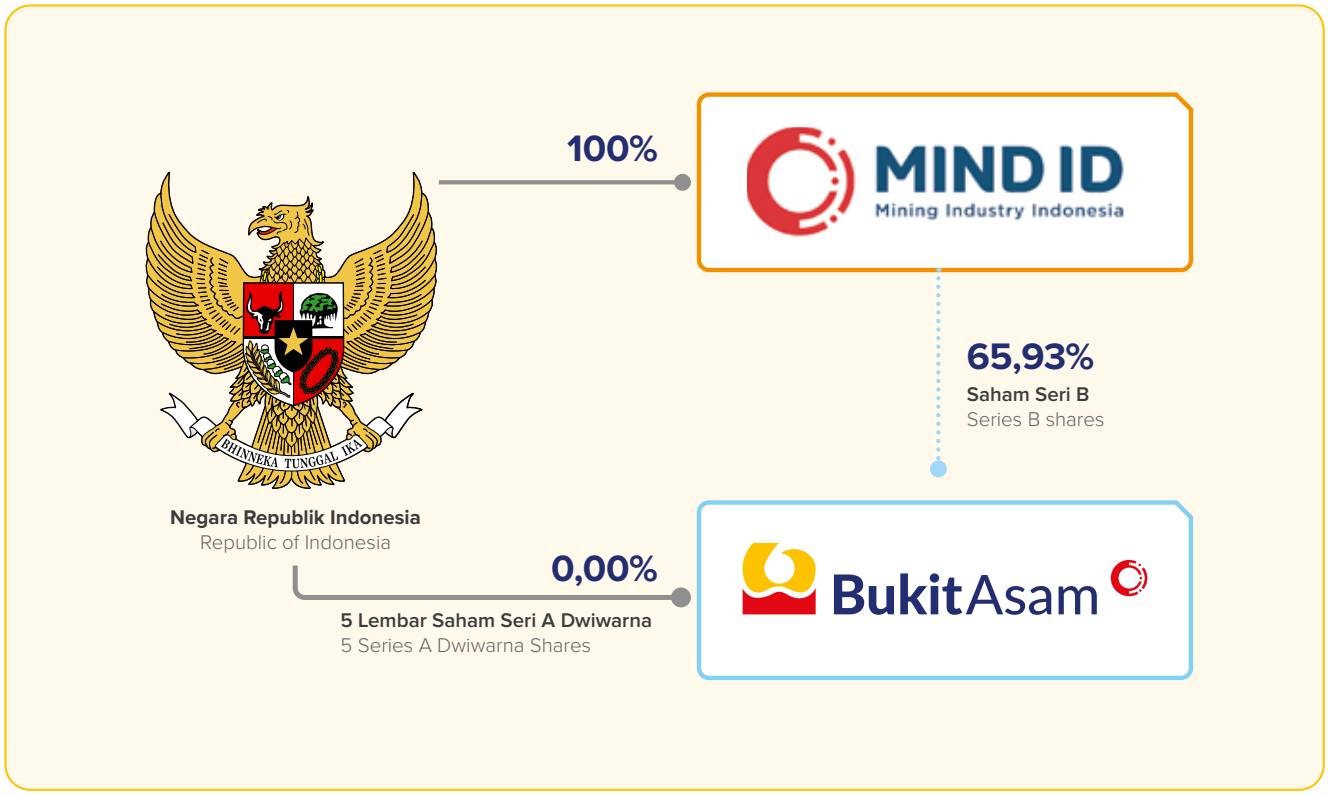
Free float shares are described in attachment I point I.22 of regulation No.I-A are shares that:
1. Owned by shareholders of less than 5% (five percent) of all registered shares,
2. Not owned by the controller and affiliates of the controller (based on BEI Circular Letter No: SE-00010/BEI/07-2023),
3. Not owned by members of the board of commissioners or members of the board of directors, and
4. Not shares that have been repurchased by the Company.

It is further explained in attachment I point II.5 of regulation No. I-A that shares that can be traded on the stock exchange, including Free Float shares, are shares that are in scripless form.

The number of shares and Free Float percentage does not take into account "the number of shares affiliated with the controller" and "the number of investment portfolio shares with public investor beneficiaries that have been approved by the stock exchange to be counted as Free Float" (if any).

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Pemilik Akhir

Information on Major/Controlling Shareholders to Ultimate-End Owner



Saham Perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna. Sementara Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hingga akhir tahun 2023, Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 5 lembar saham atau 0,00%. Sementara Saham Seri B terbanyak dimiliki oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID sebesar 65,93%, masyarakat sebesar 33,78% dan saham treasuri sebesar 0,29%. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia atas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Berdasarkan peraturan tersebut PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah mengembalikan kepemilikan saham PTBA sebanyak 7.490.437.495 lembar saham Seri B kepada Negara Republik Indonesia dalam rangka pengurangan penyertaan modal negara.

There are two types of the Company share, namely Series A Dwiwarna Shares and Series B Shares. Series A Dwiwarna Shares are shares specially owned by the Republic of Indonesia and the holders are given privilege rights. Meanwhile, Series B Shares can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Until the end of 2023, Series A Dwiwarna Shares are owned by the Republic of Indonesia amounted to 5 shares or 0.00%. While the Series B Shares are owned by PT Mineral Industri Indonesia (Persero) or MIND ID by 65.93%, the public by 33.78%, and treasury shares amounted to 0.29%. The Indonesian Government issued Government Regulation Number 45 of 2022 concerning Reduction of the Republic of Indonesia's State Capital Participation in PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero). Based on this regulation, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) has returned ownership of PTBA shares totaling 7,490,437,495 Series B shares to the Republic of Indonesia in order to reduce state capital participation.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah di atas, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pertambangan. Pada saat yang sama dengan berlakunya secara efektif pengurangan penyertaan modal negara tersebut, Negara Republik Indonesia mengalihkan 7.490.437.495 lembar saham Seri B yang dimiliki kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai bentuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Pengalihan dan pendirian tersebut berlaku efektif tertanggal 21 Maret 2023. Bukit Asam menjadi anak perusahaan atau perusahaan yang dikendalikan oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero) terhitung pada tanggal 21 Maret 2023 dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) berlaku sebagai induk atau pemegang saham utama PTBA.

Following up on the Government Regulation above, the Government of the Republic of Indonesia also issued Government Regulation Number 46 of 2022 concerning the Establishment of Companies in the Mining Sector. At the same time as the reduction in state capital participation was effectively taking effect, the Republic of Indonesia transferred 7,490,437,495 Series B shares owned to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as a form of state capital participation in the context of establishing PT Mineral Industri Indonesia (Persero). The transfer and establishment is effective on March 21, 2023. PTBA becomes a subsidiary or company controlled by PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as of March 21, 2023 and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) acts as the parent or main shareholder of PTBA.

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2023, PT Indonesia Asahan Aluminium mengalihkan saham yang dibeli dari PTBA pada tahun 2019 (saham treasuri) kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebanyak 105.213.200 (0,91%), sehingga total kepemilikan saham PT Mineral Industri Indonesia (Persero) menjadi 7.595.650.695 atau 65,93%. Dengan demikian, maka sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pemegang Saham Utama PTBA yaitu PT Mineral Industri Indonesia (Persero)

Furthermore, on April 6, 2023, PT Indonesia Asahan Aluminum transferred shares purchased from PTBA in 2019 (treasury shares) to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) amounting to 105,213,200 (0.91%), bringing the total share ownership of PT Mineral Indonesian Industry (Persero) to 7,595,650,695 or 65.93%. Thus, until December 31, 2023, the main shareholder of PTBA is PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Pemegang Saham Utama Major Shareholder	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
Kepemilikan Ownership	Negara Republik Indonesia 100,00% Republic of Indonesia
Bidang Usaha Line of Business	Perusahaan Holding di bidang pertambangan Holding Company in Mining sector
Produk Product	Manajemen Portofolio Anak Perusahaan Subsidiary Portfolio Management
Alamat Address	Kantor *Holding* Industri Pertambangan, Jakarta Gedung Energy Lt. 16 SCBD Mining Industry Holding Office, Jakarta Energy Building 16th Floor SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. P.O. BOX 6917 Jakarta Selatan, Indonesia Telp. (+6221) 29738750 Fax. (+6221) 27936331 e-mail : corsec@mind.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Commissioner	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Commissioner	Jisman Parada Hutajulu
Komisaris Commissioner	Astera Prima Bhakti
Komisaris Independen Independent Commissioner	Muhammad Munir
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Hendi Prio Santoso
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Dany Amrul Ichdan
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Portfolio and Business Development Director	Dilo Seno Widagdo
Direktur Keuangan Finance Director	Akhmad Fazri
Direktur Manajemen Risiko dan HSSE Risk Management and HSSE Director	Nur Hidayat Udin

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Perusahaan telah mengelompokkan direktorat pembinaan kepada anak perusahaan/afiliasi perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 242/0100/2021 tentang Tugas, Wewenang, Tanggung jawab Direksi PT Bukit Asam Tbk dan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 322/0100/2020 tentang Pedoman Interaksi PTBA *Holding* Dengan Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi.

The Company has grouped the development directorate into subsidiaries/affiliated companies based on the Decree of Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 242/0100/2021 concerning the Duties, Authorities, Responsibilities of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk, and the Decree of Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 322/0100/2020 regarding the Guidelines for the Interaction of PTBA Holding with Controlled Companies and Affiliated Companies.

Entitas Anak, Ventura Bersama dan Asosiasi
Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun berdiri Date of Establishment	Status Operasi Status	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure		Total Aset (dalam Rp Juta) Total Assets (Billion Rupiah)	
					Pemegang Saham Shareholders	%	2023	2022*
ENTITAS ANAK LANGSUNG DIRECT SUBSIDIARIES								
PT Batubara Bukit Kendi	Penambangan Batu Bara Coal Mining	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatera	1996	Tidak Aktif Inactive	PT Bukit Asam Tbk PT Delta Bentala Perintis	99,39 0,61	54.320	12
PT Bukit Asam Prima	Perdagangan Batu Bara Coal Trading	Jakarta Jakarta	2007	Dibekukan Freezed	PT Bukit Asam Tbk Yayasan Bukit Asam	99,99 0,01	784.394	402.271
PT Internasional Prima Coal	Penambangan Batu Bara Coal Mining	Palaran, Kalimantan Timur East Kalimantan	2008	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk PT Mega Raya Kusuma	51,00 49,00	773.924	1.030.487
PT Bukit Asam Metana Ombilin	Penambangan Gas Metana Batu Bara Coal Methane Gas Mining	Jakarta Jakarta	2007	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk Yayasan Bukit Asam	99,99 0,01	34	34
PT Bukit Asam Metana Enim	Penambangan Gas Metana Batu Bara Coal Methane Gas Mining	Jakarta Jakarta	2007	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk Yayasan Bukit Asam	99,99 0,01	73	73
PT Bukit Asam Banko	Penambangan dan Perdagangan Batu Bara Coal Mining and Trading	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatera	2008	Belum Beroperasi Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk PT Rajawali Asia Resources	99,99 0,01	313	313
PT Bukit Multi Investama	Investasi Investment	Jakarta Jakarta	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk Yayasan Bukit Asam	99,99 0,01	3.079.751	2.946.135
PT Bukit Energi Investama	Investasi Investment	Jakarta Jakarta	2015	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk Yayasan Bukit Asam	99,99 0,01	262.089	225.834

Entitas Anak, Ventura Bersama dan Asosiasi
Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

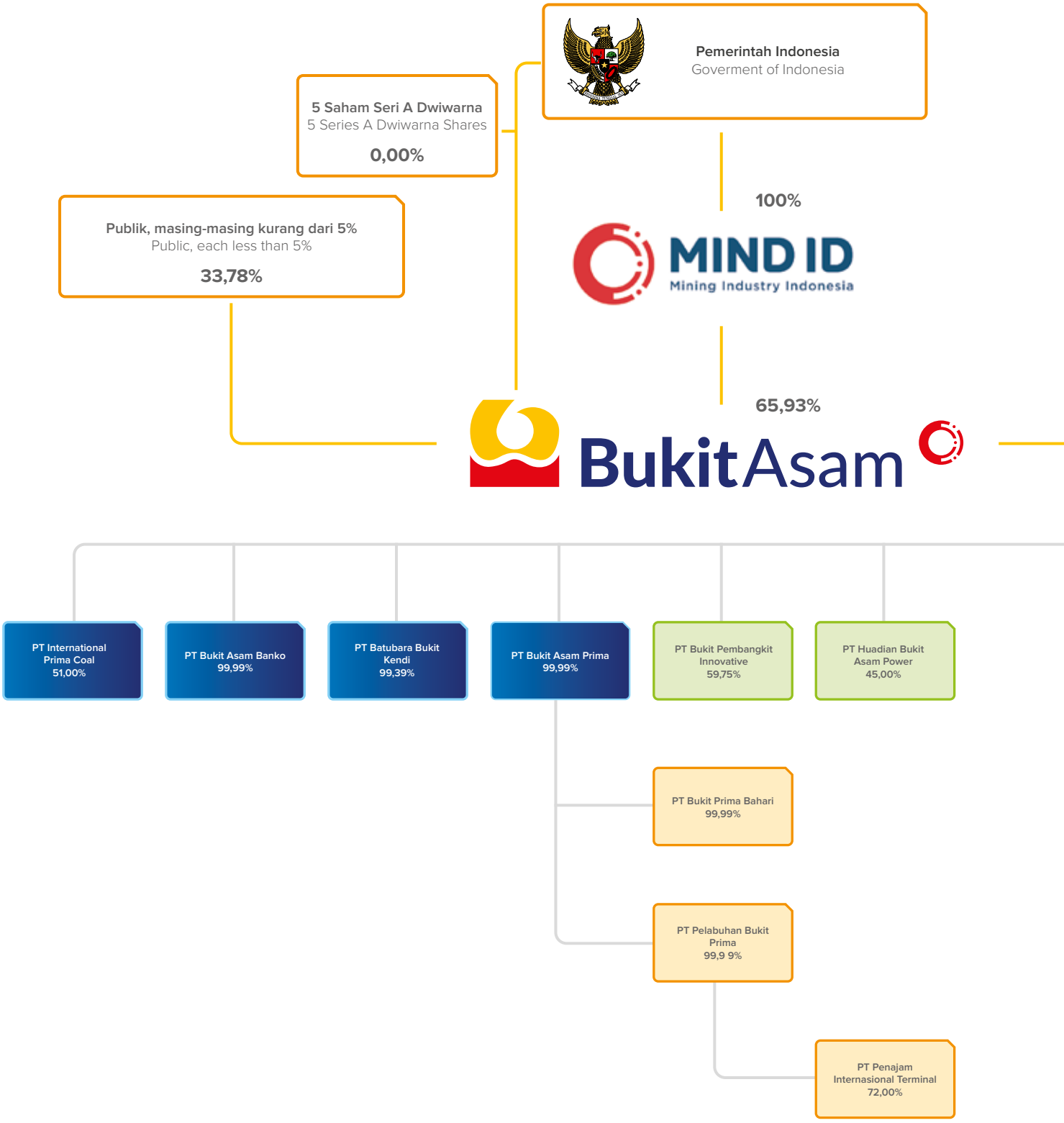
Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun berdiri Date of Establishment	Status Operasi Status	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure		Total Aset (dalam Rp Juta) Total Assets (Billion Rupiah)	
					Pemegang Saham Shareholders	%	2023	2022*
ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG INDIRECT SUBSIDIARIES								
PT Bumi Sawindo Permai	Perkebunan Kelapa Sawit dan Olahan Kelapa Sawit Palm Oil Plantation and Processed Palm Oil	Tanjung Agung, Sumatra Selatan South Sumatera	1986 diakuisisi pada 2014 1986, was acquired in 2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	435.565	375.682
					PT Bukit Asam Kreatif	0,01		
PT Bukit Prima Bahari	Pelayaran Cruise	Jakarta Jakarta	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	392.239	232.721
					Koperasi Karyawan PT Bukit Asam Prima	0,01		
PT Pelabuhan Bukit Prima	Jasa Pelabuhan Port Services	Jakarta Jakarta	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	99,99	148.341	126.410
					Koperasi Karyawan PT Bukit Asam Prima	0,01		
PT Bukit Asam Medika	Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik Hospital, Clinic and Polyclinic	Tanjung Agung, Sumatra Selatan South Sumatera	2014	Beroperasi Operating	PT Bukit Multi Investama	97,50	69.010	54.085
					PT Dana Bara Medika	2,50		
PT Satria Bahana Sarana	Jasa Penambangan dan Sewa Mining and Rental Services	Tanjung Agung, Sumatra Selatan South Sumatera	Diakuisisi tahun 2015 Acquired in 2015	Beroperasi Operating	PT Bukit Multi Investama	95,00	1.969.428	1.936.525
					PT Bukit Asam Kreatif	5,00		
PT Penajam Internasional Terminal	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Jakarta Jakarta	Diakuisisi tahun 2015 Acquired in 2015	Beroperasi Operating	PT Pelabuhan Bukit Primwa	72,00	25.780	17.079
					Tasmindo	8,00		
					PT Patralog	20,00		
PT Bukit Energi Service Terpadu	Perdagangan, Jasa, Perbengkelan, Pembangunan, Perindustrian, dan Pengangkutan Trading, Services, Workshop, Development, Industry and Transportation	Jakarta Jakarta	2015	Beroperasi Operating	PT Bukit Energi Investama	99,62	117.369	140.745
					Yayasan Bukit Asam	0,38		
PT Bukit Multi Properti	Real Estate dan Konstruksi Real Estate and Construction	Jakarta Jakarta	2019	Beroperasi Operating	PT Bukit Multi Investama	99,90	19.686	11.180
					Yayasan Bukit Asam	0,10		

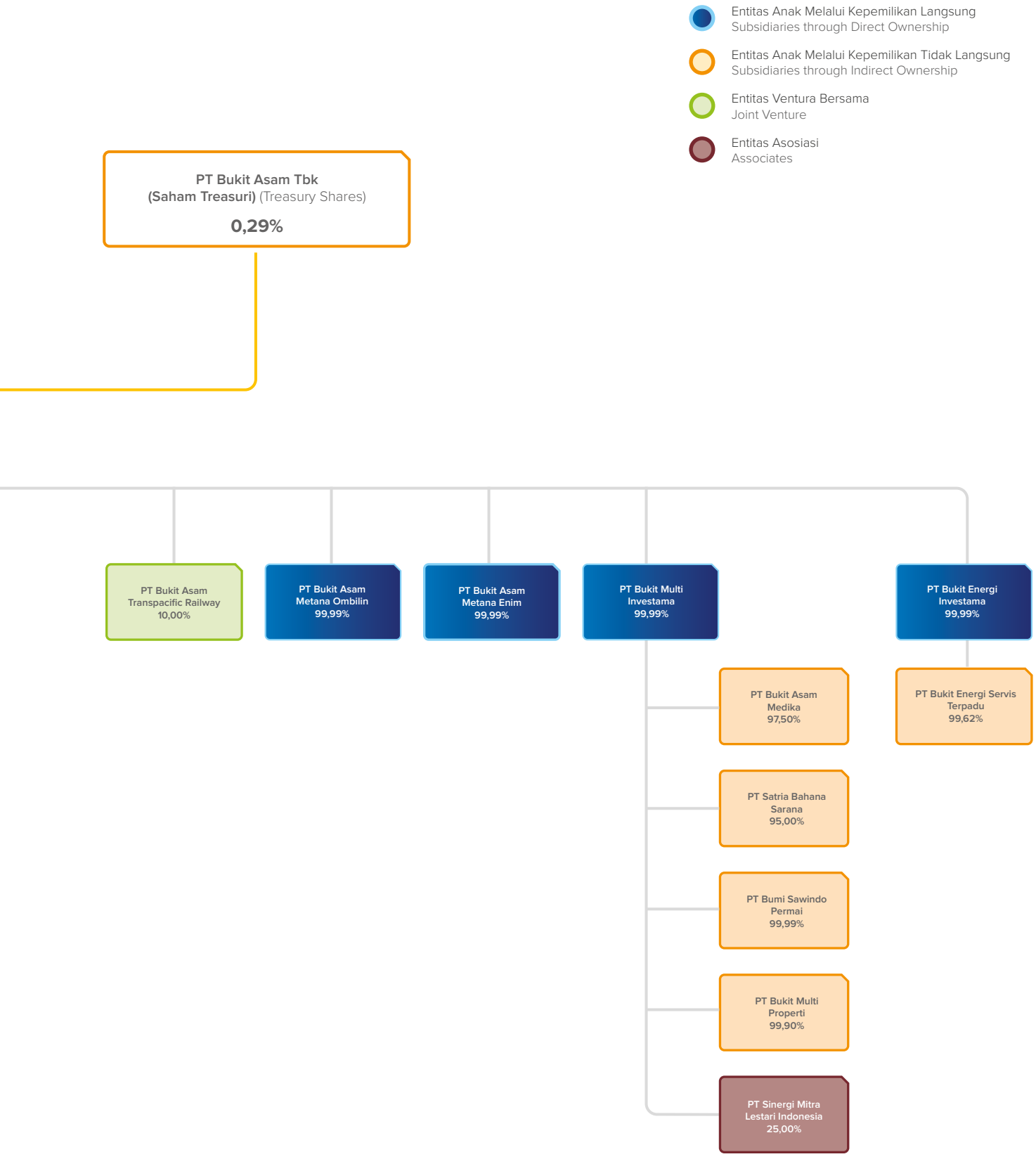
Entitas Anak, Ventura Bersama dan Asosiasi
Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun berdiri Date of Establishment	Status Operasi Status	Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure		Total Aset (dalam Rp Juta) Total Assets (Billion Rupiah)	
					Pemegang Saham Shareholders	%	2023	2022*
ENTITAS ASOSIASI ASSOCIATES								
PT Tabalong Prima Resources**	Pertambangan Mining	Kalimantan Selatan	Akuisisi tahun 2016 2016 Acquisition	Belum Beroperasi Has Not Yet Operating	PT Internasional Prima Coal	34,17	-	86.269
					H.Muhyiddin Arubusman	21,25		
					PT Cakrawala Multi Minera	0,42		
					Ir.Abdul Azis Noor	4,41		
					PT Mitra Cakrawala Internasional	14,10		
					Asmui Suhaim	21,25		
PT Mitra Hasrat Bersama**	Infrastruktur Tambang Mining Infrastructure	Kalimantan Tengah	Akuisisi tahun 2016 2016 Acquisition	Belum Beroperasi Has Not Yet Operating	PT Internasional Prima Coal	34,17	-	352.336
					PT Mitra Cakrawala Internasional	65,81		
					Lukman Andy	0,02		
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia	Infrastruktur/ Pengelolaan Limbah B3 Infrastructure/ B3 Waste Management	Jakarta	Akuisisi tahun 2017 2017 Acquisition	Beroperasi Operating	PT Antam Resourcindo	25,00	61.592	24.695
					PT Bukit Multi Investama	25,00		
					PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	25,00		
					PT Timah Investasi Mineral)	25,00		
VENTURA BERSAMA JOINT VENTURE								
PT Bukit Pembangkit Innovative	Pembangkit Tenaga Listrik/ PLTU Electric Power Plant/ CFPP	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatera	2006	Beroperasi Operating	PT Bukit Asam Tbk	59,75	5.314.354	5.435.646
					PT Pembangkitan Jawa Bali	29,15		
					PT Navigat Innovative Indonesia	11,10		
PT Huadian Bukit Asam Power	Pembangkit Tenaga Listrik/ PLTU Generation/CFPP	Tanjung Enim, Sumatra Selatan South Sumatera	2011	Belum Beroperasi Has Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	45,00	34.049.583	29.670.906
					China Huadian Hongkong Ltd	55,00		
PT Bukit Asam Transpacific Railways	Transportasi Kereta Api Batu Bara Coal Railway Transportation	Jakarta Jakarta	2008	Belum Beroperasi Has Not Yet Operating	PT Bukit Asam Tbk	10,00	112.627	112.627
					PT Rajawali Asia Resources	90,00		

*Total aset 31 Desember 2022 sudah diaudit dan total aset 31 Desember 2023 tidak diaudit
**Telah dilakukan pengakhiran Perjanjian Pengikat Jual Beli Saham untuk rencana akusisi PT TPR dan PT MHB oleh PT IPC pada tanggal 23 Juni 2023, sehingga sejak tanggal tersebut PT TPR dan PT MHB tidak masuk lagi sebagai entitas asosiasi yang dimiliki oleh PTBA secara tidak langsung.
*Total assets as of December 31, 2022 have been audited and total assets December 31, 2023 are unaudited
**The Binding Share Sale and Purchase Agreement has been terminated for the planned acquisition of PT TPR and PT MHB by PT IPC on June 23, 2023, on that date PT TPR and PT MHB are no longer included as associated entities indirectly owned by PTBA.

Struktur Grup
Group Structure




Entitas Anak Melalui Kepemilikan Langsung
Subsidiaries through Direct Ownership
Entitas Anak Melalui Kepemilikan Tidak Langsung
Subsidiaries through Indirect Ownership
Entitas Ventura Bersama
Joint Venture
Entitas Asosiasi
Associates
PT Bukit Asam Tbk
(Saham Treasuri) (Treasury Shares)
0,29%
PT Bukit Asam Transpacific Railway 10,00%
PT Bukit Asam Metana Ombilin 99,99%
PT Bukit Asam Metana Enim 99,99%
PT Bukit Multi Investama 99,99%
PT Bukit Energi Investama 99,99%
PT Bukit Asam Medika 97,50%
PT Satria Bahana Sarana 95,00%
PT Bumi Sawindo Permai 99,99%
PT Bukit Multi Properti 99,90%
PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia 25,00%
PT Bukit Energi Servis Terpadu 99,62%

Alamat Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan, Entitas Anak, Entitas Ventura Bersama, dan Entitas Asosiasi

Addresses of Head Office, Branches, Representatives, Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim
Sumatra Selatan, Indonesia 31716
Telepon : (0734) 451 096, 452 352
Phone
Fax : (0734) 451 095, 452 993
E-mail : corsec@ptba.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta
Jakarta Representative Office

Menara Kadin Indonesia Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3
Jakarta, Indonesia 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

Pertambangan
Mining

Unit Pertambangan Tanjung Enim
Tanjung Enim Mining Unit
Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim 31716, Sumatra Selatan
Telepon : (0734) 451 096, 452 352
Phone
Fax : (0734) 451 095, 452 993

Unit Pertambangan Ombilin
Ombilin Mining Unit
Jl. Saringan Sawahlunto, Sumatra Barat
Telepon : (0754) 61 021
Phone
Fax : (0754) 61 402

Pelabuhan
Ports

Pelabuhan Tarahan
Tarahan Port
Jl. Soekarno Hatta Km. 15
Tarahan, Bandar Lampung
Telepon : (0721) 31 545, 31 686
Phone
Fax : (0721) 31 577

Dermaga Teluk Bayur
Teluk Bayur Barging Port
Jl. Tanjung Periuk No. 1
Teluk Bayur, Sumatra Barat
Telepon : (0751) 62 522, 63 522,
Phone 31 996
Fax : (0751) 63 533

Pelabuhan Kertapati
Kertapati Barging Port
Jl. Stasiun Kereta Api
Palembang, Sumatra Selatan
Telepon : (0711) 512 617
Phone
Fax : (0711) 511-388

Pabrik Briket
Briquette Plant

Pabrik Briket Tanjung Enim
Tanjung Enim Briquette Plant
Jl. Tambang Banko Barat, Tanjung Enim, Muara Enim
Sumatra Selatan 31716
Telepon : (0734) 451 096, 452 352
Phone
Fax : (0734) 451 095, 452 993

Pabrik Briket Lampung
Lampung Briquette Plant
Jl. Raya Natar Km. 16 Natar
Lampung Selatan
Telepon : (0721) 783 558
Phone
Fax : (0721) 774 266

Entitas Anak Langsung
Direct Subsidiaries

PT Batubara Bukit Kendi (BBK)
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 5
Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
Sumatra Selatan
Telepon : (0734) 453 038
Phone
Fax : (0734) 453 039

PT Internasional Prima Coal (IPC)
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 5
Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
Sumatra Selatan
Telepon : (021) 5761669
Phone
Fax : (021) 5761657

PT Bukit Asam Prima (BAP)
Menara Kadin Indonesia Lt. 26
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
Kav. 2-3 Jakarta
12950
Telepon : (021) 5794 4522
Phone

PT Bukit Asam Banko (BAB)
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim
Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan 31716
Telepon : (0734) 451 096
Phone
Fax : (0734) 451095

PT Bukit Asam Methana Enim (BAME)
Menara Kadin Indonesia Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

PT Bukit Asam Metana Ombilin (BAMO)
Menara Kadin Indonesia Lt. 15
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5
Kav. 2-3 Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

PT Bukit Multi Investama (BMI)
Menara Kadin Indonesia Lt. 9
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

PT Bukit Energi Investama (BEI)
Menara Kadin Indonesia Lt. 9
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950
Telepon : (021) 525 4014
Phone
Fax : (021) 525 4002

Ventura Bersama
Joint Venture

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)
Surveyor Indonesia Lt. 17
Suite 1703, Jl. Jend. Gatot Subroto
Kav. 56, Jakarta 12950
Telepon : (021) 5212 463
Phone
Fax : (021) 5210 725

PT Bukit Asam Transpacific Railways (BATR)
Menara Rajawali Lt. 22
Jl. Mega Kuningan Lot #5.1
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5761688
Phone

PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP)
DBS Bank Tower Lt. 23
Ciputra World 1, Jakarta
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12940

Entitas Anak Tidak Langsung
Indirect Subsidiaries

PT Bukit Prima Bahari (BPB)
Menara Karya Lt. 19, Unit D
Jl H. R. Rasuna Said Blok X-5
Kavling 1-2, Kel. Kuningan Timur
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5761 636
Phone

PT Pelabuhan Bukit Prima (PBP)
Gedung Terpadu Bukit Asam
Coal Terminal (BACT) Lt. 4
Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Tarahan
Bandar Lampung
Telepon : (0721) 340 003
Phone

PT Penajam Internasional Terminal (PIT)
Jl. Kapten A Rivai B2 No. 7
Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I
Palembang, Sumatra Selatan
30121
Telepon : (0711) 512 617
Phone

PT Bumi Sawindo Permai (BSP)
Jl lintas Sumatera, Desa Penyandingan
Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara
Enim, Sumatra Selatan 31355
Telepon : (0828) 8149 6102
Phone

PT Satria Bahana Sarana (SBS)
Jl. Jurang Parigi Dalam No. 05 Tanjung Enim
Sumatra Selatan 31716
Telepon : (0734) 453 035
Phone
Fax : (0734) 453 039

PT Bukit Energi Service Terpadu (BEST)
Menara Kadin Indonesia Lt. 9
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950
Telepon : (0812) 734 892
Phone

PT Bukit Multi Properti (BMP)
Tempo Scan Tower Lt. 32
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan Timur
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (0821) 2934 9300
Phone

Entitas Asosiasi
Associates

PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia
Antam Office Building Tower Lt. 5 dan 11
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 1, Tanjung Barat
Jakarta Selatan 12530
Telepon : (021) 296 333 18
Phone
Fax : (021) 296 333 19

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Tanggal Pencatatan Listing Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Nilai Nominal Saham Share Nominal Value	Harga Penawaran/ penerbitan Offering/ Issuance Price	Jumlah Saham yang Diterbitkan Number of Issued Share	Komposisi Kepemilikan Saham Akhir Final Shares Ownership Composition
***Pra Initial Public Offering* (IPO)**					**Pemerintah : 100%** Government: 100%
23 Desember 2002 December 23, 2002	*Initial Public Offering* (IPO) berbentuk Privatisasi di Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) Initial Public Offering in the form of privatization at the Jakarta Stock Exchange (now IDX)	500	450	346,5 juta saham Seri B milik Pemerintah dan 31,5 juta saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan. 346.5 million shares of Series B owned by Government and 31.5 million new shares issued by the Company	Pemerintah: 83,74% Publik: 16,26% Government: 83,74% Public: 16,26%
	Pada IPO ini, Perusahaan turut menerbitkan Waran Seri I yang diberikan kepada pemegang saham, kecuali Negara Republik Indonesia, dilaksanakan hingga 22 Desember 2005 In the IPO, the Company also issued Series I warrants granted to the shareholders, except The Republic of Indonesia, which can be exercised until December 22, 2005	500	450	173,25 juta 173,25 million	Pemerintah: 83,74% Publik: 16,26% Government: 83,74% Public: 16,26%
25 Juni 2004 June 25, 2004	Divestasi Lanjutan di mana Pemerintah menawarkan sahamnya sejumlah 286,9 juta tanpa adanya penerbitan saham baru Further divestment in which the Government offered 286.9 million of its shares without any issuance of new shares	500		286,9 Juta 286,9 million	Pemerintah: 70,1% Publik: 29,68% Government: 70,1% Public: 29,68%
23 Desember 2005 December 23, 2005	Masa Konversi Waran Seri I Berakhir End of Series I Warrants Conversion Period	-	-	-	Pemerintah: 65,02% Publik: 27,49% Government: 65,02% Public: 27,49%
31 Desember 2005 -31 Desember 2010 December 31, 2005 – December 31, 2010	Tidak ada aksi korporasi berupa penawaran saham maupun penerbitan saham baru There were no corporate actions, no share offerings and issuance of new shares	-	-	-	Pemerintah: 65,02% Publik: 34,98% Government: 65,02% Public: 27,49%
2012-2015	Pembelian Kembali Saham Perusahaan (2012, 2013, dan 2015) Company Shares Buyback (2012, 2013, and 2015)	-	-	980.283.500 (saham treasuri) 980.283.500 (treasury shares)	Pemerintah (termasuk Seri A Dwiwarna) 65,02% PT Bukit Asam Tbk 8,51% Publik: 26,47% Government (including Series A Dwiwarna): 65,02% PT Bukit Asam Tbk: 8,51% Public: 26,47%

Tanggal Pencatatan Listing Date	**Aksi Korporasi** Corporate Action	**Nilai Nominal Saham** Share Nominal Value	**Harga Penawaran/ penerbitan** Offering/ Issuance Price	**Jumlah Saham yang Diterbitkan** Number of Issued Share	**Komposisi Kepemilikan Saham Akhir** Final Shares Ownership Composition
14 Desember 2017 December 14, 2017	Pemecahan Nilai Nominal dan Pengalihan Saham Seri B Pemerintah ke PT Inalum (Persero) Stock Split of Shares Nominal Value and Transfer of Government Series B Shares to PT Inalum (Persero)	100	-	11.520.659.250	Pemerintah: 5 saham Seri A PT Inalum (Persero): 65,02% Publik: 34,98% Government: 5 shares of Series A PT Inalum: 65,02% Public: 34,98%
2019	Pengalihan Saham Treasuri Perseroan Company's Treasury Shares Transfer	-	-	649.987.500 (saham treasuri) 649.987.500 (treasury shares)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,87% PT Inalum (Persero): 65,93% Publik: 31,2% Government: 5 shares series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,87% Inalum: 65,93% Public: 31,2%
2020	Pembelian Kembali Saham Shares Buyback	-	-	6.302.000 (saham treasuri) 6.302.000 (treasury shares)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,92% PT Inalum (Persero): 65,93% Publik: 31,15% Government: 5 shares series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 2,87% Inalum: 65,93% Public: 31,2%
2021	Pengalihan Saham Treasuri Perseroan Company's Treasury Shares Transfer	-	-	303.148.100 (saham treasuri) 303.148.000 (treasury shares)	Pemerintah: 5 Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 0,29% PT Inalum (Persero): 65,93% Publik: 33,78% Government: 5 Series A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk: 0.29% PT Inalum (Persero): 65.93% Public: 33.78%

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing

Hingga 31 Desember 2023, PTBA tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat laporan kronologis pencatatan efek yang dapat disampaikan pada laporan ini.

Until December 31, 2023, PTBA did not issue securities such as bonds, sharia bonds, convertible bonds, or other securities on the stock exchange, both in Indonesia and abroad. Thus, there is no chronological report of securities listing submitted in this report.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accounting and Public Accounting Firm

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
(PwC Indonesia)

Akuntan Publlik
Public Accounting
Yusron, S.E., Ak., CPA

Gedung WTC 3
WTC 3 Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta
Indonesia 12920
Telp. (021) 50992901 / 31192901
Fax. (021) 52905555 / 52905050
Situs Web: www.pwc.com/id

Jasa yang Diberikan | Service Provided:

1. General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha PTBA.
2. Audit Laporan Keuangan Bukit Asam Induk (tanpa laporan auditor tersendiri).
3. Prosedur Assurans berdasarkan Standar Perikatan Assurans (SPA) 3000 atas Laporan Pencapaian KPI Manajemen & Tingkat Kesehatan Perusahaan.
4. General Audit Laporan Keuangan TJSL.
5. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan PSA-62.

1. General Audit of PTBA Business Group Consolidated Financial Statements.
2. Audit of Parent PTBA Financial Statements (without a separate auditor's report)
3. Assurance procedure based on Assurance Engagement Standards 3000 on Management KPI Achievement Reports & Company Soundness Level.
4. General Audit of CSR Financial Statements.
5. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control based on PSA-62

Periode Penugasan: Tahun Buku 2023
Assignment Period : 2023 Fiscal Year

Biaya Rp3.194.583.165,-
Fee Rp3,194,583,165,-

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

Bursa Perdagangan Saham dan Efek
Stock and Securities Trading Exchanges

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Call Center: 0800-100-9000
Email: callcenter@idx.co.id
Situs Web | Website: www.idx.co.id

Jasa: Perantara perdagangan efek Perusahaan
Service: Company securities trading intermediary

Periode Penugasan: Sejak IPO - sekarang
Assignment Period : Since IPO - present

Biaya Rp275.000.000,-
Fee Rp275,000,000,-

KUSTODIAN
Custodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesian Stock Exchange Building, 1st Tower, Floor 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
Telp.: (021) 5152855
Fax : (021) 52991199
Situs Web : helpdesk@ksei.co.id www.ksei.co.id

Jasa: Pengelolaan administrasi efek
Service: Securities administration management

Periode Penugasan: Sejak IPO - sekarang
Assignment Period : Since IPO - present

Biaya Rp10.000.000,-
Fee Rp10,000,000,-

Pemeringkat Efek
Securities Rating

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Equity Tower Lt. 30
Sudirman Central Business District, Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Jasa yang Diberikan : Jasa Pemeringkatan Perusahaan *(Corporate Rating)*
Service Provided : Corporate Rating

Periode Penugasan : Tahun buku 2023
Assignment Period : Financial Year 2023

Biaya Rp175.000.000,-
Fee Rp175,000,000,-

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220
Telp. : (021) 3508077
Fax. : (021) 3508078
Situs Web : www.datindo.com
Email : corporatesecretary@datindo.com

Jasa yang Diberikan : Melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek antara lain mengelola pencatatan kepemilikan Saham Emiten dalam Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk
Service Provided : Carry out registration of Securities ownership and distribution of rights related to Securities, including managing the registration of Issuer Share ownership in the Register of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk

Periode Penugasan : Sejak Emiten melakukan penawaran umum perdana saham yakni pada Tahun 2002 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Akta No. 51 Tanggal 31 Oktober 2002 dibuat di hadapan Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., M.KN, di Jakarta s.d sekarang
Assignment Period : Since the Issuer made an initial public offering of shares in 2002, based on the Share Administration Management Agreement, Deed No. 51 dated October 31, 2002, made before Notary Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., M.KN, in Jakarta until now

Biaya Rp44.440.000,-
Fee Rp44,440,000,-

Konsultan Hukum
Legal Consultant

Soemadipradja & Taher

Wisma GBKBI Level 9 Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir
Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 50 999 879 Fax. (021) 574 0068
Email : center@soemath.com Situs
Web : www.soemath.com

Jasa: Pendampingan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTBA Tahun Buku 2022
Assistance to the PTBA Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Financial Year

Periode Penugasan : RUPS Tahun Buku 2022
Assignment Period : General Meeting of Shareholders in the 2022 Financial Year

Biaya Rp75.000.000,-
Fee Rp75,000,000,-

Muhajir Sodruddin and Partner

Jl. Fatmawati Raya No.47 D Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan 12410

Pekerjaan I
Service 1

Jasa yang Diberikan : Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum pengurusan penyelesaian permasalahan Perkara Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG
Service Provided : Legal Consultant Service in managing the resolution of Case Number 152/G/2022/PTUN.PLG

Periode Penugasan : 1 Juni 2022 - 31 Mei 2023
Assignment Period : June 1, 2022 - May 31, 2023

Biaya Rp490.000.000,-
Fee Rp490,000,000,-

Hardiansyah & Partners

Jalan Pramuka IV Pasar II Muara Enim, Sumatera Selatan
Pramuka IV Rd, Pasar II Muara Enim, South Sumatra
Telp: 0732-424135
Fax: 0734-424135
Hp: 085267101343
Email: lawfirmhrd@yahoo.com

Jasa yang Diberikan : Jasa Konsultan Hukum Retainer
Service Provided : Retainer Legal Consultant Services

Periode Penugasan : 01 April 2023 - 31 Maret 2024
Assignment Period : April 1, 2023 - March 31, 2024

Biaya Rp345.000.000,-
Fee Rp345,000,000,-

Pekerjaan 2
Service 2

Jasa yang Diberikan : Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum Penyelesaian Permasalahan Hukum PTBA
Service Provided : Legal Consultant Services Jobs Resolving PTBA Legal Issues

Periode Penugasan : 01 Desember 2022 - 31 Desember 2023
Assignment Period : December 1, 2022 - December 31, 2023

Biaya Rp1.500.000.000,-
Fee Rp1,500,000,000,-

Pekerjaan 3
Service 3

Jasa yang Diberikan : Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum Pembuatan Kajian Aset Perusahaan
Service Provided : Legal Consultant Services for Creating Company Asset Studies

Periode Penugasan : 01 Desember 2022 – 31 Desember 2023
Assignment Period : December 1, 2022-December 31, 2023

Biaya Rp1.090.000.000
Fee Rp1,090,000,000

Pekerjaan 4
Service 4

Jasa yang Diberikan : Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum pengurusan penyelesaian permasalahan Perkara Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Service Provided : Legal Consultant Services in processing the resolution of Case Number 152/G/2022/PTUN.PLG at the Appeal level at the Medan State Administrative High Court

Periode Penugasan : 01 Februari 2023 - 31 Januari 2024
Assignment Period : February 1, 2023 - January 31, 2024

Biaya Rp499.976.000
Fee Rp499,976,000

Pekerjaan 5
Pekerjaan 5

Jasa yang Diberikan : Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum praperadilan melalui Pengadilan Negeri Palembang
Service Provided : Pretrial Legal Consultant Services work at the Palembang District Court

Periode Penugasan : 21 Juni 2023 - 20 Juni 2024
Assignment Period : June 21, 2023 - June 20, 2024

Biaya Rp2.500.000.000
Fee Rp2,500,000,000

Hiswara Bunjamin & Tandjung

18th Floor, Tower 1, Sudirman 7.8, Jl. Jend. Sudirman
Tanah Abang, Jakarta

Jasa yang Diberikan : Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum penunjang pelaksanaan rencana transaksi akuisisi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("Aset PLTU") dalam rangka energy transformation mechanism dari PT PLN (Persero) selaku Penjual
Service Provided : Legal Consultant Services to support the implementation of planned acquisition transactions for Power Plants ("CFPP Assets") in the context of the energy transformation mechanism from PT PLN (Persero) as Trader

Periode Penugasan : 20 September 2022 - 19 September 2023
Assignment Period : September 20, 2022 - September 19, 2023

Biaya Rp1.462.500.000
Fee Rp1,462,500,000

Yusuf Singajuru & Partner

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Tower A Unit A2
Jakarta Selatan

Jasa yang Diberikan : Perjanjian tentang Jasa Konsultan Hukum Non Litigasi
Service Provided : Agreement on Non-Litigation Legal Consultant Services

Periode Penugasan : 19 Desember 2022 - 18 Desember 2023
Assignment Period : December 19, 2022 - December 18, 2023

Biaya Rp350.000.000
Fee Rp350,000,000

Assegaf Hamzah & Partners

Jakarta Office, Capital Place, Level 36&37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18

Jasa yang Diberikan : *Review* dan kajian permasalahan hukum yang sedang dihadapi
Service Provided : Review and legal problems study

Periode Penugasan : 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023
Assignment Period : January 1, 2023 - December 31, 2023

Biaya Rp3.600.000.000,-
Fee Rp3,600,000,000,-

Aquinas Law Alliance LLP

16 Raffles Quay, #17-03 Hong Leong Building, Singapore 048581

Jasa: Konsultan Hukum Penegakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Perkara Nomor 41030/III ARB-BANI/2018 ("Putusan Arbitrase (BANI)") yaitu mendapatkan pemenuhan kewajiban pembayaran Liannex Corporation Pte Ltd ("Liannex") kepada PTBA melalui berbagai alternatif cara penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku ("Pekerjaan"), meliputi namun tidak terbatas pada :
1. Menyusun Surat permintaan pelaksanaan Putusan Arbitrase (BANI) kepada Liannex.
2. Dalam hal Liannex gagal melakukan pembayaran sesuai dengan Putusan Arbitrase (BANI), maka PIHAK KEDUA akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Singapura mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase untuk (BANI).

Services: Legal Consultant for Enforcement of Decisions of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in Case Number 41030/III ARB-BANI/2018 ("Arbitration Decision (BANI)") namely obtaining the fulfillment of Liannex Corporation Pte Ltd's ("Liannex") payment obligations to PTBA through various alternative methods of settlement in accordance with applicable provisions ("Work"), including but not limited to:
1. Prepare a Letter of request for implementation of the Arbitration Award (BANI) to Liannex.
2. In the event that Liannex fails to make payments in accordance with the Arbitration Award (BANI), the SECOND PARTY will submit an application to the Singapore High Court to recognize and implement the Arbitration Award for (BANI).

Periode Penugasan : 17 November 2022 - 16 November 2023
Assignment Period : November 17, 2022 - November 16, 2023

Biaya $46.000
Fee $46,000

Notaris
Notary

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah Kompleks Taman Gandaria Kav. 11A, Kelurahan Gandaria Selatan
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12420
Telp. (021) 29125500 Fax. (021) 29125600
Email : Josedima99@gmail.com, jose@josedima99.co

Jasa yang Diberikan : Pembuatan akta-akta perusahaan dan pembuatan akta-akta terkait aksi korporasi dan RUPS.
Service Provided : Preparing company deeds and those related to corporate actions and GMS

Periode Penugasan : RUPS Tahun Buku 2022
Assignment Period : 2022 Financial Year GMS

Biaya Rp55.000.000,-
Fee Rp55,000,000,-

Agus Riyanto, S.H., M.Kn

Pekerjaan I
Work 1

Jasa yang Diberikan : Pembuatan Akta, Legalisir Dokumen, Sertfikasi Tanah:
- Sertifikasi Lahan disekitar TLS 1 & TLS 2
- Sertifikasi Lahan jalan masuk Banko Barat
Service Provided : Carrying out Deeds, Legalizing Documents, Land Certificates:
- Land Certificate around TLS 1 & TLS 2
- Land Certificate on Banko Barat Road Access

Periode Penugasan : Oktober 2021 - 17 Juli 2023
Assignment Period : October 2021 - July 17, 2023

Biaya Rp488.859.500
Fee Rp488,859,500

Pekerjaan 2
Work 2

Jasa yang Diberikan : Pengurusan Pengoperan Hak Atas Tanah PT Bukit Asam Tbk Bara Lestari Kepada Warga Bedeng Obak
Service Provided : Carrying out the Transfer of Land Rights from PT Bukit Asam Tbk Bara Lestari to Bedeng Obak Residents

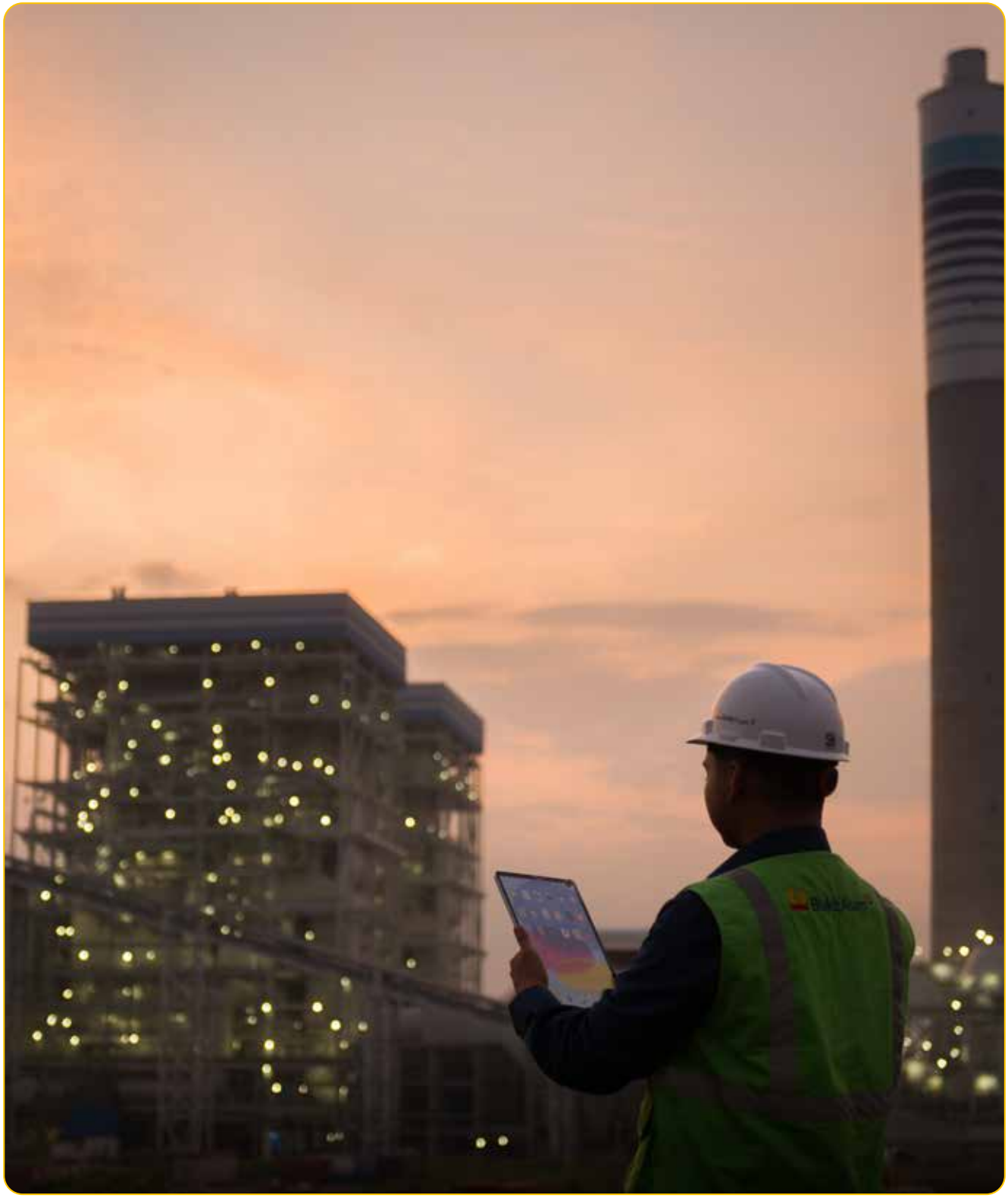
Periode Penugasan : Mei 2023 - Juli 2023
Assignment Period : May 2023 - July 2023

Pekerjaan 3
Work 3

Jasa yang Diberikan : Jasa Sertifikasi Tanah Ex-Beheersterrein Lanjutan 2023
Service Provided : Ex-Beheersterrein Land certification 2023

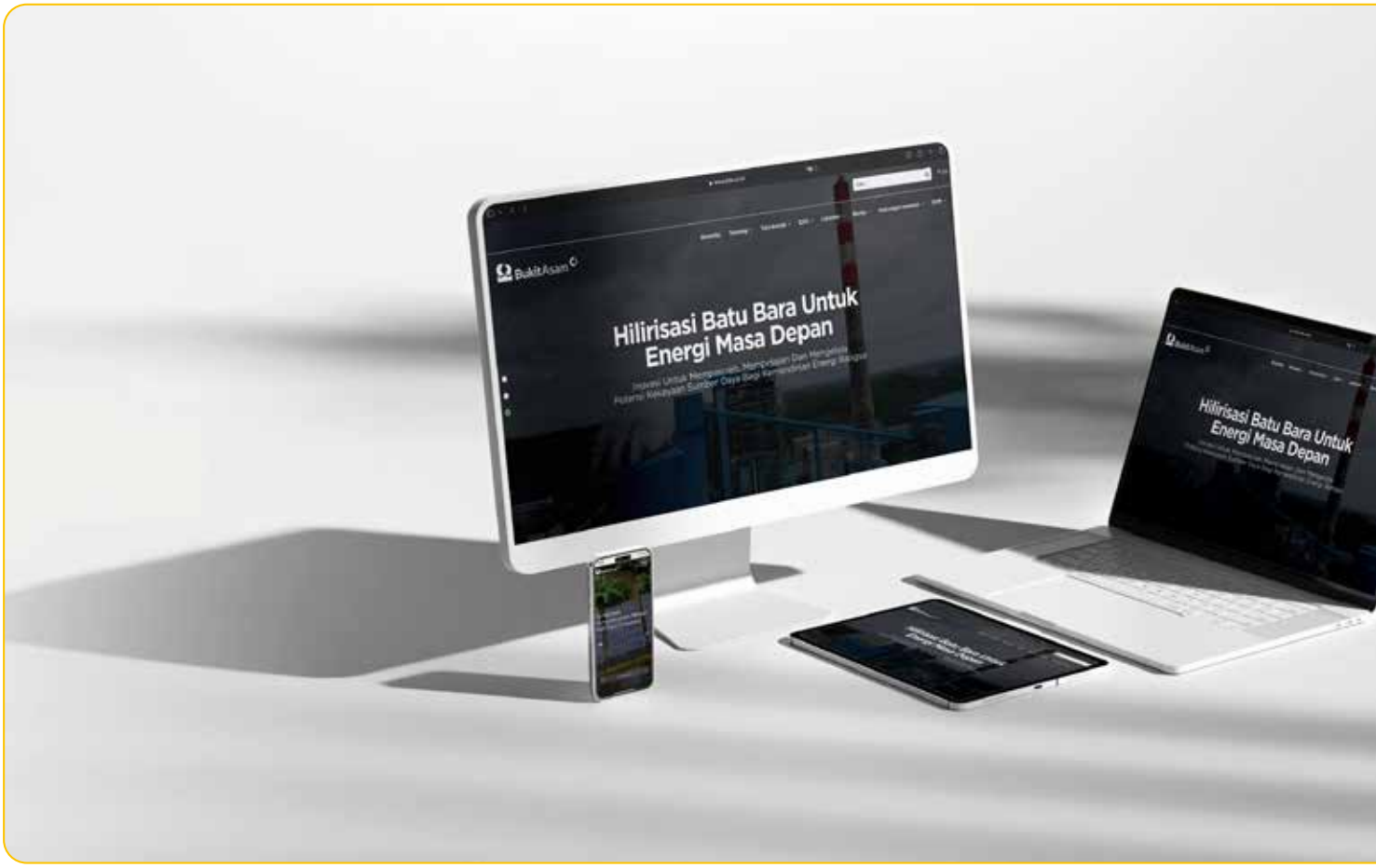
Periode Penugasan : Juni 2023 - Desember 2023
Assignment Period : June 2023 - December 2023

Biaya Rp30.000.000
Fee Rp30,000,000



Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company Website

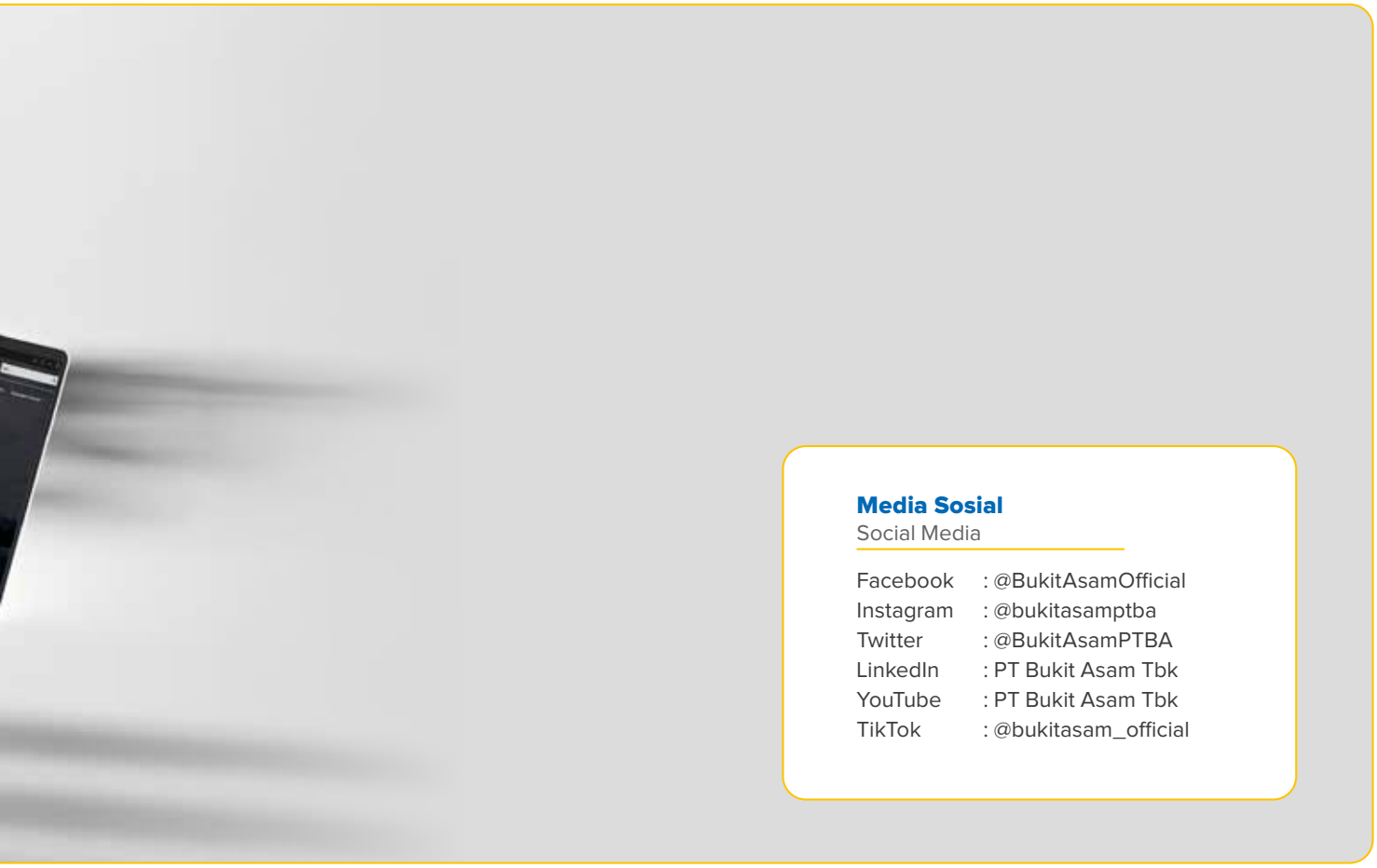


PTBA memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan ter-*update* dengan alamat www.ptba.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi Perusahaan yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, serta mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perusahaan kepada khalayak luas. Situs web resmi Perusahaan yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PTBA has an official website as a means to meet public transparency, by presenting information in a communicative and updated manner at the address www. ptba.co.id. This website is the Company's official portal that can be accessed openly with easy and simple navigation to provide comprehensive, accurate, and up-to-date information about the Company to a wider audience. The official website is presented in two languages, Indonesian and English, and is already in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.4/2015 concerning Issuer or Public Company Websites, which requires providing information regarding, among others:

1. General Information of Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.



Media Sosial
Social Media

Facebook	: @BukitAsamOfficial
Instagram	: @bukitasamptba
Twitter	: @BukitAsamPTBA
LinkedIn	: PT Bukit Asam Tbk
YouTube	: PT Bukit Asam Tbk
TikTok	: @bukitasam_official

Semua informasi yang disajikan dalam *website* Perusahaan senantiasa diperbaharui secara berkala untuk memberikan informasi terbaru bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Perusahaan juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube.

All information presented on the Company website is regularly updated to provide the latest information for all stakeholders and general public. The Company also manages social media accounts as part of information disclosure and communication to all stakeholders, including Facebook, Instagram, Twitter, and Youtube.

KETERSEDIAAN INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN BERDASARKAN POJK NO. 8/POJK.4/2015

INFORMATION AVAILABILITY ON THE COMPANY WEBSITE BASED ON POJK NO. 8/POJK.4/2015

Tentang Kami
About Us

Profil Perusahaan	Company Profile
Organisasi	Organization
Sambutan Dirut	Greetings from the President Director
Bisnis Batu Bara	Coal Business
Produk Batu Bara	Coal Products
Pengembangan Bisnis	Business Development
Penghargaan	Awards

Tata Kelola
Governance

Tata Kelola	Governance
Audit Internal	Internal Audit
Sekretaris Perusahaan	Company Secretary
Manajemen Risiko	Risk Management
Sistem Manajemen Perusahaan	Company Management System
Komite Audit & Risiko Usaha	Audit & Business Risk Committee
Sistem Pelaporan Pelanggaran	Violation Reporting System
Profesi Penunjang	Supporting Profession
Kode Etik Perusahaan	Company Code of Ethics
Kebijakan Gratifikasi	Gratuity Policy
Mekanisme Pengaduan	Complaint Mechanism
Pengelolaan Benturan Kepentingan	Management of Conflicts of Interest

ESG

Kinerja Lingkungan	Environmental Performance
Kinerja Sosial	Social Performance
Kinerja Ekonomi & Tata Kelola	Economic Performance & Governance

Laporan
Report

Laporan Audit Keuangan	Financial Audit Report
Laporan Keuangan Triwulan	Quarterly Financial Reports
Ikhtisar Keuangan	Financial Overview
Laporan Tahunan	Annual Report
Laporan Keberlanjutan	Sustainability Report
Laporan PKBL	CSR report
Presentasi Perusahaan	Company Presentation

Berita
News

Berita	News
Berita CSR & Lingkungan	CSR & Environmental News
Siaran Pers	Press Release
Pengumuman	Announcement
Video	Videos
Majalah	Magazine

Hubungan Investor
Investor Relations

Informasi Saham	Stock Information
Daftar Pemegang Saham	List of Shareholders
Info Memo	Memo Info
Rapat Umum Pemegang Saham	General Meeting of Shareholders
Dividen	Dividends

SDM
HC

Karier	Career
Bukit Asam Learning Center	Bukit Asam Learning Center
Bukit Asam Assessment Center	Bukit Asam Assessment Center

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Pejabat Eksekutif

Education and/or Training of Board of Commisioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Executive

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Pejabat Eksekutif, di sepanjang tahun 2023.

The following is information about the competency improvement program for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit, throughout 2023

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Comprehensive Corporate Financial Performance Strategy	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	Prof. Dr. Adji Suratman,SE,MM. AK,CA
	Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Deloit
	Pelatihan Training	MIND ID 3 GRC Series : Trend dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember2023 Jakarta, December 18, 2023	PTBA
Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M (Komisaris) (Commissioner)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Comprehensive Corporate Financial Performance Strategy	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	Prof. Dr. Adji Suratman,SE,MM. AK,CA
	Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Deloit
	Workshop	Implementasi ESG pd Sektor Pertambangan &Peran Auditor Internal dalam Penerapan ESG, Kebijakan ESG MIND ID Group, Rakor Komite Audit dan Internal Audit MIND ID Group	Pangkal Pinang, 7 Juni 2023 Pangkal Pinang, June 7, 2023	PT TIMAH TBK - MIND ID GROUP
	Webinar	Audit Teknologi Informasi	Virtual, 27 Juni 2023 Virtual, June 27, 2023	Deloitte, MIND ID, PTBA
	Webinar	Presentasi Pre IPO dan Post IPO dari IDX	Virtual, 10 Agustus 2023 Virtual, August 10, 2023	BLMI GRC MasterClass
	Seminar	Seminar Perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan atas Natura	Jakarta, 21 Agustus 2023 Jakarta, August 21, 2023	PT Prima Wahana Caraka (PWC)
	Webinar	Risk Management Effectiveness Evaluation	Virtual, 7 September 2023 Virtual, September 7, 2023	BLMI GRC MasterClass
	Pelatihan Training	MIND ID 3 GRC Series : Trend dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, September 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, Desember 18, 2023	PTBA

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S. Sos (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Comprehensive Corporate Financial Performance Strategy	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	Prof. Dr. Adji Suratman,SE,MM. AK,CA
	Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Deloitte
	Workshop	Implementasi ESG pd Sektor Pertambangan &Peran Auditor Internal dalam Penerapan ESG, Kebijakan ESG MIND ID Group, Rakor Komite Audit dan Internal Audit MIND ID Group	Pangkal Pinang, 7 Juni 2023 Pangkal Pinang, June 7, 2023	PT TIMAH TBK - MIND ID GROUP
	Webinar	Audit Teknologi Informasi	Virtual, 27 Juni 2023 Virtual, June 27, 2023	Deloitte, MIND ID, PTBA
	Webinar	Presentasi Pre IPO dan Post IPO dari IDX	Virtual, 10 Agustus 2023 Virtual, August 10, 2023	BLMI GRC MasterClass
	Seminar	Seminar Perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan atas Natura	Jakarta, 21 Agustus 2023 Jakarta, August 21, 2023	PT Prima Wahana Caraka (PWC)
	Pelatihan Training	Risk Management Effectiveness Evaluation	Virtual, 7 September 2023 Virtual, September 7, 2023	BLMI GRC MasterClass
	Pelatihan Training	Joint Venture between SOE and Private Sector	Virtual, 17 Oktober 2023 Virtual, October 17, 2023	BLMI GRC MasterClass
	Pelatihan Training	GRC Masterclass 2023	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	BLMI GRC MasterClass
	Pelatihan Training	MIND ID 3 GRC Series : Trend dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, December 18, 2023	PTBA
Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo B. Tewu (Komisaris) (Commissioner)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Comprehensive Corporate Financial Performance Strategy	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	Prof. Dr. Adji Suratman,SE,MM. AK,CA
	Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Deloitte
	Webinar	Webinar Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	Virtual, 22 Agustus 2023 Virtual, August 22, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
	Pelatihan Training	MIND ID 3 GRC Series : Trend dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, Desember 18, 2023	PTBA
Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan Training	Kegiatan MIND ID 3 GRC Series : Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, Desember 18, 2023	PTBA
Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd. (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pelatihan Training	Kegiatan MIND ID 3 GRC Series : Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, Desember 18, 2023	PTBA

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Senior Komisaris Senior Commissioner				
Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, S.E. (Komisaris Utama/ Independen) (President/ Independent Commissioner)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Comprehensive Corporate Financial Performance Strategy	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	Prof. Dr. Adji Suratman,SE,MM. AK,CA
	Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Deloitte
Devi Pradnya Paramita, M.Sc (Komisaris) (Commissioner)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Comprehensive Corporate Financial Performance Strategy	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	Prof. Dr. Adji Suratman,SE,MM. AK,CA
	Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Deloitte
Direksi Board of Directors				
Drs. Arsal Ismail, M.M., MSI (Direktur Utama) (President Director)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Workshop	BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2023	Jakarta, 09 Maret 2023 Jakarta, March 9, 2023	KBUMN
	Workshop	Mining Industry Outlook Strategi Ekspasif dalam Menghadapi Industri Pertambangan Global 2023	Jakarta, 16 Maret 2023 Jakarta, March 16, 2023	MIND ID
	Rakor	Upaya Percepatan Proyek Strategis Nasional Hilirisasi Batubara	Jakarta, 6 April 2023 Jakarta, April 6, 2023	Badan Intelijen Negara
	Webinar	Sharing Session dan Kick Off Pembentukan Tata Kelola Terintegrasi dan tanggung jawab social dan Lingkungan Dewan Komisaris MIND ID	Jakarta, 11 April 2023 Jakarta, April 11, 2023	MIND ID
	Workshop	BUMN Communications Week 2023	Jakarta, 3 Mei 2023 Jakarta, May 3, 2023	KBUMN
	Webinar	Undangan Edukasi Perpajakan PP 50 Tahun 2022	Virtual, 31 Mei 2023 Virtual, May 31, 2023	KPP Madya Dua Jakarta Timur
		Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023	Jakarta, 14 Juni 2023 Jakarta, June 14, 2023	BPKP
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program KBUMN	Jakarta, 16 Agustus 2023 Jakarta, August 16, 2023	KBUMN
	Workshop	BUMN Leadership Workshop	Jakarta, 18 Agustus 2023 Jakarta, August 18, 2023	KBUMN
	Webinar	Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	Virtual, 22 Agustus 2023 Virtual, August 22, 2023	OJK
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program KBUMN	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program KBUMN	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program KBUMN	Virtual, 14 Oktober 2023 Virtual, October 14, 2023	KBUMN
	Workshop	Leadership Alignment Workshop Penyusunan Rencana Strategis Transformasi Budaya	Jakarta, 16 Oktober 2023 Virtual, October 16, 2023	PTBA
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program KBUMN	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	MIND ID 2nd GRC Series: Internal Control: Leading Practices & Pratical Implementation Tips bersama EY	Virtual, 31 Oktober 2023 Virtual, October 31, 2023	MIND ID
	Workshop	Kompas 100 CEO Forum 2023	Balikpapan, 1-2 November 2023 Balikpapan, November 1-2, 2023	Kompas

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Workshop	Undangan Sosialisasi Juknis Penyusunan KPI pada BUMN, Juknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, dan Juknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN	Virtual, 14 November 2023 Virtual, November 14, 2023	KBUMN
	Workshop	Undangan Kegiatan MIND ID 3rd GRC Series: Tren & Integrasi Kewajuban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	The Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	Dubai UEA, 29 November 2023 Dubai UEA, November 29, 2023	KEMENKO MARVES
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, December 18, 2023	PTBA
Ir. Suhedi (Direktur Operasi dan Produksi) (Operation and Production Director)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Sharing Session dan Kick Off Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan TJSL Dekom MIND I	Jakarta, 11 April 2023 Jakarta, April 11, 2023	MIND ID
	Webinar	Narasumber WeTALK: 101 Cerita AKHLAK – HARMONIS	Jakarta, 11 Juli 2023 Jakarta, July 11, 2023	MIND ID
	Webinar	Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	Virtual, 22 Agustus 2023 Virtual, August 22, 2023	OJK
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	Kementerian BUMN
	Workshop	MIND ID 1st GRC Series bersama PwC Indonesia	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	MIND ID – PwC Indonesia
	Workshop	Xploration Quantum Leap (ttg Komoditas Saat Ini, Benchmarking terhadap Top Global Mining Company, dan Pain Point Implementasi Strategi Eksplorasi)	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	MIND ID – Mc Kinsey
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards – Governance of ESG)	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	BUMN School
	Pelatihan	GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information for Supervisionary Board)	Virtual, 5 Oktober 2023 Virtual, October 5, 2023	BUMN School
	Workshop	Leadership Alignment Workshop Penyusunan Rencana Strategis Transformasi Budaya	Jakarta, 16 Oktober 2023 Jakarta, October 16, 2023	PTBA – PwC Consulting
	Webinar	Wawancara mengenai Reklamasi dan Pascatambang	Virtual, 19 Oktober 2023 Virtual, October 19, 2023	Institute for Essential Sevices Reform (IESR)
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 (CG Methodology and Environmental and Social Management Systems)	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	BUMN School
	Pelatihan Training	MIND ID 2nd GRC Series: Internal Control: Leading Practices & Practical Implementation Tips	Virtual, 31 Oktober 2023 Virtual, October 31, 2023	MIND ID & EY Indonesia
	Pelatihan Training	Undangan Kegiatan MIND ID 3rd GRC Series: Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID Dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID & Deloitte Consulting

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Suherman, S.E., Ak., M.M. (Direktur Sumber Daya Manusia) (Human Resources Director)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Asesmen	Asesmen Talenta Direksi – Professional Qualification (PQ) Kementerian BUMN	Virtual, 6 Maret 2023 Virtual, March 6, 2023	KBUMN
	Workshop	Human Capital Summit	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 - Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	KBUMN
	Workshop	MIND ID 1st GRC Series bersama PwC Indonesia	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 - ESG for Board's – Governance of ESG	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 - GRC Integrated Information for Supervisionary Board	Virtual, 5 Oktober 2023 Virtual, October 5, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 - ESG for Board's – Governance of ESG	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	KBUMN
	Workshop	MIND ID 2nd GRC Series : Internal Control: Leading Practices & Practical Implementation Tips bersama EY Indonesia	Virtual, 31 Oktober 2023 Virtual, October 31, 2023	MIND ID
	Workshop	Leadership Alignment Workshop Penyusunan Rencana Strategis Transformasi Budaya	Jakarta, 16 Oktober 2023 Bali, October 16, 2023	PT Bukit Asam
	Workshop	Workshop module I CHRO School Tahun 2023	Bali, 13-14 Oktober 2023 Bali, October 13-14, 2023	KBUMN
	Workshop	MIND ID 3rd GRC Series: Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID Dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Road to CNBC Indonesia Awards (Konsisten dengan Praktik Good Mining)	Jakarta, 29 November 2023 Jakarta, November 29, 2023	CNBC
	Workshop	Operating Model Forum (OMF) - CHRO	Jakarta, 8-9 Desember 2023 Jakarta, December 8-9, 2023	CHRO
Farida Thamrin, S.T. (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Finance and Risk Management Director)	Webinar	Ceramah Motivasi oleh Ignatius Jonan	Tanjung Enim, 12-13 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12-13, 2023	PTBA
	Webinar	Women Leader Webinar Series : A Journey of Career Woman	Virtual, 24 Januari 2023 Virtual, January 24, 2023	Srikandi BUMN
	Seminar	Mandiri Investment Forum 2023 : "Prevailing Over Turbulence"	Jakarta, 1 Februari 2023 Jakarta, February 1, 2023	Mandiri Investment Forum
	Seminar	Seminar "Prof. Hikmahanto Juwana" Peran & Tanggung Jawab Direksi & Komisaris berdasarkan PERPU serta Kasus Hukum	Bandung, 3 Februari 2023 Bandung, February 3, 2023	Prof Hikmahanto Juwana
	Webinar	Webinar Manajemen Risiko 2023 with PT Deloitte Konsultan Indonesia &Holding Risk Management MIND ID	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Satker Manajemen Risiko PTBA
	Sharing Session	Sharing Session & Kick-Off Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dewan Komisaris Mind ID	Jakarta, 11 April 2023 Jakarta, April 11, 2023	MIND ID
	Webinar	FGD Komite Pengembangan Usaha Mind ID	Bogor, 4 Mei 2023 Bogor, May 4, 2023	MIND ID
	Seminar	Strategic Meeting Afiliasi Anak Perusahaan	Jakarta, 29 Mei 2023 Jakarta, May 29, 2023	AAP
	Seminar	Bank Indonesia dan Pelaku Dunia Usaha Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2023 Jakarta, June 13, 2023	Bank Indonesia
	Seminar	Rakornaswin BPKP *Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi*	Virtual, 14 Juni 2023 Virtual, July 14, 2023	BPKP
	Webinar	We TALK 101 Cerita AKHLAK dengan tema "HARMONIS, Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan"	Virtual, 11 Juli 2023 Virtual, July 11, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	Masterclass Program 2023 Topik : Pemeringkatan & Penerbitan Efek bersifat Utang & Sukuk (EBUS)	Virtual, 22 Agustus 2023 Virtual, August 22, 2023	KBUMN & BEI
	Webinar	Webinar OJK - Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	Virtual, 22 Agustus 2023 Virtual, August 22, 2023	OJK

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Pelatihan Training	Masterclass Program 2023 Topik : Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	KBUMN & Pefindo
	Pelatihan Training	GRC Series with PwC	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	Masterclass Program 2023 Topik : ESG for Boards – Governance of ESG	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	KBUMN & IFC
	Seminar	Business Judgment Rule	Virtual, 05 Oktober 2023 Virtual, October 95, 2023	Arsya Yasa Indonesia
	Pelatihan Training	Masterclass Program 2023 Topik : CG Methodology and Environmental and Social Manajement Systems	Virtual, 19 Oktober 2023 Virtual, October 19, 2023	IFC & Ashrust LLP
	Pelatihan Training	Masterclass Program 2023 Topik : JV between SOE and Private Sector	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	Mind ID 2nd GRC Series : Internal Control leading Practice & Practical Implementation Tips bersama EY Indonesia	Virtual, 31 Oktober 2023 Virtual, October 31, 2023	MIND ID
	Webinar	Woman Leadership Series 3 "Happiness Drives Great Performance"	Virtual, 21 November 2023 Virtual, November 21, 2023	PTBA & Daya Dimensi Indonesia
	Pelatihan Training	GRC Series Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Webinar	Woman Leadership Parenting in the Digital Era	Virtual, 6 Desember 2023 Virtual, December 6, 2023	PTBA & Daya Dimensi Indonesia
Ir. Rafli Yandra, M.M., MBA. (Direktur Pengembangan Usaha) Business Development Director	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 : GRC Integrated Information For Supervisionary Board	Virtual, 5 Oktober 2023 Virtual, October 5, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 : ESG for Board's – Governance of ESG	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 : Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	KBUMN & Pefindo
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023 : CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 5, 2023	KBUMN
	Pelatihan Training	CBDO Innovation School: Creating Value and Innovation through M&As	Virtual, 16 Maret 2023 Virtual, March 16, 2023	KBUMN & Insead
	Pelatihan Training	CBDO Innovation School : Mastering Technology Acquisitions & Post-merger Integration	Virtual, 17 Maret 2023 Virtual, March 17, 2023	KBUMN & Insead
	Pelatihan Training	CBDO Innovation School : Strategy, Growth & Innovation in the Digital Age	Virtual, 9 Maret 2023 Virtual, March 9, 2023	KBUMN & Insead
	Pelatihan Training	CBDO Innovation School : Negotiating Effective Deal Structures	Virtual, 24 Maret 2023 Virtual, March 24, 2023	KBUMN & Insead
	Pelatihan Training	CBDO Innovation School : Mastering Joint Ventures	Virtual, 29 Maret 2023 Virtual, March 29, 2023	KBUMN & Insead
	Pelatihan	CBDO Innovation School : How to Build Innovative Products & Services	Virtual, 5 April 2023 Virtual, April 5, 2023	KBUMN & Insead
	Workshop	Leadership Alignment Workshop : Penyusunan Rencana Strategis Transformasi Budaya	Jakarta, 16 Oktober 2023 Virtual, October 16, 2023	PT Bukit Asam
	Workshop	MIND ID 1st GRC Series bersama PwC Indonesia	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	MIND ID
	Workshop	Mind ID 2nd GRC Series : Internal Control leading Practice & Practical Implementation Tips bersama EY Indonesia	Virtual, 31 Oktober 2023 Virtual, October 31, 2023	Mind ID
	Workshop	MIND ID 3rd GRC Series: Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID Dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners				
Nurul Almy F	Workshop	Managing For Development Result	Jakarta, 3 Oktober 2023 Jakarta, October 3, 2023	PLN Training Center
	Workshop	Result-Focused Project Design & Monitoring Framework	Jakarta, 9 Juni 2023 Jakarta, June 9, 2023	Mandiri University & Asian Development Bank
	Webinar	Idea Talks Vol 3 : Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function	Virtual, 9 Februari 2023 Virtual, February 9, 2023	OJK Institute
	Pelatihan Training	Short Course: "Seminar on Reform and Governance of State-Owned Enterprise in China"	Tiongkok, 31 Agustus – 20 September 2023 China, August 31-September 20, 2023	International Cooperation Center(ICC) of National Development and Reform Commission (NDRC) China
Wilma Darwin	Webinar	Driving Collaborative Leadership in Charging Time	Tanjung Enim, 12 Januari 2023 Tanjung Enim, January 12, 2023	PTBA
	Webinar	Webinar INSIGHT "Direksi Bercerita"	Virtual, 31 Januari 2023 Virtual, January 31, 2023	Kementerian BUMN
	Workshop	(1) Mining Industry Outlook & Top Risk 2023 (2) Overview Aspek Penerapapan Manajemen Risiko dalam Permen BUMN No. 2/MBU/03/2023 (3) Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 Virtual, March 30, 2023	Delloitte -MIND ID-PTBA
	Pelatihan Training	BSE GRC MasterClass-Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & anak Perusahaan BUMN	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	BUMN School of excellence
	Pelatihan Training	ESG for Boards – Governance of ESG	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	BUMN School of excellence
	Pelatihan Training	GRC Integrated Information for Supervisionary Board	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	BUMN School of excellence
	Pelatihan Training	CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Virtual, 25 Oktober 2023 Virtual, October 25, 2023	BUMN School of excellence
Komite Audit Audit Committee				
Dodi Masykur	Pelatihan Training	MIND ID 3 GRC Series : Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, December 18, 2023	PTBA
Fadhila Achmadi Rosyid	Pelatihan Training	MIND ID 3 GRC Series : Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, November 18, 2023	PTBA
Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Resources Development Committee				
Nora Sri	Pelatihan Training	Kegiatan MIND ID 3 GRC Series : Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko Dan Pengumuman Risk Management Award	Jakarta, 18 Desember 2023 Virtual, December 18, 2023	PTBA

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Integrated Risk Monitoring and Governance Committee				
Ganda Marihot Simangunsong	Pelatihan Training	Kegiatan MIND ID 3 GRC Series : Tren dan Integrasi Kewajiban ESG MIND ID dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bersama Deloitte Consulting Activity MIND ID 3 GRC Series: Trends and Integration. MIND ID and Deloitte Consulting collaborate to address ESG obligations in governance and risk management.	Virtual, 23 November 2023 Virtual, November 23, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Eksekutif Manajemen Risiko dan Pengumuman Risk Management Award Executive Risk Management Workshop and Announcement of Risk Management Awards	Jakarta, 18 Desember 2023 Virtual, December 18, 2023	PTBA
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Apollonius Andwie C	*Workshop*	Workshop Penyusunan RKAP Berbasis Risiko Tahun 2024 Risk-Based Annual Work Plan and Budget (WP&B) Development Workshop for the Year 2024	Virtual, 18 Juli 2023 Virtual, July 18, 2023	PTBA
	Workshop	LMS MIND ID Academy : *Coaching* dan *Mentoring* LMS MIND ID Academy: Coaching and Mentoring	Virtual, 30 November 2023 Virtual, November 30, 2023	MIND ID
Niko Chandra	*Workshop*	LMS MIND ID ACADEMY : *Coaching* dan *Mentoring* LMS MIND ID Academy: Coaching and Mentoring	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	MIND ID
	Workshop	MIND ID 1st GRC Series Bersama PwC Indonesia MIND ID 1st GRC Series with PwC Indonesia	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	MIND ID dan PwC Indonesia
	Workshop	LMS MIND ID ACADEMY : Manajemen Resiko Dasar LMS MIND ID Academy: Risk Management (Basic)	Virtual, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	MIND ID
	Workshop	LMS MIND ID ACADEMY : Manajemen Resiko Menengah LMS MIND ID: Risk Management (Intermediate)	Virtual, 14 September 2023 Tanjung Enim, May 25, 2023	MIND ID
Internal Audit/Satuan Pengawasan Internal (SPI) Internal Audit/Internal Monitoring Unit (SPI)				
Nugraha Nurtyasanta	Pelatihan Training	*Training* dan *Sharing Investasi* Training and Invesment Sharing	Tanjung Enim, 25 Mei 2023 Tanjung Enim, May 25, 2023	Bank BNI
	Pelatihan Training	*Coaching Supplement - Coaching Culture* (Sesi 1 Tanjung Enim) Coaching Supplement - Coaching Culture - Session 1 Tanjung Enim)	Tanjung Enim, 13-14 Juni 2023 Tanjung Enim, June 13-14, 2023	PT Dots Kreasi Integrita
	Seminar	Seminar Pengukuhan Auditor Internal Internal Auditor Certification Seminar	Yogyakarta, 5-6 Juli 2023 Yogyakarta, July 5-6, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	Pelatihan Training	*Coaching Supplement - Coaching Culture* (Sesi 2 Tanjung Enim) Coaching Supplement - Coaching Culture (Session 2 Tanjung Enim)	Virtual, 7 Juli 2023 Virtual, July 7, 2023	PT Dots Kreasi Integrita
	Sertifikasi Certification	Program Sertifikasi Certified Internal Auditor Executive (Ciae) Certified Internal Auditor Executive Certification Program (CIAE)	Virtual & Jakarta, 14 Juli 2023 – 3 Agustus 2023 Virtual & Jakarta, July 14-August 3, 2023	Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
	Sertifikasi Certification	Ujian Kompetensi Certified Internal Audit Executive (CIAE)	Bogor, 29-30 Agustus 2023 Bogor, August 29-30, 2023	PUSDIKLATWAS BPKP
	Training	Internal Audit Mind Id Group Mengenai "Audit Forensik dan Investigasi" Internal Audit Mind ID Group Regarding “Forensic Audit and Investigation	Lampung, 4-6 September 2023 Lampung, September 4-6, 2023	PTBA & Mind ID
	Webinar	MIND ID 1st GRC Series Bersama PwC Indonesia	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	Mind ID & PwC Indonesia
	Pelatihan Training	GRC Masterclass Program 2023	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	Kementerian BUMN RI & BLMI
	Pelatihan Training	Coaching Supplement (Coaching Culture)	Jakarta, 14 September 2023 Virtual, September 14, 2023	PT Dots Kreasi Integrita
	Pelatihan Training	Pelatihan Environment, Social, and Governance (ESG) Environment, Social, and Governance (ESG) Training	Virtual, 23-24 Oktober 2023 Virtual, October 23-24, 2023	PT Surveyor Indonesia
	Workshop	Seminar "Competence Internal auditor Learning Experience" Seminar on ‘Competence Internal Auditor Learning Experience’	Jawa Tengah, 9-10 November 2023 Central Java, November 9-10, 2023	PPAK & Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal (LSPAI)

Nama dan Jabatan Name and title	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Muhamad Bagir	Pelatihan Training	Exclusive Training Legal for Non Legal	Bandung, 16-17 Maret 2023 Bandung, March 16-17, 2023	INTRINSICS
	Webinar	Webinar Money Laundering : Kenali, Cegah, dan Berantas Webinar Money Laundering: Recognize, Prevent, and Eradicate	Virtual, 28 Maret 2023 Virtual, March 28, 2023	Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI)
Manajemen Risiko Risk Management				
Effi Fidnilah	Webinar	Women Leader Webinar Series : A Journey dan Career Woman	Virtual, 24 Januari 2023 Virtual, January 24, 2023	PTBA & DDI
	Workshop	Project Risk Management	Jakarta, 17 Maret 2023 Jakarta, March 17, 2023	IKON
	Webinar	Woman Leader Webinar Series Women Can Have It All	Virtual, 19 Mei 2023 Virtual, May 19, 2023	PTBA & PT Daya Dimensi Indonesia
	Training	Training dan Sharing Investasi Investment Training and Sharing	Tanjung Enim, 25 Mei 2023 Tanjung Enim, May 25, 2023	Bank BNI
	Workshop	Workshop Penyusunan Rkap Berbasis Risiko Tahun 2024 Workshop on Risk-Based Annual Plan (WP&B) Development for the Year 2024	Virtual, 18 Juli 2023 Virtual, July 18, 2023	PTBA
	Pelatihan	Pelatihan Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko Proyek Group Mind ID Training on Project Risk Management Governance Guidelines Group Mind ID	Jakarta, 1 Agustus 2023 Jakarta, August 1, 2023	MIND ID
	Workshop	Workshop Dana Pensiun Grup Mind Id : Highligt & Investment Strategy Workshop Pension Fund Group Dana Mind ID: Highlights & Investment Strategy	Jakarta, 4 Agustus 2023 Jakarta, August 4, 2023	MIND ID
	Workshop	Undangan Upskilling dan FGD Tata Kelola Manajemen Risiko Proyek Invitation to Upskilling and FGD on Project Risk Management Governance	Jakarta, 15 Agustus 2023 Jakarta, August 15, 2023	MIND ID
	Pelatihan Training	Pelatihan Professional Directorship Program Professional Directorship Training Program	Jakarta, 21-24 Agustus 2023 Jakarta, August 21-24, 2023	Indonesian Institute For Corporate Directionship (IICD)
	Webinar	MIND ID 1st GRC Series Bersama PwC Indonesia MIND ID 1st GRC Series Together with PwC Indonesia	Virtual, 22 September 2023 Virtual, September 22, 2023	MIND ID dan PwC Indonesia
	Pelatihan Training	Pelatihan GRC Masterclass Program 2023 GRC Masterclass Program Training 2023	Virtual, 27 September 2023 Virtual, September 27, 2023	Kementrian BUMN RI & BLMI
	Pelatihan Training	Pelatihan Global GRC Benchmarking Series 6-2023 Benchmarking and International Workshop Program Global GRC Benchmarking Series 6-2023 Training Benchmarking and International Workshop Program	New Zealand, 21-28 Oktober 2023 New Zealand, October 21-28, 2023	Centrois dan Indonesian Governance Risk Complience (IGRC)

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2023
Achievements in 2023

Tanggal Date	Penghargaan Awards	Pencapaian Achievements	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
Kamis 19 Januari 2023 Thursday, January 19, 2023	Kanwil DJP Sumsel Babel South Sumatra Babel DJP (Directorate General of Taxation) Regional Office	Telah Berkontribusi Atas Penerimaan Pajak 2022 Contributed to 2022 Tax Revenue	Kanwil DJP Sumsel Babel South Sumatra Babel DJP Regional Office	Palembang
Selasa 14 Februari 2023 Tuesday, February 14, 2023	Tax Gathering KPP Wajib Pajak Besar III Tax Gathering for KPP (Tax Office) Large Taxpayer	Wajib Pajak dengan Pertumbuhan Pembayaran Pajak Tertinggi Taxpayer with the highest tax paying growth	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Large Taxpayer DJP regional office	Jakarta
		Wajib Pajak dengan Kontributor Penerimaan Terbesar Tahun 2022 Taxpayer with the highest revenue contribution in 2022		
Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28, 2023	Indonesia Best CFO Awards 2023	Best Performance Chief Financial Officer 2023 in Implementing Sustainable Efficiency	Warta Ekonomi	Virtual
Rabu, 15 Maret 2023 Wednesday, March 15, 2023	Anugerah BUMN SOEs Awards	CEO Perusahaan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Tbk CEO dengan Strategic Orientation Terbaik - Arsal Ismail SOEs CEO with the best Strategic Orientation – Arsal Ismail	BUMN Track & PPM Manajemen SOEs Track and PPM Managament	Jakarta
		Perusahaan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Tbk kategori Terbaik I Tranformasi Digital 2nd Runner Up SOEs Company with the best Digital Transformation		
		Perusahaan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Tbk kategori Terbaik II Tata Kelola Perusahaan 3rd Runner Up SOEs Company with the best Corporate Governance		

Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2023
Achievements in 2023

Tanggal Date	Penghargaan Awards	Pencapaian Achievements	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
Kamis, 30 Maret 2023 Thursday, March 30, 2023	Indonesia Digital Innovation Awards 2023	The Most Innovative Energy and Mining Company fot the Efficient and Integrated Digital Operational System	Warta Ekonomi	Jakarta
Kamis, 6 April 2023 Thursday, April 6, 2023	Indonesia Best 50 CEO Awards 2023	Indonesia Best CEO 2023 in Mining Category	The Iconomics	Jakarta
Rabu, 12 April 2023 Wednesday, April 12, 2023	PARITRANA AWARD 2023	Badan Usaha Skala Besar Terbaik Sektor Manufaktur, Pertambangan dan Migas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Best Large-Scale Business Entity in the Manufacturing, Mining and Oil and Gas Sector at South Sumatra Province.	Pemerintah Provinsi Sumsel & BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) South Sumatra Provincial Government and state-own insurer (BPJS) Employment	Palembang
Rabu, 7 Juni 2023 Wednesday, June 7, 2023	TOP CSR Award	TOP CSR Award #Star5	Top Business	Jakarta
		TOP CSR Golden Trophy 2023		
		TOP Leader on CSR Commitment 2023 - Arsal Ismail		
Jumat, 9 Juni 2023 Friday, June 9, 2023	Malam Apresiasi Emiten Issuer Appreciation Night	Main Index, High Dividend, High Growth, and High Market Capitalization	Tempo - Idnfinancials	Jakarta
Selasa, 27 Juni 2023 Tuesday, June 27, 2023	Penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023 2023 Corporate Emission Transparency Award	Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Kategori Green Elite Transparency in Reducing Corporate Emissions in the Green Elite Category	B Universe & Bumi Global Karbon Foundation (BGK Foundation)	Virtual
		Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori Platinum Plus Transparency in Calculation of Corporate Emissions in the Platinum Plus Category		
Kamis, 27 Juli 2023 Thursday, July 27, 2023	Indonesia Most Powerful Women Awards 2023	Leadership Beyond Gender	HerStory	Virtual
Kamis, 10 Agustus 2023 Thursday, August 10, 2023	TJSL & CSR Award 2023	Peringkat Bintang 5 (Platinum) Pilar Sosial 5 Star Rating (Platinum) for Social Pillar	BUMN Track & PPM Manajemen SOEs Track and PPM Management	Jakarta
		Peringkat Bintang 5 (Platinum) Pilar Ekonomi, 5 Star Rating (Platinum) for Economy Pillar		
		Peringkat Bintang 5 (Platinum) Pilar Lingkungan 5 Star Rating (Platinum) for Environment Pillar		
		Peringkat Bintang 5 (Platinum) Pilar Hukum & Tata Kelola 5 Star Rating (Platinum) for Legal and Governance Pillar		
Jumat, 25 Agustus 2023 Friday, August 25, 2023	ASEAN Coal Award	Runner-up ASEAN Coal Award dalam ajang ASEAN Energy Award bidang Coal Handling and Distribution Runner-up at the ASEAN Coal Award in the ASEAN Energy Award in the field of Coal Handling and Distribution	Kementerian ESDM ESDM Ministry	Bali
Rabu, 30 Agustus 2023 Wednesday, August 30, 2023	GRC & Exellence Award 2023	The Greatest Champions of GRC Exellence Performance 2023		Bidakara - Jakarta
		The Best GRC for IT/Digital Transformation		
		The Best CEO for GRC Exellence 2023 for PTBA President Director Arsal Ismail		
		The Best GRC Women Leader 2023 for PTBA Finance and Risk Management Director Farida Thamrin		
Senin, 18 September 2023 Monday, September 18, 2023	The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award	Best State-Owned Enterprises 2023	IICD	Financial Hall - Jakarta
		Top 50 Big Capitalization Public Listed Company.		

Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2023
Achievements in 2023

Tanggal Date	Penghargaan Awards	Pencapaian Achievements	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
Jumat, 29 September 2023 Friday, September 29, 2023	Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice/ GMP*) Award for Implementing Good Mining Engineering Principles (Good Mining Practice/GMP)	Penghargaan Aditama kategori Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara – UPTE	Kementerian ESDM ESDM Ministry	Bidakara - Jakarta
		Penghargaan Utama kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara – UPTE Award in the Mineral and Coal Mining Environmental Management category – UPTE		
		Penghargaan Utama kategori Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara – UPTE Award in the Mineral and Coal Conservation Management category – UPTE		
		Penghargaan Utama kategori Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara – UPTE Award in the category of Management of Standardization and Mineral and Coal Mining Services Business – UPTE		
		Penghargaan Pratama kategori Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara untuk PTBA Unit Pelabuhan Tarahan. Award in the Mineral and Coal Mining Environmental Management category for PTBA Tarahan Port Unit.		
Jumat, 29 September 2023 Friday, September 29, 2023	SUBROTO AWARD 2023	Penghargaan Subroto 2023 Bidang Inovasi Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan/Persemaian (*Nursery*) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kategori Kelompok Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 2023 Subroto Award for Innovation in the Provision, Development and Management of Nursery Facilities in Mineral and Coal Mining Business Activities, Mining Business Permit (IUP) and Special Mining Business Permit (IUPK) Group Category.	Kementerian ESDM ESDM Ministry	Jakarta
		Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Batubara Terinovatif, Kategori PKP2B/IUPK/IUP BUMN. Award in the Innovative Coal Community Development and Empowerment (PPM) Sector, SOEs PKP2B/IUPK/IUP Category.		
Senin, 2 Oktober 2023 Monday, October 2, 2023	Penghargaan Dharma Karya ESDM 2023. 2023 Dharma Karya ESDM Awards	Pemanfaatan limbah abu hasil pembakaran batu bara (*Fly Ash* dan *Bottom Ash/FABA*) menjadi bahan campuran pembuatan beton *High Volume Fly Ash* (HVFA). Utilization of waste ash from burning coal (Fly Ash and Bottom Ash/FABA) into a mixture for making High Volume Fly Ash (HVFA) concrete.	Kementerian ESDM ESDM Ministry	Jakarta
		Penerapan SAME-BA (Sistem Automasi dan Digitalisasi Penambangan-Bukit Asam), yang merupakan aplikasi Automasi dan Digitalisasi pada kegiatan Penambangan di PTBA Implementation of SAME-BA (Mining Automation and Digitalization System-Bukit Asam), as an application of Automation and Digitalization in Mining activities at PTBA		
		Efektivitas dan efisiensi energi dengan melakukan digitalisasi *Monitoring Power* Distribusi untuk kebutuhan power listrik unit *Shovel Electric* Energy effectiveness and efficiency by digitizing Power Distribution Monitoring for the electric power needs of Electric Shovel units.		
26 Oktober 2023 October 26, 2023	Anugerah CSR 2023 Republika 2023 Republika CSR Award	Berdayakan Ribuan Lansia, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan kategori Sosial Empowering Thousands of Elderly, Bukit Asam (PTBA) Wins Award in Social Category	Republika	Jakarta
6 November 2023 November 6, 2023	Asia Sustainability Reporting Rating 2023	Platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023 Platinum Award at the 2023 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event	National Center for Corporate Reporting (NCCR).	Jakarta

Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2023
Achievements in 2023

Tanggal Date	Penghargaan Awards	Pencapaian Achievements	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
8 November 2023 November 8, 2023	Indonesia Digital Innovation & Achievement (IDIA) Awards 2023	Best Overall Digital Innovation & Achievement 2023	Majalah Business in Asia Business in Asia Magazine	Jakarta
		Best Digital Technology & IoT Implementation 2023 in Mining Industry		
		Best CEO Indonesia Digital Innovation & Achievement of The Year 2023		
		Best Senior Executive Indonesia Digital Innovation & Achievement of the Year 2023.		
14 November 2023 November 14, 2023		Bukit Asam (PTBA) Sukses Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Bukit Asam Successfully Maintains ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification	TUV NORD	Jakarta
27 November 2023 November 27, 2023	Annual Report Award (ARA) 2022	Juara 2 kategori Go Publik Non Keuangan Runner up in the Go Public Non-Financial category	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia. Financial Services Authority (OJK), Coordinating Ministry for Economic Affairs, SOEs Ministry, Directorate General of Taxes (DJP) Ministry of Finance, Indonesian Stock Exchange (BEI), National Committee for Governance Policy, and the Indonesian Accountants Association.	Jakarta
1 Desember 2023 December 1, 2023	CEO Award 2023	The Best CEO in Beyond Coal	Tempo dan IDNFinancials Tempo and IDNFinancials	Bali
2 Desember 2023 December 2, 2023	Serelo CSR Award	Trofi Gold dan dinobatkan sebagai Perusahaan Terbaik Gold Trophy and Best Company	Pemerintah Kabupaten Lahat Lahat District Government	Pagar Alam
4 Desember 2023 December 4, 2023	Top Digital Awards 2023	Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 5	IT Works	Jakarta
		Golden Star Trophy	IT Works	Jakarta
		Top Leader on Digital Implementation 2023 untuk Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail. Top Leader on 2023 Digital Implementation for PT Bukit Asam President Director Arsal Ismail	IT Works	Jakarta
5 Desember 2023 December 5, 2023	Indonesia CSR Awards (ICA) 2023	Platinum untuk program irigasi pertanian berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Platinum for agricultural irrigation program based on Solar Power Plants (PLTS)	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Jakarta
5 Desember 2023 December 5, 2023	Indonesia CSR Awards (ICA) 2023	Gold untuk Eco Agrotomation Gold Trophy for Eco Agrotomation	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Jakarta
5 Desember 2023 December 5, 2023	Indonesia CSR Awards (ICA) 2023	Silver untuk Sentra Industri Bukit Asam (SIBA) Bokashi. Silver Award for Bukit Asam Industrial Center Bokashi	Corporate Forum for CSR Development (CFCD)	Jakarta
8 Desember 2023 December 8, 2023	Tamasya Award 2023	Penghargaan Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/Tambang Menyejahterakan Masyarakat (Tamasya) Award 2023 kategori Batubara Skala Besar 2023 Community Development and Empowerment Performance Award (PPM)/Mining Prospering the Community (Tamasya) Award for Large Scale Coal category	Kementerian ESDM ESDM Ministry	Jakarta

Penghargaan yang Diperoleh Perusahaan di Tahun 2023
Achievements in 2023

Tanggal Date	Penghargaan Awards	Pencapaian Achievements	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
Rabu, 20 Desember 2023 Wednesday, December 20, 2023	PROPER	Emas - Pelabuhan Tarahan Gold – Tarahan Port	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Environment and Forestry Ministry	Jakarta
Rabu, 20 Desember 2023 Wednesday, December 20, 2023	PROPER	Emas – UPTE Gold – UPTE	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Environment and Forestry Ministry	Jakarta
Rabu, 20 Desember 2023 Wednesday, December 20, 2023	PROPER	Hijau - Dermaga Kertapati Green – Kertapati Barging Port	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Environment and Forestry Ministry	Jakarta



Sertifikasi yang Masih Berlaku Hingga Tahun 2023
2023 Valid Certification

Nama Sistem/ Sertifikat Name of System/ Certification	Lingkup Sertifikasi Certification Coverage	Nomor Sertifikat Certificate Number	Masa Berlaku Validity		Badan Sertifikasi/ Akreditasi Certification/ Accreditation Body	Keterangan Description
			Sejak Start	Sampai End		
ISO 9001:2015	PTBA	2018-2-2463	24/03/2021	5/03/2024	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat ke-8 8th Certificate
ISO 14001:2015	PTBA	2018-0736	8/03/2021	4/03/2024		Sertifikat ke-6 6th certificate
ISO 45001:2018	PTBA	TUV 106 15 3893	28/02/2021	27/02/2024		Sertifikat ke-2 2nd certificate

Sertifikasi yang Masih Berlaku Hingga Tahun 2023
2023 Valid Certification

Nama Sistem/ Sertifikat Name of System/ Certification	Lingkup Sertifikasi Certification Coverage	Nomor Sertifikat Certificate Number	Masa Berlaku Validity		Badan Sertifikasi/ Akreditasi Certification/ Accreditation Body	Keterangan Description
			Sejak Start	Sampai End		
SNI ISO/IEC 17025:2017	Lab. Penguji UPTE UPTE testing Lab	LP-073-IDN	22/03/2021	21/03/2026	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	Akreditasi ke-4 4th Accreditation
	Lab. Kalibrasi UPTE UPTE Calibration Lab	LK-068-IDN	22/03/2021	21/03/2026		Akreditasi ke-3 3rd Accreditation
	Lab. Mekanika Tanah UPTE UPTE Soil Mechanism Lab	LP-075-IDN	28/08/2022	28/08/2027		Akreditasi ke-5 5th Accreditation
	Lab. Penguji Peltar Peltar testing lab	LP-070-IDN	20-03-2022	20-03-2027		Akreditasi ke-5 5th Accreditation
	Lab. Penguji Derti Derti Testing lab	LP-093-IDN	04-10-2019	03-10-2024		Akreditasi ke-5 5th Accreditation
SNI ISO/IEC 17043:2010	Lab Penguji UPTE UPTE Testing lab	PUP-025-IDN	16/12/2020	15/12/2025	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee	Akreditasi ke-1 1st Accreditation
SMK3	Korporat dan UPTE UPTE and Corporate	REG.SMK3.2022.BKI.SK-350	13/05/2022	14/05/2025	Kementerian Ketenaga kerjaan Manpower Ministry	Sertifikat ke-4 4th Certificate
PP No. 50/2012	Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	REG.SMK3.2022.BKI.SK-351				Sertifikat ke-4 4th Certificate
	Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	REG.SMK3.2022.BKI.SK-349				Sertifikat ke-4 4th Certificate
ISPS Code	Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port	02-0513-DV	1/09/2020	23/08/2025	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation	Sertifikat ke-4 4th Certificate
	Pelabuhan Tarahan Tarahan Port	02-0509-DN	30/04/2020	5/05/2025		Sertifikat ke-4 4th Certificate
	Pelabuhan Teluk Bayur Teluk Bayur Port	002-0211-DN	18/09/2020	2/06/2025		Sertifikat ke-4 4th Certificate
SMP Perkap 24/2007	Korporat dan UPTE Corporate and UPTE	00097/SP-00139/2015	20/01/2016	19/01/2019	KAPOLRI National Police Chief	Sertifkat Ke-1 1st Certificate
(terdapat moratorium dari POLRI berkaitan dengan perubahan peraturan Perpol 07 Tahun 2019) (there is a moratorium from the National Police related to changes to the regulations of Perpol 07 Year 2019)						
ISO 37001:2016	PTBA	03 13 F 23000408	20/06/2023	19/06/2026	PT. TUV NORD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
ISO 22301:2019	PTBA	BCMS 767223	3/08/2022	2/08/2025	PT BSI Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
ISO/IEC 27001:2013	CISEA APLIKASI dan DATA CENTER Tanjung Enim dan Kantor Jakarta CISEA Application and Data Center for Tanjung Enim and Jakarta Office	2023-4-0035	11/02/2023	25/10/2025	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate
ISO 50001:2018	Operasi Penambangan PTBA PTBA Mining Operation	2025-5-0008	24/01/2024	07/01/2027	PT TÜV SÜD Indonesia	Sertifikat Ke-1 1st Certificate





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

04



PTBA telah menerapkan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi disepanjang tahun 2023. Perusahaan fokus untuk menyiapkan masa depan melalui penyediaan energi bersih.

PTBA has implemented the right strategy to face various challenges faced throughout 2023. The Company is focused on preparing for the future through providing clean energy.

Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic and Industrial Overview



Analisis Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi global kembali melambat di tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan ketidakpastian yang meningkat dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. Tatkala sebagian besar negara di dunia masih fokus dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 melalui kebijakan moneter dan fiskal, ekonomi global kembali dihadapkan dengan tantangan gejolak politik dan konflik geopolitik, termasuk konflik dan dinamika antar negara besar.

Selain itu, inflasi yang tinggi di banyak negara telah memaksa perubahan dalam kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) dipertahankan berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan *yield* obligasi tenor jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut memicu aliran keluar modal asing dari *Emerging Markets* ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.

Analysis of Global and National Economic Conditions

The global economic growth was slowing down in 2023. This was caused by an increasing uncertainty and widening growth gap between countries. While most countries were still focused on efforts to recover the economy from the impact of the Covid-19 pandemic through monetary and fiscal policies, the global economy was faced with challenges with political turmoil and geopolitical conflicts, including conflicts and dynamics between large countries.

In addition, high inflation in many countries has forced changes in monetary policy, such as raising interest rates, including maintaining the Federal Funds Rate (FFR) at a high level for a longer period of time (higher for longer). The increase in global interest rates is expected to be followed by an increase in the yield on long-term tenor bonds in developed countries, especially United States (US) government bonds due to increased government financing needs and long-term risk premiums (term-premia). This development triggered an outflow of foreign capital from Emerging Markets to developed countries and encouraged a significant strengthening of the US dollar against various world currencies.

Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan ekonomi dan ketidakpastian politik, menambah kompleksitas skenario ekonomi yang ada. Dinamika perdagangan internasional juga mengalami pergeseran, dengan ketegangan perdagangan dan revisi perjanjian perdagangan mempengaruhi arus ekonomi global.

On the other hand, the uncertainty of global financial market, which is influenced by various factors including changes in economic policies and political uncertainty, adds complexity to the existing economic scenario. The dynamics of international trade are also shifting, with trade tensions and revisions to trade agreements affecting global economic flows.

Dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Januari 2024 Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) mengestimasikan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3,1% dan diproyeksikan akan tumbuh *flat* sebesar 3,1% pada 2024. Estimasi tersebut meningkat dibandingkan proyeksi yang diterbitkan pada Oktober 2023 yang sebesar 3,0%, seiring membaiknya kondisi perekonomian dunia di akhir tahun 2023. Ekonomi AS pada 2023 masih tumbuh cukup kuat terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa, sedangkan Tiongkok mengalami perlambatan yang dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti.

Based on the World Economic Outlook report on January 2024, the International Monetary Fund (IMF) estimate global economic growth in 2023 amounted to 3.1% and projected will grow flat at 3.1% in 2024. This estimation is an increase compared to projection published in October 2023 of 3.0%, in line with improving world economic conditions at the end of 2023. The US economy in 2023 grew quite strongly, mainly supported by household consumption and the service sector, while China was experiencing a slowdown influenced by weakening consumption and crisis in the property sector.

Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh cukup kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 5,05% dan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,31%.

Amid the global economic conditions which are experiencing a slowdown Indonesia's economy can still grow quite strongly. Based on data from the Statistics Indonesia, Indonesia's economic growth in 2023 was recorded at 5.05% and experienced a slight decline than the previous year's 5.31%.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,82%, seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi.

The strong economic growth was supported by solid domestic demand. Household consumption grew by 4.82%, in line with the continued increase in mobility, stable people's purchasing power, and consumer confidence which remains high.

Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional 2023 tercatat sebesar 2,61%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,51%. Serta didukung oleh kebijakan BI yang menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) menjadi 6,00% dari posisi akhir tahun lalu sebesar 5,50%, untuk memastikan inflasi inti tetap terjaga.

This is due to the successful attempt made by the government and Bank Indonesia (BI) in maintaining the inflation rate at a low level. Based on BPS data, national inflation in 2023 was recorded at 2.61%, much lower than the previous year's 5.51%. And supported by BI's policy of increasing the benchmark interest rate or BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) to 6.0% from the position at the end of last year of 5.5%, to ensure core inflation is maintained.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh kinerja ekspor yang cukup baik kendati lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD258,82 miliar, sedikit di bawah capaian ekspor tahun 2022 sebesar USD291,90 miliar. Perlambatan nilai ekspor tersebut sejalan dengan moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Selain itu, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia juga memberikan andil terhadap perlambatan nilai ekspor Indonesia.

Indonesia's economic growth was also supported by export performance which was quite good, although lower than the previous year. Indonesia's export value in 2023 was recorded at USD258.82 billion, slightly below the 2022 export achievement of USD291.90 billion. The slowdown in export value is in line with the moderation in prices of Indonesia's leading commodities, such as palm oil and coal. Apart from that, the economic slowdown in a number of Indonesia's main trading partner countries also contributed to the slowdown in the value of Indonesia's exports.

Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD36,93 miliar selama tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global.

Terlepas dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun 2023, Indonesia harus tetap hati-hati menghadapi kondisi tahun 2024. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di level 5,0% di 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari IMF diambil berdasarkan asumsi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Namun demikian, ekonomi Indonesia akan dibayang-bayangi sejumlah permasalahan di tingkat global, seperti konflik geopolitik dan tekanan harga komoditas.

Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi dan pemilihan pemimpin nasional. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap arah perekonomian nasional, baik di 2024 maupun ke depan.

Indonesia's trade balance recorded a surplus of USD36.93 billion during 2023. This achievement shows that Indonesia's trade performance is maintained amidst the global economic slowdown.

Despite achieving fairly good economic growth in 2023, Indonesia must remain careful in facing conditions in 2024. The IMF projects that the Indonesian economy will grow stably at the level of 5.0% in 2024. The IMF's projection of Indonesia's economic growth is based on Indonesia's fiscal and monetary policy assumptions. . However, the Indonesian economy will be overshadowed by a number of problems at the global level, such as geopolitical conflicts and pressure on commodity prices.

Moreover, in 2024, Indonesia will also organize a democracy party and elect a national leader. This will also have an influence on the direction of the national economy, both in 2024 and beyond.

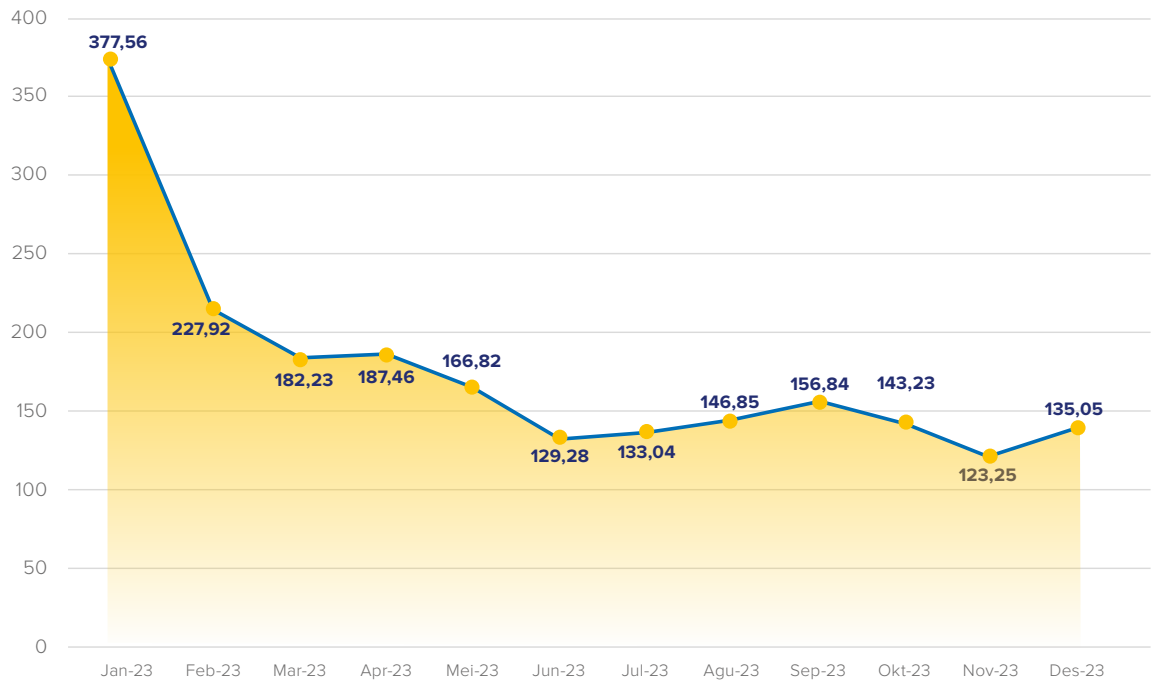
Analisis Industri Batu Bara

Pada tahun 2023, kondisi pasar batu bara dunia dan nasional mengalami beberapa dinamika penting. Pertama, terjadi penurunan tajam dalam indeks harga batu bara dunia, khususnya ICE Newcastle, dibandingkan dengan tahun 2022. Fenomena ini juga terlihat pada indeks harga batu bara yang digunakan di Indonesia, seperti HBA (Harga Batu bara Acuan) dan ICI (Indonesia Coal Index), yang mengikuti tren pelemahan yang sama. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan energi global, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dan kemungkinan perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi permintaan batu bara.

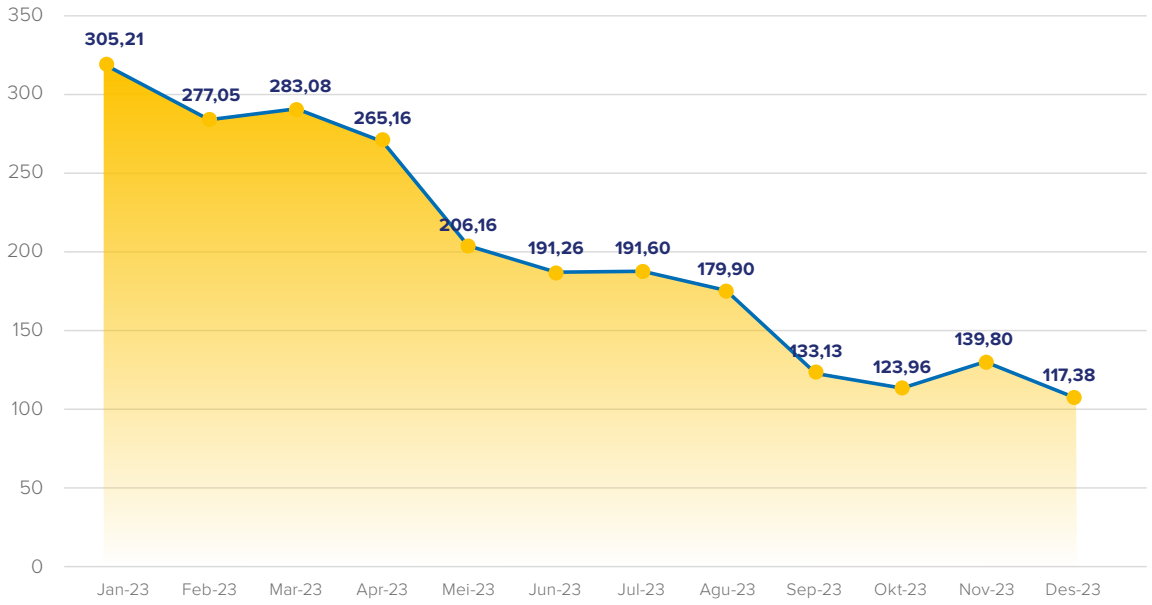
Coal Industry Analysis

In 2023, world and national coal market condition experienced several important dynamics. First, a sharp decline in the world coal price index, especially ICE Newcastle, compared to the previous year. This phenomenon can also be seen in the coal price indices used in Indonesia, such as the HBA (Reference Coal Price) and ICI (Indonesia Coal Index), which following the same weakening trend. This decline can be linked to various factors, including changes in global energy policy, increased utilization of renewable energy, and a possible global economic slowdown affecting coal demand.

ICE Newcastle Tahun 2023
ICE Newcastle in 2023

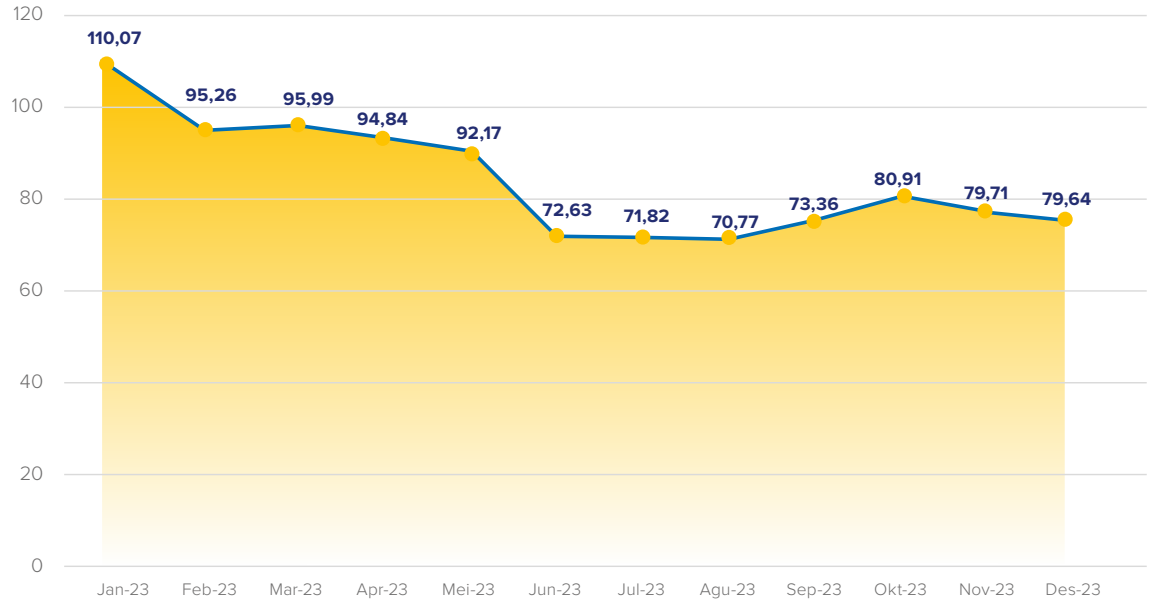


Indeks Harga Batu Bara Acuan Tahun 2023
Coal Price Index Reference in 2023



Sumber: Kementerian ESDM | Source: Ministry of Energy and Mineral Resources

ICI-3 (5000 GAR) Tahun 2023
ICI-3 (5000 GAR) in 2023



Sumber | Source: Argus Media

Di sisi lain, secara *supply-demand*, Indonesia tetap menjadi negara eksportir batu bara nomor satu di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan harga, posisi Indonesia dalam pasar batu bara global tetap kuat.

Selanjutnya, pertumbuhan produksi batu bara di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menandakan bahwa sektor batu bara Indonesia masih memiliki kapasitas produksi yang besar dan mampu memenuhi permintaan, baik domestik maupun internasional. Secara keseluruhan, walaupun terjadi penurunan harga di pasar global, kekuatan Indonesia sebagai eksportir utama dan peningkatan produksi menjadi faktor penting yang membentuk kondisi pasar batu bara di tahun 2023.

On the other hand, from a supply-demand perspective, Indonesia remains the number one coal exporter in the world. This shows that despite the decline in prices, Indonesia's position in the global coal market remains strong.

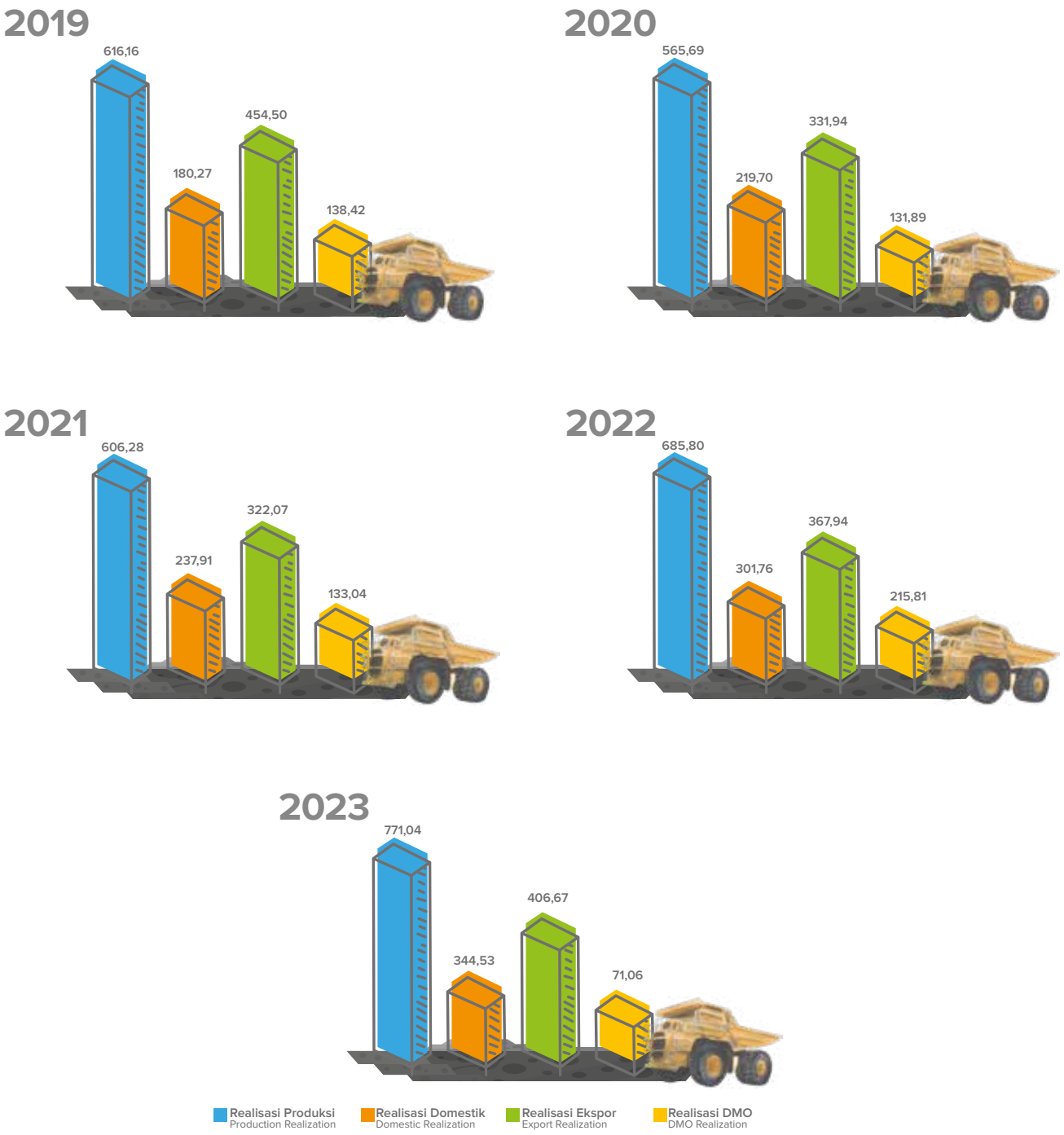
Furthermore, coal production growth in Indonesia shows an upward trend compared to 2022. This increase indicates that the Indonesian coal sector still has a large production capacity and is able to meet demand, both domestic and international. Overall, despite the decline in prices on the global market, Indonesia's strength as a major exporter and increased production are important factors shaping coal market conditions in 2023.

Realisasi produksi batubara Indonesia di tahun 2023 melampaui target. Berdasarkan catatan dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional di tahun 2023, terealisasi sebesar 771,04 juta ton, atau mencapai 111,01% terhadap target sebesar 694,50 juta ton.

Based on records from the Ministry of Energy and Mineral Resources' Minerba One Data Indonesia (MODI), the realization of Indonesian coal production in 2023 exceeds the target. The national coal production in 2023 was realized at 771,04 million tonnes, or reaching 111.01% of the target of 694.50 million tonnes.

Realisasi Produksi Batu Bara Nasional Sepanjang Tahun 2023
Realization of National Coal Production in 2023

Rp Juta
Rp Million



Dengan total produksi batu bara sebesar 771,04 juta ton, merupakan rekor baru dalam produksi batu bara nasional yang sebelumnya dicapai pada tahun 2022 dengan produksi batu bara mencapai 685,80 juta ton. Adapun dari total produksi tahun 2023 tersebut, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan batu bara pasar domestik sebesar 344,53 juta ton, pasar ekspor sebesar 406,67 juta ton, dan selebihnya sebesar 71,06 juta ditujukan untuk DMO.

Namun demikian, di tahun 2023, industri batu bara menghadapi tantangan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM sejak bulan September 2022. Dalam PP tersebut diatur tarif baru royalti batu bara hingga 13,5% dari tarif yang semula hanya 7% dari harga (untuk Harga Batu Bara Acuan/HBA sama dengan atau lebih besar US$ 90 per ton). Hal ini memberikan dampak terhadap kenaikan biaya royalti di industri batu bara.

With total coal production of 771,04 million tons, this set a new record in national coal production which were previously reaching 685.80 million tons in 2022. The total production in 2023, is expected to meet the domestic market's coal needs of 344.53 million tons, the export market is 406.67 million tons, and the remaining 71.06 million is intended for DMO.

However, in 2023, the coal industry faced challenges with the existence of Government Regulation (PP) Number 26 of 2022 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue (PNBP) which has been in effect since September 2022. In this PP, the new coal royalty tariff is regulated at up to 13.5% from the original price of only 7% of the price (for reference, HBA equal to or greater than US$ 90 per ton). This brought an impact on increasing the royalty fees in the coal industry.



Kebijakan Strategis Perusahaan
Corporate Strategic Policy



Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, PTBA menyadari semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh industri batubara ke depannya. Transisi energi telah mereduksi prospek penggunaan batu bara dalam jangka panjang namun di saat yang sama membuka kesempatan pengembangan bisnis baru bagi Perusahaan seperti bisnis energi baru dan terbarukan serta bisnis hijau lainnya.

Isu-isu keberlanjutan menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam strategi bisnis Perusahaan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang serta peningkatan nilai tambah bagi pemangku kepentingan di masa depan.

Perusahaan saat ini berfokus pada upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta berusaha meningkatkan kapabilitas untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.

Kebijakan strategis perusahaan yang selaras dengan visi perusahaan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya. Perusahaan saat ini telah memperbarui kerangka

Company Strategy and Strategic Policy

As one of the largest coal producers in Indonesia, PTBA is aware of the increasing challenges the coal industry faces in the future. The energy transition has reduced the prospects for using coal in the long term but, at the same time, has opened up new business development opportunities for the Company, such as new and renewable energy businesses and other green businesses.

Sustainability issues are an essential part that must be integrated into the Company's business strategy to ensure the long-term sustainability of the Company's business and increase added value for stakeholders in the future.

The Company is currently focusing on optimizing its existing resources and improving capabilities to support its business transformation and achieve the above goals.

The Company's strategic policies that are in line with the Company's vision are contained in the Company's long-term plan (RJPP), which is then revealed in the Company's work plan and budget (WP&B) each year. The Company has currently updated its business strategy framework, which

strategi bisnis yang terdiri dari 4 (empat) pilar bisnis yaitu: (1) Tambang, (2) Logistik, Infrastruktur dan Trading, (3) Energi, Utilitas dan Downstream, dan (4) Green Business.

Adapun di tahun 2023, beberapa aktivitas dalam kerangka 4 (empat) pilar tersebut antara lain:

1. **Pilar Tambang**
   Di bidang tambang, Perusahaan terus berupaya melakukan penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan melalui pemetaan atas potensi-potensi tambang yang ekonomis. Perusahaan juga berhasil meningkatkan produksinya ke angka tertinggi dalam sejarah Perusahaan. Perusahaan juga mendorong peningkatan produksi entitas anak perusahaan yaitu PT Internasional Prima Coal yang beroperasi di Kalimantan Timur. Secara operasional, Perusahaan juga terus melakukan optimasi penambangan yang ditunjukkan dengan keberhasilan menurunkan tingkat nisbah kupas menjadi 6,24 x (kali) dari target 6,31 x (kali). Selain itu, Perusahaan juga secara berkelanjutan aktif melakukan efisiensi biaya operasional dan upaya digitalisasi di end-to-end proses bisnis melalui melalui aplikasi CISEA.

2. **Pilar Logistik, Infrastruktur, dan *Trading***
   Peningkatan kapasitas angkutan batu bara merupakan salah satu prioritas utama bagi Perusahaan. Di tahun 2023, Perusahaan telah berhasil melakukan *groundbreaking Train Loading Station* (TLS) dan *Coal Handling Facility* (CHF) 6 dan 7 di Tanjung Enim pada tanggal 30 Desember 2023. *Groundbreaking* TLS ini merupakan satu kesatuan rangkaian pengembangan kapasitas angkutan batu bara melalui jalur kereta api relasi Tanjung Enim - Keramasan dengan potensi peningkatan kapasitas angkutan sebesar 20 juta ton per tahun. Proyek ini bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan akan beroperasi komersial pada tahun 2025.

consists of 4 (four) business pillars, namely: (1) Mining, (2) Logistics, Infrastructure, and Trading, (3) Energy, Utilities, and Downstream, and (4) Green Business.

As for 2023, several activities within the framework of the 4 (four) pillars include:

1. **Mining Pillar**
   In the mining sector, the company strives to safeguard existing reserves and control reserves by mapping economic mining potentials. The company also increased its production to the highest figure in its history. The company also encourages increased production of its subsidiary, namely PT Internasional Prima Coal, which operates in East Kalimantan. Operationally, the company also continues to optimize mining, as demonstrated by the success of reducing the stripping ratio to 6.24 x (times) from the target of 6.31 x (times). Apart from that, the company is also continuously active in carrying out operational cost efficiency and digitalization efforts in end-to-end business processes through the CISEA application.

2. **Logistics, Infrastructure, and Trading Pillar**
   Increasing coal transportation capacity is one of the main priorities for the Company. In 2023, the Company successfully carried out the groundbreaking of the Train Loading Station (TLS) and Coal Handling Facility (CHF) 6 and 7 in Tanjung Enim on December 30, 2023. This TLS groundbreaking was a part of a series of developing coal transportation capacity via the Tanjung Enim-Keramasan railway with the potential to increase transportation capacity by 20 million tons per year. This project is in collaboration with the state-owned railway company, PT KAI, which is expected to start commercial operations in 2025.



Groundbreaking Train Loading Station (TLS) dan Coal Handling Facility (CHF) 6 dan 7
Tanjung Enim, 30 Desember 2023

Groundbreaking of the Train Loading Station (TLS) and Coal Handling Facility (CHF) 6 and 7
Tanjung Enim, December 30, 2023

3. **Pilar Energi, Utilitas dan *Downstream***

Perusahaan terus berusaha melakukan diversifikasi portofolio bisnis di antaranya dengan menjajaki pengembangan bisnis energi, utilitas dan hilirisasi batubara. Di bisnis energi, perusahaan masih mengembangkan bisnis pembangkit berbasis batu bara dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan di saat yang sama agresif menjajaki pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan.

3. Energy, Utility and Downstream pillars

The company continues to try to diversify its business portfolio, including by exploring the development of energy, utilities, and coal downstream businesses. In the energy business, the company is still developing its coal-based generating business with more environmentally friendly technology and is aggressively exploring the development of new and renewable energy businesses.



Commercial Operation Date (COD) PLTU Sumsel-8 pada tanggal 7 Oktober 2023
Commercial Operation Date (COD) CFPP Sumsel-8 on October 7, 2023

Di tahun 2023, PLTU Sumsel-8 berkapasitas 2x620 MW di bawah entitas PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan joint venture company antara PTBA dengan China Huadian Hong Kong Co., Ltd. (CHDHK) telah berhasil mencapai tahapan Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 7 Oktober 2023. PLTU Sumsel-8 ini merupakan PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilengkapi dengan teknologi supercritical yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, PLTU Sumsel-8 juga menerapkan teknologi Flue Gas Desulfurization (FGD) untuk menekan emisi gas buang. Teknologi FGD ini selain dapat mengurangi sulfur dioksida dari emisi gas buang pembangkit listrik berbahan bakar batubara, juga memproduksi gipsum sebagai produk yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. PLTU Sumsel-8 diestimasikan akan memanfaatkan batu bara *low* CV dari PTBA sebesar 4 hingga 5 juta ton per tahun.

In 2023, CFPP Sumsel-8, with a capacity of 2x620 MW, will be under the entity PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), which is a joint venture company between PTBA and China Huadian Hong Kong Co., Ltd. (CHDHK) successfully reached the Commercial Operation Date (COD) stage on October 7, 2023. Sumsel-8 CFPP is the enormous mine mouth CFPP in Southeast Asia, and it is one of the National Strategic Projects, equipped with efficient and supercritical technology and environmentally friendly. Apart from that, Sumsel-8 CFPP also applies Flue Gas Desulfurization (FGD) technology to reduce exhaust gas emissions. Apart from reducing sulfur dioxide from exhaust emissions from coal-fired power plants, this FGD technology can also produce gypsum as a product that can be used as a construction material. It is estimated that Sumsel-8 CFPP will utilize low CV coal from PTBA, amounting to 4 to 5 million tons annually.

Perusahaan bersama entitas anak dan afiliasi perusahaan juga terus berupaya melakukan ekspansi bisnis di rantai nilai bisnis energi lainnya.

Perusahaan tetap melanjutkan program hilirisasi batubara sebagai bagian dari mandat strategis negara dengan tetap mengutamakan keekonomian dari setiap proyek. Perusahaan terus menjajaki kerja sama dengan pemilik teknologi maupun peneliti untuk mengembangka produk-produk turunan batubara yang potensial untuk dikomersialisasi dalam jangka panjang. Beberapa inisiatif yang dilakukan salah satunya adalah kerja sama Perusahaan dengan Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN). Pada tanggal 2 Oktober 2023, Perusahaan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan BRIN untuk melakukan riset dan pengembangan, kajian teknologi energi dan industri berbasis batu bara, serta energi baru dan terbarukan. Beberapa proyek yang saat ini ada dalam pipeline Perusahaan antara lain Coal to DME, Coalite to Artificial Graphite hingga Coal to MEG.

The company and its subsidiaries and affiliated companies continue to strive for business expansion in other energy business value chains.

The company continues its coal downstream program as part of the state's strategic mandate while prioritizing each project's economics. The company continues to explore collaboration with technology owners and researchers to develop coal derivative products that have the potential to be commercialized in the long term. One of the initiatives is the company's collaboration with the National Research & Innovation Agency (BRIN). On October 2, 2023, the company signed a Memorandum of Understanding with BRIN to conduct research and development, study energy technology and coal-based industry, and new and renewable energy. Several projects currently in the company's pipeline include Coal to DME, Coalite to Artificial Graphite, and Coal to MEG.

4. Pilar *Green Business*

Perusahaan juga berupaya memperluas portofolio ke bisnis hijau. Pilar bisnis ini merupakan pilar baru bagi Perusahaan yang diyakini akan semakin berkembang ke depannya. Di tahun 2023, Perusahaan telah melakukan *soft launching* reklamasi bentuk lain untuk pengembangan budidaya kaliandra merah di Tanjung Enim. Kaliandra merah tersebut akan diolah menjadi *wood pellet* yang akan digunakan sebagai bahan bakar campuran batu bara (*co-firing*) di PLTU. Perusahaan juga aktif untuk menjajaki proyek karbon yang tidak hanya dapat mendukung upaya dekarbonisasi Perusahaan ke depan namun juga dapat dikomersialisasi untuk memberikan nilai tambah di masa depan.

4. Green Business Pillar

The company is also working to expand its portfolio into green businesses. This business pillar is a new pillar for the company, and it is believed to continue to develop in the future. In 2023, the company carried out a soft launch of another form of reclamation to develop red calliandra cultivation in Tanjung Enim. The red calliandra will be processed into wood pellets and used as coal-mixed fuel (co-firing) at the CFPP. The company is also actively exploring carbon projects that can not only support the company's future decarbonization efforts but can also be commercialized to provide added value.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect



Strategi Pemasaran
Memasuki tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan penugasan kepada perusahaan batu bara, termasuk PTBA untuk memenuhi pasokan domestik ke PLTU dan juga industri semen dan pupuk. Menghadapi kebijakan ini, perusahaan mengupayakan agar penugasan untuk pasar domestik dapat terpenuhi, sekaligus melakukan optimasi penjualan untuk pasar ekspor. Untuk pasar ekspor tahun 2023, perusahaan melakukan penjualan ke pasar-pasar utama batu bara *seaborne* di Asia Timur dan Asia Selatan, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan India, sekaligus pasar Asia Tenggara yang mengalami peningkatan permintaan di tahun 2023, seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

Di tahun 2024, pemerintah kembali memberikan penugasan guna memenuhi pasokan domestik, khususnya untuk industri kelistrikan dan non-kelistrikan seperti semen dan pupuk. Perusahaan akan tetap melakukan optimasi penjualan domestik dan ekspor dalam rangka mencapai target penjualan serta pendapatan. Kemudian, perusahaan juga mengupayakan penjualan melalui jalur angkutan alternatif yang dapat membuka peluang peningkatan penjualan dan pendapatan.

Marketing Strategy
In 2023, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued a policy of assigning coal companies, including PTBA, to fulfill domestic supplies to the CFPP and also the cement and fertilizer industry. Facing this policy, the company strived to fulfill the task for the domestic market while optimizing sales for the export market. For the export market in 2023, the company exported coal to the main seaborne coal markets in East Asia and South Asia, such as China, South Korea, and India, as well as Southeast Asian markets which experienced increased demand in 2023, such as Vietnam, Thailand, and Cambodia.

In 2024, the government re-assist the Company to meet domestic supplies, especially for electrical and non-electrical industries such as cement and fertilizer. The company will continue to optimize domestic and export sales in order to achieve sales and revenue targets. Moreover, PTBA is also seeking sales through alternative transportation routes which can open up opportunities to increase sales and income.

Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan strategi harga yang fleksibel, menyesuaikan dengan dinamika pasar global untuk memastikan daya saing yang kuat di pasar ekspor. PTBA juga berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktek penambangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi standar lingkungan global, yang menjadi pertimbangan penting bagi banyak pembeli batu bara. Di samping itu, PTBA juga memperluas pemanfaatan media untuk pemasaran dan penjualan, dengan tujuan untuk menjangkau pelanggan baru dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan saat ini. Dengan strategi pemasaran ini, PTBA tidak hanya memenuhi target penjualan dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis.

In addition, the Company also implements a flexible pricing strategy, adapting to global market dynamics to ensure strong competitiveness in the export market. PTBA also invests in green technology and sustainable mining practices to improve the company's image and meet global environmental standards, which are important considerations for many coal buyers. In addition, PTBA is also expanding the use of media for marketing and sales to reach new customers and maintain relationships with existing customers. With this marketing strategy, PTBA will not only meet sales and revenue targets, but will also improve reputation and business sustainability.

Pangsa Pasar

PTBA merupakan salah satu pemain utama di industri tambang batu bara di tanah air yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan cadangan yang terbesar. Produksi batu bara Perusahaan dipasarkan di pasar domestik dan internasional. PTBA juga memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, atau dikenal sebagai *domestic market obligation* (DMO).

Pada tahun 2023, pangsa pasar PTBA meliputi pemenuhan domestik (Indonesia), baik DMO maupun komersial dan pasar internasional, berikut detailnya:

Market Share

PTBA is one of the main actors in the coal mining industry in Indonesia with a Mining Business License and has the largest reserves. The Company's coal production is sold in domestic and international markets. PTBA also has an obligation to fulfill regulations for meeting domestic needs, or known as domestic market obligation (DMO).

In 2023, PTBA's market share includes domestic (Indonesian) fulfillment, for both DMO and commercial and international markets, as follows:

Pangsa Pasar PTBA Berdasarkan Volume Penjualan Batu Bara
PTBA Market Share Based on Coal Sales Volume

Uraian Description	2023		2022	
	Volume (Ton) Volume (Ton)	Komposisi (%) Composition (%)	Volume (Ton) Volume (Ton)	Komposisi (%) Composition (%)
Domestik Domestic	21.403.957	57,89	19.172.313	60,57
Ekspor Export	15.569.604	42,11	12.481.321	39,43
Jumlah Total	36.973.561	100,00	31.653.634	100,00

Pangsa Pasar PTBA Berdasarkan Sebaran Wilayah Penjualan

Selain tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, perusahaan tetap berupaya untuk mengoptimalkan penjualan ekspor. Sepanjang tahun 2023, PTBA berhasil melakukan peningkatan porsi penjualan ekspor dari tahun 2022 sebesar 39%, tumbuh menjadi 42% pada tahun 2023. Distribusi batu bara PTBA untuk pasar ekspor telah menjangkau beberapa negara di kawasan Asia, antara lain India, Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, Thailand, Taiwan, Jepang, Filipina, serta Malaysia. Selain itu, pada tahun

PTBA Market Share Based on Sales Area Distribution

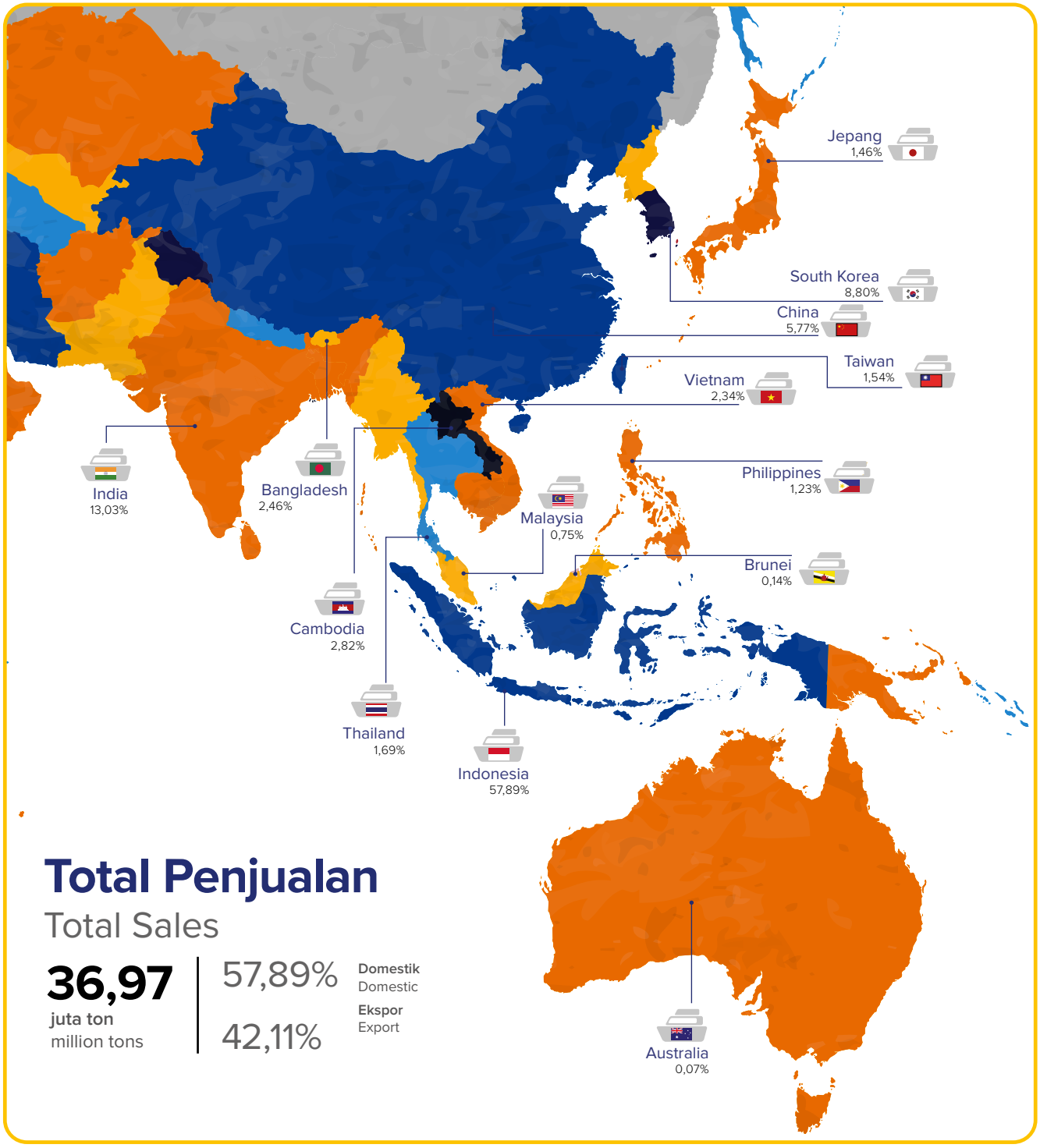
Besides being committed to meet domestic coal needs, the company continues to strive to optimize export sales. In 2023, PTBA succeeded in increasing the portion of export sales from 2022 by 39%, increasing to 42% in 2023. PTBA's coal distribution has reached several countries in the Asian region, including India, South Korea, China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Japan, the Philippines, and Malaysia. Apart from that, in 2023, the Company has also succeeded in expanding its new market share by exporting coal to several destination

2023, Perusahaan juga telah berhasil memperluas pangsa pasar baru dengan mengirimkan batu bara ke beberapa negara tujuan baru, seperti Bangladesh, Brunei Darussalam, dan Australia.

Sebaran pangsa pasar batu bara PTBA sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

countries, such as Bangladesh, Brunei Darussalam, and Australia.

The distribution of PTBA's coal market share throughout 2023 can be seen in the following illustrasion.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment

Sesuai Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aktivitas terkait yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batu bara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batu bara beserta hasil olahannya, bidang pengembangan perkebunan, dan bidang pelayanan kesehatan.

In accordance with Article 3 (three) of the Company's latest Articles of Association, the Company's aims and objectives are to carry out business in the field of developing minerals, especially coal mining in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and related activities which include general investigation, exploration, exploitation, processing, transportation and trading, management of special coal dock facilities for internal interest and other parties', operation of steam power plants for internal interest or other parties', and providing consultation and engineering services related to coal mining industry and its processed products, plantation development, and health services.

Pembahasan tinjauan operasi per segmen usaha pada Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Perusahaan membagi segmen operasinya berdasarkan produk yang dibagi menjadi dua, yaitu:

The discussion of the operational review per business segment in this Annual Report is presented in accordance with the segment divisions listed in the Company's Consolidated Financial Report, in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (2015 Adjustment) concerning Operating Segments. The company divides its operating segments based on products which are divided into two, namely:

- Segmen Batu Bara
  meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain.

- Coal Segment
  Includes general research activities, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and trading, maintenance of special coal dock facilities for internal interest and other parties', and operation of steam power plants internal interest and other parties'.

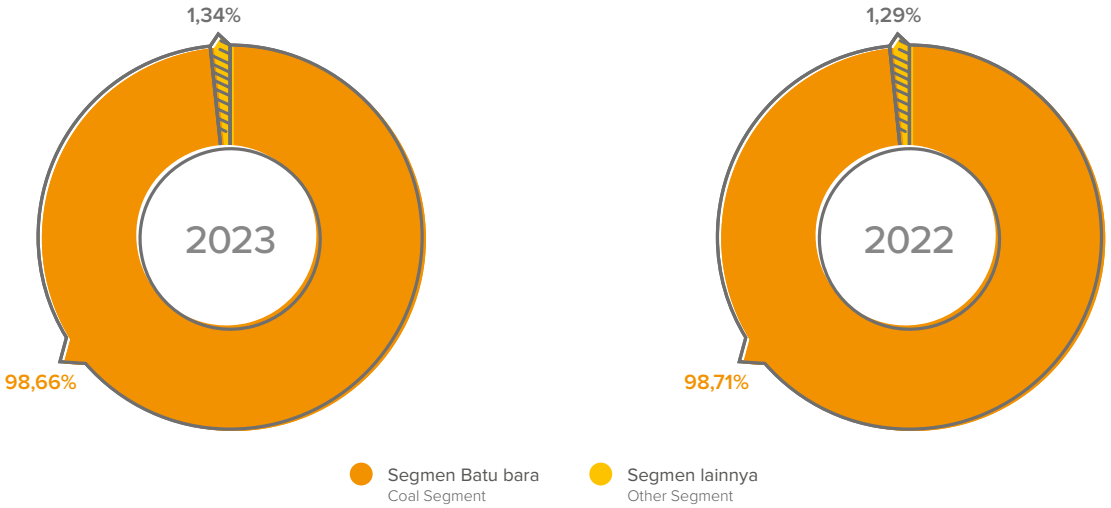
- Segmen Lainnya
  Meliputi jasa kontraktor, pengolahan briket, perkebunan sawit, pengolahan sawit, dan jasa kesehatan.

- Other Segments
  Includes contractor services, briquette processing, oil palm plantations, palm oil processing, and health services.

Segmen batu bara masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan Perusahaan. Di tahun 2023, segmen batu bara membukukan pendapatan sebesar Rp37,97 triliun, turun 9,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp42,10 triliun. Segmen batu bara memberikan kontribusi sebesar 98,66% terhadap total pendapatan Perusahaan. Sedangkan segmen lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,34% terhadap pendapatan Perusahaan atau Rp0,52 triliun.

The coal segment is still the main contributor to the Company's revenue. In 2023, the coal segment posted revenue of Rp37.97 trillion, a decrease of decrease 9.80% compared to the previous year of Rp42.10 trillion. The coal segment contributes 98.66% to the Company's total revenue. Meanwhile, other segments contributed 1.34% to the Company's revenue or Rp0.52 trillion.

Segmen Usaha PTBA
PTBA's Business Segment



Segmen Batu Bara

Segmen batu bara merupakan segmen bisnis utama bagi Perusahaan. PTBA memiliki IUP batu bara seluas 68.777 Hektar (Ha) yang tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau. Selain itu, Perusahaan juga memiliki pertambangan batu bara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, yang dioperasikan oleh entitas anak Perusahaan, yakni PT Internasional Prima Coal. Dengan IUP tersebut, Perusahaan memiliki cadangan batu bara yang cukup besar, sehingga Perusahaan menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di tanah air.

PTBA mengembangkan model bisnis penambangan batu bara yang terintegrasi. Untuk menunjang kegiatan usaha penambangan batu bara, Perusahaan memiliki pelabuhan atau dermaga yang berada di Teluk Bayur, Padang; Kertapati, Palembang; dan Tarahan, Lampung.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 050/0100/2022 tentang Merek Dagang (*Brand*) dan Spesifikasi Batu bara PT Bukit Asam Tbk, Perusahaan memiliki beragam jenis produk batu bara sesuai dengan kadar kualitas sebagai berikut:

Coal Segment

The coal segment is the Company's main business segment. PTBA has a coal IUP covering an area of 68,777 hectares (Ha) spread across several locations in the provinces of South Sumatra, West Sumatra, and Riau. In addition, the Company also has a coal mine located in East Kalimantan Province, which is operated by the Company's subsidiary, namely PT Internasional Prima Coal. With this mining permit, the Company has quite large coal reserves, making it one of the largest coal producers in the country.

PTBA continues to develop an integrated coal mining business model. In order to support coal mining business activities, the Company has ports in Teluk Bayur, Padang; Kertapati, Palembang; and Tarahan, Lampung.

Based on Directors' Decree No. 050/0100/2022 concerning PT Bukit Asam Tbk Trademarks and Coal Specifications, the Company has various types of coal products according to the following quality levels:

Parameter		Bukit Asam							PT IPC		
		BA-42	BA-46	BA-48	BA-50	BA-61	BA-67	BA-71	GAR 4600	GAR 4700	GAR 4800
CV	kcal/kg.ar	4,200	4,500	4,800	5,000	6,100	6,700	7,100	4,600	4,700	4,800
TM	%, ar	33.00	31.00	30.00	28.00	16.00	11.00	7.00	31	28	27
IM	%, adb	16.00	15.00	14.00	13.00	6.00	4.00	3.00	15	15	15
Ash	%, adb	8.00	4.00	8.00	7.00	7.00	10.00	8.00	6	6	6
VM	%, adb	39.00	43.00	39.00	40.00	40.00	25.00	28.00	38	38	38
FC	%, adb	37.00	38.00	39.00	40.00	47.00	61.00	61.00	By Diff	By Diff	By Diff
TS	%, adb	0.60	0.54	0.68	0.42	0.39	0.64	0.65	0.5	0.5	0.5

Parameter		Bukit Asam							PT IPC		
		BA-42	BA-46	BA-48	BA-50	BA-61	BA-67	BA-71	GAR 4600	GAR 4700	GAR 4800
Ash Fushion Temperatures (oC)	*Deformation*	1,218	1,216	1,321	1,302	1,331	1,479	1,461	-	-	-
	Spherical	1,240	1,246	1,332	1,325	1,366	1,476	1,486	-	-	-
	Hemisphere	1,268	1,384	1,340	1,350	1,405	1,480	1,489	-	-	-
	Flow	1,288	1,413	1,373	1,392	1,445	1,485	1,495	-	-	-
Hardgrove Grindability Index		60	58	55	57	55	63	77	42	42	42

Tantangan dan Strategi Segmen Batu Bara

Sepanjang tahun 2023, PTBA menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam segmen batu bara yang berdampak langsung pada performa keuangan perusahaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pelemahan indeks harga batu bara, yang mencakup Newcastle Index, Harga Batu Bara Acuan (HBA), dan Indonesia Coal Index (ICI). Penurunan indeks harga ini berakibat pada menurunnya harga rata-rata penjualan batu bara, yang selanjutnya berujung pada penurunan pendapatan perusahaan. Selain itu, terdapat kenaikan total biaya yang didorong oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan volume produksi, angkutan, penjualan hingga perubahan aturan terkait royalti. Pelemahan indeks harga batu bara dan kenaikan biaya tersebut tentunya mempengaruhi margin keuntungan PTBA.

Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang efektif, termasuk efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, dan inovasi dalam pengembangan produk. Perusahaan aktif memantau dinamika pasar dan secara proaktif menyesuaikan strategi bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

Produktivitas Segmen Batu Bara

Total produksi batu bara Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar 41,94 juta ton, meningkat 4,81 juta ton atau 12,94% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 37,14 juta ton. Produksi batu bara tersebut berasal dari unit pertambangan Perusahaan yang berada di beberapa lokasi, yakni Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) yang berlokasi di area Tambang Air Laya, Muara Tiga Besar (MTB), Banko Barat, dan Banko Tengah, serta 1 (satu) unit pertambangan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, yang dioperasikan oleh entitas anak Perusahaan, yakni PT Internasional Prima Coal.

Peningkatan produksi dan pembelian batu bara di tahun 2023 seiring dengan adanya pembukaan lahan tambang baru di Banko Tengah serta adanya pembelian batu bara oleh anak perusahaan, yaitu PT BAP. Peningkatan ini untuk mendukung penjualan yang diharapkan akan menambah pendapatan Perusahaan.

Berikut adalah total produksi dan pembelian batu bara yang berhasil dibukukan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Coal Segment Challenges and Strategy

Throughout 2023, PTBA encountered several significant challenges in the coal segment which have a direct impact on the company's financial performance. One of the main challenges faced is the weakening of the coal price index, which includes the Newcastle Index, Reference Coal Price, and Indonesia Coal Index (ICI). This decrease in the price index resulted in a decrease in the average sales price of coal, which led to a decrease in company revenue. In addition, there was an increase in total costs which was driven by several factors including increases in production volume, transportation, sales and changes in regulations related to royalties. The weakening coal price index and rising costs certainly affect of PTBA's profit margin.

The Company is committed to implementing effective strategies, including operational efficiency, revenue diversification, and innovation in product development. The Company actively monitors market dynamics and proactively adjusts business strategies to minimize negative impacts and maximize future growth potential.

Coal Segment Productivity

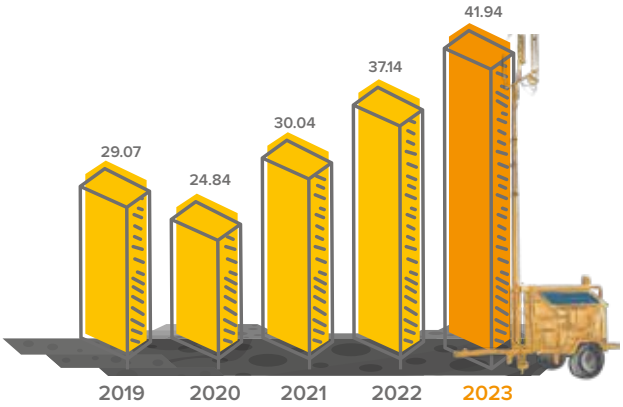
The Company's total coal production in 2023 was amounted at 41.94 million tons, an increase of 4.81 million tons or 12.94% compared to 2022 of 37.14 million tons. The coal production came from the Company's mining units located in several locations, namely the Tanjung Enim Mining Unit (UPTE) located in the Air Laya Mine area, Muara Tiga Besar (MTB), Banko West and Central Banko, as well as 1 (one) mining unit located in East Kalimantan Province, operated by the Company's subsidiary, namely PT Internasional Prima Coal.

The increase in coal production and purchasing in 2023 goes hand in hand with the opening of new mining land in Banko Tengah and the purchase of coal by a subsidiary, namely PT BAP. This increase is set to support sales which are expected to increase the Company's income.

The following is the total coal production and purchasing recorded by the Company in the last 5 (five) years.

Total Volume produksi dan pembelian Batu Bara 2019-2023
Total Volume of Coal Production 2019-2023

dalam juta ton
in million tons



Seiring dengan meningkatnya total produksi dan pembelian batu bara, volume angkutan batu bara juga mengalami peningkatan. Di tahun 2023, total volume angkutan batu bara tercatat mencapai 32,42 juta ton, meningkat 12,52%, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 28,81 juta ton.

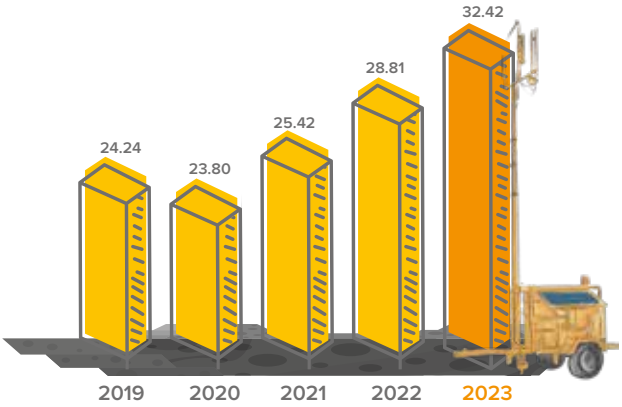
In line with the increase in total coal production and purchasing, the volume of coal transportation has also increased. In 2023, the total volume of coal transportation was recorded at 32.42 million tons, an increase of 12,52%, compared to 2022 which reached 28.81 million tons.

Volume angkutan batu bara ke Tarahan tercatat mencapai 25,43 juta ton di tahun 2023, meningkat 8,62% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 23,41 juta ton. Sementara volume angkutan batu bara ke Kertapati, tercatat mencapai 6,99 juta ton di tahun 2023, meningkat 29,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,40 juta ton. Berikut adalah total volume angkutan batu bara ke Tarahan dan Kertapati dalam 5 (lima) tahun terakhir.

The volume of coal transportation to Tarahan was recorded at 25.43 million tons in 2023, an increase of 8,62% compared to 2022 with 23.41 million tons. Meanwhile, the volume of coal transportation to Kertapati was recorded at 6.99 million tons in 2023, an increase of 29,44% compared to 2022 with 5.40 million tons. The following is the total volume of coal transportation to Tarahan and Kertapati in the last 5 (five) years.

Total Volume Angkutan Batu bara
Total Volume of Coal Transportation

dalam juta ton
in million tons



Perusahaan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke lokasi pelabuhan dan dermaga milik Perusahaan yang berada di Kertapati, Palembang dan Tarahan, Lampung.

The company collaborates with PT KAI, to transport coal from the mining site to the Company's port and barging port locations in Kertapati, Palembang and Tarahan, Lampung.

Sementara itu, dari sisi volume penjualan batu bara, sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah mencatatkan penjualan batu bara dengan total volume sebesar 36,97 juta ton, naik 17% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 31,65 juta ton. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan kebutuhan batu bara dalam negeri serta keberhasilan perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar baru.

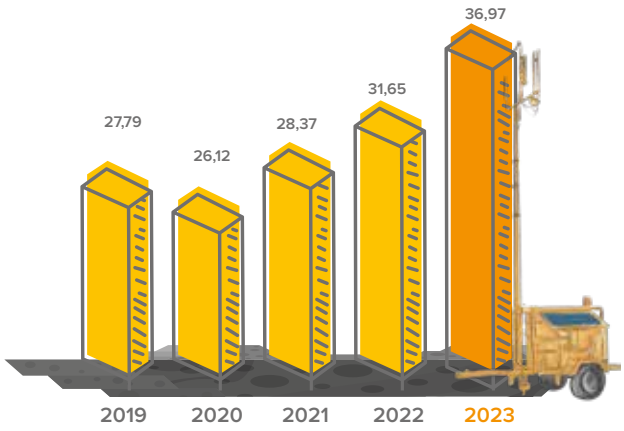
Meanwhile, in terms of coal sales volume in 2023, the Company has recorded coal sales with a total volume of 36.97 million tons, an increase of 17% compared to 2022 with 31.65 million tons. This increase is in line with the increase in domestic coal demand and the company's success in penetrating new markets.

Berikut adalah total volume penjualan batu bara domestik dan ekspor dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Below is the total volume of domestic and export of coal sales in the past 5 (five) years.

Total Volume Penjualan Batu bara
Total Volume of Coal Sales

dalam juta ton
in million tons



Adapun dari total volume penjualan batu bara tahun 2023, penjualan domestik tercatat sebesar 21,40 juta ton, meningkat 11,64%, di tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,17 juta ton. sedangkan penjualan ekspor tercatat sebesar 15,57 juta ton, mengalami peningkatan 24,74% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 12,48 juta ton. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor.

From the total coal sales volume in 2023, domestic sales were recorded at 21.40 million tons, an increase of 11.64%, in 2023, compared to 19.17 million tons in 2022. Meanwhile, export sales were recorded at 15.57 million tons, an increase of 24.74% compared to 12.48 million tons in 2022. This increase was caused by increasing demand for coal, both domestic and export.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Sejalan dengan tren penurunan harga batu bara di pasar dunia pada tahun 2023, pendapatan yang diperoleh Perusahaan dari segmen batu bara juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp37,97 triliun, atau turun 9,80% dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,10 triliun. Hal tersebut juga berdampak pada turunnya laba tahun berjalan dari segmen batu bara menjadi sebesar Rp5,41 triliun, atau turun 53,12% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,55 triliun.

Revenue and Profitability Segment

In line with the downward trend in coal prices at the global market in 2023, the revenue obtained by the Company from the coal segment also decreased to Rp37.97 trillion, or down 9,80% from the previous year of Rp42.10 trillion. This also resulted in a decrease in profit for the year from the coal segment to Rp5.41 trillion, or down 53.12% from the previous year of Rp11.55 trillion.

Segmen Lainnya

Sesuai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PTBA, Perusahaan memiliki segmen lainnya sebagai berikut:

1. Aktivitas *Holding*
   Segmen *holding* PTBA dijalankan oleh tiga perusahaan utama baik strategik *holding* ataupun operasional *holding*. Tiga Anak usaha tersebut yakni sebagai berikut:
   a. *Subholding* Pembangkit Tenaga Listrik dijalankan oleh PT Bukit Energi Investama (PT BEI). PT BEI melakukan pengelolaan atas anak usaha PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) yang bergerak di bidang Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Selain sebagai perusahaan holding, PT BEI juga tetap melakukan aktivitas operasional, khususnya energi baru dan terbarukan (EBT), seperti PLTS Jalan Tol Bali-Mandara bekerjasama dengan PT Jasa Marga (Persero) dan *Rooftop* PLTS di Bandara Soekarno Hatta bekerjasama dengan PT Angkasa Pura (Persero) II.

Other Segments

In accordance with PTBA's Notes to Financial Reports (CALK), the Company has other segments as follows:

1. Holding Activities
   PTBA's holding segment is run by three main companies, both strategic holding and operational holding. The three subsidiaries are as follows:
   a. Power Plant Subholding is run by PT Bukit Energi Investama (PT BEI). PT BEI is responsible to manage the subsidiary called PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) which operates in the Operation and Maintenance (O&M) services sector. Apart from being a holding company, PT BEI also continues to carry out operational activities, especially in new and renewable energy (NRE), such as Bali-Mandara Toll Road SPPP in collaboration with PT Jasa Marga (Persero) and Rooftop SPPP at Soekarno Hatta Airport in collaboration with PT Angkasa Pura (Persero) II.

b. *Subholding* Kepelabuhanan dan Angkutan Perairan dijalankan oleh PT Bukit Asam Prima (PT BAP). PT BAP memiliki anak usaha sebagai berikut: (a) PT Bukit Prima Bahari (PT BPB) yang bergerak di bidang Transpotasi Laut, (b) PT Pelabuhan Bukit Prima (PT PBP) yang bergerak di bidang Jasa Pemeliharaan Pelabuhan, dan (c) PT Penajam Internasional Terminal (PT PIT) yang bergerak di bidang Jasa Pemeliharaan Dermaga. Selain kegiatan usaha pengelolaan anak perusahaan, PT BAP sendiri juga melakukan kegiatan *trading* batu bara.

c. *Subholding* lainnya dijalankan oleh PT Bukit Multi Investama (PT BMI) yang melakukan pengelolaan atas anak usaha sebagai berikut: (a) PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) yang bergerak di bidang kontraktor jasa penambangan, (b) PT Bukit Asam Medika (PT BAM) yang bergerak di bidang jasa kesehatan, (c) PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP) yang bergerak di bidang perkebunan, dan (d) PT Bukit Multi Properti (PT BMP) yang bergerak di bidang pengelolaan aset dan properti.

2. Jasa Kontraktor
   Segmen ini dijalankan oleh afiliasi PTBA, yakni PT SBS, yang bergerak dibidang usaha jasa penambangan. Kegiatan usaha difokuskan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, utamanya untuk mendukung produksi batu bara PTBA.
3. Pembangkit Listrik
   Aktivitas segmen pembangkit tenaga listrik dijalankan oleh Afiliasi PTBA, yakni PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) dan PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP). PT BPI telah beroperasi komersial sejak tahun 2015 dengan kapasitas 2x110 MW berlokasi di Lahat, Sumatera Selatan. Sedangkan, PT HBAP telah beroperasi komersial pada 7 Oktober 2023 dengan kapasitas 2x660 MW dan menjadi PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara. Selain pembangkitan listrik, PTBA melalui PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) juga merambah bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M). PT BEST sendiri melakukan kegiatan O&M pada PLTU yang dimiliki oleh PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Tarahan, Lampung, serta saat juga melakukan pegelolaan terhadap beberapa PLTU lainnya di pulau Sumatra.
4. Pengelolaan Briket
   Pengelolaan briket dilakukan sendiri oleh PTBA melaui Unit Usaha Briket yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Tarahan, Lampung.
5. Perkebunan
   Grup usaha PTBA juga memiliki segmen perkebunan kelapa sawit yang dimiliki secara langsung oleh afiliasi PTBA, yakni PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP). PT BSP mengelola lahan sawit yang berlokasi di Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan.
6. Jasa Kesehatan
   Untuk menunjang kesehatan Pegawai PTBA pada khususnya dan mitra PTBA di Tanjung Enim, PTBA mendirikan PT Bukit Asam Medika (PT BAM), yang melakukan pengelolaan Rumah Sakit PTBA dan beberapa klinik di Tanjung Enim.
7. Jasa Kepelabuhanan dan Pengangkutan Perairan
   Usaha ini dijalankan oleh tiga afiliasi PTBA, yakni PT BPB, PT PBP dan PT PIT.

b. The Ports and Water Transportation Subholding is run by PT Bukit Asam Prima (PT BAP). PT BAP has the following subsidiaries: (a) PT Bukit Prima Bahari (PT BPB) which is engaged in Sea Transportation, (b) PT Pelabuhan Bukit Prima (PT PBP) which is engaged in Port Maintenance Services, and (c) PT Penajam Internasional Terminal which is engaged in Dock Maintenance Services (PT PIT). In addition to the business activities of managing subsidiaries, PT BAP itself also conducts coal trading activities.

c. The other subholding is run by PT Bukit Multi Investama (PT BMI) which manages the following subsidiaries: (a) PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) which is engaged in mining service contractor, (b) PT Bukit Asam Medika (PT BAM) which is engaged in health services, (c) PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP) which is engaged in plantation, and (d) PT Bukit Multi Properti (PT BMP) which is engaged in asset and property management.

2. Contractor Services
   This segment is run by PTBA affiliate, namely PT SBS. PT SBS operates in the mining services business focusing in Tanjung Enim, South Sumatra, mainly to support PTBA coal production.
3. Power Plants
   The power generation segment activities are carried out by PTBA affiliates, namely PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) and PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP). PT BPI has been operating commercially since 2015 with a capacity of 2x110 MW nett located in Lahat, South Sumatra. Meanwhile, PT HBAP is planned to operate commercially in 2023 with a capacity of 2x660 MW and becomes the largest mine mouth CFPP in Indonesia. Apart from electricity generation, PTBA through PT Bukit Energi Service Terpadu (PT BEST) also takes part in the operational and maintenance (O&M) services business. PT BEST is responsible to carry out O&M activities at the CFPP owned by PTBA in Tanjung Enim and Tarahan Lampung, as well as managing several other CFPP in Sumatra.
4. Briquette Management
   The briquette management is carried out by PTBA through the Briquette Business Unit located in Tanjung Enim and Tarahan Lampung.
5. Plantation
   The PTBA business group also has an oil palm plantation segment which is owned directly by Bukit Asam's affiliate, namely PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP). PT BSP manages oil palm land located in Tanjung Agung, Muara Enim, South Sumatra.
6. Health Services
   To support the health of PTBA employees in particular and PTBA partners in Tanjung Enim, PTBA established PT Bukit Asam Medika (PT BAM), which manages the PTBA Hospital and several clinics in Tanjung Enim.
7. Port Services and Water Transportation
   This business is run by three PTBA affiliates, namely PT BPB, PT PBP, and PT PIT.

Tantangan dan Strategi Segmen Lainnya

PTBA memiliki sejumlah segmen bisnis lainnya di luar penambangan batu bara, yang masing-masing menghadapi tantangan dan peluang pada tahun 2023. Dalam segmen jasa kontraktor penambangan, PT SBS berhasil meningkatkan kontribusinya sebesar 10% terhadap pencapaian produksi batu bara PTBA dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi di tahun 2023 ini sebesar 18% dari total produksi PTBA, atau ekuivalen dengan 7,5 juta ton. Pertumbuhan ini menunjukkan peran penting PT SBS dalam mendukung pencapaian kinerja produksi PTBA, meskipun juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan efisiensi operasional di masa mendatang.

Dalam segmen pembangkit listrik, PTBA mengalami beberapa tantangan. PT BPI menghadapi penurunan kinerja, terutama karena peningkatan jam rawatan di PLTU Banjarsari. Selain itu, PT HBAP mengalami keterlambatan *Commercial Operation Date* (COD) hingga 7 Oktober 2023, yang menghambat kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan serapan laba. Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan jadwal perawatan yang lebih baik untuk mengurangi *downtime*.

Segmen perkebunan melalui PT BSP menghadapi penurunan kinerja keuangan yang disebabkan oleh penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO), yang berdampak negatif terhadap harga rata-rata penjualan tandan buah segar (TBS). Strategi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan penjajakan diversifikasi produk perkebunan dan peningkatan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi.

Terakhir, dalam segmen jasa pengangkutan dan pelabuhan perairan, baik PT BPB, PT PBP, dan PT PIT mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan peningkatan volume penjualan PTBA. PT BAP, sebagai induk dari ketiga perusahaan tersebut, turut berkontribusi dalam bisnis trading melalui pembelian batu bara High CV sebesar 0,19 juta ton di tahun 2023 ini. Strategi dalam segmen ini berfokus pada ekspansi dan peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan untuk mendukung peningkatan volume penjualan batu bara dan diversifikasi portofolio tujuan layanan logistik.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategis terhadap segmen bisnis lainnya, PTBA berupaya mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan setiap peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan kinerja di masa depan, khususnya dari kontribusi segmen bisnis lainnya.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Sejalan dengan tren penurunan harga batu bara global di tahun 2023, pendapatan yang diperoleh Perusahaan dari segmen batu bara juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp37,97 triliun, atau turun 9,80% dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,10 triliun. Hal tersebut juga berdampak pada turunnya laba tahun berjalan dari segmen batu bara menjadi sebesar Rp5,41 triliun, atau turun 53,12% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,55 triliun.

Other Segment Challenges and Strategies

PTBA has other business segments outside coal mining, with each of them were faced with challenges and opportunities in 2023. In the mining contractor services segment, PT SBS succeeded in increasing its contribution by 10% to PTBA's coal production achievements compared to the previous year, with contributions in 2023 amounted to 18% of PTBA's total production, or the equivalent of 7.5 million tons. This growth shows the important role of PT SBS in supporting PTBA's production performance achievements, although it also faced challenges in maintaining and improving operational efficiency in the future.

In the power generation segment, PTBA also experienced several challenges. PT BPI is facing a decline in performance, especially due to increased maintenance hours at PLTU Banjarsari. In addition, PT HBAP experienced a delay in the Commercial Operation Date (COD) until October 7, 2023, which hampered the company's ability to optimize profit absorption. These challenges required strategies focusing on improving operational efficiency and better managing maintenance schedules to reduce downtime.

The plantation segment through PT BSP was also facing a decline in financial performance caused by the decline in Crude Palm Oil (CPO) prices, which brought a negative impact on the average sales price of fresh fruit bunches (FFB). Strategies to overcome these challenges involve exploring diversification of plantation products and improving operational efficiency to reduce production costs.

Lastly, in the water transportation and port services segment, PT BPB, PT PBP, and PT PIT experienced an increase in performance in line with the increase in PTBA sales volume. PT BAP, as the parent of the three companies, also contributed to the trading business by purchasing 0.19 million tons of High CV coal in 2023. The strategy in this segment focuses on expanding and increasing port infrastructure capacity to support increasing coal sales volumes and diversifying the portfolio of logistics service destinations.

With an integrated and strategic approach to other business segments, PTBA seeks to overcome existing challenges and take advantage of every opportunity for growth and performance improvement in the future, especially from the contribution of other business segments.

Segment Revenue and Profitability

In line with the downward trend in coal prices at the global in 2023, the revenue obtained by the Company from the coal segment also decreased to Rp37.97 trillion, or down 9.80% from the previous year of Rp42.10 trillion. This also resulted in a decrease in profit for the year from the coal segment to Rp5.41 trillion, or down 53.12% from the previous year of Rp11.55 trillion.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Standar Penyajian Informasi Keuangan dan Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Dalam menyusun analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini, mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) dengan memberikan opini pada laporan konsolidasian disajikan secara "wajar" dalam semua hal yang material.

Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam Tbk, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI. Pembahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Financial Information Presentation Standards and Compliance with Financial Accounting Standards

The preparation of this analysis and discussion of financial performance in this Annual Report is referring to the Consolidated Financial Report of PT Bukit Asam Tbk for the financial year ending December 31, 2023 and 2022, which was audited by the Public Accounting Firm, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) by providing an opinion on the consolidated report which is presented "fairly" in all material respects.

Presentation and disclosure of the Consolidated Financial Statements of PT Bukit Asam Tbk is prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, which include Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board-Accountants Association Indonesia (DSAK IAI). Discussion of the Company's financial performance is presented by considering the explanation in the notes to the Consolidated Financial Statements from the external auditor as an inseparable part of this Annual Report.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan / Penurunan Increase/Decrease	
			Rp	%
ASET ASSETS				
Aset Lancar Current Assets	15.148.356	24.432.148	(9.283.792)	-38,00
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	23.616.833	20.927.059	2.689.774	12,85
Jumlah Aset Total Assets	38.765.189	45.359.207	(6.594.018)	-14,54
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	9.968.101	10.701.780	(733.679)	-6,86
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	7.233.892	5.741.381	1.492.511	26,00
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	17.201.993	16.443.161	758.832	4,61
Jumlah Ekuitas Total Equity	21.563.196	28.916.046	(7.352.850)	-25,43
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total of Liabilities and Equity	38.765.189	45.359.207	(6.594.018)	-14,54

Posisi keuangan konsolidasian PTBA tahun 2023 masih berada pada posisi yang baik kendati secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat penurunan aset sebesar 14,54%, peningkatan liabilitas sebesar 4,61%, dan penurunan ekuitas sebesar 25,43%.

PTBA's consolidated financial position in 2023 is still in a good position even though it experienced a decline compared to the previous year. The Company recorded an decrease in assets of 14.54%, an increase in liabilities of 4.61%, and an decrease in equity of 25.43%.

Aset

Assets

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Aset Lancar Current Assets	15.148.356	24.432.148	(9.283.792)	-38,00
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	23.616.833	20.927.059	2.689.774	12,85
Jumlah Aset Total Assets	38.765.189	45.359.207	(6.594.018)	-14,54

Total aset Perusahaan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp38,77 triliun, mengalami penurunan Rp6,59 triliun atau 14,54% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp45,36 triliun. Komposisi aset Perusahaan tahun 2023 masih relatif berimbang antara aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp15,15 triliun atau setara dengan 39,08%, sedangkan aset tidak lancar tercatat sebesar Rp23,62 triliun atau 60,92% dari total aset.

The Company's total assets as of December 31, 2023, were recorded at Rp38.77 trillion, experiencing an decrease of Rp6.59 trillion or 14.54% when compared to 2022 which amounted to Rp45.36 trillion. The composition of the Company's assets in 2023 was relatively balanced between current assets and non-current assets. The Company's current assets were recorded at Rp15.15 trillion or the equivalent of 39.08% while non-current assets were recorded at Rp23.62 trillion or 60.92% of total assets.

Aset Lancar

Current Assets

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	4.138.867	7.030.343	(2.891.476)	-41,13
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	3.797.292	3.509.912	287.380	8,19
Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	875.330	783.070	92.260	11,78
Persediaan Inventories	5.499.614	3.837.187	1.662.427	43,32
Deposito Berjangka Jatuh Tempo diatas 3 Bulan dan Kurang dari 1 Tahun Time Deposits with Maturities More Than 3 Months and Less Than 1 Years	541.818	8.929.196	(8.387.378)	-93,93
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	295.435	342.440	(47.005)	-13,73
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	15.148.356	24.432.148	(9.283.792)	-38,00

Jumlah aset lancar Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp15,15 triliun, mengalami penurunan Rp9,28 triliun atau 38,00%, jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp24,43 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari satu tahun.

The Company's total current assets in 2023 were recorded at Rp15.15 trillion, experiencing an increase of Rp9.28 trillion or 38.00%, compared to 2022 of Rp24.43 trillion. This decrease was mainly caused by a decrease in cash and cash equivalents and time deposits with maturities of more than 3 months and less than one year.

Kas dan Setara Kas

Pada 31 Desember 2023, posisi kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar Rp4,14 triliun, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,03 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran kas untuk pembayaran dividen atas Tahun buku 2022.

Piutang Usaha, Neto

Jumlah piutang usaha neto Perusahaan pada akhir periode tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,80 triliun, meningkat Rp0,29 triliun atau setara dengan 8,19% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,51 triliun.

Aset Keuangan yang Dinilai Pada Nilai Wajar Melalui Pendapatan Komprehensif Lain

Jumlah aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain di tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,88 triliun, mengalami peningkatan Rp0,09 triliun atau 11,78%, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp0,78 triliun.

Persediaan

Nilai persediaan Perusahaan di tahun 2023, tercatat sebesar Rp5,50 triliun, meningkat Rp1,66 triliun atau 43,32% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp3,84 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan volume persediaan batu bara.

Deposito Berjangka Jatuh Tempo di atas 3 Bulan dan Kurang dari 1 tahun

Jumlah deposito berjangka kepada pihak berelasi tahun 2023, tercatat sebesar Rp0,54 triliun, mengalami penurunan Rp8,39 triliun atau 93,93%, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp8,93 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran kas untuk pembayaran dividen atas Tahun buku 2022.

Aset Lancar Lainnya

Jumlah aset lancar lainnya tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,30 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp0,04 triliun atau 13,73% dari Rp0,34 triliun di tahun 2022.

Cash and Cash Equivalents

As of December 31, 2023, the Company's cash and cash equivalents position was recorded at Rp4.14 trillion, a decrease compared to the same period in the previous year of Rp7.03 trillion. This is due to the expenditure of cash for dividend payments for the 2022 financial year.

Trade Receivables, Net

The Company's net trade receivables at the end of the 2023 were recorded at Rp3.80 trillion, increasing 8.19% or equivalent to Rp0.29 trillion compared to the previous year of Rp 3.51 trillion.

Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income

The number of financial assets assessed at fair value through other comprehensive income in 2023 was recorded at Rp0.88 trillion, experiencing an increase of Rp0.09 trillion or 11.78%, compared to the previous year of Rp0.78 trillion,

Inventories

The value of the Company's inventory in 2023 was recorded at Rp5.50 trillion, increasing Rp1.66 trillion or equivalent to 43.32% compared to the previous year of Rp3.84 trillion. This increase is in line with the increase in the volume of coal supplies.

Term Deposits with Maturities More Than 3 Months and Less Than 1 year

The amount of term deposits with related parties in 2023 was recorded at Rp0.54 trillion, a decrease of Rp8.39 trillion or 93.93%, compared to the previous year of Rp8.93 trillion. This is due to the expenditure of cash for dividend payments for the 2022 financial year.

Other Current Assets

The amount of other current assets in 2023 was recorded at Rp0.30 trillion, experiencing an decrease of Rp Rp0.04 trillion or 13.73% from Rp0.34 trillion in 2022.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Piutang Usaha, Neto Trade Receivables, Net	188.271	232.678	(44.407)	-19,09
Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi Other Receivables from Related Parties	18.683	29.407	(10.724)	-36,47
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates	-	25.314	(25.314)	-100,00
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	7.263.276	6.519.097	744.179	11,42
Properti Pertambangan Mining Properties	3.271.657	2.873.707	397.950	13,85
Aset Tetap Fixed Assets	8.566.210	8.410.051	156.159	1,86
Tanaman Produktif Bearer Plants	72.820	52.679	20.141	38,23

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes				
Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	25.370	160.284	(134.914)	-84,17
Pajak Lain-lain Other Taxes	2.528.981	1.336.059	1.192.922	89,29
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	1.208.683	917.323	291.360	31,76
Goodwill	102.077	102.077	0	0,00
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	370.805	268.383	102.422	38,16
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	23.616.833	20.927.059	2.689.774	12,85

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan tahun 2023, tercatat sebesar Rp23,62 triliun, meningkat Rp2,69 triliun atau 12,85% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp20,93 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas investasi pada ventura bersama.

The Company's total non-current assets in 2023 were recorded at Rp23.62 trillion, an increase of Rp2.69 trillion or 12.85% compared to 2022 of Rp20.93 trillion. This increase was mainly due to an increase in investment in joint ventures.

Piutang Usaha, Neto

Jumlah piutang usaha neto pada aset tidak lancar Perusahaan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp0,19 triliun, menurun Rp0,04 triliun atau 19,09% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,23 triliun.

Trade Receivable, Net

The amount of net trade receivables on the Company's non-current assets as of December 31, 2023 was recorded at Rp0.19 trillion, an decrease of Rp0.04 trillion or 19.09% compared to 2022 of Rp0.23 trillion.

Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi

Jumlah piutang lainnya dari pihak berelasi Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp18,68 triliun, mengalami penurunan Rp10,72 triliun atau 36,47% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp29,41 triliun.

Other Receivables from Related Parties

The amount of other receivables from related parties of the Company in 2023 was recorded at Rp18.68 trillion, experiencing an decrease of Rp10.72 trillion or 36.47% compared to the previous year of Rp29.41 trillion.

Investasi pada Ventura Bersama

Jumlah investasi pada ventura bersama tahun 2023 tercatat sebesar Rp7,26 triliun, mengalami peningkatan Rp0,74 triliun atau 11,42% dibanding tahun 2022 sebesar Rp6,52 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan serap laba dan setoran modal kepada PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) dan PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI).

Investment in Joint Ventures

Total investment in joint ventures in 2023 was recorded at Rp7.26 trillion, an increase of Rp0.74 trillion or 11.42% compared to 2022 of Rp6.52 trillion. The increase was due to the addition of profit absorption and capital deposits to PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) and PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI).

Properti Penambangan

Jumlah properti pertambangan di tahun 2023, sebesar Rp 3,27 triliun, meningkat Rp0,40 triliun, atau 13,85%, dibanding tahun 2022, yang tercatat sebesar Rp2,87 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan *Asset Retirement Obligation* (ARO) atas kewajiban reklamasi lingkungan dan rencana tutup tambang.

Mining Properties

The number of mining properties in 2023 will amount to Rp3.27 trillion, an increase of Rp0.40 trillion, or 13.85%, compared to 2022, which was recorded at Rp2.87 trillion. This increase was caused by the addition of Asset Retirement Obligation (ARO) for environmental reclamation obligations and mine closure plans.

Aset Tetap

Jumlah aset tetap Perusahaan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp8,57 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp0,16 triliun atau 1,86%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8,41 triliun.

Fixed Assets

The Company's total fixed assets as of December 31, 2023, were recorded at Rp8.57 trillion, experiencing an increase of Rp0.16 trillion or 1.86%, compared to the previous year of Rp8.41 trillion.

Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan yang digunakan dan diharapkan menghasilkan produk agrikultur untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Nilai tanaman produktif pada aset tidak lancar Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,07 triliun, mengalami peningkatan Rp0,02 triliun atau 38,23%, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp0,05 triliun.

Pajak Dibayar di Muka

Jumlah pajak dibayar di muka Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp2,55 triliun, meningkat Rp1,06 triliun atau 70,71% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,50 triliun. Pajak di bayar di muka Perusahaan terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp0,03 triliun dan pajak lain-lain sebesar Rp2,53 triliun.

Aset Pajak Tangguhan

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan aset pajak tangguhan sebesar Rp1,21 triliun, meningkat Rp0,29 triliun atau 31,76%dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,92 triliun.

Goodwill

Goodwill merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas PT Satria Bahan Sarana (PT SBS), oleh PTBA melalui entitas anak Perusahaan, yakni PT Bukit Multi Investama (PT BMI), sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik PT SBS pada tanggal akuisisi. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai *goodwill*, tidak ada/ada rugi penurunan nilai yang tercatat di tahun 2023, dengan nilai yang masih sama dengan tahun 2022 yakni sebesar Rp102,08 miliar.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Jumlah aset tidak lancar lainnya Perusahaan di tahun 2023, tercatat sebesar Rp0,37 triliun, mengalami peningkatan Rp102,42 miliar atau 38,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,27 triliun.

Bearer Plants

Bearer plants are immature plants and mature plants that are used and expected to produce agricultural products for a period of more than one year. The value of bearer plants in the Company's non-current assets in 2023 was recorded at Rp0.07 trillion, experiencing an increase of Rp0.02 trillion or 38.23%, compared to the previous year of Rp0.05 trillion.

Prepaid Taxes

The amount of the Company's prepaid taxes in 2023 was recorded at Rp2.55 trillion, an increase of Rp1.06 trillion or 70.71% from the previous year of Rp1.50 trillion. Taxes paid in advance by the Company consist of corporate income tax of Rp0.03 trillion and other taxes of Rp2.53 trillion.

Deferred Tax Assets

In 2023, the Company recorded deferred tax assets of Rp1.21 trillion, an increase of Rp0.29 trillion or 31.76% compared to 2022 of Rp0.92 trillion.

Goodwill

Goodwill is the balance arising from the acquisition of ownership of PT Satria Bahan Sarana (PT SBS), by PTBA through its subsidiary, namely PT Bukit Multi Investama (PT BMI), as a result of measuring the fair value of assets and liabilities belonging to PT SBS at the acquisition date. Based on the results of the goodwill impairment test, no/any impairment loss was recorded in 2023, with the value still the same as in 2022, namely Rp102.08 billion.

Other Non-Current Assets

The Company's other non-current assets in 2023 were recorded at Rp0.37 trillion, experiencing an increase of Rp102.42 billion or 38.16% compared to the previous year which amounted to Rp0.27 trillion.

Liabilitas

Liabilities

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	9.968.101	10.701.780	(733.679)	-6,86
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	7.233.892	5.741.381	1.492.511	26,00
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**17.201.993**	**16.443.161**	**758.832**	**4,61**

Total liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp17,20 triliun, meningkat Rp0,76 triliun atau 4,61% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp16,44 triliun. Komposisi liabilitas Perusahaan tahun 2023 utamanya berupa liabilitas jangka pendek yang pada tahun 2023 sebesar Rp9,97 triliun atau 57,95% dari total liabilitas. Sedangkan, liabilitas jangka panjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp7,23 triliun atau 42,05% dari total liabilitas.

The Company's total liabilities as of December 31, 2023 were recorded at Rp17.20 trillion, an increase of Rp0.76 trillion or 4.61% compared to 2022 of Rp16.44 trillion. The composition of the Company's liabilities in 2023 is mainly in the form of short-term liabilities which in 2023 amounted to Rp9.97 trillion or 57.95% of total liabilities. Meanwhile, long-term liabilities in 2023 were recorded at Rp7.23 trillion or 42.05% of total liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Utang Usaha Trade Payable	2.082.188	1.935.818	146.370	7,56
Biaya yang Masih Harus Dibayar Acurred Expenses	4.857.830	4.485.018	372.812	8,31
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-Term Employee Benefit Liabilities	852.007	1.331.997	(479.990)	-36,04
Utang Pajak Taxes Payable				
Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	295.176	893.655	(598.479)	-66,97
Pajak Lain-lain Other Taxes	496.645	616.152	(119.507)	-19,40
Bagian Jangka Pendek atas Pinjaman Jangka Panjang: Current Maturities of Long-Term Borrowings				
Pinjaman Bank Bank Borrowings	68.000	2.240	65.760	2935,71
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	490.017	589.437	(99.420)	-16,87
Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure	329.190	257.812	71.378	27,69
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Imbalan Pascakerja Current Maturities of Post-Employment Benefit Liabilities	228.521	358.153	(129.632)	-36,19
Utang Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	268.527	231.498	37.029	16,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	9.968.101	10.701.780	(733.679)	-6,86

Jumlah liabilitas jangka pendek Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp9,97 triliun, mengalami penurunan Rp0,73 triliun atau 6,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10,70 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya liabilitas imbalan kerja jangka pendek.

Utang Usaha

Jumlah utang usaha Perusahaan tahun 2023, tercatat sebesar Rp2,08 triliun, mengalami peningkatan Rp0,15 triliun atau 7,56% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,94 triliun.

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan jumlah biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp4,86 triliun, mengalami peningkatan Rp0,37 triliun atau 8,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,49 triliun. Hal ini seiring dengan peningkatan kinerja operasional seperti volume produksi dan penjualan dari tahun sebelumnya.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Tahun 2023, Perusahaan mencatatkan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp0,85 triliun, mengalami penurunan Rp0,48 triliun atau 36,04% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,33 triliun.

The Company's total current liabilities in 2023 were recorded at Rp9.97 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp0.73 trillion or 6.86% compared to the previous year of Rp10.70 trillion. This decline was caused by a decrease in short-term employee benefits liabilities.

Trade Payables

The Company's total trade debt in 2023 was recorded at Rp2.08 trillion, experiencing an increase of Rp0.15 trillion or 7.56% compared to 2022 of Rp1.94 trillion.

Accrued Expenses

In 2023, the Company recorded total costs still to be paid of Rp4.86 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp0.37 trillion or 8.31% compared to the previous year of Rp4.49 trillion. This is in line with the increase in operational performance such as production volume and sales volume from the previous year.

Short-term Employee Benefits Liabilities

In 2023, the Company recorded a short-term employee benefits liability of Rp0.85 trillion, experiencing an decrease of Rp0.48 trillion or 36.04% compared to the previous year of Rp1.33 trillion.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak Perusahaan tahun 2023 adalah sebesar Rp0,79 triliun, mengalami penurunan Rp0,72 triliun atau 47,55% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,51 triliun. Utang pajak Perusahaan tahun 2023 terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp0,30 triliun dan pajak lain-lain sebesar Rp0,50 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh utang pajak perusahaan Tahun 2023 terdiri dari pajak penghasilan badan sebesar Rp295,18 miliar dan pajak lain-lain sebesar Rp496,65 miliar.

Taxes Payable

The Company's total tax payable in 2023 is Rp0.79 trillion, experiencing an decrease of Rp0.72 trillion or 47.55% compared to 2022 of Rp1.51 trillion The Company's tax payable in 2023 consists of corporate income tax of Rp0.30 trillion and other taxes of Rp0.50 trillion. This decrease was caused by company tax debt in 2023 consisting of corporate income tax of Rp295.18 billion and other taxes of Rp496.65 billion.

Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Panjang

Jumlah bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,56 triliun, mengalami penurunan Rp0,03 triliun atau 5,69% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,59 triliun. Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang Perusahaan tahun 2023 terdiri dari pinjaman bank sebesar Rp0,07 triliun dan liabilitas sewa sebesar Rp0,49 triliun. Kenaikan pinjaman bank tersebut disebabkan atas pinjaman bank anak perusahaan PT BAP.

Current Maturities of Long-term Borrowings

The total current maturities of the Company's long-term borrowings in 2023 was recorded at Rp0.56 trillion, experiencing a decrese of Rp0.03 trillion or 5.69%, compared to 2022 of Rp0.59 trillion. The current maturities of the Company's long-term borrowings in 2023 consists of bank loans amounting to Rp0.07 trillion and lease liabilities amounting to Rp0.49 billion. The increase in bank loans was due to bank loans from the subsidiary of PT BAP.

Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang

Perusahaan melakukan penyisihan atas biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang berhubungan dengan reklamasi dan bagian biaya penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang dan kegiatan reklamasi yang berjalan dari tahun ke tahun. Adapun nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang pada liabilitas jangka pendek Perusahaan, di tahun 2023, adalah sebesar Rp0,33 triliun, mengalami peningkatan Rp0,07 triliun atau 27,69%, dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp0,26 triliun. Hal ini seiring dengan penambahan kewajiban atas penambahan pembukaan lahan untuk produksi batu bara.

Provision for Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure

The Company makes provision for environmental reclamation and mine closure costs related to reclamation and a portion of mine closure costs at the end of the mine period and reclamation activities that run from year to year. The value of provisions for environmental reclamation and mine closure in the Company's short-term liabilities, in 2023, is Rp0.33 trillion, experiencing an increase of Rp0.07 trillion or 27.69% compared to the previous year which was recorded at Rp0.26 trillion. This is caused by the supplemental obligations for additional land clearing for coal production.

Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatatkan jumlah bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pascakerja di tahun 2023, Rp0,23 triliun, mengalami penurunan Rp0,13 triliun atau 36,19%, dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp0,36 triliun.

Current Maturities of Post-Employment Benefit Liabilities

The amount of current maturities of post-employment benefit liabilities recorded by the Company in 2022, was Rp0.23 trillion, experiencing an decrease of Rp0.13 trillion or 36.19%, compared to 2022 which was recorded at Rp0.36 trillion.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah utang jangka pendek lainnya di tahun 2023, tercatat sebesar Rp0,27 triliun, mengalami peningkatan Rp0,04 triliun atau 16,00%, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,23 triliun.

Other Current Liabilities

Total other current liabilites in 2022 amounted to Rp0.27 trillion, experiencing an increase of Rp0.04 trillion or 16.00%, compared to 2022 of Rp0.23 trillion.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Long-Term Borrowings, Net of Current Maturities:				
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	743.665	770.524	(26.859)	-3,49
Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure	1.787.690	1.535.084	252.606	16,46
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefit Liabilities	4.625.311	3.333.429	1.291.882	38,76

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	77.226	102.344	(25.118)	-24,54
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**7.233.892**	**5.741.381**	**1.492.511**	**26,00**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp7,23 triliun, mengalami peningkatan Rp1,49 triliun atau 26,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,74 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan pascakerja.

The Company's total non-current liabilities in 2023 were recorded at Rp7.23 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp1.49 trillion or 26.00% compared to the previous year of Rp5.74 trillion. The increase in the amount of long-term liabilities is influenced by an increase in post-employment benefits liabilities.

Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Jumlah pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun, yang terdiri dari pinjaman bank dan liabilitas sewa, tercatat sebesar Rp0,74 triliun di tahun 2023, mengalami penurunan Rp0,03 triliun atau 3,49% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,77 triliun.

Long-Term Borrowings, Net of Current Maturities

The amount of long-term borrowings, net of current maturities consisting of bank loans and lease liabilities, was recorded at Rp0,74 trillion in 2023, experiencing an decrease of Rp0.03 trillion or 3.49% compared to the previous year which amounted to Rp0.77 trillion.

Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang

Di tahun 2023, nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang pada liabilitas jangka panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp1,79 triliun di tahun 2023, mengalami peningkatan Rp0,25 triliun atau 16,46% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,54 triliun. Hal ini seiring dengan penambahan kewajiban atas penambahan pembukaan lahan untuk produksi batu bara.

Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure

In 2023, the value of provisions for environmental reclamation and mine closure in the Company's long-term liabilities was recorded at Rp1.79 trillion in 2023, experiencing an increase/decrease of Rp0.25 trillion or 16.46% compared to the previous year of Rp1.54 trillion, caused by the supplemental obligations for additional land clearing for coal production.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja pada liabilitas jangka panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp4,63 triliun di tahun 2023, mengalami peningkatan Rp1,29 triliun atau 38,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,33 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan adanya tambahan pencadangan kewajiban manfaat pensiun pegawai.

Post-Employment Benefit Liabilities

Total post-employment benefit liabilities in the Company's long-term liabilities were recorded at Rp4.63 trillion in 2023, experiencing an increase of Rp1.29 trillion or 38.76% compared to the previous year of Rp3.33 trillion. This increase is due to additional allocation of employee pension benefit obligations.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Di tahun 2023, jumlah liabilitas pajak tangguhan Perusahaan tercatat sebesar sebesar Rp0,08 triliun di tahun 2023, mengalami penurunan sebesar Rp0,03 triliun atau 25,54% dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,10 triliun.

Profit for the Current Year

In 2023, the Company's total deferred tax liabilities were recorded at Rp0.08 trillion in 2023, with a decrease of Rp0.03 trillion or 25.54% from the previous year of Rp0.10 trillion.

Ekuitas

Equity

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal Saham Share Capital	1.152.066	1.152.066	-	0,00
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	594.303	594.303	-	0,00

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Saham Treasuri Treasury Stock	(43.257)	(43.257)	-	0,00
Cadangan Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain Reserve for Changes in Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	19.194	5.404	13.790	255,18
Selisih Penjabaran Kurs Laporan Keuangan Entitas Anak dan Ventura Bersama Currency Differences from Translation of Financial Statements of Subsidiaries and Joint Ventures	693.100	704.735	(11.635)	-1,65
Saldo Laba Retained Earnings				
Dicadangkan Appropiated	13.730.400	13.730.400	-	0,00
Belum Dicadangkan Unappropriated	5.288.732	12.561.417	(7.272.685)	-57,90
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	21.434.538	28.705.068	(7.270.530)	-25,33
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	128.658	210.978	(82.320)	-39,02
Jumlah Ekuitas Total Equity	21.563.196	28.916.046	(7.352.850)	-25,43

Jumlah ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp21,56 triliun, mengalami penurunan Rp7,35 triliun atau 25,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28,92 triliun. Penurunan ekuitas tersebut disebabkan penurunan saldo laba seiring dengan pembayaran dividen atas tahun buku 2022.

Sedangkan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk di tahun 2023 tercatat sebesar Rp21,43 triliun, mengalami penurunan Rp7,27 triliun atau 25,33% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp28,71 triliun. Sementara ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di tahun 2023 adalah sebesar Rp0,13 triliun, mengalami penurunan Rp0,08 triliun atau 39,02% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,21 triliun.

The Company's total equity as of December 31, 2023 was recorded at Rp21.56 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp7.35 trillion or 25.43% compared to the previous year of Rp28.92 trillion. The increase/decrease in equity is due to the decrease is due to a decrease in retained earnings in line with dividend payments for the 2022 financial year.

Meanwhile, the amount of Equity Attributable to Owners of the Parent Entity in 2023 was recorded at Rp21.43 trillion, experiencing an decrease of Rp7.27 trillion or 25.33% compared to the previous year, which amounted to Rp28.71 trillion. Meanwhile, equity attributable to non-controlling interests in 2023 is Rp0.13 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp0.08 trillion or 39.02% compared to the previous year which amounted to Rp0.21 trillion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Pendapatan Revenue	38.488.867	42.648.590	(4.159.723)	-9,75
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(29.331.562)	(24.682.304)	(4.649.258)	18,84
Laba Bruto Gross Profit	9.157.305	17.966.286	(8.808.981)	-49,03
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.936.635)	(2.390.336)	453.701	-18,98
Beban Penjualan dan Pemasaran Selling and Marketing Expenses	(656.362)	(953.120)	296.758	-31,14
Penghasilan Lainnya, Neto Other Income, Net	638.401	522.591	115.810	22,16
Laba Usaha Operating Profit	7.202.709	15.145.421	(7.942.712)	-52,44

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Penghasilan Keuangan Financial Income	584.339	428.033	156.306	36,52
Biaya Keuangan Financial Costs	(204.038)	(200.203)	(3.835)	1,92
Bagian atas Keuntungan Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures	571.303	829.063	(257.760)	-31,09
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	8.154.313	16.202.314	(8.048.001)	-49,67
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.861.792)	(3.422.887)	1.561.095	-45,61
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	6.292.521	12.779.427	(6.486.906)	-50,76
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income (Loss) for the Year	(808.804)	(13.061)	(795.743)	-6.092,51
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	5.483.717	12.766.366	(7.282.649)	-57,05
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Profit (Loss) for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	6.105.856	12.567.582	(6.461.726)	-51,42
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	186.665	211.845	(25.180)	-11,89
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	5.297.052	12.554.521	(7.257.469)	-57,81
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	186.665	211.845	(25.180)	-11,89
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) Earnings per Share - Basic and Diluted (Full Amount)	532	1.094	(562)	-51,37

Pendapatan

Revenue

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Segmen Batu Bara Coal Segment	37.972.033	42.099.316	(4.127.283)	-9,80
Segmen Lainnya Other Segment	516.834	549.274	(32.440)	-5,91
Jumlah Pendapatan Total Revenue	38.488.867	42.648.590	(4.159.723)	-9,75

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp38,49 triliun, mengalami penurunan Rp4,16 triliun atau 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp42,65 triliun. Penurunan pendapatan tersebut seiring dengan melemahnya harga batu bara dunia menjadi faktor utama yang mendorong penurunan kinerja pendapatan di Tahun 2023.

Pendapatan Perusahaan tahun 2023 utamanya masih berasal dari segmen batubara yang tercatat sebesar Rp37,97 triliun atau setara dengan 98,66% dari total pendapatan Perusahaan. Sedangkan segmen lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp0,52 triliun atau setara dengan 1,34% dari total pendapatan.

Throughout 2023, the Company recorded revenue of Rp38.49 trillion, experiencing a decrease of Rp4.16 trillion or 9.75% compared to the previous year which amounted to Rp42.65 trillion. This decrease in revenue along with weakening world coal prices is the main factor driving the decline in revenue performance in 2023.

The Company's revenue in 2023 mostly came from the coal segment which was recorded at Rp37.97 trillion or the equivalent of 98.66% of the Company's total revenue. Meanwhile, the other segment contributed Rp0.52 trillion or the equivalent of 1.34% of total revenue.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Biaya Produksi: Production Costs:				
Jasa Penambangan Mining Service	11.105.871	9.579.677	1.526.194	15,93
Jasa Angkutan Kereta Api Coal Railway Service	7.953.583	6.694.574	1.259.009	18,81
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	1.495.025	1.885.105	(390.080)	-20,69
Penyusutan Depreciation	1.412.333	1.163.819	248.514	21,35
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan Salary, Wages, and Employee Benefits	1.025.230	1.231.217	(205.987)	-16,73
Perlengkapan dan Suku Cadang Spare Parts and Materials	805.184	711.844	93.340	13,11
Sewa Alat Berat, Kendaraan dan Peralatan Rental of Heavy Equipment, Vehicles and Equipment	754.720	863.748	(109.028)	-12,62
Jasa Pihak Ketiga Third Party Services	492.674	488.959	3.715	0,76
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Taxes	461.063	215.057	246.006	114,39
Amortisasi Amortization	105.224	102.594	2.630	2,56
Listrik Electricity	87.301	74.035	13.266	17,92
Lainnya Others	574.826	487.222	87.604	17,98
Subjumlah Sub-total	26.273.034	23.497.851	2.775.183	11,81
Royalti ke Pemerintah Royalties to the Government	4.449.820	3.809.031	640.789	16,82
Pembelian Batu bara Coal Purchase	260.087	-	260.087	-
Persediaan Batu Bara dan Minyak Kelapa Sawit: Coal and Palm Oil Inventories:				
Awal Tahun Beginning of the Year	3.645.900	1.021.322	2.624.578	256,98
Akhir Tahun End of the Year	(5.297.279)	(3.645.900)	(1.651.379)	45,29
Jumlah Total	29.331.562	24.682.304	4.649.258	18,84

Beban pokok pendapatan Perusahaan ditahun 2023 tercatat sebesar Rp29,33 triliun, meningkat Rp4,65 triliun atau 18,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan beban jasa penambangan yang pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp11,11 triliun dan beban jasa angkutan kereta api sebesar Rp7,95 triliun, seiring dengan peningkatan kinerja volume produksi Batu bara dan volume angkutan kereta batu bara.

The Company's cost of revenue in 2023 was recorded at Rp29.33 trillion, an increase of Rp4.65 trillion or 18.84% compared to the previous year of Rp24.68 trillion. This increase was mainly caused by. This increase is due to mining services expenses in 2023 recorded at Rp11.11 trillion and railway transportation services expenses of Rp7.95 trillion, in line with the increase in the performance of coal production volumes and coal train transportation volumes.

Laba Bruto

Seiring dengan menurunnya pendapatan dan meningkatnya beban pokok pendapatan, laba bruto Perusahaan tahun 2023 tercatat mengalami koreksi sebesar 49,03% menjadi Rp9,16 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp17,97 triliun.

Gross Profit

In line with the decline in revenue and increase in cost of revenue, the Company's gross profit in 2023 was recorded to experience a correction of 49.03% to Rp9.16 trillion from the previous year of Rp17.97 trillion.

Beban Umum dan Administrasi

General and Administrative Expenses

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan Salaries, Wages and Employee Benefits	836.734	1.291.564	(454.830)	-35,22
Jasa Pihak Ketiga Third Party Services	321.153	259.093	62.060	23,95
Sumbangan Donation	191.093	277.261	(86.168)	-31,08
Penyusutan Depretiation	119.753	89.876	29.877	33,24
Perjalanan Dinas Business Travel	102.595	89.592	13.003	14,51
Beban Kantor Office Expenses	87.756	79.583	8.173	10,27
Sewa Kendaraan dan Peralatan Rental of Vehicles and Equipment	39.805	41.863	(2.058)	-4,92
Retribusi Retribution	26.200	19.260	6.940	36,03
Perlengkapan dan Suku Cadang Spare Parts and Materials	21.115	18.442	2.673	14,49
Pelatihan Training	20.298	17.643	2.655	15,05
Lainnya Others	170.133	206.159	(36.026)	-17,47
Jumlah Total	1.936.635	2.390.336	(453.701)	-18,98

Jumlah beban umum dan administrasi di tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,94 triliun, mengalami penurunan Rp0,45 triliun atau 18,98% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,39 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya gaji, upah, dan imbalan kerja.

Beban umum dan administrasi utamanya berupa beban gaji, upah, dan imbalan karyawan yang pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,84 triliun, turun 35,22% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,29 triliun.

Total general and administrative expenses in 2023 were recorded at Rp1.94 trillion, experiencing an decrease of Rp0.45 trillion or 18.98% compared to the previous year of Rp2.39 trillion. This was caused by a decrease in the cost of salaries, wages, and employee benefits.

General and administrative expenses are mainly in the form of salaries, wages, and employee benefits which in 2023 were recorded at Rp0.84 trillion, decrease 35.22% from the previous year of Rp1.29 trillion.

Beban Penjualan dan Pemasaran

Sales and Marketing Expenses

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Gaji, Upah dan Imbalan Karyawan Salaries, Wages and Employee Benefits	231.731	305.659	(73.928)	-24,19
Penyusutan Depreciation	191.998	176.276	15.722	8,92
Jasa Pihak Ketiga Third Party Services	106.996	102.051	4.945	4,85
Perlengkapan dan Suku Cadang Spare Parts and Materials	68.390	59.396	8.994	15,14
Jasa Angkutan Transportation	66.581	47.567	19.014	39,97
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	36.059	33.752	2.307	6,84
Listrik Electricity	18.755	13.224	5.531	41,83
Biaya Domestic Market Obligation (“DMO”) Domestic Market Obligation (“DMO”) Expense	(135.769)	130.822	(266.591)	-203,78

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Lainnya Others	71.621	84.373	(12.752)	-15,11
Jumlah Total	656.362	953.120	(296.758)	-31,14

Beban penjualan dan pemasaran Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,66 triliun, turun Rp0,30 triliun atau 31,14% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,95 triliun. Hal ini lebih dikarenakan adanya pemulihan biaya *Domestic Market Obligation* (DMO) serta penurunan biaya gaji upah, dan imbalan kerja.

The Company's total selling and marketing expenses in 2023 were recorded at Rp0,66 trillion, a decrease of Rp0,30 trillion or 31.14% compared to the previous year of Rp0.95 trillion. This was caused by to the recovery of Domestic Market Obligation (DMO) costs as well as a decrease in the cost of salaries, wages, and employee benefits.

Penghasilan Lainnya, Neto

Jumlah penghasilan lainnya neto tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,64 triliun, mengalami peningkatan Rp0,12 triliun atau 22,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,52 triliun. Peningkatan penghasilan lainnya neto utamanya disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan kompensasi royalti.

Other Income, Net

The Company's total other net income in 2023 was recorded at Rp0.64 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp0.12 trillion or 22.16% compared to the previous year of Rp0.52 trillion. The increase/decrease in net other income was caused by an increase in royalty compensation income.

Laba Usaha

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan laba usaha sebesar Rp7,20 triliun, mengalami penurunan Rp7,94 triliun atau 52,44% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15,15 triliun.

Operating Profit

In 2023, the Company posted an operating profit of Rp7.20 trillion, experiencing a decrease of Rp7.94 trillion or 52,44% compared to the previous year of Rp15.15 trillion.

Penghasilan Keuangan

Financial Income

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Penghasilan Bunga dari Penempatan Kas di Bank dan Deposito Berjangka Interest Income from Placement of Cash in Banks and Time Deposits	531.161	402.231	128.930	32,05
Penghasilan Bunga dari Penempatan Obligasi Interest Income from Placement of Bond	53.178	25.802	27.376	106,10
Jumlah Total	584.339	428.033	156.306	36,52

Jumlah penghasilan keuangan Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,58 triliun, mengalami peningkatan Rp0,16 triliun atau 36,52% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,43 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga acuan.

The Company's total financial income in 2023 was recorded at Rp0.58 trillion, experiencing an decrease of Rp0.16 trillion or 36.52% compared to the previous year of Rp0.43 trillion. This was caused by an increase in the benchmark interest rate.

Biaya Keuangan

Financial Income

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Biaya Bunga dari Liabilitas Sewa Interest Expenses from Lease Liabilities	115.938	140.101	(24.163)	-17,25
Beban Bunga dari Pinjaman Bank Interest Expenses from Bank Borrowings	26	361	(335)	-92,80
Beban Akresi dari Provisi Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang Accretion Expenses from Provision for Environmental Reclamation and Mine Closure	88.074	59.741	28.333	47,43
Jumlah Total	204.038	200.203	3.835	1,92

Tahun 2023 Perusahaan mencatat biaya keuangan sebesar Rp204,04 miliar, meningkat Rp3,84 miliar atau 1,92%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp200,20 miliar.

In 2023 the Company recorded financial costs of Rp204.04 billion, an increaseof Rp3.84 billion or 1.92%, compared to the previous year of Rp200,20 billion.

Bagian atas Keuntungan Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp0,57 triliun, mengalami penurunan Rp0,26 triliun atau 31,09% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,83 triliun. Hal ini disebabkan perusahaan membukukan bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp571,30 miliar di tahun 2023, yang diperoleh dari investasi pada ventura bersama PT BPI dan PT HBAP.

Share in Net Profit of Associates and Joint Ventures

In 2023, the Company recorded a share of the net profits of associates and joint ventures amounting to Rp0.57 trillion, experiencing an increase/decrease of Rp0.26 trillion or 31.09% compared to the previous year of Rp0.83 trillion, mainly caused by the Company's record in a share a share of the net profits of associate entities and joint ventures of IRp571.30 billion in 2023, which were obtained from investments in joint ventures PT BPI and PT HBAP.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan yang dibukukan Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,15 triliun, turun Rp8,05 triliun atau 49,67%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,20 triliun.

Profit Before Income Tax

Profit before income tax recorded by the Company in 2023 was recorded at Rp8.15 trillion, an increase/decrease of Rp8.05 trillion or 49.67%, compared to the previous year of Rp16.20 trillion.

Beban Pajak Penghasilan

Sejalan dengan menurunnya pendapat Perusahaan, jumlah beban pajak penghasilan tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi Rp1,86 triliun atau turun 45,61% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,42 triliun. Hal ini seiring dengan pencapaian laba perusahaan.

Income Tax Expense

In line with the decline in the Company's income, the total income tax expense in 2023 also decreased to Rp1.86 trillion or down 45.61% compared to the previous year of Rp3.42 trillion. This is due to the company's profit achievement.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan yang dibukukan Perusahaan tahun 2023 mencapai Rp6,29 triliun, turun Rp6,49 triliun atau 50,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,78 triliun.

Current Year Profit

The profit for the current year recorded by the Company in 2023 reached Rp6.29 trillion, a decrease of Rp6.49 trillion or 50.76% compared to the previous year of Rp12.78 trillion.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan kerugian komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp808,80 miliar, naik Rp795,74 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp13,06 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama.

Other Comprehensive Income (Loss) for the Year

In 2023, the Company recorded another comprehensive loss for the year of Rp808.80 billion, an increase of Rp795,74 billion compared to the previous year of Rp13.06 billion. This was influenced by a decrease in the difference in exchange rate translation of the financial statements of subsidiaries and joint ventures.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Berdasarkan akumulasi dari laba tahun berjalan dan kerugian komprehensif lain tahun berjalan, Perusahaan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp5,48 triliun, mengalami penurunan Rp7,28 triliun, atau 57,05% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,77 triliun.

Total Other Comprehensive Income for the Year

Based on the accumulation of current year's profit and current year's other comprehensive loss, the Company recorded current year's other comprehensive income of Rp5.48 trillion, experiencing a decrease of Rp7.28 trillion, or 57,05% compared to the previous year which amounted to Rp12.77 trillion.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Di tahun 2023, jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp6,11 triliun, mengalami penurunan Rp6,46 triliun atau 51,42% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,57 triliun. Adapun jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di tahun

Profit (Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non Controlling Interests

In 2023, the total profit for the year attributable to the owners of the parent entity was recorded at Rp6.11 trillion, experiencing a decrease of Rp6.46 trillion or 51.42% compared to the previous year which amounted to Rp12.57 trillion. The amount of profit for the current year that can be attributed to non-controlling interests in 2023 is Rp0.19

2023, adalah sebesar Rp0,19 triliun, mengalami penurunan Rp0,03 triliun atau 11,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,21 triliun.

trillion, a decrease of Rp0.03 trillion or 11.89% compared to the previous year which amounted to Rp0.21 trillion.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ditahun 2023, tercatat sebesar Rp5,30 triliun, mengalami penurunan Rp7,26 triliun atau 57,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,55 triliun. Sementara jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali di tahun 2023, adalah sebesar Rp0,19 triliun, mengalami penurunan Rp0,03 triliun atau 11,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,21 triliun.

Total Other Comprehensive Income for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non Controlling Interests

The amount of other comprehensive income for the year that can be attributed to the owners of the parent entity in 2023 was recorded at Rp5.30 trillion, experiencing a decrease of Rp7.26 trillion or 57.81% compared to the previous year which amounted to Rp12.55 trillion. Meanwhile, the amount of other comprehensive income for the year attributed to non-controlling interests in 2023 is Rp0.19 trillion, a decrease of Rp0.03 trillion or 11.89% compared to the previous year which amounted to Rp0.21 trillion.

Laba per Saham Dasar dan Dilusian

Earnings per Share - Basic and Diluted

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-juta) Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity (Rpmillion)	6.105.856	12.567.582	(6.461.726)	-51,42
Rata-Rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang Beredar (Lembar) Weighted Average Number of Ordinary Shares Outstanding (Number of Shares)	11.487.209.350	11.487.209.350	-	0,00
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) Basic and Diluted Earnings (Loss) per Share (Full Amount)	532	1.094	(562)	-51,37

Sejalan dengan turunnya laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2023, jumlah laba per saham dasar dan dilusian juga mengalami penurunan menjadi Rp532 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.094.

In line with the decline in net profit attributable to owners of the parent entity in 2023, the amount of basic and diluted earnings per share also decreased to Rp532 from the previous year of Rp1,094.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	3.104.707	12.527.439	(9.422.732)	-75,22
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	7.248.649	(1.294.274)	8.542.923	-660,06
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(13.234.918)	(8.668.614)	(4.566.304)	52,68
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(2.881.562)	2.564.551	(5.446.113)	-212,36
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	7.030.343	4.394.195	2.636.148	59,99
Efek Perubahan Kurs pada Kas dan Setara Kas Effect of Changes in Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents	(9.914)	71.597	(81.511)	-113,85
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	4.138.867	7.030.343	(2.891.476)	-41,13

Jumlah kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,14 triliun, turun dibandingkan posisi awal tahun sebesar Rp7,03 triliun.

The Company's total cash and equivalents at the end of 2023 was recorded at Rp4.14 trillion, a decrease compared to the position at the beginning of the year of Rp7.03 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Penerimaan dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	38.297.048	42.635.578	(4.338.530)	-10,18
Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan Cash Paid to Suppliers and Employees	(28.936.511)	(22.586.762)	(6.349.749)	28,11
Pembayaran Royalti Payments of Royalties	(4.342.928)	(3.861.246)	(481.682)	12,47
Penerimaan Pengembalian Pajak Cash Receipts from Tax Restitution	134.914	14.874	120.040	807,05
Pembayaran Pajak Penghasilan Payments for Income Taxes	(2.521.878)	(3.957.385)	1.435.507	-36,27
Penerimaan Bunga Receipts of Interest Income	590.051	422.842	167.209	39,54
Pembayaran Bunga Payments of Interest	(115.989)	(140.462)	24.473	-17,42
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow Provided by Operating Activities	3.104.707	12.527.439	(9.422.732)	-75,22

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,10 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,53 triliun.

Arus kas masuk utamanya berasal dari penerimaan dari pelanggan, yaitu sebesar Rp38,30 triliun, turun dari tahun 2022 seiring dengan penurunan pendapatan usaha perusahaan. Sementara itu, arus kas keluar utamanya digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, yaitu sebesar Rp28,94 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan pembayaran jasa penambangan, angkutan kereta api, serta biaya royalti yang mengalami kenaikan tarif.

Net cash flow obtained from operational activities in 2023 was recorded at Rp3.10 trillion, experiencing a decrease compared to the previous year which amounted to Rp12.53 trillion.

The main cash flow comes from receipts from customers, which is Rp38.30 trillion, down from 2022 in line with the decline in the company's operating income. Meanwhile, the cash outflow is mainly used for payments to suppliers, namely Rp28.94 trillion, an increase from the previous year due to an increase in payments mining services, rail transportation, as well as royalty fees which have experienced an increase in rates.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Penambahan Aset Tetap dan Tanaman Produktif Addition of fixed assets and bearer plants	(937.246)	(780.546)	(156.700)	20,08
Penempatan Deposito Berjangka Placement of Time Deposits	(1.747.459)	(21.351.993)	19.604.534	-91,82
Pencairan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	10.134.836	21.433.783	(11.298.947)	-52,72
Penambahan Properti Penambangan Addition of Mining Properties	-	(108.590)	108.590	-100,00
Penempatan Dana Reklamasi dan Penutupan Tambang Placement of Reclamation and Mine Closure Fund	(72.311)	(15.678)	(56.633)	361,23
Penambahan pada Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Pendapatan Komprehensif Lain Addition of financial assets at fair value through other comprehensive income	(80.000)	(471.250)	391.250	-83,02
Penerimaan dari Pengembalian Investasi pada Entitas Asosiasi Cash Receipts from Refund of Investment in Associates	198.665	-	198.665	-
Penambahan Investasi pada Ventura Bersama Addition of Investments in Joint Ventures	(247.836)	-	(247.836)	-
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flow Used in Investing Activities	7.248.649	(1.294.274)	8.542.923	-660,06

Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp7,25 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,29 triliun.

Arus kas masuk utamanya berasal dari pencairan deposito, yaitu sebesar Rp10,13 triliun untuk pembayaran dividen atas tahun buku 2022, sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk penempatan deposito, yaitu sebesar Rp1,75 triliun.

Net cash flow obtained from/used for investment activities in 2023 was recorded at Rp7.25 trillion, experiencing an increase compared to the previous year which amounted to Rp1.29 trillion.

The main cash inflow comes from the disbursement of deposits, namely Rp10.13 trillion for dividend payments for the 2022 fiscal year, while the main cash outflow is used for deposit placement, namely Rp1.75 trillion.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham Induk Payment of Dividends to Owners of the Parent Entity	(12.567.582)	(7.909.118)	(4.658.464)	58,90
Pembayaran Dividen kepada Kepentingan Non-Pengendali Payment of Dividends to Non-Controling Interests	(268.985)	(194.926)	(74.059)	37,99
Pembayaran Pinjaman Bank Repayment of Bank Borrowings	(2.240)	(3.700)	1.460	-39,46
Penerimaan Dividen dari Entitas Pengendalian Bersama Proceeds of Dividends from Non-Controling Interests	9.240	-	9.240	-
Penerimaan atas Pinjaman Bank Repayments of Bank Borrowings	68.000	-	68.000	-
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(473.351)	(560.870)	87.519	-15,60
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used for Financing Activities	(13.234.918)	(8.668.614)	(4.566.304)	52,68

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp13,23 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,67 triliun.

Arus kas masuk utamanya berasal dari penerimaan atas pinjaman bank, yaitu sebesar Rp0,07 triliun, sedangkan arus kas keluar utamanya digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham induk, yaitu sebesar Rp12,57 triliun.

Net cash flow used for financing activities in 2023 was recorded at Rp13.23 trillion, experiencing an increase compared to the previous year which amounted to Rp8.67 trillion.

The main cash inflow comes from the receipt of bank loans which is amounted to Rp0.07 trillion, while the cash outflow is mainly used for dividend payments to parent shareholders, which is Rp12.57 trillion.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Rate



Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang

Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditur dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Untuk itu, Perusahaan melakukan pengelolaan likuiditas dan melakukan pemantauan terhadap waktu jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Dimana rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek, sementara rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ability to Pay Debts

The Company is committed to fulfilling creditors' rights by making loan principal and interest payments on time. For this reason, the Company manages liquidity and monitors the due date for principal and interest payments on loans.

The Company's ability to fulfill all obligations, both short-term and long-term obligations, is measured through liquidity ratios and solvency ratios. Where the liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay off short-term obligations and the solvency ratio is used to measure the Company's ability to fulfill all its obligations, both short-term and long-term obligations.

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang Jangka Pendek

Dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dan rasio kas (*cash ratio*). Dimana rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar Perusahaan dengan liabilitas jangka pendek Perusahaan. Sementara itu, rasio kas dihitung berdasarkan perbandingan antara kas dan setara kas Perusahaan dengan liabilitas jangka pendek Perusahaan.

Adapun kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek yang diukur berdasarkan rasio likuiditas dan perbandingannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

Company's Ability to Pay Short-term Debt

In meeting short-term obligations that are due, the Company uses a liquidity ratio which is measured using the current ratio and cash ratio. The current ratio is a comparison between the Company's current assets and the Company's short-term liabilities. Meanwhile, the cash ratio is calculated based on a comparison between the Company's cash and cash equivalents and the Company's short-term liabilities.

The Company's ability to pay short-term debt, which is measured based on the liquidity ratio and the comparison in the last 2 (two) years, is as described below:

Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Cash and Cash Equivalents (Rp-million)	4.138.867	7.030.343	(2.891.476)	-41,13
Aset Lancar (Rp-juta) Current Assets (Rp-million)	15.148.356	24.432.148	(9.283.792)	-38,00
Liabilitas Jangka Pendek (Rp-juta) Current Liabilities (Rp-million)	9.968.101	10.701.780	(733.679)	-6,86
Rasio Likuiditas Liqudity Ratio				
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	151,97	228,30	(76,33)	-33,43
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	41,52	65,69	(24,17)	-36,80

Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar Perusahaan di tahun 2023, tercatat sebesar 151,97%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 228,30%. Sementara rasio kas Perusahaan di tahun 2023, tercatat sebesar 41,52%, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 65,69%. Hal ini menunjukkan Perusahaan masih memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Based on the table, the Company's current ratio in 2023 was recorded at 151.97%, experiencing a decrease compared to the previous year of 228.30%. Meanwhile, the Company's cash ratio in 2023 was recorded at 41.52%, experiencing a decrease compared to the previous year of 65.69%. This shows that the Company still has the ability to meet its short-term obligations.

Kemampuan Perusahaan dalam Membayar Utang Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang

PTBA menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, yang akan jatuh tempo. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio liabilitas terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER), serta rasio liabilitas terhadap aset atau *Debt to Asset Ratio* (DAR).

Adapun kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang diukur berdasarkan rasio solvabilitas dan perbandingannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

Company's Ability to Pay Short-term and Long-term Debt

PTBA uses the solvency ratio to measure the Company's ability to meet its short-term and long-term obligations, which are due. The solvency ratio consists of the liabilities to equity ratio or Debt to Equity Ratio (DER), as well as the liabilities to assets ratio or Debt to Asset Ratio (DAR).

The Company's ability to pay short-term debt and long-term debt, which is measured based on the solvency ratio and the comparison in the last 2 (two) years, is as described below:

Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)	38.765.189	45.359.207	(6.594.018)	-14,54
Jumlah Liabilitas (Rp-juta) Total Liabilities (Rp-million)	17.201.993	16.443.161	758.832	4,61
Jumlah Ekuitas (Rp-juta) Total Equity (Rp-million)	21.563.196	28.916.046	(7.352.850)	-25,43
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
DER (%)	79,77	56,87	22,90	40,28
DAR (%)	44,37	36,25	8,12	22,41

Berdasarkan tabel di atas, rasio liabilitas terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) di tahun 2023 tercatat sebesar 79,77%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 56,87%. Sementara rasio liabilitas terhadap aset atau *Debt to Asset Ratio* (DAR) di tahun 2023, tercatat sebesar 44,37%, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 36,25%. Perubahan yang terjadi terhadap rasio solvabilitas Perusahaan di tahun 2023 dibanding tahun 2022 tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang sudah semakin baik.

Based on the table, the liability to equity ratio or Debt to Equity Ratio (DER) in 2023 was recorded at 79.77%, experiencing an increase compared to the previous year of 56.87%. Meanwhile, the liability to asset ratio or Debt to Asset Ratio (DAR) in 2023 was recorded at 44.37%, experiencing an increase compared to the previous year of 36.25%. The changes that occurred in the Company's solvency ratio in 2023 compared to 2022, indicate that the Company's ability to fulfill long-term obligations has improved.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya, yang dapat diukur berdasarkan penghitungan periode penagihan (*collection period*). Periode penagihan ini dipengaruhi oleh jumlah piutang usaha Perusahaan dan jumlah pendapatan Perusahaan. Pada prinsipnya, Perusahaan senantiasa berupaya untuk terus menekan jumlah piutang usaha dan menjaga tingkat kolektabilitas piutangnya.

Berikut tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan yang diukur berdasarkan *collection period* tahun 2023 dibanding tahun 2022, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

Receivables Collectability Rate

The rate of collectability of receivables is the Company's ability to collect its receivables, which can be measured based on calculating the collection period. This collection period is influenced by the amount of the Company's trade receivables and the amount of the Company's revenue. In principle, the Company always tries to reduce the amount of trade receivables and maintain the level of collectability of its receivables.

The following is the collectability level of the Company's receivables as measured based on the collection period in 2023 compared to 2022:

Tingkat Kolektibilitas Piutang / Receivables Collectability Rate

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Piutang Usaha, Net (Rp-juta) Trade Receivables, Net (Rp-million)	3.985.563	3.742.590	242.973	6,49
Pendapatan (Rp-juta) Income (Rp-million)	38.488.867	42.648.590	(4.159.723)	-9,75
Periode Pengumpulan Piutang (hari) Receivables Collection Period (days)	38	32	6	18,74

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kolektabilitas piutang di tahun 2023 adalah 38 hari, berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni 32 hari. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan berupaya untuk terus menekan jumlah piutang usaha. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga jumlah hari periode penagihan. Adapun piutang usaha Perusahaan berdasarkan umur piutangnya dapat dilihat sebagaimana terlampir berikut ini:

Based on the table above, the collectability level of receivables in 2023 is 38 days, different from the previous year, which was 32 days. This shows that the Company is trying to reduce the amount of trade receivables. This is done by maintaining the number of collection period days. The Company's trade receivables based on the maturity of the receivables can be seen in the table below:

Umur Piutang Usaha Perusahaan

Receivables Aging

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Lancar Current	3.252.026	2.795.911	456.115	16,31
Jatuh Tempo 1-30 Hari Maturity of 1-30 Days	353.581	732.593	(379.012)	-51,74
Jatuh Tempo 31-90 Hari Maturity of 31-90 Days	132.783	135.709	(2.926)	-2,16
Jatuh Tempo Lebih dari 90 Hari Maturity of More Than 90 Days	398.951	176.015	222.936	126,66
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(151.778)	(97.638)	(54.140)	55,45
Jumlah Piutang Usaha - Neto Total Trade Receivables - Net	3.985.563	3.742.590	242.973	6,49

Berdasarkan tabel di atas, jumlah piutang usaha lancar di tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,25 triliun, mengalami peningkatan Rp0,46 triliun atau 16,31% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,80 triliun. Sementara itu, piutang usaha dengan jatuh tempo 1-30 hari tercatat sebesar Rp0,35 triliun di tahun 2023, mengalami penurunan Rp0,38 triliun atau 51,74%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,73 triliun. Piutang usaha dengan jatuh tempo 31-90 hari tercatat sebesar Rp0,13 triliun di tahun 2023, mengalami penurunan Rp0,01 triliun atau 2,16%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,14 triliun. Adapun piutang usaha dengan jatuh tempo lebih dari 90 hari tercatat sebesar Rp0,40 triliun di tahun 2023, mengalami peningkatan Rp0,22 triliun atau 126,66%, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp0,18 triliun. Hal ini menunjukkan sebagian besar piutang usaha Perusahaan tahun 2023 masuk kategori lancar atau di bawah 90 hari, sedangkan jumlah piutang usaha yang mencapai lebih dari 90 hari adalah sebesar Rp398,95 miliar.

Penyisihan penurunan nilai piutang usaha di tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,15 triliun dan Rp0,10 triliun, dimana Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan yang dibentuk cukup memadai untuk menutupi penurunan nilai dari piutang usaha Perusahaan.

Based on the table above, the amount of current trade receivables in 2023 was recorded at Rp3.25 trillion, experiencing an increase of Rp0.46 trillion or 16.31%, compared to the previous year which amounted to Rp2.80 trillion. Meanwhile, trade receivables with a maturity of 1-30 days were recorded at Rp0.35 trillion in 2023, experiencing an increase/decrease of Rp0.38 trillion or 51.74%, compared to the previous year which amounted to Rp0.73 trillion. Trade receivables with a maturity of 31-90 days were recorded at Rp0.13 trillion in 2023, experiencing a decrease of Rp0.01 trillion or 2.16%, compared to the previous year which amounted to Rp0.14 trillion. Meanwhile, trade receivables with a maturity of more than 90 days were recorded at Rp0.40 trillion in 2023, experiencing an increase of Rp0.22 trillion or 126.66%, compared to the previous year which amounted to Rp0.18 trillion. This indicates that the Company's trade receivables in 2023 included in current category or be under 90 days, while the total amount of trade receivables that were more than 90 days old was Rp398.95 billion.

The provision for impairment of trade receivables in 2023 and 2022 is Rp0.15 trillion and Rp0.10 trillion, where Management believes that the reserves formed are sufficient to cover the decline in value of the Company's trade receivables.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Rincian Struktur Modal

Dalam menjalankan usahanya, PTBA telah menetapkan kebijakan struktur modal yang merupakan perimbangan antara liabilitas dan ekuitas, di mana kombinasi struktur modal yang optimal dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Adapun rincian struktur modal Perusahaan pada tahun 2022 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Capital Structure Details

In carrying out its business, PTBA has established a capital structure policy which is a balance between liabilities and equity, in which an optimal combination of capital structure can maximize the value of the Company. Details of the Company's capital structure in 2022 and 2023 are presented as follows:

Rincian Struktur Modal Perusahaan dan Perubahannya

Details of the Company's Capital Structure and the Changes

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan Increase	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	9.968.101	10.701.780	(733.679)	-6,86
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	7.233.892	5.741.381	1.492.511	26,00
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	17.201.993	16.443.161	758.832	4,61
Jumlah Ekuitas Total Equity	21.563.196	28.916.046	(7.352.850)	-25,43
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	38.765.189	45.359.207	(6.594.018)	-14,54

Di tahun 2023, terdapat perubahan pada struktur modal Perusahaan, dimana komposisi liabilitas jangka pendek terhadap total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar 25,71%, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 23,59%. Sementara komposisi liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas dan ekuitas di tahun 2023 adalah sebesar 18,66%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 12,66%. Adapun komposisi ekuitas terhadap total Liabilitas dan ekuitas di tahun 2023 adalah sebesar 55,63%, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 63,57%.

In 2023, there were changes to the Company's capital structure, where the composition of short-term liabilities to total liabilities and equity is 25.71%, experiencing an a decrease compared to 2022 which was 23.59%. Meanwhile, the composition of long-term liabilities to total liabilities and equity in 2023 is 18.66%, experiencing an increase compared to 2022 which was 12.66%. The composition of equity to total liabilities and equity in 2023 is 55.63%, experiencing a decrease compared to 2022 which was 63.57%.

Berdasarkan komposisi-komposisi yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa Perusahaan memiliki struktur modal yang cukup baik, dimana ekuitas Perusahaan memiliki nilai yang lebih besar dibanding liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

Based on the compositions described above, the Company has a fairly good capital structure, where the Company's equity has a greater value than the Company's short-term and long-term liabilities.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan manajemen terhadap struktur modal diterapkan guna melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga dapat memberikan imbal hasil dan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Kebijakan Struktur Modal dan Dasar Pemilihan

Perusahaan dan kelompok usahanya dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi liabilitas, yang bertujuan untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya.

Selain itu, Perusahaan dan kelompok usahanya senantiasa memantau modal berdasarkan rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang dengan total modal. Sementara utang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas sebagaimana jumlah dalam posisi keuangan konsolidasian. Perusahaan menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar memaksimalkan nilai Perusahaan.

Adapun kebijakan struktur permodalan yang ditetapkan oleh PTBA berdasarkan Pedoman Keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan target struktur modal yang optimal agar dapat digunakan sebagai pedoman pemenuhan kebutuhan dana di masa yang akan datang serta meningkatkan nilai Perusahaan;
2. Mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai Perusahaan;
3. Mengevaluasi antara *financial leverage*, nilai Perusahaan, dan biaya modal;
4. Mengoptimalkan struktur modal Perusahaan, yaitu suatu kombinasi utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perusahaan;
5. Melakukan analisis sensitivitas menelusuri bagaimana Perusahaan dapat menampilkan variasi sensitif atas perubahan asumsi-asumsi inti yang digunakan.

Basis of Management Policy on Capital Structure

Management policy on capital structure is applied to protect the Company's ability to maintain business continuity, so as to provide returns and benefits for shareholders and other stakeholders. In addition, the Company also maintains an optimal capital structure to reduce capital costs.

Policy on Capital Structure and Selection Basis

The Company and its business groups may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce liabilities to maintain or adjust their capital structure.

In addition, the Company and its business groups always monitor capital based on the debt to capital ratio. This ratio is calculated by dividing total debt by total capital. While debt is the total liability in the consolidated statement of financial position, capital consists of all equity components as amounted to in the consolidated financial position. The Company determines an optimal capital structure policy in order to maximize the value of the Company.

The capital structure policy set by PTBA based on the Company's Financial Guidelines is as follows:

1. Determine the optimal capital structure target as a guideline for meeting future funding needs and increasing the value of the Company;
2. Consider the balance between financial risk and rate of return in an effort to increase the value of the Company;
3. Evaluate financial leverage, company value and cost of capital;
4. Optimizing the Company's capital structure, namely a combination of debt and own capital (equity) which can maximize the value of the Company;
5. Conduct a sensitivity analysis to explore how the Company can display sensitive variations to changes in the core assumptions used.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Goods Investment



Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 3 paragraph (1), states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 20% or more of the Public Company's equity.

Throughout 2023, the Company has no material commitments for capital goods investment.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Dalam mengembangkan kegiatan usaha, investasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. PTBA menerapkan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan investasi, hal ini seiring dengan pengembangan Perusahaan menuju perusahaan energi kelas dunia. Investasi difokuskan pada investasi pengembangan dalam rangka mendukung proyek-proyek strategis yang dimiliki oleh Perusahaan.

Jenis dan Tujuan Investasi Barang Modal

Pada tahun 2023, investasi PTBA ditujukan untuk investasi rutin dan investasi non-rutin. Untuk investasi rutin sendiri diantaranya untuk investasi bagi alat berat penunjang penambangan dan pembebasan lahan. Sedangkan untuk investasi non-rutin ditujukan untuk proyek-proyek pengembangan perusahaan, seperti pengembangan angkutan batu bara, setoran modal ke anak perusahaan (khususnya pada PT Huadian Bukit Asam Power) untuk PLTU Sumsel-8, pengembangan bisnis, (pembelian tug and barge pada anak perusahaan), dan investasi lainnya baik pada PTBA holding ataupun anak dan afiliasi perusahaan PTBA.

Nilai Investasi Barang Modal

Pada tahun 2023, PTBA menganggarkan *Capital Expenditure* (CAPEX) sebesar Rp6,43 Triliun, dimana realisasi penggunaan CAPEX PTBA sebesar Rp2,02 Triliun atau tercapai 31% dari rencana.

In developing business activities, investment is one of the important things to do. PTBA applies precision and prudence in making investments, in line with its development towards a world-class energy company. Investment is focused on development investment in order to support strategic projects owned by the Company.

Types and Objectives of Capital Goods Investment

In 2023, PTBA's investment is intended for routine investment and non-routine investment. Routine investment includes investment for heavy equipment to support mining and land acquisition. Meanwhile, non-routine investment is intended for company development projects, such as coal transportation development, capital deposits to subsidiaries (especially in PT Huadian Bukit Asam Power) for Sumsel-8 CFPP, business development, (purchase of tug and barge in subsidiaries), and other investments in both PTBA holding and PTBA subsidiaries and affiliates. PTBA holding or PTBA subsidiaries and affiliates.

Investment Value of Capital Goods

In 2023, PTBA budgeted Capital Expenditure (CAPEX) of Rp6.43 Trillion, where the realization of PTBA's CAPEX use was Rp2.02 Trillion or 31% of the plan.



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Subsequent to the Date of the Accountant's Report

Setoran Modal Kepada PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP)

Pada tanggal 26 Februari 2024, Perusahaan bersama dengan China Huadian Hongkong Company Limited (CHDHK) menandatangani Keputusan Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS Sirkuler") PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) untuk melakukan tambahan setoran modal bagi PT HBAP. Adapun tambahan setoran modal tersebut secara total sebesar USD66.638.000, dimana dengan kepemilikan PTBA pada PT HBAP sebesar 45%, maka porsi tambahan setoran modal PTBA sebesar USD29.987.100. Tambahan setoran modal tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen dari para pemegang saham sebagaimana tertuang pada *Shareholders Support Agreement* untuk Proyek PLTU Sumsel-8 yang digarap oleh PT HBAP.

Terhadap hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, PTBA telah menyampaikan Laporan Transaksi Afiliasi kepada OJK sesuai dengan surat PTBA No. T/165/111000/KS.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Laporan Transaksi Afiliasi.

Pengalihan Saham Treasuri

Pada tanggal 28 Maret 2024, PTBA melakukan pengalihan saham treasuri sejumlah 27.147.900 lembar saham dengan mekanisme *private placement*. Harga penjualan yaitu Rp2.950/saham, yang merupakan harga penutupan sehari sebelum tanggal transaksi, dimana harga tersebut tidak lebih rendah dari Rp2.578/saham (harga rata-rata penutupan selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan). Harga penjualan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. Pihak pembeli yaitu PT BNI Sekuritas ("BNIS") yang merupakan merupakan Anggota Bursa yang memiliki kegiatan usaha salah satunya yaitu perdagangan Efek. BNIS merupakan pihak pembeli yang terafiliasi dengan PTBA, karena BNIS ataupun PTBA baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pengendali yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia. Dengan dilakukan pengalihan saham treasuri PTBA pada tanggal 28 Maret 2024, maka PTBA masih memiliki 6.302.000 lembar saham yang merupakan hasil pembelian kembali saham PTBA (*buyback*) yang dilakukan oleh PTBA pada tanggal 17 Maret sampai dengan 16 Juni 2020. Atas pengalihan tersebut, PTBA telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik pada tanggal 2 April 2024.

Capital Injection to PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP)

On February 26, the Company, together with China Huadian Hongkong Company Limited ("CHDHK"), signed the Circular Resolution in lieu of the General Meeting of Shareholders ("Circular GMS"), PT Huadian Bukit Asam Power ("PT HBAP") for the additional capital injection of PT HBAP. This capital injection total is USD66,638,000, whereby the share ownership of the PTBA in PT HBAP is 45%. Therefore, the additional capital injection for PTBA is USD29,987,100. This Capital Injection is the shareholders' commitment stipulated under the Shareholders Support Agreement for Sumsel-8 CFPP by PT HBAP.

Regarding this matter, according to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflicts of Interest, PTBA has submitted an Affiliate Transaction Report to OJK in accordance with PTBA letter No. T/165/111000/KS.03 /II/2024 dated February 28, 2024, regarding Affiliate Transaction Reports.

Placement of Treasury Shares

On March 28, 2024, PTBA placed the treasury shares amounted 27,147,900 by private placement mechanism. The selling price is Rp2.950/share, which was the closing trade price prior to the transaction, where the price is not lower than Rp2.578/share (the latest 90 (ninety) days average before the transaction). This purchase price is according to the requirement of Regulation of Financial Services Regulation Number 29 of 2023 concerning Shares Buyback Issued by the Public Company. The buyer is PT BNI Sekuritas ("BNIS") that it is an exchange member having a business sector as a securities broker. BNIS is a buyer affiliated with PTBA, where either BNIS or the Company is directly or indirectly under the same PTBA by the Republic of Indonesia. Subsequently by the placement of the Company's treasury shares dated March 28, 2024, therefore the PTBA still has outstanding treasury shares amounted 6,302,000, which were the shares buyback taken by the PTBA on March 17 to June 16, 2020. For this placement, PTBA submitted the disclosure of information to the public on April 2, 2024.

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi untuk Satu Tahun ke Depan

Comparison between Targets and Realizationand Projection for the Next One Year

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Pada tahun buku 2023, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Comparison between Targets and Realization in 2023

In the 2023 financial year, the Company has set a number of targets to be achieved which are outlined in the 2023 Company Work Plan and Budget (WP&B). The comparison of the achievement of several targets set with the realization for the 2023 financial year is as follows:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Operasional
Comparison Tabel for Target and Operational Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target Target	Realisasi Realization	Ketercapaian Achievement
Operasional Operational				
produksi dan pembelian production and purchasing	Juta Ton Million Tons	41,04	41,94	102%
Angkutan Batu Bara Coal Transport	Juta Ton Million Tons	32,00	32,42	101%
Penjualan Sales	Juta Ton Million Tons	41,24	36,97	90%
Nisbah Kupas Stripping Ratio	Kali Times	6,31	6,24	99%
Keuangan Finance				
Pendapatan Revenue	Rp Triliun Rp Trillion	40,35	38,49	95%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Profit for the year attributable to Owners of the Parent Entity	Rp Triliun Rp Trillion	9,50	6,11	64%
Struktur Modal* Capital Structure	%	51,66	79,77	154%

Catatan I Notes :
*Struktur Modal merupakan perbandingan antara liabiitas dan ekuitas
*Capital Structure is comparision between the liabilty and equity

Secara umum, kinerja Perusahaan di tahun 2023 dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada RKAP 2023. Hal tersebut disebabkan oleh komitmen perusahaan untuk terus mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Pembahasan pencapaian target pada aspek yang penting bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

In general, the Company's performance in 2023 exceeded the targets set in the 2023 WP&B. This is due to the company's commitment to optimize all existing resources. Discussion of target achievement in aspects that are important for the Company are as follows:

Produksi dan Pembelian

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target dan Pembelian sebesar 41,04 juta ton. Hingga akhir tahun 2023, realisasi produksi Perusahaan adalah sebesar 41,94 juta ton atau 102% dari target RKAP 2023. Tercapainya target RKAP tersebut disebabkan oleh adanya tambahan pembelian batu bara dari entitas anak PTBA, yaitu PT BAP.

Production and Purchasing

In the 2023 WP&B, the Company set a production and purchasing target of 41.04 million tons. Until the end of 2023, the Company's actual production was 41.94 million tons or 102% of the 2023 WP&B target. The achievement of the WP&B target was due to additional purchases of coal from PTBA's subsidiary, namely PT BAP.

Angkutan Batu Bara

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target angkutan batu bara sebesar 32,00 juta ton. Hingga akhir tahun 2023, realisasi angkutan batu bara Perusahaan adalah sebesar 32,42 juta ton atau 101% dari target RKAP 2023. Tercapainya target RKAP tersebut disebabkan oleh sinergi yang baik antara PTBA dan PT KAI dalam melakukan optimasi angkutan batu bara.

Penjualan

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target penjualan sebesar 41,24 juta ton. Hingga akhir tahun 2023, realisasi penjualan Perusahaan adalah sebesar 36,97 juta ton atau 90% dari target RKAP 2023. Tidak tercapainya target RKAP tersebut disebabkan adanya penurunan indeks harga batu bara yang cukup dalam, sehingga beberapa rencana penjualan menggunakan angkutan selain kereta api harus ditunda sembari menunggu perbaikan harga batu bara. Selain itu, mundurnya realisasi COD PLTU Sumsel 8 dari target awal juga turut menyumbang ketidaktercapaian target penjualan.

Nisbah Kupas

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target nisbah kupas banyak 6,31 kali. Hingga akhir tahun 2023, realisasi nisbah kupas Perusahaan adalah sebanyak 6,28 kali atau 99% dari target RKAP 2023. Penurunan tersebut disebabkan adanya optimasi penambangan sebagai upaya efisiensi Perusahaan.

Pendapatan

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target pendapatan sebesar Rp40,35 triliun. Hingga akhir tahun 2023, realisasi pendapatan Perusahaan adalah sebesar Rp38,49 triliun atau 95% dari target RKAP 2023. Tidak Tercapainya target RKAP tersebut disebabkan melemahnya indeks harga batu bara atau lebih rendah dari rencana.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target laba bersih sebesar Rp9,50 triliun. Hingga akhir tahun 2023, realisasi laba sebelum pajak Perusahaan adalah sebesar Rp6,11 triliun atau 64% dari target RKAP 2023. Tidak tercapainya target RKAP tersebut disebabkan tidak tercapainya target sebagaimana penjelasan diatas dan belum terimplementasinya regulasi batu bara terkait Mitra Instansi Pengelola (MIP).

Struktur Modal

Dalam RKAP 2023, Perusahaan menetapkan target struktur modal sebesar Rp51,66%. Hingga akhir tahun 2023, realisasi struktur modal sebesar 79,77% atau sebesar 154% dari target. Tidak Tercapainya target RKAP tersebut disebabkan adanya pembayaran dividen pada tahun 2023 atas seluruh laba bersih PTBA tahun buku 2022.

Coal Transportation

In the 2023 WP&B, the Company set a coal transportation target of 32.00 million tons. Until the end of 2023, the Company's coal transportation realization was 32.42 million tons or 101% of the 2023 WP&B target. The achievement of the WP&B target was due to good synergy between PTBA and PT KAI in optimizing coal transportation.

Sales

In the 2023 WP&B, the Company set a sales target of 41.24 million tons. Until the end of 2023, the Company's sales realization was 36.97 million tons or 90% of the 2023 WP&B target. The non-achievement of the WP&B target was due to a deep decline in the coal price index, so that several sales plans using transportation other than rail must be postponed while waiting for an improvement in coal prices. In addition, the delay in the realization of the COD of Sumsel-8 CFPP from the initial target also contributed to the non-achievement of the sales target.

Stripping Ratio

In the 2023 WP&B, the Company sets a target stripping ratio of 6.31 times. Until the end of 2023, the Company's realized strip ratio was 6.28 times or 99% of the 2023 WP&B target. The decrease was due to mining optimization as an effort to increase the Company's efficiency.

Revenue

In the 2023 WP&B, the Company sets a revenue target of Rp40.35 trillion. Until the end of 2023, the Company's realized revenue was Rp38.49 trillion or 95% of the 2023 WP&B target. The failure to achieve the WP&B target was due to the weakening of the coal price index or lower than planned.

Profit for the year attributable to Owners of the parent entity

In the 2023 WP&B, the Company set a net profit target of Rp9.50 trillion. Until the end of 2023, the Company's realized profit before tax was Rp6.11 trillion or 64% of the 2023 WP&B target. The WP&B target was not achieved due to the inability of achieving the two targets as explained above and the coal regulations related to Mitra Instansi Pengelola (MIP) not yet being implemented.

Capital Structure

In the 2023 WP&B, the Company set capital structure 51.66%. Until the end of 2023, the realization of capital structure is 79,77% or 154% from 2023 WP&B target. The WP&B target was not achieved due to the payment of dividends in 2023 on PTBA's entire net profit for the 2022 fiscal year.

Proyeksi Tahun 2024

Memasuki tahun 2024, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2024, yang disusun berdasarkan sejumlah asumsi dan dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan tahun 2023. Untuk produksi dan pembelian, PTBA menargetkan sebesar 41,34 juta ton di tahun 2024, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 41,04 juta ton. Untuk angkutan batu bara, PTBA menargetkan sebesar 33,69 juta ton di tahun 2024, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 32,00 juta ton. Dengan peningkatan target volume produksi tersebut, PTBA juga menetapkan target penjualan sebesar 43,11 juta ton di tahun 2024, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 41,24 juta ton. Selain itu, PTBA menargetkan nisbah kupas sebesar 6,44 kali (x) atau meningkat dari tahun 2023 sebesar 6,29 kali (x). Kenaikan nisbah kupas tersebut kaitannya dengan adanya perluasan sekuen tambang untuk persiapan peningkatan volume produksi atas rencana Proyek Pengembangan Angkutan Kereta Api Relasi Tanjung Enim-Keramasan yang ditargetkan beroperasi komersial pada Triwulan II 2025.

Berdasarkan RKAP tahun 2024, secara keuangan, PTBA menetapkan target pendapatan usaha sebesar Rp43,72 triliun. Di samping itu Perusahaan juga tetap berkomitmen untuk mempertahankan kinerja laba Perusahaan yang positif di tengah harga batu bara yang berfluktuasi. Untuk target struktur modal ditetapkan sebesar 69,16%. Target strukur modal tersebut pada dasarnya merupakan target perbandingan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2024. Untuk Kebijakan dividen sendiri mengacu pada Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada tahun 2002. Adapun berdasarkan prospektus tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dividen tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Target-target keuangan yang telah ditetapkan tersebut di atas, dapat berubah dari waktu ke waktu, mengingat bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan sangat tergantung dengan harga indeks batubara dunia, baik untuk indeks Newcastle dan Indeks Indonesian Coal Index (ICI-3), serta nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Projections for 2024

Entering 2024, the Company has set a number of targets as outlined in the 2024 WP&B, which was prepared based on a number of assumptions and by considering the Company's performance in 2023. For production and purchase, PTBA targets 41.34 million tons in 2024, an increase from the previous year's target of 41.04 million tons. For coal transportation, PTBA targets 33.69 million tons in 2024, an increase from the previous year's target of 32.00 million tons. With the increase in production volume target, PTBA also set a sales target of 43.11 million tons in 2024, an increase from the previous year's target of 41.24 million tons. In addition, PTBA targets a stripping ratio of 6.44 times (x) or an increase from 2023 of 6.29 times (x). The increase in stripping ratio is related to the expansion of the mine sequence in preparation for the increase in production volume for the Tanjung Enim-Keramasan Railway Transportation Development Project which is targeted for commercial operation in the second quarter of 2025.

Based on the 2024 WP&B, PTBA has set a financial target of operating income in Rp43.72 trillion. On the other hand, the Company always commits to maintance the net profit performance positively in the fluctuation of coal price. For target of capital structure is 69,16%. The target of capital structure is the comparision of the liabilty and equity target in 2024. The dividend policy itself refers to the Initial Public Offering (IPO) Prospectus which was established by the Company in 2002, while based on this prospectus, the Company promises to pay a minimum dividend of. 30%, in the event that the Company records a profit, while still paying attention to funding for company projects and paying attention to the GMS decisions.

The financial targets set above may change from time to time, considering that the business carried out by the Company is very dependent on world coal index prices, both for the New Castle index and the Indonesian Coal Index (ICI-3), and rupiah exchange rate to US Dollar.

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Payout



Kebijakan Pembagian Dividen
Mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan melakukan pembagian dividen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Sebelum tahun buku keuangan berakhir, Perusahaan juga dapat membagikan dividen interim yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen atas suatu saham harus dibayarkan kepada nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. Selain itu, pembayaran dividen juga harus memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang akan ditentukan atau atas wewenang RUPS, dimana keputusan untuk pembagian dividen diambil dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

Dividend Policy
Referring to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company distributes dividends based on the decisions of the Annual GMS or Extraordinary GMS. Before the financial year ends, the Company may also distribute interim dividends determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners as long as permitted by the Company's Articles of Association.

Dividends on a share must be paid to registered name in the Register of Shareholders. Additionally, dividend payments must comply with the Company's Articles of Association, which are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The decision to distribute dividends should adhere to the regulations of the Stock Exchange where the shares are listed.

Kebijakan pembagian dividen telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu dengan memperhatikan Prospektus Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) yang dilakukan oleh Perusahaan pada tahun 2002. Dalam Prospektus tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dividen tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

The dividend distribution policy is in accordance with the Company's Articles of Association, namely by considering the Initial Public Offering (IPO) Prospectus conducted by the Company in 2002. In this Prospectus, the Company has established a cash dividend policy of at least 30% (thirty percent) of profit after tax, unless otherwise determined by the GMS.

Pembagian Dividen dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir dan Riwayat Pembagian Dividen dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023, Pemegang Saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp12,57 Triliun dari laba bersih Perusahaan atau keseluruhan laba bersih.

Dividend Payout in the Last 2 (Two) Years and History of Dividend Payout in the Last 5 (five) Years

Based on the Annual GMS held on June 15, 2023, Shareholders approved the distribution of dividends amounting to Rp12.57 trillion from the Company's net profit or the entire net profit.

Informasi Pembayaran Dividen
Dividend Payout Information

Uraian Description	2023	2022
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Dividend Payout (Rp)	12.567.581.927.964	7.909.115.945.615
Rasio Pembayaran Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	100,00	100,00
Nilai Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend Value per Shares (Rp)	1.094,05	688,52
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (Lembar) Number of Shares Entitled to Dividends (Shares)	11.487.209.350	11.487.209.350
Tanggal Pengumuman Announcement Date	15 Juni 2023 June 15, 2023	24 Mei 2022 May 24, 2022
Tanggal Pembayaran Payment Date	14 Juli 2023 July 14, 2023	24 Juni 2022 June 24, 2022

Adapun pembagian dan pembayaran dividen tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The distribution and payment of dividends from 2019 to 2023 can be seen in the table below:

Tahun Pembagian Payout Year	Tahun Buku Dividen Dividend Fiscal Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan Cash Dividend Payout (Rp)	Dividen per Lembar Saham (Rp/ Lembar) Dividend per Share (Rp/ share)	Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (Lembar) Number of Shares Entitled to Dividends (shares)	Rasio Pembagian Deviden (%) Rasio Dividen Payout Ratio (%)
2023	2022	15 Juni 2023 June 15, 2023	14 Juli 2023 July 14, 2023	12.567.581.927.964	1.094,05	11.487.209.350	100
2022	2021	24 Mei 2022 May 24, 2022	24 Juni 2022 June 24, 2022	7.909.111.452.604	688,52	11.487.209.350	100
2021	2020	05 April 2021 April 5, 2021	07 Mei 2021 May 7, 2021	835.386.571.935	74,69	11.184.061.250	35
2020	2019	10 Juni 2020 June 10, 2020	10 Juli 2020 July 10, 2020	3.651.199.955.694	326,46	11.184.061.250	90
2019	2018	25 April 2019 April 25, 2019	29 Mei 2019 May 29, 2019	3.767.959.262.485	339,63	11.094.269.550	75

Kontribusi kepada Pemerintah (Pajak dan Royalti)

Contributions to Government (Tax and Royalty)

Sebagai bentuk kontribusi PTBA kepada negara, serta wujud kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, Perusahaan telah melakukan pemenuhan kewajiban atas penerimaan negara pada tahun 2023. Kontribusi penerimaan negara yang diberikan oleh Perusahaan adalah dalam bentuk Pajak sebesar Rp3,37 Triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12,69 Triliun, atau senilai total Rp16,07 Triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

As a form of PTBA's contribution to the state, as well as a form of compliance with all applicable regulations, the Company has fulfilled its obligations for state revenue in 2023. The contribution of state revenue provided by the Company is in the form of Taxes amounting to Rp3.37 Trillion and Non-Tax State Revenue (PNBP) of Rp12.69 Trillion, or a total of Rp16.07 Trillion. The details are as follows:

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Deskripsi Description	2023	2022
Penerimaan Pajak Tax Revenue		
Pajak Penghasilan Income Tax	2.935.011	3.498.377
Pajak Bumi dan Bangunan Property Tax	418.778	214.619
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	7.189	2.844.863
Pajak Daerah Local Tax	13.973	6.239
Total Penerimaan Pajak Total Tax Revenue	3.374.952	6.564.097
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue		
Dividen (RI, Inalum, Sumsel, Muara Enim) Dividends (RI, Inalum, Sumsel, Muara Enim)	8.464.617	5.327.010
Royalti Batu Bara (PP 81 2019/PP 26 2022) Coal Royalty (PP 81 2019/PP 26 2022)	4.143.358	3.728.822
Iuran Tetap (Landrent) (PP 81 tahun 2019) Fixed Contributions (Landrent) (PP 81 of 2019)	3.515	3.691
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Land and Building Rights Acquisition Fee	4.569	4.492
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Borrow-to-Use Forest Area Permit	54.681	27.995
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Other Non-Tax Revenue	19.597	42.523
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak Total Other Non-Tax Revenue	12.690.337	9.134.532
Total Penerimaan Negara Total State Revenue	16.065.289	15.698.629

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2023, PTBA tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*).

In 2023, PTBA did not have an Employee Stock Ownership Program and/or Management Stock Ownership Program carried out by the Company. (Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from Public Offering

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan penawaran umum baik untuk efek yang bersifat ekuitas ataupun bersifat utang, sehingga tidak terdapat informasi yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum.

In 2023, there were no public offerings for either equity or debt securities, therefore, no information can be presented in this Annual Report regarding the use of proceeds from public offerings.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Perusahaan senantiasa menggunaan jasa pihak ketiga untuk menilai kewajaran transaksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal, yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Pada tahun 2023, tidak ada hal yang material terkait dengan investasi, ekspansi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal yang dilakukan PTBA. Namun, untuk divestasi sendiri, pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) divestasi entitas asosiasi yang dimiliki oleh PTBA melalui PT Internasional Prima Coal (PT IPC). Adapun keterangan terkait divestasi entitas asosiasi yang dimiliki oleh PTBA melalui PT IPC tersebut adalah sebagaimana di bawah ini.

PT Tabalong Prima Resources (PT TPR) dan PT Mitra Hasrat Bersama (PT MHB) merupakan entitas asosiasi yang dimiliki oleh PT Internasional Prima Coal (PT IPC)/ entitas anak perusahaan PTBA. Pada 9 Desember 2022, PT IPC menandatangani Perjanjian Pengakhiran Rencana Transaksi Akuisisi PT TPR dan PT MHB. Sebagai tindaklanjut Perjanjian Pengakhiran PPJB tersebut adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TPR dan PT MHB, yang pada intinya menyetujui pengalihan saham PT IPC pada PT TPR dan PT MHB kepada pemegang saham semula (sebelum pembelian oleh PT IPC);
2. Telah didapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya atas pengakhiran tersebut, pada tahun 2023, PT IPC mendapatkan pengembalian uang sebesar USD12.300.000,- dan kompensasi atas biaya-biaya sebesar USD946.095. Sehingga setelah dilakukan pengembalian saham dan pembayaran tersebut, maka PT IPC tidak lagi menjadi pemegang saham pada PT TPR dan PT MHB.

The Company always uses third party services to assess the fairness of investment transactions, expansion, divestment, business mergers/consolidations, acquisitions, and debt/capital restructuring, which are carried out in accordance with applicable provisions in the capital market sector. In 2023, there were no material related to investment, expansion, business merger/consolidation, acquisition, and debt/capital restructuring carried out by PTBA. However, for divestment in 2023, there were 2 (two) divestments of associated entities owned by PTBA through PT Internasional Prima Coal (PT IPC). The information regarding the divestment of associated entities owned by PTBA through PT IPC is as below.

PT Tabalong Prima Resources (PT TPR) and PT Mitra Hasrat Bersama (PT MHB) are associated entities owned by PT Internasional Prima Coal (PT IPC)/ a subsidiary of PTBA. On December 9, 2022, PT IPC signed an Agreement to Terminate the Transaction Plan for the Acquisition of PT TPR and PT MHB. As a follow-up of the PPJB Termination Agreement is as below:

1. A General Meeting of Shareholders (GMS) of PT TPR and PT MHB has been held, which approved the transfer of PT IPC shares to PT TPR and PT MHB to the original shareholders (before the purchase by PT IPC);
2. Approval has been obtained in accordance with statutory provisions.

Furthermore, for this termination, in 2023, PT IPC will receive a refund of US$12,300,000 and compensation for costs of US$946,095. After the shares are returned and the payment is made, PT IPC is no longer a shareholder in PT TPR and PT MHB.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan serta Ketentuan Terkait

Perusahaan memiliki kebijakan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan Perusahaan, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Mekanisme *review* atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris

Komitmen Perusahaan atau Manajemen atas Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

PTBA telah memiliki kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimuat pada Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 tentang Pedoman Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Pedoman tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Berdasarkan pedoman tersebut, dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi/ pihak berelasi, Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi tersebut telah melalui prosedur yang memadai dan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Perusahaan, melalui Dewan Komisaris dan Komite Audit, juga telah melakukan *review* untuk memastikan bahwa transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), dan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Review Mechanism Policy for Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

The company has a policy on material transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties. Material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties, carried out by the Company, always consider the precautionary principle in accordance with generally accepted business practices and complying with OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as PSAK No. 7 concerning Disclosures of Related Parties.

The review mechanism for material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/ related parties is carried out through an audit process by the Audit Committee, with the results reported to the Board of Commissioners.

Company or Management Commitment on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

PTBA has an Affiliate Transaction and Conflict of Interest policy as stated in the Decree of the Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 067/0100/2023 concerning Guidelines for Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions. The guidelines refer to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions. Based on these guidelines, in carrying out material transactions containing conflicts of interest and/ or transactions with affiliated/related parties, the Board of Directors ensures that all transaction activities have gone through adequate procedures and are in accordance with the arm's length principle. The Company, through the Board of Commissioners and the Audit Committee, has also carried out a review to ensure that material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties, are carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the principles of fair transactions (arms-length principle), and implemented in compliance with applicable regulations.

Sementara itu, transaksi material yang dilakukan Perusahaan dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, merupakan transaksi terkait kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 (satu) transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PTBA dan telah dilaporkan kepada OJK, yaitu berkaitan dengan Penandatanganan Perubahan Kedua atas *Shareholders Support Agreement* untuk Proyek PLTU Sumsel-8. Penandatangan tersebut dilakukan pada tanggal 7 April 2023, yang melibatkan PTBA dan China Huadian Hongkong Company Limited (CHDHK) selaku pemegang saham pada PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP), The Export Import Exim Bank of China (CEXIM) dan PT HBAP sendiri. *Shareholders Support Agreement* merupakan wujud dukungan dari para pemegang saham PT HBAP untuk memberikan dukungan kepada *project company* (PT HBAP), dalam hal terjadinya kondisi-kondisi tertentu. Atas penandatangan tersebut, PTBA telah menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK pada tanggal 11 April 2023 sesuai dengan Surat PTBA No. T/112/111000/KS.03/IV/2023 Perihal Transaksi Afiliasi.

Informasi Mengenai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2023 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perusahaan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perusahaan dan bebas dari konflik kepentingan.

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang didefinisikan antara lain:

1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):
   a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
      - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
      - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
      - Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Meanwhile, material transactions carried out by the Company with affiliated/related parties are transactions related to business activities carried out by the Company in order to generate business income and carried out routinely, repeatedly and/or continuously. Throughout 2023, the Company has no violations of laws and regulations related to material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliates/related parties.

Information on Transactions with Affiliated Parties

Throughout 2023, there was 1 (one) affiliated transaction conducted by PTBA and has been reported to OJK, which is related to the signing of the Second Amendment to the Shareholders Support Agreement for the Sumsel-8 CFPP Project. The signing was carried out on April 7, 2023, involving PTBA and China Huadian Hongkong Company Limited (CHDHK) as the shareholder of PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP), The Export Import Exim Bank of China (CEXIM) and PT HBAP itself. Shareholders Support Agreement is a form of support from the shareholders of PT HBAP to provide support to the project company (PT HBAP), in the event of certain conditions. For the signing, PTBA has submitted an affiliated transaction report to OJK on April 11, 2023 in accordance with PTBA Letter No. T/112/111000/KS.03/IV/2023 Regarding Affiliated Transactions.

Information on Transactions with Related Parties

Policy on Related Parties

All transactions carried out by the Company in 2023 was carried out at arm's length and in accordance with normal commercial requirements. Company transactions are carried out based on the Company's needs and are free from conflicts of interest.

The Company carried out transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 on June 25, 2012, concerning "Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies", which is defined as:

1. Related parties are persons or entities related to the Group (reporting entity):
   a. The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
      - Having control or joint control of the reporting entity;
      - Have significant influence over the reporting entity; or
      - Represent key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
   - Orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
   - Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

2. Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Nama Pihak Berelasi serta Sifat Hubungan dan Transaksi

PTBA dan kelompok usahanya, telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Adapun berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Adapun informasi terkait nama pihak berelasi serta sifat hubungan dan transaksi di tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills one of the following:
   - The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning the parent entity, subsidiary entity, and subsequent subsidiaries are related to another entity);
   - One entity is an associated entity or joint venture of another entity (or an associated entity or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);
   - Both entities are joint ventures of the same third party;
   - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of a third entity;
   - The entity is a post-employment benefits program for employee benefits from one of the reporting entities or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
   - Entities controlled or jointly controlled by the person identified in number (1);
   - The person identified in item (1)(a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity); And
   - The entity, or a member of a group of which the entity is part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

2. Significant transactions carried out with related parties, whether carried out with the same conditions and terms as third parties or not, are disclosed in the consolidated financial statements.

Names of Related Parties and Nature of Relationships and Transactions

PTBA and its business group have entered into transactions with certain related parties, in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures". Meanwhile, based on OJK Regulation No. VIII.G.7, entities related to the Government are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

The information related to the names of related parties and the nature of relationships and transactions in 2023 can be seen as follows:

Nama Pihak Berelasi serta Sifat Hubungan dan Transaksi
Names of Related Parties and Nature of Relationships and Transactions

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penempatan dana dan pinjaman bank Funds placement and bank borrowings
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk ("BNI") , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk ("BTN Syariah") PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI"), PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penempatan dana Funds placement
PT Mandiri Taspen ("Mandiri Taspen")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	PPIP Defined contribution pension programme
PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Sewa pembiayaan Finance lease
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pengangkutan Batubara dan penempatan obligasi Coal transportation and bonds placement
PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power, bersama - sama disebut PLN Grup PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power, grouped as PLN Grup	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan batubara, pemakaian listrik dan penempatan obligasi Coal sales, electricity usage and bonds placement
Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pengelolaan dana pension Pension fund management
PT TIMAH Tbk ("TIMAH")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan batubara dan penempatan MTN Coal sales and MTN placement
PT Aneka Tambang Tbk ("ANTAM"), PT Indonesia Chemical Alumina, MIND ID Trading Pte.Ltd, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("Pusri"), PT Semen Tonasa, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan batubara Coal sales
PT Solusi Bangun Indonesia ("SBI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan jasa perawatan PLTU Power Plant maintenance services
PT Dahana (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian bahan peledak Explosive material purchases
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia DPLK BNI ("DPLK BNI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	PPIP Defined contribution pension programme
PT Danareksa (Persero) ("Danareksa"), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Penempatan Obligasi Bonds placement
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian bahan bakar dan penempatan obligasi Fuel purchase and bonds placement
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Premi asuransi Insurance premiums
PT Tanjung Alam Jaya	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian Batubara Coal purchases
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (Persero) ("DAK")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Pembelian Aset Asset purchases
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Engineering, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali Entity under common control	Konstruksi proyek Project construction
PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP"), PT Nasional Hijau Lestari ("SINERGI ID"), PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR")	Entitas ventura Bersama Joint venture entity	Piutang lainnya Other receivables
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Entitas ventura Bersama Joint venture entity	Penjualan batubara Coal sales

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan PTBA dan kelompok usahanya terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Realization of Related Party Transactions

The Company conducts transactions with related parties in accordance with applicable regulations. The policies of PTBA and its business group regarding pricing for transactions with related parties are as follows:

1. Penjualan batu bara ke pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan indeks internasional yang setara sebagai perbandingan dan disesuaikan dengan spesifikasi dari batu bara dan lokasi pengiriman.
2. Pengapalan dan pengangkutan batu bara oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu.

1. Sales of coal to related parties are determined based on a sales contract, which generally uses an international index as a comparison and are adjusted according to the specifications of the coal and delivery location.

2. Shipment and transportation of coal by related parties is determined based on a transportation contract, which is mutually agreed upon based on the results of negotiations taking into account the elements of existing costs plus a certain margin.

Adapun rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi pada tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

The details of transactions and balances with related parties in 2023 and 2022 are presented in the following table:

Uraian Description	Satuan Satuan	Realisasi 2023 2023 Realization	Realisasi 2022 2022 Realization
Penjualan Batu bara dan Pendapatan dari Aktivitas Lainnya Coal Sales and Revenue from Other Activities	Rp-juta Rp-million	18.245.395	20.666.077
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Revenue	%	47	48
Pembelian Barang/Jasa Purchase of Goods/Services	Rp-juta Rp-million	10.200.168	8.836.724
Persentase terhadap Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Beban Usaha Konsolidasian Percentage to Total Cost of Goods Sold and Consolidated Operating Expenses	%	35	32
Penghasilan Keuangan Financial Income	Rp-juta Rp-million	415.209	349.431
Persentase terhadap Jumlah Penghasilan Keuangan Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Financial Income	%	71	82
Pembayaran Iuran Dana Pensiun Pension Fund Contribution Payment	Rp-juta Rp-million	260.404	147.261
Persentase terhadap Jumlah Beban Gaji Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Salary Expenses	%	12	5
Biaya Keuangan Financial Costs	Rp-juta Rp-million	26	361
Persentase terhadap Jumlah Biaya Keuangan Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Finance Costs	%	0,01	0,18
Jumlah Aset yang Terkait dengan Pihak Berelasi Total Assets Related to Related Parties	Rp-juta Rp-million	7.763.266	16.030.849
Persentase terhadap Jumlah Aset Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Assets	%	20	35
Jumlah Liabilitas yang Terkait dengan Pihak Berelasi Total Liabilities Related to Related Parties	Rp-juta Rp-million	2.073.610	2.136.973
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian Percentage to Total Consolidated Liabilities	%	12	13

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations with Significant Impact on the Company

Di tahun 2023, terdapat 6 (enam) perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak tersebut adalah sebagai berikut:

In 2023, there were 6 (six) changes in laws and regulations with significant impact on the Company. The changes in laws and regulations that affected the Company's performance in 2023 are as follows.

No	Peraturan dan Perundang-Undangan Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	
1	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023	Pada 21 November 2022, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara dalam Negeri ("Kepmen ESDM 267/2022"), yang sekarang akan menjadi dasar baru terkait pemenuhan Domestic Market Obligation ("DMO") untuk batu bara. Keputusan Menteri ESDM ini diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri ("Kepmen ESDM 399/2023") yang mulai berlaku efektif sejak 17 November 2023. a. Pemenuhan DMO Dengan terbitnya Kepmen ESDM 399/2023 Persentase DMO ditetapkan sebesar 25% ditetapkan dari realisasi produksi batu bara tahun berjalan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan sendiri dan bahan baku/bahan bakar industri. b. Penerapan Denda dan Kompensasi Terhadap pelaku usaha pertambangan Batu Bara yang tidak memenuhi persentase pemenuhan DMO dapat dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi, denda, denda dan dana kompensasi atau pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri. Ketidakpatuhan pada denda dan/atau kompensasi, dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang. c. Penentuan harga jual • Harga jual Batu Bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0,8%, dan ash 15%. • Dalam hal harga batu bara acuan ("HBA") lebih dari atau sama dengan dan kurang dari AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, maka harga jual batu bara dihitung menggunakan formula harga batu bara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Kepmen ESDM 267/2022. d. Perhitungan HBA dalam penentuan harga jual • HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batu bara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan keputusan menteri ini. • HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batu bara secara jangka tertentu (*term*). e. Pemenuhan Kewajiban Iuran Produksi/Royalti Regulasi ini mengatur formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan batu bara atas penjualan batu bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang lebih dari atau sama dengan AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, dan ketentuan formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/ royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batu Bara atas penjualan Batu Bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang Kurang Dari AS$70 Per Metrik Ton *FOB Vessel*.	On 21 November 2022, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Decree No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Year 2022 concerning Fulfillment of Domestic Coal Needs ("Kepmen ESDM 267/2022"), which now become the new basis related to the fulfillment of the Domestic Market Obligation ("DMO") for coal. This decision of the Minister of Energy and Mineral Resources was amended by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 267.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Fulfillment of Coal Needs Domestic Affairs ("Kepmen ESDM 399/2023") which has been effective since 17 November 2023. a. DMO compliance With the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No.399/2023, the Domestic Market Obligation (DMO) percentage is set at 25% based on the current year's coal production realization for the provision of electricity for public and/or self-interest, as well as industrial raw materials/fuels. b. Application of Fines and Compensation For coal mining business actors who do not fulfil the DMO fulfillment, are subject to obligation to pay compensation fund, fine, fines and compensation funds or prohibition of coal sales abroad. Non-compliance with fines and/ or compensation fund, may be subject to administrative sanctions in stages. c. Selling price determination • The selling price of coal for the supply of electricity for the public interest is US$70 per metric ton FOB Vessel, which is based on reference specifications on calorific 6,322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0.8%, and ash 15%. • In the event that the reference coalprice ("HBA") is more than or equal toand less than US$70 per metric tonFOB vessel, the selling price of coal is calculated using the coal price formula as stipulated in Appendix III to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 267/2022. d. HBA calculation in determining the selling price • The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes for spot sales of coal is the HBA at the time of the transaction in accordance with the provisions of this Ministerial Decree. • The HBA used as a reference indetermining the selling price of coal for the supply of electric power for thepublic interest for coal sales for a certain period (term). e. Fulfillment of Production/Royalty Contribution Obligations The regulation determines formula for calculating fulfillment of productioncontribution/ royalty obligations byCoal Mining Business Companies forthe sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs more than or equal to US$70 per metric ton FOB Vessel, and calculate formula of fulfillment of production contribution/royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs Less Than USD70 Per Metric Ton FOB Vessel.

No	Peraturan dan Perundang-Undangan Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	
2	Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2022 Government Regulation No. 45 and 46 of 2022	Pada bulan Desember 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan suatu Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai perusahaan holding di Bidang Pertambangan ("Holding Pertambangan") dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal efektif pendirian, Holding Pertambangan akan memiliki saham pada perusahaan (Anggota Holding) sebagai berikut: a. secara langsung saham Seri B terbanyak pada PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium; serta b. secara langsung dan tidak langsung saham pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd. Perubahan kepemilikan saham tersebut diatas tidak berdampak pada perubahan pengendalian masing-masing Anggota Holding mengingat Holding Pertambangan tetap dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	In December 2022, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 45 Year 2022 regarding the Reduction of the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), a limited liability company, and Government Regulation No. 46 Year 2022 regarding the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in the Establishment of a Limited Liability Company in the Mining Sector. Further, the Minister of Finance issued the Decree No. 516/KMK.06/2022 regarding the Value Determination of the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in the Establishment of a Limited Liability Company in the Mining Sector. Based on these regulations, the Government of the Republic of Indonesia will establish a Limited Liability Company that will be designated as a holding company in the Mining Sector ("Mining Holding"), in accordance with applicable regulation. At the effective date of the establishment, Holding Mining will acquire shares on the following entities ("Holding Members"): a. directly majority B Series shares in PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminium; and b. directly and indirectly shares in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd. The change in share ownership above does not affect the change in control of each Holding Member considering the Mining Holding is still controlled by the Government of the Republic of Indonesia.
3	Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023 Tahun 2023 Minister of Regulation No. PER-2 MBU/03/2023 of 2023	Sebagai upaya mewujudkan Peraturan Menteri yang sinkron dan harmonis guna mendukung Pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu dan berkelanjutan, maka pada 3 Maret 2023, Menteri BUMN menetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2023 ("PERMEN BUMN 2/2023) Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam PERMEN 2/2023 mengatur lebih lanjut terkait dengan Prinsip Tata Kelola BUMN, Penerapan Manajemen Risiko BUMN, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Perencanaan Strategis, Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan, Penyelenggaraan TI, dan Pelaporan.	As an effort to realise a synchronous and harmonious SOE Ministerial Regulation to support the planned, integrated and sustainable management of SOEs, on 3 March 2023, the Minister of SOEs stipulated a SOE Ministerial Regulation No. PER-2/ MBU/02/2023 ("SOE Ministerial Regulation 2/2023") Concerning Guidelines for Governance and Corporate Activities Significant State Enterprises, where SOE Ministerial Regulation No.2/2023 further regulates in relation to SOE Governance Principles, Implementation of SOE Risk Management, Assessment of SOE Soundness Level, Strategic Planning, Guidelines for Significant Corporate Activities, Implementation of IT, and Reporting.
4	Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01 MEM.B/2023 Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/ 2023	Pada Tanggal 11 Agustus 2023 Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batu Bara. Regulasi ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batu Bara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam penjualan komoditas Batu Bara. Keputusan tersebut merupakan ketentuan pelaksana Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral dan Batu Bara yang menjual Mineral dan Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan, dan harga patokan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan: a. Mekanisme Pasar; atau b. Sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Dalam regulasi ini juga mengatur bahwa harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik dan kepentingan umum serta pemenuhan bahan baku industri dalam negeri selain industri pengolahan dan pemurnian logam mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang mentapkan harga jual batu bara untuk kepentingan dimaksud.	On August 11 2023, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 227.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities. This regulation revokes Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities to increase the effectiveness of using benchmark prices in selling coal commodities. This decree is an implementing provision of Article 159 paragraph (2) of Government Regulation No. 96 of 2021, which stipulates that IUP and IUP holders at the Mineral and Coal Production Operation activity stage who sell the Mineral and Coal produced must refer to the benchmark price, and the price the benchmark referred to is determined by the Minister based on a. The market mechanism; or b. In accordance with generally accepted prices in international markets. This regulation also stipulates that the selling price of coal for the supply of electricity and public purposes as well as the fulfillment of raw materials for domestic industries other than themetal processing and refining industry refers to the reference specifications and calculations stipulated in the Ministerial Decree which determines the selling price of coal for the purposes in question.

No	Peraturan dan Perundang-Undangan Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Government Regulation No. 25/2023	Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 25 / 2023") yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2023. Dengan berlakunya PP 25/2023 maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Menteri dapat memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada WUP kepada Lembaga riset negara/daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk: a. Penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP batu bara; atau b. Penyiapan WIUP batu bara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara. Terdapat jaminan pemanfaatan ruang, kawasan, zonasi, serta WIUP yang ditetapkan, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan. Dalam PP 25/2023 ini juga mengatur ketentuan baru yang mewajibkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membentuk dan/atau menandai sebuah objek atau wilayah tertentu pada peta atas WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai kewenangannya.	President of the Republic of Indonesia has stipulated Government Regulation No. 25 of 2023 concerning Mining Areas which will become effective from 5 May 2023. With the enactment of this Regulation, Government Regulation No. 22 of 2010 concerning Mining Areas is declared repealed and no longer valid. The Minister may assign Investigations and Research assignments to Mining Business Area (MBA) to state/regional research institutions, BUMN, BUMD, and private business entities to: a. The preparation of a metal mineral Mining Business Area ("MBPA") and Coal MBPA; or b. The preparation of Coal MBPA for the development and/or utilisation of coal. There is a guarantee for the use of space, area, zoning, and designated MBPAs, from the Central Government and Regional Government, that there is no change in the use of space and area. On Government Regulation No. 25 of 2023 also stipulates a new provision which obliges Governors and Regents/Mayors to form and/or mark certain objects or areas on the map of WUPs that have been designated as Mining Areas in the Spatial Plans according to their authority.
6	Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 Government Regulation No. 36 of 2023	Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang devisa hasil ekspor, valuta asing dan pembayaran impor untuk bisnis di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, 30% dari devisa hasil ekspor, dengan nilai ekspor paling sedikit AS$250.000 atau ekuivalennya, wajib ditempatkan ke dalam rekening khusus dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Agustus 2023. Grup telah melaksanakan kewajiban untuk menempatkan DHE SDA ke dalam rekening khusus dan deposito berjangka dan disajikan sebagai bagian dari "Kas dan setara kas" dalam laporan posisi keuangan.	On 12 July 2023, Government issued Government regulation No. 36 of 2023 which regulates the cash proceeds from export sales, foreign exchange and import payments for business in mining, plantation, forestry and fishery sectors. Based on this Government Regulation, 30% ofthe cash proceeds from export sales that have export values of at least US$250,000 or its equivalent stated in an export customs declaration must be placed in the special account for a holding period of at least three months. This regulation became effective on 1 August 2023. The Group has carried out the obligation to place DHE SDA into the special accounts and time deposits and are presented as part of "Cash and cash equivalents" in the consolidated statements of financial position.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policy and Impact on the Company

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan standar akutansi yang memberikan dapak material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan, sehingga tidak ada informasi yang diungkapkan pada Laporan Tahunan ini.

In 2023, there were no changes in accounting standards that had a material impact on the consolidated financial statements for the year, so there is no information disclosed in this Annual Report.

Tingkat Kesehatan Perusahaan (*Corporate Rating*)

Company Wellness Level (Corporate Rating)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian Tingkat Kesehatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan PTBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Tingkat Kesehatan di tahun 2023 dilakukan oleh perusahaan pemeringkat nasional, sedangkan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan rating. Untuk Tahun 2023 sendiri, PTBA telah menunjuk PT Pefindo untuk melakukan penilaian atas tingkat kesehatan PTBA. Adapun berdasarkan penilaian dari PT Pefindo, PTBA mendapatkan rating **"$_{id}$AA"** atau **"Sehat".** Tingkat kesehatan PTBA dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat di lihat pada sebagai berikut:

According to Minister of BUMN Regulation Number PER2/MBU/03/2023 concerning Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activity of State-Owned Enterprises. The Wellness Level Assessment is conducted to evaluate PTBA's Wellness level in compliance with legal requirements. In 2023, a national rating company will conduct the assessment, while from 2019 to 2022, it was done by a Public Accounting Firm based on ratings. For 2023, PTBA has engaged PT Pefindo for the assessment, resulting in an **"$_{id}$AA"** or **"Healthy"** rating. The health level of PTBA from 2019 to 2023 is as follows:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir
Company Wellness Level in the Last 5 (five) Years

Tahun Tahun	2023*	2022	2021	2020	2019
Peringkat Rating	$_{id}$AA	AAA	AA	AA	AA
Kategori Category	Sehat Healthy	Sehat Healthy	Sehat Healthy	Sehat Healthy	Sehat Healthy

*Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 untuk tingkat kesehatan tahun 2023 dilakukan oleh Lembaga pemeringkat yang ditunjuk oleh Perusahaan yaitu PT Pefindo, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya tingkat kesehatan dilakukan penilaiannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
*In accordance with the provisions of SOEs Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2023, the 2023 wellness level was carried out by the rating agency appointed by the Company, namely PT Pefindo, while for previous years the soundness level was assessed by the Public Accounting Firm (KAP).

Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

Kelangsungan usaha Perusahaan ke depannya masih akan ditopang oleh bisnis di segmen batu bara serta proyek-proyek pengembangan usaha yang akan mendukung diversifikasi bisnis ke sektor lain, seperti energi dan hilirisasi batu bara. Di masa depan, ketergantungan perusahaan terhadap pendapatan yang berasal dari segmen batu bara diharapkan akan semakin menurun seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan dari sektor energi dan hilirisasi batu bara.

The Company's business continuity in the future will still be supported by business in the Coal segment as well as business development projects in business diversification into other sectors such as energy and coal downstreaming. In the future, the Company's dependence on income from the coal segment is expected to decrease in line with increasing income from the energy sector and coal downstreaming.

Saat ini, memanfaatkan momentum masih signifikannya batu bara sebagai sumber energi dalam bauran energi global hingga beberapa tahun ke depan, Perusahaan terus melakukan percepatan penyelesaian proyek-proyek peningkatan kapasitas angkutan untuk mendukung monetisasi cadangan batu bara yang saat ini masih sangat besar jumlahnya. Selain itu, proyek-proyek pengembangan usaha seperti pembangunan PLTU mulut tambang, pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, serta proyek hilirisasi batu bara diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Perusahaan juga menaruh perhatian besar pada program-program penelitian dan pengembangan yang mendukung penggunaan teknologi baru yang memberikan nilai tambah di masa depan.

By taking advantage of the momentum regarding the coal significancy as an energy source in the global energy mix for the next few years, PTBA continues to accelerate the completion of projects to increase transportation capacity to support the monetization of coal reserves, which are currently still very large. In addition, business development projects such as the construction of a mine mouth coal fired power plant, the development of new and renewable energy based power plants and coal downstream projects are being completed on time. The Company also pays attention to research and development programs that support the use of new technology that provides added value in the future.

Seiring dengan telah dicanangkannya target pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2060, Perusahaan juga berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program dekarbonisasi di seluruh rantai nilai Perusahaan ke depannya. Hal ini merupakan bagian dari visi Perusahaan untuk menjadi Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

In line with the announcement of the target of achieving net zero emissions (NZE) by the Indonesian Government by 2060, the Company is also committed to integrate decarbonization programs throughout the Company's value chain in the future. This is part of the Company's vision to become a world-class energy company that cares about the environment.

Selain itu, melalui implementasi *Business Continuity Management System* (BCMS) Perusahan juga telah menyiapkan strategi-strategi yang akan dijalankan apabila terjadi gangguan atau bencana yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan.

Moreover, through the implementation of the Business Continuity Management System (BCMS), the Company has also prepared strategies during a disruption or disaster that has a potential to impact on the continuity of the Company's business.

Sebagai perusahaan pertambangan terintegrasi yang memiliki rantai pasok produk mulai dari hulu (*pit*) sampai dengan pelabuhan/dermaga (*port*), PTBA menyadari bahwa proses bisnisnya mempunyai potensi gangguan atau hambatan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan.

As an integrated mining company that has a product supply chain starting from the upstream (pit) to the port/barging port (port), PTBA is aware that their business processes have the potential for disruption or obstacles that could disrupt the continuity of the Company's business.

Dalam menjalankan kegiatan proses bisnis Perusahaan, kondisi ideal tidak sepenuhnya dapat dijamin dan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan proses bisnis merupakan suatu keharusan. Potensi gangguan berupa bencana karena faktor alam (*Natural disaster*) atau faktor manusia (*Man-made disaster*) dapat diatasi dengan

In carrying out the Company's business process activities, ideal conditions cannot be fully guaranteed and the ability to maintain business process continuity is a necessity. Potential disruptions in the form of disasters due to natural factors (Natural disasters) or human factors (Man-made disasters) can be overcome with planned and measurable work patterns

pola kerja dan rentang waktu yang terencana dan terukur. Untuk itu, Perusahaan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) sebagai mitigasi dalam mendukung ketahanan dalam operasional bisnis kritikal. Sehingga, apabila terjadi bencana atau gangguan, operasional masih tetap berjalan.

and timescales. For this reason, the Company implements Business Continuity Management (BCM) as mitigation to support resilience in critical business operations. If a disaster or disruption occurs, business operations will still continue.

Dalam merencanakan strategi keberlangsungan bisnis, Perusahaan terlebih dahulu melakukan *Business Impact Analysis* (BIA) untuk mengetahui proses bisnis kritikal di setiap unit. Selain itu, dilakukan juga *Threat and Risk Assessment* (TRA) yang mungkin terjadi dan memberikan dampak katastropik sehingga proses bisnis terhenti dalam waktu yang lama.

In planning the business continuity strategy, the Company first conducted a Business Impact Analysis (BIA) to determine the critical business processes in each unit. In addition, a Threat and Risk Assessment (TRA) is also carried out that may occur and have a catastrophic impact so that the business process is stopped for a long time.

Potensi bencana yang dapat berpengaruh signifikan terhadap proses bisnis kritikal Perusahaan berdasarkan BIA dan TRA antara lain sebagai berikut:

1. Kerusakan alat produksi dan penunjang utama.
2. Bencana alam (tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami) yang mengganggu kegiatan operasional.
3. Kerusakan sarana dan/atau prasarana kereta api.
4. Pemogokan kerja karyawan/kontraktor yang mengganggu fungsi bisnis kritikal.
5. Kerusakan IT yang mengganggu proses operasional fungsi bisnis kritikal.

Potential disasters that could have a significant impact on the Company's critical business processes based on BIA and TRA include the following:

1. Damage to main production and supporting equipment.
2. Natural disasters (landslides, floods, earthquakes, tsunamis) that disrupt operational activities.
3. Damage to railway facilities and/or infrastructure.
4. Employee/contractor strikes that disrupt critical business functions.
5. IT damage that disrupts the operational processes of critical business functions.

Keseriusan PTBA dalam menjamin kelangsungan bisnis dibuktikan dengan telah diperolehnya sertifikasi ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* (BCMS) yang diterbitkan oleh The British Standards Institution (BSI) dengan masa berlaku efektif mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 2 Agustus 2025.

PTBA's seriousness in ensuring business continuity is proven by obtaining ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS) certification issued by The British Standards Institution (BSI) with an effective period from August 3, 2022, to August 2, 2025.

Sertifikasi diperoleh dengan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan ISO 22301:2019 dalam penerapan BCMS, termasuk dengan melakukan *drill*/simulasi secara berkala atas skenario bencana yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan.

Certification is obtained by fulfilling the requirements of ISO 22301:2019 implementation of BCMS, including conducting regular drills/simulations of disaster scenarios that could disrupt the continuity of the Company's business.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan
Business Prospects and Future Strategies

Prospek Usaha

Bisnis Perusahaan saat ini masih didominasi oleh penjualan batu bara, sehingga prospek usaha ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan fluktuasi harga batu bara, baik di pasar global maupun domestik. Di tahun 2023, permintaan global untuk batu bara *seaborne thermal* mencapai titik paling tinggi dalam sejarah. Indonesia masih menjadi negara eksportir batu bara *thermal* terbesar dengan produksi lebih dari 770 juta ton, yang juga merupakan angka produksi paling tinggi dalam sejarah Indonesia.

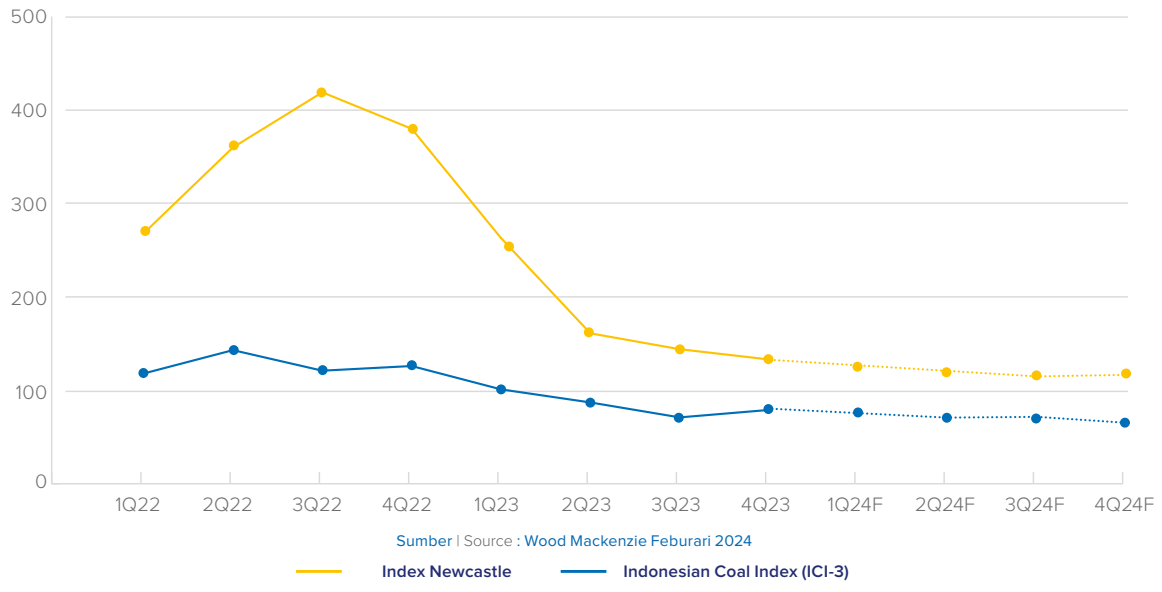
Pada tahun 2024, permintaan global untuk batu bara *seaborne thermal* diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2023 seiring dengan proyeksi pelemahan ekonomi global dan menguatnya kembali isu terkait transisi energi. Tren pelemahan harga batu bara setelah mencapai *all-time high* di tahun 2022 diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2024 sebagaimana yang terjadi di tahun 2023

Business Prospect

The Company's business is currently still dominated by coal sales. Therefore, the Company's future business prospects will still be greatly influenced by demand conditions and coal price fluctuations, in both global and domestic markets. In 2023, global demand for seaborne thermal coal reached its highest point in history. Indonesia is still the largest thermal coal exporter with production of more than 770 million tons, which is also the highest production figure in Indonesian history.

In 2024, global demand for seaborne thermal coal is projected to decline slightly from 2023 in line with the projected weakening of the global economy and strengthening issues related to the energy transition. The trend of weakening coal prices after reaching an all-time high in 2022 is projected to continue in 2024 as happened in 2023.

Harga Batu bara 2022-2023 dan Proyeksi Harga Batu bara 2024
Coal Prices 2022-2023 and Coal Price Projections for 2024



Sumber | Source : Wood Mackenzie Feburari 2024

.

Bank Dunia dalam *World Economic Situation and Prospects 2024* memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global dari 2,7% di tahun 2023 menjadi hanya 2,4% di tahun 2024, selaras dengan proyeksi menurunnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global sekaligus negara importir utama batu bara di dunia, seperti Tiongkok dan India. Seiring meredanya isu geopolitik yang sempat membuat beberapa negara maju memprioritaskan ketahanan energi nasionalnya dengan mengaktifkan kembali pembangkit listrik berbasis batubara, kebijakan untuk mengakselerasi transisi energi pasca penyelenggaraan COP 28 diproyeksikan akan kembali diintensifkan. Kondisi ini akan banyak mempengaruhi lanskap permintaan dan harga batu bara global di tahun 2024.

The World Bank in the 2024 World Economic Situation and Prospects projects a decline in global economic growth from 2.7% in 2023 to only 2.4% in 2024, in line with the projected decline in economic growth in several countries that are the driver of global economic growth and are also the main coal importing countries in the world, such as China and India. As geopolitical issues subside which had caused several developed countries to prioritize their national energy security by reactivating coal-based power plants, policies to accelerate the energy transition after COP 28 are projected to be intensified again. This condition will greatly influence the landscape of global coal demand and prices in 2024.

Di pasar domestik, pasokan Perusahaan masih akan banyak terdistribusi ke PLN yang harga jualnya telah dipatok sesuai dengan regulasi. Apabila rencana implementasi skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) efektif berlaku di tahun 2024, PTBA dapat memperoleh keuntungan akibat kompensasi pasokan domestik yang secara porsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan batu bara lainnya.

In the domestic market, the majority of the Company's supply will still be distributed to the state-owned electricity company, PLN, where the selling price has been set in accordance with regulations. If the plan to implement the Management Agency Partner (MIP) scheme is effective in 2024, PTBA will be able to gain profits due to domestic supply compensation which is a much higher portion compared to other coal companies.

Di tahun 2024, Perusahaan juga akan meningkatkan jumlah produksi dan penjualannya. Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan akan tetap melanjutkan upaya optimasi kegiatan penambangan, koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan target angkutan dapat dicapai, serta optimasi rencana penjualan, baik yang melalui angkutan kereta api maupun angkutan lainnya.

In 2024, the company will also increase its production and sales by optimizing mining activities, coordinating with PT KAI, to ensure transportation targets can be achieved, as well as optimizing sales plans, either via rail or other transportation.

Strategi ke Depan

Dalam rangka pemenuhan Mandat dari Negara kepada MIND ID untuk menjadi Perusahaan Kelas Dunia (Global Fortune 500), Perusahaan berkomitmen untuk melakukan diversifikasi pendapatan di luar bisnis penjualan batu bara. Komitmen ini merupakan aspek yang krusial dalam transformasi bisnis perusahaan dalam jangka panjang dan upaya meneguhkan visi perusahaan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PTBA memiliki 4 (empat) pilar bisnis utama yang akan menjadi kerangka pengembangan bisnis Perusahaan ke depan, yaitu:

Future Strategy

To achieve the State's mandate for MIND ID to become a World-Class Company (Global Fortune 500), the Company is dedicated to diversifying its revenue streams beyond coal sales. This is a crucial aspect of the company's long-term business transformation and vision strengthening efforts. To fulfill this commitment, PTBA has identified four main business pillars that will serve as the foundation for the company's future growth and development:

Business Strategy Framework

Mandat, visi, pilar dan tema strategis untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan
Mandate, vision, pillars, and strategic themes to support the company's business sustainability

Mandat MIND ID
MIND ID Mandate

Perusahaan Kelas Dunia
World Class Company | MIND ID Global Fortune 500

Penguasaan Cadangan Reserve Control	Pengembangan Hilirisasi Downstreaming Development	Kepemimpinan Pasar Market Leader

Visi PTBA
PTBA vision

"Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan"
"Becoming a world-class energy company that cares about the environment"

Pilar 1 | Pillar 1 — Tambang / Mining

- Cadangan: Penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan baru yang ekonomis
- Produksi: Peningkatan jumlah produksi
- Operasional: Dekarbonisasi, digitalisasi dan efisiensi biaya operasional

- Reserve: Maintaining existing reserves and controlling new economist reserves
- Production: Increased production capacity
- Operational: Decarbonization, digitalization, and operational cost efficiency

Pilar 2 | Pillar 2 — Logistik, Infrastruktur, dan Trading / Logistic, Infrastructure, and Trading

- Angkutan: Optimasi angkutan logistik hasil tambang
- Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur yang mendukung bisnis perusahaan
- Trading: Penjualan produk hasil tambang dan turunannya serta diversifikasi segmen pasar

- Transportation: Optimizing transportation logistic on mining products
- Infrastructure: Infrastructure development to support the Company's business
- Trading: Sales of mining and its derivative products and market segment diversification

Pilar 3 | Pillar 3 — *Downstream*, Energi, dan Utilitas / Downstream, Energy, and Utilities

- *Downstream*: Penjajakan produk turunan batu bara yang ekonomis dan memberikan nilai tambah
- Komoditas Energi: Bisnis komoditas sumber energi alternatif
- Power: Pengembangan bisnis pembangkit listrik berbasis batubara dengan teknologi bersih dan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan
- *Value Chain* dan Teknologi Energi: Pengembangan bisnis rantai nilai dan teknologi energi
- *Utility Services*: Penyediaan jasa utilitas untuk mendukung kebutuhan industri

- Downstream: Exploring economist coal derivative products and bring added-value
- Energy commodity: alternative energy-based business commodity
- Power: The development of coal power plant with clean energy and new renewable energy power plant
- Value Chain and Energy Technology: The development of value chain business and energy technology
- Utility Service: the provision of utility service to support the industrial needs

Pilar 4 | Pillar 4 — *Green Business*

- Bisnis Karbon: Bisnis berbasis manajemen karbon (*nature and technology-based*)
- Ekonomi Sirkular: Bisnis berbasis upaya ekstensi siklus hidup produk
- *Green Solutions*: Bisnis berbasis penyediaan jasa yang memberikan solusi ramah lingkungan

- Carbon Business: Carbon-based business (nature and technology-based)
- Circular Economy: business based on efforts on products' life cycle extension
- Green solutions: Business based on the service provision to bring environmentally friendly solution

I Inovasi dan Kemitraan / Partnership and Innovation

- **Riset & Pengembangan:**
  Research & Development:
  Memperkuat R&D untuk mendukung inovasi, pengembangan bisnis baru dan dekarbonisasi
  Strengthening R&D to support innovation, new business development, and decarbonization
- **Kemitraan** | Partnership:
  Menjalin kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah
  Maintaining strategic partnerships for added-value

II Organisasi dan Kapabilitas / Organization and Capabilities

- **Organisasi dan Sumber Daya Manusia**
  Organization and Human Capital
  Penguatan struktur organisasi dan pengembangan SDM
  Strengthening organization structure and HC development
- **Tata Kelola**
  Governance
  Penguatan tata kelola induk serta anak dan afiliasi Perusahaan
  Strengthening governance in parent company, subsidiaries, and affiliations
- **Anak dan Afiliasi Perusahaan**
  Subsidiaries and Affiliation
  Penguatan peran dan optimalisasi kinerja anak dan afiliasi perusahaan
  Strengthening subsidiaries and affiliation's role and optimizing their performance
- **Kapital**
  Capital
  Manajemen kas dan akses pembiayaan berkelanjutan
  Cash management and access to sustainable financing

1. Tambang

Pada pilar ini, strategi pengembangannya meliputi inisiatif strategis pada bidang cadangan, produksi, dan operasi. Dalam hal cadangan, Perusahaan berfokus kepada penjagaan atas cadangan eksisting dan penguasaan cadangan baru. Penjagaan atas cadangan eksisting ini dilakukan melalui pemantauan secara ketat batas-batas IUP eksisting serta melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) secara tepat waktu. Kemudian yang kaitannya dengan penguasaan cadangan baru, Perusahaan terbuka terhadap setiap opsi, apakah itu melalui, akuisisi, lelang, ataupun penugasan dari Negara.

1. Mining

In this pillar, the development strategy includes strategic initiatives in the fields of reserves, production and operations. In terms of reserves, the Company focuses on safeguarding existing reserves and controlling new reserves. Safeguarding of existing reserves is carried out through strict monitoring of existing IUP boundaries and timely extension of mining concession (IUP). In relation to the control of new reserves, the Company is open to every option, whether through acquisition, auction, or assignment from the State.

Selanjutnya terkait strategi di bidang produksi, perusahaan akan secara bertahap meningkatkan produksi setiap tahunnya, dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batubara. Selain itu, harapannya dengan peningkatan jumlah produksi ini, akan ada efisiensi pada satuan biaya operasional karena selaras dengan prinsip *economies of scale*. Tidak hanya itu, implementasi digitalisasi operasi dan penerapan teknologi memungkinkan pengurangan dampak lingkungan serta meningkatkan keselamatan kerja untuk efisiensi biaya operasional yang lebih besar.

Regarding the strategy in the production sector, the company will gradually increase production every year, in order to accelerate the monetization of coal reserves. Apart from that, it is hoped that by increasing the amount of production, there will be efficiency in unit operational costs because it is in line with the principle of economies of scale. The implementation of digitalization of operations and the application of technology allows reducing environmental impacts and increasing work safety for greater operational cost efficiency.

2. Logistik, Infrastruktur, dan *Trading*

Pilar ini berhubungan dengan pengembangan di bidang logistik, infrastruktur, dan *trading*. Tujuan utama dari pilar ini adalah untuk mendukung *supply chain* yang berkelanjutan melalui keandalan operasi tambang dan distribusi batu bara ke pelabuhan, serta penambahan opsi tujuan penjualan batu bara. Hal ini termasuk *unlocking* logistik, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan *trading* yang efektif.

Dalam kaitannya dengan pengembangan logistik, Perusahaan terus berupaya menambah kapasitas angkutan kereta api dan mencari opsi moda transportasi lain untuk mengimbangi laju peningkatan produksi. Kemudian untuk infrastruktur, Perusahaan juga terus melakukan investasi-investasi baru secara selektif yang tujuannya menjamin kelangsungan bisnis perusahaan. Terakhir dan yang tak kalah pentingnya, untuk pengembangan bisnis *Trading* di sini tidak hanya mencakup jual beli produk hasil tambang saja, tetapi juga mencari cara untuk diversifikasi sumber pasar, serta memastikan produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan efisien dan aman.

2. Logistic, Infrastructure, and Trading

This pillar relates to developments in the fields of logistics, infrastructure, and trading. The main objective of this pillar is to support a sustainable supply chain through reliable mining operations and coal distribution to ports, as well as additional coal sales destination options. This includes unlocking logistics, sustainable infrastructure development, and effective trading.

Concerning logistics development, the Company continues to strive to increase rail transportation capacity and is looking for options for other modes of transportation to keep up with the rate of increase in production. For infrastructure, the Company also continues to make new investments selectively to ensure the continuity of the company's business. Last but not least, developing a trading business here does not only include buying and selling mining products, but also looking for ways to diversify market sources, and ensure products can reach consumers efficiently and safely.

3. *Downstream*, Energi, dan Utilitas

Pilar ini mengacu pada pengolahan batu bara menjadi produk turunan yang lebih bernilai, pengembangan bisnis komoditas sumber energi alternatif, dan peningkatan efisiensi energi. Selain itu, pada pilar ini juga mencakup inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan mengimplementasikan solusi yang lebih bersih dan efisien. Ini termasuk pengelolaan utilitas dan penyediaan jasa energi yang dapat diandalkan dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis *Downstream*, perusahaan menjajaki potensi produk turunan batu bara yang ekonomis dan bernilai tambah, seperti DME, MEG, Coal Carbonization dan lain-lain. Kemudian terkait pengembangan komoditas energi, selain tetap mencari potensi peluang pembangkit berbasis batu bara, perusahaan terus melanjutkan ekspansi bisnisnya ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT), serta menjelajahi peluang bisnis dalam rantai pasokan dan teknologi energi. Dalam pengembangan bisnis di bidang Energi ini, perusahaan menerapkan strategi pengembangan yang mencakup pertumbuhan organik dan aliansi strategis, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Downstream, Energy, and Utilities

This pillar refers to processing coal into more valuable derivative products, developing alternative energy source commodity businesses, and improving energy efficiency. In addition, this pillar also includes innovations in renewable energy technologies and implementing cleaner and more efficient solutions. This includes utility management and the provision of reliable and sustainable energy services to society.

Concerning the Downstream business development, the company is exploring the potential for economical and value-added coal derivative products, such as DME, MEG, Coal Carbonization and others. Then regarding the development of energy commodities, apart from continuing to look for potential coal-based generating opportunities, the company continues to expand its business into the new and renewable energy (EBT) sector, as well as exploring business opportunities in the supply chain and energy technology. In developing its business in the Energy sector, the company implements a development strategy that includes organic growth and strategic alliances, both domestically and abroad.

4. Green Business

Pilar ini berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini melibatkan eksplorasi dan implementasi dari teknologi hijau serta inisiatif yang dapat mendukung ekonomi sirkular. Tujuan dari pilar ini adalah untuk menciptakan solusi yang mengurangi dampak lingkungan, termasuk pengurangan emisi dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Pilar ini juga mencakup pengembangan produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim.

Perwujudan inisiatif strategis dari pilar ini meliputi keterlibatan PTBA dalam bisnis karbon, baik sebagai pembeli atau penjual unit karbon. Kemudian bagaimana perusahaan dapat mengembangkan bisnis yang berbasis pengembangan siklus hidup produk yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis dan sosial di lingkungan perusahaan. Terakhir dan tak kalah pentingnya, perusahaan juga berniat untuk merambah ke bisnis *green solutions* melalui penyediaan teknologi pengelolaan limbah, reforestasi dan rehabilitasi lahan, serta teknologi pengawasan lingkungan.

Pilar Tambang dan Pilar Logistik, Infrastruktur dan *Trading* akan menjadi penopang utama bisnis segmen batu bara milik Perusahaan, sedangkan Pilar *Downstream*, Energi dan Utilitas serta Pilar *Green Business* akan menjadi penopang pengembangan bisnis segmen lainnya.

Selaras dengan pengembangan bisnis, Perusahaan juga berkomitmen untuk melakukan dekarbonisasi di seluruh rantai nilai perusahaan sebagai bentuk dukungan pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) sektor energi Indonesia di tahun 2060. Strategi dekarbonisasi yang dilakukan oleh Perusahaan bertumpu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu Dekarbonisasi Operasional, Transisi ke Portofolio Lebih Bersih, dan Offset Emisi. Melalui tiga pilar ini, Perusahaan diharapkan, baik dalam operasional maupun pengembangan usahanya, akan lebih ramah terhadap lingkungan dan lebih berorientasi pada keberlanjutan.

4. Green Business

This pillar focuses on sustainable and environmentally friendly business growth. This involves the exploration and implementation of green technologies and initiatives that can support the circular economy. The goal of this pillar is to create solutions that reduce environmental impact, including reduced emissions and better waste management. This pillar also includes the development of products and services that support environmental sustainability and contribute to tackling climate change.

The realization of strategic initiatives from this pillar includes PTBA's involvement in the carbon business, either as a buyer or seller of carbon units. Then followed by the Company's effort in developing develop a business based on product life cycle development produced by business and social activities in the company environment. Lastly, the company also intends to expand into the green solutions business by providing waste management technology, reforestation and land rehabilitation, and environmental monitoring technology.

The Mining Pillar and the Logistics, Infrastructure and Trading Pillar will be the main pillars of the Company's coal segment business, while the Downstream, Energy and Utilities and Green Business Pillars will support the business development of other segments.

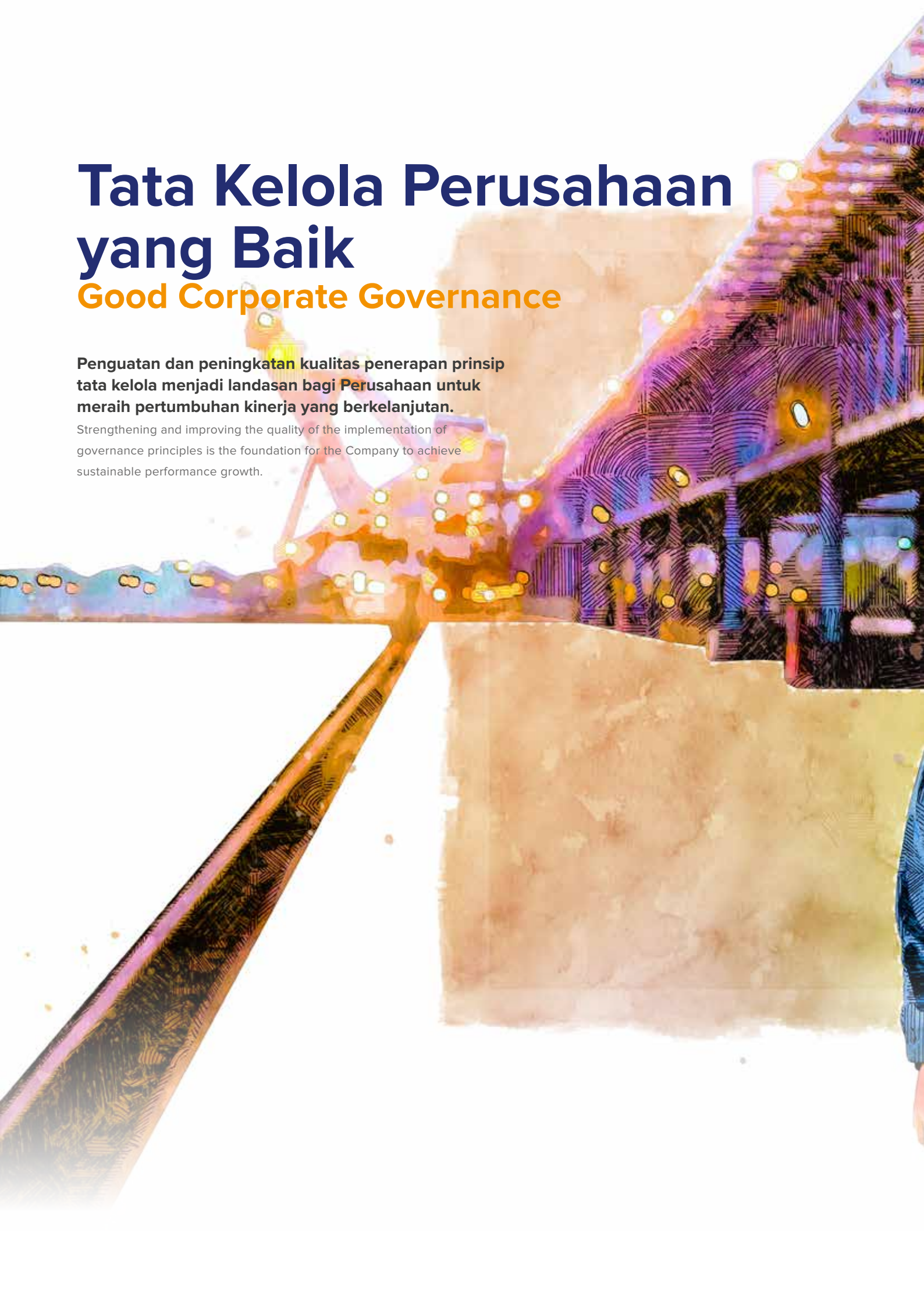
Along with business development, the Company is also committed to carrying out decarbonization throughout the company's value chain as a form of support for achieving Net Zero Emission (NZE) in the Indonesian energy sector in 2060. The decarbonization strategy carried out by the Company is based on 3 (three) main pillars, namely Operational Decarbonization, Transition to a Cleaner Portfolio, and Emissions Offset. Through these three pillars, it is hoped that the Company, both in its operations and business development, will be more environmental friendly and more sustainability oriented.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

Penguatan dan peningkatan kualitas penerapan prinsip tata kelola menjadi landasan bagi Perusahaan untuk meraih pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Strengthening and improving the quality of the implementation of governance principles is the foundation for the Company to achieve sustainable performance growth.




05

Ikhtisar Pencapaian Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

Achievement on Corporate Governance Highlights in 2023

Good Corporate Governance (GCG)



14/11/2023

Berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 berdasarkan hasil audit resertifikasi PT TUV Nord Indonesia selaku Badan Sertifikasi Independen

Successfully maintained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification based on the results of the recertification audit of PT TUV Nord Indonesia as an Independent Certification organ

Awards from External Parties



15/03/2023

Ajang "Anugerah BUMN" meraih penghargaan Perusahaan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Terbuka pada kategori Terbaik II Tata Kelola Perusahaan

Won the SOEs Company & SOEs Subsidiaries award in the Best II category for Corporate Governance at the SOEs Award



30/08/2023

Ajang "GRC & Performance Excellence Award 2023" meraih 4 (empat) kategori penghargaan:

- ***The Greatest Champions of GRC Excellence Performance***
- ***The Best GRC for IT/Digital Transformation***
- ***The Best CEO for GRC Excellence* untuk DIrektur Utama, Arsal Ismail**
- ***The Best GRC Women Leader* untuk Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, Farida Thamrin**

Won The 2023 GRC & Performance Award in 4 (four) categories:

- The Greatest Champions of GRC Excellence Performance
- The Best GRC for IT/Digital Transformation
- The best CEO for GRC Excellence for President Director Arsal Ismail
- The Best GRC Women Leader for Finance and Risk Management Director Farida Thamrin



06/11/2023

Ajang "Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)" meraih penghargaan tertinggi yaitu Platinum

Won the highest award, Platinum at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)



27/11/2023

Ajang "Annual Report Award (ARA)" meraih Juara II Kategori Go Publik Non Keuangan

Runner-up for Non-finance Go Public at the Annual Report Award (ARA)



20/12/2023

Ajang "Corporate Governance Perception Index (CGPI)" meraih predikat *The Most Trusted Company* dengan nilai 90,03 yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA

Won The Most Trusted Company with a score of 90.03 at the Corporate Governance Perception Index (CGPI) by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment Implementation of Good Corporate Governance



PTBA berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan secara konsisten, sejalan dengan keyakinan Perusahaan bahwa GCG merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan. Penerapan GCG di Perusahaan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Perusahaan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTBA is committed to implement the Good Corporate Governance (GCG) in the Company consistently, in line with the Company's belief that GCG is a basic need and foundation to carry out the Company's business activities. The implementation of GCG in the Company prioritizes ethics and integrity in the management which is aimed at encouraging increased performance, guaranteeing fulfilled rights for stakeholders, and increasing compliance with applicable laws and regulations.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTBA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atau sumber lain dapat menjadi acuan, termasuk standar terbaik (*best practice*) yang berkaitan dengan penerapan GCG. Acuan tersebut menjadi panduan dan pedoman bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pada seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, mulai dari hak dan kewajiban Pemegang Saham, petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hingga hubungan Perusahaan dengan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).

GCG Implementation Basis

The implementation of Good Corporate Governance in PTBA refers to applicable laws and regulations, as well as policies or other sources that can be used as a reference, including best standards (best practices) related to GCG implementation. This reference serves as a guidance for the Company in carrying out activities in all aspects of Company management, starting from the rights and obligations of Shareholders, instructions for the work procedures of the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties and responsibilities, to the Company's relationship with Stakeholders.

Adapun yang menjadi dasar penerapan GCG di PTBA, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
   b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
   c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   d. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
   a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
   b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
   b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
   c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
   g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
   h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
   i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

Below are the basis of GCG implementation at PTBA:

1. Law of the Republic of Indonesia
   a. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets;
   b. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
   c. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   d. Law No. 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information;
   e. Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs)
   a. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
   b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority Regulations
   a. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2014 concerning Implementation of Public Company Governance and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines;
   b. Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies;
   c. Financial Services Authority Regulation No. 35/ POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies;
   d. Financial Services Authority Regulation No. 08/ POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites;
   e. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
   f. Financial Services Authority Regulation No. 30/ POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Public Offering Proceeds;
   g. Financial Services Authority Regulation No. 31/ POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
   h. Financial Services Authority Circular No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Public Company Governance Guidelines;
   i. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work of the Audit Committee Implementation;

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik;
o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;
q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/ POJK.04/2020 tentang Pemeringatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;
v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.

4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
   Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
5. Pedoman yang Diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
   a. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2021;
   b. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004;
   c. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2004;
   d. ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*

j. Financial Services Authority Regulation No. 56/ POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter;
k. Financial Services Authority Regulation No. 29/ POJK.04/2016 concerning the Obligation to Submit Annual Reports for Issuers and Public Companies.
l. Financial Services Authority Regulation No. 11/ POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares.
m. Financial Services Authority Regulation No. 51/ POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
n. Financial Services Authority Regulation No. 58/POJK.04/2017 concerning Submission of Registration Statements or Submission of Corporate Actions Electronically;
o. Financial Services Authority Regulation No. 75/ POJK.04/2017 concerning the Responsibility of Directors for Financial Reports;
p. Financial Services Authority Regulation No. 7/ POJK.04/2018 concerning Submission of Reports through the Electronic Reporting System for Issuers or Public Companies;
q. Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies;
r. Financial Services Authority Regulation no. 16/ POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies;
s. Financial Services Authority Regulation No. 17/ POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
t. Financial Services Authority Regulation No. 42/ POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions;
u. Financial Services Authority Regulation No. 49/ POJK.04/2020 concerning Warning of Debt Securities and/or Sukuk;
v. Financial Services Authority Regulation No. 14/ POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies;
w. Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2022 concerning Stock Split and Stock Reverse by Public Companies;

4. Indonesian Stock Exchange Regulations
   Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-E concerning Obligations to Submit Information;
5. Guidelines Published by the National Committee for Governance Policy (KNKG)
   a. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), issued by the National Committee for Governance Policy in 2021;
   b. Guidelines for Independent Commissioners, issued by the National Committee for Governance Policy, 2004;
   c. Guidelines for Establishing an Effective Audit Committee, issued by the National Committee for Governance Policy in 2004;
   d. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik diimplementasikan di Perusahaan melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada seluruh aktivitas bisnis PTBA. Tujuan penerapan prinsip GCG di Perusahaan, sejalan dengan tujuan penerapan prinsip GCG sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Objectives of Implementing Corporate Governance

Good Corporate Governance is implemented in the Company through the application of Good Corporate Governance principles in all PTBA business activities. The GCG implementation at the Company is in line with the goal to implement GCG principles as contained in the Regulation of the State-Owned Enterprises Minister of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as follows:

1. Optimizing the Company's value to have strong competitiveness, both nationally and internationally, in an effort to maintain its existence and live sustainably to achieve the Company's target and objectives;
2. Encourage the management of the Company in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering the functions and increasing the independence of the Company Organ;
3. Encourage Company Organ to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with statutory provisions, as well as awareness of the corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increasing the Company's contribution to the national economy;
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

Prinsip Tata Kelola dan Pilar Governansi Korporat

Selain menerapkan prinsip Tata Kelola, PTBA juga menjadikan pilar Governansi Korporat dari Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) sebagai panduan perusahaan, sehingga atas penerapan keduanya menjadikan Perusahaan memenuhi prinsip Tata Kelola serta memenuhi kepentingan Pemegang Saham dengan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan Pemangku Kepentingan.

Principles of Corporate Governance and Pillars of Corporate Governance

Besides implementing the governance principle, PTBA also uses the Corporate Governance pillars of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) as company guidelines. Therefore, the implementation of both guidelines can help the company to fulfill the principles of Governance and fulfill the interests of Shareholders while maintaining balance with the needs of Stakeholders.

Prinsip GCG
GCG Principal

Prinsip GCG GCG Principal	Makna Description	Bukti Penerapan Implementation
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Disclosure in carrying out the decision-making process and disclosure in disclosing material and relevant information about the Company.	1. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja perusahaan dalam bentuk *Annual Report*. 2. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja lingkungan perusahaan dalam bentuk *Sustainability Report*, Laporan Pengelolaan Iklim (*Climate Change*) oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP). 3. Keterbukaan dalam penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). 1. Disclosure in delivering company performance in the Annual Report. 2. Disclosure in delivering the company's environmental performance in the Sustainability Report and the Climate Change Report by the Carbon Disclosure Project (CDP). 3. Disclosure in delivering Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL).
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of functions, implementation, and accountability of the Company Organ to carry out effective company management.	Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam SK Direksi No. 109/0100/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk. The determination of main tasks and functions for each work unit is articulated in Directors' Decree No. 109/0100/2022, dated April 18, 2022, regarding the Organizational Structure of PT Bukit Asam Tbk.

Prinsip GCG
GCG Principal

Prinsip GCG GCG Principal	Makna Description	Bukti Penerapan Implementation
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Compliance in company management with the provisions of laws and regulations and healthy corporate principles.	Melaksanakan proses bisnis sesuai Tata laksana dan Tata Cara Kerja yang berpedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Carrying out business processes in accordance with the Management and Work Procedures according to the applicable laws and regulations.
Independensi Independency	Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. A situation where the Company is managed professionally without Conflicts of Interest and influence/pressure from any party that is not in line with the provisions of laws and regulations and healthy corporate principles	1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PTBA. 2. Penandatanganan pernyataan independensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Pengisian Uji Kelayakan (Due Diligence) dalam proses pengadaan & rekrutmen Pegawai baru. 1. The signing of Pact of Integrity by all PTBA employees. 2. Signing of the independence statement by the Board of Commissioners and Directors 3. Completing the Due Diligence Test in the process of procuring & recruiting new employees.
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fairness and equality in fulfilling stakeholder rights based on agreements and applicable provisions.	1. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai baru. 2. Pemberian kesempatan yang sama dalam memperoleh jenjang karir. 3. Pegawai diberikan kesempatan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender dan kondisi fisik. 1. Providing equal opportunities in recruiting new employees. 2. Providing equal opportunities to obtain career paths. 3. Employees are given the opportunity to carry out their duties professionally without distinguishing between racism, gender and physical condition.

Pilar Governansi Korporat
Pillars of Corporate Governance

Pilar Governansi Pillars of Governance	Makna Description	Bukti Penerapan Implementation
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and builds and maintains moral values and trust consistently. The Company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality. This step is managed independently to prevent intervention from each party.	1. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan Dokumen Nomor: 277/0100/2023 Tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk *(Code Of Conduct)* dan Penerapannya dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas COC seluruh Insan PTBA Pada Tahun 2023. 2. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Bukit Asam Nomor Dokumen: BASMAP.01 No Revisi 0 Tahun 2020 3. Pedoman Lingkungan Kerja Saling Menghargai di PTBA *(Respectful Workplace Policy)* pada tanggal 14 April 2022 1. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 07/SK/PTBA-DEKOM/2021 and Document Number: 408A/0100/2021 Concerning PT Bukit Asam Tbk's Code of Conduct and Business Ethics and its proven implementation with the signing of the COC Integrity Pact for all PTBA's employees in 2023. 2. Bukit Asam Anti-Bribery Management System Guidelines Document Number: BASMAP.01 Revision No. 0 2020 3. Guidelines for a Respectful Work Environment in PTBA (Respectful Workplace Policy) on April 14, 2022
Transparansi Transparency	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company can be held accountable for its performance transparently and fairly. Therefore, the Company must be managed properly, measurably, and in line with corporate interests while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.	1. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja perusahaan dalam bentuk *Annual Report*. 2. Keterbukaan dalam penyampaian kinerja lingkungan perusahaan dalam bentuk *Sustainability Report*, Laporan Pengelolaan Iklim (*Climate Change*) oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP). 3. Keterbukaan dalam penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). 1. Disclosure in delivering the Company's performance in the Annual Report. 2. Disclosure in delivering the company's environmental performance in the Sustainability Report and Climate Change Report by the Carbon Disclosure Project (CDP). 3. Disclosure in delivering Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL).
Akuntabilitas Accountability	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in running the business, The Company provides material and relevant information in accessible and understandable manner for stakeholders' interest. PTBA takes the initiative to disclose not only issues required by statutory regulations, but also important matters as part of decision-making activities by shareholders, creditors, and other stakeholders.	Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam SK Direksi No. 109/0100/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk dan SK Direksi No. 033/0100/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Perubahan I Keputusan Direksi PTBA No 109/0100/2022 atas Struktur Organisasi PTBA. The determination of main tasks and functions for each work unit is articulated in Directors' Decree No. 109/0100/2022, dated April 18, 2022, regarding the Organizational Structure of PT Bukit Asam Tbk, as well as in Directors' Decree No. 033/0100/2023, dated February 22, 2023, concerning Amendment I to Directors' Decision of PTBA No. 109/0100/2022 on the Organizational Structure of PTBA.

Pilar Governansi Korporat
Pillars of Corporate Governance

Pilar Governansi Pillars of Governance	Makna Description	Bukti Penerapan Implementation
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with statutory regulations and is committed to carry out its responsibilities towards society and the environment as an effort to contribute to sustainable development by collaborating with all relevant stakeholders to improve their lives in line with business interests and the sustainable development agenda	1. Pedoman TJSL No Dok. BACSRM.01 2. Penetapan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja dalam TJSL dan ESG SK Direksi No. 134A/0100/2023 tanggal 30 Juni 2023 tentang Komite TJSL dan ESG PT Bukit Asam Tbk 1. TJSL Guideline No. Dok. BACSRM.01 2. The appointment of the main function and each work unit's function in TJSL and ESG on the Board of Directors Decree No.134A/0100/2023 dated June 30, 2023, on PTBA TJSL and ESG committee.

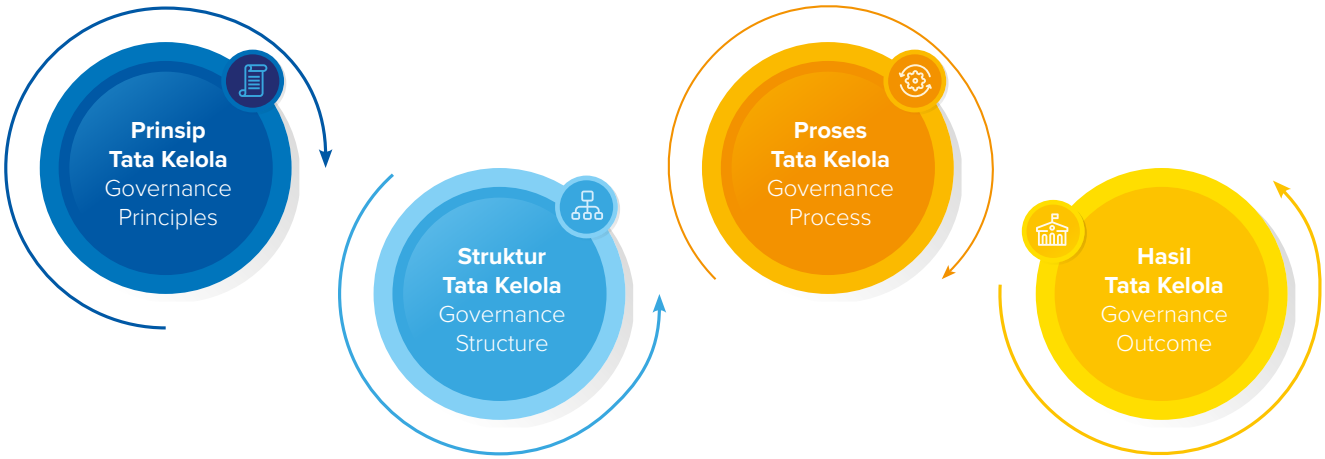
Kerangka Kerja Tata Kelola

Komitmen PTBA dalam konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan diwujudkan melalui *Governance Framework* atau Kerangka Kerja Tata Kelola. *Governance Framework* menjadi pondasi kokoh yang dibangun untuk mendasari segala tindakan Perusahaan dan menjadi acuan Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Perusahaan sehingga terwujud implementasi GCG yang konsisten dan berkelanjutan.

Governance Framework

PTBA's commitment to consistently implement good corporate governance on an ongoing basis is realized through the Governance Framework. The Governance Framework is a solid foundation to underlie all the Company's actions and becomes the Company's reference in implementing GCG principles. This is also in line with the direction set by the Company to realize consistent and sustainable GCG practice.

Kerangka Kerja Tata Kelola PTBA
Governance Framework of PTBA



Kerangka Kerja Tata Kelola PTBA memuat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Prinsip Tata Kelola, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan tata kelola di PTBA, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran;
2. Struktur Tata Kelola, yaitu, organ tata kelola PTBA yang menjalankan mandat pelaksanaan tugas PTBA dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PTBA, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi;
3. Proses Tata Kelola, yaitu serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ PTBA untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola PTBA dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan;
4. Hasil Tata Kelola, yaitu wujud pencapaian penerapan Tata Kelola di PTBA yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah Perusahaan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan.

PTBA's Governance Framework contains four main elements, namely:

1. Governance Principles, the principles for the implementation of governance in PTBA, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness;
2. Governance Structure, the governance organ at PTBA which is responsible for the mandate of implementing PTBA's duties and the function of monitoring the management of PTBA, namely the GMS, Board of Commissioners, and Directors;
3. Governance Process, a series of standards and procedures used by PTBA to ensure that the implementation and enforcement of PTBA Governance is carried out in a planned, consistent, and sustainable manner;
4. Governance Outcome, achievement of the governance implementation in PTBA which has a positive impact to bring added value for the Company and the sustainability of the Company's business.

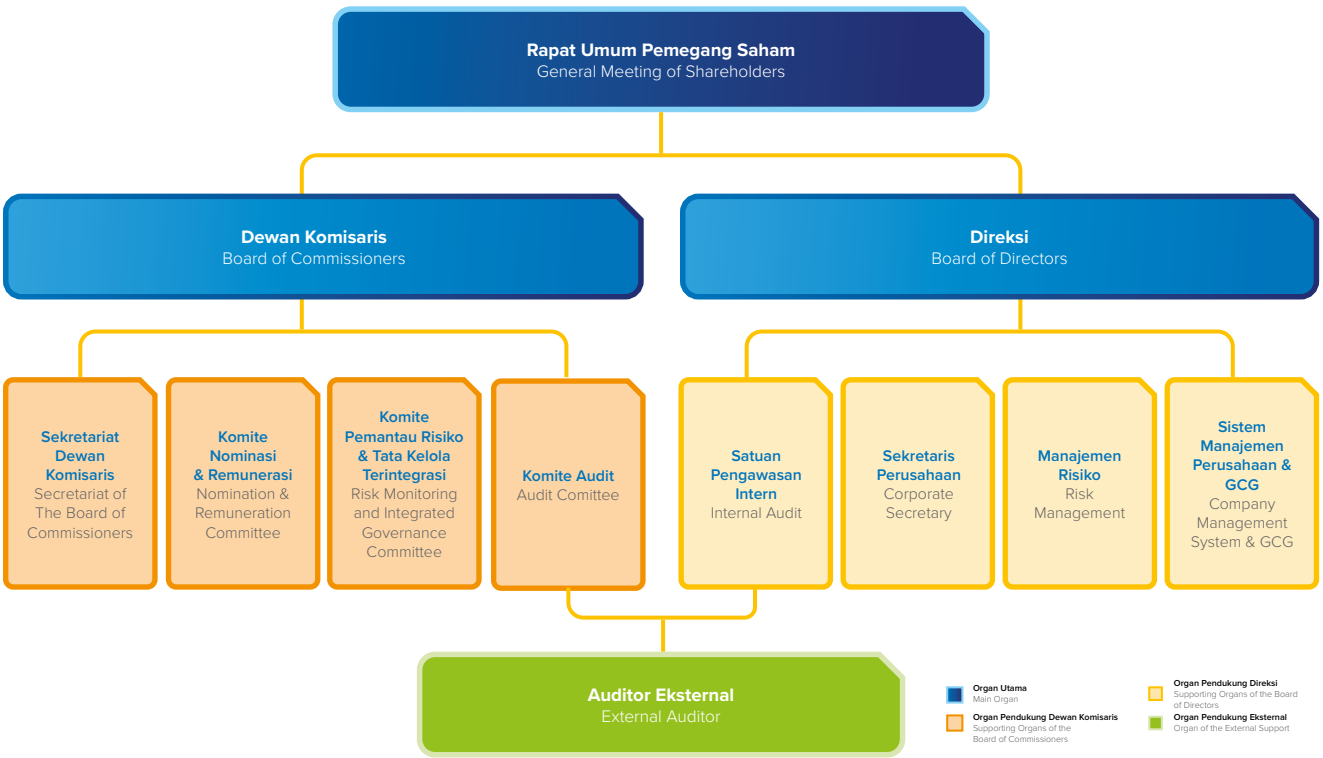
Struktur Tata Kelola
Governance Structure

Struktur Tata Kelola di Perusahaan merupakan Organ Perusahaan yang memiliki peran penting dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I terkait Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing Organ memiliki fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam kedudukan sebagai Organ Perusahaan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Governance Structure in the Company is a Company body with an important role to implement Good Corporate Governance. In accordance with Law No. 40 of 2007 Chapter I regarding General Provisions Article 1, the Company organ consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors with their own function, authority, and responsibility.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is in charge of carrying out general and/ or specific supervision under the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is authorized and entirely responsible for the Company's management for the benefit of the Company, following the purposes and objectives of the Company, and represents the Company, both inside and outside the court following the provisions of the Articles of Association.



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk organ pendukung, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Serta mempertimbangkan Surat PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 171/E/DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk, Dewan Komisaris perlu membentuk Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi & Remunerasi.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas pada tanggal 15 Desember 2023 diterbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, dengan detail organ pendukung sebagai berikut:
1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi
3. Komite Nominasi & Remunerasi

Selain itu, Dewan Komisaris dan komite-komite tersebut juga dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris, khususnya terkait hal-hal yang bersifat administratif.

Sedangkan organ pendukung yang dimiliki Direksi adalah:

1. Satuan Pengawasan Intern
2. Sekretaris Perusahaan
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko
4. Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG

Governance Soft Structure

Good Corporate Structure merupakan aspek penting dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, namun keberadaannya harus didukung dengan *Governance Soft Structure* agar proses implementasi dapat berjalan efektif dan terarah dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. *Governance Soft Structure* di PTBA diwujudkan dalam bentuk kebijakan maupun pedoman di Perusahaan yang berfungsi sebagai panduan bagi Insan PTBA dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

Melalui *Corporate Governance Policy*, PTBA menetapkan hierarki peraturan dan kebijakan dalam rangka mendukung penerapan GCG di Perusahaan. Adapun hierarki peraturan dan kebijakan yang dimaksud, sebagai berikut:

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Directors can form supporting organs, in line with the needs and applicable laws and regulations. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises and considering PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Letter No. 171/E/DIRMRHSSE/X/2023 October 9, 2023, regarding Determination of Risk Categories and Classifications of PT Bukit Asam Tbk, the Board of Commissioners must form a Risk Monitoring Committee & Integrated Governance and Nomination & Remuneration Committee.

Thus, on December 15, 2023, the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk was issued No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, with details of supporting body as follows:
1. Audit Committee
2. Integrated Risk Monitoring & Governance Committee
3. Nomination & Remuneration Committee

The Board of Commissioners and these committees are assisted by the Secretariat of of the Board of Commissioners, especially on administrative matters.

Meanwhile, the supporting organ owned by the Board of Directors are:
1. Internal Audit
2. Corporate Secretary
3. Risk Management Work Unit
4. Corporate Management System and GCG Work Unit

Governance Soft Structure

Good Corporate Governance is an important aspect in the implementation of Good Corporate Governance to ensure the effectivity in the implementation and aims to support the Company in achieving its goals. Governance Soft Structure in PTBA is realized in the form of policies and guidelines in the Company as a guide for the employees in carrying out Company activities.

Through Corporate Governance Policy, PTBA established a hierarchy of regulations and policies to support the implementation of GCG in the Company. The hierarchy of regulations and policies in question is as follows:

PERATURAN
REGULATION

1. **Peraturan Perundang-undangan;**
   Statutory Regulations
2. **Anggaran Dasar;**
   Articles of Association
3. **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;**
   Decision of the General Meeting of Shareholders
4. **Pedoman Strategis Tata Kelola MIND ID;**
   Strategic Guidelines for MIND ID Governance
5. **Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;**
   Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors
6. **Keputusan Dewan Komisaris;**
   Decision of the Board of Commissioners
7. **Keputusan Direksi/Kebijakan Kepengurusan;**
   Management Policies
8. **Keputusan Anggota Direksi dalam Pelaksanaan Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab;**
   Decisions of Board of Directors Members in Implementing the Division of Duties, Authority, and Responsibilities
9. **Surat Edaran Direksi;**
   Circular Letter
10. **Keputusan Kepala Satuan Kerja.**
    Decision of the Head of Work Unit

KEBIJAKAN
POLICY

1. ***Corporate Governance Policy;***
   Corporate Governance Policy
2. ***Code of Conduct;***
   Code of Conduct
3. ***Charter;***
   Charter
4. **Kebijakan Pelaksanaan;**
   Management Policy
5. **Management Policy/Pedoman (Guidance);**
   Management Policy (Guidance)
6. **Tata Laksana (TL);**
   Standard Operating Procedure
7. **Tata Cara Kerja (TCK).**
   Work Instruction

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Dalam kedudukannya sebagai Sub Holding dari BUMN, maka mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PTBA mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Guna memastikan penerapan prinsip GCG di Perusahaan berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawasan, Pengawas tata kelola di PTBA dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Internal dan Eksternal, yang didasarkan pada Pemangku Kepentingan sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.

Corporate Governance Mechanism

As SOEs Sub-Holding, the Good Corporate Governance mechanism in PTBA refers to the Minister of SOEs Regulation No.PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities in State-Owned Enterprises. A supervision is also needed to ensure the proper implementation of GCG principles in the Company. Governance supervisors at PTBA are divided into two parts, namely Internal and External, which are based on Stakeholders as described in the chart below.



Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

Sustainable Improvement of the Quality of GCG Implementation

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Efforts to improve the quality of GCG implementation is described in the following chart:



Siklus peningkatan kualitas implementasi penerapan GCG di PTBA meliputi:

1. Penetapan Standar Kualitas Penerapan;
2. Implementasi;
3. *Monitoring*;
4. Pengukuran/*Assessment*;
5. Peningkatan Kualitas Implementasi dan *Benchmarking*.

The quality improvement cycle for implementing GCG (Good Corporate Governance) at PTBA includes:

1. Establishment of Implementation Quality Standards;
2. Implementation;
3. Monitoring;
4. Assessment;
5. Improvement of Implementation Quality Measurement/ Benchmarking.

Penetapan Standar Kualitas Penerapan GCG

PTBA telah menetapkan standar implementasi GCG sebagai acuan dasar pemenuhan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut memuat kriteria dari berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi GCG. Standar implementasi GCG di Perusahaan mengacu pada:

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN;
2. Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Determination of Quality Standards for GCG Implementation

PTBA has set GCG implementation standards as a basic reference to meet the quality of GCG implementation. This standard contains criteria for various aspects related to GCG implementation. GCG implementation standards in the Company refer to:

1. Good Corporate Governance in SOEs;
2. Public Company Governance established by the Financial Services Authority (OJK);
3. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021, published by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

Rekam Jejak Perkembangan Penerapan GCG di PTBA

Setiap tahunnya Perusahaan menetapkan sasaran strategis berupa program-program yang harus direalisasikan sebagai bentuk pencapaian perkembangan penerapan GCG di Perusahaan. Program-program tersebut ditentukan dengan mengacu kepada *Roadmap* Tata Kelola yang ditetapkan oleh Perusahaan. Sejak pertama kali menyatakan komitmennya dalam penerapan GCG, PTBA selalu konsisten dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG di Perusahaan. Konsistensi tersebut dapat dilihat pada bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2023.

Milestone of GCG Implementation at PTBA

Every year, the Company sets strategic targets in programs that must be realized as proof of the development of GCG implementation in the Company. These programs are determined by referring to the Governance Roadmap established by PTBA. Since the first time committing to implement GCG, PTBA has always been consistent in improving the quality of its GCG implementation. This consistency can be seen in the progress chart of GCG implementation in PTBA from 2004 to 2023.

Bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA Milestone of GCG Implementation in PTBA	
2004	Melakukan *mapping* dan *assessment*. Conduct mapping and assessment.
2005	• Membuat kerangka kerja implementasi. • Melakukan *set up* infrastruktur GCG. • Membentuk satuan kerja Manajemen Risiko. • Create an implementation framework. • Set up GCG infrastructure. • Establish a Risk Management work unit.
2006	• Membentuk Komite Risiko di Komisaris. • Menandatangani komitmen penerapan praktik GCG. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 67,46 sebagai Perusahaan Cukup Tepercaya. • Establish a Risk Committee under the Board of Commissioners. • Sign a commitment to implement GCG practices. • Participate in GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 67.46 as a Fairly Trusted Company.
2007	Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 80,87 sebagai Perusahaan Tepercaya. Participate in GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 80.87 as a Trusted Company.
2008	Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 81,23 sebagai Perusahaan Tepercaya. Participate in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 81.23 as a Trusted Company.
2009	• Melakukan pengesahan revisi *Soft Structure* GCG (*GCG Code, Board Manual* dan *Code of Conduct*) pada bulan Desember 2009. • Melakukan sosialisasi internal terhadap *Soft Structure* GCG pada bulan Desember 2009. • Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (Sodiq Purwoko & Rekan) dengan nilai 89,75 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 82,27 sebagai Perusahaan Tepercaya. • Approved the revision of Soft Structure GCG (GCG Code, Board Manual, and Code of Conduct) in December 2009. • Conducted internal socialization of the Soft Structure GCG in December 2009. • Conducted GCG assessment by an external party (Sodiq Purwoko & Partners) with a score of 89.75 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by The Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 82.27 as a Trusted Company.
2010	• Melakukan pengesahan revisi ke-2 Board Manual pada bulan Desember 2010. • Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 86,48 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 84,11 sebagai Perusahaan Tepercaya. • Approved the 2nd revision of Board Manual in December 2010. • Conducted internal GCG assessment at PTBA with a score of 86.48 and Very Good predicate • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 84.11 as a Trusted Company
2011	• Melakukan sosialisasi eksternal terhadap Soft Structure GCG pada bulan Juni 2011. • Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 89,78 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 84,33 sebagai Perusahaan Tepercaya. • Conducted external socialization on Soft Structure GCG in June 2011. • Conducted internal GCG assessment at PTBA with a score of 89.78 and Very Good predicate • Participated in GCG assessment by The Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 84.33 as a Trusted Company.
2012	• Melakukan pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) pada bulan Februari 2012. • Membentuk dan menunjuk Tim Pengelola SPP pada bulan Oktober 2012. • Menandatangani komitmen Manajemen terhadap implementasi SPP pada bulan November 2012. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 82,55 sebagai Perusahaan Tepercaya. • Approved the Whistleblowing System Guidelines (SPP) in February 2012. • Formed and appointed Whistleblowing System Management Team in October 2012 • Signed the Management Commitment to SPP implementation in November 2012 • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 82.55 as a Trusted Company.

Bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA Milestone of GCG Implementation in PTBA	
2013	• Melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran pada bulan Februari-Maret 2013. • Melakukan revisi *Soft Structure* GCG pada bulan Desember 2013. • Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 91,61 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 83,80 sebagai Perusahaan Tepercaya. • Socialized the SPP in February-March 2013. • Revised the Soft Structure GCG in December 2013. • Conducted internal GCG assessment at PTBA with a score of 91.61 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 83.80 as a Trusted Company.
2014	• Menindaklanjuti laporan *assessment* penerapan GCG di PTBA pada tahun 2014. • Melakukan sosialisasi *Soft Structure* GCG pada tahun 2014. • Menyusun Pedoman Gratifikasi pada tahun 2014. • Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (PT Netriva) dengan nilai 91,60 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 84,09 sebagai Perusahaan Tepercaya. • Followed up PTBA GCG assessment report in 2014. • Conducted socialization of Soft Structure GCG in 2014. • Prepared Gratification Guidelines in 2014. • Conducted GCG assessment by an external party (PT Netriva) with a score of 91.60 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 84.09 as a Trusted Company.
2015	• Melakukan sosialisasi gratifikasi oleh SPI dan KPK pada bulan Agustus dan Oktober 2015. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) pada bulan Agustus-Oktober 2015 dan mendapat peringkat sebagai Perusahaan Sangat Tepercaya. • Mengkaji *Soft Structure* GCG khususnya *Board Manual* dan ditetapkan dalam SK bersama Direksi dengan Dewan Komisaris No. 4/SK/PTBADEKOM/IX/2015 dan No. 159AJ/Kep/Int-0100/PW.01/2015 tanggal 1 September 2015. • Melakukan sosialisasi GCG untuk pemangku kepentingan internal (pegawai) tanggal 30 September 2015. • Penyusunan Draft Pedoman dan Prosedur Pengendalian Gratifikasi. • Mengikuti undangan dari Kementerian BUMN dalam kegiatan *monitoring* dan tindak lanjut *assessment* GCG BUMN 6 November 2015. • Melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai yang masih aktif. • Sosialisasi GCG termasuk tentang peraturan Gratifikasi di PTBA kepada *Stakeholder* Eksternal dilakukan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan bersama Satuan Pengawasan Internal pada tanggal 21 Desember 2015. • Melakukan Evaluasi (*review*) penerapan GCG oleh internal PTBA dengan nilai 92,53 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 85,25 sebagai Perusahaan Sangat Tepercaya. • Conducted socialization of gratification by Internal Audit and Indonesian Corruption Eradication Commission in August and October 2015. • Participated in GCG Assessment by The Indonesia Institute for Corporate Governance in August-October 2015 and was ranked as a Highly Trusted Company. • Reviewed the Soft Structure of GCG, especially the Board Manual, and stipulated in a joint decree with Board of Directors and Board of Commissioners No. 4/SK/PTBADEKOM/IX/2015 and No. 159AJ/Kep/Int-0100/PW.01/2015 dated September 1, 2015. • Conducted GCG socialization for internal stakeholders (employees) on September 30, 2015. • Preparation of Draft Guidelines and Procedures for Gratification Control. • Attended the invitation from the Ministry of SOEs in the monitoring and follow-up activities of SOE GCG assessment, on November 6, 2015. • Signed the Code of Conduct Compliance Statement by all active employees. • Socialization of GCG, including the Gratification regulations at PTBA to External Stakeholders, carried out by the Corporate Management System and Internal Audit Work Unit on December 21, 2015. • Conducted an internal evaluation (review) of the implementation of GCG by PTBA with a score of 92.53 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 85.25 as a Very Trusted Company.
2016	• Pembangunan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). • Sosialisasi GCG kepada pegawai dan Mitra Kerja. • Melakukan ***assessment*** GCG oleh pihak eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 88,66 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 85,55 dan peringkat sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya". • Formed the Gratification Control Unit. • GCG socialization to employees and business partners. • Conducted GCG assessment by an external party (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 88.66 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 85.55 as a “Very Trusted” Company.
2017	• Melakukan Sosialisasi GCG kepada pegawai dan mitra kerja di Tanjung Enim, Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan, dan Jakarta. • Melakukan revisi Panduan Berperilaku (*Code of Conduct*). • Menetapkan Pedoman dan Tata Laksana Pengendalian Gratifikasi. • Melakukan Evaluasi (review) penerapan GCG oleh pihak internal Bukit Asam dengan nilai 90,88 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 85,56 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya". • Disseminated GCG to employees and partners at Tanjung Enim, Kertapati Barging Port, Tarahan Port, and Jakarta. • Revised the Code of Conduct. • Established Guidelines and Procedures for Gratification Control. • Conducted GCG assessment by Bukit Asam internal party with a score of 90.88 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 85.56 as a “Very Trusted” Company
2018	• Penandatanganan Panduan Berperilaku (*Code of Conduct*) oleh Direksi dan Komisaris serta mendistribusikannya kepada seluruh pegawai. • Penandatanganan pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* (CoC) kepada seluruh Komisaris, Direksi, dan karyawan. • Sosialisasi GCG kepada seluruh pegawai melalui media elektronik e-mail, pemasangan spanduk, dan banner. • Melakukan *assessment* GCG oleh pihak eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 91,12 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 86,10 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya". • The Code of Conduct signed by Board of Directors and Board of Commissioners and distributed to all employees. • The Code of Conduct (CoC) Compliance statement signed by all Board of Commissioners, Board of Directors, and employees. • Socialized GCG to all employees through electronic media such as e-mail and installation of banners. • Conducted GCG assessment by an external party (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 91.12 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesian Institute for Corporate Governance with a score of 86.10 as a “Very Trusted” Company

Bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA Milestone of GCG Implementation in PTBA	
2019	• Penandatanganan pernyataan Benturan kepentingan oleh Komisaris dan Direksi. • Sosialisasi GCG kepada seluruh pegawai melalui media elektronik e-mail, pemasangan spanduk dan banner. • Melakukan *Review Board Manual* dan *Corporate Governance Policy* (CGP). • Melakukan Proses Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 dan Integrasi Panduan Tanggungjawab Sosial berbasis ISO 26000:2010 dalam rangka Implementasi *Environment Social Governance Management System* (ESGM *System*). • Melakukan Evaluasi (review) penerapan GCG oleh pihak internal PTBA dengan nilai 97,50 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 87,05 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya". • The Conflict of Interest Statement signed by Board of Commissioners and Board of Directors. • GCG socialization to all employees through electronic media e-mail, installation of banners, and banners. • The Board Manual and Corporate Governance Policy (CGP) review. • Conducted the Process of Developing an Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016 and Integration of Social Responsibility Guidelines based on ISO 26000:2010 to Implement the Environment Social Governance Management System (ESGM System). • Conducted GCG assessment by PTBA internal parties with a score of 97.50 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 87.05 as a “Very Trusted” Company
2020	• Penandatanganan pernyataan Independensi oleh Direksi. • Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media e-mail, spanduk dan banner. • Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi/*review* secara mandiri (Assessment internal) implementasi GCG tahun 2019. • Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diawali dengan penandatanganan komitmen bersama penerapan ISO 37001:2016 oleh Direksi. • Melakukan integrasi Panduan Tanggung Jawab Sosial (CSR) berbasis ISO 26000:2010. • Penandatanganan *Corporate Governance Policy* dan *Board Manual*. • Melakukan penandatangan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai. • Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada bulan Juli 2020. • Mengikuti TOP *Governance Risk Compliance* (GRC) *Performance Excellence Awards* tahun 2020. • Melakukan Assessment KPKU dengan pencapaian nilai 667,50 dengan peringkat *Emerging Industry Leader*. • Melakukan *Assessment* oleh pihak eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 96,10 predikat Sangat Baik. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 88,05 sebagai Perusahaan “Sangat Tepercaya”. • Statement of Independence signed by Board of Directors. • Conducted regular socialization of GCG through e-mail, banners and banner. • Followed up the recommendations on the results of self-evaluation/review (internal assessment) on the implementation of GCG in 2019. • Development of an Anti-Bribery Management System began with the signing of a joint commitment to implementing ISO 37001:2016 by Board of Directors. • Performed an Integration of Social Responsibility Guidelines (CSR) based on ISO 26000:2010. • Corporate Governance Policy and Board Manual signing. • Code of Conduct signing by all employees. • Received the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate in July 2020. • Participated in the TOP Governance Risk Compliance (GRC) Performance Excellence Awards in 2020. • Conducted KPKU assessment and achieve a score of 667.50 with the rank of Emerging Industry Leader. • Conducted an Assessment by external parties (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 96.10 and Very Good predicate. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 88.05 as a “Very Trusted” Company
2021	• Penandatanganan pernyataan Independensi oleh Direksi. • Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media e-mail, spanduk, banner, Video Tron dan *Forum Group Discussion* (FGD). • Melakukan *assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PT Bukit Asam Tbk dengan pencapaian nilai 681,50 dengan memperoleh Predikat *Industry Leader*. • Melakukan penandatangan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai. • Melakukan perbaikan dan penyesuaian memperhatikan peraturan perundangan dan kondisi terkini yang relevan untuk disesuaikan pada Pedoman *Code of Conduct* PT Bukit Asam Tbk. • Penandatanganan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Bukit Asam Tbk sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBADEKOM/2021 dan No. 408A/0100/2021 pada tanggal 15 September 2021. • Melakukan perbaikan dan penyesuaian memperhatikan peraturan perundangan dan kondisi terkini yang relevan untuk disesuaikan pada Pedoman *Whistle Blowing System* PT Bukit Asam Tbk. • Pelaksanaan Surveillance Audit dalam rangka pengecekan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk. • Mengikuti ajang Internasional *Global Good Corporate Governance Awards* (3G Awards) yang diselenggarakan oleh Cambridge IFA. • Melakukan evaluasi (*review*) terhadap penerapan GCG yaitu tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya yang telah dinilai (*assessment*) oleh Pihak Eksternal yang meliputi evaluasi terhadap penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dengan perolehan nilai evaluasi (*review*) sebesar 97,62 dengan predikat "Sangat Baik". • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 88,83 sebagai Perusahaan “Sangat Tepercaya”. • Pembangunan Aplikasi CISEA-GCG. • Statement of Independence signing by Board of Directors. • Conducted regular socialization of GCG through e-mail media, banners, Video Tron, and Forum Group Discussion (FGD). • Conducted the assessment of Superior Performance Assessment Criteria of PT Bukit Asam Tbk and achieve a score of 681.50 by obtaining the Industry Leader predicate. • Code of Conduct signing by all employees. • Made improvements and adjustments taking into account the latest relevant laws and conditions to be adjusted to the Code of Conduct Guidelines for PT Bukit Asam Tbk. • Code of Conduct of PT Bukit Asam Tbk signing following the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 07/ SK/PTBA-DEKOM/2021 and No. 408A/ 0100/2021 on September 15, 2021. • Made improvements and adjustments taking into account the relevant laws and regulations and current conditions to be adjusted to PT Bukit Asam Tbk Whistle Blowing System Guidelines. • Performed Surveillance Audit to check and maintain the certificate of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk. • Participated in the International Global Good Corporate Governance Awards (3G Awards) organized by Cambridge IFA. • Conducted GCG implementation evaluation (review), namely follow-up to GCG implementation that has been carried out in the previous year, which has been assessed (Assessment) by an External Party that includes an evaluation of the assessment and follow-up on recommendations for improvement with the acquisition of a score of 97.62 and “Very Good" Company. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 88.83 as a “Very Trusted” Company. • Developed the CISEA-GCG application

Bagan perkembangan penerapan GCG di PTBA Milestone of GCG Implementation in PTBA	
2022	• Penandatanganan pernyataan independensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. • Aplikasi CISEA-GCG sebagai media Internalisasi dan upaya untuk penguatan pemahaman atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. • Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media e-mail, spanduk, banner, videotron, *Forum Group Discussion* (FGD) & CISEA GCG. • Pelatihan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Kelas Eksekutif dan Kelas Reguler bagi Pegawai Bukit Asam termasuk yang ditugaskan sebagai Direksi di Anak dan Afiliasi Perusahaan. • Pendistribusian buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Bukit Asam Tbk sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBADEKOM/2021 dan No. 408A/ 0100/2021 pada tanggal 15 September 2021. • Melakukan penandatangan *Code of Conduct* secara elektronik melalui Aplikasi CISEA-GCG oleh seluruh pegawai. • Pelaksanaan *Surveillance* Audit dalam rangka pengecekan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk. • Melakukan *Assessment* terkait implementasi GCG di Bukit Asam oleh pihak Eksternal (PT Sinergi Daya Prima) dengan nilai 97,30 predikat "Sangat Baik". • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 89,09 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya". • Melakukan pemutakhiran konten dan perbaikan *layout Dashboard* ESG pada *website* Bukit Asam. • Survey Pemahaman Pegawai terkait GCG melalui Aplikasi LMS MINS ID Academy • Studi Banding Inspektorat Kementerian Keuangan Republik Indonesia ke PTBA dalam rangka pengelolaan GRC di Perusahaan. (07-08 Desember 2022) • Statement of Independence signing of by Board of Commissioners and Board Directors. • CISEA-GCG Application as a medium for internalization and efforts to strengthen understanding of the principles of good corporate governance. • Carried out routine GCG outreach through email media, banners, videotrons, Forum Group Discussion (FGD) & CISEA GCG. • Executive Class and Regular Class Governance, Risk and Compliance (GRC) Training for Bukit Asam Employees including those assigned as Board of Directors in Subsidiaries and Affiliated Companies. • Distribution of PT Bukit Asam Tbk Code of Conduct and Business Ethics in accordance with the Joint Decree of Board of Commissioners and Board Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 07/ SK/PTBA-DEKOM/2021 and No. 408A/ 0100/2021 on September 15, 2021. • Code of Conduct signing electronically through CISEA-GCG Application by all employees. • Implementation of Surveillance Audits to check and maintain the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certificate for PT Bukit Asam Tbk. • Conducted GCG Assessment at Bukit Asam by an external party (PT Sinergi Daya Prima) with a score of 97.30 and "Very Good" Company. • Participated in GCG assessment by the Indonesia Institute for Corporate Governance with a score of 89.09 as a "Very Trusted" Company. • Updated the content and improving the layout of ESG Dashboard on Bukit Asam website • Survey of Employee Understanding regarding GCG via the MINS ID Academy LMS Application • Comparative Study of the Inspectorate of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to PTBA in the context of GRC management in the Company. (December 7-8, 2022)
2023	• Penandatanganan pernyataan independensi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. • Penandatangan COC Pegawai Baru dan Prohire melalui Aplikasi CISEA-GCG. • Melakukan sosialisasi GCG secara rutin melalui media e-mail, spanduk, banner, videotron, *Forum Group Discussion* (FGD) & CISEA GCG. • Pelatihan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) untuk Pegawai PTBA dan AAP masing-masing sebanyak 6 Sesi dari Bulan Mei - Oktober 2023. • Pelaksanaan Audit Re-sertifikasi dalam rangka pengecekan dan mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Bukit Asam Tbk. • Menindaklanjuti Hasil Assessment GCG Eksternal Tahun 2022. • Melakukan Evaluasi Mandiri terkait Penerapan GCG. • Memonitor Pencapaian Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan. • Melakuan Survey Pemahaman terkait Penerapan GCG Ke Seluruh Pegawai PTBA dengan nilai rata-rata > 90% • Penyelarasan dan Pembaharuan Soft Structure GCG (GCP, Board Manual, Pedoman COC, Pedoman SPP, Pedoman SMAP, dll) menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN. • Penyesuaian Charter Dewan Komisaris. • Pengesahan Keputusan Dewan Komisaris PTBA Nomor: 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris (Penambahan Fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai PERMEN BUMN 02 Tahun 2023. (15 Desember 2023). • Rapat Koordinasi Tata Kelola Terintegrasi MIND ID Group (14-15 Desember 2023). • Menerima Penghargaan dalam acara *GRC & Performance Excellence Award* (30 Agustus 2023). • Menerima penghargaan *Best State Owned Enterprises 2023 dan Top 50 Big Capitalization Public Listed Company*, dalam ajang *The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award* pada tanggal 18 September 2023. • Mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 berdasarkan hasil audit re-sertifikasi dari PT TUV NORD Indonesia selaku Badan Sertifikasi Independen pada tanggal 14 November 2023. • Mengikuti penilaian penerapan GCG oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan skor 90,03 sebagai Perusahaan "Sangat Tepercaya (Most Trusted Company)" dan menjadi Perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok Perusahaan Non Keuangan (EMITEN, BUMN, BUMD). • Melakukan pemutakhiran konten terkait GCG pada *Dashboard* ESG *website* PTBA. • Signing of the independence statement by the Board of Commissioners and Directors. • Signing the COC for New Employees and Prohire via the CISEA-GCG Application. • Conducted regular GCG socialization via e-mail, banners, banners, videotron, Forum Group Discussion (FGD) & CISEA GCG. • Governance, Risk and Compliance (GRC) training for PTBA and AAP employees in 6 sessions each from May – October 2023. • Carried out a Re-certification Audit in order to check and maintain the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certificate of PT Bukit Asam Tbk. • Followed up on the results of the 2022 External GCG Assessment. • Carried out an Independent Evaluation regarding the Implementation of GCG. • Monitoring the Achievement of Anti-Bribery Management System Goals. • Carrying out an Understanding Survey regarding the Implementation of GCG to all PTBA Employees with an average score of > 90% • Alignment and updating of the GCG Soft Structure (GCP, Board Manual, COC Guidelines, SPP Guidelines, SMAP Guidelines, etc.) in accordance with SOEs Ministerial Regulation. • Adjustment of the Board of Commissioners' Charter. • Ratification of PTBA Board of Commissioners Decree Number: 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners (Additional Functions of the Integrated Governance Committee in accordance with SOEs Ministerial Regulation 02 of 2023. (December 15, 2023). • MIND ID Group Integrated Governance Coordination Meeting (December 14-15, 2023). • Received an Award at the GRC & Performance Excellence Award (August 30, 2023). • Received the Best State-Owned Enterprises 2023 award and Top 50 Big Capitalization Public Listed Company, at the 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award on September 18, 2023. • Maintained the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certificate based on the results of a re-certification audit from PT TUV NORD Indonesia as an Independent Certification Body on November 14, 2023. • Participated in the assessment of GCG implementation by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) with a score of 90.03 as The Most Trusted Company and became the Company with the highest score in the Non-Financial Company group (EMITEN, SOEs, BUMD). • Updated GCG-related content on the ESG Dashboard of the PTBA website.

Monitoring Penerapan GCG

GCG Implementation Monitoring



Penanggung Jawab Penerapan GCG

Implementasi GCG menjadi kewajiban bagi Seluruh Insan PTBA di mana Perusahaan menunjuk Direktur Utama sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola perusaahan yang baik (*Good Corporate Governance*) di PTBA yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Manajemen Risiko dan Hukum & Regulasi. Penunjukan penanggungjawab implementasi GCG ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Direksi No. 080A/0100/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penanggungjawab Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Bukit Asam Tbk. Adapun tugas dan tanggungjawab selaku penanggungjawab implementasi GCG, adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Perusahaan patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal perusahaan, dan berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/perikatan yang disepakati dengan pihak eksternal;
2. Memastikan kepatuhan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk jajarannya terhadap pemenuhan tata kelola di bidang pasar modal, peraturan di bidang pasar modal, dan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Unit in Charge of GCG Implementation

The implementation of GCG is obligatory for all PTBA employees where the Company appoints the President Director as the person responsible for implementing and monitoring good corporate governance at PTBA, which in its implementation is managed by the Corporate Management System and GCG Work Unit, Corporate Secretary, Internal Audit, Risk Management, and Legal & Regulatory. The appointment of the person responsible for implementing GCG is determined based on Directors' Decree No. 080A/0100/2023 dated March 13, 2023, concerning Persons Responsible for Implementing Good Corporate Governance at PT Bukit Asam Tbk. The duties and responsibilities as the person responsible for implementing GCG are as follows:

1. Ensure the Company compliance with the provisions of applicable laws and regulations, internal company regulations, and is committed to the provisions in agreements/engagements agreed with external parties;
2. Ensure compliance by the Board of Directors and Board of Commissioners, including their staff, with compliance with governance in the capital market sector, regulations in the capital market sector, and the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs);

3. Memastikan Perusahaan Patuh terhadap peraturan tentang persyaratan keterbukaan (*Transparency*) dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendukung pemantauan atas pelaksanaan pedoman tentang perilaku etika (*Code of Conduct*) yang memuat nilai, norma, dan etika berusaha guna memaksimalkan nilai dan pertumbuhan bisnis di Perusahaan;
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan program Manajemen Risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG;
6. Melakukan pemantauan terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas adanya dugaan penyimpangan pada perusahaan, termasuk pencegahan dan pengendalian gratifikasi;
7. Menjaga dan mengevaluasi pelaksanaan, penerapan, dan pemantauan GCG di Perusahaan dengan melakukan pengukuran atas penerapan GCG yang dilakukan secara berkala dalam bentuk:
   a. Penilaian (*Assessment*), melalui pengukuran pelaksanaan dan penetapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan;
   b. Evaluasi (*Review*), yang dilaksanakan melalui program yang bertujuan mendeskrpisikan tindak lanjut pelaksanaan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan penilaian (*Assessment*) yang dalam hal ini meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
8. Memastikan Perusahaan memiliki dan menjalankan sertifikasi/*standard* dalam rangka penerapan *best practice* GCG.

Sampai dengan akhir Desember 2023, Penanggungjawab Implementasi GCG PTBA telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun tugas yang telah dilaksanakan di tahun 2023, sebagai berikut:

1. Memastikan Perusahaan patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan melakukan *aligment* dan *cascading* terhadap PER 02/MBU/2023 dan Pedoman Stategis serta Kebijakan Pelaksana MIND ID;
2. Memastikan kepatuhan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk jajarannya terhadap pemenuhan tata kelola di bidang pasar modal, peraturan di bidang pasar modal, dan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemenuhan terhadap POJK yang terkait;
3. Memastikan Perusahaan Patuh terhadap peraturan tentang persyaratan keterbukaan (*Transparency*) dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dengan Keterbukaan dalam penyampaian

3. Ensure the Company compliance with regulations regarding transparency requirements by implementing GCG principles as regulated in applicable laws and regulations;
4. Support monitoring of the implementation of ethical behavior guidelines (Code of Conduct) which contain values, norms, and business ethics to maximize business value and growth in the Company;
5. Monitor the implementation of the corporate Risk Management program in an integrated manner which is part of the implementation of the GCG program;
6. Monitor the regulation on reporting mechanisms for suspected irregularities in the company, including prevention and control of gratification;

7. Maintain and evaluate the implementation, application, and monitoring of GCG in the Company by measuring the implementation of GCG periodically in the form of:

   a. Assessment, measuring the implementation and determination of good corporate governance in the Company;
   b. Evaluation (Review), which is carried out through a program to describe the follow-up to the implementation of GCG in the Company in the following year after the assessment is carried out, which in this case includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

8. Ensure that the Company has and implements certification/ standards in order to implement GCG best practices.

Until the end of December 2023, the person responsible for implementing GCG PTBA has carried out all his duties and responsibilities well. The tasks that have been carried out in 2023 are as follows:

1. Ensure that the Company complies with the provisions of applicable laws and regulations, as evidenced by carrying out alignment and cascading to PER 02/MBU/2023 and the Strategic Guidelines and Implementing Policies of MIND ID;
2. Ensure compliance by the Board of Directors and Board of Commissioners, including their staff, with compliance with governance in the capital market sector, regulations in the capital market sector, and the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) through compliance with the relevant POJK;
3. Ensure that the Company complies with regulations regarding transparency requirements by implementing GCG principles as regulated in applicable laws and regulations as evidenced by openness in submitting company performance in the form of an Annual Report,

kinerja perusahaan dalam bentuk Annual Report, Keterbukaan dalam penyampaian kinerja lingkungan perusahaan dalam bentuk *Sustainability Report*, Laporan Pengelolaan Iklim *(Climate Change)* oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP) dan Keterbukaan dalam penyampaian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL);

4. Mendukung pemantauan atas pelaksanaan pedoman tentang perilaku etika (*Code of Conduct*) yang memuat nilai, norma, dan etika berusaha guna memaksimalkan nilai dan pertumbuhan bisnis di Perusahaan dibuktikan dengan Penandatangan Pakta Integritas (*Code of Conduct*) dan dipantau melalui sidak etika kedisiplinan;
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan program Manajemen Risiko korporasi secara terpadu dan di pantau secara berkala melalui pelaporan triwulanan pada *Enterprise Risk Manajemen Aplication* (ERMA);
6. Melakukan pemantauan terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas adanya dugaan penyimpangan pada perusahaan, termasuk pencegahan dan pengendalian gratifikasi yang dilaporkan secara berkala;
7. Menjaga dan mengevaluasi pelaksanaan, penerapan, dan pemantauan GCG di Perusahaan dengan secara berkala;
8. Memastikan Perusahaan memiliki dan menjalankan sertifikasi/*standard* dalam rangka penerapan *best practice* GCG dibuktikan dengan diterimanya Sertifikat ISO 37001:2016 dari Badan Sertifikasi PT TUV NORD hasil dari Audit Re-Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Disclosure in submitting company environmental performance in the form of a Sustainability Report , Climate Management Report (Climate Change) by the Carbon Disclosure Project (CDP) and *Openness* in delivering the Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL);

4. Support the monitoring of the implementation of guidelines on ethical behavior (Code of Conduct) which contain values, norms, and business ethics to improve value and business growth in the Company as shown by the signing of the Integrity Pact (Code of Conduct) and monitored through disciplinary ethics inspections;
5. Monitor the implementation of the corporate Risk Management program in an integrated manner and monitor it regularly through quarterly reporting on the Enterprise Risk Management Application (ERMA);
6. Monitor the provisions governing the reporting mechanism for suspected irregularities in the company, including prevention and control of gratuities which are reported periodically;
7. Periodically maintain and evaluate the implementation, application, and monitoring of Good Corporate Governance (GCG) within the Company;
8. Ensure that the Company has and implements certification/standards in the context of implementing GCG best practices as evidenced by the receipt of the ISO 37001:2016 Certificate from the PT TUV NORD Certification Body as a result of the Anti-Bribery Management System Re-Certification Audit.

Pengukuran Kualitas Penerapan GCG

PTBA secara berkala melakukan penilaian kualitas implementasi GCG di Perusahaan sebagai wujud mekanisme *check & balance* untuk mengukur tingkat penerapan GCG. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan jasa konsultan independen yang berkompeten dalam melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan berupa gambaran yang komprehensif terkait sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di Perusahaan. Selain itu penilaian juga menghasilkan rekomendasi yang menjadi *area of improvement* sebagai perbaikan terhadap penerapan GCG di Perusahaan.

Sebagai anggota *holding*, Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran atas penerapan GCG berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Namun, sehubungan dengan telah dicabutnya Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023, maka untuk periode penilaian tahun 2023, pengukuran terhadap penerapan GCG hanya menggunakan kriteria dan metodologi yang mengacu kepada Internal yang ditetapkan oleh Perusahaan.

GCG Implementation Quality Measurement

PTBA regularly assesses the quality of GCG implementation in the Company as a form of check & balance mechanism to measure the level of GCG implemented. This assessment is carried out using services from the independent consultant who is competent in conducting assessments. The assessment carried out resulted in a conclusion in a comprehensive picture regarding the extent to which GCG principles have been implemented in the Company. Moreover, the assessment also produces recommendations to improve the implementation of GCG in the Company.

As a holding member, the Company has an obligation to measure the implementation of GCG based on the parameters set by the Ministry of SOEs. However, in connection with the revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S-MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, based on Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 on August 16, 2023, then for the 2023 assessment period, measurement of GCG implementation only uses criteria and methodology that refers to internal measurement determined by the Company.

Selain itu, setiap tahunnya, Perusahaan juga mengikuti penilaian penerapan GCG yang dilakukan oleh pihak independen, yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA. Dan pada Tahun 2023 PTBA meraih predikat Indonesia Most Trusted Company dan menjadi Perusahaan dengan nilai tertinggi dalam kelompok Perusahaan Non Keuangan (emiten BUMN/ BUMD) dengan Nilai 90.03.

Penilaian (Assessment)/Evaluasi (Review) Penerapan GCG Berdasarkan Kriteria BUMN

Penilaian penerapan GCG berdasarkan kriteria BUMN yang terakhir dilaksanakan oleh PTBA, yaitu untuk periode penilaian tahun 2022, yang dilakukan pada tahun 2023. Adapun parameter yang dipergunakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan Indikator penilaian meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi;
6. Aspek lainnya.

Pihak yang Melakukan Penilaian (*Assessment*)/Evaluasi (*Review*)

Pada periode penilaian tahun 2022, pihak independen yang melakukan penilaian adalah PT Sinergi Daya Prima.

Hasil Penilaian (Assessment)/Evaluasi (Review)

Pada periode penilaian tahun 2022, Perusahaan memperoleh nilai sebesar 97,30 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100,00 dengan kualifikasi "SANGAT BAIK", dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Every year, the Company also participates in an assessment of GCG implementation conducted by an independent party, namely the Corporate Governance Perception Index (CGPI) conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine. In 2023, PTBA won the title of Indonesia Most Trusted Company and became the company with the highest score in the Non-Financial Company group (SOEs/Region Owned Enterprises issuers) with a score of 90.03.

Assessment/Evaluation of GCG Implementation Based on SOEs Criteria

The assessment of GCG implementation is based on SOEs criteria which was last carried out by PTBA, namely for the 2022 assessment period, which was carried out in 2023. The parameters used were based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, with assessment indicators including:

1. Commitment to implement Good Corporate Governance on an ongoing basis;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Information disclosure and transparency;
6. Other aspects.

Party Conducting Assessment/Evaluation (Review)

In the 2022 assessment period, the assessment was carried out by an independent party, PT Sinergi Daya Prima.

Results Assessment/Evaluation (Review)

In the 2022 assessment period, the Company obtained a score of 97.30 out of a maximum total score of 100.00 with the qualification "VERY GOOD", with details of the assessment results as follows:

No	Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Achievement
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,63
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	9,00
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	34,23
4	Direksi Board of Directors	35,00	33,82
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	8,81
6	Aspek Lainnya Others	5,00	4,82
	Skor Keseluruhan **Total Score**	**100,00**	**97,30**
	Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG **GCG Implementation Quality Qualification**		**Sangat Baik** **Very Good**

Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi (Review) terhadap Penerapan GCG Tahun Sebelumnya

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan terhadap rekomendasi yang merupakan *Area of Improvement* (AoI) atas hasil penilaian penerapan GCG untuk tahun 2022, yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerapan praktik GCG dengan memperhatikan perkembangan terkini *best practice* yang berlaku. Dari penilaian yang telah dilakukan terdapat 17 (tujuh belas) rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* dan 8 (delapan) saran. Tindak lanjut pada tahun 2023 atas rekomendasi dan saran tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Follow-up on Evaluation Recommendations of the Previous Year's GCG Implementation

The Company is dedicated to enhancing the recommendations that make up the Area of Improvement (AoI) following the 2022 GCG implementation assessment results. This commitment involves all relevant parties increase the implementation of GCG practices, considering the latest developments in best practices. The assessment identified 17 Areas of Improvement and 8 suggestions. The table below outlines the follow-up plan for these recommendations and suggestions in 2023:

No	Rekomendasi Penilaian (Assessment) Assessment Reccomendation	Status	Tindak Lanjut 2023 Follow-up in 2023	
			Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
I. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan I. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance Aspect				
1	Mempertegas penunjukan Direktur yang bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan. (WP I.2.3) Confirm the appointment of Director in charge for implementing and monitoring GCG in the Company. (WP I.2.3)	*Closed*	2023	Telah dilakukan penunjukan Direktur yang bertanggungjawab atas penerapan dan pemantauan GCG dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PTBA No. 080A/0100/2023 tentang Penanggungjawab Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PTBA pada tanggal 31 Maret 2023. A Director has been appointed to be responsible for implementing and monitoring GCG with the issuance of PTBA Directors' Decree No. 080A/0100/2023 concerning Persons Responsible for Implementing Good Corporate Governance at PTBA on March 31, 2023
2	Wajib Lapor LHKPN memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sesuai dengan Daftar Wajib LHKPN yang ditetapkan Perusahaan dan peraturan yang berlaku. (WP I.4.8; 9) LHKPN Mandatory Reporter fulfills The State Official Wealth Report (LHKPN) reporting obligations in accordance with LHKPN Mandatory List established by the Company and applicable regulations. (WP I.4.8; 9)	*Closed*	2023	Status Pelaporan LHKPN PTBA tanggal 31 Desember 2023 dari Total Wajib Lapor LHKPN sebanyak 213 orang yang telah melaporkan sebanyak 211 orang atau setara dengan 99,06%. PTBA LHKPN Reporting Status on December 31, 2023, of the total LHKPN Mandatory Reporting, 211 people or the equivalent of 99.06%.
3	Memastikan kesesuaian ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah selaras dengan Peraturan KPK RI Nomor: 2 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. (WP I.5.10; 12) Ensuring compliance with the provisions stipulated in the Gratification Control Guidelines are aligned with Indonesian Corruption Eradication Commission Regulation Number: 2 of 2019 dated November 05, 2019 concerning Reporting of Gratification. (WP I.5.10; 12)	*Closed*	2023	Telah dilakukan Revisi dan penyesuaian terhadap Pedoman Gratifikasi dimana sedang dalam proses revisi internal dengan melakukan pemetaan peraturan yang terkait dan Kebijakan Pelaksana dari MIND ID Revisions and adjustments have been made to the Gratification Guidelines which are currently in the process of internal revision by mapping the relevant regulations and Implementing Policies from MIND ID
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal II. Shareholders and GMS/Capital Owners				
4	Memastikan terdapat alasan pemberhentian sebelum habis masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) atau memberikan kesempatan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut untuk menanggapi pemberhentiannya di dalam RUPS untuk kemudian dimuat dalam risalah rapat RUPS (WP II.7.20) Ensuring there are reasons for termination before the end of the term for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners (if applicable) or providing an opportunity for these members to respond to their termination during the General Meeting of Shareholders (RUPS) for subsequent inclusion in the minutes of the GMS meeting (WP II.7.20).	*Closed*	2023	Tidak ada Direksi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dan yang diberhentikan oleh RUPS pada tahun 2023. Bapak Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya sesuai Anggaran Dasar PTBA pada 11 April 2023 dan Ibu Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum pada 21 Maret 2023. No member of the Board of Directors terminated before the end of their term, nor were any terminated by the RUPS in 2023. Mr. Agus Suhartono (Independent President Commissioner) concluded his term according to PTBA's Articles of Association on April 11, 2023, and Ms. Devi Pradnya Paramita (Commissioner) ended her term due to legal reasons on March 21, 2023.

No	Rekomendasi Penilaian (Assessment) Assessment Reccomendation	Status	Tindak Lanjut 2023 Follow-up in 2023	
			Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
III. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas III. Board of Commissioners/Supervisory Board				
5	Melengkapi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris terkait dengan tugas Dewan Komisaris dalam: a. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. (WP III.16.57) b. Pelaporan kepada Pemegang Saham. (WP III.19.67) Completing the Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget related to the duties of Board of Commissioners in: a. Supervision and provision of advice on quality and service policies and their implementation. (WP III.16.57) b. Reporting to Shareholders. (WP III.19.67)	*Closed*	2023	RKAT Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan dan nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. Disamping itu, RKAT telah dilengkapi juga dengan pelaporan kepada pemegang saham. The Board of Commissioners' RKAT (Annual Work Plan and Budget) has been equipped with the Board of Commissioners' tasks in providing supervision and advice on quality and service policies and their implementation. In addition, the RKAT has also been equipped with reporting to shareholders.
6	Memastikan *area of improvement* hasil *assessment/review* GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti seluruhnya. (WP III.21.70) Ensuring that the areas of improvement resulting from GCG assessment/review that are under the authority of the Board of Commissioners have been fully followed up. (WP III.21.70)	*Closed*	2023	*Area of improvement* hasil *assessment/review* GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisasis senantiasa diperhatikan proses tindaklanjutnya. Areas of improvement from the GCG assessment/review results which are the authority of the Board of Commissioners are always taken into account in the follow-up process.
7	Melengkapi Piagam Komite Audit terkait tugas Komite Audit untuk menyusun Program Kerja sebelum tahun buku berjalan. (WP III.24.81) Complementing the Audit Committee Charter regarding the duties of the Audit Committee to prepare a Work Program prior to the current fiscal year. (WP III.24.81)	*Closed*	2023	Telah dilakukan *alignment* terhadap Piagam Komite Audit serta beberapa peraturan lainnya oleh Tim. Currently, the team is aligning the Audit Committee Charter with several other regulations.
IV. Direksi IV. Board of Directors				
8	Memastikan penyampaian permohonan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jadwal perjalanan dinas dimaksud sesuai Surat Direktur Utama PT INALUM (Persero) No. 382/LDIRUT/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pedoman Perizinan dan Pelaporan Perjalanan Dinas LN bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anggota HIP. (WP IV.25.85) Ensuring the submission of requests for overseas business trip no later than 14 (fourteen) working days prior to the scheduled business trip according to the Letter of President Director of PT INALUM (Persero) No. 382/LDIRUT/VIII/2018 dated August 6, 2018, regarding Guidelines for Licensing and Reporting Overseas Business Trip for Directors and Commissioners of HIP Members. (WP IV.25.85)	*Closed*	2023	Sudah ada permohonan perjalanan dinas yang disampaikan ke MIND ID dan terdapat izin dari MIND ID untuk perjalanan dinas Direksi ke Luar Negeri dan juga sudah terdapat laporan perjalanan Dinas Direksi ke MIND ID A request for business trip has been submitted to MIND ID, and MIND ID also allowed the Board of Directors to go on overseas business trip with reports submitted to MIND ID as well.
9	Melaporkan pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Direktur Utama PT INALUM (Persero) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Surat Direktur Utama PT INALUM (Persero) No. 382/LDIRUT/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pedoman Perizinan dan Pelaporan Perjalanan Dinas LN bagi Direksi dan Dewan Komisaris Anggota HIP. (WP IV.25.85) Report the Overseas Business Trip to the President Director of PT INALUM (Persero) no later than 14 days after the Business Trip according to the Letter of President Director of PT INALUM (Persero) No. 382/LDIRUT/VIII/2018 dated August 6, 2018, concerning Guidelines for Licensing and Reporting of Overseas Business Trip for Directors and Commissioners of HIP Members. (WP IV.25.85)	*Closed*	2023	Permohonan perjalanan dinas yang disampaikan ke MIND ID dan terdapat izin dari MIND ID untuk perjalanan dinas Direksi ke Luar Negeri dan juga sudah terdapat laporan perjalanan Dinas Direksi ke MIND ID A business trip request has been submitted to MIND ID, and MIND ID has granted permission for the Board of Directors to go on overseas business trips, with reports also being submitted to MIND ID accordingly.
10	Melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. (WP IV.26.87) Reviewing and improving SOPs on a regular basis. (WP IV.26.87)	*Closed*	2023	Telah dilakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala oleh seluruh Satuan Kerja/ Proyek didampingi Satker SMP&GCG The Standard Operating Procedures (SOP) had been reviewed and refined periodically by all Work Units/Projects accompanied by the SMP&GCG Working Unit.
11	Meningkatkan *risk awareness* satuan kerja terhadap Manajemen Risiko melalui sosialisasi secara berkelanjutan. (WP IV.29.106) Increase work unit's risk awareness on risk management through continuous outreach. (WP IV.29.106)	*Closed*	2023	Telah dilakukan secara berkala Sosialisasi terkait *Risk Awareness* melalui email Riskpedia. Socialization on Risk Awareness has been carried out regularly via Riskpedia email.

No	Rekomendasi Penilaian (Assessment) Assessment Reccomendation	Status	Tindak Lanjut 2023 Follow-up in 2023	
			Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-up
12	Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian sebagaimana ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Pasal 19. (WP IV.31.114;36.132) Inform the Financial Services Authority (OJK) regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal as stipulated in POJK No. 55/POJK.04/2015 Article 19. (WP IV.31.114;36.132)	*Closed*	2023	Laporan perubahan komite audit telah disampaikan kepada OJK ditanggal yang sama pengangkatan 1 September 2023, sehingga sudah sesuai dengan POJK 55/POJK.04/2015. The audit committee change report has been submitted to the OJK on the same appointment date as September 1, 2023, it is in accordance with POJK 55/POJK.04/2015.
13	Mengupayakan penyelesaian atas piutang program kemitraan yang bermasalah dengan optimal. (WP IV.31.118) Strive for optimal settlement of non-performing receivables of partnership program. (WP IV.31.118)	*Closed*	2023	Telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelesaian atas piutang program kemitraan yang bermasalah dan di pantau ketercapaiannya melalui Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja BSC 2023 Efforts have been made to resolve non-performing partnership program receivables and their achievements have been monitored through the Internal Audit of the BSC 2023 Performance Management System
14	Menyelaraskan Pedoman Audit Internal Berbasis Risiko PT Bukit Asam Tbk sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta *Board Manual* Perusahaan salah satunya terkait pengaturan pengangkatan Kepala SPI serta pemberitahuannya kepada OJK. (WP IV.35.129) Align the Risk-Based Internal Audit Guidelines of PT Bukit Asam Tbk in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs and the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number: 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charter and Board Manual, one of which is related to regulation on the appointment of Head of Internal Audit and its notification to OJK. (WP IV.35.129)	*Closed*	2023	Penyelarasan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta Board Manual Perusahaan telah dilakukan dilakukan penyelasaran pada Pedoman SPI (*Internal Audit Charter*) PT Bukit Asam Tbk. Alignment with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs which has been revoked and replaced by Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number L 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, concerning the Formation and Guidelines for Preparing the Internal Audit Charter and the Company's Board Manual, adjustments were made to the PT Bukit Asam Tbk Internal Audit Charter Guidelines.
15	Memuat Dinamika Rapat dalam Risalah Rapat Direksi sehingga dapat menggambarkan jalannya rapat. (WP IV.36.132) Include the Meeting Dynamics in the Minutes of Board of Directors Meetings in order to describe the course of the meeting. (WP IV.36.132)	*Closed*	2023	Risalah Rapat Direksi telah memuat dinamika rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023, namun mengingat Risalah Rapat Direksi bersifat confidential, kami akan tampilkan kepada *assessor* secara langsung. The Minutes of Directors' Meetings currently adhere to meeting dynamics as per the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023. However, as these minutes are confidential documents, we will only provide access to the assessor directly.
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi V. Disclosure of Information and Transparency				
16	Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian sebagaimana ketentuan POJK Nomor: 55/POJK.04/2015, Pasal 19. (WP III.24.79; WP IV.31.114;36.132; WP V.38.137) Inform the Financial Services Authority regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal as stipulated in POJK Number: 55/POJK.04/2015 Article 19. (WP V.38.137)	*Closed*	2023	Laporan perubahan komite audit telah disampaikan kepada OJK ditanggal yang sama pengangkatan 1 September 2023, sehingga sudah sesuai dengan POJK 55/POJK.04/2015. The audit committee change report has been submitted to the OJK on the same appointment date as September 1, 2023, it is in accordance with POJK 55/POJK.04/2015.
17	Memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan informasi dalam Laporan Tahunan. (WP V.40.148) Ensuring that there are no errors in writing information in the Annual Report. (WP V.40.148)	*Closed*	2023	Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang telah dipublikasikan di website PTBA pada April 2023 dan tidak terdapat kesalahan penulisan. The 2022 Fiscal Year Annual Report was published on the PTBA website in April 2023 with no writing errors.

Saran Penilaian
Suggestion

No	Saran Penilaian (Assessment)	Status	Tindak Lanjut 2023 Follow-up in 2023	
			Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-Up
I. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan I. Aspects of Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance				
1	Mengunggah *Code of Conduct* versi Bahasa Inggris dalam *website* Perusahaan. (WP I.1.2) Uploading the Code of Conduct in English Version at the Company's Website (WP I.1.2)	*Closed*	2023	Code of conduct versi bahasa inggris telah diunggah pada website PTBA The Company Secretary has published the Code of Conduct in English version on PTBA's website.
2	Memperhatikan dasar hukum yang tercantum dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 10/SK/PTBA-DEKOM/2020 No. 400/0100/2020. (WP I.5.10) Pay attention to the legal basis stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 10/SK/PTBA-DEKOM/2020 No. 400/0100/2020. (WP I.5.10)	*Closed*	2023	Telah dilakukan Revisi dan penyesuaian terhadap Pedoman Gratifikasi dimana sedang dalam proses revisi internal dengan melakukan pemetaan peraturan yang terkait dan Kebijakan Pelaksana dari MIND ID Revisions and adjustments have been made to the Gratification Guidelines which are currently in the process of internal revision by mapping the relevant regulations and Implementing Policies from MIND ID
II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal II. Shareholders and GMS/Capital Owners				
3	Memastikan terdapat alasan pemberhentian sebelum habis masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) atau memberikan kesempatan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut untuk menanggapi pemberhentiannya di dalam RUPS untuk kemudian dimuat dalam Risalah Rapat RUPS. (WP II.7.20) Ensuring a reason for dismissal before the end of the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners (if any) or provide an opportunity for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to respond to their dismissal at the GMS to then be included in the Minutes of the GMS Meeting. (WP II.7.20)	*Closed*	2023	Di tahun 2023, tidak ada Dewan Komisaris yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir yang diberhentikan oleh RUPS. Di tahun 2023, Bpk. Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar PTBA pada tanggal 11 April 2023, sedangkan Ibu Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum pada tanggal 21 Maret 2023 In 2023, no Board of Commissioners who resign before the end of their term of office will be dismissed by the GMS. In 2023, Mr. Agus Suhartono (President/Independent Commissioner) ends in accordance with PTBA's Articles of Association on April 11, 2023, while Ms. Devi Pradnya Paramita (Commissioner) term of office ends by law on March 21, 2023
III. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas III. Board of Commissioners/Supervisory Board				
4	Melengkapi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris terkait dengan tugas Dewan Komisaris dalam Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap: 1. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya. (WP III.16.53) 2. Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut. (WP III.16.54) Completing the Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget related to the Board of Commissioners' duties in supervising and providing advice on: 1. Company risk management policy and its implementation. (WP III.16.53) 2. Human capital policies and implementation of these policies. (WP III.16.54)	*Closed*	2023	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap 1. Kebijakan manajemen risiko & Pelaksanaannya; dan 2. Kebijakan SDM dan pelaksanannya. The Work Plan and Budget for the Year 2024 of the Board of Commissioners has been supplemented with the tasks in overseeing and advising on: 1. Risk management policies and their implementation; and 2. Human capital policies and their implementation.
5	Mencantumkan hasil penilaian individual masing-masing Anggota Dewan Komisaris dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. (WP III.21.71) Putting the results of the individual assessment of each Member of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners' Supervisory Task Report. (WP III.21.71)	*Closed*	2023	Laporan tugas Dewan Komisaris termuat dalam *Annual Report* PTBA. dalam *Annual Report* terakhir yaitu tahun buku 2022, telah mencantumkan hasil penilaian kolegial Dewan Komisaris. The explanation of the Board of Commissioners is included in PTBA's Annual Report. In the latest Annual Report, for the fiscal year 2022, the report has documented the results of the collegial assessment of the Board of Commissioners.
6	Menyesuaikan Piagam Komite Audit untuk penyebutan Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (WP III.24.81) Adjusting the Audit Committee Charter to refer to Bapepam and LK as the Financial Services Authority (OJK). (WP III.24.81)	*Closed*	2023	Dalam Piagam Komite Audit telah dilakukan penyesuaian penyebutan nama "Bapepam LK" menjadi "OJK", termasuk mengupdate peraturan-peraturan terkini yang diterbitkan oleh OJK. In the Audit Committee Charter, adjustments have been made to the name "Bapepam LK" to "OJK", including updating the latest regulations issued by the OJK.

Saran Penilaian
Suggestion

No	Saran Penilaian (Assessment)	Status	Tindak Lanjut 2023 Follow-up in 2023	
			Periode Tindak Lanjut Follow-up Period	Bentuk Tindak Lanjut Form of Follow-Up
7	Memastikan risalah rapat Komite ditandatangani oleh peserta rapat sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit maupun Piagam Komite RU, PT, CSR, NR&PSDM. (WP III.24.82) Ensuring the minutes of Committee meetings are signed by meeting participants in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter and the RU, PT, CSR, NR&HCD Committee Charter. (WP III.24.82)	*Closed*	2023	Risalah rapat Komite telah ditandatangani oleh peserta rapat sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit maupun Piagam Komite RU, PT, CSR, NR&PSDM. The minutes of the Committee meeting have been signed by the meeting participants in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter and the RU, PT, CSR, NR&HCD Committee Charter.
IV. Direksi IV. Board of Directors				
8	Mendorong VP SPI untuk memperoleh sertifikasi profesi minimal *Certified Internal Auditor/ Qualified Internal Auditor*. (WP IV.35.129) Encouraging VP Internal Audit to obtain professional certification at least Certified Internal Auditor/ Qualified Internal Auditor. (WP IV.35.129)	*Closed*	2023	VP SPI telah lulus uji tulis Chief Internal Auditor Executive pada tanggal 17 Oktober 2023. Selain itu juga memperoleh sertifikat Qualified Chief Risk Officer pada tanggal 24-25 Mei 2023. VP SPI passed the Chief Internal Auditor Executive written test on October 17, 2023, and received a Qualified Chief Risk Officer certificate on May 24-25, 2023.

Perkembangan Hasil Penilaian (Assessment) dan Evaluasi (Review) terhadap Penerapan GCG

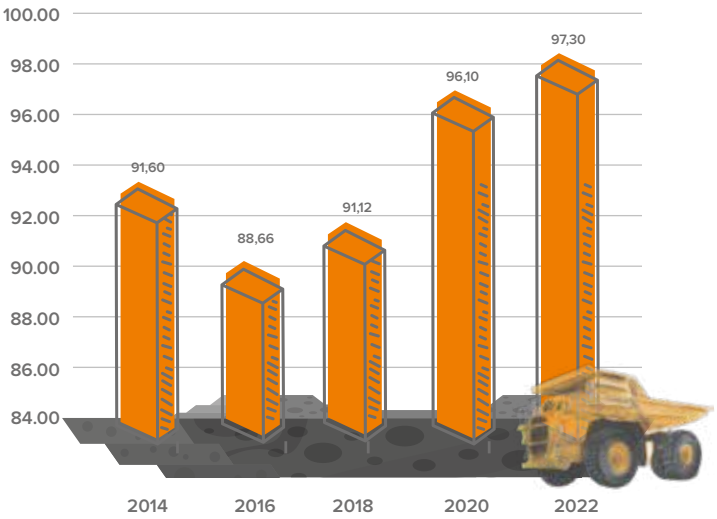
Perusahaan konsisten dalam komitmennya meningkatkan implementasi GCG di Perusahaan, yang dibuktikan melalui hasil penilaian penerapan GCG di PTBA oleh asesor independen, dimana Perusahaan konsisten memperoleh kualifikasi "Sangat Baik" dalam setiap penilaiannya. Kewajiban penilaian penerapan GCG dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun, sebagaimana kewajiban tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Goverance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan. Adapun hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:

Development of Assessment and Evaluation Results on GCG Implementation

The Company is consistent in its commitment to improving GCG implementation in the Company, as evidenced by the results of the assessment of GCG implementation in PTBA by independent assessors, where the Company consistently obtains a "Very Good" qualification in each assessment. The obligation to assess GCG implementation is carried out periodically every 2 (two) years, as previously regulated in SOEs Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012, which was later revoked and replaced by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities. The results of the assessment are as follows:

Penilaian (Assessment) terhadap Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal
Assessment of GCG Implementation by External Parties

Tahun Ukur Assessment Assessment Year	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	Kategori Category	Jenis Penilaian dan Pelaksana Assessment Type and Assessor
2022	97,30	"Sangat Baik" "Very Good"	*Assessment* GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2020	96,10	"Sangat Baik" "Very Good"	*Assessment* GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2018	91,12	"Sangat Baik" "Very Good"	*Assessment* GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2016	88,66	"Sangat Baik" "Very Good"	*Assessment* GCG oleh PT Sinergi Daya Prima GCG Assessment by PT Sinergi Daya Prima
2014	91,60	"Sangat Baik" "Very Good"	*Assessment* GCG oleh PT Netriva GCG Assessment by PT Netriva



Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Dalam menjaga kepercayaan segenap *stakeholders*, PTBA terus mengikuti *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi GCG serta menjadi acuan bagi PTBA untuk melaksanakan penyempurnaan implementasi GCG ke depannya.

Metode Penilaian

Metode penilaian CGPI terdiri dari 4 (empat) tahapan penilaian yang meliputi *Self Assessment,* penilaian dokumen, penilaian makalah dan observasi.

1. *Self Assessment* adalah penilaian mandiri oleh perusahaan mengenai kualitas pelaksanaan GCG di lingkup internal perusahaan. Daftar responden terdiri dari 2 (dua) kalangan responden yakni responden internal dan responden eksternal.
2. Kelengkapan Dokumen adalah pemenuhan persyaratan penilaian dengan menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema penilaian.
3. Penyusunan Makalah disusun oleh perusahaan yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di perusahaan dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian.
4. Observasi adalah tahapan akhir penilaian berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan tema penilaian.

Aspek Penilaian CGPI

Aspek penilaian CGPI terdiri dari:

1. Aspek Struktur Tata Kelola
   Penilaian aspek struktur tata kelola menggambarkan penilaian kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola korporat serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

In maintaining stakeholders' trust, PTBA continues to participate in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) held by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). This assessment aims to evaluate the implementation of GCG which is also a reference for PTBA to carry out improvements to GCG implementation in the future.

Assessment Method

The CGPI assessment method consists of four assessment stages, including self-assessment, document assessment, paper assessment, and observation.

1. Self Assessment is an independent assessment by the Company regarding the quality of GCG implemented in the Company's internal scope. The list of respondents consists of two respondents, namely internal and external respondents.
2. Completeness of Documents requires the submission of various documents regarding GCG implementation in the Company and other documents related to the theme of assessment.
3. Papers Preparation is prepared by the Company which describes a series of processes and programs for GCG implementation in the Company and the management's efforts related to the theme of assessment.
4. Observation is the final stage of assessment in the form of a direct review by the CGPI assessment team to ensure that the series of GCG program implementation and management efforts is related to the theme of assessment.

CGPI Assessment Aspects

CGPI assessment aspects consist of:

1. Governance Structure Aspect
   The governance structure aspect assessment describes an assessment of the completeness of corporate governance structure, infrastructure, and strengthening the business platform to create value for stakeholders to realize sustainable corporate growth by governance principles.

Aspek struktur tata kelola secara rinci terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu:
a. Indikator Pemegang Saham;
b. Indikator Dewan Komisaris;
c. Indikator Direksi;
d. Indikator Penanggung Jawab Manajemen Fungsional;
e. Indikator Pemangku Kepentingan Kunci Lainnya.

2. Aspek Proses Tata Kelola
Penilaian aspek proses tata kelola menggambarkan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme tata kelola korporat serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

Aspek proses tata kelola secara rinci terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu:
a. Indikator Tata Kelola Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan RUPS;
b. Indikator Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi;
c. Indikator Tata Kelola Perilaku Keorganisasian;
d. Indikator Tata Kelola Pengawasan Internal dan Eksternal;
e. Indikator Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
f. Indikator Tata Kelola Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan;
g. Indikator Tata Kelola Ekosistem Bisnis;
h. Indikator Tata Kelola Sumber Daya.

3. Aspek Hasil Tata Kelola
Penilaian aspek hasil tata kelola menggambarkan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari tata kelola perusahaan serta penguatan platform bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

Aspek hasil tata kelola secara rinci terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:
a. Indikator Kinerja Bisnis
b. Indikator Kinerja Keuangan
c. Indikator Kinerja Ekosistem Bisnis

Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh perusahaan peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi GCG yang menggunakan istilah "Terpercaya" dengan tingkatan sebagai berikut:

In detail, governance structure aspect consists of five indicators, namely:
a. Shareholder Indicators;
b. Board of Commissioners Indicators;
c. Board of Directors Indicators;
d. Unit in Charge for Functional Management Indicators;
e. Other Key Stakeholder Indicators.

2. Governance Process Aspect
The governance process aspect is an assessment on the effectiveness of corporate governance systems and mechanisms, and strengthening business platforms to bring value for stakeholders to realize sustainable corporate growth by governance principles.

In detail, the Governance process aspect consists of eight indicators, namely:
a. Fulfillment of Shareholders' Rights and GMS Governance Indicators;
b. Board of Commissioners and Board of Directors Governance Indicators;
c. Organizational Behavior Governance Indicators;
d. Internal and External Monitoring Governance Indicators;
e. Information Disclosure and Transparency Governance Indicators;
f. Risk Management and Compliance Governance Indicators;
g. Business Ecosystem Governance Indicators;
h. Resource Governance Indicators.

3. Governance Outcome Aspects
The governance outcome aspect assessment describes the quality of outputs, results, impacts, and benefits of corporate governance and strengthening business platforms to bring value for stakeholders to realize sustainable corporate growth by governance principles.

In detail, Governance outcome aspect consists of three indicators, namely:
a. Business Performance Indicators
b. Financial Performance Indicators
c. Business Ecosystem Performance Indicators

The results of CGPI assessment are in the form of a range of scores achieved by participating companies with the categorization of quality level of GCG implementation using the term "Trusted" with the following levels:

Rentang Nilai Score Range	**Predikat** Predicate
55,00 - 69,99	"Cukup Terpercaya" "Fairly Trusted"
70,00 - 84,99	"Terpercaya" "Trusted"
85,00 - 100,00	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"

Perkembangan CGPI

Perusahaan terus berupaya untuk memaksimalkan penerapan GCG di Perusahaan. Di tahun 2023, PTBA meraih skor 90,03 dengan kategori "Sangat Terpercaya".

Adapun perkembangan hasil CGPI yang dicapai Perusahaan adalah sebagai berikut:

CGPI Development

The Company strives to maximize the implementation of GCG in the Company. In 2023, PTBA received a score of 90.03 in the "Most Trusted" category.

The progress of CGPI results achieved by the Company are as follows:

Tahun Year	Assessment GCG – CGPI GCG-CGPI Assessment	Ktegori Category
2023	90,03	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2022	89,09	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2021	88,83	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2020	88,05	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2019	87,05	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2018	86,10	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2017	85,56	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2016	85,55	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2015	85,25	"Sangat Terpercaya" "Most Trusted"
2014	84,09	"Terpercaya" "Trusted"
2013	83,30	"Terpercaya" "Trusted"
2012	82,55	"Terpercaya" "Trusted"
2011	84,33	"Terpercaya" "Trusted"
2010	84,11	"Terpercaya" "Trusted"
2009	82,27	"Terpercaya" "Trusted"
2008	81,23	"Terpercaya" "Trusted"
2007	80,87	"Terpercaya" "Trusted"
2006	67,46	"Cukup Terpercaya" "Fairly Trusted"

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh OJK. PTBA menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" sebagai berikut:

Implementation of Aspects and Principles of Good Corporate Governance in Accordance with Financial Services Authority

In line with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, there are five aspects, eight principles, and 25 recommendations of governance submitted by OJK. PTBA implements these aspects, principles, and recommendations based on the "comply or explain" approach as follows:

No	Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di PTBA Explanation of Implementation at PTBA	Status
I	**Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham** Aspect 1: The Relationship of Public Companies with Shareholders in Ensuring Shareholders Rights.			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 Improving the Value of GMS	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Company has technical procedures for open or closed voting that promote independence and the interest of shareholders	Perusahaan telah memiliki tata tertib untuk pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2022 yang mengatur tata cara voting dan penunjukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara yaitu PT Datindo Entricom (Biro Administrasi Efek) dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The company has rules and regulations for the implementation of the 2022 Fiscal Year GMS which regulated voting procedures and the appointment of independent parties to count the votes, namely PT Datindo Entricom (Securities Administration Bureau) and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.	Terpenuhi Fulfilled
		Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of Board of Directors and Board of Commissioners are present at Annual GMS.	Pada RUPS Tahun Buku 2022 di tanggal 15 Juni 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir pada RUPS. On June 15, 2023, all Board of Directors and Board of Commissioners attended the GMS	Terpenuhi Fulfilled
		Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS minutes is available on Public Company's website for no less than 1 (one) year.	Situs web perusahaan telah mengungkapkan ringkasan risalah RUPS lebih dari 1 (satu) tahun yaitu mulai tahun 2017 sampai dengan 2023 The Company website has uploaded a summary of GMS minutes from 2017-2023	Terpenuhi Fulfilled
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham perusahaan sebagaimana kebijakan berikut: 1. Tata Laksana Pelayanan Informasi Investor; 2. Tata Laksana Keterbukaan Informasi; 3. Kebijakan GCG terkait dengan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*); 4. *Corporate Governance Policy;* 5. *Code of Conduct.* The Company has a policy regarding the Company's communication with shareholders as stated in the following policies: 1. Policy of Investor Information Services 2. Policy of Information Disclosure 3. GCG Policy related to Insider Trading 4. Corporate Governance Policy 5. Code of Conduct	Terpenuhi Fulfilled
		Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public Company discloses its community policy with shareholders or investors on its website.	Perusahaan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor pada situs web perusahaan. The Company has disclosed its communication policy with shareholders or investors on the Company's website.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di PTBA Explanation of Implementation at PTBA	Status
II	**Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** Aspect 2: Functions and Roles of Board of Commissioners			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of Board of Commissioners members shall consider the condition of Public Company.	Penentuan jumlah Dewan Komisaris Perusahaan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Penentuan Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 6 anggota Dewan Komisaris. Determination of the number of the Company's Board of Commissioners considers the condition of the Company. Determination of Board of Commissioners refers to the Articles of Association and applicable Laws and Regulations. As of December 31, 2023, the Company has 6 members on Board of Commissioners.	Terpenuhi Fulfilled
		Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of Board of Commissioners members considers the variety of expertise, knowledge and experience required.	Penentuan Dewan Komisaris Perusahaan telah memper timbangkan faktor keberagamaan yaitu diantaranya keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal ini telah mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Determination of the Company's Board of Commissioners has taken into account the diversity factors, including expertise, knowledge, and experience. This has been referred to the Articles of Association, Board Manual, and applicable laws and regulations.	Terpenuhi Fulfilled
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 Improving the Quality of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakanpenilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of Board of Commissioner	Dewan Komisaris telah melakukan penilaian menggunakan pendekatan kinerja Dewan Komisaris secara Kolektif Kolegial Board of Commissioners has conducted an assessment using the collegial Board of Commissioners' performance approach	Terpenuhi Fulfilled
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners is disclosed in annual report of Public Company.	Dewan Komisaris telah mengungkapkan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagaimana dimuat pada Laporan Tahunan ini Board of Commissioners has disclosed the Board of Commissioners' performance assessment policy as contained in this Annual Report.	Terpenuhi Fulfilled
		Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of Board of Commissioner members if such members are involved in financial crime.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan pengunduran diri dalam hal terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimuat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has policies resignation in case of involvement in financial crimes as stated in the Articles of Association and Board of Commissioners Work Guidelines.	Terpenuhi Fulfilled
		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or Committee that conducts nominations and remuneration functions shall arrange a succession policy for the nomination process of Board of Director members.	Dewan Komisaris telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Kebijakan Suksesi anggota Direksi dijalankan dengan mengedepankan pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Board of Commissioners has a Nomination and Remuneration Committee. Succession Policy for members of the Board of Directors carried out with priority in POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company, Articles of Association, and current regulations.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di PTBA Explanation of Implementation at PTBA	Status
III	**Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi** Aspect 3 : Function and Role of Board of Directors			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of Board of Directors	Penentuan jumlah Anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the number of members of the Board of Directors considers the diversity of skills, knowledge and experience required.	Penentuan jumlah Direksi Perusahaan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Penentuan Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, per 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 5 anggota Direksi. Determination of the Number of the Company's Board of Directors considers the Company condition. Determination of Board of Directors refers to the Articles of Association and applicable Laws and Regulations. As of December 31, 2023, the Company has 5 members of Board of Directors.	Terpenuhi Fulfilled
		Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of Board of Directors considers the variety of expertise, knowledge and experience required.	Penentuan Direksi Perusahaan telah mempertimbangkan faktor keberagamaan yaitu diantaranya keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal ini telah mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar, Pedoman Kerja Direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Determination of the Company's Board of Directors considered the diversity factors, including expertise, knowledge, and experience. This has been referred to the Articles of Association, Board Manuals and applicable laws and regulations.	Terpenuhi Fulfilled
		Anggota Direksi yang membawahibidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuandi bidang akuntansi. Members of Board of Directors who are liable for accounting of finance have accounting expertise and/or knowledge.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perusahaan yang diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 05 April 2021 dan menjabat sampai dengan sekarang memiliki kemampuan di bidang keuangan dan akuntansi. The Company has a Director of Finance who was appointed at the 2020 Annual GMS on April 5, 2021, and has continued to serve until present with an area of expertise in finance and accounting.	Terpenuhi Fulfilled
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Directors	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors	Direksi telah memiliki kebijakan self assessment untuk mengukur Key Performance Indicator masing-masing anggota Direksi. Board of Directors already had a self-assessment policy to measure the Key Performance Indicators of each member of Board of Directors	Terpenuhi Fulfilled
		Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report	Kebijakan penilaian dari Direksi diungkapkan pada Laporan Tahunan sebagaimana pada bab tata kelola. The assessment policy of Board of Directors is disclosed in the Annual Report as in the governance chapter.	Terpenuhi Fulfilled
		Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Director has a policy related to resignation of Board of Director members if involved in financial crime.	Direksi memiliki kebijakan pengunduran diri dalam hal terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimuat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. Board of Directors has a resignation policy in the case of engaging in financial crimes as contained in the Articles of Association and Board Manual	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di PTBA Explanation of Implementation at PTBA	Status
IV	**Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan** Aspect 4: Stakeholders Participation			
	Prinsip 7 Meningkatkan AspekTata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Improving Corporate Governance Aspect through Participation of Stakeholders	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Company has a policy to prevent insider trading	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait dengan transaksi orang dalam sebagaimana keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.250G/0100/2023 dan No.15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Kebijakan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading) The Company has a policy related to insider transactions as stated in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No.250G/0100/2023 and No.15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 regarding Policy Guidelines for Insider Trading	Terpenuhi Fulfilled
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*. Public Company has anti-corruption and anti-fraud policy	PTBA telah memiliki beberapa pedoman yang berkaitan dengan anti korupsi dan anti fraud yang dimuat pada: 1. *Code of Conduct;* 2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi; 3. Pedoman Sistem Anti Penyuapan. PTBA has guidelines related to anti-corruption and anti-fraud which are contained in: 1. Code of conduct; 2. Gratification Control Guidelines; 3. Anti-Bribery System Guidelines.	Terpenuhi Fulfilled
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. Public Company has policies concerning selection and capability improvement of suppliers and vendors.	Perusahaan telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan pemasok sebagaimana dimuat pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Bukit Asam Tbk No. 260/0100/2023. The Company has supplier selection and improvement policies as contained in the Guidelines for PT Bukit Asam Tbk Procurement of Goods and Services No. 260/0100/2023	Terpenuhi Fulfilled
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Company has a policy concerning the fulfillment of creditors' rights.	Perusahaan telah mengatur hubungan dengan mitra kerja Perusahaan dalam *Code of Conduct* yang menjamin pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kontrak yang ada dengan Perusahaan. The Company has regulated relationships with the Company's partners in the Code of Conduct and guaranteed the fulfillment of rights and obligations in accordance with existing contracts with the Company.	Terpenuhi Fulfilled
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *Whistleblowing*. Public Company has a Whistleblowing system	Perusahaan telah memiliki kebijakan *Whistleblowing* (WBS) dan untuk sistem pelaporan terkait WBS telah terintegrasi dalam media perusahaan melalui website perusahaan. The Company already has a Whistleblowing (WBS) policy and for WBS-related reporting systems have been integrated through the Company's media including the Company's Website.	Terpenuhi Fulfilled
		Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Public Company has a long-term incentive policy for Board of Directors and employees	Bahwa berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 yang mendelegasikan kewenangan penetapan gaji dan tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah menetapkan asuransi purna jabatan kepada Direksi Perusahaan. Dan untuk karyawan telah diberikan berbagai insentif jangka panjang yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Keputusan Direksi terkait. Based on Decision GMS for the 2022 Fiscal Year, delegate authority determining salaries and allowances for Directors to the Board of Commissioners by approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as proxy of Series A Dwiwarna Shareholder has established full insurance position on the Company's Board of Directors. Employees will also receive various long-term incentives based on the Work Agreement and related Directors decision.	Terpenuhi Fulfilled

No	Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di PTBA Explanation of Implementation at PTBA	Status
V	**Aspek 5 : Keterbukaan Informasi** Aspect 5: Disclosure of Information			
		Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi Public Company takes benefit from the wider use of information technology in addition to its website as an information disclosure media.	Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk keterbukaan informasi di antaranya situs web perusahaan, e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. The Company has utilized information technology for information disclosure including corporate websites, email, Twitter, Facebook, Instagram, and Youtube	Terpenuhi Fulfilled
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.	Laporan Tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen),selain pengungkapan pemilik manfaatakhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual report of Public Company discloses the final beneficial owner in share ownership of the Public Company of at least 5%, other than disclosure of the final beneficial owner in share ownership of the Public Company through major and controlling shareholders.	Dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan website Perusahaan telah diungkapkan keterbukaan terkait informasi struktur pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% dan pemegang saham utama Perusahaan. The Company's Annual Report and website, disclose the structure of shareholders with ownership above 5% and major shareholders of the Company.	Terpenuhi Fulfilled



Peningkatan Kualitas Implementasi GCG
Improving the Quality of GCG Implementation



Inisiatif Strategis Penguatan Penerapan GCG

Perusahaan menyadari bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan monitoring pelaporan pemenuhan GCG secara berkala, melakukan reviu atas penerapan GCG, serta memfasilitasi penilaian (*assessment*) implementasi GCG yang dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen untuk memastikan sejauh mana kualitas penerapan praktik GCG yang disertai dengan transformasi yang dilakukan.

Tujuan dilakukannya kegiatan *monitoring* agar Perusahaan dapat melengkapi seluruh *soft structure* yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG, serta melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada demi meningkatkan penerapan GCG.

Adapun inisiatif strategis penguatan GCG di Bukit Asam di sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Melakukan penguatan dan internalisasi terkait penerapan GCG kepada seluruh pegawai melalui program Digitalisasi (CISEA-GCG) meliputi Pengisian Pakta Integritas COC, Pengisian Survey Pemahaman GCG, Sosialisasi GCG dan Informasi *Soft Structure* GCG.
2. Melakukan penguatan dan internalisasi terkait penerapan GCG kepada pegawai PTBA dan Anak dan Afiliasi Perusahaan melalui *Workshop Governance Risk Compliance* (GRC) sebanyak 6 Sesi dari TW II-TW IV 2023.
3. Melakukan penguatan dan monitoring terkait penerapan GCG melalui penyelesaian tindak lanjut Hasil Assessment GCG.
4. Melakukan penguatan dan internalisasi terkait penerapan GCG melalui pembentukan tim penyesuaian kebijakan GCG di PTBA dan melakukan ratifikasi terkait peraturan perundangan yang terkini Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 terkait Tata Kelola Terintegrasi.

Strategic Initiative to Strengthen GCG Implementation

The Company realizes that improving the quality of effective GCG implementation in a sustainable manner is important. Therefore, Bukit Asam constantly monitors reports on GCG compliance on a regular basis, reviews GCG implementation, and facilitates GCG assessment conducted by independent assessors to ensure the quality of GCG implementation accompanied by transformations.

The purpose of conducting monitoring activities is to help the Company to complete all soft structures in accordance with applicable regulations and best practices for implementing GCG, as well as conducting studies for existing improvements in order to improve GCG implementation.

Strategic initiatives to strengthen GCG at Bukit Asam throughout the year 2023 include:

1. Strengthening and internalizing the implementation of GCG among all employees through the Digitalization Program (CISEA-GCG), including Integrity Pact COC completion, GCG Understanding Survey completion, GCG socialization, and Soft Structure GCG information dissemination.
2. Reinforcing and internalizing the application of GCG among PTBA and Subsidiaries and Affiliates' Company employees through six sessions of Governance Risk Compliance (GRC) Workshops from Q2 to Q4 2023.
3. Strengthening and monitoring the implementation of GCG through the completion of follow-up actions from the GCG Assessment results.
4. Strengthening and internalizing the application of GCG through the establishment of a GCG policy adjustment team in PTBA and ratifying the latest legislation, Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, regarding Integrated Governance.

Roadmap GCG PTBA

PTBA Roadmap GCG

2024

- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company*.
- Resertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001.
- Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen.
- Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group.
- Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
- ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 recertification.
- Evaluation of GCG implementation by Independent Parties.
- PTBA Group Governance Risk Compliance Training

2023

- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
- Sertifikasi IT *Security System* (ISO 27001).
- Resertifikasi ISO 37001:2016.
- Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group.
- Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
- IT Security System Certification (ISO 27001).
- ISO 37001:2016 recertification.
- PTBA Group Governance Risk Compliance Training.
- Independent evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

2022

- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company*.
- Pembangunan *IT Security System* (ISO 27001).
- *Launching* Aplikasi Cisea GCG.
- Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA *Group – Executive* (BOD-1) *and Regular* (GRC *Officer*) Class.
- Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen (PT Sinergi Daya Prima).
- Laporan Keterbukaan Pengelolaan perubahan iklim (CDP – *Climate Change*) dengan predikat C (*Awareness Level*).
- Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
- Development of IT Security System (ISO 27001).
- Launching of Cisea GCG Application.
- PTBA Group Governance Risk Compliance Training – Executive (BOD-1) and Regular (GRC Officer) Class.
- Evaluation of GCG implementation by Independent Parties (PT Sinergi Daya Prima).
- Climate Change Management Disclosure Report (CDP – Climate Change) with the predicate C (Awareness Level)

2021

- Implementasi Pedoman Interaksi PTBA *Holding* dengan Perusahaan terkendali danPerusahaan Afiliasi.
- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most TrustedCompany.*
- Resertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001.
- Pelatihan *Governance Risk Compliance* PTBA Group – Perwakilan Fungsi GRC di BukitAsam Group.
- Penyempurnaan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*).
- Laporan Keterbukaan Pengelolaan perubahaniklim (CDP – *Climate Change*) dengan predikat C (*Awareness Level*).
- Evaluasi mandiri penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Implementation of PTBA Holding Interaction Guidelines with Controlled Companies and Affiliated Companies
- Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
- ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 recertification.
- PTBA Group Governance Risk Compliance Training – GRC Function Representative at PTBA Group.
- Refinement on the Code of Conduct and Business Ethics (Code of Conduct).
- Climate Change Management Disclosure Report (CDP – Climate Change) with the predicate C (Awareness Level).
- Independent evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

2020

- Penyusunan Pedoman Interaksi PTBA *Holding* dengan Perusahaan terkendali dan Perusahaan Afiliasi.
- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company*.
- Pembaharuan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistleblowing System* (WBS).
- *Certified* ISO 37001:2016.
- Penandatangan pernyataan kepatuhan *Code of Conduct* oleh seluruh pegawai.
- Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen (PT Sinergi Daya Prima).
- Pemenuhan Parameter ESG berkolaborasi dengan *Carbon Disclosure Project* (CDP).
- Preparation of PTBA Holding Interaction Guidelines with Controlled Companies and Affiliated Companies.
- Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
- Renewal of Violation Reporting System Guidelines/ Whistleblowing System (WBS).
- ISO 37001:2016 Certified
- The signing of the Code of Conduct compliance statement by all employees.
- Evaluation of GCG implementation by Independent Parties (PT Sinergi Daya Prima).
- ESG Parameter Fulfillment in collaboration with Carbon Disclosure Project (CDP).

2019

- Evaluasi penerapan GCG oleh Pihak Independen (PT Sinergi Daya Prima).
- Penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan Predikat *Most Trusted Company.*
- Penyempurnaan *Board Manual dan Corporate Governance Policy*.
- Evaluasi mandiri penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Evaluation of GCG implementation by Independent Parties (PT Sinergi Daya Prima).
- Corporate Governance Perception Index Award (CGPI) with the Predicate of Most Trusted Company.
- Refinement on Manual Board and Corporate Governance Policy.
- Independent evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG)

Sosialisasi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip GCG

PTBA secara berkala melaksanakan sosialisasi dan internalisasi prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan GCG di lingkungan PTBA. Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG bekerja sama dengan unit kerja terkait lain dan diaudit oleh satuan kerja Satuan Pengawasan Intern.

Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal Perusahaan dengan fokus yang berbeda. Sosialisasi terhadap pihak internal menitikberatkan pada peningkatan pemahaman GCG dan mendorong timbulnya kesadaran serta kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sedangkan sosialisasi kepada pihak eksternal difokuskan untuk memberikan pemahaman.

Sosialisasi dilakukan melalui metode tatap muka, seperti forum dan rapat-rapat internal, dan juga melalui saluran komunikasi internal seperti *intranet*, *website* dan media sosial, dengan materi yang disosialisasikan berupa:
1. *Corporate Governance Policy* (CGP) PTBA;
2. *Board Manual*;
3. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (COC);
4. Pedoman Interaksi PTBA *Holding* Dengan Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi;
5. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS);
6. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Kebijakan Anti Gratifikasi.

Socialization and Internalization of GCG Principles

PTBA periodically organizes the socialization and internalization of GCG principles to provide an in-depth understanding of GCG implementation within PTBA. Bukit Asam carries out the stages of socialization and internalization of GCG principles on an ongoing basis. The socialization is carried out by the Corporate Management System Work Unit in collaboration with other related work units and GCG by Internal Audit Work Unit.

Socialization activities are carried out to internal and external parties of the Company with different focus. Socialization to internal parties is focused on understanding GCG and raising awareness and the need to apply GCG consistently. Meanwhile, socialization to external parties aims to provide better understanding.

The socialization is done through face-to-face method, such as internal forums and meetings, and also through internal communication channels such as intranet, website, and social media. The socialized materials are in the form of:
1. PTBA's Corporate Governance Policy (CGP);
2. Board Manual
3. Code of Conduct and Business Ethics (COC);
4. PTBA Holding Interaction Guidelines with Controlled Companies and Affiliated Companies;
5. Guidelines for Violation Reporting System/ Whistleblowing System;
6. Guidelines for Anti-Bribery Management System;
7. Anti Gratification Policy.

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders and General Meeting of Shareholders



Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

Jenis dan Hak Pemegang Saham

Perusahaan mengeluarkan saham Seri A Dwiwarna dan saham biasa Seri B dengan keterangan sebagai berikut:

Saham Seri A Dwiwarna

Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham dengan hak-hak istimewa/tertentu yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS Perseroan termasuk mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
   b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;
   c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;

Shareholders

Shareholder is an individual or legal entities who legally own Company shares, in accordance with the Company's Articles of Association.

Types and Rights of Shareholders

The company issued Series A Dwiwarna shares and Series B ordinary shares with the following information:

Series A Dwiwarna Share

Series A Dwiwarna Shares are shares with special/certain rights based on the Company's Articles of Association, namely:

1. The right to approve in the GMS regarding the following matters:
   a. Approval of the appointment and dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners;
   b. Approval of amendments to the Articles of Association;
   c. Approval of changes to the Shares Ownership structure;
   d. Agreements regarding the merger, consolidation, separation, dissolution, and the Company's takeover by another Company.
2. The right to propose candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners;
3. The right to propose GMS agenda items
4. The right to request and access Company data and documents

5. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis pada Perseroan dalam bidang sebagai berikut:
   a. Bidang akuntansi dan keuangan;
   b. Bidang pengembangan dan investasi;
   c. Bidang operasional dan pengendalian mutu;
   d. Bidang pemasaran dan komersial;
   e. Bidang informasi teknologi;
   f. Bidang pengadaan dan logistik;
   g. Bidang sumber daya manusia;
   h. Bidang tata kelola, manajemen risiko dan pengawasan internal;
   i. Bidang hukum, kepatuhan dan penanganan permasalahan hukum;
   j. Bidang kesehatan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial;
   k. Bidang penelitian dan inovasi terkait teknologi serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
   l. Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; dan/atau
   m. Bidang lainnya.
6. Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu, memberi masukan, meminta informasi, memberikan persetujuan, melakukan penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perusahaan;
7. Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
8. Hak untuk mengoordinir, menyelenggarakan dan/atau mensinergikan fungsi untuk Perusahaan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Perusahaan pada bidang-bidang sebagaimana di atas;
9. Hak untuk melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan;
10. Hak melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perusahaan;
11. Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu memberi masukan, meminta informasi, dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan; dan
12. Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Pelaksanaan terhadap hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perusahaan (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak) dalam hal ini PT Mineral Industri Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Saham Seri B

Merupakan saham biasa yang memberikan hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa atau hak-hak tertentu yang dimiliki saham Seri A sebagaimana dijelaskan di atas. Hak yang sama dengan

5. The right to determine the Company's strategic guidelines in the following sectors:
   a. Accounting and Finance;
   b. Development and Investment;
   c. Operational and Quality Control;
   d. Marketing;
   e. Information Technology;
   f. Procurement and Logistics;
   g. Human Capital;
   h. Risk Management and Internal Control;
   i. Legal, Compliance, and Legal Dispute;
   j. Health, Occupational Safety, Environmental Management, and Social Responsibility;
   k. Research and innovation related to technology and Intellectual Property Rights (IPR);
   l. Review of legal regulations and policies; and/or
   m. Other fields.
6. The right to carry out inspections/reviews, provide input, request information, give approval, determine and monitor the implementation of the Management Contract for the Company's Directors, including determining the key performance indicators attached therein, as a condition for the appointment of the Company's Directors;
7. The right to propose changes to the Company's Articles of Association;
8. The right to coordinate, organize and/or synergize functions for the Company based on an agreement with/ authorized by the Company in the fields as above;
9. The right to synergize supervision of the Company's operational and strategic activities;
10. The right to control or monitor the implementation of the Company's strategic and operational activities or policies;
11. The right to carry out inspections/reviews, provide input, request information, and approve the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, other work plans, along with amendments submitted by the Company's Board of Commissioners; and
12. Other rights are regulated in these Articles of Association as the rights and/or authorities of Series A Dwiwarna Shareholders.

The implementation of the special rights of Series A Dwiwarna Shareholders can be authorized to Series B shareholders with ownership of the majority of the Company's shares (hereinafter referred to as the Most Series B Shareholders) in this case PT Mineral Industri Indonesia (Persero) based on the Power of Attorney of the Minister of SOEs No. SKK-19 / MBU/03/2023 dated March 21, 2023.

Series B Share

Ordinary shares that provide the same rights as the rights of Series A shares, except for special or certain rights held by Series A shares as described above. The same rights as those held by Series A shares, including the right to receive

yang dimiliki saham Seri A termasuk hak untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki. Saham Seri B merupakan saham biasa yang beredar.

dividends and the proceeds from the dissolution of the Company following the proportion of the number and amount paid for the shares owned. Series B shares are common shares outstanding.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai Pemilik Modal memiliki tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemegang Saham harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Pemegang Saham Pengendali, harus memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), serta mengungkapkan Pemegang Saham Pengendali sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh lembaga/badan otoritas yang berwenang. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan, maka perlu diupayakan agar terdapat akuntabilitas dan hubungan antara Perusahaan dapat dijalankan secara transparan.

Shareholder Responsibilities

Shareholders as Capital Owners have responsibility in the Company in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In carrying out their responsibilities, Shareholders must pay attention to the Company's continuity.

In its practice, Controlling Shareholders must take into account the interests of Minority Shareholders and Stakeholders, as well as disclose the ultimate shareholders in a violation of laws and regulations as long as it is ordered by the competent authority institution/body. In the case of Shareholders becoming Controlling Shareholders in several companies, efforts should be made to ensure accountability and transparent relationship between the Companies.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk mengatur hubungan pemegang saham dengan Perusahaan, di antaranya adalah Tata Laksana Pelaksanaan RUPS, Tata Laksana Keterbukaan Informasi, Pedoman Pengelolaan *Website*, dan Pedoman Komunikasi. Seluruh kebijakan tersebut berada di bawah pengendalian Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan, sebagaimana salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/POJK.04/2014.

Shareholders Relation Policy

The Company has established policies to regulate shareholder relations with the Company, including the Procedures of GMS Holding, Information Disclosure Procedures, Website Management Guidelines, and Communication Guidelines. All of these policies are under the control of Corporate Secretary Work Unit, as one of the Corporate Secretary duties in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Dalam rangka memberikan informasi yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya pemegang saham, Perusahaan telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat diakses oleh pemegang saham Perusahaan melalui kanal sebagai berikut:

: www.ptba.co.id
: corsec@bukitasam.co.id

Di samping itu, Perusahaan juga telah membentuk Divisi Hubungan Investor yang akan menunjang dan bertanggungjawab sebagai *liaison officer* antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu wadah Perusahaan dalam menjalin komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan para pemegang saham dan memegang wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. RUPS juga bertindak sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, memberikan pengesahan dan pendapat terkait aktivitas pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun buku serta rencana pengelolaan Perusahaan untuk tahun berikutnya.

Access to Information to Shareholders

In order to provide adequate information to all stakeholders, especially shareholders, the Company provided various communication media channel that can be accessed by the Company's shareholders through the following channels:

: www.ptba.co.id
: corsec@bukitasam.co.id

Moreover, PTBA has established an Investor Relations Division which will support and be responsible as a liaison officer between the Company and the Company's shareholders.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the Company's forums to establish communication between the Board of Commissioners and Directors with shareholders and holds the highest authority in making important company decisions. The GMS also acts as a means to obtain information; provide approval and opinions regarding the Company's management activities throughout the financial year, and acts as the Company's management plans for the following year.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dasar Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan mengacu kepada:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15 Tahun 2020");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16 Tahun 2020");
5. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;
6. *Corporate Governance Policy*.

Jenis RUPS

Dalam penyelenggaraannya RUPS terbagi atas dua jenis, yakni RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPS LB). RUPST diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau waktu lain yang ditentukan oleh OJK berdasarkan ketentuan POJK No. 15 Tahun 2020. Sementara (RUPSLB) dapat diselenggarakan di luar waktu RUPST.

1. RUPS Tahunan
   Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS Tahunan memiliki kewenangan sebagai berikut:
   a. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk didalamnya penyampaian Laporan pengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, Laporan pertanggungjawaban program *Corporate Social Responsibility*;
   b. Penetapan gaji dan honorarium, dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Penetapan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau;
   d. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Perusahaan pada tahun buku berjalan;
   e. Usulan penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan (jika Perusahaan mempunyai Laba Positif);
   f. Mata acara lain yang membutuhkan persetujuan RUPS berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUPS Luar Biasa
   Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan untuk memutuskan:
   a. Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa tugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebab-sebab lainnya;
   b. Adanya rencana transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

General Meeting of Shareholders

Basis for holding GMS

Organizing the Company's GMS should refer to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority Regulation no. 15/ POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15 of 2020");
4. Financial Services Authority Regulation No. 16/ POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No.16 of 2020");
5. Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk;
6. Corporate Governance Policy.

Type of GMS

In its implementation, the GMS is divided into two types, namely the Annual GMS (AGMS) and the Extraordinary GMS (EGMS). The AGMS is held at least once a year no later than 6 (six) months after the financial year ends or other time determined by the OJK based on the provisions of POJK No. 15 of 2020. Meanwhile, EGMS can be held outside the AGMS time.

1. Annual GMS
   Pursuant to the Company's Articles of Association, the Annual GMS has the following authorities:
   a. Ratification of the Annual Report, including the submission of reports on the management of Board of Directors and the supervision of Board of Commissioners, including the ratification of the Company's Annual Financial Statements, and the Corporate Social Responsibility program accountability report;
   b. Determination of salary and honorarium, and other facilities for Board of Directors and Board of Commissioners;
   c. Determination of performance bonuses/ incentives for Board of Directors and Board of Commissioners for the last fiscal year;
   d. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the current fiscal year;
   e. Proposal to determine the use of the Company's Net Profit (if the Company has Positive Profit);
   f. Other agendas that require GMS approval based on the Articles of Association and regulations under applicable laws and regulations.

2. Extraordinary GMS
   Based on the Company's Articles of Association, an Extraordinary GMS can be held to decide:
   a. Replacement of Board of Commissioners and Board of Directors before their term ends, either due to resignation and/or other reasons;
   b. There are plans for material transactions and/or conflicts of interest as stipulated in applicable laws and regulations;

c. Rencana korporasi lain yang bersifat material, seperti pembelian kembali saham Perusahaan yang beredar, stock split, dan right issue yang didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

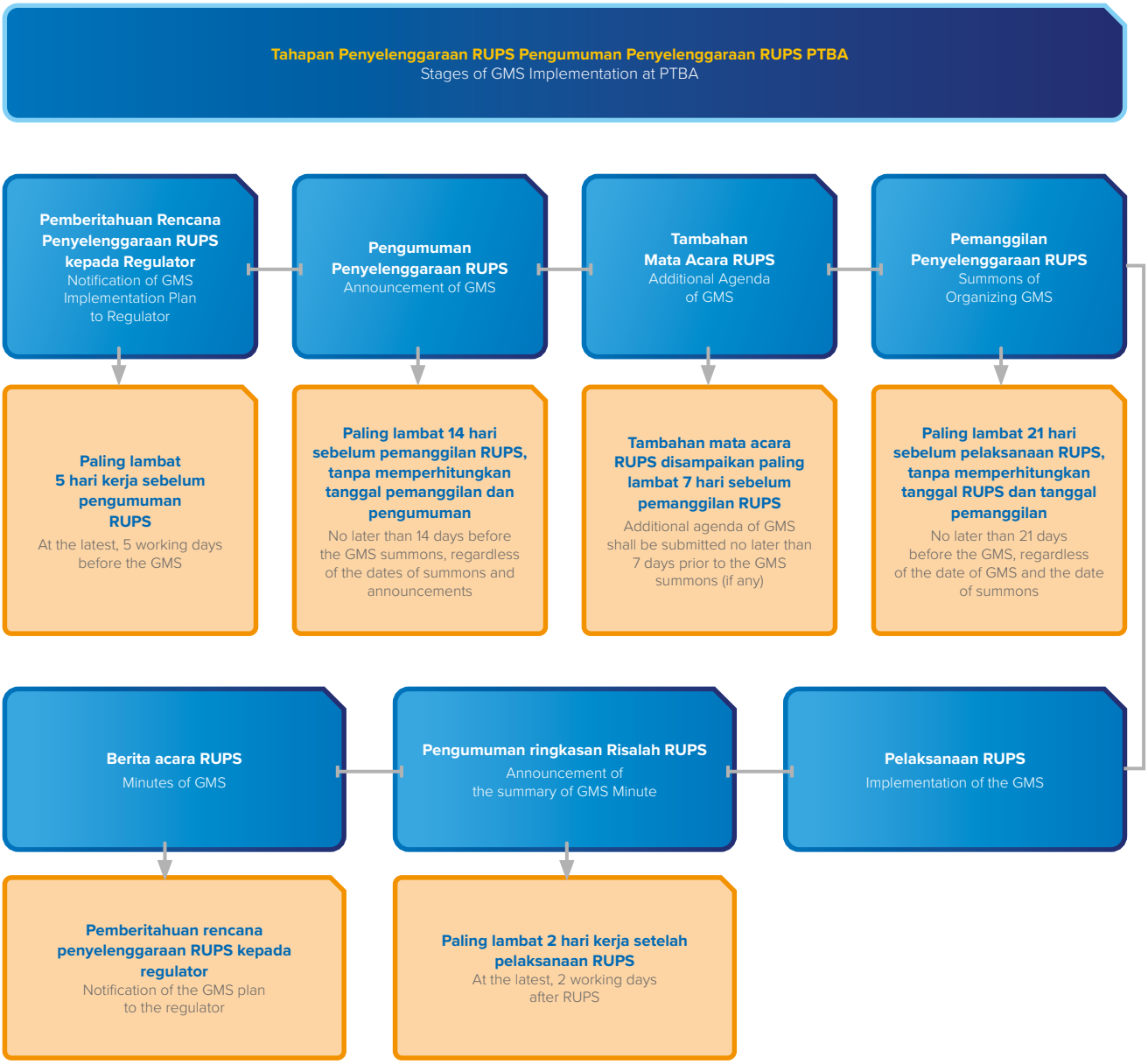
Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS perusahaan mengacu pada ketentuan POJK No. 15 Tahun 2020 dan POJK No. 16 Tahun 2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS secara umum adalah sebagai berikut:

c. Other corporate plans that are material in nature, such as buying back the Company's outstanding shares, stock splits, and rights issues, which are based on the Articles of Association and applicable regulations in the capital market sector.

Stages of GMS Implementation

The implementation of the company's GMS refers to the provisions of POJK No. 15 of 2020, POJK No. 16 of 2020, and provisions of the Company's Articles of Association. The general stages of implementing a GMS are as follows:



Berikut uraian dari penjelasan tahapan di atas:

1. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, termasuk pengungkapan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS

The following is a description of stages above:

1. GMS Notification to OJK shall be made no later than 5 (five) working days before the GMS announcement, without taking into account the GMS announcement date, including the disclosure of GMS Agenda;
2. GMS Announcement shall be made no later than 14 (fourteen) days before the GMS summon regardless of the

tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pengumuman, yang disampaikan pada situs web bursa efek, situs web perusahaan dan eASY. KSEI;
3. Tambahan Mata Acara RUPS disampaikan paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS yang disampaikan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna atau 1 atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara sah;
4. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pelaksanaan RUPS dan tanggal pemanggilan yang disampaikan melalui situs web bursa efek, situs web perusahaan dan eASY.KSEI;
5. Pelaksanaan RUPS;
6. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS melalui situs web bursa efek, situs web perusahaan dan eASY.KSEI;
7. Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan RUPS.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali yakni RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022 pada 15 Juni 2023 yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring). Pelaksanaan RUPST telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

date of Summon and Announcement, which are submitted on the Stock Exchange Website, the Company's Website, and eASY.KSEI;
3. Additional GMS Agendas are submitted no later than seven days before the GMS summon submitted by Shareholders of series A Dwiwarna or one or more who represent 1/20 or more of total number of shares issued by the Company with valid voting rights;
4. GMS Summon is made no later than 21 days before the GMS is held, excluding the date of GMS and date of summon submitted through the Stock Exchange Website, the Company's Website, and eASY.KSEI;
5. GMS Holding;
6. Submission of the Summary of GMS Minutes no later than 2 (two) working days after the GMS is held via the Stock Exchange Website, the Company's Website, and eASY. KSEI;
7. Submission of GMS Minutes to OJK no later than 30 (thirty) calendar days after the GMS is held.

GMS in 2023

Throughout 2023, the Company has held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS for 2022 Fiscal Year on June 15, 2023, physically and virtually. The implementation of AGMS is in accordance with the mechanism stated in POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and the provisions of the Company's Articles of Association.

Proses Penyelenggaraan RUPST 15 Juni 2023
Process of Annual GMS on June 15, 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Information
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator AGMS notification to regulator	10 April 2023 April 10, 2023	Pemberitahuan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 5 hari kerja sebelum penguman, dimana Perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK untuk RUPS Tahun Buku 2022 berdasarkan Surat Nomor:T/065.J/0100/KS.03/IV/2023 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") PT Bukit Asam Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2022. Notification has been submitted to OJK in accordance with applicable regulations, namely 5 working days prior to the announcement, where the Company has submitted notification to OJK for the 2022 Fiscal Year GMS based on Letter Number: T/065.J/0100/KS.03/IV/2023 regarding Notification Plans for holding the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of PT Bukit Asam Tbk ("Company") for the 2022 financial year.
Pengumuman RUPST AGMS announcement	17 April 2023 April 17, 2023	• Pengumuman telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku yakni 14 hari sebelum tanggal pemanggilan tanpa memperhitungkan tanggal pemaggilan dan tanggal pengumuman. • Untuk pengumuman sendiri, perusahaan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Tahun Buku 2022 berdasarkan Surat Perusahaan No. B/118/111000/KS.03/IV/2023 Perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 melalui media sebagai berikut: a. Situs web Perusahaan; b. Situs web Bursa Efek Indonesia; c. Situs web KSEI pada halaman eASY.KSEI. • Bukti iklan terkait pengumuman telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 17 April 2023 berdasarkan Surat Perusahaan Nomor:B/119/11100/KS.03/IV/2023 perihal Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022. • An announcement has been submitted in accordance with applicable regulations, namely 14 days before the summons date without taking into account the summons date and the announcement date. • For AGMS announcement, the company has submitted the Announcement of the GMS for the 2022 Financial Year based on Company Letter Number: B/118/111000/KS.03/IV/2023 concerning the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year through the following media: a. Company website; b. Indonesian Stock Exchange website; c. KSEI website on page eASY.KSEI. • Proof of advertisement related to the announcement was submitted to the OJK on April 17, 2023, based on Company Letter No. B/119/11100/KS.03/IV/2023 regarding Proof of Advertisement for the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year.

Proses Penyelenggaraan RUPST 15 Juni 2023

Process of Annual GMS on June 15, 2023

Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Information
Ralat Pengumuman Announcement correction	28 April 2023 April 28, 2023	• Perusahaan melakukan ralat pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang semula RUPS akan diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023 menjadi 15 Juni 2023. • Ralat pengumuman telah disampaikan oleh Perusahaan berdasarkan Surat Perusahaan Nomor:B/129/111000/KS.03/IV/2023 Perihal Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 yang disampaikan melalui media sebagai berikut: a. Situs web Perusahaan; b. Situs web Bursa Efek Indonesia; c. Situs web KSEI pada halaman eASY.KSEI. • Bukti Iklan ralat pengumuman telah disampaikan oleh Perusahaan kepada OJK berdasarkan Surat Nomor:B/130/111000/KS.03/IV/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Bukti Iklan Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022.
		• The company revised the announcement of the Annual GMS for the 2022 Fiscal Year, from the GMS originally being held on May 24, 2023, to June 15, 2023. • The announcement revision has been submitted by the Company based on Company Letter Number: B/129/111000/KS.03/IV/2023 Regarding Correction of the Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for Fiscal Year 2022 which was delivered via the following media: a. Company website; b. Indonesian Stock Exchange website; c. KSEI website on page eASY.KSEI. • Proof of advertisement of revised announcement has been submitted by the Company to the OJK based on Letter Number: B/130/111000/KS.03/IV/2023 dated 28 April 2023 regarding Proof of Advertisement of Corrected Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Recording Date of List of Shareholders entitled to attend the AGMS	23 Mei 2023 May 23, 2023	*Recording Date* Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST yaitu 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pemangilan RUPST. Recording Date List of Shareholders who are entitled to attend the AGMS, namely 1 (one) trading day before the date of invitation for the AGMS.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPST Summon and explanation of AGMS agenda items	24 Mei 2023 May 24, 2023	• Pemanggilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan. • Untuk pemanggilan sendiri perusahaan telah menyampaikan pemanggilan berdasarkan Surat Perusahaan No. B/173/111000/KS.03/V/2023 Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 yang disampaikan melalui media sebagai berikut: a. Situs web Perusahaan; b. Situs web Bursa Efek Indonesia; c. Situs web KSEI pada halaman eASY.KSEI. • Bukti Iklan Pemanggilan telah disampaikan oleh Perusahaan kepada OJK pada tanggal 24 Mei 2023, berdasarkan Surat No. B/174/111000/KS.03/V/2023 Perihal Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022. • The summons has been made in accordance with applicable regulations, namely 21 days before the date of the GMS without taking into account the date of the GMS and the date of the summons. • For the summons, the company has submitted a summons based on Company Letter No. B/173/111000/KS.03/V/2023 concerning the Summons for the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year which was conveyed through the following media: a. Company website; b. Indonesian Stock Exchange website; c. KSEI website on page eASY.KSEI. • Proof of Advertisement of Invitation was submitted by the Company to OJK on May 24, 2023, based on Letter No. B/174/111000/KS.03/V/2023 Regarding Proof of Advertisement of Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year.
Pelaksanaan RUPST AGMS holding	15 Juni 2023 June 15, 2023	RUPST diselenggaran di Sumba Room, Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10710 pada pukul 16.22-17.53 WIB The AGMS was held at Sumba Room, Borobudur Hotel, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10710, on 16-22-17.53 local time.

Kewajiban pelaporan di atas dilakukan oleh Perseroan menggunakan sistem pelaporan elektronik PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

The reporting obligations are carried out by the Company using the electronic reporting system of the Indonesian Stock Exchange and the Financial Services Authority.

Keterangan Description	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 The 2022 Financial Year GMS
Pimpinan Rapat Chairman of Annual GMS	Irwandy Arif, Komisaris Commissioner
Kuorum Kehadiran Quorum	Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir mewakili sejumlah 9.672.323.925 saham termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 84,2008153% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebesar 33.449.900 lembar saham atau 0,29%. The Company's shareholders with valid voting rights who were present represented a total of 9,672,323,925 shares including 5 (five) Series A Dwiwarna shares or 84,2008153% of all shares that have been issued and fully paid up in the Company after deducting the shares that have been purchased returned by the Company amounting to 33,449,900 shares or 0.29%.

Keterangan Description	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 The 2022 Financial Year GMS	
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Board of Commissioners and Board of Directors' Attendance	**Dewan Komisaris*** • Andi Pahril Pawi, Komisaris Independen • Carlo Brix Tewu, Komisaris • E. Piterdono HZ, Komisaris • Irwandy Arif, Komisaris **Direksi** • Arsal Ismail, Direktur Utama • Farida Thamrin, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko • Suhedi, Direktur Operasi dan Produksi • Rafli Yandra, Direktur Pengembangan Usaha • Suherman, Direktur Sumber Daya Manusia	**Board of Commissioners*** • Andi Pahril Pawi, Independent Commissioner • Carlo Brix Tewu, Commissioner • E. Piterdono HZ, Commissioner • Irwandy Arif, Commissioner **Board of Directors** • Arsal Ismail, President Director • Farida Thamrin, Finance and Risk Management Director • Suhedi, Operations and Production Director • Rafli Yandra, Business Development Director • Suherman, Human Resources Director
Mekanisme Pengambilan Keputusan Voting Mechanism	Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Decisions are taken by consensus through voting.	

*Catatan: pada saat RUPS Tahunan jumlah komisaris sebanyak 4 orang mengingat:
1) Pada tanggal 21 Maret 2023 Sdri. Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum, mengingat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bukit Asam yang bersangkutan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris di PTBA, pasca dialihtugaskannya dari Direktur Holding (MIND ID) menjadi sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (*sister company* PTBA).
2) Pada tanggal 11 April 2023, Sdr Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya karena hukum untuk periode kedua.
*Note: at the Annual GMS the number of commissioners were 4 people considering:
1) On March 21, 2023, Devi Pradnya Paramita (Commissioner) term of office ended due to law. In accordance with the provisions of the Articles of Association of PTBA, she was prohibited from holding concurrent positions as Commissioner in PTBA, after her transfer from Holding Director (MIND ID) to become Finance Director of PT Indonesia Asahan Aluminum (sister company of Bukit Asam).
2) On April 11, 2023, Suhartono (President/Independent Commissioner) ended his position due to law for the second term of office.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pemungutan Suara

Sesuai dengan tata tertib yang disampaikan pada *website* Perusahaan, mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
2. Untuk mata acara kesatu, kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh harus disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara ketujuh juga harus disetujui oleh Pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.
3. Untuk mata acara Rapat Kelima, harus disetujui oleh para Pemegang Saham seri B dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham seri B dengan hak suara yang sah

Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan dari pemegang saham selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
2. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- *Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
3. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perusahaan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara

Decision Making and Voting Mechanisms

In accordance with the Rules of Procedure posted on the Company's website, the decision-making and voting mechanisms are as follows:

Decision-making

1. Decisions are taken by deliberation to reach a consensus through voting.
2. The first, second, third, fourth and sixth agenda items must be approved by shareholders who represent more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights. Apart from being attended by shareholders representing more than ½ (one half) of total shares, the seventh agenda item must be approved by the Series A Dwiwarna shareholder or their representative.

3. The fifth meeting agenda item, must be approved by the series B shareholders and/or their legal representatives who jointly represent at least 3/4 (three quarters) of total series B shares with valid voting rights.

Voting

1. Voting is carried out after all questions from shareholders have been answered and/or the question-and-answer session has ended.
2. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
3. Shareholders who attend or are represented by their proxies but have not cast a vote on the meeting agenda, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period for each item on the meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 5 (five) minutes;

(*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit; Selama proses elektronik pemungutan suara secara berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no. (T) has started' pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status tertentu pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no. ( ) has ended*', maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

4. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses *System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perusahaan www.ptba.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam rapat.
7. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Pihak Independen Penghitung Suara

Guna menjamin independensi, Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek Perusahaan PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada rapat.

Keputusan RUPST 15 Juni 2023 dan Tindak Lanjutnya

Seluruh keputusan telah dimuat dalam Akta No. 60 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh dan hadapan notaris, Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Keputusan tentang persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar (AD) Perusahaan juga telah dinyatakan kembali dan disusun seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut dalam Akta No. 61 tanggal 15 Juni 2023 , yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk.

Berikut disampaikan hasil keputusan RUPST untuk Tahun Buku 2022 dan realisasi atau tindak lanjut atas hasil keputusan RUPS.

During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no. (T) has started" will be displayed in the column "General Meeting Flow Text". If the shareholders or their proxies do not vote for the agenda items of the Meeting until the certain status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no. ( ) has ended', then it will be deemed to have voted Abstain for the relevant Meeting agenda item.

4. Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application.
5. Electronic direct voting per agenda item is a maximum of 5 (five) minutes per meeting agenda item.
6. Shareholders who are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) via the https://access.ksei. co.id/link, can cast their votes by granting a power of attorney. They can download the power of attorney contained on the Company's website www.ptba.co.id to provide power of attorney and vote at the Meeting.
7. Shareholders who abstain (did not cast a vote) will be included in the the most voted cast at the Meeting.
8. Shareholders who are physically present are asked to submit a ballot card that has been filled in, the Chairman of Meeting will ask the Notary to announce the voting results.

Vote Counter Independent Party

In order to guarantee independence, the Company has appointed independent parties, namely the Share Registrar PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., to assist in calculating the votes at the meeting.

AGMS Decision on June 15, 2023 and the Follow-ups

All decisions have been contained in Deed number 60 dated June 15, 2023, made by and in the presence of a notary, Jose Dima, S.H., M.Kn. in Jakarta. The decision regarding approval of changes to the Company's Articles of Association has also been restated and compiled all the provisions of the Company's Articles of Association in Deed No. 61 dated June 15, 2023, which was made before Notary Jose Dima, S.H., M.Kn. in Jakarta. The notification has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU. AH.01.03-0090409 dated July 12, 2023, Regarding the Receipt of Notification of the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk and Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0138986 dated July 12, 2023, Regarding Receipt of Notification of Changes to Company Data of PT Bukit Asam Tbk.

The following are the results of the AGMS decisions for the 2022 Financial Year and the realization or follow-up to the results of the GMS decisions.

Mata Acara Rapat Kesatu First Agenda Item Meeting	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Annual Financial Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the fiscal year ending December 31, 2022, as well as the granting of full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during 2022 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting

Setuju Agree	*Abstain*	Tidak Setuju Disagree
9.633.203.203 atau 99,60% 9,633,203,203 or 99.60%	29.328.338 atau 0,30% 29,328,338 or 0.30%	9.792.384 atau 0,10% 9,792,384 or 0.10%

Keputusan Rapat Resolutions	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan laporannya No. 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/11/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecii untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai laporannya No. 00524/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/111/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecii yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan. 1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 Financial Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report as well as ratify the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia) in accordance with its report No. 00220/2.1025/AU.1/02/0243-1/1/11/2023 dated February 28, 2023, with an opinion of "fair in all material respects", and provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for actions in the management and supervision of the company that have been carried out in the Financial Year ending on December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the report books company. 2. Ratify the Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report as audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) according to its report No. 00524/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/111/2023 dated March 31, 2023, with the opinion "fair in all material respects", as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions in managing and supervising the Micro and Small Business Funding Program which have been carried out in the Financial Year ending on December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the report books Company.
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Laporan Tahunan Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2022 telah disahkan pada RUPS Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 pada tanggal 15 Juni 2023 dan telah dimuat pada Berita Acara RUPS Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022 sebagaimana dimuat pada Akta Notaris Nomor 60 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. The Annual Report for the 2022 Financial Year, the Audited Annual Financial Report for the 2022 Financial Year, and the PUMK Financial Report for the 2022 Financial Year have been ratified at the Annual GMS of PT Bukit Asam Tbk for the 2022 Financial Year on June 15, 2023, and set forth in the Meeting Minutes which has been contained in Deed No. 60 of 2023, made by and before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.

Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda Item Meeting	Penetapan penggunaan laba bersih, pembagian dividen untuk Tahun Buku 2022. Determination of the use of net income, including the distribution of dividends for 2022 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Terdapat satu pertanyaan dari pemegang saham, namun mengingat pertanyaan tidak relevan dengan mata acara Rapat, maka sesuai dengan tata tertib Rapat tidak ditanggapi oleh Perusahaan. One shareholder asked a question but considering that the question was not relevant to the agenda of the Meeting, in accordance with the Meeting's rules and regulations, the Company did not respond to it.

Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.648.355.925 atau 99,75% 9,648,355,925 or 99.75%	22.616.300 atau 0,24% 22,616,300 or 0.24%	1.351.700 atau 0,01% 1,351,700 or 0.01%
Keputusan Rapat Resolutions	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan sebesar Rp12.567.581.927.964 (Dua Belas Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puiuh Satu Juta Sembiian Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembiian Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sebagai dividen seluruhnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang beriaku pada bursa efek di tempat saham Perusahaan dicatatkan. 1. Approved the determination of the use of net profit for the 2022 Fiscal Year attributable to the owner of the Company's parent entity amounting to Rp12,567,581,927,964 (Twelve Trillion Five Hundred Sixty Seven Billion Five Hundred Eight Hundred Million Nine Hundred Twenty Seven Thousand Nine Hundred Sixty Four Rupiah), as full dividends. 2. Grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures for distributing dividends and to announce them by taking into account the regulations applicable to the stock exchange where the Company's shares are listed.		
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Dividen Tahun Buku PTBA Tahun Buku 2022, telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 14 Juli 2023. Dividends have been distributed to all shareholders of the Company on July 14, 2023.		

Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda Item Meeting	Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023. Determination of bonuses for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2022 Fiscal Year and salary/ honorarium along with facilities and allowances for 2023 Fiscal Year		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.470.564.465 atau 97,91% 9,470,564,465 or 97%	30.015.459 atau 0,31% 30,015,459 or 0.31%	171.744.001 atau 1,78% 171,544,001 or 1.78%
Keputusan Rapat Resolutions	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak seteiah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi Perusahaan untuk Tahun 2023. 1. Granted authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the largest Series B Shareholder by first consulting with Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Financial Year as well as determine the honorarium, allowances, facilities, and other incentives for members Company's Board of Commissioners in 2023. 2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the largest Series B Shareholder after consulting with Dwiwarna Series A Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Fiscal Year as well as determining salaries and allowances, facilities, and other incentives for the Company's Directors in 2023.		
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Telah ditetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 yang didasarkan pada Surat Dewan Komisaris No. 57/DEKOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk serta Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesi (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium dan Penghasilan Tahun 2023 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"). The remuneration of the Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year and the bonus for the 2022 Financial Year has been determined based on the Letter of the Board of Commissioners No. 57/DEKOM/VIII/2023 dated August 14, 2023, concerning Determination of the Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salaries/ Honorarium and Benefits and Facilities for the 2023 Fiscal Year of PT Bukit Asam Tbk and Letter from the Director of Portfolio and Business Development of PT Mineral Industri Indonesi (Persero) as Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 dated August 11, 2023, Regarding Determination of Bonus on the 2022 Fiscal Year and Salary/Honorarium and Revenue in 2023 for Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("PTBA").		

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda Item Meeting	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Pubiik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecii Tahun Buku 2023. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for 2023 Fiscal Year.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.485.861.068 atau 98,07% 9,485,861,068 or 98.07%	22.112.000 atau 0,23% 22,112,000 or 0.23%	164.350.857 atau 1,70% 164,350,857 or 1.70%
Keputusan Rapat Resolutions	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) antara lain untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, serta Laporan lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk dilakukan audit, termasuk Laporan Pencapaian Key Performance Indicators Direksi secara koiegiai dan individual serta Laporan PSA 62 Perusahaan untuk Tahun Buku 2023. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan; b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti. 1. Appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana Rintis & Partners, members of the global network PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia), among others, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year and other periods in the 2023 Financial Year, carry out a general audit of the Report Micro and Small Business Funding Program Finances for the 2023 Financial Year, and other reports required under applicable laws and regulations for audit, including the Board of Directors' Key Performance Indicators Achievement Report individually and collectively, and the Company's PSA 62 Report for the 2023 Financial Year. 2. Delegated authority to the Board of Commissioners by first obtaining approval from the largest number of Series B Shareholders to: a. Appoint a Public Accountant at the Public Accounting Firm that has been determined in the Meeting, because the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the evaluation results, and as long as the appointment is carried out subject to the Public Accountant criteria stipulated in the Company's policy; b. Determine a replacement for Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to continue or carry out their duties for any reason based on capital market rules and regulations; and c. Determine the conditions, requirements for appointment and honorarium for the Public Accountant and/or replacement Public Accountant Firm.		
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan anggota jaringan *global PricewaterhouseCoopers* (*PwC Indonesia*) pada RUPST PTBA Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 dan Dewan Komisaris PTBA telah menunjuk Akuntan Publik Yusron, S.E., Ak, CPA dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. T/225/111000/KS.03/VI/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada PT Bukit Asam Tbk. The Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana Rintis & Partners, members of the global network PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) have been appointed at the PTBA AGMS for the 2022 Fiscal Year on June 15, 2023, and the PTBA Board of Commissioners has appointed Public Accountant Yusron, S.E., Ak, CPA which has been reported to OJK based on Letter No. T/225/111000/KS.03/VI/2023 dated July 20, 2023, concerning Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the Context of an Audit of Annual Historical Financial Information at PT Bukit Asam Tbk.		

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Agenda Item Meeting	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Approval of amendment to the Company's Articles of Association		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	8.580.010.770 atau 88,71% 8,580,010,770 or 88.71%	30.159.159 atau 0,31% 30,159,159 or 0.31%	1.062.153.991 atau 10,98% 1,062,153,991 or 10.98%

Keputusan Rapat Resolutions	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain: a. Dalam rangka penyesuaian/penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di Perusahaan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022; serta b. Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan di lingkup Badan Usaha Milik Negara; sesuai dengan usulan dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna, sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham Perusahaan. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas, termasuk pernyataan kembali susunan pemegang saham Perusahaan yaitu sebagai berikut: a. Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 5 (lima) lembar saham Seri A Dwiwarna; b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki sebanyak 7.595.650.695 (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) lembar saham Seri B; c. Perusahaan memiliki sebanyak 33.449.900 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) lembar saham Seri B; dan d. Masyarakat memiliki sebanyak 3.891.558.650 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh) lembar saham Seri B. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, melakukan penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diperlukan dengan berkoordinasi dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku penerima kuasa khusus dari pemegang saham Seri A Dwiwarna, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham terakhir, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Approved changes to the Company's Articles of Association, including: a. In order to adjust/add to the rights of Series A Dwiwarna Shareholders (which can be authorized) in the Company in connection with the issuance of Government Regulation Number 45 of 2022 jo. Government Regulation Number 46 of 2022; as well as b. Adjustments to regulatory provisions within the scope of State-Owned Enterprises; in accordance with the proposal from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the attorney for the Series A Dwiwarna shareholder, as the proposal has been submitted to the Company's shareholders. 2. Approved to re-arrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in number 1 (one) of the decision above, including a restatement of the composition of the Company's shareholders, namely as follows: a. The Republic of Indonesia owns 5 (five) Series A Dwiwarna shares; b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) owns 7,595,650,695 (Seven Billion Five Hundred Ninety Five Million Six Hundred Fifty Thousand Six Hundred Ninety Five) Series B shares; c. The Company owns 33,449,900 (Thirty Three Million Four Hundred Forty Nine Thousand Nine Hundred) Series B shares; And d. The public owns 3,891,558,650 (Three Billion Eight Hundred Ninety One Million Five Hundred Fifty Eight Thousand Six Hundred and Fifty) Series B shares. 3. Granted power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions on the agenda of this Meeting, including but not limited to, making improvements to changes to the Company's Articles of Association as necessary in coordination with PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as recipient of special power of attorney from the Series A Dwiwarna shareholder, to prepare and restate all changes to the Articles of Association in a Notarial Deed as well as state the final composition of shareholders, and submit to the authorized agency to obtain approval and/or a sign of acceptance of the changes to the Articles of Association, and do everything that is deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the Articles of Association if this is required by the competent authority.
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Anggaran Dasar PTBA telah dimuat pada Akta Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Bukit Asam Tbk;" PTBA's Articles of Association have been contained in Deed Number 61 dated June 15, 2023, made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notary in Jakarta. The notification has been received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.03-0090409 dated July 12, 2023, Concerning Receipt of Notification of the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk and Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0138986 dated July 12, 2023, Concerning Receipt of Notification of Changes to Company Data of PT Bukit Asam Tbk;"

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Agenda Item Meeting	Pengukuhan (ratifikasi) atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Repubiik Indonesia (Permen BUMN) berikut: 1. Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosiai dan Lingkungan Badan Usaha Miiik Negara: 2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Keloia dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miiik Negara; dan 3. Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Miiik Negara. Ratification of the following Regulations of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (SOEs Decree): 1. SOEs Ministerial Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises: 2. SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. SOEs Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None

Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	9.647.080.625 atau 99,74% 9,647,080,625 or 99.74%	23.100.600 atau 0,24% 23,100,600 or 0.24%	2.142.700 atau 0,02% 2,142,700 or 0.02%
Keputusan Rapat Resolutions	Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Miiik Negara, sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosiai dan Lingkungan Badan Usaha Miiik Negara; 2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Keloia dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miiik Negara; dan 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari. Officiating the Implementation of the Agency Ministerial Regulation State-Owned Enterprises, as follows: 1. Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; 2. Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises; Following are the changes in the future.		
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; Telah disahkan untuk diratifikasi pada RUPS PTBA Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, yang dimuat pada Akta Notaris Nomor 60 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. 1. Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; 2. Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and 3. Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises; Has been approved for ratification at the PTBA GMS for Fiscal Year 2022 on June 15, 2023, which was contained in Notarial Deed Number 60 of 2023 made by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta.		

Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Agenda Item Meeting	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	8.438.150.954 atau 87,24% 8,438,150,654 or 87.24%	29.492.459 atau 0,31% 29,492,459 or 0.31%	1.204.680.512 atau 12,45% 1,204,680,512 or 12.45%
Keputusan Rapat Resolutions	1. Mengukuhkan pengakhiran masa jabatan anggota- anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: a. Sdr. Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen terhitung sejak tanggal 11 April 2023; dan b. Sdri. Devi Pradnya Paramita sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023. 2. Mengalihkan penugasan Sdr. Irwandy Arif, dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut: a. Sdr. Kurnia Toha sebagai Komisaris Independen; dan; b. Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan sebagai Komisaris Independen. 1. Confirmed the termination of the terms of office of the members of the Board of Commissioners as follows: a. Agus Suhartono as President/Independent Commissioner as of April 11, 2023; And b. Devi Pradnya Paramita as Commissioner as of March 21, 2023. 2. Assignment transfer of Irwandy Arif, from being Commissioner to become President Commissioner of PT Bukit Asam Tbk, with the term of office continuing the remaining term of office in accordance with the GMS decision regarding the appointment of the person concerned. 3. Appointed members of the Company's Board of Commissioners as follows: a. Kurnia Toha as Independent Commissioner; And; b. Rahmat Hidayat Pulungan as Independent Commissioner.		

4. Dengan adanya pengakhiran masa jabatan, pengalihan penugasan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 di atas, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:
4. With the termination of the term of office, transfer of assignments and appointment of members of the Company's Board of Commissioners as referred to in numbers 1, 2 and 3 above, the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company will be as follows:

Direksi Board of Directors			
1)	Direktur Utama President Director	:	Sdr. Arsal Ismail
2)	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	:	Sdr. Suhedi
3)	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	:	Sdr. Rafli Yandra
4)	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	:	Sdri. Farida Thamrin
5)	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	:	Sdr. Suherman
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1)	Komisaris Utama President Commissioner	:	Sdr. Irwandy Arif
2)	Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Sdr. Kurnia Toha
3)	Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan
4)	Komisaris Independen Independent Commissioner	:	Sdr. Andi Pahril Pawi
5)	Komisaris Commissioner	:	Sdr. E. Piterdono HZ
6)	Komisaris Commissioner	:	Sdr. Carlo Brix Tewu

1. Bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

1. Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors appointed as referred to in number 4 above who are still serving in other positions which are prohibited under the Laws and Regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, the person concerned must resign or dismissed from his position.
2. Granted power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to declare everything decided at the meeting in the form of a Notarial deed and appear before a Notary or authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.

Tindak Lanjut/Realisasi
Follow-up/Realization

Perubahan Pengurus PTBA yang telah disetujui oleh RUPS PTBA Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, dan telah dimuat pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimuat pada Akta Nomor 62 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.01.09.0130619 Tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan PT Bukit Asam Tbk
Changes in the Management of PTBA which have been approved by the PTBA GMS for the 2022 Fiscal Year dated June 15, 2023, and have been included in the Statement of Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders contained in Deed Number 62 dated June 15, 2023, made by Jose Dima Satria SH., M.Kn Notary in Jakarta whose receipt of notification is in accordance with the Letter of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.09.0130619 Dated June 22, 2023, Regarding Receipt of Notification of Changes to Company Data PT Bukit Asam Tbk

RUPS Tahun 2022

Pada tahun 2022 PTBA menyenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2022.

Seluruh keputusan RUPS Tahunan tersebut telah direalisasikan pada tahun 2022. Agenda, keputusan dan realisasi dari keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

GMS in 2022

In 2022, PTBA held 1 (one) GMS, namely the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Financial Year on May 24, 2022.

All decisions of the Annual GMS have been realized in 2022. The agenda, decisions, and realization of the decisions of the Annual GMS for the 2021 Fiscal Year are as follow:

Mata Acara Rapat Kesatu First Agenda Item Meeting	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Annual Financial Report and Implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program for the fiscal year ending December 31, 2021, as well as the granting of full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during 2021 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting Setuju / Agree: 8.809.331.387 atau 99,66% / 8,809,331,387 or 99.66% Abstain: 4.916.552 atau 0,06% / 4,916,552 or 0.06% Tidak Setuju / Disagree: 25.254.299 atau 0,28% / 25,254,299 or 0.28%
Keputusan Rapat Resolution	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00245/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". 2. Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00577/2.1025/AU.2/11/O241-3/1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Bukit Asam Tbk, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik." Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perusahaan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas. 1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year and ratified the Company's consolidated Financial Statements which included the Report on the Implementation of Social and Environmental Responsibility Program ended on December 31, 2021 and has been audited by Tanudiredja Public Accounting Firm, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) as stated in its report No. 00245/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/II/2022 dated February 25, 2022 with the opinion "Fair, in all material respects, the consolidated financial position PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, as well as the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards". 2. Received the Financial Report and Implementation of Micro and Small Business Funding Program for the fiscal year ending December 31, 2021 which has been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC) as contained in its report No. 00577/2.1025/AU.2/11/O241-3/1/IV/2022 dated April 5, 2022 with the opinion "Fair, in all material respects, the financial position of PT Bukit Asam Tbk's Micro and Small Business Funding Program, as well as its financial activities and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability" 3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of Board of Commissioners, and the ratification of Consolidated Financial Statements which also include the Report of the Implementation of Social and Environmental Responsibility Program and the Financial Report of Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year ending December 31, 2021, the GMS granted full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of Board of Directors for the management actions of the Company and Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the Fiscal Year ending December 31, 2021, including management and supervision towards the Company's Social and Environmental Responsibility Program ended on December 31, 2021, provided that the actions are not a crime and has been reflected in the report above.
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Keputusan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan dan dituangkan pada Berita Acara Rapat yang telah dimuat pada Akta No. 119 tanggal 24 Mei 2022. Keputusan ini dibuat oleh dan di hadapan notaris, Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta. The resolution has been approved by the Company's shareholders and set forth in the Meeting Minutes which has been contained in Deed No. 119 dated May 24, 2022. This resolution was made by and before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta

Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda Item Meeting	Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021 Determination of the use of net income, including the distribution of dividends for 2021 Fiscal Year
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	2 (dua) Penanya 2 (two) Questioners.

Pengambilan Keputusan Resolution-making	1. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku pemegang saham seri B mayoritas dan kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna menyampaikan pendapat, dengan ringkasan pendapat pada intinya meminta untuk penetapan rasio dividen menjadi 100% dari usulan yang disampaikan oleh Perusahaan sebesar 50%. Tanggapan: Direksi Perusahaan dapat menyetujui usulan dimaksud setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan saat ini, khususnya kas Perusahaan. 2. Rio Al Fajri, pemegang saham Perusahaan sebesar 344.900 membuat pernyataan sebagai berikut: a. Beliau setuju untuk *dividend payout ratio* sebesar 100%, mengingat kas Perusahaan sebesar Rp13 Triliun; dan b. Disisi lain, terkait rencana Perusahaan untuk investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak begitu banyak, sehingga apakah memungkinkan agar *dividend payout ratio* menjadi sebesar 80%-100%. Mengingat hal tersebut di atas merupakan suatu pernyataan dari pemegang saham dan Direksi Perusahaan telah menyetujui penetapan rasio dividen menjadi 100%, maka Direksi tidak menyampaikan tanggapan khusus lebih lanjut. PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the majority shareholder of series B and the power of attorney of series A shareholder Dwiwarna expressed an opinion, with a summary of the opinion essentially asking for the determination of dividend ratio to 100% of the proposal submitted by the Company at 50%. 1. Response: The Company's Board of Directors can approve the said proposal after considering the Company's current financial condition, especially the Company's cash. 2. Rio Al Fajri, the Company's 344,900 shareholder made the following statement: a. Agreed to a dividend payout ratio of 100%, given the Company's cash amounted to Rp13 trillion; and b. On the other hand, given that the Company's plan to invest in Special Economic Zones (KEK) was not in a large amount, is it possible to increase the dividend payout ratio to 80%-100%. Considering that the statement above is from the shareholders and the Company's Board of Directors have agreed to determine the dividend ratio to 100%, Board of Directors did not provide any further specific response.
Keputusan Rapat Resolution	Dengan Pemungutan Suara / By Voting Setuju / Agree: 8.822.945.124 atau 99,81% / 8.822,945.124 or 99.81% Abstain: 2.653.500 atau 0,03% / 2,653,500 or 0.03% Tidak Setuju / Disagree: 13.903.614 atau 0,16% / 13,903,614 or 0.16%
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 sebesar Rp7.909.111.452.604 (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Sembilan Miliar Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) sebagai dividen seluruhnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Approved determination of the use of net profit for 2021 Fiscal Year in the amount of Rp7,909,111,452,604 (Seven Trillion Nine Hundred Nine Billion One Hundred Eleven Million Four Hundred Fifty Two Thousand Six Hundred Four Rupiah) as a total dividend. 2. Granted authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution to determine the schedule and procedure for paying dividends for 2021 Fiscal Year in accordance with applicable regulations.
Tindak Lanjut/Realisasi Tindak Lanjut/Realisasi	Dividen telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perusahaan pada 24 Juni 2022. Dividends have been distributed to all shareholders of the Company on June 24, 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda Item Meeting	Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022. Determination of bonuses for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2021 Fiscal Year and salary/honorarium along with facilities and allowances for 2022 Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara / By Voting Setuju / Agree: 8.830.663.310 atau 99,90% / 8,830,663,310 or 99.90% Abstain: 2.707.400 atau 0,03% / 2,707,400 or 0.03% Tidak Setuju / Disagree: 6.181.528 atau 0,07% / 6.181.528 or 0,07%
Keputusan Rapat Resolution	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2022. 1. Granted authority and power to PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the Proxy of Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus for 2021 Fiscal Year and to determine the honorarium, allowances, facilities, and other incentives for members of Board of Commissioners for 2022. 2. Granted authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), as the Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder, to determine the amount of bonus for 2021 Fiscal Year and to determine salaries, allowances, facilities and other incentives for Board of Directors for 2022
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Keputusan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tindak lanjut dari keputusan RUPS di atas telah ditentukan pada Surat Dewan Komisaris Nomor: 57/DEKOM/ VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022. The decision to provide remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners as a follow-up to the above GMS decision was determined in the Board of Commissioners Letter Number: 57/DEKOM/VIII/2022 dated August 5, 2022.

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda Item Meeting	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022. Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for 2022 Fiscal Year.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	8.696.075.168 atau 98,38% 8,696,075,168 or 98.38%	2.654.700 atau 0,03% 2,654,700 or 0.03%	140.772.370 atau 1,59% 140,772,370 or 1.59%
Keputusan Rapat Resolution	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) antara lain untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2022 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2022 serta audit umum atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan; b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti. 1. Approved the appointment of Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a Member of Global PricewaterhouseCoopers (PwC) to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for 2022 Fiscal Year and other periods in 2022 Fiscal Year, carry out a General Audit of the financial report of Micro and Small Business Funding Program for 2022 Fiscal Year. 2. Delegated authority to the Board of Commissioners with prior approval from the largest Series B Shareholders to: a. Appoint Public Accountant at the Public Accounting Firm that has been determined in this Meeting, because the appointment of public accountant needs to be adjusted to the results of evaluation, and as long as the appointment is made subject to the criteria of Public Accountant stipulated in the Company's policies; b. Appoint Public Accountant and/or Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason based on the provisions and regulations of capital market; and c. Determine the conditions, requirements for the appointment, and honorarium of the Substitute Public Accountant Firm. c. Determine the conditions, requirements for appointment, and honorarium of the Public Accountant and/or Substitute Public Accountant Firm.		
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Telah dilakukan penunjukan terhadap Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) dan Partner yang bertanggungjawab atas hal tersebut atas nama Yusron Fauzan yang mana penunjukannya telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Nomor:B/151/111000/KS.03/V/2022 tanggal 27 Mei 2022. Appointed Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a Member of Global PricewaterhouseCoopers (PwC) and the partner responsible for this matter is Yusron Fauzan, whose appointment has been reported to OJK based on Letter Number: B/151/111000/ KS.03/V/2022 dated May 27, 2022.		

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Agenda Meeting Item	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Approval of amendment to the Company's Articles of Association		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	8.070.175.224 atau 91,30% 8,070,175,224 or 91.30%	2.702.800 atau 0,03% 2,702,800 or 0.03%	766.624.214 atau 8,67% 766,624,214 or 8,67%

Keputusan Rapat Resolution	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan keputusan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 dan usulan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham; 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas; 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association to comply with the decision of Statistics Indonesia Number 2 of 2020 and the proposal of PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the Proxy of Series A Dwiwarna Shareholder as submitted to Shareholders; 2. Agreed to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendment provisions as referred to in paragraph 1 (one) of the decision above; 3. Granted power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting agenda, including changes based on the Series A Dwiwarna Shareholder or their Proxy, compiling and restating all modifications to the Articles of Association in a Notarial Deed and submitting to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of amendments to the Articles of Association, doing anything deemed necessary and valuable for that purpose with nothing being excluded, including to make additions and/or amendments to the Articles of Association if the competent authority requires it.
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Anggaran Dasar Perusahaan telah dimuat pada Akta No. 79 tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) berdasarkan Surat AHUAH.01.03-0251286 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk. The Company's Articles of Association have been contained in Deed No. 79 dated June 15, 2022, made before the Notary and received notification from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter AHU-AH.01.03-0251286 Regarding Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk.

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Agenda Meeting Item	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan. Approval of Changes in the Composition of the Company's Management		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat Number of Shareholders Asking/ Giving Opinions	Tidak Ada None		
Pengambilan Keputusan Resolution-making	Dengan Pemungutan Suara By Voting		
	Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
	-	-	-
Keputusan Rapat Resolution	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna tidak mengusulkan nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana haknya dalam Anggaran Dasar Perusahaan, oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan pada Mata Acara keenam. PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the attorney of Dwiwarna series A shareholder did not propose the nomination of members of Board of Directors and/or Board of Commissioners according to their rights in the Company's Articles of Association, therefore no resolution was made on the 6th Agenda item		
Tindak Lanjut/Realisasi Follow-up/Realization	Tidak Ada None		

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga berkewajiban memantau dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID selaku holding PTBA, di tahun 2023, PTBA melakukan penyelarasan kebijakan internal PTBA. Salah satu yang menjadi penyelarasan yaitu perubahan Panduan Kerja Direksi Dewan Komisaris. Panduan Kerja Dewan Komisaris yang sebelumnya menjadi satu dengan Panduan Kerja Direksi, di tahun 2023 panduan tersebut dipisahkan menjadi suatu kebijakan sendiri menjadi Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 16/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris *(Charter to Board of Commissioners)* PT Bukit Asam Tbk. Secara garis besar Pedoman Kerja Dewan Komisaris PTBA dengan mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Program Pengenalan, Remunerasi dan Pelatihan Dewan Komisaris;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Tugas dan Kewajiban;
6. Wewenang, Pembagian Tugas dan Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan;
7. Rapat Dewan Komisaris;
8. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi;
9. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
10. Evaluasi Kinerja Direksi; dan
11. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Masa Jabatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

The Board of Commissioners is a Company organ that carries out supervisory functions and gives advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company. Besides carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is also obliged to monitor and ensure the implementation of good corporate governance in an effective and sustainable manner.

The Board of Commissioners Work Guidelines/ Charter

In line with the policies set by MIND ID as PTBA's holding company, in 2023, PTBA aligned the Company's internal policies. One of the areas of alignment is the change to the Board of Directors' Work Guide for the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' Work Guide, which was previously integrated with the Board of Directors' Work Guide, was separated into its own policy in 2023 and become the Board of Commissioners' Work Guide. The Board of Commissioners' Work Guidelines have been approved by the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree No. 16/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning PT Bukit Asam Tbk's Charter to Board of Commissioners Work Guidelines. In general, the PTBA Board of Commissioners' Work Guidelines include:

1. General Provisions;
2. Membership of the Board of Commissioners;
3. Introduction, Remuneration and Training Program for Board of Commissioners;
4. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Duties and Obligations;
6. Authority, Division of Duties and Principles of Decision Making;
7. The Board of Commissioners meetings;
8. Working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors;
9. Performance Evaluation of the Board of Commissioners;
10. Performance Evaluation of the Board of Directors; and;
11. Supporting Organs for the Board of Commissioners.

Term of Office

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the closing of the 5th Annual GMS after the date of appointment, with the requirement of not exceeding the 5 (five) years period by considering capital market laws and regulations, but without prejudice to the right of GMS to dismiss members of the Board of Commissioners before their term of office ends. After the term of office ends, members of the Board of Commissioners can be reappointed by the GMS for one term of office.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan, apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. Mengundurkan diri.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat pula diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Perusahaan.
2. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
   a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar.
   b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Dismissal of Members of The Board of Commissioners

1. Members of the Company's Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the GMS Resolution by conveying the reasons.
2. Members of the Board of Commissioners may be dismissed if based on the facts, the members of the Board of Commissioners concerned:
   a. Unable to carry out their duties properly;
   b. Violate the provisions of Articles of Association and laws and regulations;
   c. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the state;
   d. Take actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a member of the Board of Commissioners;
   e. Is declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
   f. Resign.
3. The GMS may also dismiss members of the Board of Commissioners based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Resignation of Members of the Board of Commissioners

1. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position before the end of his/her term of office by giving written notification of his/her intention to the Company.
2. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of members of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
3. The Company, through the Corporate Secretary, is required to disclose information to the public and submit it to OJK no later than 2 (two) working days after:
   a. The application for resignation of members of the Board of Commissioners is accepted as stipulated in the Articles of Association.
   b. The results of GMS as referred to in the Company's Articles of Association.
4. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Commissioners concerned is still obliged to complete his/her duties and responsibilities following the Articles of Association and prevailing laws and regulations.
5. The resigning member of the Board of Commissioners can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners from the appointment in question until the resignation approval date at the GMS.
6. The discharge of responsibility of member of the Board of Commissioners who resigns is given after the Annual GMS releases him/her.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua), maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris pada Tahun 2023

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisaris di PTBA berjumlah 6 (enam) orang, dan tidak mengalami perubahan secara jumlah untuk tahun 2023. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023. Adapun untuk perubahannya, disajikan dalam tabel berikut:

7. If a member of the Board of Commissioners resigns and the number of members of the Board of Commissioners becomes less than 2 (two), then the resignation is valid if the GMS has confirmed it and a new member of the Board of Commissioners has been appointed, thus meeting the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners.

Structure, Number, and Composition of Members of the Board of Commissioners in 2023

Based on the Company's Articles of Association and Charter of Board of Commissioners, the number of members of the Board of Commissioners is adjusted to the needs of the Company, namely consisting of at least 2 (two) persons, one of whom is appointed as President Commissioner.

The number of members of the Board of Commissioners in PTBA is 6 (six) people, with no change in 2023. The current number of members of the Board of Commissioners has complied with the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which regulates that:

1. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners must be at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.
3. 1 (one) member of the Board of Commissioners is appointed as President Commissioner.

The composition of the Board of Commissioners underwent changes based on the Annual GMS on June 15, 2023. The changes are presented in the table below:

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023
Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Ketetapan Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 15 Juni 2023 Annual GMS Resolution on June 15, 2023	2023 - 2025	Pertama First Term
	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	Pertama First Term
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	Pertama First Term
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 10 Juni 2020 Annual GMS Resolution on June 10, 2020	2020 – 2025	Pertama First Term
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 15 Juni 2023 Annual GMS Resolution on June 15, 2023	2023 – 2028	Pertama First Term
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan 15 Juni 2023 Annual GMS Resolution on June 15, 2023	2023 – 2028	Pertama First Term

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023
Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Ketetapan Legal Basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Agus Suhartono*)	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent	Keputusan RUPS Tahunan 11 April 2018 Annual GMS Resolution on April 11, 2018	2018 - 2023	Kedua Second Term
		Keputusan RUPS Luar Biasa 10 Oktober 2013 Extraordinary GMS Resolution on October 10, 2013	2013 - 2018	Pertama First Term
Devi Pradnya Paramita**)	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Extraordinary GMS Resolution on December 23, 2021	2021 – 2023	Pertama First Term

*Pada tanggal 11 April 2023, Sdr Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya karena hukum untuk periode kedua.
**Pada tanggal 21 Maret 2023 Sdri. Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum, mengingat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bukit Asam yang bersangkutan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris di Bukit Asam, pasca dialihtugaskannya dari Direktur Holding (MIND ID) menjadi sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (*sister company* Bukit Asam).
*On April 11, 2023, Agus Suhartono (President/Independent Commissioner) ended his position due to law for a second term.
**On March 21, 2023, Devi Pradnya Paramita's (Commissioner) term of office ended due to law. In accordance with the provisions of the Articles of Association of Bukit Asam, she was prohibited from holding concurrent positions as Commissioner in Bukit Asam, after her transfer from Holding Director (MIND ID) to become Finance Director of PT Indonesia Asahan Aluminum (sister company of PTBA).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, Kontrak Manajemen Direksi dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Dewan Komisaris harus:
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Memantau dan memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada Perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain tugas di atas, Dewan Komisaris memiliki beberapa tugas khusus pengawasan khusus berkaitan dengan bidang-bidang di bawah ini:
1. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
   a. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, bertugas memberikan pendapat dan persetujuan RKAP serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi.

   b. Persetujuan Rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris paling lambat dilakukan pada 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun RKAP yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Duties

The Board of Commissioners is responsible to supervise management policies, the implementation of management in general regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors including the implementation of the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget, Directors' Management Contracts and Budget provisions, and the Company's principles, as well as applicable laws and regulations in accordance with the Company's aims and objectives.

In implementing their duties, members of the Board of Commissioners must:
1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Possess good faith, full of prudence, and responsible in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and following the purposes and objectives of the Company.
3. Monitor and ensure that the principles of Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably.

In addition, the Board of Commissioners also has several special supervisory duties relating to the areas below:

1. Related to Strategy and Work Plans
   a. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, must provide opinions and approval for the Company Work Plan and Budget (WP&B) and other work plans prepared by the Board of Directors.
   b. Approval of the WP&B Draft by the Board of Commissioners must be carried out no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the relevant WP&B year) or within the time specified in the applicable laws and regulations.

c. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan RKAP dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.

2. Terkait dengan Nominasi Anggota Direksi Perusahaan

   a. Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi menyusun kriteria seleksi, prosedur nominasi, serta penilaian bagi calon Anggota Direksi Perusahaan;

   b. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi Perusahaan dari hasil proses nominasi oleh Dewan Komisaris yang dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya untuk dilakukan seleksi lebih lanjut tanpa membatasi calon lain yang diusulkan sebelum ditetapkan dalam RUPS.

3. Terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan
   a. Dewan Komisaris menerima usulan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang diusulkan oleh Direksi, untuk kemudian memberikan persetujuan tertulis sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Threshold Dewan Komisaris.
   b. Menyampaikan permohonan persetujuan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen lengkap dari Direksi Perusahaan.
   c. Memperoleh persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Dewan Komisaris, kecuali dianyatakan lain oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.
   d. Menyampaikan persetujuan tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diteirmanya persetujuan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.
   e. Ketentuan mengenai syarat Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan (persyaratan formal, materiil dan lainnya) tidak berlaku dalam hal Calon Anggota Dewan Komisaris berasal dari anggota Direksi Perusahaan.

4. Terkait dengan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
   a. Dewan Komisaris menyusun KPI dengan kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan sesuai dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris yang meliputi KPI Dewan Komisaris kolegial dan KPI Dewan Komisaris individu. KPI Dewan Komisaris individu dilihat melalui pencapaian KPI Komite Penunjang Pendukung Dewan Komisaris mengingat Dewan Komisaris merupakan anggota dari Komite Penunjang Pendukung Dewan Komisaris.

c. The Board of Commissioners' approval of the WP&B Draft can be determined after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholders or their proxies.

2. Related to the Nomination of Members of the Company's Board of Directors
   a. The Board of Commissioners can be assisted by the committee in charge of nomination and remuneration in preparing selection criteria, nomination procedures, and assessments for prospective members of the Company's Board of Directors;
   b. The Board of Commissioners proposes candidates for members of the Company's Board of Directors from the results of the nomination process by the Board of Commissioners who can be assisted by the committee in charge of nomination and remuneration to Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies for further selection without limiting other candidates proposed before being determined at the GMS.

3. Related to the Nomination of Members of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries
   a. The Board of Commissioners accepts proposals for candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries proposed by the Board of Directors, and then gives written approval as stated in the Company's Articles of Association and the Threshold for the Board of Commissioners.
   b. Submit a request for approval to Series A Dwiwarna shareholders or their proxies no later than 15 (fifteen) days from the date of receipt of the request and explanation or complete documents from the Company's Directors.
   c. Obtain approval from Series A Dwiwarna shareholders or their proxies no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the application and complete explanation or documents from the Board of Commissioners, unless otherwise stated by the Series A Dwiwarna Shareholders/their Proxies.
   d. Submit written approval from the Board of Commissioners to the Board of Directors no later than 15 (fifteen) days from the date of receipt of approval from Series A Dwiwarna shareholders or their proxies.
   e. Provisions regarding the requirements for members of the Board of Commissioners of a Subsidiary (formal, material, and other requirements) do not apply if the prospective members of the Board of Commissioners come from members of the Company's Board of Directors.

4. Related to the Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Directors
   a. The Board of Commissioners prepares KPIs with assessment criteria that are specific, measurable, achievable, and in accordance with the duties and obligations of the Board of Commissioners based on policies determined by the Board of Commissioners which include collective Board of Commissioners KPIs and individual Board of Commissioners KPIs. The KPI of the individual Board of Commissioners is reviewed through the KPI achievements of the Board of Commissioners Supporting Support Committee considering that the Board of Commissioners is a member of the Board of Commissioners Supporting Support Committee.

b. KPI Dewan Komisaris disampaikan bersamaan dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk dimuat dalam RKAP.
c. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komite, dan setiap individu Komisaris.

d. Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
e. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan dengan sistem self-assessment, dalam hal diperlukan dapat menggunakan pihak independen secara berkala minimal sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur.

5. Terkait dengan Pengendalian Intern
Sehubungan dengan pelaksanaan Pengendalian Intern di Perusahaan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:
a. Memastikan bahwa Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern;

b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;

c. Memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Perusahaan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
d. Memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
f. Menunjuk pengendali mutu dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;
g. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
h. Memastikan Satuan Pengawasan Intern, Akuntan Publik dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. Memastikan kebijakan sistem pengendalian intern Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

b. The Board of Commissioners' KPI is submitted simultaneously with the Board of Commissioners' Work Plan to be included in the WP&B.
c. The Board of Commissioners is required to conduct an objective annual evaluation to determine the effectiveness of the Board, committees and each individual Commissioner.
d. The annual evaluation is submitted by the Board of Commissioners to the GMS.
e. The Board of Commissioners carries out annual performance assessments using a self-assessment system, and if necessary, can use independent parties periodically at least once during their term of office, to facilitate an objective and honest performance evaluation of the Board of Commissioners.

5. Related to Internal Control
In regard with the implementation of Internal Control in the Company, the Board of Commissioners, and may be assisted by the Audit Committee, have the task of:
a. Ensure that the Company and the Company's Subsidiaries have an Internal Supervisory Unit that carries out the Internal Audit function;
b. Provide approval for the appointment and dismissal of the head of Internal Audit as proposed by the Board of Directors;
c. Ensure that Internal Audit has access to information and/or data regarding the Company that is necessary to carry out its duties;
d. Give approval to the Internal Audit Charter proposed by the Board of Directors by considering the proposal from Internal Audit;
e. Review the effectiveness and efficiency of the Internal Audit based on information obtained from Internal Audit at least once every 1 (one) year;
f. Appoint a quality controller from an external party to review Internal Audit performance (quality assurance review) at least once every 3 (three) years;
g. Carry out supervision and provide advice on the implementation of other Internal Audit functions in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association, and/or GMS decisions;
h. Ensure that the Internal Audit, Public Accountant, and Audit Committee have access to information regarding the Company necessary to carry out their duties;

i. Ensure that the Board of Directors has followed up on the findings of internal audits, external audits, audits of the State Audit Board, audits of the Financial and Development Audit Agency, and/or the results of other authority supervisory institutions in accordance with the provisions of statutory regulations; and
j. Ensure that the Company's internal control system policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

6. Terkait dengan Manajemen Risiko
   Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk:
   a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi manajemen risiko.
   b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   c. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
   d. Memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara menyeluruh di Perusahaan, dan berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
   e. Memastikan kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis/Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.
   f. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan dapat berkoordinasi dengan fungsi Direksi yang bertanggungjawab atas manajemen risiko.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk:
   a. Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan, agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Induk Perusahaan;
   c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perusahaan atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
   d. Mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
   e. Mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan; dan
   f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, Pedoman Strategis/ Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya dan/atau keputusan RUPS.
7. Terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik
   a. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
   b. Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

6. Related to Risk Management
   In regard with the implementation of risk management, the Board of Commissioners, and may be assisted by the Risk Monitoring Committee, have the task to:
   a. Evaluate and approve policies and risk management strategies.
   b. Evaluate the responsibility of the Board of Directors for the implementation in risk management policies and strategies as referred to in letter a.
   c. Supervise and provide advice to the Board of Directors on the Company's risk management policies and their implementation in accordance with the provisions of statutory regulations, articles of association and/or GMS decisions.
   d. Ensure that the implementation of risk management is carried out thoroughly in the Company, and play an active role in supervising the implementation of risk management carried out by the Board of Directors.
   e. Ensure that the Company's risk management policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines/Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.
   f. In carrying out supervision over risk management, the Board of Commissioners is assisted by the Risk Monitoring Committee and can coordinate with the Board of Directors who are responsible for risk management.

Related to the implementation of integrated governance functions, the Board of Commissioners has the duty to:
   a. Evaluate and approve Integrated Governance policies;
   b. Supervise the implementation of Integrated Governance in Subsidiaries to be in line with the Parent Company's Risk Management policies;
   c. Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Company's Director and provide direction or advice to the Company's Directors regarding the implementation of Integrated Governance policies;
   d. Evaluate the Integrated Governance policies and directing improvements;
   e. Supervise the implementation of Integrated Governance in Subsidiaries to be in line with the Integrated Governance policies of the Parent and Subsidiaries; and;
   f. Carry out supervision and provide advice on the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and Strategic Guidelines/Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies and/ or GMS decisions.
7. Related to Good Corporate Governance
   a. Have a binding work guidelines and rules for each member of the Board of Commissioners.
   b. Monitor and ensure the implementation of Good Corporate Governance in effective and sustainable manners.

8. Terkait dengan Sistem Teknologi dan Informasi
   Sehubungan dengan Sistem Teknologi dan Informasi Perusahaan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk:

   a. Mengevaluasi atas sistem teknologi dan informasi yang digunakan oleh Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada penerapannya, aplikasi yang digunakan, dan memberikan saran serta pendapat atas sistem teknologi dan informasi yang diterapkan oleh Perseroan.
   b. Memastikan kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

9. Terkait dengan Sumber Daya Manusia
   Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh komite yang membidangi nominasi dan remunerasi memiliki tugas untuk:
   a. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM;
   b. Melakukan evaluasi atas penerapan manajemen sumber daya manusia di Perusahaan meliputi sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karir, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian (remunerasi), serta sistem pensiun;
   c. Menggali informasi pengembangan SDM Perusahaan melalui Direksi; dan
   d. Memastikan kebijakan sumber daya manusia Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

10. Terkait dengan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
    Sehubungan dengan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu dengan Komite Audit berkewajiban untuk:
    a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan infomasi lainnya antara lain:
       - Memastikan adanya prosedur *review* yang memadai atas laporan keuangan maupun proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan;
       - Memastikan laporan keuangan disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;
       - Memastikan laporan-laporan disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan instansi terkait dengan benar dan tepat waktu.
    b. Memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

8. Related to Technology and Information Systems
   In regard to the Company's Technology and Information Systems, the Board of Commissioners, and with the assistance of the Risk Monitoring Committee, have the task of:
   a. Evaluate the technology and information systems used by the Company including but not limited to their implementation, applications used, and provide suggestions and opinions on the technology and information systems implemented by the Company.

   b. Ensure that the Company's information technology system policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

9. Related to Human Capital
   The Board of Commissioners, and may be assisted by the committee in charge of nomination and remuneration, have the task to:
   a. Review the Company's level of compliance with laws and regulations relating to nomination, remuneration and HC development;

   b. Evaluate the implementation of human resource management in the Company including the recruitment system, career system, training and development system, performance assessment and salary (remuneration) system, as well as the retirement system;
   c. Explore information on the Company's HC development through the Board of Directors;
   d. Ensure that the Company's human resource policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

10. Related to Accounting and Preparation of Financial Reports
    The Board of Commissioners, and may be assisted by the Audit Committee, are obliged to:

    a. Review financial information issued by the Company such as financial reports, projections and other information, including:
       - Ensuring adequate review procedures for financial reports and projections and other financial information published by the Company;

       - Ensuring that financial reports are prepared in compliance with generally accepted accounting principles;
       - Ensure that reports are submitted to Series A Dwiwarna Shareholders, Proxies of Series A Dwiwarna Shareholders and related agencies correctly and on time.
    b. Ensure that the external auditor immediately informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit for follow-up by the Board of Directors.

c. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan publik untuk diusulkan kepada RUPS serta rekomendasi atas pemutusan hubungan kerja dengan Akuntan Publik.
d. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Akuntan Publik;
e. Setelah kantor akuntan publik selesai menjalankan pekerjaannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelahnya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Deputi melalui sistem informasi manajemen Kementerian BUMN beberapa informasi sebagai berikut:
   - nama kantor akuntan publik dan partner yang menandatangani opini laporan keuangan audit;
   - ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik;
   - imbal jasa audit;
   - imbal jasa non-audit;
   - evaluasi pelaksanaan pekerjaan kantor akuntan publik termasuk evaluasi proses pemilihan kantor akuntan publik, evaluasi kecukupan ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik, dan evaluasi rekomendasi audit secara keseluruhan; dan
   - informasi lainnya.
f. Memastikan kebijakan akuntansi dan keuangan Perusahaan dan pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

11. Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa
Sehubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa Perusahaan, Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:
a. Memberikan persetujuan atas penentuan pengadaan barang dan jasa yang bersifat substansial (non rutin) yang disampaikan Direksi.
b. Memperoleh laporan dari Direksi terkait proses dan hasil pengadaan barang dan jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).
c. Memastikan kebijakan pengadaan barang dan jasa Perusahaan serta pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

12. Terkait dengan Kebijakan Mutu dan Pelayanan
Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan mutu dan pelayanan, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit memiliki tugas untuk:
a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;
b. Memastikan kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan serta pelaksanaannya selaras dengan Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya.

c. Provide recommendations for the appointment of a Public Accountant to be proposed to the GMS as well as recommendations for terminating employment relations with the Public Accountant.
d. Supervise and evaluate the work of Public Accountants;
e. After the public accounting firm has finished carrying out its work, no later than 1 (one) month later, the Board of Commissioners is obliged to convey to the Deputy through the management information system of the Ministry of SOEs the following information:
   - the name of the public accounting firm and partner who signed the audit financial report opinion;
   - scope of work/assignment of the public accounting firm;
   - fee for audit services;
   - non-audit service fees;
   - evaluation of the implementation of the work of the public accounting firm, including evaluation of the public accounting firm selection process, evaluation of the adequacy of the scope of work/assignment of the public accounting firm, and evaluation of overall audit recommendations; and
   - other information.
f. Ensure that the Company's accounting and financial policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies established by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

11. Related to the Procurement of Goods and Services
In relation to the Company's goods and services procurement process, the Board of Commissioners, and assisted by the Audit Committee, have responsibilities to:
a. Provide approval to determine procurement of substantial (non-routine) goods and services submitted by the Board of Directors.
b. Obtain reports from the Board of Directors regarding the process and results of procurement of certain substantial (not routine) goods and services.
c. Ensure that the Company's goods and services procurement policy and its implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

12. Related to Quality and Service Policy
In regard to the implementation of quality and service policies, the Board of Commissioners and may be assisted by the Audit Committee have the task to:
a. Supervise and provide advice to the Board of Directors on quality and service policies and the implementation;
b. Ensure that the Company's quality and service policies and their implementation are in line with the Strategic Guidelines and/or Implementing Policies determined by the Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

13. Terkait dengan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Afiliasi Perusahaan
    a. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan.
    b. Menerima laporan dari Direksi atas pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
    c. Mendapatkan laporan dari Direksi terkait realisasi *Capital Expenditure* dari Anak Perusahaan yang telah disetujui Perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan yang nilainya diatas *threshold* Dewan Komisaris.

14. Terkait dengan Kepatuhan terhadap Perjanjian dengan Pihak Ketiga
    Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit berkewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Direksi terhadap perjanjian dengan pihak ketiga khususnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris diantaranya pelaksanaan dari perjanjian dan pemenuhan hak-hak pihak ketiga atas perjanjian.

15. Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

16. Terkait Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
    a. Pelaporan
        - Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
        - Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Direksi selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi.
        - Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
        - Memperoleh laporan penghapusbukuan piutang macet dari Direksi.
        - Menerima laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
        - Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
    b. Keterbukaan Informasi
        - Memperoleh informasi dari Direksi secara teratur, tepat waktu sesuai dengan permintaan dan secara komprehensif tentang semua informasi yang relevan dengan Perusahaan.
        - Memperoleh akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

13. Related to the Management of Subsidiaries and Company Affiliates
    a. Carry out supervision of Subsidiary management policies.
    b. Receive reports from the Board of Directors regarding the appointment of members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Subsidiary as determined in the GMS of the Subsidiary concerned.
    c. Receive reports from the Board of Directors regarding the realization of Capital Expenditure from Subsidiaries that have been approved by the Company at the Subsidiary's GMS which value is above the threshold for the Board of Commissioners.

14. Related to Compliance with Agreements with Third Parties
    The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is obliged to supervise and monitor the Board of Directors' compliance with agreements with third parties, especially those that require approval from the Board of Commissioners, including the implementation of agreements and fulfillment of third party rights to agreements.

15. Related to Social and Environmental Responsibility
    Supervise the implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility Program.

16. Related to Reporting and Information Disclosure
    a. Reporting
        - Report to the Company regarding family's share ownership in the Company and other companies, including any changes.
        - Prepare an annual report on the implementation of supervision and provision of advice to the Board of Directors during the previous financial year as an inseparable part of the annual report prepared by the Board of Directors.
        - Submit a report on the supervisory tasks that have been carried out during the previous financial year to the GMS.
        - Obtain a bad debt write-off report from the Board of Directors.
        - Receive periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations as well as other reports by considering statutory regulations, especially applicable regulations in the Capital Market sector.
        - Members of the Board of Commissioners are required to submit asset reports in accordance with statutory provisions.
    b. Information Disclosure
        - Obtain information from the Board of Directors regularly, on time according to requests and comprehensively on all information relevant to the Company.
        - Have access to accurate, relevant, and timely information.

- Memberikan penjelasan mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan RUPS.
- Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.

17. Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Lainnya
    Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas dan Kewajiban lainnya, Dewan Komisaris dan dapat dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan/atau Komite lain, memiliki tugas untuk:
    a. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan;
    b. Menanggapi saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian dari Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Direksi tentang saran dan penyelesaian yang diperlukan;
    c. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan, pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang tanggungjawab atas Laporan Tahunan Perusahaan dan hal-hal lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diungkapkan oleh Dewan Komisaris; dan
    d. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tugas Komisaris Utama

Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Kebijakan Internal Perusahaan, Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai primus interpares yakni mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris di samping tugas-tugas lainnya di antaranya:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Memberikan perintah tertulis untuk pemberian tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, yang menerangkan: Nama anggota Dewan Komisaris yang diberi tugas, sifat dan lingkup pekerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, waktu penugasan, dan hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut;

- Provide an explanation regarding information related to matters to be decided by the GMS.
- Ensure that the annual report contains information regarding the identity, main job, position of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one financial year which include internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, as well as honorarium, facilities and/or allowances others received from the Company.

17. Related to the Implementation of Other Duties and Obligations
    In regard to the implementation of other Duties and Obligations, the Board of Commissioners and may be assisted by the Audit Committee, Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee, and/or other Committees, have the duties to:
    a. Supervise and provide advice to the Board of Directors regarding important matters of changes in the business environment which are expected to have a major impact on the Company's business and performance;
    b. Responding to suggestions, expectation, problems, and complaints from stakeholders which are submitted directly to the Board of Commissioners or submitted by the Board of Directors, to be followed up and submitted to the Board of Directors regarding the necessary suggestions and solutions;
    c. Ensure that the Company's Annual Report contains information regarding the identity, main jobs, positions of members of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one financial year (internal meetings and joint meetings with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other benefits received from the Company, statements by Members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Company's Annual Report and other matters which based on statutory provisions must be disclosed by the Board of Commissioners; and
    d. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Duties of the President Commissioner

In accordance with the provisions of the Articles of Association and Internal Company Policies, the duties and responsibilities of the President Commissioner, as the primus interpares, which coordinating the activities of the Board of Commissioners alongside other tasks, which include:

1. Carry out supervisory functions as carried out by other members of the Board of Commissioners;
2. Give written orders to assign special tasks to members of the Board of Commissioners in accordance with the decision of the Board of Commissioners meeting, which explains: the name of the member of the Board of Commissioners assigned the task, nature and scope of work, goals and objectives of the work, time of assignment, and administrative matters involved related to that specific task;

3. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris;
4. Memimpin Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi;
5. Tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dan/atau terdapat permasalahan yang bersifat darurat dan strategis;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perusahaan, dengan ketentuan usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta kewajiban lainnya yang ditentukan dalam Piagam Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Charter Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

3. Summon the Board of Commissioners Meeting;
4. Chair a Board of Commissioners Meeting or a Board of Commissioners Meeting to which the Directors are invited;
5. Other duties and responsibilities in accordance with regulations and legislation.

Responsibilities

In carrying out its duties, the Board of Commissioners are also responsible to:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. Provide opinion and approval of the Company's Annual Work Plan and Budget and other work plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association;
3. Keep up with the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding any issues considered important for the management of the Company;
4. Report to Series A Dwiwarna Shareholders/ Proxy of Series A Dwiwarna Shareholders regarding signs of a decline in the Company's performance, and/or urgent and strategic problems in the Company.
5. Propose to the GMS regarding the appointment of public accountant to conduct an audit of the Company's books, provided that the proposed appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm must take into account the recommendations of Audit Committee;
6. Research and review the periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports;
7. Provide explanations, opinions, and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested;
8. Make the Board of Commissioners' meeting minutes and keep a copy;
9. Report to the Company regarding their and/or family's share ownership in the Company and other companies;
10. Provide a report on supervisory duties that have been carried out during the recent Fiscal Year to the GMS;
11. Provide an explanation regarding all matters asked or requested by Series A Dwiwarna Shareholders/Proxy of Series A Dwiwarna Shareholders by considering laws and regulations particularly applicable in the field of Capital Market;
12. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS Resolutions, as written in the Charter of the Board of Commissioners.

Authority of Board of Commissioners

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Charter of the Board of Commissioners, in carrying out its duties, the Board of Commissioners has the authority to:

1. Access books, letters, and other documents, examine the cash for verification purposes and other securities, and examine the Company's assets;

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite yang membidangi Nominasi dan Remunerasi, Komite yang membidangi Risiko & Tata Kelola Terintegrasi dan Komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
13. Menelaah usulan honorarium dan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas) Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan komite yang membidangi nominasi dan remunerasi untuk selanjutnya mengusulkan hal tersebut kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

2. Enter the yards, buildings, and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the Company's management;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Request Directors and/or other officials under the Board of Directors under Board of Directors' consent to attend Board of Commissioners meeting;
6. Appoint and dismiss Secretary of the Board of Commissioners;
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors based on the provisions of Articles of Association;
8. Establish Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and other Committees, if necessary, by considering the capabilities of the Company;
9. Use the service of experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if necessary;
10. Take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period following the provisions of Articles of Association;
11. Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Supervisory Unit;
12. Attend Board of Directors Meetings and provide views on matters discussed;
13. Reviewing the proposed honorarium and remuneration (salary, allowances, and facilities) of the Board of Commissioners and Directors with the committee in charge of nomination and remuneration to then propose this matter to the GMS;
14. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Decisions.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dalam rangka mengefektifkan peran Dewan Komisaris, maka dilakukan pembagian tugas di antara Dewan Komisaris, dimana selama tahun 2023 terdapat 2 (dua) kali perubahan pembagian tugas sebagai berikut:

1. **Periode 1 Januari 2023 - 18 Juni 2023**
   Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembagian tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, maka pembagian tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:.

Division of Duties of the Board of Commissioners

In order to streamline the role of the Board of Commissioners, a division of duties is carried out between the Board of Commissioners, where during 2023 there were be 2 (two) changes to the division of duties as follows:

1. **January 1, 2023-June 18, 2023 period**
   Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 dated December 27, 2021, concerning the Division of Duties for the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, the division of duties of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Description of Duties
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen Commissioner/Independent	Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan PSDM Chairman of Committee for Business Risk, Post-mining, CSR, and Nomination, Remuneration & HCD
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan PSDM -- Bidang Bidang Risiko Usaha dan Pasca Tambang Vice Chairman of Committee for Business Risk, Post-mining, CSR and Nomination, Remuneration & HCD – Business Risk and Post-Mining Sector

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Description of Duties
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee
Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Audit Vice Chairman of the Audit Committee
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM – Bidang Nominasi dan PSDM Deputy Chairman of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee – Nomination and HCD Division
Devi Pradnya Paramita	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM – Bidang Remunerasi, CSR/PKBL Vice Chairman of Committee for Business Risk, Postmining, CSR and Nomination, Remuneration & HCD– Remuneration, CSR/PKBL

2. **Periode 19 Juni 2023 - 14 Desember 2023**
   Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pembagian tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, maka pembagian tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

2. **June 19, 2023-December 14, 2023 period**
   Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023 dated June 19, 2023, concerning the division of duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, the division of duties of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Description of Duties
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan PSDM Chairman of Committee for Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HCD
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Audit Vice Chairman of Audit Committee
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM – Bidang Nominasi dan PSDM Deputy Chair Committee of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and HCD – Nomination and HCD Division
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM – Bidang Risiko Usaha dan Pasca Tambang Vice Chairman Committee of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and HCD – Business Risk and Post-mining Division
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM – Bidang Remunerasi, CSR/PKBL Vice Chairman Committee of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and HCD – Remuneration and CSR Division

3. **Periode 15 Desember 2023 - sekarang**
   Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pembagian tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, maka pembagian tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

3. **December 15, 2023-Present period**
   Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 15, 2023, concerning the division of duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, the division of duties of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Description of Duties
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Chair of the Integrated Risk Monitoring & Governance Committee
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi – Bidang Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Deputy Chair of the Integrated Risk Monitoring & Governance Committee – Integrated Risk Monitoring and Governance Division
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Komite Nominasi & Remunerasi Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Description of Duties
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Ketua Komite Nominasi & Remunerasi - Wakil Ketua Komite Audit - Chair of Nomination and Remuneration Committee - Vice Chairman of Audit Committee
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi – Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of the Integrated Risk Monitoring & Governance Committee – Post-Mining, CSR, GCG, and IT

Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjamin independensi anggota Dewan Komisaris:

1. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/ hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, dengan ketentuan penyampaian pelaporan tersebut:
   a. Dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa tertulis;
   b. Wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dan melaporkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen kepada Perusahaan melalui Rapat Dewan Komisaris;
4. Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak, tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan benturan kepentingan.

Kebijakan Rangkap Jabatan

Kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris dinyatakan dalam:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,
2. Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Charter Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 14 ayat (29) Anggaran Dasar Perusahaan dan Charter Dewan Komisaris menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B terbanyak;

Independence of the Board of Commissioners

To guarantee the independence of members of the Board of Commissioners:

1. No blood family relation between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors up to the third degree, whether straight or sideways or marital/familial relationships arising from marriage ties, including sons-in-law or brothers-in-law;
2. Members of the Board of Commissioners are required to report to OJK their ownership and any changes in their ownership of Company shares, either directly or indirectly, with the following reporting requirements:
   a. Can be authorized to other parties with a written power of attorney;
   b. Must be submitted to the OJK no later than 5 (five) days after ownership or change in ownership of Company shares occurs.
3. Members of the Board of Commissioners are required to disclose and report all conflicts of interest that are being faced or that have the potential to become conflicts of interest or anything that could hinder members of the Board of Commissioners from acting independently for the Company through Board of Commissioners Meetings;
4. Members of the Board of Commissioners who hold concurrent positions as members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises as the largest Series B Shareholders, are not permitted to participate in decision making that creates a conflict of interest.

Concurrent Position Policy

The Board of Commissioners concurrent positions policy is stated in:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises,
2. Company Articles of Association.
3. Work Guidelines for the Board of Commissioners.

In accordance with Article 14 paragraph (29) of the Company's Articles of Association and the Charter of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as follows:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, private-owned enterprises, except for Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises as the largest Series B Shareholders;

2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri,
3. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk rangkap jabatan;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Berdasarkan ketentuan terkait rangkap jabatan tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tersebut. Berikut merupakan transparansi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2023.

2. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, except based on special assignments from the Minister,
3. Political party administrators and/or candidates/members of the House of Representatives, Regional Representative Board, provicial Regional House of Representatives, and district/city Regional House of Representatives. and/or candidates for regional head/deputy regional head;
4. Other positions by statutory provisions are prohibited from holding concurrent positions;
5. Other positions that may give rise to a conflict of interest.

Based on the provisions on dual positions, all members of the Board of Commissioners have fulfilled these provisions. Below is data transparency of the dual positions of members of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2023.

Nama Name	PT Bukit Asam Tbk	Jabatan Rangkap Concurrent Position	
	Jabatan Position	Nama Perusahaan/Instansi Other Company/Institution	Jabatan Position
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources	Staff Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia A Special Staff to the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
E. Piterdono HZ	Komisaris Commisioner	Tidak ada None	Tidak ada None
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commisioner	Kementerian Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises (SOEs) Ministry	Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi Expert Staff of the Minister of State-Owned Enterprises Specializing in Mediation
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Universitas Indonesia University of Indonesia	Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law, University of Indonesia
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/Indepenen President Commissioner/ Independent	• PT Pondok Indah Padang Golf Tbk • PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk	• Komisaris Utama • Komisaris Utama • President Commissioner • President Commissioner
Devi Pradnya Paramita*	Komisaris Commisioner	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Direktur Keuangan Finance Director

*catatan:
1) Pada tanggal 21 Maret 2023 Sdri. Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum, mengingat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bukit Asam yang bersangkutan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris di Bukit Asam, pasca dialihtugaskannya dari Direktur Holding (MIND ID) menjadi sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (*sister company* Bukit Asam).
2) Pada tanggal 11 April 2023, Sdr Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya karena hukum untuk periode kedua.
*note:
1) On March 21, 2023, Devi Pradnya Paramita's (Commissioner) term of office ended due to applicable law. In accordance with the provisions of the Articles of Association of Bukit Asam, she is prohibited from holding concurrent positions as Commissioner in Bukit Asam, after her transfer from Holding Director (MIND ID) to become Finance Director of PT Indonesia Asahan Aluminum (sister company Bukit Asam).
2) On April 11, 2023, Agus Suhartono (President/Independent Commissioner) ended his position due to applicable law for the second period of his term of office.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT Bukit Asam Tbk, dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Board of Commissioners Share Ownership

Information on the share ownership of the Board of Commissioners in PT Bukit Asam Tbk can be seen in the Company Share Ownership section by the Board of Commissioners and Directors in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria independensi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan ditunjuk oleh RUPS sebagai

Independent Commissioner

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who meets the independence criteria in accordance with applicable regulations. The person

Komisaris Independen. Dalam kedudukannya, Komisaris Independen tidak terafiliasi Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, sehingga bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan, dan dapat bertindak secara objektif dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Setiap Perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi serta melindungi kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau Regulasi Bursa Efek Indonesia No. IA sebagaimana diubah terakhir dengan Kep-00183/BEI/12-2018.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Selain harus memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, untuk diangkat sebagai Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Komposisi Komisaris Independen

Pada tahun 2023 terjadi perubahan komposisi Komisaris Independen dengan kronologis sebagai berikut:

a. Sebelum 11 April 2023 Susunan Komisaris Independen sebagai berikut:
   1. Agus Suhartono — Komisaris Utama/Independen
   2. Andi Pahril Pawi — Komisaris Independen
b. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 15 Juni 2023 susunan Komisaris Independen menjadi sebagai berikut:
   1. Andi Pahril Pawi — Komisaris Independen
   2. Kurnia Toha — Komisaris Independen
   3. Rahmat Hidayat Pulungan — Komisaris Independen

Sehingga sampai dengan 31 Desember 2023, Komisaris Independen di PTBA berjumlah 3 (tiga) orang dari total 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris

concerned is appointed by the GMS as an Independent Commissioner. In its position, the Independent Commissioner is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and controlling shareholders. Therefore, the person concerned is free from business relationships or other relationships that could affect the ability to act independently or act solely in the interests of the Company, and can act objectively with guided by GCG principles. Every public company must have Independent Commissioners of at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioners are responsible to supervise the Company's management carried out by the Board of Directors and protecting the interests of minority Shareholders and other stakeholders. The appointment of Independent Commissioners is regulated in OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Criteria for Determining Independent Commissioners

Apart from having to fulfill the requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners, in order to become an Independent Commissioner, the person concerned must fulfill the requirements as regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, namely:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;
2. Does not own shares in the Company, either directly or indirectly;
3. Has no affiliation with the Commissioners, Directors and Major Shareholders of the Company;
4. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly.

Independent Commissioners Composition

There were changes in the Independent Commissioners composition in Bukit Asam on 2023 with the following chronologies:

a. Before April 11, 2023, the composition of Independent Commissioners was as follows:
   1. Agus Suhartono as President/Independent Commissioner
   2. Andi Pahril Pawi as Independent Commissioner
b. After the Annual GMS for the 2022 Financial Year on June 15, 2023, the composition of the Independent Commissioners will be as follows:
   1. Andi Pahril Pawi as Independent Commissioner
   2. Kurnia Toha as Independent Commissioner
   3. Rahmat Hidayat Pulungan as Independent Commissioner

Until December 31, 2023, there are 3 (three) Independent Commissioners in PTBA out of a total of 6 (six) members of the Board of Commissioners. The number of Independent

Independen tersebut telah mencapai persentase sebesar 50% atau telah memenuhi ketentuan POJK yaitu sekurang-kurangnya 30%. Susunan Komisaris Independen Bukit Asam adalah sebagai berikut:

Commissioners has reached a percentage of 50% or has fulfilled the POJK provisions, namely at least 30%. The composition of the Independent Commissioners of Bukit Asam is as follows:

Komisaris Independen Independent Commissioner	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Legal Basis
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Juni 2020 Resolution on Annual GMS on June 10, 2020
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023 Resolution on Annual GMS on June 15, 2023
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023 Resolution on Annual GMS on June 15, 2023

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Guna menjamin independensi Komisaris Independen, berikut disampaikan pengungkapan pemenuhan persyaratan komisaris independen Bukit Asam sepanjang tahun 2023 sesuai dengan persyaratan pada pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Statement of Independence of Independent Commissioners

In order to guarantee the independence of Independent Commissioners, the following is a disclosure of the fulfillment of the requirements for Bukit Asam independent commissioners throughout 2023 in accordance with the requirements in article 21 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Persyaratan Criteria	Nama Name			
	Agus Suhartono*	Andi Pahril Pawi	Kurnia Toha	Rahmat Hidayat Pulungan
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. Not as a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut. Does not own the Company's shares either directly or indirectly.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan tersebut. Has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders of the Company	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut. Has no business relationship with the Company, either directly or indirectly	√	√	√	√

*catatan: Pada tanggal 11 April 2023, Sdr Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya karena hukum untuk periode kedua.
*Note: On April 11, 2023, Agus Suhartono (President Commissioner/Independent) term of office ended due to the applicable law for the second period.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris atau diambil secara sirkuler dengan ketentuan semua Anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua Anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang diajukan dan keputusan yang diambil demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. Ketentuan terkait Rapat Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

Board of Commissioners Meeting

Policy

All Board of Commissioners' decisions taken at the meeting or in a circular manner with other Commissioners with writing notification. All members agree to the proposals submitted and the decisions to have the same force as decisions legally taken at a Board of Commissioners meeting. Provisions related to Board of Commissioners Meetings refer to applicable laws and regulations, including Minister of State-

lain Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Jadwal Rapat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, serta mengadakan Rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Agenda Rapat

1. Proses Penetapan Agenda Rapat Agenda rapat Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat.
   b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan agenda rapat Dewan Komisaris, maka usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
   c. Usulan agenda rapat yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan pemilihan ulang oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan, usulan agenda rapat yang akan diajukan pada rapat Dewan Komisaris merupakan agenda yang disetujui oleh ½ (satu perdua) bagian jumlah suara.
   d. Anggota Dewan Komisaris, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat Dewan Komisaris harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.
2. Agenda Rapat Susulan
   Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Usulan agenda rapat Dewan Komisaris tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
   b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut.
   c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as provisions as contained in the Company's Articles of Association.

Meeting Schedule

As regulated in Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 and the provisions contained in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is obliged to hold a meeting of the Board of Commissioners at least once a month as well as holing a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors periodically at least once in one month. The Board of Commissioners may also hold a meeting at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or Directors by stating the issues to be discussed.

Meeting Agenda

1. The meeting agenda of the Board of Commissioners is determined based on the following provisions:
   a. Each member of the Board of Commissioners has the right to submit proposals for the Meeting agenda.
   b. If there is more than one proposed agenda for the meeting, then the proposed meeting agendas must be collected by the Board of Commissioners secretary.
   c. The proposed meeting agenda that has been collected is subject to re-election by the Board of Commissioners provided that the proposed meeting agenda to be submitted at the Board of Commissioners meeting is an agenda approved by ½ (half) of the total number of votes.
   d. Members of the Board of Commissioners, whose proposed agenda is designated as the agenda for the Board of Commissioners meeting, must prepare adequate materials according to their proposed agenda.
2. Follow-up Meeting Agenda
   If there is an additional proposal for a meeting, the following provisions apply:
   a. The additional proposed agenda for the Board of Commissioners meeting must be accompanied by adequate materials.
   b. The agenda for the follow-up meeting must be approved by all members of the Board of Commissioners, both those present at the meeting and those not present at the meeting. For this reason, members of the Board of Commissioners who are not present must be contacted to obtain approval or rejection of the follow-up agenda.
   c. If members of the Board of Commissioners who are absent cannot be contacted within a reasonable time, then approval of the follow-up agenda is left to the decision of the meeting participants.

Kuorum Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.

Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk jika ada perbedaan pendapat/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, juga harus memuat hal hal yang diputuskan. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas dari yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, kepada yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Rapat Gabungan

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat melakukan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat. Rapat gabungan dapat juga dilakukan atas usulan Direksi.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 19 kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali, dengan agenda sebagai berikut:

Meeting Quorum

Board of Commissioners meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended or represented by more than ½ (half) of the members of the Board of Commissioners.

Minutes of Meetings

At each meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be prepared containing the matters discussed, including if there are differences of opinion/dissenting opinions of members of the Board of Commissioners, and must also contain the matters decided. The minutes of the meeting are signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Commissioners who were present at the meeting.

Minutes of meetings are drawn up and administered by the Secretary of the Board of Commissioners or other officials appointed by the chairman of the meeting. Minutes of meetings of the Board of Commissioners and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors must be documented by the Company.

Every member of the Board of Commissioners has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, regardless of whether the person concerned was present or not at the meeting. In the event that there is a member of the Board of Commissioners who does not sign the results of the meeting, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

Joint Meeting

Apart from internal meetings, the Board of Commissioners can also hold joint meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance and provide responses, notes, and advice as outlined in the Minutes of Meeting. Joint meetings can also be held at the suggestion of the Board of Directors.

Implementation of the 2023 Board of Commissioners Meeting

In 2023, the Board of Commissioners has held 19 internal meetings and 13 joint meetings with the Board of Directors, with the following agenda:

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	12 Januari 2023 January 12, 2023	1. Kinerja Perusahaan Bulan Desember tahun 2022 2. Progres Proyek Strategis s.d. Desember tahun 2022 3. Kinerja Anak/Cucu Perusahaan Triwulan IV tahun 2022 4. KPI Tahun 2022 (*unaudited*) 5. Surat Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor : T/0316.J/0100/PG.09.01/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur PT Bukit Asam Prima 1. Company Performance in December 2022 2. Strategic Project Progress up to. December 2022 3. the Performance of the Company's Subsidiaries and Subsubsidiaries in the Fourth Quarter of 2022 4. KPIs for 2022 (unaudited) 5. Discussion of Letter from the Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: T/0316.J/0100/PG.09.01/XII/2022 dated December 26, 2022, Regarding Application for Approval of the Appointment of the President Director and Director of PT Bukit Asam Prima	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	25 Januari 2023 January 25, 2023	1. Perubahan *layout* ruang Dewan Komisaris; 2. Surat Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor T/002.J/0100/PG.09.01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur PT Bukit Multi Investama 1. Layout changing of the Board of Commissioners office 2. Letter from the Directors of PT Bukit Asam Tbk Number T/002.J/0100/PG.09.01/I/2023 dated January 11, 2023, on the Approval of the Appointment of Director of PT Bukit Multi Investama	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita
3	13 Februari 2023 February 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Bulan Januari tahun 2023 2. Progres Proyek Strategis s.d. Januari tahun 2023 1. Company Performance in January 2023 2. Strategic Project Progress up to January 2023	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita
4	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Bulan Februari tahun 2023 2. Progres Proyek Strategis s.d. Februari tahun 2023 3. Surat Direksi Nomor T/017.J /0100/KU/02.05/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 Perihal Usulan Penghapusbukuan Aset 1. Company Performance in February 2023 2. Strategic Project Progress up to February 2023 3. Directors' Letter Number T/017.J /0100/KU/02.05/II/2023 dated February 16, 2023, Regarding Proposed Asset Write-Offs	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita
5	9 April 2023 April 9, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan Maret dan Triwulan I Tahun 2023 2. Progres Proyek Strategis Triwulan I tahun 2023 3. KPI Triwulan I Tahun 2023 4. Surat Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor T/050.J/0100/PG.09.01/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Komisaris PT Bukit Asam Prima 1. Company Performance Including Company Subsidiaries in March and First Quarter 2023 2. Strategic Project Progress for the First Quarter of 2023 3. KPI First Quarter of 2023 4. Letter from the Directors of PT Bukit Asam Tbk Number T/050.J/0100/PG.09.01/III/2023 dated March 27, 2023, Regarding Application for Approval of the Commissioners of PT Bukit Asam Prima	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono
6	2 Mei 2023 May 2, 2023	1. Surat Dewan Komisaris MIND ID Nomor DEKOM/MII/10/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permintaan Wakil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 1. The Letter from the Board of Commissioners MIND ID Number DEKOM/MII/10/2023 dated April 17, 2023, regarding the Request for Representative Members of the Integrated Governance and Social and Environmental Responsibility Committee;	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono
7	15 Mei 2023 May 15, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan periode bulan April dan sampai dengan April tahun 2023 2. Progres proyek Strategis s.d April tahun 2023 3. Surat direksi Nomor: T/078.J/0100/KS.03/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggantian Vice President Satuan Pengawasan Intern 4. Surat direksi Nomor: R/081.J/0100/HK.01/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2022 dan Gaji/Honorarium tahun 2023 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk 5. Surat direksi Nomor: T/084.J/0100/PG.09.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama PT International Prima Coal 6. Surat direksi Nomor: T/085.J/0100/KS.03/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penggantian Sekretaris Perusahaan 7. Surat direksi Nomor: T/086.J/0100/PG.09.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Rapat Kedua Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur PT Bukit Energi Investama 8. Surat direksi Nomor: T/087.J/0100/PG.09.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur dan Ratifikasi Pengangkatan Komisaris PT Huadian Bukit Asam Power 9. Evaluasi Jabatan GM Unit Pertambangan Ombilin 1. Company Performance, Including Subsidiaries/Associated Companies, for the Period from April to April 2023. 2. Progress of Strategic Projects up to April 2023. 3. Director's Letter Number: T/078.J/0100/KS.03/V/2023 dated May 2, 2023, regarding Approval Request for Replacement of Vice President of Internal Audit Unit. 4. Director's Letter Number: R/081.J/0100/HK.01/V/2023 dated May 3, 2023, regarding Submission of Proposal for Determination of 2022 Bonus Calculation and 2023 Salary/Honorarium for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk. 5. Director's Letter Number: T/084.J/0100/PG.09.01/V/2023 dated May 5, 2023, regarding Request for Approval of Appointment of President Director of PT International Prima Coal. 6. Director's Letter Number: T/085.J/0100/KS.03/V/2023 dated May 5, 2023, regarding Request for Approval of Replacement of Company Secretary. 7. Director's Letter Number: T/086.J/0100/PG.09.01/V/2023 dated May 5, 2023, regarding Second Meeting Request for Approval of Appointment of President Director and Director of PT Bukit Energi Investama. 8. Director's Letter Number: T/087.J/0100/PG.09.01/V/2023 dated May 5, 2023, regarding Request for Approval of Appointment of Director and Ratification of Appointment of Commissioner of PT Huadian Bukit Asam Power. 9. Evaluation of the General Manager's Position in the Ombilin Mining Unit.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
8	8 Juni 2023 June 8, 2023	1. Perubahan Anggaran Dasar 2. Progres KPI Triwulan I 2023 dan tindaklanjut Monev PTBA 3. Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Nomor: 106/E.DIRPPU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Usulan Penggunaan Laba Bersih untuk mendapatkan Persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) PT Bukit Asam Tbk 1. Amendment of Articles of Association. 2. Progress of Q1 2023 Key Performance Indicators (KPIs) and Follow-up Monitoring of PTBA. 3. Letter from the Director of Portfolio and Business Development of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Number: 106/E.DIRPPU/V/2023 dated May 24, 2023, regarding Proposal for the Use of Net Profit to Obtain Approval at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 (Fiscal Year 2022) of PT Bukit Asam Tbk.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono
9	14 Juni 2023 June 14, 2023	1. Kinerja Bulan Mei dan s.d. Mei 2023 2. Progres Proyek Strategis s.d. Mei tahun 2023; 3. Progres KPI April dan Mei 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA 1. Performance in May and up to May 2023 2. Strategic Project Progress up to May 2023; 3. Discussion of April and May 2023 KPI Progress and PTBA Monev Follow-up	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono
10	19 Juni 2023 June 19, 2023	1. Perkenalan Dewan Komisaris 2. Pembagian Tugas Dewan Komisaris 1. Introduction of the Board of Commissioners. 2. Division of Tasks of the Board of Commissioners.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
11	13 Juli 2023 July 13, 2023	1. Kinerja Juni dan s.d Triwulan II 2023 2. Progres Proyek Strategis s.d Triwulan II tahun 2023 3. Progres KPI s.d Triwulam II tahun 2023 4. Tindaklanjut monev triwulan I PTBA 5. Surat direktur utama PT Bukit Asam Tbk Nomor: T/146.J/0100/PU.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Bukit Energi Investama 6. Surat direktur utama PT Bukit Asam Tbk Nomor: T/151.J/0100/PU.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Batubara Bukit Kendi 7. Masa jabatan komite yang akan berakhir 1. June Performance and Year-to-Date Performance for the Second Quarter of 2023. 2. Progress of Strategic Projects up to the Second Quarter of 2023. 3. Progress of Key Performance Indicators (KPIs) up to the Second Quarter of 2023. 4. Follow-up of First Quarter Monitoring of PTBA. 5. Letter from the President Director of PT Bukit Asam Tbk Number: T/146.J/0100/PU.01/VII/2023 dated July 6, 2023, regarding Request for Approval of the Appointment of President Commissioner of PT Bukit Energi Investama. 6. Letter from the President Director of PT Bukit Asam Tbk Number: T/151.J/0100/PU.01/VII/2023 dated July 6, 2023, regarding Request for Approval of the Appointment of President Commissioner of PT Batubara Bukit Kendi. 7. Expiry of Committee Terms.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
12	18 Juli 2023 July 18, 2023	Lanjutan Surat Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Nomor: T/146.J/0100/PU.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Bukit Asam Prima Continued discussion of the Letter from the President Director of PT Bukit Asam Tbk Number: T/146.J/0100/PU.01/VII/2023 dated July 6, 2023, regarding the Application for Approval of the Appointment of the President Commissioner of PT Bukit Asam Prima.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
13	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. Kinerja perusahaan termasuk anak/cucu perusahaan bulan Juli dan s.d Juli tahun 2023 2. Progres proyek strategis s.d Juli tahun 2023 3. Progres KPI s.d Juli 2023 dan tindaklanjut Monev PTBA 4. Tembusan surat Direktur SDM PTBA Nomor: T/134.J/HK.01/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Rencana Perpanjangan Kontrak Jasa Penambangan PT PAMA 1. Company Performance, Including Subsidiaries/Associated Companies, for the Month of July and Year-to-Date Performance up to July 2023. 2. Progress of Strategic Projects up to July 2023. 3. Progress of Key Performance Indicators (KPIs) up to July 2023 and Follow-up Monitoring of PTBA. 4. Copy of the Letter from the HR Director of PTBA Number: T/134.J/HK.01/VIII/2023 dated August 4, 2023, regarding Plan for Contract Extension of Mining Services with PT PAMA.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
14	29 Agustus 2023 August 29, 2023	1. Rencana renovasi ruangan Dewan Komisaris 2. Surat Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Nomor: T/196.J/0100/PG.09.01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal Permohonan Persetujuan Penutupan PT Bukit Asam Metana Ombilin (PT BAMO) 3. Surat Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Nomor: R/205.J/0100/OT.01/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Organisasi Pertambangan Ombilin 1. Renovation Plan for the Board of Commissioners' Room. 2. Letter from the President Director of PT Bukit Asam Tbk Number: T/196.J/0100/PG.09.01/VIII/2023 dated August 16, 2023, regarding Request for Approval of the Closure of PT Bukit Asam Metana Ombilin (PT BAMO). 3. Letter from the President Director of PT Bukit Asam Tbk Number: R/205.J/0100/OT.01/VIII/2023 dated August 23, 2023, regarding Request for Approval of Organizational Changes in Ombilin Mining.	• Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
15	8 September 2023 September 8, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu Perusahaan Bulan Agustus dan s.d. Agustus tahun 2023 2. Progres Proyek Strategis s.d. Agustus tahun 2023 3. Progres KPI s.d Agustus 2023 4. Tindak Lanjut Monev PTBA s.d Agustus 5. Surat Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 209.J/0100/PG.09.01/VII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Ralat Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama dan Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Bukit Energi Investama 1. Company Performance Including its subsidiaries and subsubsidiaries in August and up to August 2023 2. Strategic Project Progress up to August 2023 3. KPI Progress until August 2023 4. PTBA Monev Follow-up until August 5. Letter from the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 209.J/0100/PG.09.01/VII/2023 dated August 30, 2023, regarding Correction Request for Approval of the Appointment of President Commissioner and Request for Approval of the Appointment of Commissioner of PT Bukit Energi Investama.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
16	13 Oktober 2023 October 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan September dan s.d Triwulan III tahun 2023 2. Progres proyek strategis s.d September tahun 2023 3. Progres KPI s.d Triwulan III 2023 4. Tindaklanjut Monev PTBA s.d September 2023 5. Surat direksi MIND ID Nomor 491/E.DIRPPU/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Tanggapan atas Penyampaian Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk 6. Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SR-517/S.MBU/09/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Usulan Penggantian Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam 7. Penggantian Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan PSDM 8. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk tahun 2024 9. Tembusan surat direksi PTBA Nomor: T/223.J/0100/LG.06/IX/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Rencaan Perpanjangan Kontrak Jasa Penambangan 10. Tembusan surat direksi PTBA Nomor: T/221.J/0100/HK.02/IX/2023 tanggal 31 September 2023 perihal Ralat Permohonan Penilaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2011-2012 1. Company Performance, Including Subsidiaries/Subsubsidiaries Companies, for the Month of September and Year-to-Date Performance up to Q3 2023. 2. Progress of Strategic Projects up to September 2023. 3. Progress of Key Performance Indicators (KPIs) up to Q3 2023. 4. Follow-up Monitoring of PTBA up to September 2023. 5. Letter from the MIND ID Board of Directors Number: 491/E.DIRPPU/IX/2023 dated September 13, 2023, regarding Response to Submission of Request for Approval of Changes to the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for the Year 2023 of PT Bukit Asam Tbk. 6. Letter from the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SR-517/S.MBU/09/2023 dated September 8, 2023, regarding Proposal for Replacement of Secretary of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam. 7. Replacement of Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HC Committees. 8. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk for the Year 2024. 9. Copy of Letter from PTBA Board of Directors Number: T/223.J/0100/LG.06/IX/2023 dated September 21, 2023, regarding Plan for Extension of Mining Service Contract. 10. Copy of Letter from PTBA Board of Directors Number: T/221.J/0100/HK.02/IX/2023 dated September 31, 2023, regarding Correction Request for Assessment of Follow-up to the Recommendations of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) Report for the Year 2011-2012.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
17	13 November 2023 November 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk anak/Cucu Perusahaan Bulan Oktober tahun 2023; 2. Progres Proyek Strategis s.d Oktober tahun 2023; 3. Progres KPI s.d Oktober 2023 4. Tindak Lanjut Monev PTBA s.d Oktober 2023; 5. Tembusan Surat Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Bukit Asam Tbk nomor: T/1148K/0300/KS.03/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Bukit Asam Tbk; 6. Tembusan Surat Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Nomor : T/251.J/0100/PG.09.09/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal laporan Kajian Penyehatan dan Penguatan Dana Pensiun Bukit Asam 1. Company Performance Including Subsidiaries/Subsubsidiaries Companies for October 2023. 2. Progress of Strategic Projects up to October 2023. 3. Progress of Key Performance Indicators (KPIs) up to October 2023. 4. Follow-up Monitoring of PTBA up to October 2023. 5. Copy of Letter from the Finance Director & Risk Management of PT Bukit Asam Tbk Number: T/1148K/0300/KS.03/X/2023 dated October 30, 2023, regarding Submission of Draft Work Plan and Budget (WP&B) for the Year 2024 of PT Bukit Asam Tbk. 6. Copy of Letter from the President Director of PT Bukit Asam Tbk Number: T/251.J/0100/PG.09.09/X/2023 dated October 31, 2023, regarding the Report on the Review of the Rehabilitation and Strengthening of the Bukit Asam Pension Fund.	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan
18	26 Oktober 2023 October 26, 2023	1. Wawancara calon anggota Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM 2. RKA Dewan Komisaris tahun 2024 1. Interview for prospective members of the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HCD Committees 2. The Board of Commissioners' work plan and budget for 2024	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. Tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris
Table of Internal Meeting Agenda for the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
19	15 Desember 2023 December 15, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk anak/Cucu Perusahaan Bulan November dan sampai dengan November tahun 2023; 2. Progres Proyek Strategis s.d November tahun 2023; 3. Progres KPI s.d November 2023 4. Tindak Lanjut Monev PTBA sampai dengan November 2023; 5. Surat Direktur Utama PTBA Nomor : T/293.J/0100/HK.01/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Permohonan Persetujun Prinsip Cost Overrun untuk Proyek PLTU Sumsel-8; 6. Surat Direktur Utama PTBA Nomor T/297.J/0100/PG.09.01/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Huadian Bukit Asam Power; 1. Company Performance Including Company Subsidiaries/Subsubsidiaries in November and up to November 2023; 2. Strategic Project Progress until November 2023; 3. KPI progress until November 2023 4. PTBA Monev Follow-up until November 2023; 5. Letter from the President Director of PTBA Number: T/293.J/0100/HK.01/XII/2023 dated December 6, 2023, regarding Application for Approval of Cost Overrun Principles for the Sumsel-8 CFPP Project; 6. Letter from the President Director of PTBA Number T/297.J/0100/PG.09.01/XII/2023 dated December 8, 2023, regarding Application for Approval of the Appointment of President Commissioner of PT Huadian Bukit Asam Power;	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris Pada Rapat Dewan Komisaris
Frequency of Attendance of the Board of Commissioners at Internal Board of Commissioners Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Percentage
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	19	18	94%
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	19	19	100%
Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	19	19	100%
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	19	19	100%
Kurnia Toha*	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Rahmat Hidayat Pulungan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Agus Suhartono**	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent	5	5	100%
Devi Pradnya Paramita***	Komisaris Commissioner	4	4	100%

Catatan
* menjabat sejak 15 Juni 2023
** menjabat hingga 11 April 2023
*** menjabat hingga 21 Maret 2023.

Notes
* worked since June 15, 2023
** worked until April 11, 2023
*** worked until March 21, 2023.

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk.

Sesuai dengan ketentuan di atas Rapat Gabugan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan. Adapun pada tahun 2023 telah dilakukan 13 (tiga belas) kali rapat dengan uraian sebagai berikut:

Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

Joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are based on the following provisions:
1. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk.

In accordance with provisions written above, Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners must be held at least 1 (one) time a month. In 2023, 13 (thirteen) meetings were held with the following description:

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Bulan Desember tahun 2022 2. Progres Proyek Strategis s.d. Desember tahun 2022 3. Kinerja Anak/Cucu Perusahaan Triwulan IV Tahun 2022 4. KPI Tahun 2022 (*unaudited*) 1. Company Performance in December 2022 2. Strategic Project Progress up to December 2022 3. The Performance of the Company's Subsubsidiaries in the Fourth Quarter of 2022 4. KPIs for 2022 (unaudited)	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
2	13 Februari 2023 February 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan bulan Januari tahun 2023 2. Progres Proyek Strategis s.d. Januari tahun 2023 3. Hasil asesmen GCG Tahun 2022 1. Company Performance in January 2023 2. Strategic Project Progress up to January 2023 3. The results of the 2022 GCG assessment	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
3	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2023 s.d Bulan Februari 2023 2. Progres Proyek Strategis Februari s.d. Februari tahun 2023 1. Company Performance for February 2023 to February 2023 2. Strategic Project Progress in February to February 2023	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
4	9 April 2023 April 9, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu Perusahaan bulan Maret 2023 dan Triwulan I 2023 2. Progres Proyek Strategis Triwulan I tahun 2023 3. KPI Triwulan I tahun 2023 1. Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in March 2023 and First Quarter 2023 2. Strategic Project Progress for the First Quarter of 2023 3. KPI for the first quarter of 2023	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Agus Suhartono • Devi Pradnya Paramita • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
5	15 Mei 2023 May 15, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan bulan April 2023 dan s.d. bulan April 2023 2. Progres Proyek Strategis April s.d. April tahun 2023 3. Paparan Hasil Kajian Korn Ferry terkait Penetapan Perhitungan Tantiem tahun 2023 dan Gaji/ Honorarium Tahun 2023 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk 4. Evaluasi Jabatan GM Unit Pertambangan Ombilin 1. Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in April 2023 and up to April 2023 2. Strategic Project Progress in April to April 2023 3. Presentation of Korn Ferry Study Results regarding the Determination of the 2023 Bonus Calculation and 2023 Salary/Honorarium for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk 4. The Evaluation of the Position of GM of the Ombilin Mining Unit	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
6	14Juni 2023 June 14, 2023	1. Kinerja Perusahaan bulan Mei 2023 dan sampai dengan bulan Mei 2023 2. Progres Proyek Strategis sampai dengan Mei tahun 2023 3. Proyek KPI April dan Mei 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA (*Table* Monev Terlampir) 1. Company Performance in May 2023 and up to in May 2023 2. Strategic Project Progress until May 2023 3. April and May 2023 KPI Projects and PTBA Monev Follow-up (Monev Table Attached)	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
7	14 Juli 2023 July 14, 2023	1. Kinerja Perusahaan bulan Juni 2023 dan sampai dengan bulan Juni 2023; 2. Progres Proyek Strategis sampai dengan Triwulan II tahun 2023; 3. Progres KPI Juni s.d Triwulan II Tahun 2023; 4. Tindak Lanjut Monev Triwulan I PTBA; 1. Company Performance in June 2023 and up to June 2023 2. Strategic Project Progress up to Quarter II 2023 3. KPI Progress June to Quarter II 2023 4. PTBA's Quarter I Monitoring and Evaluation Follow-up	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
8	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan Juli 2023 dan sampai dengan Juli tahun 2023 2. Progres Proyek Strategis sampai dengan Juli tahun 2023 3. Progres KPI sampai dengan Juli 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA 1. Company Performance in July and up to July 2023 2. Strategic Project Progress up to July 2023 3. KPI Progress up to July 2023 and PTBA Monev Follow-up	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
9	8 September 2023 September 8, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan bulan Agustus 2023 dan sampai dengan Agustus tahun 2023. 2. Progres Proyek Strategis sampai dengan Agustus tahun 2023 3. Progres KPI sampai dengan Agustus 2023; 4. Tindak Lanjut Monev PTBA sampai dengan Agustus 2023; 1. Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in August and up to August 2023. 2. Strategic Project Progress up to August 2023 3. KPI Progress up to August 2023 4. Follow-up monitoring and evaluation of PTBA up to August 2023	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
10	22 September 2023 September 22, 2023	Pengesahan Rencana Kerja dan Angaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 Approval of the Company's Work Plan and Budget (WP&B) for the year 2024	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
11	13 Oktober 2023 October 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan September dan Triwulan III Tahun 2023; 2. Progres Proyek Strategis s.d Triwulan III tahun 2023; 3. Progres KPI sampai dengan September 2023; 4. Tindak Lanjut Monev PTBA sampai dengan September 2023; 5. Terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR 1. Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in September and Quarter III of 2023 2. Strategic Project Progress up to Quarter III 2023 3. KPI Progress up to September 2023 4. Follow-up monitoring and evaluation of PTBA up to September 2023 5. Related to work safety, environment, and CSR	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin
12	13 November 2023 November 13, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Oktober 2023 dan sampai dengan Oktober tahun 2023; 2. Progres Proyek Strategis sampai dengan Oktober tahun 2023; 3. Progres KPI sampai dengan Oktober 2023; 4. Tindak Lanjut Monev PTBA sampai dengan Oktober 2023; 1. Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in October and up to October 2023 2. Strategic Project Progress until October 2023 3. KPI Progress up to October 2023 4. Follow-up monitoring and evaluation of PTBA up to October 2023	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Agenda for Joint Meeting of Directors and Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
13	15 Desember 2023 December 15, 2023	1. Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan November 2023 dan sampai dengan November Tahun 2023; 2. Progres Proyek Strategis sampai dengan November tahun 2023; 3. Progres KPI sampai dengan November 2023; 4. Tindak Lanjut Monev PTBA sampai dengan November 2023; 1. Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries from November to November 2023 2. Strategic Project Progress until November 2023 3. KPI Progress up to November 2023 4. Follow-up monitoring and evaluation of PTBA to November 2023	• Irwandy Arif • Carlo Brix Tewu • Andi Pahril Pawi • E. Piterdono • Kurnia Toha • Rahmat H. Pulungan • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Suhedi • Suherman • Farida Thamrin

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Frequency of Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisartis Joint Meetings of Directors and the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	13	13	100%
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%
Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	13	13	100%
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	13	13	100%
Kurnia Toha*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Rahmat Hidayat Pulungan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	6	86%
Agus Suhartono**	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/Independent	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita***	Komisaris Commissioner	3	3	100%
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	13	11	85%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Development Director	13	13	100%
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	13	13	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Management Director	13	11	85%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	13	13	100%

Catatan
* menjabat sejak 15 Juni 2023
** menjabat hingga 11 April 2023
*** menjabat hingga 21 Maret 2023.

Notes
* worked since June 15, 2023
** worked until April 11, 2023
*** worked until March 21, 2023.

Program Pengenalan
Perusahaan menyelenggarakan kegiatan program pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kali. Kegiatan ini bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam *Charter* Dewan Komisaris, dan bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis Perusahaan dan pengkajian dokumen, atau

Introduction Program
The Company held an introduction program for newly appointed Board of Commissioners on their first term of office. This activity is mandatory as stated in the Board of Commissioners Charter, to introduce and provide understanding regarding the Company to newly appointed members of the Board of Commissioners. The introduction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of the Board of Commissioners. The Company's introduction program may be delivered in the form of presentations, meetings, visits to the Company's business units, and review of documents or other programs deemed appropriate to

program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Apabila dibutuhkan, dapat pula dilakukan program pengenalan atas anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi. Adapun materi yang harus disampaikan pada program pengenalan mencakup:

1. Tata Kelola yang berlaku di Perusahaan sebagai anggota dari Grup MIND ID, termasuk mengenai pedoman dan/atau kebijakan yang melibatkan peran MIND ID selaku *holding* pertambangan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Kuasa Khusus (SKK) Kementerian BUMN, maupun kebijakan lain yang berlaku;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* oleh Perusahaan;
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
5. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2023, PTBA melaksanakan program pengenalan Perusahan bagi Dewan Komisaris, yang dilaksanakan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
1. Paparan kepada anggota Dewan Komisaris baru pada tanggal 19 Juni 2023;
2. Kunjungan ke Unit Pertambanan Tanjung Enim pada tanggal 8-11 Agustus 2023.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka Anggota Dewan Komisaris harus secara teratur menerima program pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan sertifikasi yang relevan, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu diberikan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* atau bentuk lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Tahun 2023

Program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris Perusahaan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil.

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan, rekomendasi, dan persetujuan yang menunjang proses pengawasan Perusahaan sebanyak 93 dokumen sebagai berikut:

the Company where the program is implemented, and if necessary, an introduction program can also be carried out for subsidiaries and affiliated companies. The material that must be presented in the introductory program includes:

1. Governance that applies to the Company as a member of the MIND ID Group, including guidelines and/or policies involving MIND ID's role as a mining holding company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Special Power of Attorney (SKK) of the Ministry of SOEs, as well as other applicable policies;
2. Implementation of the principles of good corporate governance by the Company;
3. An overview of the Company related to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
4. Information related to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
5. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors and prohibited rules.

In 2023, PTBA implemented a Company introduction program for the Board of Commissioners, on the following dates:

1. Introduction to new members of the Board of Commissioners on June 19, 2023;
2. Visit to the Tanjung Enim Mining Unit on August 8-11, 2023.

Competency Training and Development

Policy

In order to support the implementation of their supervisory duties and provide advice to the Board of Directors, members of the Board of Commissioners must regularly receive relevant, independent and sustainable training; knowledge development; and certification programs. To support this knowledge update, members of the Board of Commissioners must be provided with training, workshops, seminars, conferences, or other forms that are useful to boost the effectiveness of the Board of Commissioners' functions.

Training and/or Competency Improvement in 2023

The training and competency improvement programs that the Company's Board of Commissioners will participate in throughout 2023 can be seen in the Profile Chapter.

Decisions, Recommendations, and Implementation of Duties of the Board of Commissioners

In 2023, the Board of Commissioners has issued various decisions, recommendation, and approvals that support the Company's supervision process, totaling 93 documents as follows:

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
12 Januari 2023 January 12, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama PT Bukit Asam Prima Request for Approval of the Appointment of the President Director of PT Bukit Asam Prima	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12Januari 2023 January 12, 2023	Permohonan Persetujuan Atas Tambahan Setoran Modal Kepada PT Bukit Asam Prima dalam rangka Tambahan Setoran Modal kepada PT Bukit Prima Bahari Request for Approval of Additional Capital Deposits to PT Bukit Asam Prima in the context of Additional Capital Deposits to PT Bukit Prima Bahari	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12 Januari 2023 January 12, 2023	Penyampaian KPI Tahun 2022 PT Bukit Asam Tbk (*Unaudited*) Submission of PT Bukit Asam Tbk KPI in 2022 (Unaudited)	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12 Januari 2023 January 12, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja Anak Perusahaan s.d. Triwulan IV Tahun 2022 PT Bukit Asam Tbk Submission of Subsidiary Performance Reports up to Quarter IV 2022 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12 Januari 2023 January 12, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk Desember 2022 dan sampai dengan Triwulan IV 2022 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report in December 2022 and up to Quarter IV 2022	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
12 Januari 2023 January 12, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis sampai dengan bulan Desember 2022 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until December 2022 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Februari 2023 February 15, 2023	Pengangkatan Direktur PT Bukit Multi Investama Appointment of Director of PT Bukit Multi Investama	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Februari 2023 February 15, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk Januari 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report in January 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Februari 2023 February 15, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis sampai dengan bulan Januari tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until January 2023 PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Maret 2023 March 14, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk Februari 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report in February 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 Maret 2023 March 13, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until February 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Maret 2023 March 14, 2023	Persetujuan Penghapusan dan Pelalangan Aset Approval of Asset Removal and Auction	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
20 Maret 2023 March 20, 2023	Persetujuan Tambahan Setoran Modal kepada PT Bukit Asam Prima Dalam Rangka Tambahan Setoran Modal Kepada PT Bukit Prima Bahari Approval of Additional Capital Deposits to PT Bukit Asam Prima in the Context of Additional Capital Deposits to PT Bukit Prima Bahari	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
6 April 2023 April 6, 2023	Pengangkatan Direktur PT Bukit Asam Prima (BAP) Appointment of Director of PT Bukit Asam Prima (BAP)	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
9 April 2023 April 9, 2023	Surat Penunjukan Pimpinan RUPST Letter of Appointment of AGMS Chairperson	-
10 April 2023 April 10, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis Triwulan I tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report for Quarter I 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
10 April 2023 April 10, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Maret 2023 dan Triwulan I 2023 dan Kinerja Anak Perusahaan Triwulan I 2023. Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for March 2023 and First Quarter of 2023 and Subsidiary Performance for First Quarter of 2023.	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
10 April 2023 April 10, 2023	Persetujuan Realisasi Tambahan Setoran Modal ke PT Batubara Bukit Kendi Approval for the Realization of Additional Capital Deposits to PT Batubara Bukit Kendi	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
3 Mei 2023 May 3, 2023	Usulan Wakil Anggota Dewan Komisaris Group Holding MIND ID sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Proposed Deputy Member of the Board of Commissioners of MIND ID Holding Group as Member of the Integrated Governance and Social and Environmental Responsibility Committee	Komisaris Utama MIND ID MIND ID President Commissioner
3 Mei 2023 May 3, 2023	Persetujuan Rencana Kerja Sama Bangun Serah Guna (BSG) dengan PT Internasional Prima Coal (PT IPC) Approval of the Build-Operate-Transfer Plan with PT Internasional Prima Coal (PT IPC)	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
3 Mei 2023 May 3, 2023	Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 Proposed the Use of Net Profit for Fiscal Year 2022	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
3 Mei 2023 May 3, 2023	Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 Proposed the Use of Net Profit for Fiscal Year 2022	Direktur Utama MIND ID MIND ID President Director

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
8 Mei 2023 May, 8, 2023	Penyampaian KPI Triwulan I Tahun2023 PT Bukit Asam Tbk KPI Submission for the First Quarter of 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
8 Mei 2023 May 8, 2023	Surat Penunjukan RUPS Tahunan Letter of Appointment for Annual GMS	-
15 Mei 2023 May 15, 2023	Persetujuan Penggantian *Vice President* Satuan Pengawasan Intern (VP SPI) Approval of the Replacement of the Vice President of the Internal Audit Unit (VP SPI)	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
15 Mei 2023 May 15, 2023	Persetujuan Penggantian Sekretaris Perusahaan Approval of the Replacement of the Company's Secretary	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
15 Mei 2023 May 15, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama PT Internasional Prima Coal Request for Approval for the Appointment of President Director of PT Internasional Prima Coal	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Mei 2023 May 15, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan April 2023 dan s.d. April April 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for April 2023 and up to April April 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Mei 2023 May 15, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. April tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Reports up to April 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Mei 2023 May 15, 2023	Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2022 dan Gaji/Honorarium Tahun 2023 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Submission of Proposals for Determining the 2022 Bonus Calculation and 2023 Salary/Honorarium for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk	1.Menteri BUMN SOEs Minister 2. Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
23 Mei 2023 May 23, 2023	Penyampaian Usulan Perubahan Pengurus PT BEI Submission of Proposals for Changes in the Management of PT BEI	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
23 Mei 2023 May 23, 2023	Persetujuan Pengangkatan Direktur dan Ratifikasi Pengangkatan Komsaris PT Huadian Bukit Asam Power Approval of the Appointment of Director and Ratification of the Appointment of Commissioner of PT Huadian Bukit Asam Power	Direktur Utama PTBA PTBA Board of Directors
23 Mei 2023 May 23, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Direktur Utama PT Bukit Energi Investama Proposal for Approval of the Appointment of President Director of PT Bukit Energi Investama	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
8 Juni 2023 June 8, 2023	Penyampaian Laporan Progress Pengawasan dan Penyelesaian KPI Triwulan I Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of KPI Supervision and Completion Progress Report for the First Quarter of 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
8 Juni 2023 8 June, 2023	Perubahan Anggaran Dasar Changes to the Articles of Association	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
8 Juni 2023 8 June 2023	Tanggapan Tertulis atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 Written Response to the Proposed Use of Net Profit for 2023 Fiscal Year	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
14 Juni 2023 June 14, 2023	Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Audit Committee Recommendations in the Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
14 Juni 2023 June 14, 2023	Penyampaian Laporan Progress Proyek Strategis s.d. Mei Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until May 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Juni 2023 June 14, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Mei 2023 dan s.d.Mei 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for May 2023 and up to May 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 Juni 2023 June 19, 2023	Permohonan Persetujuan Penunjukan Akuntan Pulik (AP) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) PwC untuk Mengaudit Laporan Keuangan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023 Application for Approval of the Appointment of a Public Accountant (AP) at the PwC Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Financial Report of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 Juni 2023 June 19, 2023	Perubahan Wakil Anggota Dewan Komisaris Group Holding MIND ID sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Change of Deputy Member of the Board of Commissioners of MIND ID Holding Group as Member of the Integrated Governance and Social and Environmental Responsibility Committee	Komisaris Utama MIND ID MIND ID President Commissioner
6 Juli 2023 July 6, 2023	Penyampaian Laporan Dewan Komisaris atas Progres Pengawasan dan Peneyelsaian KPI dan Tindak Lanjut Kinerja s.d.Mei 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of the Board of Commissioners' Report on the Progress of Supervision and Completion of KPIs and Follow-up Performance until May 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Juli 2023 July 14, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Triwulan II Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Reports up to Quarter II 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Juli 2023 July 14, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Bukit Energi Investama Request for Approval for the Appointment of President Commissioner of PT Bukit Energi Investama	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Juli 2023 July 14, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Batubara Bukit Kendi Application for Approval of the Appointment of Commissioner of PT Batubara Bukit Kendi	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
14 Juli 2023 July 14, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Juni 2023 dan s.d. Triwulan II 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for June 2023 and up to Quarter II 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 Juni 2023 June 19, 2023	Pembagian Tugas Dewan Komisaris Division of Duties of the Board of Commissioners	-
	Tim Penyesuaian Kebijakan *Good Corporate Governance* di PT Bukit Asam Tbk Good Corporate Governance Policy Adjustment Team at PT Bukit Asam Tbk	-
20 Juli 2023 July 20, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Bukit Asam Prima Request for Approval for the Appointment of President Commissioner of PT Bukit Asam Prima	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
21 Juli 2023 July 21, 2023	Persetujuan Pengangkatan Direksi PT Bukit Energi Investama Approval of the Appointment of the Directors of PT Bukit Energi Investama	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
21 Juli 2023 July 21, 2023	Persetujuan Pengangkatan Direksi PT Internasional Prima Coal Approval of the Appointment of the Directors of PT International Prima Coal	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
26 Juli 2023 July 26, 2023	Permohonan Persetujuan RKAP Perubahan Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Application for Approval of Revised WP&B in 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID up Direktur Portfolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Board of Directors up the Director of Portfolio and Business Development
4 Agustus 2023 August 4, 2023	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan I Tahun Buku 2023 dan KPI per Juni 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for the First Quarter of the 2023 Fiscal Year and KPI as of June 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 Agustus 2023 August 14, 2023	Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/ Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk Determination of Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salary/Honorarium as well as Benefits and Facilities for the 2023 Financial Year of PT Bukit Asam Tbk	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 Agustus 2023 August 15, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d.Juli tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Report until July 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Agustus 2023 August 15, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Juli 2023 dan s.d. Juli 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for July 2023 and up to July 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
30 Agustus 2023 August 30, 2023	Persetujuan Penutupan PT Bukit Asam Metana Ombilin Approval for the Closure of PT Bukit Asam Metana Ombilin	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
30 Agustus 2023 August 30, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Sementara Anggota Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM PT Bukit Asam Tbk Temporary Dismissal and Appointment of Members of the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HR Development Committee of PT Bukit Asam Tbk	-
1 September 2023 September 1, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bukit Asam Tbk Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Bukit Asam Tbk	-
6 September 2023 September 6, 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Organisasi Unit Pertambangan Ombilin Application for Approval of Changes to the Organization of the Ombilin Mining Unit	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
5 September 2023 September 5, 2023	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan I dan Triwulan II Tahun Buku 2023 serta KPI per Juli 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for Quarter I and Quarter II of the 2023 Financial Year and KPI as of July 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
11 September 2023 September 11, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Agustus tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Reports up to August 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
11 September 2023 September 11, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Agustus 2023 dan s.d. Agustus 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for August 2023 and up to August 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
11 September 2023 September 11, 2023	Perubahan atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris utama PT Bukit Energi Investama Amendments to the Application for Approval of the Appointment of the President Commissioner of PT Bukit Energi Investama	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
14 September 2023 September 14, 2023	Penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik PwC untuk Mengaudit Laporan Keuangan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023 Appointment of a Public Accountant at the PwC Public Accounting Firm to Audit the Financial Report of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year	Direktur Utama PTBA PTBA Board of Directors
1 Oktober 2023 October 1, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remuenrasi, dan Pengembangan SDM PT Bukit Asam Tbk Dismissal and Appointment of Members of the Business Risk Committee, Post Addition, CSR, Nomination, Remuneration, and HR Development of PT Bukit Asam Tbk	-
4 Oktober 2023 October 4, 2023	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan II Tahun Buku 2023 serta KPI per Agustus 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Supervision Progress Report on the Results of Monitoring and Evaluation for the Second Quarter of the 2023 Fiscal Year and KPI in August 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 Oktober 2023 October 13, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan September 2023 dan s.d. September 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for September 2023 and up to September 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 Oktober 2023 October 13, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. September tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Reports up to September 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
26 Oktober 2023 October 26, 2023	Penyampaian RKA Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk tahun 2024 Submission of the WP&B to the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk in 2024	Direktur Utama PTBA PTBA President Director
27 Oktober 2023 October 27, 2023	Persetujuan Ratifikasi Pengangkatan Direksi PT Bukit Asam Metana Ombilin Ratification Approval of the Appointment of the Directors of PT Bukit Asam Metana Ombilin	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
27 Oktober 2023 October 27, 2023	Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Jasa Angkutan dan Pelabuhan pada Skema Penjualan *Free On Board Mother Vessel* di Pelabuhan lain yang belum ditetapkan pada RKAP PTBA 2023 Request for Approval for the Implementation of the Procurement Process for Transport and Port Services in the Free On Board Mother Vessel Sales Scheme at other Ports that have not been determined in PTBA's 2023 WP&B	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
31 Oktober 2023 October 31, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk	-
2 November 2023 November 2, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR,Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM PT Bukit Asam Tbk Dismissal and Appointment of Members of the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HR Development Committees of PT Bukit Asam Tbk	-
6 November 2023 November 6, 2023	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan atas Hasil Monev Triwulan II Tahun Buku 2023 serta KPI per September 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Supervision Progress Report on the Results of Monev for the Second Quarter of the 2023 Fiscal Year and KPI in September 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 November 2023 November 13, 2023	Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus PT BAP Request for Approval of Changes in Management of PT BAP	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 November 2023 November 13, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan Oktober 2023 dan s.d. Oktober 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for October 2023 and up to October 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
13 November 2023 November 13, 2023	Penyampaian Laporan Progres Proyek Strategis s.d. Oktober tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Reports up to October 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
14 November 2023 November 14, 2023	Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Batubara Bukit Kendi dan Komisaris Utama PT Bukit Energi Investama Approval of the Appointment of Commissioner of PT Batubara Bukit Kendi and President Commissioner of PT Bukit Energi Investama	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
15 November 2023 November 15, 2023	Persetujuan Skema Penjualan *Free On Board Mother Vessel* di Pelabuhan Lain Approval of the Free On Board Mother Vessel Sales Scheme at Other Ports	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
27 November 2023 November 27, 2023	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Tambahan Setoran Modal ke PT Bukit Asam Prima dalam Rangka Tambahan modal ke PT Bukit Prima Bahari Submission of Complete Documents for Additional Capital Deposit to PT Bukit Asam Prima in the Context of Additional Capital to PT Bukit Prima Bahari	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
27 November 2023 November 27, 2023	Pengangkatan Anggota Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunersi, dan Pengembangan SDM PT Bukit Asam Tbk Appointment of Members of the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HR Development Committee of PT Bukit Asam Tbk	-

Tanggal Date	Perihal Issues	Ditujukan Kepada Intended to
28 November 2023 November 28, 2023	Keterlibatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Involvement in General Elections, Regional Head Elections, and/or as Political Party Administrators or Regional Head Officials and Deputy Regional Heads	1.Dewan Komisaris Board of Commissioner 2. Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioner Supporting Organs
15 Desember 2023 December 15, 2023	Penyampaian Laporan Progres Pengawasan Hasil Monev Triwulan III Tahun Buku 2023 serta KPI per Oktober 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Monitoring Progress Report on Monitoring and Evaluation Results for the Third Quarter of the 2023 Fiscal Year and KPI as of October 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Desember 2023 December 15, 2023	Penyampaian Laporan Kinerja PT Bukit Asam Tbk bulan November 2023 dan s.d. November 2023 Submission of PT Bukit Asam Tbk Performance Report for November 2023 and November 2023	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Desember 2023 December 15, 2023	Penyampaian Laporan Progres Priyek Strategis s.d. November Tahun 2023 PT Bukit Asam Tbk Submission of Strategic Project Progress Reports up to November 2023 of PT Bukit Asam Tbk	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
15 Desember 2023 December 15, 2023	Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk	-
15 Desember 2023 December 15, 2023	Pemberhentian dan Pengalihan Jabatan Anggota Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM PT Bukit Asam Tbk menjadi Anggota Komite Pemanatau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Bukit Asam Tbk. Dismissal and Transfer of Positions of Members of the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration and HRD Committees of PT Bukit Asam Tbk to become Members of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT Bukit Asam Tbk.	-
15 Desember 2023 December 15, 2023	Pengangkatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi PT Bukit Asam Tbk Appointment of Members of the Nomination & Remuneration Committee of PT Bukit Asam Tbk	-
19 Desember 2023 December 19, 2023	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP) Request for Approval for Appointment of President Commissioner of PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP)	Direksi MIND ID MIND ID Board of Directors
19 Desember 2023 December 19, 2023	Persetujuan Prinsip *Cost Overrun* untuk Proyek PLTU Sumsel-8 Approval of Cost Overrun Principles for the Sumsel-8 CFPP	Direksi PTBA PTBA Board of Directors
21 Desember 2023 December 21, 2023	*Corporate Governance Policy* PT Bukit Asam Tbk The Corporate Governance Policy of PT Bukit Asam Tbk.	-
21 Desember 2023 December 21, 2023	Pencabutan Panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan PT Bukit Asam Tbk (Board Manual) Revocation of the Working Guidelines for the Board of Commissioners and PT Bukit Asam Tbk (Board Manual)	-
21 Desember 2023 December 21, 2023	Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Charter to Board of Commissioners) PT Bukit Asam Tbk Charter for the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk	-
31 Desember 2023 December 31, 2023	Penetapan Pedoman Kerja Sekretariat Dewan Komisaris Determination of Work Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners	-
31 Desember 2023 December 31, 2023	Penetapan Piagam Komite Audit Determination of the Audit Committee Charter	-
31 Desember 2023 December 31, 2023	Penetapan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi Determination of the Nomination & Remuneration Committee Charter	-
31 Desember 2023 December 31, 2023	Pedoman Perilaku & Etika Bisnis Code of Business Conduct & Ethics	-
31 Desember 2023 December 31, 2023	Penetapan Piagam Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Determination of the Charter of the Integrated Risk Monitoring & Governance committee	-

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 7 dan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Bukit Asam Tbk No. S-581/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 perihal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, diatur mengenai tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, terdapat beberapa aksi korporasi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Pengangkatan Direktur PT Bukit Multi Investama
2. Persetujuan Penghapusan dan Pelelangan Aset
3. Persetujuan Tambahan Setoran Modal kepada PT Bukit Asam Prima Dalam Rangka Tambahan Setoran Modal kepada PT Bukit Prima Bahari
4. Pengangkatan Direktur PT Bukit Asam Prima (BAP)
5. Persetujuan Realisasi Tambahan Setoran Modal ke PT Batubara Bukit Kendi
6. Persetujuan Rencana Kerja Sama Bangun Serah Guna (BSG) dengan PT Internasional Prima Coal (PT IPC)
7. Persetujuan Penggantian *Vice President* Satuan Pengawasan Intern
8. Persetujuan Penggantian Sekretaris Perusahaan
9. Persetujuan Pengangkatan Direktur dan Ratifikasi Pengangkatan Komsaris PT Huadian Bukit Asam Power
10. Perubahan Anggaran Dasar
11. Persetujuan Pengangkatan Direksi PT Bukit Energi Investama
12. Persetujuan Pengangkatan Direksi PT Internasional Prima Coal
13. Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk
14. Persetujuan Penutupan PT Bukit Asam Metana Ombilin
15. Penunjukan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik PWC untuk Mengaudit Laporan Keuangan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2023
16. Persetujuan Ratifikasi Pengangkatan Direksi PT Bukit Asam Metana Ombilin
17. Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Batubara Bukit Kendi dan Komisaris Utama PT Bukit Energi Investama
18. Persetujuan Skema Penjualan *Free On Board Mother Vessel* di Pelabuhan Lain
19. Persetujuan Prinsip *Cost Overrun* untuk Proyek PLTU Sumsel-8

Directors' Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners

In accordance with the Articles of Association Article 12 paragraph 7 and the Letter of the Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna Shareholder of PT Bukit Asam Tbk No. S-581/MBU/09/2018 dated September 6, 2018, regarding Approval of Proposed Limitations and/or Criteria for the Authority of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, regulates the actions of the Board of Directors which require approval from the Board of Commissioners.

In 2023, there were several corporate actions that have received approval from the Board of Commissioners as follows:

1. Appointment of Director of PT Bukit Multi Investama
2. Approval of Asset Write-Off and Auction
3. Approval of Additional Capital Deposits to PT Bukit Asam Prima for the Additional Capital Deposits to PT Bukit Prima Bahari
4. Appointment of Director of PT Bukit Asam Prima (BAP)
5. Approval of the Realization of Additional Capital Deposits to PT Batubara Bukit Kendi
6. Approval of the Build-Operate-Transfer Cooperation Plan with PT Internasional Prima Coal (PT IPC)
7. Approval of the Replacement of the Vice President of the Internal Audit Unit
8. Approval of Replacement of Corporate Secretary
9. Approval of the Appointment of the Director and Ratification of the Appointment of the Commissioner of PT Huadian Bukit Asam Power
10. Changes to the Articles of Association
11. Approval of the Appointment of the Directors of PT Bukit Energi Investama
12. Approval of the Appointment of the Directors of PT Internasional Prima Coal
13. Determination of Bonus Calculation for Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salary/Honorarium as well as Benefits and Facilities for the 2023 Financial Year of PT Bukit Asam Tbk
14. Approval for the closure of PT Bukit Asam Metana Ombilin
15. Appointment of a Public Accountant at the PWC Public Accounting Firm to Audit the Financial Report of PT Bukit Asam Tbk for the 2023 Financial Year
16. Approval of the Ratification of the Appointment of the Directors of PT Bukit Asam Metana Ombilin
17. Approval of the Appointment of Commissioner of PT Batubara Bukit Kendi and President Commissioner of PT Bukit Energi Investama
18. Approval of the Free On Board Mother Vessel Sales Scheme at Other Ports
19. Approval of Cost Overrun Principles for the Sumsel-8 CFPP

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

Setiap tahun, Komite menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun termasuk *Key Performance Indicator* (KPI) Komite. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai piagam Komite dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan dengan mengevaluasi rencana program kerja tahunan serta KPI dari masing-masing Komite yang telah disepakati bersama dengan Dewan Komisaris beserta realisasinya.

Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil perbandingan realisasi dengan target dikalikan dengan bobot. Apabila realisasi tercapai di atas 100%, maka nilai/skor yang diberikan dapat melebihi bobot maksimal. Apabila realisasi KPI tercapai di bawah 100%, maka nilai akan diberikan secara proporsional terhadap bobot. Berdasarkan jumlah skor, dapat ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Skor 100% ≥ x > 95%, kriteria Sangat Baik.
2. Skor 95% ≥ x > 80%, kriteria Baik.
3. Skor 80% ≥ x > 65%, kriteria Cukup.
4. Skor 65% ≥ x > 50%, kriteria Kurang.
5. Skor ≤ 50%, kriteria Sangat Kurang.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian Anggota Komite terhadap KPI yang telah ditetapkan sebelum masuk tahun anggaran. Untuk penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris, dapat dilihat secara rinci pada bagian Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bab ini.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Performance Appraisal Procedures

Every year, the Committee submits an Annual Work Plan which contains the Committee's work program for one year including the Committee's Key Performance Indicators (KPI). KPI is a measurement assessment to measure the success of carrying out tasks in accordance with the Committee charter and applicable laws and regulations. The performance assessment procedure for Committees under the Board of Commissioners is carried out by evaluating the annual work program plans and KPIs of each Committee which have been mutually agreed with the Board of Commissioners and their realization.

Assessment Criteria

The assessment is carried out based on the results of a comparison of the realization with the target multiplied by the weight. If the realization is above 100%, the value/score given may exceed the maximum weight. If the KPI realization is below 100%, the value will be given proportional to the weight. Based on the total score, the following assessment criteria can be determined as:

1. Score 100% ≥ x > 95%, Very Good criteria.
2. Score 95% ≥ x > 80%, Good criteria.
3. Score 80% ≥ x > 65%, Average criteria.
4. Score 65% ≥ x > 50%, Poor criteria.
5. Score ≤ 50%, Very Poor criteria.

The Party Conducting the Performance Appraisal

The Performance Appraisal of the Board of Commissioners Committees is carried out by the Board of Commissioners based on the achievements of the Committee Members to the KPIs that have been determined before the start of the fiscal year. The assessment of the Committees under the Board of Commissioners, can be seen in detail in the Audit Committee and Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee sections in this chapter.

Direksi
The Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS, dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi memiliki Pedoman Panduan Kerja Direksi (*Charter of Board Directors*), yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi. Panduan Kerja Direksi menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang di dalamnya memuat ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, hal-hal yang ditetapkan dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS), serta praktik-praktik terbaik GCG.

Secara berkala Panduan Kerja Direksi dievaluasi dan disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan kebutuhan Perusahaan.

Sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh MIND ID selaku *holding* PTBA, di tahun 2023, PTBA melakukan penyelarasan kebijakan internal PTBA. Salah satu yang menjadi penyelarasan yaitu perubahan Panduan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Panduan Kerja Direksi yang sebelumnya menjadi satu dengan Panduan Kerja Dewan Komisaris, di tahun 2023 panduan tersebut dipisahkan menjadi suatu kebijakan sendiri menjadi Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi telah disahkan oleh Dewan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (*Charter to Board of Directors*) PT Bukit Asam Tbk. Secara garis besar Pedoman Kerja Direksi PTBA dengan mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Keanggotaan Direksi;
3. Program Pengenalan, Remunerasi, dan Pelatihan;
4. Tugas dan Kewajiban;
5. Wewenang, Pembagian Tugas, dan Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan;
6. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan;
7. Rapat Direksi;

The Board of Directors is a Company Organ with authority and full responsibility for managing the Company for the interests and objectives of the Company as well as representing the Company both inside and outside the court. The appointment of Directors is carried out by the GMS, from candidates proposed by Series A Dwiwarna Shareholders or their proxies. The Board of Directors is obliged to manage the Company in accordance with its authority and responsibility, as regulated in the Articles of Association and the provisions of the laws and regulations, which is carried out in good faith and full responsibility for the greatest interests of the Company, while still paying attention to the balance of interests of all parties related to the activities Company.

Board of Directors' Work Guidelines/Charter

In carrying out its duties and functions, the Board of Directors has a Board of Directors Work Guidelines (Charter of Board Directors), which is determined and signed by the Board of Directors. The Directors' Work Guide is a reference for the Directors to carry out their duties and functions, which contains provisions that refer to the principles of corporate law, applicable laws and regulations, the Articles of Association, others stipulated at the General Meeting of Shareholders (GMS), and at the GCG best practices.

The Directors' Work Guide is periodically evaluated and refined by considering the provisions of applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Company's needs.

In line with the policies set by MIND ID as PTBA's holding company, in 2023, PTBA aligned its internal policies. One of the areas of alignment is the change to the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guide. The Directors' Work Guidelines were previously integrated with the Board of Commissioners' Work Guidelines, however, in 2023 these guidelines were separated into their own policy to become the Directors' Work Guidelines. It has been ratified by the Board of Directors based on the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PTBA with guideline such as:

1. General Provisions;
2. Membership of the Board of Directors;
3. Introduction, Remuneration, and Training Program;
4. Duties and Obligations;
5. Authority, Division of Duties, and Decision-Making Principles;
6. Implementation of Company Management Duties;
7. Board of Directors Meeting;

8. Hubungan Antara Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Evaluasi Kinerja Direksi;
10. Fungsi di bawah Direksi yang Wajib Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Persetujuan Tindakan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ketentuan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri, maka:

1. Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan, dengan tembusan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B terbanyak, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Direksi;
3. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya efektif.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan,

8. Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners;
9. Evaluation of Directors' Performance;
10. Functions under the Board of Directors which must be formed based on statutory provisions;
11. Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners for Approval of Actions.

Term of Office

The Board of Directors' term of office starts from the closing of the GMS or the date determined by the GMS appointing them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment, provided that the term must not exceed 5 (five) years, but still considering the statutory regulations in the capital markets sector. These term of office provisions do not reduce the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office ends. Members of the Board of Directors can be reappointed by the GMS for one term of office.

Mechanism for Resignation and Dismissal of Directors

The term of office of a member of the Board of Directors ends if:
1. Resign;
2. Passed away;
3. The end of the term of office;
4. Dismissed based on GMS decision;
5. Declared bankrupt by the Commercial Court which has permanent legal force or placed under guardianship based on a Court decision; or
6. No longer meets the requirements as a member of the Board of Directors based on applicable laws and regulations.

In the event that a member of the Board of Directors resigns, then:
1. The member of the Board of Directors concerned must submit a written request for resignation regarding this intention to the Company, with a copy to the Series A Dwiwarna shareholder and the largest Series B shareholder, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors at least 30 (thirty) days before the date of resignation;
2. No later than 90 (ninety) days after receiving the letter of resignation, the Company is obliged to hold a GMS to decide on the request for resignation of the Member of the Board of Directors;
3. Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable from the time of their appointment until the effective date of their resignation.

Members of the Board of Directors may at any time be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons if they act contrary to the Articles of Association or there are indications of taking actions that are detrimental to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company, considering the

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi, dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
2. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara, atau lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara;
3. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara;
4. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
5. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk membela diri;
6. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila dinyatakan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS;
7. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau dinyatakan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
8. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
9. Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
10. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat/publik dan menyampaikan kepada OJK mengenai keputusan pemberhentian sementara serta hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Susunan, Jumlah, Komposisi, dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2023

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi, jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, yakni sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)

following provisions:

1. The temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned along with the reason, with a copy from the Board of Directors, no later than 2 (two) working days after the provision of the temporary dismissal;
2. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court, which comes effective from the decision to temporarily dismiss them by the Board of Commissioners until a GMS decision confirming or canceling temporary dismissal, or the expiry of the period for holding the GMS to revoke or confirm the decision to temporarily dismiss,
3. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners must convene a GMS to revoke or confirm the decision on the temporary dismissal;
4. If the time period for holding the GMS has expired or the GMS is unable to make a decision, the temporary dismissal will be cancelled;
5. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are given the opportunity to defend themselves;
6. Temporary suspension cannot be extended or re-established for the same reason, it it is exceeding the GMS period;
7. If the GMS cancels the temporary dismissal or it is declared that the period for holding the GMS has expired, then the relevant member of the Board of Directors is obliged to carry out his/her duties again;
8. If the GMS confirms the decision to temporarily dismissal, the member of the Board of Directors concerned will be permanently dismissed;
9. If the temporarily dismissed member of the Board of Directors does not attend the GMS after being summoned in writing, then the temporarily dismissed member of the Board of Directors is deemed not to have exercised his right to defend themselves at the GMS and has accepted the GMS decision;
10. The Company is obliged to disclose information to the public/public and submit to the OJK regarding the decision on temporary dismissal as well as the results of holding a GMS to revoke or strengthen the decision on temporary dismissal or information regarding the cancellation of the temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the failure to hold the GMS until the expiry of the time period, no later than no later than 2 (two) working days after the event occurs.

Position, Number, Composition, and Basis for Board of Directors Appointment in 2023

Based on the Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines, the number of members of the Board of Directors is adjusted to the needs of the Company,

orang, diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Susunan, jumlah, dan komposisi Direksi tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yakni berjumlah 5 (lima). Adapun susunan Direksi tahun 2023, adalah sebagai berikut:

namely consisting of at least 2 (two) people, of whom are appointed as President Director.

The position, number, and composition of the Board of Directors in 2023 did not change from the previous year, namely 5 (five). The composition of the Board of Directors in 2023 is as follows:

Tabel Susunan Anggota Direksi Tahun 2023
Table of Directors Composition in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Ketetapan Legal basis	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Keputusan RUPS Tahunan 5 April 2021 Resolution of Annual GMS on April 5, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operations and Production Director	Keputusan RUPS Tahunan 5 April 2021 Resolution of Annual GMS on April 5, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	Keputusan RUPS Luar Biasa 23 Desember 2021 Resolution of Extraordinary GMS on December 23, 2021	2021 – 2026	Pertama First

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS termasuk kewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam pelaksanaan tugas Direksi, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
c. Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan itikad baik , penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
d. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
e. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Duties and Responsibilities

The Board of Directors must carry out all actions related to and being responsible for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company, while still paying attention to and complying with the provisions and representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with the limitations as stated in stipulated in statutory regulations, Articles of Association, and/or GMS decisions including the obligation to hold Annual GMS and other GMS as regulated in statutory regulations and Articles of Association.

In carrying out the duties of the Board of Directors, they must consider these principles:

a. The Board of Directors is obliged to devote full energy, thought, attention and dedication to the duties, obligations, and achievement of the Company's objectives.
b. Members of the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and statutory regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness.
c. Each member of the Board of Directors is obliged to carry out their duties and responsibilities for the interests and business of the Company in good faith, with full responsibility and prudence, by complying with applicable laws.
d. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for losses to the Company caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
e. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove that the losses were not due to their fault or negligence, have carried out management in good faith, full responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company, and have no conflict

Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

of interest directly or indirectly for management actions that result in losses, and have taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dalam melaksanakan fungsi pengurusan Perusahaan, diatur sebagai berikut:

The duties, responsibilities and authority of the Board of Directors in carrying out the Company's management functions are regulated as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan di bidang badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan ketentuan persetujuan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
c. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, yang terdiri dari catatan (yaitu neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan), bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Perusahaan.
e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.
f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
g. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
h. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi urusan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada triwulanan dan tahunan terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
j. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In accordance with the provisions of the Regulations in the State-Owned Enterprises and the Company's Articles of Association, in carrying out their duties, the Board of Directors is obliged to:

a. Endeavor and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with its aims and objectives and business activities.
b. Prepare the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Work Plan and Budget and other work plans, as well as amendments to be submitted to the Board of Commissioners and obtain approval from the Board of Commissioners, provided that the approval of the Board of Commissioners is determined after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholders.
c. Create a Shareholders List, Special List, minutes of GMS, and minutes of Directors' meetings.
d. Prepare an Annual Report, containing, among other things, Financial Reports, as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as intended in the Law on Company Documents, which consist of notes (annual balance sheets, annual profit and loss calculations, accounts, daily transaction journals, or any writing containing information regarding rights and obligations as well as matters relating to the Company's business activities), evidence of bookkeeping, and supporting financial administration data, which is proof of the existence of rights and obligations as well as the Company's business activities.
e. Prepare Financial Reports based on Financial Accounting Standards and submit them to public accountants for audit.
f. Submit the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners no later than 5 (five) months after the Company's financial year ends to the GMS for approval and ratification.
g. Provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
h. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report approved by the GMS to the Minister in charge of legal affairs in accordance with the provisions of statutory regulations.
i. Prepare other reports required by statutory regulations, including but not limited to quarterly and annual reports related to the implementation of the Social and Environmental Responsibility Program
j. Maintain and store at the Company's place of residence the Register of Shareholders, Special Register, minutes of the

risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perseroan lainnya.

k. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
n. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, (yang dilakukan melalui atau dikoordinasikan oleh kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) dengan memperhatikan peraturan perundang undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku.
p. Membentuk unit Sekretaris Perusahaan.
q. Membentuk unit SPI.
r. Membentuk unit Manajemen Risiko.
s. Membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi.
t. Memiliki fungsi tata kelola terintegrasi.
u. Membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
v. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
w. Memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka hubungan dengan Dewan Komisaris, maka Direksi memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI kepada Dewan Komisaris.
b. Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris kajian risiko untuk setiap aksi korporasi yang dilakukan dan pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan.
c. Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris pelaksanaan dan implementasi Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan.
d. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan atas sistem teknologi dan informasi yang digunakan oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

GMS, minutes of meetings of the Board of Commissioners and minutes of meetings of the Board of Directors, Annual Report, and financial documents of the Company, and other Company documents.
k. Organize and maintain the Company's bookkeeping and administration in accordance with the applicable regulations.
l. Prepare an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and internal control principles, especially the functions of management, recording, storage and supervision.
m. Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies by considering the provisions of laws and regulations, especially regulations in the market sector. Capital.
n. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties.
o. Provide explanations regarding all matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and/or Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies of Series A Dwiwarna Shareholders, (which are carried out through or coordinated by the proxies of Series A Dwiwarna Shareholders) taking into account the laws and regulations, especially regulations in the Capital Market.

p. Establish a Corporate Secretary unit.
q. Establish an Internal Audit unit.
r. Establish a Risk Management unit.
s. Establish an Information Technology Steering Committee.
t. Has an integrated governance function.
u. Establish a Social and Environmental Responsibility Committee.
v. Other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.
w. Fulfill and carry out actions in order to fulfill the rights of Series A Dwiwarna Shareholders or their Proxies.

Besides the obligations as referred to in the Company's Articles of Association, in the context of relations with the Board of Commissioners, the Board of Directors has the following obligations:

a. Obliged to submit a report on the implementation of the inspection by Internal Audit to the Board of Commissioners.
b. Obliged to submit to the Board of Commissioners the risk assessment for every corporate action carried out and the implementation of risk management in the Company.
c. Obliged to report to the Board of Commissioners the implementation of Integrated Governance in the Company.
d. Obliged to submit reports on the technology and information systems used by the Company to the Board of Commissioners.

e. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan.
f. Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja Anak Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan.
g. Direksi berkewajiban menyampaikan pelaksanaan perjanjian dan pemenuhan hak-hak pihak ketiga atas perjanjian.

e. Obliged to submit reports on the procurement of goods and services carried out by the Company.
f. The Board of Directors as Shareholders of Subsidiaries are obliged to submit Subsidiary performance reports every 3 (three) months.
g. The Board of Directors is obliged to convey the implementation of the agreement and fulfill the rights of third parties regarding the agreement.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Perusahaan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan.
b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi atau kepada seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus untuk itu termasuk pegawai Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain.
c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pegawai Perusahaan, termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
f. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
g. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Authority of the Board of Directors

In carrying out their duties, the Board of Directors have the following authorities:

a. Establish appropriate policies in the management of the Company.
b. Regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors or to a person or several people specially appointed for this purpose including Company employees either individually or jointly and/or other bodies.
c. Regulate provisions regarding Company employees including determining wages, pensions or old age security, and other income for Company employees based on applicable laws and regulations.
d. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
e. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Audit Unit with approval from the Board of Commissioners.
f. Write off bad debts according to the provisions in the Articles of Association and report to the Board of Commissioners to be later reported in the Annual Report.
g. No further collection of receivables for interest, fines, fees, and other receivables beyond the principal amount carried out in the context of restructuring and/or settlement of receivables as well as other acts in the context of settlement of the Company's receivables with the obligation to report to the Board of Commissioners whose terms and reporting procedures are determined by the Board Commissioner.
h. Carrying out all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as regulated in the regulations, Articles of Association, and/or GMS Decisions.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, maka dilakukan pembagian tugas Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.242/0100/2021 tentang Tugas,

Division of Duties Between Directors

In order to support the implementation of the duties of the Board of Directors, their duties are divided according to their respective functions based on the Decree of the Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 242/0100/2021 concerning the

Wewenang, Tanggung Jawab Direksi PT Bukit Asam Tbk dan dan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 115/0100/2023 tentang Pembinaan Anak dan Afiliasi Serta Badan Hukum Terafiliasi PT Bukit Asam Tbk, dengan uraian berikut:

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Directors of PT Bukit Asam Tbk and the Decree of the Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 115/0100/2023 concerning Subsidiaries Development and Affiliates and Affiliated Legal Entities PT Bukit Asam Tbk, with the following description:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Bidang Tugas** Scope of work
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Direksi; 2. Bertugas untuk mengkoordinasikan anggota Direksi lainnya, agar seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis, dan kebijakan yang ditetapkan; 3. Bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif internal Perusahaan dan memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan; 4. Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh sehingga menjamin terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); 5. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; 6. Menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP; 7. Menyiapkan kebijakan umum sistem pengendalian intern dan mengambil langkah- langkah yang diperlukan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 8. Bertanggung jawab di bidang keterbukaan informasi kepada publik yang terkait dengan fungsi Sekretaris Perusahaan dan Administrasi Korporat, Audit Internal, Sistem Manajemen Perusahaan dan *Good Corporate Governance*; 9. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan; 10. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; 11. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi, dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 12. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Tasked with coordinating other members of the Board of Directors, to manage all policies run in line with the vision, mission, strategic targets, and established policies; 3. Responsible for aligning all internal initiatives of the Company and ensuring improvement in the Company's competitive capabilities; 4. Directing, developing, and establishing a comprehensive Company management strategy to ensure the creation of good corporate governance; 5. Prepare the Company's Long-Term Plan, Company Annual Work Plan and Budget, and other work plans and amendments to be submitted to the Board of Commissioners and obtain approval from the Board of Commissioners; 6. Prepare WP&B which is an annual elaboration of RJPP; 7. Prepare general policies for the internal control system and take the necessary steps based on audit results reports prepared by the Internal Audit Unit (SPI); 8. Responsible for information disclosure to the public related to the functions of Corporate Secretary and Corporate Administration, Internal Audit, Company Management System, and Good Corporate Governance; 9. Establish appropriate policies in the Company's management; 10. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in line with its target and objectives and business activities; 11. Provide guidance and be responsible for work units under his authority as stipulated in the Board of Directors Decree, and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under his authority or activities that fall under his authority based on Separate Board of Directors decision; 12. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Direksi; 2. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional di bidang keuangan, anggaran, akuntansi, sekaligus memastikan ketersedian dana bagi pengembangan Perusahaan; 3. Bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai Perusahaan (*corporate value*) melalui pengelolaan dana; 4. Melakukan pembinaan pendanaan dan keuangan terhadap Anak Perusahaan; 5. Memastikan ketersedian dan berfungsinya sistem informasi Perusahaan; 6. Memastikan fungsi Manajemen Risiko Perusahaan berjalan efektif; 7. Bertanggung jawab atas evaluasi kinerja Anak Perusahaan; 8. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini, dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 9. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 10. Bertanggung jawab untuk melakukan Pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA yang memiliki bidang usaha dan/atau kegiatan terkait investasi/portofolio murni (*absolute investment company*) yang kegiatannya hanya sebatas pada pengelolaan investasi anak perusahaan (baik *direct* ataupun *indirect subsidiary*) serta badan hukum terafiliasi PTBA sebagai berikut: a. PT Bukit Multi Investama; b. Dana Pensiun Bukit Asam; c. Yayasan Bukit Asam; d. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian hari yang memiliki bidang usaha investasi/portofolio murni (*absolute investment company*), badan hukum terafiliasi lainnya dimana PTBA sebagai pendiri/*founder* (apabila dibutuhkan pembinaan), serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi bertanggung jawab Pembinaan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. 1. Has the authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' decisions; 2. Responsible for coordinating, controlling, and evaluating the implementation of operational tasks in the fields of finance, budgeting, accounting, as well as ensuring the availability of funds for the Company's development; 3. Responsible for increasing corporate value through fund management; 4. Provide funding and financial guidance to Subsidiaries; 5. Ensure the availability and function of the Company's information system; 6. Ensure that the Company's Risk Management function runs effectively; 7. Responsible for evaluating the performance of Subsidiaries; 8. Provide guidance and be responsible for work units under her authority as stipulated in this Board of Directors Decree, and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under her authority or engagements that fall under her authority based on a separate Board of Directors Decision; 9. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association. 10. Responsible for providing guidance to PTBA Subsidiaries and Affiliates who have business fields and/or activities related to investments/pure portfolios (absolute investment companies) whose activities are only limited to manage investments of subsidiary companies (either direct or indirect subsidiaries) as well as PTBA affiliated legal entities as follows: a. PT Bukit Multi Investama; b. Bukit Asam Pension Fund; c. Bukit Asam Foundation; d. PTBA's subsidiaries and affiliates formed, established, and/or originating from corporate actions at a later date which has a pure investment/portfolio business sector (absolute investment company), other affiliated legal entities where PTBA is the founder (if guidance is required), and other PTBA subsidiaries and affiliates determined by the PTBA Board of Directors will later become the responsibility of the Director of Finance and Risk Management.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta Keputusan Direksi; 2. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang penambangan batu bara, teknik, keselamatan pertambangan dan K3L, serta mengembangkan program efisiensi proses penambangan maupun produksi secara berkelanjutan, serta memastikan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan *good mining practice*; 3. Melakukan pembinaan unit-unit operasional yang terdiri dari Unit Pertambangan Tanjung Enim, Unit Pertambangan Ombilin, termasuk melakukan pembinaan terhadap fungsi penunjang (fungsi pergudangan, keuangan, administrasi kepegawaian, pengadaan aset tanah dan briket), serta unit-unit pertambangan yang akan dibentuk di kemudian hari; 4. Bertanggung jawab untuk mengembangkan program efisiensi proses penambangan maupun produksi secara berkelanjutan; 5. Melakukan pembinaan terhadap unit-unit pelabuhan dan/atau dermaga meliputi Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan, dan Dermaga Teluk Bayur, serta unit-unit pelabuhan/dermaga yang akan dibentuk kemudian hari; 6. Bertanggung jawab terhadap bidang layanan umum yang berkaitan dengan penambangan; 7. bertanggungjawab untuk melakukan Pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA yang telah memasuki tahap operasi dan produksi dan Anak Afiliasi PTBA yang merupakan penunjang operasi dan produksi (termasuk *investment company* yang memiliki kegiatan operasional) sebagai berikut: a. PT Internasional Prima Coal; b. PT Satria Bahana Sarana; c. PT Bukit Pembangkit Innovative; d. PT Bukit Energi Investama; e. PT Bukit Energi Service Terpadu; f. PT Bumi Sawindo Permai; g. PT Nasional Hijau Lestari; h. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian yang telah memasuki tahap operasi dan produksi dan/atau memiliki kegiatan usaha penunjang operasi dan produksi (termasuk *investment company* yang memiliki kegiatan operasional), serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi tanggung jawab Pembinaan Direktur Operasi dan Produksi. 8. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 9. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Coordinate, control, and evaluate the implementation of operational tasks in the fields of coal mining, engineering, mining safety, and HSE, as well as developing sustainable mining and production process efficiency programs and also ensuring mining activities complying with the provisions of good mining practice; 3. Carry out development of operational units at Tanjung Enim Mining Unit and Ombilin Mining Unit, including providing guidance on supporting functions (warehousing, finance, personnel administration, procurement of land assets and briquettes), as well as mining units that will be established in the future; 4. Responsible for developing sustainable mining and production process efficiency programs; 5. Provide guidance to port and/or barging port units including Kertapati Barging Port, Tarahan Port, and Teluk Bayur Barging Port, as well as upcoming port/barging port in the future; 6. Responsible for public services related to mining; 7. Responsible for providing guidance to PTBA's subsidiaries and affiliates which have entered the operations and production stage and PTBA's affiliated subsidiaries which support operations and production (including investment companies which have operational activities) as follows: a. PT Internasional Prima Coal; b. PT Satria Bahana Sarana; c. PT Bukit Pembangkit Innovative; d. PT Bukit Energi Investama; e. PT Bukit Energi Service Terpadu; f. PT Bumi Sawindo Permai; g. PT Nasional Hijau Lestari; h. Subsidiaries and Affiliates of PTBA which were formed, established, and/or originated from corporate actions in the future which have entered the operation and production stage and/or have business activities supporting operations and production (including investment companies which have operational activities), as well as Subsidiaries and Affiliates Other PTBA determined by the PTBA Board of Directors will later become the responsibility of the Director of Operations and Production. 8. Carry out guidance and be responsible for the work units under his authority as stipulated in this Board of Directors Decree and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of the work units under him or engagements that fall under his authority based on Separate Board of Directors decision; 9. 9. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the Laws and Regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Direksi; 2. Bertanggung jawab atas proses penerimaan, pembinaan, dan pembangunan serta strategi pengelolaan SDM agar memiliki daya saing dan unggul; 3. Bertanggung jawab atas bidang hukum, perizinan, dan memastikan Perusahaan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bertanggung jawab di bidang aset Perusahaan diantaranya tanah dan bangunan (selain aset Perusahaan yang merupakan kewenangan dari Direktur Pengembangan Usaha), layanan umum (khusus perumahan dan perkantoran) dan perawatan serta utilitas, dan pembangunan sipil; 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Melakukan monitoring atas pembinaan dan pengembangan SDM pada anak Perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan; 7. Bertanggung jawab atas bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi; 8. Bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA sebagai berikut: a. PT Bukit Asam Medika; b. PT Bukit Multi Properti; c. PT Batubara Bukit Kendi; d. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian hari yang berkaitan dengan pengelolaan dan/atau pegembangan *human capital, human resources*, pendayagunaan/optimalisasi aset PTBA/Anak dan Afiliasi PTBA, dan perumahsakitan, serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi tanggungjawab Pembinaan Direktur Sumber Daya Manusia. 9. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri. 10. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Responsible for the recruitment, coaching, and development process as well as HC management strategies to bring competitiveness and excellence in the Company's employees; 3. Responsible for legal issues, licensing, and ensuring the Company complies with the provisions of applicable laws and regulations; 4. Responsible for the Company's assets including land and buildings (aside from Company assets which are the authority of the Director of Business Development), public services (specifically housing and offices) and maintenance and utilities, and civil construction; 5. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations; 6. Monitoring the guidance and development of human capital in subsidiaries, thereby providing added value to the Company; 7. Responsible for the procurement of goods and services in line with the authority determined by the Directors' Decree; 8. Responsible for the development of PTBA Subsidiaries and Affiliates as follows: a. PT Bukit Asam Medika; b. PT Bukit Multi Properti; c. PT Batubara Bukit Kendi; d. PTBA Subsidiaries and Affiliates formed, established and/or originating from corporate actions in the future related to the management and/or development of human capital, human resources, utilization/optimization of PTBA/Subsidiary and PTBA Affiliate assets, and hospitals, as well as Subsidiaries and other PTBA Affiliates determined by the PTBA Board of Directors will later become the responsibility of the Human Resources Director. 9. Carry out guidance and be responsible for work units under his authority as stipulated in this Board of Directors Decree and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under his authority or engagements that fall under his authority based on Separate decision of the Board of Directors. 10. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the Laws and Regulations and the Company's Articles of Association.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of work
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Direksi; 2. Bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan batu bara yang berada di kawasan area kelolaan Perusahaan; 3. Bertanggung jawab terhadap fungsi strategi korporasi Perusahaan; 4. Melakukan kajian dan upaya pemberian nilai tambah sumber daya cadangan batu bara di area kelolaan Perusahaan; 5. Melakukan kajian dan merealisasikan rencana pengembangan usaha dengan dukungan inovasi SDM dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, ekonomis dan akuntabel; 6. Menginkubasi unit usaha baru yang terbentuk di bidang penambangan, energi, infrastruktur dan pembangkit listrik; 7. Bertanggung jawab terhadap pembangunan/proyek strategis infrastruktur perseroan dan pengembangan aset Perusahaan yang bersifat strategis; 8. Bertanggung jawab atas bidang komersial yang mencangkup pemasaran, penjualan dan distribusi, beserta dengan pengembangan dan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan bagi Perusahaan; 9. Bertanggung jawab atas pengembangan dan perluasan pemasaran produk Perusahaan; 10. Melakukan Pembinaan terhadap Anak dan Afiliasi PTBA yang masih dalam tahap pra-produksi, dalam proses pengembangan (*development*), inkubasi, dan *dormant,* serta Anak dan Afiliasi yang bergerak di bidang rantai pasok (*supply chain*) dan logistik (termasuk diantaranya yang memiliki kegiatan usaha jasa kepelabuhan/ dermaga, angkutan perairan, angkutan darat, dan angkutan perkeretaapian) sebagai berikut: a. PT Bukit Asam Prima; b. PT Bukit Prima Bahari; c. PT Pelabuhan Bukit Prima; d. PT Penajam International Terminal; e. PT Huadian Bukit Asam Power; f. PT Bukit Asam Banko; g. PT Bukit Asam Pasific Railways; h. PT Bukit Asam Metana Enim; i. PT Bukit Asam Metana Ombilin; j. Anak dan Afiliasi PTBA yang dibentuk, didirikan dan/atau berasal dari aksi korporasi di kemudian hari, namun masih tahap pra-produksi, dalam proses pengembangan (*development*), inkubasi, dan *dormant,* serta Anak dan Afiliasi yang bergerak di bidang rantai pasok (*supply chain*) dan logistik (termasuk diantaranya yang memiliki kegiatan usaha jasa kepelabuhan/dermaga, angkutan perairan, angkutan darat, dan angkutan perkeretaapian) serta Anak dan Afiliasi PTBA lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PTBA dikemudian hari menjadi tanggungjawab Pembinaan Direktur Pengembangan Usaha. 11. Anak dan cucu Perusahaan lainnya yang didirikan kemudian atau menjadi anak atau cucu Perusahaan dari aksi korporasi Perusahaan di kemudian hari; 12. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan Keputusan Direksi tersendiri; 13. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. 1. Has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company inside and outside the court in line with the provisions of the Company's Articles of Association and Directors' Decisions; 2. Responsible for developing potential coal reserve resources in the Company's managed areas; 3. Responsible for the Company's corporate strategy function; 4. Conduct studies and efforts to provide added value to coal reserve resources in the Company's managed areas; 5. Conduct studies and realize business development plans with the support of HR innovation by utilizing appropriate, economical, and accountable technology; 6. Incubate new business units formed in the mining, energy, infrastructure, and power generation sectors; 7. Responsible for the development/strategic projects of the Company's infrastructure and the development of strategic company assets; 8. Responsible for the commercial sector which includes marketing, sales and distribution, along with the development and sustainable growth of income for the Company; 9. Responsible for the development and expansion of marketing of the Company's products; 10. Provide guidance to PTBA Subsidiaries and Affiliates in the pre-production stage, in the development, incubation and dormant processes, as well as Subsidiaries and Affiliates who are engaged in supply chain and logistics (including those with port/barging port service business activities, water transportation, land transportation, and railway transportation) are as follows: a. PT Bukit Asam Prima; b. PT Bukit Prima Bahari; c. PT Pelabuhan Bukit Prima; d. PT Penajam International Terminal; e. PT Huadian Bukit Asam Power; f. PT Bukit Asam Banko; g. PT Bukit Asam Pacific Railways; h. PT Bukit Asam Metana Enim; i. PT Bukit Asam Metana Ombilin; j. PTBA Subsidiaries and Affiliates which were formed, established and/or originate from corporate actions in the future, but are still in the pre-production stage, in the development, incubation and dormant process, as well as Subsidiaries and Affiliates which operate in the supply chain sector (supply chain) and logistics (including those with port/barging port service business activities, water transportation, land transportation, and rail transportation) as well as other PTBA subsidiaries and affiliates determined by the PTBA Board of Directors in the future to be the responsibility of the Director of Business Development. 11. Subsidiaries established in the future under PTBA from corporate actions of the Company at a later date; 12. Carry out guidance and be responsible for work units under his authority as stipulated in this Board of Directors Decree and have the authority to represent and sign all engagements and documents relating to the functions and duties of work units under his authority or engagements under his authority based on Separate Board of Directors decision; 13. Carry out other duties and responsibilities as regulated in the Laws and Regulations and the Company's Articles of Association.

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasa, dan RUPS

Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya, atau RUPS atau RUPS, untuk perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-581/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 hal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("*Threshold*"), dan Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. SKK-19/MBU/03/2023 terkait kuasa pelaksanaan hak seri A Dwiwarna pada PT Bukit Asam Tbk beserta dengan perubahan-perubahannya yang meliputi pada aspek dan tingkat persetujuan sebagai berikut:

a. Level Persetujuan Berdasarkan Threshold Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris & Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris, dan Direksi)

Board of Directors' Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners, Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies, and the GMS

The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners, Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies, or the GMS, for actions classified in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Letter from the Minister of State-Owned Enterprises No. S-581/MBU/09/2018 dated September 6, 2018, regarding Approval of Proposed Limits and/or Criteria for the Authority of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk ("Threshold"), and Special Power of Attorney from the Minister of State-Owned Enterprises to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. SKK-19/MBU/03/2023 regarding the power to implement Dwiwarna series A rights at PT Bukit Asam Tbk along with changes including the following aspects and levels of approval:

a. Approval Level Based on Company Threshold (GMS, Board of Commissioners & Series A Dwiwarna, Board of Commissioners and Directors)

No	Tindakan Action	RUPS GMS	Dewan Komisaris & Seri A/ Kuasanya Board of Commissioner & Serie A/Proxies	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan, kecuali yang dicatat sebagai persediaan Releasing/transferring and/or pledging Company assets, except those recorded as inventory	>50% total kekayaan bersih Perseroan *audited* terakhir >50% of the Company's total net assets from the last audit	≥100 Miliar* ≥100 billion*	≥75 Miliar* ≥75 Billion*	<75 Miliar* <75 Billion*
2	Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk KSO, KSU, kerjasama lisensi, BGS, BSG, BGM, dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama Establish cooperation with business entities or other parties, in the form of KSO, KSU, licensing cooperation, BGS, BSG, BGM, and other agreements of the same nature		≥100 Miliar atau jangka waktu >10 tahun-20 tahun ≥100 Billion or in term >10 years-20 years	≥75 Miliar atau jangka waktu >5 tahun-10 tahun ≥75 Billion or in term>5 years-10 years	≥75 Miliar atau jangka waktu <5 tahun ≥75 Billion or in term of <5 years
3	Melakukan penyertaan, melepskan penyertaan, serta perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain Make an investment, release an investment, and changes in capital structure in other companies		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
4	Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Establishing subsidiaries and/or joint ventures		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
5	Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran Anak Perusahaan dan *Joint Venture*, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lain melalui Anak Perusahaan Conducting mergers, consolidations, takeovers, separations, dissolution of Subsidiaries and Joint Ventures, including capital participation in other companies through Subsidiaries		≥75 Miliar ≥75 Billion	≥50 Miliar ≥50 Billion	<50 Miliar <50 Billion
6	Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg/avalist*) Binding the Company as guarantor (borg/avalist)		≥300 Miliar ≥300 Billion	≥150 Miliar ≥150 Billion	<150 Miliar <150 Billion
7	Menerima pinjaman jangka panjang/menengah dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang bersifat operasional Receive long/medium term loans and give operational medium/long term loans		≥1 Triliun ≥1 Trillion	≥750 Miliar ≥750 Billion	<750 Miliar <750 Billion
8	Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada Anak Perusahaan Give non-operational short/medium/long term loans, except for loans to Subsidiaries		≥300 Miliar ≥300 Billion	≥150 Miliar ≥150 Billion	<150 Miliar <150 Billion
9	Menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati Erase bad debts and dead inventory		≥100 Miliar ≥100 Billion	≥75 Miliar ≥75 Billion	<75 Miliar <75 Billion

No	Tindakan Action	RUPS GMS	Dewan Komisaris & Seri A/ Kuasanya Board of Commissioner & Serie A/Proxies	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
10	Mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Propose Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries who make significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the Board of Commissioners		Dirut dan Komut untuk seluruh Anak Perusahaan President Director and President Commissioner for all Subsidiaries		
			Seluruh Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang total Asetnya ≥50% dari aset induk dan/atau *revenue* anak ≥50% dari *revenue* induk (berdasarkan audit terakhir) All Directors and Commissioners of Subsidiaries whose total assets are ≥50% of all Directors and Commissioners of Subsidiaries whose total assets are ≥50% of parent assets and/or subsidiary revenue ≥50% of parent revenue (based on the last audit)	Seluruh Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan (Kecuali Direktur Utama dan Komisaris Utama) yang total Asetnya <50% dari aset induk dan/atau *revenue* anak <50% dari revenue induk (berdasarkan *audit* terakhir) All Directors and Commissioners of Subsidiaries (Except the President Director and President Commissioner) whose total assets are <50% of the parent's assets and/or subsidiary revenue <50% of the parent's revenue (based on the last audit)	

*nilai yang tertera hanya berlaku jika nilai tersebut <50% kekayaan bersih perusahaan (Pasal 102 ayat (1) UU 40/2007).
*the value stated is only valid if the value is <50% of the company's net assets (Article 102 paragraph (1) Law 40/2007)

b. Level Persetujuan di Luar *Threshold*

1. Tindakan-tindakan ini, merupakan tindakan Direksi Perusahaan yang tidak diatur dalam *Threshold*, namun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, SKK MIND, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk di bidang pasar modal), perlu mendapatkan persetujuan korporasi.
2. Tindakan-tindakan sebagaimana huruf b.1) di atas diantaranya:
   a. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
   b. Pengangkatan pemberhentian kepala/VP Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit) yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
   c. Persetujuan penetapan dan/atau perubahan *Charter* SPI;
   d. Perubahan logo Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan;
   e. Penetapan/perubahan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi Perusahaan, yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya;
   f. Persetujuan dan termasuk perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya;
   g. Persetujuan dan termasuk perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya;

b. Approval Level Beyond Threshold

1. These are actions of the Company's Board of Directors which are not regulated in the Threshold, but based on the provisions of the Company's Articles of Association, SKK MIND, and the provisions of applicable laws and regulations (including in the capital markets sector), that require corporate approval.
2. Actions as stated in letter b.1) include:
   a. Appointment and dismissal of the Corporate Secretary which requires approval from the Company's Board of Commissioners;
   b. Appointment and dismissal of the head/VP of the Internal Audit Unit which requires approval from the Company's Board of Commissioners;
   c. Approval of the determination and/or changes to the Internal Audit Charter;
   d. Changes to the Company's logo that require approval from the Company's Board of Commissioners;
   e. Determination/change to the organizational structure one level below the Company's Board of Directors, which requires approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
   f. Approval and including changes to the Company's Work Plan and Budget which require approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;
   g. Approval and including changes to the Company's Long-Term Plan which require approval from the Board of Commissioners and Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies;

h. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perusahaan di mana sebelum persetujuan RUPS perlu mendapatkan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna/kuasanya (apabila usulan berasal dari Direksi Perusahaan);
i. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham pada Perusahaan yang perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham seri A Dwiwarna;
j. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Perusahaan oleh perusahaan lain, di mana sebelum ditetapkan oleh RUPS wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna.;
k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Perusahaan, di mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A/kuasanya;
l. Tindakan untuk melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi, yang di mana berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham seri A/kuasanya;
m. Tindakan-tindakan transaksi yang bersifat material dengan mengacu level persetujuan sebagaimana a.1 s.d. a.9 di atas, kecuali berdasarkan peraturan di bidang pasar modal pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan (seperti pemegang saham utama/pengendali) tidak diperkenankan untuk memberikan persetujuan korporasi;
n. Tindakan Direksi yang merupakan transaksi afiliasi di bidang pasar modal yang membutuhkan persetujuan Organ UUPT, dengan ketentuan setiap pihak-pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperkenankan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

o. Tindakan Direksi yang merupakan transaksi benturan kepentingan, yang berdasarkan ketentuan peraturan di bidang pasar modal, diisyaratkan mendapatkan persetujuan korporasi seperti dari pemegang saham independen atau pihak lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan;

p. Tindakan Direksi yang masuk klasifikasi gabungan beberapa/semua transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan di bidang pasar modal yang diisyaratkan oleh peraturan di bidang pasar modal mendapatkan persetujuan korporasi;
q. Tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku wajib mendapatkan persetujuan organ Perusahaan.

h. Approval of changes to the Company's articles of association where prior to approval of the GMS it is necessary to obtain approval from the Dwiwarna series A shareholders/their proxies (if the proposal comes from the Company's Directors);
i. Approval of changes to the share ownership structure of the Company which requires approval from Dwiwarna series A shareholders;
j. Approval regarding the merger, consolidation, separation, dissolution, and takeover of the Company by another company, which before being determined by the GMS must obtain approval from the Dwiwarna series A shareholders;
k. Actions that have not been determined within the Company, which based on the provisions of the Company's Articles of Association are required to obtain approval from the Board of Commissioners and series A shareholders/their proxies;
l. Actions to release the right to a mining business permit for production operations or the right to a mining business permit in other legal forms that has entered the production operation stage, which based on the provisions of the Articles of Association requires approval from the Board of Commissioners and series A shareholders/their proxies;
m. Material transaction actions refer to the level of approval as a.1 to a.9 points above, except that based on regulations in the capital market sector, parties who have a conflict of interest (such as the main/controlling shareholder) are not allowed to give corporate approval;

n. Actions of the Board of Directors which constitute affiliated transactions in the capital markets sector which require approval from the Company Law (UUPT) Organs, provided that any parties who have a potential conflict of interest are not allowed to provide approval and/or ratification in accordance with the applicable provisions in the capital markets sector;
o. Actions by the Board of Directors which constitute transactions which constitute a conflict of interest transaction, which, based on the provisions of regulations in the capital market sector, are required to obtain corporate approval such as from independent shareholders or other parties as required by the regulations;
p. Directors' actions that are classified as a combination of several/all material transactions, affiliated transactions, and/or conflict of interest transactions in the capital markets sector as required by regulations in the capital markets sector obtain corporate approval;
q. Directors' actions based on the provisions of other applicable laws and regulations must obtain approval from the Company's organs.

Kebijakan Rangkap Jabatan

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi Perusahaan mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Usaha Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
2. Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Surat Edaran MIND ID No. SE-002/DIR/2020 tentang Petunjuk Pengusulan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan di Lingkungan MIND ID;
4. Surat Wakil Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 033/E.WADIRUT/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Perihal Penyampaian Arahan Terkait Keberlakuan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023;
5. Pedoman Kerja Direksi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar Perusahaan dan Pedoman Kerja Direksi, seorang anggota Direksi Perusahaan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
   a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
   d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
   e. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
   g. Jabatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap jabatan.
2. Rangkap jabatan di luar butir a di atas perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:
   a. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/perusahaan terafiliasi Perusahaan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
   b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan Perusahaan sepanjang memperoleh izin dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Concurrent Position Policy

The Company's Concurrent Position Policy for Directors refers to:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
2. Company Articles of Association;
3. MIND ID Circular No. SE-002/DIR/2020 concerning Instructions for Nominating Candidates for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Companies within MIND ID;
4. Letter from the Deputy Director of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) No. 033/E.WADIRUT/IV/2023 dated April 17, 2023, concerning the Submission of Directions Regarding the Implementation of SOEs Ministerial Regulation PER-3/MBU/03/2023;
5. Board of Directors' Work Guidelines.

In accordance with the provisions of applicable laws and regulations and Article 11 paragraph (28) of the Company's Articles of Association and Directors' Work Guidelines, a member of the Company's Board of Directors is prohibited from holding the following positions:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding multiple positions as stated below:
   a. Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
   b. Members of the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
   c. Other structural and functional positions in central and regional government agencies/institutions;
   d. Political party administrators, members of the DPR, DPD, provincial DPRD, and district/city DPRD and/or regional heads/deputy regional heads;
   e. Become a candidate/member of the DPR, DPD, provincial DPRD, and district/city DPRD or a candidate for regional head/deputy regional head;
   f. Other positions that may rise a conflict of interest; and/or
   g. Other positions in accordance with statutory provisions are prohibited from being held concurrently.
2. Multiple positions outside of point a above require approval from the Board of Commissioners, and can be carried out as long as they do not conflict with the Articles of Association and applicable laws.
3. Apart from holding concurrent positions as referred to in letter b, members of the Company's Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Members of the Board of Commissioners in other business entities, except:
   a. Board of Commissioners in Subsidiaries/affiliated companies of the Company, other than as President Commissioner; and
   b. Board of Commissioners in other business entities to represent/fight for the Company's interests as long as they obtain permission from the Minister of State-Owned Enterprises.

Berikut merupakan transparansi rangkap jabatan anggota Direksi Perusahaan per 31 Desember 2023.

Below is transparency of the concurrent positions of members of the Company's Board of Directors as of December 31, 2023.

Nama Name	PT Bukit Asam Tbk	Perusahaan /Intansi Lain Other Company/Institution	
	Jabatan Position	Perusahaan/ Badan Hukum Company/Insitution	Jabatan Position
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	PT Internasional Prima Coal	Komisaris Commissioner

Kepemilikan Saham Direksi

Informasi kepemilikan saham Direksi pada PT Bukit Asam Tbk dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Board of Directors' Shares Ownership

Information on the share ownership of the Board of Directors at PT Bukit Asam Tbk can be seen in the Company Share Ownership section by the Board of Commissioners and Directors in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Rapat Direksi

Kebijakan

Rapat Direksi diselenggarakan oleh Direksi, dan segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, baik yang dilakukan secara fisik maupun sirkuler dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dan keputusan yang diambil demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, yaitu:
   a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
   b. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
   c. Kewenangan yang memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham Seri A atau Kuasanya;.
   d. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
3. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:
   a. Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan;
   b. Di luar rencana dalam RKAP;
   c. Bersifat mendesak, atau;
   d. Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.

Board of Directors Meeting

Policy

Board of Directors meetings are held by the Board of Directors, and all Board of Directors decisions are taken at Board of Directors meetings, both physically and circularly, as long as all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors have given their approval regarding the proposals submitted. Therefore, all decisions taken have the same force with decisions legally taken at the Board of Directors meeting.

Matters that Require Decision Making in Board of Directors Meetings

The Board of Directors determines matters that require decision making process through Board of Directors meetings as follows:

1. Actions related to the implementation of authority in accordance with the provisions of the Articles of Association, namely:
   a. Authority that requires approval from the Board of Directors;
   b. Authority that requires approval from the Board of Commissioners;
   c. Authority that requires a written response from the Board of Commissioners and approval from Series A Shareholders/Proxies;
   d. Authority that requires GMS approval.
2. Actions related to the procurement of goods and services in accordance with the provisions applicable to the Company.
3. Other strategic actions, with limitations:
   a. Strategically/significantly affecting the Company's operations;
   b. Outside the plan in the WP&B;
   c. Urgent, or;
   d. Concerning employees in strategic positions.

Jadwal Rapat

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;
   b. Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.

Agenda Rapat

1. Proses Penetapan Agenda Rapat
   Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap anggota Direksi berhak mengajukan usulan agenda rapat;
   b. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait;
   c. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syaratnya untuk diajukan sebagai agenda rapat;
   d. Anggota Direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya.
2. Agenda Rapat Susulan
   Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai;
   b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut;
   c. Apabila anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.
3. Kuorum Rapat
   Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Ketentuan mengenai pemberian kuasa tertulis dalam rapat diatur sebagai berikut:

   a. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
   b. Seorang Direktur hanya dapat mewakili kehadiran seorang Direktur lainnya.
   c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama

Meeting Schedule

1. Board of Directors meetings are held at least once every 1 (one) month.
2. The Board of Directors is obliged to hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.
3. Board of Directors meetings can be held at any time if:

   a. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
   b. Upon written request from the Board of Commissioners.

Meeting Agenda

1. Meeting Agenda Determination Process
   The Board of Directors' meeting agenda is determined based on the following provisions:
   a. Each member of the Board of Directors has the right to submit a proposal for the meeting agenda;
   b. Proposed meeting agendas can be submitted by other than the Board of Directors, but must be approved from the relevant Director;
   c. The proposed meeting agenda is collected by the Corporate Secretary to verify the adequacy of the requirements to be submitted as a meeting agenda;
   d. Members of the Board of Directors, whose proposed agenda is set as the meeting agenda, must prepare adequate material according to their proposed agenda.
2. Follow-up Meeting Agenda
   Additional meeting agenda prior to the meeting date must comply these following provisions:

   a. The proposed meeting agenda must be accompanied by adequate materials;
   b. The agenda for the follow-up meeting must be approved by all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those not present at the meeting. For this reason, members of the Board of Directors who are absent must be contacted to obtain approval or rejection of the follow-up agenda;
   c. If a member of the Board of Directors who is absent cannot be contacted within a reasonable time, then approval of the follow-up agenda is left to the decision of the meeting participants.
3. Meeting Quorum
   A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if it is attended by more than ½ (half) of the number of members of the Board of Directors or their authorized representatives. Provisions regarding the granting of written power of attorney at meetings are regulated as follows:
   a. A member of the Board of Directors may be represented at a Board of Directors meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
   b. A Director can only represent the presence of another Director.
   c. Members of the Board of Directors who are unable to attend the Board of Directors meeting can submit their opinion in writing and sign it and then submit it to the President Director or Deputy President Director or to

atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi tersebut, mengenai apakah akan mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat tersebut akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.

d. Kehadiran dalam rapat Direksi yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

Risalah Rapat

Setiap rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ *dissenting opinion* anggota Direksi jika ada), dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan risalah rapat agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi. Risalah rapat harus dibuat kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, kepada yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 39 kali dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 14 kali, dengan agenda sebagai berikut:

other members of the Board of Directors who will chair the Board of Directors meeting, regarding whether they will support or not support the matters to be discussed and their opinions. These will be considered valid votes cast at the Board of Directors meeting.

d. Attendance at Board of Directors meetings conducted via electronic means.

Members of the Board of Directors can participate in Board of Directors meetings held via teleconference, video conference, or other electronic means that enable all Directors meeting participants to see and hear each other directly as well as participate in the meeting and participation indicates the person's presence at the Board of Directors meeting.

Minutes of Meetings

Each Board of Directors meeting must be written in the minutes of the meeting signed by the chairman of the Board of Directors meeting and all members of the Board of Directors present, containing the matters discussed (including statements of disapproval/dissenting opinions of members of the Board of Directors if any) and matters decided. A copy of the minutes of the meeting must be submitted to the Board of Commissioners.

Minutes of meetings are prepared and administered by the Corporate Secretary or other official appointed by the Board of Directors. Minutes of the meeting must be prepared and then signed by all members of the Board of Directors present and submitted to all members of the Board of Directors.

Every member of the Board of Directors has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, regardless of whether the member of the Board of Directors concerned was present or not at the meeting.

If there is a member of the Board of Directors who does not sign the results of the meeting, the person concerned is obliged to state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

The 2023 Board of Directors Meeting

Throughout 2023, the Board of Directors has held 39 internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners 14 times, with the following agenda:

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	6 Januari 2023 January 6, 2023	Update Perkembangan Insentif Jangka Panjang Update on Long-Term Incentive Development	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi

Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	10 Januari 2023 January 10, 2023	Rencana Rekruitmen Pegawai Jenjang S1 Recruitment plan for undergraduate employees	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
3	12 Januari 2023 January 12, 2023	Rapat *Talent Committee* PTBA Meeting on PTBA Talent Committee	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
4	21 Februari 2023 February 21, 2023	1. *Cost Overrun* PLTU Sumsel 8 2. Harga Penjualan di bawah RKAP 3. Skema harga *Free on Truck* Mulut Tambang (FOMT) 1. Cost Overrun Sumsel-8 CFPP 2. Sales price below WP&B 3. Free on Truck Mine Mouth (FOMT) price scheme	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
5	9 Maret 2023 March 9, 2023	1. *Long Term Incentives (LTI) Presentation with Delloitte Consulting* 2. Rencana Penggunaan tanah di Kalimantan untuk kantor IPC 3. Rencana pengadaan tanah di Lampung 4. *Bulk Trading* 1. Long Term Incentives (LTI) Presentation with Delloitte Consulting 2. Land use plan in Kalimantan for the IPC office 3. Land acquisition plan in Lampung 4. Bulk Trading	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
6	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. Paparan hasil rapat optimasi 2. Pelepasan IPPKH 3. Kontrak penambangan 4. Paparan project PLTS BEI 5. PLTU-Smelter Beginjan 6. *Update* paparan negosiasi kepada BPH Migas 1. Presentation of the results of the optimization meeting 2. Release of IPPKH 3. Mining contracts 4. Presentation to the BEI SPPP project 5. Beginjan Coal Power Plant Smelter 6. Update on negotiation presentation to Regulatory Agency for Upstream Oil and Gas	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
7	27 Maret 2023 March 27, 2023	1. Pengelolaan remunerasi dan *Human Capital cost* 2. Draft KPI Manajemen 2023 3. Update progress aset lain-lain DPBA 4. Rencana likuidasi BAMO 5. Presentasi BSP 6. Update BBK 7. Tantiem Direksi 1. Management of remuneration and Human Capital costs 2. Draft Management 2023 KPI 3. Update progress on other DPBA assets 4. BAMO liquidation plan 5. BSP Presentation 6. Update BBK 7. Bonus for directors	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
8	3 April 2023 April 3, 2023	1. Pengembangan *Hydrogen to Power* 2. Presentasi draft SSA HBAP 1. Development on Hydrogen to Power 2. Presentation on SSA HBAP draft	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
9	13 April 2023 April 13, 2023	Pembahasan Proyek Tarahan 2 Discussing Tarahan 2 project	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
10	5 Mei 2023 May 5, 2023	1. Pembahasan Kinerja Q1 2023 2. Persiapan *Analyst Meeting* 1. Discussion on 2023 Q1 performance 2. Analyst meeting preparation	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
11	19 Mei 2023 May 19, 2023	1. Persiapan Pendampingan Komisi VII 2. Kondisi proyeksi TW II 3. Perubahan Anggaran Dasar MIND ID 4. Implementasi Permen BUMN No. 3 1. Preparation for Assistance to Commission VII 2. TW II projection conditions 3. Changes to MIND ID's Articles of Association 4. Implementation of SOEs Ministerial Regulation Number 3	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi

Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
12	22 Mei 2023 May 22, 2023	1. Perhitungan MIP 2. Potensi Bisnis BAP 1. MIP Calculation 2. BAP business potential	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
13	28 Mei 2023 May 28, 2023	1. Pekerjaan SBS 2. Skema pengawasan & Evaluasi Kinerja AAP 1. SBS work 2. Monitoring scheme and performance evaluation on AAP	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
14	30 Mei 2023 May 30, 2023	1. Rencana RUPS Anak dan Afiliasi Perusahaan PTBA 2. Perbandingan kinerja PTBA vs *Peers* 3. Evaluasi HPP dan Rencana Tambang Banko Tengah Utara 1. GMS Plan for PTBA's Subsidiaries and Affiliate Companies 2. Comparison of PTBA vs Peers performance 3. Evaluation of HPP and Banko Tengah Utara Mine Plan	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
15	6 Juni 2023 June 6, 2023	1. Rencana pembangunan TLS 6 & 7 2. Usulan konstruksi BACBIE 3. Penambangan oleh PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) di IUP PTBA 4. Hasil kajian restrukturisasi BMI 1. Development plan on TLS6&7 2. BACBIE construction proposal 3. Mining by PT Andalas Bara Sejahtera (PT ABS) at PTBA IUP 4. Results of BMI restructuring studies	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
16	9 Juni 2023 June 9, 2023	1. Paparan rencana iuran tambahan DPBA 2. Paparan kajian Penilaian Pre-Implementasi SAP 3. Paparan piutang Lianex 1. Exposure to DPBA additional contribution plans 2. Presentation of SAP Pre-Implementation assessment studies 3. Lianex receivables exposure	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
17	19 Juni 2023 June 19, 2023	Remunerasi AAP AAP remuneration	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
18	21 Juni 2023 June 21, 2023	1. Remunerasi AAP 2. *Unfreeze* BAP 3. Simulasi Kinerja 2023 4. Persiapan revisi RKAP 2023 5. Rencana jalur khusus angkutan batu bara 6. Rencana tambang Peranap 1. AAP Remuneration 2. Unfreeze BAP 3. 2023 Performance Simulation 4. Preparation for the 2023 WP&B revision 5. Plan for a special coal transportation route 6. Peranap mine plan	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
19	15 Juli 2023 July 15, 2023	1. Skema optimasi penambangan 2023 2. Rencana penjualan 2023 - revisi RKAB 3. *Update* jalan *hauling* batu bara Muara Enim 4. *Update* PETI 5. Paparan kajian pemenuhan BBM 6. Paparan efisiensi perawatan 1. Organisasi Unit Penambangan Ombilin (UPO) 2. Paparan hasil konsinyering tim *cost overrun* Sumsel 8 3. Mining optimization scheme 2023 4. 2023 sales plan - revised RKAB 5. Update on the Muara Enim coal hauling road 6. PETI Update 7. Presentation of fuel compliance studies 8. Maintenance efficiency exposure 9. Ombilin Mining Unit Organization 10. Presentation of the results of the Sumsel 8 cost overrun team's consignment	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
20	18 Juli 2023 July 18, 2023	1. Perubahan RKAP 2023 2. Pembahasan *cost overrun* HBAP 1. Changes in 2023 WP&B 2. HBAP cost overrun discussion	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
21	11 Agustus 2023 August 11, 2023	1. Pembahasan Proyek Kramasan 2. Pembangunan kantor Direksi 3. Paparan gedung *IoT & Management* 4. Paparan harga jual BA-61 5. Pembahasan kinerja SBS Juli 2023 6. Pembahasan kontrak PAMA 1. Discussion of the Kramasan project 2. Construction of the Directors' office 3. IoT & Management building exposure 4. Display of selling prices for BA-61 5. Discussion of SBS performance in July 2023 6. Discussion of the PAMA contract	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
22	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. Pembahasan tantiem Direksi 2. Rencana pemanfaatan kendaraan listrik operasional DIreksi 1. Discussion on Board of Directors' bonus 2. Plan to use electric vehicle for Board of Directors	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
23	21 Agustus 2023 August 21, 2023	1. Pembahasan *cost overrun* HBAP 2. Pembahasan tantiem AAP 3. Pembahasan BSC 1. Discussion of HBAP cost overrun 2. Discussion of AAP bonuses 3. BSC discussion	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
24	27 Agustus 2023 August 27, 2023	Pembahasan hasil Rekrutmen Bersama BUMN Discussion on SOEs joint recruitment	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
25	28 Agustus 2023 August 28, 2023	Pembahasan usulan organisasi *Office of the Board* Discussion on Office of the Board organization	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
26	15 September 2023 September 15, 2023	1. *Update Office of the Board* 2. Paparan Proyek Keramasan 3. Paparan tantiem Anak dan Afiliasi Perusahaan PTBA 1. Office of the Board update 2. Presentation on Kramasan Project 3. Presentation on bonus for PTBA subsidiaries and affiliates	• Arsal Ismail • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
27	20 September 2023 September 20, 2023	1. Kontrak KAI 2. Pemilihan Pengurus SPBA 2023-2024 3. RKAP 2024 4. KAI Contract 5. Nomination for SPBA board in 2023-2024 6. 2024 WP&B	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
28	3 Oktober 2023 October 3, 2023	1. *Update* Project Kramasan 2. Pengurus Anak dan Afiliasi Perusahaan 3. Setoran Modal PT BAP 1. Kramasan Project Update 2. Management of PTBA Subsidiaries and Affiliates 3. PT BAP Capital Deposit	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
29	10 Oktober 2023 October 10, 2023	1. Calon pengguna Kantor dan Gedung TE 2. Penyelesaian uang muka SBS 3. *Cost overrun* HBAP 1. Prospective TE Office and Building users 2. Settlement of SBS advances 3. HBAP cost overrun	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
30	12 Oktober 2023 October 12, 2023	1. Pembahasan investasi Rumah Sakit 2. Pembahasan Peraturan Dana Pensiun PTBA 3. Penetapan pedoman pengadaan strategis 1. Discussion of Hospital investment 2. Discussion of PTBA Pension Fund Regulations 3. Establishment of strategic procurement guidelines	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
31	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Pembahasan RKAP 2024 2024 WP&B discussion	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi
Tabel of Board of Directors Internal Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
32	23 Oktober 2023 October23, 2023	Prognosa FInal Produksi 2023 2023 final production prognosis	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
33	27 Oktober 2023 October 27, 2023	1. Tindak lanjut *Leader Workshop Alignment* 2. Penjualan *Free on Truck* 3. *Roadmap* penyehatan Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) 4. *Invoice Fuel PT KAI* 1. Follow up with Alignment Workshop Leaders 2. Free on Truck Sales 3. Roadmap for restructuring the Bukit Asam Pension Fund (DPBA) 4. PT KAI Fuel Invoice	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
34	6 November 2023 November 6, 2023	1. Rencana pengembangan bisnis BMI 2. *Update* pedoman *Free on Board Mother Vessel* (FOB MV) 3. Penyelerasan kontrak Manajemen ke KPI BSC TW-III & IV 2023 1. BMI business development plan 2. Updated Free on Board Mother Vessel (FOB MV) guidelines 3. Alignment of Management contracts to KPI BSC TW-III & IV 2023	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
35	22 November 2023 November 22, 2023	Paparan perubahan Pedoman Pengadaan PTBA Presentation on changes to the PTBA Procurement Guidelines	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
36	24 November 2023 November 24, 2023	1. FOB MV Pelabuhan lain 2. BATIC (Bukit Asam Business Analytics) 3. Nilai tunai Bumiputera 1. FOB MV other Port 2. BATIC (Bukit Asam Business Analytics) 3. Bumiputera cash value	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
37	4 Desember 2023 December 4, 2023	RKAP 2024 2024 WP&B	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
38.	6 Desember 2023 December 6. 2023	1. Pengisian Personil Organisasi 2. PSAK 24 1. Filling in Organizational Personnel 2. PSAK 24	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra
39.	27 Desember 2023 December 27, 2023	1. Update Project Prajen 2. Rencana Penjualan Batu Bara 2024 3. Paparan Alternatif Project ICBT 1. Update on Project Prajen 2. 2024 Coal Sales Plan 3. Presentation of ICBT Project Alternatives	• Arsal Ismail • Farida Thamrin • Suhedi • Suherman • Rafli Yandra

Tabel Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners' Joint Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
1	13 Januari 2023 January 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Desember tahun 2022 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Desember tahun 2022 3. Pembahasan Kinerja Anak/Cucu Perusahaan Triwulan IV Tahun 2022 4. Pembahasan KPI Tahun 2022 1. Discussion of Company Performance in December 2022 2. Discussion of Strategic Project Progress up to December 2022 3. Discussion of the Performance of the Company's Subsidiaries in the Fourth Quarter of 2022 4. Discussion of 2022 KPIs	• Agus Suhartono • Andi Pahril pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Devi Pradnya Paramita • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi

Tabel Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners' Joint Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
2	13 Februari 2023 February 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Januari tahun 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Januari tahun 2023 3. Pembahasan hasil asesmen GCG Tahun 2022 1. Discussion of Company Performance in January 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to January 2023 3. Discussion of the results of the 2022 GCG assessment	• Agus Suhartono • Andi Pahril pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Devi Pradnya Paramita • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
3	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2023 s.d Bulan Februari 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis Februari s.d. Februari tahun 2023 1. Discussion of Company Performance for February 2023 to February 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress February up to February 2023	• Agus Suhartono • Andi Pahril pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Devi Pradnya Paramita • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
4	9 April 2023 April 9, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu Perusahaan bulan Maret 2023 dan Triwulan I 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis Triwulan I tahun 2023 3. Pembahasan KPI Triwulan I tahun 2023 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in March 2023 and 2023 Q1 2. Discussion of Strategic Project Progress for 2023 Q1 3. Discussion of Q1 KPI in 2023	• Agus Suhartono • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
5	15 Mei 2023 May 15, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan bulan April 2023 dan s.d. bulan April 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis April s.d. April tahun 2023 3. Paparan Hasil Kajian Korn Ferry terkait Penetapan Perhitungan Tantiem tahun 2023 dan Gaji/Honorarium Tahun 2023 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk 4. Pembahasan Evaluasi Jabatan GM Unit Pertambangan Ombilin 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in April 2023 and up to April 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress April to April 2023 3. Presentation of Korn Ferry Study Results regarding Determination of 2023 Bonus Calculation and 2023 Salary/Honorarium for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk 4. Discussion on the Evaluation of GM Position in Ombilin Mining Unit	• Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
6	8 Juni 2023 June 8, 2023	1. Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar 2. Pembahasan Progres KPI Triwulan I 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA 1. Discussion of Amendments to the Articles of Association 2. Discussion of KPI Progress for the First Quarter of 2023 and PTBA Monev Follow-up	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
7	14 Juni 2023 June 14, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Mei 2023 dan s.d. bulan Mei 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Mei tahun 2023 3. Pembahasan Proyek KPI April dan Mei 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA (Table Monev Terlampir) 1. Discussion of Company Performance in May 2023 and up to in May 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress until May 2023 3. Discussion of April and May 2023 KPI Projects and PTBA Monev Follow-up (Monev Table Attached)	• Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Irwandy Arif • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
8	14 Juli 2023 June 14, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan bulan Juni 2023 dan s.d. bulan Juni 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Triwulan II tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI Juni s.d Triwulan II Tahun 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev Triwulan I PTBA; 1. Discussion of Company Performance in June 2023 and up to June 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to 2023 Q2 3. Discussion of KPI Progress June up to 2023 Q2 4. Discussion of PTBA's First Quarter Monitoring and Evaluation Follow-up	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi

Tabel Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners' Joint Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Attendees
9	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan Juli s.d. Juli tahun 2023 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. April tahun 2023 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Juli 2023 dan Tindak Lanjut Monev PTBA 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in July up to July 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to April 2023 3. Discussion of KPI Progress up to July 2023 and PTBA Monev Follow-up	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
10	8 September 2023 September 8, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/Cucu Perusahaan Bulan Agustus dan s.d. Agustus tahun 2023. 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Agustus tahun 2023 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Agustus 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Agustus 2023; 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in August and up to August 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress up to August 2023 3. Discussion of KPI Progress up to August 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to August 2023	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
11	22 September 2023 September 22, 2023	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) PT Bukit Asam Tbk Tahun 2024 Ratification of the Work Plan and Company Budget (WP&B) of PT Bukit Asam Tbk for 2024	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
12	13 Oktober 2023 October 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan September dan Triwulan III Tahun 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d Triwulan III tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. September 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. September 2023; 5. Pembahasan terkait Keselamatan kerja, Lingkungan, dan CSR. 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in September and 2023 Q3 2. Discussion of Strategic Project Progress up to 2023 Q3 3. Discussion of KPI Progress up to September 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to September 2023 5. Discussions on to work safety, environment and CSR.	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
13	13 November 2023 November 13, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan Oktober Tahun 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. Oktober tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. Oktober 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. Oktober 2023; 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries in October 2023; 2. Discussion of Strategic Project Progress until October 2023 3. Discussion of KPI Progress up to October 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to October 2023	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi
14	15 Desember 2023 December 15, 2023	1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Termasuk Anak/cucu perusahaan bulan November s.d. November Tahun 2023; 2. Pembahasan Progres Proyek Strategis s.d. November tahun 2023; 3. Pembahasan Progres KPI s.d. November 2023; 4. Pembahasan Tindak Lanjut Monev PTBA s.d. November 2023; 1. Discussion of Company Performance Including Company Subsidiaries and Subsubsidiaries from November to November 2023 2. Discussion of Strategic Project Progress until November 2023 3. Discussion of KPI Progress up to November 2023 4. Discussion on follow-up monitoring and evaluation of PTBA to November 2023	• Irwandy Arif • Andi Pahril Pawi • Carlo B. tewu • E. Piterdono HZ • Kurnia Toha • Rahmat Hidayat P • Arsal Ismail • Rafli Yandra • Farida Thamrin • Suherman • Suhedi

Adapun tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat, termuat dalam tabel berikut:

The attendance rate of members of the Board of Directors at meetings is detailed in the following table:

Tabel Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi
Board of Directors' Attendance on Internal Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Board of Directors' Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance Rate
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	39	39	100%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	39	38	97%
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	39	39	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	39	39	100%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	39	39	100%

Tabel Kehadiran Anggota Direksi Pada Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris
Board of Directors' Attendance in Joint Meetings with Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisartis Joint Meetings Board of Directors and Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance Rate
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	100%
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100%
Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Kurnia Toha*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Rahmat Hidayat Pulungan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	7	100%
Agus Suhartono**	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/Independent	4	4	100%
Devi Pradnya Paramita***	Komisaris Commissioner	3	3	100%
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	14	14	100%
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	14	14	100%
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	14	14	100%
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	14	14	100%
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	14	14	100%

Catatan | Notes
* menjabat sejak 15 Juni 2023
** menjabat hingga 11 April 2023
*** menjabat hingga 21 Maret 2023.
* served since June 15, 2023
** served until April 11, 2023
*** served until March 21, 2023.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Perusahaan menyelenggarakan kegiatan program pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat untuk pertama kali. Kegiatan ini bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*, dan bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait Perusahaan kepada anggota Direksi yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Apabila dibutuhkan, dapat pula dilakukan program pengenalan atas anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi. Adapun materi yang harus disampaikan pada program pengenalan mencakup:

1. Tata Kelola yang berlaku di PTBA sebagai anggota dari Grup MIND ID, termasuk mengenai pedoman dan/atau kebijakan yang melibatkan peran MIND ID selaku *holding* pertambangan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Surat Kuasa Khusus (SKK) Kementerian BUMN, maupun kebijakan lain yang berlaku;
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* oleh Perusahaan;
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
5. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak menyelenggarakan Program Pengenalan bagi anggota Direksi, karena sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengangkatan anggota Direksi baru.

Company Induction Program for New Directors

The company conducts an induction program for newly appointed Directors. This activity is mandatory as stated in the Board Manual, and aims to introduce and provide understanding regarding the Company to newly appointed members of the Board of Directors. The introduction program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of the Board of Directors. The Company's introduction program is carried out in the form of presentations, meetings, visits to the Company's business units, and review of documents or other programs. If necessary, an introduction program can also be carried out for subsidiaries and affiliated companies. The material that is mandatory to be presented in the introductory program includes:

1. Governance that applies to PTBA as a member of the MIND ID Group, including guidelines and/or policies involving MIND ID's role as a mining holding company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Special Power of Attorney (SKK) of the Ministry of SOEs, and other policies applicable;
2. Implementation of the principles of good corporate governance by the Company;
3. An overview of the Company related to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
4. Information related to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
5. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as permitted matters

In 2023, the Company did not conduct an Introduction Program for members of the Board of Directors, since there was no appointment of new members of the Board of Directors.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi, maka Anggota Direksi harus secara teratur menerima program pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan sertifikasi yang relevan, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi *update knowledge* tersebut, maka anggota Direksi perlu diberikan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* atau bentuk lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Tahun 2023

Program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Bab Profil.

Competency Training and Development

Policy

In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Directors, members of the Board of Directors must regularly receive relevant, independent and sustainable training, knowledge development, and certification programs. To facilitate this update knowledge, they need to receive training, workshops, seminars, conferences, and other forms to increase their effectiveness in the Company.

Training and/or Competency Improvement in 2023

The training and competency improvement programs attended by members of the Board of Directors can be seen in the Profile Chapter.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2023, Direksi Perusahaan telah melakukan tindakan atau membuat keputusan strategis utamanya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktifikasi kegiatan bisnis PT Bukit Asam Prima yang merupakan entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan batu bara;
2. Pengakhiran rencana akuisisi PT Tabalong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama yang dilakukan melalui entitas anak perusahaan PT Internasional Prima Coal;
3. Menetapkan rencana dekarbonisasi dan manajemen karbon;
4. Rencana diversifikasi usaha melalui hilirisasi batubara;
5. Menyusun *roadmap* ESG dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan;
6. Pengembangan kapasitas angkutan batu bara Tanjung Enim-Kramasan dengan melakukan *groundbreaking Train Loading Station* (TLS) 6 dan 7 di Tanjung Enim.

Komite di Bawah Direksi dan Penilaiannya

Dalam rangka mendukung kinerja Direksi PTBA, selain terdapat satuan kerja, Direksi PTBA pun membentuk beberapa komite, yakni:

1. Komite Lingkungan
   Komite lingkungan merupakan komite yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan PTBA. Komite lingkungan berada di lokasi kerja (i) Unit Pertambangan Tanjung Enim, (ii) Pelabuhan Tarahan, dan (iii) Dermaga Kertapati.
   Komite Lingkungan sendiri memiliki detail fungsi, yakni:
   - Sistem manajemen lingkungan;
   - Penilaian daur hidup dan dekarbonisasi;
   - Efisiensi energi;
   - Penurunan emisi;
   - Efisiensi air dan penurunan beban air limbah;
   - Pengurangan dan pemanfaatan limbah B3;
   - Pengurangan dan pemanfaatan limbah non-B3;
   - Perlindungan keanekaragaman hayati;
   - Pembinaan masyarakat/inovasi sosial;
   - Tanggap bencana;
   - Kendali kerusakan lahan;
   - Dokumen lingkungan dan dokumen SIMPEL.

   Evaluasi kinerja Komite Lingkungan yang dilakukan oleh Direksi PTBA, yakni dengan ketercapaian atas target penghargaan PROPER yang diterima oleh setiap unitnya.

2. Komite Investasi dan Lindung Nilai
   Komite ini memiliki tugas penting sebagai berikut:
   a. Melakukan analisa tingkat risiko dan pengembalian dari jenis-jenis investasi pada instrumen keuangan dan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas nilai tukar valuta asing yang tersedia di pasar;

Decisions and Implementation of Board of Directors' Duties

In 2023, PTBA Board of Directors has taken actions or made strategic decisions primarily related to the following matters:

1. Activation of the business activities of PT Bukit Asam Prima, which is a subsidiary entity engaged in coal trading;
2. Termination of the planned acquisition of PT Tabalong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama which was carried out through the subsidiary PT Internasional Prima Coal;
3. Establish a decarbonization and carbon management plan;
4. Business diversification plans through coal downstreaming;
5. Develop an ESG roadmap to support the company's business sustainability;
6. Developing Tanjung Enim-Kramasan coal transportation capacity by groundbreaking Train Loading Station (TLS) 6 and 7 in Tanjung Enim.

Committees Under the Board of Directors and Their Assessment

In order to support the performance of the Bukit Asam Board of Directors, besides having work units, the Bukit Asam Board of Directors also formed several committees, namely:

1. Environmental Committee
   This committee is responsible for environmental management in the PTBA environment. Environmental committees are located at work locations (i) Tanjung Enim Mining Unit, (ii) Tarahan Port, and (iii) Kertapati Barging Port. The Environmental Committee itself has detailed functions, namely:
   - Environmental management system
   - Life cycle assessment (LCA) and decarbonization
   - Energy efficiency
   - Emissions reduction
   - Water efficiency and reduced waste water load
   - Reduction and utilization of B3 waste
   - Reduction and utilization of non-B3 waste
   - Protection of biodiversity
   - Community development/social innovation
   - Disaster response
   - Control land damage
   - Environmental documents and SIMPEL documents.

   Evaluation of the Environmental Committee's performance by the PTBA Board of Directors, namely by the achievement of the PROPER target. PROPER awards received by each unit.

2. Investment and Hedging Committee
   This committee has the following important duties:
   a. Analyze the level of risk and return of the types of investments in financial instruments and hedging transactions on foreign currency exchange rates available on the market

b. Melakukan penilaian terhadap kelayakan dan reputasi institusi keuangan (*counterparty*) yang akan dijadikan mitra kerja;
c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mengenai:
   - Jenis-jenis investasi (portofolio) dan limit transaksi dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan pengembalian investasi pada instrumen keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang ada;
   - Usulan melakukan lindung nilai (*hedging*) berdasarkan analisis posisi valuta asing yang dimiliki perusahaan serta prediksi pergerakan nilai tukar/ kurs;
   - Pemilihan institusi keuangan (*counterparty*) untuk melakukan aktivitas transaksi investasi pada instrumen keuangan dan aktivitas lindung nilai atas nilai tukar valuta asing dengan berpedoman kepada kebijakan yang ada;
   - Setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko harus disertai dengan analisis yang lengkap mengenai tingkat risiko dan tingkat pengembalian / keuntungan, serta kelayakan dan reputasi institusi keuangan (*counterparty*) yang akan dijadikan mitra kerja.
d. Melakukan transaksi investasi pada instrumen keuangan dan lindung nilai atas nilai tukar valuta asing dengan institusi keuangan berdasarkan persetujuan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
e. Membukukan transaksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; dan
f. Melaporkan secara berkala atau dalam keadaan terjadi perubahan parameter yang signifikan atas investasi yang telah dilakukan.

Evaluasi Komite dilakukan oleh Direktur pembina, dalam hal ini Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, utamanya atas keberhasilan dalam tugas-tugas komite.

3. *Talent Committee*
Komite ini berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk suksesi *talent* yang ada di PTBA. Adapun 3 (tiga) fungsi utama dari *Talent Committee,* yakni:
   - Melakukan *review* dan pengelompokkan *talent* dalam kelas-kelas *talent* berdasarkan kriteria potensi dan kinerja *talent*, sesuai dengan jenjang jabatannya;
   - Mengusulkan evaluasi dan rekomendasi program pengembangan *talent* terhadap *top talent* yang dinominasikan sebagai *successor* dalam *succession planning;*
   - Mengusulkan kepada Direksi PTBA daftar *talent* yang akan dinominasikan sebagai *selected talent*, daftar *talent* yang akan diangkat sebagai pengurus Anak/Afiliasi perusahaan dan daftar *talent* yang akan dipromosikan untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan penetapan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penilaian keberhasilan dari komite ini diukur dengan tersedianya *talent* PTBA sesuai dengan *succession plan* yang disusun.

b. Assess the suitability and reputation of the financial institution (counterparty) that will be partnered with;
c. Provide recommendations to the Director of Finance and Risk Management regarding:
   - Types of investment (portfolio) and transaction limits taking into account the level of risk and return on investment in financial instruments guided by existing policies;
   - Proposal to hedge based on analysis of the company's foreign exchange position and predictions of exchange rate movements;
   - Selection of financial institutions (counterparties) to carry out investment transaction activities in financial instruments and hedging activities on foreign exchange rates guided by existing policies;
   - Every recommendation submitted to the Director of Finance and Risk Management must be accompanied by a complete analysis regarding the level of risk and rate of return/profit, as well as the suitability and reputation of the financial institution (counterparty) as a working partner.
d. Conduct investment transactions in financial instruments and hedge foreign exchange rates with financial institutions based on the approval of the Director of Finance and Risk Management;
e. Record transactions that have been carried out in accordance with applicable accounting principles; And
f. Report periodically or when significant changes occur in the parameters of investments that have been made.

Committee evaluation is carried out by the supervisory director, in this case the Director of Finance and Risk Management, primarily for the success in the committee's duties.

3. Talent Committee
This committee plays a role to provide recommendations to the Board of Directors for the succession of talent at PTBA. There are 3 (three) main functions of the Talent Committee, namely:
   - Review and group talent into talent classes based on talent potential and performance criteria, according to their position level;
   - Propose evaluations and recommendations for talent development programs for top talents nominated as successors in succession planning;
   - Propose to the Directors of PTBA a list of talents who will be nominated as selected talents, a list of talents who will be appointed as managers of the company's Subsidiaries/Affiliates and a list of talents who will be promoted to further obtain approval for the determination in accordance with applicable procedures.

The success of this committee is measured by the availability of PTBA talent in accordance with the succession plan prepared.

4. Komite TJSL dan ESG

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 134A/0100/2023. Adapun tugas komite ini yaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, sasaran, *roadmap*, strategi, action plan terkait ESG;
b. Malakukan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, antara lain namun tidak terbatas pada:
   - berkoordinasi dengan satuan kerja terkait/lintas direktorat untuk menetapkan prioritas dan tujuan TJSL Perusahaan;
   - bersinergi dengan satuan kerja terkait/lintas direktorat dalam implementasi TJSL perusahaan;
   - membantu Direksi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL Perusahaan;
   - Melaporkan pelaksanaan program TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Memastikan pemenuhan terhadap kriteria lembaga pemeringkat ESG, diantaranya Morgan Stanley Capital International (MSCI), Sustainalytic, dan Carbon Disclosure Program (CDP), International Council on Mining & Metals (ICMM), UN Global Compact, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) meliputi:
   - Menyusun dokumen penilaian dan memastikan pemenuhan seluruh kriteria penilaian secara maksimal;
   - Memonitor pencapaian kinerja perusahaan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan serta melakukan pendampingan sesuai kriteria penilaian;
   - Melaporkan kinerja berkelanjutan sesuai ketentuan aspek berkelanjutan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan TJSL, dan laporan pemeringkat ESG, *website* perusahaan, dan laporan lain sesuai kebutuhan.
d. Mendukung tercapainya pendanaan eksternal perusahaan berbasis keberlanjutan, antara lain namun tidak terbatas pada *sustainability financing, green financing*, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur internal perusahaan.

Evaluasi Komite ini didasarkan pada pencapaian ESG yang dicapai oleh Perusahaan berdasarkan rating/penilaian yang diberikan oleh organisasi, lembaga, institusi nasional maupun internasional.

4. CSR and ESG Committee

The Social and Environmental Responsibility (CSR) and Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee based on the Decision of the Board of Directors of PTBA No. 134A/0100/2023. The tasks of this committee are as follows:

a. Develop and implement policies, targets, roadmaps, strategies, action plans related to ESG;
b. Perform the functions of the SOEs CSR Committee as regulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023, including but not limited to:
   - Coordinate with relevant work units/cross-directorates to establish priorities and goals for the Company's CSR;
   - Synergize with relevant work units/cross-directorates in the implementation of the Company's CSR;
   - Assist the Board of Directors in monitoring and evaluating the implementation of the Company's CSR programs;
   - Report on the implementation of the Company's CSR programs according to applicable regulations.
c. Ensure compliance with the criteria of ESG rating agencies, including Morgan Stanley Capital International (MSCI), Sustainalytics, and Carbon Disclosure Program (CDP), International Council on Mining & Metals (ICMM), UN Global Compact, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) including:
   - Prepare assessment documents and ensure compliance with all assessment criteria to the maximum extent;
   - Monitor the achievement of company performance according to established deadlines and provide assistance according to assessment criteria;
   - Report sustainable performance in accordance with sustainable aspects in annual reports, sustainability reports, CSR reports, ESG rating reports, company websites, and other reports as needed.
d. Support the achievement of the company's external funding based on sustainability, including but not limited to sustainability financing, green financing, and others, while still considering applicable regulations and internal company procedures.

Evaluation of this committee is based on the achievement of ESG attained by the Company according to ratings/assessments provided by national and international organizations, institutions, and agencies.

5. Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi
   Sesuai dengan kewajiban Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023, PTBA telah membentuk Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi dan Komite Pengarah Implementasi Teknologi Informasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Direksi PTBA No. 007/0100/2024 yang merupakan pembaharuan dari Komite yang ditetapkan pada tahun 2021. Komite Pengarah Strategi Teknologi Informasi ini memiliki tujuan untuk memastikan rencana strategis teknologi informasi (TI) sesuai dengan kebutuhan bisnis dan digitaliasi PTBA dengan tetap mengacu pada perkembangan teknologi informasi baik domestik dan global. Sedangkan, untuk Komite Pengarah Implementasi TI memiliki tujuan untuk memastikan TI sesuai dengan rencana strategis TI yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan Tata Kelola yang berlaku, serta secara efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang optimal. Penilaian komite ini didasarkan pada pencapaian atas kinerja/capaian TI sesuai dengan rencana strategis TI, sehingga dapat memberikan nilai tambah optimal bagi perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan Teknologi Informasi, dapat dilihat pada Sub Bab Teknologi Informasi pada bab ini.

Selain komite-komite di atas, Direksi dibantu oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit (SPI). Kinerja Komite di bawah Direksi dinilai berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas, saran, dan rekomendasi yang diberikan oleh kedua organ tersebut. Direksi telah menilai bahwa Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2023 dengan baik.

Penilaian kinerja organ pendukung Direksi berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam setiap satuan kerja yang merupakan *Key Performance Indicator* (KPI), termasuk untuk satuan kerja Sekretaris Perusahaan dan SPI. Penetapan KPI tersebut tertuang dalam *Balance Scorecard* yang dilakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulannya oleh audit internal Perusahaan.

5. Information Technology Steering Committee and Information Technology Implementation Steering Committee
   In accordance with the obligations of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023, PTBA has established the Information Technology Steering Committee and Information Technology Implementation Steering Committee as stipulated in the Board of Directors' Decision of PTBA No. 007/0100/2024, which is a renewal of the Committee established in 2021. The Information Technology Steering Committee aims to ensure that the IT strategic plans align with the business needs and digitalization of PTBA while referring to both domestic and global IT developments. Meanwhile, the Information Technology Implementation Steering Committee aims to ensure that IT aligns with the established IT strategic plans and complies with applicable Governance provisions, effectively and efficiently obtaining optimal benefits. The assessment of these committees is based on the achievement of IT performance according to the IT strategic plans, thereby providing optimal added value to the company. For further information regarding Information Technology, please refer to the Information Technology subsection in this section.

In addition to the above committees, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit. The performance of Committees under the Board of Directors is evaluated based on the realization of tasks, advice, and recommendations provided by both organs. The Board of Directors has assessed that the Corporate Secretary and Internal Audit have performed their duties and responsibilities well in 2023.

The performance assessment of supporting organs of the Board of Directors is based on the evaluation criteria established in each work unit, which are Key Performance Indicators (KPIs), including for the Corporate Secretary and Internal Audit Unit. The determination of KPIs is outlined in the Balance Scorecard, which undergoes periodic evaluation every three months by the Company's internal audit.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Setiap tahunnya, Dewan Komisaris menetapkan Program Kerja tahunan Dewan Komisaris dan KPI sebagai sasaran capaian kinerja Dewan Komisaris. Capaian atas KPI menjadi objek penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama satu tahun. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil perbandingan realisasi dengan target dikalikan dengan bobot. Apabila realisasi tercapai di atas 100%, maka nilai/skor yang diberikan dapat melebihi bobot maksimal. Apabila realisasi KPI tercapai di bawah 100%, maka nilai akan diberikan secara proporsional terhadap bobot.

Berdasarkan jumlah skor, dapat ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Skor 100% ≥ x > 95%, kriteria Sangat Baik.
2. Skor 95% ≥ x > 80%, kriteria Baik.
3. Skor 80% ≥ x > 65%, kriteria Cukup.
4. Skor 65% ≥ x > 50%, kriteria Kurang.
5. Skor ≤ 50%, kriteria Sangat Kurang.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja tahunan Dewan Komisaris dilakukan dengan sistem *self-assessment*, terhadap capaian KPI Dewan Komisaris, dan atas hasil penilaiannya disampaikan kepada Pemegang Saham seri A atau kuasanya untuk diputuskan lebih lanjut melalui RUPS, dengan memberikan Keputusan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris terkait tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku sebelumnya.

Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada pemenuhan KPI Dewan Komisaris untuk periode tahun penilaian. KPI Dewan Komisaris mencakup perspektif penilaian kinerja sebagai berikut:

1. Kontribusi pencapaian atas KPI Direksi;
2. Aspek pengawasan;
3. Aspek dinamis dan penguatan tata kelola;

Performance Appraisal of the Board of Commissioners

Appraisal Procedures

Every year, the Board of Commissioners determines the annual Work Program of the Board of Commissioners and KPIs as performance targets for the Board of Commissioners. KPI Achievements becomes the object of assessment of the performance of the Board of Commissioners for one year. The assessment is carried out based on the results of a comparison of the realization with the target multiplied by the weight. If the realization is above 100%, the value/score given may exceed the maximum weight. If the KPI realization is below 100%, the value will be given proportional to the weight.

Based on the total score, the following assessment criteria can be determined:

1. Score 100% ≥ x > 95%, Very Good criteria.
2. Score 95% ≥ x > 80%, Good criteria.
3. Score 80% ≥ x > 65%, Average criteria.
4. Score 65% ≥ x > 50%, Poor criteria.
5. Score ≤ 50%, Very Poor criteria.

Appraiser

The annual performance assessment of the Board of Commissioners is carried out using a self-assessment system, towards the KPI achievements of the Board of Commissioners, and the results of the assessment are submitted to Series A Shareholders or their proxies for further decisions through the GMS, by providing a decision to approve and ratify the Annual Report and Financial Reports including Board of Commissioners report regarding the Company's supervisory duties for the previous financial year.

Appraisal Criteria

The performance appraisal of the Board of Commissioners is based on the fulfillment of the Board of Commissioners' KPIs for the assessment year period. The Board of Commissioners' KPI includes the following performance assessment perspectives:

1. Contribution to the achievement of the Board of Directors' KPI;
2. Supervisory aspect;
3. Dynamic aspects and governance routing;

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris

Result of Board of Commissioners' KPI Appraisal

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Contribution of Board of Directors' KPI Achievement Aspect		Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Kontribusi Pencapaian KPI Direksi Contribution of Board of Directors' KPI Achievement Aspect				**20**			**19,46**
Pencapaian KPI Direksi Directors' KPI achievement		Realiasi Pencapaian KPI Direksi Realization of Directors' KPI achievement	%	20	100	97,30	19,46
Aspek Pengawasan dan Penasihatan Supervisory and Advisory Aspect				**60**			**61,50**
1	Memberikan persetujuan/rekomendasi/ tanggapan atas aksi korporasi yang disampaikan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide approval/recommendations/ responses to corporate actions submitted by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association	Persetujuan/ rekomendasi/ tanggapan yang diberikan kepada Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan AD Approval/recommendations/responses given to the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the AD	Dokumen Document	8	2	19	8,80
2	Memberikan nasihat atau saran kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS, dan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Provide advice or suggestions to the Board of Directors to optimize performance in accordance with the work plan, GMS directions, and increase the Company's compliance with statutory regulations.	Nasihat atau saran yang diberikan kepada Direksi guna mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana kerja, arahan RUPS, dan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Advice on suggestions given to the Board of Directors to optimize performance in accordance with the work plan, GMS directions, and increase the Company's compliance with statutory regulations.	Dokumen Document	8	1	1	8
3	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan strategis Perusahaan melalui kunjungan lapangan (*site visit*) Conduct monitoring to PTBA's strategic activities (site visit)	Kunjungan lapangan (site visit) untuk memonitor kegiatan-kegiatan strategis perusahaan Site visit to monitor PTBA's strategic activities	Dokumen Document	7	3	10	7,70
4	Tanggapan terhadap RKAP dan/atau RJPP yang disiapkan oleh Direksi Response to WP&B and RJPP prepared by Board of Directors	Pembahasan RKAP yang telah disiapkan Direksi WP&B discussion prepared by Board of Director	Dokumen Document	8	1	1	8
5	Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi Examine and review periodic reports prepared by the Board of Directors	Jumlah surat evaluasi laporan berkala The number of periodic evaluation reports	Surat Letter	7	12	12	7
6	Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan Submitting the Board of Commissioners' Supervision Report at the Annual GMS	Laporan pengawasan yang disampaikan pada RUPS Tahunan Supervision report conveyed at the annual GMS	Dokumen Document	7	1	1	7
7	Pengawasan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian intern. Supervision of compliance with legislation and internal control.	Pembahasan Upaya tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi Laporan Auditor Indpenden (LAI) atas kepatuhan perundang-undangan dan pengendalian intern Discussion of follow-up efforts to the findings and recommendations of the Independent Auditor's Report (LAI) on statutory compliance and internal control	Risalah/ Surat Summary/ Letter	7	1	1	7
8	Mengusulkan KAP yang mengaudit laporan keuangan Perusahaan. Suggesting Public Accountant Office (KAP) to audit the Company's finance report	Pengusulan kepada RUPS/Menteri mengenai KAP yang mengaudit laporan keuangan Proposal to the GMS/Minister regarding KAP auditing financial reports	Surat Letter	8	1	1	8

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris
Result of Board of Commissioners' KPI Appraisal

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Contribution of Board of Directors' KPI Achievement Aspect	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamics and Governance Strengthening Aspect			**20**			**21,34**
1 Kegiatan Pengembangan Development Activities			6			6,60
Mengikuti FGD/Pelatihan/ Seminar/ *Workshop* Join FGD/Training/Seminar/Workshop	Kegiatan FGD/ Pelatihan/ Seminar/ *Workshop* yang diikuti oleh Dewan Komisaris dan/atau Organ FGD/Training/Seminar/Workshop followed by the Board of Commissioner and/or its organs	Laporan/ Sertfikat Report/ Certification	6	2	12	6,60
2 Penguatan Tata Kelola Governance Strengthening			14			14,74
a. Menerapkan Tata Kelola Dewan Komisaris Implementing Board of Commissioners' GCG	Skor GCG Dewan Komisaris Board of Commissioners' GCG score	Skor Score	4	33	34,22	4,14
b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris 2024 Planning the 2024 Board of Commissioners WP&B	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang telah ditandatangani Signed Board of Commissioners' WP&B	Dokumen Document	4	1	1	4
c. Menghadiri rapat-rapat: Attending meetings:			6			6,59
• Rapat Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners internal meetings	Rata-Rata persentase kehadiran Dewan Komisaris Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% Kehadiran Attendance	1	80	100	1,10
• Rapat Koordinasi/ Gabungan Dewan Komisaris dan Dlreksi Joint Coordination meeting between the Board of Directors and Comissioners	Rata-Rata persentase kehadiran Dewan Komisaris Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioner Attendance	1	80	100	1,10
• Pengesahan RKAP WP&B ratification	Rata-Rata persentase kehadiran Dewan Komisaris Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioner Attendance	1	80	100	1,10
• RUPS Tahunan Annual GMS	Rata-Rata persentase kehadiran Dewan Komisaris Average percentage of Board of Commissioners' attendance	% Kehadiran Attendance	1	80	100	1,10
• Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	Rata-rata persentase kehadiran Komite Audit pada rapat Komite Average percentage of Audit Committee attendance on Committee meetings	% Kehadiran Attendance	1	80	100	1,10
• Rapat Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR,Nominasi, Remunerasi dan PSDM Meeting of Committee for Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HCD	Rata-rata persentase kehadiran Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM pada rapat komite Average percentage of Committee for Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and HCD on Committee meetings	% Kehadiran Attendance	1	80	87	1,09
Jumlah **Total**			**100**			**102,30**

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Setiap tahunnya Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya (MIND ID), yang di dalamnya terdapat *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai penjabaran dari RKAP yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan MIND ID. KPI Direksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kolegial dan individu, yang atas capaian keduanya menjadi objek penilaian atas kinerja Direksi selama satu tahun. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Akuntan Publik melakukan evaluasi kinerja Direksi kemudian disampaikan kepada RUPS dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya melalui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahun terhadap capaian KPI Direksi, baik kolegial maupun individu, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Akuntan Publik.

Kriteria Penilaian

Penilaian Direksi mengacu pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang bertujuan sebagai alat penilaian bagi Pemegang Saham atas kinerja Direksi sampai dengan akhir tahun.

Pada penilaian kinerja Direksi, terdapat 5 perspektif yang digunakan, adapun pada tahun 2023 pencapaian dibandingkan target yaitu:

The Board of Directors' Performance Appraisal

Appraisal Procedures

Every year the Board of Directors signs a Management Contract with Series A Dwiwarna/Proxy (MIND ID) shareholders, which includes Key Performance Indicators (KPI) as an elaboration of the WP&B which has been approved by the Board of Commissioners and MIND ID. The KPI of the Board of Directors is divided into 2 (two), namely collegial and individual, the achievements of both of which become the object of assessment of the performance of the Board of Directors for one year. The Board of Commissioners, assisted by the Public Accountant, evaluates the performance of the Board of Directors and then submits it to the GMS and/or Series A Dwiwarna Shareholders/Proxies through the Board of Commissioners' Supervisory Task Report.

Appraiser

The Directors' performance assessment is carried out every year on the KPI achievements of the Directors, both collegial and individual, which is carried out by the Board of Commissioners with the assistance of a Public Accountant.

Appraisal Criteria

The Board of Directors' assessment refers to the Key Performance Indicator (KPI) which is based on SOEs Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as an assessment tool for Shareholders regarding the performance of the Board of Directors until the end of the year.

In assessing the performance of the Board of Directors, there are 5 perspectives used, while in 2023 the achievements compared to targets are:



Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif
KPI Achievements for Board of Directors Based on Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Pencapaian Achievement		
						REAL REAL	%	Bobot Weight
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia A. Economic and Social Value for Indonesia								
A.1 Finansial A.1 Financial								
1	*EBITDA*	Rp Miliar Rp Billion	5.673	Maksimal Maximum	2	8.902	110,00	2,20
2	*ROIC ≥ WACC*	%	5,8	Maksimal Maximum	1	21	110,00	1,10
3	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flow from operations	Rp Miliar Rp Billion	4.989	Maksimal Maximum	2	3.105	62,23	1,24
4	Pencapaian Skor TKP Kinerja 2023 Achievement of 2023 TKP Performance Scores	Indeks	AA	Maksimal Maximum	2	AA	100,00	2,00
5	Serapan investasi: Investment uptake:							
	a. Investasi Rutin Routine Investment	Rp Miliar Rp Billion	1.844	Stabilize	2	1.448	78,52	1,57
	b. Investasi Non-Rutin (termasuk anggaran *contingency*) Non-Routine Investments (including budget contingency)	Rp Miliar Rp Billion	1.236	Range	3	570	57,60	1,73
A.2 Operasional A.2 Operational								
6	Internalisasi budaya *safety* - Pencapaian KPI HSE Internalization of safety culture - Achievement of HSE KPIs	%	100	Maksimal Maximum	5	96	96,00	4,80
7	Unit/anak usaha yang memperoleh peringkat PROPER: Units/subsidiaries that received ratings PROPER:							
	a. Jumlah unit/Anak Usaha yang meningkat peringkat PROPER dari Biru ke Hijau Number of units/Subsidiaries that have increased in rank PROPER from Blue to Green	Jumlah Unit/ Anak Usaha Number of Units/ Subsidiaries	1	Maksimal Maximum	1	1	100,00	1,00
	b. Jumlah unit/Anak Usaha yang meningkat peringkat PROPER dari Hijau ke Emas Number of units/Subsidiaries that have increased in rank PROPER from Green to Gold	Jumlah Unit/ Anak Usaha Number of Units/ Subsidiaries	1	Maksimal Maximum	1	1	100,00	1,00
	c. Jumlah unit/Anak Usaha yang mempertahankan peringkat PROPER Emas Number of units/Subsidiaries that maintain Gold PROPER rating	Jumlah Unit/ Anak Usaha Number of Units/ Subsidiaries	1	Stabilize	1	1	100,00	1,00
8	Produksi komoditas : Commodity production:							
	Batu bara Coal	Ton Tons	43.000.000	Maksimal Maximum	7	41.751.980	97,10	6,80
9	Pengurangan emisi karbon di grup MIND ID terhadap total emisi *business-as-usual* yang dihasilkan di 2023 Reduction of carbon emissions in the MIND ID group against total business-as-usual emissions generated in 2023	%	2	Maksimal Maximum	1	8,79	110,00	1,10
10	Penurunan Intensitas Energi dari rata-rata *Business-as-usual* yang dihasilkan di tahun 2023 Decrease in Energy Intensity from average Businessas-normal produced in 2023	%	2	Maksimal Maximum	1	14,49	110,00	1,10
11	Implementasi & Sertifikasi SNI ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi Implementation & Certification of SNI ISO 50001:2018 System Energy Management	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	1	Dec-23	100,00	1,00

Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif
KPI Achievements for Board of Directors Based on Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Pencapaian Achievement		
						REAL REAL	%	Bobot Weight
12	Pelaksanaan program Sub-Komite Manajemen Risiko Tahun 2023 dalam rangka sinergi Grup MIND ID dan pemenuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 terkait Manajemen Risiko Implementation of the 2023 Risk Management Sub-Committee program in the context of synergy with the MIND ID Group and compliance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Risk Management	%	100	Maksimal Maximum	4	104	104,05	4,16
13	Optimasi kinerja TJSL : CSR performance optimization:							
	Rasio *Social Return on Investment* (SROI) dari Dampak/Manfaat Program TJSL/PPM > 1 Social Return on Investment (SROI) ratio of Impact/Benefits of the CSR/PPM Program > 1	Program	3	Maksimal Maximum	1	5	110,00	1,10
B. Inovasi Model Bisnis B. Business Model Innovation								
14	Kontribusi EAT Anak & Cucu Perusahaan serta *Joint Ventures & Associated Companies* EAT Contributions of Company Subsidiaries & Subsubsidiaries and Joint Ventures Ventures & Associated Companies	Rp Miliar Rp Billion	1.063	Maksimal Maximum	5	1.149	108,06	5,40
15	Penjualan listrik HBAP ke PLN HBAP electricity sales to PLN	MWH	4.606.368	Maksimal Maximum	5	100%	100,00	5,00
16	Implementasi digitalisasi produksi/teknologi robotik pada *smelter/site* tambang Implementation of digitalization of production/robotic technology at smelters/mining sites	Program	1	Maksimal Maximum	2	2	110,00	2,20
17	Penjualan komoditas Batu bara melalui MIND ID Trading Sales of Coal commodities through MIND ID Trading	Ton	1.650.000	Maksimal Maximum	2	2.867.728	110,00	2,20
18	Penyelesaian Program Kerja *Sub Committee Procurement* di tahun 2023 Completion of the Procurement Sub Committee Work Program in 2023	%	100	Maksimal Maximum	4	80	80,00	3,20
19	Mendukung implementasi fungsi sentralisasi di Grup MIND ID Supports the implementation of centralized functions in the MIND ID Group	Ton	1.630	Maksimal Maximum	5	1.634	100,27	5,01
20	Penurunan *Cash Cost* per ton Reducing Cash Cost per ton	%	3,0	Maksimal Maximum	3	14,0	110,00	3,30
21	Kepatuhan terhadap kajian remunerasi dengan standar P75 Compliance with remuneration review with standard P75							
	1. *EC/Revenue*	%	3,80	Minimal Minimum	3.2	5,00	68,47	2,19
	2. EC/EBITDA	%	12,70	Minimal Minimum	1.6	20,64	37,48	0,60
	3. EC/Total Cost	%	5,50	Minimal Minimum	3.2	5,90	92,73	2,97
22	Efisiensi Biaya Kontrak Jasa Penambangan untuk Pekerjaan Tahunan 2025 Mining Service Contract Cost Efficiency for 2025 Annual Work	%	10	Range	5	13	110,0	5,50
23	Penambahan alokasi pekerjaan jasa penambangan batu bara untuk anak usaha *Mining Services* PTBA Additional allocation of coal mining services work for PTBA's Mining Services subsidiary	%	160	Maksimal Maximum	1	164	102,50	1,03
24	Kajian potensi *unlocking logistic* dari mulut tambang Study of the potential for unlocking logistics from the mine mouth	Waktu Times	Sep-23	Minimal Minimum	2	Sep-23	100,00	2,00

Pencapaian KPI Direksi Berdasarkan Perspektif
KPI Achievements for Board of Directors Based on Perspective

No	KPI Unit KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Pencapaian Achievement		
						REAL REAL	%	Bobot Weight
C. Kepemimpinan Teknologi C. Technology Leadership								
25	Pra Sertifikasi ISO 20001 *Information Technology Service Management* (ITSM) *Implementation* di MIND ID Pre-Certification ISO 20001 Information Technology Service Management (ITSM) Implementation at MIND ID	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	1	Nov-23	110,00	1,10
26	*MCT Development*	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	2	Dec-23	100,00	2,00
27	Pengembangan teknologi sintesis *artificial graphite* dari *coalite* Development of artificial graphite synthesis technology from coalite	TRL	5	Maksimal Maximum	3	5	100,00	3,00
D. Peningkatan Investasi D. Investment Enhancement								
28	Penyelesaian FEED atas inisiatif *Coal to Activated Carbon* FEED completion of the Coal to Activated Carbon initiative	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	3	Oct-23	110,00	3,30
29	Proyek TE-Keramasan - *Groundbreaking* CHF & TLS TE-Keramasan Project - CHF & TLS ground breaking	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	4	Dec-23	100,00	4,00
30	Proyek TE-Perajen - Penyelesaian dokumen TOR untuk pengadaan konsultan *preliminary design* CHF & TLS (bila FID diterima) TE-Perajen Project - Completion of TOR documents for procurement of CHF & TLS preliminary design consultants (if FID is accepted)	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	2	100%	100,00	2,00
31	Pekerjaan pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan BACBIE BACBIE Area Basic Infrastructure development work	Waktu Times	Dec-23	Minimal Minimum	1	100%	100,00	1,00
E. Pengembangan Talenta E. Talent Development								
32	% Perempuan dalam *nominated talent* % Women in nominated talent	%	10	Maksimal Maximum	1	15	110,00	1,10
33	% milenial (< 42 tahun) dalam *nominated talent* % of millennials (< 42 years old) in nominated talents	%	5	Maksimal Maximum	1	69	110,00	1,10
34	Rotasi *Talent* (talent mobility) di perusahaan grup MIND ID atau lingkungan KBUMN Talent Rotation (talent mobility) in MIND ID group companies or KBUMN environment	Orang People	8	Maksimal Maximum	1	10	110,00	1,10
35	Pemenuhan data Perusahaan dan Pengurusan Hasil RUPS dalam Pergantian Pengurus dari Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi di Grup PTBA Fulfillment of Company Data and Management of GMS Results in Changing Management of Subsidiaries and Affiliated Companies in the PTBA Group	Waktu Times	30 hari setelah pelaksanaan RUPS pada entitas terkait 30 days after GMS on related entity	Minimal Minimum	1	16	109,5	1,10
36	Pemenuhan kapabilitas Tenaga Kerja Spesialis dalam bidang lingkungan – Sertifikasi *Lead Auditor* ISO 14001 Fulfillment of specialist workforce capabilities in the environmental sector - ISO 14001 Lead Auditor Certification	Orang People	2	Maksimal Maximum	1	2	100,00	1,00
37	Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Completion of the Roadmap for Restructuring Defined Benefit Pension Funds	Waktu Times	Oct-23	Minimal Minimum	2	Oct-23	100,00	2,00
	Jumlah **Total**				**100**			**97,30**

Pencapaian KPI Secara Individual
Individual KPI Achievement

Nama Name	Jabatan Position	Nilai Value
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	97,30*
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	102,18
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	102,34
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	102,62
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	101,67

Catatan | Notes :
*Skor penilaian mengacu pada KPI Kolegial
The assessment score refers to the collegial KPI



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Commissioners

Pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang Pemegang Saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Prosedur Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan kewenangan Pemegang Saham. Sebagai anggota *holding*, prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PTBA mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA harus memenuhi persyaratan formil, materil, serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan pada ketentuan tersebut, termasuk telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Keputusan RUPS.

Kriteria Dewan Komisaris

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan;

Appointment and dismissal as well as determining the amount of remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners are under the authority of Shareholders which is carried out through the GMS mechanism.

Procedure for Nomination of Members of the Board of Commissioners and Directors

The appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Directors is within the authority of the Shareholders. As a holding member, the appointment procedures for the Board of Commissioners and Directors of PTBA refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

All prospective members of the Board of Commissioners and Directors of PTBA must meet formal and material requirements, as well as other requirements stipulated in these provisions; including passing the Fit and Proper Test (UKK). The appointment of the Board of Commissioners and Directors is carried out by Shareholders through a GMS Resolution.

Criteria for Board of Commissioners

Persons who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who can fulfill the following requirements at the time of appointment and during their term of office:

1. Have good morals and integrity;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Within 5 (five) years before appointment and during office must:
   a. Never declared bankruptcy;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners who was found guilty of causing bankruptcy in a company;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector and;
   d. Never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners while serving:
      - Never held an Annual GMS;
      - Their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS and;

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan tahunan dan/atau Laporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
6. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana ketentuan nominasi diantaranya persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Perusahaan dan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Kriteria Direksi

Kriteria persyaratan calon anggota Direksi yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi PTBA, yaitu:

1. Memiliki akhlak, moral, dan integritas baik;
2. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
3. Cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dipailitkan;
   b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - Pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- Have ever led a company to obtain a permit agreement or registration from OJK does not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK.

4. Have a commitment to comply with statutory regulations;
5. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
6. Fulfill other requirements as stipulated in the nomination provisions, including the requirements in the Limited Liability Company Law, capital market regulations, and other laws and regulations applied to the Company and other laws related to the Company's business activities.

Criteria for Board of Directors

The criteria for members of the Board of Directors contained in the Articles of Association and Work Guidelines for the Board of Directors of PTBA are:

1. Have good morals and integrity;
2. Have a high leadership spirit and dedication to advance and develop the Company;
3. Capable of carrying out legal actions;
4. Within 5 (five) years before appointment and during office the concerned person must:
   a. Never been bankrupted;
   b. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a bankruptcy in the company;
   c. Never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector;
   d. Never been a Member of the Board of Directors and/or Member of the Board of Commissioners during their term of office:
      - Never held an annual GMS;
      - Accountability as a Member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never performed accountability as a Member of the Board of Directors and/or Member of the Board of Commissioners to the GMS; and/or
      - Has ever caused a company that obtained a permit, approval or registration from the OJK to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial reports to the OJK.

5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta tunduk pada ketentuan dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan, dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;
7. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

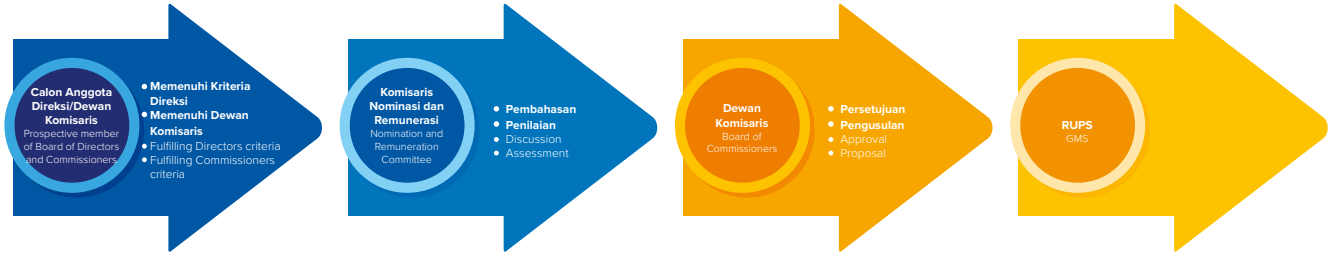
Mekanisme Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas kemudian akan dibahas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Setelah dilakukan pembahasan, usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada RUPS untuk disahkan.

5. Have a commitment to comply with statutory regulations, and comply with the provisions in the Management Contract signed by the Company's Directors, the Company's Board of Commissioners, and representatives of the Series A Dwiwarna Shareholders;
6. Have knowledge and/or expertise in the field required by the Company;
7. Fulfill other requirements as stipulated in the Company's Articles of Association and other requirements determined by Series A Dwiwarna shareholders or their proxies as long as they do not conflict with applicable laws and regulations.

Nomination Mechanism for Board of Directors and Commissioners

Candidates for members of the Board of Commissioners and Directors who meet the above provisions will then be discussed by the Nomination and Remuneration Committee. After discussion, the proposal will be submitted to the Board of Commissioners and then submitted to the GMS for ratification.



Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi

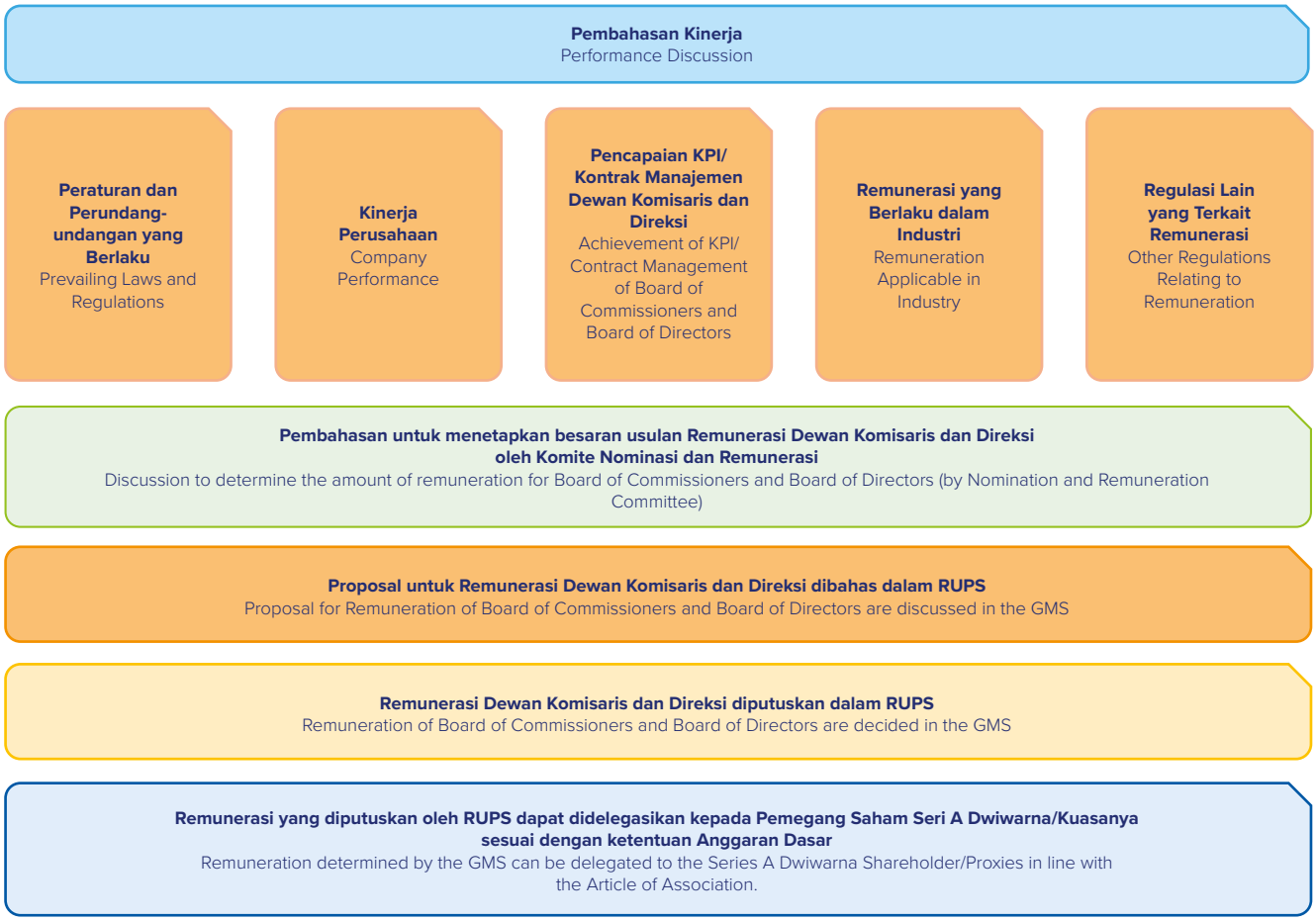
Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Terkait penetapannya, itu mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners

Remuneration Determination Procedure

The procedure to determine the remuneration of the Board of Commissioners and Directors is based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on March 3, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The determination refers to the results of the GMS by considering the results of studies carried out by the Board of Commissioners through in-depth research by Shareholders. Decisions on determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are agreed upon the Annual GMS.

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Chart of Procedures for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Kinerja Perusahaan;
3. Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan;
5. Regulasi lain yang terkait.

Hasil kajian disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham, berdasarkan aturan remunerasi yang berlaku di Kementerian BUMN.

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023, diberikan berdasarkan pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun buku 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Audit serta penilaian KPI tahun 2022, yang merupakan bahan pertimbangan dalam menetapkan tantiem dan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Indicators to Determine the Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

The structure, policy, and amount of remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors must consider the following matters:

1. Prevailing laws and regulations;
2. Company Performance;
3. Performance of Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Applicable remuneration in the industry following the business activities of the Company, which has the same type and scale of business as the Company;
5. Other related regulations.

The results of the study are submitted by the Board of Commissioners as material for proposals to determine remuneration to Shareholders, based on the remuneration regulations at the SOEs Ministry.

Indicators for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Directors for 2023 are given based on the Company's performance achievements in the 2022 financial year as stated in the Audit Financial Report and the 2022 KPI assessment, which is a consideration in determining bonuses and remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.

Struktur Remunerasi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023, pada mata acara ketiga RUPS memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak seteiah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi Perusahaan untuk Tahun 2023. Berikut struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PTBA tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 57/DEKOM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk serta Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium dan Penghasilan Tahun 2023 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk ("PTBA"), maka susunan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure

Based on the resolution of the Annual General Meeting on June 15, 2023, the third agenda of the meeting decided:

1. Granted authority and power to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the majority shareholder for the Series B Shares by first consulting with Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Financial Year and determine the honorarium, allowance, other facilities and incentives for members of the Company's Board of Commissioners in 2023.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the majority shareholder of the Series B Shares after consulting with Dwiwarna Series A Shareholders to determine the amount of the bonus for the 2022 Financial Year and determine the salary, allowance, facilities, and other incentives for the Company's Board of Directors in 2023. The following is the remuneration structure for the Board of Commissioners and Directors of PTBA in 2023.

Furthermore, based on the Letter of the Board of Commissioners No. 57/DEKOM/VIII/2023 on August 14, 2023, concerning the Determination of the Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salary/Honorarium as well as the Benefits and Facilities for the 2023 Financial Year of PT Bukit Asam Tbk and the Portfolio Director's Letter and Business Development PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 on August 11, 2023, Regarding the Determination of Bonus for the 2022 Financial Year and Salary, Honorarium, and Income for for Directors and Members of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") in 2023, the remuneration structure for PTBA's Directors and Board of Commissioners is as follows:

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
1	Honorarium dengan pengaturan: • Komisaris Utama sebesar 45% gaji Direktur Utama. • Komisaris sebesar 90% gaji/honorarium Komisaris Utama. Honorarium with arrangements: • President Commissioner: 45% of salary/honorarium of President Director. • Commissioner: 90% salary/honorarium of President Commissioner	Gaji dengan pengaturan: • Direktur Utama sebesar 100%. • Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji/honorarium Presiden Direktur. Salary with arrangements: • President Director at 100%. • Directors at 85% of salary/honorarium president director
2	Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium. Religious holiday allowance of 1 (one) time honorarium.	Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji. Religious holiday allowance of 1 (one) time salary.
3	Asuransi Purna Jabatan dengan premi sebesar maksimal 25% gaji/honorarium per tahun. Post-employment insurance with a maximum premium of 25% honorarium per year.	Asuransi Purna Jabatan dengan premi sebesar maksimal 25% gaji/honorarium per tahun. Post-employment insurance with a maximum premium of 25% salary/honorarium per year.
4	Tidak Ada Tunjangan Perumahan No housing allowance	Tunjangan Perumahan Rp22.500.000 per bulan. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 apabila Direksi masih mendapatkan fasilitas rumah dinas dapat tetap mengunakan fasilitas tersebut paling lambat 31 Desember 2023. Housing Allowance of Rp22,500,000 per month. In accordance with SOEs Ministerial Regulation Number PER-03/MBU/03/2023, if the Directors still using official housing facilities, they can continue to use the facility no later than December 31, 2023.

No.	Jenis Penghasilan Type of Income	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
5	Tunjangan Transportasi 20%/honorarium per tahun Transportation Allowance: 20%/honorarium per month	Fasilitas kendaraan sebanyak 1 (satu) unit. dengan spesfikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasi baterai (*battery electric vehicle*). Vehicle facilities of 1 (one) unit with vehicle specifications and types regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for fuel-based vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles.
6	Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan sesuai dengan pemakaian (*at cost*). Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost).	Fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan sesuai dengan pemakaian (*at cost*). Health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost).
7	Pemberian fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (*at cost*). Providing legal aid facilities in the amount of usage (at cost)	Pemberian fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (*at cost*). Providing legal aid facilities in the amount of usage (at cost)
8	Komposisi besarnya tantiem sesuai dengan keputusan RUPS yang didelegasikan kepada Dewan Komisaris. The composition of the amount of the bonus is according to the GMS resolution delegated to the Board of Commissioners.	Komposisi besarnya tantiem sesuai dengan keputusan RUPS yang didelegasikan kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna. The amount of the bonus composition is according to the resolution delegated to PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) as the proxy for Series A Dwiwarna shareholder.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sebagai berikut:

Nominal Amount/Component of Remuneration

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in the 2023 fiscal year is as follows:

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun 2022 2022 Bonus	Jumlah Total
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	1.379.970.000	275.994.000	108.945.000	4.799.250.000	6.564.159.000
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.307.340.000	261.468.000	108.945.000	4.799.250.000	6.477.003.000
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	1.307.340.000	261.468.000	108.945.000	4.799.250.000	6.477.003.000
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	1.307.340.000	261.468.000	108.945.000	4.799.250.000	6.477.003.000
Kurnia Toha*	Komisaris Independen Independent Commissioner	762.615.000	152.523.000	-	-	915.138.000
Rahmat Hidayat Pulungan*	Komisaris Independen Independent Commissioner	762.615.000	152.523.000	-	-	915.138.000
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent	484.200.000	96.840.000	121.050.000	5.332.500.000	6.034.590.000
Devi Pradnya Paramita*	Komisaris Commissioner	326.835.000	65.367.000	-	-	392.202.000

*Catatan | Notes:
1) Pada tanggal 21 Maret 2023, Sdri. Devi Pradnya Paramita (Komisaris) masa jabatannya berakhir karena hukum. mengingat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTBA yang bersangkutan dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris di PTBA. pasca dialihtugaskannya dari Direktur *Holding* (MIND ID) menjadi sebagai Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (sister company PTBA).
2) Pada tanggal 11 April 2023, Sdr Agus Suhartono (Komisaris Utama/Independen) berakhir jabatannya karena hukum untuk periode kedua.
3) Sdr. Kurnia Toha dan Sdr. Rahmat Hidayat Pulungan menjabat terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 15 Juni 2023.
4) Tantiem atas tahun buku 2022 sebagaimana di atas termasuk tantiem yang di *lock* oleh PTBA sebagaimana ketentuan persyaratan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023
1) On March 21, 2023, Devi Pradnya Paramita (Commissioner)'s term of office ended due to applicable law considering that in accordance with the provisions of the PTBA Articles of Association, the person concerned is prohibited from holding concurrent positions as Commissioner at PTBA after being transferred from Director of Holding (MIND ID) to Director of Finance at PT Indonesia Asahan Aluminum (PTBA Sister Company).
2) On April 11, 2023, Agus Suhartono (Main/Independent Commissioner) ended his position due to applicable law for the second period.
3) Kurnia Toha and Rahmat Hidayat Pulungan took office since the date of the 2022 Annual GMS on June 15, 2023.
4) Bonuses for the 2022 financial year as written above include bonuses locked by PTBA in accordance with the requirements of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Direksi
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Honorarium	Tunjangan Incentive	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tantiem atas Tahun 2022 2022 Bonus	Jumlah Total
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	3.228.000.000	270.000.000	269.000.000	11.850.000.000	15.617.000.000
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Director of Operational and Production	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	2.743.800.000	270.000.000	228.650.000	10.072.500.000	13.314.950.000

*Catatan | Notes:
Tantiem atas tahun buku 2022 sebagaimana di atas termasuk tantiem yang di *lock* oleh PTBA sebagaimana ketentuan persyaratan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Bonuses for the 2022 financial year as written above includes the bonus locked by PTBA in accordance with the regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

The Amount of Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Uraian Description	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris The Amount of Remuneration for Board of Commissioners	34.252.236.000
Jumlah Remunerasi Direksi The Amount of Remuneration for Board of Directors	68.876.800.000

Informasi Mengenai Rasio Gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan

Information on the salary ratio of Board of Commissioners, Board of Directors, and PTBA Employees

Perihal Description	2023	2022	2021
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Directors	1 : 1	1 : 2	1 : 1
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to the Board of Commissioners	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1 : 0.4	1 : 2	1 : 1
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi President Director to the Highest Employee	1 : 0.231	1 : 0.968	1 : 0.283
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah *Full Year* President Director to the Lowest Full Year Employee	1 : 0.01	1 : 0.028	1 : 0.013
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah President Director to the Lowest Employee	1 : 0.001	1 : 0.002	1 : 0.001
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah *Full Year* President Director to the Lowest Full Year Employee	1 : 0.042	1 : 0.029	1 : 0.047
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to the Lowest Employee	1 : 0.004	1 : 0.002	1 : 0.01
Karyawan Terendah *Full Year* terhadap UMP Lowest Full Year Employee to the Provincial Minimum Wage	1 : 0.271	1 : 0.348	1 : 0.332
Karyawan Terendah terhadap UMP Lowest Employee to the Provincial Minimum Wage	1 : 3	1 : 6	1 : 3

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah karyawan dengan jumlah penghasilan tertinggi selama satu tahun buku, sementara karyawan terendah *full year* adalah karyawan dengan penghasilan terendah selama satu tahun buku yang masa kerjanya selama 12 bulan, dan karyawan terendah adalah karyawan dengan penghasilan terendah selama satu tahun buku yang masa kerja nya kurang dari 12 bulan.

The highest employee in the table above is an employee with the highest amount of income for one fiscal year, while the lowest full-year employee is an employee with the lowest salary for one fiscal year with 12 months working period. The lowest employee is an employee with the lowest salary for one fiscal year with a working period of less than 12 months.

Hubungan Afiliasi antara Direksi dan Dewan Komisaris

Affiliations among the Board of Directors and Board of Commissioners

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi antar anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi, atau Direksi dengan Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan sehingga Dewan Komisaris maupun Direksi akan sanggup mengambil keputusan tanpa merugikan Perusahaan.

The Company's the Board of Commissioners and the Board of Directors are prohibited from having affiliated relationships between members of the Board of Commissioners, between members of the Board of Directors, or between the Board of Directors and the Board of Commissioners, or with Shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This aims to avoid conflicts of interest so that the Board of Commissioners and the Board of Directors will be able to make decisions without harming the Company.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Family relationships of members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and Major/Controlling Shareholders can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Affiliation					
		Dewan Komisaris the Board of Commissioners		Direksi the Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Main/Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris the Board of Commissioners							
Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	√	-	√
Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
E. Piterdono HZ	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√
Direksi the Board of Directors							
Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√
Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	-	√	-	√	-	√
Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	-	√	-	√	-	√
Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	-	√	-	√	-	√
Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	-	√	-	√	-	√

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and The Board of Directors Composition Diversity

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menyatakan bahwa komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ maupun secara individu masing-masing. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dan pengurusan oleh Direksi.

Based on the recommendation from the Financial Services Authority as outlined in the Appendix to Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, the composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of organs and individually respectively. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience required in carrying out supervisory and advisory duties by Board of Commissioners and management by Board of Directors.

Komposisi keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari pendidikan/ bidang keilmuan, kompetensi, keahlian, gender, usia dan pengalaman kerja. Keberagaman komposisi tersebut dianggap perlu oleh Perusahaan ketika proses pengambilan sebuah keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah.

The composition of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company consists of members who have different backgrounds ranging from education/ scientific fields, competencies, expertise, gender, age, and work experience. The Company's diversity of composition is needed to create a more objective and comprehensive decision-making process. It is also expected to provide alternative solutions.

Keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTBA yang menjabat di tahun 2023, disampaikan pada tabel berikut.

The following is the diversity of composition by each member of PTBA's Board of Commissioners and Board of Directors in 2023.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
1	Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commisioner	72	Pria Male	• S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) • S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) • S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) • Postgraduate at the Ecoles des Mines de Nancy, France (1991) • Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) • Bachelor Degree in Mining at Bandung Institute of Technology (1976)	• Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) • Independent Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Underground Mining Advisor at PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Independent Commissioner at PT Antam Tbk (2009) • Independent Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2018)
2	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner	61	Pria Male	• Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) • Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985) • Army Forces Staff and Command School (2008) • Air Forces Staff and Command School (1998) • Air Force Unit Command School (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985)	• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) • Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) • Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) • Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) • Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) • Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
3	E. Piterdono Hz	Komisaris Commissioner	63	Pria Male	• S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) • S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) • S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) • Master Degree of Bandar Lampung University (2001) • Bachelor Degree in Economy Management of Saburai Lampung University (2001) • Bachelor Degree in Geological Engineering of UPN Veteran Yogyakarta (1986)	• Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) • Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) • Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) • Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) • Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
4	Carlo Brix Tewu	Komisaris Commissioner	61	Pria Male	• Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) • Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) • Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) • Akademi Kepolisian (1994) • Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) • National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) • Police Staff and Leadership School (1998) • Police Academy (1994)	• Tenaga Ahli Menteri BUMN bidang Mediasi (2023-sekarang) • Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2020-2023) • Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) • Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) • Expert Staff of the Minister of SOEs in Mediation (2023-present) • Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) • Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) • West Sulawesi Acting Governor (2016) • Director of Criminal Acts for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
5	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner	62	Pria Male	• S3, University of Washington School of Law (2007) • S2, University of Washington School of Law (1998) • S1, Hukum, Universitas Indonesia (1987) • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor Degree in Law from Universitas Indonesia (1987)	• Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Head of Law and Public Relations Department at the Agrarian and Spatial Planning Ministry (2016-2018) • Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2023)
6	Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner	45	Pria Male	• S3, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020. • S2, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 • S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute pada tahun 2012 • S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta pada tahun 2001 • Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) • Master Degree at Jakarta State University (2016) • S1, Faculty of Economics and Business, Perbanas Institute in 2012 • S1, Sharia Faculty at IAIN Jakarta in 2001	• Komisaris PT Berdikari (2013-2015) • Komisaris PT Rekayasa Industri (2015-2017) • Komisaris Independen PT KAI (Persero) (2017-2021) • Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Commissioner of PT Berdikari (2013-2015) • Commissioner of PT Rekayasa Industri (2015-2017) • Independent Commissioner of PT KAI (2017-2021) • Independent Commissioner of PT Kimia Farma Tbk (2021-2023)
7	Arsal Ismail	Direktur Utama President Director	59	Pria Male	• S2, Administrasi dan Kebijakan Bisnis, Universitas Indonesia (2004) • Master of Business Administration and Policy, University of Indonesia (2004)	• Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) • *President Director* PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) • *President Director* PT Muba Coal (2016-2020) • Direktur Marketing PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016) • Business Development Director of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2020-2021) • President Director of PT Nuansa Cipta Coal Investment (2016-2020) • President Director of PT Muba Coal (2016-2020) • Marketing Director of PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (2015-2016)

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Tabel of Board of Commissioners and Board of Directors Diversity in 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Sex	Pendidikan Education	Pengalaman Experience
8	Farida Thamrin	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	51	Wanita Female	S1, Teknik Sipil Universitas Indonesia (1996) Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia (1996)	• *Group Head Corporate Solution* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-April 2021) • *Group Head Treasury* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • *Group Head Market Risk* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Group Head Corporate Solution of PT Bank Mandiri Tbk (2019-April 2021) • Group Head Treasury of PT Bank Mandiri Persero (2016-2019) • Group Head Market Risk of PT Bank Mandiri Persero (2015-2016)
9	Suhedi	Direktur Operasi dan Produksi Operation and Production Director	60	Pria Male	S1, Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (1990) Bachelor of Geology Engineering from Gadjah Mada University (1990)	• General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) • General Manajer Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk (2016-2020) • General Manager for Tanjung Enim Mining Unit of PT Bukit Asam Tbk (2016-2020)
10	Rafli Yandra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	54	Pria Male	• Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) • S2, Manajemen di Universitas Sriwijaya (2012) • S1, Teknik Sipil di Universitas Andalas (1995) • Master of Business Administration, George Simon Ohm – Management Institut Nurnberg, Jerman (2015) • Master in Management of Sriwijaya University (2012) • Bachelor in Civil Engineering of Andalas University (1995)	• *Vice President* Penanganan dan Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) • Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) • *Vice President* Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (2017-2019) • Vice President of Coal Handling and Transportation of PT Bukit Asam Tbk (2020-2021) • President Director of PT Bukit Prima Bahari (2019-2020) • Vice President Marketing and Export Sales of PT Bukit Asam Tbk (2017-2019)
11	Suherman	Direktur Sumber Daya Manusia Human Resources Director	57	Pria Male	• S2, Manajemen Universitas Sriwijaya (2007) • S1, Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990) • Master in Management, Sriwijaya University (2007) • Bachelor in Economics, Sriwijaya University (1990)	• Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2020-2021) • Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) • Senior Manajer Perbendaharaan dan Anggaran PT Bukit AsamTbk (2016-2017) • Senior Manajer Perbendaharaan dan Pendanaan PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) • Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran PT Bukit Asam Tbk (2009-2014) • President Director of PT Bukit Multi Investama (2020-2021) • Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (2017-2020) • Senior Manager of Treasury and Budget of PT Bukit Asam Tbk (2016-2017) • Senior Manager of Treasury and Funding of PT Bukit Asam Tbk (2014-2016) • Senior Manager of Accounting and Budgeting of PT Bukit Asam Tbk (2009-2014)

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of the Board of Commissioners

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang berada di bawahnya. Organ pendukung Dewan Komisaris PTBA, yaitu:

1. Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Risiko Usaha, Pasca tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) (Dimana sejak tanggal 15 Desember 2023 Komite tersebut dipecah menjadi 2 yaitu (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dan (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi).

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris guna membantu kelancaran pekerjaan terkait kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Di samping tugas kesekretariatan, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat juga bertugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Kriteria

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
3. Memiliki integritas yang baik;
4. Memahami fungsi kesekretariatan;
5. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

In order to support the effective implementation of supervisory duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely:

1. Secretariat of the Board of Commissioners;
2. Audit Committee;
3. Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee (Whereas since December 15, 2023, the Committee has been divided into two, namely (i) Risk Monitoring and Integrated Governance Committee and (ii) Nomination and Remuneration Committee).

Secretariat of Board of Commissioners

The Board of Commissioners forms Secretariat of the Board of Commissioners to assist them in all activities related to their responsibilities. The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners, who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Besides secretarial duties, the Secretary of the Board of Commissioners as head of the Secretariat is also responsible to ensure that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies the principles of good corporate governance in carrying out their duties. In the context of orderly administration and implementation of good corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners must ensure that documents for carrying out the activities of the Board of Commissioners are stored properly in the Company.

Criteria

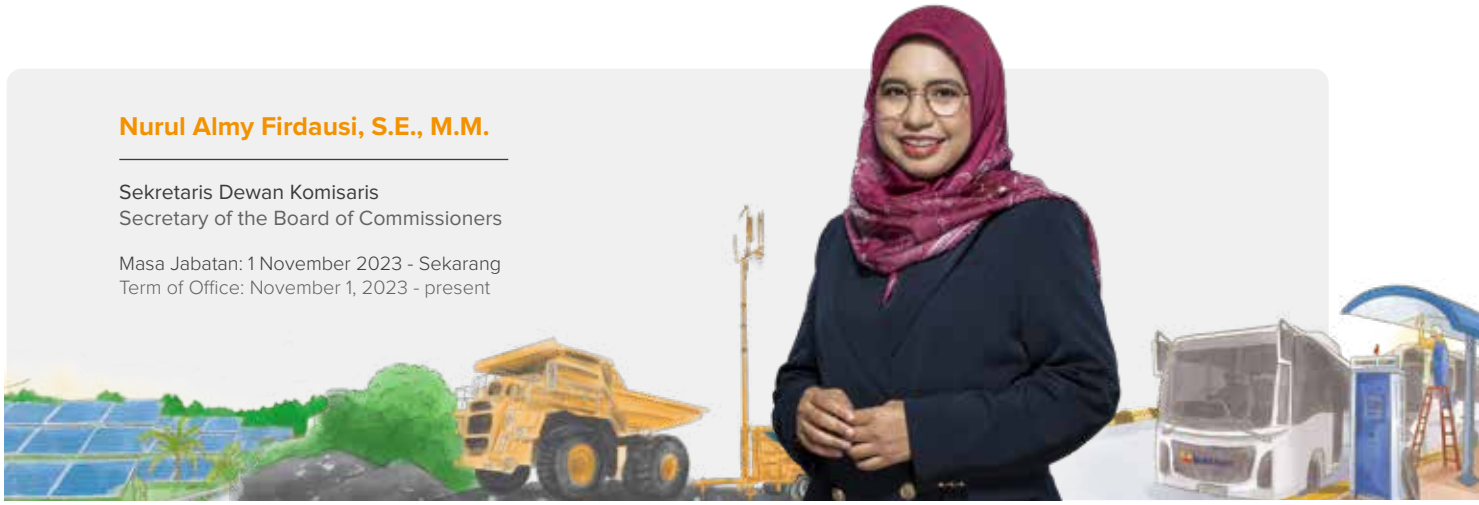
The Secretary to the Board of Commissioners must fulfill the following requirements:

1. Comes from outside the Company;
2. Understand the system of management, supervision, and development of the Company;
3. Have good integrity;
4. Understand secretarial functions;
5. Have the ability to communicate and coordinate well.

Term of Office

Based on the provisions of Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners at 3 (three) years and can be reappointed for 2 (two) years, without reducing the rights of the Board Commissioner to dismiss the concerned person at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of the Secretary of the Board of Commissioners



Nurul Almy Firdausi, S.E., M.M.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Masa Jabatan: 1 November 2023 - Sekarang
Term of Office: November 1, 2023 - present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Bogor, 7 April 1985/ 38 Tahun Bogor, April 7, 1985/ 38 Years Old
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Board of Commissioners Decree No. 06/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 on October 31, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Manajemen Bisnis, Bina Nusantara Business School (2021) • S1, Ekonomi – Akuntansi, Universitas Indonesia (2009) • D3, Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003) • Master Degree at Business Management from Bina Nusantara Business School (2021) • Bachelor's Degree in Economics – Accounting from University of Indonesia (2009) • Diploma in Accounting from Indonesian State College of Accountancy (2003)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Koordinator Bidang Jasa Pariwisata & Pendukung, Kementerian BUMN (2023 – sekarang) • Subkoordinator Bidang Jasa Pariwisata & Pendukung, Kementerian BUMN (2021-2023) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2018-2023) • Subkoordinator Bidang Usaha Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian BUMN (2020-2021) • Tourism & Support Services Coordinator at SOEs Ministry (2023-present) • Sub-coordinator for Tourism & Support Services at SOEs Ministry (2021-2023) • Secretary of the Board of Commissioners at PT Wijaya Karya Tbk (2018-2023) • Sub-coordinator for Logistics, Regional and Tourism Business Sector at SOEs Ministry (2020-2021)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	PNS Kementerian BUMN Civil servants of the Ministry of SOEs
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wilma Darwin, E.E., M.S., Ak.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Masa Jabatan: 1 Januari 2023 - 30 Oktober 2023
Term of Office: January 1, 2023 - October 30, 2023

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Padang, 26 November 1972/51 tahun Padang, November 26, 1972/51 years
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Kedua kali diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Bukit Asam tanggal 26 April 2022, 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2022 Second time appointed as Secretary of the Board of Commissioners of Bukit Asam on April 26, 2022, 01/SK/PTBA-DEKOM/IV/2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia (2008) • S1 Manajemen, Universitas Andalas (1995) • Master Degree in Accounting Science Postgraduate Program, University of Indonesia (2008) • Bachelor Degree of Management, Andalas University (1995)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2019-2023) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Timah Tbk (2016-2019) • Pegawai Negeri Sipil (PNS) (1996-sekarang) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk (2019-2023) • Secretary of the Board of Commissioners of PT Timah Tbk (2016-2019) • Civil Servants (PNS) (1996-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	PNS Kementerian BUMN Civil servants of the Ministry of SOEs
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman kerja Sekretariat Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk., berdasarkan hal tersebut tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas Sekretariat Dewan Komisaris:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
d. Menyusun RKA Dewan Komisaris;
e. Menyusun rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk., the duties and responsibilities related to the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

The Duties of the Secretariat of the Board of Commissioners include, among others:

a. Prepare meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
b. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the company's Articles of Association;
c. Administering the Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
d. Prepare RKA for the Board of Commissioners;
e. Prepare draft reports for the Board of Commissioners;

f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sedangkan tugas yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, yaitu:
a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG;
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

f. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

Meanwhile, the responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are:
a. Ensuring the Board of Commissioners complies with statutory regulations and applies GCG principles;
b. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
c. Coordinating committee members, if necessary in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
d. As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

Competency Development

The competency development program carried out by the Secretary of the Board of Commissioners throughout 2023 is as follows:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023
Table of Competency Development for the Secretary to the Board of Commissioners in 2023

Nama Peserta Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Date and Place
Wilma Darwin	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	*Driving Collaborative Leadership in Charging Time*	PTBA	• 12 Januari 2023, Tanjung Enim • January 12, 2023, Tanjung Enim
		Webinar INSIGHT "Direksi Bercerita" INSIGHT Webinar "Direksi Bercerita"	Kementerian BUMN SOEs Ministry	• 31 Januari 2023, online • January 31, 2023, online
		1. Mining Industry Outlook & Top Risk 2023 2. Overview Aspek Penerapapan Manajemen Risiko dalam Permen BUMN no 2/MBU/03/2023 3. Fraud Risk Management 1. Mining Industry Outlook & Top Risk 2023 2. Overview Aspek Penerapapan Manajemen Risiko dalam Permen BUMN no 2/MBU/03/2023 3. Fraud Risk Management	Delloitte -MIND ID-PTBA	• 30 Maret 2023, online • March 30, 2023, online
		BSE GRC MasterClass-Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & anak Perusahaan BUMN BSE GRC MasterClass-Socialization of the Ranking of SOEs & SOEs subsidiaries	BUMN School of excellence	• 14 September 2023, online • September 14, 2023, online
		ESG for Boards – Governance of ESG	BUMN School of excellence	• 27 September 2023, online • September 27, 2023, online
		GRC Integrated Information for Supervisionary Board	BUMN School of excellence	• 25 Oktober 2023, online • October 25, 2023, online
		CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	BUMN School of excellence	• 25 Oktober 2023, online • October 25, 2023, online
Nurul Almy F	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	*Managing For Development Result*	PLN Training Center	• 3 Oktober 2023, Jakarta • October 3, 2023, Jakarta
		Result-Focused Project Design & Monitoring Framework	Mandiri University & Asian Development Bank	• 9 Juni 2023, Jakarta • June 9, 2023, Jakarta
		Idea Talks Vol 3 : Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function	OJK Institute	• 9 Februari 2023, online • February 9, 2023, online
		Short Course: "Seminar on Reform and Governance of State-Owned Enterprise in China"	International Cooperation Center (ICC) of National Development and Reform Commission (NDRC) China	• 31 Agustus – 20 September 2023, Tiongkok • August 31-September 20, 2023, China

Kebijakan dan Besaran Remunerasi

Penetapan remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Pedoman kerja Sekretariat Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Remuneration Policy and Amount

The determination of the remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners is regulated in Board of Commissioners Decision No. 17/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Guidelines for the Secretariat of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, and in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala setiap tahunnya berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas administrasi, termasuk mengkoordinasikan anggota Komite dan sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Secara umum, di tahun 2023 Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tercermin dari realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Performance Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners

Performance Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners is periodically evaluated by the Board of Commissioners based on the implementation of duties and responsibilities of Secretary of the Board of Commissioners in carrying out administrative duties, including coordinating Committee members and serving as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners has carried out its duties and functions well, as reflected in the realization of the Secretary of the Board of Commissioners' KPI as contained in the following table.

Tabel Realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris
Table of KPI Realization of the Secretary of the Board of Commissioners

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	%	Skor Score
Kegiatan Internal Dewan Komisaris Internal Activities of the Board of Commissioners			**20**			**21,20**
Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris Organizing internal meetings of the Board of Commissioners	Terselenggaranya rapat internal Dewan Komisaris setiap bulan The Board of Commissioners internal meeting is being held every month	12x (Kali / Times)	12	15	125	13,2
Menyelenggarakan program pengenalan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Organ Organizing induction and competency development program of Board of Commissioners and Organs	Keikutsertaan Dewan Komisaris dan/atau Organ pada program pengenalan dan peningkatan kompetensi. Participation of the Board of Commissioners and/or Organs in induction and competency development programs.	12x (Kali / Times)	4	2	100	4
Menyelenggarakan kunjungan kerja lapangan Organizing site visits	Terselenggaranya kunjungan lapangan ke Anak Perusahaan/ Unit Site visit to Subsidiaries/Units	4x (Kali / Times)	4	4	100	4
Kegiatan Dewan Komisaris dengan Direksi Activities of the Board of Commissioners with the Board of Directors			**36**			**37,8**
Menyelenggarakan Rapat Komisaris – Direksi Organizing the Board of Commissioners – the Board of Directors Meetings	Terselenggaranya Rapat Dewan Komisaris - Direksi The implementation of meetings for the Board of Commissioners and the Board of Directors	12x (Kali / Times)	18	14	116	19,8
Menyusun RKA dan KPI Dewan Komisaris Develop RKA and KPI of the Board of Commissioners	Tersusunnya RKA dan KPI Dewan Komisaris RKA and KPI of the Board of Commissioners is done	1x (Kali / Times)	18	1	100	18
Kegiatan Dewan Komisaris dengan MIND ID Activities of the Board of Commissioners with MIND ID			**33**			**33**
Menyusun laporan Kinerja Bulanan Prepare Monthly Performance reports	Tersusunnya Laporan Kinerja Bulanan Monthly Performance Reports are done	12 Surat 12 letters	12	12	100	12

Tabel Realisasi KPI Sekretaris Dewan Komisaris
Table of KPI Realization of the Secretary of the Board of Commissioners

Program Kerja Work Program	Uraian Description	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	%	Skor Score
Penyusunan laporan Progres Proyek Strategis Preparation of Strategic Project Progress reports	Tersusunnya Laporan progres proyek strategis Strategic Project Progress reports are done	12 Surat 12 letters	12	12	100	12
Menyusun laporan KPI Triwulanan Prepare Quarterly KPI reports	Tersusunnya Laporan KPI Triwulanan Quarterly KPI reports are done	3 Surat 3 letters	6	3	100	6
Menyusun Laporan Kinerja Anak Perusahaan Triwulanan Prepare Quarterly Subsidiary Performance Reports Company	Tersusunnya Laporan Kinerja Anak Perusahaan Triwulanan Quarterly Subsidiary Performance Reports are done	3 Surat 3 letters	3	3	100	3
Kegiatan RUPS GMS Activities			**11**			**11**
Penyusunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the the Board of Commissioners Supervisory Duties	Tersusunnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Supervisory Duties Report is done	1x	11	1	100	11
Jumlah Total			**100**			**103**

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Implementation of Duties in 2023

In 2023, Secretary of the Board of Commissioners has carried out the following activities:

Tabel Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners' Secretary

No	Program Kerja Work Program	Jumlah Pelaksanaan Realization	Satuan Unit
1	Penyelenggaraan Rapat: Organizing Meetings:		Kali Times
	a. Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	15	
	b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris - Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners - the Board of Directors	14	
	c. Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting	14	
	d. Rapat Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and PSDM Committee meetings	14	
2	Penyusunan RKA dan KPI Dewan Komisaris Preparation of RKA and KPI for the Board of Commissioners	1	Dokumen Documents
3	Persuratan: Letters:		Dokumen Documents
	a. Surat Dewan Komisaris The Board of Commissioners Letter	107	
	b. Nota Dinas Komite Audit Audit Committee Service Note	62	
	c. Nota Dinas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi, dan PSDM Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and PSDM Committee Service Note	49	
4	Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Organizing the Annual GMS and Preparing the Supervisory Duties Report for the Board of Commissioners	1	Kali Times
5	Kunjungan kerja atau secara virtual Work visit or virtual	10	Pertemuan Meetings
6	Keikutsertaan Diklat Participation in training	5	Diklat Trainings

Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committee Under the Board of Commissioners

Sejalan dengan ditetapkannya Nomor:PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN No.2/2023") dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN, MIND ID selaku induk dari PTBA telah menetapkan klasifikasi risiko PTBA berdasarkan Surat Direktur Manajemen Risiko dan HSSE No. 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Berdasarkan penetapan dari MIND ID, PTBA tergolong anak perusahaan MIND ID dengan klasifikasi Sistemik A Individu. Atas penetapan tersebut, maka Komite di bawah Dewan Komisaris PTBA perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kementerian BUMN yang terdiri dari (i) Komite Audit, (ii) Komite Pemantau Risiko merangkap Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan (iii) Komite Nominasi dan Remunerasi.

In line with the enactment of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Significant State-Owned Enterprises Governance and Corporate Activities ("Minister of SOEs Regulation No. 2/2023") and Deputy Deputy for Finance and Risk Management Decision No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions on the Composition and Qualifications of Risk Management Organ in SOE Environment, MIND ID as the parent company of PTBA has established the risk classification of PTBA based on the Letter of Risk Management and HSSE Director No. 171/E.DIRMRHSSE/X/2023 dated October 9, 2023, regarding the Determination of Risk Categories and Classifications of PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Based on MIND ID's determination, PTBA is classified as a MIND ID subsidiary with a Systemic A Individual classification. Following this determination, adjustments need to be made to the Committees under the PTBA Board of Commissioners in accordance with the regulations applicable in the Ministry of SOEs, which consist of (i) Audit Committee, (ii) Risk Monitoring Committee concurrently serving as the Integrated Governance Committee, and (iii) Nomination and Remuneration Committee.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 15 Desember 2023, Dewan Komisaris PTBA telah menetapkan susunan Komite di bawah Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Following up on this matter, during the Internal Board of Commissioners Meeting on December 15, 2023, the PTBA Board of Commissioners determined the composition of Committees under the Board of Commissioners as follows:

Komite Audit
Audit Committee

Jabatan di Komite Position at Committee	Nama Name	Keterangan Description
Ketua Chairman	Andi Pahril Pawi	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wakil Ketua Deputy Chairman	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner
Anggota Member	Dody Masykur	Pihak Independen Independent Party
Anggota Member	Fadhila Achmadi Rosyid	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Audit
Profile of the Audit Committee



Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Marsda TNI (Purn) Andi Pahril Pawi, S.Sos

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bone, 4 April 1962 Bone, April 4, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) (2008) • Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1998) • Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) (1993) • Akademi Angkatan Udara (1985) • Army Forces Staff and Command School (2008) • Air Forces Staff and Command School (1998) • Air Force Unit Command School (1993) • Indonesian Air Force Academy (1985)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN (2017-2020) • Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden (2014-2017) • Kepala Biro Personel TNI dan Polri Sekretariat Militer Presiden (2012-2014) • Expert Staff for Defense and Security of BIN (2017-2020) • Head of Security Bureau of the Presidential Military Secretariat (2014-2017) • Head of the Indonesian Armed Forces and Police Personnel Bureau, Presidential Military Secretariat (2012-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Audit
Vice Chairman of Audit Committee

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 - Present

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lampung, 16 Juni 1961 Lampung, June 16, 1961
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, University of Washington School of Law pada tahun 2007 • S2, University of Washington School of Law pada tahun 1998 • S1, Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Dodi Masykur, SE., Ak., CPA., QIA., CPI., CA

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Masa Jabatan: 2021 - Sekarang
Term of Office: 2021 - Present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Padang, 20 Oktober 1974/49 tahun Padang, October 20, 1974/49 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021 Board of Commissioners Decree Number 02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi, Universitas Andalas (1998) Bachelor Degree of Accountant from Andalas University (1998)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Audit Partner di KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) (2016 – sekarang) • Komite Audit di PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2017-2017) • Internal Audit di PT Pertamina Patra Niaga (2012-2016) • IFRS & ICoFR Specialist di PT Pertamina Patra Niaga (2011-2012) • Komite Audit di PT Barata Indonesia (Persero) (2011-2012) • Nonresident Lecturer di Universitas Sahid (2011-2012) • Managing Director di DDM Consulting – Accounting, Assurance, Finance & Business Advisory Services (2009-2011) • Group Head Finance, Tax & Accounting di PT Energi Tata Persada / Catur Khita Persada Group Integrated Drilling and Project Management Services (2008-2009) • Audit Asisten Manajer di PricewaterhouseCoopers – KAP Haryanto Sahari & Rekan (2006-2008) • Audit Asisten Manajer di RSM Indonesia – KAP Aryanto Amir Jusuf & Mawar (2000-2006) • Auditor Akuntan Publik di KJA Sumatera Barat (1995-1997) • Audit Partner at Hertanto Grace Karunawan KAP – The International Accounting Group (TIAG) (2016-present) • Audit Committee at PT Adhi Karya Tbk (2017) • Internal Audit at PT Pertamina Patra Niaga (2012-2016) • IFRS & ICoFR Specialist at PT Pertamina Patra Niaga (2011-2012) • Audit Committee at PT Barata Indonesia (2011-2012) • Nonresident Lecturer at Sahid University (2011-2012) • Managing Director at DDM Consulting – Accounting, Assurance, Finance & Business Advisory Services (2009-2011) • Group Head Finance, Tax & Accounting at PT Energi Tata Persada / Catur Khita Persada Group Integrated Drilling and Project Management Services (2008-2009) • Audit Assistant Manager at PricewaterhouseCoopers – KAP Haryanto Sahari & Partner (2006-2008) • Audit Assistant Manager at RSM Indonesia – KAP Aryanto Amir Jusuf&Mawar (2000-2006) • Auditor at KJA Public Accountant in West Sumatera (1995-1997)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Partner KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG) Partner KAP Hertanto Grace Karunawan – The International Accounting Group (TIAG)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of the Board of Directors, fellow members of the Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Dr. Eng. Ir. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T.

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Masa Jabatan: 2020 - Sekarang
Term of Office: 2020 - Present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Semarang, 19 Agustus 1982/41 tahun Semarang, August 19, 1982 / 41 years old
Domisili Domicile	Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Periode I: SK Dewan Komisaris No.05/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2020 Periode II: SK Dewan Komisaris No. 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023 Period I: Board of Commissioners Decree Number 05/SK/PTBA/DEKOM/VIII/2020 Period II: Board of Commissioners Decree Number 04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Engineering bidang Ekonomi Mineral, Akita University, Jepang (2017) • S2 Teknik dalam bidang Ekonomi Mineral, Institut Teknologi Bandung (2007) • S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (2004) • Doctoral Degree on Mineral Economy of Akita University, Japan (2017) • Master Degree of Mineral Economy of Bandung Institute of Technology (2007) • Bachelor Degree of Mining Engineering of Bandung Insitute of Technology (2004)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Dosen (Asisten Profesor) di Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung • Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (2020-sekarang) • Peneliti pada Center of Research Excellence (CoRE) Ekonomi dan Manajemen Mineral dan Batubara Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (2012-sekarang) • Lecturer (Professor Assistant) at Mining Engineering of Bandung Institute of Technology • Head of the Undergraduate Mining Engineering Study Program of Bandung Institute of Technology (2020-present) • Researcher at the Center of Research Excellence (CoRE) Economics and Management of Minerals and Coal, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Bandung Institute of Technology (2012-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen (Asisten Profesor) di Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung Lecturer (Professor Assistant) at Mining Engineering of Bandung Institute of Technology
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbkv

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Jabatan di Komite Position at Committee	Nama Name	Keterangan Description
Ketua Chairman	Irwandy Arif	Komisaris Utama President Commissioner
Wakil Ketua Bidang Risiko Usaha & TKT Deputy Chairman of Business Risk & TKT	E. Piterdono H.Z	Komisaris Commissioner
Wakil Ketua Bidang GCG, CSR/PKBL dan IT Deputy Chairman of GCG, CSR/PKBL, and IT	Rahmat Hidayat Pulungan	Komisaris Independen Independent Commissioner
Anggota Member	Tri Winarno	Pihak Independen Independent Party
Anggota Member	Helmiansyah Irawan	Pihak Independen Independent Party
Anggota Member	Ganda Marihot Simangunsong	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Profile of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee



Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Chairman of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Prof. Dr. Irwandy Arif, DEA., M.Sc

Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	72 tahun 72 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ujung Pandang, 28 Desember 1951 Ujung Pandang, December 28, 1951
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, Ecole des Mines de Nancy, Perancis (1991) • S2, Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1985) • S1, Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (1976) • Doctoral Degree from Ecole des Mines de Nancy, France (1991) • Master of Industrial Engineering at Bandung Institute of Technology (1985) • Bachelor of Mining Engineering at Bandung Institute of Technology (1976)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Advisor Tambang Bawah Tanah PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Komisaris Independen PT Antam Tbk (2009) • Independent Commissioner of PT Vale Indonesia Tbk (2018) • Underground Mining Advisor of PT Cibaliung Sumber Daya Mineral (2011) • Independent Commissioner of PT Antam Tbk (2009)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2020 - sekarang) Special Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources (2020 - present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020, pengangkatan sebagai Komisaris; • Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023, alih tugas sebagai Komisaris Utama. • 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 10, 2020 • 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution on June 15, 2023 as President Commissioner.
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bidang Risiko Usaha & TKT (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Deputy Chairman of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for Business Risk & TKT (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Ir. E. Piterdono HZ, S.E., M.M.

Komisaris
Commisioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	63 tahun 63 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Ogan Kemering Ulu, 22 November 1960 Ogan Komering Ulu, November 22, 1960
Domisili Domicile	Bandar Lampung, Lampung
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung (2001) • S1, Ekonomi Manajemen di Universitas Saburai Lampung (2001) • S1, Teknik Geologi di UPN Veteran Yogyakarta (1986) • Master of Management at the University of Bandar Lampung (2001) • Bachelor of Economy Management at the Saburai University Lampung (2001) • Bachelor of Geological Engineering at UPN Veteran Yogyakarta (1986)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (2017-2020) • Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (2014) • Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (2013) • Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung (2012) • Head of Lampung Province Regional Revenue Agency (2017-2020) • Head of Lampung Province Mining and Energy Service (2014) • Head of the Provincial Environmental Management Agency of Lampung Province (2013) • Head of of Lampung Province Manpower and Transmigration Service (2012)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bidang GCG, CSR/PKBL dan IT (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Deputy Chairman of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for GCG, CSR/PKBL and IT (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Can Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 – Present

Usia Age	45 tahun 45 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 16 Agustus 1978 Jakarta, August 16, 1978
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3, Universitas Negeri Jakarta (2020) • S2, Universitas Negeri Jakarta (2016) • S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute (2012) • S1, Fakultas Syariah IAIN Jakarta pada tahun (2001) • Doctoral Degree at Jakarta State University (2020) • Master Degree at Jakarta State University (2016) • Bachelor's degree (S1) from the Faculty of Economics and Business, Perbanas Institute (2012) • Bachelor's degree from the Sharia Faculty of Jakarta Islamic State University (2001)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017-2021) • Komisaris Utama PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) • Komisaris PT Rekayasa Industri (2016-2017) • Komisaris PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) • Komisaris PT Berdikari (Persero) (2013-2015) • Komisaris PT Niaga Permasindo (2011-2014) • Independent Commissioner at PT Kimia Farma Tbk (2021-2023) • Independent Commissioner at PT KAI (2017-2011) • President Commissioner at PT Niaga Prima Jaya (2015-2019) • Commissioner at PT Rekayasa Industri (2016-2017) • Commissioner at PT Cipta Media Permasindo (2014-2017) • Commissioner at PT Berdikari (2013-2015) • Commissioner at PT Niaga Permasindo (2011-2014)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam/luar Perusahaan Does not hold any concurrent positions both inside/outside the Company
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Dr. Ing Tri Winarno, ST, MT

Masa Jabatan: 2021 - Sekarang
Term of Office: 2021 - Present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Yogyakarta, 5 November 1972/50 tahun Yogyakarta, November 5, 1972/50 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak tahun 2018 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No. 3/PTBA-DEKOM/ VIII/2018. • Kedua kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak tahun 2021 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No. 4/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2021. • First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since 2018, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 3/PTBA-DEKOM/VIII/2018 • Appointed for the second time as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since 2021 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk Number 4/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2021.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Geoscience & Mining Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany (2016) • S2 Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2006) • S1 Teknik Pertambangan, UPN "Veteran" Yogyakarta (1997) • Doctoral Degree in Geoscience and Mining Technische of Universität Bergakademie Freiberg, Germany (2016) • Master Degree in Geological Engineering of Gadjah Mada University (2006) • Bachelor Degree in Mining Engineering of UPN Veteran Yogyakarta (1997)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara (2022-sekarang) • Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara (2017-sekarang). • Analis Konservasi Mineral dan Batubara (2013-2017) • Kepala Seksi Konservasi Batubara (2011-2013) • Kepala Seksi Standarisasi Mineral dan Batubara (2009-2011) • Director of Mineral and Coal Program Development (2022-present) • Head of Sub-Directorate for Supervision of Mineral and Coal Revenue (2017-present). • Mineral and Coal Conservation Analyst (2013-2017) • Head of Coal Conservation Section (2011-2013) • Head of Mineral and Coal Standardization Section (2009-2011)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batu bara Director of Mineral and Coal Program Development and Head of Sub-Directorate for Supervision of Mineral and Coal Revenue
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintergrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Helmiansyah Irawan., SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPI., CIIB., ANZIIF (Snr. Assc) CIP., CACP.

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 - Present



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Jakarta, 22 Januari 1987/36 tahun Jakarta, January 22, 1987 / 36 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak 30 September 2020. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No. 16/SK/PTBADEKOM/IX/2020. • Selanjutnya diangkat untuk Periode Kedua sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Bukit Asam No.05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 • First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since September 30, 2020, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 • Subsequently appointed for the Second Period based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk Number 07/SK/PTBA-DEKOM/X/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1, Ekonomi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I (2008) • S2, Akuntansi Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2015) • S3, Ekonomi, Universitas Trisakti (masih menempuh pendidikan) • Bachelor Degree in Economy of YAI Persada University (2008) • Master Degree in Financial Accounting of YAI College of Economy (2015) • Doctoral Degree in Economy of Trisakti University (on-going)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Auditor pada Kantor Akuntan Publik sejak tahun (2008 s/d sekarang) • Anggota Komite Audit PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016-2020). • Auditor at Public Accountant Office (2008-present) • Member of Audit Committee of PT Reasuransi Nasional Indonesia (2016-2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Partner di KAP Antadaya, Helmiansyah, Yassirli - Member Firm of EURA Audit International Partner at Antadaya, Helmiansyah, Yassirli Public Accountant Office - Member Firm of EURA Audit International.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HR Committee)

Dr. Eng. Ganda Marihot Simangunsong, ST, MT

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 - Present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Bandung, 13 Mei 1976/ 47 tahun Bandung, May 13, 1976/47 years old
Domisili Domicile	Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Perusahaan sejak 1 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023. First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since December 1, 2023, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Kyushu University Japan (2005) • S2 Rekayasa Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (2002) • S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1999) • Phd of Kyushu University, Japan (2005) • Master Degree in Mining Engineering of Bandung Institute of Technology (2002) • Bachelor Degree in Mining Engineering of Bandung Institute of Technology (1999)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Manajer Laboratorium Geomekanika & Peralatan Tambang (2015 s.d. sekarang) • Ketua Program Studi Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Banding (2016-2020) • Manajer Laboratorium Perencanaan dan Valuasi Tambang (2012-2015) • Staf Pengajar, Lektor Kepala di Intitut Teknologi Bandung (2007 s.d. sekarang) • Geomechanics & Mining Equipment Laboratory Manager (2015-present) • Head of the Mining Engineering Study Program of Bandung Institute of Technology (2016-2020) • Mining Planning and Valuation Laboratory Manager (2012-2015) • Teaching Staff, Associate Professor at Bandung Institute of Technology (2007-present)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Staf Pengajar, Lektor Kepala di Intitut Teknologi Bandung dan Manajer Laboratorium Geomekanika & Peralatan Tambang Teaching Staff, Associate Professor at Bandung Institute of Technology and Geomechanics & Mining Equipment Laboratory Manager
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Jabatan di Komite Position at Committee	Nama Name	Keterangan Description
Ketua Chairman	Kurnia Toha	Komisaris Independen Independent Commissioner
Wakil Ketua Vice Chairman	Carlo B. Tewu	Komisaris Commissioner
Anggota Member	Nora Sri Hendriyeni	Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (Formerly the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan: 15 Juni 2023 - Sekarang
Term of Office: June 15, 2023 - Present

Usia Age	62 tahun 62 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Lampung, 16 Juni 1961 Lampung, June 16, 1961
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 University of Washington School of Law pada tahun 2007 • S2 University of Washington School of Law pada tahun 1998 • S1 Hukum, Universitas Indonesia tahun 1987 • Doctoral Degree from the University of Washington School of Law (2007) • Master Degree from the Washington School of Law (1998) • Bachelor of Law, University of Indonesia (1987)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI (2018-2020) • Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN (2016-2018) • Chairman of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) (2018-2020) • Head of Legal and Public Relations Center at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (2016-2018)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Professor at the Faculty of Law at University of Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 2022 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 15, 2023
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk



Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (Previously the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & PSDM Committee)

Irjen. Pol. (Purn) Drs. Carlo Brix Tewu

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan: 10 Juni 2020 - Sekarang
Term of Office: June 10, 2020 - Present

Usia Age	61 tahun 61 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tondano, 13 September 1962 Tondano, September 13, 1962
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Polri (2008) • Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2005) • Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (1998) • Akademi Kepolisian (1994 • Police Staff and High-Level Leadership School of National Police of the Republic of Indonesia (2008) • National Defense Institute of the Republic of Indonesia (2005) • Police Staff and Leadership School (1998) • Police Academy (1994)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-sekarang) • Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN (2022-2023) • Deputi Bidang Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Pjs. Gubernur Sulawesi Barat (2016) • Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015) • Expert Staff to the Minister of SOEs in the field of Mediation (2023-present) • Deputy for Law and Legislation, Ministry of SOEs (2020-Present) • Bidang Politik Hukum dan Keamanan (2016) • Deputy for Coordination of Security and Public Order at the Coordinating Ministry for Politics, Legal, and Security Affairs (2016) • West Sulawesi Acting Governor (2016) • Director of Criminal Acts for Criminal Investigation of National Police of the Republic of Indonesia (2015)
Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Positions	Tenaga Ahli Menteri BUMN Bidang Mediasi (2023-sekarang) Expert Staff to the Minister of SOEs in the field of Mediation (2023-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment Board of Commissioners	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 2019 Annual General Meeting of Shareholders Resolution dated June 10, 2020
Dasar Hukum Pengangkatan Komite Legal Basis of Appointment Committee	Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Dahulu Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM)
Member of the Nomination and Remuneration Committee (formerly the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee)

Nora Sri Hendriyeni, Ph.D., CA., CSRA., CSP., CACP

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 - Present



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/ Usia Place, Date of Birth/ Age	Padang, 15 Januari 1973/50 tahun Padang, January 15, 1973/50 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• Pertama kali diangkat sebagai Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM Perusahaan sejak 2 November 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 • Periode Kedua berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No.07/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023 • First appointed as Member of the Company's Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HRD Committee since November 2, 2020, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk, Number 18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 • Second Period based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No.07/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S3 Akuntansi, University of Central Lancashire, United Kingdom (2018) • S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1998) • S1 Akuntansi, Universitas Andalas (1996) • Doctoral Degree in Accounting of Central Lancashire University, United Kingdom (2018) • Master Degree in Management of Gadjah Mada University (1998) • Bachelor Degree in Accounting of Andalas University (1996)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2008 - sekarang) • Ketua Program Studi Akuntansi Bisnis (2009-2014) • Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM • Lecturer at PPM Management Institute (2008-present) • Head of the Business Accounting Study Program (2009-2014) • Head of the Master of Management Study Program at PPM Management Institute
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM Lecturer at PPM Management Institute
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliation with members of Board of Directors, fellow members of Board of Commissioners, as well as with controlling and major shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak memiliki saham PT Bukit Asam Tbk Has no shares of PT Bukit Asam Tbk

Tambahan Informasi Komite di Bawah Dewan Komisaris

Mengingat pada tanggal 15 Desember 2023 terdapat perubahan struktur komite di bawah Dewan Komisaris dari dua komite menjadi tiga komite, maka pada laporan tahunan ini hanya akan dijelaskan tentang Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Additional Information on Committees Under the Board of Commissioners

Given the restructuring of the committees under the Board of Commissioners on December 15, 2023, from two committees to three committees, this annual report will only explain the Audit Committee and the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Committee.

Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang pembentukannya bersifat wajib berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Komite Audit Perusahaan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Dewan Komisaris (Dekom);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
10. Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;
11. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 18/ SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Piagam Komite Audit.

Audit Committee

Audit Committee is one of supporting organs of Board of Commissioners that was formed based on the Regulation of Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/2023. The Committee helps the Board of Commissioners in the supervisory function and gives advice to Board of Directors regarding the Company's management, in accordance with the applicable law.

Legal Basis

The Company's Audit Committee was formed based on statutory provisions, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dismissal of State-Owned Enterprises;
4. Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
5. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 dated December 23 ,2015, concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
8. Financial Services Authority Regulation No. 21/ POJK.04/2015 dated November 16, 2015, concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines as outlined in OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015, concerning Public Company Governance Guidelines, that the Board of Commissioners can form a Board of Commissioners Committee (Dekom);
9. Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 dated July 11, 2023, concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;
10. Notarial Deed of Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 dated June 10, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk;
11. Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 18/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 dated December 31, 2023, regarding the Establishment of the Audit Committee Charter.

Visi dan Misi Komite Audit

Visi

Menjadi mitra kerja yang independen dan profesional bagi Dewan Komisaris PTBA dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk menciptakan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Misi

Mendorong dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor, mendorong adanya peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam (*Charter*) Komite Audit sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, yang substansinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tugas Komite Audit. Piagam (*Charter*) Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya.

Pemutakhiran terhadap Piagam (*Charter*) Komite Audit dilakukan pada tahun 2023 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 18/SK/PTBA-KOM/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Piagam Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk.

Piagam (*Charter*) Komite Audit memuat pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit, serta batasan dan pengaturan tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Adapun muatan dalam Piagam (*Charter*) Komite Audit, sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Organisasi;
3. Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kewenangan;
4. Rapat;
5. Penutup.

Kriteria Anggota Komite Audit

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri BUMN No, PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Kompetensi

Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan;

Vision and Mission of Audit Committee

Vision

Become an independent and professional partner for Board of Commissioners of PTBA to support the duties and functions of Board of Commissioners to realize the implementation of Good Corporate Governance.

Mission

To encourage and ensure the effectiveness of internal control system and the effectiveness of external and internal auditors' duties, promote increased business success and corporate accountability to increase the Company's added value.

Audit Committee Work Guidelines/Charter

The Audit Committee has a Charter as a guideline in carrying out its duties, which the substance is in accordance with applicable regulations relating to the duties of the Audit Committee. The Audit Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically to ensure the Company's compliance with OJK provisions and other related regulations.

The update to the Audit Committee Charter was carried out in the year 2023 and was stipulated through Board of Commissioners Decree No. 18/SK/PTBA-KOM/XII/2023 dated December 31, 2023 concerning Audit Committee Charter of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk

The Audit Committee Charter contains regulations regarding the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee, as well as boundaries and regulations for working relations between the Audit Committee and the Board of Commissioners, Directors, Internal Auditors, and External Auditors.

The contents of the Audit Committee Charter are as follows:

1. Introduction;
2. Organization;
3. Duties, Obligations, Responsibilities, and Authorities;
4. Meetings;
5. Closing.

Criteria for Audit Committee Members

The requirements and qualifications of the Company's Audit Committee members must meet the competency and independence requirements as stipulated in OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Work Implementation of Audit Committee and the State-Owned Enterprises Ministry Regulations No. Per-3/MBU/03/2023 regarding Organs and Human Resources of the State-Owned Enterprises.

Competencies

The chairman and members of the Company's Audit Committee must meet the following requirements:

1. Have a good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/ inspection;

2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami Laporan Keuangan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Memiliki pemahaman yang memadai atas aspek bisnis dan pengelolaan/ kontrol Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif, memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
5. Memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan:
   a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit maupun dalam pengampuan;
   c. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit;
   d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.
6. Memiliki sikap mental, etika, dan tanggung jawab profesi yang baik;
7. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya bagi pelaksanaan tugas Komite Audit.

Independensi

Ketua dan anggota Komite Audit harus memiliki independensi yang tidak terbatas diukur dengan:

1. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham pengendali;
3. Bukan merupakan Pemegang Saham, Komisaris, Direktur, atau karyawan dari Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, keuangan, maupun bisnis dengan Perusahaan;
4. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
5. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan PTBA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
6. Tidak mempunyai:
   a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Mayoritas PTBA dan atau;
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA.
7. Tidak memiliki konflik kepentingan terhadap informasi yang material tentang PTBA.

2. Have sufficient knowledge to read and understand financial statements, audit processes, and laws and regulations in the capital market sector;
3. Have an adequate understanding of the business aspects and management/control of the Company following the laws and regulations;
4. Able to communicate effectively and have the ability to provide constructive suggestions and views, having high integrity, dedication, ability, adequate knowledge, and experience according to their educational background;
5. Have a good reputation, as evidenced by, among other things:
   a. Never been convicted of a criminal act;
   b. Never been declared bankrupt or in custody;
   c. Has never been found guilty of causing the Company owned or is currently leading to be declared bankrupt;
   d. Never been dishonorably dismissed from a job. 6. Have a good mental attitude, ethics, and professional responsibility;
6. Possessing good mental attitude, ethics, and professional responsibility;
7. Able to allocate sufficient time to fulfill responsibilities for the Audit Committee tasks.

Independence

The chairman and members of Audit Committee must have absolute independence as measured by:

1. Has no personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company;
2. Has no affiliation with Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholder;
3. Not a shareholder, commissioner, director, or employee of a Company that has affiliated, financial, or business relationships with the Company;
4. Not a person in a KAP, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by Board of Commissioners;
5. Does not have the authority and responsibility to plan, lead, or control PTBA within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except the Independent Commissioner;
6. Has no:
   a. Family relationship due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically with Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority Shareholders of PTBA and or;
   b. Business relationship, either directly or indirectly, which is related to PTBA's business activities.
7. Has no conflict of interest with material information about PTBA.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Term of Office

The term of office of Audit Committee members who are also a member of Board of Commissioners will follow the term of office as Commissioner of the Company. While the term of office of members of Audit Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended for a 2 (two) year term of office, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss at any time.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Susunan Komite Audit tahun 2023 mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali sehingga susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Structure and Composition of Audit Committee

The composition of the Audit Committee for 2023 has changed 2 (two) times from the previous year The composition of the Audit Committee as of December 31, 2023, is as follows

Periode 15 Desember 2023 - 31 Desember 2023
December 15, 2023-December 31, 2023 Period

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	SK Pengangkatan Apppointment Decree	Periode Jabatan Term of Office
Andi Pahril Pawi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/ Independent Commissioner	Manajemen Strategi Strategic Management	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	2020 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 – end of position ad Board of Commissioners
Kurnia Toha	Wakil Ketua/Komisaris Independen Vice Chairman/ Independent Commissioner	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	2023 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 – end of position ad Board of Commissioners
Dodi Masykur	Anggota Member	Akuntansi Accounting	02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021	2021 – 2024
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	Teknik Pertambangan/ Ekonomi Mineral dan Batu bara Mining Engineering/ Economy Mining and Coal	05/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2020	2020 – 2023
			04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023	2023 – 2026

Periode 1 Januari 2023 - 14 Desember 2023
January 1, 2023- December 14, 2023 Period

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	SK Pengangkatan Apppointment Decree	Periode Jabatan Term of Office
Andi Pahril Pawi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Manajemen Strategi Strategic Management	04/SK/PTBA-DEKOM/VI/2020 01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	2020 – berakhirnya jabatan sebagai Dewan Komisaris 2020 - end of position ad Board of Commissioners
E. Piterdono HZ	Wakil Ketua/Komisaris Vice Chairman/ Commissioner	Manajemen dan Teknik Geologi Management and Geological Engineering	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	2021 – 2023
Dodi Masykur	Anggota Member	Akuntansi Accounting	02/SK/PTBA-DEKOM/III/2021	2021 – 2024
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	Teknik Pertambangan/Ekonomi Mineral dan Batu bara Mining Engineering/Economy Mining and Coal	05/SK/PTBA-DEKOM/ VIII/2020	2020 – 2023
			04/SK/PTBA-DEKOM/IX/2023	2023 – 2026

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit dapat dilihat pada bagian atas Sub-bab ini.

Audit Committee Profile

The profiles of the Audit Committee can be viewed at the top of this Subsection.

Independensi Anggota Komite Audit

Ketua dan Anggota Komite Audit merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan guna menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Independence of Audit Committee Members

The Chair and Members of the Audit Committee are professional individuals who have no relationship with the Company in order to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities. Members of the Company's Audit Committee have fulfilled the independence requirements in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee, as well as State-Owned Enterprises Ministry Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Fulfillment of this independence can be seen in the following table.

Tabel Independensi Anggota Komite Audit
Independence Table of Member of Audit Committee

Kriteria Criteria	Andi Pahril Pawi	Kurnia Toha	Dodi Masykur	Fadhila Achmadi Rosyid
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi Has no management relationship in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Has no shareholding relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus Partai Politik, Pejabat, dan Pemerintah Not serving as an administrator of Political Parties, Officials, and Government	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Piagam (*Charter*) Komite Audit mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik;
3. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Akuntan Publik;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern;
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, termasuk intern di dalam penelaahan atas pengaduan masyarakat;
6. Mendorong ditetapkannya Tata Kelola Perusahaan yang baik;

Duties and Responsibilities

The Audit Committee Charter regulates the duties and responsibilities of the Audit Committee as written below:

1. Review financial information that will be released by the Company, such as financial reports, projections, and other financial information;
2. Provide recommendations for the appointment of a Public Accountant;
3. Supervise and evaluate the work of Public Accountants;
4. Review the implementation of audits by the Internal Audit Unit to ensure the effectiveness of the internal control system;
5. Review the Company's compliance with laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's activities, including internally in reviewing public complaints;
6. Encourage the establishment of good corporate governance;

7. Melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perusahaan;
8. Memastikan terdapat dan ditetapkannya Kode Etik Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Berkaitan dengan Auditor Eksternal

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan penunjukan Auditor Eksternal, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (Auditor Eksternal) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa.

Atas pekerjan yang dilaksanakan oleh KAP selaku Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan penelaahan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal. Apabila pelaksanaan pekerjaan Auditor Eksternal tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, maka Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberhentian Auditor Eksternal.

Wewenang

1. Mengakses secara penuh dan bebas atas catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA;
3. Meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari Pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
4. Meminta pendapat profesional dari pihak internal melalui Direksi PTBA maupun pihak ketiga, antara lain konsultan dan ahli hukum;
5. Mengundang Direksi, jajaran eksekutif, dan pegawai PTBA melalui Direksi atau konsultan dalam rapat Komite Audit;
6. Memperoleh masukan dari pihak eksternal/ independen yang profesional apabila diperlukan, atas biaya perusahaan.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Komite Audit dapat mengadakan rapat, baik dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal sesuai kebutuhan. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau pegawai Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 34 kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

7. Conduct inspections regarding errors in Board of Directors Meeting Decisions or irregularities in the implementation of the Board of Directors Meeting Decisions. The audit can be carried out by the Audit Committee or an independent party appointed by the Audit Committee at the Company's expense;
8. Ensure the implementation of the Company's Code of Ethics.

Audit Committee Duties and Responsibilities to External Auditors

The Audit Committee has duties and responsibilities related to the appointment of External Auditors, namely providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants (External Auditors) based on independence, scope of work, and remuneration.

Regarding the work carried out by Public Accountant Office as External Auditor, the Audit Committee carries out a review to ensure the effectiveness of the External Auditor's duties. If the implementation of the External Auditor's work is not in accordance with applicable standards and regulations, the Audit Committee can provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the dismissal of the External Auditor.

Authority

1. Fully and freely access records or information about employees, funds, assets, and other company resources, which are related to the implementation of their duties;
2. Obtain the required information, inputs, and explanations from the Directors of PTBA;
3. Request and obtain information, inputs, and explanations from employees and other parties related to Company activities;
4. Request professional opinions from internal parties through the PTBA Board of Directors and third parties, including consultants and legal experts;
5. Invite the Board of Directors, executive staff, and employees of PTBA through the Board of Directors or consultants to the Audit Committee meeting;
6. Obtain input from professional external/independent parties if necessary, at the company's expense.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee holds regular meetings at least once every 1 (one) month. Audit Committee meetings are chaired by the Chair of the Audit Committee or the most senior member if the Chair of the Audit Committee is unable to attend. The Audit Committee can hold meetings with both Internal Auditors and External Auditors as needed. The Audit Committee through the Board of Commissioners can ask the Directors or Company employees to attend meetings and provide the necessary information.

Throughout 2023, the Audit Committee has held 34 meetings with the agenda and frequency of attendance as follows:

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Table of Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	17 Januari 2023 January 17, 2023	Pembahasan Temuan Uji Tuntas Dana Pensiun Discussion of Pension Fund Due Diligence Findings
2	18 Januari 2023 January 18, 2023	Diskusi Perihal Dana Pensiun Bukit Asam Discussion regarding the Bukit Asam Pension Fund
3	24 Januari 2023 January 24, 2023	Laporan Kegiatan SPI Triwulan 4 Tahun 2023 SPI Activity Report for Quarter 4 of 2023
4	7 Februari 2023 February 7, 2023	Kick-off Meeting Pengadaan Jasa KAP untuk Audit Laporan Keuangan MIND ID Grup Tahun 2023 Kick-off Meeting Procurement of Public Accountant Office Services for the 2023 MIND ID Group Financial Report Audit
5	9 Februari 2023 February 9, 2023	Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan KAP Audit Laporan Keuangan PTBA Tahun Buku 2023 Discussion of Terms of Reference (KAK) and Self Estimated Prices (HPS) Procurement of KAP Audit of Financial Reports PTBA Fiscal Year 2023
6	12-15 Februari 2023 February 12-15, 2023	Rapat Koordinasi Komite Audit dengan SPI Grup MIND ID, Rapat di PT INALUM Paritohan Sumatera Utara Audit Committee Coordination ,Meeting with SPI MIND ID Group, Meeting at PT INALUM PAritohan North Sumatra
7	20 Februari 2023 February 20, 2023	Rapat Pengadaan KAP Grup MIND ID dengan 4 KAP (EY, PWC, Deloitte dan KPMG) MIND ID Group KAP Procurement Meeting with 4 Public Accountants (EY, PWC, Deloitte and KPMG)
8	21 Februari 2023 February 21, 2023	Laporan Progres Akhir Audit Laporan Keuangan PTBA dan Entitas Anak untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 Final Progress Report Audit of PTBA and Subsidiaries' Financial Statements for the Period ending of December 31, 2022
9	6 Maret 2023 March 6, 2023	Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK 2012-2013 terkait Padang Bolak Jaya Discussion of the 2012-2013 BPK LHP Follow-up regarding Padang Bolak Jaya
10	6 Maret 2023 March 6, 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Komite Audit dan Satuan Pengawas Internal MIND ID Group Tahun 2023 Discussion of Follow-up Meeting of the 2023 Audit Committee and Internal Supervisory Unit Mind ID Group Coordination Meeting
11	20 Maret 2023 March 20, 2023	Pembahasan Audit *Fee* Pengadaan KAP Tahun 2023 Discussion of 2023 Public Accountant Office Procurement Audit Fees
12	3 April 2023 April 3, 2023	Laporan Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2023 SPI Activity Report for the First Quarter of 2023
13	22 Mei 2023 May 22, 2023	Rapat dengan Satuan Kerja UPTE dan Anak Perusahaan PT SBS, PT BAM, dan PT BSP Meeting with UPTE Work Unit and Subsidiaries PT SBS, PT BAM, and PT BSP
14	23 Mei 2023 May 23, 2023	Rapat dengan Anak Perusahaan PLTU Sumsel-8 Meeting with Sumsel-8 CFPP Subsidiaries
15	6 Juni 2023 June 6, 2023	Rapat Koordinasi Komite Audit dan Internal Audit Grup MIND ID di PT Timah Tbk Pangkal Pinang MIND ID Group Audit and Internal Audit Committee Coordination Meeting at PT Timah Tbk Pangkal Pinang
16	13-15 Juli 2023 July 13-15, 2023	Rapat di Kertapati Meeting in Kertapati
17	18 Juli 2023 July 18, 2023	Pembahasan Rencana Perubahan RKAP 2023 Discussion of the 2023 WP&B Amendment Plan
18	21 Juli 2023 July 21, 2023	Rehabilitasi DAS Kulon Progo dan Pemanfaatan Aset Dana Pensiun PTBA di Wonosari Rehabilitation of the Kulon Progo Watershed and Utilization of PTBA Pension Fund Assets in Wonosari
19	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Kick-off Meeting *Limited Review* atas Laporan Keuangan PT Bukit Asam, Tbk Kick-off Meeting Limited Review of the Financial Report of PT Bukit Asam, Tbk
20	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Laporan Kegiatan SPI Triwulan II Tahun 2023 SPI Activity Report for Quarter II 2023
21	22 Agustus 2023 August 22, 2023	*Limited Review* Laporan Keuangan PTBA Per 30 Juni 2023 Limited Review of PTBA Financial Report as of June 30, 2023
22	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Rapat Penutupan PT Bukit Asam Metana Ombilin dan Perubahan Organisasi Pertambangan Ombilin Closing Meeting of PT Bukit Asam Methane Ombilin and Changes to the Ombilin Mining Organization
23	7-8 September 2023 September 7-8, 2023	Evaluasi dan Perencanaan Kerja Komite Audit Evaluation and Work Planning of the Audit Committee
24	19 September 2023 September 19, 2023	Rapat Proyek Keramasan dengan BPKP Sumsel Keramasan Project Meeting with South Sumatra BPKP
25	22 September 2023 September 22, 2023	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2024 Discussion of Proposed 2024 WP&B
26	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Laporan Kagiatan SPI Triwulan III Tahun 2023 SPI Activity Report for Quarter III 2023
27	16-18 November 2023 November 16-18, 2023	Kunjungan kerja Persiapan Penjualan *Free on Board Mother Vessel* di Palembang dan Tanjung Enim Work visit Preparation for Sales of Free on Board Mother Vessel in Palembang and Tanjung Enim
28	17 November 2023 November 17, 2023	Pembahasan Rencana Penjualan Batubara Skema FOB MV Discussion of Coal Sales Plan FOB MV Scheme
29	27 November 2023 November 27, 2023	Finalisasi *Corporate Governance Policy*, Charter Direksi, dan *Charter* Dewan Komisaris Finalization of Corporate Governance Policy, Board of Directors Charter and Board of Commissioners Charter
30	7 Desember 2023 December 7, 2023	Progres Interim Audit per 30 September 2023 dan Persiapan Audit LK FY 2023 Interim Audit Progress as of September 30, 2023, and Preparation for FY 2023 LK Audit

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Table of Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
31	7 Desember 2023 December 7, 2023	Meeting Progres Interim Audit per 30 September 2023 dan Persiapan Audit LK 31 Desember 2023 dengan PwC di Menara Kadin lt 8 Interim Audit Progress Meeting as of September 30, 2023, and LK Audit Preparation December 31, 2023, with PwC at Kadin Tower 8th floor
32	11-12 Desember 2023 December 11-12, 2023	Kunjungan Kerja ke Pangkal Pinang berkaitan dengan proses pembangunan *Tug Boat* dan *Barges* sesuai dengan pesanan PT BPB ke PT DAK Working Visit to Pangkal Pinang related to the construction process of Tug Boats and Barges in accordance with PT BPB orders to PT DAK
33	22 Desember 2023 December 22, 2023	Paparan Rencana Audit Tahunan SPI PTBA Tahun 2024 Presentation of SPI PTBA Annual Audit Plan Year 2024
34	27 Desember 2023 December 27, 2023	Kunjungan Kerja Duri Kosambi Jakarta Barat Working Visit Duri Kosambi West Jakarta

Adapun persentase kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat adalah sebagai berikut:

The attendance percentage of Audit Committee members in the meetings is as follows:

Tabel Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Komite Audit Tahun 2023
Table of Audit Committee Attendance at 2023 Audit Committee Meetings

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
1	Andi Pahril Pawi	Ketua Chairman	34	34	100%
2	E. Piterdono H.Z*	Wakil Ketua Deputy Chairman	34	34	100%
3	Kurnia Toha**	Wakil Ketua Deputy Chairman	1	1	100%
4	Dodi Masykur	Anggota Member	34	34	100%
5	Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	34	34	100%

Catatan | Notes :
*Menjabat sampai dengan 14 Desember 2023
**Menjabat terhitung 15 Desember 2023
*Officiate until 14 December 2023
**Officiate as of December 15, 2023

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pengembangan kompetensi Komite Audit dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development for Audit Committee

Competency development for Audit Committee can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Audit
Profession Certification Owned by Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institution Issuing Professional Certification
Andi Pahril Pawi	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	-	-
E. Piterdono HZ	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	-	-
Dodi Masykur	Anggota Member	Certified Public Accountant (CPA)	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants
		Qualified Internal Auditor (QIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation
		Certified Professional investigator (CPI)	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesian Institute of Public Accountants
		Chartered Accountant (CA)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants
Fadhila Achmadi Rosyid	Anggota Member	Pendidikan Profesi Insinyur Professional Engineering Education	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology (ITB)

Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa honorarium sebesar 20% dari gaji Direktur Utama.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian berikut:

1. Telaahan & Rekomendasi atas Tambahan Modal pada Anak Perusahaan;
2. Telaahan & Rekomendasi atas Laporan Kinerja Operasi & Keuangan bulanan perusahaan;
3. Hasil Kunjungan Lapangan serta rekomendasi terkait;
4. Telaahan dan Rekomendasi atas Kegiatan Satuan Pengawasan Intern;
5. Telaahan & Rekomendasi atas Usulan Hapus buku Aset perusahaan;
6. Telaahan & Rekomendasi serta evaluasi Laporan Keuangan Audited dan Laporan atas pelaksanaan audit oleh KAP;
7. Telaahan & Rekomendasi atas Usulan Penunjukkan KAP Perusahaan untuk melakukan audit keuangan perusahaan;
8. Telaahan dan rekomendasi atas rencana penggunaan laba bersih perusahaan.
9. Telaahan & Rekomendasi atas Rencana Kerjasama Perusahaan;
10. Telaahan & Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
11. Telaahan dan Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun PTBA;
12. Telaahan dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Triwulanan Perusahaan;
13. Telaahan dan Rekomendasi atas Rancangan RKAP PTBA;
14. Telaahan dan Rekomendasi atas Proyek PLTU Sumsel-8;
15. Telaahan dan Rekomendasi atas Usulan Lembaga Jasa Pemeringkatan Perusahaan;
16. Penyusunan Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2023 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Audit, yaitu:

Policy and Amount of Remuneration for the Audit Committee

Based on State-Owned Enterprises Minister Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners receive remuneration in the form of an honorarium of 20% of the President Director's salary.

Implementation of Audit Committee Duties

Throughout 2023, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in detail as shown below:

1. Review & Recommendations for Additional Capital in Subsidiaries;
2. Review & Recommendations on the company's monthly Operational & Financial Performance Reports;
3. Site Visit Results and related recommendations;
4. Review and Recommendations on Internal Monitoring Unit Activities;
5. Review & Recommendations on the Proposal to Write Off Company Assets;
6. Review & Recommendations as well as evaluation of Audited Financial Reports and Reports on the implementation of audits by KAP;
7. Review & Recommendations on the Proposed Appointment of the Company's KAP to conduct the company's financial audit;
8. Review and recommendations on plans for using the company's net profit.
9. Review & Recommendations on Company Collaboration Plans;
10. Review & Recommendations on the Audit Results Report BPK;
11. Review and Recommendations on the Evaluation Results of the Health Level and Management of the PTBA Pension Fund;
12. Review and Evaluation of the Company's Quarterly Financial Reports;
13. Review and Recommendations on PTBA's Draft WP&B;
14. Review and Recommendations for the Sumsel-8 CFPP Project;
15. Review and Recommendations on Proposals from Company Rating Services Institutions;
16. Preparation of the Committee's Quarterly and Annual Reports.

Assessment by the Board of Commissioners of the Performance of the Audit Committee

The Audit Committee's performance assessment is carried out by the Board of Commissioners through monitoring and evaluation of the Committee's performance reports in achieving the KPI targets of each Committee.

The Audit Committee performance assessment in 2023 was carried out based on the realization and completion of the work program that has been prepared. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan containing the Committee's work program for one year, which includes the Committee's Key Performance Indicators. There are 3 (three) perspectives on the Audit Committee KPI, namely:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi;
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite.

Adapun realisasi atas KPI Komite Audit tahun 2023, sebagai berikut:

1. Aspects of Study and Providing Recommendations;
2. Dynamic Aspects and Strengthening Governance;
3. Committee Meeting.

The realization of the Audit Committee KPIs in 2023 is as follows:

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2023
KPI Table for Audit Committee in 2023

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, Functions, and Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Aspects of Study and Recommendations**			**60**	
	Memberikan pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give opinions/recommendations/responses to the Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian pendapat/rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of opinions/recommendations/responses to the Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official memo	10	1
	Memberikan masukan/ pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Give input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by the Board of Directors in a timely manner in accordance with the provisions of the Articles of Association	Nota Dinas Official memo	10	1
	Memberikan pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis, dan aspek risiko atas aksi korporasi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Give quality opinions and suggestions, including legal aspects, business aspects and risk aspects of corporate actions and mitigation of corporate actions proposed by the Board of Directors for the current year.	Pemberian pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan The provision of quality opinions and suggestions includes, among other things, legal aspects, business aspects and risk aspects of actions and their mitigation for corporate actions proposed by the Board of Directors for the current year	Nota Dinas Official memo	10	2
	Melakukan peninjauan melalui kunjungan lapangan (site visit) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting site visit to SOEs strategic activities	Kunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Site visit to SOEs' strategic activities	Laporan Kunjungan Visit report	10	2
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Give opinion and suggestion to the Board of Commissioners regarding RJPP and WP&B	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinion and suggestion the the Board of Commissioners regarding RJPP and WP&B	Nota Dinas Official memo	10	1
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan Give opinion and suggestion to the Board of Commissioner regarding annual report	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisars mengenai laporan tahunan The provision of opinion and suggestion to the Board of Commissioners regarding annual report	Nota Dinas Official memo	10	1
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola** **Dynamic and GCG Strengthening Aspect**			**20**	
	Kegiatan Pengembangan Development Activities				
	Mengikuti Pelatihan/ Seminar/Webinar untuk meningkatkan kompetensi Participating in training/seminar/webinar to increase competency	Kegiatan Pelatihan/Seminar/ Webinar Training/Seminar/Webinar activities	Laporan / Sertifikat Report / Certificate	10	2
	Penguatan Tata Kelola GCG Strengthening				
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Komite Submission to the Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	10	1

Tabel KPI Komite Audit Tahun 2023
KPI Table for Audit Committee in 2023

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, Functions, and Responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target
3	**Rapat Komite** **Committee Meeting**			**20**	
	Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance at Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committee members attending meetings in a year	%	10	80
	Risalah Rapat Minutes of meetings	Tersusunnya risalah rapat Completed minutes of meetings	Dokumen Risalah Minutes of meetings document	10	6
Jumlah **Total**				**100**	**100**

Tabel KPI Individu Komite Audit Tahun 2023
Tabel for Individual KPI of Audit Committee in 2023

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Perspektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Dodi Masykur	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee's KPI achievement	%	40	100
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Providing Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy	1	10	10
		Monitoring Temuan Auditor Intern/Ekstern Monitoring Internal/External Auditor Findings	1	15	15
		Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Accounting and Preparation of Financial Reports	1	15	15
		Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Companies			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	%	20	20
Jumlah **Total**				**100**	**100**

Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Perspektif Perspective	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Fadhila Achmadi Rosyid	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee's KPI achievements	%	40	100
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Providing Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy	1	10	1
		Monitoring Temuan Auditor Intern/Ekstern Monitoring Internal/External Auditor Findings	1	15	1
		Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Accounting and Preparation of Financial Reports	1	15	1
		Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Company Internal Control System			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Companies			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	%	20	80
Jumlah **Total**				**100**	**100**

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Audit, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2023, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Based on the fulfillment of targets for the Audit Committee's KPIs, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has properly carried out its duties and responsibilities in 2023, in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan, and achievement of the KPI targets that have been set.

Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Komite di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terkait pengendalian risiko usaha, pelaksanaan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM di lingkungan PTBA.

Komite ini merupakan penggabungan dari 2 (dua) Komite Dewan Komisaris yakni Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Konarba dan PSDM) dengan Komite Asuransi, Risiko Usaha dan Pascatambang, yang telah digabungkan sejak 1 Januari 2013. Secara garis besar, pelaksanaan fungsi Komite ini adalah membantu tugas Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat terkait pengelolaan perusahaan yang berhubungan dengan risiko usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, pengadministrasian untuk terpilihnya calon Direksi dan Pejabat Internal satu tingkat di bawah Direksi dan calon Direksi anak Perusahaan, tersusunnya besaran Gaji/ Honorarium dan Tantiem yang memadai bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Insentif Kinerja Pegawai (IKP) berdasarkan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Perusahaan, serta mengkaji pengembangan sumber daya manusia berdasarkan rencana strategis Perusahaan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn. No. 43 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk;
8. Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang

Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee

The Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee is under the Board of Commissioners to assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, related to controlling business risks, implementing nominations, remuneration, and developing human resources within PTBA.

This committee is a combination of 2 (two) Board of Commissioners Committees, namely the Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee (Konarba and PSDM) with the Insurance, Business Risk, and Post-mining Committee, which have been merged since January 1, 2013. In general, the implementation of this committee is to assist the Board of Commissioners in providing opinions regarding company management related to business risks with the potential to cause significant losses, administering the selection of prospective Directors and Internal Officials one level below the Directors and prospective Directors of subsidiary companies, arranging the amount of Salary/Honorarium and bonus for the Board of Directors and Board of Commissioners, Employee Performance Incentives based on the Company's Performance and Health Level, as well as reviewing human resource development based on the Company's strategic plan.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dismissal of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/ MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 dated December 8, 2015, concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
7. Notarial Deed of Jose Dima Satria, SH, M.Kn. Number 43 dated June 10, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Bukit Asam Tbk;
8. Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021,

Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Misi

Memberikan masukan secara komprehensif dalam rangka:

- Meminimalkan risiko perusahaan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan usaha, operasi produksi dan pemasaran;
- Meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
- Mewujudkan sinergitas peran dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat serta pelestarian lingkungan;
- Mendorong terlaksananya prosedur nominasi dan remunerasi yang sesuai dengan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance*;
- Mendorong terciptanya sistem pengembangan SDM yang fair dan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai PTBA.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Pedoman kerja atau Piagam (*Charter*) Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Pedoman ini disusun sebagai acuan tata laksana tugas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM.

Secara berkala Piagam (*Charter*) dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun muatan dalam Piagam (*Charter*) Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM, sebagai berikut :

1. Tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan;
2. Ketentuan Rapat;
3. Ketentuan Pelaporan;
4. Hal-hal lain yang bersifatnya penting guna pelaksanaan tugas komite.

Kriteria Keanggotaan

Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber

concerning Determination of the Charter of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee.

Vision and Mission

Vision

Become a professional and independent committee to harmonize synergy between the Board of Commissioners and Board of Directors of PTBA to support the achievement of the Company's Vision and Mission.

Mission

Provide comprehensive input in order to:

- Minimize company risks that may occur in the areas of business development, production, and marketing operations;
- Minimize the negative impact of company activities on the environment;
- Realizing the synergy of corporate social roles and responsibilities in improving the economic, social, educational level of the community, and preserving the environment;
- Encourage the implementation of nomination and remuneration procedures in accordance with the principles and practices of Good Corporate Governance;
- Encourage the creation of a fair HR development system to increase the work motivation of PTBA employees.

Work Guidelines/Charter of Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Committee

Work Guidelines/Charter for this committee is based on the Board of Commissioners' Decree No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021, concerning the Determination of the Charter of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee. This guideline has been prepared as a reference for implementing the duties of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committees.

The Charter is periodically evaluated to ensure the Company's compliance with applicable regulations. The contents of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee Charter are as follows:

1. Duties, functions, obligations, responsibilities and authority;
2. Meeting Terms;
3. Reporting Provisions;
4. Other important matters to carry out the committee's duties.

Membership Criteria

The requirements and qualifications for members of this committee are regulated in the Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises. As for the

Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun atas persyaratan dan kualifikasinya, harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi, antara lain:

Kompetensi

1. Memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadaisesuai dengan latar belakang pendidikannya;
2. Memiliki sikap dan reputasi yang baik;
3. Memiliki sikap mental, etika dan tanggung jawab profesi yang baik;
4. Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga bagi pelaksanaan tugas KRU, PT, CSR, NR & PSDM;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran danpandangan yang konstruktif;
6. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yangmemadai atas aspek-aspek risiko usaha, pascatambang, CSR, nominasi, remunerasi, danpengembangan SDM perusahaan.

Independensi

1. Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
3. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
4. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
5. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
7. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
8. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak keberatan/ bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermaterai.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan SDM yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris akan mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Perusahaan, sedangkan masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

requirements and qualifications, they must meet competency and independence requirements, including:

Competencies

1. Have high integrity, dedication, ability, knowledge, and adequate experience according to their educational background;
2. Have a good attitude and reputation;
3. Have a good mental attitude, ethics, and professional responsibility;
4. Committed to dedicate their time and energy for the implementation of their duties;
5. Able to communicate effectively and have the ability to provide suggestions and constructive views;
6. Have adequate knowledge and understanding of aspects of business risk, post-mining, CSR, nomination, remuneration, and human capital development of the Company.

Independence

1. Members of this committee is responsible to Board of Commissioners;
2. Members of this committee must be independent and free from external influences;
3. Members of this committee should not have blood and marriage relations up to the second degree either in a straight line or sideways with members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or Major Shareholders of PTBA;
4. Members of this committee are not allowed to have a business relationship, either directly or indirectly related to PTBA's business activities;
5. Members of this committee are not employees of PTBA in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
6. Members of this committee are not allowed to have a personal interest, either directly or indirectly, with material Company information;
7. Members of this committee who are not members of Board of Commissioners are not allowed to concurrently become members of other committees within PTBA in the same period;
8. Members of this committee have no objections/are willing to make and sign a written statement regarding the independence requirements on stamped paper.

Term of Office

Members of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee who are also members of Board of Commissioners, their term of office follows the term of office as a Commissioner of the Company. Meanwhile, the term office for those who are not included in the Board of Commissioners, have a maximum of 3(three) years and may be extended for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of Board of Commissioners at any time to review and dismiss the members of this committee.

Susunan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

(Per 15 Desember 2023 berubah dan terbagi menjadi Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi & Remunerasi)

Di tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM. Selanjutnya dalam rangka kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dan peraturan yang berlaku, maka pada tanggal 15 Desember 2023 dilakukan perubahan nama komite menjadi Komite Pemantau RIsiko & Tata Kelola Terintegrasi. Fungsi Nominasi, Remunerasi & PSDM dilakukan oleh komite terpisah, yaitu Komite Nominasi & Remunerasi.

Adapun susunan dan komposisi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM tahun 2023 sebagai berikut:

Composition of Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

(As per December 15, 2023, the committee is separated into the Risk Monitoring & Integrated Governance Committee and the Nomination & Remuneration Committee)

In 2023, there were changes to the composition of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committees. In order to comply with corporate governance and applicable regulations, on December 15, 2023, the name of the committee was changed to the Integrated Risk & Governance Monitoring Committee. Meanwhile, the Nomination, Remuneration & HCD functions are carried out by a separate Committee, namely the Nomination & Remuneration Committee.

The composition of the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee in 2023 is as follows:

Susunan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM (1 Januari - 14 Desember 2023)
Composition of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committees (January 1, - December 14, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Irwandy Arif	Ketua Chairman	Teknik Pertambangan Mining Engineering	01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	Pertama First
Kurnia Toha	Wakil Ketua Bidang Risiko Usaha dan Pasca Tambang Vice Chairman of Business Risk and Post-Mining	Hukum Law	01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	Pertama First
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Ketua Bidang Remunerasi, CSR/PKBL Vice Chairmanof Remuneration and CSR/PKBL	Ekonomi & SDM Economy & HRD	01/SK/PTBA-DEKOM/VI/2023	Pertama First
Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Bidang Nominasi dan PSDM Vice Chairman of Nomination and HCD	Hukum Law	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021	Pertama First
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management	18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020 dan 07/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023	Kedua Second
Tri Winarno	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	03/PTBA-DEKOM/VIII/2018, 04/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2021 dan 03/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023	Kedua Second
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	Akuntansi dan Audit Accounting and Audit	16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan 05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023	Kedua Second
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023	Pertama First

Susunan Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi (15 - 31 Desember 2023)
Composition of the Risk Monitoring & integrated Governance Committee (December 15 - 31, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Irwandy Arif	Ketua Chairman	Teknik Pertambangan Mining Engineering	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
E. Piterdono HZ	Wakil Ketua Bidang Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Vice Chairman of Integrated Risk Monitoring & Governance Committee	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Ketua Bidang Pasca Tambang, CSR, GCG dan IT Vice Chairman of Post-Mining, CSR, GCG, and IT	Ekonomi & SDM Economy & HRD	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Tri Winarno	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	03/PTBA-DEKOM/VIII/2018, 04/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2021 , 03/SK/PTBA-DEKOM/VIII/2023 dan 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second

Susunan Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi (15 - 31 Desember 2023)
Composition of the Risk Monitoring & integrated Governance Committee (December 15 - 31, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	Akuntansi dan Audit Accounting and Audit	16/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020, 05/SK/PTBA-DEKOM/X/2023 dan 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	Teknik Pertambangan Mining Engineering	08/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023 dan 10/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First

Susunan Komite Nominasi & Remunerasi (15 - 31 Desember 2023)
Composition of the Nomination & Remuneration Committee (December 15 - 31, 2023)

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Keputusan Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Kurnia Toha	Ketua Chairman	Hukum Law	09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Vice Chairman	Hukum Law	07/SK/PTBA-DEKOM/XII/2021 dan 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Pertama First
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management	18/SK/PTBA-DEKOM/XI/2020, 07/SK/PTBA-DEKOM/XI/2023, dan 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023	Kedua Second

Profil Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Profil Komite Risiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipecah menjadi (i) Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi serta (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian atas Sub-BAB ini.

Profile of Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

The profiles of the Risk Management, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Committee, which have been divided into (i) the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, and (ii) the Nomination and Remuneration Committee, can be seen at the top of this subsection.

Independensi Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait independensi anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM, Dewan Komisaris Perusahaan telah menetapkan persyaratan independensi dari Komite RU & NR PSDM yang dimuat pada Piagam Komite yaitu:

1. Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
3. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
4. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung kepada berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
5. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
7. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap

Independence of Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee Members

In accordance with the provisions governing Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee independence, the Company's Board of Commissioners determined the independence requirements of this committee, which are contained in the Committee Charter, namely:

1. Members of this committee are responsible to Board of Commissioners;
2. Members of this committee must be independent and free from external influences;
3. Members of this committees are not allowed to have blood and marriage relations up to the second degree either in a straight line or sideways with Members of Board of Commissioners, Members of Board of Directors, and/or Major Shareholders of PTBA;
4. Members of this committees are not allowed to have a business relationship, either directly or indirectly, related to PTBA's business activities;
5. Members of this committee are not employees of PTBA in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners;
6. Members of this committee are not allowed to have a personal interest, either directly or indirectly, with material Company information;
7. Members of this committee who are not members of Board of Commissioners are not allowed to concurrently

menjadi Anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
8. Anggota Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM tidak keberatan/ bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermaterai.

become members of other committees within PTBA in the same period;
8. Members of this committee have no objections/are willing to make and sign a written statement regarding the independence requirements on stamped paper.

Adapun pemenuhan independensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

The independence fulfillment is listed on the table below:

Tabel Independensi Anggota Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM
Independence Table of Member of Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Irwandy Arif	Kurnia Toha	Rahmat Hidayat Pulungan	Carlo B. Tewu	Nora Sri Hendriyeni	Tri Winarno	Helmiansyah Irawan	Ganda Marihot Simangunsong
Bukan pegawai Aktif Perusahaan Not an Active Employee of the Company	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/ Pengendali Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, or Major/Controlling Shareholders	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Has no business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business	√	√	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Bidang Risiko Usaha

1. Melakukan penelaahan atas jenis-jenis asuransi dan risiko usaha yang dilakukan PTBA sesuai dengan tingkat kewajaran yang berlaku umum di perusahaan-perusahaan tambang;
2. Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batu bara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
3. Melakukan kajian berbagai risiko yang dihadapi PTBA, dan pelaksanaan risiko oleh Direksi, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi PTBA;
4. Melakukan peninjauan lapangan secara *on the spot* dan secara periodik untuk mengetahui segala risiko baik yang sudah terjadi maupun untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan sesuai dengan keperluannya;
5. Melakukan pemantauan periode pascatambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
7. Menyampaikan peringatan dini atas risiko yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan penambangan, kebijakan, kontrak, penjualan, investasi, penggunaan peralatan baru dan kegiatan usaha lainnya;
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA yang berkaitan dengan asuransi, risiko usaha dan pascatambang.

Duties and Responsibilities

Business Risk Sector

1. Review the types of insurance and business risks of PTBA based on fairness generally accepted in mining companies;
2. Monitoring the request of PTBA Board of Commissioners on the development of coal price situation in the domestic and international market for evaluation material;
3. Conduct a study of various risks faced by PTBA, and the implementation of risks by Board of Directors, evaluate and provide recommendations regarding the risk management system implemented by Board of Directors of PTBA;
4. Conduct on-the-spot and periodic field visits to learn all risks, both those that have occurred, and to anticipate up-coming matters in the near future in the field according to their needs;
5. Monitor the post-mining period, to follow the procedures and laws and regulations;
6. Provide positive thoughts about opportunities in business development from research results to be submitted to PTBA Board of Commissioners and as a follow-up to PTBA Board of Commissioners' policy steps;
7. Deliver early warning of risks that may arise as a result of mining activities, policies, contracts, sales, investments, use of new equipment, and other business activities;
8. Perform other tasks assigned by Board of Commissioners of PTBA related to insurance, business risk, and post-mining.

Bidang Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM

1. Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kriteria seleksi, prosedur nominasi serta penilaian bagi anggota Direksi Dewan Komisaris PTBA serta memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PTBA.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan perhitungan dan besaran Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA.
5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia di PTBA yang meliputi sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karier, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian, serta sistem pensiun.
6. Menggali informasi mengenai pengembangan SDM Perusahaan melalui Direksi PTBA.
7. Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Pada akhir tahun berjalan, Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris PTBA untuk ditetapkan.
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA.

Nomination, Remuneration, and Human Capital Development Sector

1. Give independent and professional opinions and recommendations to Board of Commissioners of PTBA on nomination, remuneration, and Human Capital Development issues.
2. Review the Company's level of compliance with laws and regulations relating to nomination, remuneration, and human Capital development.
3. Assist the Board of Commissioners in compiling selection criteria, nomination procedures and assessments for members of Board of Directors of and Board of Commissioners of PTBA and provide recommendations on the number of members of Board Commissioners and Board of Directors at PTBA.
4. Assist the Board of Commissioners in proposing the calculation and amount of Salary/Honorarium, Allowances, Facilities, and Bonuses for Board of Directors and Board of Commissioners of PTBA.
5. Evaluate and provide recommendations on the implementation of Human Capital Management at PTBA, which includes the recruitment system, career system, training and development system, performance appraisal system, payroll, and the pension system.
6. Explore information regarding PTBA's Human Capital Development through Bukit Asam's Board of Directors.
7. Conduct a field survey to determine the implementation of Human Capital Development.
8. At the end of the current year, BR, PM, CSR, NR & HCD Committee is obliged to prepare and submit an annual work program to PTBA Board of Commissioners for determination.
9. Perform other tasks assigned by Board of Commissioners of PTBA.

Pelaporan

Laporan tanggung jawab Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:

1. Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite.
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

Reporting

Reports on the responsibilities of BR, PM, CSR, NR & HCD Committees are submitted to Board of Commissioners in the form of a written report, which consists of:

1. Quarterly reports on the implementation of Committee's activities.
2. Reports for each Committee's duties implementation, including facts on the field, analysis, conclusions, and suggestions.

Pembagian Tugas Antar Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM terbagi atas bidang tugas sebagai berikut:

Division of Duties Among Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee

In carrying out its duties, Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee is divided into the following task fields:

No	Bidang Field	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman	Anggota Member
1	Risiko Usaha dan Pascatambang Business and Post-mining Risks	Irwandy Arif	Kurnia Toha	Tri Winarno
2	Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Nomination, Remuneration and HC Development		Carlo B Tewu	Nora Sri Hendriyeni
3	CSR/PKBL dan GCG CSR/PKBL and GCG		Rahmat Hidayat Pulungan	Helmiansyah Irawan

Rapat Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM wajib mengadakan rapat sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite atau Anggota yang paling senior apabila Ketua berhalangan hadir.

Sepanjang tahun 2023, Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM telah melaksanakan rapat sebanyak 14 dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Business Risk, Post Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Committee Meeting

BR, PM, CSR, NR & HCD Committee is required to conduct a meeting at least once in 1 (one) month led by Chairman of Committee or the most senior member if the Chairman cannot attend.

Throughout 2023, the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HCD Development has held 14 Meetings, with the following agenda and frequency of attendance:

Tabel Agenda Rapat Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM
Table of Meeting Agenda of RU, PT, CSR, NR & HCD Development Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	02 Januari 2023 January 2, 2023	Informasi Teknologi *Business Analytics* Business Analytics Technology Information
2	13 Januari 2023 January 13, 2023	Peninjauan UMKM Binaan PTBA Review of PTBA-assisted MSMEs
3	17 Januari 2023 January 17, 2023	Uji Tuntas Dana Pensiun Pension Fund Due Diligence
4	13 Februari2023 February 13, 2023	Peninjauan Rumah BUMN Inspection of SOEs Houses
5	27 Februari 2023 February 27, 2023	Perkembangan Terkini PT IPC Anak Usaha PTBA Latest Developments of PT IPC, a Subsidiary of PTBA
6	13 Juli 2023 July 13, 2023	Kunjungan Kerja Ke Unit Dermaga Kertapati Working Visit to the Kertapati Pier Unit
7	02 Agustus 2023 August 2, 2023	Perkembangan Terkini Informasi Teknologi PTBA Latest Developments in PTBA Technology Information
8	03 Agustus 2023 August 3, 2023	Realisasi TJSL TW II Realization of TJSL QW II
9	07 Agustus 2023 August 7, 2023	Rapat Pembahasan Proyek Strategis Terkini Latest Strategic Project Discussion Meeting
10	08 September 2023 September 8, 2023	Kunjungan Rumah BUMN Banyuasin Banyuasin SOEs Home Visit
11	21 Desember 2023 December 21, 2023	Implementasi GCG Di PTBA Implementation of GCG at PTBA
12	27 Desember 2023 December 27, 2023	Paparan Unit Pertambangan Ombilin Exposure to the Ombilin Mining Unit
13	27 Desember 2023 December 27, 2023	Kegiatan Pasca Tambang PTBA PTBA Post-Mining Activities
14	27 Desember 2023 December 27, 2023	Kinerja Anak Usaha PTBA Performance of PTBA Subsidiaries

Tabel Kehadiran Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM dalam Rapat Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM
Table of Committee Meeting Attendance of RU, PT, CSR, NR & HRD Development Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
1	Irwandy Arif	Ketua Chairman	11	11	100%
2	Carlo Brix Tewu	Wakil Ketua Vice Chairman	11	9	82%
3	Kurnia Toha*	Wakil Ketua Vice Chairman	7	7	100%
4	Rahmat Hidayat Pulungan*	Wakil Ketua Vice Chairman	7	7	100%
5	Agus Suhartono**	Ketua Chairman	4	4	100%
6	Devi Pradnya Paramita**	Wakil Ketua Vice Chairman	4	-	0%
7	E Piterdono HZ***	Wakil Ketua Vice Chairman	4	4	100%
8	Tri Winarno	Anggota Member	14	11	79%

Tabel Kehadiran Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM dalam Rapat Komite RU, PT, CSR, NR & PSDM
Table of Committee Meeting Attendance of RU, PT, CSR, NR & HRD Development Committee

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Kehadiran (%) Attendance (%)
9	Helmiansyah Irawan	Anggota Member	14	14	100%
10	Nora Sri Hendriyeni	Anggota Member	14	14	100%
11	Ganda M Simangunsong***	Anggota Member	4	4	100%

Keterangan | Information:
*Aktif sejak 30 Juni 2023
**Tidak aktif sejak 10 April 2023
***Aktif sejak 15 Desember 2023
*Active from June 30, 2023
**Inactive since April 10, 2023
***Active since December 15, 2023

Pengembangan Kompetensi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM

Pengembangan kompetensi Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Competency Development of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committees

The competency development of this Committees can be seen in the Education and/or Training section in the Company Profile Chapter in this Annual Report book.

Sertifikasi Profesi yang Dimiliki oleh Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Profession Certification Owned by the Business Risk, Post-Mining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institutions that Issue Professional Certification
Irwandy Arif	Ketua/Komisaris Utama Chairman/President Commissioner	Insinyur Profesional Utama (iPU) Principal Professional Engineer	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) The Institution of Engineers Indonesia
		Certificate of Honorary Membership	The Asean Federation of Engineering Organization
		Dosen Lecturer	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
Kurnia Toha	Wakil Bid. Risiko Usaha & Pasca Tambang/Komisaris Independen Vice Department of Business & Post-Mining Risk/Independent Commissioner	Dosen Lecturer	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
Rahmat Hidayat Pulungan	Wakil Bid. Remunerasi & CSR/ PKBL/ Komisaris Independen Vice Department of Remuneration & CSR/PKBL/Independent Commissioner	Tidak ada None	
Carlo B Tewu	Wakil Bid. Nominasi & PSDM Vice Department of Nomination & HCD	Tidak ada None	
Nora Sri Hendriyeni	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	CA-Chartered Accountant	Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants
		CACP-*Certified* Audit Committee Professional	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
		CSRA-*Certified* Sustainability Reporting Assurance	NCCR-National Center for Corporate Reporting
		CSRS-*Certified* Sustainability Reporting Specialist	NCCR-National Center for Corporate Reporting
		CSP-*Certified* Sustainability Practitioner	NCCR-National Center for Corporate Reporting

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Institutions that Issue Professional Certification
Helmiansyah Irawan	Anggota Member	*Certified* Public Accountant	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Public Accountants
		Certified Professional Investigator	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Public Accountants
		Certified Professional Auditor of Indonesia	Institut Akuntan Publik Indonesia Indonesian Institute of Public Accountants
		Chartered Accountant of Indonesia	Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants
		Asean Chartered Professional Accountants	The Asean Chartered Professional Accountant Coordinating Committee
		Certified of Audit Committee Practices	Ikatan Komite Audit Indonesia Indonesian Audit Committee Association
		Certified of Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance	The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
		Certified Risk Associate	Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Capital Market Professional Certification Institute
		Certified of Indonesia Insurance Brokers	Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia Indonesian Insurance and Reinsurance Brokers Association
Ganda Marihot Simangunsong	Anggota Member	Insinyur Profesional Madya (IPM) Intermediate Professional Engineer	Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Indonesian Engineers Association

Pelaksanaan Tugas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di tahun 2023, Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & PSDM melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Telaahan & Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan untuk Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
2. Telaahan & Rekomendasi atas Laporan Proyek Strategis Bulanan Perusahaan;
3. Hasil Site Visit /Kunjungan Lapangan serta rekomendasi terkait;
4. Laporan Implementasi Padi UMKM;
5. Telaahan & Rekomendasi atas Rencana Kerja Sama perusahaan;
6. Telaahan & Rekomendasi atas Pergantian Sekretaris Perusahaan
7. Telaahan & Rekomendasi atas Perhutungan Tantiem dan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
8. Telaahan atas Progres KPI setiap bulan.
9. Telaahan & Rekomendasi atas Perubahan Organisasi;
10. Telaahan & Rekomendasi atas Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko Perusahaan
11. Telaahan dan Rekomendasi atas Laporan Kinerja TJSL;
12. Penyusunan Laporan Triwulanan dan Tahunan Komite.

Implementation of Duties of Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee

In 2023, the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & HC Development Committee has carried out the following duties and responsibilities as follows:

1. Review & Recommendations on Application for Approval for Appointment of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries;
2. Review & Recommendations on the Company's Monthly Strategic Project Report;
3. Site Visit / Field Visit Results and related recommendations;
4. Implementation Reports on PaDi MSMEs;
5. Review & Recommendations on the company's Cooperation Plan;
6. Review & Recommendations for the Change of Corporate Secretary
7. Review & Recommendations on Tantiem Calculations and Salaries/Honorariums for the Company's Directors and Board of Commissioners;
8. Review of KPI Progress every month.
9. Review & Recommendations for Organizational Changes;
10. Review & Recommendations for Determining Categories and Company Risk Classification
11. Review and Recommendations on the CSR Performance Report;
12. Preparation of the Committee's Quarterly and Annual Reports.

Penilaian oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM

Penilaian kinerja Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target KPI masing-masing Komite.

Penilaian kinerja Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023, dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah disusun. Setiap awal tahun, Komite menyerahkan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan program kerja Komite selama satu tahun, yang di dalamnya memuat *Key Performance Indicator* Komite. Terdapat 3 (tiga) perspektif pada KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM, yaitu:

1. Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi;
2. Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola;
3. Rapat Komite.

Adapun realisasi atas KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023, sebagai berikut:

The Board of Commissioners' Assessment on the performance of Business Risk, Post-mining, Nomination, Remuneration, and HC Development Committee

The performance of this Committees is assessed by The Board of Commissioners through monitoring and evaluating the Committee's performance reports in achieving KPI targets of each Committee.

The performance appraisal of this Committee in 2023 was carried out based on the realization and completion of the work program that was prepared at the beginning of the year. At the beginning of each year, the Committee submits an Annual Work Plan consist of the Committee's work plan in one year, including the Committee's Key Performance Indicator. There are 3 (three) perspective on the committee's KPI as follows:

1. Study and Giving Recommendations Aspect;
2. Dynamics and Governance Strengthening;
3. Committee Meeting.

The realization of the Committee's KPIs in 2023 is as follows:

Tabel KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023
2023 KPI Achievements of Business Risk, Post-mining, Nomination, Remuneration, and HC Development Committee

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, functions, and responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target	Status
1	**Aspek Kajian dan Pemberian Rekomendasi** **Review and Provision of Recommendations Aspect**					
	Memberikan pendapat/ rekomendasi/ tanggapan kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide opinions/recommendations/ responses to Board of Commissioners accompanied by clear and timely reasons in accordance with the Articles of Association	Pemberian pendapat/rekomendasi/ tanggapan kepada Direksi yang disertai dengan alasan yang jelas dan tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of opinions/ recommendations/responses to Board of Directors accompanied by clear and timely reasons in accordance with the Articles of Association	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
	Memberikan masukan/ pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar Provide input/opinion on corporate actions submitted by Board of Directors in a timely manner in accordance with the Articles of Association	Pemberian masukan/pendapat atas aksi korporasi yang disampaikan oleh Direksi secara tepat waktu sesuai ketentuan Anggaran Dasar The provision of input/opinions on corporate actions submitted by Board of Directors in a timely manner in accordance with the Articles of Association	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
	Memberikan pendapat dan saran berkualitas antara lain memuat aspek legal, aspek bisnis dan aspekrisiko atas aksi korporasi besertamitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan Provide quality opinions and suggestions, including legal aspects, business aspects and risk aspects of corporate actions and their mitigation of corporate actions proposed by Board of Directors for the current year	Pemberian pendapat dan saranberkualitas antara lain memuataspek legal, aspek bisnis dan aspek risiko atas aksi beserta mitigasinya terhadap aksi korporasi yang diusulkan Direksi tahun berjalan The provision of quality input/opinion, among others, in law, business, and risk aspeaspectscts in line with its mitigation for the corporate act proposed by the Board of Directors in the current year	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
	Melakukan peninjauan melaluikunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Conducting a review through site visits on strategic activities of SOEs	Kunjungan lapangan (*site visit*) terhadap kegiatan-kegiatan strategis BUMN Site visit to SOE strategic activities	Laporan Kunjungan Visit report	10	2	Tercapai Achieved
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP Provide opinions and suggestions to Board of Commissioners regarding the RJPP and WP&B	Pemberian pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai RJPP dan RKAP The provision of opinions and suggestions to Board of Commissioners regarding the RJPP and WP&B	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved

Tabel KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM tahun 2023
2023 KPI Achievements of Business Risk, Post-mining, Nomination, Remuneration, and HC Development Committee

No	Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Duties, functions, and responsibilities	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot (%) Weight (%)	Target	Status
	Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai laporan Provide opinions and suggestions to Board of Commissioners regarding reports	Pemberian tanggapan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tahunan The provision of feedback to Board of Commissioners regarding the annual report	Nota Dinas Official note	10	1	Tercapai Achieved
2	**Aspek Dinamis dan Penguatan Tata Kelola Dynamic and Governance Strengthening Aspect**			**20**		
	Kegiatan Pengembangan Development activity					
	Mengikuti Pelatihan/ Seminar/ Webinar untuk meningkatkan Kompetensi Participate in training/seminars/ webinar to improve competency	Kegiatan Pelatihan/ Seminar/ Webinar Training/Seminars/Webinar Activities	Laporan/ Sertifikat Report/ certificate	10	1	Tercapai Achieved
	Penguatan Tata Kelola Governance Strengthening					
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Prepare the Committee's Annual Work Plan and Budget	Penyampaian kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Komite Submission to Board of Commissioners regarding the Committee's annual Work Plan and Budget	Surat Letter	10	1	Tercapai Achieved
3	**Rapat Komite Committee Meeting**			**20**	**20**	
	Kehadiran Rapat Internal Komite Attendance of Internal Committee Meetings	Rata-rata jumlah komite yang menghadiri rapat dalam setahun Average number of committees attending meetings in a year	%	10	80	Tercapai Achieved
	Risalah Rapat Minutes of meetings	Tersusunnya risalah rapat Minutes of meetings drawn up	Dokumen Risalah Minutes document	10	6	Tercapai Achieved
Jumlah Total				**100**		

Tabel KPI Individu Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM Tahun 2023
Table of the BR, PM, CSR, NR & HR Development Committee Individual KPIs in 2023

Anggota Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM BR, PM, CSR, NR & HC Development Committee Member	Perspektif Perspective	Indikator Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Tri Winarno	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100 (Tercapai) 100 (Achieved)
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Ventures	Rapat/ND Meetings/ND	15	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Manajemen Risiko Perusahaan dan Pasca Tambang Corporate and Post-Mining Risk Management	Rapat/ND Meetings/ND	10	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy	Rapat/ND Meetings/ND	15	3 (Tercapai) 3 (Achieved)
		Penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance			
		CSR			
		Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Capital Development Policy			
		Sistem Teknologi Informasi Information Technology System			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran %Attendance	20	80 (Tercapai) 80 (Achieved)
Jumlah Total				**100**	

Tabel KPI Individu Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM Tahun 2023
Table of the BR, PM, CSR, NR & HR Development Committee Individual KPIs in 2023

Anggota Komite KRU, PT, CSR, NR & PSDM BR, PM, CSR, NR & HC Development Committee Member	Perspektif Perspective	Indikator Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
Helmiansyah Irawan	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100 (Tercapai) 100 (Achieved)
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations			
		Kebijakan mutu dan pelayanan Quality and service policy			
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Ventures	Rapat/ND Meetings/ND	10	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Manajemen Risiko Perusahaan dan Paska Tambang Corporate and Post-Mining Risk Management	Rapat/ND Meetings/ND	20	2 (Tercapai) 2 (Achieved)
		Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy	Rapat/ND Meetings/ND	10	2 (Tercapai) 2 (Achieved)
		Penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance			
		CSR			
		Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Capital Development Policy			
		Sistem Teknologi Informasi Information Technology System			
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran %Attendance	20	80 (Tercapai) 80 (Achieved)
Jumlah Total				100	
Nora Sri Hendriyeni	Kolegial Collegial	Pencapaian KPI Komite Committee KPI Achievement	%	40	100 (Tercapai) 100 (Achieved)
	Individu Individual	Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations			
		Pemberian Kajian dan Rekomendasi Provision of Studies and Recommendations	Rapat/ND Meetings/ND	10	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Pengelolaan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan Management of Subsidiaries/Joint Ventures			
		Manajemen Risiko Perusahaan dan Paska Tambang Corporate and Post-Mining Risk Management			
		Kebijakan Pengembangan Usaha Business Development Policy			
		Penerapan *Good Corporate Governance* Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance			
		CSR			
		Kebijakan Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Capital Development Policy	Rapat/ND Meetings/ND	30	1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Sistem Teknologi Informasi Information Technology System			1 (Tercapai) 1 (Achieved)
		Menghadiri Rapat Meeting Attendance	% Kehadiran %Attendance	20	80 (Tercapai) 80 (Achieved)
Jumlah Total				100	

Berdasarkan pemenuhan target atas KPI Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Risiko Usaha, Pascatambang, Nominasi Remunerasi dan PSDM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2023, sesuai dengan Piagam Komite, Rencana Kerja Tahunan dan capaian target KPI yang telah ditetapkan.

Based on the fulfillment of the Committee's KPI, Board of Commissioners considers that the Business Risk, Post-mining, Remuneration Nomination, and HC Development Committee has properly carried out their duties and responsibilities in 2023 in accordance with the Committee Charter, Annual Work Plan, and achieved the set KPI targets.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") diwajibkan untuk membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan. Fungsi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan yang menjalakan peran sangat esensial bagi perusahaan seperti (i) hubungan dengan pemegang saham (ii) hubungan dengan pemangku kepentingan termasuk media, (iii) menjamin kepatuhan perusahaan (khususnya Direksi, Dewan Komisaris, serta perangkat Organ Pendukung Dewan Komisaris) dan *good corporate governance*, khususnya untuk ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal, (iv) arsip dan kesekretariatan khususnya terkait dengan dokumentasi rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan, dan RUPS dapat berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Activities Significantly, the State-Owned Enterprise, PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") is required to establish the Corporate Secretary. The Function of the Corporate Secretary Work Unit will carry out very essential roles for the company such as (i) relations with shareholders (ii) relations with stakeholders including the media, (iii) ensuring company compliance (especially the Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners) and good corporate governance, especially for provisions in the capital market sector, (iv) archives and secretariat, especially related to documentation of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, joint meetings and GMS to run effectively and efficiently by considering the provisions of laws and regulations and the principles of good corporate governance.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar, dan Piagam Sekretaris Perusahaan PTBA, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perusahaan .
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Perusahaan wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
4. Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK.
5. Dalam situs web Perusahaan wajib diungkapkan informasi mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan kekosongan Sekretaris Perusahaan dengan disertai informasi pendukung.
6. Pelaporan kepada OJK atas informasi terkait dengan angka 1 dan angka 2 dan pemuatan informasi pada situs web Perusahaan sebagaimana angka 5 di atas, dilakukan oleh Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kondisi baik itu pengangkatan, pemberhentian, dan peristiwa kekosongan Sekretaris Perusahaan.

Persyaratan Sekretaris Perusahaan

Untuk dapat menjabat/diangkat sebagai pejabat Sekretaris Perusahaan dan selama menjabat sebaga Sekretaris Perusahaan, disyaratkan untuk memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
4. Memahami kegiatan usaha Perusahaan;
5. Dapat berkomunikasi dengan baik; dan
6. Berdomisili di Indonesia.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Di tahun 2023 terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan PTBA dari Apollonius Andwie C menjadi Niko Chandra. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan Sekretaris Perusahaan Bukit Asam telah disampaikan laporannya kepada OJK berdasarkan Surat

Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Companies, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises ("SOEs") No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities State-Owned Enterprises, Articles of Association, and Charter of the Corporate Secretary of PTBA, the mechanism for appointing and dismissing the Corporate Secretary is carried out by considering the following matters:

1. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors by first obtaining approval from the Company's Board of Commissioners.
2. The company is obliged to submit a report to the OJK regarding the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.
3. In the event of a vacancy in the Corporate Secretary, the Company is obliged to appoint a replacement within a maximum period of 60 (sixty) days from the vacancy of the Corporate Secretary.
4. During the vacancy period in the Corporate Secretary as referred to in number 3, the Corporate Secretary is held concurrently by a member of the Board of Directors or an individual appointed as temporary Corporate Secretary without considering the requirements for the Corporate Secretary as regulated in OJK's regulations.
5. On the Company's website, information regarding the appointment, dismissal and vacancy of the Corporate Secretary must be disclosed, along with the supporting information.
6. Reporting to the OJK regarding information related to numbers 1 and 2 and disclosing of information on the Company's website as in number 5 above, is carried out by the Company no later than 2 (two) working days after conditions such as appointment, dismissal and vacancy on the Corporate Secretary.

Corporate Secretary Requirements

To be able to serve/be appointed as Corporate Secretary and while serving as Corporate Secretary, Corporate Secretary is required to fulfill the following requirements and qualifications:

1. It is prohibited to hold any position in other issuers or public companies.
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Have knowledge and understanding in the fields of law, finance, and corporate governance;
4. Understand the Company's business activities;
5. Can communicate well; and
6. Domiciled in Indonesia.

Profile of Corporate Secretary Officer

In 2023 there was a change in the Corporate Secretary of PTBA from Apollonius Andwie C to Niko Chandra. In accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, changes to the Corporate Secretary of Bukit Asam have been submitted to the OJK based on PTBA Letter

PTBA No. B/320/111000/KS.03/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Perubahan Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk.

No. B/320/111000/KS.03/VIII/2023 dated August 10, 2023, Regarding Changes in the Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk.

Profil Sekretaris Perusahaan 10 Agustus 2023 - sekarang

Profile of Corporate Secretary from August 10, 2023 - Present



Niko Chandra, S.T., M.M.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 - Present

Usia Age	37 tahun 37 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Magelang, 20 April 1986 Magelang, April 20, 1986
Domisili Domicile	Serpong, Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor: 168/0100/2023 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk Number: 168/0100/2023 concerning the Appointment of Position Holders within PT Bukit Asam Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2023) • S1 Teknik Kimia – Institut Teknologi Bandung (2008) • Master of Management – PPM School of Management (2023) • Bachelor in Chemical Engineering – Bandung Institute of Technology (2008)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (Agustus 2023 – sekarang) • Ahli Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Maret – Agustus 2023) • Kepala Divisi Institutional Relations PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Des 2021 – Maret 2023) • Kepala Divisi Mining and Mineral Industry Institute PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Jun – Des 2021) • VP Strategi dan Pengembangan Korporat PT Bukit Asam Tbk (Okt 2020 – Mei 2021) • VP Pengembangan Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Jan – Okt 2020) • VP Pemasaran dan Penjualan Ekspor PT Bukit Asam Tbk (Jan 2019 – Jan 2020) • Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (August 2023-present) • Business Expert PT Bukit Asam Tbk (March-August 2023) • Head of Institutional Relations Division PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Dec 2021 – March 2023) • Head of Mining and Mineral Industry Institute Division PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (June – December 2021) • VP Corporate Strategy and Development PT Bukit Asam Tbk (October 2020 – May 2021) • VP Business Development PT Bukit Asam Tbk (January – October 2020) • VP Marketing and Export Sales PT Bukit Asam Tbk (January 2019 – January 2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris PT Bukit Service Energi Terpadu Commissioner of PT Bukit Service Energi Terpadu
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Profil Sekretaris Perusahaan sampai dengan 10 Agustus 2023

Profile of Corporate Secretary until August 10, 2023



Apollonius Andwie C., S.E., M.M.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Masa Jabatan: 2020 - 2023
Term of Office: 2020 - 2023

Usia Age	54 Tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Pekalongan, 14 Agustus 1969 Pekalongan, August 14, 1969
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 220/0100/2020 Decree of the Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 220/0100/2020
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Keuangan LPPM (1995) • S1 Akuntansi STIE Malang Kucecwara (1994) • Master Degree in Financing from LPPM (1995) • Bachelor Degree in Accounting from STIE Malang Kucecwara (1994)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Senior Manajer Pemasaran, Penjualan Domestik dan Distribusi (2020) • Direktur Utama PT Bukit Multi Investama (2018-2020) • Senior Manajer Keuangan (2017-2018) • Senior Manajer Keuangan Korporat (2016-2017) • Senior Manajer Akuntansi dan Anggaran (2014-2016) • Corporate Secretary of PT Bukit Asam Tbk (2020-2023) • Senior Marketing Manager, Domestic Sales and Distribution (2020) • President Director of PT Bukit Multi Investama (2018-2020) • Senior Manager of Finance (2017-2018) • Senior Manager of Corporate Finance (2016-2017) • Senior Manager of Accounting and Budgeting (2014-2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan investor (*investor relation*) termasuk penatausahaan serta menyimpan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta risalah rapat Direksi maupun RUPS.

Corporate Secretary Main Duties

1. Monitor developments in the Capital Market, especially applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with statutory provisions in the Capital Market sector.
3. Carrying out activities related to the investor relations function including administration and storing Company documents including but not limited to the Shareholder Register, Special Register and minutes of Directors' meetings, and GMS.

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*).
5. Membina dan mengendalikan kepatuhan hukum, perundang-undangan dan tata kelola Perusahaan dalam rangka memastikan terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pasar modal, SRO serta selalu berusaha memenuhi undang-undang dan ketentuan terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Mengelola kesekretariatan Direksi untuk memberikan dukungan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
7. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
   - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
   - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretaris Perusahaan
2. Membina dan memelihara kepatuhan Perusahaan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, baik aspek hukum pasar modal, aspek hukum bidang usaha maupun perundang-undangan lain yang terkait.
3. Mengkoordinir dalam membangun, menjaga dan meningkatkan citra Perusahaan serta penyelenggaraan media/sarana komunikasi internal dan eksternal.
4. Melaksanakan pengelolaan informasi secara terpadu dan mengelola kewajiban pelaporan Perusahaan.
5. Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian kegiatan kehumasan dan pembinaan kegiatan keprotokolan Perusahaan.
6. Pelaksanaan komunikasi informasi antara Perusahaan dengan *stakeholder*, khususnya Pemegang Saham, masyarakat dan media masa serta bertindak selaku wakil Perusahaan dan pejabat penghubung antara Perusahaan dengan regulator dan seluruh *stakeholder*.
7. Mengkoordinir penyelenggaraan pemeliharaan data Pemegang Saham dan melakukan pemutakhiran secara periodik.
8. Mengkoordinir penyiapan penyelenggaraan rapat Direksi dan/Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pembuatan dan penyimpanan risalah rapat.
9. Pengelolaan kesekretariatan Direksi, serta kegiatan perkantoran Direksi.
10. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Carry out activities related to the function of public relations.
5. Fostering and controlling compliance with laws, regulations, and corporate governance in order to ensure the fulfillment of the provisions set by the capital market authority, SRO, and always trying to fulfill the laws and related provisions set by the Government.
6. Manage the secretariat of the Board of Directors to provide support for the Board of Directors in carrying out their duties and functions.
7. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
   - Disclosure of information for decisions including the availability of information on the Company's website;
   - Submission of reports to OJK on time;
   - Organizing and documenting the GMS;
   - Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
   - Implementation of an orientation program regarding decisions for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Corporate Secretary Functions

1. Prepare the Corporate Secretary's work plan and budget
2. Develop and maintain the Company's compliance with laws and regulations, including capital market legal aspects, business sector legal aspects, and other related laws.
3. Coordinate in building, maintaining, and improving the Company's image as well as organizing internal and external media/communication facilities.
4. Carry out integrated information management and manage the Company's reporting obligations.
5. Coordinate the implementation of control of public relations activities and development of Company protocol activities.
6. Implement information communication between the Company and stakeholders, especially Shareholders, public, and the mass media as well as acting as the Company's representative and liaison officer between the Company and regulators and all stakeholders.
7. Coordinate the maintenance of Shareholder data and update it regularly.
8. Coordinate the preparation for meetings of the Board of Directors and/Board of Commissioners, General Meeting of Shareholders, including the preparation and storage of meeting minutes.
9. Manage the Directors' secretariat, as well as Directors' office activities.
10. As a liaison between the Company and shareholders, OJK and other stakeholders.

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Wewenang Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi-informasi kepada OJK, SRO, berkaitan dengan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
3. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
4. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi.
5. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
6. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan kepada unit-unit terkait untuk keperluan pelaksanaan tugas.
7. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari unit-unit kerja/pihak terkait atas penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
8. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan
9. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
10. Menghadiri rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Guna mendukung fungsi Sekretaris Perusahaan, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang memuat divisi dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Hubungan Investor;
2. Divisi Kantor Perwakilan, khusus kantor perwakilan Jakarta;
3. Divisi Hubungan Masyarakat dan Administrasi Korporat;
4. Divisi *Corporate Communication dan Government Relation;*
5. Divisi *Office of the Board;*
6. Fungsi *Compliance.*

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 202A/0100/2023 pada tanggal 9 November 2023 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan sebagaimana tergambarkan pada bagan di bawah ini.

Company Secretary Authority

The authority of the Corporate Secretary is as follows:

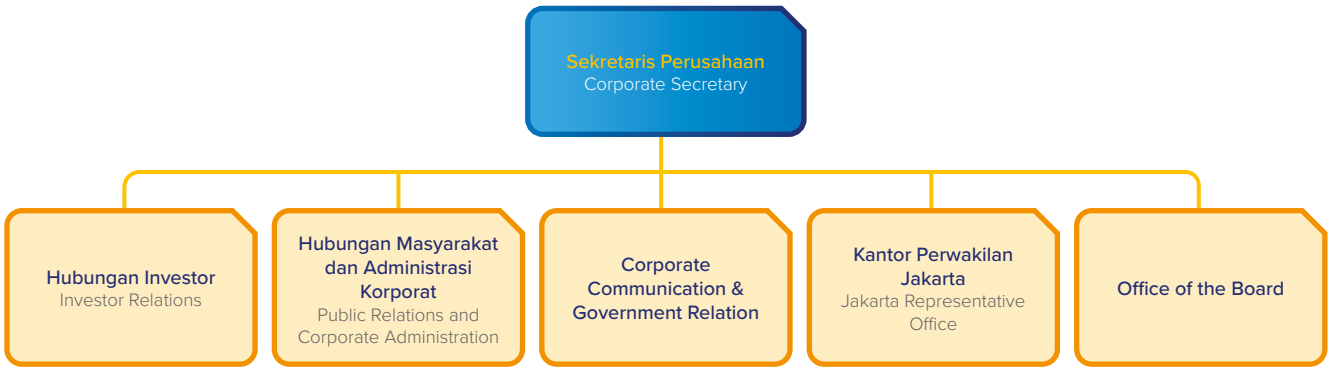
1. Submit information to OJK and SRO regarding the duties of the Corporate Secretary in accordance with applicable regulations.
2. Establish systems and procedures for correspondence and archives within the Board of Directors and the Company.
3. Check notes, minutes of Board of Directors meetings, Company documents and reports in the context of activities to provide information required by the Board of Directors.
4. Request a progress report on the implementation of the Board of Directors' decisions.
5. Request data/information/explanations required by the Board of Directors from related parties inside and outside the Company for the purposes of carrying out the Board of Directors' duties.
6. Request data/information/explanations needed from related units for the purpose of carrying out tasks.
7. Remind and request explanations from work units/related parties regarding the provision of materials/information/data required by the Board of Directors.
8. Represent the Board of Directors in dealing with external and internal parties in accordance with the assignments given and determined policies
9. Propose agendas for the Board of Directors meetings with parties inside/outside the Company.
10. Attend the Board of Directors meetings with external and internal parties in accordance with previously established policies.
11. Use secretarial facilities to carry out their duties.

Corporate Secretary Organizational Structure

In order to support the function of the Corporate Secretary, the Company's Board of Directors has established an organizational structure for the Corporate Secretary which contains the following divisions and functions:

1. Investor Relations Division;
2. Representative Office Division, for the Jakarta representative office;
3. Public Relations and Corporate Administration Division;
4. Corporate Communication and Government Relations Division;
5. Office of the Board Division;
6. Compliance Function;

The Organizational Structure of the Corporate Secretary is in accordance with Directors' Decree No. 202A/0100/2023 dated November 9, 2023, concerning the Organizational Structure of the Corporate Secretary Work Unit as described in the chart below.



Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan kerja Sekretaris Perusahaan yang meliputi:
2. Pengembangan kebijakan, strategi, standar dan prosedur, penyusunan program, implementasi program untuk penanganan *corporate action;*
3. Monitoring perkembangan pasar modal;
4. Membuat kebijakan dan rekomendasi sesuai dengan peraturan pasar modal;
5. Memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal-hal yang perlu diketahui oleh Masyarakat atau pemegang saham mengenai emiten atau perusahaan publik;
6. Menjadi penghubung antara perusahaan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat atau pemegang saham;
7. Membuat kajian berbagai laporan terbaru dari analis pasar modal;
8. Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif atas kinerja perusahaan khususnya di bidang Keuangan;
9. Monitoring situasi dan proyeksi perekonomian (internasional, regional dan lokal, serta pasar modal berbagai negara);
10. Penanganan Administrasi Perusahaan;
11. Penanganan *corporate communication dan government relation;*
12. Penanganan hubungan investor dan kepatuhan;
13. Menjadi representasi Perusahaan (Direksi);
14. Mengelola Kantor Perwakilan Jakarta;
15. Penanganan hubungan masyarakat;
16. Publikasi kegiatan Perusahaan;
17. Penerbitan laporan perusahaan;
18. Menciptakan standar identitas perusahaan;
19. Memberikan dukungan strategis kepada Direksi sehingga citra Perusahaan meningkat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementation of Tasks in 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, including:

1. Direct and control all activities of the Corporate Secretary work unit;
2. Develop policies, strategies, standards and procedures, preparing programs, implementing programs to handle corporate actions;
3. Monitor capital market developments;
4. Form policies and recommendations in accordance with capital market regulations;
5. Provide information services regarding matters that the public or shareholders need to know regarding issuers or public companies;
6. Become a liaison between public companies and the Financial Services Authority (OJK) and the public or shareholders;
7. Review various latest reports from capital market analysts;
8. Conduct qualitative and quantitative analysis of company performance, especially in the financial sector;
9. Monitor the economic situation and projections (international, regional and local, as well as capital markets in various countries);
10. Handle Company Administration;
11. Handle corporate communications and government relations;
12. Handle investor relations and compliance;
13. Become a representative of the Company (Board of Directors);
14. Manage the Jakarta Representative Office;
15. Handle public relations;
16. Publication of Company activities;
17. Publish company reports;
18. Create corporate identity standards;
19. Provide strategic support to the Board of Directors to help the Company's image improves, and in accordance with applicable regulations.

Kegiatan Hubungan Investor

Membina hubungan dengan Pemegang Saham merupakan salah satu hal penting bagi Perusahaan. PTBA selalu memberikan informasi terkini secara berkala kepada para pemegang saham, di luar penyampaian informasi yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2023, aktivitas dan interaksi Investor Relations PTBA dengan investor, analis, dan pelaku pasar modal antara lain:

1. *Analyst meeting* sebanyak 4 (empat) kali.

Tanggal Date	Topik Topic	Lokasi Location	Keterangan Description
9 Maret 2023 March 9, 2023	Kinerja PTBA FY22 PTBA performance on 2022 Financial Year	Jakarta	*Offline*
4 Mei 2023 May 4, 2023	Kinerja PTBA 1Q23 PTBA performance on 1Q23	Jakarta	*online*
1 September 2023 September 1, 2023	Kinerja PTBA 1H23 PTBA performance on 1H23	Jakarta	*Offline*
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Kinerja PTBA 9M23 PTBA Performance on 9M23	Jakarta	*Offline*

2. Berdiskusi melalui *teleconference, one on one meeting, group discussion* serta komunikasi aktif lainnya dengan para pemegang saham baik melalui *WhatsApp*, telepon, maupun *email*.
3. *Public Expose* tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023 dilaksanakan secara daring melalui *video conference call* yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Pada *public expose* ini, manajemen perusahaan memaparkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan serta strategi pengembangan Perusahaan ke depan.
4. *Site visit* ke unit kerja PTBA yang ditujukan kepada pemegang saham eksisting, *potential investors*, *analyst*, dan publik (masyarakat umum).
5. Info memo sebanyak 4 (empat) kali.

Adapun prestasi yang telah diperoleh oleh Investor Relations PTBA sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. Juara 2 dalam ajang Annual Report Award (ARA) Tahun 2023
2. Peringkat Platinum dalam ajang Asian Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023

Relations Activities

Establishing relationships with Shareholders is one of the important issues for the Company. PTBA always provides the latest information periodically to shareholders, apart from the information conveyed at the General Meeting of Shareholders.

Throughout 2023, PTBA Investor Relations activities and interactions with investors, analysts and capital market players include:

1. 4 (four) times analyst meetings

2. Discuss via teleconference, one on one meeting, group discussion, and also actively continue to communicate with shareholders either via WhatsApp, telephone, or email.
3. The 2023 Public Expose on November 27, 2023, was held online via video conference call in collaboration with the Indonesian Stock Exchange. In this public expose, company management explained the company's operational and financial performance as well as the company's future development strategy.
4. Site visits to PTBA work units with the involvement of existing shareholders, potential investors, analysts and the public (general public).
5. Info memo 4 (four) times.

The achievements obtained by PTBA Investor Relations throughout 2023 include:

1. Second place in the 2023 Annual Report Award (ARA).
2. Platinum Rank in the 2023 Asian Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event

Kegiatan Corporate Communication & Government Relation

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
3 Januari 2023 January 3, 2023	PTBA Beri Bantuan Bedah Rumah untuk 4 Unit Hunian Tak Layak Huni PTBA renovates four unhabitable houses
6 Januari 2023 January 6, 2023	Langkah PTBA Persiapkan Tanjung Enim Menjadi Kota Wisata PTBA's efforts in realizing Tanjung Enim as Tourism City
11 Januari 2023 January 11, 2023	Energi Surya PTBA Bikin Petani Lebih Sejahtera PTBA's solar energy increases farmers' welfare
13 Januari 2023 January 13, 2023	Ragam Dukungan PTBA untuk Sektor Pariwisata PTBA's efforts in supporting tourism sector

Corporate Communication & Government Relation Activity

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
24 Januari 2023 January 24, 2023	PTBA Sabet Penghargaan dari Kanwil DJP Sumsel Babel PTBA receives award from Sumsel Babel DJP
27 Januari 2023 January 27, 2023	Lima Unit Bus Listrik Dioperasikan PTBA untuk Pelabuhan Tarahan PTBA operates five electric buses for Tarahan Port
2 Februari 2023 February 2, 2023	Bukit Asam Kirim Tim Ekspedisi ke 6 (enam) Gunung Bukit Asam sends expedition team to 6 (six) mountains
6 Februari 2023 February 6, 2023	PTBA Bangun Gedung PAUD hingga Posyandu untuk Warga Perumahan Bara Lestari PTBA builds PAUD, Posyandu buildings for Bara Lestari residents
9 Februari 2023 February 9, 2023	PTBA Gelar The 1st South Sumatera Fire and Rescue Challenge PTBA holds the 1st South Sumatera Fire and Rescue Challenge
14 Februari 2023 February 14, 2023	Berkontribusi Besar ke Penerimaan Pajak, PTBA Kembali Raih Penghargaan PTBA receives award in tax revenue
20 Februari 2023 February 20, 2023	PTBA Dorong Kearifan Lokal Go International, Batik Kujur Tampil di AS PTBA supports local culture by sending Kujur Batik to USA
27 Februari 2023 February 27, 2023	Jasa Marga dan PTBA Lanjutkan Kolaborasi Pengembangan PLTS di Jalan Tol Jasa Marga-PTBA collaborate to develop toll road Solar Panel Power Plant (SPPP)
28 Februari 2023 February 28, 2023	Sinergi Grup MIND ID! PT Timah dan Bukit Asam Jajaki Pengembangan PLTS PT Timah-Bukit Asam explore Solar Panel Power Plant (SPPP) development
2 Maret 2023 March 2, 2023	HUT ke-42, Momentum Bukit Asam Melesat Melampaui Batas Bukit Asam's Momentum to Soar Beyond Limits on 42nd Anniversary
3 Maret 2023 March 3, 2023	Jaga Kepatuhan Hukum, PTBA Gandeng Kejari Muara Enim PTBA partners with Prosecutor's Office for law compliance
6 Maret 2023 March 6, 2023	HUT ke-25 Kementerian BUMN, Bukit Asam Gelar Jalan Sehat di 6 Kabupaten Bukit Asam conducts fun walk to commemorate SOEs Ministry Anniversary
6 Maret 2023 March 6, 2023	Siapkan Tanjung Enim Jadi Kota Wisata, PTBA Hadirkan Waterpark PTBA opens water park to support Tanjung Enim as tourism city
9 Maret 2023 March 9, 2023	Tertinggi dalam Sejarah, PTBA Raih Laba Bersih Rp 12,6 Triliun PTBA generates Rp12,6 trillion Net Profit, the highest in history
13 Maret 2023 March 13, 2023	Gerak Cepat PTBA Bantu Korban Bencana Banjir di Muara Enim dan Lahat PTBA assists victims of floods in Muara Enim, Lahat
15 Maret 2023 March 15, 2023	Dukung Rehabilitasi DAS dan Pariwisata, PTBA Perluas Pusat Persemaian PTBA Expands Nursery Center to Support Watershed Rehabilitation, Tourism
16 Maret 2023 March 16, 2023	Arsal Ismail Raih Penghargaan The Best CEO Strategic Orientation Arsal Ismail awarded as the Best CEO Strategic Orientation
21 Maret 2023 March 21, 2023	Cerita Sulikin, Anak Petani yang Bisa Kuliah Berkat Beasiswa dari PTBA PTBA gives college scholarship for farmer's kid
27 Maret 2023 March 27, 2023	Bukit Asam Konservasi Terumbu Karang di Pulau Pahawang Bukit Asam Conducts Coral Reef Conservation on Pahawang Island
30 Maret 2023 March 30, 2023	Bukit Asam Bagikan 10.000 Paket Sembako di Muara Enim dan Lahat Bukit Asam disburses 10,000 staple packages at Muara Enim, Lahat
5 April 2023 April 5, 2023	PTBA Latih Warga Binaan Lapas Perempuan Olah Limbah Jadi Beragam Kerajinan PTBA opens craft class from waste for women prisoners
12 April 2023 April 12, 2023	PTBA Beri Bantuan untuk 105 Masjid dan 106 Musala PTBA provides assistance to 105 mosques and 106 prayer rooms
13 April 2023 April 13, 2023	Terapkan Green Building, Kantor Pusat Bukit Asam Bakal Pakai PLTS Atap PTBA office to use roof SPPP to realize green building
17 April 2023 April 17, 2023	Lewat Usaha Rosella, Perempuan Berdaya Bersama PTBA PTBA empowers women with Rosella business
18 April 2023 April 18, 2023	Tingkatkan Kualitas Kopi Lampung, PTBA Serahkan Bantuan Mesin Pengolah PTBA hands over coffee grinding machine to support Lampung coffee
19 April 2023 April 19, 2023	Mudik Bersama BUMN 2023, Bukit Asam Berangkatkan Ratusan Pemudik Bukit Asam accommodates hundreds of homecomers for 2023 SOEs homecoming
28 April 2023 April 28, 2023	Kinerja Operasional Meningkat, PTBA Raih Laba Bersih Rp1,2 Triliun di Triwulan I 2023 PTBA Generates Rp1,2 trillion net profit in 1Q2023
4 Mei 2023 May 4, 2023	Diversifikasi Bisnis PTBA Menjadi Perusahaan yang Berkelanjutan PTBA aims to become sustainable company through business diversification
10 Mei 2023 May 10, 2023	PLTU Sumsel-8 Masuki Tahap Uji Coba Operasi Sumsel-8 CFPP enters operational trial phase
12 Mei 2023 May 12, 2023	Dukungan Bukit Asam untuk Wujudkan Pertanian Ramah Lingkungan PTBA aims to realize environmentally friendly agriculture
16 Mei 2023 May 16, 2023	Komitmen Lindungi Pekerja, PTBA Raih Paritrana Award PTBA wins Paritrana Award for employees protection

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
22 Mei 2023 May 22, 2023	Bukit Asam Sejahterakan Petani Lewat Budidaya Beras Organik Bukit Asam increases farmers' welfare through organic rice planting
25 Mei 2023 May 25, 2023	Kisah Pemuda Tanjung Enim Raih Mimpi Berkat Beasiswa dari PTBA PTBA gives a scholarship to Tanjung Enim student
8 Juni 2023 June 8, 2023	Bermula dari Gudang, UMK Batik Binaan PTBA Sukses Naik Kelas PTBA's Batik MSE enters new stage of business
9 Juni 2023 June 9, 2023	Jalankan CSR Inovatif, PTBA Borong 3 Penghargaan TOP CSR Awards PTBA wins 3 awards from TOP CSR Awards
13Juni 2023 June 13, 2023	Hari Lingkungan Hidup, PTBA Ajak Masyarakat Bersih-bersih Sungai Enim dan Sungai Kiahaan PTBA invites community to clean Enim, Kiahaan Rivers
16 Juni 2023 June 16, 2023	PTBA Tebar Dividen Rp12,6 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih PTBA Disburses Dividends of Rp12.6 Trillion, 100 Percent of Net Profit
22 Juni 2023 June 22, 2023	Berantas Buta Membaca, Bukit Asam (PTBA) Gelar Pelatihan untuk 164 Guru PTBA holds training for 164 teachers to eradicate illiteracy
24 Juni 2023 June 24, 2023	Kinerja Keuangan 5 Tahun Terakhir Moncer, PTBA Raih Penghargaan PTBA receives awards for positive financial performance in 5 years
26 Juni 2023 June 26, 2023	PTBA Gelar Tes Akademik untuk 281 Calon Penerima Beasiswa Bidiksiba PTBA holds academic test for 281 prospective scholarship beneficiaries
27 Juni 2023 June 27, 2023	Menggapai Cita-cita Berkat Beasiswa Bidiksiba dari Bukit Asam (PTBA) Achieving dreams through scholarship provided by PTBA
27 Juni 2023 June 27, 2023	Komitmen Kuat Bukit Asam (PTBA) Turunkan Emisi PTBA demonstrates willingness in reducing emission
3 Juli 2023 July 3, 2023	Idul Adha 1444 H, Bukit Asam Salurkan 145 Sapi dan 56 Kambing Bukit Asam disburses 145 cattles, 56 goats for Eid al Adha
6 Juli 2023 July 6, 2023	Cerita Istana Roti Bakery, UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) The story of Istana Roti Bakery, SME under Bukit Asam
7 Juli 2023 July 7, 2023	Bukit Asam (PTBA) Ubah Lahan Bekas Tambang Jadi Kebun Buah PTBA converts former land mine into fruit farm
11 Juli 2023 July 11, 2023	Petani Tanjung Raja Rasakan Manfaat Pupuk Organik dari Bukit Asam Farmers generate benefits from organic fertilizer by Bukit Asam
15 Juli 2023 July 15, 2023	Bukit Asam (PTBA) Bagikan Dividen Rp 12,6 Triliun Hari Ini Bukit Asam Distributes Rp12,6 trillion devident as per today
18 Juli 2023 July 18, 2023	Bukit Asam (PTBA) Meriahkan BUMN Goes to Campus di Polsri PTBA supports SOEs goes to campus at Polsri
20 Juli 2023 July 20, 2023	Milenial Bukit Asam (PTBA) Berpartisipasi di BUMN Environmental Movement PTBA millenial participates as SOEs Environmental Movement
20 Juli 2023 July 20, 2023	PTBA Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Kawasan Ekowisata Cuku Nyi Nyi PTBA plants 50 thousand Mangrove seeds as Cuku Nyi Nyi Ecotourism
2 Agustus 2023 August 2, 2023	Pembangkit Listrik Tenaga Surya Irigasi Bukit Asam (PTBA) Jadi Andalan Petani Desa Nanjungan Nanjungan Farmers cling to solar power plant by PTBA
3 Agustus 2023 August 3, 2023	Bukit Asam (PTBA) Gandeng China Huadian Kembangkan Energi Terbarukan PTBA works with China Huadian to develop renewable energy
7 Agustus 2023 August 7, 2023	Bantuan dari Bukit Asam (PTBA) Tingkatkan Penghasilan Petani di Lampung PTBA's assistance increases farmers welfare in Lampung
10 Agustus 2023 August 10, 2023	Sembilan Bulan Beroperasi, PLTS Tol Bali-Mandara Sukses Pangkas Emisi Operating for 9 months, Bali Mandara toll road PLTS able to reduce emission
14 Agustus 2023 August 14, 2023	Bukit Asam (PTBA) Raih 4 Penghargaan di Ajang TJSL & CSR Award 2023 PTBA gets 4 awards at 2023 TJSL&CSR Awards
18 Agustus 2023 August 18, 2023	HUT ke-78 RI, Bukit Asam (PTBA) Resmikan PLTS Irigasi Desa Karang Raja PTBA officiates Karang Raja Village irrigation on Independence Day
22 Agustus 2023 August 22, 2023	PTBA Serahkan Bantuan Truk Arm Roll hingga Mesin Pemusnah Sampah untuk Pemkab Muara Enim PTBA hands over arm roll truck, waste crusher machine to Muara Enim government
24 Agustus 2023 August 24, 2023	Kurangi Emisi, PTBA Operasikan Hybrid Dump Truck hingga Bus Listrik PTBA uses hybrid dump truck, electric bus to reduce emission
25 Agustus 2023 August 25, 2023	Kembangkan Batik Kujur, Bukit Asam (PTBA) Berdayakan Para Ibu Rumah Tangga PTBA empowers housewife with Kujur Batik production
28 Agustus 2023 August 28, 2023	Digitalisasi Pertambangan Bukit Asam (PTBA) Berbuah Prestasi PTBA mining digitalization reaps achievement

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023

PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Bersih Rp2,8 Triliun di Semester I 2023 PTBA Scores Rp2.8 trillion Net Profit in 1H2023
31 Agustus 2023 August 31, 2023	Terapkan Standar GRC Tinggi, Bukit Asam (PTBA) Borong 4 Penghargaan PTBA gets 4 awards in GRC compliance
4 September 2023 September 4, 2023	Kolaborasi dengan Pemerintah, Bukit Asam (PTBA) Ikut Aksi Tanam Mangrove PTBA participates in mangrove planting with government
11 September 2023 September 11, 2023	Bukit Asam (PTBA) Dukung Pelestarian Songket Silungkang Khas Sawahlunto PTBA supports Sawahlunto Silungkang Songket preservation
14 September 2023 September 14, 2023	Bukit Asam (PTBA) Gandeng Inhutani V untuk Reklamasi hingga Pengelolaan Hutan PTBA works with Inhutani V for forest management, reclamation
18 September 2023 September 18, 2023	Kolaborasi Bukit Asam (PTBA) dan UGM Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara PTBA works with UGM to increase coal added value
20 September 2023 September 20, 2023	Jalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan PTBA wins awards in GCG implementation
27 September 2023 September 27, 2023	Hari Pertambangan dan Energi ke-78, PTBA Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat PTBA focuses on community welfare on mining and energy day
2 Oktober 2023 October 2, 2023	Konsistensi Bukit Asam (PTBA) Jalankan Good Mining Practice Demi Keberlanjutan PTBA consistent in implementing Good Mining Practice for sustainability
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Bukit Asam (PTBA) Sabet 2 Penghargaan Subroto 2023 dari Kementerian ESDM Bukit Asam achieves 2 Subroto Awards from ESDM Ministry
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Dorong Inovasi Pemanfaatan Batu Bara dan EBT, PTBA Gandeng BRIN PTBA works with BRIN to develop coal, EBT utilization
4 Oktober 2023 October 4, 2023	Inovasi Insan Bukit Asam (PTBA) Berbuah 3 Dharma Karya ESDM 2023 PTBA's People Innovation wins 3 ESDM Ministry Awards
10 Oktober 2023 October 10, 2023	Bukit Asam (PTBA) Kembangkan Energi Biomassa dari Kaliandra Merah PTBA develops Biomass energy from Calliandra
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Tingkatkan Sinergisitas, KAI dan PTBA Tanda Tangani Perjanjian Angkutan Batu Bara PTBA-KAI sign new MoU in coal transport to increase synergy
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Waspada Penipuan Investasi Mengatasnamakan Bukit Asam (PTBA) Beware of investment fraud misusing PTBA's name
24 Oktober 2023 October 24, 2023	4 Tahun Transformasi BUMN, Bukit Asam (PTBA) Terus Melaju PTBA continues to roar in SOEs 4th year of transformation
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Kisah Sukses Zailani dan PTBA Budidaya Tanaman Berbasis Otomasi Zailani's success story in Automation-Based Plant Cultivation with PTBA
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Bersih Rp 3,8 Triliun di Triwulan III 2023 PTBA Scores Net Profit of Rp3.8 Trillion in 2023 Q3
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Cerita Febri Sumantri dan PTBA Dorong Transformasi Desa Keban Agung Febri Sumantri's story in Keban Agung Village transformation with PTBA
1 November 2023 November 1, 2023	Berdayakan Ribuan Lansia, Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan PTBA gets awards from empowering thousands of elderly
2 November 2023 November 2, 2023	PLTU Sumsel-8 Resmi Beroperasi Secara Komersial Sumsel-8 CFPP officialy opens for commercial purpose
8 November 2023 November 8, 2023	Bukit Asam (PTBA) Raih Platinum di Asia Sustainability Reporting Rating 2023 PTBA wins Platinum score at the 2023 Asia Sustainability Reporting Rate
10 November 2023 November 10, 2023	Bukit Asam (PTBA) dan Kimia Farma (KAEF) Jajaki Kerja Sama di Bidang Kesehatan PTBA partners with Kimia Farma to explore health cooperation
13 November 2023 November 13, 2023	Bukit Asam (PTBA) Boyong 4 Penghargaan IDIA Awards 2023 PTBA takes home 4 IDIA Awards 2023
15 November 2023 November 15, 2023	Bukit Asam (PTBA) Sukses Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PTBA Successfully Maintains Anti-Bribery Management System Certification
17 November 2023 November 17, 2023	PLTS Irigasi Bukit Asam (PTBA) Sejahterakan Petani di Lampung Tengah PTBA Irrigation SPPP Increases Farmers' Welfare in Central Lampung
27 November 2023 November 27, 2023	Pertahankan Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Genjot Produksi dan Penjualan Batu Bara PTBA boosts coal production, sales to maintain performance
29 November 2023 November 29, 2023	Bukit Asam (PTBA) Raih Annual Report Award 2022 PTBA wins 2022 Annual Report Award
30 November 2023 November 30, 2023	Ada PLTS PTBA, Petani Tetap Garap Sawah Saat Kemarau Panjang Farmers still cultivate fields during prolonged drought supported by PTBA's SPPP

Press Release PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023
PT Bukit Asam Tbk Press Release in 2023

Tanggal Date	Judul Title
1 Desember 2023 December 1, 2023	Bukit Asam (PTBA) Sukses Pulihkan Daerah Aliran Sungai 234 Ha di Muara Enim PTBA Successfully Restores 234 Hectares River Watershed in Muara Enim
4 Desember 2023 December 4, 2023	Sinergi BUMN di COP 28, PLN dan Bukit Asam (PTBA) Jajaki Pemanfaatan FABA PTBA-PLN work to utilize FABA at SOEs cooperation in COP 28
5 Desember 2023 December 5, 2023	Bukit Asam Raih Gelar Perusahaan Terbaik di Ajang Serelo CSR Award PTBA wins the best company award at Serelo CSR Award
6 Desember 2023 December 6, 2023	Sabet 3 Penghargaan, Bukit Asam (PTBA) Cetak Prestasi di Top Digital Awards 2023 Bukit Asam (PTBA) Scores Achievements at the 2023 Top Digital Awards
7 Desember 2023 December 7, 2023	Dirut PTBA Arsal Ismail Raih Gelar The Best CEO in Beyond Coal PTBA's President Director gets the best CEO in Beyond Coal
11 Desember 2023 December 11, 2023	Jalankan CSR Berkelanjutan, Bukit Asam (PTBA) Borong 3 Penghargaan ICA 2023 PTBA wins 3 awards at 2023 ICA for implementing sustainable CSR
12 Desember 2023 December 12, 2023	Konsisten Berdayakan Masyarakat, PTBA Raih Tamasya Award dari Kementerian ESDM PTBA wins Tamasya Award from ESDM Ministry for community empowerment
14 Desember 2023 December 14, 2023	Energi Surya Bukit Asam (PTBA) Tingkatkan Panen Petani di Sawahlunto PTBA's solar power increases farmers' yield in Sawahlunto
19 Desember 2023 December 19, 2023	Dua PLTS Bukit Asam (PTBA) Pangkas Emisi 618,5 Ton, Setara Tanam 847 Pohon Two PTBA's power plants cut emission by 618,5 tons, equivalent to plant 847 trees
21 Desember 2023 December 21, 2023	Taat Pengelolaan Lingkungan, Bukit Asam (PTBA) Dianugerahi 2 PROPER Emas 2023 PTBA gets 2 PROPER Gold award for environmental management compliance

Hubungan dengan Otoritas dan Self-Regulatory Organization (SRO)

Sebagaimana salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik salah satu tugas sekretaris perusahaan yakni berkaitan hubungan dengan OJK dan SRO, selama tahun 2023 surat, laporan, korespondensi sebanyak 85 kali yang memuat diantaranya laporan bulanan registrasi efek, laporan perubahan komite audit, laporan perubahan sekretaris perusahaan, dan keterbukaan informasi.

Relationship with Authorities and Self-Regulatory Organizations (SRO)

As one of the duties of the Corporate Secretary in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 of 2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, one of the duties of the corporate secretary is related to relations with the OJK and SRO. In 2023 there were 85 letters, reports, and correspondence including monthly securities registration reports, audit committee change reports, company secretary change reports, and information disclosure.

Pengembangan Kompetensi

Sebagai upaya pengembangan kompetensi, Sekretaris Perusahaan difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi mencakup program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, adapun pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2023, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development

As an effort to develop competency, the Corporate Secretary is supported by the Company to participate in education and training. Competency development includes education, training, and certification program. The training and certification taken by the Corporate Secretary in 2023 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

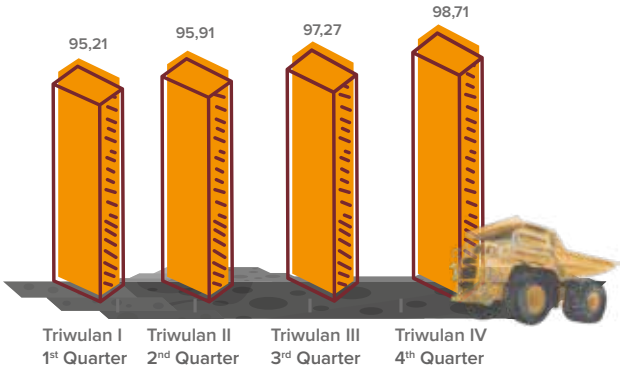
Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan mendapatkan skor 95,21 pada Triwulan I, skor 95,91 pada Triwulan II, skor 97,27 pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 98,71.

Performance Appraisal

The performance appraisal of the Corporate Secretary Work Unit in 2023 was carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2023 the Corporate Secretary Work Unit received a score of 95.21 in 1st Quarter, a score of 95.91 in 2nd Quarter, a score of 97.27 in 3rd Quarter, and in 4th Quarter a score of 98.71,

Key Performance Indicator Sekretaris Perusahaan 2023
Corporate Secretary Key Performance Indicators in 2023





Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit



Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan memiliki Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam menjalankan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif melalui evaluasi sistem pengelolaan perusahaan dan pemberian rekomendasi perbaikan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. SPI dipimpin oleh *Vice President* yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur utama dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.

Satuan Pengawasan Intern telah dilengkapi dengan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yakni Piagam Satuan Pengawasan Intern PTBA yang ditandatangani bersama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama/Komisaris Independen PTBA. Pedoman Audit dan Program Kerja Audit Tahunan yang ditetapkan oleh Direktur Utama. Ruang lingkup Satuan Pengawasan Intern meliputi pengendalian internal, evaluasi efektivitas implementasi prinsip-prinsip GCG dan evaluasi efektivitas Manajemen Risiko.

In an effort to implement GCG principles, the Company has an Internal Audit Unit to carry out independent and objective assurance and consultation activities through evaluating the company's management system and providing recommendations for improvements to bring added value to the Company. Internal Audit is led by a Vice President who is appointed by and responsible to the President Director and known by the Board of Commissioners.

The Internal Audit Unit is equipped with guidelines as a reference for carrying out its duties, namely the PTBA Internal Audit Unit Charter which was jointly signed by the President Director and the President Commissioner/Independent Commissioner of PTBA. Audit Guidelines and Annual Audit Work Program are determined by the President Director. The scope of work for the Internal Audit Unit includes internal control, evaluating the effectiveness of implementing GCG principles, and evaluating the effectiveness of Risk Management.

Satuan Pengawasan Intern memberikan bantuan berupa assurance dan konsultasi terkait analisis, penilaian, rekomendasi dan informasi mengenai aktivitas satuan kerja melalui pimpinan perusahaan serta melakukan pencatatan fisik kekayaan perusahaan di seluruh unit kerja termasuk anak perusahaan, guna mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit. Untuk kelancaran tugas, Satuan Pengawasan Intern berkoordinasi dengan Komite Audit dan menjadi mitra kerja dari auditor eksternal serta mempunyai hubungan dengan Satuan Pengawasan Intern entitas anak, entitas afiliasi dan yayasan milik Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

Visi
Menjadi mitra bisnis strategis bagi direksi, komisaris, dan manajemen perusahaan yang profesional, independen dan terpercaya.

Misi
Ikut serta dalam meningkatkan dan melindungi nilai Perusahaan melalui aktivitas jasa assurance dan konsultasi dengan memberikan asuransi, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan objektif.

Piagam SPI

Perusahaan memiliki Piagam SPI sebagaimana disusun pada tahun 2017 dan perubahan terakhir Piagam SPI pada tanggal 28 Februari 2023, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN serta perubahan terakhirnya, Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Piagam ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan SPI, yakni pedoman kerja SPI yang berisi beberapa hal yaitu maksud, visi, misi, struktur hubungan kerja, fungsi dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, kebijakan, standar, kode etik, evaluasi dan penyempurnaan. Piagam SPI ditinjau secara periodik agar pelaksanaan audit internal senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Independensi

Sebagai pemeriksa internal, SPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kebebasan bertindak (independen) secara objektif, di mana:

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam Perusahaan seperti manajemen dan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaidah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.

The Internal Audit Unit provides assistance in the form of assurance and consultation related to analysis, assessment, recommendations, and information regarding work unit activities through company leaders as well as carrying out physical records of company assets in all work units including subsidiaries, in order to obtain data and information related to the implementation of audit tasks. To carry out its duties properly, the Internal Audit Unit coordinates with the Audit Committee and is a working partner of the external auditor and has a relationship with the Internal Audit Unit of subsidiaries, affiliated entities and foundations belonging to the Company in the form of coordinating the implementation of audits and technical assistance.

Vision
Become a Strategic Business Partner for Board of Directors, Commissioners, and the Company's management in a professional, independent, and trusted manner.

Mission
Participate in enhancing and protecting the corporate value through assurance and consulting service activities by providing risk-based and objective insurance, advice and insight.

Internal Audit Unit Charter

The Company has an Internal Audit Charter as compiled in 2017 and the last amendment to Internal Audit Charter on February 28, 2023, refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and the latest amendment of Minister of SOEs Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter.

This charter regulates various objects related to Internal Audit, namely the purposes, vision, mission, work relationship structure, functions and responsibilities, authorities, scope, policies, standards, Code of Conduct, evaluation, and improvement. The Internal Audit Unit Charter is reviewed periodically to optimize the implementation of internal audit.

Independence

As an internal auditor, in carrying out its duties and functions, Internal Audit has the freedom to act (independently) objectively by:

1. Not taking sides with the interests of internal parties in the Company such as management and Commissioners, either directly or indirectly;
2. Conduct audit in line with accepted and applied internal audit rules and principles;
3. In carrying out the audit task, must free themselves from all personal interests and the work unit being examined while upholding the established Code of Conduct.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh Vice President yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. Vice President SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit, maka Kepala SPI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama.

Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Fungsi dan Cakupan Kerja

Satuan Pengawasan Internal membantu Direktur Utama agar dapat mengamankan aset Perusahaan, berjalannya kegiatan usaha secara efisien dan efektif serta ditaatinya peraturan perusahaan dengan menjalankan 2 (dua) fungsi utama:

1. Fungsi Strategic Partner, yaitu dalam pemberian asuransi dan konsultasi yang independen dan sesuai dengan aturan perusahaan (preventive action);
2. Fungsi Assurance dan Konsultasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Direktur Utama pada seluruh tingkatan dan menyampaikan rekomendasi Tindakan perbaikan kepada Direktur Utama (corrective action).

Selain itu, SPI juga berkoordinasi dengan Komite Audit dan menjadi mitra kerja dari auditor eksternal serta mempunyai hubungan koordinatif dengan SPI entitas anak, entitas afiliasi dan yayasan milik Perusahaan dalam bentuk koordinasi pelaksanaan audit dan bantuan teknis.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Di tahun 2023 terdapat perubahan Kepala Satuan Pengawasan Intern PTBA dari Muhammad Bagir menjadi Nugraha Nurtyasanta. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, perubahan Kepala Satuan Pengawasan PTBA telah disampaikan laporannya kepada OJK berdasarkan Surat PTBA Nomor: B/178/111000/KS.03/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal Laporan Perubahan Vice President Satuan Pengawasan Intern PT Bukit Asam Tbk.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit

Internal Audit Unit is led by a Vice President appointed and dismissed by Board of Directors with the approval of Board of Commissioners. Vice President of Internal Audit reports directly to President Director and coordinates with Audit Committee and External Auditor in carrying out his/her duties. To support independence and ensure a smooth audit and the authority to monitor follow-up on audit results, Head of Internal Audit can communicate directly with Board of Commissioners and the Committees of Board of Commissioners to inform various matters related to the audit. The provision of such information must be reported to President Director.

Every appointment, replacement, or dismissal of Head of Internal Audit is notified to the Financial Services Authority (OJK) and Head of Internal Audit is directly responsible to President Director.

Functions and Scope of Work

Internal Audit assists the President Director in securing the Company's assets, ensuring the business activities to run efficiently and effectively, and complying with Company regulations by carrying out 2 (two) main functions:

1. Strategic Partner function, providing independent assurance and consulting following Company regulations (preventive action);
2. Assurance and Consultancy Function, supervising the implementation of President Director's policies at all levels and submit recommendations for corrective actions to President Director (corrective action).

In addition, Internal Audit coordinates with Audit Committee, becomes a partner of external auditor, and has a coordinating relationship with Internal Audit's subsidiaries, affiliated entities, and foundations owned by the Company in the form of coordination of audit implementation and technical assistance.

Profile of the Head of the Internal Audit Unit

There was a change in the Head of the PTBA Internal Audit Unit in 2023 from Muhammad Bagir to Nugraha Nurtyasanta. In accordance with the provisions of OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Preparing an Internal Audit Charter, a change in the Head of the PTBA Supervision Unit has been submitted to the OJK based on PTBA Letter Number: B/178/111000/KS.03/V/2023 dated May 26, 2023, Regarding the Report on Changes to the Vice President of the Internal Audit Unit of PT Bukit Asam Tbk.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern, 26 Mei 2023-sekarang

Profile of the Head of the Internal Audit Unit, May 26, 2023-present



Nugraha Nurtyasanta, S.H., M.Hum.

VP Satuan Pengawasan Intern
VP Internal Audit

Masa Jabatan: 2023 - Sekarang
Term of Office: 2023 - Present

Usia Age	54 Tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Yogyakarta, 25 Agustus 1969 Yogyakarta, August 25, 1969
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam No. 103/0100/2023 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Decree of Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 103/0100/2023 Concerning The Appointment of Position Holders within PT Bukit Asam Tbk
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Humaniora, Universitas Gadjah Mada (2003) • S1 Hukum, Universitas Gadjah Mada (1992) • Master Degree in Humanities, Gadjah Mada University (2003) • Bachelor Degree in Law, Gadjah Mada University (1992)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• VP Satuan Pengawasan Intern (2023 - sekarang) • VP Hukum dan Regulasi Tahun (2014 - 2023) • Manajer Hukum (2010 - 2014) • Spesialis Hukum (2004 - 2010) • Administrator Kontrak (1993 - 2004) • VP Internal Audit Unit (2023 - present) • VP Law and Regulation (2014 - 2023) • Legal Manager (2010 - 2014) • Legal Specialist (2004 - 2010) • Contract Administrator (1993 - 2004)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern sampai dengan 26 Mei 2023

Profile of the Head of the Internal Audit Unit until May 26, 2023



Muhamad Bagir, M.Si.

VP Satuan Pengawasan Intern
VP Internal Audit

Masa Jabatan: 2017 - 2023
Term of Office: 2017 - 2023

Usia Age	56 Tahun 56 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Surakarta, 19 Juli 1967 Surakarta, July 19, 1967
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi Bukit Asam No. 350/KEP/Int-0100/PG.04/2017 Bukit Asam Board of Directors Decree No. 350/KEP/Int-0100/PG.04/2017
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Pengelolaan Lingkungan, Universitas Sriwijaya (2011) • S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (1997) • Master in Environmental Management, Sriwijaya University (2011) • Bachelor Degree in Public Health, University of Indonesia (1997)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	• VP Satuan Pengawasan Intern (2017 - 2023) • SM Teknologi Informasi (2017) • Direktur PT BMI (2016 - 2017) • SM CSR (2015-2016) • SM SDM (2015) • SM PLPT (2012 - 2015) • SM Hukum dan Administrasi Korporat (2010 - 2012) • SM Sarana dan Prasarana (2007 - 2010) • Manajer K3 dan Lingkungan (2002 - 2007) • Kepala Operasional K3 (1999 - 2002). • VP Internal Oversight Unit (2017 - 2023) • SM Information Technology (2017) • Director of PT BMI (2016 - 2017) • SM CSR (2015-2016) • SM HR (2015) • SM PLPT (2012 - 2015) • SM Law and Corporate Administration (2010 - 2012) • SM Facilities and Infrastructure (2007 - 2010) • K3 and Environmental Manager (2002 - 2007) • Head of K3 Operations (1999 - 2002).
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak ada None

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Jangka Panjang (RAJP) dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit, dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit/ dievaluasi pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit/ evaluasi kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur terkait, dan Dewan Komisaris atas persetujuan Direktur Utama.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya.
8. Menyusun dan mengimplementasikan program *quality assurance* dan pengembangan serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan fungsi audit internal dan mengidentifikasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan secara berkesinambungan/terus menerus untuk memastikan bahwa Divisi Internal Audit dalam melakukan perannya telah sesuai dengan Standar yang berlaku, Kode Etik serta Piagam Audit Internal dalam rangka memberikan hasil audit yang berkualitas.
9. Melakukan penilaian dan pemantauan sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa informasi penting Perusahaan terjamin keamanannya dan penyajian segala laporan dan kegiatan Perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melaksanakan tugas khusus (termasuk pendampingan/ *counterpart* Auditor Eksternal, konsultan) yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
11. Melakukan Audit Tujuan Tertentu audit tematik atas permintaan Direktur Utama.
12. PTBA grup melaksanakan koordinasi dengan Audit Internal Anggota *Holding* yang mencakup namun tidak terbatas pada perencanaan audit tahunan, monitoring tindak lanjut hasil audit eksternal, program pengembangan, dan *quality assurance*.
13. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.

Duties and Responsibilities

Internal Audit's duties and responsibilities include:

1. Develop and implement a risk-based Long-Term Audit Plan and Annual Audit Work Program conveyed to the President Director and the Audit Committee, and approved by the President Director.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies.
3. Examine and evaluate efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human capital, marketing, information technology, and other activities.
4. Provide constructive suggestions and recommendations and objective information about the activities being audited/evaluated at all levels of Management.
5. Prepare and submit audit/evaluation reports to the President Director with copies to the relevant Director and the Board of Commissioners with the approval of President Director.
6. Monitor, analyze, and report on the follow-up of audit results.
7. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out.
8. Develop and implement quality assurance and development programs as well as evaluate the efficiency and effectiveness of internal audit function activities and identify improvements that need to be carried out on an ongoing basis to ensure that the Internal Audit Division in carrying out its role complies with applicable standards, Code of Conduct and Internal Audit Charter in order to provide quality audit results.
9. Assess and monitor the information and communication control system to ensure that the Company's important information is guaranteed security and the presentation of all reports and Company activities complies with applicable laws and regulations.
10. Carry out special tasks (including mentoring/ counterpart External Auditors, consultants) assigned by the President Director.
11. Conducting Specific Purpose Audits/thematic audits as requested by President Director.
12. PTBA group coordinates with the Internal Audit of Holding Members which includes but is not limited to annual audit planning, monitoring follow-up of external audit results, development programs, and quality assurance.
13. Report significant findings to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee for corrective action in a timely manner.

Wewenang

Satuan Pengawasan Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, catatan, personal dan fisik kekayaan perusahaan di seluruh unit kerja perusahaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya, termasuk Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
5. Menyusun, mengubah dan melaksanakan Piagam SPI termasuk menentukan prosedur dan lingkup audit;
6. Menilai keandalan informasi yang dihasilkan oleh Unit Kerja dan efektivitas kebijakan, sistem dan prosedur pengendalian yang ada;
7. Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem audit;
8. Menilai dan menganalisis aktivitas Perusahaan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang dikaji/diaudit;
9. Mengalokasikan sumber daya auditor, menentukan auditee, menentukan sasaran audit, ruang lingkup dan jadwal audit, penerapan teknik audit yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan lisan/ tertulis pada Auditee, memberikan saran dan rekomendasi;
10. Meminta bantuan dari unit Kerja lain atau pihak eksternal yang profesional dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu;
11. Berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya dan jika diminta oleh Pimpinan dapat memberikan peringatan atau teguran bila terjadi penyimpangan;
12. Mengusulkan staf SPI untuk promosi, rotasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas audit atau untuk memenuhi kompetensi staf/ auditor sesuai tuntutan dan jenjang karier yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
13. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
14. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas internal audit.

Pelaporan

Satuan Pengawasan Internal menyampaikan dan menyediakan laporan kepada Direksi melalui Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/ wakilnya meliputi:

1. Laporan Hasil Audit;
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit;
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit; dan
4. Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Authorities

Internal Audit has the following authorities as follow:

1. Full and unrestricted access to documents, records, personal and physical assets of the Company in all work units of the Company to obtain data and information related to the implementation of their audit tasks, including Subsidiaries and Sub Subsidiaries of the Company;
2. Communicate directly with Board of Directors and Board of Commissioners, including Audit Committee;
3. Hold regular or incidental meetings with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
4. Coordinate its activities with the activities of External Auditor;
5. Develop, amend, and implement the Internal Audit Unit Charter, including determining audit procedures and scope;
6. Assess the reliability of information produced by Work Unit and the effectiveness of existing control policies, systems, and procedures;
7. Verify and test the reliability of information obtained from the assessment of the effectiveness of audit system;
8. Assess and analyze the activities of the Company, but does not have the authority to implement and be responsible for the activities being reviewed/audited;
9. Allocate auditor resources, determine auditee, determine audit objectives, audit scope, and schedule, apply audit techniques deemed necessary to achieve audit objectives, clarify and discuss audit results, request oral/ written responses from the auditee, provide suggestions and recommendations;
10. Request assistance from other work units or professional external parties in conducting audits if deemed necessary;
11. Coordinate with other leaders and, if requested by the leaders, give a warning or reprimand in the case of deviation;
12. Propose Internal Audit staff for promotion, rotation, attending education, training, seminars, and courses related to audit tasks or to fulfill staff/auditor competencies according to the demands and career path set by the Company;
13. Participate in strategic meetings;
14. Appoint competent human capital according to the needs in carrying out internal audit tasks.

Reporting

Internal Audit submits and provides reports to Board of Directors through the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee, and the Series A Dwiwarna Shareholders/their representatives include:

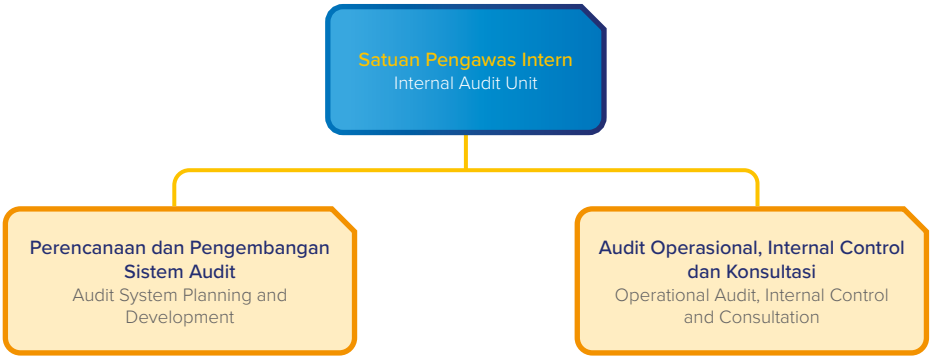
1. Audit Result Report;
2. Summary of Follow-up Report on Audit Results;
3. Report on the Realization of Audit Activities.
4. Report on the Results of Evaluation of the Company's Internal Control System.

Struktur Organisasi Audit Internal dan Jumlah Pegawai

Struktur organisasi SPI ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 297/0100/2022 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengawasan Intern.

Internal Audit Organizational Structure and Number of Employees

The organizational structure of Internal Audit is determined according to the Decree of Board of Directors No. 297/0100/2022 concerning the Organizational Structure of Internal Audit Work Unit.



Di tahun 2023, jumlah karyawan yang berada pada unit Satuan Pengawas Internal sebanyak 16 orang.

In 2023, the number of employees who were members of Internal Audit Unit is 16 persons.

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Internal Audit Professional Certification

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Karyawan Number of Employee
Qualified Internal Auditor (QIA)	6 Orang | People
Certified Risk Management Professional (CRMP)	3 Orang | People
Professional Internal Auditor (PIA)	2 Orang | People
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	2 Orang | People
Certified Legal Auditor (CLA)	1 Orang | People
Certified Governance Professional (CGP)	1 Orang | People
Certified Internal Auditor Executive (CIAE)	4 Orang | People
ISO 37001:2016 (SMAP) Internal Auditor Based On ISO 19011	5 Orang | People
Cobit 2015	1 Orang | People
Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 Orang | People
Certified Competent Internal Auditor (CCIA)	1 Orang | People
Associate Certifed Competent Internal Auditor (ACCIA)	1 Orang | People
Certifed Internal Auditor (CIA)	1 Orang | People
Certifed Risk Management Officer (CRMO)	2 Orang | People

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern

Dalam meningkatkan kualitas personel SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit, Perusahaan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SPI dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai. Tentang daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawasan Intern di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dalam bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Internal Audit Unit Competency Development

In order to improve the quality of Internal Audit personnel in accordance with the needs for carrying out Internal Audit duties, the Company facilitates development programs for Internal Audit to improve employee competencies. The list of competency development activities attended by Internal Audit Unit throughout 2023 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Intern secara rutin melakukan Rapat Koordinasi Internal yang dihadiri seluruh pejabat struktural dan fungsional/auditor dan staf SPI lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali membahas dan mengevaluasi progres kinerja yang sedang berjalan dan rencana kegiatan assurance dan konsultasi/pendampingan ke depan berdasarkan Rencana Audit tahunan dan Target kinerja tahun berjalan.

Internal Audit Unit Meeting

Internal Audit Unit routinely conducts Internal Coordination Meetings attended by all structural and functional officials/auditors and other Internal Audit staffs at least once a month to discuss and evaluate ongoing performance progress and plans for future assurance and consulting/assistance activities based on the annual Audit Plan and performance targets of the current year.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Di tahun 2023, SPI telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Kegiatan audit operasional dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI Tahun 2023 yang telah disahkan oleh Direktur Utama melalui Nota Dinas Nomor: 0300.J/T/0100/PW.02/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 dan Revisi PKAT Nomor : 141/T/0100/PW.02/VI/2023 untuk dilakukan audit sebanyak 13 Objek audit dan 39 satuan kerja untuk evaluasi internal control, sebagai berikut :

Implementation of Duties in 2023

In 2023, Internal Audit has carried out its duties and responsibilities with the following activities:

1. Operational Audit

Operational audit activities were carried out in accordance with the 2023 Annual Audit Plan as approved by President Director through the Official memo Number 0300.J/T/0100/PW.02/XI/2022 dated December 9, 2022 and PKAT Revision Number: 141/T/0100/PW.02/VI/2023 for audits of 13 (thirteen) audit objects and 39 (thirty nine) work units for internal control evaluation, as follows:

No	Objek Audit Audit Object	Jenis Audit Type of Audit	Waktu Audit Auditing Time	Keterangan Information
1.	Perawatan, Perawatan APPT, Perawatan CHF & ATU APPT, CHF & ATU Maintenance	Audit Operasional Operational Aduit	16 Januari - 17 Februari 2023 January 16 - February 17, 2023	Final
2.	Penanganan an Angkutan Batubara Coal Transport Handling	Audit Operasional Operational Audit	17 Januari - 21 Februari 2023 January 17 - February 21, 2023	Final
3.	Perencanaan, Perencanaan Tambang, eksplorasi Planning, Mining Planning, Exploration	Audit Operasional Operational Audit	18 Januari - 21 Februari 2023 January 18 - February 21, 2023	Final
4.	Penambangan Mining	Audit Operasional Operational Audit	18 Januari - 21 Februari 2023 January 18 - February 21, 2023	Final
5.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Audit Kepatuhan Compliance Audit	25 Januari - 28 Februari 2023 January 15 - February 28, 2023	Final
6.	Pengelolaan Lingkungan & Penunjang Tambang Environmental Management and Mining Support	Audit Operasional Operational Audit	10 Mei - 15 Juni 2023 May 10 - June 15, 2023	Final
7.	K3L Korporat Corporate OHSE	Audit Operasional Operational Audit	8 Mei - 14 Juni 2023 May 8 - June 14, 2023	Final
8.	Keuangan Korporat Corporate Finance	Audit Operasional Operational Audit	15 Mei - 21 Juni 2023 May 15 - June 21, 2023	Final
9.	Distribusi, Pemasaran, Komersial Distribution, Marketing, Commercial	Audit Operasional Operational Audit	22 Mei - 27 Juni 2023 May 22 - June 27, 2023	Final
10.	Pengembangan Hilirisai Downstreaming Development	Audit Operasional Operational Audit	12 Juli - 16 Agustus 2023 July 12 - August 16, 2023	Final
11.	Pengembangan Energi Energy Development	Audit Operasional Operational Audit	17 Juli - 22 Agustus 2023 July 17 - August 22, 2023	Final
12.	GRC – SMP & GCG, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Hukum Regulasi GRC – SMP & GCG, Risk Management, Corporate Secretary, and Law Regulation	Audit Operasional Operational Audit	9 Oktober - 10 November 2023 October 9 - November 10, 2023	Final
13.	Anggaran dan Akuntansi Budgeting and Accounting	Audit Operasional Operational Audit	16 Oktober - 17 November 2023 October 16 - November 17, 2023	Final

2. Advis

Satuan Pengawasan Internal telah mengeluarkan 14 Advis yang tujuannya untuk perbaikan kinerja satuan kerja. Adapun advis yang dimaksud sebagai berikut:

2. Advice

As of November 2023, Internal Audit has issued 14 Advices to improve work unit performance with the list as follows:

No	Tanggal Date	No. Nota Dinas Number of Official Memo	Ditujukan Kepada Referred to	Saran/advis Advice
1.	23 Januari 2023 January 23, 2023	021/T/11200/PW.02/I/2023	VP Manajemen Portofolio VP of Portfolio Management	Reminder Hubungan Komunikasi PT Bukit Asam Tbk dengan Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi Reminder on Communication Relations between PT Bukit Asam Tbk and Controlled Companies and Affiliated Companies
2.	22 Februari 2023 February 22, 2023	048/T/11200/PW.02/II/2023	VP Penanganan dan Angkutan Batu Bara VP Coal Handling and Transportation	Struktur Organisasi dan Kelembagaan Laboratorium di Lingkup PT Bukit Asam Tbk Laboratory Organizational and Institutional Structure within PT Bukit Asam Tbk
3	22 Februari 2023 February 22, 2023	049/T/11200/PW.02/II/2023	VP Perawatan VP of Maintenance	Pergudangan PLTU 3X10 MW Tanjung Enim Warehousing CFPP 3X10 MW Tanjung Enim

No	Tanggal Date	No. Nota Dinas Number of Official Memo	Ditujukan Kepada Referred to	Saran/advis Advice
4	06 Maret 2023 March 06, 2023	061/T/11200/PW.02/III/2023	• Direktur Operasi Produksi • Direktur Pengembangan Usaha • Operations and Production Director • Business Development Director	Going Concern Operasi Produksi di Peranap Going Concern Production Operations in Peranap
5	10 April 2023 April 10, 2023	082/B/11200/PW.02/IV/2023	VP SDM Operasional VP of Operational HR	Kesetaraan Jenjang Jabatan Alih Daya dan Tarif SPPD pada Modul Travel Aplikasi CISEA on Equality in Outsourcing Position Levels and SPPD Tariffs in the CISEA Application Travel Module
6	11 April 2023 April 11, 2023	087/T/11200/PW.02/IV/2023	VP Manajemen Portofolio VP of Portfolio Management	Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Perusahaan Terkendali dan Perusahaan Afiliasi PT Bukit Asam Tbk on Implementing an Internal Control System in Controlled Companies and Affiliated Companies of PT Bukit Asam Tbk
7	12 Juni 2023 June 12 , 2023	124/B/11200/PW.02/VI/2023	VP K3L Korporat VP of OHSE Corporate	Reviu Monitoring Tindak lanjut Inspeksi K3L atas Pengelolaan Jasa Boga Pegawai Lokasi Kerja di UPTE Review Monitoring Follow-up to OHSE Inspections on the Management of Catering Services for Work Location Employees at UPTE
8	12 Juni 2023 June 12, 2023	123/B/11200/PW.02/VI/2023	VP SDM Stratejik VP of Strategic HR	Evaluasi Ruang Lingkup, Job Description, dan Fungsi K3L Korporat Evaluation of Scope, Job Description, and Corporate OHSE Functions
9	23 Juni 2023 June 23, 2023	139/T/11200/PW.02/VI/2023	VP Keuangan Korporat VP of Corporate Financial	Strategi Pembayaran kepada Pemasok oleh Satuan Kerja Keuangan Korporat Payment Strategy Advice to Suppliers by the Corporate Finance Work Unit
10	13 Juli 2023 July 13, 2023	179/T/11200/PW.02/VII/2023	VP Pengembangan Hilirisasi VP of Downstreaming Development	Jangka Waktu SPPH 362 SPPH 362 Time Period
11	14 Juli 2023 July 14, 2023	158/T/11200/PW.02/VII/2023	VP Manajemen Portofolio VP of Portfolio Management	Optimalisasi Pemantauan Realisasi Penyetoran modal dan Pengembalian Pinjaman kepada Anak dan Afiliasi Perusahaan (AAP) on Optimizing Monitoring Realization of Capital Deposits and Repayment of Loans to Subsidiaries and Company Affiliates
12	18 Agustus 2023 August 18, 2023	181/T/11200/PW.02/VII/2023	Sekretaris Perusahaan VP Layanan Operasi UPTE GM Unit Pelabuhan Tarahan GM Unit Dermaga Kertapati GM Unit Pertambangan Ombilin Corporate Secretary VP Operation Services UPTE GM Tarahan Port Unit GM of Kertapati Pier Unit GM Ombilin Mining Unit	Advis Reminder Wewenang Pembayaran pada Unit Kerja sebagai Pengelola Keuangan Advis Remender Wewenang Pembayaran pada Unit Kerja sebagai Pengelola Keuangan Advis Reminder of Payment Authority in Work Units as Financial Manager Advis Remender of Payment Authority to Work Unit as Financial Manager as Financial Manager
13	31 Oktober 2023 October 31, 2023	239/T/11200/PW.02/X/2023	VP Pengadaan VP of Procurement	Proses Percepatan Penandatanganan Kontrak dan Addendum Kontrak Accelerated Process of Contract Signing and Contract Addendums
14	02 November 23 November 2, 2023	240/T/11200/PW.02/XI/2023	VP Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG VP of Corporate Management System and GCG	Pemutakhiran Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) Updating the Violation Reporting System (WBS) Guidelines

3. Konsultasi

Konsultasi yang dilakukan oleh SPI pada tahun 2023 ada sebanyak 11 kegiatan yaitu:

3. Consultation

Consultation activities carried out by Internal Audit Work there are 11 activities namely:

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
1	18 Januari 2023 January 18, 2023	Laboratorium Pelabuhan Tarahan Tarahan Port Laboratory	Penghapusan/ pemusnahan aset Assets write-off/destruction	• Nilai buku aset sudah nol. • Aset peralatan laboratorium sebanyak 21 item dalam keadaan rusak akan dilakukan penghapusan/ pemusnahan aset • Book value of these assets is Rp 0 • 21 items of laboratory equipment assets that are damaged will be written off/destroyed

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
2	27 Februari 2023 February 27, 2023	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pemusnahan Dokumen Perusahaan Tahun 2023 2023 Company Document Write-off	• Arsip yang dimusnahkan telah dilakukan verifikasi dari Tim Penilai ANRI • Dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan arsip dengan saksi berasal dari Satker Hukreg dan SPI serta Pihak ketiga (PT Aspex Kumbong) dan Kepala ANRI" • The destroyed archives have been verified by the ANRI Assessment Team • Contained in the Minutes of Archive Destruction with witnesses coming from the Law and Regulation and SPI Working Unit as well as third parties (PT Aspex Kumbong) and the Head of ANRI
3	07 Maret 2023 March 7, 2023	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pengecekan fisik usulan penghapusbukuan aset perawatan Physical checking of proposed write-off of maintenance assets	Kondisi aset yang akan dimusnahkan sudah tidak dipergunakan lagi dan nilai bukunya sudah nol The condition of the asset to be destroyed is no longer used and its book value is zero
4	14 Juni 2023 June 14, 2023	Perawatan Maintenance	Usulan Penghapusbukuan Aset Aktiva Non Produktif Jalur Conveyor CC-10, Transfer Station CC – 10 MTB, OLC 11 dan Jalur Conveyor OLC – 11 Proposed Write-Off of Non-Productive Assets Conveyor Line CC-10, Transfer Station CC – 10 MTB, OLC 11 and Conveyor Line OLC – 11	• Dalam upaya optimasi jalur CHF PLTU BPI Banjarsari dan pemanfaatan lahan eks jalur conveyor untuk lahan timbunan tambang MTBU • Aset tersebut akan dilakukan penghapusbukuan dan pembongkaran dan akan disampaikan kajian dari dari Tim optimasi CHF BPI untuk pemanfaatannya bagi perusahaan. • In an effort to optimize the CHF CFPP BPI Banjarsari route and utilize the former conveyor route land for MTBU mine dump land • These assets will be written off and dismantled and a study will be submitted from the CHF BPI optimization team regarding their use for the company.
5	05 Juli 2023 July 5, 2023	Pergudangan Warehousing	Pendampingan dan pengecekan barang dead stock dan penyaksian pengambilan sebagian barang oleh pemenang lelang di Pergudangan PTBA TAL Assistance and checking of dead stock goods and witnessing the collection of some goods by the auction winner at the PTBA TAL Warehouse	• Melaksanakan proses lelang sesuai dengan hasil Laporan Konsultan Kantor Jasa Penilai Publik ANA (Amin Nirwan Afiliator dan Rekan) dan melaksanakan proses lelang sesuai dengan tata kelola yang berlaku di Perusahaan • Memastikan sudah ada pembayaran oleh pemenang lelang di Keuangan PTBA sebelum material dibawa oleh pemenang lelang • Carry out the auction process in accordance with the results of the Consultant Report from the ANA Public Appraisal Services Office (Amin Nirwan Affiliate and Partners) and carry out the auction process in accordance with the governance that applies in the Company • Ensure the payment by the auction winner in PTBA Finance before the material is brought by the auction winner.
6	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Perawatan Dermaga Kertapati Kertapati Barging Port Maintenance	Pendampingan dan pengecekan fisik asset atas permohonan lelang aset hasil pembongkaran general overhaul Unit Dermaga Kertapati Assistance and physical inspection of assets for auction requests for assets resulting from the general overhaul of the Kertapati Barging Port	Melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan Carry out the auction process in accordance with the procedures applicable in the Company
7	9 Oktober 2023 October 9, 2023	PAISP PAISP	Perihal Permohonan Penghapusan Aset Alat Kesehatan di RS BAM Application for Write-Off of Medical Device Assets at BAM Hospital	• Memproses prosedur penghapusbukuan • Melaksanakan prosedur penilaian asset • Melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan • Process write-off procedures • Carry out asset assessment procedures • Carry out the auction process in accordance with applicable procedures in the company

No	Tanggal Date	Satker Peminta Requesting Work Unit	Perihal About	Saran/Masukan Suggestion/Feedback
8	13 Oktober 2023 October 13, 2023	P2SP P2SP	Pendampingan atas Pekerjaan Revitalisasi Perkantoran Assistance for Office Revitalization Work	• Jika kontrak/perjanjian masih dalam proses maka dimungkinkan dibuat SPMK/KOM/LOI yang ditandatangani pejabat berwenang • Berkoordinasi dengan satker pengadaan dan terkait lainnya untuk percepatan proses persetujuan addendum kontrak • Berkoordinasi dengan satker pengadaan memastikan PT Waskita Karya dapat memenuhi klausul-klausul dalam kontrak Memastikan bahwa: - Pekerjaan yang telah dikerjakan tidak sesuai sequence, tidak mengalami kerusakan - Seluruh yang ada dalam item pekerjaan telah memiliki sertifikat kelayakan fungsi - Pengerjaan item pekerjaan tidak melebihi batas waktu - Setelah dilakukan addendum kontrak PT Waskita Karya memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan SPPH 18527 • Menyusun langkah langkah mitigasi risiko jika PT Waskita Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan • If the contract/agreement is still in process, it is possible to create an SPMK/KOM/LOI signed by an authorized official • Coordinate with procurement and other related work units to accelerate the contract addendum approval process • Coordinating with the procurement work unit to ensure PT Waskita Karya can fulfill the clauses in the contract • Ensure that: - The work that has been done is not in accordance with the sequence, there is no damage - Everything in the work item has a certificate of functional suitability - Work on work items does not exceed the time limit - After the contract addendum is carried out, PT Waskita Karya is committed to completing the SPPH 18527 work • Develop risk mitigation steps if PT Waskita Karya cannot complete the work within the specified time
9	2 November 2023 November 2, 2023	Penambangan Mining	Permohonan Penghapusan Aset Spreader 701. Tripper Car 901, Conveyor Dumping 02 MTBU Asset Removal Request of Spreader 701. Tripper Car 901 and Conveyor Dumping 02 MTBU	• Spreader 701 sedang diusulkan pembuatan kajian hukumnya. • Memproses preosedur penghapusbukuan. • Spreader 701 sedang diusulkan pembuatan kajian hukumnya. • Memproses preosedur penghapusbukuan. • Spreader 701 is being proposed for legal study. • Processing the book removal procedure. • Spreader 701 is being proposed for legal study. • Processing the book removal procedure.
10	17 November 2023 November 17, 2023	Sustainability Sustainability	Bantuan Konsultasi atas Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-277/MBU/10/2023 Consultation Assistance on Decree of the Minister of SOEs Number SK-277/MBU/10/2023	• Penghapusan bukuan piutang bermasalah ini hal yang baru di PTBA atau BUMN dengan nilai piutang bermasalah yang besar dan sesuai dokumen sosialisasi SK 277 2023 diatas maka sebaiknya pelajari dulu petunjuk penghapusan bukuan ini sesuai arahan kementerian BUMN termasuk tahapan nya (harus tercantum di RKA, ada SOP nya, ada persetujuan BOD dan BOC) jika perlu ada juknis. • Meminta pendapat hukum kepada Satuan Kerja Hukum dan Regulasi terkait SK Kementerian BUMN yang terbaru. • Meminta memo perihal manajemen risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko atas program terkait. • The removal of problematic debt from the books is a new matter for PTBA or state-owned enterprises with significant problematic debt values, as per the socialization document SK 277 of 2023 mentioned above. Therefore, it is advisable to first study the guidelines for book removal according to the instructions from the Ministry of State-Owned Enterprises, including its stages (which should be included in the RKA, have its SOP, have approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners), and if necessary, there should be detailed guidelines (juknis). • Seek legal opinions from the Legal and Regulatory Work Unit regarding the latest Ministry of State-Owned Enterprises decree (SK). • Request a memo regarding risk management from the Risk Management Work Unit concerning the related program.
11	4 Desember 2023 December 4, 2023	Direktur SDM Human Resources Director	Transportasi & Uang Saku untuk Istri Suami Pegawai Peserta Pelatihan Prapensiun Transportation & Pocket Money for Pre-retirement Trainee Employee's wife	• VP SDM Stratejik selaku Kepala Satuan Kerja Tertinggi yang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pra Pensiun dapat menetapkan kesetaraan kategori jabatan untuk tamu perusahaan, yang selanjutnya dapat memberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direksi Nomor 182/0100/2021 tanggal 5 Mei 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor 246/0100/2022 tanggal 12 Juli 2022. • The VP of Strategic HR, as the Head of the Highest Work Unit responsible for organizing Pre-Retirement Training activities, can establish equivalent job categories for corporate guests, who can then be eligible for official travel expenses according to the provisions stated in Director's Decision Number 182/0100/2021 dated May 5, 2020, regarding Official Travel, as last amended by Director's Decision Number 246/0100/2022 dated July 12, 2022.

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi personil Audit Internal dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga standar kualitas hasil audit internal terbaik untuk bisnis Perusahaan. Pengembangan mencakup program pelatihan dan sertifikasi. Program pelatihan disusun secara terstruktur dengan tujuan utama untuk membekali semua tenaga auditor dengan keahlian dan pengalaman yang memadai untuk pelaksanaan proses audit sesuai kebutuhan Perusahaan. Program pelatihan yang telah diikuti oleh Satuan Pengawasan Internal dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Pengawasan Internal mendapatkan skor 99,97 pada Triwulan I, pada Triwulan II mendapatkan skor 99,82, pada Triwulan III mendapatkan skor 99,82, dan pada Triwulan IV mendapatkan skor 99,83.

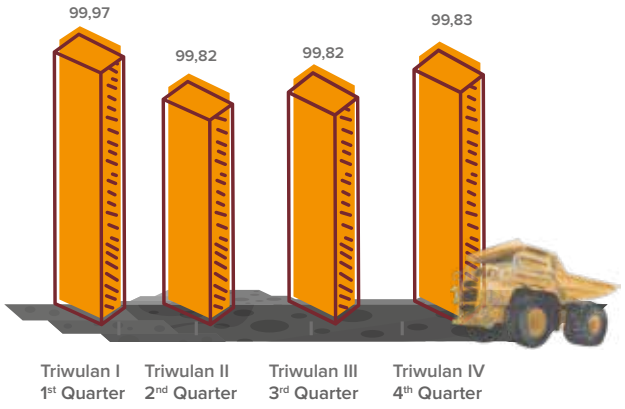
Competency Development

Competency development of Internal Audit personnel is carried out on an ongoing basis to maintain the best quality standards for internal audit results for the Company's business. Development includes training and certification programs. The training program is tailored to equip all auditors with adequate skills and experience to carry out the audit process according to the Company's needs. The training programs attended by the Internal Audit Unit can be viewed in the Profile Section of this Annual Report.

Performance Assessment

The performance assessment of the Internal Audit Unit in 2023 is carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2023 the Internal Audit Unit got a score of 99.97 in 1st quarter, in 2nd quarter it got a score of 99.82, in 3rd quarter it got a score of 99.82, and in 4th quarterit got a score of 99.83.

Key Performance Indikator Satuan Pengawasan Internal 2023
Internal Audit Unit Key Performance Indicators in 2023



Satuan Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Unit



Perusahaan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh seorang *Vice President* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PTBA. Secara struktur, Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengelolaan risiko-risiko di seluruh aktivitas perusahaan, sehingga dapat menjamin kelangsungan bisnis dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pemangku kepentingan.

PTBA has a Risk Management Unit led by a Vice President appointed and dismissed by the Directors of PTBA. This work unit is under the Directorate of Finance and Risk Management. The Risk Management Unit was formed to assist the risk management in all company activities to ensure business continuity and achievement of predetermined targets, as well as providing maximum added value for stakeholders.

Visi

Menjadi satuan kerja yang andal dalam mengelola risiko korporat dan pengembangan bisnis/stratejik perusahaan sesuai standar nasional maupun internasional guna mendukung pencapaian visi-misi perusahaan.

Misi

- Mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap aktivitas Perusahaan;
- Menyusun dan menetapkan pendekatan yang struktur dan komprehensif dalam untuk penerapan manajemen risiko;
- Menyesuaikan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan konteks internal & eksternal serta sasaran perusahaan;
- Melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan untuk meningkatkan *awareness* terkait manajemen risiko;
- Mengantisipasi dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi secara dinamis;
- Menggunakan informasi terbaik yang tersedia sebagai input dalam manajemen risiko, baik data historis, informasi saat ini, serta prediksi di masa depan;
- Meningkatkan budaya risiko pada setiap lini perusahaan;
- Meningkatkan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Strategi Kerja Manajemen Risiko

Menyusun perencanaan yang solid merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan. Untuk itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki strategi-strategi kerja sebagai berikut:

1. Mendemonstrasikan kepemimpinan dan komitmen dalam menerapkan manajemen risiko, di antaranya melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai pendekatan-pendekatan penerapan manajemen risiko;
2. Memastikan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan risiko, termasuk jumlah dan kompetensi pegawai, organisasi, metode dan *tools* pengelolaan risiko;
3. Menetapkan otoritas, kewajiban, dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di setiap level organisasi;
4. Mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan sasaran-sasaran perusahaan;
5. Mempertimbangkan konteks eksternal dan internal perusahaan dalam mendesain kerangka kerja manajemen risiko;
6. Menguatkan tanggung jawab pengelolaan risiko oleh setiap pemilik risiko;
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan risiko di seluruh lini perusahaan.

Vision

Become a reliable work unit in managing corporate risk and Company's business/strategic development according to national and international standards to support the achievement of the Company's vision and mission.

Mission

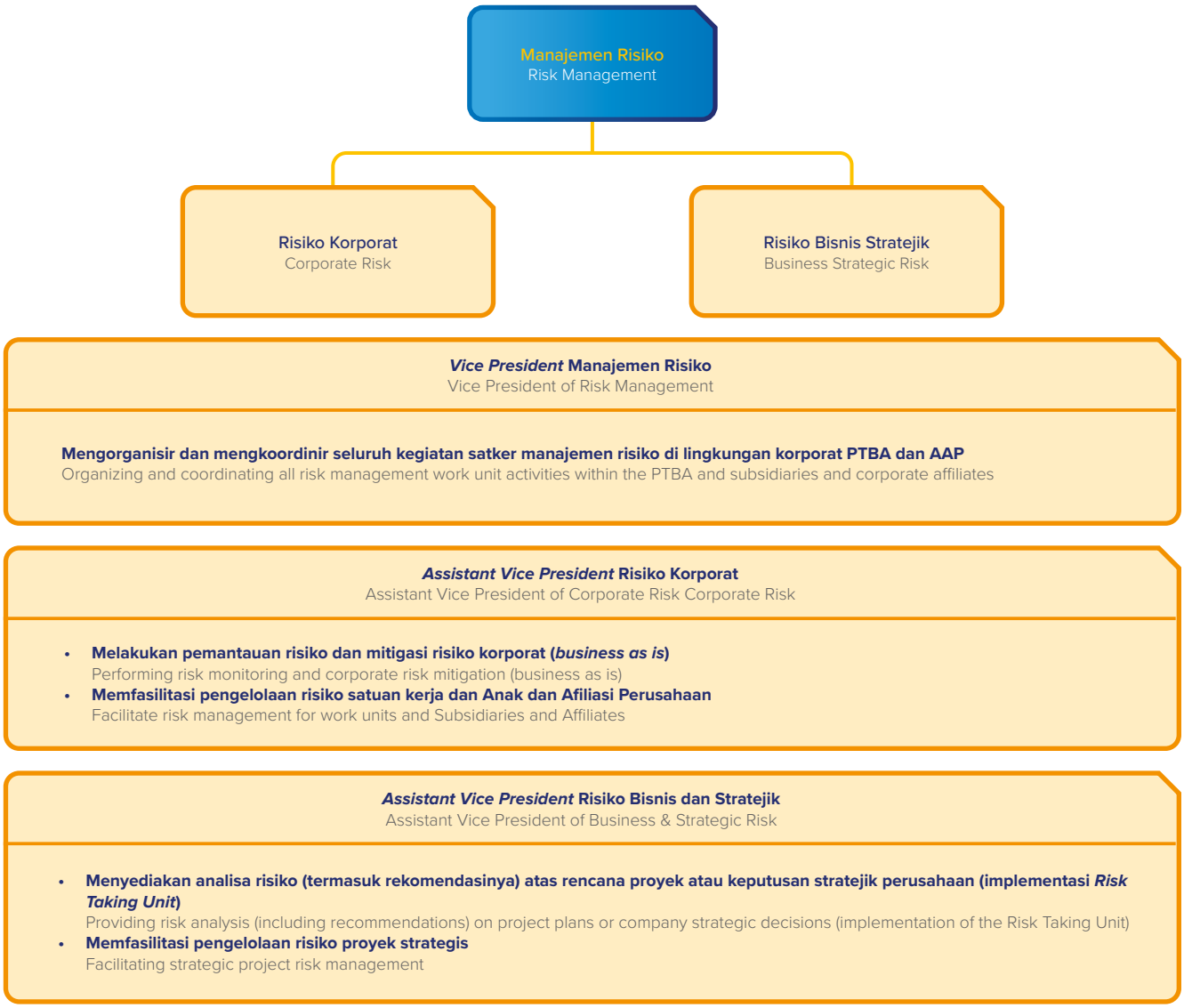
- Integrate risk management in every activity of the Company;
- Develop and establish a structural and comprehensive approach to the implementation of risk management;
- Adjust the risk management framework and process to the internal & external context and Company goals;
- Involve all relevant stakeholders to increase awareness related to risk management;
- Anticipate and respond to changes that occur dynamically;
- Use the best available information as input in risk management, both historical data, current information and predictions in the future;
- Improve the risk culture in every line of the Company;
- Improve the implementation of risk management sustainably.

Risk Management Work Strategy

Preparing a solid and efficient plan is one of the keys in improving risk management in the Company. Therefore, the Risk Management Unit has the following work strategies:

1. Demonstrate leadership and commitment in implementing risk management, including through the establishment of policies and procedures governing approaches to risk management implementation;
2. Ensure the adequacy of resources needed in risk management, including the number and competence of employees, organization, methods and tools of risk management;
3. Establish the authority, obligations, and authorities of the parties involved in risk management at every level of the organization;
4. Consider risk in every decision making and setting Company goals;
5. Consider the external and internal context of the Company in designing the risk management framework;
6. Strengthen risk management responsibilities by each risk owner;
7. Establish effective communication and consultation to support and facilitate the implementation of risk across all lines of the Company.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko
Risk Management Organizational Structure



Profil Pejabat Manajemen Risiko

Di tahun 2023 terjadi perubahan *Vice President* Manajemen Risiko, dari semula dijabat oleh Andri Manendra menjadi Efi Fidinillah. Adapun informasi terkait dengan profil *Vice President* Manajemen Risiko sebagai berikut:

Risk Management Officer Profile

In 2023, there was a change in the Vice President of Risk Management, from Andri Manendra to Efi Fidinillah. The information related to the profile of the Vice President of Risk Management is as follows:

Profil *Vice President* Manajemen Risiko 26 Mei 2023-Sekarang

Profile of Risk Management Vice President from May 26, 2023-Present



Efi Fidinilah, S.T.

Vice President Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management

Masa Jabatan : 26 Mei 2023 - sekarang
Term of Office : May 26, 2023-present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Places, Date of Birth/Age	Cirebon, 31 Mei 1985 / 38 tahun Cirebon, May 31, 1985 / 38 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor 103/100/2023 PT Bukit Asam Tbk Board of Directors Decree Number 103/100/2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Industri - Universitas Diponegoro Bachelor Degree in Industrial Engineering of Diponegoro University
Riwayat Pekerjaan Working Experience	• Vice President Manajemen Risiko (Mei 2023 – sekarang) • AVP Risiko Bisnis dan Stratejik (Juni 2021– Mei 2023) • Manajer Risiko Portofolio dan Investasi Pengembangan (Juni 2019-Juni 2021) • Analis Risiko Keuangan dan Komersial (Agustus 2014-Juni 2019) • Vice President Risk Management (May 2023 – present) • AVP Business and Strategic Risk (June 2021– May 2023) • Portfolio Risk and Investment Development Manager (June 2019-June 2021) • Financial and Commercial Risk Analyst (August 2014-June 2019)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Profil Vice President Manajemen Risiko Sampai 26 Mei 2023

Profile of Risk Management Vice President until May 26, 2023



Andri Mahendra, S.T.,MBA.

Vice President Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management

Masa Jabatan: 2020 - 26 Mei 2023
Term of Office: 2020 - May 26, 2023

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Places, Date of Birth/Age	Keban Agung, 28 Maret 1981 / 42 tahun Keban Agung, March 28, 1981 / 42 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of First Appointment	Keputusan Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 111/0100/2022 tanggal 18 April 2022 Decree of PTBA Board of Directors No.111/0100/2022 on April 18, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Administrasi Bisnis, SBM – Institut Teknologi Bandung (2021) • S1 Teknik Industri, Universitas Gadjah Mada (2006) • Bachelor Degree in Industrial Engineering from Gadjah Mada University (2006) • Master of Business Administration (MBA), SBM – Bandung Institute of Technology (2021)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	• *Vice President* Manajemen Risiko (Januari 2020-2023) • Manajer Penjualan Ekspor (Juni 2019-Januari 2020) • Analis Pasar (September 2018-Juni 2019) • Spesialis Sistem Manajemen (Maret 2014-September 2018) • Vice President Risk Management (January 2020-Present) • Export Sales Manager (June 2019-January 2020) • Market Analyst (September 2018-June 2019) • Management Systems Specialist (March 2014-September 2018)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak ada None

Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sertifikasi Profesi

Di tahun 2023, jumlah pegawai di Satuan Kerja Manajemen Risiko sebanyak 8 orang. Daftar sertifikasi yang dimiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Risk Management Unit Composition and Professional Certification

In 2023, the number of employees in the Risk Management Unit consisted of 8 people. The list of certifications held by the Risk Management Unit is as follows:

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko
Certification Table of Risk Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Efi Fidinilah	Vice President Manajemen Risiko Vice President of Risk Management	CRMP ERMAP
2	Boni Susanto	Assistant Vice President Risiko Korporat Vice President Assistant in Corporate Risk	ERMCP
3	Aditya Kusuma Putra	Assistant Vice President Risiko Bisnis & Stratejik Vice President Assistant in Business Risk & Strategic	CRMP ERMAP

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko
Certification Table of Risk Management

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
4	Nurida Sandy Karisa	Analis Risiko Bisnis & Stratejik Muda Junior Business Risk & Strategic Analyst	CRMP
5	Ayu Agustian	Analis Risiko Korporat Pratama Senior Corporate Risk Analyst	CRMP
6	Safrun Robiallah	Analis Risiko Korporat Pratama Senior Corporate Risk Analyst	CRMO
7	Zukhrufa Awalia Rahma	Analis Risiko Korporat Pratama Senior Corporate Risk Analyst	CRMP
8	Prilly Febi Pratiwi	Analis Risiko Bisnis & Stratejik Pratama Senior Business Risk & Strategic Analyst	CRMP

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai pelaksana fungsi Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif;
2. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;
3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
6. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   a. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   b. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
   c. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (risk limit) dan ambang batas (threshold); dan
7. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

To implement the Risk Management function, the Risk Management Work Unit has the following duties and responsibilities:

1. Develop and propose comprehensive Risk Management policies and strategies;
2. Implement Risk Management policies;
3. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization;
4. Carry out improvements in human capital competency related to Risk Management;
5. Ensure that the Risk Management function operates independently;
6. Carry out regular reviews to ensure:
   a. accuracy of Risk assessment methodology;
   b. adequacy of implementation of the Risk Management information system;
   c. the accuracy of Risk Management policies and procedures as well as determining risk limits and thresholds; and
7. Carry out other Risk Management functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS, Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

Implementation of Tasks

Throughout 2023, the Risk Management Work Unit has carried out its duties and responsibilities:

VP Manajemen Risiko VP of Risk Management	Mengorganisir dan mengkoordinir seluruh kegiatan satker manajemen risiko di lingkungan korporat PTBA dan PTBA Group yang meliputi: Perumusan dan pengembangan kebijakan serta prosedur Manajemen Risiko (pedoman, tata laksana, tata cara kerja dan formulir); Pengelolaan sistem manajemen risiko; Memfasilitasi penyusunan dokumen risiko (matriks risiko, proses bisnis, identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko): Pemasyarakatan sistem identifikasi eksposur risiko; Memfasilitasi pemetaan risiko; Pengembangan manajemen risiko berbasis IT; Pemantauan dan pengendalian risiko proses bisnis inti dan penunjang: Pembuatan profil risiko korporat dan profil risiko portofolio korporat; Melakukan evaluasi dan analisa risiko terhadap portofolio eksisting dan rencana pengembangan termasuk melakukan analisa risiko keuangan; Pendampingan penyusunan dan pemantauan Risk Based Budgeting (RBB) risk owner: serta membuat laporan Risk Management sehingga risiko Korporasi PTBA Group dapat terkendali dan dapat diminimalkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Organize and coordinate all risk management work unit activities in the PTBA and PTBA Group corporate environment which includes: Formulating and developing Risk Management policies and procedures (guidelines, procedures, work procedures, and forms); Management of risk management systems; Facilitate the preparation of risk documents (risk matrix, business processes, risk identification, risk analysis and risk evaluation): Popularization of the risk exposure identification system; Facilitate risk mapping; Development of IT-based risk management; Risk monitoring and control of core and supporting business processes: Creation of corporate risk profiles and corporate portfolio risk profiles; Conduct risk evaluation and analysis of existing portfolios and development plans including carrying out financial risk analysis; Assistance in preparing and monitoring Risk Based Budgeting (RBB) for risk owners: as well as creating Risk Management reports to control and minimize risk at PTBA Group Corporate risks in accordance with applicable regulations.

AVP Risiko Korporat AVP of Corporate Risk	• Melakukan pemantauan risiko dan mitigasi risiko Korporat (*business as is*). • Memfasilitasi pengelolaan risiko Satuan Kerja dan Anak dan Afiliasi Perusahaan. • Carrying out risk monitoring and corporate risk mitigation (business as is). • Facilitate risk management for Work Units and Subsidiaries and Company Affiliates.
AVP Risiko Bisnis dan Stratejik AVP of Busines Risk & Strategic	• Menyediakan analisa risiko (termasuk rekomendasinya) atas rencana proyek atau keputusan stratejik perusahaan (implementasi Risk Taking Unit); • Memfasilitasi pengelolaan risiko proyek strategis. • Providing risk analysis (including recommendations) on project plans or company strategic decisions (implementation of the Risk Taking Unit); • Facilitate strategic project risk management.

Pengembangan Kompetensi

Perusahaan senantiasa meningkatkan mutu dan kompetensi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Adapun pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh personil Satuan Kerja Manajemen Risiko di tahun 2023 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development

The Company continues to improve the quality and competence of the Risk Management Unit with training and certification in 2023 which can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

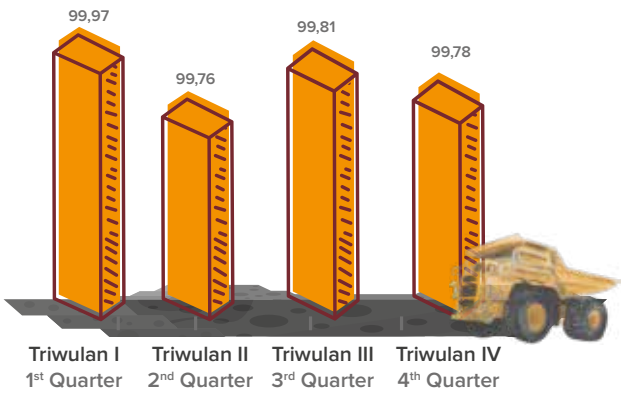
Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Kerja Manajemen Risiko mendapatkan skor 99,97 pada Triwulan I, skor 99,76 pada Triwulan II, skor 99,81 pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 99,78.

Performance assessment

The performance assessment of the Risk Management Unit in 2023 is carried out by evaluating the Key Performance Indicators/Balance Score Card on a quarterly basis. Based on the calculation results, in 2023 the Risk Management Unit received a score of 99.97 in 1st quarter, a score of 99.76% in 2nd quarter, a score of 99.81 in 3rd quarter, and in 4th quarter a score of 99.78.

Key Performance Indikator Manajemen Risiko 2023
Key Performance Indicators Risk Management 2023



Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan & GCG

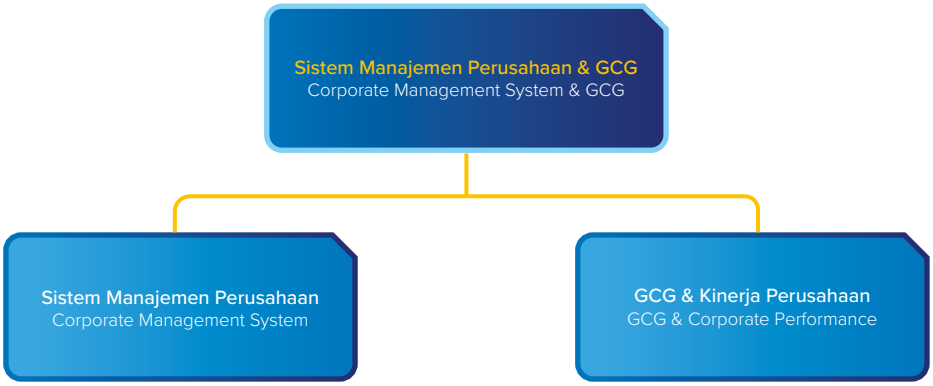
Corporate Management System & GCG Unit



Dalam pengelolaan Perusahaan, Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG menjadi pendukung penting yang berperan dalam mengelola dan mengendalikan sistem yang ada di Perusahaan termasuk melakukan *review* dan evaluasi terhadap sertifikasi Perusahaan, pemantau GCG dan sistem kinerja perusahaan.

In managing the Company, the Corporate Management System and GCG are important in managing and controlling the existing systems in the Company, including reviewing and evaluating the Company's certification, monitoring GCG, and the company's performance system.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG
The Structure Organization of Corporate Management System and GCG Unit



Profil Pejabat Sistem Manajemen Perusahaan & GCG

Corporate Management System & GCG Officer Profile



Tri Ubaya Sakti

Vice President Sistem Manajemen Perusahaan & GCG
Vice President of Corporate Management Systems and GCG

Masa Jabatan : 26 Mei 2023 - sekarang
Term of Office : May 26, 2023 - present

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Usia Place, Date of Birth/Age	Palembang, 24 Januari 1970 / 53 tahun Palembang, January 24, 1970/53 years old
Domisili Domicile	Tanjung Enim
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Legal Basis of Appointment	SK Direksi Bukit Asam : No.009/0100/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Bukit Asam Board of Directors Decree : No.009/0100/2020 dated January 15, 2020
Riwayat Pendidikan Educational Background	• S2 Magister Terapan Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya (2021) • S2 Master of Administration Business Hochschule Bremen, University of Applied Sciences Jerman (2015) • S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Palembang (1998) • Master in Applied Engineering Sriwijaya State Polytechnic (2021) • Master of Business Administration Hochschule Bremen, University of Applied Sciences Germany (2015) • Bachelor in Mechanical Engineering, Sriwijaya University Palembang (1998)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	• VP Sistem Manajemen Perusahaan & GCG (2022-Sekarang) • VP Sistem Manajemen Perusahaan & GCG (2020-2022) • Manajer GCG & KP (2019-2020) • Manajer SMP & GCG (2017-2019) • Manajer Sistem Manajemen Perusahaan (2016-2017) • Spesialis Sistem Manajemen (2011-2016) • VP Corporate Management Systems & GCG (2022-Present) • VP Company Management System & GCG (2020-2022) • GCG & KP Manager (2019-2020) • SMP & GCG Manager (2017-2019) • Company Management Systems Manager (2016-2017) • Management Systems Specialist (2011-2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama Has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.
Kepemilikan Saham Shares Ownership	Tidak Ada None

Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA)

Dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, PTBA berkomitmen menciptakan Perusahaan yang efektif, efisien, dan diakui secara nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan membentuk Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA), yang mulai dijalankan di Perusahaan sejak tanggal 16 Juli 2010. Adapun pembentukan sistem manajemen ini memiliki manfaat dan tujuan, sebagai berikut:

Bukit Asam Management System (SMBA)

To achieve the Company's goals, PTBA is committed to creating an effective, efficient and recognizable Company, both at national and international level. For this reason, the Company established and applied Bukit Asam Management System (SMBA) since July 16, 2010. The establishment of this management system has benefits and objectives, including:

1. Adanya acuan baku dalam mengelola mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset serta keamanan teknologi informasi di PTBA dalam memuaskan pelanggan;
2. Adanya pengakuan internasional terhadap produk dan proses yang dihasilkan PT Bukit Asam Tbk;
3. Menjamin pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Turut menjamin keberlangsungan/sustainability kegiatan operasi perusahaan;
5. Meningkatkan kepercayaan jajaran manajemen dan pegawai PTBA dalam memasok produk sesuai harapan pelanggan;
6. Menjamin terciptanya *added value dan continuous improvement*.

Hingga saat ini, Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) dijalankan dengan mengacu dengan standar terbaru yang diakui nasional *(mandatory)* maupun internasional serta terintegrasi, di antaranya:

1. Sistem Manajemen Mutu (SM Mutu) (ISO 9001:2015), disertifikasi oleh PT TÜV SÜDIndonesia;
2. Sistem Manajemen Lingkungan (SM Lingkungan) (ISO 14001:2015), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
3. Sistem Manajemen K3 (SMK3) (ISO 45001:2018), disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
4. Sistem Manajemen K3 (SMK3) (PP No. 50 Tahun 2012), disertifikasi oleh PT BKI;
5. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2018), disertifikasi oleh PT British Standards Institution dan telah Re-Sertifikasi oleh PT Tuv Nord Indonesia tahun 2023;
6. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (SMM Lab) (ISO 17025:2017), diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
7. Sistem Manajemen Uji Profisiensi (ISO 17043:2010), diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
8. Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code), disertifikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
9. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) (Permen ESDM No. 26 Tahun 2018);
10. Sistem Manajemen Pengamanan (Perpol No. 7 Tahun 2019);
11. Sistem Manajemen Energi (ISO 50001:2018), sertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
12. Manajemen Risiko (ISO 31000:2018);
13. Manajemen CSR (ISO 26000:2010);
14. Sistem Manajemen Aset (ISO 55001:2018);
15. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (ISO 27001:2013) disertifikasi oleh PT TÜV SÜD Indonesia;
16. Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (ISO 22301:2019), disertifikasi oleh PT British Standards Institution;
17. Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (ISO 20000-I:2018).

1. Standard reference in managing product quality, environment, OHS, laboratory quality, security, mining operation safety, energy, anti bribery, assets and technology security information on PTBA in satisfactory customer;
2. International recognition of the products and processes produced by PT Bukit Asam Tbk;
3. Ensure compliance with applicable laws and regulations;
4. Participate in ensuring the sustainability of the Company's operating activities;
5. Increase management's confidence and PTBA employees in supplying products according to customer expectations;
6. Ensure the creation of added value and continuous improvement.

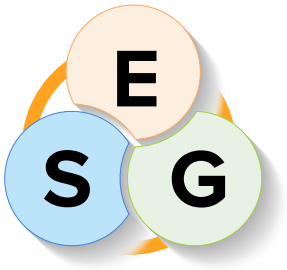
Thus far, Bukit Asam Management System (SMBA) has been carried out while referring to the latest standards that are recognized nationally (mandatory) and internationally, and are integrated, including:

1. Quality Management System (Quality MS) (ISO 9001:2015), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
2. Environmental Management System (Environment MS) (ISO 14001:2015), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
3. OHS Management System (OHSMS) (ISO 45001:2018), certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
4. OHS Management System (OHSMS) (PP No. 50 Year 2012), certified by PT BKI;
5. Anti-Bribery Management System (SMAP) (ISO 37001:2018), certified by PT British Standards Institution and re-certified by PT Tuv Nord Indonesia in 2023;
6. Laboratory Quality Management System Lab QMS (ISO 17025:2017), accredited by the National Accreditation Committee;
7. Proficiency Test Management System (ISO 17043:2010), accredited by the National Accreditation Committee;
8. Ship Security and Port Facilities Management System (ISPS Code), certified by the Director General of Sea Transportation;
9. Mining Safety Management System Mining Safety MS (Minister of ESDM Regulation No. 26 of 2018);
10. Security Management System (Perpol No. 1 of 2019);
11. Energy Management System (ISO 50001:2018) certified by PT TÜV SÜD Indonesia ;
12. Risk Management (ISO 31000:2018);
13. CSR Management (ISO 26000:2010);
14. Asset Management System (ISO 55001:2018);
15. Information Security Management System (ISMS) (ISO 27001:2013) certified by PT TÜV SÜD Indonesia;
16. Business Continuity Management System (ISO 22301:2019), certified by PT British Standards Institution.
17. Information Technology Service Management System (ISO 20000-I:2018)



Pembangunan Sistem Manajemen (SM) Baru
- SM Kinerja Aset ISO 55001:2014
- SM Keamanan Informasi ISO 27001:2013
- Business Continuity Management System ISO 22301:2019

Establishment of New Management System (MS)
- MS of Asset Performance ISO 55001:2014
- MS of Information Security ISO 27001:2013
- Business Continuity Management System ISO 22301:2019



Pencapaian Sasaran Sistem Manajemen PTBA

Sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan, manajemen bertekad untuk mencapai kinerja setinggi-tingginya dalam pengelolaan mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan operasional dan pelabuhan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset, dan keamanan TI dan Layanan Teknologi Informasi, serta menjadikan hal-hal tersebut sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. PTBA menetapkan sasaran SMBA yang diturunkan menjadi *Key Performance Indicator* satuan kerja, pengukuran atas KPI tersebut dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali melalui Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja BSC.

Target Achievement of PTBA Management System

In line with the Company's Vision and Mission, the management is determined to achieve the highest performance in the management of product quality, environment, OHS, laboratory quality, operational and port security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets, IT security, and IT service, and prioritize those in every operational activity of the Company. For this reason, PTBA sets the SMBA target, which is passed down to the Key Performance Indicators of work unit, and measured every three months through the Internal Audit of BSC Performance Management System.

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen PTBA

Audit Sistem Manajemen PTBA dilaksanakan dengan mengacu pada Tata Laksana Audit Internal. Berdasarkan pelaksanaannya, PTBA menetapkan pemantauan dan pengukuran kinerja mutu produk, lingkungan, K3, mutu laboratorium, pengamanan operasional dan pelabuhan, keselamatan operasi pertambangan, energi, anti penyuapan, aset, keamanan dan Layanan Teknologi Informasi secara berkala, melalui proses audit yang dilakukan internal maupun oleh lembaga sertifikasi. Pelaksanaan audit Sistem Manajemen PTBA dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan kesesuaiannya yang didasarkan pada persyaratan standar (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; PP RI No. 50/2012; SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2010; Perpol No 07/2019; ISPS Code; PERMEN ESDM No.26/2018; ISO 50001:2018; ISO 37001:2016; ISO 27001:2018 dan ISO 22301:2019).

Adapun waktu pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan sebagai berikut:

PTBA Management System Audit

The PTBA Management System audit was carried out with reference to the Internal Audit Procedures. Based on the implementation, PTBA establishes monitoring and measuring the performance of product quality, environment, OHS, laboratory quality, operational and port security, mining operation safety, energy, anti-bribery, assets, security, and Information Technology Services on a regular basis, through an internal audit process and certification bodies. The audit of the PTBA Management System is carried out in accordance with a predetermined plan, with compliance based on standard requirements (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; PP RI No. 50/2012; SNI ISO/IEC 17025 :2017; SNI ISO/IEC 17043:2010; Political Regulation No. 07/2019; ISPS Code; ESDM Ministerial Regulation No.26/2018; ISO 50001:2018; ISO 37001:2016; ISO 27001:2018 and ISO 22301:2019).

The Internal Audit is carried out on:

1. Audit internal berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) secara terintegrasi.
2. Audit terhadap Sistem Manajemen lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Audit *surveillance* Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen K3 terintegrasi dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
4. *Audit surveillance* terhadap Sistem Manajemen lainnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal terjadi penyimpangan yang menimbulkan keraguan pada kesesuaian kebijakan, prosedur dan standar laboratorium maka Manajemen dapat melakukan audit internal tambahan.

Penetapan jadwal audit mempertimbangkan status dan pentingnya proses/area yang diaudit, perubahan yang berpengaruh pada PTBA serta hasil audit sebelumnya. Hasil audit ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang terkait sesuai dengan temuan audit, dan harus dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan telah sesuai dan berjalan dengan efektif. Audit internal dilakukan oleh auditor yang terlatih, mandiri, independen dan dilakukan lintas satuan kerja.

Komitmen Penerapan Sistem Manajemen PTBA

Perusahaan berkomitmen untuk selalu meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen PTBA sehingga dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Adapun langkah yang dilakukan oleh Perusahaan diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi dan jumlah auditor internal sesuai dengan ketentuan untuk menjamin keluaran dari kegiatan audit internal yang dilaksanakan lebih baik.
2. Perusahaan juga secara konsisten melaksanakan proses *benchmarking* terhadap *leading* dan *lagging indicator* penerapan sistem manajemen terhadap perusahaan sekelas yang menerapkan sistem sejenis.
3. Memenuhi sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan dan keamanan pegawai, menjadi kewajiban Perusahaan sekaligus untuk mencegah kerusakan dan kerugian.
4. Penerapan *good mining practice* serta pengelolaan energi yang efektif guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui *community development.*
5. Melakukan perbaikan berkesinambungan dengan memperhatikan harapan dan keinginan dari pemangku kepentingan, perkembangan ilmu dan teknologi, serta pembangunan sistem manajemen pendukung ESG (*Environmental, Social, and Governance*) agar keberlanjutan usaha perusahaan dapat dipertahankan.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023, meliputi:

1. Internal audits relating to the Quality Management System, Environmental Management System, OHS Management System are carried out every 3 (three) months (quarterly) in an integrated manner.
2. Audits of other Management Systems are carried out once a year.
3. Surveillance audits of the Quality Management System, Environmental Management System, and integrated OHS Management System are carried out 2 (two) times a year.
4. Surveillance audits of other Management Systems are carried out once a year.

If there is a deviation that raise doubts about the suitability of laboratory policies, procedures, and standards, Management can conduct additional internal audits.

Determination of the audit schedule shall consider the status and importance of the process/area being audited, changes that affect PTBA, and the results of previous audits. The audit results are followed up by the relevant work units in accordance with the audit findings, and re-verification must be carried out to ensure that corrective and preventive actions are appropriate and running effectively. Internal audits are carried out by trained, independent, and independent auditors and are carried out across work units.

Commitment on PTBA Management System

The Company is committed to constantly improve the implementation of PTBA Management System to support the achievement of the Company's Vision and Mission, including by:

1. Increase the competencies and number of internal auditors per the provisions to ensure better output from internal audit activities.
2. Consistently carries out a benchmarking process against leading and lagging indicators of the implementation of a management system for companies of the same class that implement a similar system.
3. Fulfill supporting infrastructure to increase productivity, safety, and security of employees, is the Company's obligation and to prevent damage and loss.
4. Implementing good mining practices and effective energy management to prevent environmental pollution and maintain harmonious relations with the surroundings through community development.
5. Carrying out continuous improvement by taking into account the expectations and desires of stakeholders, science and technology development, and the development of ESG (Environmental, Social, and Governance) supporting management system to maintain the business sustainability.

Implementation of Duties of Corporate Management System and GCG Unit

In 2023, the Company's Management Systems Unit has carried out its duties and responsibilities in accordance with the plans prepared in the 2023 Work Plan and Budget, including:

No	Perihal Regarding	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
	Sistem Manajemen Perusahaan Corporate Management System	
1	Audit Internal Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) diantaranya: • Audit internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (15-17 Mei 2023) • Audit internal ISO 23001 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis) (15-26 Mei 2023) • Audit internal Sistem Manajemen Pengamanan di unit kerja Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan dan UPTE (24 Juli-1 Agustus 2023) • Audit internal laboratorium SNI ISO/IEC 17043 pada di La boratorium Batu bara Tanjung Enim (3-4 Agustus 2023) • Audit internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 (23-31 Oktober 2023) • Audit internal Sistem Manajemen Energi (23-31 Oktober 2023) • Audit internal SMK3 PP No. 50 Th 2012 (23-31 Oktober 2023) • Audit internal ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan TI) (23-31 Oktober 2023) • Audit internal ISPS code telah dilaksanakan di Dermaga Teluk Bayur, Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan (14-28 Desember 2023) • Audit internal laboratorium SNI ISO/IEC 17025 pada 5 laboratorium PTBA (27-28 Desember 2023) Internal Audit of the Bukit Asam Management System (SMBA) includes: • Internal audit of the Anti-Bribery Management System (May 15-17, 2023) • ISO 23001 (Business Continuity Management System) internal audit (May 15-26, 2023) • Internal audit of the Security Management System at the Kertapati Pier, Tarahan Harbor and UPTE work units (July 24-August 1, 2023) • Internal audit of the SNI ISO/IEC 17043 laboratory at the Tanjung Enim Coal Laboratory (August 3-4, 2023) • Internal audit of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 (October 23-31, 2023) • Energy Management System internal audit (October 23-31, 2023) • Internal audit of SMK3 PP No. 50 2012 (October 23-31, 2023) • ISO 27001 (IT Security Management System) internal audit (October 23-31, 2023) • Internal ISPS code audits have been carried out at Teluk Bayur Pier, Kertapati Pier and Tarahan Harbor (December 14-28, 2023) • Internal laboratory audit of SNI ISO/IEC 17025 in 5 PTBA laboratories (December 27-28, 2023)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
2	Audit Eksternal Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) diantaranya: • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium mekanika tanah UPTE dilaksanakan dengan onsite assessment dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam rangka Surveillance Tidak Terjadwal untuk Laboratorium Penguji Mekanika Tanah PT Bukit Asam (Persero) Tbk (LP-075-IDN) 27 Maret 2023) • Pelaksanaan surveilance audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 (19-26 Mei 2023) • Pelaksanaan audit re-sertifikasi ISO 37001 oleh auditor eksternal (4-9 Juni 2023) • Pelaksanaan surveilance audit ISO 22301 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis) (21-27 Juli 2023) • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium penguji UPTE (TW II 2023) • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium kalibrasi UPTE (TW II 2023) • Pelaksanaan surveillance audit SNI ISO / IEC 17025:2017 laboratorium penguji Peltar (24-25 Agustus 2023) External Audit of the Bukit Asam Management System (SMBA) includes: • The surveillance audit of SNI ISO/IEC 17025:2017 UPTE soil mechanics laboratory was carried out with an onsite assessment from the National Accreditation Committee (KAN) in the context of Unscheduled Surveillance for the Soil Mechanics Testing Laboratory of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (LP-075-IDN) March 27, 2023) • Implementation of surveillance audits ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 (May 19-26, 2023) • Implementation of ISO 37001 re-certification audit by external auditor (June 4-9, 2023) • Implementation of surveillance audit ISO 22301 (Business Continuity Management System) (July 21-27, 2023) • Implementation of surveillance audits of SNI ISO/IEC 17025:2017 UPTE testing laboratories (Q II 2023) • Implementation of surveillance audits of SNI ISO/IEC 17025:2017 UPTE calibration laboratories (Q II 2023) • Implementation of surveillance audit of SNI ISO/IEC 17025:2017 Peltar testing laboratory (August 24-25, 2023)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
3	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Internal: • Sertifikasi auditor internal ISPS code (23-24 Februari 2023) • Sertifikasi auditor internal Sistem Manajemen Pengamanan (24-31 Mei 2023) • Konsinyering dan pelatihan auditor internal baru SMBA (15-16 Juni 2023) • Sertifikasi auditor internal SMKP (02-28 Agustus 2023) • Pembinaan Teknis Sistem Manajemen Pengamanan pada unit kerja Dermaga Kertapati, Tanjung Enim, dan Pelabuhan Tarahan (September-Oktober 2023) • Sertifkasi auditor internal SM Lab ISO 17025 (14-15 Desember 2023) Internal Auditor Training and Certification: • ISPS code internal auditor certification (February 23-24, 2023) • Security Management System internal auditor certification (May 24-31, 2023) • Consignment and training of new SMBA internal auditors (June 15-16, 2023) • SMKP internal auditor certification (August 2-28, 2023) • Technical Development of Security Management Systems at Kertapati Barging Port, Tanjung Enim and Tarahan Harbor work units (September-October 2023) • SM Lab ISO 17025 internal auditor certification (December 14-15, 2023)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
	GCG dan Kinerja Perusahaan GCG and Company Performance	
1	Penyusunan dan penetapan KPI Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek dan Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023 melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya: Aspirasi Pemegang Saham, Aspirasi BOD, Kick Off Meeting Tim, Workshop Penyusunan Dokumen, Pembahasan KPI dengan Satuan Kerja/Proyek dan AAP, Paparan Final ke BOD dan Sirkuler Pengesahan KPI BSC oleh BOD. The preparation and determination of the KPI Balanced Scorecard (BSC) of the Company, Work Units/Projects and Affiliated Subsidiaries of PT Bukit Asam Tbk in 2023 through several stages of activities including: Shareholder Aspirations, BOD Aspirations, Team Kick Off Meeting, Document Preparation Workshop, KPI Discussion with Work Unit/Project and AAP, Final Exposure to BOD and BSC KPI Ratification Circular by BOD.	TW I 2023 Q I 2023
2	Pembekalan untuk Auditor Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC), melalui kegiatan Konsinyering Auditor Tahun 2023 dan Workshop kepada BSC Officer dalam rangka peningkatan pemahaman mekanisme Audit. Provision for Internal Auditors on the Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, through the 2023 Auditor Conference and Workshop for BSC Officers in order to increase understanding of the Audit mechanism.	TW I-II 2023 Q I-II 2023

No	Perihal Regarding	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
3	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Perusahaan, Satuan Kerja/Proyek PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023 (37 Satuan Kerja) Internal Audit of the Company's Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System, PT Bukit Asam Tbk Work Units/Projects in 2023 (37 Work Units)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
4	Audit Internal Sistem Manajemen Kinerja Balanced Scorecard (BSC) Anak Afiliasi Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2023 (Sesuai Permintaan Direktur AAP) Internal Audit of the Balanced Scorecard (BSC) Performance Management System of Affiliated Subsidiaries PT Bukit Asam Tbk in 2023 (As requested by the Director of subsidiaries and affiliates)	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
5	Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan melakukan penyusunan Laporan keterbukaan Informasi perubahan iklim dan penyampaian kuesioner CDP *Climate Change* Implementation of good corporate governance by preparing climate change information disclosure reports and submitting CDP Climate Change questionnaires	TW I- III 2023 Q I-III2023
6	*Roadshow* GRC (aspek GCG) kepada seluruh Satuan Kerja/ Unit/ Proyek di PTBA guna meningkatkan kesadaran terkait pentingnya GRC dalam format awareness dan pendampingan dengan Pelatihan GRC Kepada perwakilan Satuan Kerja/Proyek GRC Roadshow (GCG aspect) to all Work Units/Units/Projects at PTBA to increase awareness regarding the importance of GRC in the format of awareness and assistance with GRC Training to representatives of Work Units/Projects	TW II-IV 2023 Q II-IV 2023
7	Workshop dan tindak lanjut hasil *assessment* GCG eksternal atas penilaian tahun 2022 sebagai penetapan rencana kerja berdasarkan rekomendasi assessment di tahun 2023 kepada satuan kerja terkait serta Melakukan evaluasi mandiri terkait implementasi GCG Tahun 2023 Workshop and follow-up on the results of the external GCG assessment for the 2022 assessment as the determination of a work plan based on the recommendations of the 2023 assessment to the relevant work units as well as carrying out an independent evaluation regarding the implementation of GCG in 2023	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
8	Melakukan *Enhancement* (Penyempurnaan) aplikasi CISEA-GCG yang memiliki fitur diantaranya: fitur Informasi *Soft Structure* PTBA, fitur Informasi Internalisasi dan Capaian GCG PTBA, fitur Survey Pemahaman GCG, dan fitur Pengisian Pakta Integritas COC melalui Aplikasi CISEA-GCG dalam rangka internalisasi Kode etik pegawai agar berprilaku sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Carrying out Enhancements (Refinements) to the CISEA-GCG application which has features including: PTBA Soft Structure Information feature, PTBA Internalization and GCG Achievement Information feature, GCG Understanding Survey feature, and COC Integrity Pact Filling feature via the CISEA-GCG Application in the context of internalizing the employee Code of Ethics to behave in accordance with good corporate governance.	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023
9	Ikut serta ajang penilaian/evaluasi implementasi GCG oleh pihak eksternal (Corporate Governance Perception Index) Participate in assessment/evaluation of GCG implementation by external parties (Corporate Governance Perception Index)	TW III-IV 2023 Q III-IV 2023
10	Pemutakhiran dashboard dan konten ESG (Aspek CDP) pada website serta Mendukung kegiatan sustainability MIND ID khususnya dalam konteks GCG, dengan mempersiapkan program/system mengacu kepada 10 prinsip International Council On Mining And Metals (ICMM) guna meningkatkan citra dan kepercayaan stakeholders. Updating dashboards and ESG content (CDP Aspects) on the website and supporting MIND ID's sustainability activities, especially in the context of GCG, by preparing programs/systems referring to the 10 principles of the International Council on Mining and Metals (ICMM) to improve the image and trust of stakeholders.	TW I-IV 2023 Q I-IV 2023

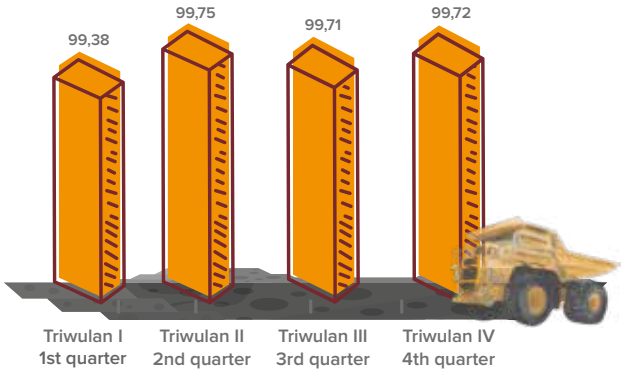
Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG tahun 2023 dilakukan dengan melakukan evaluasi *Key Performance Indikator/Balance Score Card* secara triwulan. Berdasarkan hasil perhitungan, di tahun 2023 Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG mendapatkan skor 99,38 pada Triwulan I, skor 99,75 pada Triwulan II, skor 99,71 pada Triwulan III, dan Triwulan IV mendapatkan skor 99,72.

Performance Appraisal

The performance assessment of the Corporate Management System and GCG Unit in 2023 was conducted by evaluating Key Performance Indicators/Balance Score Card quarterly. Based on the calculations, in 2023, the Corporate Management System and GCG Unit obtained a score of 99.38 in 1st quarter, a score of 99.75 in 2nd quarter, a score of 99.71 in 3rd quarter, and 4th quarter scored 99.72.

Key Performance Indikator Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG 2023
Key Performance Indicators of Corporate Management Systems and GCG 2023



Akuntan Publik
Public Accountant



Dalam menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan, Perusahaan menggunakan jasa dari Akuntan Publik. Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Audit atas Laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

1. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
2. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan keuangan.

In disclosing an opinion regarding the fairness, in all material matters, financial position, business results, changes in equity, and cash flows as contained in the Financial Statements, the Company uses the services of a Public Accountant. Financial reports are in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

External Audit Procedures and Audit Standards

Audits of the Company's financial statements are carried out in accordance with the Professional Standards for Public Accountants which include all audit procedures deemed necessary according to the circumstances.

1. Audit includes testing and evaluation of the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence that supports the amounts and disclosures in the Financial Report. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the presentation of the Financial Statements as a whole in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards issued by IAI.
2. As part of the audit process, the Public Accountant Firm also questions the management regarding management statements disclosed in the financial reports.

3. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
4. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di review oleh badan atau otoritas terkait.
5. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

3. Audits contain an inherent risk of material errors and irregularities. If there is such a thing, Public Accountant Firm will convey it to management.

4. Management approves the Public Accountant Firm's audit working papers for the Company to be reviewed by the relevant bodies or authorities.
5. Audits are carried out based on the Professional Standards for Public Accountants published by the Indonesian Institute of Public Accountants. If there is financial assistance from the Indonesian Government, then the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KAP yang ditunjuk oleh Perusahaan harus memenuhi syarat atau kriteria, sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di OJK;
2. Mempunyai afiliasi dengan KAP Internasional yang memberikan quality control procedures;
3. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan perusahaan sejenis (bergerak di bidang pertambangan);
4. Memiliki dan menugaskan tim auditor dengan kualifikasi Certified Public Accountant (CPA), ahli di bidang internal control berbasis Committee of Sponsoring Organization (COSO) atau Certified Internal Audit (CIA);
5. Menugaskan personil minimal sesuai dengan jumlah menurut Struktur Tim Audit, dengan jumlah hari penugasan masing-masing personil minimal sama dengan Rencana Waktu Audit yang didukung dengan Daftar Hadir pada setiap penugasan;
6. Mampu menyelesaikan laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Public Accountant Appointment Policy

The appointment of a public accounting firm and public accountant is carried out through the GMS mechanism by considering the proposal of the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Offices in Financial Services Activities. To ensure the independence and quality of audit results, the appointed external auditor must not have a conflict of interest with any level of Company officials and consider the provisions of applicable laws and regulations. The KAP appointed by the Company must meet the following requirements or criteria:

1. Public Accounting Firms and Public Accountants must be registered with the OJK;
2. Has an affiliation with International Public Accountant Office which provides quality control procedures;
3. Experienced in conducting general audits on companies registered with the OJK and similar companies (engaged in the mining sector);
4. Have and assign a team of auditors with Certified Public Accountant (CPA) qualifications, experts in the field of internal control based on the Committee of Sponsoring Organization (COSO) or Certified Internal Audit (CIA);
5. Assign minimum personnel according to the number according to the Audit Team Structure, with the minimum number of days assigned to each personnel equal to the Audit Time Plan supported by an Attendance List for each assignment;
6. Able to complete audit reports according to the predetermined schedule.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juni 2023, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC), untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan Periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, serta audit umum atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023.

Based on the results of the decision of the Annual GMS on June 15, 2023, the Company appointed the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm, a member of the PricewaterhouseCoopers (PwC) global network, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year and other periods in the 2023 Financial Year , as well as a general audit of the financial reports of the Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Financial Year.

Adapun Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Public Accounting Firms that have audited the Company's Financial Reports for the last 5 years are as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Partner in Charge)	Periode Period	Fee (Rp)	Izin KAP PAF License
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yusron, S.E., Ak., CPA	Kelima Fifth	3.194.583.165	AP.0243
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yusron, S.E., Ak., CPA	Keempat Fourth	3.122.482.500	AP.0243
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Ketiga Third	3.465.711.562	AP.0241
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Kedua Second	2.960.306.250	AP.0241
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA	Pertama First	1.725.000.000	AP.0241

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Di tahun 2023, tidak ada jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Other Services Provided by Public Accounting Firm and Public Accountant

In 2023, there were no other services provided by the Public Accountant Firm that conducted the audit on Company Financial Statements

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System



Sistem Pengendalian Internal diselenggarakan oleh Manajemen sebagai upaya dalam mengamankan investasi dan asset Perusahaan, melalui peningkatan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Internal berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Bukit Asam, Tbk Nomor BAICM:00 tanggal 21 November 2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIn). Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan oleh Perusahaan mengacu pada kerangka yang diakui secara Internasional (COSO-*Internal Control Framework*). Berdasarkan COSO-*Internal Control Framework* terdapat 5 (lima) komponen Pengendalian Internal, yaitu (1) Lingkungan pengendalian, (2) pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, (3) aktivitas pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi, dan (5) *monitoring*.

The Internal Control System is implemented by Management as an effort to secure the Company's investments and assets, through increasing the Company's compliance with applicable laws and regulations, ensuring the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports, as well as meeting efficiency and effectiveness from business activities that are in accordance with the Company's vision, mission and objectives.

The Company has established Guidelines for Implementing the Internal Control System based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam, Tbk Number BAICM:00 dated November 21, 2022, regarding the Guidelines for the Implementation of Internal Control System. The Internal Control System implemented by the Company refers to an internationally recognized framework (Internal Control Framework). Based on the COSO-Internal Control Framework, there are 5 (five) components of Internal Control, namely (1) environment control, (2) business risk assessment and management, (3) activities control, (4) information and communication systems, and (5) monitoring.

Sampai dengan akhir Desember tahun 2023, telah dilaksanakan Internal control sebanyak 40 satuan kerja. Pengendalian Internal telah dilakukan kepada Satuan Kerja di Perusahaan, dengan informasi sebagai berikut:

Until the end of December 2023, internal control has been implemented for 40 work units. Internal Control has been carried out for Work Units in the Company, with the following information:

Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV
• Unit Pertambangan Tanjung Enim • Penambangan • Perawatan • Perawatan APPT • Perawatan CHF dan ATU • Perencanaan • Perencanaan Tambang • Perencanaan Eksplorasi • PAB • PLPT	• Optimasi Operasi Produksi • K3L Korporat • Komersial • Pemasaran • Distribusi • SDM Stratejik • SDM Operasional • Manajemen Portofolio • Keuangan Korporat • Teknologi Informasi	• Pengadaan • Pengembangan Hilirisasi • Pengembangn Logistik dan Infrastruktur • Pengembangan Tambang • Proyek Pengembangan Sarana Penunjang • Unit Dermaga Kertapati • Unit Pelabuhan Tarahan • Unit Pertambangan Ombilin • Pengembangan Energi • Proyek Pengembangan Infrastruktur	• SMP & GCG • Hukum dan Regulasi • Layanan Operasi • Sekretaris Perusahaan • PAISP • Manajemen Risiko • Sustainability • Anggaran dan Akuntansi • Project Management Ofiice • Satuan Pengawasan Intern
• Tanjung Enim Mining Unit • Mining • Treatment • APPT treatment • CHF and ATU treatment • Planning • Mine Planning • Exploration Planning • PAB • PLPT	• Optimization of Production Operations • Corporate OHSE • Commercial • Marketing • Distribution • Strategic HR • Operational HR • Portfolio Management • Corporate Finance • Information Technology	• Procurement • Downstream Development • Logistics and Infrastructure Development • Mining Development • Supporting Facilities Development Project • Kertapati Barging Port Unit • Tarahan Port Unit • Ombilin Mining Unit • Energy Development • Infrastructure Development Project	• SMP & GCG • Laws and Regulations • Operation Services • Company Secretary • PAISP • Risk Management • Sustainability • Budget and Accounting • Project Management Office • Internal Control Unit

Penjelasan Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka yang Diakui secara Internasional (COSO – Internal Control Framework)

Perusahaan telah menerapkan penerapan dan pengembangan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice)* yang meliputi 5 komponen, di antaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar atau pondasi dari semua komponen pengendalian internal. Demi terwujudnya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, Perusahaan bertolak dari Lingkungan Pengendalian yang positif yang dibentuk melalui:

1. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika di Perusahaan;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Komitmen Dewan Komisaris;
4. Komitmen filosofi dan pola manajerial;
5. Struktur organisasi yang efektif;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efektif dan bertanggung jawab; dan
7. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan efektif.

Explanation on the Conformity of Internal Control System with Internationally Recognized Framework (COSO – Internal Control Framework)

The Company has applied and developed an Internal Control System in accordance with the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice) which covers 5 components, including control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

Control Environment

The control environment is the basis or foundation of all internal control components. In order to realize an effective Internal Control System, the Company starts from a positive Control Environment which is formed through:

1. Commitment to integrity and ethical values in the Company;
2. Commitment to competence;
3. Commitment of the Board of Commissioners;
4. Commitment to managerial philosophy and patterns;
5. Effective organizational structure;
6. Effective and responsible Human Capital Management; and
7. Appropriate and effective delegation of authority and responsibility.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Proses penilaian risiko oleh Perusahaan dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan, untuk selanjutnya Perusahaan melakukan evaluasi untuk menentukan tindakan guna meminimalisir risiko yang dihadapi.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan Perusahaan dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko yang menghambat pencapaian tujuan Perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan diwujudkan melalui:

a. Menyusun Kebijakan, Pedoman dan Prosedur sesuai Ketentuan yang berlaku
b. Melakukan kegiatan operasi berdasarkan Kebijakan, SOP, Prosedur & Peraturan yang berlaku
c. Mengembangkan teknologi digitalisasi dan melakukan pengendalian risiko secara berkala

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi diperoleh dan dihasilkan oleh Perusahaan guna mendukung fungsi dari komponen pengendalian internal lainnya. Perusahaan mengelola setiap informasi dan komunikasi, melalui pembaharuan sistem informasi dan penyediaan sarana komunikasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah timbulnya permasalahan yang diakibatkan dari informasi yang tidak relevan dan berkualitas.

Pemantauan Pengendalian Internal

Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian internal di Perusahaan secara berkala melalui:

a. Melakukan Sosialisasi terkait pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Sosialisasi cara pengisian *Form* CSA (*Control Self Assesment*) dan bukti yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang akan dilakukan evaluasi efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal
b. Evaluasi efektivitas dan kecukupan Sistem Pengendalian Internal kepada 40 satuan kerja selama tahun 2023 yang di bagi 4 kali /triwulan (10 satuan kerja per triwulan)
c. Memberikan *feedback* kepada satuan kerja yang telah di lakukan evaluasi efektivitas dan kecukupannya untuk dapat ditindaklanjuti

Tindakan sebagaimana disampaikan, dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Hasil monitoring dipergunakan oleh Perusahaan untuk memperbaiki kelemahan yang terdeteksi dan memperkuat sistem yang telah dibentuk.

Risk Assessment

Risk Assessment is carried out to identify and assess risks that may affect the achievement of objectives. The Company's risk assessment process begins by identifying risks that can affect the achievement of the Company's objectives then followed by an evaluation to determine actions to minimize the risks faced.

Control Activities

Control activities are the Company's actions in an effort to prevent and reduce risks that could hamper the achievement of the Company's objectives. Actions taken by the Company are based on established policies and procedures. The control activities carried out by the Company are realized through:

a. Develop policies, guidelines and procedures in accordance with applicable provisions
b. Carry out operational activities based on applicable Policies, SOPs, Procedures & Regulations
c. Develop digitalization technology and carry out risk control regularly

Information and Communication

Information and Communication is obtained and produced by the Company to support the functions of other internal control components. The Company manages all information and communication, through updating information systems and providing effective and accountable communication facilities, to minimize and prevent the occurrence of problems resulting from irrelevant and high-quality information.

Internal Control Monitoring

The Company periodically monitors and evaluates internal control in the Company through:

a. Carrying out socialization regarding the importance of implementing the Internal Control System and socializing how to fill out the CSA (Control Self Assessment) Form and the evidence needed by the work unit that will evaluate the effectiveness and adequacy of the Internal Control System
b. Evaluation of the effectiveness and adequacy of the Internal Control System for 40 work units during 2023 which is divided into 4 times / quarter (10 work units per quarter)
c. Provide feedback to work units which effectiveness and adequacy have been evaluated so that they can be followed up

The actions are taken to ensure that the Company's internal control system is running well. The results of monitoring are used by the Company to correct detected weaknesses and strengthen the systems that have been established.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada Tahun Buku

Dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal, Perusahaan melakukan penerapan berbasis internasional yang meliputi aspek *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice)* dari penilaian yang dilakukan rata-rata tingkat efektivitas pengendalian internal mendapatkan predikat baik dengan rerata 91,64.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi selalu mengembangkan sistem pengendalian Internal di Perusahaan guna penerapannya dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Corporate Governance Policy* berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan telah cukup dan berfungsi efektif serta memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Hal tersebut tercermin melalui operasional Perusahaan yang berjalan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Review on the Effectiveness of the Internal Control System in the Fiscal Year

In the implementation of the Internal Control System, the Company carries out international-based implementation which includes the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Best Practice) aspect. From the assessment carried out, the average level of internal control effectiveness received a good predicate with an average of 91.64.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors always develops an internal control system in the Company to maintain its implementation to function effectively to secure the Company's investments and assets. The Internal Control System in the Company is implemented in accordance with what is stipulated in the Corporate Governance Policy based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors.

The Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Internal Control System in the Company is sufficient and works effectively and adequately in managing the risks faced by the Company. This is reflected in the Company's operations running effectively and efficiently, the reliability of financial reporting, the security of the Company's assets, and compliance with statutory regulations.

Manajemen Risiko
Risk Management



Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi dan proses bisnis yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan dari risiko, yang berpengaruh terhadap sasaran Perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko dan prosedur turunannya yang disusun berdasarkan pada beberapa referensi yang relevan, di antaranya yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan.

Basis for Implementing a Risk Management System

The Company is committed to implement appropriate strategies and business processes to identify and manage risks related to the Company's activities. This aims to minimize the possibility of risks occurring and the impacts arising from risks, which affect the Company's targets, to provide maximum benefits to shareholders and stakeholders.

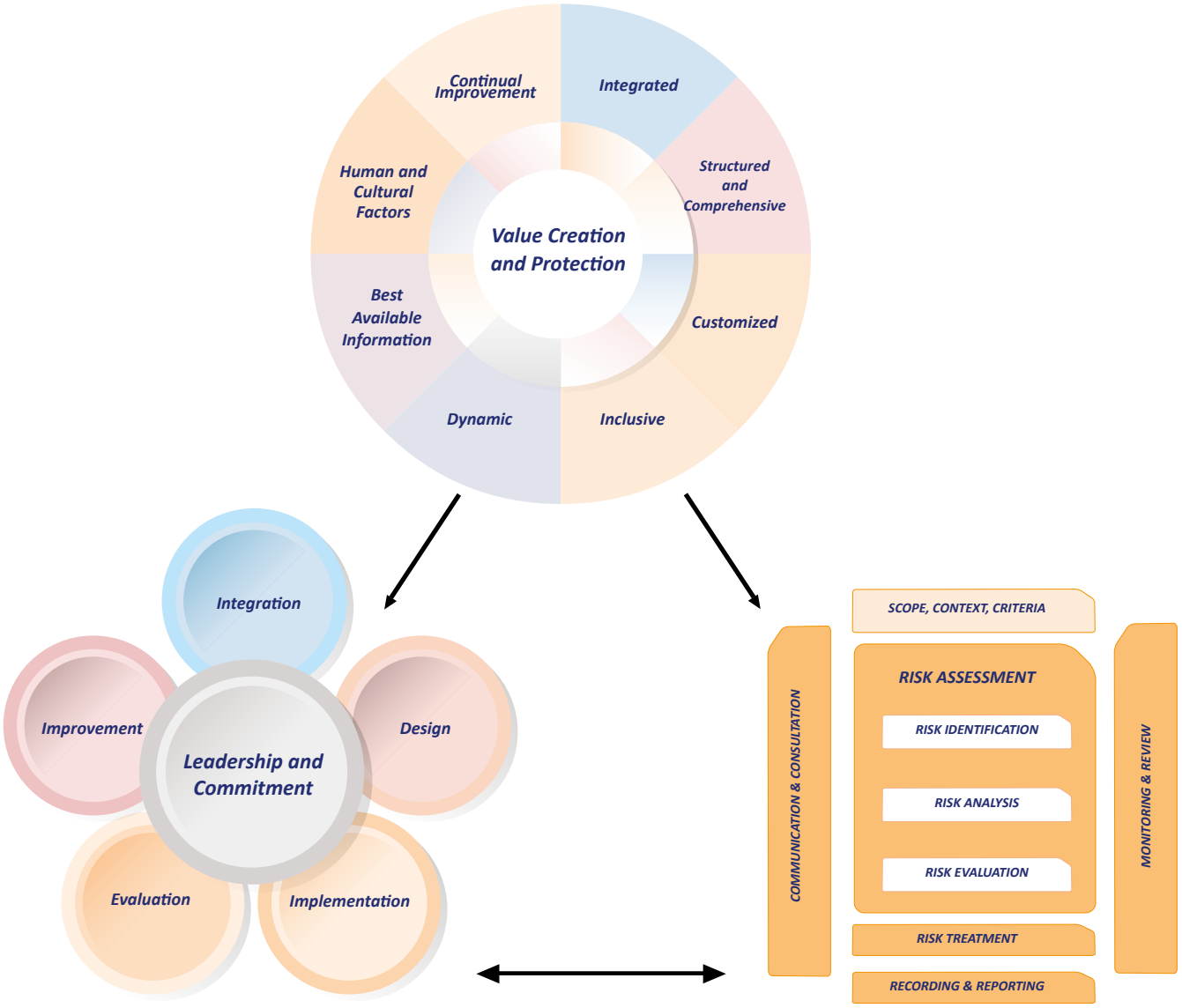
The implementation of risk management in the Company refers to the Risk Management Guidelines and derivative procedures which are prepared based on several relevant references, including Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Arsitektur Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018, arsitektur manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

Risk Management Architecture

Based on ISO 31000:2018, the risk management architecture is described as follows:



Tujuan Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000:2018 – *Risk Management Guidelines*, tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan ini diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Adapun tujuan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
   Jika risiko-risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diases dengan baik, maka mitigasi untuk mengatasi risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses organisasi dapat diantisipasi. Walaupun risiko tersebut terjadi, maka organisasi telah siap untuk menanganinya dengan baik.
2. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan.
   Melalui penetapan lingkup, konteks, dan kriteria risiko yang jelas, termasuk penegasan bahwa risikorisiko yang dikelola merupakan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran, manajemen risiko akan dapat meningkatkan keyakinan atas pencapaian sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan.
   Melalui komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, mereka mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani Risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4. Mengurangi Kejutan-Kejutan yang kurang menyenangkan.
   Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, maka hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran perusahaan sekaligus langkah antisipasi yang perlu dilakukan.
5. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin baik.
   Dalam penerapan manajemen risiko, perlu menemukenali para pemangku kepentingan dan harapan atau kebutuhannya. Melalui Komunikasi timbal balik yang intens dapat dicapai kesamaan persepsi untuk mencapai sasaran Perusahaan. Manajemen harus terintegrasi di dalam proses organisasi dan memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

Pedoman Manajemen Risiko PTBA

Pedoman Manajemen Risiko PTBA disahkan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Direktur Utama pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan nomor dokumen BARMM.01. Secara umum, Pedoman Manajemen Risiko memuat mengenai:

Risk Management Objective

Berdasarkan ISO 31000:2018 – *Risk Management Guidelines*, tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan ini diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Adapun tujuan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1. Enhancing Effectiveness and Efficiency:
   By adequately identifying risks that could hinder organizational processes, mitigation measures to address potential disruptions can be anticipated. Even if such risks occur, the organization is prepared to handle them effectively.

2. Providing Reasonable Assurance of Company Goal Achievement:
   Through clear identification of the scope, context, and risk criteria, including the assertion that managed risks may affect goal achievement, risk management can enhance confidence in the company's established goals.

3. Enhancing Company Reputation:
   Effective communication with stakeholders ensures they are aware that the company is capable of managing its risks well. Stakeholders include both internal and external parties.

4. Reducing Unpleasant Surprises:
   Effective risk management helps identify significant factors affecting the company's goal achievement and facilitates proactive measures.

5. Improving Relationships with Stakeholders:

   In risk management implementation, identifying stakeholders and understanding their expectations or needs is crucial. Through intensive feedback communication, a shared perception can be achieved to reach company goals. Risk management should be integrated into the organizational process and requires leadership and commitment from top management, as well as active involvement from all organization members.

Risk Management Guidelines of PTBA

The Risk Management Guidelines of PTBA were approved by the Finance and Risk Management Director as well as the President Director on August 9, 2021, with document number BARMM.01. In general, the Risk Management Guidelines cover:

1. Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Acuan, dan Definisi;
3. Prinsip Manajemen Risiko;
4. Kerangka Manajemen Risiko;
5. Proses Manajemen Risiko.

Penerapan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di Lingkup PTBA

Dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko di PTBA. Perusahaan memiliki Pedoman, Tata Laksana (TL), dan Tata Cara Kerja (TCK) yang lengkap, mencakup:

1. Pedoman Manajemen Risiko;
2. Pedoman Business Continuity Management System;
3. Pedoman 4 Eyes Principles Pengambilan Keputusan;
4. TL Penerapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria Risiko;
5. TL Manajemen Risiko Satker/Proyek;
6. TL Penyusunan Profil Risiko Korporat Terintegrasi;
7. TL Monitoring Pengendalian Risiko;
8. TL Evaluasi Manajemen Risiko;
9. TL Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko;
10. TL Kajian Risiko Bisnis & Stratejik;
11. TL Pendampingan Manajemen Risiko Anak dan Afiliasi Perusahaan;
12. TL Business Continuity Plan (BCP) Pelabuhan Tarahan;
13. TL Business Continuity Plan (BCP) Dermaga Kertapati;
14. TL Business Continuity Plan (BCP) Penambangan Tanjung Enim;
15. TL Business Continuity Plan (BCP) Kantor Perwakilan Jakarta;
16. TCK Identifikasi Risiko;
17. TCK Analisis Risiko;
18. TCK Inspeksi Lapangan;
19. TCK Pencatatan Kejadian Merugikan;
20. TCK Laporan Pengendalian Risiko Melalui Aplikasi ERM;
21. TCK Penyusunan Kajian Risiko;
22. TCK Penyusunan monitoring Key Risk Indicator.

Perusahaan senantiasa memastikan kesesuaian prosedur manajemen risiko dengan proses bisnis terkini dengan melakukan pembaruan terhadap Pedoman, TL, dan TCK yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan manajemen risiko. Berikut merupakan informasi pengembangan implementasi Manajemen Risiko di PTBA.

1. Risk Management Policy;
2. Introduction: Background, Purpose, Scope, References, and Definitions;
3. Risk Management Principles;
4. Risk Management Framework;
5. Risk Management Process.

System Implementation and Development of Risk Management in PTBA

In supporting the implementation of risk management in PTBA. The Company has a complete set of Guidelines, Procedures (TL), and Code of Conduct (TCK), which includes:

1. Risk Management Guidelines;
2. Business Continuity Management System Guidelines;
3. Guidelines for 4 Eyes Principles of Decision Making;
4. TL Implementation of Scope, Context, and Risk Criteria;
5. TL of PIU/Project Risk Management;
6. TL Preparation of Integrated Corporate Risk Profile;
7. TL Monitoring of Risk Control;
8. TL Evaluation of Risk Management;
9. TL Risk Management Communication and Consultation;
10. TL Business & Strategic Risk Assessment;
11. TL AAP Risk Management Assistance;
12. TL Business Continuity Plan (BCP) of Tarahan Port;
13. TL Business Continuity Plan (BCP) Kertapati Barging Port;
14. TL Business Continuity Plan (BCP) Tanjung Mining Enim Mining;
15. TL Business Continuity Plan (BCP) Representative Office Jakarta;
16. TCK Risk Identification;
17. TCK Risk Analysis;
18. TCK Field Inspection;
19. TCK of Adverse Event Recording;
20. TCK Risk Control Report through ERM Application;
21. TCK Preparation of Risk Assessment;
22. TCK Preparation of Key Risk Indicator monitoring.

The Company consistently ensures the alignment of risk management procedures with current business processes by updating Guidelines, Standard Operating Procedures (SOPs), and Control Test Checklists (TCKs) used as references in risk management implementation. The following information outlines the development of risk management implementation at PTBA.

Milestones Implementasi Manajemen Risiko PTBA

PTBA Risk Management Implementation Milestones

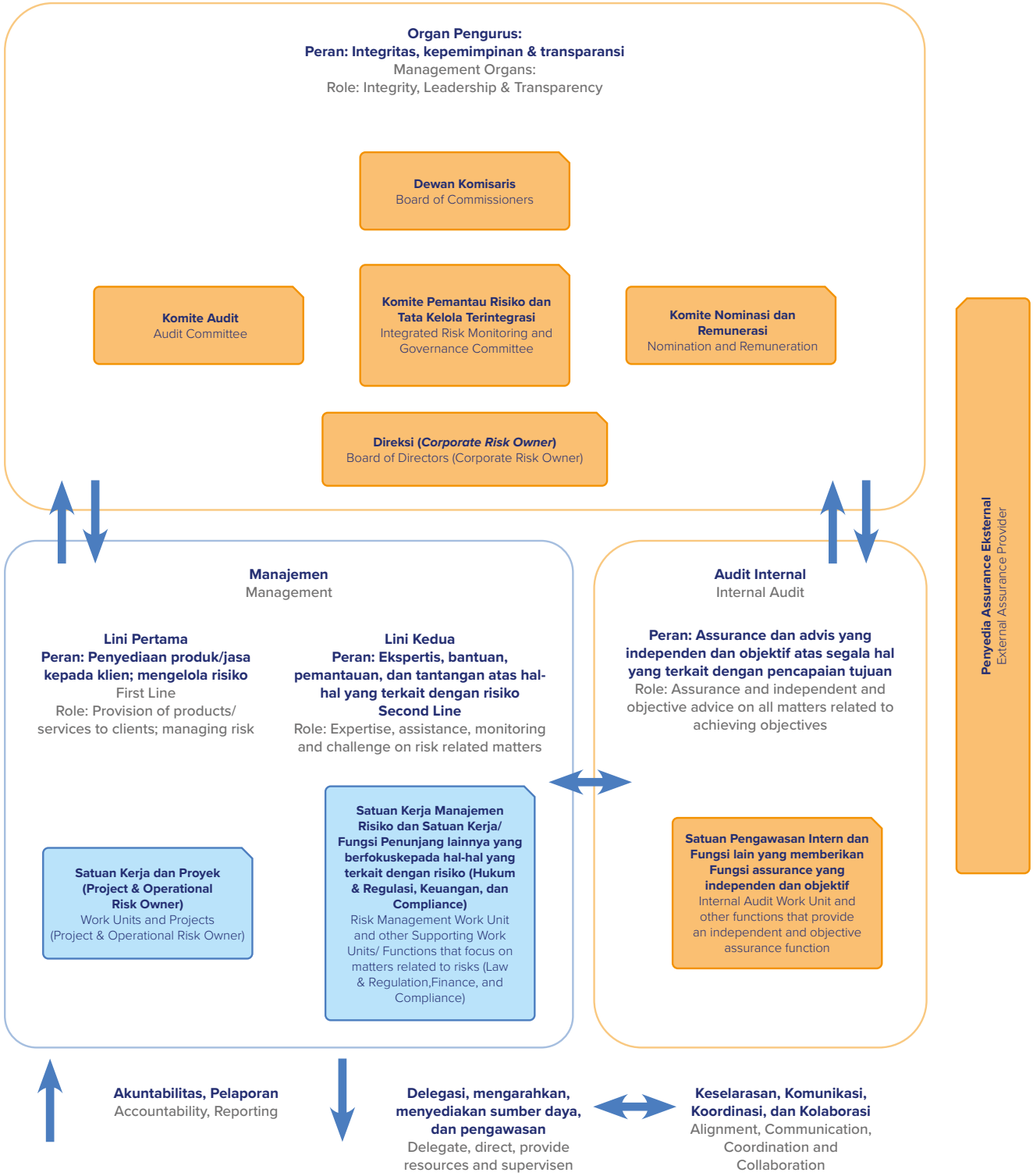
2007 – 2008	• Pembangunan Manajemen Risiko (MR) PTBA Terintegrasi (Identifikasi Risiko berdasarkan Kategori Risiko) • Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran MR PTBA (Ke-1) (Acuan: AS/NZS 4360:2004)	• Development of Integrated PTBA Risk Management (MR) (Risk Identification based on Risk Category) • Determination of MR PTBA Guidelines, Policies & Targets (1st) (Reference: AS/NZS 4360:2004)
2009	Pembuatan dan Pengesahan TL Manajamen Risiko Terintegrasi (2 Prosedur)	Creation and Ratification of Integrated Risk Management RTL (2 Procedures)
2013	• Pembangunan MR Berbasis IT (ERM Application) • Identifikasi Risiko berdasarkan kejadian (Risk Event) • Penilaian & Profil Risiko (Satker – Korporat: Bottom to Top)	• IT-Based MR Development (ERM Application) • Risk identification based on events (Risk Event) • Risk Assessment & Profile (Work Unit – Corporate: Bottom to Top)
2014	Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran Manajemen Risiko PTBA (Ke-2) Acuan: ISO 31000:2009 Mixed COSO 2013 & AS/NZS 4360:2004.	Determination of PTBA Risk Management Guidelines, Policies & Targets (2nd) Reference: ISO 31000:2009 Mixed COSO 2013 & AS/NZS 4360:2004.
2015	• Go Live Enterprise Risk Management Application (ERM Application). • Pembangunan Budaya Risiko (Risk Culture).	• Go Live Enterprise Risk Management Application (ERM Application). • Risk Culture Development.
2016 – 2017	• Monitoring & Evaluasi Penerapan MR Aplikasi ERM. • Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Satker Baru & Anak Perusahaan. • Updating & Pengesahan TL MR (5 Prosedur). • Uji coba Risk-Based Internal Audit (RBIA).	• Monitoring & Evaluation of the Implementation of MR ERM Applications. • Assistance in the Implementation of Risk Management for New Work Units & Subsidiaries. • Updating & Ratifying TL MR (5 Procedures). • Risk-Based Internal Audit (RBIA) trial.
2018	• Penetapan Pedoman, Kebijakan & Sasaran MR PTBA (Ke-3) ISO 31000:2018. • Pembangunan Database Analisa Kuantitatif & Manajemen Insiden.	• Establishment of MR PTBA Guidelines, Policies & Targets (3rd) ISO 31000:2018. • Building a Quantitative Analysis & Incident Management Database.
2019	• Tersedianya database risiko kuantitatif untuk Risk-Based Audit. • Tersedianya Pedoman RKAP berbasis risiko PTBA dan Anak Perusahaan. • 50% Anak Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko (telah memiliki Dokumen Pedoman dan Prosedur MR) • 70% Risk Officer telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko.	• Availability of a quantitative risk database for Risk-Based Audit. • Availability of risk-based WP&B guidelines for PTBA and Subsidiaries. • 50% of Subsidiaries have implemented Risk Management (have MR Guidance and Procedure Documents) • 70% of Risk Officers have obtained Risk Management Certification.
2020	• Hasil Risk Maturity Level Assessment oleh BPKP: 88,98 / 100,00. • Tersedianya dokumen Business Continuity Management System (BCMS). • Teridentifikasinya risiko terkait penyuapan di Satuan Kerja (ISO 37001:2016). • Penerapan RKAP berbasis risiko PTBA dan Anak Perusahaan. • Tersedianya Pedoman Manajemen Risiko di Anak Perusahaan.	• Risk Maturity Level Assessment results by BPKP: 88.98 / 100.00. • Availability of Business Continuity Management System (BCMS) documents. • Identification of risks related to bribery in the Work Unit (ISO 37001:2016). • Implementation of risk-based WP&B for PTBA and Subsidiaries. • Availability of Risk Management Guidelines in Subsidiaries.
2021	• Hasil asesmen Risk Maturity Index oleh Deloitte: 3,98/5,00. • Perubahan nomenklatur manajemen risiko. • Perubahan organisasi Satker Manajemen Risiko. • Enhancement Aplikasi ERM. • Tersedianya Laporan Profil Risiko Anak dan Afiliasi Perusahaan. • Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Risk Owner, Risk Officer, dan Personel Satker Manajemen Risiko. • Tersedianya Pembaruan Pedoman dan Prosedur Manajemen Risiko.	• Risk Maturity Index assessment results by Deloitte: 3.98/5.00. • Changes in risk management nomenclature. • Changes in the organization of the Risk Management Work Unit. • ERM Application Enhancement. • Availability of Risk Profile Reports for Subsidiaries and Affiliates. • Implementation of training and certification for Risk Owners, Risk Officers and Risk Management Work Unit Personnel. • Availability of updated Risk Management Guidelines and Procedures.
2022	• Hasil asesmen Risk Maturity Index oleh asesor internal dari MIND ID Group: 3,67 /5 (Established) Catatan: terdapat perbedaan parameter yang digunakan dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya. • Go Live Enterprise Risk Management Application (ERMA), update / enhancement dari Aplikasi ERM. • Sertifikasi BCMS ISO 22301:2019. • Tersedianya Pedoman 4-Eyes Principles Pengambilan Keputusan. • Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan budaya risiko, melalui pelatihan, sertifikasi, workshop, FGD, dan sosialisasi melalui berbagai media. • Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan.	• Risk Maturity Index assessment results by internal assessors from the MIND ID Group: 3.67/5 (Established) Note: there are differences in the parameters used compared to the previous year's assessment. • Go Live Enterprise Risk Management Application (ERMA), update/ enhancement of the ERM Application. • BCMS ISO 22301:2019 certification. • Availability of 4-Eyes Principles Guidelines for Decision Making. • Implementation of competency and risk culture improvement programs, through training, certification, workshops, FGDs, and outreach through various media. • Availability of Risk Management Guidelines and Documents for Company Subsidiaries & Affiliates.
2023	• Implementasi Four Eyes Principles dalam Pengambilan Keputusan • Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi dan budaya risiko, pelatihan, sertifikasi, workshop, FGD, dan sosialisasi melalui berbagai media. • Tersedianya Pedoman dan Dokumen Manajemen Risiko di Anak & Afiliasi Perusahaan. • Terlaksananya Risk Management Award untuk seluruh satuan kerja di PTBA Induk. • Enhancement Aplikasi ERMA.	• Implementation of the Four Eyes Principles in Decision Making • Implementation of competency and risk culture improvement programs, training, certification, workshops, FGDs, and outreach through various media. • Availability of Risk Management Guidelines and Documents for Company Subsidiaries & Affiliates. • Implementation of the Risk Management Award for all work units at Holding PTBA. • ERMA Application Enhancement.

Pengelolaan Risiko di Lingkup PTBA

PTBA menetapkan struktur tata kelola manajemen risiko dengan mengadopsi "Three Lines Model" yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yaitu sebagai berikut:

Risk Management within PTBA's Scope

PTBA establishes a risk management governance structure by adopting the "Three Lines Model" developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), as follows:



Risiko yang Dihadapi Perusahaan

Risiko-risiko Perusahaan dikelompokan dalam Risk Universe yang terdiri dari 28 Tipe Risiko dengan 3 kategori yaitu *External Environment, Operational,* dan *Organizational* sebagaimana berikut:

Risks Faced by the Company

Company risks are grouped into Risk Universe which consists of 28 Risk Types with 3 categories, namely External Environment, Operational, and Organizational as follows:

External Environment

- A1 Macro Economy
- A2 Industry
- A3 Investment
- A4 Regulation Changes
- A5 Community Relation
- A6 Security Threat
- A7 Weather

Operational

- B1 Production Cost
- B2 Sourcing
- B3 Sourcing
- B4 Production Disruption
- B5 Product Quality
- B6 Product Quality
- B7 Facility & Infrastructure
- B8 Operation Planning
- B9 Operation Planning
- B10 Business Interruption
- B11 Project
- B12 Project
- B13 Financial Reporting
- B14 Land Availability
- B15 Land Availability

Organizational

- C1 People
- C2 Governance
- C3 Business Process
- C4 Financial
- C5 Information Technology
- C6 Legal & Regulatory Compliance

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa risiko utama yang dihadapi oleh Perusahaan. Berdasarkan Profil Risiko Perusahaan, risiko-risiko tersebut yaitu:

1. **Kesehatan, Keamanan, & Lingkungan (Health, Safety, & Environment / HSE)**
   Risiko HSE meliputi seluruh aspek yang dapat berdampak pada kesehatan & keselamatan pekerja serta pencemaran lingkungan sekitar Perusahaan. Risiko ini dapat berdampak lebih lanjut pada kehilangan kesempatan dalam menjalankan bisnis Perusahaan, penurunan reputasi, sanksi dari regulator, serta peningkatan biaya yang harus dikeluarkan, misalnya untuk penanganan insiden, peningkatan premi asuransi, dan kompensasi yang harus dibayarkan.

   Di tahun 2023 risiko kecelakaan kerja masih menjadi fokus Perusahaan mengingat karakteristik perusahaan tambang yang memang memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko-risiko kecelakaan. Pengendalian terhadap risiko ini terus dilakukan secara konsisten melalui penerapan *golden rules* dan sistem manajemen terkait keselamatan yaitu ISO 45001:2018, Sistem Manejemen K3, dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Pada tahun 2023 dilakukan pengendalian risiko di antaranya sebagai berikut:
   a. Pelatihan / *workshop* untuk membekali karyawan mitra kerja terkait pengetahuan K3;

In 2023, there were several main risks faced by the Company listed on the Company's Risk Profile namely:

1. **Health, Safety, & Environment (HSE)**

   HSE risks cover all aspects that can impact the health & safety of workers as well as environmental pollution around the Company. This risk can have a further impact on lost opportunities in running the Company's business, reduced reputation, sanctions from regulators, as well as increased costs that must be incurred, for example for handling incidents, increasing insurance premiums, and compensation that must be paid.

   In 2023, the risk of work accidents was still the Company's focus considering the characteristics of mining companies which have high exposure to accident risks. Control of this risk continues to be carried out consistently through the implementation of golden rules and safety-related management systems, namely ISO 45001:2018, K3 Management System, and Mining Safety Management System (SMKP). In 2023, risk controls were carried out including the following:

   a. Training/workshops to equip partner employees with HSE knowledge;

b. Inspeksi rutin dan inspeksi mendadak (sidak);
c. Mensyaratkan seluruh operator sudah memiliki izin dari instansi terkait;
d. Pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala;
e. Pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu K3;
f. Penggunaan teknologi untuk memantau pergerakan lereng dengan alat *Slope Stability Radar* (SSR) dan Synthetic Aperture Radar (SAR);
g. Perawatan dan pembuatan jalan *All Weather Road* (AWR);
h. Pemeriksaan dan perawatan alat secara rutin sesuai jadwal;
i. Pemberian tindakan disiplin (pinalti) terhadap pelanggaran *safety*/K3 ke seluruh *section*/tim yang terlibat;
j. Pembinaan berupa *incident recall, violation recall* dan *safety minute* kepada pimpinan Satuan Kerja dan mitra kerja saat pelaksanaan *safety committee meeting*, P2K3, *safety talk* dan Rakor *Supply Chain*.

2. Project

Risiko ini berkaitan dengan kegagalan untuk menyelesaikan proyek dalam hal biaya, jadwal waktu, dan kualitas. Pada tahun 2023, terdapat beberapa proyek strategis yang dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) diantaranya adalah proyek PLTU Sumsel-8 yang telah COD pada tanggal 7 Oktober 2023.

Atas risiko keterlambatan operasional PLTU Sumsel-8, mitigasi yang telah dilakukan di antaranya:
a. Menjalankan proyek sesuai dengan *framework* manajemen proyek yang baik;
b. Menyusun asesmen dan mitigasi risiko proyek secara komprehensif serta memonitornya secara berkala;
c. Menyusun dan/atau mengupdate kajian bisnis yang komprehensif dan realistis;
d. Mengimplementasikan Pedoman dan Prosedur *Four Eyes Principles* untuk pengambilan keputusan Proyek dan Rencana Keputusan Strategis Perusahaan;
e. Melakukan eskalasi atas isu/kendala Proyek yang bersifat strategis dan *uncontrollable*.

Selain itu, atas risiko keterlambatan proyek-proyek Pengembangan bisnis lainnya, Perusahaan juga menjalankan mitigasi sebagai berikut:
a. Menyusun timeline rencana/ proyek Pengembangan bisnis secara detail dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
b. Menyusun dan/atau meng-update kajian bisnis secara komprehensif dan realistis.
c. Melakukan pemilihan konsultan atau kontraktor yang memiliki kapabilitas yang memadai.
d. Mengimplementasikan Pedoman dan Prosedur *Four Eyes Principles* untuk pengambilan keputusan Proyek dan Rencana Keputusan Strategis Perusahaan.

3. Marketing & Sales

Risiko ini berkaitan dengan kapasitas perusahaan untuk secara efektif dan efisien mengakses pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. Risiko ini dapat terjadi

b. Routine inspections and sudden inspections (sidak);
c. Requires that all operators to have permits from the relevant agencies;
d. Regular health checks of workers;
e. Installation and maintenance of HSE signs;
f. Use of technology to monitor slope movements using Slope Stability Radar (SSR) and Synthetic Aperture Radar (SAR);
g. All Weather Road (AWR) road maintenance and construction;
h. Regular inspection and maintenance of equipment according to schedule;
i. Providing disciplinary action (penalty) for safety/HSE violations to all sections/teams involved;
j. Guidance in the form of incident recalls, violation recalls, and safety minutes for Work Unit leaders and work partners during safety committee meetings, P2K3, safety talks, and Supply Chain Coordination Meetings.

2. Projects

This risk is related to failure in completing the project in terms of cost, time schedule, and quality. In 2023, there were several strategic projects being carried out to support the achievement of strategic targets in accordance with the Company's Long-Term Plan, including the Sumsel-8 CFPP project which COD started on October 7, 2023.

Regarding the risk of operational delays at Sumsel-8 CFPP, mitigation that has been carried out includes:
a. Execute projects according to a good project management framework;
b. Develop comprehensive project risk assessments and mitigation and monitor them regularly;
c. Compile and/or update comprehensive and realistic business studies;
d. Implement Four Eyes Principles Guidelines and Procedures for Project decision making and Company Strategic Decision Plans;
e. Escalate strategic and uncontrollable Project issues/ constraints.

In addition, for the risk of delays in other business development projects, the Company also implemented the following mitigation:
a. Prepare a detailed business development plan/ project timeline and carry out regular monitoring and evaluation.
b. Compile and/or update business studies in a comprehensive and realistic manner.
c. Choose consultants or contractors who have adequate capabilities.
d. Implement Four Eyes Principles Guidelines and Procedures for decision making and Company Strategic Decision Plans.

3. Marketing & Sales

This risk is related to the company's capacity to effectively and efficiently access current and potential customers. This risk can occur due to limited coal transportation

akibat keterbatasan kapasitas angkutan batubara yang mengangkut batubara Perusahaan dari Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan serta keterbatasan Perusahaan dari sisi regulasi yang berlaku. Pada tahun 2023, terdapat dua isu terkait penjualan batubara yang menjadi fokus yaitu risiko ketidaktercapaian volume penjualan batubara dan aturan terkait kompensasi DMO batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) yang belum terbit serta diimplementasikan.

Target volume penjualan batubara Perusahaan yang terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk memastikan dapat mencapai target tersebut, Perusahaan melakukan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan optimalisasi penjualan baik melalui angkutan batubara maupun skema penjualan lainnya dengan tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku;
b. Mengimplementasikan *operational excellence* dan koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meminimalkan kendala-kendala dalam pengangkutan batu bara;
c. Mendapatkan pelanggan baru untuk penjualan batu bara secara ekspor.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Batu bara Dalam Negeri, maka Perusahaan wajib memenuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan karena penjualan batu bara domestik menggunakan cap harga yang telah ditetapkan Pemerintah. Adanya kompensasi DMO batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat mendukung kinerja Perusahaan yang lebih baik. Untuk mendorong terbitnya peraturan mengenai kompensasi DMO batu bara, Perusahaan melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

4. Security Threat

Risiko ini terkait dengan tindakan individu atau kelompok yang mengancam operasional Perusahaan. Penambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi krusial bagi Perusahaan karena dapat mengancam operasional Perusahaan dan berdampak pada pengurangan cadangan batu bara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki Perusahaan. Atas ancaman tersebut, Perusahaan telah melakukan beberapa mitigasi diantaranya:

a. Melakukan pemantauan dan pengontrolan batas area tambang di wilayah IUP Perusahaan.
b. Melakukan pemantauan ancaman PETI di seluruh area IUP Perusahaan.
c. Melaporkan kegiatan PETI kepada Kepolisian dan KESDM serta upaya represif sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Melakukan Pemberdayaan masyarakat sekitar PETI dan para penambang PETI agar tidak melakukan penambangan tanpa izin di wilayah IUP PTBA.

capacity that transports the Company's coal from Tanjung Enim to Kertapati Barging Port and Tarahan Port as well as the Company's limitations in terms of applicable regulations. In 2023, there were two issues related to coal sales becoming the Company's focus, namely the risk of the inability to achieve coal sales volume and regulations regarding coal DMO compensation through Management Agency Partners (MIP) which have not yet been issued and implemented.

The Company's coal sales volume target continues to increase compared to previous years. To ensure the realization of the target, the Company made the following efforts:

a. Optimizing sales both through coal transportation and other sales schemes while remaining compliant with applicable regulations;
b. Implementing operational excellence and intensive coordination with PT Kereta Api Indonesia (Persero) to minimize obstacles in coal transportation;
c. Seek for new customers for export coal sales.

Based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 of 2022 concerning Domestic Coal Fulfillment, the Company is obliged to fulfill the Domestic Market Obligation (DMO) of 25% of the planned amount of coal production in the Work Plan and Budget Annual Fees. This is a challenge for the company because domestic coal sales use a price cap set by the government. The existence of coal DMO compensation through Management Agency Partners (MIP) can support better company performance. To encourage the issuance of regulations regarding coal DMO compensation, the Company carried out intensive coordination with relevant stakeholders.

4. Security Threats

This risk is related to individual or group actions that threaten the Company's operations. Mining Without a Permit (Penambangan Tanpa Izin / PETI) is crucial for the Company since it can threaten the Company's operations and have an impact on reducing coal reserves in the Mining Business License (Izin Usaha Pertambangan / IUP) area owned by the Company. Due to this threat, the Company has carried out several mitigations including:

a. Monitor and control mining area boundaries in the Company's IUP area.
b. Monitor PETI threats in all Company IUP areas.
c. Report PETI activities to the Police and ESDM Ministry as well as repressive efforts in accordance with applicable regulations.
d. Empower communities around PETI and PETI miners to prevent them from carrying out unauthorized mining near the PTBA IUP area.

5. *Capacity*

Risiko ini terkait dengan kapasitas yang tidak mencukupi atau yang melebihi sehingga mengancam kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan margin laba yang kompetitif. Terkait dengan risiko *capacity,* yang menjadi fokus PTBA adalah terkait kapasitas angkutan batubara yang berpotensi tidak dapat menunjang target penjualan di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena angkutan batu bara melalui Kereta Api menjadi moda angkutan utama Perusahaan untuk mengirim batubara ke Pelabuhan/ Dermaga untuk selanjutnya dikirim ke Pembeli.

Terkait risiko tersebut, Perusahaan melakukan beberapa upaya mitigasi, di antaranya:

a. Melakukan komunikasi dengan PT KAI untuk melakukan upaya pencegahan kejadian anjlokan di lingkup tanggung jawab PT KAI.
b. Memastikan ketersediaan asupan batu bara yang akan diangkut menggunakan Kereta Api dengan melakukan:
   - Memaksimalkan *rehandling* batu bara ke *live stockpile;*
   - Melakukan perawatan dan pembuatan AWR di jalan *hauling*.
c. Menjaga kehandalan CHF di tambang dan pelabuhan untuk memastikan kelancaran penanganan, pengiriman, dan pengapalan batu bara.
d. Melakukan koordinasi intensif untuk penjadwalan angkutan dan pengapalan dengan mempertimbangkan ketersediaan kargo batu bara dan kebutuhan pasar.
e. Mengupayakan alternatif pasokan listrik lain untuk mengoperasikan TLS dan melakukan koordinasi dengan PLN.

Dengan beberapa mitigasi yang dijalankan, risiko yang semula menjadi salah satu top risk pada awal tahun 2023 dapat menurun, sehingga target angkutan batu bara pada tahun 2023 dapat tercapai.

6. Perubahan Regulasi

Risiko ini terkait dengan hukum dan peraturan yang mengancam kemampuan Perusahaan untuk menjalankan transaksi, perjanjian, kontrak penting atau menerapkan strategi dan kegiatan spesifik lainnya. Terdapat perizinan yang dianggap krusial untuk didapatkan agar Perusahaan tetap dapat melakukan kegiatan operasional Penambangan sesuai dengan sekuen tambang yang sudah dijalankan. Izin tersebut terkait dengan pengalihan alur Air Kiahaan Tahap II, Lengi, dan Niru, dimana Perusahaan telah melakukan beberapa mitigasi di antaranya:

a. Menunjuk pihak ketiga/konsultan yang berkompeten untuk membuat kajian teknis, ekonomis dan lingkungan sebagai persyaratan permohonan perizinan.
b. Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
c. Mengajukan izin ke instansi terkait serta melakukan monitoring & *follow up*.

Indikator Risiko (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) merupakan ukuran yang digunakan sebagai indikator oleh suatu organisasi. KRI akan menjadi sebuah pemberitahuan dini apabila terjadi suatu perubahan

5. Capacity

This risk is related to insufficient or excess capacity, which threatens the Company's ability to generate competitive profit margins. Regarding capacity risk, PTBA's focus is related to coal transportation capacity which has the potential to not be able to support sales targets in 2023. This was caused by coal transportation via train is the Company's main mode of transportation to send coal to ports/barging port for further delivery to Buyer.

Regarding this risk, the Company has carried out several mitigation efforts, including:

a. Communicate with PT KAI to make efforts to prevent subsidence incidents within PT KAI's scope of responsibility.
b. Ensure the availability of coal stock to be transported by train by:
   - Maximizing coal rehandling to live stockpile;
   - Carry out maintenance and manufacture of AWR on hauling roads.
c. Maintain CHF reliability in mines and ports to ensure smooth handling, delivery, and shipment of coal.
d. Carry out intensive coordination for transportation and shipping scheduling by considering the availability of coal cargo and market needs.
e. Seek for alternative electricity supplies to operate TLS and coordinating with PLN.

With several mitigations implemented, the risk that was originally one of the top risks at the beginning of 2023 can be reduced and the coal transportation target in 2023 can be achieved.

6. Regulation Changes

These risks are related to laws and regulations that threaten the Company's ability to execute essential transaction, agreement and contract or implement other specific strategies and activities. There are permits that are considered crucial to obtain to help the Company carrying out mining operational activities in accordance with the mining sequence that has been carried out. This permit is related to the diversion of the Kiahaan Phase II, Lengi and Niru water channels, where the Company has carried out several mitigations, including:

a. Appoint competent third parties/consultants to carry out technical, economic, and environmental studies as requirements for licensing applications.
b. Complete the required documents.
c. Apply for permits to the relevant agencies and carry out monitoring & follow up.

Key Risk Indicator (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) is a measure used as an indicator by an organization. KRI will act as an early notification for a change in risk exposures for several aspects of a company. In

dari *risk exposures* untuk beberapa aspek pada sebuah perusahaan. Dalam hal ini, KRI dapat menjadi sebuah indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak atau kerugian di masa yang akan datang.

Adapun manfaat adanya KRI di antaranya:
1. Menentukan *early warning signal;*
2. Memudahkan dalam perhitungan *likelihood* dan *impact* suatu risiko;
3. Memudahkan manajemen dalam membuat program preventif, detektif, dan korektif.

Informasi yang didapatkan dari KRI memungkinkan *risk owner* untuk melakukan tindakan mitigasi lebih awal, sehingga dapat membantu mengurangi atau mencegah terjadinya risiko. Apabila suatu KRI masuk pada kategori *Red Flag* atau berada pada batas kritis, maka hal ini mengindikasikan bahwa risiko dapat terjadi dengan kemungkinan yang tinggi.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Tahun Buku 2023

Sepanjang tahun 2023, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja melalui kegiatan-kegiatan berikut:

Pada tahun 2023, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja dan dengan beberapa kegiatan penting, di antaranya:
1. Sertifikasi Kompetensi Pegawai Satker Manajemen Risiko
   Pada tahun buku 2023, telah dilakukan sertifikasi dalam rangka pengakuan kompetensi pegawai satuan kerja Manajemen Risiko diantaranya *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dan *Certified Risk Management Officer* (CRMO).
2. Pembangunan Budaya Risiko
   Untuk meningkatkan budaya sadar risiko di lingkungan Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun buku 2023 melakukan:
   a. *Executive Workshop* untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *leaders* (BOD-1);
   c. Pelatihan Manajemen Risiko untuk supervisor (BOD-4 struktural);
   d. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *Risk Officer*;
   e. FGD Manajemen Risiko untuk *Risk Officer*;
   f. *Risk Management Awards;*
   g. *Risk Culture Survey;*
   h. *Knowledge* Sharing/sosialisasi manajemen risiko untuk *Risk Officer* satuan kerja
   i. *Risk Awareness* melalui email, *banner*, dan/atau media lainnya.
3. Implementasi 4 *Eyes Principles.*
   PTBA telah mengimplementasikan 4 *Eyes Principles* dalam pengambilan keputusan proyek dan rencana strategis Perusahaan yaitu melakukan pengembilan keputusan dengan berdasarkan pertimbangan aspek bisnis dan aspek risiko.

this case, KRI can indicate the possibility of an impact or loss in the future.

The benefits of having a KRI include:
1. Determine early warning signal;
2. Help to calculate the likelihood and impact of a risk;

3. Help the management to create preventive, detective, and corrective programs.

Information obtained from KRI allows risk owners to take early mitigation actions as an effort to reduce or prevent risks from occurring. If a KRI is included in the Red Flag category or is at the critical limit, then it indicates that the risk can occur with a high probability.

Brief Report on the Implementation of Risk Management Work Unit Tasks in the 2023 Fiscal Year

Throughout 2023, the Risk Management Work Unit has implemented work programs through the following activities:

In 2023, the Risk Management Work Unit has carried out activities in accordance with the work program and with several important activities, including:
1. Risk Management Working Unit Employee Competency Certification
   In the 2023 financial year, certification has been carried out to recognize the competency of Risk Management work unit employees, including Certified Risk Management Professional (CRMP) and Certified Risk Management Officer (CRMO).
2. Establishing a Risk Culture
   To increase the risk awareness culture within the Company, the Risk Management Work Unit in the 2023 financial year carried out:
   a. Executive Workshop for the Board of Commissioners and Directors;
   b. Risk Management competency training and certification for leaders (BOD-1);
   c. Risk Management Training for supervisors (structural BOD-4);
   d. Risk Management competency training and certification for Risk Officers;
   e. Risk Management FGD for Risk Officers;
   f. Risk Management Awards;
   g. Risk Culture Survey;
   h. Knowledge sharing/socialization of risk management for work unit Risk Officers
   i. Risk Awareness via email, banners and/or other media.

3. Implementation of the 4 Eyes Principles.
   PTBA has implemented the 4 Eyes Principles in making project decisions and the Company's strategic plans, namely making decisions based on considering business aspects and risk aspects.

4. Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Anak & Afiliasi Perusahaan
   Manajemen berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko sampai dengan Anak dan Afiliasi Perusahaan (AAP). Satuan kerja Manajemen risiko berfungsi sebagai fasilitator bagi AAP untuk pendampingan penyusunan Pedoman Manajemen Risiko di AAP serta implementasinya. Tahun 2023 telah disahkan Pedoman Manajemen Risiko di 4 AAP PTBA.
5. Penyusunan RKAP 2024 Berbasis Risiko
   Tahun buku 2024 merupakan tahun keempat penyusunan RKAP berbasis risiko bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program kerja yang dijalankan oleh satuan kerja merupakan mitigasi dari risiko untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
6. Kajian Risiko Keputusan Strategis
   Komitmen Manajemen dalam penerapan manajemen risiko secara komprehensif membuat seluruh pengambilan keputusan strategis harus dilengkapi kajian risiko. Selama tahun buku 2023, satuan kerja Manajemen Risik telah menerbitkan kajian risiko diantaranya berupa Kajian Risiko, Memo Manajemen Risiko, verifikasi atas kajian risiko yang dibuat oleh satuan kerja maupun konsultan, dan nota dinas pendapat risiko.
7. Pelaksanaan Risk Culture Survey
   Dilakukan untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap 5 aspek yaitu *transparency, acknowledgement, responsiveness, respect* dan *operational.*

Laporan tentang Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko di Tahun 2023

Untuk memastikan efektivitas atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan, pada tahun 2023 dilakukan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Evaluasi atas pelaporan pengendalian risiko dan penilaian risiko satuan kerja yang dilakukan melalui aplikasi ERMA. Pelaporan dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja secara triwulanan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pemilik risiko hingga ke Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Audit Operasional berbasis risiko yang dilakukan oleh Satker SPI. Audit dilaksanakan salah satunya untuk melihat efektivitas dari pengendalian risiko yang dilaksanakan satuan kerja, dengan salah satu input dari proses audit yang dilakukan adalah risiko-risiko Satuan Kerja yang teregister di aplikasi ERMA.
3. Pelaporan kepada Direksi dan Komite Risiko Usaha mengenai risiko-risiko yang dihadapi baik secara korporasi maupun risiko dari proyek-proyek Strategis Perusahaan, termasuk mitigasi-mitigasi risiko yang perlu dilaksanakan.
4. Audit ISO atau standar kesisteman lainnya, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Dalam audit yang dilakukan, risiko menjadi salah satu aspek yang dinilai kesesuaiannya terhadap kriteria/standar audit yang digunakan.
5. Evaluasi implementasi manajemen risiko juga dilakukan melalui pelaksanaan audit *Balanced Scorecard* (BSC). Audit BSC dilaksanakan setiap triwulan untuk mengukur pencapaian sasaransasaran yang telah ditetapkan, baik dalam tingkat korporat maupun satuan kerja.

4. Assistance in the Implementation of Risk Management for Subsidiaries & Company Affiliates
   The management is committed to implement risk management up to Subsidiaries and Company Affiliates (AAP). The Risk Management work unit functions as a facilitator for AAP to assist in the preparation of Risk Management Guidelines in AAP and their implementation. In 2023, Risk Management Guidelines in 4 PTBA AAPs have been ratified.
5. The Preparation of the Risk-Based 2024 WP&B
   The 2024 financial year is the fourth year of preparing risk-based WP&B for the company. This shows that every work program carried out by the work unit is a risk mitigation to achieve the company's goals and objectives.
6. Strategic Decision Risk Assessment
   Management's commitment to implementing comprehensive risk management means that all strategic decision making must be accompanied by a risk assessment. During the 2023 financial year, the Risk Management work unit has published risk studies including Risk Studies, Risk Management Memos, verification of risk studies made by work units and consultants, and risk opinion service notes.
7. Implementation of Risk Culture Survey
   It is conducted to determine employee perceptions of 5 aspects, namely transparency, acknowledgment, responsiveness, respect, and operations.

Report on Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System in 2023

To ensure the effectiveness of the implementation of risk management in the Company, in 2023 several activities had been carried out including:

1. Evaluation of risk control reporting and work unit risk assessments carried out through the ERMA application. Reporting is carried out by all Work Units on a quarterly basis. Evaluation is carried out in stages from the risk owner to the Risk Management Work Unit.
2. Risk-based Operational Audit carried out by the Internal Audit Working Unit. One of the audits was carried out to review the effectiveness of the risk control carried out by the work unit, with one of the inputs from the audit process carried out being the risks of the Work Unit which were registered in the ERMA application.
3. Reporting to the Board of Directors and the Business Risk Committee regarding the risks faced both corporately and risks from the Company's Strategic projects, including risk mitigations that need to be implemented.
4. ISO audit or other system standards, both by internal and external auditors. In the audit carried out, risk is one of the aspects that is assessed for its suitability to the audit criteria/standards used.
5. Evaluation of risk management implementation is also carried out through the implementation of a Balanced Scorecard (BSC) audit. BSC audits are carried out quarterly to measure the achievement of predetermined targets, both at the corporate and work unit levels.

6. Perusahaan juga melakukan evaluasi atas kejadian-kejadian merugikan dalam bentuk *loss event* database. Pengelolaan *loss event* dilakukan di antaranya sebagai evaluasi efektivitas pengendalian risiko yang telah dilakukan dan sebagai indikasi level risiko yang terkait dengan masing-masing kejadian.

6. The company also evaluates adverse events in the form of a loss event database. Loss event management is carried out, among other things, as an evaluation of the effectiveness of the risk controls that have been implemented and as an indication of the level of risk associated with each event.

Rencana Penerapan atau Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2024

Perusahaan telah menyusun rencana kerja atas pelaksanaan Manajemen Risiko untuk tahun 2024, sebagai berikut:

Risk Management System Implementation or Development Plan for 2024

The Company has prepared a work plan for the implementation of Risk Management for 2024, as follows:

No	Program Kerja Work Plan	Waktu Pelaksanaan Time
Budaya & Kapabilitas Risiko Risk Culture & Capabilities		
1	Pelatihan manajemen risiko untuk organ Perusahaan sesuai ketentuan juknis Permen 02/2023. Risk management training for company organs in accordance with the technical guidelines of Ministerial Decree 02/2023.	TW I-TW II 1st Quarter-2nd Quarter
2	Pelatihan Manajemen Risiko untuk *Risk Owner*/JJ1. Risk Management Training for Risk Owners/JJ1.	TW III 3rd Quarter
3	Pelatihan Manajemen Risiko untuk Pegawai JJ 4 Fungsional. Risk Management Training for JJ 4 Functional Employees.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
4	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko untuk *Risk Officer.* Risk Management competency training and certification for Risk Officers	TW III 3rd Quarter
5	Pelatihan/workshop dan/atau sertifikasi kompetensi manajemen risiko untuk personel satuan kerja Manajemen Risiko. Training/workshop and/or risk management competency certification for Risk Management work unit personnel.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
6	Pelatihan/workshop personil manajemen risiko untuk memenuhi PDU. Training/workshop for risk management personnel to fulfill PDU.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
7	*Knowledge sharing* untuk *Risk Officer* baru. Knowledge sharing for new Risk Officer	TW I – TW II 1st Quarter-2nd Quarter
8	FGD Manajemen Risiko untuk *Risk Officer.* Risk Management FGD for Risk Officer.	TW IV 4th Quarter
9	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen risiko untuk Anak Afiliasi Perusahaan (AAP). Risk Management Training and Certification for Affiliated Companies (APA).	TW III 3rd Quarter
10	*Workshop, training* dan/atau sosialisasi Manajemen risiko untuk Anak Afiliasi Perusahaan (AAP). Workshop, training, and/or socialization of risk management for Company Affiliated Subsidiaries (AAP).	TW IV 4th Quarter
11	Webinar Manajemen Risiko dengan pembicara eksternal Risk Management Webinar with external speakers	TW I 1st Quarter
12	*Risk Culture Survey*	TW III 3rd Quarter
13	*Risk Management Awards*	TW IV 4th Quarter
14	*Risk Awareness* melalui email, *banner*, dan/atau media lainnya. Risk Awareness through email, banner, and/or other media	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
Organisasi & Tata Kelola Risiko Organization & Risk Governance		
1	Rapat koordinasi dengan MIND ID. Coordination Meeting with MIND ID.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
2	Rapat koordinasi dengan Direksi dan/atau Komisaris. Coordination meeting with Directors and/or Commissioners.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
3	Pembaharuan dokumen pedoman/kebijakan dan/atau prosedur manajemen risiko sesuai tata kelola dan peraturan yang berlaku. Update guidance documents/policies and/or risk management procedures in accordance with applicable governance and regulations.	TW I – TW II 1st Quarter-2nd Quarter
Kerangka Risiko & Kepatuhan Risk & Compliance Framework		
1	Pelaksanaan Asesmen *Risk Maturity Index* (RMI) Implementation of Risk Maturity Index (RMI) Assessment	TW III 3rd Quarter
2	Penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko (Top Risk) 2025. Preparation of Risk Strategy and Risk Profile (Top Risk) in 2025.	TW III – TW IV 3rd Quarter-4th Quarter
3	Pendampingan penyusunan RKAP berbasis risiko. Assistance in preparing risk-based WP&B.	TW II – TW III 2nd Quarter-3rd Quarter

No	Program Kerja Work Plan	Waktu Pelaksanaan Time
Proses & Kontrol Risiko Process and Risk Control		
1	Melakukan penyusunan Profil Risiko Korporat dan Proyek Strategis serta updating KRI seluruh risiko korporat. Preparing Corporate Risk Profiles and Strategic Projects as well as updating KRI for all corporate risks.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
2	Penyusunan kajian risiko untuk mendukung keputusan strategis manajemen. Preparation of risk studies to support strategic management decisions.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
3	Monitoring tindak lanjut rekomendasi pengendalian risiko strategis. Monitoring the follow-up to strategic risk control recommendations.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
4	Monitoring pengendalian risiko operasional on site. Monitoring operational risk control on site.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
5	Pelaksanaan training/workshop kepada anggota tim BCP. Implementation of training/workshops for BCP team members.	TW II 2nd Quarter
6	Sosialisasi dan pendampingan simulasi BCM/BCP di area *supply chain* secara periodik. Periodic socialization and assistance with BCM/BCP simulations in the supply chain area.	TW II 2nd Quarter
7	Pendampingan pelaporan manajemen risiko di satuan kerja. Assistance with risk management reporting in work units.	TW II 2nd Quarter
8	Monitoring pengendalian risiko setiap triwulan sesuai jadwal. Monitoring risk control every quarter according to schedule.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
9	Evaluasi/ updating risk register satker dan korporat secara periodik. Periodically evaluate/update the working unit and corporate risk register.	TW I – TW IV 1st Quarter-4th Quarter
10	Pendampingan /fasilitasi penyusunan dokumen profil risiko korporat Anak Afiliasi Perusahaan. Assistance/facilitation in the preparation of corporate risk profile documents for the Company's Affiliated Subsidiaries.	TW I- TW IV 1st Quarter-4th Quarter
Model, Data & Teknologi Risiko Model, Risk Data & Technology		
1	Maintenance aplikasi ERMA. ERMA application maintenance	TW I- TW IV 1st Quarter-4th Quarter
2	Pengembangan ERMA untuk *dashboard, loss event management* dan kebutuhan lainnya. The development of ERMA for dashboard, loss event management, and other needs.	TW I- TW IV 1st Quarter-4th Quarter

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Manajemen Risiko

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan, Manajemen berkomitmen dalam implementasi manajemen risiko di Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia secara periodik melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pembahasan yang dilakukan di antaranya mengenai perkembangan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan, risiko-risiko utama (*top risk*) yang dihadapi Perusahaan, baik pada level korporasi maupun proyek-proyek strategis Perusahaan, beserta mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan, serta rencana dan realisasi program kerja Manajemen Risiko.

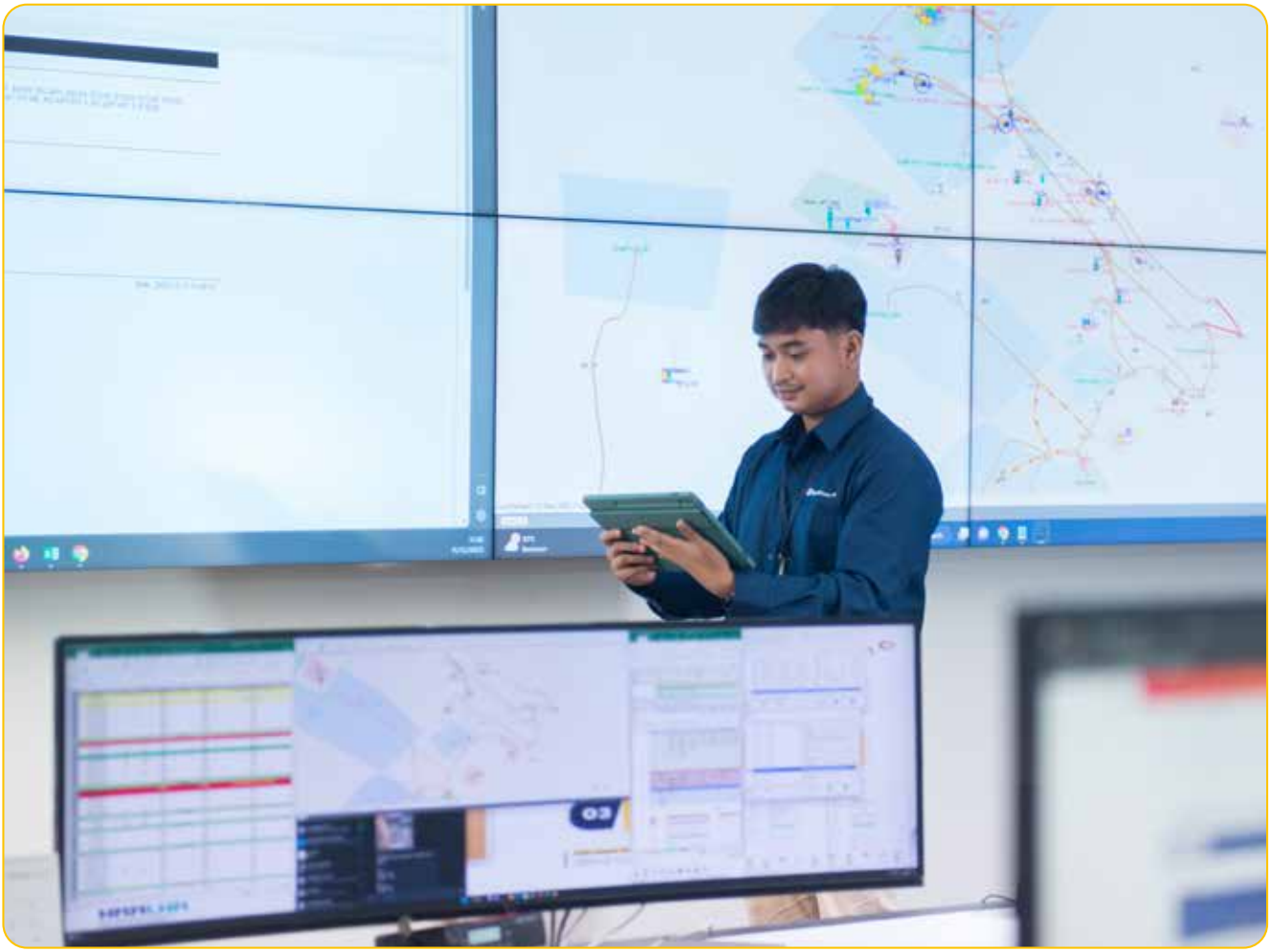
Pada tahun 2023, secara umum Manajemen menilai sistem manajemen risiko di PTBA telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut di antaranya dibuktikan dengan diperolehnya berbagai penghargaan yang terkait dengan kematangan pengelolaan risiko di Perusahaan.

Statement of Board of Directors and/ or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of Risk Management System

In order to achieve the Company's goals that have been set, the Management is committed to apply risk management in the Company. Board of Directors and Board of Commissioners through Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development Committee periodically hold discussions with Risk Management Work Unit. The discussions carried out included the development of the Company's internal and external issues, the top risks faced by the Company, both at corporate level and strategic projects, along with the mitigations, as well as Risk Management work program plans and realization.

In 2023, in general, the Management considers that the risk management system at PTBA has been implemented properly, this was shown by various awards received by PTBA related to the maturity of risk management in the Company.

Teknologi Informasi
Information Technology



Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan Perusahaan dalam usaha pertambangan yang terus berkembang. TI yang efektif, kompeten dan tepat akan mampu mendorong pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dalam Perusahaan menjadi semakin efektif dan efisien, juga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam proses bisnis yang cepat berubah. Keberadaan TI di Perusahaan juga digunakan dalam mendukung digitalisasi proses bisnis perusahaan.

Perusahaan senantiasa melibatkan teknologi terkini untuk dapat menjangkau aset-aset vital, meningkatkan efisiensi dan produksi, serta menekan serendah mungkin dampak buruk aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dalam setiap prosesnya, sehingga memudahkan dan mempercepat proses bisnis, terutama yang berkaitan dengan analisis data dan pelaporan dalam skala korporat.

Information Technology (IT) is one of the key aspects needed by the Company in the ever-growing mining business. Competent and accurate IT can encourage more effective and efficient management and decision-making within the Company, thereby strengthening its competitive position in rapidly changing business processes. This also applies when IT is used to support the development of resulting systems, namely e-commerce, e-business, or other business activities.

The company always involves the latest technology to reach vital assets, increase efficiency and production, and reduce as low as possible the negative impact of mining activities on the environment in every process, thereby facilitating and speeding up business processes, especially those related to data analysis and reporting on a corporate scale.

Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Pengembangan TI

Dalam mendukung penerapan TI di Perusahaan, Bukit Asam telah menyusun dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan TI dengan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER- 2/MBU/03/2023, yang antara lain berisikan:

1. Penyelarasan program kerja TI dengan kebutuhan satuan kerja dan anak perusahaan;
2. Pembentukan IT *Shared Services* Unit untuk melayani satuan kerja dan anak perusahaan;
3. Optimalisasi teknologi informasi yang ada saat ini dalam sisi integrasi, fungsionalitas, dan tata kelola;
4. Transformasi *Digital Operational* untuk mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dalam pengembangan Industri 4.0;
5. Melakukan *Continuous Improvement* sebagai usaha atau upaya berkelanjutan untuk peluang perbaikan.

Satuan Kerja Teknologi Informasi

Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah unit kerja yang akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan dan pengembangan TI di PTBA. Satuan kerja ini berada di Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko serta bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Satuan Kerja TI di PTBA memiliki peran untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas serta meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan melalui simplifikasi, digitalisasi, integrasi, dan otomotisasi guna menciptakan nilai tambah di setiap aspek bisnis Perusahaan dan Anak/Afiliasi Perusahaan. Satuan Kerja Teknologi Informasi juga berperan sebagai mitra strategis serta mendukung transformasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk menjadi Perusahaan Energi Kelas dunia yang Peduli Lingkungan.

IT Management and Strategic Policies Development

In supporting the implementation of IT in the Company, Bukit Asam has prepared and established strategic IT management policies by referring to SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, which contains:

1. Alignment of IT work programs with the needs of work units and subsidiaries;
2. Formation of an IT Shared Services Unit to serve work units and subsidiaries;
3. Optimizing existing information technology in terms of integration, functionality, and governance;
4. Digital Operational Transformation to support the Company's Long-Term Plan in the development of Industry 4.0;
5. Carry out Continuous Improvement as an ongoing business or effort for improvement opportunities.

Information Technology Work Unit

This work unit will be responsible for all IT Management and development activities in the PTBA. This work unit under the directorate of Finance and Risk Management which responsibility to Director of Finance and Risk Management.

The IT Work Unit at PTBA is responsible to increase productivity, efficiency and effectiveness as well as minimizing the risks faced by the company through simplification, digitalization, integration, and automation in order to create added value in every aspect of the Company's and the Company's Subsidiaries/Affiliates' business. The Information Technology Work Unit also acts as a strategic partner and supports the transformation of the Company's business development to become a world-class Energy Company that Cares about the Environment.

Struktur Satuan Kerja Teknologi Informasi
Structure of Information Technology Work Unit



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perusahaan, Satuan Kerja TI menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujud dan terlaksananya secara konsisten budaya dan sikap kerja yang baik di Perusahaan yang berpedoman pada kaidah-kaidah Tata Kelola Korporasi yang baik (Good Corporate Governance) dan Tata Kelola TI yang baik (IT Governance).
2. Agar setiap praktik yang berhubungan dengan penggunaan/pemanfaatan Teknologi Informasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
3. Agar pelaksanaan Teknologi Informasi dilakukan secara efesien, efektif, transparan, adil, wajar, dan akuntabel untuk mendukung proses bisnis PT Bukit Asam Tbk.
4. Terwujudnya operasional Teknologi Informasi yang efesien dan efektif.
5. Menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Teknologi Informasi dengan cepat dan tepat.

Visi dan Misi

Visi

Teknologi informasi berperan sebagai mitra strategis dan mendukung transformasi pengembangan bisnis Perusahaan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Misi

1. Penyelarasan program kerja TI dengan kebutuhan Satuan Kerja
2. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses bisnis perusahaan melalui digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi operasional dan informasi.
3. Menetapkan fungsi IT Shared Service untuk melayani Satuan Kerja dan Anak Afiliasi Perusahaan (AAP)
4. Melakukan peningkatan dan optimalisasi Arsitektur Teknolgi Informasi berupa solusi bisnis (aplikasi/ digitalisasi), infrastruktur dan jaringan serta keamanan dan tata kelola.

In carrying out its duties and functions in the company, the IT Work Unit implements Good Corporate Governance (GCG) as regulated in the Minister of SOEs Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises with the aim of as following:

1. The realization and consistent implementation of a good work culture and attitude in the Company which is guided by the principles of Good Corporate Governance and good IT Governance.
2. Every practice related to the use/utilization of Information Technology must follow established procedures.
3. The implementation of Information Technology must be carried out efficiently, effectively, transparently, fairly, and accountably to support the business processes of PT Bukit Asam Tbk.
4. Realization of efficient and effective Information Technology operations.
5. Establish appropriate procedures to resolve Information Technology problems quickly and precisely.

Vision and mission

Vision

Information Technology works as a strategic partner and supports the transformation of the Company's business development to become a world-class energy company that cares about the environment.

Mission

1. Alignment of IT work programs with Work Unit needs.
2. Increase the effectiveness and efficiency of the company's business processes through digitalization by utilizing operational and information technology.
3. Determine the IT Shared Service function to serve The Company's Affiliated Subsidiaries, Sub Subsidiaries, and Work Units (AAP).
4. Improve and optimize the Information Technology Architecture in the form of business solutions (applications/ digitization), infrastructure and networks as well as security and governance.



PENGEMBANGAN DAN LAYANAN APLIKASI
APPLICATION DEVELOPMENT AND SERVICES

STRATEGI STRATEGY	TARGET
Enhancement CISEA Apps Existing	Triwulan 4 Quarter 4
CISEA New Apps Development	Triwulan 4 Quarter 4
Automatic Data Feeder	Triwulan 4 Quarter 4
Middleware Tools Integration	Triwulan 4 Quarter 4
Assessment Pre-Implementation SAP	Triwulan 2 Quarter 2
Business Analytics Development	Triwulan 4 Quarter 4

Program Strategis Tahun 2023
Strategic Program in 2023

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

STRATEGI STRATEGY	TARGET
Upgrade Microsoft Infrastructure	Triwulan 4 Quarter 4
Pembangunan Tower Jaringan Network Tower Construction	Triwulan 4 Quarter 4
Replacement Core Switch	Triwulan 4 Quarter 4
Refreshment Storage and Storage CCTV	Triwulan 4 Quarter 4
Managed Network Service	Triwulan 2 Quarter 2

TATA KELOLA TI
IT GORVERNANCE

STRATEGI	TARGET
Pelaksanaan IT Awareness Pelaksanaan IT Awareness	Triwulan 2 & Triwulan 4 Quarter 2 & Quarter 4
IT Maturity Assessment	Triwulan 4 Quarter 4
Pelaksanaan Simulasi Table Top DRP Implementation of Table Top DRP Simulation	Triwulan 2 & Triwulan 4 Quarter 2 & Quarter 4

Tata Kelola TI

PTBA berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan secara konsisten. Melalui penerapan Tata Kelola diharapkan aktivitas TI di Perusahaan dapat berjalan maksimal dalam mendukung pencapaian Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasional, permasalahan terkait TI juga menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, diantaranya permasalahan berkaitan dengan penanganan gangguan (*disruption*), keamanan siber (*cyber security*), dan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Adapun penanganan yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Penanganan Gangguan (*Disruption*)
   Penanganan gangguan di PTBA menerapkan *service desk* untuk menyediakan bantuan terkait teknologi informasi bagi seluruh satuan kerja meliputi identifikasi masalah, pencatatan/logging, manajemen insiden/masalah, serta evaluasi dan *reporting*. Semua keluhan user berkaitan dengan gangguan layanan TI akan dilaporkan melalui service desk untuk dicatat, dieskalasi ke masing-masing PIC/spesialis/administrator untuk ditindaklanjuti sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang telah disepakati.

IT Governance

PTBA is committed to consistently implement Information Technology (IT) Governance in the Company. With IT Governance, IT activities at the Company are expected to run optimally in supporting the Company's achievements. In carrying out operational activities, IT-related problems are also one of the risks faced by the Company, including problems related to handling disruptions, cyber security and disaster recovery. The company's handling of this problem is as follows:

1. Disruptions Handling
   Handling disruptions at PTBA involves implementing a service desk to provide assistance related to information technology for all work units, including problem identification, logging, incident/problem management, as well as evaluation and reporting. All user complaints related to IT service disruptions will be reported through the service desk for logging, escalated to respective PICs/specialists/administrators for follow-up according to the agreed Service Level Agreement (SLA).

2. Keamanan Siber (Cyber Security)
   Untuk memastikan keamanan siber (*cyber security*) seluruh infrastruktur jaringan PTBA telah dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya serangan siber dijaringan PTBA dan terpantau dalam teknologi SIEM (*Security Information and Event Management*), selain itu PTBA juga rutin melakukan *vulnerability assessment and penetration testing* untuk mencari potensi celah keamanan serta cara untuk mengatasi celah keamanan tersebut.

3. Pemulihan Bencana
   Untuk menunjang ketersediaan (*availability*) dan keberlangsungan (*continuity*) layanan TI, Satuan kerja TI telah mengimplementasikan IT *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang merupakan bagian dari BCMS sebagai pedoman untuk dapat secara efektif menjaga keberlangsungan layanan TI penunjang proses bisnis kritikal pada kondisi bencana.

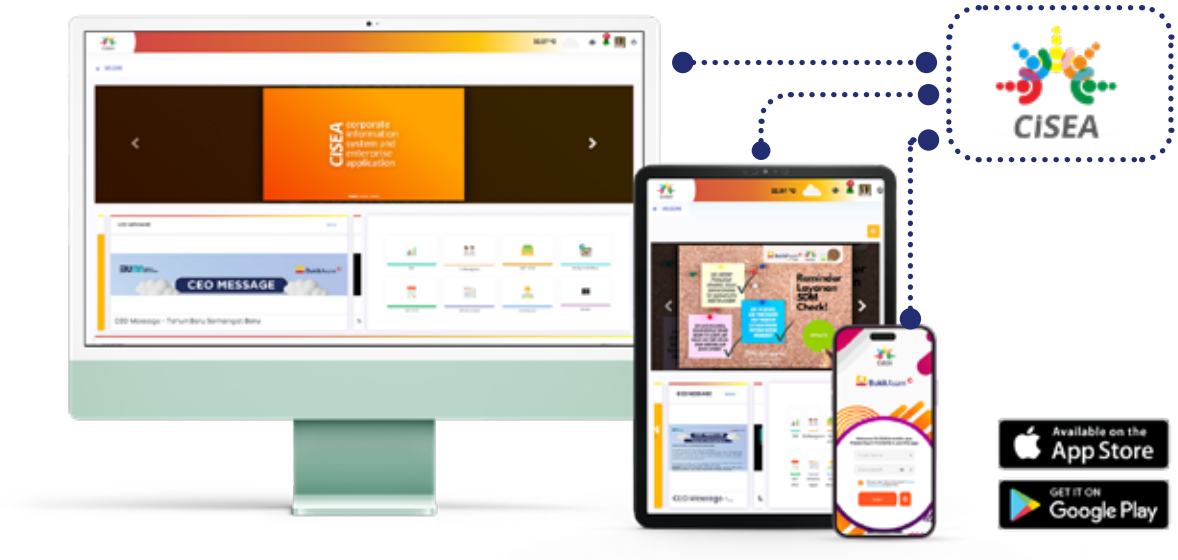
Terhadap permasalahan Risiko TI yang akan dihadapi, Perusahaan telah melakukan upaya penanganan dengan cara melakukan identifikasi terhadap risiko utama dan selanjutnya melakukan pengelolaan terhadap risiko yang telah diidentifikasi melalui tindakan-tindakan mitigasi guna menghilangkan atau meminimalisir risiko yang akan terjadi. Keseluruhan proses Tata Kelola TI termasuk penanganan atas permasalahan yang dihadapi, secara berkala dilaporkan kepada Direksi untuk dimonitor dan dievaluasi.

2. Cyber Security
   To ensure cybersecurity, PTBA has equipped its entire network infrastructure with advanced technologies to detect and prevent cyber attacks. This infrastructure is monitored through Security Information and Event Management (SIEM) technology. In addition, PTBA regularly conducts vulnerability assessments and penetration testing to identify potential security loopholes and methods to address them.

3. Disaster Recovery
   To support the availability and continuity of IT services, the IT work unit has implemented an IT Disaster Recovery Plan (DRP) as part of the Business Continuity Management System (BCMS). This plan serves as a guideline to effectively maintain the continuity of IT services supporting critical business processes during disaster conditions.

Regarding the IT problems faced, the Company continues to handle it by identifying the main risks, then managing the risks through mitigation actions to eliminate or minimize the risks. The entire IT Governance process, including problems troubleshooting, is regularly reported to the Board of Directors for monitoring and evaluation.

Corporate Information System and Enterprise Application (CISEA)



CISEA adalah singkatan dari Corporate Information System and Enterprise Application merupakan Super-Apps milik PTBA yang dikembangkan secara mandiri untuk mendukung produktifitas dalam melakukan aktivitas proses bisnis yang terintegrasi dengan semua komponen penyusunnya seperti informasi seputar ke-SDM-an, *supply chain management*, finansial, hingga informasi pribadi pegawai. Melalui aplikasi ini, user juga dapat mengakses informasi yang terupdate seputar PTBA. Dengan desain antarmuka yang menarik yang akan memanjakan user aplikasi ketika menggunakan aplikasi ini.

Terdapat 5 Modul utama yang berisi banyak menu/aplikasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing pegawai. Aplikasi CISEA tersedia dalam bentuk *web-application* juga dalam bentuk mobile application berbasis android maupun ios.

1. **Cisea-Executive Support**
   Pada modul ini hanya terdapat satu modul aplikasi yaitu modul EIS (Executive Information System) yang menampilkan data Produksi, Angkutan, Penjualan, Keuangan dan SDM secara realtime untuk membantu para executive dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

2. **Cisea-Human Capital**
   Kategori Cisea terkait human capital memiliki sebanyak 23 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:

   a. **Absensi**: Modul yang digunakan oleh seluruh pegawai PTBA untuk absensi digital dengan penggunaan deteksi lokasi dan upload gambar sebagai evidence.
   b. **SPBA (Serikat Pekerja Bukit Asam)**: modul yang digunakan untuk mengakses informasi seputar kegiatan serika pegawai serta berdiskusi.
   c. **B-Pedia (Bukit Asam Pedia**): modul yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai PTBA untuk mengakses informasi dan pengetahuan seputar kesumberdayaan manusia dalam perusahaan berbentuk artikel serta ruang diskusi.
   d. **MCU (Medical Check Up):** modul yang digunakan oleh seluruh pegawai untuk digitalisasi pelaksanaan MCU bagi pegawai dan keluarga seperti penjadwalan dan akses hasil pemeriksaan.

3. **Cisea-Supply Chain**
   Kategori Cisea terkait rantai pasokan memiliki sebanyak 25 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. **MAPO (Map Operation)**: modul yang digunakan untuk monitoring kondisi operasional aktivitas penambangan dan alat penunjang tambang secara real time melalui tampilan map.

CISEA stands for Corporate Information System and Enterprise Application, which is a Super-App owned by PTBA developed internally to support productivity in conducting integrated business process activities with all of its constituent components, including information related to human capital, supply chain management, financials, and employee personal information. Through this application, users can also access updated information about PTBA. It features an attractive interface design to enhance user experience.

There are 5 main modules containing numerous menus/ applications that can be used according to the needs and access rights of each employee. The CISEA application is available in the form of a web application as well as a mobile application for both Android and iOS platforms.

1. **Cisea-Executive Support**
   This module consists of one application module: the Executive Information System (EIS), which displays real-time data on Production, Transportation, Sales, Finance, and HC to assist executives in making quick and accurate decisions.

2. **Cisea-Human Capital**
   The Human Capital category in Cisea includes a total of 23 application modules. Some of the main modules in this category are:

   a. **Attendance:** Used by all PTBA employees for digital attendance, with location detection and image upload as evidence.
   b. **SPBA (Bukit Asam Workers Union):** Used to access information about employee union activities and discussions.
   c. **B-Pedia (Bukit Asam Pedia):** Available to all PTBA employees for accessing information and knowledge about human resources within the company in the form of articles and discussion rooms.
   d. **MCU (Medical Check-Up):** Used by all employees for digitizing the implementation of medical check-ups for employees and their families, including scheduling and accessing examination results.

3. **Cisea-Supply Chain**
   The Supply Chain category in Cisea includes a total of 25 application modules. Some of the main modules in this category are:
   a. **MAPO (Map Operation):** Used for monitoring the operational conditions of mining activities and supporting mining equipment in real-time through map displays.

b. **SHE (Safety, Helath, and Environment) News**: modul untuk akses informasi terupdate seputaran K3 di PTBA.

c. **Angkutan KA**: modul yang digunakan untuk reporting dan monitoring proses pengangkutan batu bara, mulai dari pengisian, pembongkaran, dan monitoring integrasi dengan kereta api batu bara KAI.

d. **EPA (Equipment Performance Analysis)**: modul yang digunakan untuk reporting dan monitoring performa seluruh jenis perlatan penambangan mencakup jam jalan, hambatan, dan ritase yang dilaporkan setiap *shift*.

4. **Cisea-Finance & Accounting**
   Kategori Cisea terkait keuangan dan akuntasi memiliki sebanyak 7 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. **Budgeting**: modul yang digunakan oleh seluruh satuan kerja di PTBA untuk melakukan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) mencakup biaya umum dan biaya investasi.
   b. **Royalty**: modul untuk pengelolaan proses pembayaran royalti batu bara mencakup pengajuan draft pembayaran, perhitungan besaran *royalty*, penerbitan sertfikat, dan upload bukti pembayaran *royalty*.

5. **Cisea-Corporate Services**
   Kategori Cisea terkait corporate services memiliki sebanyak 21 modul aplikasi. Adapun beberapa modul utama pada kategori ini antara lain:
   a. **SPEND**: modul untuk mendukung proses bisnis pengadaan mencakup vendor management
   b. **AMS (Audit Management System)**: modul manajemen sistem audit yang ada di PTBA mencakup perencanaan, pelaksanaan audit, pemeriksaan, dan laporan akhir.
   c. **CISEA Care**: modul yang dapat digunakan oleh seluruh ppegawai PTBA sebagai *one-stop-services* dalam pengajuan layanan umum, layanan satuan pengawasan internal, layanan manajemen risiko, dan layanan optimasi operasi produksi.
   d. **ERMA (Enterprise Risk Management**): modul yang digunakan untuk melapor dan memonitor pengelolaan risiko oleh setiap satuan kerja di PTBA.
   e. **GCG (Good Corporate Governance)**: modul untuk internalisasi prinsip-prinsip GCG kepada seluruh pegawai PTBA mencakup informasi sosialisasi dan capaian GCG serta *code of conduct* pegawai.

b. SHE (Safety, Health, and Environment) News: This module provides access to updated information regarding Occupational Health and Safety (OHS) at PTBA.

c. Railway Transportation: This module is used for reporting and monitoring the coal transportation process, including loading, unloading, and integration monitoring with the Indonesian State Railway's coal trains.

d. EPA (Equipment Performance Analysis): This module is used for reporting and monitoring the performance of all types of mining equipment, including operating hours, downtime, and haulage reported every shift.

4. Cisea-Finance & Accounting
The Finance and Accounting category in Cisea includes a total of 7 application modules. Some of the main modules in this category are:
a. **Budgeting:** Used by all units in PTBA to submit the Company Budget Work Plan (WP&B), covering general and investment costs.

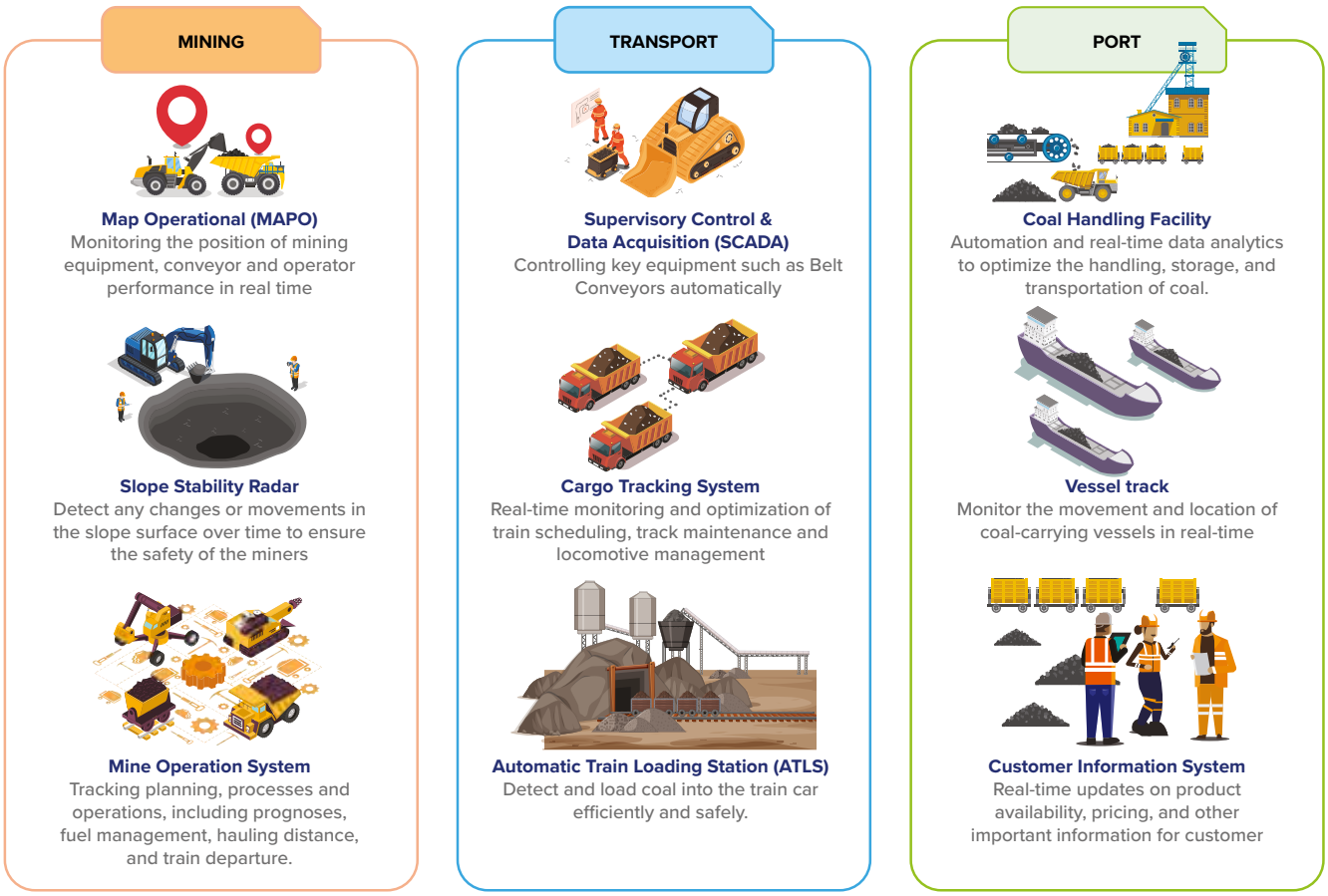
b. **Royalty:** Manages the coal royalty payment process, including draft payment submission, royalty calculation, certificate issuance, and royalty payment evidence upload.

5. Cisea-Corporate Services
The Corporate Services category in Cisea includes a total of 21 application modules. Some of the main modules in this category are:
a. **SPEND**: Supports procurement business processes, including vendor management.
b. **AMS (Audit Management System):** Manages the audit system at PTBA, including planning, audit execution, inspection, and final reporting.
c. **CISEA Care:** Can be used by all PTBA employees as a one-stop-service for general services, internal audit services, risk management services, and production operation optimization services.

d. **ERMA (Enterprise Risk Management):** Used to report and monitor risk management by each unit in PTBA.

e. **GCG (Good Corporate Governance):** A module for internalizing GCG principles to all PTBA employees, including information dissemination, GCG achievements, and employee code of conduct.

Digitalisasi Proses Pertambangan Secara Berkesinambungan
Continuous Digitalization of Mining Processes



PTBA mengadopsi teknologi terkini dan mengintegrasikan antara *operation technology* (OT) dengan *information technology* (IT) dalam satu platform yaitu CISEA. Pemanfaatan OT dalam menunjang operasional tambang dari hulu ke hilir terdiri dari modul MAPO (*Map Operational*), *Slope Stability Radar,* dan *Mine Operation System* pada proses penambangan batu bara, lalu dengan modul SCADA (*Supervisory Control & Data Acquisition*), *Cargo Tracking System,* dan Automatic Loading Station untuk transportasi angkutan, serta modul *Coal Handling Facility, Vessel Track,* dan *Customer Information System* untuk proses bisnis batu bara yang terdapat di dermaga dan pelabuhan PTBA.

Pengembangan Kompetensi SDM TI

Satuan Kerja Teknologi Informasi berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. Untuk menunjang hal tersebut, Perusahaan juga turut meningkatkan kualitas SDM Satuan Kerja Teknologi Informasi dengan mengikutsertakan pada program pengembangan kompetensi. Di mana program tersebut berupa pelatihan yang bersifat teknis maupun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait perkembangan teknologi terkini.

PTBA adopts the latest technology and integrates Operation Technology (OT) with Information Technology (IT) into a single platform called CISEA. The utilization of OT supports mining operations from upstream to downstream, consisting of modules such as MAPO (Map Operational), Slope Stability Radar, and Mine Operation System for coal mining processes. Additionally, OT modules include SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition), Cargo Tracking System, and Automatic Loading Station for transportation logistics. Furthermore, modules like Coal Handling Facility, Vessel Track, and Customer Information System are utilized for coal business processes at PTBA's docks and ports.

IT HC Competency Development

The Information Technology Work Unit is committed to provide maximum benefits in supporting the achievement of the Company's Vision and Mission. To support this, the Company improves the quality of HC in the Information Technology Work Unit by participating in competency development programs in the form of technical training as well as to increase knowledge and insight regarding the latest technological developments.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh SDM Satuan Kerja Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Data Scientist
2. *Product Management*
3. *Business Intelligent*
4. *ESTIM Enterprise Architechture*
5. *Awareness ISO 20000*
6. *Awareness ISO 27000*
7. *Pentaho Data Integration Training*
8. *Information Security Advance*
9. *Border Gateway Protocol (BGP) Advance*

The competency development programs participated in by the HC Information Technology Work Unit are as follows:

1. Data Scientist
2. Product Management
3. Business Intelligence
4. ESTIM Enterprise Architecture
5. ISO 20000 awareness
6. ISO 27000 awareness
7. Pentaho Data Integration Training
8. Information Security Advance
9. Border Gateway Protocol (BGP) Advanced

Investasi Pengelolaan dan Pengembangan TI

PTBA menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan TI dapat membawa Perusahaan mencapai akselerasi perkembangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Maka dari itu, Perusahaan senantiasa melakukan investasi di bidang TI, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan teknologi untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan produktif.

Di tahun 2023, Perusahaan telah menganggarkan investasi di bidang TI sebesar Rp11.648.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp11.375.000.000,- atau mencapai 98% dari anggaran yang telah ditetapkan Perusahaan.

IT Management and Development Investment

PTBA understands that optimizing IT utilization can help the Company to achieve accelerated development and sustainable business growth. Therefore, the Company continues to invest in the IT sector, as a form of the Company's commitment to managing and developing technology to create more effective, efficient, and productive business processes.

In 2023, the Company has budgeted investment in the IT sector of Rp11.648.000.000,- with a realization of Rp11.375.000.000,- or reaching 86% of the budget set by the Company.

Realisasi Biaya Investasi Pengembangan TI Tahun 2023
Realization of IT Development Investment Costs in 2023

No	Uraian Description	Biaya Cost
1	Pembangunan Tower Jaringan Data Construction of Data Network Tower	1.203.000.000
2	Refreshment Core Switch Hub	1.318.000.000
3	Pembangunan Display Monitoring Informasi Development of Information Monitoring Displays	3.961.000.000
4	Middleware Data Integration Middleware Data Integration	3.975.000.000
5	Pembangunan Interactive Monitoring Meeting Room Development of Interactive Monitoring Meeting Room	900.000.000

Pencapaian Tata Kelola TI di Tahun 2023

Salah satu bentuk keberhasilan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan TI adalah dengan diperolehnya berbagai penghargaan di bidang TI. Di tahun 2023, Perusahaan berhasil memperoleh penghargaan di bidang TI, yakni sebagai berikut:

IT Governance Achievements in 2023

One form of the Company's success in managing and developing IT is by obtaining various awards in the IT field. In 2023, the Company succeeded in receiving awards in the IT sector, namely as follows:

No	Jenis Penghargaan Type of Award	Diberikan Oleh Awarded by	Tahun Year
1	Top Digital Implementation – Level 5 Star	Top Digital Awards	2023
2	Top Leader on Digital Implementation	Top Digital Awards	2023
3	Golden Star – Trophy (Three Times Consecutive Win Level 5 Star)	Top Digital Awards	2023
4	Best Overall Indonesia Innovation and Achievement 2023 (Mining Industry)	Business Asia Indonesia	2023
5	Best Digital Technology and IOT Implementation 2023 (Mining Industry)	Business Asia Indonesia	2023
6	Best CEO Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023	Business Asia Indonesia	2023
7	Best Senior Executive Indonesia Innovation and Achievement of The Year 2023	Business Asia Indonesia	2023

Rencana Pengembangan TI ke Depan
Future IT Development Plans

		2023	2024	2025
PT BUKIT ASAM	Analytics	• Implementation of BATIC through data integration from all PTBA Members	• BATIC enhancement with What-If scenario and predictive analysis	• Integrating external information and self-learning autonomous operations trough Artificial Intelligence
	CISEA	• CISEA Facelift Assessment	• CISEA Facelift Implementation (Phase 1) • CISEA Integration with SAP	• CISEA Facelift Implementation (Phase 2) • CISEA Integration with SAP
	ERP	• SAP Assessment	• SAP Implementation (Phase 1)	• SAP Implementation (Phase 2)
	Operation Technology	• Fleet Tracking Management System • Mine Water Pump Automation System	• Super Map Implementation	• Autonomous Mine Operations
	Infrastructure	• LTE Network (signal coverage) on Mining Area Assessment	• LTE Network (signal coverage) on Mining Implementation	
	Digital Mining Strategy			
	• IT & Data Governance • Enterprise Architecture • Developmnet, Security, Operation (DevSecOp) • Private & Hybrid Cloud • Managed Cyber Security Services • IT Infrastructure Automation			

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pada tahun 2023, PTBA tidak memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja ataupun program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (*Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program*). Namun demikian, perusahaan melakukan investasi sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa tugas belajar kepada pegawai perusahaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM PTBA. Pegawai yang telah menjalani tugas belajar wajib kembali bekerja kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam kontrak tugas belajar.

Performance Based Long-Term Compensation Policy

In 2023, PTBA did not have a policy of providing long-term performance-based compensation or a stock ownership program by employees and/or management implemented by the company (Employee Stock Ownership Program/ Management Stock Ownership Program). However, the Company invests to human capital by granted scholarship for the employees, this aims to enrich the quality of PTBA's human capital. The employees who got scholarship from the company and have graduated are required to work at the Company in accordance with the duration mentioned in the contract.

Perkara Hukum
Lawsuit

Selama tahun 2023, terdapat beberapa perkara penting berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan:

In 2023, there were several important cases related to legal issues faced by the Company:

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
1.	Perkara TUN No. 152/G/2022/PTUN. PLG Tanggal 14 April 2022	Gugatan pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64 Tanggal 10 Juni 2021 surat ukur nomor 1134/Perajen/2021 tanggal 10 Juni 2021 seluas 31.22 Ha atas nama PTBA yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. **Penggugat :** Fajar Firmansyah, SH., Mkn **Tergugat :** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin **Tergugat II Intervensi :** PT Bukit Asam Tbk Putusan pada tingkat pertama : (13 Oktober 2022) **Dalam Eksepsi :** Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi unuk seluruhnya **Dalam Pokok Perkara :** • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.368.000,- **Putusan pada tingkat banding : (16 Maret 2023)** • Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat; • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki Status perkara saat ini : Pada 2 November 2023 telah terbit Putusan Kasasi pada amarnya telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN-PLG tanggal 17 Maret 2023.	Muhajir Sodruddin & Partners
	State Administration Case Number 152/G/2022/PTUN/ PLG dated April 14, 2022	Lawsuit for cancellation of Building Use Rights Certificate Number 64 dated June 10, 2021, measuring letter number 1134/Perajen/2021 dated June 10, 2021, covering an area of 31.22 Ha in the name of PTBA issued by the Banyuasin District Land Office. **Plaintiff:** Fajar Firmansyah, SH., Mkn **Defendant:** The Head of the Banyuasin District Land Office **Defendant II intervened:** PT Bukit Asam Tbk Decision at first instance: (October 13, 2022) **In Exception:** Reject the exception of the Defendant and Defendant II's intervention in its entirety **In the main case:** • Reject the Plaintiff's lawsuit in its entirety • Sentenced the Plaintiff to pay court costs amounting to Rp1,368,000,- **Decision on appeal: (March 16, 2023)** • Accept the appeal request from the Appellant first as Plaintiff; • Cancel the decision of the Palembang State Administrative Court Number 152/G/2022/PTUN.PLG dated October 13, 2022, which is being appealed.	In the event that PTBA loses, PTBA may lose its control rights and use of the land it owns. Current case status: On November 2 2023, the Cassation Decision was issued, in its ruling granting the cassation petition from the Cassation Petitioner I and the Cassation Petitioner II, and canceling the Decision of the Palembang State Administrative High Court with Decision Number 12/B/2023/PT.TUN-PLG dated March 17 2023.	Muhajir Sodruddin & Partners

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
2.	Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2022/PN.Mre Tanggal 25 April 2022	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembebasan lahan yang dilakukan oleh PTBA dari Okta Ipriadi pada lahan yang berlokasi di Ataran Tebing Ajan, Desa Penyandingan, yang diklaim oleh Romili sebagai haknya. **Penggugat :** Romili **Tergugat :** PT Bukit Asam Tbk **Turut Tergugat :** Okta Ipriadi Putusan tingkat pertama : (28 November 2022) **Dalam Eksepsi :** Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya **Dalam Pokok Perkara :** • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; • Menyatakan Surat Keterangan Pembelian Kebun Atas Tanah tertanggal 19 Juli 1999 yang ditandatangani saksi-saksi batas tanah seluas ± 0,5 Ha (Panjang ± 100 M dan Lebar ± 50 M) sah milik Penggugat • Menyatakan sebidang tanah a quo yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagai mana Surat Keterangan Pembelian Kebun tertanggal 19 Juli 1999 seluas lebih kurang 2.990,79 M2 adalah hak milik Penggugat • Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan pembebasan/ ganti rugi dan menguasai tanah a quo milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) • Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat oleh Para Tergugat atas tanah a quo tersebut adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM • Menghukum Para Tergugat mengembalikan sebidang tanah a quo milik Penggugat tersebut kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun • Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan • Menghukum Para Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah • Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Putusan tingkat banding : (02 Februari 2023) • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pdt.G/ 2022/ PN Mre tanggal 28 November 2022; • Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah.	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki Status perkara saat ini : Telah ditetapkan putusan kasasi pada perkara dimaksud, dimana putusan kasasinya menguatkan putusan tingkat pertama dan putusan banding.	Hardiansyah & Partners
	Civil Case Number 13/ Pdt.G/2022/PN.Mre Date April 25, 2022	Lawsuit for Unlawful Actions against land acquisition carried out by PTBA from Okta Ipriadi on land located in Ataran Tebing Ajan, Penyandingan Village, which Romili claims as his right. **Plaintiff:** Romili **Defendant:** PT Bukit Asam Tbk **Co Defendant:** Okta Ipriadi First instance ruling: (November 28, 2022) **In Exception:** Reject the Defendant's exception in its entirety **In the main case:** • Granted the Plaintiff's lawsuit in part; • Declare that the Land Plantation Purchase Certificate dated July 19, 1999, signed by witnesses, has a land area of ± 0.5 Ha (Length ± 100 M and Width ± 50 M) as legally belonging to the Plaintiff. • Declare that the plot of land a quo which is part of the land owned by the Plaintiff as stated in the Garden Purchase Certificate dated July 19, 1999, covering an area of approximately 2,990.79 M2 is the property of the Plaintiff	In the event that PTBA loses, PTBA may lose its control rights and use of the land it owns. Current case status: The cassation decision has been determined in the case in question, where the cassation decision confirms the first instance decision and the appeal decision.	Hardiansyah & Partners

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
		• Declare that the actions of the Defendants in carrying out release/ compensation and controlling the a quo land belonging to the Plaintiff is an Unlawful Act (PMH) • Declare that all documents made by the Defendants regarding the a quo land are INVALID and VOID BY LAW • Punish the Defendants to return the plot of land a quo belonging to the Plaintiff to the Plaintiff voluntarily without any conditions • Sentencing the Defendants to pay forced money (dwangsom) to the Plaintiff amounting to Rp300,000.00 (three hundred thousand rupiah) every day, if they fail to comply with this decision starting from the time the decision is pronounced until it is implemented • Sentenced the Defendants to pay court costs which to date have been set at Rp2.390.000.00 (two million three hundred and ninety thousand rupiah) • Reject the plaintiff's claim other than that. **Appeal level decision: (February 02, 2023)** • Accept the appeal request from the original Appellant, the Defendant; • Strengthening the decision of the Muara Enim District Court Number 13/Pdt.G/ 2022/ PN Mre dated November 28, 2022; • Sentenced the Appellant, the original Defendant, to pay court costs at both levels of court, which at the appeal level was set at Rp150,000.00 (one hundred and fifty thousand rupiah)		
3.	Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2022/ PN Mre Tanggal 03 Agustus 2022	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembebasan lahan yang dilakukan oleh PTBA dari Syamsul Komar pada lahan yang berlokasi di Ataran Tambak, Desa Penyandingan, yang diklaim H. Najamuddin sebagai haknya. **Penggugat :** H. Nadjamudin Hanap **Tergugat I :** PT Bukit Asam Tbk **Tergugat II :** Syamsul Komar **Turut Tergugat I :** Surahman **Turut Tergugat II :** Suhardi, SH.,MKn Putusan tingkat pertama : (29 Maret 2023) **Dalam Eksepsi :** Menerima Eksepsi Tergugat I **Dalam Pokok Perkara :** • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.410.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah); • Putusan tingkat banding : (08 Juni 2023) • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 20/ Pdt.G/2022/PN.Mre tanggal 29 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut • Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,-	Dalam hal PTBA kalah, PTBA dapat kehilangan hak penguasaannya dan pemanfaatan atas lahan yang dimiliki Status perkara saat ini : Sudah ada putusan tingkat Banding pada tanggal 08 Juni 2023.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 20/Pdt.G/2022/PN Mre Date August 3, 2022	Lawsuit for Unlawful Actions against land acquisition carried out by PTBA from Syamsul Komar on land located in Ataran Tambak, Penyandingan Village, which H. Najamuddin claims as his right. **Plaintiff:** H. Nadjamudin Hanap **Defendant I:** PT Bukit Asam Tbk **Defendant II:** Syamsul Komar **Co Defendant:** Surahman **Co Defendant:** Suhardi, SH., MKn First instance decision: (March 29, 2023) **In Exception:** Accepting Defendant I's Exception	In the event that PTBA loses, PTBA may lose its control rights and use of the land it owns. Current case status: There has been a decision at the appeal level on June 8, 2023.	Hardiansyah & Partner

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
		In the main case: • Declaring the Plaintiff's claim unacceptable (niet ontvankelijke verklaard); • Sentenced the Plaintiff to pay court costs amounting to Rp3,410,000.00 (Three Million Four Hundred and Ten Thousand Rupiah); Appeal level decision: (June 8, 2023) • Received an appeal request from the original Appellant, Plaintiff • Strengthened the decision of the Muara Enim District Court Number 20/Pdt.G/2022/PN.Mre dated March 29, 2023, which is requested to be appealed • Sentenced the Appellant, the original Plaintiff, to pay court costs at both levels of court, the appeal level of which was set at Rp150,000,000,-		
4.	Perkara Perdata No. 9/Pdt.G/2023/PN.Mre Tanggal 29 Maret 2023	Gugatan perbuatan Melawan Hukum terkait klaim warga desa Tanjung Agung atas tanah Tergugat I yang berlokasi di Desa Tanjung Agung yang berada dalam HGU No. 1 Tanggal 14 Mei 1994 seluas 1411,4 Ha **Penggugat :** Ude Indayadi, SH (Kades Tanjung Agung) **Tergugat I :** PT Bumi Sawindo Permai **Tergugat II :** PT Bukit Asam Tbk **Turut Tergugat :** Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	Dalam hal PTBA kalah maka akan berdampak pada kegiatan pengembangan dan pertambangan PTBA Status Perkara Saat ini : Sudah ada putusan tingkat Banding pada tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak dan pada saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 9/Pdt.G/2023/PN.Mre Dated March 29, 2023	The Unlawful Act lawsuit relates to the claims of Tanjung Agung village residents ovser Defendant I's land located in Tanjung Agung Village which is in HGU No. 1 May 14, 1994 covering an area of 1411.4 Ha **Plaintiff:** Ude Indayadi, SH (Tanjung Agung Village Head) **Defendant I:** PT Bumi Sawindo Permai **Defendant II:** PT Bukit Asam Tbk **Co Defendant:** Muara Enim District Land Office	If PTBA loses, it will have an impact on PTBA's development and mining activities. Current Case Status: There was a decision at the Appeals level on November 22, 2023, which confirmed the District Court's decision where the lawsuit submitted by the Plaintiff was rejected and is currently in the cassation process at the Supreme Court.	Hardiansyah & Partner
5.	Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Lht Tanggal 22 Agustus 2023	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan klasifikasi perkara Kerusakan Lingkungan akibat Kegiatan Pertambangan, dengan dalil kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukannya kegiatan reklamasi pada objek sengketa yang berada pada IUP MTB PTBA dengan total luas 13,65 Ha. **Penggugat** : LSM Lestari **Tergugat I :** PT Bukit Asam Tbk **Tergugat II :** Kementerian ESDM RI cq. Menteri ESDM RI	Dalam hal PTBA kalah maka akan berdampak pada reputasi perusahaan dan adanya kerugian materiil Status Perkara saat ini : Pada saat ini masing-masing Pihak telah mengirimkan kesimpulan di e-court.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Lht Date August 22, 2023	Lawsuit for Unlawful Actions with the classification of cases of Environmental Damage due to Mining Activities, with the argument that environmental damage was a result of not carrying out reclamation activities on the disputed object located in PTBA's MTB IUP with a total area of 13.65 Ha. **Plaintiff:** Lestari NGO **Defendant I:** PT Bukit Asam Tbk **Defendant II:** Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cq. Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia	In the event if PTBA loses, it will impact the company's reputation and result in material losses Current case status: At this time each party has submitted its conclusions in e-court	Hardiansyah & Partner

Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
State Administrative and Civil Cases

No	Perkara/Kasus Case	Keterangan Singkat Brief Description	Dampak Terhadap Perusahaan Impact on the Company	Konsultan Hukum Law Consultant
6.	Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2023/ PN.Mre Tanggal 18 Oktober 2023	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Mardiansyah atas lahan yang terletak di IUP Banko Tengah B yang telah dibebaskan oleh PTBA. **Penggugat :** Mardiansyah Bin Salri **Tergugat I :** PT Bukit Asam Tbk **Tergugat II :** PT Bumi Sawindo Permai **Turut Tergugat :** PT Pama Persada Nusantara	Dalam hal PTBA kalah maka akan berdampak pada kegiatan pertambangan dan preseden bagi Pihak lain. Status Perkara saat ini : Gugatan telah dicabut oleh Penggugat.	Hardiansyah & Partner
	Civil Case Number 28/Pdt.G/2023/ PN.Mre Date October 18, 2023 2023	A lawsuit filed by Mardiansyah over land located in IUP Banko Tengah B which has been released by PTBA **Plaintiff:** Mardiansyah bin Sairi **Defendant I:** PT Bukit Asam Tbk **Defendant II:** Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cq. Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia	In the event if PTBA loses, it will impact the mining activity and other causes on other parties Current case status: The lawsuit has been withdrawn by the Plaintiff	Hardiansyah & Partner

Sengketa Perpajakan
Tax Dispute

No	Jenis Pajak Type of Tax	Kantor Pelayanan Pajak Tax Office	Tahun Year	Status	Pemohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/PK Petitioner of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review	Termohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/ PK Respondent of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review
1	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2007	Peninjuan Kembali Judicial Review	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Directorate General of Taxes (DJP)	PTBA
2	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2012	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
3	PBB Land and Building Tax	Lahat	2012	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
4	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2014	Selesai Banding End of Appeal	PTBA	DJP
5	PBB Land and Building Tax	Lahat	2014	Selesai Banding End of Appeal	PTBA	DJP
6	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2015	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
7	PBB Land and Building Tax	Lahat	2015	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
8	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2016	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
9	PBB Land and Building Tax	Lahat	2016	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA
10	PBB Land and Building Tax	Prabumulih	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
11	PBB Land and Building Tax	Lahat	2019	Banding Appeal	PTBA	DJP
12	STP PBB Land and Building Tax Bill	Prabumulih	2014	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA

No	Jenis Pajak Type of Tax	Kantor Pelayanan Pajak Tax Office	Tahun Year	Status	Pemohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/PK Petitioner of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review	Termohon Gugatan/ Banding/ Keberatan/ PK Respondent of Lawsuit/ Appeal/ Objection/ Judicial Review
13	STP PBB Land and Building Tax Bill	Lahat	2015	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	PTBA	DJP
14	STP PBB Land and Building Tax Bill	Prabumulih	2017	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA
15	STP PBB Land and Building Tax Bill	Prabumulih	2018	Selesai Peninjuan Kembali End of Judicial Review	DJP	PTBA
16	PPh 23 Income Tax 23	Prabumulih	2011	Peninjuan Kembali Judicial Review	PTBA	DJP
17	SKPLB PPh Badan Overpaid Tax Assessment Letter of Agency Income Tax	LTO 3	2016	Peninjuan Kembali Judicial Review	DJP	PTBA
18	SKPLB PPh Badan Overpaid Tax Assessment Letter of Agency Income Tax	LTO 3	2017	Keberatan Objection	PTBA	DJP

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu terhitung sejak awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan pajak maupun sengketa pajak.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2023, baik Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak pernah mendapatkan sanksi administratif, termasuk sanksi administratif yang bersifat material yang dikenakan oleh regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event). Perusahaan juga tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran atau belum mematuhi peraturan dan peraturan pencatatan selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan.

Ketidakpatuhan Terhadap Hukum, Aturan Dan Peraturan Berkaitan Dengan Pihak Berelasi

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, dan peraturan berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun ataupun terlibat kasus yang berkaitan dengan masalah perburuhan, ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan ataupun lingkungan.

In the last 3 (three) years, starting from the beginning of 2021 to the end of 2023, the Company has never received a guilty verdict from the highest tax court regarding taxes or tax disputes.

Administrative Sanctions

During the year, neither the Company nor any member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors have been subject to any administrative sanctions, including material administrative sanctions imposed by regulators for not making announcements within the prescribed timeframe for material events. The Company has also not been found to have violated or not complied with any listing rules and regulations during the past year other than disclosure rules.

Non-Compliance with Laws, Rules and Regulations Relating to Related Parties

During the last 3 (three) years, the Company has never committed any violations related to non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions.

Violations of Labor, Employment, Consumer, Bankruptcy, Commercial, Competition, or Environmental Laws

Throughout 2023, the Company has never committed any legal violations or been involved in cases related to labor, employment, consumer, bankruptcy, commercial, competition, or environmental issues.

Kebijakan Pengungkapan Informasi
Information Disclosure Policy

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk melaporkan kepemilikan atas saham Perusahaan, termasuk setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan merupakan bagian dari Pengungkapan Informasi, yang pengaturannya secara internal Perusahaan diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Pelaksanaan atas kebijakan Pengungkapan Informasi diwujudkan melalui kepatuhan Perusahaan dalam melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan mengungkapkannya dalam Laporan Tahunan maupun *website* resmi Perusahaan. Pengungkapan informasi berkenaan dengan kepemilikan saham Perusahaan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bagian Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are obliged to report ownership of Company shares, including any changes in ownership of Company shares either directly or indirectly, to the Financial Services Authority (OJK). This obligation is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares. The reporting obligation is part of Information Disclosure, which is regulated internally by the Company in the Directors' Work Guidelines and the Board of Commissioners' Work Guidelines.

Implementation of the Information Disclosure policy is realized through the Company's compliance in reporting ownership and any changes in ownership of the Company's shares by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, by disclosing this in the Annual Report or the Company's official website. Disclosure of information regarding Company share ownership by Members of the Board of Commissioners and Directors can be accessed in the Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors chapter in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access Company Information and Data



Komitmen penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik salah satunya diwujudkan oleh Bukit Asam melalui keterbukaan informasi. Perusahaan memberikan informasi untuk publik dan pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pelaksanaannya di Perusahaan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi bagi publik dapat diakses melalui situs web Perusahaan pada alamat *website* www.ptba.co.id, dan atas informasi serta data perusahaan pada *website*, disediakan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sementara, penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan, dapat lebih lanjut diakses melalui beberapa cara, antara lain melalui:

One of the commitments to implement the principles of Good Corporate Governance is carried out through information disclosure. The company provides information to the public and shareholders as specified in Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Openness, in which the implementation is managed by the Corporate Secretary in accordance with applicable regulations.

Information disclosure to the public can be accessed via the Company's website at the website address www.ptba.co.id, and company information and data on the website is provided in two languages, namely Indonesian and English. Meanwhile, the provision of information for Shareholders and stakeholders can be accessed in several ways, including through:

Kantor

Alamat Kantor : Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia, 31716
Telepon : +62 734 451096, 452352
Fax : +62 734 451095, 452993
Email : corsec@bukitasam.co.id

Media Sosial

Facebook : PT Bukit Asam Tbk
Twitter : @BukitAsamPTBA
Instagram : bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Laporan-Laporan

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perusahaan, terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh Perusahaan, dipublikasikan pada website Perusahaan. Laporan Perusahaan yang dapat diakses melalui *website* antara lain, Laporan Audit Keuangan, Laporan Keuangan Triwulan, Ikhtisar Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan PKBL. Perusahaan juga menyampaikan Laporan Tahunan yang telah dibuat kepada regulator sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siaran Pers

Perusahaan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi tentang Perusahaan kepada masyarakat luas. Pada tahun 2023, PTBA telah menyampaikan sebanyak sebanyak 103 siaran pers.

Aktivitas Investor Relations

Perusahaan memberikan informasi melalui aktivitas yang berkaitan dengan *Investor Relations*. Penyediaan informasi ini merupakan penghubung Perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain, sehingga para pemegang saham, calon investor, dan masyarakat luas mendapatkan informasi terkini mengenai Perusahaan

Office

Office Address : Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, South Sumatera, Indonesia, 31716
Telephone : +62 734 451096, 452352
Fax : +62 734 451095, 452993
Email : corsec@bukitasam.co.id

Social media

Facebook : PT Bukit Asam Tbk
Twitter : @BukitAsamPTBA
Instagram : Bukitasamptba
YouTube : PT Bukit Asam Tbk

Reports

As a form of information disclosure to stakeholders to understand the condition of the Company, reports made by the Company are published on the Company's website. Company reports that can be accessed via the website include Financial Audit Reports, Quarterly Financial Reports, Financial Overview, Annual Reports, Sustainability Reports and PKBL Reports. The company also submits the Annual Report that has been prepared to the regulator to fulfill its obligations under applicable laws and regulations.

Press Release

The Company utilizes mass media as a partner to disseminate information about the Company to the wider community. In 2023, PTBA issued 103 press releases.

Investor Relations Activities

The Company provides information through activities related to Investor Relations. This information provision is a link between the Company and the capital market community and other external parties. Therefore, shareholders, potential investors, and the wider community can receive the latest information regarding the Company.

Kode Etik
Code of Conducts



Perusahaan memiliki pedoman Kode Etik yang mengatur nilai-nilai etis dan standar perilaku yang harus dipedomani oleh Insan PTBA. Pedoman Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk *(Code of Conduct)*. Pedoman memuat pengaturan 2 (dua) aspek mendasar dalam perilaku, yakni Etika Bisnis dan Etika Perilaku Individu sebagai standar perilaku bagi setiap Insan Perusahaan.

Pedoman Kode Etik diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada dalam lingkaran operasi dan bisnis Perusahaan, maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan.

The company has a Code of Conducts guidelines that regulate ethical values and standards of behavior that must be adhered to by PTBA employees. Code of Conducts guidelines are established by Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). The Guidelines contain regulations on 2 (two) fundamental aspects of behavior, namely Business Ethics and Individual Behavior Ethics as standards of behavior for every Company Person.

The Code of Conducts guidelines are expected to build a harmonious relationship between the interests of the Company's operations and business and the interests of every stakeholder within the Company's operations and business circle, as well as those affected by the Company's operations and business activities.

Pokok-Pokok Kode Etik

Etika Bisnis

Etika Bisnis Perusahaan memiliki aspek kritis terhadap jalannya operasional Perusahaan, mencakup:

1. Target yang harus dicapai oleh jajaran Manajemen dan pegawai;
2. Pengendalian internal Perusahaan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian donasi;
5. Pemberian dan penerimaan hadiah;
6. Lingkungan;
7. Ketenagakerjaan;
8. Etika hubungan dengan pemangku kepentingan;
9. Pemberian kesempatan yang sama untuk menjadi rekanan Perusahaan;
10. Hak atas kekayaan intelektual;
11. Transaksi afiliasi.

Etika Perilaku Individu

Etika perilaku yang harus dipenuhi oleh Insan Perusahaan, meliputi:

1. Integritas dan komitmen;
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Kerahasiaan informasi;
4. Benturan kepentingan;
5. Transaksi orang dalam;
6. Manajemen risiko;
7. Menjaga mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta keamanan Perusahaan;
8. Citra Perusahaan;
9. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
10. Pemberian dan penerimaan hadiah;
11. Perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan secara efisien;
12. Pencatatan data, pelaporan, dan dokumentasi;
13. Perilaku etis terhadap sesama pegawai;
14. Penggunaan media sosial.

Tujuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Tujuan pedoman Kode Etik Perusahaan terbagi atas 2 (dua) yaitu Makro dan Mikro, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Makro

Mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG di bidang energi berbasis batu bara sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan maupun yang diharapkan, baik yang secara langsung meningkatkan nilai Perusahaan.

Mikro

1. Menjabarkan nilai-nilai Perusahaan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Code of Conducts Principles

Business Ethics

The Company's Business Ethics have critical aspects to the Company's operations, including:

1. Mandatory targets achieved by management and employees;
2. Company internal control;
3. Compliance with laws and regulations;
4. Donations;
5. Giving and receiving gifts;
6. Environment;
7. Employment;
8. Ethics of relationships with stakeholders;
9. Providing equal opportunities to become Company partners;
10. Intellectual property rights;
11. Affiliate transactions.

Ethics of Individual Behavior

The ethical behavior that must be complied by Company Personnel includes:

1. Integrity and commitment;
2. Compliance with laws and regulations;
3. Confidentiality of information;
4. Conflict of interest;
5. Insider transactions;
6. Risk management;
7. Maintain quality, environment, occupational health and safety as well as Company security;
8. Company Image;
9. Involvement in political activities;
10. Giving and receiving gifts;
11. Protection and efficient use of Company assets;
12. Data recording, reporting, and documentation;
13. Ethical behavior towards fellow employees;
14. Use of social media.

Purpose of Code of Conducts and Business Ethics

The purpose of the Company Code of Conducts guidelines are divided into 2 (two), namely Macro and Micro, as described below:

Macro

Develop the best business ethical standards that are in accordance with GCG principles in the coal-based energy sector to encourage the creation of the Company's culture and expectations, both of which directly increase the value of the Company.

Micro

1. Describe the Company's values as an ethical foundation that must be followed by all levels of the Company in carrying out daily operational activities.

2. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Pelanggan, Mitra Kerja, jajaran Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya dengan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi dan etika bisnis yang sehat.

Manfaat Penerapan Kode Etik

Manfaat yang diperoleh dari penerapan Kode Etik, sebagai berikut:

1. Perusahaan
   a. Mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif;
   b. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
2. Pemegang Saham Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara amanah (*duty of loyalty*) dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), efisien, transparan, akuntabel, dan adil untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
3. Jajaran Perusahaan
   a. Memberikan pedoman kepada setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai tentang perilaku yang diinginkan atau yang dilarang oleh Perusahaan.
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai secara menyeluruh.
4. Masyarakat dan Pihak lain yang Terkait Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Pengungkapan Kepatuhan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Pedoman Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan Perusahaan pada semua level organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Perusahaan, termasuk yang berada pada entitas anak. Pedoman Kode Etik wajib dibaca dan dipahami isinya, serta terhadap lembar pernyataan kepatuhan atas Pedoman Kode Etik, wajib untuk ditandatangani.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik Perusahaan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan dan *Good Corporate Governance* sebagai penanggung jawab implementasi GCG, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia Operasional (SDMO).

2. Develop harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships between customers, business partners, company staff, and other interested parties (stakeholders) with the company based on corporate principles and sound business ethics.

Benefits of Code of Conducts Implementation

The benefits obtained from implementing the Code of Conducts are as follows:

1. Company
   a. Encourage the Company's operational activities to be more efficient and effective;
   b. Increase the value of the Company by providing certainty and protection to stakeholders related to the Company, resulting in a good reputation, which ultimately yields long-term business success.

2. Shareholders increased confidence in the company's management (duty of loyalty) and based on the principle of prudence (duty of care), efficiently, transparently, accountably, and fairness to achieve the level of profitability expected by Shareholders while still paying attention to the interests of the Company .

3. Company Rankings
   a. Provide guidelines to each member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and employees regarding behavior that is desired or prohibited by the Company.
   b. Creating a work environment that upholds the values of honesty, ethics, and openness to improve the performance and productivity of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and employees as a whole.
4. Community and other related parties Creating a harmonious and mutually beneficial relationship with the Company, which will ultimately create social economic prosperity for the community and other related parties.

Compliance Disclosure that the Code of Conducts Apply to All Levels of Organization

The Code of Conducts guidelines apply to all Company Personnel at all organizational levels, starting from the Board of Commissioners, Directors, Company Employees, including those in subsidiaries. The contents of the Code of Conducts Guidelines must be read and understood, and the statement sheet regarding compliance with the Code of Conducts Guidelines must be signed.

Socialization and Dissemination of the Code of Conducts

Socialization of the Company's Code of Conduct is carried out by the Company Management System and Good Corporate Governance Work Unit as the party responsible for implementing GCG, in coordination with the Human Capital (HC) Work Unit.

Sosialisasi kode etik atau *code of conduct* dilakukan setiap triwulan, yang dilaksanakan melalui email perusahaan maupun melalui aplikasi CISEA GSG. Selain itu, ditahun 2023 sosialisasi Kode Etik juga dilaksanakan dengan mendistribusikan buku Pedoman Kode Etik kepada seluruh pegawai PTBA. Seluruh pegawai PTBA telah melakukan pengisian pakta integritas COC melalui aplikasi CISEA GCG, dengan status 100% untuk periode penyampaian tahun 2023.

Upaya Penegakan Kode Etik dan Pengaduan Pelanggaran

Upaya penegakan Kode Etik di PTBA dilakukan melalui:

1. Pengisian Pakta Integritas;
2. Sosialisasi Pedoman Kode Etik dan Kebijakan lain yang terkait;
3. Penegakan dan implementasi secara efektif terhadap Kebijakan lain yang mendukung penerapan Kode Etik; dan
4. Tindak lanjut terhadap Laporan Pengaduan Pelanggaran.

Dalam mendukung penegakan Kode Etik, Perusahaan menyediakan sarana/media pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik. Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan melalui:

1. Mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang dikelola secara internal organisasi Perusahaan;
2. Mekanisme dan ketentuan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) yang telah dimiliki dan dikembangkan Perusahaan, yang memberikan kerahasiaan bagi pelapor.

Jenis Sanksi untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Kode Etik (Normatif)

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Insan PTBA akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama. Sedangkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pelanggan dan mitra kerja, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik beserta Sanksi yang Diberikan pada Tahun Buku

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik maupun penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik di PTBA, hal ini menunjukan bahwa Insan PTBA memahami pentingnya berperilaku baik selaras dengan Kode Etik yang berlaku.

The socialization of the code of ethics or code of conduct is conducted quarterly, disseminated through company emails as well as through the CISEA GSG application. Additionally, in 2023, the Code of Ethics socialization was also carried out by distributing the Code of Ethics Guidelines book to all PTBA employees. All PTBA employees have completed the integrity pact COC filling via the CISEA GCG application, with a status of 100% for the reporting period of 2023.

Efforts to Enforce the Code of Conduct and Complaint of Violations

Efforts to enforce the Code of Conducts in PTBA are carried out through:

1. Filling out the Integrity Pact;
2. Socialization of the Code of Conducts Guidelines and other related policies;
3. Effective enforcement and implementation of other policies that support the implementation of the Code of Conducts; and
4. Follow up on Violation Complaint Reports.

In supporting the enforcement of the Code of Conducts, the Company provides facilities/media for reporting violations of the Code of Conducts. The mechanism for reporting violations can be carried out through:

1. Internal violation reporting mechanism managed internally by the Company's organization;
2. Mechanisms and provisions for the Whistleblowing System (WBS), which provides confidentiality for the reporter.

Types of Sanctions for Each Type of Violation Regulated in the Code of Conduct (Normative)

Violations of the Code of Conducts committed by PTBA employees will be subject to sanctions in accordance with the applicable rules and regulations in the Company based on the provisions of the Collective Labor Agreement. Meanwhile, violations of the Code of Conducts committed by customers and work partners will be dealt in accordance with the provisions stated in the contract.

Number of Code of Conducts Violations along with the Sanctions Imposed in the Fiscal Year

In 2023, there were no violations of the Code of Conducts or imposition of sanctions for violations of the Code of Conducts in PTBA, this shows that PTBA employee understand the importance of behaving well according to the Code of Conducts.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTBA menyediakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau dikenal dengan *Whistleblowing System* (WBS). SPP merupakan sistem yang mengelola pengaduan pelanggaran, yang memungkinkan Insan Perusahaan atau siapapun untuk melaporkan indikasi penyimpangan yang terjadi di PTBA, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor.

Perusahaan menetapkan SPP melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06/DEKOM/VIII/2020 dan No. 395/0100/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengenai Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Adapun tujuan dari implementasi SPP di Perusahaan, yaitu:

1. Deteksi dini (peringatan dini) dari masalah yang mungkin disebabkan dari pelanggaran;
2. Mengurangi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, akibat dari pelanggaran dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
3. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memiliki perspektif dan proses kerja kritis yang lebih luas yang memiliki kelemahan pengendalian internal dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Jenis Pelanggaran

Jenis-jenis pelanggaran yang tercakup dan dapat dilaporkan melalui SPP meliputi:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Kejahatan, termasuk pencurian, kekerasan terhadap karyawan atau pemimpin, pemerasan, narkoba, pelecehan, dan kriminal lainnya;
4. Pelanggaran peraturan perpajakan;
5. Pelanggaran hukum dan peraturan yang terkait dengan bisnis Perusahaan seperti pertambangan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen;
6. Pelanggaran aturan internal Perusahaan;
7. Pelanggaran untuk Kode Etik Karyawan;
8. Kewajiban Dewan atau melanggar norma-norma kesusilaan umum.

Saluran Pengaduan

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada Perusahaan melalui media yang telah disediakan, yaitu:

Website : http://www.ptba.co.id
Email : spp@bukitasam.co.id
Telepon : +62 21 527 4635

In supporting the implementation of Good Corporate Governance, PTBA provides a Whistleblowing System (WBS). WBS is a system that manages complaints of violations, which allows Company Personnel or anyone to report indications of irregularities that occur in PTBA, while still prioritizing the protection and confidentiality of the identity of the reporter.

The Company determines WBS through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 06/DEKOM/VIII/2020 and No. 395/0100/2020 dated August 31, 2020, concerning Ratification of the Violation Reporting System Guidelines. The objectives of WBS implementation in the Company are:

1. Early detection of problems that may result from violations;
2. Reduce the risks faced by the Company, resulting from violations in terms of finance, operations, law, work safety, and reputation;
3. Provide input to the Company to have a broader perspective and critical work processes that have internal control weaknesses and plan necessary corrective actions.

Type of Violation

The types of violations that are covered and can be reported through WBS are:

1. Corruption;
2. Bribery;
3. Crime, including theft, violence against employees or leaders, extortion, drugs, harassment, and other crimes;
4. Violation of tax regulations;
5. Violations of laws and regulations related to the Company's business such as mining, environment, employment, and consumer protection;
6. Violation of the Company's internal rules;
7. Violation of the Employee Code of Conducts;
8. Obligations of the Board or violating the norms of general decency.

Complaint Channel

Violation reports can be submitted to the Company through the channel provided, namely:

Website : http://www.ptba.co.id
Email : spp@bukitasam.co.id
Telephone : +62 21 527 4635

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian pengaduan dan penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.06/DEKOM/VIII/2020 dan No. 395/0100/2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bukit Asam Tbk. Pedoman Pelaporan Pelanggaran mengatur hal-hal pokok mengenai mekanisme Pelaporan, meliputi:

1. Informasi dan cara Pelaporan Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui SPP/WBS;
2. Pengelolaan Pelaporan;
3. Perlindungan Pelapor;
4. Tindak lanjut atas Laporan termasuk aturan sanksi yang diterapkan.

Adapun mekanisme penyampaian laporan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan (sebagai informasi awal).
2. Laporan tertulis dapat disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) dan laporan lisan dapat disampaikan melalui telepon.
3. Pelapor memberikan informasi mengenai data diri secara jelas, karena pelaporan anonim tidak akan ditindaklanjuti.
4. Pelapor harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi kejadian, waktu kejadian, bagaimana terjadinya, apakah ada bukti, apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada institusi/ pihak-pihak lain, dan apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

Sebaliknya, Perusahaan justru akan memberi sanksi bagi pelapor yang:

1. Membuka kerahasiaan komunikasi dan informasi yang timbul dalam proses penanganan Pelaporan.
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau yang bersifat fitnah atau palsu. Sanksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan.

Mechanism for Violation Reports Submission

The mechanism for submitting complaints and handling complaints is implemented in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No.06/DEKOM/VIII/2020 and No. 395/0100/2020 concerning Guidelines for the Violation Reporting System (Whistleblowing System) of PT Bukit Asam Tbk. The Guidelines for Reporting Violations regulate the main issues regarding the reporting mechanism, including:

1. Information and methods for reporting violations via WBS;
2. Reporting Management;
3. Whistleblower Protection;
4. Follow up on the Report including the sanctions rules applied.

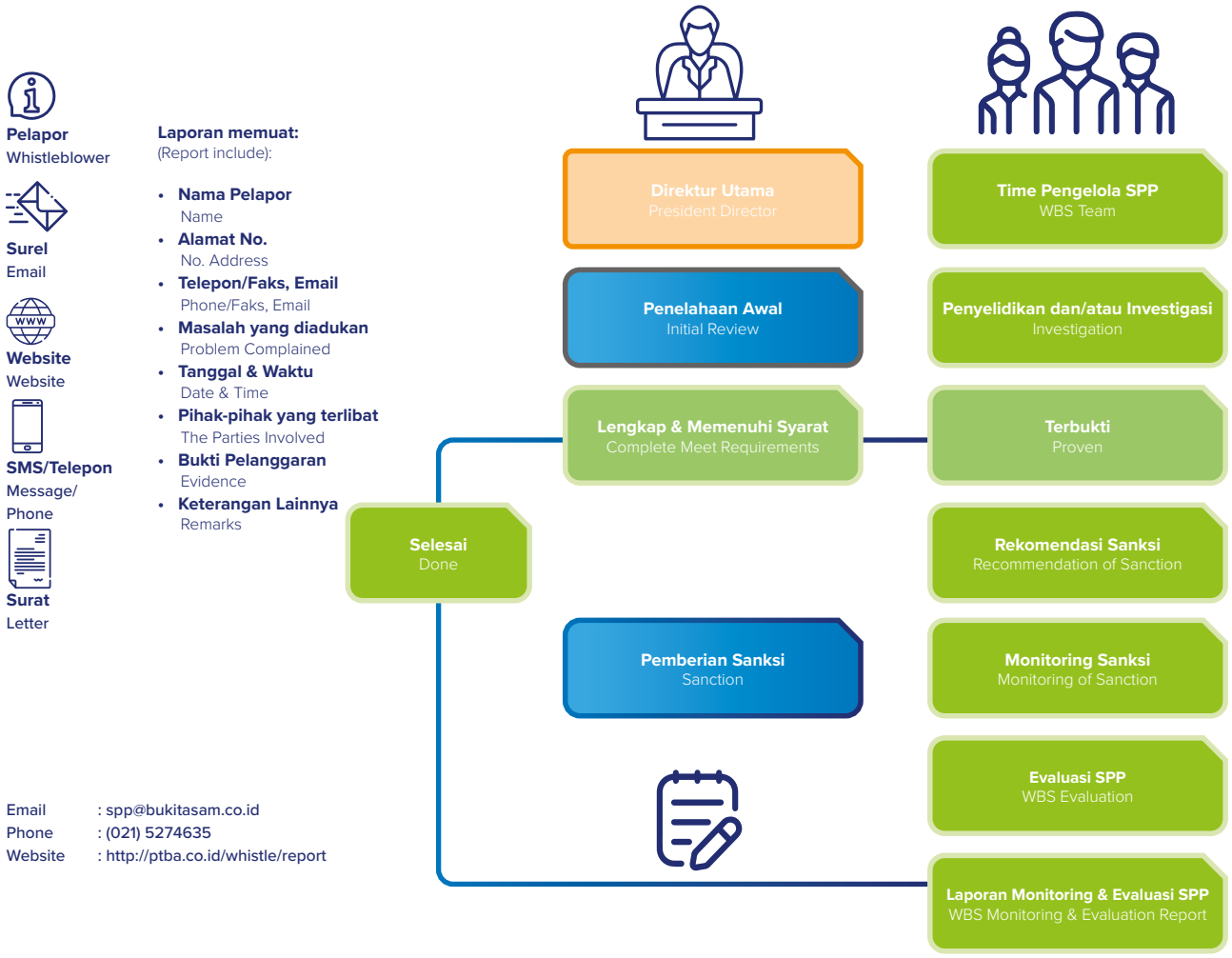
The mechanism for violation reports submissions is as follows:

1. The reporter submits a written or oral report (as initial information).
2. Written reports can be submitted via electronic mail (e-mail) and oral reports can be submitted via telephone.
3. The reporter provides information regarding personal data. Anonymous reporting will not be followed up.
4. The reporter must provide initial indications that can be accounted for, including the problem being reported, the parties involved, the location of the incident, the time of the incident, the brief story, whether there is evidence, whether this case has ever been reported to other institutions/parties, and whether this case has ever been reported. or happened before.

On the other hand, the Company will impose sanctions on whistleblowers who:

1. Revealing the confidentiality of communications and information that arises in the Reporting handling process.
2. Submitting false reports. These sanctions are carried out in accordance with applicable laws and regulations and/or the Company's Collective Labor Agreement.

Struktur dan Mekanisme WBS
WBS Structure and Mechanism



Sosialisasi SPP

Guna terwujud SPP yang efektif dan tepat sasaran, maka Perusahaan secara berkala melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan oleh Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan dan Stakeholders. Tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi 14 kali selama periode TW I s.d TW IV 2023 kepada Internal Perusahaan.

WBS Socialization

In order to realize effective and on target WBS, the Company regularly carries out socialization to all Company Personnel and Stakeholders. In 2023, the Company has carried out 14 socializations from Q1 to Q4 to company internals.

No.	Penerima Sosialisasi Socialization Recipient	Jadwal Sosialisasi Socialization Schedule	Tempat Place	Agenda kegiatan Agenda
1	Satker Penanganan Angkutan Batubara Coal Transportation Handling Work Unit	16 Januari 2023 January 16, 2023	Ruang Rapat Satker PAB Coal Transportation Handling Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker PAB WBS socialization was carried out at the Opening of the Coal Transportation Handling Work Unit Operational Audit
2	Satker Perawatan Maintenance Work Unit	16 Januari 2023 January 16, 2023	Ruang Rapat Satker Perawatan Maintenance Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Perawatan WBS socialization was carried out at the opening of the Maintenance Work Unit Operational Audit
3	Satker Perencanaan Planning Work Unit	18 Januari 2023 January 18, 2023	Ruang Rapat Satker Perencanaan Planning Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Perencanaan WBS socialization was carried out at the opening of the Planning Work Unit Operational Audit

No.	Penerima Sosialisasi Socialization Recipient	Jadwal Sosialisasi Socialization Schedule	Tempat Place	Agenda kegiatan Agenda
4	Satker Penambangan Mining Work Unit	18 Januari 2023 January 18, 2023	Ruang Rapat Satker Penambangan Mining Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Penambangan WBS socialization was carried out at the opening of the Mining Work Unit Operational Audit
5	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	25 Januari 2023 January 25, 2023	Ruang Rapat masing-masing via zoom meeting Each meeting room via Zoom meeting	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Sekretaris Perusahaan WBS socialization was carried out at the opening of the Corporate Secretary Operational Audit
6	Satker Sustainibility Sustainability Work Unit	27 Maret 2023 March 27, 2023	Ruang Rapat Rechall Tanah Putih Rechall Tanah Putih Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Sharing Session dengan Manajemen Sustainability WBS socialization was carried out during Sharing Session with Sustainability Management
7	Satker K3L Korporat Corporate OHSE Work Unit	08 Mei 2023 May 8, 2023	Ruang Rapat Satker K3L Korporat Corporate OHSE Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker K3L Korporat WBS socialization was carried out at the opening of the Corporate OHSE Work Unit Operational Audit
8	Satker PLPT PLPT Work Unit	10 Mei 2023 May 10, 2023	Ruang Rapat Satker PLPT PLPT Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker PLPT WBS socialization was carried out at the opening of PLPT Work Unit Operational Audit
9	Satker Keuangan Korporat Corporate Finance Work Unit	22 Mei 2023 May 22, 2023	Ruang Rapat Satker Keuangan Korporat Corporate Finance Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Keuangan Korporat WBS Socialization was carried out at the opening of the Corporate Finance Work Unit Operational Audit
10	Satker Komersial Commercial Work Unit	22 Mei 2023 May 22, 2023	Ruang Rapat Satker Komersial Commercial Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Komersial WBS socialization was carried out at the opening of Commercial Work Unit Operational Audit
11	Satker Pengembangan Hilirisasi Downstream Development Work Unit	12 Juli 2023 July 12, 2023	Ruang kerja masing-masing via link zoom meeting Each working room via Zoom meeting	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Pengembangan Hilirisasi WBS socialization was carried out at the opening of Downstream Development Work Unit Operational Audit
12	Satker Pengembangan Energi Energy Development Work Unit	25 Juli 2023 July 25, 2023	Ruang Rapat Satker Pengembangan Energi Energy Development Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Pengembangan Energi WBS socialization was carried out at the opening of Energy Development Work Unit Operational Audit
13	Satker Hukum dan Regulasi, SMP & GCG, Manajemen Risiko, dan Sekretaris Perusahaan. Law and Regulation Work Unit, SMP & GCG, Risk Management, and Corporate Secretary	09 Oktober 2023 October 9, 2023	Ruang kerja masing-masing via link zoom meeting Each working room via Zoom meeting	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional GRC WBS socialization was carried out at the opening of the GRC operational audit
14	Satker Anggaran dan Akuntansi Budgeting and Accounting Work Unit	16 Oktober 2023 October 16, 2023	Ruang Rapat Satker Anggaran dan Akuntansi Budgeting and Accounting Work Unit Meeting Room	Sosialisasi WBS disampaikan saat Opening Audit Operasional Satker Anggaran & Akuntansi WBS Socialization was carried out at the opening of the Budgeting and Accounting Work Unit Operational Audit

Perlindungan bagi Pelapor Pelanggaran

Dalam mengelola Laporan Pengaduan Pelanggaran yang masuk ke Perusahaan, PTBA memberikan perlindungan terhadap pelapor, berupa:

1. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimile, *email*, unit kerja);
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga;
3. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/ jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik;
4. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor, tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Whistleblowers Protection

In managing Violation Complaint Reports submitted to the Company, PTBA provides protection for whistleblowers, in the form of:

1. Confidentiality of the whistleblower identity (name, address, telephone number, facsimile, email, work unit);
2. Protection against countermeasures from the reported party or institution;
3. Protection from pressure, postponement of promotion/ position, dismissal, lawsuits, property, to physical actions;
4. The protection does not only apply to the whistleblower but can be extended to the whistleblower family member.

Penanganan Pengaduan

Setiap laporan yang masuk ke Perusahaan, akan ditelaah terlebih dahulu untuk diperoleh keputusan tindak lanjut atas laporan tersebut. Laporan Pengaduan Pelanggaran minimal memuat informasi sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang diadukan dan pihak yang terlibat;
2. Waktu dan tempat terjadinya pelanggaran;
3. Kronologi ringkas kejadiannya;
4. Disertai adanya bukti-bukti pelanggaran.

Laporan yang telah diterima dan ditelaah oleh Perusahaan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada petugas SPP yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta mendokumentasikan laporan penerimaan pengaduan.
2. Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima. Langkah-langkah tindak lanjut yang dapat ditempuh di antaranya:
   a. Investigasi oleh auditor internal, apabila substansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim auditor internal.
   b. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila substansi pengaduan membutuhkan kompetensi/ pengetahuan/ keahlian tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim auditor internal.
3. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi pengaduan kepada Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut.

   Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain:
   a. Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
   b. Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar.
   c. Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

   Dalam hal ini, akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Perusahaan membentuk tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola, memverifikasi, dan memproses seluruh pengaduan laporan yang masuk.

Complaint Handling

Every report submitted to the Company will be reviewed to obtain a follow-up decision on the report. The Violation Complaint Report must contain at least the following information:

1. The type of violation that is being complained of and the parties involved;
2. The time and place of violation;
3. A brief chronology of events;
4. Accompanied by evidence of the violation.

Received and reviewed report will be followed-up on the following step:

1. President Director receives and submits every complaint of violation to appointed WBS officer to verify data, collect sufficient and adequate initial evidence, and document the complaint receipt report.

2. The Board of Directors determines follow-up actions for complaints that have been received. Follow-up steps that can be taken include:
   a. Investigation by internal auditors, if the substance of the complaint can be investigated by a team of internal auditors.
   b. Investigation by an external investigator, if the substance of the complaint requires certain competencies/ knowledge/expertise that cannot be fulfilled by the internal auditor team.
3. The investigation team carries out comprehensive investigation activities and submits the results of the complaint investigation to the Board of Directors to then determine a decision on the complaint.

   Some of the decisions that can be made include:
   a. It will be stopped and declared complete if the results of the investigation state that the complaint is false or unproven.
   b. Forward the results of the investigation to the Violation Case Discussion forum if the results of the investigation state that the complaint is proven to be true.

   c. Forwarding cases of violations that fall into the category of general crimes or corruption to investigators for further processing in accordance with applicable provisions and laws.

   In this case, communication and coordination will be carried out with the team from the Legal Division to ensure that the evidence that has been collected in the investigative activities is deemed sufficient to be submitted to the authorities.

Complaints Management Party

The company formed a Whistleblowing System Management team which was specifically assigned to manage, verify, and process all incoming complaints.

Tim SPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA Nomor 02/SK/PTBA-DEKOM/X/2022 dan 400/0100/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Tim Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Adapun susunan tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

The WBS Team was formed based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PTBA Number 02/SK/PTBA-DEKOM/X/2022 and 400/0100/2022 dated October 7, 2022, concerning the Whistleblowing System (WBS) Team. The composition of the Violation Reporting System Management team can be seen in the following table:

Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
WBS Mangement Team

No.	Susunan Anggota Composition	Kedudukan dalam Tim Position in the Team
1	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Ketua Chair
2	*Vice President* Hukum dan Regulasi Vice President of Law and Regulation	Wakil Ketua Deputy Chair
3	*Vice President* Satuan Pengawasan Intern Vice President of Internal Audit Unit	Anggota Member
4	*Vice President* Sumber Daya Manusia Operasional Vice President of Human Resources Operational	Anggota Member
5	*Vice President* Sistem Manajemen Perusahaan & GCG Vice President of Corporate Management System & GCG	Anggota Member
6	Assisstant Vice President Audit Operasional, Internal Control, dan Konsultansi Vice President Assistant for Operational Audit, Internal Control, and Consultation	Anggota Member
7	*Assisstant Vice* President Litigas dan Non Litigasi Assistant Vice President for Litigation and Non-Litigation	Anggota Member
8	Manajer GCG dan Kinerja Perusahaan GCG Manager and Company Performance	Anggota Member
9	Pemeriksa Muda Junior Auditor	Anggota Member
10	*Compliance Officer Muda, Spesialis* GCG Pratama, dan Spesialis Hukum Pratama Junior Compliance Officer, Senior GCG Specialist, and Senior Legal Specialist	Anggota Member

Kode Etik Tim Pengelola SPP

sebagaimana ketentuan Pedoman WBS PTBA, WBS dikelola secara internal oleh Tim Pengelola, untuk menjadi Tim Pengelola WBS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Petugas Perlindungan Pelapor
   Sebagai Petugas Perlindungan Pelapor, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
   1. Dapat dipercaya;
   2. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat menyakinkan orang;
   3. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya dan;
   4. Mampu bersifat objektif dan tegas.

Code of Conduct for WBS Management Team

As stipulated in the PTBA WBS Guidelines, the WBS is managed internally by the Management Team. To become a WBS Management Team, they must fulfill the following requirements:

a. Whistleblower Protection Officer
   As a Whistleblower Protection Officer, the person concerned must have the following requirements:
   1. Trustworthy;
   2. Able to communicate, build good relationship, and can convince people;
   3. Can be diplomatic well and tactically enough, without angering the other person and;
   4. Able to be objective and firm.

b. Petugas Investigasi
Sebagai Petugas Investigasi, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
1. Dapat dipercaya;
2. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat menyakinkan orang;
3. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya dan;
4. Mampu bersifat objektif dan tegas;
5. Mempunyai integritas tinggi;
6. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
7. Kemampuan analisa yang tinggi;
8. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik (*sound of judgement*).

b. Investigating Officer
As an Investigation Officer, the person concerned must have the following requirements:
1. Trustworthy;
2. Able to communicate, build good relationship, and can convince people;
3. Can be diplomatic well and tactically enough, without angering the other person and;
4. Able to be objective and firm;
5. Have high integrity;
6. Have the ability to carry out investigations;
7. High analytical skills;
8. Ability to make good judgments (sound of judgment).

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

Tahun 2023, terdapat 7 laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui SPP, baik yang disampaikan melalui email, surat, telepon, faksimile, ataupun *website* Perusahaan.

Number of Complaints Received and Processed

In 2023, there were 7 reports of suspected violations submitted via WBS, whether submitted via email, letter, telephone, fax, or the Company's website.

	Media Pelaporan Reporting Media	Jumlah Laporan yang Masuk Number of Reports Received	Status Laporan per 31 Desember 2023 Reports Status per December 31, 2023
1	Email Email	7	7
2	Surat Letter	-	-
3	Telepon Telephone	-	-
4	Faksimile Fax	-	-
5	*Website* *Website*	-	-
Jumlah Total		7	7

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses pada Tahun 2023

Berdasarkan laporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke Perusahaan, sebanyak 7 (tujuh) pengaduan masuk sampai dengan akhir tahun 2023. Seluruh laporan yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

Sanctions/Follow-Up for Complaints Completed in 2023

Based on reports of violations submitted to the Company, there were 7 (seven) complaints received by the end of 2023. All reports submitted have been followed up.

Kebijakan *Insider Trading*

Insider Trading Policy



Perusahaan menetapkan larangan penyalahgunaan jabatan dan pekerjaan Insan PTBA untuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.

Perusahaan memiliki kebijakan insider trading yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No.250/0100/2023 dan No.15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Transaksi Orang Dalam (Insider Trading). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tidak pernah terjadi transaksi orang dalam yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, manajemen yang berada di bawah Direksi, dan Karyawan Perusahaan.

The company prohibits misuse of the position and work of PTBA employees to disclose material information that could influence investors' informed decisions. Material information is information that has not been widely published that could encourage someone to buy, sell, or hold Company shares.

The company has an insider trading policy which is stipulated in Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Director PTBA No.250/0100/2023 and No.15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 Concerning Guideline of Insider Trading. In the last 3 (three) years, starting from 2021 to 2023, there have never been any insider transactions involving the Board of Commissioners, Directors, Supporting Organs of the Board of Commissioners, management under the Directors, and Company Employees.

Kebijakan Antikorupsi
Anti-Corruption Policy

Perusahaan telah menetapkan kebijakan tentang anti korupsi yang dimuat dalam *Corporate Governance Policy, Board Manual, Code of Conduct, Pedoman Whistleblowing System*, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang secara substansi mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Program dan Prosedur Penanganan Anti Korupsi

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan praktik bisnis yang anti korupsi, demi terwujudnya iklim bisnis yang sehat. Dalam mendukung praktik anti korupsi, Perusahaan menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan internal Perusahaan, melalui Kebijakan anti korupsi yang didukung dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai wujud komitmen. Perusahaan juga mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Standar internasional Anti-Bribery Management System atau Manajemen Anti Suap ISO 37001:2016, sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan upaya membangun perusahaan yang bersih dari praktik korupsi. Atas komitmen Perusahaan dalam menerapkan SMAP, Bukit Asam menjadi BUMN tambang pertama yang memperoleh ISO 370001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Prosedur penanganan anti korupsi di Perusahaan diwujudkan melalui pembentukan SDM yang bertanggungjawab terhadap pengawasan, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai prosedur audit dan pendeteksian risiko penyimpangan, serta meningkatkan *awareness* insan capital dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan anti korupsi, khususnya pada unit-unit yang berpotensi untuk terpapar praktik korupsi, kecurangan, suap, gratifikasi dan sejenisnya.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi

Perusahaan memberikan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi bagi Insan PTBA guna memberikan pemahaman dan pembekalan pengetahunan mengenai korupsi dan hal lain yang berkaitan dengan korupsi. Sepanjang tahun 2023 Perusahaan telah memberikan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi (termasuk *anti-fraud dan anti bribery*) sebanyak 6 pelatihan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The company has established anti-corruption policies contained in the Corporate Governance Policy, Board Manual, Code of Conduct, Whistleblowing System Guidelines, and Gratification Control Guidelines, which substantially refer to Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Anti-Corruption Handling Programs and Procedures

The Company has a strong commitment to implement anti-corruption business practices in order to realize a healthy business climate. In supporting anti-corruption practices, the Company forms an anti-corruption culture in the Company's internal environment, through an anti-corruption policy which is supported by the signing of an Integrity Pact as a form of commitment. The Company also implements an Anti-Bribery Management System (SMAP) with the international standard Anti-Bribery Management System or Anti-Bribery Management ISO 37001:2016, as a form of implementing good corporate governance and an effort to build a company that is free from corrupt practices. Due to the Company's commitment to implementing SMAP, Bukit Asam became the first mining SOEs to obtain ISO 370001:2016 Anti-Bribery Management System.

Procedures to handle anti-corruption in the Company are realized through the formation of human capital who are responsible for supervision, to participate in education and training regarding audit procedures and detecting risks of irregularities, as well as increasing awareness of capital employees by involving them in anti-corruption education and training, especially in units with potential to be exposed to corrupt practices, fraud, bribery, gratification, and others.

Anti-Corruption Training/Socialization

The company provides anti-corruption training and socialization for PTBA employees to provide understanding and knowledge regarding corruption and other matters related to corruption. In 2023, the Company conducted 5 anti-corruption training and socialization (including anti-fraud and anti-bribery) as listed in the table below:

Jenis Type	Judul Pelatihan Training Title	Tempat dan Tanggal Place and Date	Jumlah Peserta Number of Participant	Penyelenggara Organizer
Training	Diklat Sertifikasi Audit Kecurangan (Fraud Audit)+Asesmen Fraud Audit Certification Training + Assessment	Green Forest Bogor Hotel, 13-19 Maret 2023 Green Horest Hotel Bogor, March 13-19, 2023	2	PPA&K - LSP Auditor Internal
Training	Audit Investigative Di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Investigative Audit Within the Government's Internal Supervisory Apparatus	Rizen Padjajaran Hotel, 08-12 Mei 2023 Rizen Padjajaran Hotel, May 8-12, 2023	1	Pusdiklatwas BPKP BPKP Education and Training Center
Training	Internal Audit Mind Id Group Mengenai "Audit Forensik Dan Investigasi" Internal Audit MIND ID Group on "Forensic Audit and Investigation"	Novotel Hotel Bandar Lampung, 04-05 September 2023 Novotel Hotel Bandar Lampung, September 4-5, 2023	6	PTBA & MIND ID
Training	Webinar Money Laundering : Kenali, Cegah, Dan Berantas Money Laundering Webinar: Recognize, Prevent, and Eradicate	Zoom Meeting Di Lokasi Kerja Pegawai, Tanjung Enim, 03 Mei 2023 Tanjung Enim, May 3, 2023, by Zoom meeting	5	Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) Indonesian Forensic Auditors Association (AAFI)
Training	Seminar (Hybrid) Anti Fraud Day Seminar (Hybrid) Anti Fraud Day	Hotel Js Luwansa, 03 Juli 2023 JS Luwansa Hotel, July 3, 2023	1	GRC Management
Webinar	Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management Mining Industry, Aspek Penerapapan Manajemen Risiko, Fraud Risk Management	Virtual, 30 Maret 2023 March 30, 2023	6	Deloitte

Selain memberikan pelatihan kepada pegawai, PTBA juga tetap konsiten untuk menerapkan ISO-37001:2016 tentang SMAP. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya survey pemahaman yang ditujukan kepada seluruh pegawai PTBA di tahun 2023 atas penerapan SMAP tersebut. Alhasil, PTBA berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 berdasarkan hasil audit dari PT TUV NORD Indonesia selaku Badan Sertifikasi Independen.

Besides training to employees, PTBA also remains consistent in implementing ISO-37001:2016 regarding SMAP. This is proven by a survey for at all PTBA employees in 2023 regarding the implementation of the SMAP. As a result, PTBA succeeded in maintaining ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification based on audit results from PT TUV NORD Indonesia as an Independent Certification Body.



Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

PTBA memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa di Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 260/0100/2023, yang isinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Pedoman tersebut menjadi panduan Perusahaan dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Dalam Pedoman Barang dan Jasa PTBA, ditetapkan prinsip utama pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, dan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance*.

Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan menggunakan sistem bernama Spend Management System yang merupakan sistem pengadaan perusahaan yang terintegrasi, sehingga dapat menjamin praktik pengadaan yang bertanggung jawab. *Spend* PTBA dapat diakses oleh publik pada tautan *website* Perusahaan atau link https://spend.bukitasam.co.id/web/index.

PTBA has a policy regarding the procurement of goods and services in the Company which is determined based on the Decree of the Directors of PTBA No. 260/0100/2023, the contents of which refer to the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and MIND ID Implementation Policy for Strategic Guidelines on Procurement and Logistics. These guidelines serve as the Company's guide in realizing effective and efficient procurement of goods and services. In the PTBA Goods and Services Guidelines, the main principles for procurement of goods and services are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, accountable, and prioritizing the principles of Good Corporate Governance.

Procurement of goods and services in the Company uses a system called the Spend Management System, which is an integrated company procurement system, to guarantee responsible procurement practices. The system can be accessed by the public via the Company website link or the link https://spend.bukitasam.co.id/web/index.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control



Perusahaan melaksanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang merupakan standar etika Perusahaan dalam mengatur ketentuan pemberian dan penerimaan hadiah, pelaporan gratifikasi, pengawasan, dan sanksi. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 10/SK/PTBADEKOM/IX/2020 dan No. 400/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* untuk Kebijakan Anti Gratifikasi yang berlaku di PTBA. Adapun substansi yang diatur dalam kebijakan tersebut mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
3. Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/06/2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN.

The Company implements policies which constitute the Company's ethical standards in regulating the provisions for giving and receiving gifts, reporting gratuities, supervision, and sanctions. The Company's Gratification Control Policy is established through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 10/SK/PTBADEKOM/IX/2020 and No. 400/0100/2020 concerning the Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for the Anti-Gratification Policy in PTBA. The substances regulated in the policy refer to:

1. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.
2. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-2/MBU/07/2019 dated July 29, 2019, concerning Clean Management of State-Owned Enterprises Through the Implementation of Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism and Handling of Conflicts of Interest and Strengthening Internal Supervision.
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 09/MBU/06/2021 concerning Gratification Reporting within the Ministry of SOEs.

Prinsip Umum Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Insan PTBA dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap, dan wajib melaporkan kepada KPK atas penerimaan yang dilakukan.

Pemberian maupun penerimaan diperkenankan selama masih dalam batas kewajaran serta memenuhi peraturan yang ditetapkan secara khusus oleh Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak dapat membenarkan pemberian maupun penerimaan hadiah dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh jajaran Perusahaan ataupun pihak-pihak tertentu, dengan maksud memengaruhi keputusan jajaran Perusahaan atau untuk memberikan keuntungan bagi salah satu pihak di luar batas-batas kewajaran, baik secara hukum dan etika bisnis.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pengendalian Gratifikasi di lingkup Perusahaan dimaksudkan:

1. Sebagai Pedoman bagi karyawan PTBA untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi gratifikasi di Perusahaan;
2. Sebagai Pedoman bagi karyawan PTBA dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Memberikan arah dan acuan bagi karyawan PTBA mengenai pentingnya Kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

Mekanisme Pengendalian Gratifikasi

Pemberian

1. Perusahaan melarang setiap individu jajaran Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap, dan sejenisnya kepada Penyelenggara negara, Mitra Kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat digunakan untuk memengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Selain pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang ditentukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (Mou) dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hal tersebut.
3. Pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan besar keagamaan, cinderamata, dan kenang-kenangan dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang, dengan jumlah konfirmasi maksimal Rp3.000.000,00 per orang/ perusahaan per tahun kecuali untuk kegiatan promosi dan *sponsorship*.
4. Pemberian kepada pihak lain dalam rangka untuk kelancaran operasional Perusahaan dalam jumlah

General Principles of Giving and Receiving Gifts

PTBA employees are prohibited from accepting gratuities which are considered bribes, and are required to report to the Corruption Eradication Committee.

Giving or receiving is permitted within reasonable limits and meets the regulations specifically determined by the Company or applicable laws and regulations. The Company cannot justify giving or receiving gifts in various forms given by Company officials or certain parties, with the intention of influencing the decisions of Company officials or to provide benefits to one party beyond reasonable limits, both legally and in business ethics.

Aims, Objectives, and Benefits

Gratification Control within the Company is intended to:

1. As a guide for PTBA employees to understand, prevent, and deal with gratification in the Company;
2. As a guide for PTBA employees in taking a firm stance towards gratification in the Company to realize good Company management;
3. Realizing Company management that is free from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism;
4. Provide direction and reference for PTBA employees regarding the importance of compliance in reporting gratuities to protect themselves and their families from the possibility of being charged with the crime of bribery.

Gratification Control Mechanism

Giving

1. The Company prohibits any individual within the Company's ranks from giving or promising, either directly or indirectly, gifts, bribes, and others to State Officials, Business Partners, and other parties related to the Company, where such giving is known or reasonably suspected to be used to influence or force these parties to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.
2. Apart from the gifts as intended in paragraph (1), gifts or grants for small business development activities, donations for social and religious activities, and donations to Regional Governments determined based on a Memorandum of Understanding (Mou) are possible as long as they are in accordance with the provisions of the governing laws and regulations
3. Gifts to other parties as a token of gratitude, religious gifts, and souvenirs can be given in the form of goods or money, with a maximum confirmation amount of Rp3,000,000,00 per person/company per year except for promotional activities and sponsorship.
4. Grants to other parties for the smooth operation of the Company in certain amounts may be carried out by

tertentu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas setelah mendapat persetujuan dari Direksi.

5. Pemberian kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan batasan sebagai berikut:
   a. Pemberian berupa barang wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari barang tersebut.
   b. Pemberian tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
   c. Pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuap dan/atau mempengaruhi pihak yang bersangkutan yang dapat menyebabkan citra negatif Perusahaan.

Penerimaan

1. Perusahaan melarang setiap individu jajaran Perusahaan untuk:
   a. Menerima hadiah, suap, dan sejenisnya dari pihak mana pun yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah, suap, dan sejenisnya tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   b. Meminta hadiah, suap, dan sejenisnya dari pihak mana pun yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk memengaruhi pengambilan Keputusan baik keputusan sendiri maupun pejabat yang berwenang atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   c. Memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
2. Setiap individu jajaran Perusahaan yang menerima hadiah, berapa pun nilainya dan dalam bentuk apa pun, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menggunakan Formulir 1.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan hadiah dari pihak mana pun dalam rangka promosi perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan yang dimaksudkan sebagai pemberian suap dan/atau bernilai kurang dari Rp3.000.000 per orang/perusahaan/tahun dapat diterima sebagai suatu Kepatutan dalam pergaulan sehari-hari dengan ketentuan:
   a. Mencantumkan logo/nama perusahaan pemberian yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi.
   b. Pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh pemberi yang sama kepada jajaran Perusahaan maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
   c. Setiap individu jajaran Perusahaan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif Perusahaan.
4. Apabila individu jajaran Perusahaan menerima hadiah yang nilainya tidak melebihi ketentuan sebagaimana

prioritizing the principle of accountability after obtaining approval from the Board of Directors.

5. Gifts to other parties as intended in paragraph (3) and paragraph (4) are regulated with the following limitations:
   a. Gifts in the form of goods must include the Company logo which is an inseparable part of the goods.
   b. Gifts are not made continuously to one party, a maximum of 3 (three) times/year.
   c. These gifts are not intended to bribe and/or influence the parties concerned which could cause a negative image of the Company.

Receiving

1. The Company prohibits every individual within the Company's ranks from:
   a. Accepting gifts, bribes, and other forms from any party who is known and reasonably suspected that the gifts, bribes, and other forms were given to motivate them to do or not do something in their position which is contrary to their obligations.
   b. Requesting gifts, bribes, and other forms from any party who is known or reasonably suspected to be used to influence decision making, either his or her own decision or that of an authorized official or to encourage someone to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.
   c. Withholding or taking part of the amount of payments to third parties as compensation for carrying out their duties and obligations.
2. Every individual within the Company who receives a gift, regardless of value and in whatever form, is required to report it to their direct supervisor using Form 1.
3. Excluded from the provisions as referred to in paragraph (1), are accepting gifts from any party in the context of company promotion, tokens of thanks, gifts for religious holidays, and souvenirs intended as a bribe and/or worth less than Rp3,000,000 per person/company/year can be accepted as propriety in daily interactions with the following conditions:
   a. Include the logo/name of the giving company which is part of the giving company's promotional activities.
   b. This gift is not made continuously by the same giver to the Company's ranks a maximum of 3 (three) times/year.
   c. Individuals within the Company's ranks do not hold discussions or provide internal information about the Company that could give rise to a conflict of interest or a negative image of the Company.
4. If an individual from the Company's ranks receives a gift whose value does not exceed the provisions as intended

dimaksud pada ayat (3), maka penerima hadiah tersebut, dengan persetujuan pimpinannya, dapat menyimpan dan memanfaatkan hadiah tersebut.

5. Jika hadiah yang diterima dianggap sebagai hal yang tidak patut, maka kewajiban bagi penerima hadiah untuk mengembalikan kepada si pemberi dengan mengucapkan terima kasih dan penjelasan mengenai Kebijakan ini, dengan menggunakan Formulir 2.
6. Jika pemberi tidak diketahui alamatnya atau alamatnya berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir 2 saja yang dikirimkan sedangkan hadiahnya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.

in paragraph (3), then the recipient of the gift, with the approval of his or her management, can keep and utilize the gift.

5. If the gift received is considered inappropriate, it is the obligation of the recipient of the gift to return it with thanks and an explanation of this Policy, using Form 2.
6. If the giver's address is unknown or his address is in a distant place or abroad, then only Form 2 is sent while the prize is given to the social institution determined by the Company.

Sistem Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi dilakukan melalui aplikasi e-Gratifikasi yang dapat diakses melalui http://aplikasi.bukitasam.co.id/e-gratifikasi dan apabila di tempat penugasn Wajib Lapor Gratifikasi belum atau tidak terhubung dengan e-Gratifikasi, maka pelaporan dapat disampaikan secara manual (tertulis) atau pun melalui email yang ditujukan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Gratification Reporting System

Gratification reporting is carried out via the e-Gratification application which can be accessed via http://aplikasi.bukitasam.co.id/e-gratification. If the work location for the Mandatory Gratification Report is not connected to e-Gratification, then reporting can be submitted manually (in writing) or via email addressed to the Internal Audit Unit.

Sosialisasi Gratifikasi

Perusahaan melaksanakan sosialisasi gratifikasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) Insan Perusahaan. Tahun 2023, Kegiatan sosialisasi gratifikasi dilaksanakan oleh SPI pada saat pembukaan audit operasional dan audit tujuan tertentu sebanyak 14 kali. Selain itu, kegiatan sosialisasi gratifikasi juga dilaksanakan bersama dengan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh Insan PTBA dan disampaikan pada tanggal 27 Maret serta 26 Juni 2023 melalui media *email blast* dari Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan & GCG.

Sebagai bentuk komitmen PTBA terhadap pengendalian gratifikasi, selain kepada Insan PTBA, sosialisasi gratifikasi juga dilakukan oleh Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media koran dengan peredaran nasional dan lokal (Sumatera Selatan) menjelang Idul Fitri Tahun 2023.

Gratification Socialization

The company carries out the socialization of gratuities as an effort to increase awareness of company personnel. In 2023, gratification socialization activities had been carried out by Internal Audit at the opening of operational audits and audits for certain purposes 14 times. Apart from that, gratification socializations were also carried out together with anti-corruption socialization to all PTBA employees and were delivered on March 27 and June 26, 2023, via email blast from the Company Management Systems & GCG Work Unit.

As a form of PTBA's commitment to controlling gratuities, apart from PTBA's people, the Company also carries out socialization of gratuities to all stakeholders through newspapers with national and local circulation (South Sumatera) ahead of Eid al-Fitr 2023.

Jumlah Pengaduan

Sepanjang tahun 2023, tercatat tidak ada pengaduan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Adapun rekapitulasi laporan gratifikasi tahun 2023, sebagai berikut:

Number of Complaints

Throughout 2023, there were no recorded complaints regarding the receipt of gratuities to the Corruption Eradication Commission (KPK). The recapitulation of the gratification report for 2023 is as follows:

Periode Laporan Reporting Period	Jumlah Laporan Masuk Number of Reports Received	Jumlah Tindak Lanjut Number of Follow-up	Status Status
Triwulan I 2023 Q1 of 2023	-	-	-
Triwulan II 2023 Q2 of 2023	-	-	-
Triwulan III 2023 Q3 of 2023	-	-	-
Triwulan IV 2023 Q4 of 2023	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report

Salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan turut serta mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Wujud pelaksanaannya adalah dengan menerapkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada para pejabat Bukit Asam yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tertulis dalam formulir LHKPN, yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK. Dalam hal ini, KPK menjalankan upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Pelaksanaan LHKPN memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggara negara yang taat pada asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk mengungkapkan secara jujur, benar, dan lengkap kekayaannya kepada KPK.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyampaian LHKPN di Bukit Asam, mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri BUMN No. 10/ MBU/06/2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

One of the Company's form of commitment in implementing good corporate governance is by participating in supporting state administration that is free from the practices of Corruption, Collusion, and Nepotism as stipulated in Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. The effort is carried out by implementing the obligation to submit the State Officials Wealth Report (LHKPN) to Bukit Asam officials who are designated as State Administrators, in accordance with Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcements and Examination of State Administration Assets.

LHKPN is a list of all State Officials' Assets written in the LHKPN form, which is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in the KPK Decree. In this case, the Corruption Eradication Commission carries out efforts to prevent corruption, including through registration and examination of the LHKPN.

The implementation of LHKPN aims to realize state administrators who adhere to the general principles of state administration that are free from the practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every state administrator is required to disclose honestly, correctly, and completely his or her assets to the Corruption Eradication Commission.

Legal Basis

The legal basis for submitting LHKPN in Bukit Asam refers to the following provisions:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. KPK Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcements and Examination of State Administration Assets (LHKPN);
3. Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 10/ MBU/06/2021 concerning Reporting the Assets of State Officials within the Ministry of State-Owned Enterprises.
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi PTBA No. 021/Kep/Int-0100/OT.01/2017, pejabat PTBA yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Direksi;
3. Pejabat pada kategori jabatan manajer utama atau fungsional utama; dan
4. Manajer madya atau fungsional madya.

Realisasi LHKPN Tahun 2023

Realisasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN PTBA pada tahun 2023 mencapai 99,06%.

Implementation of LHKPN within the Company

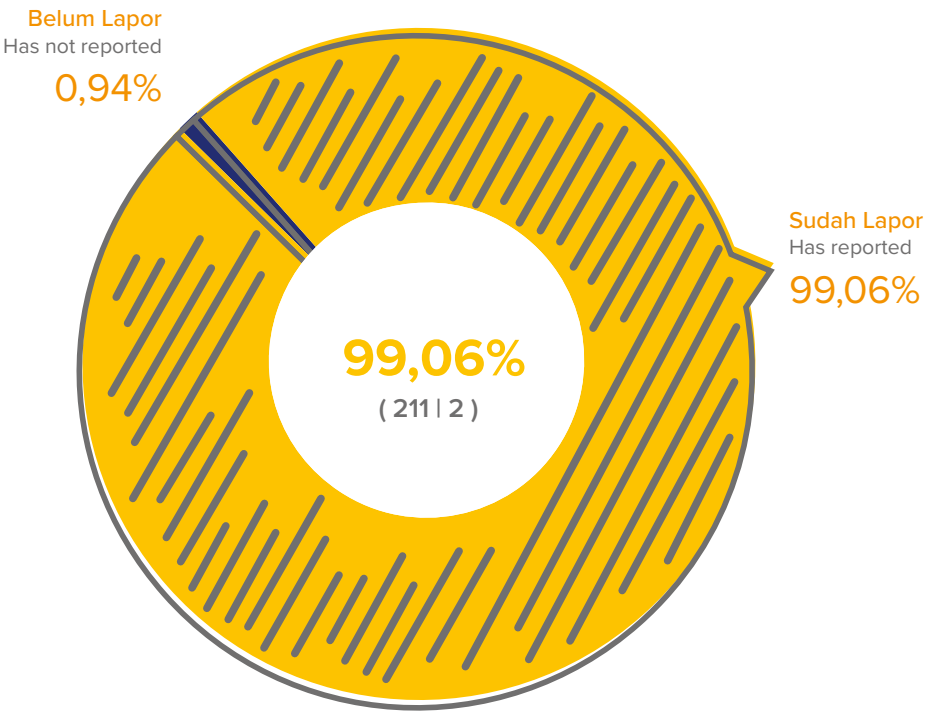
Based on PTBA Board of Directors Decree No. 021/Kep/Int-0100/OT.01/2017, PTBA officials who are required to submit LHKPN are:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Officials on the levels of senior manager or senior functional;
4. Mid-management or mid-functional.

LHKPN Realization in 2023

The realization of LHKPN submission by the PTBA LHKPN Mandatory Report in 2023 reached 99.06%.

Persentase Pelaporan
Reporting Percentage



Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Guna menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan, Perusahaan memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan No. 404/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance untuk Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Perusahaan.

Benturan Kepentingan merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan Insan PTBA memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif dan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra Perusahaan dalam jangka panjang. Insan PTBA wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, melalui pembebasan diri dari situasi tersebut dengan melaporkannya kepada pimpinan atau yang bertanggungjawab atas penanganan benturan kepentingan.

Perusahaan menerapkan 2 (dua) prinsip utama yang harus diikuti seluruh jajaran Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yaitu:
1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk ke pentingan orang atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan;
2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat memengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan jabatan atau yang dapat merugikan Perusahaan.

In order to avoid potential conflicts of interest, the Company has Conflict of Interest Guidelines which were approved based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 and No. 404/0100/2020 concerning the Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for Company Conflict of Interest Policies.

Conflict of Interest is a situation/condition that allows PTBA Personnel to take advantage of their position and authority within the Company for personal, family or group interests, so they cannot carry out their mandated tasks objectively and have implications for the Company's performance and image in the long term. PTBA personnel are obliged to avoid all forms of potential conflicts of interest that could be detrimental to the Company, by freeing themselves from the situation by reporting it to the management or those responsible for handling conflicts of interest.

The Company implements 2 (two) main principles that must be followed by all levels of the Company to prevent conflicts of interest, namely:
1. Do not use the position for personal interests or for the interests of other people or parties related to the Company;
2. Avoid any off-duty activities that could negatively affect independence and objectivity in making decisions that conflict with the position or that could be detrimental to the Company.

Penyediaan Dana untuk Kegiatan Politik
Provision of Funds for Political Activities

Perusahaan mengakui hak setiap Pegawai untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya sebatas diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkenaan dengan penyediaan dana oleh Perusahaan untuk kegiatan politik, sesuai dengan Kebijakan yang berlaku di PTBA, Perusahaan melarang penggunaan *asset* maupun memberikan dana atau sumbangan dalam bentuk apapun kepada partai politik ataupun kegiatan politik lainnya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company recognizes the right of every employee to channel their political aspirations, and does not force or limit an individual's right to channel their political aspirations in the scope of applicable laws and regulations. However, regarding the provision of funds by the Company for political activities, in accordance with the applicable Policy in PTBA, the Company prohibits the use of assets or providing funds or donations in any form to political parties or other political activities outside the provisions of the applicable laws and regulations.

Pemenuhan Hak terhadap Kreditor
Fulfillment of Rights Against Creditors

Perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan pemenuhan terhadap hak-hak kreditur, hal tersebut dilakukan sebagai wujud penerapan tata kelola perusahan yang baik. Pemenuhan hak-hak kreditur termasuk pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/perikatan/kesepakatan antara PTBA dengan para kreditur. Sampai dengan akhir tahun 2023, tidak terdapat perkara sehubungan dengan penundaan pembayaran terhadap kreditor yang menyebabkan status PTBA diajukan gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para kreditornya, sebagaimana disampaikan pada Bagian Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan dalam Bab ini.

The company is committed to fulfill the rights of creditors, as a form of good corporate governance implementation. Fulfillment of creditors' rights, including payments, is carried out in accordance with the provisions of the agreement/commitment/agreement between PTBA and the creditors. Until the end of 2023, there were no cases relating to delays in payments to creditors which resulted in PTBA's status being filed for bankruptcy and/or Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) by its creditors, as stated in the Section on Law Violations Related to Labor, Employment, Consumers, Bankruptcy, Commercial, Competition or Environmental in this Chapter.

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

Perusahaan menyadari pentingnya menghilangkan praktik *Bad Governance* di Perusahaan, yang dapat mengganggu sistem tata kelola perusahaan yang telah diupayakan Perusahaan selama ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Perusahaan yang konsisten menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap aktivitas Perusahaan.

The Company realizes the importance of eliminating Bad Governance practices in the Company, which can disrupt the corporate governance system that the Company has strived for so far. This is in line with the Company's commitment to consistently implement Good Corporate Governance in every Company activity.

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak pernah/pernah mendapatkan laporan adanya aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

Report on Company Activities Polluting the Environment

Throughout 2023, the Company has never received any reports of Company activities that polluted the environment.

Pengungkapan Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat

Perusahaan mengungkapkan perkara penting yang berdampak material yang dihadapi oleh Perusahaan, Anak Perusahaan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam Laporan Tahunan, yang dapat dilihat pada Bagian Perkara Hukum dalam Bab ini.

Disclosure of Important Cases Being Faced by the Company, Subsidiaries, Active Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners

The Company discloses important cases that have a material impact faced by the Company, Subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are currently serving in the Annual Report, which can be seen in the Legal Cases Section in this Chapter.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perusahaan senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perpajakan. Setiap tahunnya, Perusahaan taat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, baik berupa pajak penghasilan, pajak badan, ataupun pajak lainnya. Perusahaan tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi berkaitan dengan sengketa perpajakan, sebagaimana disampaikan pada Bagian Perkara Hukum berkenaan dengan sengketa perpajakan dalam Bab ini.

Disclosure of Tax Obligations Fulfillment

The company always complies with laws and regulations, including tax. Every year, the Company complies with paying and reporting taxes, whether in the form of income tax, corporate tax, or other taxes. The Company has never obtained a guilty verdict from the tax court in relation to a tax dispute, as stated in the Legal Cases section relating to tax disputes in this Chapter.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan tahunan dan laporan keuangan dipublikasikan oleh Perusahaan secara tepat waktu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan segala informasi, analisa, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia).

Inconsistency in the Presentation of Annual Reports and Financial Reports with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

The annual report and financial reports are published by the Company on time, in accordance with applicable rules and regulations, and all information, analysis, and discussion of performance in this annual report refers to the 2022 and 2023 Financial Reports which have been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia).

Perusahaan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Kasus terkait Buruh dan Karyawan

Perusahaan membina hubungan kerja yang baik dengan karyawan berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kasus hubungan industrial berkaitan dengan pegawai Bukit Asam, sebagaimana disampaikan pada Bagian Pelanggaran Hukum Terkait Perburuhan, Ketenagakerjaan, Konsumen, Kepailitan, Komersial, Persaingan atau Lingkungan dalam Bab ini.

Hubungan kerja antara Perusahaan dengan pegawai berjalan baik dan tidak terdapat konflik

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Perusahaan telah menyajikan segmen operasi pada Laporan Keuangan Audited tahun 2023 sesuai dengan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015). Di mana Perusahaan telah menyajikannya menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha antara lain bidang industri tambang batu bara dan berdasarkan lokasi geografis sebagai bentuk pelaporan segmen operasi, seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan *Audited* tahun 2023 catatan.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan Perusahaan baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, maupun Laporan Tahunan Digital yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan, sehingga tidak terdapat perbedaan pada isi dan substansi.

The Company prepared and presented Financial Reports based on Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Accountants Association.

Cases related to Workers and Employees

The Company maintains good working relationships with employees based on good corporate governance. Throughout 2023, there were no industrial relations cases related to Bukit Asam employees, as stated in the Section on Violations of Laws Related to Labor, Employment, Consumers, Bankruptcy, Commercial, Competition or the Environment in this Chapter.

The working relationship between the Company and employees runs well with no conflict.

Disclosure of Operational Segments in Financial Statement

The Company has presented operating segments in the 2023 Audited Financial Report in accordance with PSAK No. 5 (2015 Adjustment). Where the Company has presented it according to business segment, including the coal mining industry and based on geographical location as a form of operating segment reporting, as presented in the 2023 Audited Financial Report notes.

Compatibility of Annual Report Books and Digital Annual Reports

The Company's Annual Report, whether submitted to Shareholders, Stakeholders, or the Digital Annual Report which has been uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company. There are no differences in content and substance.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perusahaan memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mengacu pada prinsip ESG.

The Company is committed to supporting the achievement of sustainable development goals by implementing social and environmental responsibility activities that adhere to ESG principles.




CUKU NYI NYI
JALESVEVA JAYAMA

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainable Performance Highlights

Aspek Ekonomi
Economic Aspect

2023 2022 2021

Kuantitas produk/jasa yang dijual
Quantity of Products/Services Sold

10 Produk Batu Bara
Coal Products

2022 : 10 Produk Batu Bara/Coal Products
2021 : 9 Produk Batu Bara/Coal Products

Kategori Produk
Product Category

Pendapatan
Revenue

38.488.867

2022 : 42.648.590
2021 : 29.261.468

Juta Rupiah
Million Rupiah

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

38.488.867

2022 : 42.648.590
2021 : 29.261.468

Juta Rupiah
Million Rupiah

Produk ramah lingkungan
Eco-Friendly Product

2 PLTS | SPPP

2022 : 2 PLTS | SPPP
2021 : 1 PLTS | SPPP

Unit Produk
Product Unit

Pelibatan pihak lokal (dalam negeri)
Local Supplier Involvement (Domestic)

455

2022 : 421
2021 : 457

Perusahaan/Mitra
Companies/Partners

Jumlah Pegawai Lokal
Total Local Employee

738 | 47%

2022 : 763 | 48%
2021 : 847 | 46%

Orang
Person

Aspek Lingkungan

Environmental Aspect

2023 2022 2021

Penggunaan BBM (Solar)

Fuel Consumption (Diesel)

338.550 | 13.096.478

2022 : 265.415 | 10.267.367
2021 : 174.819 | 6.762.855

Kiloliter
Gigajoule

Penggunaan Listrik

Electricity Consumption

131.428.080 | 473.457

2022 : 125.616.851 | 452.221
2021 : 119.923.281 | 431.724

kWh

Emisi Gas Rumah Kaca

Greenhouse Gas (GHG) Emission

1.028.230

2022 : 828.914
2021 : 558.038

ton CO_2e

Energi

Energy

13.570.094

2022 : 10.720.399
2021 : 7.194.688

Kiloliter
Gigajoule

Hasil Absolut Penurunan Emisi

Absolute Emission Reduction Results

323.296

2022 : 182.792
2021 : 165.524

ton CO_2e

Pengurangan (Penambahan) Air Limbah Non-B3

Reduction (Addition) of Non-Hazardous Waste Water

11.064

2022 : (90.085)
2021 : 54.761

Megaliter

Pengurangan (Penambahan) Limbah Padat Non-B3

Reduction (Addition) of Non-Hazardous Solid Waste

(5,73)

2022 : 2,78
2021 : (12,51)

Ton
Tons

Pengurangan (Penambahan) Limbah Padat dan Cair B3

Reduction (addition) of Hazardous Solid and Liquid Waste

(1.221,82)

2022 : (1.078,16)
2021 : (472,27)

Ton
Tons

Limbah yang Dikirim ke Pembuangan Akhir
Quantity of Products/Services Sold

1.024,39 | 45,73

2022 : 492,57 | 39,78
2021 : 321,48 | 56,64

Limbah Padat B3 | Limbah Padat Non B3
B3 Solid Waste | Non B3 Solid Waste

Ton
Tons

Limbah yang Dialihkan dari Pembuangan Akhir
Waste Redirected from Final Disposal

153,98 | 235,07

2022 : 80,45 | 220,67
2021 : 92,71 | 206,59

Limbah Padat B3 | Limbah Padat Non B3
B3 Solid Waste | Non B3 Solid Waste

Ton
Tons

Penggunaan Air
Water Consumption

2.029,72

2022 : 2.177,50
2021 : 1.605,03

Megaliter

Biaya Lingkungan
Environmental Costs

253.759

2022 : 173.228
2021 : 124.960

Juta Rupiah
Million Rupiah

Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Biodiversity Preservation

13 Spesies Mamalia
Species of Mammals

122 Spesies Burung
Species of Birds

12 Spesies Herpetofauna
Species of Herpetofauna

22 Jenis Tanaman
Types of Plants

2022
13 Spesies Mamalia | Species of Mammals
90 Spesies Burung | Species of Birds
2 Spesies Herpetofauna | Species of Herpetofauna
21 Jenis Tanaman | Plants

2021
12 Spesies Mamalia | Species of Mammals
90 Spesies Burung | Species of Birds
18 Jenis Tanaman | Plants

Spesies
Species

Aspek Sosial
Social Aspect

● 2023 ● 2022 ● 2021

Jumlah total pegawai
Total Number of Employee

1.561
2022 : 1.599
2021 : 1.827

Orang
Person

Jumlah pegawai wanita
Number of Female Employee

298
2022 : 292
2021 : 308

Orang
Person

Perputaran pegawai
Employee Turnover

0,26
2022 : 0,31
2021 : 0,49

Persen
Percent

Jumlah kecelakaan kerja
Number of Work Accident

3
2022 : 4
2021 : 2

Kasus
Case

Sumbangan
Donation

191.093
2022 : 277.261
2021 : 241.934

Juta Rupiah
Million Rupiah

Pendanaan UMK
MSE Funding

31.564
2022 : 8.500
2021 : 5.495

Juta Rupiah
Million Rupiah

Dana Bantuan untuk Kegiatan TJS Lainnya
Other CSR Activities Funding

66.936
2022 : 208.880
2021 : 166.205

Juta Rupiah
Million Rupiah

Kepuasan pelanggan
Customer Satisfaction

3,60
2022 : 3,57
2021 : 3,53

Skor dari skala 4
Score of Scale 4

Inisiatif Eksternal terkait Sustainability

External Initiatives related to Sustainability



Annual Report Award

Juara II Annual Report Award atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 pada Kategori Go Publik Non-Keuangan.

Second place in the Annual Report Award for the Annual Report Fiscal Year 2022 in the Non-Financial Go Public Category.



Corporate Governance Perception Index (CGPI)

PTBA meraih predikat The Most Trusted Company dengan nilai 90,03 yang diselenggarakan oleh The Institute for Corporate Governance (IICG) oleh Majalah SWA.

PTBA awarded as The Most Trusted Company with a score of 90.03 organized by The Institute for Corporate Governance (IICG) by SWA Magazine.



Sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)

ISO 37001:2016 Certification (Anti-Bribery Management System)

PTBA berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), hal ini menandakan komitmen kuat PTBA untuk anti korupsi dan suap.

PTBA has successfully maintained ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) certification, this indicates PTBA's strong commitment to anti-corruption and bribery.



Penghargaan PROPER

PROPER Award

PTBA mendapatkan 2 PROPER Emas untuk unit Pertambangan Tanjung Enim dan Pelabuhan Tarahan. Selain itu PTBA juga mendapatkan 1 PROPER Hijau untuk Dermaga Kertapati. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja lingkungan perusahaan.

PTBA awarded 2 PROPER Gold for Tanjung Enim Mining unit and Tarahan Port. Apart from that, PTBA also awarded 1 Green PROPER for Kertapati Barging Port. This award was given by the Ministry of Environment and Forestry for the company's environmental performance.



Asia Sustainability Reporting Rating (ASSRAT)

PTBA meraih predikat Platinum, merupakan predikat tertinggi atas *rating* Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022. Penghargaan ini diberikan oleh National Center for Corporate Rating (NCSR).

PTBA awarded the Platinum predicate, which is the highest predicate for the 2022 Financial Year Sustainability Report rating. This award was given by the National Center for Corporate Ratings (NCSR).

Carbon Disclosure Project

Perusahaan mendapatkan rating "B" untuk kategori climate change, merupakan rata-rata tertinggi dari capaian industri sejenis di kelasnya, dan meningkat dibanding pencapaian tahun sebelumnya dengan rating “C”.

The company received a "B" rating in the climate change category, the highest average achievement of similar industries in its class, and increase compared to previous year's achievements with a rating of "C"

Informasi Lebih Lanjut
Further Information

Untuk Informasi Lebih Lanjut tentang kinerja keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTBA tahun buku 2023, dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terpisah dengan Laporan Tahunan ini.

For more details on PTBA's sustainability performance and Social and Environmental Responsibility in the 2023 fiscal year, please refer to the separate Sustainability and Social and Environmental Responsibility Report, distinct from this Annual Report.




PKBM
PESONA PULAU TEGA

Lampiran
Appendix





07

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
31 DECEMBER 2023 AND 2022

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2023 AND 2022

PT BUKIT ASAM Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Atas nama Dewan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Arsal Ismail
   Alamat kantor : Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716
   Telepon : 0734-451098
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Farida Thamrin
   Alamat kantor : Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716
   Telepon : 0734-451098
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. *Name* : *Arsal Ismail*
   Office address : *Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716*
   Telephone : *0734-451098*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Farida Thamrin*
   Office address : *Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716*
   Telephone : *0734-451098*
   Position : *Finance and Risk Management Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements;*
   b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

METERAI TEMPEL

Arsal Ismail
Direktur Utama/*President Director*

Farida Thamrin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

JAKARTA
29 **Februari/*February* 2024**

PT BUKIT ASAM TBK
Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, **T** (0734) 451 096, (0734) 452 352, **F** (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, **T** (021) 525 4014, **F** (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, **T** (0721) 31 545, (0721) 31 686, **F** (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, **T** (0711) 512 617, **F** (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, **T** (0754) 61 021, **F** (0754) 61402

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BUKIT ASAM TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bukit Asam Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Lihat Catatan 2t (Informasi kebijakan akuntansi material – Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang), Catatan 4 (Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan – Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang) dan Catatan 18 (Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang) atas laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki kewajiban hukum dan konstruktif terkait dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang disebabkan oleh operasi penambangannya. Besarnya provisi tersebut ditentukan oleh estimasi dan berbagai asumsi utama, diantaranya:

- waktu kegiatan, estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan; dan
- tingkat diskonto dan tingkat inflasi.

Kami menganggap provisi tersebut menjadi hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, melibatkan penggunaan asumsi yang kompleks, dan pertimbangan tingkat tinggi untuk mengestimasi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut:

- Kami memperoleh pemahaman atas proses dan metodologi yang diadopsi oleh Grup untuk menghitung provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang;
- Kami memeriksa metodologi yang digunakan untuk menentukan asumsi terkait dengan waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan konsisten dengan rencana penutupan yang disusun oleh Grup dan disampaikan kepada Pemerintah Indonesia;
- Kami menguji akurasi perhitungan matematis yang atas provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang;
- Kami menilai kemampuan Grup untuk memperkirakan secara akurat dengan membandingkan asumsi biaya perkiraan historis dengan biaya aktual yang terjadi;dan

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.

Provision for environmental reclamation and mine closure

Refer to Note 2t (Material accounting policy information – Provision for environmental reclamation and mine closure), Note 4 (Significant accounting judgements, estimates and assumptions – Provision for environmental reclamation and mine closure) and Note 18 (Provision for environmental reclamation and mine closure) to the consolidated financial statements.

The Group has legal and constructive obligations associated with environmental reclamation and mine closure obligations as a result of its mining operations. The provision was determined using estimation and various key assumptions, which included:

- *the timing of the activities, estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities; and*
- *the discount rate and inflation rate.*

We considered the provision as a key audit matter due to the significance of the balance to the consolidated financial statements, the involvement of complex assumptions and the high degree of judgement to estimate the costs required to satisfy environmental reclamation and mine closure obligations.

How our audit addressed the Key Audit Matter

Our audit procedures include the following:

- *We understood the process and the methodology adopted by the Group to calculate the provision for environmental reclamation and mine closure;*
- *We checked that the methodology used to determine the assumptions related to timing of the activities and estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities were consistent with the closure plans prepared by the Group and submitted to the Indonesian Government;*
- *We tested the mathematical accuracy of calculation of the environmental reclamation and mine closure provision;*
- *We assessed the Group's ability to accurately forecast by comparing historical forecasted cost assumptions to actual costs incurred; and*

- Kami menilai tingkat diskonto dan tingkat inflasi yang digunakan dalam perhitungan provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang, termasuk membandingkan dengan informasi yang tersedia secara publik.

- *We assessed the discount rate and inflation rate adopted to calculate the provision for environmental reclamation and mine closure, including benchmarking to publicly available information.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
29 Februari/*February* 2024

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0243

Biaya Asam Tbk dan Entitas Anak
00223/2.1025/AU.1/02/0243-2/1/II/2024

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	5a	4,138,867	7,030,343	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, neto	6	3,797,292	3,509,912	*Trade receivables, net*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	875,330	783,070	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Persediaan	8	5,499,614	3,837,187	*Inventories*
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	5b	541,818	8,929,196	*Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*
Aset lancar lainnya		295,435	342,440	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**15,148,356**	**24,432,148**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang usaha, neto	6	188,271	232,678	*Trade receivables, net*
Piutang lainnya dari pihak berelasi	30b	18,683	29,407	*Other receivables from related parties*
Investasi pada entitas asosiasi	9a	-	25,314	*Investments in associates*
Investasi pada ventura bersama	9b	7,263,276	6,519,097	*Investments in joint ventures*
Properti penambangan	10	3,271,657	2,873,707	*Mining properties*
Aset tetap	11	8,566,210	8,410,051	*Fixed assets*
Tanaman produktif		72,820	52,679	*Bearer plants*
Pajak dibayar di muka:				*Prepaid taxes:*
- Pajak penghasilan badan	17a	25,370	160,284	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	17a	2,528,981	1,336,059	*Other taxes -*
Aset pajak tangguhan	17d	1,208,683	917,323	*Deferred tax assets*
Goodwill	12	102,077	102,077	*Goodwill*
Aset tidak lancar lainnya		370,805	268,383	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**23,616,833**	**20,927,059**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**38,765,189**	**45,359,207**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	13	2,082,188	1,935,818	*Trade payables*
Biaya yang masih harus dibayar	14	4,857,830	4,485,018	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	15	852,007	1,331,997	*Short-term employee benefit liabilities*
Utang pajak:				*Taxes payable:*
- Pajak penghasilan badan	17b	295,176	893,655	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	17b	496,645	616,152	*Other taxes -*
Pinjaman bank	20	68,000	2,240	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	21	490,017	589,437	*Lease liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	18	329,190	257,812	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pascakerja	19	228,521	358,153	*Current maturities of post-employment benefit liabilities*
Utang jangka pendek lainnya	16	268,527	231,498	*Other current liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**9,968,101**	**10,701,780**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa	21	743,665	770,524	*Lease liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	18	1,787,690	1,535,084	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Liabilitas imbalan pascakerja	19	4,625,311	3,333,429	*Post-employment benefit liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	17d	77,226	102,344	*Deferred tax liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**7,233,892**	**5,741,381**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**17,201,993**	**16,443,161**	***TOTAL LIABILITIES***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/3 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.995 lembar saham Seri B				*Authorised - 5 Series A Dwiwarna shares and 39,999,999,995 Series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 11.520.659.245 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	22	1,152,066	1,152,066	*Issued and fully paid - 5 Series A Dwiwarna shares and 11,520,659,245 Series B shares with a value of Rp100 per share*
Tambahan modal disetor	22	594,303	594,303	*Additional paid-in capital*
Saham treasuri	23	(43,257)	(43,257)	*Treasury shares*
Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		19,194	5,404	*Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		693,100	704,735	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	25	13,730,400	13,730,400	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		5,288,732	12,561,417	*Unappropriated -*
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**21,434,538**	**28,705,068**	***Total equity attributable to owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali	9c	128,658	210,978	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**21,563,196**	**28,916,046**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**38,765,189**	**45,359,207**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan	26	38,488,867	42,648,590	***Revenue***
Beban pokok pendapatan	27a	(29,331,562)	(24,682,304)	***Cost of revenue***
Laba bruto		**9,157,305**	**17,966,286**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	27b	(1,936,635)	(2,390,336)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan dan pemasaran	27c	(656,362)	(953,120)	*Selling and marketing expenses*
Penghasilan lainnya, neto	27d	638,401	522,591	*Other income, net*
Laba usaha		**7,202,709**	**15,145,421**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	28a	584,339	428,033	*Finance income*
Biaya keuangan	28b	(204,038)	(200,203)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	9b	571,303	829,063	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan		**8,154,313**	**16,202,314**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	17c	(1,861,792)	(3,422,887)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan		**6,292,521**	**12,779,427**	***Profit for the year***

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, except for basic and diluted earnings per share)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive (loss)/ income for the year:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	19	(1,039,691)	(615,196)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities*
Beban pajak penghasilan terkait	17d	228,732	135,316	*Related income tax expenses*
		(810,959)	(479,880)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		(11,635)	509,960	*Currency differences from translations of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	13,790	(43,141)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
		(808,804)	**(13,061)**	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**5,483,717**	**12,766,366**	***Total comprehensive income for the year***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		6,105,856	12,567,582	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	9c	186,665	211,845	*Non-controlling interests*
Laba tahun berjalan		**6,292,521**	**12,779,427**	***Profit for the year***
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total other comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		5,297,052	12,554,521	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	9c	186,665	211,845	*Non-controlling interests*
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		**5,483,717**	**12,766,366**	***Total other comprehensive income for the year***
Laba per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	31	**532**	**1,094**	***Earnings per share - basic and diluted (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*										
	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saham treasuri/ *Treasury shares*	Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ *Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income*	Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama/ *Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*	Saldo laba telah dicadangkan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum dicadangkan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**48,545**	**194,775**	**13,730,400**	**8,382,833**	**24,059,665**	**194,059**	**24,253,724**	***Balance as at 1 January 2022***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	12,567,582	12,567,582	211,845	12,779,427	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Perubahan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	-	-	-	(43,141)	-	-	-	(43,141)	-	(43,141)	*Changes in financial asset at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		-	-	-	-	509,960	-	-	509,960	-	509,960	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	19, 17d	-	-	-	-	-	-	(479,880)	(479,880)	-	(479,880)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax*
Dividen kas	9c, 24	-	-	-	-	-	-	(7,909,118)	(7,909,118)	(194,926)	(8,104,044)	*Cash dividends*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**5,404**	**704,735**	**13,730,400**	**12,561,417**	**28,705,068**	**210,978**	**28,916,046**	***Balance as at 31 December 2022***
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	6,105,856	6,105,856	186,665	6,292,521	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Perubahan dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	-	-	-	13,790	-	-	-	13,790	-	13,790	*Changes in financial asset at fair value through other comprehensive income*
Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak dan ventura bersama		-	-	-	-	(11,635)	-	-	(11,635)	-	(11,635)	*Currency differences from translation of subsidiaries' and joint ventures' financial statements*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	19, 17d	-	-	-	-	-	-	(810,959)	(810,959)	-	(810,959)	*Remeasurement of post-employment benefit liabilities, net of tax*
Dividen kas	9c, 24	-	-	-	-	-	-	(12,567,582)	(12,567,582)	(268,985)	(12,836,567)	Cash *dividends*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	**19,194**	**693,100**	**13,730,400**	**5,288,732**	**21,434,538**	**128,658**	**21,563,196**	***Balance as at 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKIT ASAM Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		38,297,048	42,635,578	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(28,936,511)	(22,586,762)	*Cash paid to suppliers and employees*
Pembayaran royalti		(4,342,928)	(3,861,246)	*Payments of royalties*
Penerimaan pengembalian pajak		134,914	14,874	*Cash receipts from tax restitution*
Pembayaran pajak penghasilan		(2,521,878)	(3,957,385)	*Payments for income taxes*
Penerimaan bunga		590,051	422,842	*Receipt of interest income*
Pembayaran bunga		(115,989)	(140,462)	*Payment of interest*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		**3,104,707**	**12,527,439**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan aset tetap dan tanaman produktif		(937,246)	(780,546)	*Addition of fixed assets and bearer plants*
Penempatan deposito berjangka		(1,747,459)	(21,351,993)	*Placement of time deposits*
Pencairan deposito berjangka		10,134,836	21,433,783	*Withdrawal of time deposits*
Penambahan properti penambangan		-	(108,590)	*Addition of mining properties*
Penempatan dana reklamasi dan penutupan tambang		(72,311)	(15,678)	*Placement of reclamation and mine closure fund*
Pengeluaran pada aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7	(80,000)	(471,250)	*Addition of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Penerimaan dari pengembalian investasi pada entitas asosiasi		198,665	-	*Cash receipts from refund of investment in associates*
Penambahan investasi pada ventura bersama	9b	(247,836)	-	*Addition of investments in joint ventures*
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		**7,248,649**	**(1,294,274)**	***Net cash flows provided from/(used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen kepada pemegang saham induk	24	(12,567,582)	(7,909,118)	*Payment of dividends to owners of the parent entity*
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	9c	(268,985)	(194,926)	*Payments of dividends to non controlling interests*
Pembayaran pinjaman bank		(2,240)	(3,700)	*Proceeds from bank borrowings*
Penerimaan deviden dari entitas pengendalian bersama	9c	9,240	-	*Proceeds of dividends from non controlling interests*
Penerimaan atas pinjaman bank	35b	68,000	-	*Repayments of bank borrowings*
Pembayaran liabilitas sewa	35b	(473,351)	(560,870)	*Payment of lease liabilities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(13,234,918)**	**(8,668,614)**	***Net cash flows used in financing activities***
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(2,881,562)**	**2,564,551**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	**7,030,343**	**4,394,195**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
EFEK PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS		**(9,914)**	**71,597**	***EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	**4,138,867**	**7,030,343**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***
Lihat Catatan 35a untuk informasi transaksi non-kas Grup.				*Refer to Note 35a for the Group's non-cash information.*

1. UMUM

PT Bukit Asam Tbk ("Perusahaan" atau "PTBA") didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1, yang diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 tanggal 28 November 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33, Tambahan No. 550, tanggal 25 April 1986. Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan disesuaikan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("PT") dan nama Perusahaan dapat disingkat menjadi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Perubahan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Ketetapan No. AHU-50395.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 76, Tambahan No. 18255 tanggal 19 September 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), meski berubah statusnya, anggota *Holding* tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Negara memiliki pengendalian terhadap anggota *Holding*, baik secara langsung melalui saham Seri A "Dwiwarna", maupun tidak langsung melalui PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (sebelumnya MIND ID).

Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui akta inbreng tanggal 28 November 2017 sehingga PT Bukit Asam (Persero) Tbk berubah nama menjadi PT Bukit Asam Tbk.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan, diantaranya, pengaturan tentang saham, pemindahan hak atas saham, dewan komisaris dan direksi, tugas wewenang dan kewajiban direksi dan dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Perubahan tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No. 61 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("RUPS") yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan Akta No. 62 Tahun 2023 dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0130619 tanggal 22 Juni 2023.

1. GENERAL

PT Bukit Asam Tbk (the "Company" or "PTBA") was established on 2 March 1981 under Government Regulation No. 42 of 1980, based on Notarial Deed No. 1 of Mohamad Ali, as amended by the Notarial Deeds No. 5 dated 6 March 1984 and No. 51 dated 29 May 1985 of the same notary. The deed of establishment and its amendments were approved by the Minister of Justice in Decree No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 dated 28 November 1985 and published in Supplement No. 550 of the State Gazette No. 33 dated 25 April 1986. In 2008, the Company's Articles of Association were amended to comply with Law No. 40, 2007 on Limited Liability Companies ("PT") and to gain approval for the abbreviation of the Company's name as PT Bukit Asam (Persero) Tbk. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decree No. AHU-50395.AH.01.02 of 2008 dated 12 August 2008 and was published in Supplement No. 18255 of State Gazette No. 76 dated 19 September 2008.

In accordance with Government Regulation No. 72 of 2016 on State Capital Administration and Administration Procedures at State-Owned Enterprises ("BUMN"), even if the ownership status changes, the Holding members will still be treated the same as state-owned enterprises for strategic matters. The state has control over the holding members either directly through the Series A "Dwiwarna" shares or indirectly through the PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (formerly MIND ID).

Based on the amendment approved by the Minister of State-Owned Enterprises through the deed of inbreng dated 28 November 2017, PT Bukit Asam (Persero) Tbk changed its name to PT Bukit Asam Tbk.

The most recent amendment to the Company's Articles of Association related to share arrangements, the transfer rights of shares, the board of commissioners and directors, roles authorisation and duties of the directors and board of commissioners, and general meetings of shareholders. The amendment was stipulated in Deed No. 61 of 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. which was received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0138986 dated 12 July 2023.

Based on the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS") that was held on 15 June 2023, there is an amendment of the composition of the Board of Commissioners was stipulated in Deed No. 62 of 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. and received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.09-0130619 dated 22 June 2023.

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2022 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.06/2022 Tahun 2022 dan Akta Penyertaan Saham dengan Pemasukan dalam Perseroan Terbatas PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MII") yang sebelumnya disebut sebagai MIND ID No. 137 pada tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn maka terhitung sejak tanggal 21 Maret 2023, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki 7.490.437.495 lembar saham seri B atau 65,02%. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2023, melanjutkan rangkaian transaksi tersebut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah mengalihkan saham yang dimilikinya (saham treasuri yang dibeli pada tahun 2019) sebanyak 105.213.200 lembar saham seri B atau 0,91% kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) namun saham "Dwiwarna" tetap dimiliki oleh Pemerintah.

Perusahaan dan entitas anaknya (keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") bergerak dalam bidang industri tambang batubara dan aktivitas terkait, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya, bidang pengembangan perkebunan, dan bidang pelayanan kesehatan.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang terdaftar di Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Pada bulan Desember 2002, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 346.500.000 saham yang terdiri dari 315.000.000 saham divestasi yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah dan 31.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp575 (nilai penuh) per saham. Penawaran Umum Saham Perdana tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2002.

***1. GENERAL** (continued)*

Based on Government Regulations no. 45 and 46 of 2022 and Minister of Finance Decree No. 516/KMK.06/2022 Year 2022 and Deed of Participation of Shares with Entry into a Limited Liability Company PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("MII") which previously referred to as MIND ID No. 137 on 21 March 2023 before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, as of 21 March 2023, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) has 7,490,437,495 series B shares or 65.02%. Then on 6 April 2023, continuing the series of transactions, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) transferred its shares (treasury shares purchased in 2019) of 105,213,200 series B shares or 0.91% to PT Mineral Industri Indonesia (Persero) but "Dwiwarna" shares are still owned by the Government .

The scope of activities of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") covers coal mining and related activities, including general surveying, exploration, exploitation, processing, transportation and trading, management of special coal port facilities for internal and external needs, the operation of steam power plants for internal and external needs and the provision of consulting services related to the coal mining industry as well as its derivative products, plantation development activities and healthcare activities.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim, South Sumatra.

In December 2002, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 346,500,000 shares which consisted of 315,000,000 divestment shares previously owned by the Government as well as 31,500,000 new shares with a par value of Rp500 (full amount) per share and an offering price of Rp575 (full amount) per share. The shares offered in the IPO were listed on the Indonesian Stock Exchange on 23 December 2002.

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan juga menerbitkan 173.250.000 waran Seri I yang diberikan kepada pemegang saham (kecuali kepada Negara Republik Indonesia) dengan harga pelaksanaan waran sebesar Rp675 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2005, seluruh waran telah dikonversi.

Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan *Vice President* Satuan Pengawasan Internal merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Irwandy Arif	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Edmar Piterdono Hamzah	:	*Commissioners*
		Carlo Brix Tewu		
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi	:	*Independent Commissioner*
		Kurnia Toha		
		Rahmat Hidayat Pulungan		
Direktur Utama	:	Arsal Ismail	:	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Farida Thamrin	:	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Operasi dan Produksi	:	Suhedi	:	*Operation and Production Director*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Rafli Yandra	:	*Business Development Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Suherman	:	*Human Resources Director*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Agus Suhartono	:	*President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris	:	Devi Pradnya Paramita	:	*Commissioners*
		Edmar Piterdono Hamzah		
		Carlo Brix Tewu		
		Irwandy Arif		
Komisaris Independen	:	Andi Pahril Pawi	:	*Independent Commissioner*
Direktur Utama	:	Arsal Ismail	:	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Farida Thamrin	:	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Operasi dan Produksi	:	Suhedi	:	*Operation and Production Director*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Rafli Yandra	:	*Business Development Director*
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Suherman	:	*Human Resources Director*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Andi Pahril Pawi	:	*Chairman*
Wakil Ketua	:	Kurnia Toha	:	*Vice Chairman*
Anggota	:	Dodi Masykur	:	*Members*
		Fadhila Achmadi Rosyid		

***1. GENERAL** (continued)*

The Company also issued 173,250,000 Series I warrants to the shareholders (except the Government of the Republic of Indonesia) at an exercise price of Rp675 (full amount). As at 31 December 2005, these warrants were fully exercised.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's Corporate Secretary and the Vice President of the Internal Control Department are the key management personnel of the Company.

As at 31 December 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners and its Board of Directors were as follows:

As at 31 December 2022, the composition of the Company's Board of Commissioners and its Board of Directors were as follows:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2023 were as follows:

1. UMUM (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2022 were as follows:

Ketua	:	Andi Pahril Pawi	:	*Chairman*
Wakil ketua	:	Edmar Piterdono Hamzah	:	*Vice Chairman*
Anggota	:	Dodi Masykur	:	*Members*
		Fadhila Achmadi Rosyid		

Pada 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 1.561 karyawan tetap (2022: 1.599 karyawan tetap) (tidak diaudit).

As at 31 December 2023, the Company had 1,561 permanent employees (2022: 1,599 permanent employees) (unaudited).

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan kepemilikan tidak langsung pada entitas anak berikut ini:

The Company has direct and indirect ownership of the following subsidiaries:

	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk Perusahaan/ *Proportion of ordinary shares held by parent*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Grup/ *Proportion of ordinary shares held by the Group*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh kepentingan nonpengendali/ *Proportion of ordinary shares held by non-controlling interests*		Total asset* (sebelum eliminasi konsolidasi)/ *Total assets* (before consolidation elimination)*	
				31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec 2023* %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec 2023* %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/*Dec* 2023	31 Des/*Dec* 2022
Entitas anak melalui kepemilikan langsung/ *Directly owned subsidiaries*											
PT Batubara Bukit Kendi ("BBK")a)	Penambangan batubara/ *Coal mining*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	1997	99.39	98.00	98.00	98.00	2.00	2.00	54,320	12
PT Bukit Asam Prima ("BAP")	Perdagangan batubara/ *Coal trading*	Jakarta	2007	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	784,394	402,271
PT Internasional Prima Coal ("IPC")	Penambangan batubara/ *Coal mining*	Palaran, Kalimantan Timur/*East Kalimantan*	2010	51.00	51.00	51.00	51.00	49.00	49.00	773,924	1,030,487
PT Bukit Asam Metana Ombilin ("BAMO")	Penambangan gas metana batubara/ *Coal methane gas mining*	Jakarta	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	34	34
PT Bukit Asam Metana Enim ("BAME")	Penambangan gas metana batubara/ *Coal methane gas Mining*	Jakarta	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	73	73
PT Bukit Asam Banko ("BAB")	Pertambangan dan perdagangan/ *Coal mining and trading*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatra*	Belum beroperasi/ *Not yet operating*	99.99	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	313	313
PT Bukit Multi Investama ("BMI")	Melakukan investasi pada perusahaan lain/ *Investments in other companies*	Jakarta	2014	99.91	99.99	99.99	99.99	0.09	0.01	3,079,751	2,946,135
PT Bukit Energi Investama ("BEI")	Melakukan investasi pada perusahaan lain/ *Investments in other companies*	Jakarta	2015	99.60	99.99	99.99	99.99	0.04	0.01	262,089	225,834
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung/*Indirectly owned subsidiaries*											
PT Bumi Sawindo Permai ("BSP")	Perkebunan kelapa sawit dan hasil olahan kelapa sawit/ *Palm plantation and palm processing*	Tanjung Agung, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	2007	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	435,565	375,682

*) total aset 31 Desember 2022 sudah diaudit dan total aset 31 Desember 2023 tidak diaudit

**) total assets 31 December 2022 was using the audited figure and total assets 31 December 2023 was using the unaudited figure*

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL** (continued)*

	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh induk Perusahaan/ *Proportion of ordinary shares held by parent*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Grup/ *Proportion of ordinary shares held by the Group*		Proporsi saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh kepentingan nonpengendali/ *Proportion of ordinary shares held by non-controlling interests*		Total aset* (sebelum eliminasi konsolidasi)/ *Total assets* (before consolidation elimination)*	
				31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/ *Dec* 2023 %	31 Des/ *Dec* 2022 %	31 Des/*Dec* 2023	31 Des/*Dec* 2022
Entitas anak melalui kepemilikan tak langsung (lanjutan)/ ***Indirectly owned subsidiaries*** *(continued)*											
PT Bukit Prima Bahari ("BPB")	Pelayaran/ *Sea voyages*	Jakarta	2014	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	392,239	232,721
PT Pelabuhan Bukit Prima ("PBP")	Jasa pelabuhan/ *Port service*	Jakarta	2014	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01	148,341	126,410
PT Bukit Asam Medika ("BAM")	Rumah sakit, klinik, poliklinik, poliklinik Spesialis, dan balai pengobatan/ *Hospital, clinic, polyclinic, specialist polyclinic, and medical services*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/*South Sumatra*	2014	-	-	97.50	97.50	2.50	2.50	69,010	54,085
PT Satria Bahana Sarana ("SBS")	Jasa penambangan dan sewa/*Mining service and rental*	Tanjung Enim, Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	2014	-	-	95.00	95.00	5.00	5.00	1,969,428	1,936,525
PT Bukit Energi Servis Terpadu ("BEST")	Perdagangan, jasa, perbengkelan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan/ *Trading, service, workshop, construction, industry, and transportation*	Jakarta	2015	-	-	99.62	99.62	0.38	0.38	177,369	140,745
PT Penajam Internasional Terminal ("PIT")	Jasa pelabuhan/ *Port services*	Jakarta	2016	-	-	72.00	72.00	28.00	28.00	25,780	17,079
PT Bukit Multi Properti ("BMP")	Real estat dan konstruksi/ *Real estate and Construction*	Jakarta	2019	-	-	99.90	99.90	0.10	0.10	19,686	11,180

*) total aset 31 Desember 2022 sudah diaudit dan total aset 31 Desember 2023 tidak diaudit

**) total assets 31 December 2022 was using the audited figure and total assets 31 December 2023 was using the unaudited figure*

Catatan:

a) Operasi penambangan dihentikan sementara.

Notes:

a) Mining operations have been temporarily suspended.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2d untuk informasi mata uang fungsional.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted for the preparation of the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of the preparation of the consolidated financial statements

The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards and with the Regulations of the Financial Services Authority ("OJK") No. VIII.G.7 concerning Guidance on Financial Statements Presentation.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for financial assets at fair value through other comprehensive income which is recognised at fair value and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to Note 2d for information on the functional currency.

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Reformasi Pajak Internasional Ketentuan Model Pilar Dua

Standar baru dan amendemen tertentu telah diterbitkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar
- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif"
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang sewa jual dan sewa balik

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The adoption of the following amendments to accounting standards which are effective from 1 January 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies*
- *The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use*
- *The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates*
- *Amendment SFAS 46 "Income taxes" about Deferred Tax arising related to Assets and Liabilities arising from a single transactions*
- *Amendment SFAS 46 "Income taxes" about International Tax Reform – Pillar Two Model Rules*

New standards and amendments have been published that are not mandatory for the year ended on 31 December 2023 and have not been adopted early by the Group:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities between current and non-current*
- *SFAS 74 "Insurance Contracts"*
- *Amendment to SFAS 74 "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information"*
- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants*
- *The amendment to SFAS 73 "Leases" about leases on sale and leaseback*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") (lanjutan)

Standar baru dan amendemen terhadap standar akuntansi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali PSAK 74 dan Amendemen PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan Amendemen pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")** (continued)*

New standards and amendments to the above accounting standards are effective from 1 January 2024, except for SFAS 74 and Amendment to SFAS 74 which is effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

Beginning 1 January 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI").

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries include all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.1. Konsolidasi (lanjutan)

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakusisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

i.2. Akuisisi

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

***i.1. Consolidation** (continued)*

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition dates.

The Group recognises any non-controlling interest in an acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separately from the owner's equity of the parent.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

i.2. Acquisition

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at the acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed an asset or liability are recognised in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for in equity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan. Secara umum, Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***i. Subsidiaries** (continued)*

***i.2. Acquisition** (continued)*

The excess of the consideration transferred, the amount of non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired, and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Associates and joint ventures

Associates are entities over which the Group has significant influence but not control. Generally, the Group owns 20% or more of the voting rights but not exceeding 50%. Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement under which the parties which share joint control have the rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

ii. Entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan apabila diperlukan agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***ii. Associates and joint ventures** (continued)*

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make payments or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture will be changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

ii. Entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di mana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Principles of consolidation** (continued)*

***ii. Associates and joint ventures** (continued)*

- ***Equity method of accounting** (continued)*

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

- ***Disposals***

An investment in an associate or joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date on which significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from partial the disposal or dilution of an investment in an associate and a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan berdasarkan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") dan kurs transaksi yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Foreign currency transactions** (continued)*

ii. Transaction and balance

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the dates of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates on such dates. Foreign exchange gains and losses arising from the settlement of such transactions in foreign currencies, and from the translation at the end of year exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The exchange rates used are based on the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR"). The transaction rates published by Bank Indonesia were as follows:

	2023	2022	
1 Dolar Amerika Serikat ("AS$")	15,439	15,592	*United States Dollars ("US$")*
1 Dolar Australia ("AU$")	10,565	10,581	*Australian Dollars ("AU$")*
1 Dolar Singapura ("SG$")	11,712	11,659	*Singapore Dollars ("SG$")*
1 Euro ("€")	17,139	16,713	*Euro ("€")*

iii. Entitas dalam Grup

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

(a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;
(b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan
(c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

iii. Entities within the Group

The results of the operations and the financial position of all the Group's subsidiaries that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

(a) The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate on the date of the consolidated statement of financial position;
(b) The income and expenses for each profit or loss are translated at the average exchange rates of the period (unless the average does not provide a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates prevailing on the dates of the transactions); and
(c) All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

iii. Entitas dalam Grup (lanjutan)

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dianalisis antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

f. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang lainnya adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Foreign currency transactions** (continued)*

***iii. Entities within the Group** (continued)*

Changes in the fair values of monetary securities denominated in foreign currency classified as financial assets at fair value through other comprehensive income are analysed between based on the translation differences arising from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amounts of the securities. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity periods of three months or less at original that are not used as collateral or restricted.

f. Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Piutang (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian kerugian penurunan nilai bersih dalam laba usaha. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 2o untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

h. Persediaan

Persediaan batubara dan produksi perkebunan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang atas biaya yang terjadi selama tahun berjalan dan terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, serta alokasi biaya *overhead* berdasarkan kapasitas operasi normal yang berkaitan dengan aktivitas penambangan dan perkebunan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***f. Receivables** (continued)*

Impairment losses on receivables are presented as part of the net impairment losses within operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2o for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

Non-trade receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statement of financial position.

g. Transactions with related parties

The Group has entered into transactions with certain related parties, as defined in SFAS 7, "Related Party Disclosures".

Based on OJK Regulation No. VIII.G.7, Government-related entities include any entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

h. Inventories

Coal and plantation inventories are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined based on the weighted average cost incurred during the year and comprises materials, labour and overheads based on normal operating capacity related to mining and plantation activities. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Perlengkapan dan suku cadang diakui pada harga perolehan, ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, setelah dikurangi penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat.

Penyisihan untuk perlengkapan dan suku cadang yang usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada tahun yang digunakan.

i. Aset eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pemaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

(i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***h. Inventories** (continued)*

Materials and spare parts are valued at cost, determined on a weighted average method, less the provision for obsolete and slow-moving inventory.

The provision for obsolete and slow-moving materials and spare parts is determined on the basis of the estimated future usage of individual inventory items. Supplies and materials are charged to production costs in the year in which they are used.

i. Exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation activity involves searching for mineral resources after the Group has obtained the legal right to explore a specific area, determining the technical feasibility and assessing the commercial viability of an identified resource.

Exploration and evaluation expenditure includes costs that are directly attributable to the following:

- *acquisition of rights to explore;*
- *topographical, geological, geochemical and geophysical studies;*
- *exploratory drilling;*
- *trenching and sampling; and*
- *activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting mineral resources.*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met:

(i) the tenure rights of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through the successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale; or

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini: (lanjutan)

(ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan menemukan sumber daya mineral pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi di atas tidak lagi terpenuhi.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti penambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***i. Exploration and evaluation assets** (continued)*

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met: (continued)

(ii) exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are ongoing.

Capitalised costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant area of interest, and exclude physical assets which are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to exploration or evaluation assets only to the extent that those costs can be related directly to finding mineral resources in the relevant area of interest.

Capitalised exploration and evaluation expenditure is written off when the above conditions are no longer satisfied.

As the exploration and evaluation assets are not available for use, they are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to "mining properties - mines under development".

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Properti penambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

Saldo properti penambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai dari awal tahun terjadinya perubahan.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun properti penambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang berproduksi" pada akun properti penambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan rencana manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang berproduksi".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti penambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "tambang yang berproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. "Tambang yang berproduksi" dideplesi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

j. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights which are recorded as fixed assets.

The balance of mining properties is amortised over the life of the property using the units of production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis from the beginning of the year in which the change occurs.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Mines under development" are reclassified as "mines in production" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

No amortisation is recognised for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production".

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of "mines in production" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

"Mines in production" (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units of production method, with separate calculations being made for each area of interest. "Mines in production" will be depleted using the units of production method on the basis of proven and probable reserves.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Properti penambangan (lanjutan)

Properti penambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti penambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

"Tambang dalam pengembangan" dan "tambang yang berproduksi" diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2m.

k. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16, "Aset Tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya historis termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada saat akuisisi aset. Apabila terdapat kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap maka beban yang terkait akan ditambahkan ke biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan dan kewajiban atas biaya terkait tersebut diakui.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***j. Mining properties** (continued)*

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially recognised as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the accounting policy outlined above.

"Mines under development" and "mines in production" are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2m.

k. Fixed assets

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73, "Leases". If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16, "Property, Plant and Equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.

Fixed assets, except land rights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. In the case of mandatory dismantling and asset removals the related costs are added to the cost of the relevant assets and provisions are recognised to cover the costs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan berdasarkan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, umur tambang, atau masa Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), yang dinyatakan sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION* *(continued)*

k. *Fixed assets* *(continued)*

Fixed assets are depreciated using the straight-line method to their estimated residual value over the lesser of the estimated useful lives of the assets, the life of the mine or the term of the mining licence ("IUP") as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	5 - 20	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	4 - 20	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	3 - 4	*Office and hospital equipments*

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang digantikan dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the assets' carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of the replaced parts are derecognised. Repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2o).

An assets' carrying value is written down immediately to its recoverable amount if the assets' carrying value is greater than its estimated recoverable amount (Note 2o).

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin, peralatan dan kendaraan dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery, equipment and vehicles are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to the fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. *Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak dan merupakan selisih imbalan yang ditransfer terhadap kepemilikan dalam nilai wajar neto atas aset, liabilitas, dan liabilitas kontinjensi teridentifikasi dan nilai wajar kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK"), atau kelompok UPK, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi *goodwill* menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang *goodwill*-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal. *Goodwill* dipantau pada level segmen operasi.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi, dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahaan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

Dalam menentukan penurunan nilai, aset pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

I. Goodwill

Goodwill arises from the acquisition of subsidiaries and represents the excess of the consideration transferred over the interest in the net fair value of the net identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree and the fair value of the non-controlling interest in the acquiree.

For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each Cash-Generating Unit ("CGU"), or group of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each CGU or group of CGUs to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which goodwill is monitored for internal management purposes. Goodwill is monitored at the operating segment level.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Assets that have a definite useful life are subject to amortisation or depreciation and are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised at the amount by which the assets' carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an assets' fair value less costs of disposal and its value in use.

For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash inflows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

o. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

(i) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
(ii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
(iii) aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***m. Impairment of non-financial assets** (continued)*

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the assets' recoverable amount since the last impairment testing was carried out. The reversal of impairment losses will be recognised immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

o. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:

(i) financial assets measured at amortised cost;
(ii) financial assets measured at fair value through profit or loss; and
(iii) financial assets at fair value through other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual ketika menentukan apakah arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

(ii) Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

- Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Financial assets** (continued)*

***i. Classification, recognition and measurement** (continued)*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

(i) Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" criteria.

(ii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

The classification applies to the following financial assets:

- *Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" criteria.*

- *All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value of gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Ketika aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai bagian dari "Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" dan akan direklasifikasi ke laba rugi.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian ("KKE") terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Financial assets** (continued)*

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

When financial assets are classified as financial assets at fair value through other comprehensive income, the accumulated fair value adjustments recognised in equity are included in the "Reserve for changes in financial assets at fair value through other comprehensive income" and will be reclassified to profit or loss.

iii. Impairment of financial assets

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses ("ECL") associated with its debt instruments carried at amortised cost and fair value through other comprehensive income. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that are indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset keuangan (lanjutan)

iii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lainnya dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letters of credit*, dan garansi bank. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

p. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***o. Financial assets** (continued)*

***iii. Impairment of financial assets** (continued)*

The Group applies the "simplified approach" to measure the ECL which uses a lifetime ECL on a forward-looking basis for all trade receivables balance and other receivables and contract assets without significant financing component and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

iv. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

p. Lease

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Grup tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Aset dan liabilitas yang timbul dari perjanjian sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat diskonto.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Lease** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- *the Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*
- *the Group has the right to direct the use of the identified asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the following:

- *the initial amount of the lease liability;*
- *lease payment made at the commencement date, less any lease incentive;*
- *initial direct cost incurred; and*
- *an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group does not separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Assets and liabilities arising from lease arrangements are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

q. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam keadaan seperti ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Lease** (continued)*

***The Group as a lessee** (continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" in the consolidated statements of financial position.

Short term leases and low-value asset leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

q. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan di negara di mana perusahaan dan entitas anaknya beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan mencukupi untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi, tidak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, karena saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

r. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah jasa tersebut diberikan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***q. Taxation** (continued)*

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither the accounting nor the taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting period end and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is not provided on temporary differences arising on investment in subsidiaries and associates, because the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

r. Employee benefit liabilities

Short-term employee benefit

The Group recognises short-term employee benefit liabilities when services are rendered and the compensation for such services is to be paid within 12 months after such services have been rendered.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun

Grup memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan kebijakan Grup.

Program pensiun imbalan pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang di mana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefit liabilities** (continued)*

Pension benefits

The Group has various pension schemes in accordance with prevailing Law and Group's policy.

Defined benefit plan

A defined pension benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually depending on one or more factors, such as age, years of service or compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Law or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation as at the consolidated statement of financial position date, less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in profit or loss in employee benefit expense, which reflects the increase in the defined obligations resulting from employee service in the current year.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program pensiun pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pada tanggal 21 Oktober 2002, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan (No. KEP-245/KM.6/2002) untuk membentuk Lembaga (*Trust*) terpisah yang mengelola dana pensiun dalam bentuk Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") bernama Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA"), untuk mengelola, atas nama para anggota, semua kekayaan agar dapat memenuhi kewajiban pensiun dari Perusahaan.

Program pensiun iuran pasti

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun di mana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Perusahaan memiliki program tabungan pensiun karyawan untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi dihitung secara periodik oleh perusahaan asuransi. Para karyawan mengkontribusikan persentase tertentu dari gaji dasar dan sisa kontribusi ditanggung oleh Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefit liabilities** (continued)*

***Defined benefit plan** (continued)*

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

Remeasurement gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

On 21 October 2002, the Company received approval from the Ministry of Finance (No. KEP-245/KM.6/2002) to establish a separate, trustee-administered pension fund as a defined benefit retirement plan ("PPMP"), namely Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA"), to hold, on behalf of plan members, assets held to satisfy the pension obligations of the Company.

Defined contribution plan

A defined pension contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal nor constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

The Company has a contributory employee savings programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by Pension Fund ("DPLK"). Contributions are calculated on a periodic basis by the insurance company. The employees contribute a certain percentage of their basic salary and the Company contributes the remaining balance of the required amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan, santunan kematian, cuti jangka panjang, penghargaan pengabdian, dan uang pisah.

Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Santunan kematian diberikan bila pegawai dan anggota keluarga tertentu meninggal dunia. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada peraturan Perusahaan. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara: (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***r. Employee benefit liabilities** (continued)*

Other long-term employee benefits

The Company also provides other long-term employment benefits, such as long service rewards, death allowances, long service leave, jubilee rewards, and separation rewards.

The long service reward is paid when the employees reach their retirement age. Death allowance is paid when the employee or the qualifying family members pass away. The reward is based on the Company's regulations. Meanwhile the separation reward benefit is paid to employees in the event of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

s. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfil the following five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atas jasa tersebut).

Pendapatan dari penjualan produk batubara diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian berikut:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***s. Revenue and expense recognition** (continued)*

***Revenue** (continued)*

Revenue recognition has to fulfill the following five step assessment: (continued)

3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.

4. Allocate the transaction price to each obligation on the basis of the relative standalone selling prices of each distinct good or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin.

5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Revenue from sales of coal and palm oil products is recognised when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the following five indicators of control:

1. The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.

3. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.

4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.

5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

Revenue recognition has to fulfill the following five step assessment: (continued)

2. The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms and conditions of the sales contract.

3. The customer has accepted the goods. Sales revenue may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognised based on the Group's best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual quality and/or quantity are not significant.

4. The customer has legal title to the goods.

5. The customer has physical possession of the goods.

A performance obligation may be satisfied at either of the following:

1. Point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan berasal dari penjualan batubara Grup dan pendapatan lainnya.

i. Penjualan produk batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian beralih ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal di mana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban kinerja, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Dalam kondisi ini, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu, Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

Revenue represents revenue from the sale of the Group's coal and other revenues.

i. Sales of coal products

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customers and sales revenue is recognised when the product is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customers' premises.

The Group sells its coal products Free on Board ("FOB"), where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has been passed on at the loading port. For this term there is only one performance obligation, which is for the provision of the product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal on terms of Cost, Insurance and Freight ("CIF"), but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port. Under this condition, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation for the sale of coal due to the control over coal supplies passing to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

ii. Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya Grup diperoleh dari penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan penjualan obat-obatan.

Pendapatan dari penjualan tersebut diakui pada suatu titik waktu saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan.

Pendapatan diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan pengukuran langsung atas jasa yang dialihkan kepada pelanggan sampai saat ini secara relatif terhadap sisa jasa yang dijanjikan dalam kontrak.

Beban

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban-beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

s. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue *(continued)*

ii. Other revenue

The Group's other revenue derives from sales of crude palm oil, palm kernels, and medicine.

Revenue from sales above is recognised at the point in time when the control of goods has been transferred to the customer.

Revenue is recognised over time using the output method as the basis of direct measurement of the services transferred to date relative to the remaining services promised under the contract.

Expense

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or are incremental to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. Therefore, these costs are eligible for capitalisation under SFAS 72 and recognised as other current assets. Such cost will be amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Other expenses are recognised when they are incurred.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Grup memiliki kewajiban hukum dan konstruktif terkait dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang disebabkan oleh operasi penambangannya. Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban konstruktif yang berkaitan dengan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang area penambangan. Kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau dideplesikan selama masa manfaat aset tersebut. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan dalam pengukuran liabilitas yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan sebagai beban pokok pendapatan. Pengaruh nilai waktu berjalan yang timbul dari mendiskontokan kewajiban yang diestimasi tersebut dicatat sebagai biaya keuangan.

Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang merupakan estimasi terbaik dari nilai kini dari pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan tutup tambang pada tanggal pelaporan, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Untuk itu, estimasi mengenai jumlah kewajiban untuk reklamasi dan penutupan tambang, membutuhkan manajemen untuk mempertimbangkan waktu kegiatan, estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

t. Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group has legal and constructive obligation associated with environmental reclamation and mine closure obligation as result of its mining operations. These obligations are recognised as liabilities when a constructive obligation with respect to the environmental reclamation and mine closure of the mine area is incurred. The reclamation and mine closure obligations that are equivalent to these liabilities are capitalised as part of the related assets' carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the assets' useful life. These obligations are measured at the present value of the expenditure that is expected to be required to settle the obligation using a discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arise during production are also charged to the cost of revenue. The unwinding of the effect of discounting the estimated liability is recognised as a finance cost.

The provision for environmental reclamation and mine closure represents the best estimate of the present value of the future expenditure required to undertake the reclamation and mine closure as at the reporting date, based on current legal requirements.

The estimate of the liability for reclamation and mine closure costs, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of the activities, estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities, discount rate and inflation rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang (lanjutan)

Perubahan dalam pengukuran kewajiban reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang timbul dari perubahan estimasi waktu kegiatan, tingkat inflasi atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

u. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama. Pengambil keputusan operasional utama, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, serta membuat keputusan strategis adalah Direksi.

v. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Perusahaan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Provision for environmental reclamation and mine closure** (continued)*

The changes in the measurement of environmental reclamation and mine closure obligations that result from changes in the estimated timing of the activities, inflation rate or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flow) that required settlement of the obligations, or a change in the discount rate, will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current year. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment losses incurred.

u. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments and making strategic decisions, is the Board of Directors.

v. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Where any Group company purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perusahaan yang telah disesuaikan dengan biaya keuangan dan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas utang obligasi konversi, serta pengaruh pajak yang bersangkutan, dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan, berdasarkan asumsi bahwa semua opsi telah dilaksanakan dan seluruh utang obligasi konversi telah dikonversikan.

x. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam tahun ketika pembagian dividen telah diumumkan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

w. Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent of the Company adjusted for finance costs and foreign exchange gains or losses on convertible bonds and their related tax effects, by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the year, assuming that all options have been exercised and all convertible bonds have been converted.

x. Dividends

Dividend distributions to the Group's shareholders are recognised as liabilities in the Group's consolidated financial statements in the year in which the dividends are declared.

3. MANAJEMEN RISIKO

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi bertugas untuk menjamin kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan terhadap risiko-risiko keuangan, yang meliputi identifikasi risiko secara akurat, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko-risiko keuangan. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, sekaligus juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup risiko-risiko dalam bidang tertentu.

3. RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange rate risk, commodity price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Group's risk management processes are to identify, measure, monitor and manage key risks in order to safeguard the Group's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Group.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board ensures the sufficiency of all procedures and methodologies of financial risk management, which consists of ensuring the accuracy of risk identification, measurement, monitoring and financial risks control. The Board of Directors provides principles for overall risk management, as well as policies covering specific areas.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya, analisis umur piutang untuk risiko kredit dan analisis beta untuk menentukan risiko pasar dari portofolio investasi.

Sementara itu, Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

a. Risiko pasar

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Sebagian pendapatan dan pengeluaran operasional Grup didenominasi dalam mata uang Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersil di masa yang akan datang serta aset dan liabilitas yang diakui.

Manajemen telah membuat kebijakan untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional Grup. Risiko nilai tukar mata uang asing dapat dikelola oleh Grup dengan melakukan transaksi penjualan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Grup dapat menjaga kecukupan kas dan aset lainnya, seperti piutang dalam mata uang Dolar AS yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan liabilitas sewa pembiayaan dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp308,76 miliar (31 Desember 2022: Rp570,66 miliar) (nilai penuh) terutama diakibatkan keuntungan/kerugian dari penjabaran kas dan setara kas, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, piutang usaha, utang usaha, pinjaman bank dan liabilitas sewa yang didenominasikan dalam mata uang asing.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange rate and other price risks, aging analysis for credit risk and beta analysis in respect to investments portfolio to determine market risk.

Meanwhile, the Risk Management Committee has a responsibility to assist the Board of Directors in ensuring that risk management has been implemented in accordance with these principles.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

A portion of the Group's revenue and operational expenditure is denominated in US Dollars. Foreign currency exchange risk arises from future commercial transactions, and assets and liabilities which are recognised in a foreign currency.

Management has set up a policy to require companies within the Group to manage their foreign exchange risk against their functional currency. Foreign exchange risk is managed by the Group by entering sales transactions in US Dollars, in order to keep sufficient amounts of cash and other assets, such as receivables denominated in US Dollars, that will be used to settle lease liabilities denominated in US Dollars.

As at 31 December 2023, if the Rupiah had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables remaining constant, post-tax profit for the year would have been Rp308.76 billion (31 December 2022: Rp570.66 billion) (full amount) higher/lower, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of cash and cash equivalents, financial assets at fair value through other comprehensive income, trade receivables, trade payables, bank borrowings and lease liabilities denominated in foreign currency.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga

Grup terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia. Namun, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos terhadap fluktuasi harga dikarenakan penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman.

Grup terekspos risiko harga yang berasal dari investasi dalam aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek utang, Grup melakukan analisis terkait besarnya bunga kupon yang ditawarkan pada obligasi dan tingkat imbal hasil yang secara umum diharapkan oleh pasar. Kinerja investasi tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara periodik.

Pada tanggal 31 Desember 2023, apabila harga atas aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain 10% lebih tinggi atau lebih rendah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka total ekuitas akan naik atau turun sebesar Rp16,92 miliar (31 Desember 2022: Rp15,61 miliar).

(iii) Risiko suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman bank dan deposito berjangka. Risiko suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Rupiah. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(ii) Price risk

The Group is exposed to market risks related to the price volatility of commodity prices traded on world coal markets. However, the Group's financial assets and liabilities are not exposed to price volatility because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the coal sales and purchase agreements which are determined at the time of delivery.

The Group is exposed to security price risk from investment which comprises financial assets at fair value through other comprehensive income. To manage price risk arising from investments in debt securities, the Group performs an analysis of the coupon rates offered on bonds and the required rate of return which is generally expected by the market. The performance of the Group's available-for-sale investments is monitored periodically.

As at 31 December 2023, if the price of financial assets at fair value through other comprehensive income had been 10% higher or lower with all other variables held constant, total equity would have increased or decreased by Rp16.92 billion (31 December 2022: Rp15.61 billion).

(iii) Interest rate risk

The Group's interest rate risk arises from bank borrowings and time deposits. The Group's interest rate risk arises from long-term borrowing denominated in Rupiah. Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut diatas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp9,97 triliun (31 Desember 2022: Rp20,82 triliun) (nilai penuh). Risiko kredit terutama berasal dari penjualan dengan memberikan kredit, kas di bank, deposito berjangka, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, jaminan reklamasi dan penutupan tambang, piutang usaha, piutang lainnya dari pihak berelasi dan piutang lainnya dari pihak ketiga.

Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada, dan alternatif lain pembiayaan. Berdasarkan skenario tersebut diatas, Grup mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada akhir periode pelaporan, tidak terdapat saldo pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(iii) Interest rate risk (continued)

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flows interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

b. Credit risk

As at 31 December 2023, the total maximum exposure from credit risk was Rp9.97 trillion (31 December 2022: Rp20.82 trillion) (full amount). Credit risk arises from sales under credit, cash in banks, time deposits, financial assets at fair value through other comprehensive income, reclamation and mine closure funds, trade receivables, other receivables from related parties and other receivables from third parties.

The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing of existing positions, and alternative financing. Based on the above scenarios, the Group manages its cash flow interest rate risk by refinancing borrowings at a lower interest rate.

As at the end of reporting period, the Group had no outstanding floating rate bank borrowings.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki perjanjian yang jelas dengan pelanggan, perjanjian yang mengikat terutama untuk transaksi penjualan batubara dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah.

Kebijakan umum Grup untuk meminimalisasi risiko kredit yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:
- memilih pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
- menerima pelanggan baru dan penjualan batubara disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup; dan
- meminta pembayaran dengan menggunakan *letter of credit* untuk pelanggan luar negeri dan dalam negeri selain dari transaksi dengan Grup PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN").

Semua kas di bank, deposito berjangka, dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank asing dan lokal yang memiliki reputasi.

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Manajemen berkeyakinan bahwa manajer investasi yang mengelola aset keuangan tersebut memiliki reputasi yang baik.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lainnya di atas terutama berasal dari pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah bertransaksi dengan Grup lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

Management is confident in its ability to maintain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear agreements with customers, binding agreements primarily in place for coal sales transactions and historically low levels of bad debt.

The Group's general policies to minimise the potential credit risk which may arise are as follows:
- *selecting customers with a strong financial conditions and good reputations;*
- *acceptance of new customers and sales of coal being approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy; and*
- *requesting payments by letter of credit for all customers except for transactions with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") Group.*

All the cash in banks, time deposits and restricted time deposits are placed in reputable foreign and local banks.

The Group manages credit risk exposure from its financial assets at fair value through other comprehensive income by monitoring the reputation and, credit ratings and reducing the aggregate risk of each individual counterparty. Management believes that the investment managers who manage the financial assets have a good reputation.

The entire outstanding balances from trade receivables and other receivables are mostly derived from customers/third parties/related parties which have transacted with the Group for more than 12 months and do not have any history of default.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi di mana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Dalam kebijakan manajemen risiko likuiditas, Grup melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that arises in situations where the Group's cash flow indicates that the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. As part of its liquidity risk management policy, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including their loan maturity profiles, and continuously assesses financial markets for opportunities to raise funds.

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ *Contractual maturities of financial liabilities*			
	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	Antara 3 bulan sampai 1 tahun/ *Between 3 months and 1 year*	Antara 1 sampai 5 tahun/ *Between 1 and 5 years*	Jumlah/*Total*
31 Desember/*December* 2023				
Utang usaha/*Trade payables*	2,082,188	-	-	2,082,188
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	4,857,830	-	-	4,857,830
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	208,901	372,011	817,396	1,398,308
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	68,086	-	-	68,086
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	268,527	-	-	268,527
Jumlah liabilitas/*Total liabilities*	**7,485,532**	**372,011**	**817,396**	**8,674,939**
31 Desember/*December* 2022				
Utang usaha/*Trade payables*	1,935,818	-	-	1,935,818
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	4,485,018	-	-	4,485,018
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	112,975	152,212	1,223,296	1,488,483
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	1,009	1,356	-	2,365
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	231,498	-	-	231,498
Jumlah liabilitas/*Total liabilities*	**6,766,318**	**153,568**	**1,223,296**	**8,143,182**

d. Manajemen permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Capital risk management

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Manajemen permodalan (lanjutan)

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

e. Nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup menganalisis aset keuangan yang dimiliki yang diukur pada nilai wajar. Tabel di halaman berikutnya menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan model penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- tingkat 1 - harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- tingkat 2 - teknik-teknik lain atas semua input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- tingkat 3 - teknik yang menggunakan input yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar yang tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Capital risk management** (continued)*

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowing and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

e. Fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability, or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value. The table on the next page analyses financial instruments carried at fair value, by the level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

3. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Nilai wajar (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut:

***3. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***e. Fair value** (continued)*

Financial assets and liabilities that are recorded based on fair value were as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
	Tingkat/*Level 1*	Tingkat/*Level 2*	Tingkat/*Level 3*	Jumlah/*Total*	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	875,330	-	-	875,330	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*

	31 Desember/*December* 2022				
	Tingkat/*Level 1*	Tingkat/*Level 2*	Tingkat/*Level 3*	Jumlah/*Total*	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	783,070	-	-	783,070	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*

Selain instrumen keuangan yang dijabarkan di atas, Grup tidak memiliki aset dan/atau kewajiban lain yang dicatat pada nilai wajarnya.

Other than the financial instrument described above, the Group did not have any other assets and/or liabilities that were recorded at their fair values.

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

The fair values of current financial assets and liabilities with maturities of one year or less are assumed to be approximately the same as their carrying amounts due to their short-term nature.

Jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair value.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut di mana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan

Perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak pasti dalam kegiatan usaha biasa.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun di mana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, di mana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

Judgement

Taxation

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Group. Specifically, in calculating income tax expenses, the Group involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

All judgements and estimates made by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volumes, commodity prices and other factors, which are subject to risk and uncertainty. Hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  a. bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  b. persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  c. fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI"), PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP"), dan PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR"). Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa

Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Judgement *(continued)*

Interests in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required in order to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:

- *the structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.*
- *when the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  a. the legal form of the separate vehicle;
  b. the terms of the contractual arrangement; and
  c. other relevant facts and circumstances

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and whether the arrangement is a joint operation or a joint ventures, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, being PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI"), PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP") and PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR").

These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan komponen pembayaran sewa, apakah pembayaran tersebut mengandung komponen pebayaran tetap atau variabel. Bila Grup wajib melakukan pembayaran minimum maka Grup perlu melakukan pencatatan atas aset hak guna dan liabilitas sewa.

Sebaliknya, jika tidak terdapat pembayaran minimum maka sewa mengandung komponen pembayaran variabel dan dibukukan sebagai biaya dalam laba rugi. Hal ini memerlukan penilaian dan pertimbangan manajemen yang perlu diperbaharui dari waktu ke waktu.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

Estimates and assumptions

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Management perform assessment on determining lease payment component, whether the payments contain fixed or variable payment component. If the Group is required to make a minimum payments, the Group should record right-of-use assets and lease liabilities.

In the other hand, if there is no minimum payments, then the lease contain variable payment component and should be booked as expense at profit or loss. These need management's assessment and consideration which require periodical updates from time to time.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

For leases of buildings, vehicles, machinery and equipment, the following factors are normally the most relevant:

- *if there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *if any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).*
- *otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the costs and business disruption required to replace the leased asset.*

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat atas aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat dikaji paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Namun, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi cadangan batubara

Cadangan batubara adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari properti penambangan Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Australasian Joint Ore Reserves Committee* ("JORC") untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Untuk memperkirakan cadangan batubara, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman tubuh batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan data geologi tambahan dihasilkan selama operasi. Oleh karena itu, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Estimated useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. However, it is possible that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

Coal reserve estimates

Coal reserves are estimates of the amounts of product that can be economically and legally extracted from the Group's mining properties. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the Australasian Joint Ore Reserves Committee (the "JORC") for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

The economic assumptions used to estimate reserves change from period to period and additional geological data is generated during the course of operations. Therefore, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- *assets' carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows;*

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi cadangan batubara (lanjutan)

- penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dan dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah;
- provisi untuk aktivitas purnaoperasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini; dan
- nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Dalam melakukan penilaian estimasi cadangan, Grup juga mempertimbangkan dampak potensial yang timbul dari perubahan iklim.

Provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang

Kebijakan akuntansi Grup atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan, waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan. Dengan demikian, waktu kegiatan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan rentang berbagai kemungkinan hasil. Perubahan pada waktu kegiatan dan estimasi biaya kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang di masa depan, tingkat diskonto dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan tahun lalu lebih besar daripada jumlah yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan di laba rugi pada tahun kelebihan tersebut timbul. Provisi yang diakui pada setiap lokasi ditinjau secara berkala dan diperbarui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and assumptions *(continued)*

Coal reserve estimates (continued)

- *depreciation and amortisation charged in profit or loss and may change where such charges are determined on a units of production basis, or where the useful economic lives of assets change;*
- *decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities; and*
- *the carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

In assessing the reserve estimates, the Grup also considered the potential impact arising from climate change.

Provision for environmental reclamation and mine closure

The Group's accounting policy for the recognition of environmental reclamation and mine closure provision requires significant estimates and assumptions such as requirements of the relevant legislative and regulatory requirements, the timing of the activities and estimated costs of the future environmental and mine closure activities. As such, the timing of the activities and amounts of future cash flows required to settle the obligations at each of the reporting dates are subject to significant uncertainty. These uncertainties may result in a wide range of possible measurement outcomes. Changes in timing of the activities and estimated costs of future environmental reclamation and mine closure activities, the discount rate and inflation rate could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

If the total current year expenditure related to past activity is higher than the existing balance, the differences will be charged to profit or loss of the year where the excess arises. The provision recognised for each site is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(penghasilan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan, tren biaya kesehatan dan biaya rata-rata kesehatan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan batubara'), biaya operasi, biaya penutupan tambang dan reklamasi, tingkat diskonto dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan situasi yang dapat mengubah proyeksi ini, sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***Estimates and assumptions** (continued)*

Post-employment benefits obligation

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy, expected remaining periods of service of employees, medical cost trend and average medical cost. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Impairment of non-financial assets

The recoverable amount of a cash-generating asset or group of assets is measured at the higher of its fair value less cost of disposal or value in use. The determination of fair value less cost of disposal or value in use requires management to make judgement, estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Coal reserve estimates'), operating costs, mine closure and reclamation costs, discount rate and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying values of the assets may be further impaired or the impairment charges may be reduced with the impact being recorded in profit or loss.

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA / *CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS*

a. Kas dan setara kas / *Cash and cash equivalents*

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: / *The details of cash and cash equivalents are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Kas	**524**	**469**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	547,168	981,963	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	4,607	26,818	*PT Bank Permata Tbk ("Permata")*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")	1,164	58,065	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan and Bangka Belitung ("BPD Sumsel Babel")*
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	542	7,157	*PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	1,191	5,629	*Others (each below Rp10,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	677,441	889,521	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Permata	2,004	77,320	*Permata*
UOB	1,855	4,159	*UOB*
Deutsche Bank AG	1,146	5,385	*Deutsche Bank AG*
Dolar Australia			*Australian Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	555	22,926	*Related party (Note 30b)*
Euro			*Euro*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	2,658	-	*Related party (Note 30b)*
Jumlah kas di bank	**1,240,331**	**2,078,943**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	970,523	4,012,035	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Mega Tbk	133,297	282,150	*PT Bank Mega Tbk*
BPD Sumsel Babel	95,000	267,500	*BPD Sumsel Babel*
PT Bank Mega Syariah	-	217,106	*PT Bank Mega Syariah*
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	181,408	172,140	*Related parties (Note 30b)*
Jumlah deposito berjangka	**1,380,228**	**4,950,931**	***Total time deposits***
Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor			***Time deposits for cash proceeds from export sales***
Dolar AS			*US Dollars*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	1,517,784	-	*Related parties (Note 30b)*
Jumlah kas dan setara kas	**4,138,867**	**7,030,343**	***Total cash and cash equivalents***

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

Tingkat suku bunga kontraktual dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah	2.25% - 7.05%	2.25% - 6.25%	*Rupiah*
Dolar AS	4.00% - 5.41%	0.30% - 1.25%	*US Dollars*

Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo tiga bulan yang ditempatkan oleh Grup sebagai salah satu pemenuhan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023. Lihat Catatan 29m untuk Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

***5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS** (continued)*

***a. Cash and cash equivalents** (continued)*

Contractual interest rates on time deposits are as follows:

Time deposites for cash proceeds from export sales represent time deposits with maturity of three months placed by the Group to fulfill one of the obligations as required in Government Regulation No. 36 of 2023. Refer to Note 29m for Government Regulation No.36 of 2023.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents as mentioned above.

b. Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			***Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 30b)	541,818	6,782,720	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Bank Mega Tbk	-	1,501,696	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Mega Syariah	-	644,780	*PT Bank Mega Syariah*
Jumlah deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	**541,818**	**8,929,196**	***Total time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah	6.10% - 6.75%	2.50% - 5.90%	*Rupiah*

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari deposito berjangka sebagaimana yang dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of time deposits as mentioned above.

6. PIUTANG USAHA, NETO / *6. TRADE RECEIVABLES, NET*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade receivables are as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Sumber Segara Primadaya	95,835	209,513	*PT Sumber Segara Primadaya*
PT Bukit Batu Mulia	50,831	100,790	*PT Bukit Batu Mulia*
PT Indocement Tunggal Perkasa	22,549	27,983	*PT Indocement Tunggal Perkasa*
PT Kutai Refinery Nusantara	-	31,151	*PT Kutai Refinery Nusantara*
Lainnya	122,854	98,948	*Others*
Dolar AS			*US Dollars*
Motion Shipping and Trading Pte. Ltd.	376,354	-	*Motion Shipping and Trading Pte. Ltd.*
Century Commodities Solution Pte.	272,852	139,741	*Century Commodities Solution Pte.*
Hua Qin International Trading	214,826	-	*Hua Qin International Trading*
Cashin Resource Company Limited	136,223	-	*Cashin Resource Company Limited*
Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.	92,685	-	*Kowa Asia Pacific Pte. Ltd.*
Suek AG	91,498	-	*Suek AG*
KNK Energy Pte. Ltd.	88,435	-	*KNK Energy Pte. Ltd.*
Indopacific Energy Pte. Ltd.	82,383	99,881	*Indopacific Energy Pte. Ltd.*
Ares Asia Resources Pte. Ltd.	77,151	-	*Ares Asia Resources Pte. Ltd.*
Noble Resources International Pte. Ltd.	32,146	122,493	*Noble Resources International Pte. Ltd.*
Avra International AG.	16,954	121,311	*Avra International AG.*
Rex Commodities Pte. Ltd.	-	215,796	*Rex Commodities Pte Ltd.*
Adani Global Pte. Ltd.	-	123,591	*Adani Global Pte. Ltd.*
Dragon Energy Co. Ltd.	-	110,278	*Dragon Energy Co. Ltd.*
Falcon Power Co. Ltd.	-	102,063	*Falcon Power Co. Ltd.*
Coal Trans Indo Pte. Ltd.	-	98,450	*Coal Trans Indo Pte. Ltd.*
Lainnya	33,684	25,089	*Others*
Dolar Singapura			*Singapore Dollars*
Lainnya	22,130	4,922	*Others*
Jumlah piutang usaha - pihak ketiga	**1,829,390**	**1,632,000**	***Total trade receivables - third parties***
Pihak berelasi (Catatan 30b)			***Related parties*** *(Note 30b)*
Rupiah	2,307,951	1,818,079	*Rupiah*
Dolar AS	-	390,149	*US Dollars*
Jumlah piutang usaha	**4,137,341**	**3,840,228**	***Total trade receivables***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(151,778)	(97,638)	*Provision for impairment*
Jumlah piutang usaha, neto	**3,985,563**	**3,742,590**	***Total trade receivables, net***
Bagian lancar	**(3,797,292)**	**(3,509,912)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**188,271**	**232,678**	***Non-current portion***

6. PIUTANG USAHA, NETO (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Lancar	3,252,026	2,795,911	*Current*
Jatuh tempo 1-30 hari	353,581	732,593	*Overdue by 1-30 days*
Jatuh tempo 31-90 hari	132,783	135,709	*Overdue by 31-90 days*
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	398,951	176,015	*Overdue by more than 90 days*
	4,137,341	3,840,228	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(151,778)	(97,638)	*Provision for impairment*
	3,985,563	**3,742,590**	

Perubahan cadangan kerugian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	97,638	225,534	*Beginning balance*
Penambahan	54,685	6,257	*Addition*
Pemulihan	(545)	(134,153)	*Recovery*
Saldo akhir	**151,778**	**97,638**	***Ending balance***

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung KKE sesuai dengan PSAK 71 yang mengizinkan penggunaan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada piutang usaha Grup yang dijaminkan (2022: Rp5,11 miliar (nilai penuh)). Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

***6. TRADE RECEIVABLES, NET** (continued)*

The aging analysis of trade receivables is as follows:

The changes in the loss allowance of trade receivables are as follows:

The Group applies the simplified approach to provide for ECL prescribed by SFAS 71 which permits the use of the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables.

As at 31 December 2023, no trade receivables of the Group had been used as collateral (2022: Rp5.11 billion (full amount)). Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

7. ASET KEUANGAN YANG DINILAI PADA NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

7. *FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain terdiri dari investasi pada instrumen utang dalam bentuk di bawah ini:

As at 31 December 2023 and 2022, financial assets at fair value through other comprehensive income represent investments in debt securities in the form of the following:

Perusahaan penerbit/ *Issuer entity*	**Mata uang/ *Currency***	**Tingkat suku bunga/ *Interest rate***	**Tenor/*Tenure***
Medium term notes			
PT TIMAH Tbk	Rupiah/*IDR*	7.20%	2 tahun/*years*
Obligasi/*Bonds*			
PT Pertamina (Persero)	Dolar AS/*USD*	6.45%	20 tahun/*years*
PLN	Rupiah/*IDR*	8.65%	12 tahun/*years*
KAI	Rupiah/*IDR*	7.10%	4 tahun/*years*
Danareksa	Rupiah/*IDR*	7.50%	2 tahun/*years*
SMI Seri A	Rupiah/*IDR*	5.90%	1 tahun/*years*
SMI Seri B	Rupiah/*IDR*	6.70%	3 tahun/*years*
Obligasi pemerintah/ *Government bonds*			
Seri FR0090	Rupiah/*IDR*	5.13%	3 tahun/*years*

Di bawah ini adalah mutasi aset keuangan Grup yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain:

The movement of the Group's financial assets at fair value through other comprehensive income is shown below:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Saldo awal	783,070	341,821	*Beginning balance*
Penambahan	80,000	471,250	*Addition*
Efek nilai tukar	(1,530)	13,140	*Exchange rate effect*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	13,790	(43,141)	*Unrealised gain/(loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Saldo akhir	**875,330**	**783,070**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya bukti objektif penurunan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain. Oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas aset keuangan tersebut.

The Group's management is of the opinion that there are no events or changes of circumstances which indicate a permanent decline in the fair value of the financial assets at fair value through other comprehensive income. Therefore, no provision for impairment in the value of the above financial assets is necessary.

Penghasilan bunga efektif yang diperoleh dari aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah Rp53.178 (2022: Rp25.802) (lihat Catatan 28a).

Effective interest income earned from financial assets at fair value through other comprehensive income during the year amounted to Rp53,178 (2022: Rp25,802) (see Note 28a).

Nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain berdasarkan harga penawaran yang berlaku dalam pasar yang aktif. Lihat Catatan 3e untuk informasi lebih lanjut mengenai metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar.

The fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income is based on the current bid price in active markets. See Note 3e for further information about the methods used and assumptions applied in determining fair value.

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

Persediaan terdiri dari: / *Inventories consisted of the following:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Persediaan batubara	5,292,138	3,644,984	*Coal inventories*
Perlengkapan dan suku cadang	336,570	316,027	*Materials and spare parts*
Minyak kelapa sawit dan kernel	5,141	916	*Crude palm oil and kernels*
	5,633,849	3,961,927	
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan persediaan usang	(134,235)	(124,740)	*Provision for obsolete inventories*
Jumlah persediaan, neto	**5,499,614**	**3,837,187**	***Total inventories, net***

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: / *Movements of provision for obsolete inventories were as follows:*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	(124,740)	(114,524)	*Beginning balance*
Penambahan penyisihan persediaan usang	(9,495)	(10,216)	*Addition of provision for obsolete inventories*
Saldo akhir	**(134,235)**	**(124,740)**	***Ending balance***

Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaannya tidak melebihi nilai realisasi bersihnya pada tanggal 31 Desember 2023.

The Group is of the opinion that the carrying values of its inventories do not exceed their net realisable values as at 31 December 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada persediaan yang dijaminkan. Pada 31 Desember 2022 terdapat persediaan Grup sebesar Rp6,74 miliar (nilai penuh) dijaminkan kepada BRI.

On 31 December 2023 there is no inventories pledged as collateral. On 31 December 2022 certain inventories of the Group amounting to Rp6.74 billion (full amount) were used as collateral to BRI.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh persediaan tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian yang berkaitan dengan persediaan adalah rendah.

As at 31 December 2023 and 2022, all inventories were not insured. Management considers the risks of losses associated with inventories to be low.

9. INVESTASI / *9. INVESTMENTS*

a. Investasi pada entitas asosiasi / *a. Investments in associates*

Jumlah investasi pada entitas asosiasi yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts of investment in associates recognised in the consolidated financial statements are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Investasi pada entitas asosiasi			***Investments in associates***
TPR	-	106,718	*TPR*
MHB	-	85,064	*MHB*
Jumlah	**-**	**191,782**	***Total***
Cadangan penurunan nilai			***Allowance for impairment***
TPR	-	(87,282)	*TPR*
MHB	-	(79,186)	*MHB*
Jumlah	**-**	**25,314**	***Total***

9. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Nama entitas/ *Name of entity*	Lokasi usaha/ *Place of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*
TPR	Indonesia	-	34.17%	Catatan/*Note a*
MHB	Indonesia	-	34.17%	Catatan/*Note b*
SINERGI ID	Indonesia	25.00%	25.00%	Catatan/*Note c*

Catatan:

a) TPR memiliki tambang batubara di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 18 April 2023, PT IPC telah melakukan pemindahan hak atas saham TPR kepada Mitra Cakrawala International ("MCI"). Kementrian ESDM telah menyetujui pemindahan hak atas saham.
b) MHB memiliki dermaga di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 18 April 2023, PT IPC telah melakukan pemindahan hak atas saham MHB kepada MC. Kementrian ESDM telah menyetujui pemindahan hak atas saham.
c) Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("Sinergi ID") sebelumnya disebut PT Nasional Hijau Lestari ("NHL") menyediakan jasa penanggulangan limbah B3. Sinergi ID telah beroperasi pada bulan Juli 2019.

Ringkasan informasi keuangan atas investasi pada TPR, MHB dan Sinergi ID pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

9. *INVESTMENTS* *(continued)*

a. *Investments in associates* *(continued)*

Investments in associates owned by the Group are as follows:

Notes:

a) TPR has a coal mine at Tabalong Regency, South Kalimantan. On 18 April 2023, PT IPC have performed transfer of rights to TPR shares to Mitra Cakrawala Internasional ("MCI"). Ministry of Energy and Mineral Resources have approved the transfer of rights.

b) MHB has a port at South Barito Regency, Central Kalimantan. On 18 April 2023, PT IPC have performed transfer of rights to MHB shares to MCI. Ministry of Energy and Mineral Resources have approved the transfer of rights.

c) Sinergi Mitra Lestari Indonesia ("Sinergi ID") previously named PT Nasional Hijau Lestari ("NHL") provide B3 waste management. Sinergi ID started its operation in July 2019.

A summary of financial information related to investments in TPR, MHB and Sinergi ID as at 31 December 2023 and 2022 is as follows:

Asosiasi/ *Associates*	Tahun/ *Year*	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	(Rugi)/laba/ *(Loss)/profit*	Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif/ *Total comprehensive (loss)/income*
Sinergi ID	2023	61,592	(97,921)	(1,428)	(1,428)
Sinergi ID	2022	24,695	(51,316)	(7,410)	(7,410)
TPR	2022	86,269	(23,118)	(533)	(533)
MHB	2022	352,336	(64,042)	6,649	6,649

9. INVESTASI (lanjutan)

b. Investasi pada ventura bersama

Jumlah yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Investasi pada ventura bersama			***Investments in joint ventures***
HBAP	4,569,200	3,956,399	*HBAP*
BPI	2,688,651	2,557,273	*BPI*
BATR	5,425	5,425	*BATR*
Jumlah	**7,263,276**	**6,519,097**	***Total***

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pada awal tahun	6,519,097	5,174,429	*At the beginning of the year*
Bagian keuntungan	571,303	829,063	*Share of profit*
Penambahan investasi	247,836	-	*Addition of investments*
Dividen	(9,240)	-	*Dividen*
Efek translasi	(65,720)	515,605	*Translation effect*
Pada akhir tahun	**7,263,276**	**6,519,097**	***At the end of the year***

Investasi pada ventura bersama yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Nama entitas/ *Name of entity*	Lokasi usaha/ *Place of business*	% kepemilikan/ *% of ownership*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Metode pengukuran/ *Measurement method*
BATR	Indonesia	10.00%	Catatan/*Note a*	Ekuitas/*Equity*
BPI	Indonesia	59.75%	Catatan/*Note b*	Ekuitas/*Equity*
HBAP	Indonesia	45.00%	Catatan/*Note c*	Ekuitas/*Equity*

Catatan:

a) BATR didirikan untuk prasarana perkeretaapian batubara. Pada tanggal 31 Desember 2023, BATR belum beroperasi.
b) BPI melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Mulut Tambang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
c) HBAP melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN untuk PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sejak 7 Oktober 2023, HBAP sudah menjalankan kegiatan operasionalnya.

9. *INVESTMENTS* *(continued)*

b. *Investments in joint ventures*

The amounts recognised in the consolidated financial statements are as follows:

The movements of investments in joint ventures are as follows:

Investments in joint ventures owned by the Group are as follows:

Notes:

a) BATR was established to operate a coal railway infrastructure. As at 31 December 2023, BATR was not yet in operation.
b) BPI entered into a power purchase agreement with PLN related to Mine Mouth Power Plant at Lahat Regency, South Sumatra.
c) HBAP entered into a power purchase agreement with PLN related to Mine Mouth Power Plant South Sumatra 8 at Muara Enim Regency, South Sumatra. As at 7 October 2023, HBAP has carried out its operational activities.

9. INVESTASI (lanjutan)

b. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari BPI, ventura bersama yang signifikan bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***9. INVESTMENTS** (continued)*

***b. Investments in joint ventures** (continued)*

Below is the summarised financial information for BPI, a significant joint venture for the Group as at 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Ringkasan laporan posisi keuangan			***Summarised statements of financial position***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	209,818	46,288	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan	411,835	234,353	*Financial assets*
Aset lancar lainnya	262,061	99,338	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**883,714**	**379,979**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan	4,217,120	4,675,315	*Financial assets*
Aset tidak lancar lainnya	213,520	380,352	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**4,430,640**	**5,055,667**	***Total non-current assets***
Jumlah aset	**5,314,354**	**5,435,646**	***Total assets***
Jumlah liabilitas jangka pendek	**(223,225)**	**(567,085)**	***Total current liabilities***
Jumlah liabilitas jangka panjang	**(591,295)**	**(588,606)**	***Total non-current liabilities***
Aset neto	**4,499,834**	**4,279,955**	***Net assets***
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Summarised statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	1,068,125	1,063,862	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(791,553)	(702,319)	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	(92,586)	(92,587)	*General and administrative expenses*
Depresiasi dan amortisasi	(13,442)	-	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	1,943	1,171	*Finance income*
Biaya keuangan	(141)	(5,982)	*Finance cost*
Penghasilan lainnya, neto	166,954	227,497	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	339,300	491,642	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(62,385)	(122,256)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**276,915**	**369,386**	***Profit for the year***
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain	**(41,572)**	**345,837**	***Other comprehensive (loss)/income***
Jumlah penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan	**235,343**	**715,223**	***Total other comprehensive income for the year***

9. INVESTASI (lanjutan)

b. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari HBAP, ventura bersama yang signifikan bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***9. INVESTMENTS** (continued)*

***b. Investments in joint ventures** (continued)*

Below is the summarised financial information for HBAP, a significant joint venture for the Group as at 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Ringkasan laporan posisi keuangan			***Summarised statements of financial position***
Aset lancar			***Current assets***
Kas dan setara kas	897,199	745,078	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	1,131,679	190,188	*Other current assets*
Jumlah aset lancar	**2,028,878**	**935,266**	***Total current assets***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Aset keuangan	31,986,035	28,727,550	*Financial assets*
Aset tidak lancar lainnya	34,670	8,090	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar	**32,020,705**	**28,735,640**	***Total non-current assets***
Jumlah liabilitas jangka pendek	**(6,090,944)**	**(3,709,772)**	***Total current liabilities***
Liabilitas jangka panjang			***Non-current liabilities***
Liabilitas keuangan	(16,664,642)	(16,223,453)	*Financial liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(1,140,218)	(945,684)	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**(17,804,860)**	**(17,169,137)**	***Total non-current liabilities***
Aset neto	**10,153,779**	**8,791,997**	***Net assets***

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			***Summarised statements of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	4,813,428	5,707,749	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(1,941,954)	(512,515)	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi	(70,211)	(52,536)	*General and administrative expenses*
Biaya keuangan	(1,656,909)	(1,053,722)	*Finance costs*
Penghasilan keuangan	610	875	*Finance income*
Beban lainnya, neto	(62,256)	(2,370,979)	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	1,082,708	1,718,872	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(180,824)	(366,973)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**901,884**	**1,351,899**	***Profit for the year***
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain	**(90,848)**	**686,594**	***Other comprehensive (loss)/income***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**811,036**	**2,038,493**	***Total other comprehensive income for the year***

9. INVESTASI (lanjutan)

b. Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Perusahaan telah menjaminkan seluruh saham yang dimilikinya di entitas HBAP baik yang dimiliki pada saat penandatanganan Akta Gadai Saham atau saham tambahan dimasa yang akan datang kepada China Export-Import Bank dalam rangka pemberian pinjaman untuk pendanaan proyek HBAP. Penjaminan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN pada tanggal 17 Mei 2018.

Pada tahun 2021, PLN telah mengajukan surat permintaan untuk menunda tanggal operasi komersial ("COD") pembangkit listrik milik HBAP. Pada bulan Juli 2022, PLN dan HBAP telah sepakat untuk melakukan beberapa penyesuaian atas *Power Purchase Agreement* ("PPA") yang terdiri dari penyesuaian tanggal operasi komersial pembangkit listrik milik HBAP dan penyesuaian lainnya.

Pada bulan Agustus 2022, HBAP menandatangani *side agreement* dengan PLN untuk menunda COD pembangkit listrik milik HBAP. Sebagai dampak atas penundaan tanggal operasi komersial tersebut, HBAP telah mengestimasi tambahan biaya konstruksi dan biaya operasional lainnya ("tambahan biaya"). Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah membukukan dampak dari tambahan biaya pada keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama.

Pada tanggal 7 Mei 2023, HBAP menyelesaikan penyaluran tegangan listrik untuk umpan tenaga listrik dari PLN *(backfeeding power)* dari jalur transmisi 275 kV Lumut Balai - Muara Enim ke PLTU HBAP.

PLTU HBAP telah memasuki fase COD sejak tanggal 7 Oktober 2023.

Ringkasan informasi keuangan atas investasi pada BATR tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

***9. INVESTMENTS** (continued)*

***b. Investments in joint ventures** (continued)*

The Company has pledged all of its existing share ownership in HBAP at the signing of the Deed of Shares Pledge and any future shares to the China Export-Import Bank as collateral for the loan obtained for the HBAP project. The guarantee was approved by the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") on 17 May 2018.

In 2021, PLN submitted a letter of request to delay the commercial operation date ("COD") of HBAP's power plant. In July 2022, PLN and HBAP agreed to adjust the Power Purchase Agreement ("PPA"), which consisted of adjusting the operation date of HBAP's power plant and other adjustments.

In August 2022, HBAP signed a side agreement with PLN to delay the commercial operation date of HBAP's power plant. As the impact of the delay of the COD of HBAP's power plants, HBAP has estimated additional construction costs and other operational costs ("additional costs"). As at 31 December 2022, the Company has recorded the impact from additional costs in share in net profit of associates and joint ventures.

On 7 May 2023, HBAP has succesfully carried out the distribution of voltage for electric power feed from PLN (backfeeding power) from the 275 kV transmission line Lumut Balai – Muara Enim to the HBAP's PLTU.

HBAP's PLTU has entered the COD phase since 7 October 2023.

The summary of financial information related to investments in BATR as at 31 December 2023 and 2022:

Tahun/ *Year*	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Rugi/ *Loss*	Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*	Jumlah rugi komprehensif/ *Total comprehensive loss*
2023	112,627	(258,590)	(131)	-	(131)
2022	112,647	(258,479)	(125)	-	(125)

9. INVESTASI (lanjutan)

c. Kepentingan nonpengendali

Informasi kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak:

***9. INVESTMENTS** (continued)*

c. Non-controlling interests

Information on non-controlling interests in the net assets of subsidiaries is as follows:

Non-controlling interests in the net assets of subsidiaries:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
IPC			***IPC***
Persentase kepemilikan 49%			*Percentage of ownership 49%*
Nilai tercatat - awal	231,811	214,842	*Carrying amount - beginning*
Bagian atas laba bersih	186,522	211,895	*Share of net income*
Deklarasi dividen	(268,985)	(194,926)	*Declaration of dividend*
	149,348	231,811	
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)			***Others (each below 5%)***
Nilai tercatat - awal	(20,833)	(20,783)	*Carrying amount - beginning*
Bagian atas laba/(rugi) bersih	143	(50)	*Share of net income/(loss)*
	(20,690)	(20,833)	
Jumlah kepentingan nonpengendali	**128,658**	**210,978**	***Total non-controlling interests***

Kepentingan nonpengendali atas laba/(rugi) entitas anak:

Non-controlling interests in income/(loss) of subsidiaries:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
IPC	186,522	211,895	*IPC*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp5.000)	143	(50)	*Others (each below Rp5,000)*
Jumlah	**186,665**	**211,845**	***Total***

Seluruh entitas ventura bersama dan asosiasi adalah perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia atas saham perusahaan tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi cukup untuk menutupi adanya kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi.

All joint venture and associates are unlisted private companies, and there are no quoted market prices available for their shares. Management believes that the allowance for impairment of investments in associates is sufficient to cover any impairment losses on the investments in associates.

10. PROPERTI PENAMBANGAN / *10. MINING PROPERTIES*

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Currency differences due to financial *statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Area yang telah menemukan cadangan terbukti						***Areas with proven reserves***
Nilai perolehan						***Acquisition costs***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	445,629	26,927	-	-	472,556	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	485,104	136,530	-	-	621,634	*Banko Barat*
Air Laya	807,619	128,980	-	-	936,599	*Air Laya*
Banko Tengah	651,003	208,214	1,019,895	-	1,879,112	*Banko Tengah*
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	384,896	-	-	(9,089)	375,807	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	9,662	-	-	-	9,662	*BBK - Bukit Kendi*
Subjumlah	**2,783,913**	**500,651**	**1,019,895**	**(9,089)**	**4,295,370**	***Subtotal***
Tambang dalam pengembangan						*Mines under development*
- Perusahaan						*The Company -*
Banko Tengah	1,019,895	-	(1,019,895)	-	-	*Banko Tengah*
Peranap	42,551	-	-	-	42,551	*Peranap*
Jumlah	**3,846,359**	**500,651**	**-**	**(9,089)**	**4,337,921**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company -*
Muara Tiga Besar	(161,000)	(16,710)	-	-	(177,710)	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	(101,650)	(12,908)	-	-	(114,558)	*Banko Barat*
Air Laya	(262,467)	(10,720)	-	-	(273,187)	*Air Laya*
Banko Tengah	(16,880)	(55,317)	-	-	(72,197)	*Banko Tengah*
Subjumlah	**(541,997)**	**(95,655)**	**-**	**-**	**(637,652)**	***Subtotal***
- Entitas anak						*Subsidiaries -*
IPC - Palaran	(327,357)	(11,817)	-	13,860	(325,314)	*IPC - Palaran*
BBK - Bukit Kendi	(9,662)	-	-	-	(9,662)	*BBK - Bukit Kendi*
Jumlah	**(879,016)**	**(107,472)**	**-**	**13,860**	**(972,628)**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai	**(93,636)**	**-**	**-**	**-**	**(93,636)**	***Provision for impairment***
Nilai buku bersih	**2,873,707**				**3,271,657**	***Net book value***

10. PROPERTI PENAMBANGAN (lanjutan) / ***10. MINING PROPERTIES** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Currency differences due to financial *statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Area yang telah menemukan cadangan terbukti						***Areas with proven reserves***
Nilai perolehan						***Acquisition costs***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company* -
Muara Tiga Besar	393,884	51,745	-	-	445,629	*Muara Tiga Besar*
Banko Barat	420,882	64,222	-	-	485,104	Banko Barat
Air Laya	696,331	111,288	-	-	807,619	Air Laya
Banko Tengah	-	625,091	25,912	-	651,003	Banko Tengah
- Entitas anak						*Subsidiaries* -
IPC - Palaran	362,316	10,431	-	12,149	384,896	IPC - Palaran
BBK - Bukit Kendi	9,662	-	-	-	9,662	BBK - Bukit Kendi
Subjumlah	**1,883,075**	**862,777**	**25,912**	**12,149**	**2,783,913**	***Subtotal***
Tambang dalam pengembangan						*Mines under development*
- Perusahaan						*The Company* -
Banko Tengah	1,045,807	-	(25,912)	-	1,019,895	Banko Tengah
Peranap	42,551	-	-	-	42,551	Peranap
Jumlah	**2,971,433**	**862,777**	**-**	**12,149**	**3,846,359**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Tambang yang berproduksi						*Producing mines*
- Perusahaan						*The Company* -
Muara Tiga Besar	(147,500)	(13,500)	-	-	(161,000)	Muara Tiga Besar
Banko Barat	(70,719)	(30,931)	-	-	(101,650)	Banko Barat
Air Laya	(242,601)	(19,866)	-	-	(262,467)	Air Laya
Banko Tengah	-	(16,880)	-	-	(16,880)	Banko Tengah
Subjumlah	**(460,820)**	**(81,177)**	**-**	**-**	**(541,997)**	***Subtotal***
- Entitas anak						*Subsidiaries* -
IPC - Palaran	(307,861)	(16,732)	-	(2,764)	(327,357)	IPC - Palaran
BBK - Bukit Kendi	(9,662)	-	-	-	(9,662)	BBK - Bukit Kendi
Jumlah	**(778,343)**	**(97,909)**	**-**	**(2,764)**	**(879,016)**	***Total***
Penyisihan penurunan nilai	**(93,636)**	**-**	**-**	**-**	**(93,636)**	***Provision for impairment***
Nilai buku bersih	**2,099,454**				**2,873,707**	**Net book value**

Seluruh amortisasi properti penambangan dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

All of the amortisation of mining properties was allocated to the cost of revenue.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai properti penambangan cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai properti penambangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management is of the opinion that the provision for the impairment of mining properties is adequate for covering any losses from the impairment of mining properties as at 31 December 2023 and 2022.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	31 Desember/*December* 2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	958,287	1,065	-	36,565	(1,674)	994,243	*Land*
Bangunan	2,678,388	2,906	(12,908)	103,531	(106)	2,771,811	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	8,917,859	771,072	(20,138)	299,697	(137)	9,968,353	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	190,220	18,976	(6,328)	-	(13)	202,855	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**12,744,754**	**794,019**	**(39,374)**	**439,793**	**(1,930)**	**13,937,262**	***Subtotal***
Aset dalam penyelesaian	555,886	738,717	-	(313,820)	-	980,783	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	25,694	932	(14,730)	-	-	11,896	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	2,272,579	367,419	(380,302)	(125,973)	-	2,133,723	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	18,832	287	(12,704)	-	-	6,415	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**2,317,105**	**368,638**	**(407,736)**	**(125,973)**	**-**	**2,152,034**	***Subtotal***
Jumlah	**15,617,745**	**1,901,374**	**(447,110)**	**-**	**(1,930)**	**17,070,079**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	(914,182)	(127,401)	3,637	-	(21)	(1,037,967)	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	(5,155,568)	(1,075,263)	10,060	(62,229)	(22)	(6,283,022)	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(165,670)	(12,524)	6,522	-	(3)	(171,675)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(6,235,420)**	**(1,215,188)**	**20,219**	**(62,229)**	**(46)**	**(7,492,664)**	***Subtotal***
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	(19,676)	(58)	14,730	-	-	(5,004)	*Buildings*
Mesin dan peralatan kendaraan	(876,113)	(503,540)	380,302	62,229	-	(937,122)	*Machinery and equipment vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(14,894)	(5,298)	12,704	-	-	(7,488)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(910,683)**	**(508,896)**	**407,736**	**62,229**	**-**	**(949,614)**	***Subtotal***
Jumlah	**(7,146,103)**	**(1,724,084)**	**427,955**	**-**	**(46)**	**(8,442,278)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(61,591)	-	-	-	-	(61,591)	*Allowance for impairment*
Nilai buku bersih	**8,410,051**					**8,566,210**	***Net book value***

11. ASET TETAP (lanjutan) / ***11. FIXED ASSETS** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ *Currency differences due to financial statement translations***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	942,943	1,069	-	-	14,275	958,287	*Land*
Bangunan	2,637,412	9,073	(1,685)	31,818	1,770	2,678,388	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	7,909,229	328,365	(35,290)	712,888	2,667	8,917,859	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	173,857	25,448	-	(9,290)	205	190,220	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**11,663,441**	**363,955**	**(36,975)**	**735,416**	**18,917**	**12,744,754**	***Subtotal***
Aset dalam penyelesaian	912,608	311,636	-	(668,358)	-	555,886	*Construction in progress*
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	24,746	948	-	-	-	25,694	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	1,557,113	829,201	(46,677)	(67,058)	-	2,272,579	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	18,832	-	-	-	-	18,832	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**1,600,691**	**830,149**	**(46,677)**	**(67,058)**	**-**	**2,317,105**	***Subtotal***
Jumlah	**14,176,740**	**1,505,740**	**(83,652)**	**-**	**18,917**	**15,617,745**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	(829,341)	(141,027)	1,685	56,137	(1,636)	(914,182)	*Buildings*
Mesin, peralatan dan kendaraan	(4,292,685)	(803,032)	35,048	(92,707)	(2,192)	(5,155,568)	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(161,354)	(17,971)	-	13,857	(202)	(165,670)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(5,283,380)**	**(962,030)**	**36,733**	**(22,713)**	**(4,030)**	**(6,235,420)**	***Subtotal***
Aset hak guna							*Right-of-use asset*
Bangunan	(11,777)	(7,899)	-	-	-	(19,676)	*Buildings*
Mesin dan peralatan kendaraan	(489,817)	(454,092)	46,581	21,215	-	(876,113)	*Machinery and equipment vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	(8,944)	(5,950)	-	-	-	(14,894)	*Office and hospital equipments*
Subjumlah	**(510,538)**	**(467,941)**	**46,581**	**21,215**	**-**	**(910,683)**	***Subtotal***
Jumlah	**(5,793,918)**	**(1,429,971)**	**83,314**	**(1,498)**	**(4,030)**	**(7,146,103)**	***Total***
Cadangan penurunan nilai	(61,591)	-	-	-	-	(61,591)	*Allowance for impairment*
Nilai buku bersih	**8,321,231**					**8,410,051**	***Net book value***

11. ASET TETAP (lanjutan)

Grup menyewa berbagai mesin, peralatan, kendaraan, dan alat berat berdasarkan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa berkisar antara dua sampai lima tahun dan Grup memegang kepemilikan atas aset. Tidak ada dari aset sewa tersebut yang disewakan kembali oleh Grup kepada pihak ketiga.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan sebagai berikut:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

The Group leases machinery, equipment, vehicles and heavy equipment under non-cancellable lease agreements. The lease terms are between two and five years, and ownership of the assets lies within the Group. None of the leased assets were sub-leased by the Group to third parties.

Depreciation expense for the years ended on 31 December 2023 and 2022 was allocated as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 27a)	1,412,333	1,163,819	*Cost of revenue (Note 27a)*
Beban di luar beban pokok pendapatan	311,751	266,152	*Expenses other than cost of revenue*
Jumlah	**1,724,084**	**1,429,971**	***Total***

Nilai tercatat bruto aset tetap yang disusutkan penuh tetapi masih digunakan oleh Grup adalah sebesar:

The gross amount of fully depreciated fixed assets which were still being used by the Group amounted to the following:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Bangunan	182,758	182,331	*Buildings*
Mesin, peralatan, dan kendaraan	1,517,097	1,490,229	*Machinery, equipment and vehicles*
Peralatan kantor dan rumah sakit	134,868	134,447	*Office and hospital equipment*
Jumlah	**1,834,723**	**1,807,007**	***Total***

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh Grup masih dalam proses pengurusan sertifikat.

Most of the land rights owned by the Group are still in the certification process.

Aset tetap tertentu termasuk alat tambang utama yang berada di Area Pertambangan Tanjung Enim, Pelabuhan Kertapati, Pelabuhan Tarahan, Pelabuhan Teluk Bayur, Area Pertambangan Ombilin, Unit Pengusahaan Briket dan beberapa lokasi lain telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk semua risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp12,76 triliun (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: Rp11,24 triliun (nilai penuh)). Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Certain fixed assets, including the main mining equipment located in the Tanjung Enim Mine Area, Kertapati Port, Tarahan Port, Teluk Bayur Port, Ombilin Mine Area, Coal Briquette Operating Unit, and several other locations were insured with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) for all risks with the sum insured amounting to Rp12.76 trillion (full amount) as at 31 December 2023 and (2022: Rp11.24 trillion (full amount)). The Group's management is of the opinion that the fixed assets were adequately insured as at 31 December 2023 and 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak ada aset tetap Grup yang dijaminkan. Pada 31 Desember 2022 terdapat aset tetap Grup sebesar Rp24 miliar (nilai penuh) dijaminkan kepada BRI.

On 31 December 2023 there is no assets pledged as collateral. On 31 December 2022 certain fixed assets of the Group amounting to Rp24 billion (full amount) were used as collateral to BRI.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Jika aset tetap dicatat sebesar nilai wajar maka jumlahnya adalah sebesar:

***11. FIXED ASSETS** (continued)*

If the fixed assets were stated on a fair value basis, the amounts would be as follows:

	31 Desember/ *December* 2023		31 Desember/ *December* 2022		
	Nilai buku/ *Book value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai buku/ *Book value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Tanah	994,243	4,014,746	958,287	3,978,792	*Land*
Bangunan	1,733,844	2,294,582	1,764,206	2,320,290	*Buildings*
Mesin dan peralatan	3,716,511	6,366,521	3,786,841	6,524,565	*Machinery and equipment*
Jumlah	**6,444,598**	**12,675,849**	**6,509,334**	**12,823,647**	***Total***

Selain tanah, bangunan, mesin dan peralatan tidak ada perbedaan yang material antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Penentuan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan laporan penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori, dan Rekan tanggal 15 Februari 2023. Metode penilaian ditentukan dengan pendekatan data pasar. Penilai independen melakukan perbandingan beberapa transaksi jual beli dari aset serupa untuk menentukan nilai wajar aset tersebut (hierarki nilai wajar tingkat 3). Penentuan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 adalah setelah mempertimbangkan nilai wajar 31 Desember 2022 dan pergerakan nilai buku selama tahun 2023.

There is no material difference between the fair value and carrying value of fixed assets, other than land, buildings, machinery and equipment.

The determination of the fair value of the property, plant and equipment as at 31 December 2022 was based on an appraisal report from Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori, and Rekan dated 15 February 2023. The valuation method was determined through the market data approach. An independent appraiser compares several sale and purchase transactions in the market for similar items to determine the fair value of those assets (fair value hierarchy level 3). The determination of the fair value of the property, plant and equipment as at 31 December 2023 was after considering the fair value as at 31 December 2023 and the movement of the book value during 2023.

Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress

Construction in progress represents projects that have not been completed as at the date of the consolidated statements of financial position with details as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2023				*31 December 2023*
Kawasan Industri Tanjung Enim – Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Tahap 1 – 3 (Industri Batubara) (sebelumnya Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Batubara))	2.70%	142,812	Desember/ *December 2039*	*Kawasan Industri Tanjung Enim Bukit Asam Coal Based Industrial Estate Phase 1 - 3 (Coal Industry) (previously Kawasan Ekonomi Khusus (Coal Industry))*
Konstruksi kapal	89.82%	140,519	Maret/ *March* 2024	*Ship construction*
Betonisasi jalan tambang	37.00%	126,606	September/ *September* 2024	*Mine road concreting*
Revitalisasi kantor	97.00%	122,977	Juni/ June 2024	*Office revitalisation*
Pengadaan tanah Tarahan	75.00%	88,543	Desember/ *December* 2024	*Tarahan land procurement*

11. ASET TETAP (lanjutan) / ***11. FIXED ASSETS** (continued)*

Aset dalam penyelesaian (lanjutan) / ***Construction in progress** (continued)*

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2023 (lanjutan)				*31 December 2023 (continued)*
Rumah Dinas Duren Tiga	99.00%	80,579	Maret/ *March* 2024	*Duren Tiga Employee Housing*
Pemindahan *Bucket-wheel Excavator ("BWE")* 204 ke Banko	82.60%	57,967	Juni/ *June* 2024	*Transfer of Bucket-wheel excavator ("BWE")204 to Banko*
Lainnya	7.31% sd 95%	220,780	Desember/*December* 2024 - 2025	*Others*
Jumlah		**980,783**		***Total***

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion*	
31 Desember 2022				*31 December 2022*
Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Batubara)	15.54%	131,135	Desember/ *December* 2025	*Special Economic Zone (Coal Industry)*
Coal Handling Facility ("CHF") *Supply* PLTU Sumsel-8	98.78%	104,002	Maret/ *March* 2023	*Coal Handling Facility ("CHF") Supply for Power Plants Sumsel-8*
Rumah Dinas Duren Tiga	99.00%	77,539	Maret/ *March* 2023	*Duren Tiga Employee Housing*
Rumah Dinas Tarahan	99.36%	54,483	Maret/ *March* 2023	*Tarahan Employee Housing*
Pemindahan *Bucket-wheel Excavator ("BWE")* 204 ke Banko	69.00%	41,324	Maret/ *March* 2023	*Transfer of Bucket-wheel excavator ("BWE")204 to Banko*
Lainnya	15% - 95%	147,403	Desember/*December* 2023 - 2024	*Others*
Jumlah		**555,886**		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai aset tetap telah dibentuk secara memadai.

As at 31 December 2023 and 2022, management believed that allowance for impairment of the carrying values of fixed assets was adequate.

12. *GOODWILL*

Saldo *Goodwil* sebesar Rp102,077 merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas SBS sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik SBS pada tanggal akuisisi.

12. GOODWILL

Goodwill balance amounting to Rp102.077 represents the balance arising from acquisition of ownership in SBS, as a result of fair value measurement of assets and liabilities owned by SBS as at the acquisition date.

12. *GOODWILL* (lanjutan)

Grup menggunakan pendekatan pendapatan untuk menguji penurunan nilai UPK tertentu. Pendekatan pendapatan didasarkan atas nilai arus kas masa depan yang akan dihasilkan oleh suatu bisnis. Metode diskonto arus kas meliputi proyeksi arus kas dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan jumlah terpulihkan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat pertumbuhan jangka panjang	3.00%	3.55%	*Long-term growth rate*
Tingkat diskonto sebelum pajak (untuk perhitungan nilai pakai)	12.27%	15.40%	*Discount rate before tax (for value in use)*

Asumsi utama lainnya termasuk pendapatan dan biaya operasi jangka panjang.

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Nilai wajar yang ditentukan dalam perhitungan nilai aset yang dapat dipulihkan diklasifikasikan sebagai Tingkat 3 dalam hierarki nilai wajar.

Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada rugi penurunan nilai yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

12. GOODWILL *(continued)*

The Group used an income approach to assess the impairment value of certain CGUs. The income approach is predicated upon the value of the future cash flows that a business will generate going forward. The discounted cash flow method was used which involves projecting cash flows and converting it to a present value equivalent through discounting. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

The key assumptions used for recoverable amount calculations as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Other key assumptions include the long-term operating revenue and expenses.

Management determines key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

The fair value determined in the calculation of the recoverable amount of assets is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

Based on the results of the test for impairment of goodwill as at 31 December 2023 and 2022, there is no impairment loss recorded as at 31 December 2023 and 2022.

13. UTANG USAHA / *13. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas usaha kepada pihak ketiga dan berelasi dengan rincian sebagai berikut:

This account represents liabilities to third parties and related parties with the details as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	1,056,458	1,162,844	*Rupiah*
Euro	1,704	1,140	*Euro*
Dolar AS	16	-	*US Dollars*
	1,058,178	1,163,984	
Pihak berelasi (Catatan 30b)			*Related parties (Note 30b)*
Rupiah	892,847	601,222	*Rupiah*
Dolar AS	131,163	170,612	*US Dollars*
	1,024,010	771,834	
Jumlah utang usaha	**2,082,188**	**1,935,818**	***Total trade payable***

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan bakar, suku cadang, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan batubara, dan jasa penambangan batubara.

Trade payables balances mainly arose from the purchase of fuel, spare parts, repair and maintenance services, coal transportation services and coal mining services.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *14. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Jasa penambangan	2,139,376	1,499,153	*Mining services*
Jasa angkutan kereta api	786,964	1,330,847	*Coal railway services*
Suku cadang dan peralatan	479,852	168,236	*Spare parts and equipment*
Sewa alat berat	408,524	407,037	*Heavy equipments rent*
Jasa pihak ketiga	331,237	344,042	*Third party services*
Aset dalam penyelesaian	329,477	70,857	*Construction in progress*
Sumbangan	41,645	52,045	*Donations*
Denda	-	42,878	*Penalty*
Lainnya	340,755	569,923	*Others*
Jumlah	**4,857,830**	**4,485,018**	***Total***

Biaya yang masih harus dibayar atas aset dalam penyelesaian terdiri dari beban akrual atas pembuatan kapal yang dilakukan oleh PT Dok dan Perkapalan Air Kantung ("DAK"). Selain akrual konstruksi kapal terdapat akrual atas pembelian aset tetap yang belum siap digunakan dan betonisasi jalan.

Construction in progress accrued expense consists of accrued expense related to shipbuilding performed by PT Dok dan Perkapalan Air Kantung ("DAK"). Other than ship construction accrual there is accruals related to fixed assets purchase which were not yet ready to use and road concreting.

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK / *15. SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2023, liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari akrual bonus karyawan dan tantiem sebesar Rp852.007 (31 Desember 2022: Rp1.331.997).

As at 31 December 2023, short-term employee benefit liabilities consisted of employee bonuses and tantiem accruals amounting to Rp852,007 (31 December 2022: Rp1,331,997).

16. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA / *16. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan diterima di muka	95,449	129,958	*Unearned revenue*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10.000)	173,078	101,540	*Others (each below Rp10,000)*
Jumlah	**268,527**	**231,498**	***Total***

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 28A	25,370	160,284	*Article 28A*
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	2,528,981	1,252,382	*Value Added Tax ("VAT")*
Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") dan pajak lainnya	-	83,677	*Land and Buildings Tax ("PBB") and other taxes*
Jumlah	**2,554,351**	**1,496,343**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 25	8,247	354,739	*Article 25*
Pasal 29	286,929	538,916	*Article 29*
Pajak lainnya:			*Other taxes:*
PBB	128,118	158,388	*PBB*
PPN	147,870	198,529	*VAT*
Pasal 23/26	70,267	50,876	*Article 23/26*
Pasal 21	145,083	203,754	*Article 21*
Pasal 22	4,680	4,360	*Article 22*
Pasal 15	627	245	*Article 15*
Jumlah	**791,821**	**1,509,807**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Perusahaan			***The Company***
Kini	1,725,736	3,169,638	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	42,578	120,684	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(50,298)	(13,174)	*Deferred*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Kini	181,224	145,739	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	-	-	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(37,448)	-	*Deferred*
Konsolidasian			***Consolidated***
Kini	1,906,960	3,315,377	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	42,578	120,684	*Prior year's adjustment*
Tangguhan	(87,746)	(13,174)	*Deferred*
Jumlah pajak penghasilan	**1,861,792**	**3,422,887**	***Total income tax expenses***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***17. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expenses** (continued)*

The reconciliation between the profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the year ended on 31 December 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	8,154,313	16,202,314	*Consolidated profit before income tax*
Dikurangi:			*Less:*
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(804,255)	(880,532)	*Profit before income tax - subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	**7,350,058**	**15,321,782**	***Profit before income tax - the Company***
Koreksi pajak:			***Fiscal corrections:***
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	316,946	639,678	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Properti penambangan	(447,635)	(697,401)	*Mining properties*
Liabilitas imbalan pascakerja	122,559	(47,514)	*Post-employment benefit liabilities*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	327,370	222,418	*Difference between commercial and tax net book value of fixed assets*
Selisih liabilitas sewa dengan pembayaran liabilitas sewa	5,420	(21,005)	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	(96,025)	(59,709)	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Sumbangan	102,346	218,227	*Donations*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(571,303)	(829,063)	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Penghasilan kena pajak final	(581,149)	(437,743)	*Income subject to final tax*
Penyesuaian penjualan atas penetapan PP 15	1,133,882	-	*Sales adjustment upon application of GR 15*
Lainnya	181,785	97,775	*Others*
	494,196	(914,337)	
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	**7,844,254**	**14,407,445**	***Estimated taxable income - the Company***
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	**1,725,736**	**3,169,638**	***Current income tax expenses - the Company***

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. *TAXATION* *(continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. *Income tax expenses* *(continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum manfaat pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang dilaporkan dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expenses computed using the prevailing tax rates on the accounting profit before income tax benefit and the tax expenses as reported in profit or loss is as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	**8,154,313**	**16,202,314**	***Consolidated profit before income tax***
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 22%	1,793,949	3,564,509	*Tax expense computed using the prevailing tax rate of 22%*
Penghasilan kena pajak final	(218,490)	(193,904)	*Income subject to final tax*
Sumbangan	22,516	48,010	*Donations*
Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(125,687)	(182,394)	*Share in net profit of associates and joint venture*
Penyesuaian penjualan atas penetapan PP 15	249,454	-	*Sales adjustment upon application of GR 15*
Penyesuaian tahun lalu	42,578	120,684	*Prior year adjustment*
Beban pajak yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	97,472	65,982	*Non-deductible expense*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,861,792**	**3,422,887**	***Consolidated corporate income tax***

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan saat SPT tahunan disampaikan ke DJP.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are submitted to DGT.

d. Pajak tangguhan

d. *Deferred tax*

Perhitungan beban pajak dan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The computation of deferred income tax expenses and deferred tax assets is as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss*	Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Perusahaan					***The Company***
Aset pajak tangguhan, neto					***Deferred tax assets, net***
Liabilitas imbalan pascakerja	816,700	26,963	228,732	1,072,395	*Post-employment benefit liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	375,788	69,728	-	445,516	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	79,054	(21,126)	-	57,928	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Penurunan nilai aset tidak lancar	21,991	-	-	21,991	*Impairment for non-current assets*
Selisih liabilitas sewa dengan nilai buku aset-hak-guna	9,663	1,192	-	10,855	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Properti penambangan	(359,595)	(98,480)	-	(458,075)	*Mining properties*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(49,126)	72,021	-	22,895	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Manfaat pajak tangguhan		50,298	228,732		*Deferred tax benefits*
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	**894,475**			**1,173,505**	*Total deferred tax assets, net*

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***17. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	14,036	-	-	14,036	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Rugi pajak yang dapat dibawa ke masa depan	1,003	-	-	1,003	*Tax loss carry-forward*
Lainnya	7,809	12,330	-	20,139	*Others*
Total aset pajak tangguhan	22,848	12,330	-	35,178	*Total deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(23,525)	-	-	(23,525)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Pembayaran liabilitas sewa	(78,819)	25,118	-	(53,701)	*Payment for lease liabilities*
Total liabilitas pajak tangguhan	(102,344)	25,118	-	(77,226)	*Total deferred tax liabilities*
Beban pajak tangguhan		37,448	-		*Deferred tax expenses*
Konsolidasian					***Consolidated***
Aset pajak tangguhan	917,323			1,208,683	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan	(102,344)			(77,226)	*Deferred tax liabilities*
Manfaat pajak tangguhan		87,746	228,732		*Deferred tax benefits*

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Perusahaan					***The Company***
Aset pajak tangguhan, neto					***Deferred tax assets, net***
Liabilitas imbalan pascakerja	691,837	(10,453)	135,316	816,700	*Post-employment benefit liabilities*
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	235,059	140,729	-	375,788	*Provision for environmental reclamation and mine closure*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	92,190	(13,136)	-	79,054	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Penurunan nilai aset tidak lancar	21,991	-	-	21,991	*Impairment for non-current assets*
Selisih liabilitas sewa dengan nilai buku aset-hak-guna	4,512	5,151	-	9,663	*Difference between lease liabilities and right-of-use assets*
Properti penambangan	(201,546)	(158,049)	-	(359,595)	*Mining properties*
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(98,058)	48,932	-	(49,126)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Manfaat pajak tangguhan		13,174	135,316		*Deferred tax benefits*
Jumlah aset pajak tangguhan, neto	745,985			894,475	*Total deferred tax assets, net*

17. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***17. TAXATION** (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax** (continued)*

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ *Credited/ (charged) to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	14,036	-	-	14,036	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Rugi pajak yang dapat dibawa ke masa depan	1,003	-	-	1,003	*Tax loss carry-forward*
Lainnya	7,809	-	-	7,809	*Others*
Total aset pajak tangguhan	22,848	-	-	22,848	*Total deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(23,525)	-	-	(23,525)	*Difference between commercial and tax book value of fixed assets*
Pembayaran liabilitas sewa	(78,819)	-	-	(78,819)	*Payment for lease liabilities*
Total liabilitas pajak tangguhan	(102,344)	-	-	(102,344)	*Total deferred tax liabilities*
Beban pajak tangguhan		-	-		*Deferred tax expenses*
Konsolidasian					***Consolidated***
Aset pajak tangguhan	768,833			917,323	*Deferred tax assets*
Liabilitas pajak tangguhan	(102,344)			(102,344)	*Deferred tax liabilities*
Manfaat pajak tangguhan		13,174	135,316		*Deferred tax benefits*

e. Administrasi / ***e. Administration***

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the companies within the Group which are domiciled in Indonesia submit their tax returns on the basis of self-assessment. The DGT may assess and amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Sengketa pajak / ***f. Tax disputes***

PBB / ***PBB***

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ("SPPT") atas PBB sebagai berikut:

As at the date of these consolidated financial statements, the Company had received the following Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") and Notification of Tax Due ("SPPT") on PBB as follows:

Jenis pajak/ *Tax type*	**Tahun pajak/ *Fiscal year***	**KPP penerbit/ *Issuing tax office***	**Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter***	**Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter***	**Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)**	**Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)**	**Status/ *Status***
PBB	2007	KPP Prabumulih	SKPKB	Desember/ *December* 2013	109	(153,558)[a)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2012	KPP Prabumulih	SPPT	Agustus/ *August* 2012	49,984	(9,613)	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by the Company*

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. *TAXATION* *(continued)*

f. Sengketa pajak (lanjutan)

f. *Tax disputes* *(continued)*

PBB (lanjutan)

PBB *(continued)*

Jenis pajak/ *Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	KPP penerbit/ *Issuing tax office*	Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter*	Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter*	Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)	Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)	Status/ *Status*
PBB	2012	KPP Lahat	SPPT	Agustus/ *August* 2012	19,655	(354)	Peninjauan kembali oleh Perusahaan/ *Judicial review by the Company*
PBB	2015	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2015	35,833	35,740[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2015	KPP Lahat	SPPT	April/*April* 2015	3,340	(1,639)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2016	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2016	68,106	(7,299)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2016	KPP Lahat	SPPT	April/*April* 2016	4,959	(317)[b)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT rejected*
PBB	2019	KPP Prabumulih	SPPT	April/*April* 2019	214,737	121,880	Banding/*Appeal*
PBB	2019	KPP Lahat	SPPT	April/*April* 2019	47,932	25,255	Banding/*Appeal*
PBB	2014	KPP Prabumulih	SKPKB	September/ *September* 2019	-	(55,541)[c)]	Banding diterima/ *Appeal Approved*
PBB	2014	KPP Lahat	SKPKB	September/ *September* 2019	-	(2,002)[c)]	Banding diterima/ *Appeal Approved*
PBB	2014	KPP Prabumulih	STP	Desember/ *December* 2019	3,332	-	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PBB	2014	KPP Lahat	STP	Desember/ *December* 2019	240	240	Peninjauan kembali oleh Perusahaan Ditolak/Judicial *review by Company rejected*
PBB	2017	KPP Prabumulih	STP	Oktober/ *October* 2019	-	137[d)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT rejected*
PBB	2018	KPP Prabumulih	STP	Oktober/ *October* 2019	-	7,252[d)]	Peninjauan kembali oleh DJP ditolak/ *Judicial review by DGT rejected*

Catatan:

a) Kompensasi berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") tertanggal 21 Februari 2018 menyatakan bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar PBB sebesar Rp293 miliar, dari sengketa pajak tahun 2004-2008, 2009-2010 dan 2014. Pada Februari 2018, Perusahaan telah menerima restitusi pajak sebesar Rp176 miliar. Jumlah sisanya Rp111 miliar akan dikompensasikan untuk sengketa PBB tahun 2015, 2016 dan 2017.

b) Kompensasi atas sengketa pajak PBB tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp35 miliar, Rp28 miliar dan Rp47 miliar.

c) Pada September 2019, DJP menerbitkan SKP PBB atas PBB tahun 2014 yang ditelah diperiksa ditingkat Mahkamah Agung sebelumnya. SKP tersebut dilakukan upaya hukum keberatan dan banding oleh perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2023 telah terbit putusan pengadilan pajak dengan amar putusan menerima permohonan banding perusahaan.

d) Kompensasi berdasarkan SPMKP sebesar Rp7,3 miliar untuk STP PBB 2017 dan 2018.

Notes:

a) Compensation based on SPMKP dated 21 February 2018 stated the Company has overpayment on PBB amounting to Rp 293 billion, from PBB dispute 2004-2008, 2009-2010, and 2014. On February 2018, the Company received payment for a tax refund amounting to Rp176 billion. The remaining balance amounting to Rp111 billion is compensated to PBB dispute year 2015, 2016 and 2017.

b) Compensation for the 2015, 2016 and 2017 PBB disputes, amounted to Rp35 billion, Rp28 billion and Rp47 billion, respectively.

c) As of September 2019, DGT issued SKP for PBB 2014 which previously was examined at the Supreme Court level. The SKP is subject to legal objections and appeals by the Company. As of 31 December 2023, the Tax Court's decision has been issued with a decision to accept the company's appeal.

d) Compensation based on SPMKP amounted to Rp7.3 billion for STP PBB 2017 and 2018.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Sengketa pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima SKPKB atas pajak penghasilan sebagai berikut:

***17. TAXATION** (continued)*

***f. Tax disputes** (continued)*

Income Tax

As at the date of these consolidated financial statements, the Company had received the following SKPKB on income tax as follows:

Jenis pajak/ *Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	KPP penerbit/ *Issuing tax office*	Surat ketetapan pajak/ *Assessment letter*	Periode surat ketetapan pajak/ *Period of tax assessment letter*	Jumlah berdasarkan keputusan terakhir/ *Amount based on the latest decision* (dalam jutaan/ *in millions*)	Jumlah (kompensasi)/ pembayaran terakhir/ *Total latest (compensation)/ payment* (dalam jutaan/ *in millions*)	Status/ *Status*
PPh 23	2011	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	Desember/ *December* 2012	38,600	38,600	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PPh badan	2016	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPLB	Agustus/ *August* 2018	(1,548)	(101,646)	Peninjauan kembali oleh DJP/ *Judicial review by DGT*
PPh badan	2017	KPP Wajib Pajak Besar 3	SKPKB	September/ *September* 2022	145,000	72,500	Keberatan/ *Objection*

18. PROVISI REKLAMASI LINGKUNGAN DAN PENUTUPAN TAMBANG

Penyisihan dilakukan atas reklamasi lingkungan dan penutupan tambang yang berhubungan dengan reklamasi dan bagian provisi penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang dan kegiatan reklamasi yang berjalan dari tahun ke tahun. Mutasi nilai provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

18. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RECLAMATION AND MINE CLOSURE

The provision for environmental reclamation and mine closure relates to the reclamation and mine closure provision to be incurred at the end of the life of the mine and ongoing reclamation activities from year to year. Movements in the provision for environmental reclamation and mine closure were as follows:

		Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang/ *Provision for environmental reclamation and mine closure*				
Nama/ *Name*	Lokasi/ *Location*	1 Januari/ *January* 2023	Penambahan/ (pengurangan)/ *Additions/ (deductions)*	Akresi/ *Accretion*	Pengeluaran reklamasi lingkungan/ *Reclamation expenditure*	31 Desember/ *December* 2023
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Air Laya	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	417,574	128,979	17,533	(125,331)	438,755
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Muara Tiga Besar	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	322,380	26,927	17,719	(43,515)	323,511
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Banko Barat	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	428,963	136,530	24,929	(43,114)	547,308
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Sawahlunto	Ombilin - Sumatera Barat/ *West Sumatra*	5,409	-	-	-	5,409
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Bukit Kendi	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	51,663	3,768	-	-	55,431
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Peranap	Peranap - Riau/ *Riau*	6,875	-	-	-	6,875
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* IPC	Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	33,100	3,272	-	-	36,372
IUP Operasi Produksi/- *Operation Production* Banko Tengah	Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	526,932	208,213	27,893	(59,819)	703,219
Jumlah/*Total*		**1,792,896**	**507,689**	**88,074**	**(271,779)**	**2,116,880**

18. PROVISI REKLAMASI LINGKUNGAN DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

18. *PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RECLAMATION AND MINE CLOSURE (continued)*

Nama/ *Name*	Lokasi/ *Location*	Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang/ *Provision for environmental reclamation and mine closure* — 1 Januari/ *January* 2022	Penambahan/ (pengurangan)/ *Additions/ (deductions)*	Akresi/ *Accretion*	Pengeluaran reklamasi lingkungan/ *Reclamation expenditure*	31 Desember/ *December* 2022
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Air Laya	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	423,839	111,287	15,815	(133,367)	417,574
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Muara Tiga Besar	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	267,628	51,745	17,413	(14,406)	322,380
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Banko Barat	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	364,704	64,222	25,313	(25,276)	428,963
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Sawahlunto	Ombilin - Sumatera Barat/ *West Sumatra*	5,409	-	-	-	5,409
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Bukit Kendi	Tanjung Enim - Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	51,663	-	-	-	51,663
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* Peranap	Peranap - Riau/ *Riau*	6,875	-	-	-	6,875
IUP Operasi Produksi/ *Operation Production* IPC	Kalimantan Timur/ *East Kalimantan*	24,497	7,582	1,200	(179)	33,100
IUP Operasi Produksi/- *Operation Production* Banko Tengah	Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	-	526,932	-	-	526,932
Jumlah/*Total*		**1,144,615**	**761,768**	**59,741**	**(173,228)**	**1,792,896**

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo akhir tahun	2,116,880	1,792,896	*Balance at the end of the year*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(329,190)**	**(257,812)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**1,787,690**	**1,535,084**	***Non-current portion***

Estimasi manajemen atas jumlah provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang adalah sebesar Rp2.116.880 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp1.792.896) sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2t.

Management's estimate of total environmental reclamation and mine closure provisions amounts to Rp2,116,880 for the year ended on 31 December 2023 (31 December 2022: Rp1,792,896) in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2t.

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The key assumptions used for the provision of environmental reclamation and mine closure calculations as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat inflasi	3.60%	5.51%	*Inflation rate*
Tingkat diskonto	6.36% - 6.84%	5.52% - 7.26%	*Discount rate*

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan yang dilakukan telah mencukupi taksiran kewajiban yang akan timbul pada saat realisasi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang.

Management believes that the provision is adequate to cover the liability that will arise at the time of environmental reclamation and mine closure realisation.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES*

Liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaria independen, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Employee benefit liabilities as at 31 December 2023 and 2022 were calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari penyisihan, beban dan mutasi saldo penyisihan untuk imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja dan imbalan kerja lainnya:

The following table summarises the provision, expenses and movements in the obligation for pension benefits, post-employment healthcare benefits and other employment benefits:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Kewajiban posisi keuangan untuk:			*Financial position obligations for:*
Imbalan pensiun	204,699	385,292	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	4,458,003	3,166,609	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	191,130	139,681	*Other employment benefits*
Jumlah	**4,853,832**	**3,691,582**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(228,521)**	**(358,153)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**4,625,311**	**3,333,429**	***Non-current portion***

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Dibebankan pada laba rugi konsolidasian:			*Charged to consolidated profit or loss:*
Imbalan pensiun	34,511	38,139	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	319,608	226,916	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	56,828	6,554	*Other employment benefits*
	410,947	**271,609**	
Pengukuran kembali untuk:			*Remeasurements for:*
Imbalan pensiun	(27,772)	62,770	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	1,055,041	531,702	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	12,422	20,724	*Other employment benefits*
	1,039,691	**615,196**	

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun / *a. Pension benefits*

Perusahaan telah menerima persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Kep-245/KM.6/2003 tanggal 21 Oktober 2002 untuk mendirikan dana pensiun terpisah, Dana Pensiun Bukit Asam, di mana pekerja tertentu, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pasti saat pensiun, cacat atau kematian, serta imbalan kesehatan pascakerja.

The Company received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Kep-245/KM.6/2003 dated 21 October 2002 to establish a separate pension fund, Dana Pensiun Bukit Asam. After serving a qualifying period, certain employees are entitled to defined benefits upon retirement, disability or death, and also post-employment healthcare benefits.

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Nilai kini kewajiban yang didanai	(2,126,519)	(2,097,578)	*Present value of funded obligation*
Nilai wajar aset program	1,921,820	1,712,286	*Fair value of plan assets*
Jumlah liabilitas imbalan pascakerja	(204,699)	(385,292)	*Total post-employment benefit liabilities*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligations for the year ended on 31 December 2023 were as follows:

	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation*	Nilai wajar aset program/*Fair value of plan assets*	Jumlah/ *Total*	
1 Januari 2023	**2,097,578**	**(1,712,286)**	**385,292**	***1 January 2023***
Biaya jasa kini	11,029	-	11,029	*Current service cost*
Biaya/(penghasilan) bunga	155,850	(132,368)	23,482	*Interest cost/(income)*
Subjumlah yang diakui dalam laba rugi	**166,879**	**(132,368)**	**34,511**	***Subtotal amounts recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:				*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Laba dari perubahan asumsi demografi	(201,137)	-	(201,137)	*Gain from changes in demographic assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	140,991	-	140,991	*Losses from changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	2,468	-	2,468	*Experience adjustment on obligation*
Hasil dari aset program	-	29,906	29,906	*Return on plan assets*
Subjumlah biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**(57,678)**	**29,906**	**(27,772)**	***Subtotal expenses recognised in other comprehensive income***
Iuran yang dibayar:				*Contributions paid by:*
Grup	-	(187,332)	(187,332)	*The Group*
Pembayaran manfaat oleh:				*Benefits paid by:*
Aset program	(80,260)	80,260	-	*Plan assets*
31 Desember 2023	**2,126,519**	**(1,921,820)**	**204,699**	***31 December 2023***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan) / *19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan) / *a. Pension benefits (continued)*

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit obligations during the year ended on 31 December 2022 were as follows:

	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligation*	Nilai wajar aset program/*Fair value of plan assets*	Jumlah/ *Total*	
1 Januari 2022	**1,895,340**	**(1,535,528)**	**359,812**	***1 January 2022***
Biaya jasa kini	12,309	-	12,309	*Current service cost*
Biaya/(penghasilan) bunga	143,098	(117,268)	25,830	*Interest cost/(income)*
Subjumlah yang diakui dalam laba rugi	**155,407**	**(117,268)**	**38,139**	***Subtotal amounts recognised in profit or loss***
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:				*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	31,252	-	31,252	*Losses from changes in financial assumptions*
Kerugian dari perubahan asumsi demografi	59,396	-	59,396	*Losses from changes in demographic assumptions*
Kerugian dari perubahan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	16,390	-	16,390	*Losses from increase in pension basic income rate*
Rugi dari perubahan kombinasi asumsi	2,768	-	2,768	*Losses from changes in combination of assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	16,214	-	16,214	*Experience adjustment on obligation*
Hasil dari aset program	-	(63,250)	(63,250)	*Return on plan assets*
Subjumlah biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**126,020**	**(63,250)**	**62,770**	***Subtotal expenses recognised in other comprehensive income***
Iuran yang dibayar:				*Contributions paid by:*
Aset program	-	(75,429)	(75,429)	*Plan assets*
Pembayaran manfaat oleh:				*Benefits paid by:*
Aset program	(79,189)	79,189	-	*Plan assets*
31 Desember 2022	**2,097,578**	**(1,712,286)**	**385,292**	***31 December 2022***

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya jasa kini	11,029	12,309	*Current service costs*
Iuran karyawan ke dalam aset program	(1,126)	(1,424)	*Employee contributions to plan assets*
Biaya bunga	24,608	27,254	*Interest cost*
Jumlah	**34,511**	**38,139**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

a. Pension benefits *(continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023, dari total beban, Rp17.44 miliar (2022: Rp19,27 miliar) (nilai penuh) dan Rp17.07 miliar (2022: Rp18,87 miliar) (nilai penuh) masing-masing dimasukkan sebagai "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2023, of the total charge, Rp17,44 billion (2022: Rp19.27 billion) (full amount) and Rp17,07 billion (2022: Rp18.87 billion) (full amount) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman di setiap wilayah. Di Indonesia, asumsi mortalitas yang digunakan adalah GAM 1971 *male*.

Assumptions regarding future mortality are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in each territory. In Indonesia, the mortality assumptions used are based on the GAM 1971 male.

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Tingkat diskonto	6.86%	7.43%	*Discount rate*
Hasil aset program yang diharapkan	7.50%	7.50%	*Expected return on plan assets*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	11.50%	11.50%	*Pension basic income rate*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk karyawan aktif	100% GAM 1971	100% TMI IV	*Mortality rate applied for active employee*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk pensiunan	100% GAM 1971	100% GAM 1971	*Mortality rate applied for pensioners*

Sensitivitas liabilitas pensiun secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan/*Impact on overall liability***	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp237 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp287 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp12 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Increase pension basic income rate*
31 Desember/ *December* 2022			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp256 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp316 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp12 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Increase pension basic income rate*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

a. Imbalan pensiun (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

a. Pension benefits *(continued)*

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption, with all other assumptions remaining constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated by the projected unit credit method at the end of the reporting year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Komposisi nilai wajar aset program		***Composition of fair value assets programme***
Surat berharga negara	59.61%	*Government bonds*
Obligasi	16.76%	*Bonds*
Tanah dan bangunan	7.94%	*Land and buildings*
Sukuk	7.11%	*Sukuk*
Deposito berjangka	3.65%	*Time deposits*
Saham	3.51%	*Stocks*
Lainnya	1.42%	*Others*
Jumlah	**100.00%**	***Total***

b. Imbalan kesehatan pascakerja

Perusahaan memiliki beberapa skema imbalan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dengan skema pensiun imbalan pasti. Seluruh program ini tidak didanai.

b. Post-employment healthcare benefits

The Company operates a number of post-employment healthcare benefits schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes. All of these plans are unfunded.

Total liabilitas imbalan kesehatan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ditentukan sebagai berikut:

Post-employment healthcare benefit liabilities recognised in the consolidated statements of financial position as at 31 December 2023 and 2022 are computed as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Nilai kini kewajiban	4,458,003	3,166,609	*Present value of obligation*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

b. Imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment healthcare benefits *(continued)*

Nilai kini imbalan kesehatan pascakerja adalah sebagai berikut:

Present values of post-employment healthcare benefits are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	**3,166,609**	**2,473,771**	***Beginning balance***
Biaya jasa kini	84,329	40,146	*Current service cost*
Biaya bunga	235,279	186,770	*Interest cost*
	319,608	226,916	
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	1,176,423	55,824	*Losses from change in financial assumptions*
(Laba)/rugi dari perubahan asumsi demografi	(536,620)	177,025	*(Gain)/lossess from change in demographics assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	415,238	298,853	*Experience adjustment on obligation*
	1,055,041	531,702	
Pembayaran manfaat oleh Grup	(83,255)	(65,780)	*Benefit paid by the The Group*
Saldo akhir	**4,458,003**	**3,166,609**	***Ending balance***

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss were as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya jasa kini	84,329	40,146	*Current service cost*
Biaya bunga	235,279	186,770	*Interest cost*
Jumlah tercakup dalam biaya karyawan	319,608	226,916	*Total included in employee costs*

Pada tanggal 31 Desember 2023, dari total beban, Rp161,51 miliar (2022: Rp114,67 miliar) (nilai penuh) dan Rp158,10 miliar (2022: Rp112,25 miliar) (nilai penuh) masing-masing dimasukkan sebagai "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2023, of the total charges, Rp161.51 billion (2022: Rp114.67 billion) (full amount) and Rp158.10 billion (2022: Rp112.25 billion) (full amount) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

b. Imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

b. Post-employment healthcare benefits *(continued)*

Berikut asumsi pokok aktuaria yang digunakan:

Below are the principal actuarial assumptions used:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Tingkat diskonto untuk jaminan kesehatan	6.95%	7.43%	*Discount rate for healthcare benefits*
Tren biaya kesehatan	9.30%	7.89%	*Medical cost trend*
Tingkat mortalitas yang diterapkan untuk pensiunan	100% GAM 1971	100% GAM 1971	*Mortality rate applied for pensioners*

Sensitivitas liabilitas imbalan kesehatan pascakerja secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall post-employment healthcare benefits liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan/ *Impact on overall liability***	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp682 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp895 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tren biaya kesehatan	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp887 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp691 miliar/*billion*	*Medical cost trend*
31 Desember/ *December* 2022			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp459 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp593 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tren biaya kesehatan	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* Rp584 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp461 miliar/*billion*	*Medical cost trend*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined medical benefit obligation is calculated by using the projected unit credit method at the end of the reporting year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya

Selain imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja, Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja lainnya berupa:

Program lainnya:

- Program untuk pengunduran diri dan cacat; dan
- Imbalan pascakerja lainnya berdasarkan UU dan peraturan perusahaan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya:

- Imbalan pascakerja untuk penghargaan purnakarya; dan
- Imbalan kerja jangka panjang lainnya berdasarkan peraturan perusahaan.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

c. Other employment benefits

Other than pension benefits and post-employment healthcare benefits, the Company also provides its employees with several other employee benefits:

Other benefits:

- *Program for resignation and disability; and*
- *Other post-employment benefits based on laws and company's regulations.*

Other long-term employee benefits:

- *Employment benefit for post-service reward; and*
- *Other long-term employee benefits based on company's regulations.*

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Program lainnya	55,356	37,915	*Other benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	135,774	101,766	*Other long-term employee benefits*
Nilai kini kewajiban imbalan kerja lainnya	191,130	139,681	*Present value of other employment benefits*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Mutasi kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligations for the year ended on 31 December 2023 and 2022 is as follows:

Program lainnya / ***Other programmes***

	Nilai kini kewajiban/*Present value obligation*		
	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Awal tahun	**37,915**	**203,138**	***At the beginning of the year***
Biaya jasa kini	5,159	3,745	*Current service cost*
Biaya bunga	2,802	1,981	*Interest cost*
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) yang timbul dari penyelesaian	-	(38,528)	*Past service cost and (gain) on settlement*
	7,961	(32,802)	
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income:*
Rugi/(laba) dari perubahan asumsi keuangan	2,843	(1,515)	*Loss/(gain) from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan Asumsi demografi	13,431	-	*Loss from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(3,852)	22,239	*Experience adjustment on obligation*
	12,422	20,724	
Pembayaran manfaat oleh:			*Benefits paid by the plan:*
Grup	(2,942)	(11,059)	*The Group*
Penyelesaian	-	(142,086)	*Settlement*
	(2,942)	(153,145)	
Akhir tahun	**55,356**	**37,915**	***At the end of the year***

Imbalan jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefits***

	Nilai kini kewajiban/*Present value obligation*		
	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Awal tahun	**101,766**	**87,179**	***At the beginning of the year***
Biaya jasa kini	35,849	8,849	*Current service costs*
Biaya bunga	7,521	6,330	*Interest cost*
	43,370	15,179	
Pengukuran kembali diakui pada laba rugi:			*Remeasurement recognised in profit or loss:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	7,801	4,418	*Loss from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi demografi	1,913	-	*Loss from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(4,217)	19,759	*Experience adjustment on obligation*
	5,497	24,177	
Pembayaran manfaat oleh:			*Benefits paid by the plan:*
Grup	(14,859)	(24,769)	*The Group*
Akhir tahun	**135,774**	**101,766**	***At the end of the year***

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss were as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya jasa kini	41,008	12,594	*Current service costs*
Biaya bunga	10,323	8,311	*Interest expenses*
Biaya jasa lalu dan (keuntungan) yang timbul dari penyelesaian	-	(38,528)	*Past service cost and (gain) on settlement*
Pengukuran kembali diakui pada laba rugi:			*Remeasurement recognised in profit or loss:*
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	7,801	4,418	*Losses from changes in financial assumptions*
Rugi dari perubahan asumsi demografi	1,913	-	*Losses from changes in demographic assumptions*
Penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban	(4,217)	19,759	*Experience adjustment on obligation*
Jumlah tercakup dalam biaya karyawan	**56,828**	**6,554**	***Total included in employee costs***

Pada tanggal 31 Desember 2023, dari total beban, Rp28,72 miliar (nilai penuh) (2022: Rp3,31 miliar (nilai penuh)) dan Rp28,11 miliar (nilai penuh) (2022: Rp3,24 miliar (nilai penuh)) masing-masing dimasukkan pada "Beban pokok pendapatan" dan "Beban umum dan administrasi".

As at 31 December 2023, of the total charges, Rp28.72 billion (full amount) (2022: Rp3.31 billion (full amount)) and Rp28.11 billion (full amount) (2022: Rp3.24 billion (full amount)) were included in "Cost of revenue" and "General and administrative expenses", respectively.

Berikut asumsi pokok aktuaria yang digunakan:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat diskonto untuk imbalan kerja lainnya	6.85%	7.39%	*Discount rate for other employment benefits*
Kenaikan gaji masa datang	10.00%	10.00%	*Future salary increases*

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

c. Imbalan kerja lainnya (lanjutan)

c. Other employment benefits *(continued)*

Sensitivitas liabilitas imbalan kerja lainnya terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall other employment benefits liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas secara keseluruhan/ *Impact on overall liability***	
31 Desember/ *December* 2023			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp20 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp23 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by 1*%	naik/*decrease by* Rp24 miliar/*billion* turun/*increase by* Rp21 miliar/*billion*	*Salary growth rate*
31 Desember/ *December* 2022			
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion* naik/*increase by* Rp13 miliar/*billion*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by 1*%	naik/*increase by* Rp13 miliar/*billion* turun/*decrease by* Rp12 miliar/*billion*	*Salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial di mana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti kesehatan atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in one assumption, while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated.

When calculating the sensitivity of the defined medical benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated by the projected unit credit method at the end of the year) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

d. Program pensiun iuran pasti

d. Defined contribution pension plan

Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun iuran pasti ("PPIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh DPLK BNI, bersama-sama disebut sebagai pengelola PPIP. Kontribusi dihitung secara periodik oleh pengelola PPIP. Para karyawan mengkontribusikan 3% dari gaji dasar dan perusahaan berkontribusi sebesar 20,5%, 21%, dan 22,5% dari gaji dasar karyawan untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Jumlah kontribusi yang dibayar ke dana pensiun lembaga keuangan dimaksud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp71,95 miliar (2022: Rp70,41 miliar) (nilai penuh).

The Company also has a defined contribution pension programme covering all of its qualified permanent employees. The programme is managed by DPLK BNI, collectively referred to as defined contribution fund manager. Contributions are computed periodically by the fund manager, whereby the employees contribute 3% of their basic salary and the Company contributes 20.5%, 21%, and 22.5% of the employee's basic salary to achieve the required amounts. Total contributions paid to the pension fund for the year ended on 31 December 2023 amounted to Rp71.95 billion (2022: Rp70.41 billion) (full amount).

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja

Perusahaan terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Perusahaan hanya memiliki aset program untuk kewajiban manfaat pensiun, yang dikelola oleh DPBA. Untuk manfaat kesehatan pascakerja dan manfaat jangka panjang lainnya, Grup melakukan investasi secara sendiri dan tidak memiliki atau mendirikan aset program.

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Terkait dengan program manfaat pensiun, investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada surat utang negara, meskipun DPBA juga berinvestasi pada obligasi, properti, sukuk, deposito berjangka, instrumen saham, reksadana, dan kontrak investasi kolektif. DPBA meyakini bahwa surat utang negara memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Terkait dengan manfaat kesehatan pascakerja dan manfaat jangka panjang lainnya, Grup melakukan investasi pada instrumen obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Investasi pada instrumen ini dinilai aman oleh manajemen untuk melindungi kepastian Grup dalam memenuhi kewajiban manfaat karyawan di masa depan.

Harapan umur hidup

Manfaat pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program. Sementara itu, imbalan kerja jangka panjang lainnya diberikan pada saat karyawan berhenti bekerja.

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

e. Risk management related to employee benefit programme

The Company is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and post-employment healthcare plans. The most significant risks areas are as follows:

Asset volatility

The Company only has plan assets for its pension benefits, which are managed by DPBA. For its post-employment healthcare and other long-term benefits, the Group does not establish plan assets and only manages its liability through investments in the corporate level.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

In relation to the pension benefit programme, investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in government bonds, although DPBA also invests in bonds, property, sukuk, time deposits, equity instruments, mutual funds, and collective investment contract. DPBA believes that government bonds offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

In relation to post-employment healthcare and other long-term benefits, the Group has invested in corporate bonds listed on the Indonesia Stock Exchange. Investment in this instrument is considered safe to prevent the Group from defaulting in fulfilling its obligation to employees in the future.

Life expectancy

Pension benefits and post-employment healthcare benefits are to provide benefits for the life of the member, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities. Meanwhile, other post-employment benefits are provided to employees while they are retired.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja (lanjutan)

Harapan umur hidup (lanjutan)

Rata-rata durasi kewajiban untuk pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, dan imbalan kerja lainnya, masing-masing adalah 17,16 tahun, 19,45 tahun dan 19,69 tahun.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun, imbalan kesehatan pascakerja, dan imbalan kerja lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

19. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

e. Risk management related to employee benefit programme *(continued)*

Life expectancy (continued)

The weighted average durations of the pension benefits, post-employment healthcare benefits and other benefits are 17.16 years, 19.45 years and 19.69 years, respectively.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase the plan's liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits, post-employment healthcare benefits and other employment benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Imbalan pensiun	96,621	460,806	5,815,654	6,373,081	*Pension benefits*
Imbalan kesehatan pascakerja	124,281	625,666	82,928,326	83,678,273	*Post-employment healthcare benefits*
Imbalan kerja lainnya	16,582	52,710	1,885,564	1,954,856	*Other employment benefits*
Jumlah	**237,484**	**1,139,182**	**90,629,544**	**92,006,210**	***Total***

20. PINJAMAN BANK

20. BANK BORROWINGS

	Jumlah tercatat/Carrying amount		
	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pinjaman bank			***Bank borrowings***
Mandiri	68,000	-	*Mandiri*
BRI	-	2,240	*BRI*
Jumlah	**68,000**	**2,240**	***Totals***

20. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *20. BANK BORROWINGS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar pinjaman bank sama dengan jumlah tercatatnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan mengingat jatuh temponya kurang dari satu tahun. Pinjaman jangka panjang lainnya merupakan pinjaman dengan suku bunga mengambang sesuai dengan suku bunga pinjaman yang ada di pasar.

As at 31 December 2023, the fair value of short-term bank borrowings equals their carrying amount since the impact of discounting is not significant, as the borrowings are due in less than one year. Other long-term borrowings have a floating interest rate based on market interest rate.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank borrowings as at 31 December 2023 is as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facility* (dalam ribuan/ *in thousands)*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Periode pembayaran bunga/*Interest payment period*	Tingkat suku bunga per tahun/*Annual interest rate*	Jenis suku bunga/ *Interest rate type*	Jaminan/*Collateral* (dalam jutaan/ *in millions)*
Mandiri	Rupiah	28,000,000	31 Okt/*Oct* 2023 -30 Jan/*Jan* 2024	Bulanan/ *Monthly*	0.50%	Tetap/ *Fixed*	Dana DHE SDA: Rp28,000
Mandiri	Rupiah	40,000,000	30 Nov/*Nov* 2023 -29 Feb/*Feb* 2024	Bulanan/ *Monthly*	0.50%	Tetap/ *Fixed*	Dana DHE SDA: Rp40,000

21. LIABILITAS SEWA / *21. LEASE LIABILITIES*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
PT Putra Perkasa Abadi	299,089	380,008	*PT Putra Perkasa Abadi*
PT Rifansi Dwi Putra	208,670	127,599	*PT Rifansi Dwi Putra*
PT Sumi Gita Jaya	185,025	263,313	*PT Sumi Gita Jaya*
PT Kosindo Supratama	99,794	43,314	*PT Kosindo Supratama*
PT Adil Utama	72,369	93,815	*PT Adil Utama*
PT Lematang	67,788	16,627	*PT Lematang*
PT Prima Indojaya Mandiri	56,530	98,100	*PT Prima Indojaya Mandiri*
PT Leo Anugerah Sukses	40,475	63,830	*PT Leo Anugerah Sukses*
PT Primatama Energi Nusantara	34,622	48,904	*PT Primatama Energi Nusantara*
PT Cakra Indo Pratama	26,819	43,892	*PT Cakra Indo Pratama*
PT Mitsubishi UFJ Financial Group (''MUFG'')	14,537	37,708	*PT Mitsubishi UFJ Financial Group (''MUFG'')*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp20.000)	127,964	142,851	*Others (each below Rp20,000)*
Jumlah	**1,233,682**	**1,359,961**	***Total***
Dikurang:			*Less:*
Bagian jangka pendek	**(490,017)**	**(589,437)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**743,665**	**770,524**	***Non-current portion***
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:			*The present value of lease liabilities is as follows:*
Tidak lebih dari 1 tahun	580,912	265,187	*No later than 1 year*
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	817,396	1,223,296	*Later than 1 year and no later than 5 years*
	1,398,308	1,488,483	
Dikurang:			*Less:*
Biaya keuangan di masa depan atas sewa	(164,626)	(128,522)	*Future finance costs on leases*
Nilai kini liabilitas sewa	**1,233,682**	**1,359,961**	***Present value of lease liabilities***

21. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *21. LEASE LIABILITIES (continued)*

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Beban terkait sewa variabel	9,659,365	8,769,072	*Expenses relating to variable leases*
Beban terkait sewa jangka pendek	78,751	70,638	*Expenses relating to short-term leases*
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	25,447	23,564	*Expenses relating to leases of low-value assets*
Jumlah	**9,763,563**	**8,863,274**	***Total***

Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh pesewa dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan Grup terkait dengan penggunaan aset atau pencapaian kinerja keuangan tertentu.

There is no significant restriction imposed by lease arrangements between lessors and the Group on use of the assets or achievement of certain financial performance.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to lease liabilities as at 31 December 2023 is as follows:

Pesewa/ *Lessor*	Tanggal kontrak/ *Contract date*	Nomor kontrak/ *Contract number*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah nilai pembiayaan (dalam nilai penuh)/*Total lease value (in full amount)*	Periode sewa/*Leasing period*	Suku bunga/ *Interest rate*	Simpanan jaminan (dalam nilai penuh)/ *Deposit guarantee (in full amount)*
MUFG	16 Agt/Aug 2019	SHS18041292-006	Rupiah	69,953,400,000	60 bulan/months	11.25%	Rp7,772,600,000

Grup memiliki perjanjian dengan perusahaan penyedia alat berat dan kendaraan untuk sewa dengan jangka waktu 2-5 tahun. Perusahaan dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

The Group has an agreement with a heavy equipment and vehicle supplier for a period of 2-5 years. The Company can extend the lease period based on the agreement of both parties.

22. MODAL SAHAM / *22. SHARE CAPITAL*

Kepemilikan saham Perusahaan sebagai berikut:

The share ownership of the Company as follows:

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	
Pemegang saham				***Shareholders***
Saham preferen (Seri A Dwiwarna)				*Preferred stock (A Dwiwarna Share)*
Pemerintah	5	0.00%	-	*Government*
Saham biasa (Seri B)				*Common stock (B Shares)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7,595,650,695	65.93%	759,565	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
Arsal Ismail (Direktur Utama)	304,900	0.00%	30	*Arsal Ismail (President Director)*
Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia)	100,000	0.00%	10	*Suherman (Human Resources Director)*
Lainnya (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3,891,153,750	33.78%	389,116	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham beredar	11,487,209,350	99.71%	1,148,721	*Total shares outstanding*
Saham treasuri	33,449,900	0.29%	3,345	*Treasury shares*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	11,520,659,250	100%	1,152,066	*Number of shares issued and fully paid*

22. MODAL SAHAM (lanjutan) / *22. SHARE CAPITAL (continued)*

	31 Desember/*December* 2022			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	
Pemegang saham				***Shareholders***
Saham preferen (Seri A Dwiwarna)				*Preferred stock (A Dwiwarna Share)*
Pemerintah	5	0.00%	-	*Government*
Saham biasa (Seri B)				*Common stock (B Shares)*
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	7,595,650,695	65.93%	759,565	*PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
Arsal Ismail (Direktur Utama)	304,900	0.00%	30	*Arsal Ismail (President Director)*
Suherman (Direktur Sumber Daya Manusia)	100,000	0.00%	10	*Suherman (Human Resources Director)*
Lainnya (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	3,891,153,750	33.78%	389,116	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham beredar	11,487,209,350	99.71%	1,148,721	*Total shares outstanding*
Saham treasuri	33,449,900	0.29%	3,345	*Treasury shares*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	11,520,659,250	100%	1,152,066	*Number of shares issued and fully paid*

Lihat Catatan 29 untuk informasi perubahan kepemilikan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ke PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Refer to Note 29 for information on the change in shares ownership from PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) to PT Mineral Industri Indonesia (Persero).

Perubahan jumlah saham yang beredar selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Changes in the number of outstanding shares during the year ended on 31 December 2023 and for the year ended on 31 December 2022 were as follows:

		Nilai nominal/*Nominal amount*			
	Jumlah lembar saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*	**Saham biasa (dalam jutaan Rupiah)/ *Ordinary shares (in millions of Rupiah)***	**Tambahan modal disetor (dalam jutaan Rupiah)/ *Additional paid-in capital (in millions of Rupiah)***	**Saham treasuri (dalam jutaan Rupiah)/ *Treasury shares (in millions of Rupiah)***	
1 Januari 2022	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***1 January 2022***
Penjualan saham treasuri	-	-	-	-	*Sale of treasury shares*
31 Desember 2022	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***31 December 2022***
Penjualan saham treasuri	-	-	-	-	*Sale of treasury shares*
31 Desember 2023	**11,487,209,350**	**1,152,066**	**594,303**	**(43,257)**	***31 December 2023***

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Ordinary shares entitle the holder to participate in dividends and proceeds on winding-up of the Company in proportion to the number of shares held and amounts paid.

23. SAHAM TREASURI / *23. TREASURY SHARES*

Pada tanggal 2 September 2015 sampai dengan 1 Desember 2015, Perseroan melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan yang diadasarkan pada Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret sampai dengan 16 Juni 2020, Perseroan dengan berdasarkan SEOJK No.3/SEOJK.04/2020 melakukan pembelian saham kembali.

On 2 September 2015 to 1 December 2015, the Company carried out share buybacks in significantly fluctuating market conditions based on OJK Circular Letter No.22/SEOJK.04/2015. Furthermore, from March 15 to June 16 2020, the Company, based on SEOJK No.3/SEOJK.04/2020, purchased shares back.

Mutasi jumlah lembar saham dan nilai saham treasuri untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The movement of number of share and the values of treasury shares for the year ended on 31 December 2023 and for the year ended on 31 December 2022 is as follows:

	Jumlah saham treasuri/ *Total treasury shares*		
	Lembar/ *Number of shares*	Jumlah/ *Total*	
Saldo 1 Januari 2022	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 1 January 2022***
Pembelian saham treasuri	-	-	*Purchase of treasury shares*
Penjualan saham treasuri	-	-	*Sales of treasury shares*
Saldo 31 Desember 2022	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 31 December 2022***
Pembelian saham treasuri	-	-	*Purchase of treasury shares*
Penjualan saham treasuri	-	-	*Sales of treasury shares*
Saldo 31 Desember 2023	**33,449,900**	**43,257**	***Balance as of 31 December 2023***

Saham treasuri yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan saham yang dibeli pada tahun 2015 yang telah kedaluwarsa di tahun 2021. Transaksi ini tetap diperbolehkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No.3/SEOJK.04/2020 dan SEOJK No.20/SEOJK.04 /2021 yang memberikan relaksasi kepada perusahaan publik dalam menjual dan membeli kembali sahamnya selama kondisi pasar berfluktuatif secara signifikan.

The remaining treasury shares as at 31 December 2023 were shares that were purchased in 2015 which has been expired in 2021. This transaction is allowed based on the Circular Letter of the Financial Services Authority ("SEOJK") No. 3/SEOJK.04/2020 and SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 which provides relaxation to public companies in selling and buying back their shares during significantly fluctuating market conditions.

Berdasarkan ketentuan Surat OJK No. S-68/D.04/2023 tanggal 02 Maret 2023, Perusahaan diwajibkan kembali untuk melakukan pelepasan saham treasuri terhitung setelah tanggal 31 Maret 2023 dengan batas waktu yang akan ditentukan kembali oleh OJK. Pada tanggal 4 September 2023, OJK menerbitkan Surat No.S-2222/PM.21/2023 yang memperjelas tata cara perhitungan terkait tenggat waktu pelepasan saham treasuri. Perusahaan telah mempertimbangkan surat tersebut dimana Perusahaan perlu melakukan penjualan saham treasuri sebagian pada tahun 2024 dan sisanya sampai dengan tahun 2029.

Based on the provisions of OJK Letter No. S-68/D.04/2023 dated 02 March 2023, the Company is required to release its treasury shares as of 31 March 2023 with a deadline that will be respecified by OJK. On 4 September 2023, OJK issued Letter No.S-2222/PM.21/2023 which clarifies procedures for calculating treasury shares release due date. The Company has considered the letter issued which the Company should release part of the treasury shares on 2024 and the remaining treasury shares up to 2029.

24. DIVIDEN / *24. DIVIDENDS*

Dividen kas yang telah diumumkan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Cash Dividends declared during the year ended 31 December 2023 and for the year ended on 31 December 2022, were as follows:

	Tanggal dideklarasi/ *Date declared*	Tanggal pembayaran/ *Payment date*	Dividen per lembar saham (nilai penuh)/ *Dividend per share (full amount)*	Jumlah/ *Total*	
Dividen tahun 2022	15 Juni/ *June* 2023	14 Juli/ *July* 2023	1,094	12,567,582	*Dividend for the year 2022*
Dividen tahun 2021	24 Mei/ *May* 2022	23 - 24 Juni/ *June* 2022	689	7,909,118	*Dividend for the year 2021*

25. CADANGAN UMUM DAN LAINNYA / *25. GENERAL RESERVE AND OTHERS*

Di dalam akun ini terdapat cadangan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, yang mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

In this account there are reserve that was created to meet the requirement from Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 which was introduced in March 1995, and amended by Law No. 40/2007, issued in August 2007, which requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital.

26. PENDAPATAN / *26. REVENUE*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan batubara			***Sales of coal***
Pihak berelasi (Catatan 30b)	18,204,595	20,641,240	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga	19,767,438	21,458,076	*Third parties*
Total pendapatan dari penjualan batubara	37,972,033	42,099,316	*Total revenue from sales of coal*
Pendapatan dari aktivitas lainnya			***Revenue from other activities***
Pihak berelasi (Catatan 30b)	40,800	24,837	*Related parties (Note 30b)*
Pihak ketiga	476,034	524,437	*Third parties*
Total pendapatan dari aktivitas lainnya	516,834	549,274	*Total revenue from other activities*
Jumlah pendapatan	**38,488,867**	**42,648,590**	***Total revenue***

Pendapatan dari aktivitas lainnya merupakan penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah dan inti sawit, jasa kesehatan rumah sakit dan jasa sewa.

Revenue from other activities represents sales of power, briquettes, crude palm oil and kernels, healthcare services and rental services.

26. PENDAPATAN (lanjutan) / *REVENUE (continued)*

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% total pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers with revenue transactions that represent more than 10% of the total revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PLN Grup	12,383,348	10,758,011	*PLN Group*
MIND ID Trading Pte. Ltd	3,823,768	8,388,787	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Jumlah	**16,207,116**	**19,146,798**	***Total***

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

27. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT / *EXPENSES OR INCOME BY NATURE*

a. Beban pokok pendapatan / *Cost of revenue*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

The components of cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya produksi:			***Production costs:***
Jasa penambangan	11,105,871	9,579,677	*Mining services*
Jasa angkutan kereta api	7,953,583	6,694,574	*Coal railway services*
Bahan bakar dan pelumas	1,495,025	1,885,105	*Fuel and lubricants*
Penyusutan (Catatan 11)	1,412,333	1,163,819	*Depreciation (Note 11)*
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	1,025,230	1,231,217	*Salaries, wages, and employee benefits*
Perlengkapan dan suku cadang	805,184	711,844	*Spare parts and materials*
Sewa alat berat, kendaraan, dan peralatan	754,720	863,748	*Rental of heavy equipment, vehicles, and equipment*
Jasa pihak ketiga	492,674	488,959	*Third party services*
Pajak bumi dan bangunan	461,063	215,057	*Land and building taxes*
Amortisasi	105,224	102,594	*Amortisation*
Listrik	87,301	74,035	*Electricity*
Lainnya	574,826	487,222	*Others*
Subjumlah	26,273,034	23,497,851	*Subtotal*
Royalti ke Pemerintah	4,449,820	3,809,031	*Royalties to the Government*
Pembelian batubara	260,087	-	*Coal purchasing*
Persediaan batubara dan minyak kelapa sawit:			*Coal and palm oil inventories:*
Awal tahun (Catatan 8)	3,645,900	1,021,322	*Beginning of the year (Note 8)*
Akhir tahun (Catatan 8)	(5,297,279)	(3,645,900)	*End of the year (Note 8)*
Jumlah	**29,331,562**	**24,682,304**	***Total***

27. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan)

27. *EXPENSES OR INCOME BY NATURE* *(continued)*

a. Beban pokok pendapatan (lanjutan)

a. *Cost of revenue* *(continued)*

Rincian jasa pihak ketiga dan jasa lainnya dengan transaksi melebihi 10% total beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of third party services and other services with transactions that amount to more than 10% of the total cost of revenue are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga			*Third party*
PT Pamapersada Nusantara ("PAMA")	8,202,491	7,427,401	*PT Pamapersada Nusantara ("PAMA")*
Pihak berelasi			*Related party*
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI")	7,953,583	6,694,574	*PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI")*
Jumlah	**16,156,074**	**14,121,975**	***Total***

b. Beban umum dan administrasi

b. *General and administrative expenses*

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

General and administrative expenses consist of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	836,734	1,291,564	*Salaries, wages and employee benefits*
Jasa pihak ketiga	321,153	259,093	*Third party services*
Sumbangan	191,093	277,261	*Donation*
Penyusutan (Catatan 11)	119,753	89,876	*Depreciation (Note 11)*
Perjalanan dinas	102,595	89,592	*Business travel*
Beban kantor	87,756	79,583	*Office expense*
Sewa kendaraan dan peralatan	39,805	41,863	*Rental of vehicles and equipment*
Retribusi	26,200	19,260	*Retribution*
Perlengkapan dan suku cadang	21,115	18,442	*Spare parts and materials*
Pelatihan	20,298	17,643	*Training*
Lainnya	170,133	206,159	*Others*
Jumlah	**1,936,635**	**2,390,336**	***Total***

c. Beban penjualan dan pemasaran

c. *Selling and marketing expenses*

Beban penjualan dan pemasaran terdiri dari:

Selling and marketing expenses consist of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Gaji, upah, dan imbalan karyawan	231,731	305,659	*Salaries, wages and employee benefits*
Penyusutan (Catatan 11)	191,998	176,276	*Depreciation (Note 11)*
Jasa pihak ketiga	106,996	102,051	*Third party services*
Perlengkapan dan suku cadang	68,390	59,396	*Spare parts and materials*
Jasa angkutan	66,581	47,567	*Transportation*
Bahan bakar dan pelumas	36,059	33,752	*Fuel and lubricants*
Listrik	18,755	13,224	*Electricity*
(Pemulihan)/biaya *Domestic Market Obligation* ("DMO")	(135,769)	130,822	*Domestic Market Obligation ("DMO") (reversal)/expense*
Lainnya	71,621	84,373	*Others*
Jumlah	**656,362**	**953,120**	***Total***

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

27. BEBAN ATAU PENGHASILAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan)

***27. EXPENSES OR INCOME BY NATURE** (continued)*

d. Penghasilan lainnya, neto

d. Other income, net

Penghasilan lainnya, neto terdiri dari:

Other income, net consists of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan kompensasi royalti	162,013	57,309	*Gain on royalty compensation*
Pemulihan provisi piutang lainnya	161,001	-	*Recovery of other receivables provisions*
Pendapatan denda	105,605	174,771	*Penalty income*
Restitusi pajak lainnya	94,124	-	*Other tax restitution*
Despatch	48,317	33,110	*Despatch*
(Rugi)/laba dari nilai tukar mata uang asing	(63,206)	209,315	*(Loss)/gain on foreign currency exchange*
Lainnya	130,547	48,086	*Others*
Jumlah	**638,401**	**522,591**	***Total***

28. PENGHASILAN DAN BIAYA KEUANGAN

28. FINANCE INCOME AND COST

a. Penghasilan keuangan

a. Finance income

Penghasilan keuangan terdiri dari:

Finance income consists of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Penghasilan bunga dari penempatan kas di bank dan deposito berjangka	531,161	402,231	*Interest income from placement of cash in banks and time deposits*
Penghasilan bunga dari penempatan obligasi	53,178	25,802	*Interest income from placement of bonds*
Jumlah	**584,339**	**428,033**	***Total***

b. Biaya keuangan

b. Finance cost

Biaya keuangan terdiri dari :

Finance cost consists of the following:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Beban bunga dari liabilitas sewa	115,938	140,101	*Interest expense from lease liabilites*
Beban bunga dari pinjaman bank	26	361	*Interest expense from bank borrowings*
Beban akresi dari provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	88,074	59,741	*Accretion from provision for environmental reclamation and mine closure*
Jumlah	**204,038**	**200,203**	***Total***

Lihat Catatan 30b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 30b for information on the details of transactions and balances with related parties.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Perjanjian jual beli batubara / *a. Coal sales and purchase agreements*

Pelanggan/ *Customer*	Harga jual/ *Sales price*	Penjualan (dalam Rp miliar)/*Sales (in billion IDR)* 31 Des/*Dec* 2023	31 Des/*Dec* 2022	Piutang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account receivables (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2023	31 Des/ *Dec* 2022	Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
BPI	AS$/*US$*39.39	423	442	55	233	Juni/*June* 2044
PLTU Suralaya (PLN Indonesia Power)[b]	Rp820,671 - Rp893,809 (berdasarkan nilai kalori/ *based on calorific value)*	2,873	3,053	10	425	Desember/ *December* 2025
PLTU Bukit Asam (PLN Nusantara Power)[c]	Rp636,645	567	581	47	80	Desember/ *December* 2023[a]
PLTU Tarahan (PLN Nusantara Power)[c]	Rp841,416	669	813	92	172	Desember/ *December* 2031
PLTU 10,000 MW Tahap I	Rp811,721 – Rp841,416 (berdasarkan nilai kalori/ *based on calorific value)*	8,262	6,242	1,079	670	Desember/ *December* 2032

a) Perpanjangan kontrak masih dalam proses negosiasi
b) PLN Indonesia Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang dibentuk pada tahun 2023
c) PLN Nusantara Power merupakan subholding PT PLN (Persero) yang dibentuk pada tahun 2023

a) The extentions of the contract is still in negotiation
b) PLN Indonesia Power is PT PLN (Persero) subholding established in 2023
c) PLN Nusantara Power is PT PLN (Persero) subholding established in 2023

Adapun rincian PLTU 10.000 MW Tahap I adalah sebagai berikut:

Details of these PLTU 10,000 MW Phase 1 are as follows:

PLN Grup/*PLN Group*

- PLTU Pelabuhan Ratu
- PLTU Lontar
- PLTU Labuan
- PLTU Pangkalan Susu
- PLTU Labuhan Angin
- PLTU Teluk Sirih
- PLTU Adipala
- PLTU Suralaya Baru
- PLTU Ombilin
- PLTU Barru
- PLTU Indramayu
- PLTU Pacitan
- PLTU Nagan Raya
- PLTU Paiton Baru
- PLTU Tanjung Awar-Awar
- PLTU Rembang
- PLTU Tenayan
- PLTU Sebalang

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

b. Perjanjian jasa pengangkutan batubara

b. Coal delivery agreements

Pemasok/ *Supplier*	Rute/ *Route*	Jumlah biaya (dalam Rp miliar)/ *Total cost (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2023	31 Des/ *Dec* 2022	Utang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account payables (in billion IDR)* 31 Des/ *Dec* 2023	31 Des/ *Dec* 2022	Masa akhir kontrak/ *Contract period end*
KAI	Tanjung Enim - Tarahan	6,952	5,886	571	379	Desember/ *December* 2027
	Tanjung Enim - Kertapati	1,002	809	90	171	Desember/ *December* 2027

Pada 12 Oktober 2023 telah ditandatangani dengan PT KAI perjanjian jangka pendek untuk angkutan batubara relasi Tanjung Enim Baru - Tarahan dan Tanjung Enim Baru - Kertapati periode 2023 - 2027.

As at 12 October 2023, a short-term agreement was signed with PT KAI for coal transportation for the Tanjung Enim Baru - Tarahan and Tanjung Enim Baru - Kertapati relations for the period 2023 – 2027.

c. Perjanjian jasa penambangan batubara

c. Mining service agreements

Pemasok/ Supplier	Sifat/ Nature	Jumlah biaya (dalam Rp miliar)/ *Total cost (in billion IDR)* 31 Des/ Dec 2023	31 Des/ Dec 2022	Utang usaha (dalam Rp miliar)/ *Account payables (in billion IDR)* 31 Des/ Dec 2023	31 Des/ Dec 2022	*Masa akhir* kontrak/ *Contract period end*
PT Pamapersada Nusantara	Jasa penambangan/ Mining service	8,202	7,427	85	687	Februari/ *February* 2031
PT Putra Perkasa Abadi	Jasa pengupasan dan transportasi material/*Stripping and transportation services*	1,387	977	359	67	Februari/ *February* 2027

d. Pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah

Perusahaan menandatangani kesepakatan dengan beberapa Pemerintah Daerah selama 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

d. Payment of third party donations to the Regional Government

The Company signed agreements with several Regional Governments during 31 December 2023 and 2022 as follows:

Pemerintah daerah/ *Local government*	Jenis bantuan dana/ *Type of donations*	Periode pemberian dana/ *Period of donation*
Sumatera Selatan/ *South Sumatra*	Perbaikan *venue-venue* yang mengalami kerusakan akibat Bencana Angin Puting Beliung di Jakabaring Sport City/*Repair of venues damaged by the Whirlwind Disaster in Jakabaring Sport City;*	2018 - 2023
	Pembangunan gedung olahraga di wilayah Provinsi Sumatera Selatan/*Construction of a sports hall in the South Sumatra Province;*	
	Pembangunan fasilitas umum serta kendaraan pendukung tugas dan fungsi Pemprov/ *Constructing of public facilities and vehicles supporting the tasks and functions of the South Sumatra Province,*	
Muara Enim	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Muara Enim/*Participation funding assistance for development in Muara Enim*	2021 - 2025

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

***29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

d. Pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah (lanjutan)

***d. Payment of third party donations to the Regional Government** (continued)*

Pemerintah daerah/ *Local government*	Jenis bantuan dana/ *Type of donations*	Periode pemberian dana/ *Period of donation*
Lahat	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Lahat/*Participation funding assistance for development in Lahat*	2021 - 2023
Lampung	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Lampung/*Participation funding assistance for development in Lampung*	2023
Sawahlunto	Bantuan dana peran serta untuk pembangunan di Kota Sawahlunto/*Participation funding assistance for development in Sawahlunto*	2023

e. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Grup terikat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban reklamasi dan penutupan tambang. Kewajiban tersebut antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Perusahaan telah menyampaikan kewajiban rencana penutupan tambang ("RPT") dan rencana reklamasi ("RR") ke Kementerian ESDM dari waktu ke waktu. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah menempatkan deposito berjangka untuk jaminan reklamasi IUP - Operasi Produksi di area TAL, MTB, Banko Barat, Banko Tengah, OP, dan Ombilin masing-masing sebesar Rp101,58 miliar, Rp76,95 miliar, Rp17,69 miliar, Rp28,58 miliar, Rp3,05 miliar, dan Rp8,39 miliar.

Pada 3 Februari 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") telah menyetujui rencana reklamasi dan penutupan tambang BBK. Berdasarkan rencana reklamasi dan penutupan tambang terakhir, BBK telah menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang sebesar Rp40 miliar pada tanggal 7 Juni 2023.

e. Mine reclamation and mine closure

The Group is bound by various regulations in relation with reclamation and mine closure obligations. These obligations include to (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare post-mining plans; (3) provide reclamation guarantees that can be in the form of joint accounts or time deposits placed at state banks, bank guarantees, or accounting reserves (if allowed); and (4) provide post-mining guarantees in the form of time deposits placed at government banks.

The company has submitted mandatory mine closure plans ("MCP") and reclamation plans ("RP") to the Ministry of Energy and Mineral Resources from time to time. As at 31 December 2023, the Company had placed a time deposit for reclamation guarantees for IUP-Production Operation at TAL, MTB, Banko Barat, Banko Timur, OP, and Ombilin amounting to Rp101.58 billion, Rp76.95 billion, Rp17.69 billion, Rp28.58 billion, Rp3.05 billion, and Rp8.39 billion.

On 3 February 2023, Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") has approved reclamation and mine closure plan of BBK. Based on latest reclamation and mine closure plan, BBK has placed reclamation and mine closure guarantee amounting to Rp40 billion on 7 June 2023.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada 21 November 2022, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri ("Kepmen ESDM 267/2022"), yang sekarang akan menjadi dasar baru terkait pemenuhan *Domestic Market Obligation* ("DMO") untuk batubara. Keputusan Menteri ESDM ini diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen ESDM 399/2023") yang mulai berlaku efektif sejak 17 November 2023.

a. Pemenuhan DMO

Dengan terbitnya Kepmen ESDM 399/2023 Persentase DMO ditetapkan sebesar 25% ditetapkan dari realisasi produksi batubara tahun berjalan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan sendiri dan bahan baku/bahan bakar industri.

b. Penerapan Denda dan Kompensasi

Terhadap pelaku usaha pertambangan batubara yang tidak memenuhi persentase pemenuhan DMO dapat dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi, denda, denda dan dana kompensasi atau pelarangan penjualan batubara ke luar negeri. Ketidakpatuhan pada denda dan/atau kompensasi, dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang.

f. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/ 2023

On 21 November 2022, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Decree No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Year 2022 concerning Fulfillment of Domestic Coal Needs ("Kepmen ESDM 267/2022"), which now become the new basis related to the fulfillment of the Domestic Market Obligation ("DMO") for coal. This decision of the Minister of Energy and Mineral Resources was amended by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 267.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Fulfillment of Coal Needs Domestic Affairs ("Kepmen ESDM 399/2023") which has been effective since 17 November 2023.

a. DMO compliance

With the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 399/2023, the Domestic Market Obligation (DMO) percentage is set at 25% based on the current year's coal production realization for the provision of electricity for public and/or self-interest, as well as industrial raw materials/fuels.

b. Application of Fines and Compensation

For coal mining business actors who do not fulfil the DMO fulfillment, are subject to obligation to pay compensation fund, fine, fines and compensation funds or prohibition of coal sales abroad. Non-compliance with fines and/or compensation fund, may be subject to administrative sanctions in stages.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 (lanjutan)

c. Penentuan harga jual

- Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *total moisture* 8%, *total sulphur* 0,8%, dan *ash* 15%.

- Dalam hal harga batubara acuan ("HBA") lebih dari atau sama dengan dan kurang dari AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, maka harga jual batubara dihitung menggunakan formula harga batubara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Kepmen ESDM 267/2022.

d. Perhitungan HBA dalam penentuan harga jual

- HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan keputusan menteri ini.

- HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*).

e. Pemenuhan Kewajiban Iuran Produksi/Royalti

- Regulasi ini mengatur formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang lebih dari atau sama dengan AS$70 per metrik ton *FOB Vessel*, dan ketentuan formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang Kurang Dari USD70 Per Metrik Ton FOB Vessel.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

f. Minister of Energy and Mineral Resources Number 399.K/MB.01/MEM.B/2023 *(continued)*

c. Selling price determination

- *The selling price of coal for the supply of electricity for the public interest is US$70 per metric ton FOB Vessel, which is based on reference specifications on calorific 6,322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0.8%, and ash 15%.*

- *In the event that the reference coal price ("HBA") is more than or equal to and less than US$70 per metric ton FOB vessel, the selling price of coal is calculated using the coal price formula as stipulated in Appendix III to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 267/2022.*

d. HBA calculation in determining the selling price

- *The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes for spot sales of coal is the HBA at the time of the transaction in accordance with the provisions of this Ministerial Decree.*

- *The HBA used as a reference in determining the selling price of coal for the supply of electric power for the public interest for coal sales for a certain period (term).*

e. Fulfillment of Production/Royalty Contribution Obligations

- *The regulation determines formula for calculating fulfillment of production contribution/ royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs more than or equal to US$70 per metric ton FOB Vessel, and calculate formula of fulfillment of production contribution/royalty obligations by Coal Mining Business Companies for the sale of coal for the Provision of Electricity for Public Interests specifically for HBAs Less Than USD70 Per Metric Ton FOB Vessel.*

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Peraturan Pemerintah No. 45 dan 46 Tahun 2022

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Keputusan No. 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan mendirikan suatu Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai perusahaan *holding* di Bidang Pertambangan ("*Holding* Pertambangan") dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal efektif pendirian, *Holding* Pertambangan akan memiliki saham pada perusahaan (Anggota *Holding*) sebagai berikut:

a. secara langsung saham Seri B terbanyak pada PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium; serta
b. secara langsung dan tidak langsung saham pada PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals dan MIND ID Trading, Pte. Ltd.

Perubahan kepemilikan saham tersebut diatas tidak berdampak pada perubahan pengendalian masing-masing Anggota *Holding* mengingat *Holding* Pertambangan tetap dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

g. Government Regulation No. 45 and 46 of 2022

In December 2022, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 45 Year 2022 regarding the Reduction of the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero), a limited liability company, and Government Regulation No. 46 Year 2022 regarding the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in the Establishment of a Limited Liability Company in the Mining Sector. Further, the Minister of Finance issued the Decree No. 516/KMK.06/2022 regarding the Value Determination of the Government of Republic of Indonesia's Equity Participation in the Establishment of a Limited Liability Company in the Mining Sector.

Based on these regulations, the Government of the Republic of Indonesia will establish a Limited Liability Company that will be designated as a holding company in the Mining Sector ("Mining Holding"), in accordance with applicable regulation

At the effective date of the establishment, Holding Mining will acquire shares on the following entities ("Holding Members"):

a. directly majority B Series shares in PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT TIMAH Tbk, and PT Indonesia Asahan Aluminium; and
b. directly and indirectly shares in PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia PP Minerals and MIND ID Trading, Pte. Ltd.

The change in share ownership above does not affect the change in control of each Holding Member considering the Mining Holding is still controlled by the Government of the Republic of Indonesia.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023 Tahun 2023

Sebagai upaya mewujudkan Peraturan Menteri yang sinkron dan harmonis guna mendukung Pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu dan berkelanjutan, maka pada 3 Maret 2023, Menteri BUMN menetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/02/2023 ("PERMEN BUMN 2/2023) Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam PERMEN 2/2023 mengatur lebih lanjut terkait dengan Prinsip Tata Kelola BUMN, Penerapan Manajemen Risiko BUMN, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Perencanaan Strategis, Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan, Penyelenggaraan TI, dan Pelaporan.

i. Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01/MEM.B/2023

Pada Tanggal 11 Agustus 2023 Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. Regulasi ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam penjualan komoditas batubara.

Keputusan tersebut merupakan ketentuan pelaksana Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang menjual Mineral dan Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan, dan harga patokan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

a. Mekanisme Pasar; atau
b. Sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

h. Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023

As an effort to realise a synchronous and harmonious SOE Ministerial Regulation to support the planned, integrated and sustainable management of SOEs, on 3 March 2023, the Minister of SOEs stipulated a SOE Ministerial Regulation No. PER-2/ MBU/02/2023 ("SOE Ministerial Regulation 2/2023") Concerning Guidelines for Governance and Corporate Activities Significant State Enterprises, where SOE Ministerial Regulation No.2/2023 further regulates in relation to SOE Governance Principles, Implementation of SOE Risk Management, Assessment of SOE Soundness Level, Strategic Planning, Guidelines for Significant Corporate Activities, Implementation of IT, and Reporting.

i. Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/ 2023

On August 11 2023, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 227.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities. This regulation revokes Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Guidelines for Determining Benchmark Prices for Sales of Coal Commodities to increase the effectiveness of using benchmark prices in selling coal commodities.

This decree is an implementing provision of Article 159 paragraph (2) of Government Regulation No. 96 of 2021, which stipulates that IUP and IUP holders at the Mineral and Coal Production Operation activity stage who sell the Mineral and Coal produced must refer to the benchmark price, and the price the benchmark referred to is determined by the Minister based on:

a. The market mechanism; or
b. In accordance with generally accepted prices in international markets.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Keputusan Menteri ESDM No.227.K/MB.01/MEM.B/2023 (lanjutan)

Dalam regulasi ini juga mengatur bahwa Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik dan kepentingan umum serta pemenuhan bahan baku industry dalam negeri selain industry pengolahan dan pemurnian logam mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang mentapkan harga jual batubara untuk kepentingan dimaksud.

***29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***i. Decree of MoEMR No. 227.K/MB.01/MEM.B/2023** (continued)*

This regulation also stipulates that the selling price of coal for the supply of electricity and public purposes as well as the fulfillment of raw materials for domestic industries other than the metal processing and refining industry refers to the reference specifications and calculations stipulated in the Ministerial Decree which determines the selling price of coal for the purposes in question.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan ("PP 25 / 2023") yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2023. Dengan berlakunya PP 25/2023 maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Menteri dapat memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada WUP kepada Lembaga riset negara/daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk:

a. Penyiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; atau

b. Penyiapan WIUP Batubara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Terdapat jaminan pemanfaatan ruang, kawasan, zonasi, serta WIUP yang ditetapkan, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan.

Dalam PP 25/2023 ini juga mengatur ketentuan baru yang mewajibkan Gubernur dan Bupati/wali kota untuk membentuk dan/atau menandai sebuah objek atau wilayah tertentu pada peta atas WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai kewenangannya.

j. Government Regulation No. 25/2023

President of the Republic of Indonesia has stipulated Government Regulation No. 25 of 2023 concerning Mining Areas which will become effective from 5 May 2023. With the enactment of this Regulation, Government Regulation No. 22 of 2010 concerning Mining Areas is declared repealed and no longer valid.

The Minister may assign Investigations and Research assignments to Mining Business Area (MBA) to state/regional research institutions, BUMN, BUMD, and private business entities to:

a. The preparation of a metal mineral Mining Business Area ("MBPA") and Coal MBPA; or
b. The preparation of Coal MBPA for the development and/or utilisation of coal.

There is a guarantee for the use of space, area, zoning, and designated MBPAs, from the Central Government and Regional Government, that there is no change in the use of space and area.

On Government Regulation No. 25 of 2023 also stipulates a new provision which obliges Governors and Regents/Mayors to form and/or mark certain objects or areas on the map of WUPs that have been designated as Mining Areas in the Spatial Plans according to their authority.

k. Perjanjian Notional Pooling BRI

Perusahaan bersama-sama dengan anggota holding MIND ID lainnya, menandatangani perjanjian dengan BRI di mana BRI akan memberikan layanan jasa Notional Pooling yang merupakan jasa *cash management* untuk mengkonsolidasikan kebutuhan dana grup MIND ID dalam rangka optimalisasi likuiditas.

k. BRI Notional Pooling agreements

The Company together with other members of MIND ID holding, signed an agreement with BRI under which BRI will provide Notional Pooling services, which are essentially cash management services to consolidate the funding needs of MIND ID group with the aim of liquidity optimisation.

29. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

k. Perjanjian Notional Pooling mandiri (lanjutan)

Perusahaan bersama-sama dengan anggota holding MIND ID lainnya, menandatangani perjanjian dengan Mandiri di mana Mandiri akan memberikan layanan jasa Mandiri Notional Pooling ("MNP") yang merupakan jasa cash management untuk mengkonsolidasikan kebutuhan dana grup MIND ID dalam rangka optimalisasi likuiditas. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan dapat melakukan penarikan dari rekening MNP dalam batasan limit defisit yang ditentukan dalam perjanjian. Saldo defisit Perusahaan dari penarikan dana rekening MNP dapat ditutupi dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Global Line yang diberikan oleh Mandiri kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero), yang dapat digunakan oleh Perusahaan selaku peserta pooling untuk melakukan penihilan saldo defisit pada akhir bulan.

l. Pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu

Grup saat ini mendukung terlaksananya program pemerintah terkait *Energy Transition Mechanism* (ETM) di Indonesia. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan percepatan pengakhiran (*early retirement*) operasi beberapa pembangkit listrik milik PT PLN, salah satunya adalah PLTU Pelabuhan Ratu. Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerangka dan Pokok-Pokok Kesepakatan Utama terkait Dengan Akselerasi Pengakhiran Lebih Awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pelabuhan Ratu 3x350 MW dalam rangkaian agenda SOE *International Conference* di Bali pada 18 Oktober 2022 yang berpotensi meningkatkan pendapatan Grup dari pasokan batubara dan atas kepemilikan PLTU. Sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang dalam melakukan proses uji tuntas didampingi oleh konsultan independen yang mencakup aspek keuangan, teknis, legal, dan risiko.

m. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023

Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 yang mengatur tentang devisa hasil ekspor, valuta asing dan pembayaran impor untuk bisnis di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, 30% dari devisa hasil ekspor, dengan nilai ekspor paling sedikit AS$250.000 atau ekuivalennya, wajib ditempatkan ke dalam rekening khusus dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Agustus 2023. Grup telah melaksanakan kewajiban untuk menempatkan DHE SDA ke dalam rekening khusus dan deposito berjangka dan disajikan sebagai bagian dari "Kas dan setara kas" dalam laporan posisi keuangan.

***29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

***k. Mandiri Notional Pooling agreements** (continued)*

The Company together with other members of MIND ID holding, signed an agreement with Mandiri under which Mandiri will provide Mandiri Notional Pooling ("MNP") services, which are essentially cash management services to consolidate the funding needs of MIND ID group with the aim of liquidity optimisation. Based on this agreement, the Company can drawdown cash from the MNP account within the deficit limit set out in the agreement. The Company's deficit balance from the drawdown of the MNP account can be settled using the Global Line working capital loan facility provided by Mandiri to PT Mineral Industri Indonesia (Persero), which can be used by the Company as a pooling participant to settle the Company's deficit balance at the end of month.

l. The Transfer of PLTU Pelabuhan Ratu

The Group is currently supporting the implementation of government programmes related to the Energy Transition Mechanism (ETM) in Indonesia. One of the activities that will be carried out relates to the early retirement of several power plants owned by PT PLN, one of which is CFPP Pelabuhan Ratu. This commitment was stated in the signing of the Perjanjian Kerangka dan Pokok-Pokok Kesepakatan Utama terkait Dengan Akselerasi Pengakhiran Lebih Awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pelabuhan Ratu 3x350 MW in the series of agendas for the SOE International Conference in Bali on 18 October 2022 which has the potential to increase the Group's revenue from coal supply and ownership of CFPP. Until the date of these consolidated financial statements, the Group is in the process of conducting due diligence accompanied by independent consultants covering financial, technical, legal and risk aspects.

m. Government Regulation No. 36 of 2023

On 12 July 2023, Government issued Government regulation No. 36 of 2023 which regulates the cash proceeds from export sales, foreign exchange and import payments for business in mining, plantation, forestry and fishery sectors.

Based on this Government Regulation, 30% of the cash proceeds from export sales that have export values of at least US$250,000 or its equivalent stated in an export customs declaration must be placed in the special account for a holding period of at least three months. This regulation became effective on 1 August 2023. The Group has carried out the obligation to place DHE SDA into the special accounts and time deposits and are presented as part of "Cash and cash equivalents" in the consolidated statements of financial position.

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. The nature of the relationships

The nature of transactions and relationships with related parties is as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi/ *Relationship with the related parties*	Transaksi/*Transaction*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ("BRI") Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan dana dan pinjaman bank/*Funds placement and bank borrowings*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) ("BNI") Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri") Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("BTN") Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah ("BTN Syariah") Tbk, PT Bank Syariah Indonesia ("BSI") Tbk, PT Bank Raya Indonesia ("Bank Raya") Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan dana/ *Funds placement*
PT Mandiri Taspen ("Mandiri Taspen")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	PPIP/*Defined contribution pension programme*
PT Mandiri Tunas Finance ("MTF")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Sewa pembiayaan/ *Finance lease*
PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pengangkutan batubara dan penempatan obligasi/ *Coal transportation and bonds placement*
PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT PLN Indonesia Power Bersama – sama disebut PLN Grup	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara, pemakaian listrik dan penempatan obligasi/ *Coal sales, electricity usage and bonds placement*
Dana Pensiun Bukit Asam ("DPBA")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pengelolaan dana pensiun/ *Pension fund management*
PT TIMAH Tbk ("TIMAH")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara dan penempatan MTN/*Coal sales and MTN placement*
PT Aneka Tambang Tbk ("ANTAM"), PT Indonesia Chemical Alumina, MIND ID Trading Pte.Ltd, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("Pusri"), PT Semen Tonasa, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan batubara/ *Coal sales*
PT Solusi Bangun Indonesia ("SBI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penjualan jasa perawatan PLTU/ *Power Plant maintenance services*
PT Dahana (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian bahan peledak/ *Explosive material purchases*
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia DPLK BNI ("DPLK BNI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	PPIP/*Defined contribution pension programme*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. The nature of the relationships *(continued)*

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi/** ***Relationship with the related parties***	**Transaksi/*Transaction***
PT Danareksa (Persero) ("Danareksa"), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Penempatan Obligasi/ *Bonds placement*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian bahan bakar dan penempatan obligasi/ *Fuel purchase and bonds placement*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Premi asuransi/ *Insurance premiums*
PT Tanjung Alam Jaya	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian batubara/ *Coal purchases*
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (Persero) ("DAK")	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pembelian Aset/ *Asset purchases*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Engineering, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Konstruksi proyek/ *Project construction*
PT Huadian Bukit Asam Power ("HBAP"), PT Nasional Hijau Lestari ("SINERGI ID"), PT Bukit Asam Transpacific Railway ("BATR")	Entitas ventura bersama/ *Joint venture entity*	Piutang lainnya/ *Other receivables*
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Entitas ventura bersama/ *Joint venture entity*	Penjualan batubara/ *Coal sales*

Kebijakan Grup terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- Penjualan batubara ke pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan indeks internasional yang setara sebagai perbandingan dan disesuaikan dengan spesifikasi dari batubara dan lokasi pengiriman.

- Pengapalan dan pengangkutan batubara oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu.

The Group's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- *Sales of coal to related parties are set based on sales contracts, which generally use international indices as benchmarks adjusted for coal specifications and location of deliveries.*

- *Coal shipping and transportation by related parties are determined based on contracts agreed upon by each party after considering the cost components plus a certain margin.*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi

b. Details of transactions and balances with related parties

Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions and balances with related parties were as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Penjualan batubara dan pendapatan dari aktivitas lainnya			***Sale of coal and revenue from other activities***
PLN Grup	12,383,348	10,758,011	*PLN Group*
MIND ID Trading Pte. Ltd	3,823,768	8,388,787	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Pusri	547,707	450,002	*Pusri*
HBAP	532,493	-	*HBAP*
BPI	422,865	441,618	*BPI*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	183,906	188,037	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indonesia Chemical Alumina	131,059	188,032	*PT Indonesia Chemical Alumina*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	107,807	147,381	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Semen Tonasa	55,258	27,171	*PT Semen Tonasa*
TIMAH	28,913	71,641	*TIMAH*
SBI	28,271	5,397	*SBI*
Jumlah	**18,245,395**	**20,666,077**	***Total***
Persentase terhadap jumlah pendapatan konsolidasian	47%	48%	*As a percentage of total consolidated revenue*
Pembelian barang/jasa			***Purchases of goods/services***
KAI	7,953,583	6,694,574	*KAI*
Pertamina	1,495,025	1,885,105	*Pertamina*
PT Tanjung Alam Jaya	260,087	-	*PT Tanjung Alam Jaya*
PT Dahana (Persero)	148,971	96,709	*PT Dahana (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	123,663	25,970	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	107,757	-	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PLN Grup	93,113	103,852	*PLN Group*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	16,675	-	*PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)*
PT Surveyor Indonesia	1,294	-	*PT Surveyor Indonesia*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	30,514	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Jumlah	**10,200,168**	**8,836,724**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban pokok penjualan dan beban usaha konsolidasian	35%	32%	*As a percentage of total consolidated cost of revenue and operating expenses*
Penghasilan keuangan			***Finance income***
Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI, Bank Raya dan BTN Syariah	374,277	325,983	*Mandiri, BTN, BRI, BNI, BSI Bank Raya and BTN Syariah*
TIMAH	19,015	4,226	*TIMAH*
Pertamina	9,976	9,733	*Pertamina*
PLN Grup	5,839	7,785	*PLN Group*
KAI	3,834	1,704	*KAI*
SMI	1,931	-	*SMI*
Danareksa	337	-	*Danareksa*
Jumlah	**415,209**	**349,431**	***Total***
Persentase terhadap jumlah penghasilan keuangan konsolidasian	**71%**	**82%**	*As a percentage to total consolidated finance income*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

b. Details of transactions and balances with related parties *(continued)*

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Pembayaran iuran dana pensiun			***Pension fund contribution payment***
DPLK BNI	71,945	70,409	*DPLK BNI*
DPBA	188,459	76,852	*DPBA*
Jumlah	**260,404**	**147,261**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban gaji konsolidasian	12%	5%	*As a percentage to total consolidated salary expense*
Biaya keuangan			***Finance costs***
Mandiri	26	-	*Mandiri*
BRI	-	361	*BRI*
Jumlah	**26**	**361**	***Total***
Persentase terhadap jumlah biaya keuangan konsolidasian	0.01%	0.18%	*As a percentage of total consolidated finance cost*

	31 Desember/ *December* 2023	**31 Desember/ *December* 2022**	
Aset			***Assets***
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
BNI	224,442	250,412	*BNI*
Mandiri	224,330	707,801	*Mandiri*
BRI	91,990	11,573	*BRI*
BSI	2,959	2,191	*BSI*
BTN Syariah	1,499	907	*BTN Syariah*
BTN	1,415	1,809	*BTN*
Bank Raya	533	7,270	*Bank Raya*
Subjumlah	**547,168**	**981,963**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollars*
Mandiri	309,852	523,864	*Mandiri*
BRI	297,845	109,465	*BRI*
BNI	69,744	253,602	*BNI*
BSI	-	2,590	*BSI*
Subjumlah	**677,441**	**889,521**	***Subtotal***
Dolar Australia			*Australian Dollars*
Mandiri	555	22,926	*Mandiri*
Euro			*Euro*
Mandiri	2,658	-	*Mandiri*
Jumlah	**1,227,822**	**1,894,410**	***Total***

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
BTN	516,573	1,905,957	*BTN*
BRI	248,000	1,618,013	*BRI*
Mandiri	94,450	16,650	*Mandiri*
BNI	61,500	62,500	*BNI*
BTN Syariah	50,000	5,000	*BTN Syariah*
BSI	-	378,915	*BSI*
Mandiri Taspen	-	22,000	*Mandiri Taspen*
Bank Raya	-	3,000	*Bank Raya*
Subjumlah	**970,523**	**4,012,035**	***Subtotal***
Dolar AS			*US Dollars*
BNI	181,408	172,140	*BNI*
Subjumlah	**181,408**	**172,140**	***Subtotal***
Deposito berjangka untuk devisa hasil ekspor			***Time deposits for cash proceeds from export sales***
Dolar AS			*US Dollars*
BNI	724,282	-	*BNI*
Mandiri	527,180	-	*Mandiri*
BRI	266,323	-	*BRI*
Subjumlah	**1,517,784**	**-**	***Subtotal***
Jumlah	**2,669,715**	**4,184,175**	***Total***
Piutang usaha			***Trade receivables***
Rupiah			*Rupiah*
PLN Grup	1,641,085	1,366,918	*PLN Group*
HBAP	480,340	-	*HBAP*
Pusri	76,009	71,764	*Pusri*
BPI	54,937	232,678	*BPI*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	20,526	65,783	*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	14,601	36,987	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Indonesia Chemical Alumina	13,681	8,873	*PT Indonesia Chemical Alumina*
BPJS kesehatan	4,520	-	*BPJS kesehatan*
SBI	2,252	-	*SBI*
PT Semen Tonasa	-	-	*PT Semen Tonasa*
TIMAH	-	35,076	*TIMAH*
Dolar AS			*US Dollars*
MIND ID Trading Pte. Ltd	-	390,149	*MIND ID Trading Pte. Ltd*
Subjumlah	**2,307,951**	**2,208,228**	***Subtotal***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai - HBAP	(51,899)	-	*Provision for impairment HBAP -*
Jumlah	**2,256,052**	**2,208,228**	***Total***
Bagian lancar	**(2,067,781)**	**(1,975,550)**	***Current portion***
Bagian tidak lancar	**188,271**	**232,678**	***Non-current portion***

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Piutang lainnya			***Other receivables***
Rupiah			*Rupiah*
BPI	6,130	134,624	*BPI*
PLN Grup	5,972	19,220	*PLN Group*
HBAP	3,603	1,662	*HBAP*
SINERGI ID	1,893	1,893	*SINERGI ID*
BATR	1,085	1,085	*BATR*
Subjumlah	**18,683**	**158,484**	***Subtotal***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai - BPI	-	(129,077)	*Provision for impairment BPI -*
Jumlah	**18,683**	**29,407**	***Total***
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain			***Financial assets at fair value through other comprehensive income***
Rupiah			*Rupiah*
TIMAH	391,250	391,250	*TIMAH*
PLN Grup	105,605	106,422	*PLN Group*
KAI	81,022	81,200	*KAI*
SMI	69,950	-	*SMI*
Danareksa	9,956	-	*Danareksa*
Dolar AS			*US Dollars*
Pertamina	169,225	156,160	*Pertamina*
Jumlah	**827,008**	**735,032**	***Total***
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun			***Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year***
Rupiah			*Rupiah*
BRI	212,106	3,151,214	*BRI*
BSI	269,712	-	*BSI*
BTN Syariah	30,000	550,760	*BTN Syariah*
BRI Agro	30,000	-	*BRI Agro*
BTN	-	3,069,746	*BTN*
BNI	-	10,000	*BNI*
Mandiri	-	1,000	*Mandiri*
Jumlah	**541,818**	**6,782,720**	***Total***

Tingkat suku bunga kontraktual dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Contractual interest rates on time deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	
Rupiah	6.10% - 6.75%	2.50% - 5.90%	*Rupiah*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi dan saldo kepada pihak berelasi (lanjutan)

***b. Details of transactions and balances with related parties** (continued)*

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aset (lanjutan)			***Assets** (continued)*
Aset tidak lancar lainnya			***Other non-current assets***
Jaminan reklamasi dan penutupan tambang			*Reclamation and mine closure*
Rupiah			*Rupiah*
Mandiri	222,168	196,877	*Mandiri*
Jumlah aset yang terkait dengan pihak berelasi	**7,763,266**	**16,030,849**	***Total assets associated with related parties***
Persentase terhadap jumlah aset konsolidasian	20%	35%	*As a percentage of total consolidated assets*

	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December* 2022	
Liabilitas			***Liabilities***
Utang usaha			***Trade payables***
Rupiah			*Rupiah*
KAI	529,597	379,119	*KAI*
Pertamina	252,255	161,099	*Pertamina*
PT Waskita Karya	42,322	-	*PT Waskita Karya*
PT Dahana (Persero) Tbk	31,282	27,673	*PT Dahana (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	21,005	30,567	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Sucofindo	7,280	-	*PT Sucofindo*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000)	9,106	2,764	*Others (each below Rp5,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
KAI	131,163	170,612	*KAI*
Jumlah	**1,024,010**	**771,834**	***Total***
Biaya yang masih harus dibayar			***Accrued expenses***
Rupiah			*Rupiah*
KAI	703,315	1,013,219	*KAI*
DAK	140,519	-	*DAK*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	27,894	26,814	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya	26,182	-	*PT Adhi Karya*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp5.000)	41	3,192	*Others (each below Rp5,000)*
Dolar AS			*US Dollars*
KAI	83,649	317,628	*KAI*
Jumlah	**981,600**	**1,360,853**	***Total***
Pinjaman bank			***Bank borrowings***
Rupiah			*Rupiah*
Mandiri	68,000	-	*Mandiri*
BRI	-	2,240	*BRI*
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Rupiah			*Rupiah*
MTF	-	2,046	*MTF*
Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi	**2,073,610**	**2,136,973**	***Total liabilities associated with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	12%	13%	*As a percentage of total consolidated liabilities*

30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

c. Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci Perusahaan. Kompensasi yang dibayar pada manajemen kunci dan persentase terhadap total beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

c. Key management compensation

Key management personnel are the Board of Commissioners, Board of Directors and key employees of the Company. The compensation paid to key management and the percentage of total employee expenses is shown below:

	31 Desember/*December* 2023						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji, imbalan kerja, dan tunjangan lainnya	3.26	68,168	1.78	37,284	0.44	9,183	*Salaries, employee benefit and other allowances*
Jumlah	**3.26**	**68,168**	**1.78**	**37,284**	**0.44**	**9,183**	***Total***

	31 Desember/*December* 2022						
	Direksi/ *Board of Directors*		Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci Dewan lainnya/ *Other key management personnel*		
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
Gaji, imbalan kerja, dan tunjangan lainnya	2.38	67,249	1.30	36,780	0.27	7,553	*Salaries, employee benefit and other allowances*
Jumlah	**2.38**	**67,249**	**1.30**	**36,780**	**0.27**	**7,553**	***Total***

31. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan termasuk pelepasan saham treasuri Perusahaan yang dilakukan selama periode berjalan (Catatan 22).

31. EARNINGS PER SHARE

Profit for the year per share is calculated by dividing the net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, including the release of the Company's treasury shares made during the period (Note 22).

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6,105,856	12,567,582	*Profit for the year attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar)	11,487,209,350	11,487,209,350	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	532	1,094	*Basic and diluted earnings per share (full amount)*

Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Group does not have any dilutive ordinary shares as at 31 December 2023 and 2022.

32. INFORMASI SEGMEN / *32. SEGMENT INFORMATION*

a. Aktivitas / *a. Activities*

Segmen utama dari bisnis Grup adalah bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain.

Grup juga memiliki segmen bisnis lainnya, yaitu jasa kontraktor, pengolahan briket, perkebunan sawit, pengolahan sawit dan jasa kesehatan.

The main segment of the Group's business is coal mining activities, which includes general surveying, exploration, exploitation, processing, refining, transportation and trading, maintenance of special coal port facilities for internal and external needs, and operation of steam power plants for internal and external needs.

The Group also has other business segments, which are mining services, briquette processing, palm plantation and palm processing and health services.

b. Informasi segmen / *b. Segment information*

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan produk. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen yang merupakan segmen primer adalah sebagai berikut:

Based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on the type of products. All transactions between segments have been eliminated.

Information concerning the segments that are considered the primary segments is as follows:

	31 Desember/*December* 2023					
	Batubara/ *Coal*	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	37,972,033	3,804,375	41,776,408	(3,287,541)	38,488,867	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(28,917,974)	(3,305,168)	(32,223,142)	2,891,580	(29,331,562)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**9,054,059**	**499,207**	**9,553,266**	**(395,961)**	**9,157,305**	***Gross profit***
Beban usaha	(2,938,485)	(187,769)	(3,126,254)	533,257	(2,592,997)	*Operating expenses*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	717,142	58,555	775,697	(137,296)	638,401	*Other income/ (expenses), net*
Laba usaha	**6,832,716**	**369,993**	**7,202,709**	**-**	**7,202,709**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	571,154	53,760	624,914	(40,575)	584,339	*Finance income*
Biaya keuangan	(161,868)	(82,745)	(244,613)	40,575	(204,038)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto asosiasi dan ventura bersama	-	571,303	571,303	-	571,303	*Share in net profit profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan	**7,242,002**	**912,311**	**8,154,313**	**-**	**8,154,313**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(1,829,598)	(32,194)	(1,861,792)	-	(1,861,792)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**5,412,404**	**880,117**	**6,292,521**	**-**	**6,292,521**	***Profit for the year***
Aset segmen	**40,385,913**	**1,523,232**	**41,909,145**	**(3,143,956)**	**38,765,189**	***Segment assets***
Liabilitas segmen	**17,071,885**	**2,491,569**	**19,563,454**	**(2,361,461)**	**17,201,993**	***Segment liabilities***
Beban penyusutan dan amortisasi	1,384,815	418,788	1,803,603	-	1,803,603	*Depreciation and amortisation*
Penambahan aset tetap dan properti penambangan/ beban pengembangan tangguhan	1,410,549	490,825	1,901,374	-	1,901,374	*Additions to fixed assets and mining properties/ deferred development expenditure*

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *32. SEGMENT INFORMATION (continued)*

b. Informasi segmen (lanjutan) / *b. Segment information (continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
	Batubara/ *Coal*	**Lainnya/ *Others***	**Jumlah sebelum eliminasi/ *Total before elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Jumlah/ *Total***	
Pendapatan	42,099,316	3,415,878	45,515,194	(2,866,604)	42,648,590	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(24,596,373)	(2,703,763)	(27,300,136)	2,617,832	(24,682,304)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**17,502,943**	**712,115**	**18,215,058**	**(248,772)**	**17,966,286**	***Gross profit***
Beban usaha	(3,532,758)	(219,258)	(3,752,016)	408,560	(3,343,456)	*Operating expenses*
Penghasilan/ (beban) lainnya, neto	573,441	108,937	682,378	(159,787)	522,591	*Other income/ (expenses), net*
Laba usaha	**14,543,626**	**601,794**	**15,145,420**	**-**	**15,145,421**	***Operating profit***
Penghasilan keuangan	419,449	51,194	470,643	(42,609)	428,033	*Finance income*
Biaya keuangan	(130,220)	(112,593)	(242,813)	42,609	(200,203)	*Finance costs*
Bagian atas keuntungan neto asosiasi dan ventura bersama	-	829,063	829,063	-	829,063	*Share in net profit profit of associates and joint ventures*
Laba sebelum pajak penghasilan	**14,832,855**	**1,369,458**	**16,202,313**	**-**	**16,202,3143**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(3,287,822)	(135,065)	(3,422,887)	-	(3,422,887)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**11,545,033**	**1,234,393**	**12,779,426**	**-**	**12,779,427**	***Profit for the year***
Aset segmen	47,948,194	17,785	47,965,979	(2,606,771)	45,359,208	*Segment assets*
Liabilitas segmen	15,798,347	2,807,967	18,606,314	(2,163,152)	16,443,162	*Segment liabilities*
Beban penyusutan dan amortisasi	1,234,774	297,791	1,532,565	-	1,532,565	*Depreciation and amortisation*
Penambahan aset tetap dan properti penambangan/ beban pengembangan tangguhan	2,165,913	202,603	2,368,516	-	2,368,517	*Additions to fixed assets and mining properties/ deferred development expenditure*

	31 Desember/ *December 2023*	**31 Desember/ *December 2022***	
Informasi penjualan menurut lokasi geografis:			***Sales information by geographic location:***
Indonesia	17,539,114	16,458,589	*Indonesia*
India	6,192,250	8,420,942	*India*
Tiongkok	3,041,885	3,472,734	*China*
Korea	4,334,176	3,784,065	*Korea*
Kamboja	1,416,057	1,037,507	*Cambodia*
Vietnam	1,185,323	140,423	*Vietnam*
Bangladesh	1,102,000	-	*Bangladesh*
Jepang	957,480	2,478,337	*Japan*
Thailand	765,090	2,197,063	*Thailand*
Filipina	757,218	445,544	*Philippines*
Taiwan	720,488	849,609	*Taiwan*
Malaysia	390,699	546,526	*Malaysia*
Italia	-	2,606,218	*Italy*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp250.000)	87,087	211,033	*Others (each below Rp250,000)*
Jumlah	**38,488,867**	**42,648,590**	***Total***

32. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

b. Informasi segmen (lanjutan)

Seluruh aset tidak lancar selain instrumen keuangan berada di Indonesia. Perusahaan tidak memiliki aset dan hak imbalan kerja yang muncul dari kontrak asuransi.

32. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Segment information (continued)

All non-current assets other than financial instruments are domiciled in Indonesia. The Company has no employment benefit assets and rights arising from insurance contracts.

33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Berikut ini adalah kategori aset dan liabilitas keuangan dari Grup:

The information given below relates to the Group's financial assets and liabilities by category:

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ *Fair value through other comprehensive income*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*
31 Desember/*December* 2023				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	4,138,867	4,138,867	-	-
Piutang usaha, neto/*Trade receivables, net*	3,985,563	3,985,563	-	-
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	875,330	-	875,330	-
Piutang lainnya dari pihak berelasi/*Other receivables from related parties*	18,683	18,683	-	-
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun/ *Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*	541,818	541,818	-	-
Aset lancar lainnya/*Other current asset*	295,435	295,435	-	-
Aset tidak lancar lainnya/ *Other non current asset*	370,805	370,805	-	-
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**10,226,501**	**9,351,171**	**875,330**	**-**

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit and loss*
31 Desember/*December* 2023			
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*			
Utang usaha/*Trade payables*	(2,082,188)	(2,082,188)	-
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	(4,857,830)	(4,857,830)	-
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	(68,000)	(68,000)	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	(1,233,682)	(1,233,682)	-
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	(268,527)	(268,527)	-
Jumlah liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**(8,510,227)**	**(8,510,227)**	**-**

33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *33. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ *Fair value through other comprehensive income*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss*
31 Desember/*December* 2022				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/ *Cash and cash equivalents*	7,030,343	7,030,343	-	-
Piutang usaha, neto/*Trade receivables, net*	3,742,590	3,742,590	-	-
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	783,070	-	783,070	-
Piutang lainnya dari pihak berelasi/*Other receivables from related parties*	29,407	29,407	-	-
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun/ *Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*	8,929,196	8,929,196	-	-
Aset lancar lainnya/*Other current asset*	91,716	91,716	-	-
Aset tidak lancar lainnya/ *Other non current asset*	259,238	259,238	-	-
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**20,865,560**	**20,082,490**	**783,070**	**-**

	Jumlah/ *Total*	Biaya amortisasi/ *Amortised cost*	Nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit and loss*
31 Desember/*December* 2022			
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*			
Utang usaha/*Trade payables*	(1,935,818)	(1,935,818)	-
Biaya yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	(4,485,018)	(4,485,018)	-
Pinjaman bank/*Bank borrowings*	(2,240)	(2,240)	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	(1,359,961)	(1,359,961)	-
Utang jangka pendek lainnya/ *Other current liabilities*	(231,498)	(231,498)	-
Jumlah liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**(8,014,535)**	**(8,014,535)**	**-**

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group has the following monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies (in full amounts, except Rupiah equivalent):

	31 Desember/*December* 2023					
	Dolar AS/ *US Dollars*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollars*	Dolar Australia/ *Australian Dollars*	Euro/ *Euro*	Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Aset						***Assets***
Kas di bank						*Cash in banks*
Pihak ketiga	324,173	-	-	-	5,005	*Third parties*
Pihak berelasi	43,878,554	-	52,574	155,055	680,654	*Related parties*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	110,058,488	-	-	-	1,699,192	*Related parties*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	98,140,424	1,889,573	-	-	1,537,321	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	*Related parties*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,960,878	-	-	-	169,225	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
	263,362,517	**1,889,573**	**52,574**	**155,055**	**4,091,397**	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	(1,135)	-	-	(99,419)	(1,720)	*Third parties*
Pihak berelasi	(8,495,548)	-	-	-	(131,163)	*Related parties*
	(8,496,683)	-	-	(99,419)	(132,883)	
Aset neto	**254,865,834**	**1,889,573**	**52,574**	**55,636**	**3,958,485**	***Net assets***

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

	31 Desember/*December* 2022					
	Dolar AS/ *US Dollars*	Dolar Singapura/ *Singapore Dollars*	Dolar Australia/ *Australian Dollars*	Euro/ *Euro*	Jumlah setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Aset						***Assets***
Kas di bank						*Cash in banks*
Pihak ketiga	5,571,062	-	-	-	86,864	*Third parties*
Pihak berelasi	57,049,833	-	2,166,714	-	912,447	*Related parties*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Pihak ketiga	-	-	-	-	-	*Third parties*
Pihak berelasi	11,040,277	-	-	-	172,140	*Related parties*
Piutang usaha						*Trade receivables*
Pihak ketiga	74,313,301	422,163	-	-	1,163,615	*Third parties*
Pihak berelasi	25,022,383	-	-	-	390,149	*Related parties*
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	10,015,393	-	-	-	156,160	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
	183,012,249	**422,163**	**2,166,714**	**-**	**2,881,375**	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha						*Trade payables*
Pihak ketiga	-	-	-	(68,210)	(1,140)	*Third parties*
Pihak berelasi	(10,942,214)	-	-	-	(170,612)	*Related parties*
	(10,942,214)	**-**	**-**	**(68,210)**	**(171,752)**	
Aset neto	**172,070,035**	**422,163**	**2,166,714**	**(68,210)**	**2,709,623**	***Net assets***

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dijabarkan dengan menggunakan JISDOR dan kurs tengah mata uang asing pada tanggal di mana laporan keuangan konsolidasian diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan, maka aset neto dalam mata uang asing akan naik sekitar Rp70.343.

If the Group's assets and liabilities in foreign currencies as at 31 December 2023 had been translated using JISDOR and middle rates as at the date the consolidated financial statements were authorised for issue by the Board of Directors, the total net foreign currency assets of the Group would have increased by approximately Rp70,343.

35. INFORMASI ARUS KAS / *35. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the year:

	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas			***Non-cash activities***
Pembelian aset tetap melalui utang dan akrual	632,346	80,705	*Purchase of fixed assets through payables and accruals*
Penambahan properti pertambangan melalui penambahan provisi reklamasi dan penutupan tambang	500,651	754,186	*Addition of mining property through addition provision for environmental reclamation and mine closure*
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	368,638	830,149	*Addition of fixed assets through lease liabilities*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan / *b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

	31 Desember/*December* 2023				
	1 Januari/ January	***Penambahan/ Addition***	***Pembayaran/ Payments***	***31 Desember/ December***	
Pinjaman bank	2,240	68,000	(2,240)	68,000	*Bank borrowings*
Liabilitas sewa	1,359,962	347,071	(473,351)	1,233,682	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1,362,202**	**415,071**	**(475,589)**	**1,301,682**	***Total liabilities from financing activities***

	31 Desember/*December* 2022				
	1 Januari/ January	***Penambahan/ Addition***	***Pembayaran/ Payments***	***31 Desember/ December***	
Pinjaman bank	5,940	-	(3,700)	2,240	Bank borrowings
Liabilitas sewa	1,041,311	879,521	(560,870)	1,359,962	Lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	**1,047,251**	**879,521**	**(564,570)**	**1,362,202**	***Total liabilities from financing activities***

36. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

Pada 26 Februari 2024, Perusahaan bersama-sama China Huadian Hongkong Company Limited (“CHDHK”) menandatangani Keputusan Sirkuler diluar Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS Sirkuler”) HBAP untuk melakukan tambahan setoran modal bagi HBAP sebesar USD66.638.000. Dengan kepemilikan Perusahaan pada HBAP sebesar 45%, maka porsi tambahan setoran modal Perusahaan adalah sebesar USD29.987.100. Tambahan setoran modal tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen dari para pemegang saham sebagaimana tertuang pada Shareholders Support Agreement untuk Proyek PLTU Sumsel-8 yang digarap oleh HBAP.

36. SIGNIFICANT EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

On 26 February 2024, the Company together with China Huadian Hongkong Company Limited ("CHDHK"), signed the Circular Resolution in lieu of the General Meeting of Shareholders ("Circular GMS") HBAP for the additional capital injection of HBAP amounted to USD66,638,000. With 45% of the Company’s share ownership in HBAP, the additional capital injection is USD29,987,100. This Capital Injection is the shareholders' commitment stipulated under the Shareholders Support Agreement for CFPP Sumsel-8 by HBAP.

37. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan tanggal 29 Februari 2024.

37. AUTHORISATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 29 February 2024.

Indeks Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)

General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) Index

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of Board of Directors		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out the leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in conducting business; c. contribute positively to society and the environment; as well as d. ability to survive and grow (corporate resilience)	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam *Corporate Governance Policy* PTBA 2023 It is appropriate as stated in the PTBA Corporate Governance Policy PTBA 2023
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by making effective use of innovation and technology.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam penjelasan Visi dan Misi PTBA Contained in PTBA Vision and Mission explanation

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 3 & 4 **Recommendation 3 & 4**			
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporate implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and complies with applicable law regulations and standards.	Diterapkan Apply	Direksi telah mengeluarkan Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur terkait Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal. Direksi memastikan Manajemen risiko diterapkan pada setiap pengambilan keputusan strategis dan tahapan proyek-proyek strategis Perusahaan. Pada tahun 2023, telah disusun Pedoman Four Eyes Principle Pengambilan Keputusan PT Bukit Asam BAFEPDMM.02 kebijakan yang berlaku di MIND ID dan peraturan di bidang BUMN. Perusahaan juga memiliki Piagam SPI sebagaimana disusun pada tahun 2017 dan perubahan terakhir Piagam SPI pada tanggal 28 Februari 2023, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. The Board of Directors has issued Policies, Guidelines and Procedures related to Risk Management and internal control systems. The Board of Directors ensures that risk management is implemented in every strategic decision-making stage of the Company's strategic projects. Accordingly, in 2023, PT Bukit Asam prepared BAFEPDMM.02 Four Eyes Principle Guidelines for Decision Making based on Ministerial Regulation Number Per-8 MBU/08/2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry of BUMN for 2020- 2024. The company also has an SPI Charter as drafted in 2017 and the last amendment to the SPI Charter on February 28, 2023, refers to the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Financial Services Authority Regulation No. 56/ POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporate.	Diterapkan Apply	Direksi merupakan bagian Pengendalian Internal yang merancang dan menjalankan kepatuhan perusahaan termasuk menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan. The Board of Directors ensures that risk management is implemented in every strategic decision making and stages of the Company's strategic projects. In 2023, the 4 Eyes Principles Guidelines have been developed.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 5 **Recommendation 5**			
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan PTBA disusun berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) dan POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, PTBA juga melakukan pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Bukit Asam Tbk serta aktivitas keuangan dan arus kas yang kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk kemudian dilaporkan dan disahkan dalam RUPS sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. PTBA's Sustainability Report is prepared based on Global Reporting Initiative (GRI) standards and POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. In addition, PTBA carries out financial reporting on the PT Bukit Asam Tbk Micro and Small Business Funding Program as well as financial activities and cash flows which are audited by the Public Accounting Firm, reported and ratified at the GMS in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability.
Rekomendasi 6 **Recommendation 6**			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establish a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	Diterapkan Apply	Bukit Asam telah menyusun dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan TI di lingkup Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; serta dibentuknya Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Prosedur TI yang disusun berdasarkan ISO 27001, ISO 20000 dan Framework COBIT/COSO-Internal Control. Bukit Asam has developed and established a strategic policy for managing IT within the Company based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the formation of Information Technology Work Units and IT Procedures based on ISO 27001, ISO 20000, and the COBIT/COSO-Internal Control Framework.
Rekomendasi 7, 8 & 9 **Recommendation 7, 8 & 9**			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporates that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	Penjelasan Explain	Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah The Company does not carry out business activities based on sharia principles
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for the Directors individually which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decision letter of the Board of Directors.	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi PTBA yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (Charter to Board of Directors) PT Bukit Asam Tbk serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan terkait pembagian wewenang Direksi It is in accordance as stated in the PTBA Charter of Board of Directors stipulated in the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk dated 14 September 2020 and the provisions Article 12 paragraph (2) of the Company's Articles of Association regarding the division of authority of the Board of Directors.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Apply	PTBA menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi berdasarkan pendekatan "comply or explain" dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh OJK. Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi juga diatur dalam Keputusan Direksi No. 250H/0100/2023 tentang Pedoman Kerja Direksi (Charter to Board of Directors) PT Bukit Asam Tbk serta Anggaran Dasar Perusahaan. PTBA implements aspects, principles and recommendations based on the "comply or explain" approach in Financial Services Authority Regulation No. 21 POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, there are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) governance recommendations submitted by OJK. The resignation policy for members of the Board of Directors is also regulated in the Board of Directors Decree No. 250H/0100/2023 concerning the Charter to Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk dated 14 September 2020 and the Company's Articles of Association.
1.2	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Appraisal – Board of Directors and Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Diterapkan Apply	Hasil evaluasi terhadap direksi secara kolegial maupun individu, dan hasil tersebut menjadi dasar untuk masa jabatan selanjutnya. The evaluation results of directors collegially and individually, and these results become the basis for the next term of office.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Remuneration and Nomination Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Diterapkan Apply	Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Komite Asuransi, Risiko Usaha dan Pascatambang secara garis besar, membantu tugas Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat terkait pengelolaan perusahaan yang berhubungan dengan risiko usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan termasuk dalam mengevaluasi Direksi berdasarkan rencana strategis Perusahaan sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. The Committee for Nomination, Remuneration and Human Resources Development with the Insurance, Business Risk and Postmining Committee in general, assists the duties of the Board of Commissioners in providing opinions regarding the management of the company related to business risks that have the potential to cause significant losses including in evaluating the Board of Directors based on the Company's strategic plan in accordance Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR. Development Committee Charter.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
Rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 & 6 **Recommendation 1, 2, 3, 4, 5 & 6**			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advise and approve the business plans and long-term financial plans and corporate short-term financial plans. The Board of Commissioners advise and monitor the Directors on their implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporate, regulated in the articles of association of the corporate.	Diterapkan Apply	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perusahaan. Setiap tahun dilakukan pembahasan strategi, hal ini merupakan bagian dari proses persetujuan RJPP dan RKAT perusahaan, dalam rapat komisaris yang dihadiri direksi. Hasilnya tertuang dalam risalah rapat untuk dilakukan tindak lanjut oleh direksi. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are contained in the Company's Charter to Board of Commissioners. Strategy discussions are held every year, as part of the Company's RJPP and RKAT approval process, at the board of commissioners' meeting attended by the board of directors. The results are stated in the minutes of meeting to be followed up by the directors.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	Diterapkan Apply	Hasil keputusan telah diungkapkan dalam laporan tahunan, pada Bab 5 Tata Kelola Perusahaan, pembahasan tentang Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris. The decision has been disclosed in the annual report, in Chapter 5 of Corporate Governance, discussion of Decisions, Recommendations and Implementation of Duties of the Board of Commissioners.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures that the process of nominating and selecting members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	Diterapkan Apply	Rekomendasi ini dilakukan setiap tahun dan merupakan hal yang diminta oleh pemegang saham. This recommendation is made every year and is requested by the shareholders.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function formulates a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. The Board of Commissioners review the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director in every year.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Pedoman disusun sebagai acuan tata laksana tugas Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. This is stated in the policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter. The guidelines have been prepared as a reference for the implementation of the duties of the Business Risk Committee, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development and Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 dated 8 December 2015 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3.5	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners submit to the GMS, which may be preceded by a recommendation from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporate and shareholders; periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Hasil reviu Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan pada Dewan Komisaris yang kemudian menjadi usulan kepada RUPS/Pemegang saham. The results of Nomination and Remuneration Committee review are submitted to the Board of Commissioners which then becomes a recommendation to the GMS/ Shareholders.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervise the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter.
Rekomendasi 7 **Recommendation 7**			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs corporates to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with corporate goals, objectives and strategies and comply with laws and regulations, codes of conduct and applicable standards.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Penerapan manajemen risiko dan sistempengendalian internal juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter. The application of risk management and internal control systems also refers to the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/ MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 8 **Recommendation 8**			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and direct the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Diterapkan Apply	Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 kemudian apabila ada isu yang beresiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi Pelaksanaan Pengendalian Internal juga dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal dengan kerangka yang diakui secara Internasional (COSOInternal Control Framework). This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021 then if there are issues that are at risk they will be submitted to the agenda for the Board of Commissioners meeting attended by the Directors Implementation of Internal Control is also carried out in accordance with the internal control system with an internationally recognized framework (COSO-Internal Control Framework).
Rekomendasi 9,10,11 & 12 **Recommendation 9,10,11 & 12**			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the annual report and corporate sustainability report and ensures their integrity, and supervise the process of corporate disclosure and communication.	Diterapkan Apply	Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris. Proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi juga tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021. The Board of Commissioners' approval for the Annual and Sustainability Report is contained in the Annual Report and Sustainability Report, which is signed by all Members of Board of Commissioners. The process of corporate disclosure and communication is also contained in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. Board of Commissioners charter is periodically reviewed.	Diterapkan Apply	Reviu piagam Dewan Komisaris termasuk organ Dewan Komisaris dilakukan reviu secara periodik The Board of Commissioners' charter including the organs of Board of Commissioners is reviewed periodically
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Commissioners if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.	Diterapkan Apply	Mengikuti ketentuan hukum yang berlaku Follow the applicable legal provisions
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Sesuai Board Manual PTBA dan ketentuan hukum yang berlaku In accordance with PTBA Board Manual and applicable legal provisions
Rekomendasi 13 **Recommendation 13**			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner has a role as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures the effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring timely enough available to discuss all the agenda. In addition, there should also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Diterapkan Apply	Ketentuan dalam Corporate Governance Policy 2023 dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris 2023. Provisions in the Corporate Governance Policy 2023 and Charter of Board of Commissioners 2023.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the President Commissioner duties are disclosed in the annual report and corporate website.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Laporan Tahunan pada Bab 5 Tata Kelola Perusahaan, Sub Bab Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. RIncian tugas utama Komisaris utama juga tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang telah ditayangkan di website Perusahaan dengan link www.ptba.co.id. It is contained in the Annual Report in Chapter 5 of Corporate Governance, Sub-Chapter Meetings of the Board of Commissioners and Directors. Details of the main duties of the main Commissioner are also contained in the Charter to Board of Commissioners which has been published on the Company's website with the link www.ptba.co.id
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. Details of President Commissioner duties are disclosed in annual report and corporate website, the President Commissioner coordinates the division of oversight roles among members of the Board of Commissioners, chairs the meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in dealings with parties outside the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 09/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk Decree of the Board of Stated in the decision of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk was issued No. 09/ SK/PTBA-DEKOM/XII/2023 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioners. There needs to be a gap period of 2 (two) years to be reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/member of the Board of Directors needs to become the President Commissioner, the Board of Commissioners will provide reasons and explanations in the Annual Report.	Diterapkan Apply	PTBA tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, terutama terkait pengangkatan Direksi Perseroan. PTBA is subject to and complies with laws and regulations, especially regarding the appointment of Board of Directors of the Company.
1.4	Pembentukan Komite Committee Formation		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporate has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee and Risk Management Monitoring Committee.	Diterapkan Apply	Dewan Komisaris PTBA telah memiliki Komite Audit dan Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Pedoman kerja komite-komite tersebut tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. PTBA's Board of Commissioners already has an Audit Committee and Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration & Human Capital Development (HCD) Committee. The work guidelines for these committees are contained in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021 concerning Stipulation of the Business Risk, Postmining, CSR, Nomination, Remuneration and HR Development Committee Charter.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and other committees formed by the Board of Commissioners are the majority of the independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan termasuk mengenai masa jabatan. Has been carried out in accordance with the provisions including regarding the term of office.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan To ensure the monitoring of the duties implementation of Audit Committee is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Has been carried out in accordance with the provisions
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Appraisal - Board of Commissioners and Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, the Committees and each individual commissioner.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Has been carried out in accordance with the provisions
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Board of Directors Members who have concurrent positions outside the corporate must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly listed corporate, other directorships or other positions with significant time commitments.	Diterapkan Apply	Pemantauan pengelolaan benturan kepentingan dilaksanakan Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No.14/SK/PTBA-DEKOM/ IX/2020 dan No. 04/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* untuk Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Perusahaan Monitoring the management of conflicts of interest is carried out by the Board of Commissioners in accordance with the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No.14/SK/PTBA-DEKOM/ IX/2020 and No. 04/0100/2020 concerning Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for Company Conflict of Interest Policies.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages the potential of conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving Commissioners or Affiliation of the Commissioner concerned	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Ada penandatanganan Piagam Benturan Kepentingan yang dilakukan pembaharuan tiap tahun Has been carried out according to the provisions. There is a signing of Conflict of Interest Charter which is renewed every year

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Improvement of Board of Directors and Board of Commissioners Members		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporate, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their role on the Board.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Anggaran Dewan Komisaris salah satunya tentang pelatihan untuk peningkatan dan penyegaran pengetahuan. Has been carried out according to the provisions. One of the Board of Commissioners' budget is regarding training to increase and refresh knowledge.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Board of Directors Composition		
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidates for directors, the Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Remuneration and Nomination Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Apply	Dilakukan rapat khusus pada komite untuk melakukan validasi atas usulan yang disampaikan Dewan Komisaris, manajemen dan pemegang saham mayoritas. Hasilnya diberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. A special meeting was held at the committee to validate the proposals submitted by the Board of Commissioners, management and majority shareholders. The results are given recommendations to the Board of Commissioners. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Diterapkan Apply	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa calon Anggota Direksi telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini tertuang pada Anggaran Dasar dan , Corporate Governance Policy 2023, dan Pedoman Kerja Direksi 2023. The Board of Commissioners has ensured that the candidates for Members of the Board of Directors are in accordance with the terms and criteria that have been set. This is stated in PTBA's Articles of Association , Corporate Governance Policy 2023, dan Charter of Board of Directors 2023.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Diterapkan Apply	Telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Has been implemented according to the recommendations of the Financial Services Authority as outlined in the Appendix to the Financial Services Authority Circular Letter No.32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
Rekomendasi 5 & 6 **Recommendation 5 & 6**			
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix that has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
Panduan Manual			
2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner has previous experience in the main sector where the corporate operates.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determination of the number of Board of Commissioners members consider the condition of the corporate.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the major shareholder
Rekomendasi 7 **Recommendation 7**			
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran- peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide the independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate point of view.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Dewan Komisaris melakukan supervisi dan penasehatan dalam rapat Dewan Komisaris yang menghadirkan Direksi. Hal ini tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out according to the provisions. The Board of Commissioners supervises and advises the Board of Commissioners' meetings which present the Directors. This is stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 8 Recommendation 8			
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG tertuang pada Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021 dengan penentuan kriteria dibuat transparan dan mengikuti ketentuan yang ada. Implementation has been carried out according to the provisions. This process is carried out by the Nomination, Remuneration and GCG Committee as stated in the Policy of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021 with the determination of criteria being made transparent and following existing regulations.
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Remuneration and Nomination Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/ VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
Panduan Manual			
2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. The remuneration policy is reasonable and fair, both in structure and size, and is determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourages competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/ VIII/2021 dated 30 August 2021.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporate has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and aligned with the achievement of the long-term interests of the corporate, such as performance measures as follows: share ownership options, deferred bonuses, provision for returning part or all of bonuses/ incentives that have been paid (clawback).	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tindak lanjut dari keputusan RUPS yang telah ditentukan pada Surat Dewan Komisaris No. 57/DEKOM/ VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Penetapan Perhitungan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium Berikut Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 PT Bukit Asam Tbk serta Surat Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesi (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Gaji/Honorarium dan Penghasilan Tahun 2023 bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (“PTBA”). Implementation has been carried out in accordance with the provisions as a follow-up to the GMS decision which has been determined in the Letter of Letter of the Board of Commissioners No. 57/DEKOM/VIII/2023 on August 14, 2023, concerning the Determination of the Bonus Calculation for the Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year and Salary/Honorarium as well as the Benefits and Facilities for the 2023 Financial Year of PT Bukit Asam Tbk and the Portfolio Director’s Letter and Business Development PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as Proxy for Series A Dwiwarna Shareholder No. 271/E.DIRPPU/VIII/2023 on August 11, 2023, Regarding the Determination of Bonus for the 2022 Financial Year and Salary, Honorarium, and Income for for Directors and Members of the Board of Commissioners PT Bukit Asam Tbk (“PTBA”) in 2023,
2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities other than the facilities that have been provided based on the Corporate General Meeting of Shareholders.	Diterapkan Apply	Penetapan Remunerasi dan Fasilitas untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Determination of Remuneration and Facilities for Board of Commissioners and Board of Directors refers to Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and promotes long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, the position of President Commissioner and chairman as well as the membership in committees must also be considered	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/ VIII/2021 dated 30 August 2021.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of the directors and commissioners with due regard to corporate operating performance, individual performance and market conditions, the Remuneration and Nomination Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. Implementation has been carried out in accordance with the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/ VIII/2021 dated 30 August 2021.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
3.	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Working Relations Characteristic		
Rekomendasi 1, 2 & 3 **Recommendation 1,2 & 3**			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information so that confidential information does not leak.	Diterapkan Apply	Perusahaan memperhatikan diskusi terbuka maupun tertutup dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pelaksanaan juga mengacu sesuai ketentuan Kebijakan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 agustus 2021. The company pays attention to open and closed discussions by prioritizing independence and the interests of shareholders. In line with Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines and SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines Public company. Implementation also refers to the provisions of PT Bukit Asam Tbk Board of Commissioners Policy No. 06/SK/PTBA-KOM/VIII/2021 dated 30 August 2021.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing- masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.		Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Policy , Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman Kerja Direksi 2023. It is in accordance as stated in the PTBA board manual stipulated in Corporate Governance Policy , Charter to Board of Commissioners, and Charter of Board of Directors 2023
3.1.3	Corporate Secretary memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengacu ketentuan POJK Nomor 35/ POJK.04/2014. Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sementara itu, terkait hubungan kerja dan komunikasi antara Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan telah dilaksanakan sesuai dengan Corporate Governance Policy, Pedoman Kerja Direksi, dan Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan serta Kode Etik dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). Selain itu, akses Dewan Komisaris didasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Implementation has been carried out in accordance with the provisions by referring to POJK provisions No. 35/POJK.04/2014. about the Corporate Secretary of the Issuer or Public Company. Meanwhile, regarding work relations and communication between the Board of Directors, Board of Commissioners, shareholders and stakeholders, this has been carried out in accordance with the Corporate Governance Policy, Charter of Board of Directors, and Charter of Corporate Secretary, and the Code of Ethics with the stipulation of Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). and No. 408A/0100/2021. In addition, access to the Board of Commissioners is based on the provisions of the Company's Articles of Association.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
3.2	Akses informasi Dewan Komsaris Access to information on the Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it is properly informed. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and in a comprehensive manner on all matters relevant to the corporate. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Policy , Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman Kerja Direksi 2023, serta Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is in accordance as stated in the PTBA board manual stipulated in Corporate Governance Policy , Charter to Board of Commissioners, Charter of Board of Directors 2023, and Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct).
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structures on Corporate		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the corporate. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders which may impact the management and operations of the corporate.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Has been carried out according to the provisions.
4.	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and responsible behavior		
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam This statement is stated in	Diterapkan Apply	

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak- hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is set forth in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: a. Act in the best interests of the corporate; b. Act honestly and with a high standard of integrity; c. Be independent and act on full information, in good faith, with due diligence and prudence. d. Comply with laws and regulations that apply to corporates and their operations; e. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines; f. Not involved or participating in any activities that will cause a conflict of interest with the best interests of the corporate or which will have a negative impact on the reputation of the corporate; g. Do not take advantage of property or information owned by the corporate, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporate and its customers. h. Does not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain. i. Avoiding the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for other people that cause conflicts of interest/give benefits to third parties in violation of laws and regulations. j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. k. Ensure the complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporate to regulators and in other public communications	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PTBA dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is contained in PTBA's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct)

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PTBA dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct) Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait dengan kebijakan anti korupsi dan anti fraud dalam sebagaimana keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.10/SK/PTB-DEKOM/IX/2020 dan No.400/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Anti Gratifikasi di PT Bukit Asam Tbk. It is contained in PTBA's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). The company already has policies related to anticorruption and anti-fraud policies in accordance with the joint decisions of the Board of Commissioners and Directors No.10/SK/PTB-DEKOM/IX/2020 and No.400/0100/2020 concerning Implementation of Good Corporate Anti-Gratification Principles and Practices at PT Bukit Asam Tbk.
4.2	Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilainilai korporasi Corporates articulate, grow and express corporate culture and values	Diterapkan Apply	Penerapan nilai – nilai dan budaya AKHLAK dalam seluruh kegiatan pekerjaan oleh seluruh pegawai Perusahaan yang telah diawali oleh sosialisasi penerapan AKHLAK yang diberikan oleh Manajemen PTBA. The application of AKHLAK values and culture in all work activities by all Company employees, which was initiated by the socialization of AKHLAK implementation by PTBA Management.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Code of Ethics, Values and Culture		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. Code of conduct and corporate code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management system and remuneration structure, and enforced	Diterapkan Apply	Telah sesuai sebagaimana tertuang Kode Etik dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/ PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). Diperkuat pada tahun 2023 sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan buku Code of Conduct kepada seluruh pegawai Bukit Asam dan pengisian pakta integritas COC melalui aplikasi CISEA GCG dengan status 100% untuk seluruh pegawai. It is in accordance with the Code of Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). Strengthened in 2022 socialization is carried out by distributing Code of Conduct books to all Bukit Asam employees and filling out the COC integrity pact through the CISEA GCG application with 100% status for all employees.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews on the design accuracy and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and the results of the review are conveyed to the shareholders through the annual report of corporate.	Diterapkan Apply	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang terbit secara berkala setiap tahun memuat hasil reviu Direksi atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan setiap tahun pada saat iklan panggilan RUPST. The Annual Report and Sustainability Report which are published regularly every year contain the results of the Board of Directors' review of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and the Company's compliance with the principles of Corporate Governance and applicable laws and regulations and are submitted every year. year at the time of the announcement of the AGMS summons.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.		Telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Policy, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Piagam Manajemen Risiko, dan kebijakan manajemen risiko Perseroan. It is in accordance as stated in the PTBA board manual stipulated in the Corporate Governance Policy, Charter of Board of Directors, Charter to Board of Commissioners, Charter of Risk Management, and the policy Company risk management.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for oversight of corporate risk management.		Telah sesuai berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk No. 06/ SK/PTBA-KOM/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Pascatambang, CSR, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. It is in accordance with Decision of the Board of Commissioners of PT Bukit Asam Tbk No. 06/SK/ PTBA-KOM/VIII/2021 dated August 30, 2021, concerning Determination of the Charter of the Business Risk, Post-mining, CSR, Nomination, Remuneration and Human Capital Development Committee.
5.3.	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors builds an integrated system of governance, risk management and compliance (GRC), by handling various uncertainties in an integrated manner with high integrity, to ensure that the corporate can achieve its goals		Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan dibuktikan dengan diperolehnya berbagai penghargaan atas implementasi manajemen risiko di Perusahaan, diantaranya yaitu Corporate Governance Perception Index (CGPI) oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance dan Majalah SWA, dan Juara II Annual Report Award dengan kategori Go Public Non- Keuangan. The implementation has been carried out according to the provisions and is proven by obtaining various awards for the implementation of risk management in the Company, including the Corporate Governance Perception Index (CGPI) by The Indonesian Institute for Corporate Governance and SWA Magazine, and Runner of Annual Report Award in Category Go Public Non Finance

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Pan-duan Man-ual			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and capacity building among the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporate stays on the right track in achieving its goals.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilau dan Etika Bisnis PTBA dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is contained in PTBA's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct).
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest	Diterapkan Apply	Tertuang dalam code of conduct governance perseroan It is contained in the company's code of conduct governance
5.4.	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function helps the corporate to achieve its goals by approaching an objective and disciplined to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Has been carried out according to the provisions.
6.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
Rekomendasi 1 & 2 **Recommendation 1 & 2**			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporate has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Bukit Asam dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 20/ SK/PTBA-DEKOM/2023 dan No. 277/0100/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Prilaku dan Etika Bisnis PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct). It is contained in Bukit Asam's Code of Conduct and Business Ethics with the stipulation of the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 20/SK/PTBA-DEKOM/2023 and No. 277/0100/2023 dated December 29, 2023, concerning the Behaviour and Business Ethics of PT Bukit Asam Tbk (Code of Conduct).
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely material relevant information about the corporate must be fulfilled.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Ketentuan POJKNo 42 Tahun 2020 & POJK No 17 Tahun 2022 The Company complies with POJK No 42 of 2020 & POJK No 17 of 2022

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporate discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Ketentuan PSAK, Peraturan Bursa X.K.2, dan POJK No 14 Tahun 2022 The Company Complies with PSAK, Stock Exchange Regulations X.K.2, and POJK No 14 of 2022
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rekomendasi penunjukan auditor ektsernal dilakukan setiap tahun oleh Komite Audit Has been carried out according to the provisions. Recommendations for the appointment of external auditors are carried out annually by Audit Committee
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan PTBA telah disusun sesuai dengan POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021, GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, SASB, dan ICMM. The PTBA Sustainability Report has been prepared accordingly with POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021 and the GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, andSASB, dan ICMM.
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporate has issued a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Corporate's Sustainability Report has presented the Corporate's sustainability performance which includes economic, social, environmental and governance aspects, which are presented in a 3-year comparison, so that it is expected to help shareholders and stakeholders understand the strategic goals of the corporate and its progress in creating sustainable value.	Diterapkan Apply	Laporan Keberlanjutan PTBA telah disusun sesuai dengan POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021, GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, SASB, dan ICMM. The PTBA Sustainability Report has been prepared accordingly with POJK 51, Consolidated GRI Standards 2021 and the GRI G4 Mining and Metals Sector Disclosures, and SASB, dan ICMM.
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide users with equitable, timely and relatively inexpensive access to relevant information.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh pada Ketentuan POJK No 31 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi The Company complies with POJK No 31 of 2015 concerning Information Disclosure

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 2 & 3 **Recommendation 2 & 3**			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporate ensures that an annual statement on the application of the General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia, including an explanation of the application of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Penjelasan Explain	Situs Web PTBA belum memuat tentang pernyataan tahunan penerapan PUGKI. PTBA website does not yet contain an annual statement on PUGKI implementation.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporate listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, the applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented.	Penjelasan Explain	Hingga akhir tahun buku 2023, Perusahaan hanya mencatatkan/memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia, tempat domisili Perusahaan. Until the end of 2023 fiscal year, the Company only lists/trades its shares on the Indonesia Stock Exchange, where the Company is domiciled.
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of the Rights of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporate has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	Diterapkan Apply	Melalui Website Perusahaan dan Public Expose Yang Diselenggarakan Tiap Tahun Through the Company's Website and Public Expose Held Every Year
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporate which is the parent entity ensures that its corporate governance policies apply to its subsidiaries and entities under common control corporate investment is significant.	Diterapkan Apply	Perusahaan turut memastikan implementasi kebijakan governansi juga berlaku bagi entitas anak dan entitas terkait dengan senantiasa melakukan monitoring pelaporan pemenuhan GCG secara berkala, melakukan reviu atas penerapan GCG, serta memfasilitasi penilaian (assessment) implementasi GCG. The company also ensures that the implementation of governance policies also applies to subsidiaries and related entities by constantly monitoring reports on GCG compliance on a regular basis, reviewing GCG implementation, and facilitating the assessment of GCG implementation
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporate has rules and procedures governing acquisitions, acquisitions and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur in a transparent and under reasonable conditions and protect the rights of all shareholders according to the class.	Diterapkan Apply	Implementasi prinsip GCG dan menggunakan jasa pihak ketiga secara konsisten untuk menilai kewajaran transaksi investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal, yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal menjadi startegi perusahaan melindungi kepentingan para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Consistent implementation of GCG principles and consistent use of third party services to assess the fairness of investment transactions, expansions, divestitures, business mergers/consolidations, acquisitions, and debt/capital restructuring, which are carried out in compliance with applicable provisions in the capital market sector, is the company's strategy to protect the interests of shareholders. Shareholders and all Stakeholders.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Manual			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporations clearly disclose these rules and procedures thus investors understand their rights and the right to obtain compensation.	Penjelasan Explain	Tertuang Dalam Prospektus dan Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar yang diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Set forth in the Prospectus and Derivatives of the provisions of the Articles of Association which are implemented through a voting procedure in making decisions in the GMS Rules, in which the GMS Rules are given to the Shareholders who are present and explained again by the Chairperson of the GMS at the opening of the GMS.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan, (*anti- take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The anti-takeover devices should not be used to protect the management and Board of Commissioners from accountability.	Penjelasan Explain	Perusahaan tidak memiliki taktik untuk mencegah pengambialihan (anti-take-over devices) The company does not have tactics to prevent takeover (anti-take-over devices)
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Corporate have rules and procedures that ensure All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, Disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structure and arrangements that enable certain shareholders to acquire influence or control that is disproportionate to its shareholding.	Diterapkan Apply	PTBA memiliki aturan dan prosedur setara dan sesuai terkait jenis saham seperti kepemilikan Saham Seri B memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki Saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa atau hak-hak tertentu yang dimiliki Saham Seri A sebagaimana peraturan yang berlaku. PTBA has equal and appropriate rules and procedures regarding types of shares such as Series B Shares have the same rights as Series A Shares, except for special rights or certain rights owned by Series A Shares according to applicable regulations.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporate has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in such a way as to ensure that the conflict of interests have been properly managed, and protect the interests of the corporate and shareholders.	Diterapkan Apply	PTBA telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBADEKOM/IX/2020 dan No. 404/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance untuk Kebijakan Benturan Kepentingan di Perusahaan. PTBA already has a Conflict of Interest Guideline based on the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bukit Asam Tbk No. 14/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 and No. 404/0100/2020 regarding the Application of Good Corporate Governance Principles and Practices for the Company's Conflict of Interest Policy.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. The corporate has and discloses the policies to prevent insider trading. The corporate has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one can benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	Diterapkan Apply	Kebijakan yang mencegah terjadinya insider trading tertuang dalamKeputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PTBA No.250/0100/2023 dan No.15/ SK/PTBADEKOM/XII/2023 tentang Pedoman Transaksi Orang Dalam (Insider Trading). Policies that prevent insider trading are contained in the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Director PTBA No.250/0100/2023 and No.15/SK/ PTBADEKOM/ XII/2023 Concerning Guideline of Insider Trading.
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporate calls for the GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporate website	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Pojk No. 15 Dan 16 Tahun 2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Dimana Panggilan RJUPS dan Materi RUPS ditayangkan Paling Lambat 21 Hari Sebelum RUPS. The Company complies with POJK No. 15 and 16 of 2020 concerning GMS for Public Companies, where the Summons for GMS and the Material for GMS are published no later than 21 days before the GMS.
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporate has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively in GMS.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada Pojk No. 15 dan 16 Tahun 2021 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dimana Pemegang Saham dapat berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company complies with POJK No. 15 and 16 of 2021 concerning Electronic Public Company GMS, where Shareholders can participate and vote effectively at the GMS.
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Corporate Governance Policy 2023 Contained in the Corporate Governance Policy 2023
Rekomendasi 4 **Recommendation 4**			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporate ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam pernyataan transparansi dan akuntabilitas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan Audited. Contained in the statement of transparency and accountability of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Audited Financial Report.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi 5 **Recommendation 5**			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Diterapkan Apply	Perusahaan Patuh Pada POJK No. 15 & 16 Tahun 2021 tentang RUPS Perusahaan Terbuka The Company complies with POJK No. 15 & 16 of 2021 concerning Public Company's GMS
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Key Stakeholder Engagement		
Rekomendasi 1 **Recommendation 1**			
8.1.1	Korporasi melalui Corporate Secretary melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporate through the Corporate Secretary carry out regular, transparent and effective communications with key stakeholders and involve them to understand their hopes and grievances and the impact the corporate has on them.	Diterapkan Apply	PTBA menyediakan kanal Pelaporan Keterbukaan Informasi Publik Pada Website resmi PTBA, yaitu www.ptba.co.id. PTBA provides Public Information Disclosure Reporting channel on PTBA's official website, namely www.ptba.co.id.
8.2	Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models		
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others developing and implementing corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	Diterapkan Apply	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Has been carried out according to the provisions

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Implementation/ Explanation	Keterangan Penerapan Description of Implementation
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders		
Rekomendasi 3 **Recommendation 3**			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporate and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam Corporate Governance Policy 2023 As stated in the Corporate Governance Policy 2023
Rekomendasi 2 **Recommendation 2**			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages the employees to work for the long term interests of the corporate and prioritizes sustainability.	Diterapkan Apply	Tertuang dalam perjanjian kerja bersama Perusahaan Contained in the Company's collective labor agreement

Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

POJK NO. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference

No.	Uraian Description	Halaman Page
1.	**Ketentuan Umum** General Terms	
	a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: • Khtisar data keuangan penting; • Informasi saham (jika ada); • Laporan Direksi; • Laporan Dewan Komisaris; • Profil Emiten atau Perusahaan Publik; • Analisis dan pembahasan manajemen; • Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; • Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; • Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan • Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan; a. The Annual Report shall at least include the following information: • An overview of important financial data; • Share information (if any); • Board of Directors' report; • Board of Commissioners' report; • Issuer or Public Company profiles; • Management discussion and analysis; • Issuer or Public Company governance; • Issuer or Public Company social and environmental responsibility; • Audited annual financial statements; and • statement from the Board of Directors and the Board of Commissioners on their responsibility for the Annual Report;	v
	b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami/ Annual reports can present information in the form of pictures, graphs, tables, and / or diagrams clearly statingthe title and / or description, which is easy to read and understand	v
2.	**Uraian Isi Laporan Tahunan** Annual Report Contents Description	
A.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Summary of Important Financial Data	
	Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Financial Highlights includes financial information presented in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting a business if the Issuer's or the Public Company's business activities are less than 3 (three) years, and should at least include:	
	1. Pendapatan/penjualan; Revenue/sales;	20
	2. Laba bruto; Gross profit;	20
	3. Laba (rugi); Profit (loss);	20
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;	20
	5. Total laba (rugi) komprehensif; Total comprehensive profit (loss);	20
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non- controlling interests;	20
	7. Laba (rugi) per saham; Profit (loss) per share;	20
	8. Jumlah aset; Total assets;	22
	9. Jumlah liabilitas; Total liabilities;	22
	10. Jumlah ekuitas; Total equities;	22
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; Profit (loss) to total assets ratio;	24

No.	Uraian Description	Halaman Page
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; Profit (loss) to equity ratio;	24
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; Profit (loss) to revenue/sales ratio;	24
	14. Rasio lancar; Current ratio;	24
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; Liabilities to equity ratio;	24
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan Liabilities to total assets ratio;	24
	17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or a Public Company and its industry type;	24
B.	**Informasi Saham** Share Information	
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company shall at least contain: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares issued for each quarter are presented in the form of comparison for the last 2 (two) years, to include at least: a. Jumlah saham yang beredar; total outstanding shares; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan The highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed; and d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. The volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed; e. Informasi dalam huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information on the letter b), c), and d) is only disclosed if the shares are listed on the Stock Exchange;	28-29
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: In the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the shares' nominal value, conversion securities issuance, as well as capital additions and deductions, share information as referred to in number 1) shall be added with, at least, explanation regarding: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; corporate action execution date; b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of shares outstanding before and after the corporate action; d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; share price before and after the corporate action;	30-31
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan In the event of share trading temporary suspension (suspension) and/or shares delisting during the fiscal year, the shares' suspension and/or delisting reasons shall be explained; and	30
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. If the share trading temporary suspension as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting) shall be explained.	30
C.	**Laporan Direksi** Board of Directors Report	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The Board of Directors' report shall, at the minimum, contain a brief description of:	
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The strategy and strategic policy of the Issuer or Public Company;	54-57
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; The Board of Directors' role in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	58-59
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	58-59

No.	Uraian Description	Halaman Page
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan Comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	57-58
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; The constraints faced by the Issuer or Public Company;	56-57
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan Business prospects overview of the Issuer or Public Company; and	58
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Governance implementation of the Issuer or Public Company.	61-62
D.	**Laporan Dewan Komisaris** Board of Commissioner Report	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' Report shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; The Board of Directors' performance evaluation regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the strategies formulation and implementation for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	42-45
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan View on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors;	46
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. View on the Issuer or Public Company's application of governance;	47
E.	**Profil Emiten atau Perusahaan Publik** Profile of the Issuer or Public Company	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company contains, at the minimum, information of: 1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; The name of the Issuer or Public Company, including if there was any change of name, the reason for the change, and effective date of the name change during the fiscal year;	68
	2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuer or Public Company, including any branch offices or representative offices, which allows the public access to information on the Issuer or Public Company, including: a. Alamat; Address; b. Nomor telepon; Telephone number; c. Alamat surat elektronik; dan Electronic mail address; and d. Alamat situs web; Website address;	68-69
	3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; A brief history of Issuer or Public Company;	70-72
	4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; The vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	74-78
	5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Business activities according to the last articles of association, the business activities carried out during the fiscal year, as well as the type of goods and/or services produced;	79-85
	6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; The operational area of the Issuer or Public Company; Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. The operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operating activities.	86-88
	7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at the minimum, the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	90-93
	8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	89

No.	Uraian Description	Halaman Page
	9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: The profile of Directors, to at least include: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; The name and position per the duties and responsibilities; b. Foto terbaru; A recent photograph; c. Usia; Age; d. Kewarganegaraan; Nationality; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational and/or certification history; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	94-100
	10. Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The profile of Board of Commissioners, to at least include: a. Nama dan jabatan; the name and position; b. Foto terbaru; A recent photograph; c. Usia; Age; d. Kewarganegaraan; Nationality; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Educational and/or certification history; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; The legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company concerned; ii. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned; iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member, and other positions inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and iv. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Period of work experience both inside and outside the Issuer or Public Company. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. If the member has no affiliation relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed; i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	102-111
	11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; In the event of changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members that occurred after the fiscal year ends until the deadline for submission of the Annual Report, the composition to be included in the Annual Report is the latest and the previous composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners' members;	112

No.	Uraian Description	Halaman Page
	12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	134-139
	13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Shareholders names and ownership percentage at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Issuer or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders whom each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	140-145
	14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; The shares' indirect ownership percentage of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	144
	15. 1jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: The number of shareholders and the percentage of ownership at the fiscal year-end based on the classification of: a. Kepemilikan institusi lokal; Local institutions ownership; b. Kepemilikan institusi asing; Foreign institutional ownership; c. Kepemilikan individu lokal; dan Local individual ownership; and d. Kepemilikan individu asing; Foreign individual ownership;	143
	16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the major and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of schematics or charts;	146-148
	17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	149-157
	18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); A chronological listing of shares, number of shares, nominal value, and the offer price from the start of recording until the end of the financial year and the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	158-159
	19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	160

No.	Uraian Description	Halaman Page
	20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include: a. Nama dan alamat; Name and address; b. Periode penugasan; Assignment period; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; Information on audit and/or non-audit services provided; d. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the fiscal year; and e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan If AP and KAP and their networks/associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and f. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies can be presented in tabular form.	160
	21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	161-164
F.	**Analisis dan Pembahasan Manajemen** Management Discussion and Analysis	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management Discussion and Analysis shall include analysis and discussion of the financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the fiscal year, to at least have: 1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: A review of operations per operating segment based on the Issuer or Public Company's type of industry, to name a few: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; Production, including the process, capacity, and its development; b. Pendapatan/penjualan; dan Revenue / sales; and c. Profitabilitas; Profitability;	201-207
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) years, an explanation of the cause of any changes and the impact of such changes, to name a few: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Ekuitas; Equity; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e. Arus kas; Cash flow;	208-224
	3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; Ability to pay the debt by presenting the relevant ratios;	225-227
	4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; The collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	227-228
	5. Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; Capital structure and management policies on capital structure accompanied by the basis for determining the policy;	229-230
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: Discussion on material commitments for capital investments with explanations, to name a few: a. Tujuan dari ikatan tersebut; The purpose of such commitments; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; Sources of funds to meet such commitments; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan Currency-denominated; and d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; Planned measures by the Issuer or Public Company to cover the risks of foreign currency positions;	231
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Discussion regarding capital goods investments realized in the last fiscal year, to name a few: a. Jenis investasi barang modal; Type of capital goods investments; b. Tujuan investasi barang modal; dan Capital goods investment objectives; and c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; Value of capital goods investments realized;	232

No.	Uraian Description	Halaman Page
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); Material information and facts occurring after the date of the auditor's report (if any);	233
	9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; Business prospects of the Issuer or Public Company based on the condition of the industry, the general economy, and the international markets supporting quantitative data from trusted data sources;	252-256
	10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between the targets/projections at the beginning of the year with the results achieved (realized), including: a. Pendapatan/penjualan; Revenue / sales; b. Laba (rugi); Profit (loss); c. Struktur modal (capital structure); atau Capital structure; or d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	234-235
	11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for one (1) year ahead, including: a. Pendapatan/penjualan; Revenues / sales; b. Laba (rugi); Profit (loss) c. Struktur modal (capital structure); Capital structure; d. Kebijakan dividen; atau Dividend policy; or e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Other matters that are considered important for the Issuer or Public Company;	236
	12. Spek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; The Issuer or Public Company's marketing of goods and/or services, at least including the marketing strategy and market share;	198-200
	13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least: a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan The amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; The amount of dividends paid annually; e. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	237-238
	14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan If, during the fiscal year, the Issuer must submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; If there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	240

No.	Uraian Description	Halaman Page
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing: a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; The date, value, and object of the transaction; b. Nama pihak yang melakukan transaksi; The name of the party conducting the transaction; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); The nature of the affiliation relationship (if any); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction; e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan Compliance with related provisions; and f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information: i. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); dan A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and ii. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out following generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle;	241-246
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; For affiliated or material transactions, which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. If the affiliated or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added. h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction; then this matter shall be disclosed;	
	16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in regulations and legislation that significantly impact the Issuer or Public Company and the impact on the financial statements (if any); and	247-249
	17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Changes in accounting policies, reasons, and impact on the financial statements (if any);	250

No.	Uraian Description	Halaman Page
G.	**Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik** Corporate Governance of Issuer or Public Company	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall, at the minimum, contain a brief description of: 1. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at the minimum, contains:	297-315
	a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year include:	
	i. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan The GMS' resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized in the fiscal year; and	305-315
	ii. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that has not been realized and the reasons for not realizing them;	305-315
	b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	305
	2. Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at the minimum, contains:	
	a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. The duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are described and can be presented in tabular form.	354-362
	b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; A statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	351
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Directors' meeting frequency, Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners, and the Board of Directors member's attendance level in the meeting including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Directors member's level of attendance at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.	304 367 367-376
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: Training and/or competency improvement of the Board of Directors members:	377-378
	i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan Training and/or improving the competence of members of the Board of Directors policy, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	377
	ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	377 172-175
	e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain: i. Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	378-381 378-381
	f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	378
	3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at the minimum, contains:	
	a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	319-327
	b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	316
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the Board of Commissioners meeting frequency, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the Board of Commissioners members' attendance level at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	304 333-334 335 333-342

No.	Uraian Description	Halaman Page
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	342-348
	i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan Policy on training and/or improving the Board of Commissioners members' competence, including orientation programs for Newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	342 343
	ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	343 170-172
	e. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at the minimum containing:	382-388
	i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Procedures for implementing performance appraisals;	382 385
	ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and	382 385
	iii. Pihak yang melakukan penilaian; dan The party conducting the assessment; and	382 385
	f. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	350
	i. Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and	350
	ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; The criteria used such as performance achievements during the fiscal year, competence, and attendance at meetings;	350
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
	a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Nomination procedure, including a brief description of the policies and members nomination process of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and	390
	b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	391-395
	i. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	392-393
	ii. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus, and others; and	394-395
	iii. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	395-396
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The Sharia Supervisory Board, the Issuer or Public Company that runs the business activities based on Islamic principles as stated in the articles of association shall, at the minimum, include: a. Nama; Names; b. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; The legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c. Periode penugasan dewan pengawas syariah; The period of assignment of the sharia supervisory board; d. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan Duties and responsibilities of the Shariah Supervisory Board; and e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; Frequency and mode of administration advice and suggestions as well as monitoring compliance with Sharia Principles in the Capital Market of the Issuer or Public Company;	N/A
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: The Audit Committee, including, at the minimum:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Names and positions of the committee members;	408-411
	b. Usia; Age;	408-411
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	408-411
	d. Riwayat pendidikan; Education background;	408-411

No.	Uraian Description	Halaman Page
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position background, including:	406-410
	f. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	408-411 424
	i. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	408-411
	ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	408-411
	g. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; Period and tenure of Audit Committee members;	424
	h. Pernyataan independensi komite audit; Statement of Audit Committee independence;	425
	i. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any);	428 176
	j. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan Policy and implementation of Audit Committee meeting frequency and level of attendance of Audit Committee members at the meetings;	426-428
	k. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; Implementation of Audit Committee activities in the fiscal year in the Audit Committee guidelines or charter;	429
7.	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at the minimum, containing:	
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Names and positions of the committee members;	418-420
	b. Usia; Age;	418-420
	c. Kewarganegaraan; Nationality;	418-420
	d. Riwayat pendidikan; Education background;	418-420
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position background, including:	416-419
	i. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	418-420
	ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or members of committees as well as other positions (if any); and	418-420
	iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	418-420
	f. Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and tenure of committee members;	418-420 435
	g. Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	436-437
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any);	440 176
	i. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	437-438
	j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); Statement that it has established committee guidelines or charter;	433
	k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policy and implementation of committee meeting frequency and level of attendance of committee members at the meetings;	439-440
	l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan A brief description of the committee's activities in the fiscal year;	441
	m. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: If no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
	i. Alasan tidak dibentuknya komite; dan Reasons for not forming the committee; and	-
	ii. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; The party carrying out the nomination and remuneration function;	-

No.	Uraian Description	Halaman Page
8.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Other committees owned by Issuers or Public Companies to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and responsibilities of the Board of Commissioners, at the minimum, containing:	N/A
a.	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	412-417
b.	Usia; Age;	412-417
c.	Kewarganegaraan; Nationality;	412-417
d.	Riwayat pendidikan; Educational history;	412-417
e.	Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	
f.	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as a committee member;	412-417 435-436
ii.	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	412-417
iii.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience and period both inside and outside the Issuer or Public Company;	412-417
f.	Periode dan masa jabatan anggota komite; The period and term of office of the committee members;	412-417 435-436
g.	Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	436-437
h.	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan Training and/or competency improvement that has been followed in the fiscal year (if any); and	440 177
i.	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	437-438
j.	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; A statement that the committee has had guidelines or charters;	433
k.	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in those meetings; and	439-440
i.	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; A brief description of the committee's activities for the fiscal year;	441
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate Secretary, including, at the minimum:	
a.	Nama; Name;	447-448
b.	Domisili; Domicile;	447-448
c.	Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	446
d.	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as Corporate Secretary; and	447-448
i.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience both inside and outside the Issuer or Public Company;	447-448
e.	Riwayat pendidikan; Education background;	447-448
f.	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan Training and/or competence improvement followed during the fiscal year; and	456 177
	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; A brief description of the Corporate Secretary activities in the fiscal year;	451-456
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal Audit Unit, including, at the minimum:	
a.	Nama kepala unit audit internal; Name of the Internal Audit Unit head;	461-462
b.	Riwayat jabatan, meliputi: Position background, including:	460
i.	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan The legal basis for the appointment as Internal Audit Unit head; and	461-462
ii.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; Work experience with its period both inside and outside of the Issuer or Public Company;	461-462

No.	Uraian Description	Halaman Page
	c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); Professional internal audit qualifications or certifications (if any);	465
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; Training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	465 177
	e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; Structure and positions within the Internal Audit Unit;	465
	f. Uraian tugas dan tanggung jawab; Duties and responsibilities description;	463
	g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan Statement that it has established Internal Audit Unit guidelines or charter; and	459
	h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year, including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	466
11.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the internal control system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control and compliance with other laws and regulations; and	488
	b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan Review of the internal control system effectiveness;	491
	c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	491
12.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the risk management system applied by the Issuer or Public Company, at the minimum, including:	
	a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; A general description of the Issuer or Public Company risk management system;	492
	b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Risks types and their management; and	497-500
	c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan Review of the Issuer or Public Company risk management system effectiveness;	503-504
	d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the risk management system;	505
13.	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners (if any), at the minimum, contain:	516-521
	a. Pokok perkara/gugatan; case / litigation description;	516-520
	b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan case / litigation settlement status; and	516-520
	c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; Impact on the Issuer or Public Company condition;	516-520
14.	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any)	521
15.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: information regarding the Issuer or Public Company code of ethics, including:	
	a. Pokok-pokok kode etik; Code of ethics content;	526
	b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan Form of code of ethics socialization and enforcement efforts; and	527-528
	c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company	527
16.	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP);	515

No.	Uraian Description	Halaman Page
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
	a. Jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	N/A
	b. Jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	N/A
	c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	N/A
	d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	N/A
17.	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: A brief description of the information disclosure policy regarding:	522
	a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	522 144
	b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the said policy;	522 144
18.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: Description of the whistleblowing system in the Issuer or a Public Company (if any), including:	
	a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; Violation report submission;	530-531
	b. Perlindungan bagi pelapor; Protection for whistle-blowers;	532
	c. Penanganan pengaduan; Complaint handling;	533
	d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan The party managing the complaint;	533-534
	e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: Complaint handling results, at the minimum:	535
	i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan Number of complaints received and processed during the fiscal year; and	535
	ii. Tindak lanjut pengaduan; Complaint follow up; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter must be disclosed.	535
19.	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at the minimum containing:	
	a. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and	537
	b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy must be explained.	537-538
20.	Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of Code of Corporate Governance guidelines by the Issuer that issues equity securities or the Public Company, including:	287-292
	a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement regarding recommendations have been implemented; and/or	287-292
	b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Description of the recommendations that have not been implemented, the reasons, and the implementation alternatives (if any); Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	287-292

No.	Uraian Description	Halaman Page
H.	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran SEOJK 16/2021)** Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company (SEOJK 16/2021 Attachment)	
	Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini. The Social and Environmental Responsibility section of the Issuer or Public Company is presented in the form of a Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.	
I.	**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit** Audited Annual Financial Report	
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared following financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulate the periodic reports of securities companies if the Issuer is a securities company.	
J.	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.** Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for The Annual Report	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Board of Directors and Board of Commissioners' Affidavit on the responsibility for the Annual Report prepared following the format of the Board of Directors and Board of Commissioners' Statement on Responsibility for the Annual Report.	63-64

2023

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

BukitAsam

PT Bukit Asam Tbk

Jl. Parigi No. 1, Tanjung Enim
Muara Enim, Sumatera Selatan
Indonesia 31716

T +62-734-451 096, 452 352
F +62-734-451 095, 452 993
E corsec@bukitasam.co.id

www.ptba.co.id